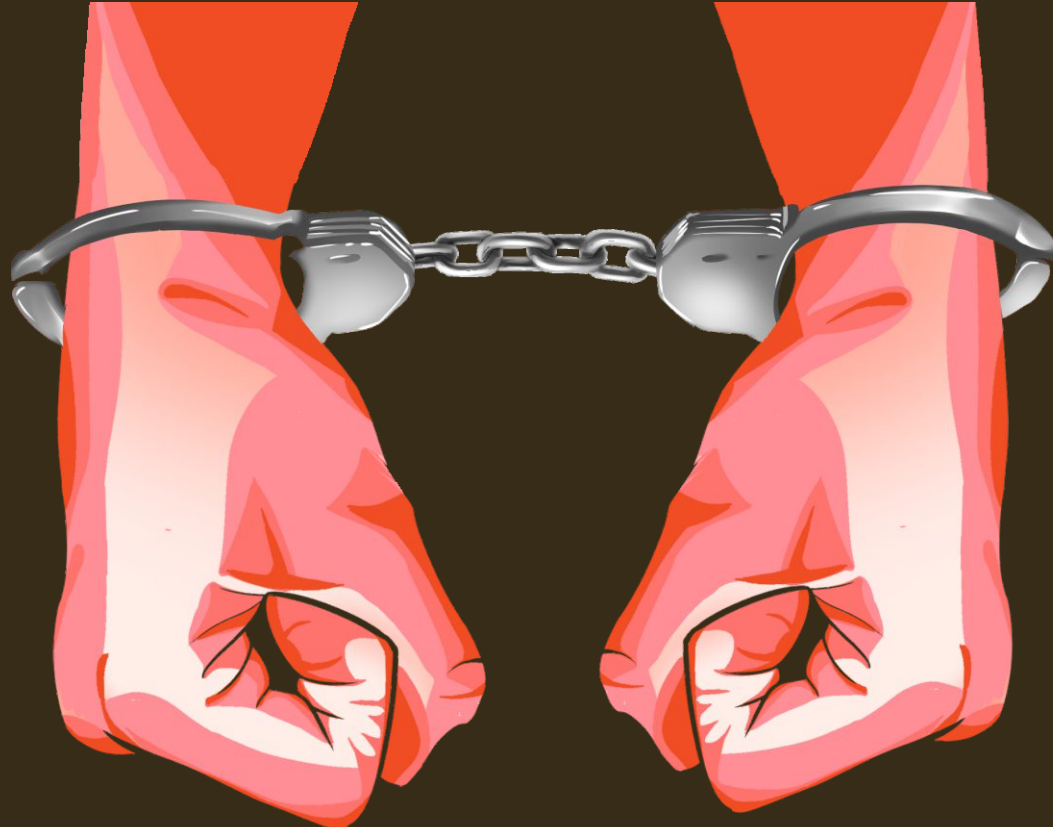




YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM PIDANA

JILID 1

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H
Dian Karisma, S.H, M.H



HUKUM PIDANA

JILID 1

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H
Dian Karisma, S.H, M.H



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-95-6 (jil.1 PDF)



9 786238 120956

HUKUM PIDANA JILID 1

Penulis :

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H
Dian Karisma, S.H, M.H

**ISBN : 978-623-8120-94-9 (No.Jil.Lengkap)
978-623-8120-95-6 (Jil.1)**

Editor :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Penyunting :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom.

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Fax. 024-6710144
Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "***Hukum Pidana – Jilid 1***" dengan baik. Hukum Pidana adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur tindakan kriminal dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran hukum tertentu. Fokus utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan merugikan, serta untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana mengatur perilaku yang dianggap merugikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan kejahatan lainnya yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum.

Hukum pidana terdiri dari dua aspek utama, yaitu subjektif dan objektif. Aspek subjektif berkaitan dengan unsur kesalahan pelaku, di mana seseorang harus memiliki niat jahat atau kelalaian yang menyebabkan kerugian untuk dianggap melanggar hukum pidana. Sementara itu, aspek objektif berkaitan dengan perbuatan yang melanggar norma hukum tertentu dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hukum pidana, terdapat prinsip-prinsip penting seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan asas kemanfaatan. Asas legalitas menetapkan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa undang-undang yang mengatur secara tegas perbuatan tersebut. Asas kesalahan mengharuskan adanya kesalahan subjektif atau objektif dari pelaku untuk dapat dipidana. Asas proporsionalitas mengatur bahwa hukuman harus sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Sedangkan asas kemanfaatan menekankan bahwa hukum pidana harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam proses hukum pidana, terdapat tahapan-tahapan seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi hukuman. Setiap tahapan tersebut memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hukum pidana juga melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan proses hukum secara adil dan transparan. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran yang vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat.

Buku ini dibagi menjadi 10 bab. Bab 1 buku ini akan membahas definisi hukum pidana substantif, serta perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana dan disertai prinsip-prinsip dasar landasan hukum dalam konsep *actus reus*, *mens rea* dan pertahanan. Bab 2 ini akan membahas definisi *actus reus* disertai dengan contoh sebab-akibat. Dalam Bab ke 3 buku ini akan membahas dasar hukum pidana, bab ini akan terfokus pada motif dan niat para pelaku dari *mens rea* dan *actus reus*. Bab ke 4 ini membahas doktrin tanggung jawab yang ketat, dalam kejahatan yang menggunakan definisi *smith* dan *Hogan*. Bab 5 akan membahas mengenai pihak utama dan pelaku sekunder dalam sebuah kasus.

Bab ke 6 buku ini akan mengkaji hukum yang berkaitan dengan doktrin *vicarious* serta tanggung jawab korporasi. Dalam Bab 7 akan berfokus pada pembelaan secara umum yang berkaitan dengan kesukarelaan dalam melakukan tindak pidana. Bab 8 ini akan membahas tiga

pembelaan; kesalahan, keracunan dan pembelaan diri. Bab 9 ini akan menyelidiki kelainan mental (gangguan jiwa) pada saat melakukan pelanggaran ataupun dalam kasus ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan dalam persidangan. Bab 10 membahas tentang pelanggaran kecil yang merupakan bab terakhir yang membahas topik-topik umum.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai hukum pidana akan membawa manfaat besar dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Semoga bahan ajar ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam perjalanan akademis dan profesional para pembaca. Selamat belajar dan semoga pengetahuan yang diperoleh dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana.

Semarang, April 2024

Tim penulis

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H

Dian Karisma, S.H, M.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PIDANA	1
1.1. Prinsip Dasar Pertanggungjawaban Pidana	1
1.2. Asas Hukum Pidana Dan Kriminalisasi	10
1.3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1998	14
1.4. Perbedaan Hukum Pidana Dan Perdata	20
BAB 2 AKTUS REUS	49
2.1. Masalah Yang Muncul	51
2.2. Kejahatan 'Perilaku' Dan 'Akibat'	55
2.3. Beberapa Masalah Khusus Dalam Sebab Akibat	62
2.4. Kesulitan Dalam Pembuktian Sebab-Akibat	79
2.5. Reformasi Tanggung Jawab Atas Kelalaian	96
BAB 3 MENS REA	101
3.1. Definisi Mens Rea	103
3.2. Motif	106
3.3. Kritik.....	123
3.4. Kenekatan	131
3.5. Pembaruan	137
3.6. Beberapa Masalah Mens Rea	146
3.7. Kesejamaan	149
BAB 4 TANGGUNG JAWAB YANG KETAT	157
4.1. Pelanggaran Yang Ketat Dan Mutlak	159
4.2. Tanggung Jawab Yang Ketat	163
4.3. Bagaimana Pengadilan Menerapkan Pedoman Ini	172
4.4. Alasan Tanggung Jawab Yang Ketat	179
BAB 5 PIHAK-PIHAK UTAMA DAN PERILAKU SEKUNDER	193
5.1. Definisi Dan Terminolog	196
5.2. Kegagalan Untuk Bertindak	202
5.3. Tanggung Jawab Perusahaan Bersama	212
5.4. Tidak Adanya Hukuman Terhadap Pelaku Utama	222
5.5. Laporan Komisi Hukum No.36 Ikut Serta Dalam Kejahatan	239
BAB 6 TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DAN PERUSAHAAN	249
6.1. Pengantar Tanggung Jawab Perwakilan	249
6.2. Alasan Tanggung Jawab Perwakilan	255
6.3. Usulan Reformasi Non-Pemerintah	272
6.4. Usulan Pemerintah	277

BAB 7 MASA BAYI, TEKANAN, PAKSAAN, KEBUTUHAN, DAN TEKANAN KEADAAN	289
7.1. Pengantar Pertahanan	289
7.2. Pembenaran Dan Alasan	290
7.3. Paksaan	299
7.4. Proposal Reformasi	322
7.5. Usulan Komisi Hukum Tahun 2006	325
7.6. Kebutuhan Dan Paksaan Keadaan	330
BAB 8 KESALAHAN, MABUK-MABUKAN, DAN MEMBELA DIRI	350
8.1. Kesalahan	350
8.2. Faktanya Salah	354
8.3. Keadaan Mabuk	365
8.4. Pertahanan Diri Dan Pencegahan Kejahatan	400
BAB 9 PERTAHANAN TERHADAP GANGGUAN JIWA	420
9.1. Ketidakmampuan Untuk Memohon	421
9.2. Cacat Akal	432
9.3. Pembaruan	439
9.4. Rekomendasi Untuk Reformasi 1980-2000	452
9.5. Otomatisme	457
9.6. Aturan Khusus Dalam Otomatisme	462
BAB 10 PELANGGARAN YANG BELUM SEMPURNA	473
10.1. Mendorong, Membantu Dan Mantan Pelanggaran Penghasutan	473
10.2. Pelanggaran Hukum Penghasutan	478
10.3. Konspirasi	485
10.4. Persyaratan Dua Pihak	491
10.5. Konspirasi Luar Negeri	501
10.6. Mens Rea Dalam Konspirasi Hukum	503
10.7. Penghapusan Pelanggaran Hukum Umum Atas Persiapan	529
Daftar Pustaka	534

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA

1.1 PRINSIP DASAR PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Ada sekitar 5 juta kejahatan yang dilaporkan ke polisi setiap tahunnya. Angka pada tahun yang berakhir Juli 2008 hampir mencapai 5 juta. (Survei Kejahatan Inggris, yang mencakup kejahatan yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat, memperkirakan terdapat 10,1 juta pelanggaran pada tahun 2007–2008 dan Survei tahun 2001 memperkirakan bahwa hanya separuh kejahatan yang dilaporkan ke polisi dan proporsinya mungkin kurang dari itu. Mungkin satu dalam tiga puluh kejahatan mengarah pada hukuman, meskipun banyak orang diperingatkan.) Sebagian besar kejahatan ini dilakukan oleh laki-laki dan anak laki-laki. Pelanggaran terhadap properti mencapai sekitar 75 persen, dan setengahnya melibatkan pencurian. Kejahatan dengan kekerasan mencapai 5 persen. Kejahatan dengan kekerasan meningkat sebesar 2 persen pada tahun 2004 – 2005 hingga 2005 – 2006 namun menurun sebesar 8 persen pada tahun 2007–2008, menurut Survei Kejahatan Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan dengan kekerasan telah meningkat dan terdapat ketakutan masyarakat di beberapa kota seperti London, Manchester dan Nottingham terhadap kejahatan senjata dan pisau yang dilakukan oleh laki-laki muda (namun masih jauh di bawah tingkat tahun 1995, tahun puncak), dan non- - pelanggaran kekerasan menurun. Bertentangan dengan pandangan umum, jumlah kejahatan yang dilakukan tidak meningkat dari tahun ke tahun, namun yang meningkat adalah jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Parlemen.

Hukum pidana dapat dilihat sebagai suatu rangkaian, mungkin bukan suatu sistem, aturan-aturan yang bertujuan untuk mengendalikan pelanggaran. Dari sisi lain hukum pidana juga mengontrol perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seperti polisi dan hakim. Hal ini memastikan bahwa stigma suatu keyakinan hanya melekat pada mereka yang seharusnya melekat pada keyakinan tersebut.

Kejahatan itu besar. Hukum pidana selama bertahun-tahun dianggap belum berkembang dari segi teori. Putusan juri bersalah atau tidak, tidak bisa ditelusuri. Instruksi juri bukanlah preseden yang kuat. Baru pada tahun 1907 terdapat Pengadilan Banding Pidana dan hingga tahun 1960, pengajuan banding ke House of Lords hanya sedikit. Hingga pertengahan tahun 1960-an, buku pelajaran bagi pelajar dan praktisi sebagian besar berupa daftar peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang. Sejak itu terjadi pertumbuhan eksponensial dalam minat dan analisis akademis. Terlepas dari perkembangan ini dan mungkin karena hal tersebut, banyak hukum pidana yang masih belum jelas. Apakah orang yang mencoba membunuh tetapi gagal harus diperlakukan sama seperti orang yang berhasil? Mengapa pembunuhan lebih serius daripada pembunuhan berencana? Apakah hubungan seksual merupakan bagian dari kehidupan atau bagian dari kejahatan? Oleh karena itu, aturan, prinsip, dan kebijakan harus diselidiki. Perhatian dalam buku ini terfokus pada pelanggaran-

pelanggaran yang biasa dibahas dalam mata kuliah hukum pidana, namun masih ada ribuan pelanggaran lainnya dan tidak ada satu buku pun yang dapat membahas semuanya.

Prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan ketika melihat hukum pidana? Ada yang berargumentasi bahwa tidak ada prinsip, dan tentu saja Parlemen hanya tunduk pada sedikit batasan internasional atau batasan lainnya ketika membuat undang-undang, ada pula yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut memang ada, namun ada banyak pengecualian. Dalam bukunya *Philosophy of Criminal Law* (Rowman & Littlefield, 1987), D.N. Husak dari Amerika, yang sebagian besar mengandalkan *Foundations of Jurisprudence* karya Jerome Hall (Bobbs-Merrill, 1973) mendalilkan delapan prinsip filsafat liberal yang mendasari hukum pidana AS. Umumnya didasarkan pada otonomi individu. Mereka dapat dianggap mewakili aspirasi beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan, penerapan dan pengajaran hukum pidana di Inggris dan di negara lain. Prinsip-prinsip ini tidak dibatasi oleh negara, waktu atau politik. Namun perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip ini tidak selalu diterapkan. Parlemen jarang menaruh perhatian pada prinsip-prinsip umum hukum pidana ini. Misalnya saja, pemerintah mungkin melarang aktivitas yang dilakukan banyak orang hampir setiap hari, misalnya ngebut di jalan raya. Agaknya mereka memandang hukum pidana sebagai cara yang paling efisien untuk memberantas ngebut, meskipun faktanya banyak yang tidak menganggap hukuman atas kejahatan ini mengandung stigma. Mengapa kriminalisasi terjadi merupakan bidang studi yang penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, sosiologis dan ekonomi. Beberapa kendali atas terciptanya pelanggaran baru dan perluasan pelanggaran lama diatur oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia; pengaruhnya masih kecil namun mungkin akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Legalitas

Prinsip ini adalah bahwa seseorang tidak boleh dianggap bertanggung jawab dan dihukum secara pidana tanpa terlebih dahulu ada hukum yang mengaturnya (lihat juga di bawah). Hal ini mencegah kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Husak memperoleh empat syarat tambahan: (a) hukum tidak boleh kabur; (b) badan legislatif tidak boleh membuat pelanggaran untuk menutupi kesalahan yang terjadi secara retrospektif; (c) lembaga peradilan tidak boleh menciptakan pelanggaran baru; dan mungkin (d) undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. (Peraturan lain mempunyai sub-aturan yang berbeda: misalnya, undang-undang harus diumumkan dan undang-undang tidak boleh mustahil untuk dipatuhi.) Hukum Inggris tidak mengadopsi prinsip anak perusahaan yang pertama, dan prinsip-prinsip lainnya meragukan. Misalnya, dapat dikatakan bahwa dalam *Preddy* [1996] AC 815 House of Lords dengan tegas menafsirkan Undang-Undang Pencurian tahun 1968 (yang menyatakan bahwa penipu hipotek tidak dihukum karena pelanggaran penipuan), sedangkan DPR kadang-kadang memperpanjang jangka waktu tersebut. hukum pidana dengan mendefinisikan delik hukum secara luas, seperti yang terjadi dalam *Hinks* [2001] AC 241 dimana 'perampasan' dalam UU yang sama dibaca secara luas untuk menutupi suatu hadiah. Banyak pelanggaran yang batasannya tidak jelas. Misalnya, pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius, namun pola pikir yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut

telah berubah selama 30 tahun terakhir. Terkait dengan kedaulatan parlemen, pemerintah yang bertindak melalui Parlemen dapat membuat undang-undang yang berlaku surut. Para hakim tidak konsisten dalam menafsirkan undang-undang, namun sedikit banyak telah melepaskan hak istimewa mereka dalam membuat undang-undang (lihat lebih lanjut di bawah). Hakim di House of Lords baru-baru ini memperluas tanggung jawab pidana dalam beberapa kasus, namun di Clegg [1995] 1 AC 482 House of Lords menolak untuk mengubah undang-undang yang menguntungkan terdakwa. Di Irlandia; Burstow [1998] AC 147 House of Lords, dengan mengabaikan pembelajaran selama berabad-abad, memperluas serangan hingga menutupi hal-hal yang menakutkan dengan kata-kata termasuk kata-kata yang diucapkan melalui telepon. Dalam R [1992] 1 AC 599 House of Lords pada dasarnya menghapuskan kekebalan lama suami atas tuduhan pemerkosaan terhadap istrinya, sebuah pelanggaran terhadap prinsip konstruksi ketat undang-undang pidana dan prinsip menentang retroaktif, meskipun alasannya adalah bahwa pengecualian tersebut tidak ada pada saat terdakwa melakukan tindakan; dalam Gotts [1992] 2 AC 412 House of Lords berpendapat bahwa paksaan bukanlah pembelaan terhadap percobaan pembunuhan, sehingga mengubah hukum umum; di Woollin [1999] AC 82 House of Lords dalam satu pandangan memperluas batas-batas pembunuhan. Kasus-kasus dalam paragraf ini dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab terkait.

Namun, keputusan House of Lords tidak secara seragam mendukung perluasan tanggung jawab pidana dan ketika dalam C v DPP Pengadilan Divisi membatalkan prinsip bahwa anak-anak berusia di atas 10 tahun tetapi di bawah 14 tahun tidak bersalah kecuali mereka memiliki kebijaksanaan yang nakal, House of Lords memulihkan undang-undang sebelumnya ([1996] 1 AC 1). Baik pelanggaran maupun pembelaan dapat berubah, sehingga seseorang suatu hari nanti akan bersalah, namun tidak bersalah di hari berikutnya karena adanya perubahan undang-undang yang dibuat oleh lembaga peradilan. Jika terdakwa dalam R v R (di atas), kasus yang melibatkan kekebalan perkawinan dalam pemerkosaan, telah meminta nasihat pengacara apakah dia bersalah, jawaban sebelum kasus tersebut akan negatif, meskipun keputusan House of Lords bahwa kekebalan tersebut tidak ada pada saat suami melakukan tindakan yang seharusnya merupakan pemerkosaan. Keputusan-keputusan ini tidak dapat diprediksi. Jika seseorang bertanya kepada seorang pengacara sebelum pidato Lords di R apakah sang suami bersalah atas pemerkosaan dalam keadaan yang ada, maka jawabannya akan negatif. Argumen sebaliknya diungkapkan oleh Lord Keith dalam R (di atas): 'Common law mampu berkembang seiring dengan perubahan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.' Dengan mengubah common law, common law akan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Seperti dapat dilihat dari pembahasan singkat ini, hukum pidana tidak selalu terdiri dari peraturan yang tegas dan tegas, dan perluasan hukum ke kategori-kategori yang sebelumnya dikecualikan tidak sejalan dengan Pasal 1(1) KUHP tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1(1) KUHP tentang Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan asas legalitas. Pasal ini menyatakan bahwa di dalam KUHP Indonesia, prinsip serupa tercermin dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Tidak dapat dijatuhkan

pidana, kecuali atas dasar perbuatan yang pada saat dilakukan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada." Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Namun, jika kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan undang-undang yang penting dalam hal hak asasi manusia di Indonesia, maka ia berlaku di Indonesia.

Undang-Undang tersebut memang telah disahkan pada tahun 1999, tetapi berlaku pada bulan Oktober 2000 berdasarkan Pasal 64 UU tersebut. Oleh karena itu, ia sudah berlaku di Indonesia setelah bulan Oktober 2000

Terdapat beberapa dampak penting dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bagi Indonesia:

1. **Peningkatan Perlindungan Hak Asasi Manusia:** UU HAM memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, hak-hak dasar setiap individu diakui dan dilindungi oleh negara.
2. **Peningkatan Kepatuhan Internasional:** UU HAM membantu Indonesia untuk memenuhi kewajiban dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini dapat memperkuat citra Indonesia di mata komunitas internasional dan meningkatkan kerja sama antarnegara dalam bidang hak asasi manusia.
3. **Penguatan Institusi Hak Asasi Manusia:** UU HAM membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki peran penting dalam pemantauan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya institusi-institusi ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih terorganisir dan efektif.
4. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** UU HAM juga berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak asasi mereka. Melalui pendidikan dan sosialisasi, masyarakat semakin memahami pentingnya hak asasi manusia dan mengerti bagaimana cara melindungi dan memperjuangkannya.
5. **Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah:** Dengan adanya UU HAM, pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Mereka harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini dan dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara ini.

Secara keseluruhan, UU HAM memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, memperkuat tata kelola negara yang baik, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dalam menafsirkan Undang-undang HAM dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, pengadilan memiliki tugas dalam menafsirkan Undang-undang tersebut yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif dalam system peradilan. Dalam menafsirkan UU HAM pengadilan harus memperhatikan prinsip-prinsip interpretasi hukum yang berlaku, termasuk:

1. **Interpretasi Konstitusional:** Pengadilan harus memastikan bahwa interpretasi UU HAM sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam konstitusi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
2. **Interpretasi yang Progresif:** Pengadilan dapat menerapkan interpretasi yang progresif terhadap UU HAM, yang memperluas pemahaman terhadap hak-hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum.
3. **Konvensi Internasional:** Pengadilan juga dapat merujuk pada konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai panduan interpretasi UU HAM.
4. **Putusan-Putusan Sebelumnya:** Pengadilan dapat mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang telah menginterpretasikan UU HAM dalam kasus-kasus serupa.
5. **Tujuan dan Ruang Lingkup UU HAM:** Pengadilan harus memahami tujuan dan ruang lingkup UU HAM dalam menafsirkan dan menerapkannya dalam kasus yang diajukan kepadanya.

Dengan menafsirkan UU HAM secara tepat, pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar hak asasi manusia yang berlaku dan memberikan perlindungan yang efektif bagi individu-individu yang terlibat dalam proses peradilan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. **Tafsir Undang-Undang dan Konvensi:** Pengadilan di Indonesia diharapkan untuk menafsirkan undang-undang secara konsisten dengan Konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional.
2. **Ketidaksesuaian dengan Konvensi:** Jika terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang nasional dengan ketentuan dalam Konvensi hak asasi manusia, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Konvensi. Pernyataan semacam ini dapat dikeluarkan jika pengadilan menemukan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
3. **Pentingnya Konsistensi:** Konsistensi antara undang-undang nasional dengan standar hak asasi manusia internasional penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi secara efektif di tingkat nasional. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan di Indonesia tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip ini belum selalu secara tegas diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya di Indonesia. Namun, pengadilan dapat menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip hukum internasional sebagai panduan dalam menafsirkan undang-undang dan memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Penjelasan selanjutnya ada beberapa yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional tentang keharusan konsistensi antara undang-undang nasional dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Pengadilan harus menafsirkan undang-undang dan menafsirkan common law secara konsisten dengan Konvensi dan dapat mengeluarkan pernyataan ketidaksesuaian jika undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi. Konvensi harus dibaca sesuai dengan kondisi modern. Oleh karena itu, apa yang dahulu merupakan hukum Konvensi tidak perlu lagi berlaku sekarang, dan pihak berwenang tidak boleh dijadikan preseden. Contoh kasus di Eropa adalah *Sutherland v UK* [1998] EHRLR 117. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa larangan perilaku homoseksual di kalangan laki-laki sampai usia 18 tahun ketika heteroseksual diizinkan secara hukum untuk melakukan hubungan seksual sejak usia 16 tahun adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. pelanggaran terhadap Pasal 8(1), hak untuk menghormati kehidupan pribadi, meskipun terdapat fakta bahwa keputusan-keputusan Konvensi lainnya mendukung pelarangan tersebut.

Pasal 7 dapat digunakan untuk mencegah pengadilan membuat suatu pelanggaran hukum mempunyai efek retrospektif. Tampaknya juga ada larangan, misalnya, hukuman atas perkosaan dalam rumah tangga seperti yang terjadi di R. Namun, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan dalam *SW v United Kingdom* [1996] 1 FLR 434 bahwa 'betapapun jelasnya rancangan ketentuan hukum mungkin tidak, dalam sistem hukum apa pun, termasuk hukum pidana, terdapat unsur penafsiran yudisial yang tidak bisa dihindari' dan Pasal 7 tidak melarang klarifikasi hukum seiring berjalannya waktu dan penghapusan akhir kekebalan perkawinan dalam pemerkosaan merupakan klarifikasi bertahap. Apa yang dilakukan Lords di R adalah menyatakan bahwa pengecualian perkawinan telah hilang seiring berjalannya waktu dan Pasal 7 mengizinkan mereka melakukan hal tersebut karena tidak ada retroaktif. Seperti yang dikatakan Pengadilan:

Sifat perkosaan yang pada dasarnya merendahkan martabat begitu nyata sehingga hasil keputusan Pengadilan Tinggi dan House of Lords [yang membatalkan kekebalan perkawinan] tidak dapat dikatakan berbeda dengan maksud dan tujuan Pasal 7 UU tersebut. Konvensi, yaitu untuk memastikan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penuntutan, hukuman atau hukuman sewenang-wenang. Terlebih lagi, ditinggalkannya gagasan yang tidak dapat diterima bahwa seorang suami kebal terhadap tuntutan. . . Hal ini tidak hanya sesuai dengan konsep perkawinan yang beradab tetapi juga, dan yang terpenting, dengan tujuan-tujuan mendasar Konvensi, yang hakikatnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia

Dalam *Misra* [2005] 1 WLR 1 pengadilan menyatakan:

Undang-undang yang tidak jelas dan dimaksudkan untuk menciptakan pertanggungjawaban pidana tidak diinginkan, dan dalam kasus-kasus ekstrim . . . Ketidakjelasan mungkin membuat sulit untuk mengidentifikasi tindakan yang dilarang oleh sanksi pidana. Namun demikian, persyaratannya adalah kecukupan. Daripada kepastian mutlak.

Dianggap bahwa tindak pidana pembunuhan karena kelalaian berat yang dibahas pada Bab 12 tidak bertentangan dengan Pasal 7. Aspek lain dari Pasal 7 adalah tampaknya melarang pembatasan pembelaan. Jika demikian, kasus-kasus seperti *Gotts* [1992] 2 AC 412, yang membahas apakah paksaan merupakan pembelaan terhadap percobaan pembunuhan, adalah tidak benar. Perlu dicatat bahwa ada pengecualian untuk non-retrospektif. Hal ini terjadi jika tindakan tersebut 'merupakan tindak pidana menurut prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab'. Pengecualian ini diatur dalam *C* [2004] 1 WLR 2098 (CA) untuk mencakup penghapusan yudisial atas kekebalan perkawinan dari hukuman atas pemerkosaan. Hakim LJ berkata:

Pasal 7(2) memberikan banyak pembenaran untuk mengadili dan menghukum suami atas pemerkosaan istrinya, sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Memang, . . .

Akan mengejutkan jika mengetahui bahwa hukum di negara beradab mana pun melindungi perempuan dari pemerkosaan, kecuali pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah berjanji untuk mencintai dan menghiburnya.

Yurisprudensi Inggris mengenai Pasal 7 sejauh ini mengecewakan bagi mereka yang mengharapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 membatasi undang-undang peradilan. *C* jadi menunjukkan. Dalam kasus ini, seorang laki-laki dinyatakan bersalah pada tahun 2003 karena memperkosa istrinya pada tahun 1970, padahal jika ia didakwa pada tahun 1970, ia tidak akan dihukum. Namun, dalam *Rimmington* [2006] 1 AC 459 House of Lords, mengamandemen kejahatan common law atas gangguan publik agar sejalan dengan Pasal 7. Law Lords menemukan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan common law untuk menghapuskan pelanggaran, namun mereka dapat mengesampingkan kasus-kasus agar common law sejalan dengan Pasal 7. *C* tidak konsisten dengan *Rimmington* di mana Lord Bingham menekankan bahwa: 'Ada dua prinsip panduan: tidak seorang pun boleh dihukum berdasarkan undang-undang kecuali jika undang-undang tersebut cukup jelas dan pasti untuk memungkinkan dia mengetahui perbuatan apa yang dilarang sebelum dia melakukannya; dan tidak seorang pun boleh dihukum atas perbuatan apa pun yang tidak secara jelas dan pasti dapat dihukum pada saat perbuatan itu dilakukan.' Prinsip kedua ini bertentangan dengan rasio *C.C.*, namun dapat ditegakkan atas dasar yang diberikan oleh Pengadilan Eropa. Hak Asasi Manusia dalam *SW v UK*, yaitu bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah 'kriminal menurut prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab', sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7(2) ECHR. *Rimmington* juga berwenang atas dalil bahwa kejahatan yang menyebabkan gangguan publik tidak terlalu kabur untuk memenuhi Pasal 6. Seperti yang dikatakan ECHR dalam *Kokkinakis v Yunani* (1993) 17 EHRR 397, 'di mana individu dapat mengetahui dari kata-kata dalam undang-undang tersebut. ketentuan yang relevan dan, jika perlu, dengan bantuan interpretasi pengadilan mengenai hal tersebut, tindakan dan kelalaian apa yang membuatnya bertanggung jawab', maka Pasal 7 dipenuhi tetapi Pasal 7 dilanggar jika 'hukum pidana ditafsirkan secara luas untuk kerugian terdakwa, misalnya dengan analogi'.

Aktus Reus

Terdakwa bersalah hanya jika ia telah berbuat atau telah menimbulkan suatu keadaan (*actus reus*). Ia tidak bertanggung jawab hanya karena dirinya apa adanya (misalnya miskin, beragama, berkulit hitam). Orang tidak dihukum hanya karena pikirannya. Undang-undang Inggris terdekat telah menghukum orang karena dianggap sebagai salah satu bentuk pengkhianatan, termasuk kematian Ratu, dan konspirasi. Karena prinsip ini, timbul permasalahan mengenai ruang lingkup tanggung jawab pidana atas kelalaian (lihat Bab 2), upaya (lihat Bab 10), dan tindakan yang tidak disengaja (lihat otomatisme di Bab 9). Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa kejahatan tanpa *actus reus* adalah inkonstitusional. Dalam hukum Inggris, yang mana *actus reus* merupakan suatu tindakan atau kelalaian, terdakwa dinyatakan bersalah hanya jika ia setidaknya memiliki kendali atas perilakunya. Harus ada tindakan yang disengaja, tindakan sukarela.

Memang Benar

Kondisi mental yang salah, *mens rea*, diperlukan dalam hampir semua kejahatan berat. Orang tidak boleh dihukum kecuali mereka bersalah. Hanya orang-orang yang bertindak dengan sengaja atau mengetahui bahwa mereka mengambil risiko yang bersalah. Keadilan tidak akan terwujud jika seseorang dihukum oleh negara padahal mereka tidak melakukan tindakan yang tercela. Tanggung jawab pidana sebagian besar didasarkan pada kesalahan moral. Namun terdapat banyak pengecualian: pelanggaran tanggung jawab ketat, ringan atau berat, tidak memerlukan *mens rea* mengenai satu atau lebih bagian dari *actus reus* (lihat Bab 4). Telah dipertanyakan apakah kelalaian pantas untuk diklasifikasikan sebagai keadaan pikiran. Ada juga anggapan bahwa jika undang-undang mengharuskan terdakwa mendapat pembelaan hanya jika ia bertindak secara wajar seperti dalam keadaan terpaksa (lihat Bab 7), maka kondisi *mens rea* tidak termasuk dalam kasus ini. Kadang-kadang ada argumen bahwa seorang terdakwa tidak seharusnya bersalah ketika dia tidak patut disalahkan dan pelanggaran-pelanggaran yang membuatnya bersalah harus dibatalkan.

Persetujuan

Dalam hukum Inggris aturan dasarnya adalah *actus reus* dan *mens rea* harus simultan. Namun ada beberapa pengecualian yang dibahas dalam Bab 3.

Menyakiti

Dalam banyak pelanggaran, seseorang atau sesuatu dirugikan. Dalam pembunuhan seseorang dibunuh; dalam kerusakan pidana harta benda hancur atau rusak. Salah satu tujuan hukum adalah untuk memungkinkan orang bertindak bebas dari bahaya. Para agresor harus dicegah. Sebagaimana dinyatakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam *Laskey v United Kingdom* (1997) 24 EHRR 39: 'salah satu peran yang tidak diragukan lagi berhak dilakukan oleh negara adalah berupaya mengatur, melalui penerapan hukum pidana, kegiatan-kegiatan yang melibatkan penderitaan fisik'. Ada beberapa pelanggaran yang tidak didasarkan pada kerugian terhadap orang lain. Undang-Undang Terorisme tahun 2006 menciptakan pelanggaran yang mengagung-agungkan terorisme, sebuah istilah yang tidak jelas, namun tidak mengharuskan korban terluka atau terbunuh. Tidak seorang pun perlu dirugikan dalam pelanggaran-pelanggaran kecil (Bab 10) dan mengemudi berbahaya, dan

terdapat argumen mengenai apa yang disebut sebagai ‘pelanggaran tanpa korban’ seperti kepemilikan ganja. Beberapa pelanggaran yang ‘tanpa korban’ diperlakukan sebagai pelanggaran yang merugikan orang lain. Jika seseorang tidak mengenakan sabuk pengaman dan, sebagai akibatnya, ia mengalami cedera yang lebih parah, maka ia menjadi beban bagi orang lain. Pandangan alternatifnya adalah menyatakan bahwa negara berkepentingan terhadap kesejahteraan warganya), yang mana Lacey mendukung konsep 'kesejahteraan': negara berhak melakukan intervensi untuk menjamin kesejahteraan fisik warga negaranya dengan cara seperti memerintahkan pemakaian sabuk pengaman dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran). Selain itu, biaya kesehatan dan ketidakhadiran kerja dapat dicegah dengan cara ini. Beberapa kerugian mungkin tidak terlalu penting jika dilihat dari faktanya. Yang lain mungkin serius, mis. polusi. Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah kerugian tertentu seperti campur tangan terhadap orang atau harta benda dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Beberapa akademisi juga menurunkan prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain, beberapa kejahatan lebih serius dibandingkan kejahatan lainnya. Misalnya, pembunuhan lebih serius daripada penyerangan yang menyebabkan luka fisik. Oleh karena itu, pembunuhan harus dihukum lebih berat daripada hukuman fisik yang sebenarnya. Mungkin yang terkait erat dengan prinsip ini adalah pelabelan yang adil; yaitu, bahwa nama yang diberikan pada kejahatan tersebut harus sesuai dengan kesalahan yang terkandung dalam pelanggaran tersebut. Diskusi yurisprudensial mengenai prinsip ‘kerugian’ selama 50 tahun terakhir sangatlah luas. Beberapa ahli hukum berusaha untuk membenarkan pelanggaran berdasarkan moralitas atau sifat menyerang. Pembaca dirujuk ke Bacaan lebih lanjut di akhir bab ini untuk diskusi.

Hal Menyebabkan

Hasil kejahatan harus dibuktikan bahwa terdakwa melakukan actus reus (lihat Bab 2). Tidak selalu jelas siapa yang menyebabkan suatu peristiwa. Penyebab dalam kasus pencemaran nampaknya lebih luas dibandingkan dengan doktrin yang ditemukan di tempat lain dalam hukum pidana. Kebencian yang ditransfer dapat dilihat sebagai hal yang luar biasa: terdakwa bermaksud untuk menyakiti satu orang tetapi menyakiti orang lain. Ada juga kesulitan karena kelalaian (Bab 2).

Pertahanan

Hal ini dibahas dalam Bab 7–9.

Diskusi yurisprudensial mengenai ‘prinsip kerugian’ selama 50 tahun terakhir sangatlah luas. Beberapa ahli hukum berusaha untuk membenarkan pelanggaran berdasarkan moralitas atau sifat menyerang. Pembaca dirujuk ke bacaan lebih lanjut di akhir bab ini untuk diskusi.

Bukti (tanpa keraguan)

Hal ini dibahas dalam bab ini. Seluruh unsur pelanggaran yang didakwakan harus dibuktikan tanpa keraguan. Apa yang harus dibuktikan bervariasi dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya, dan hal itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, sejak tahun 1994 laki-laki bisa menjadi korban pemerkosaan; sebelumnya hanya perempuan yang bisa.

1.2 ASAS HUKUM PIDANA DAN KRIMINALISASI

Alan Norrie merangkum norma-norma ini dalam *Crime, Reason and History* (edisi ke-2, Butterworths, 2001) 10: 'Hukum pidana, pada hakikatnya, adalah penerapan praktis dari filsafat politik liberal.' Prinsip-prinsip ini membatasi kekuasaan negara yang diungkapkan melalui lembaga-lembaganya, seperti polisi dan kehakiman. Tanpa mereka, hukum pidana tidak akan mempunyai batas dan kekuasaan aparat negara tidak akan terbatas. Pemberlakuan pelanggaran hukum secara demokratis membenarkan penggunaan kekuasaan negara untuk menghukum pelanggar hukum. Hukuman setelah pemidanaan atas suatu pelanggaran merupakan kekuasaan yang besar di tangan negara dan dapat berupa hukuman penjara, yang merampas kebebasan pelakunya. Semua kejahatan berat dan kejahatan ringan melekat pada stigma sebagai orang yang dihukum. Kebanyakan orang menghindari pembunuh dan pemerkosa. Prinsip-prinsip tersebut juga memungkinkan warga negara, pada tingkat tertentu, untuk dapat memperkirakan apakah tindakan mereka merupakan tindak pidana atau tidak. Dalam Jackson (1994) *The Independent*, 25 Mei, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan asas fundamental hukum pidana.

Kita mungkin mengkritik buku-buku hukum pidana karena bersifat positivistik, yaitu menggambarkan hukum sebagaimana adanya (secara rinci), namun kita tentu tidak ingin dihukum karena ada orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak sejalan dengan hukum pidana. sikap moral. Tanggung jawab tidak boleh bergantung pada 'spekulasi atau penyelidikan' atau kondisi politik saat ini. Bahkan 'orang jahat' pun harus tahu apakah dia melanggar hukum pidana. (Lihat di bawah untuk interpretasi hukum atas Undang-Undang Parlemen.) Namun prinsip-prinsip ini tidak diterapkan secara seragam. Ahli hukum Amerika, Oliver Wendell Holmes, merumuskan pepatah bahwa kehidupan hukum adalah pengalaman, bukan logika. Hukum pidana adalah contoh dari proposisi ini. Hal ini tidak konsisten atau logis, seperti yang banyak ditunjukkan dalam buku ini. Sebagian besar undang-undang ini rumit, dan kadang-kadang tidak diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam bab tentang pelanggaran non-fatal. Ketika membaca buku ini Anda mungkin menganggap bahwa hanya sedikit yang dapat dikatakan tentang asas-asas umum yang dikemukakan Husak yang mendasari hukum pidana.

Siswa yang memulai mata kuliah hukum pidana sering kali yakin bahwa mereka mengetahui banyak tentang mata pelajaran tersebut, namun mengalami kesulitan dalam mata kuliah tersebut karena mereka tidak siap menghadapi banyak hukum yang sulit, seperti yang disengaja. Ada kecenderungan ke arah konsistensi, yang didorong oleh Komisi Hukum, namun pemerintah belum merasa perlu melakukan reformasi undang-undang, meskipun reformasi tersebut akan menghemat uang. Oleh karena itu, hukum pidana berkaitan dengan penetapan standar, dan hukuman diberikan kepada mereka yang melanggar norma tersebut.

Meskipun prinsip-prinsip ini mendasari substansi undang-undang, namun tidak membatasi cakupannya. Lebar itu terkadang merupakan masalah sejarah. Misalnya, undang-undang tentang anjing berbahaya merupakan respons terhadap sejumlah kecil serangan mengerikan yang dilakukan oleh ras anjing tertentu terhadap anak-anak. Apakah suatu perilaku termasuk kriminal harus menjadi masalah kebijakan. Kebanyakan orang akan setuju

bahwa pembunuhan dan pemerkosaan bukanlah hal yang baik. Rancangan KUHP yang disusun oleh Komisi Hukum (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini) tidak berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum pidana. Beberapa upaya untuk mempertimbangkan kapan tanggung jawab pidana harus dijatuhkan harus dilakukan karena jika tidak, kekuatan hukum pidana untuk menghukum pelaku kesalahan akan berkurang dan fungsi hukumannya akan hilang. Terlebih lagi, dalam negara demokrasi harus ada kontrol terhadap agen-agen negara yang bisa menggunakan sanksi negara yang paling keras terhadap pelanggar-pelanggar sepele. Penjelasan paling otoritatif mengenai tujuan hukum pidana dari sudut pandang liberal adalah Laporan Komite (Wolfenden) tentang Pelanggaran Homoseksual dan Prostitusi, Cmnd 247, 1957, yang mengarah pada dekriminialisasi praktik homoseksual pria dewasa secara pribadi. Hukum pidana ada:

*. . . untuk menjaga ketertiban umum dan kesopanan, untuk melindungi warga negara dari hal-hal yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap eksploitasi atau korupsi orang lain. . . Bukan itu
 . . . fungsi hukum untuk mengintervensi kehidupan pribadi warga negara. . . lebih jauh dari yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan [ini]. . . (paragraf 13 –14).*

Dapat dikatakan bahwa mayoritas anggota House of Lords dalam Brown [1994] AC 212, yang dibahas pada Bab 13, melanggar prinsip-prinsip ini ketika mereka menghukum sadomasokisme homoseksual. Pengurangan usia persetujuan bagi laki-laki homoseksual dari 21 menjadi 18 tahun mulai berlaku ketika Undang-undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum tahun 1994 menerima Persetujuan Kerajaan (3 November 1994). Perbedaan usia yang diperbolehkan untuk melakukan hubungan heteroseksual (16) dan homoseksual (18) dikutuk oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa karena bertentangan dengan Pasal 8 Konvensi, menghormati kehidupan pribadi, dan bertentangan dengan parasit. Pasal 14, non-diskriminasi: Sutherland v United Kingdom [1998] EHRLR 117. Undang-Undang Pelanggaran Seksual (Amandemen) tahun 2000 mengurangi usia menjadi 16 tahun. Pendapat utama Komite Wolfenden adalah bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menegakkan moralitas bahkan dari mayoritas anggota masyarakat. Lord Hobhouse (dissenting) dalam Hinks [2001] 2 AC 241 menyatakan: 'Menganggap perbuatan yang melanggar hukum sebagai tindak pidana hanya karena hal tersebut terbuka untuk penolakan [oleh warga negara yang berpikiran kanan] akan bertentangan dengan prinsip dan dapat menimbulkan keberatan karena penolakan tersebut gagal mencapai kepastian yang obyektif dan transparan yang disyaratkan dalam hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.'

Model KUHP AS, yang berupaya merangkum praktik terbaik dalam yurisdiksi negara bagian, secara terkenal menyatakan bahwa hukum pidana memiliki lima tujuan (ejaan dalam bahasa Inggris):

- a) untuk melarang dan mencegah perbuatan yang menimbulkan atau mengancam kerugian terhadap kepentingan umum secara tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dimaafkan;

- b) tunduk pada pengawasan publik terhadap orang-orang yang perilakunya menunjukkan bahwa mereka cenderung melakukan kejahatan;
- c) untuk melindungi perbuatan yang tanpa kesalahan agar tidak dihukum sebagai tindak pidana;
- d) memberikan peringatan yang adil mengenai sifat perbuatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran;
- e) membedakan berdasarkan alasan yang masuk akal antara pelanggaran berat dan pelanggaran ringan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Komentar, bagian dari Kode ini 'berusaha untuk menyatakan tujuan umum yang paling luas dari Kode ini'. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengendalikan kebijaksanaan resmi dan untuk membantu penafsiran Kode Etik. Beberapa dari prinsip-prinsip ini dilanggar oleh hukum Inggris saat ini, yang tidak mempunyai tujuan tertulis. Misalnya saja, melakukan tindakan yang melukai tubuh secara serius merupakan pelanggaran yang lebih serius dibandingkan melakukan tindakan yang benar-benar melukai tubuh, namun keduanya memiliki hukuman maksimal yang sama. Terkadang prinsip-prinsip tersebut bertentangan, dan mungkin terdapat perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup masing-masing prinsip. Ada yang berpendapat bahwa menghisap ganja tidak merugikan kepentingan umum. Pengadilan Banding di Kingston [1994] QB 81, dalam sebuah bagian yang tidak dikritik oleh House of Lords, mengatakan bahwa 'tujuan hukum pidana adalah untuk menghambat, dengan pelarangan dan sanksi pidana, tindakan antisosial yang mungkin dilakukan oleh individu. jika tidak, lakukan'. Sayangnya common law belum mengembangkan prinsip-prinsip seperti yang terdapat dalam Model KUHP. Hal serupa juga terjadi di Parlemen. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menarik garis batas terlebih dahulu antara mengkriminalisasi tindakan dan tidak melakukan tindakan tersebut. Hukum pidana menetapkan norma-norma, standar perilaku, yang harus dipatuhi oleh perorangan dan badan hukum.

Sebagian besar hal ini memberitahu orang-orang apa yang tidak boleh dilakukan, bukan apa yang harus mereka lakukan. Sangatlah penting bahwa hukum pidana tetap berada dalam batas-batasnya. Sumber daya kepolisian akan lebih besar dibandingkan saat ini jika undang-undang tersebut diperluas jika tidak diperlukan, dan kewenangan penangkapan dan penuntutan dapat menjadi lebih sewenang-wenang dibandingkan saat ini. Hukum pidana adalah bentuk kontrol negara yang kuat. Lagipula orang bisa dirampas kebebasannya seumur hidup dan masih ada kemungkinan hukuman mati karena makar. Ada stigma yang melekat pada hukuman pidana. Nama seseorang mungkin tercantum di surat kabar lokal bahkan untuk pelanggaran sepele. Masyarakat mengutuk seseorang karena melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, warga negara harus mengetahui perbuatan mana yang melanggar hukum. Bidang-bidang hukum seperti ketidakjujuran, konspirasi untuk merusak moral dan niat masyarakat yang definisinya tidak jelas akan dibahas dalam buku ini, begitu pula ketika hakim terlihat 'meregangkan' hukum untuk mencakup orang-orang yang 'ternyata bersalah'. dituduh melakukan pelanggaran yang salah. Kasus insider-trading memberikan bahan diskusi yang berguna. Hingga Parlemen menghukum penggunaan informasi rahasia untuk membeli saham dengan harga rendah, tidak ada pelanggaran yang ditujukan secara khusus pada bentuk

perilaku ini. Cara menghasilkan uang seperti ini dapat diterima oleh mereka yang melakukannya. Apakah tindakan insider-trader termasuk dalam lingkup hukum pidana yang dianut oleh Komite Wolfenden? Dalam sila kelima Husak, kerugian, siapa yang dirugikan? Pembaca diajak memikirkan apa jadinya jika tidak ada hukum pidana. Memang benar, secara umum menyalahgunakan informasi rahasia bukanlah suatu kejahatan. Namun demikian, harus dikatakan bahwa apa pun jawaban atas teka-teki perdagangan orang dalam, tidak semua pelanggaran bersifat serius secara sosial atau ekonomi, dan terkadang lebih baik menggunakan tindakan pelatihan dan administratif daripada sanksi pidana. Pemerintah dari semua aliran tampaknya mempunyai kecenderungan untuk mengkriminalisasi perilaku yang tidak dapat mereka kendalikan, bahkan ketika tidak ada konsensus di masyarakat bahwa bentuk perilaku tertentu harus dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana berkembang sedikit demi sedikit tanpa memperhatikan teori. Beberapa undang-undang pidana melambungkan reaksi spontan terhadap krisis yang dirasakan seperti anjing berbahaya, penguntitan, rave, pengunjung rasa anti-jalan raya, dan konvoi 'hippie'. Dalam jargonnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut 'bergantung secara historis': kedatangan mereka ke lapangan menandai semacam kampanye, bukan penyelidikan yang rasional dan berprinsip. Sebagaimana dapat dilihat, hukum pidana modern memiliki cakupan yang luas. Ini mencakup pelanggaran serius dan tidak serius yang dilakukan oleh individu, dan juga digunakan sebagai sarana untuk mengatur bisnis.

Selain itu, Parlemen, meskipun jarang menghapuskan pelanggaran, juga menciptakan pelanggaran baru, yang mengakibatkan batasan hukum pidana semakin melebar. Ada sekitar 7.000 pelanggaran pada tahun 1980; diperkirakan terdapat sekitar 8.000 pada tahun 2000. Angka saat ini nampaknya sekitar 11.000: lihat *The Independent*, hal. 1, 16 Agustus 2006. Diperkirakan pemerintah telah menciptakan 3.023 kejahatan sejak tahun 1997. Anggota senior kepolisian menyerukan dekriminalisasi kepemilikan dan penghirupan obat-obatan ringan seperti ganja. Dalam sistem hukum yang rasional, jika seseorang ingin menghukum kepemilikan obat-obatan, ia dapat memulai dengan mengkriminalisasi alkohol (lihat Laporan Banding Pidana atau Tinjauan Hukum Pidana mengenai apa yang dilakukan orang ketika mabuk), atau jika ada ingin menghentikan kekerasan, orang mungkin dengan mudah menyimpulkan bahwa tinju seharusnya ilegal.

Bagaimanapun juga, para politisi, dan sampai batas tertentu para hakim,lah yang membuat hukum (kita tidak lagi mempercayai dongeng bahwa hakim tidak membuat hukum) dan mereka mempunyai preferensi mereka sendiri dan rentan terhadap kepanikan moral. Dalam Jawaban Tertulis Menteri Negara pada saat itu di Kementerian Dalam Negeri, Lord Williams dari Mostyn, menyatakan bahwa pelanggaran baru 'harus dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan' (Hansard, HL Deb, 18 Juni 1999, WA 57). Masih harus dilihat apakah janji tersebut ditepati. Ringkasnya, pembuatan undang-undang baru oleh Parlemen mungkin bergantung pada politik, bukan prinsip. Sangat menarik untuk melihat berapa banyak waktu yang dapat diberikan kepada parlemen untuk topik berita seperti, misalnya, anjing berbahaya, sedangkan tidak ada waktu yang tersedia untuk membuat proposal reformasi hukum yang

telah dipertimbangkan dengan matang, seperti yang diajukan oleh Undang-Undang. Komisi, dibahas pada bagian terakhir bab ini.

1.3 UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA TAHUN 1998

Undang-undang ini tidak memasukkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ke dalam undang-undang Inggris: undang-undang ini bukan konstitusi atau undang-undang yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan oleh Undang-undang ini adalah mewajibkan pengadilan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Konvensi 'sejauh . . . mungkin' (s 3(1)). Jika undang-undang yang dipermasalahkan tidak dapat ditafsirkan demikian, Pengadilan Tinggi (dan Pengadilan Banding dan House of Lords) harus membuat pernyataan ketidaksesuaian. Namun pernyataan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan undang-undang (pasal 4(1)). Parlemen kemudian mempunyai pilihan untuk memutuskan apakah akan mengubah undang-undang tersebut atau tidak. Kekuasaan tersebut selama ini belum digunakan dalam perkara pidana substantif. Badan publik, istilah yang mencakup pengadilan, harus bertindak konsisten dengan Konvensi (pasal 6). Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 tidak hanya mengizinkan terdakwa untuk berargumen bahwa pelanggaran tertentu bertentangan dengan Undang-undang tersebut, namun juga mengizinkan korban untuk berargumentasi bahwa negara tidak melindungi hak-haknya. Contoh dari metode yang terakhir adalah hukum yang berkaitan dengan hukuman orang tua terhadap anaknya. Perlindungan negara terhadap anak menyebabkan penyempitan situasi di mana seorang anak dapat dihukum oleh orang tuanya (atau orang lain yang *in loco parentis*).

Perlu dicatat bahwa UU tahun 1998 tidak secara langsung berlaku terhadap common law. Cara menghindari non-aplikasi ini adalah sebagai berikut. Ambil contoh kegilaan. Undang-undang yang berlaku saat ini mungkin tidak sesuai dengan Konvensi. Pasal 5 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Jika putusan mengenai kegilaan tidak sesuai dengan Konvensi, maka karena pengadilan adalah badan publik, maka pengadilan harus bertindak sesuai dengan Konvensi. Dalam H [2002] 2 Cr App R (S) 59 Pengadilan Tinggi menerima bahwa penggunaan pasal 6 adalah cara beracara yang sah.

Disarankan agar dalam beberapa tahun ke depan, bidang-bidang hukum pidana berikut yang menjadi bagian dari buku ini mungkin akan terpengaruh oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia: pembelaan diri/pencegahan kejahatan (menurut Pasal 2, hak untuk hidup), tanggung jawab yang ketat (berdasarkan Pasal 3, hak untuk tidak dikenakan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat: Arden J menulis di luar hukum dalam [1999] Crim LR 439 berpendapat bahwa pengadilan dapat menciptakan pembelaan atas uji tuntas namun pengadilan Inggris belum bertindak sejauh ini belum ada dalam hukum pidana), kegilaan (berdasarkan Pasal 5 di atas), pertanggungjawaban yang ketat dan beban pembuktian (berdasarkan Pasal 7, hak atas pemeriksaan yang adil dan asas praduga tak bersalah), persekongkolan untuk menipu, merusak moral masyarakat, dan membuat marah masyarakat. kesopanan dan pelanggaran ketidakjujuran (menurut Pasal 7, non-retroaktif), dan menyetujui pelanggaran non-fatal dan seksual serta pelanggaran ketidakjujuran (menurut Pasal 8, menghormati kehidupan pribadi). Sebagai ilustrasi, pembelaan terhadap pencegahan

kejahatan akan melanggar Pasal 2 karena (a) pembunuhan demi membela harta benda tidak dapat dibenarkan menurut Konvensi dan (b) kasus hukum, termasuk tuntutan *McCann v United Kingdom* (1995) 21 EHRR 97 suatu keyakinan yang didasarkan pada alasan yang masuk akal, sedangkan dalam undang-undang saat ini, keyakinan yang jujur saja sudah cukup. Sebagian besar kasus hukum saat ini berkaitan dengan Pasal 6, yaitu hak atas peradilan yang adil, yang sebagian besar berada di luar cakupan buku ini, namun disebutkan jika relevan, misalnya dalam pembahasan beban pembuktian. Perlu dicatat bahwa Konvensi ini ditafsirkan berdasarkan kondisi sosial saat ini. Oleh karena itu, preseden lama mungkin tidak lagi berguna.

Undang-undang tahun 1998 tidak mempengaruhi hak untuk mengajukan petisi ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg namun Pasal 34 Konvensi menetapkan bahwa penyelesaian dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemohon harus menggunakan pengadilan Inggris terlebih dahulu. Jika pengadilan menganggap bahwa preseden Inggris tidak sejalan dengan Konvensi, pengadilan harus mengikuti preseden tersebut dan memberikan izin untuk mengajukan banding: *Lambeth London Borough Council v Kay* [2006] 4 All ER 128 (HL).

Upaya definisi kejahatan

Definisi-definisi tersebut dikatakan ketinggalan jaman, namun tanpa definisi-definisi tersebut pembaca mungkin akan disesatkan dan berpikir bahwa pelanggaran terhadap salah satu dari Sepuluh Perintah Allah adalah sebuah kejahatan atau bahwa pelanggaran kontrak adalah sebuah kejahatan. Ada beberapa upaya untuk mendefinisikan kejahatan, yang sebagian besar bertujuan agar suatu kejahatan dapat menimbulkan proses pidana yang dapat berujung pada hukuman (pidana). Blackstone menulis bahwa kejahatan adalah 'pelanggaran hak dan kewajiban publik karena seluruh komunitas dianggap sebagai sebuah komunitas'. Definisi ini berasal dari pertengahan abad kedelapan belas dari salah satu komentator terkemuka hukum Inggris. Yang lebih mutakhir adalah definisi yang mencakup 'pelanggaran kewajiban yang dikenakan oleh hukum untuk kepentingan masyarakat luas' dan kesalahan 'yang sanksinya bersifat menghukum dan tidak dapat dibatalkan oleh orang pribadi mana pun, namun dapat dibatalkan oleh Kerajaan. sendirian jika dapat diterima sama sekali'. Hukuman yang dilakukan negara menjadikan hukum pidana penting dalam masyarakat. Remissible artinya sanksi yang diberikan oleh pengadilan dapat dikurangi. House of Lords, pengadilan tertinggi Inggris untuk sebagian besar tujuan hukum pidana, menyusun definisi dalam *Board of Trade v Owen* [1957] AC 602: 'tindakan melanggar hukum atau wanprestasi yang merupakan pelanggaran terhadap publik dan menjadikan orang tersebut bersalah atas tindakan tersebut. tindakan yang dapat dikenakan hukuman hukum'. Definisi seperti itu tidak memberi tahu kita mengapa suatu tindakan dianggap kriminal. Suatu kejahatan mungkin menimbulkan kerugian yang lebih kecil dibandingkan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kontrak. Jika majikan memecat karyawannya karena melanggar perjanjian layanan, kerugian akan menimpa mereka, keluarga mereka, toko-toko lokal dan sebagainya, namun pukulan di tempat parkir pub pada waktu tutup bahkan tidak akan menyebabkan memar kecuali harga diri.

Salah satu penulis terkemuka hukum pidana, Glanville Williams dalam 'The Definition of a Crime' [1955] CLP 107, menyatakan bahwa kejahatan adalah 'kesalahan hukum yang dapat diikuti dengan proses pidana yang dapat mengakibatkan hukuman', sedangkan terkemuka Amerika, H. M. Hart 'Tujuan Hukum Pidana' (1958) 23 L & CP 401 at 405, berpendapat bahwa kejahatan adalah 'perbuatan yang . . . akan menimbulkan pernyataan formal dan khidmat mengenai kecaman moral masyarakat'. Oleh karena itu, hukum pidana dipenuhi dengan simbolisme: terdakwa yang dihukum dihukum oleh negara dan hukuman tersebut mempunyai aspek publik. Definisi tersebut mungkin ditolak dengan alasan bahwa pelanggaran berat (lihat Bab 4) mungkin tidak salah secara moral, namun merupakan kejahatan. Perlu dicatat bahwa definisi-definisi ini tidak mengatakan bahwa hukuman, harus dijatuhkan setelah putusan dijatuhkan, dan tidak ada keharusan bahwa kejahatan harus selalu dituntut dan bahkan jika terdakwa dituntut, ia dapat lolos dari hukuman. Misalnya, pelanggaran undang-undang keselamatan sering kali ditangani secara administratif tanpa menggunakan penegakan hukum pidana. Kepatuhan terhadap hukum dan bukan hukuman adalah kekuatan pendorongnya. Sebuah karya yang merangkum keseluruhan hukum Inggris adalah Halsbury's Laws of England, vol. 11(1), para. 1 (Butterworths, terbitan ulang 1990). Edisi keempat memuat hal-hal sebagai berikut:

Biasanya kejahatan adalah suatu perbuatan salah yang mempengaruhi keamanan atau kesejahteraan masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat berkepentingan untuk memberantasnya. . . Namun, . . . suatu tindakan dapat dianggap pidana oleh Parlemen hanya karena hal tersebut merupakan proses pidana, bukan proses perdata, yang menawarkan cara yang lebih efektif untuk mengendalikan tindakan tersebut.

Efektivitas dapat dilihat dalam kejahatan seperti pengendalian lalu lintas jalan raya dan transaksi orang dalam. Dengan mengesahkan undang-undang, Parlemen dianggap melakukan sesuatu terhadap masalah sosial. Parlemen dapat mengubah perbuatan melawan hukum menjadi kejahatan atau apa yang sebelumnya sah menjadi perbuatan melawan hukum, atau dapat menghalalkan apa yang sebelumnya ilegal. Apa yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan secara sipil dapat diubah menjadi kejahatan, dan masyarakat ikut terlibat dalam menekan apa yang dianggap oleh Parlemen sebagai perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, tidak selalu jelas mengapa suatu pelanggaran dilakukan. Kadang-kadang tampaknya lebih mudah untuk melakukan suatu pelanggaran daripada melakukan hal lain.

Definisi yang lebih modern memang bersifat melingkar dan tidak memberikan aturan mengenai jenis perilaku apa yang harus dikriminalisasi. Pelanggaran adalah pelanggaran kewajiban hukum yang dapat diikuti dengan proses pidana dan hukuman. Acara pidana mendefinisikan apa itu hukum pidana. Sayangnya, kita tidak tahu apakah proses pidana diperlukan sampai kita mengetahui bahwa hukum pidana telah dilanggar. Definisi-definisi tersebut tidak menyelesaikan keraguan apakah suatu perkara bersifat perdata atau pidana. Lebih lanjut, mengetahui adanya perbedaan prosedural antara hukum pidana dan perdata tidak membenarkan pembedaan kedua jenis hukum tersebut dari segi substansinya. Williams

mencatat bahwa ia hanya dapat memberikan daftar faktor-faktor yang menunjukkan di sisi mana suatu permasalahan berada, namun terkadang fitur-fitur yang menunjukkan bahwa hukum pidana harus diseimbangkan dengan faktor-faktor yang menunjukkan hukum perdata. Namun demikian, dalam banyak kasus, hukum pidana ibarat seekor gajah: kita mengetahuinya ketika kita melihatnya. Menerima bahwa sulit untuk mendefinisikan kejahatan untuk semua tujuan, hal berikut ini cukup untuk tujuan kita: 'suatu kesalahan hukum yang obatnya adalah hukuman bagi pelakunya atas permintaan negara' (Profesor Cross). Kata-kata Profesor Cross digaungkan dalam edisi ketujuh belas Card, Cross dan Jones: Hukum Pidana (OUP, 2006), hal 1– 2: '... kejahatan adalah kesalahan hukum. . . akibat hukum pokok suatu kejahatan adalah pelakunya . . . dituntut oleh atau atas nama Negara.' Oleh karena itu, pasti ada (a) perbuatan salah, atau situasi yang salah; (b) 'kesalahan hukum'; (c) suatu kesalahan dimana negara dengan cara apa pun melakukan intervensi untuk menghukum pelaku kesalahan; dan (d) perbaikan atas kesalahan dalam bentuk hukuman. Oleh karena itu, kompensasi merupakan ciri hukum perdata, bukan pidana. Hukuman menandai atau menstigmatisasi terdakwa sebagai penjahat. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang tidak dapat diserahkan kepada perorangan untuk ditegakkan.

Misalnya saja tindak pidana pencurian. Terdakwa telah mencuri sesuatu. Negara telah menetapkan bahwa pelanggaran ini dapat dihukum, penuntutan membuktikan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran tanpa keraguan dan terdakwa menerima hukuman seperti denda atau penjara. Korban pelanggaran biasanya tidak mendapatkan apa pun dari sistem peradilan pidana baik dari negara maupun dari terdakwa, meskipun ada pengecualian, seperti perintah restitusi atas barang yang dicuri berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Pencurian tahun 1968 atau dalam beberapa kasus berupa uang. dari Badan Kompensasi Cedera Pidana. Terdakwa dapat diadili baik atas permintaan negara (biasanya Kejaksaan Agung atau Direktorat Penuntutan Umum, DPP) atau oleh perorangan atau perusahaan, misalnya ketika sebuah toko di jalan raya melakukan penuntutan atas kasus pengutulan. Berdasarkan definisi yang telah diberikan sebelumnya, pencurian merupakan tindak pidana karena dapat dilanjutkan dengan proses pidana.

Satu istilah dalam definisi Cross memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang salah pasti merupakan kesalahan hukum. Ungkapan ini menunjuk pada salah satu perbedaan antara hukum pidana dan moral (atau apa yang dipikirkan sebagian besar masyarakat). Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana, baik undang-undang tersebut ditetapkan oleh Parlemen atau pengadilan. Hal ini tidak berarti kesalahan moral, melainkan pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh sistem etika. Hukum pidana mencakup berbagai situasi yang tidak semuanya dianggap sebagai pelanggaran moral. Beberapa kejahatan tidak dipandang oleh semua orang sebagai kesalahan moral. Misalnya, euthanasia seperti ketika seorang anak perempuan membunuh ibunya yang sakit parah dan menderita kesakitan yang luar biasa tidak dianggap oleh semua orang sebagai tindakan yang salah secara moral, namun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap salah satu hukum pidana: yaitu pembunuhan. Mengambil makanan untuk memberi makan bayi yang kelaparan adalah pencurian. Namun, moralitas dapat diperhitungkan pada tahap hukuman. Tidak diragukan lagi, orang yang

mencuri untuk memberi makan anak yang kelaparan akan menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang yang mencuri untuk memuaskan keserakahan. Memang benar, banyak kejahatan tidak memiliki muatan moral apa pun. Pengemudi di Inggris berkendara di sisi jalan yang berbeda dengan di AS dan benua Eropa, namun tidak ada moralitas di balik perbedaan tersebut. Meskipun tidak semua kejahatan merupakan pelanggaran terhadap segala bentuk moralitas, namun tidak semua kesalahan moral merupakan kejahatan. Keegoisan, kebohongan, ingkar janji, dan perzinahan mungkin salah secara moral, namun itu bukanlah kejahatan. Namun, peristiwa yang sama mungkin merupakan kejahatan dan kesalahan moral. Pemerksaan adalah sebuah kejahatan, dan mungkin sebagian besar orang juga akan mengatakan bahwa pemerksaan adalah tindakan yang salah secara moral. Oleh karena itu, meskipun kejahatan dan moralitas tidak sama, ada beberapa bidang yang saling tumpang tindih.

Kadang-kadang dikatakan bahwa suatu kejahatan berdampak pada masyarakat dan hukum perdata berdampak pada satu orang, namun anggapan ini dengan mudah dibantah. Misalnya, perkelahian antara dua orang di tempat parkir pub dapat menyebabkan cedera seperti luka, memar, dan mungkin gegar otak. Cedera ini merupakan satu atau lebih pelanggaran non-fatal. Tidak bisa dikatakan bahwa seluruh masyarakat terkena dampaknya. Namun, tumpahan minyak akan berdampak pada lebih banyak orang dibandingkan dengan pukulan di tempat parkir meskipun hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana beberapa aspek moralitas berubah, demikian pula hukum pidana. Contoh umum adalah homoseksualitas. Hingga baru-baru ini, tindakan homoseksual di mana pun di Inggris dan Wales merupakan suatu pelanggaran di antara laki-laki, berapapun usianya. Pada tahun 1967 Parlemen mengubah undang-undang untuk membuat aktivitas homoseksual secara pribadi antara dua pria berusia di atas 21 tahun menjadi sah. Usia tersebut dikurangi menjadi 18 tahun pada tahun 1994 dan kemudian menjadi 16 tahun. Perlu dicatat bahwa perubahan undang-undang ini mungkin sejalan dengan Konvensi Eropa. Konvensi ini merupakan dokumen hidup yang harus ditafsirkan berdasarkan keberadaan masyarakat saat ini dan bukan berdasarkan keadaan pada saat penyusunannya. Secara umum, homoseksualitas adalah ilegal di negara-negara yang menandatangani Konvensi tersebut pada tahun 1950an dan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa mengizinkan undang-undang tersebut. Namun, seiring dengan perubahan undang-undang nasional, penafsiran Konvensi juga mengalami perubahan sehingga negara-negara, misalnya, tidak dapat lagi menetapkan usia persetujuan yang terpisah untuk melakukan hubungan heteroseksual dan homoseksual. Demikian pula, pelanggaran heteroseksual adalah ilegal hingga tanggal 3 November 1994, karena tindakan tersebut sah, dengan syarat: kedua pasangan harus berusia di atas 18 tahun dan aktivitas tersebut harus dilakukan secara pribadi dan atas dasar suka sama suka. (Lesbianisme tidak pernah menjadi kejahatan meskipun kadang-kadang tuntutan penyerangan tidak senonoh diajukan. Kejahatan penyerangan tidak senonoh sekarang adalah penyerangan seksual, dan kecil kemungkinannya tuntutan akan diajukan.) Dalam bidang hukum pidana yang berbeda, ketidakjujuran di bawah Pencurian Tindakan, pengadilan mengatakan bahwa juri dapat mempertimbangkan standar perilaku saat ini. Bisa jadi juri pada

tahun 1972 tidak akan memvonis bersalah berdasarkan fakta yang sama dengan yang divonis juri saat ini. Contohnya adalah praktek meminta lebih banyak saham daripada uang yang harus dibayar seseorang pada saat saham tersebut akan dibagikan dengan harapan bahwa seluruh jumlah saham yang diminta tidak akan dibagikan kepada terdakwa sehingga ia akan mempunyai cukup uang. uang untuk membayar saham yang diperolehnya. Dengan cara ini dia akan mendapatkan bagian yang sangat dia inginkan. Jika dia hanya memasukkan nomor itu, dia tidak akan mendapatkan semuanya jika terjadi kelebihan permintaan. Bentuk perilaku mana yang termasuk kriminal merupakan urusan Parlemen dan pengadilan. Terkadang cakupan tidak ada. Jika saya menyalahgunakan rahasia dagang, saya tidak bersalah atas pencurian. Terkadang cakupannya hanya sebagian. Jika saya berbohong untuk melakukan hubungan seksual, saya tidak bersalah melakukan pemerkosaan, kecuali saya berbohong tentang sifat atau tujuan tindakan tersebut atau identitas saya. Jika saya berbohong untuk mendapatkan suatu barang, saya mungkin bersalah karena melakukan penipuan. Salah satu aspek permasalahannya adalah Parlemen dan pengadilan melakukan pelanggaran yang sangat luas sehingga mengakibatkan tindakan-tindakan dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda dimasukkan ke dalam pelanggaran yang sama. Dua ilustrasi saja sudah cukup. Dalam pembunuhan tidak berencana, kejahatannya mencakup pelanggaran yang berada di ambang pembunuhan (dan bahkan tindakan yang tidak lebih dari 20 tahun yang lalu merupakan pembunuhan) serta skenario di mana terjadi perkelahian singkat, korban dipukul, jatuh ke tanah, kepalanya terbentur batu bata secara tidak sengaja, dan mati. Namun, contoh yang paling terkenal adalah pembunuhan yang mencakup kemarahan teroris yang paling buruk dan pembunuhan yang paling penuh kasih sayang.

Ada juga fakta bahwa undang-undang pidana diubah secara perlahan dan sebagian oleh Parlemen untuk mencerminkan perkembangan sosial. Tidak ada Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer sampai tahun 1990. Bahasa yang digunakan baik dalam hukum pidana yang dibuat oleh hakim maupun yang dibuat oleh Parlemen mungkin sudah ketinggalan zaman. 'Kebencian yang sudah dipikirkan sebelumnya', keadaan pikiran yang diperlukan untuk membunuh, tidak didasarkan pada rasa dendam atau pembunuhan berencana. Demikian pula, istilah 'jahat' dalam Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Manusia tahun 1861 dipilih dengan buruk, karena tidak ada gunanya melakukan kejahatan. Beberapa bidang hukum telah diperbarui dan bahasanya dimodernisasi dalam beberapa tahun terakhir, misalnya. pencurian, pengrusakan kriminal, tetapi beberapa bagian menggunakan kosakata kuno. Sekalipun rancangan KUHP yang ada saat ini harus disahkan, undang-undang baru tersebut tidak akan mencakup semua bidang hukum pidana (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini). Karena perkembangan undang-undang ini berjalan sedikit demi sedikit selama berabad-abad, maka tidak mengherankan jika tidak ada definisi tunggal yang merangkum mengapa perbuatan ini merupakan kejahatan dan perbuatan tersebut bukan kejahatan.

Parlemen belum mendefinisikan kejahatan. Namun demikian, kini terdapat ketentuan dalam pasal 18(1)(a) Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1981 yang menyatakan bahwa dengan pengecualian, tidak ada banding dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tinggi (Divisi

Perdata) dalam kasus pidana apa pun. sebab atau hal'. Kasus-kasus, yang utama adalah *Amand v Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Pemerintah Kerajaan Belanda* [1943] AC 147 (HL), memutuskan bahwa jika proses persidangan dapat berujung pada hukuman, maka hal tersebut merupakan sebab atau perkara pidana. Sekalipun Parlemen mendefinisikan suatu kejahatan, definisi tersebut kini harus tunduk pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 6(2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia hanya berlaku bagi orang-orang yang 'didakwa melakukan tindak pidana'. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih besar kepada mereka yang dituduh melakukan kejahatan dibandingkan dengan terdakwa dalam kasus perdata. Misalnya, terdakwa tunduk pada asas praduga tak bersalah dan harus didampingi pengacara gratis jika ia tidak mampu membayarnya. Definisi 'tindak pidana' merupakan definisi yang bersifat otonom dan tidak terikat dengan apa yang terdapat dalam undang-undang nasional. Sifat dari proses persidangan, beratnya hukuman dan klasifikasi berdasarkan hukum nasional semuanya diperhitungkan, namun pertimbangan pertama adalah yang paling penting. Contohnya adalah *Benham v UK* (1996) 22 EHRR 293 (ECHR). Terdakwa dimasukkan ke dalam penjara ketika juru sita tidak dapat menemukan barang yang bernilai cukup untuk membayar biaya komunitasnya ('pajak pemungutan suara'). Hukum Inggris mengatakan bahwa proses hukum tersebut, meskipun dilakukan di pengadilan, bersifat perdata: seperti yang dinyatakan oleh ECHR, 'Tujuan penahanan adalah untuk memaksa pemohon membayar pajak yang terutang, bukan untuk menghukumnya. karena tidak membayarnya.' Meskipun demikian, Pengadilan memutuskan bahwa proses hukum tersebut merupakan proses pidana dan, oleh karena itu, Pasal 6 Konvensi berlaku. Sifat dari proses ini sangat penting. Persidangan dilakukan oleh otoritas publik dan mempunyai unsur hukuman dimana hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara dan terdakwa dapat dipenjara paling lama tiga bulan. (Pengadilan Eropa menyebut jumlah maksimum ini 'relatif parah'.) Klasifikasi menurut hukum domestik Inggris tidak menentukan. *Benham* dibedakan oleh House of Lords di *Clingham v Royal Borough of Kensington dan Chelsea* [2003] 1 AC 787. Pembuatan perintah perilaku anti-sosial adalah masalah hukum perdata, meskipun pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan proses pidana sifatnya: tidak ada penalti sampai tahap selanjutnya. Sampai saat ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan pengadilan Inggris masih belum sepakat mengenai apakah ada 'pelanggaran pidana' atau tidak. Seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak yurisprudensi mengenai masalah ini.

1.4 PERBEDAAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Sistem hukum modern di seluruh dunia membedakan antara hukum perdata dan pidana, demikian pula di Inggris dan Wales. Ada yang mungkin berasumsi bahwa pelanggaran hukum pidana akan lebih serius dibandingkan pelanggaran hukum perdata, namun hal ini tidak serta merta berarti demikian. Hukum pidana dan perdata tidak selalu berbeda dalam jenis perilaku yang ingin mereka kendalikan. Perbuatan yang sama bisa merupakan kejahatan dan perbuatan melawan hukum, yang terkadang disebut sebagai kesalahan perdata. Jika saya menyerang Anda, saya bersalah atas kejahatan dan perbuatan melawan hukum. Jika sopir bus

yang mengantar Anda pulang malam ini dengan sembarangan mengalami kecelakaan dan Anda terluka, mungkin ada beberapa kejahatan terkait mengemudi dan kerugian serta perbuatan melawan hukum dan pelanggaran kontrak oleh perusahaan bus untuk mengangkut Anda dengan aman.

Namun terdapat perbedaan penting dalam beberapa hal yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pengadilannya tidak sama. Dalam hukum perdata, dua pengadilan yang pertama kali mengadili perkara adalah Pengadilan Tinggi dan pengadilan daerah. Perbedaan antara keduanya banyak berubah pada tahun 1991, namun pembagian dasarnya tetap bahwa Pengadilan Tinggi mengadili kasus-kasus yang melibatkan jumlah uang yang besar, sedangkan pengadilan negeri mendengarkan sisanya. Di bawah sayap pengadilan daerah terdapat pengadilan tuntutan kecil, yang yurisdiksinya terbatas. Banding diajukan ke Pengadilan Banding (Divisi Sipil) dan kemudian ke House of Lords. Ketika Undang-Undang Reformasi Konstitusi tahun 2005, Bagian 3, berlaku, House of Lords sebagai badan peradilan akan digantikan oleh Mahkamah Agung. Ada juga kemungkinan rujukan dari salah satu pengadilan ini ke Pengadilan Eropa di Luksemburg mengenai masalah hukum Komunitas Eropa. Aturan dasarnya adalah bahwa pengadilan di bawah House of Lords dapat merujuk permasalahan tersebut, sedangkan DPR harus merujuknya kecuali secara umum permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan jelas sebelumnya (*act clair*). Hierarki dan hubungan pengadilan hukum pidana diuraikan kemudian dalam bab ini. Singkatnya, pengadilan yang mengadili perkara terlebih dahulu (pengadilan tingkat pertama) adalah Pengadilan Mahkota dan pengadilan hakim. Di kedua pengadilan ini mayoritas terdakwa mengaku bersalah. Ada banding ke Pengadilan Divisi atau Pengadilan Banding (Divisi Pidana), dengan sebagian besar banding dari hakim diajukan ke Pengadilan Mahkota. Pengadilan pilihan terakhir, pengadilan banding terakhir, adalah House of Lords. Tidak ada Pengadilan Banding yang sebenarnya dalam perkara pidana sampai tahun 1907 ketika Pengadilan Banding Pidana didirikan. Pengadilan tersebut digantikan pada tahun 1966 oleh Pengadilan Banding perantara yang sekarang. Baru pada tahun 1960 House of Lords memperoleh yurisdiksi banding penuh dalam masalah pidana. Hukum pidana hampir tidak tersentuh oleh hukum Komunitas Eropa, namun undang-undang tersebut kini, misalnya, berdampak pada undang-undang tentang penangkapan ikan.
- b) Terminologinya berbeda. Dalam hukum pidana, penuntutan mengadili terdakwa (atau terdakwa). Dalam hukum perdata penggugat menggugat tergugat.
- c) Hasilnya berbeda. Dalam hukum perdata jika penggugat menang, dia biasanya menerima ganti rugi atau perintah pengadilan. Kerugian menurut hukum perdata mungkin melebihi denda hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdakwa, jika bersalah, (biasanya meskipun tidak selalu) dijatuhi hukuman. Tujuan hukum perdata biasanya adalah memberikan kompensasi kepada korban, sedangkan dalam hukum pidana tujuannya adalah hukuman. Ada beberapa pengecualian. Terdakwa dapat diperintahkan untuk mengembalikan barang yang dicuri (*Theft Act 1968, s 28*) atau

barang apa pun yang diambil (Police (Property) Act 1897, s 1), atau untuk memberikan kompensasi kepada korban (Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, s 130), namun meskipun perintah kompensasi sering kali dibuat di pengadilan, dalam sebagian besar kasus pidana, korban tidak menerima apa pun dari pelaku. Selain itu, putusan bersalah biasanya mempunyai stigma yang lebih besar dibandingkan tuntutan atau pembelaan hukum perdata yang gagal. Karena hukuman bukan merupakan konsekuensi penting dari hukuman, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum pidana dan hukuman tidak memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan seperti yang diyakini sebagian orang.

- d) Masalah prosedurnya berbeda. Seperti yang telah kita lihat, biasanya negaralah yang melakukan penuntutan, sedangkan individu atau perusahaan swasta yang menuntut, dan Kerajaan dapat meringankan hukuman dalam hukum pidana namun tidak dalam hukum perdata. Perbedaan lainnya adalah bahwa suatu proses pidana yang telah dimulai tidak dapat dihentikan kecuali oleh Jaksa Agung yang mengeluarkan apa yang disebut dengan *nolle prosequi* ('jangan menuntut'), sedangkan proses perdata dapat diselesaikan kapan saja oleh para pihak. Terdakwa dapat dipaksa untuk memberikan bukti dalam perkara perdata tetapi tidak dalam perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa negara mempunyai kepentingan dalam proses pidana yang tidak dapat dikesampingkan oleh keinginan pihak non-negara.
- e) Pelanggaran hukum pidana merupakan simbol kekuasaan negara. Keyakinan menunjukkan ketidaksenangan negara terhadap bentuk perilaku tertentu. Dinyatakan bertanggung jawab secara perdata tidak memenuhi tujuan ini.
- f) Korban mempunyai peran yang kecil dalam hukum pidana, sedangkan penggugat mempunyai peran utama dalam hukum perdata.

Secara umum, penuntutan tidak menghalangi proses perdata dan sebaliknya. Ada ketentuan khusus yang ditemukan dalam ss 44 – 45 dari *Offences Against the Person Act 1861* yang menetapkan bahwa tuntutan perdata untuk penyerangan atau penyerangan tidak dapat diajukan ketika terdakwa telah diadili di pengadilan dan telah memperoleh surat keterangan. surat keterangan pemberhentian pengaduan atau dihukum.

Hirarki pengadilan pidana: sistem banding

Setelah keputusan diambil di pengadilan mana perkara itu akan disidangkan, terdakwa diadili. Proses banding bergantung pada apakah kasus tersebut disidangkan di pengadilan hakim atau di Pengadilan Kerajaan. Pengadilan Anglo-Welsh terakhir dalam perkara pidana adalah House of Lords, yang dalam mata uang buku ini dapat menjadi Mahkamah Agung.

Pengadilan hakim

Ada dua kemungkinan jalur banding. Yang biasa dilakukan adalah Pengadilan Mahkota, yang untuk tujuan ini terdiri dari seorang hakim dan (biasanya) dua hakim. Hanya terdakwa yang dapat mengajukan banding, dan alasannya adalah (a) berdasarkan fakta atau hukum yang bertentangan dengan hukuman, atau (b) bertentangan dengan hukuman. Alasan pertama hanya dapat digunakan jika terdakwa mengaku tidak bersalah. Formatnya adalah sidang ulang, yakni sidang baru yang penuh (a trial de novo). Banding alternatif adalah ke

Pengadilan Divisi dari Divisi Queen's Bench di Pengadilan Tinggi. Permohonan banding ini disebut 'berdasarkan kasus yang dinyatakan'. Masing-masing pihak dapat mengajukan banding, namun alasannya semata-mata adalah (a) berdasarkan hukum, atau (b) bahwa hakim melampaui yurisdiksinya. Jika penuntutan berhasil, hakim diarahkan untuk menghukum dan memberikan hukuman yang sesuai. Ada juga banding melalui kasus yang diajukan dari Pengadilan Mahkota ke Pengadilan Divisi. Terdapat 188 permohonan banding pada tahun 1998. Banding dari Pengadilan Divisi ditujukan ke House of Lords. Masing-masing pihak boleh mengajukan banding, namun hanya berdasarkan hukum. Ada dua prasyarat lainnya: Pengadilan Divisi harus menyatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan kepentingan masyarakat umum dan baik Pengadilan atau Lords harus memberikan izin untuk mengajukan banding. Ada sekitar sepuluh permohonan banding seperti itu dalam setahun.

Pengadilan Mahkota

Banding dari Pengadilan ini terletak pada Pengadilan Banding (Divisi Pidana). Banding terhadap hukuman dilakukan dengan dasar bahwa hukuman tersebut 'tidak aman'. Tidak masalah jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh juri. Hanya terdakwa yang dapat mengajukan banding. Permohonan banding tersebut dapat bertentangan dengan keyakinan atas suatu hal hukum, atau terhadap keyakinan atas suatu fakta atau campuran antara hukum dan fakta; atau menentang hukuman. Uji coba ulang mungkin dilakukan tetapi jarang. Namun, hal-hal tersebut merupakan fenomena yang sedang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1972, pasal 36, Jaksa Agung dapat merujuk suatu ketentuan hukum untuk memperjelas masalah tersebut. Jika pengadilan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menjatuhkan hukuman, maka pembebasan terdakwa tidak akan terpengaruh. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1988, pasal 35 –36, Jaksa Agung dapat mengajukan hukuman ke Pengadilan Tinggi jika ia yakin bahwa hukuman tersebut terlalu ringan. Kekuasaan ini hanya ada dalam kaitannya dengan pelanggaran berat tertentu. Pengadilan Banding dapat menjatuhkan hukuman apa pun yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri.

Banding dari Pengadilan Banding ditujukan ke House of Lords. Intinya harus bersifat hukum, dan kedua belah pihak dapat mengajukan banding. Sekali lagi ada dua persyaratan: Pengadilan Banding harus menyatakan bahwa ada suatu ketentuan hukum yang penting bagi masyarakat umum, dan pengadilan atau House of Lords harus memberikan izin. Terdapat tiga permohonan banding pada tahun 1998. Referensi Jaksa Agung mengenai undang-undang atau hukuman dapat diajukan ke House of Lords. Contoh rujukannya adalah Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1988) [1989] AC 971 (HL), yang dibahas di bawah ini.

Preseden Dalam Hukum Pidana

Keputusan pengadilan tidak mengikat pengadilan mana pun. Keputusan Pengadilan Negeri tidak mengikat, meskipun hakim mungkin akan menindaklanjutinya jika mereka mengetahuinya. Keputusan seperti itu jarang dilaporkan, namun lihat Bab 14 tentang pemerkosaan untuk pengecualian modern. Keputusan Pengadilan Divisi dan Pengadilan Banding (Divisi Kriminal) mengikat pengadilan di bawahnya dalam hierarki (lihat bagian sebelumnya). Dikatakan, namun tidak selalu diadopsi, bahwa Pengadilan Banding (Divisi

Kriminal) tidak akan mematuhi keputusan-keputusan sebelumnya seperti yang dilakukan pihak perdata karena dianggap bias dalam memihak terdakwa, dalam mendukung kebebasan: Gould [1968] 2 QB 65. Tampaknya pengadilan yang beranggotakan lima orang dapat mengesampingkan pengadilan yang beranggotakan tiga orang. House of Lords mengikat pengadilan di bawahnya. Sejak tahun 1966, ia tidak terikat oleh keputusannya sendiri: Pernyataan Praktik [1966] 1 WLR 1234. Namun, Pernyataan Praktik tersebut menyatakan bahwa House of Lords akan mempertimbangkan kebutuhan khusus akan kepastian hukum pidana. Artinya, dalam persoalan hukum pidana lebih dari pada persoalan hukum perdata akan diusahakan untuk tidak menyimpang dari putusan-putusan sebelumnya. Dampak dari Pernyataan Praktik ini adalah bahwa Yang Mulia berusaha untuk menjunjung tinggi keputusan-keputusan sebelumnya yang telah menjatuhkan hukuman kepada seseorang, meskipun hasilnya tidak adil. Namun, House of Lords pernah melakukan hal tersebut dengan sangat cepat, membatalkan keputusannya mengenai upaya yang mustahil dalam *Anderton v Ryan* [1985] AC 560 di *Shivpuri* [1987] AC 1. House of Lords telah melakukannya, seperti halnya Pengadilan Banding , sering kali menghukum seseorang karena tidak mematuhi penafsiran ketat suatu undang-undang (misalnya *Ayres* [1984] AC 447 dan *MPC v Charles* [1977] AC 177), atau sangat bergantung pada kasus-kasus sebelumnya (yang tidak mengikat): lihat *MPC v Caldwell* [1982] AC 341. Tidak dapat dipastikan apakah suatu pengadilan yang lebih rendah terikat oleh pengadilan yang berada tepat di atasnya atau oleh pengadilan yang berada di atasnya. Di sisi sipil, aturan sebelumnya berlaku.

Dalam kasus-kasus pidana, Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa mereka terikat oleh keputusan-keputusan Pengadilan Banding sebelumnya dan bukan oleh nasihat dari Dewan Penasihat: *Campbell* [1997] 1 Cr App R 199. Aturannya berbeda dalam hukum perdata, dan ada tidak ada alasan yang jelas atas perbedaan tersebut. Namun, baru-baru ini Pengadilan Banding, yang menurut sebagian orang, telah mengikuti saran dari Dewan Penasihat dan bukan keputusan House of Lords: lihat *James* [2006] EWCA Crim 14 tentang provokasi. Pengadilan menekankan hal berikut: ada sembilan Penguasa Hukum di Dewan Penasihat; mayoritas secara eksplisit mengatakan bahwa nasihat mereka adalah hukum Inggris dan Wales, dan mayoritas mencakup lebih dari separuh Penguasa Hukum.

Dalam kaitannya dengan teori preseden ortodoks, terdapat keraguan mengenai nilai preseden dari Referensi Jaksa Agung, namun Referensi Jaksa Agung dianggap setara dengan otoritas pengadilan di mana Referensi tersebut diadili. 'Pengadilan dalam bahasa Inggris harus, jika tidak ada keadaan khusus, mengikuti yurisprudensi Pengadilan Strasbourg yang jelas dan konstan' (sesuai Lord Nicholls dalam *Kay v London Borough of Lambeth* [2006] UKHL 10), kecuali terdapat preseden dalam negeri, dalam dalam hal mana pengadilan harus menerapkan preseden, memberikan pandangannya dan memberikan izin naik banding: lihat Lord Bingham dalam kasus yang sama di [43].

Penafsiran Undang-Undang Pidana

Sebagian besar hukum pidana didasarkan pada undang-undang, dan pemberlakuan rancangan KUHP akan mempercepat kecenderungan menuju hukum pidana berdasarkan undang-undang. Jika undang-undang tersebut disahkan (dan baik pemerintah Partai

Konservatif maupun Partai Buruh tidak menunjukkan kesiapan), hal ini tidak akan mengubah peran dasar hakim dalam menafsirkan undang-undang karena tidak ada aturan khusus yang melekat pada rancangan undang-undang tersebut yang harus dipatuhi oleh hakim. Kode Etik ini tidak akan berlaku untuk pelanggaran 'pra-Kode', yang pada tahun 2009 berjumlah sekitar 11.000 pelanggaran, yang akan terus ditafsirkan dengan cara yang biasa. Di bawah sistem mana pun, kata-kata bersifat terbuka: 'apa yang dimaksud dengan pembelaan diri yang masuk akal?', 'apakah orang ini tidak jujur?'

Karena undang-undang tidak berlaku secara otomatis, seseorang harus menjelaskan luasnya undang-undang tersebut kepada para pengadil fakta, apakah Hakim Perdamaian (atau Hakim Distrik (Pengadilan Magistral)) di Pengadilan Magistral, atau juri di Pengadilan Mahkota, agar mereka dapat menerapkan hukum pada fakta. Terlebih lagi, Parlemen seringkali mengabaikan hal-hal mendasar seperti partai mana yang harus dibebani pembuktian dan apa mens rea-nya, jika ada. Terkadang undang-undang menjadi ketinggalan jaman karena teknologi. Hakim berada dalam posisi yang sulit. Ia harus menerapkan hukum secara imparial namun ia merupakan bagian dari ketertiban negara, bagian dari mekanisme untuk menekan kejahatan. Masih ada ruang untuk kreativitas peradilan karena Parlemen tidak dapat membuat undang-undang untuk setiap kemungkinan. Dahulu dikatakan bahwa di Inggris hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat, atau setidaknya menguntungkan terdakwa (kadang-kadang disebut sebagai 'demi kebebasan'). Artinya, undang-undang pidana harus dibaca secara sempit sehingga hanya mencakup bidang-bidang yang jelas-jelas diinginkan oleh Parlemen agar undang-undang tersebut diterapkan. Tampaknya ada beberapa alasan mengapa pandangan seperti itu diambil. Di era hukuman mati, hukuman gantung tidak terlihat begitu saja ketika Parlemen belum secara tegas menetapkan aturan yang mengatur situasi tersebut. Di masa ketika intervensi parlemen jarang terjadi, dan bahkan saat ini pembunuhan merupakan pelanggaran hukum yang lazim, para hakim mengatakan bahwa undang-undang yang mereka buat adalah contoh dari alasan yang masuk akal, dan setiap perubahan yang dibuat oleh Parlemen harus dibaca secara sempit. Lord Reid mengatakan dalam *Sweet v Parsley* [1970] AC 132 (HL): 'Merupakan prinsip universal bahwa jika suatu ketentuan pidana secara wajar mampu memiliki dua penafsiran, maka penafsiran yang paling menguntungkan terdakwa harus diadopsi.' Hakim-hakim zaman modern kadang-kadang nampaknya mengambil tindakan ekstrem yang lain: 'Inilah orang yang nakal atau jahat; dia seharusnya bersalah atas sesuatu; oleh karena itu, mari kita buat dia bersalah atas sesuatu hal.' Contoh-contoh dapat diambil khususnya dari Bab 15 tentang pencurian, dimana para hakim berusaha untuk mempertahankan dakwaan yang tampaknya seolah-olah seharusnya diajukan pada bagian yang berbeda. Dampaknya adalah undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan terkadang tidak konsisten. Keputusan House of Lords dalam *Kassim* [1992] 1 AC 9 mungkin dapat menghentikan perkembangan ini. Terdakwa didakwa melakukan pengadaan surat berharga, cek, dengan penipuan yang bertentangan dengan pasal 20(2) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 (lihat sekarang Undang-Undang Penipuan tahun 2006). Lord Ackner mengizinkan banding terdakwa dengan alasan bahwa 'eksekusi' mempunyai arti khusus yang tidak mencakup pembayaran dengan cek. Tuduhan yang benar

adalah berdasarkan pasal 15 UU yang sama, memperoleh properti (uang) dengan penipuan (lihat sekarang kejahatan penipuan bertentangan dengan pasal 1 UU Penipuan 2006).

Para ahli hukum pada pertengahan abad kedua puluh mengadopsi apa yang disebut pendekatan literal terhadap konstruksi undang-undang. *Fisher v Bell* [1961] 1 QB 394 mencontohkan aturan literal ini. Seorang penjaga toko didakwa melakukan pelanggaran karena menawarkan pisau lipat untuk dijual ketika dia memajangkannya di etalasenya. Parlemen telah memutuskan bahwa pisau lipat itu berbahaya dan ingin agar pisau tersebut tidak dijual. Kita mungkin berpikir bahwa Pengadilan Divisi akan beralasan seperti ini: 'Pisau itu berbahaya; seseorang yang menaruhnya di etalase tokonya ingin menjual barang berbahaya; oleh karena itu dia bersalah karena menawarkan pisau itu untuk dijual.' Namun, Lord Parker C. J. memutuskan bahwa apa yang dilakukan penjaga toko bukanlah menawarkan pisau untuk dijual, tetapi mengundang orang yang lewat untuk datang ke toko dan menawarkan untuk membeli. itu, oleh karena itu terdakwa tidak bersalah. Metode analisisnya terkadang dikenal sebagai 'konseptual'.

Dia bekerja dari satu kategori ke kategori berikutnya dan hasilnya terdakwa dibebaskan (yang jelas membuat Parlemen kecewa karena mengubah undang-undang tersebut pada tahun berikutnya: terdakwa kini bersalah). Selain masalah kedaulatan Parlemen, tidak ada paksaan pada Lord Parker C. J. untuk mengadopsi kategori hukum kontrak dalam hukum pidana, namun penggunaan kategori tersebut menunjukkan bagaimana undang-undang dapat ditafsirkan untuk menghukum atau membebaskan terdakwa. Untuk keputusan House of Lords baru-baru ini yang menerapkan aturan literal, lihat Bentham [2005] 1 WLR 1057. Dinyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki 'senjata api tiruan' ketika dia mengarahkan jarinya ke bawah jaketnya pada saat itu. dari perampokan. Dia tidak memiliki jarinya sendiri sesuai dengan arti undang-undang.

House of Lords mengambil pendekatan berbeda sehubungan dengan undang-undang pidana. Dalam *Acuan Jaksa Agung* (No. 1 Tahun 1988) yang dikutip di atas, pendekatan ini mengadopsi apa yang disebut pendekatan 'purposif'. Lord Lowry mengatakan bahwa hakim harus menggunakan konteks pelanggaran dalam undang-undang untuk mencapai tujuan Parlemen.

Kasus ini melibatkan insider-dealing. Terdakwa telah menerima informasi rahasia tentang harga saham. Sebuah perusahaan hampir diambil alih. Dia dituduh mendapatkan informasi tersebut. Hakim pengadilan memutuskan bahwa dia tidak memperoleh informasi tersebut 'dengan tujuan dan usaha'. Dia baru saja menerimanya saat berbicara dengan seseorang dari bank dagang. Jaksa Agung merujuk masalah ini ke Pengadilan Banding dan dibawa ke House of Lords, pidato utama disampaikan oleh Lord Lowry. Dia berkata:

- (a) Definisi kamus tentang 'diperoleh' mencakup perolehan dengan usaha dan perolehan (dengan atau tanpa usaha). Dengan kata lain, ada dua arti 'diperoleh' dalam bahasa biasa. Yang pertama merupakan makna primer, sedangkan yang terakhir merupakan makna sekunder atau umum.
- (b) Prinsip tentang konstruksi hukum pidana yang ketat hanya diterapkan dalam kasus-kasus yang benar-benar diragukan. Adanya ambiguitas saja tidak cukup.

- (c) Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah Parlemen bermaksud menggunakan kata tersebut dalam arti primer atau sekunder. Hanya jika yang terakhir itulah terdakwa bersalah. Penggunaan informasi yang tidak diinginkan tidak bergantung pada apakah terdakwa memperolehnya dengan mudah atau mudah. Buku Putih yang menjadi dasar undang-undang terkait menganggap kejahatan sebagai kepemilikan informasi, bukan cara memperolehnya. Tindakan pengadaan bukanlah *actus reus* (“tindakan bersalah”): mengapa terdakwa dilarang menggunakan hanya sebagian dari informasi rahasia? ‘Objek undang-undang harus dihilangkan sebagian jika makna sempit “diperoleh” diadopsi.’ Makna sempit tersebut juga akan menghasilkan perbedaan yang halus.

Argumen sebaliknya dibantah. ‘Memperoleh’ dapat berarti ‘memperoleh dengan usaha keras’ dalam beberapa undang-undang, misalnya. Theft Act 1968, s 15 (sekarang dicabut), namun makna tersebut tidak berlaku dalam semua konteks. Kasus tersebut bukanlah kasus yang memiliki arti yang tepat dan longgar (atau tidak akurat): itu mempunyai arti primer dan sekunder, keduanya benar. Oleh karena itu, makna yang lebih luas diadopsi, yang menyatakan bahwa mereka yang menerima potongan informasi rahasia dari insider-trader bertanggung jawab, dan permasalahan tersebut tidak boleh ditarik dari juri.

Dalam *Acuan Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1991) [1993] QB 94 (CA)* terdakwa menekan tombol di komputer untuk mendapatkan diskon 70 persen di perusahaan lamanya. Hakim persidangan mengatakan pelanggaran yang didakwakan ditujukan pada peretasan komputer. Peretasan memerlukan akses ke satu komputer melalui komputer lain. Namun terdakwa hanya mengakses satu komputer. Pengadilan Banding akan menjatuhkan hukuman. ‘Makna yang jelas dan alami’ dari kata-kata undang-undang itu jelas. Akses ke satu komputer sudah cukup. Karena tidak ada ambiguitas, maka tidak perlu membahas kejahatan yang menurut pengadilan telah dilakukan oleh Parlemen. Memang benar bahwa kejahatan ini lebih luas daripada peretasan: hal ini mencakup spionase industri melalui penggunaan komputer, baik komputer tersebut diakses oleh orang lain atau sebaliknya.

Ada ketegangan antara kebebasan individu dan tidak membiarkan orang yang ‘jelas-jelas bersalah’ pergi. Bagian dari ketegangan ini dicatat oleh Profesor Ashworth ‘*Interpreting pidana undang-undang: krisis legalitas?*’ (1991) 107 LQR 419 di 443 – 444:

Jika salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk menghukum orang-orang yang bersalah menyebabkan kerugian, maka hal ini merupakan tujuan kebijakan yang harus menjadi bagian dari doktrin hukum pidana dan dapat dengan baik dimasukkan ke dalam keputusan penafsiran. Klaim di sini bukanlah bahwa undang-undang pidana harus diperluas secara retrospektif terhadap perilaku warga negara, melainkan bahwa orang-orang yang dengan sengaja ‘berlayar mendekati angin’ tidak perlu terkejut jika undang-undang tersebut ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup perilaku mereka.

Lebih-lebih lagi: Ada beberapa poin di mana sistem modern biasanya menyimpang dari prinsip kepastian maksimum (misalnya persyaratan sebab-akibat, perbedaan antara persiapan dan upaya, definisi kecerobohan [lihat Bab 2, 10 dan 3 masing-masing]). Mengupayakan kepastian maksimal dalam semua kasus ini mungkin akan meminimalkan diskresi peradilan

(yang juga disertai dengan praktik diskriminatif dan ketidakkonsistenan biasa), namun hal ini juga dapat menyebabkan ketentuan yang tidak fleksibel yang gagal dalam memberikan perbedaan yang adil dan mengakibatkan pembebasan beberapa orang yang melakukan tindakan tersebut. harus dihukum.

Konstruksi undang-undang pidana yang ketat yang memberikan tanggung jawab tidak pernah mencakup pembelaan, hanya sedikit di antaranya yang bersifat undang-undang. Komisi Hukum, yang selalu siap untuk mengurangi luasnya kesalahan, khususnya kecerobohan, terus mengusulkan agar beberapa pembelaan tidak didefinisikan dalam undang-undang untuk memungkinkan pengembangan peradilan. Kita tidak boleh disesatkan oleh protes-protes seperti itu. Kita dapat dengan mudah menemukan contoh pengadilan yang mempersempit pembelaan (misalnya paksaan) dan juga melihat pengadilan memperluas pembelaannya (misalnya provokasi: lihat *Camplin* [1978] AC 705 (HL)).

Seperti halnya di sisi perdata, pengadilan pidana dapat melihat *Hansard* dan laporan reformasi hukum untuk menemukan kenakalan yang dirancang untuk dipenuhi oleh Undang-Undang Parlemen, namun tidak dapat menggunakannya untuk menentukan luasnya kata-kata undang-undang di mana tidak ada ambiguitas, ketidakjelasan, atau absurditas. : *Pepper v Hart* [1993] AC 593 (HL). Ada otoritas baru-baru ini yang menyatakan bahwa aturan ini tidak boleh digunakan untuk memperluas tanggung jawab pidana ketika kata-kata dalam undang-undang itu sendiri tidak menyatakan bahwa terdakwa bersalah: *Thet v DPP* [2007] 2 Semua ER 425 (DC). Namun, *Thet v DPP* dibedakan dalam *Tabnack* [2007] 2 Cr App R 34. Dikatakan bahwa *Thet* diterapkan ketika penuntut berusaha untuk mengandalkan debat parlemen, bukan ketika pembela melakukannya.

Klasifikasi pelanggaran berdasarkan asal: bisakah hakim membuat undang-undang pidana baru?

Kejahatan berdasarkan hukum umum adalah kejahatan yang dibuat oleh hakim seperti hukum pembunuhan (lihat Bab 11). Ada cara-cara lain di mana 'hukum umum' digunakan, namun pengertian inilah yang digunakan dalam buku ini. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran yang dibuat oleh Parlemen seperti tindak pidana pengrusakan (lihat Bab 18). Sejauh ini sebagian besar pelanggaran yang terjadi saat ini adalah pelanggaran hukum. Parlemen sering kali melakukan pelanggaran; hal itu jarang melemahkan mereka.

Hakim telah melepaskan kewenangan untuk melakukan tindak pidana baru: *Kneller (Publishing, Printing and Promotions) Ltd v DPP* [1973] AC 435 dan *DPP v Withers* [1975] AC 842, keduanya merupakan keputusan House of Lords. Otoritas House of Lords yang lebih baru adalah *Jones* [2006] UKHL 16. Abnegasi ini sangat kontras dengan pandangan yang diungkapkan dengan tegas dari pengadilan yang sama dalam *Shaw v DPP* [1962] AC 220, sebuah kasus yang melibatkan publikasi nama, alamat dan jenis kelamin. layanan pelacur perempuan, bahwa 'di pengadilan masih ada sisa kekuasaan untuk menegakkan tujuan tertinggi dan mendasar dari hukum untuk menjaga tidak hanya keselamatan dan ketertiban tetapi juga kesejahteraan moral negara'. Kasus ini melibatkan masalah sosial yang kontroversial, dan merupakan masalah yang baru saja dibicarakan oleh Parlemen beberapa waktu yang lalu. Dalam kedua hal tersebut, House of Lords seharusnya tidak melakukan

intervensi. *Shaw v DPP* merupakan pelanggaran asas legalitas yang dibahas di halaman pertama buku ini. Saat ini tidak ada keraguan bahwa terdapat kejahatan yang melanggar kesusilaan publik, namun hal tersebut memerlukan waktu 30 tahun setelah *Shaw* terjadi. Pengadilan Tinggi, meskipun mengatakan bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut, menegaskan kembali kewenangan untuk menciptakan kejahatan baru ketika memutuskan dalam *R [1991] 2 Semua ER 257* bahwa suami bertanggung jawab jika mereka melakukan hubungan seksual dengan istri mereka tanpa persetujuan mereka. Keputusan tersebut dikukuhkan oleh House of Lords ([1992] 1 AC 599), meskipun terdapat fakta bahwa paling lambat sejak awal abad kedelapan belas, aturan umum yang berlaku adalah bahwa seorang suami dibebaskan dari hukuman atas pemerkosaan terhadap istrinya. Penghapusan pengecualian sama dengan menciptakan pelanggaran baru, dan keduanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Bandingkan pendirian Lord Reid dalam *Shaw*: '[bila] Parlemen takut untuk mengambil tindakan, maka Pengadilan tidak akan terburu-buru melakukan tindakan'. *Shaw* dan *Kneller* mungkin salah saat ini karena pengadilan di Inggris dan Wales telah diberi tugas untuk menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998.

Dalam *C v DPP [1996] 1 AC 1*, sebuah keputusan sebelum Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 mulai berlaku, Lord Lowry, yang disetujui oleh para Penguasa Hukum lainnya, menetapkan lima prinsip:

- (1) Jika penyelesaiannya meragukan, hakim harus berhati-hati dalam menerapkan upaya hukumnya sendiri;
- (2) kehati-hatian harus dilakukan jika Parlemen menolak peluang untuk menyelesaikan suatu kesulitan yang diketahui atau telah membuat undang-undang namun membiarkan kesulitan tersebut tidak ditangani;
- (3) permasalahan kebijakan sosial yang disengketakan kurang cocok untuk intervensi peradilan dibandingkan permasalahan hukum semata;
- (4) doktrin-doktrin hukum yang mendasar tidak boleh diabaikan begitu saja;
- (5) Hakim tidak boleh melakukan perubahan kecuali dapat mencapai finalitas dan kepastian.

Karena semua alasan ini, Lord Lowry menolak upaya pengadilan yang lebih rendah untuk menghapuskan anggapan yang dapat disangkal bahwa anak-anak yang berusia di atas 10 tahun namun di bawah 14 tahun secara hukum tidak mampu melakukan kejahatan. (Untuk alasan serupa, House of Lords di *Kingston [1995] 2 AC 355* menolak untuk membuat pembelaan luas atas keracunan paksa dan di *Clegg [1995] 1 AC 482* menolak pembelaan diri yang berlebihan karena keputusan untuk mengurangi pelanggaran mulai dari pembunuhan hingga pembunuhan tidak disengaja dalam keadaan seperti itu adalah hal yang harus dilakukan Parlemen, meskipun Lord Lloyd bersedia mengubah undang-undang tersebut, bahkan jika ada pertanyaan tentang kebijakan sosial.) Kasus seperti *Shaw* tidak akan bertahan dalam penerapan lima prinsip Lord Lowry: setidaknya prinsip (3) dilanggar. Menarik untuk membandingkan pedoman ini dengan perubahan undang-undang yang dilakukan hakim baru-baru ini. Misalnya, pembaca diajak untuk mempertimbangkan berapa banyak dari ketentuan

tersebut yang dilanggar ketika House of Lords menghapuskan kekebalan suami dalam pemerkosaan (R [1992] 1 AC 599). Keputusan ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pada tahun 1970. Harus dikatakan bahwa perubahan-perubahan besar dalam hukum dalam 40 tahun terakhir mungkin tidak semuanya melanggar pedoman ini. Berbagai upaya untuk mendefinisikan niat dan kecerobohan, yang dibahas dalam Bab 3, diperbolehkan menurut mereka.

House of Lords dalam Jones [2006] UKHL 16 mengatakan bahwa pengadilan tidak dapat lagi melakukan pelanggaran. Tugas itu adalah untuk Parlemen. Hal ini bahkan terjadi ketika apa yang diusulkan untuk diterapkan dalam hukum Anglo-Welsh sudah merupakan kejahatan dalam hukum kebiasaan internasional, yaitu agresi terhadap suatu negara. Merupakan 'prinsip demokrasi yang penting di negara ini', kata Lord Bingham, 'bahwa mereka yang mewakili rakyat di Parlemen, bukan eksekutif atau hakim, lah yang berhak memutuskan tindakan apa yang harus dianggap sebagai kebohongan. sejauh ini berada di luar batas-batas yang dapat diterima dalam masyarakat kita sehingga dapat menimbulkan hukuman pidana.'

Kekuasaan hakim untuk menciptakan pelanggaran baru tidak diperlukan dalam negara demokrasi, dan lembaga peradilan menyadari bahwa secara teori, lembaga tersebut tidak boleh menciptakan undang-undang pidana baru. Itulah alasan mengapa di R pengadilan menyatakan bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut. Pengadilan tidak memiliki informasi sosio-ekonomi yang dimiliki Parlemen ketika memutuskan untuk mengesahkan RUU, misalnya undang-undang. Inggris tidak memiliki laporan 'Brandeis' yang mengharuskan AS untuk memutuskan dampak dari keputusan tersebut, meskipun praktik yang berkembang di beberapa bidang hukum untuk memiliki seorang pengacara yang diberi pengarah sebagai *amicus curiae* (secara harfiah berarti 'teman pengadilan') mungkin akan membawa manfaat tertentu. Untuk memperbaiki kekurangan ini, dan mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan keputusan yang dimiliki Parlemen untuk melaksanakan undang-undang. Parlemen tidak selalu mengeluarkan undang-undang mengenai hal-hal yang kontroversial dan beberapa undang-undang tidak dirancang dengan baik atau diintegrasikan ke dalam undang-undang yang ada, namun teori konstitusionalnya jelas: Parlemen membuat undang-undang dan pengadilan menerapkannya. Doktrin kedaulatan legislatif parlementer ini mendapat serangan dalam urusan Uni Eropa, namun dalam hukum pidana, tesis ini tetap berlaku. Selain itu, Parlemen dapat membuat undang-undang kapan pun mereka menginginkannya dan dengan cara yang dianggap tepat oleh pemerintah saat itu. Hal ini tidak perlu menunggu sampai perkara tersebut diajukan ke hadapannya oleh pihak penuntut seperti yang dilakukan oleh pengadilan. Dan para hakim dibatasi hanya untuk membahas pokok persoalan yang ada di hadapan mereka: pokok apa pun yang tidak relevan dengan putusan disebut *diktum obiter*, yang tidak perlu diterapkan dalam kasus-kasus selanjutnya (lihat juga bagian selanjutnya). Oleh karena itu, Parlemen dapat membuat undang-undang yang ditujukan untuk kejahatan, yang sering disebut kejahatan, jika pemerintah menghendakinya. Dalam waktu yang belum terlalu lama, undang-undang tersebut telah disahkan dengan cukup cepat, misalnya Undang-undang Larangan Sunat Perempuan tahun 1985, Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer tahun 1990, dan Undang-undang

Pencurian (Amandemen) tahun 1996. Untuk memungkinkan sistem peradilan, yang tidak bertanggung jawab secara demokratis, untuk menciptakan sistem hukum baru. pelanggaran memberinya terlalu banyak kekuatan.

Namun terkadang, Parlemen tidak mengambil tindakan dan pengadilan mungkin, dengan sedikit keengganan, memutuskan untuk mengubah undang-undang tersebut. Lord Millett di K [2002] 1 AC 462 mengajukan permohonan yang tulus:

. . . Usia untuk mencapai persetujuan sudah lama tidak lagi mencerminkan kehidupan sehari-hari, dan dalam hal ini Parlemen telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga agar hukum pidana tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Saya yakin bahwa diperkenalkannya sedikit demi sedikit berbagai unsur dalam Pasal 14 [UU Pelanggaran Seksual tahun 1956, kejahatan penyerangan tidak senonoh, sejak dicabut], ditambah dengan kegagalan terus-menerus Parlemen dalam merasionalisasi cabang undang-undang ini bahkan sampai sejauh mana upaya menghilangkan absurditas yang telah diidentifikasi oleh pengadilan, berarti bahwa kita tidak boleh memaksakan diri untuk mencapai koherensi internal bahkan dalam satu pelanggaran pun. Ketidakadilan adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi konsistensi.

Penerimaan umum para hakim bahwa mereka secara konstitusional tidak mampu menciptakan kejahatan baru tidak mencakup dua hal. Yang pertama adalah bahwa mereka dapat menerapkan undang-undang yang ada saat ini pada keadaan-keadaan baru meskipun batasan antara tidak menciptakan kejahatan baru dan memperluas kejahatan lama mungkin sempit. Ada pelanggaran berdasarkan ss 23 –24 dari Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang 1861 yaitu memberikan sesuatu yang berbahaya kepada seseorang. Jika terdakwa membuat tas berisi lem dan mengundang sahabatnya untuk mengendusnya, pengadilan harus memutuskan apakah lem tersebut berbahaya dan apakah, jika demikian, lem tersebut diberikan sesuai dengan arti undang-undang. Undang-undang tersebut sudah ada, namun permasalahannya masih baru. Keputusan serupa juga diambil oleh House of Lords di Irlandia; Burstow [1998] 1 AC 147, yang menyatakan bahwa meskipun perancang undang-undang tahun 1861 tidak memikirkan bahaya kejiwaan, namun undang-undang tersebut harus ditafsirkan menurut definisi akhir abad ke-20 dan oleh karena itu 'kerusakan' termasuk 'kerusakan kejiwaan' membahayakan.' Dalam jargon undang-undang, Undang-undang tahun 1861 adalah 'selalu berbicara'. (Untuk undang-undang yang mengatur tentang penjualan alat penghisap lem, lihat Undang-Undang tentang Zat yang Memabukkan (Pasokan) tahun 1985: Pengadilan Inggris tidak dapat mengungkapkan kejahatan seperti yang dilakukan Parlemen.) Kedua, para hakim tidak menghindari pembentukan pembelaan baru. Perkembangan pembelaan terhadap tekanan keadaan (lihat Bab 7) telah melemahkan banyak hal yang sebelumnya tidak mengakui perlunya pembelaan. Komisi Hukum mengusulkan dalam Laporannya No. 218, Legislasi KUHP – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Prinsip-Prinsip Umum, 1993, untuk mendukung pembentukan peradilan dan pengembangan pertahanan 'untuk mengakui perubahan keadaan atau untuk menghilangkan kesenjangan yang tidak dapat dibenarkan dalam hal ini. pembelaan yang ada' (paragraf 27.8). Tiga prinsip yaitu tidak menciptakan pelanggaran baru, penerapan pelanggaran lama dengan fakta baru, dan

kemungkinan pengembangan pembelaan baru, akan dipertahankan dalam rancangan KUHP, jika diberlakukan (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini). Mungkin kemampuan untuk menciptakan pembelaan baru harus dibatasi pada alasan-alasan (lihat Bab 7), dimana kita melihat pada kondisi mental terdakwa, bukan pada apakah perilakunya dapat dibenarkan. Hukum harus menetapkan apa yang dibenarkan.

Pemberlakuan rancangan KUHP (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini) tidak akan menghapuskan pelanggaran hukum common law. Pelanggaran besar seperti gangguan publik dan konspirasi untuk menipu akan tetap ada.

Beban pembuktian yang bersifat bukti dan hukum

Hukum pidana Inggris sebagian besar memberi terdakwa manfaat dari keraguan (namun, karya Ashworth dan Blake yang dikutip di bagian Bacaan Lebih Lanjut menunjukkan bahwa 40 persen pelanggaran yang dapat diadili berdasarkan dakwaan membalikkan asas praduga tak bersalah; penulis menulis tentang sikap santai Parlemen yang memberikan beban persuasi kepada terdakwa). Para pengadil faktanya, apakah juri, magistrates atau Hakim Distrik (Magistrates' Court), hanya dapat menjatuhkan hukuman jika mereka yakin akan kesalahan terdakwa. Hukuman harus diterapkan hanya jika sudah pasti bahwa terdakwa melakukan pelanggaran. Prinsip dan pengecualiannya dijelaskan secara rinci di bagian ini.

Ada perbedaan antara pembuktian dan beban pembuktian hukum. Perbedaannya dapat diilustrasikan dengan mengacu pada otomatisme (lihat Bab 9). Sebelum terdakwa dapat mengandalkan pembelaan ini, ia harus mengemukakan beberapa bukti bahwa ia bertindak secara otomatis ketika, misalnya, ia memukul kepala kekasihnya dengan asbak yang berat. Buktinya bisa berupa keterangan saksi bahwa dia melihat apa yang terjadi atau laporan dari psikiater. Dalam istilah hukum dia harus mengemukakan atau memimpin bukti. Jika ia tidak mengemukakan bukti-bukti tersebut, pembelaannya akan gagal pada tahap tersebut dan penuntut tidak perlu memberikan bukti bahwa pembelaannya tidak akan berhasil. Jika ia melakukan hal tersebut, maka penuntut harus membuktikan bahwa ia bertindak secara otomatis. Bebannya disebut beban pembuktian atau tanggung jawab pembuktian. Beban penuntutan adalah beban hukum.

Beban bukti

Beban pembuktian berarti bahwa terdakwa harus mengemukakan bukti-bukti yang dapat menimbulkan keraguan di benak para juri yang berakal sehat. Seperti dapat dilihat dari penjelasan di atas, dalam sebagian besar pelanggaran, Kerajaan tidak perlu menolak pembelaan apa pun yang mungkin dimiliki terdakwa. Harus menunjukkan *actus reus* dan *mens rea*, jika ada. Jika terdakwa ingin mengandalkan pembelaan, ia harus mengajukan pembelaan dan menunjukkan bukti yang mendukung, seperti yang dikatakan Lord Diplock sehubungan dengan kesalahan dalam *Sweet v Parsley* [1970] AC 132. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pembelaan diri, otomatisme, dan pembelaan diri. paksaan.

Beban hukum

Di sebagian besar bidang hukum pidana, penuntut harus membuktikan *actus reus* dan *mens rea* 'tanpa keraguan'. Artinya, para pengadil fakta (juri atau hakim) harus yakin bahwa terdakwa bersalah. Jika otoritas diperlukan untuk proposisi ini, hal ini dapat ditemukan dalam

pidato terkenal Viscount Simon dalam *Mancini v DPP* [1942] AC 1, yang mengubah undang-undang sebelumnya:

Tidak peduli apa dakwaan atau di mana persidangannya, prinsip bahwa penuntut harus membuktikan kesalahan tahanan [istilah kuno untuk terdakwa] adalah bagian dari hukum umum Inggris dan tidak ada upaya untuk mengurangi kesalahan tersebut.

'*Benang Emas*' hukum pidana Inggris adalah tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan tanpa keraguan. Mengenai keputusan *Mancini v DPP*, J. C. Smith menulis ('The praduga tak bersalah' (1987) 38 NILQ 223 at 224): 'Menurut pendapat saya, House of Lords tidak pernah melakukan tindakan yang lebih mulia di bidang hukum pidana daripada pada hari itu.' Pernyataan yang lebih modern adalah pernyataan Hodgson LJ dalam *More* [1987] 1 WLR 1578: 'Tugas pertama penuntut adalah memuaskan setiap juri, bahwa setiap unsur pelanggaran telah dilakukan.' Prinsip ini juga berlaku untuk pelanggaran ringan (lihat Bab 10) bahkan ketika Parlemen telah membebani terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan secara penuh.

Prinsip yang sama berlaku untuk sebagian besar pertahanan. Penuntut, misalnya, harus menyangkal paksaan dan membela diri. Sebaliknya, kasus-kasus lama tidak lagi berwibawa. Terhadap prinsip ini ada tiga, mungkin empat, pengecualian. Pengecualian ini menuai kritik. Pasal 6(2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa siapa pun 'yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum'. Yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tidak membantu terdakwa: sejauh ini tidak ada upaya untuk memberikan beban pada terdakwa yang berhasil. Namun, House of Lords dengan mayoritas empat banding satu memutuskan dalam *Lambert* [2002] 2 AC 545, dengan mengandalkan Pasal 6(2), bahwa frasa 'itu akan menjadi pembelaan bagi terdakwa untuk membuktikan' dalam pasal 28(2) Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba tahun 1971 ditafsirkan bertentangan dengan peraturan sebelumnya karena hanya memberikan beban pembuktian kepada terdakwa. Ini merupakan penafsiran yang luar biasa, meskipun terdapat asas praduga tak bersalah dalam Pasal 6(2). Simak juga pembahasannya dibawah ini. Tidak jelas pada saat itu apakah keputusan ini mengubah semua keputusan yang merugikan lainnya. Diperkirakan tidak. Lord Steyn dengan tegas menyatakan hal itu dan tidak ada seorang pun yang tidak setuju. Itu adalah keputusan yang sangat penting. Dalam *C* [2002] Crim LR 316 dinyatakan bahwa menempatkan tanggung jawab pada terdakwa untuk membuktikan tidak adanya niat untuk menipu setelah penuntut membuktikan penyembunyian hutang melanggar Pasal 6 (2). Namun, Pengadilan yang sama dalam *L v DPP* [2002] Kriminal LR 320 memutuskan bahwa memberikan beban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia mempunyai alasan yang baik atau wewenang yang sah untuk membawa pisau kunci di tempat umum setelah penuntut selesai. membuktikan bahwa ia memang memiliki pisau jenis itu di tempat umum tidak bertentangan dengan Pasal 6(2). Pengadilan mengatakan bahwa tidaklah proporsional untuk membebaskan tanggung jawab kepada terdakwa. Hal serupa terjadi pada *Sliney v Havering London Borough Council* (2002) 20 November, tidak dilaporkan (CA). Pengadilan mempertimbangkan konteks sosial dari ketentuan tersebut, efektivitas hukum dan hukuman maksimum.

Ada kemunduran dari Lambert dan pendiriannya saat ini adalah bahwa beban pembuktian terbalik dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 6(2). Dalam Johnstone [2003] 1 WLR 1736 (HL) Lord Nicholls mengatakan: 'Pengadilan akan mencapai kesimpulan yang berbeda dari badan legislatif [mengenai beban balik] hanya jika jelas bahwa badan legislatif kurang mementingkan hak asasi manusia. dari seseorang untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.' Pengadilan Banding mengikuti Johnstone dan lebih memilih Lambert dalam Referensi Jaksa Agung (No. 4 tahun 2004) [2005] 1 WLR 2819 sebagai otoritas selanjutnya. Kasus ini memberikan daftar faktor. Di tingkat banding, dimana kasus ini juga dikenal sebagai Sheldrake, [2005] 1 AC 264 Lords mengatakan bahwa pertanyaan sebenarnya untuk setiap pelanggaran adalah apakah beban terbalik konsisten dengan persidangan yang adil. Mereka membangkitkan kembali Lambert, dengan berpendapat bahwa penghormatan harus diberikan pada fakta bahwa Parlemen telah mengenakan tanggung jawab kepada kami terhadap terdakwa. Kasus-kasus sebelumnya yang disebutkan dalam paragraf terakhir telah disetujui. Undang-undang tersebut dirangkum oleh Lord Bingham: 'relevan dengan penilaian apa pun mengenai kewajaran atau proporsionalitas adalah kesempatan yang diberikan kepada terdakwa untuk membantah anggapan tersebut, pemeliharaan hak-hak terdakwa, fleksibilitas dalam penerapan anggapan tersebut, retensi oleh pengadilan. tentang kekuasaan untuk menilai bukti, pentingnya hal yang dipertaruhkan dan kesulitan yang mungkin dihadapi penuntutan jika tidak ada anggapan'. Kasus terbaru adalah Keogh [2007] EWCA Crim 528. Pengadilan memutuskan bahwa ss 2 – 3 dari Undang-Undang Rahasia Resmi tahun 1989, yang menempatkan beban pembuktian yang sah pada terdakwa, harus dibaca hanya memberikan beban pembuktian pada dirinya. karena memberikan beban hukum kepadanya adalah hal yang 'tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan' terutama karena terdakwa harus membuktikan salah satu elemen utama dari pelanggaran yang dilakukannya.

Penyakit jiwa

Agar terdakwa dapat memperoleh pembelaan ini, ia harus menunjukkan bahwa ia tidak waras pada saat melakukan pelanggaran. Standar pembuktiannya adalah pada 'keseimbangan probabilitas'. Frasa tersebut pada dasarnya berarti bahwa jika kemungkinan besar terdakwa tidak waras, maka ia mempunyai pembelaan. Standar ini dinyatakan dalam kasus-kasus seperti *Sodeman v R* [1936] 2 All ER 1138, keputusan Dewan Penasihat (PC) yang telah diterima sebagai pernyataan hukum Inggris. Alasan hukum yang diberikan atas pengecualian ini adalah bahwa setiap orang dianggap waras; oleh karena itu, terdakwa harus membuktikan kegilaannya: *M'Naghten (1843)* [1843 –60] All ER Rep 229. Dampaknya adalah jika juri tidak yakin, maka terdakwa tidak mempunyai pembelaan. Alasan utama dilakukannya pembalikan beban pembuktian adalah bahwa terdakwa mempunyai pengetahuan tertentu. Misalnya, dalam tindak pidana kepemilikan barang yang diduga bertujuan teroris, terdakwa harus membuktikan bahwa barang tersebut bukan untuk tujuan teroris; informasi itu ada dalam pengetahuannya. Dalam DPP, *ex parte Kebilene* [2000] 2 AC 326 (HL) Lord Hope mengacu pada sifat ancaman (misalnya terorisme) yang dirancang untuk diberantas oleh ketentuan undang-undang. Lord Steyn, yang disetujui oleh Lords Slynn dan Cooke, mengatakan bahwa beban pembuktian terbalik yang terdapat dalam Undang-Undang

Pencegahan Terorisme 1989 dapat dianggap hanya menempatkan beban pembuktian pada terdakwa.

Parlemen secara tegas memberikan beban kepada terdakwa

Sebagaimana dinyatakan dalam pidato Viscount Simon dalam *Mancini v DPP* yang dikutip di atas, aturan umum tentang tanggung jawab pembuktian adalah masalah hukum adat. Parlemen dapat mengubah beban berdasarkan undang-undang dan hal ini telah dilakukan beberapa kali. Berikut ini adalah contohnya. Pasal 4(1) Undang-Undang Bahan Peledak tahun 1883 memberikan pembelaan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia membuat bahan tersebut untuk tujuan yang sah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, terdakwa harus membuktikan bahwa ia mempunyai pembelaan atas tanggung jawab yang berkurang. Beban pembuktian terbalik ini tidak melanggar Pasal 6(1) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu masalah dalam pasal 2 terjadi ketika pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab dan provokasi diajukan secara bersamaan. Penuntut harus menyangkal provokasi dan pembela harus membuktikan berkurangnya tanggung jawab. Namun keduanya mungkin muncul dari fakta yang sama. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Pencegahan Kejahatan tahun 1953, terdakwa mendapat pembelaan jika dia dapat menunjukkan bahwa dia mempunyai wewenang yang sah atau alasan yang masuk akal untuk membawa senjata ofensif. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Ketertiban Umum tahun 1986 yang mendefinisikan kerusuhan:

. . . Barangsiapa yang mengganggu kesadarannya karena mabuk, harus dianggap sadar akan apa yang akan ia sadari jika tidak mabuk, kecuali ia menunjukkan bahwa mabuknya itu bukan karena perbuatannya sendiri atau bahwa hal itu semata-mata disebabkan oleh penggunaan atau penggunaan suatu zat. substansi selama perawatan medis.

‘Pertunjukan’ dimaksudkan untuk memberikan beban hukum kepada terdakwa, namun dapat diartikan sebagai hanya memberikan beban pembuktian kepada terdakwa. Komisi Hukum mengusulkan dalam Laporannya No. 229, Perundang-undangan KUHP: Mabuk dan Tanggung Jawab Pidana, 1995, bahwa beban harus dibebankan pada penuntutan.

Mengikuti Lambert, mungkin banyak beban hukum yang dibebankan pada pembela ketika suatu unsur pelanggaran sedang dibahas sekarang harus dibaca sebagai beban yang bersifat bukti saja. Meskipun ketentuan-ketentuan ini dipandang sebagai pengecualian, persepsi tersebut belum tentu benar. Andrew Ashworth (‘Apakah hukum pidana merupakan tujuan yang sia-sia?’ (2000) 116 LQR 225 di 228) melaporkan hasil survei yang dilakukannya terhadap kejahatan yang terjadi pada tahun 1997. Ia menemukan bahwa ‘sebagian besar pelanggaran baru ditandai dengan ketentuan tanggung jawab terbalik untuk pengecualian. [Ciri seperti itu terletak] sangat jauh dari konsepsi hukum pidana yang dianut oleh banyak dosen universitas dan praktisi kriminal. Memang [itu] tidak konsisten dengan unsur-unsur utama hukum pidana Inggris itu penuntut memikul beban untuk membuktikan kesalahannya.’ Apabila Parlemen menempatkan beban pembuktian pada terdakwa, maka standar

pembuktiannya didasarkan pada keseimbangan probabilitas, kecuali jika Parlemen menyatakan sebaliknya.

'Pengecualian, pengecualian, ketentuan, alasan atau kualifikasi' dalam pelanggaran hukum'. Dalam Hunt [1987] AC 352, terdakwa didakwa dengan kepemilikan morfin secara tidak sah yang bertentangan dengan pasal 5(2) Undang-undang Penyalahgunaan Narkoba tahun 1971. Peraturan Penyalahgunaan Narkoba tahun 1973, Bagian 1, ayat 3 dengan ketentuan:

[a] persiapan obat apa pun. . . morfin yang mengandung tidak lebih dari 0,2 persen morfin. . . menjadi persiapan yang digabungkan dengan satu atau lebih. . . bahan sedemikian rupa sehingga. . . morfin tidak dapat diperoleh kembali dengan cara yang mudah digunakan atau dengan hasil yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. . .

tidak berada dalam angka 5. Penuntut tidak memberikan bukti yang menunjukkan persentase morfin dalam bubuk yang ditemukan terdakwa. Bahan lain dalam bubuk itu adalah kafein dan atropin. House of Lords mengizinkan bandingnya.

Pidato paling sederhana disampaikan oleh Lord Templeman. Penuntut telah mengemukakan fakta-fakta yang mungkin atau mungkin tidak menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Tidak terbukti bahwa terdakwa memiliki morfin lebih dari 0,2 persen. Lord Ackner berpendapat bahwa Parlemen dapat memberikan beban pembuktian kepada terdakwa baik secara tegas maupun 'dengan implikasi yang diperlukan'. Ketika memutuskan apakah beban tersebut berdampak pada terdakwa, pengadilan harus melihat tidak hanya pada bahasa pembuatan undang-undang tetapi juga pada substansi dan dampaknya. Konsekuensi praktisnya juga dapat diselidiki.

Jika hasil dari memegang beban pembuktian itu akan melakukan penuntutan sangat sulit atau membebani dengan konsekuensi bahwa tujuan undang-undang tersebut akan gagal secara signifikan, maka hal ini akan menjadi pertimbangan yang relevan untuk mempertimbangkan bentuk gramatikal undang-undang tersebut.

Faktanya, jaksa hanya perlu memperoleh laporan analis. Oleh karena itu, beban tetap berada pada Kerajaan. Pidato utama disampaikan oleh Lord Griffiths, yang disetujui oleh Lords Keith dan Mackay.

- (a) Statuta dapat menempatkan beban pembuktian secara tersirat pada terdakwa. Pemerintahan sebelumnya telah melakukan hal yang sama dan jika aturannya tidak berlaku, maka undang-undang di Pengadilan Kerajaan dan pengadilan akan melanggar hukum (lihat (c) di bawah). Dalam kritiknya, dapat dikatakan bahwa pengecualian yang tersirat ini merupakan penguraian serius dari 'benang emas' bahwa beban pembuktian ada pada penuntutan.
- (b) Lord Wilberforce benar ketika mengatakan dalam *Nimmo v Alexander Cowan & Sons Ltd* [1968] AC 107 (HL atas banding dari Skotlandia) bahwa 'pengecualian dll., harus dilakukan oleh mereka yang mengandalkannya'.
- (c) Pengadilan Banding dalam *Edwards* [1975] QB 27, yang harus ditegakkan berdasarkan fakta-faktanya sendiri, mengatakan bahwa beban ada pada terdakwa ketika Parlemen

telah melakukan pelanggaran 'yang melarang dilakukannya suatu tindakan kecuali dalam kasus-kasus tertentu. keadaan atau oleh orang-orang dari golongan tertentu atau dengan kualifikasi tertentu atau dengan izin atau izin dari pihak yang berwenang tertentu. Aturan ini, yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai aturan hukum, sebenarnya merupakan panduan konstruksi karena 'setiap kasus harus bergantung pada konstruksi undang-undang tertentu'. Aturan dalam Edwards bagaimanapun juga mempunyai cacat karena tidak terdapat perbedaan yang kuat antara definisi pelanggaran dan pengecualian terhadap definisi tersebut. Misalnya, ada undang-undang yang menyatakan bahwa 'tidak seorang pun boleh memasuki County North Yorkshire tanpa paspor'. Undang-undang ini dapat dirumuskan ulang menjadi 'tidak seorang pun boleh memasuki wilayah North Yorkshire, kecuali orang tersebut telah memperoleh paspor'. Kedua versi tersebut memiliki arti yang sama, namun jika aturan dalam Edwards benar, maka terdakwa harus membuktikan bahwa ia memiliki paspor pada versi kedua, sedangkan pada versi pertama, penuntut harus menyangkal bahwa ia memang memiliki paspor. Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa absurdnya Edwards. Seseorang dapat merumuskan kembali serangan dan pertahanan menjadi serangan yang sempit. Aturan yang sama berlaku apakah persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan atau ringkasan: yaitu, baik di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Magistral. Jika yang pertama, Hunt berlaku. Jika yang terakhir, pasal 101 dari Magistrates' Courts Act 1980 menetapkan bahwa:

Dimana terdakwa. . . mengandalkan pembelaannya atas pengecualian, pengecualian, ketentuan, alasan atau kualifikasi apa pun. . . , beban untuk membuktikan pengecualian [dll] ada pada dia.

J. C. Smith, dalam artikelnya tahun 1987 di atas, mencatat kegagalan dalam menerapkan pasal 101, terutama pada alasan yang sah dan pembelaan otoritas yang sah. Contohnya adalah keyakinan akan persetujuan korban, seandainya ia mengetahui keadaannya, dalam tindak pidana pengrusakan. Namun, secara umum efek utama dari Hunt adalah memberikan beban pada terdakwa ketika pembelaan menurut undang-undang diberikan. Oleh karena itu, setelah Hunt, aturan tentang pengecualian merupakan aturan konstruksi, bukan hukum: aturan tersebut merupakan interpretasi undang-undang. Oleh karena itu, pelanggaran apa pun (yang dapat diadili di Pengadilan Kerajaan atau Pengadilan Magistral) diperlakukan sama di Pengadilan Mahkota dan pengadilan hakim.

- (d) Apabila Parlemen memberikan beban pembuktian kepada terdakwa, maka ialah yang menanggung beban hukum dan bukan hanya beban pembuktian saja.
- (e) Mengenai fakta, beban pembuktian tetap ada pada penuntut umum. Karena mengkonsumsi morfin dalam satu bentuk tetapi tidak dalam bentuk lain merupakan suatu pelanggaran, maka penuntut harus membuktikan bahwa morfin tersebut dalam bentuk yang dilarang. Jika tidak dapat melakukannya, terdakwa dibebaskan. Hal ini mudah bagi terdakwa, karena zat tersebut mungkin telah disita oleh polisi atau mungkin jumlahnya terlalu kecil untuk dianalisis lebih lanjut atau mungkin telah

dimusnahkan selama analisis. Selain itu, karena kepemilikan narkoba merupakan pelanggaran berat (lihat Bab 4), ambiguitas harus diselesaikan demi kepentingan terdakwa. Oleh karena itu, paragraf 3 Sch 1 Peraturan Penyalahgunaan Narkoba tahun 1973 tidak menyatakan pengecualian tetapi apa yang harus dibuktikan oleh penuntut. Jenis-jenis argumen yang digunakan dalam Hunt akan digunakan dalam kasus-kasus selanjutnya untuk memutuskan apakah pengecualian dalam suatu undang-undang (aturan ini tidak dapat diterapkan pada pelanggaran hukum umum, karena ini merupakan salah satu konstruksi undang-undang) menempatkan beban pembuktian pada terdakwa. Tindakan tersebut harus dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan tata bahasa pada bagian yang memuat pelanggaran. Dalam memutuskan apakah Parlemen bermaksud untuk membebani terdakwa, kita harus melihat kepraktisan. Jika salah satu pihak mengalami kesulitan yang serius dalam membuktikan sesuatu, maka ada kesimpulan bahwa pihak tersebut tidak menanggung beban tersebut. Itu juga menjadi faktor apakah kejahatannya serius atau tidak. Jika kasusnya serius, kemungkinan besar pihak penuntutlah yang menanggung tanggung jawabnya. Beban ini sepertinya tidak akan ditimpakan pada terdakwa, karena tidak mudah untuk berasumsi bahwa Parlemen tidak bermaksud melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Namun, harus dikatakan bahwa House of Lords in Hunt bisa saja memberikan beban pembuktian pada penuntutan, asalkan Parlemen secara tegas menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, keputusan akan berada di tangan Parlemen dan bukan pengadilan. Pemerintah terpilih harus mengambil keputusan seperti itu. Hunt pasti akan mendapat lebih banyak kritik karena tuntutan Lambert diterima oleh pengadilan Inggris.

Kasus pertama yang menerapkan Hunt adalah *Alath Construction Ltd [1990] 1 WLR 1255*. Pengembang didakwa menebang pohon yang tunduk pada perintah pelestarian, bertentangan dengan Undang-undang Perencanaan Kota dan Pedesaan tahun 1971. Perusahaan yang dituduh berpendapat bahwa hal itu tidak dilakukan. Bersalah karena mereka mempunyai pembelaan berdasarkan undang-undang bahwa pohon itu berbahaya. Pengadilan Banding memutuskan bahwa pembelaan ini merupakan pengecualian untuk tujuan Hunt dan oleh karena itu bebannya ada pada terdakwa. Pengadilan menganggap bahwa keputusannya dibenarkan oleh struktur Undang-undang (kejahatan ada di satu bagian, pembelaan di bagian lain), bahasa pembelaan (istilah-istilah dari ayat yang menciptakan pembelaan dimulai 'tanpa merugikan bagian lain mana pun). pengecualian...', menyiratkan bahwa pembelaan yang diberikan juga merupakan pengecualian), dan kepraktisan dalam mengetahui apakah pohon tersebut berbahaya (pengembang lebih mungkin mengetahui bahaya tersebut dibandingkan pemerintah daerah, yang mempunyai tugas untuk menjaga pohon-pohon yang dilindungi.). Pengadilan membedakan Hunt dengan alasan bahwa hal itu berkaitan dengan obat-obatan berbahaya, yang tidak ada hubungannya dengan perintah pelestarian pohon. Dari sudut pandang Hunt, Alath terbuka terhadap kritik:

- (a) Di Hunt, tidak menjadi masalah bahwa penyerangan dan pertahanan berada di bagian yang terpisah, sedangkan di Alath pemisahan tersebut digunakan untuk membenarkan menganggap pertahanan sebagai pengecualian.

- (b) Hunt tidak menyukai penggunaan bahasa undang-undang untuk menentukan apakah pembelaan tersebut merupakan pengecualian untuk tujuan mengalokasikan beban pembuktian, namun Pengadilan Tinggi di Alath justru melakukan hal tersebut. Selain itu, kata-kata pengecualian tersebut berbunyi seperti penyempitan definisi delik daripada pengecualian terhadap delik: terdakwa tidak bersalah karena pohon itu berbahaya, bukan terdakwa yang dibebaskan dari hukuman karena pohon itu berbahaya.

Mungkin juga ada argumen bahwa karena Parlemen tidak menentukan pihak mana yang harus menanggung beban pembuktian, Parlemen secara tidak langsung menyerahkan tanggung jawab penuntutan sebagai masalah hukum pembuktian. Lord Steyn dalam *Lambert* dengan tegas menyatakan bahwa revisi undang-undang yang ditemukan dalam kasus tersebut tidak mempengaruhi undang-undang yang ditetapkan dalam *Edwards*.

Pembebasan *autrefois* dan terpidana *autrefois*

Mungkin saja beban pembuktian terletak pada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia sebelumnya telah dibebaskan atau dihukum dalam suatu persidangan pidana.

Dua hal mengenai beban pembuktian

- (a) Sebelum tahun 1935 dikatakan bahwa jika terdakwa menyebabkan kematian korban, maka ia harus menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai *mens rea* untuk melakukan pembunuhan. Beban ini dibebankan pada penuntutan dalam *Woolmington v DPP* [1935] AC 462. Di seluruh jaringan hukum pidana Inggris, ada satu benang emas yang selalu terlihat, yaitu tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan narapidana. Perkataan Lord Sankey tersebut sering diulang-ulang, namun tidak menjelaskan mengapa benang emas tidak melewati kegilaan dan pengecualian menurut undang-undang. Argumen sebaliknya, yang tidak terkait dengan pembunuhan, adalah bahwa terdawalah yang paling berhak menjelaskan perbuatannya. Jika, misalnya, korban tertembak mati oleh peluru dari pistol berasap yang dipegang oleh terdakwa, yang mendambakan istrinya, maka dapat dikatakan bahwa memberikan beban pembuktian kepada penuntut adalah hal yang tidak masuk akal. Tidak diragukan lagi para penguji fakta memiliki pandangan yang kuat terhadap fakta-fakta tersebut.
- (b) Di bawah pengaruh *DPP v Smith* [1961] AC 290 (HL) diperkirakan bahwa seseorang bermaksud melakukan apa yang merupakan konsekuensi alami dari perilakunya. Dalam istilah hukum, seorang laki-laki dianggap mempunyai akibat wajar dari perilakunya. Jika anggapan ini tidak dapat dibantah, maka pasal 8 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1967 menghapuskannya.

Pengadilan atau juri dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan pelanggaran (a) tidak terikat oleh hukum untuk menyimpulkan bahwa ia bermaksud atau memperkirakan akibat dari tindakannya hanya dengan alasan bahwa hal itu merupakan akibat yang wajar dan mungkin terjadi dari tindakan tersebut, tetapi (b) akan memutuskan apakah ia memang bermaksud atau memperkirakan akibat tersebut dengan mengacu pada semua bukti, dengan menarik kesimpulan dari bukti yang tampak sebagaimana mestinya dalam keadaan.

Bagian 8 membahas bagaimana membuktikan niat atau pandangan ke depan. Ini berkaitan dengan hukum pembuktian atau prosedur. Hal ini tidak berkaitan dengan hukum pidana substantif yang menjadi pokok bahasan buku ini. Oleh karena itu, hal ini tidak mempengaruhi hukum substantif pembunuhan. Kita mungkin mengira bahwa karena pasal 8 tidak mempengaruhi hukum substantif pembunuhan, keputusan dalam DPP v Smith bahwa mens rea pembunuhan mencakup apa yang diperkirakan oleh orang yang masuk akal dalam posisi terdakwa akan terus berlaku setelahnya. Undang-Undang tahun 1957, namun kenyataannya pengadilan dengan cepat memutuskan bahwa bagian DPP v Smith ini dibatalkan oleh pasal 8. Sikap mengejutkan ini terus diambil, seperti terlihat dalam keputusan House of Lords di Woollin [1999] AC 82.

Bagian ini hanya berlaku pada maksud atau pandangan ke depan terdakwa. Di luar pola pikir tersebut, hukum umumlah yang mengatur. Bagian 8 dinyatakan berlaku untuk niat dan pandangan ke depan terhadap hasil, tetapi aturan yang sama berlaku di hukum umum untuk keadaan: DPP v Morgan [1976] AC 182 (HL). Hal ini tidak berlaku jika terdakwa tidak mempunyai niat atau memperkirakan konsekuensinya. Dalam pembunuhan yang tidak disengaja karena kelalaian berat, terdakwa tetap bersalah, baik ia menyadari atau tidak bahwa hal itu akan mengakibatkan kematian. Hal serupa juga terjadi pada kejahatan kelalaian. Sebagai akibat dari konstruksi peradilan, pasal 8 tidak berlaku jika terdakwa dalam keadaan mabuk. Bagian ini merujuk pada pertimbangan juri terhadap 'semua bukti'. House of Lords dalam DPP v Majewski [1977] AC 433 menetapkan bahwa 'semua bukti' berarti 'semua bukti yang relevan secara hukum'. Karena mabuk bukanlah pembelaan terhadap apa yang disebut sebagai pelanggaran niat dasar, maka mabuk bukanlah bagian dari bukti sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

Pembaruan

Rancangan KUHP Komisi Hukum pasal 13 memuat:

- (1) Kecuali ditentukan lain:
 - (a) beban pembuktian setiap unsur pelanggaran dan fakta lain yang dituduhkan atau diandalkan oleh penuntut ada pada penuntutan;
 - (b) apabila bukti diberikan (baik oleh terdakwa atau penuntut) mengenai suatu pembelaan atau fakta lain yang dituduhkan atau diandalkan oleh terdakwa, maka beban ada pada penuntut untuk membuktikan bahwa unsur pembelaan atau fakta lain tersebut tidak terbukti. ada.
- (2) Pembuktian diberikan mengenai suatu pembelaan atau fakta lain yang dituduhkan atau diandalkan oleh terdakwa apabila terdapat bukti yang dapat mengarahkan pengadilan atau juri untuk menyimpulkan bahwa ada kemungkinan yang masuk akal bahwa unsur pembelaan atau fakta lain tersebut ada.

Terdapat pengecualian untuk pelanggaran-pelanggaran Pra-Kode dimana kasus s 101 dari Magistrates' Courts Act 1980 atau 'peraturan atau penafsiran terkait apa pun yang diterapkan pada persidangan atas dakwaan' (yaitu Hunt) terus berlaku (cl 13(6)). Standar pembuktiannya adalah, kecuali ditentukan lain, tanpa keraguan jika penuntut menanggung beban hukum atau keseimbangan kemungkinan jika terdakwa menanggungnya (klausul 13(4)), kecuali jika

pembelaan seluruhnya atau sebagian didasarkan pada bukti bahwa ada orang lain yang bersalah, dan dalam hal ini beban pembuktiannya tidak diragukan lagi (kl. 13(5)).

Pasal 8 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1967 dipertahankan dan dirumuskan kembali dalam pasal 14. Pengadilan atau juri, dalam menentukan apakah seseorang mempunyai, atau mungkin pernah mempunyai, suatu keadaan pikiran tertentu, harus mempertimbangkan semua bukti termasuk, jika diperlukan, ada atau tidaknya alasan yang masuk akal untuk memiliki keadaan pikiran tersebut.

Oleh karena itu rancangan Kode ini menegaskan kembali asas praduga tak bersalah yang ditetapkan dalam *Woolmington v DPP*, di atas, dan memperluas pasal 8 Undang-Undang tahun 1967 untuk mencakup semua pola pikir 'Kode'. Pasal 1(2) Undang-Undang Pelanggaran Seksual (Amandemen) tahun 1976, yang menyatakan bahwa juri dapat mempertimbangkan kewajaran kesalahan dalam memutuskan apakah terdakwa (secara jujur) melakukan kesalahan, termasuk dalam kelas 14; namun, Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 memberikan pembelaan terhadap pemerkosaan hanya jika terdakwa yakin akan persetujuan korban atas dasar alasan yang masuk akal. Rancangan KUHP juga tetap mempertahankan standar pembuktian yang berlaku saat ini – tidak diragukan lagi jika bebannya ada pada penuntutan; pada keseimbangan probabilitas ketika hal itu terjadi pada terdakwa (cl 13(4)).

Pasal 6(2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: 'Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.' Konvensi ini dimasukkan ke dalam hukum Inggris melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998, yang mulai berlaku berlaku di Inggris pada tanggal 2 Oktober 2000. Menempatkan beban pembuktian pada terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 6(2). Lords berpendapat dalam *Lambert*, di atas, bahwa beban pembuktian pada terdakwa adalah beban pembuktian dan bukan beban hukum. *Lambert* datang untuk menerima kritik. Menggantikan 'menyampaikan bukti yang cukup' (yang merupakan arti dari beban pembuktian) dengan 'membuktikan' (beban hukum) saja tidak akan menghasilkan apa yang tampaknya dilakukan oleh Yang Mulia. Mereka ingin terdakwa mendapat pembelaan hanya jika para juri merasa ragu; mereka tidak bermaksud agar terdakwa mendapatkan pembelaan namun untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat menimbulkan keraguan yang beralasan.

Reformasi hukum pidana, Komisi Hukum dan RUU KUHP

Komite Revisi Hukum Pidana adalah badan pertama yang melakukan reformasi, melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam Undang-Undang Pencurian yang pertama (1968) tetapi sekarang sudah hampir mati. Komisi Hukum, yang didirikan pada tahun 1965, telah mengambil alih perannya dalam hukum pidana dan telah mendorong beberapa reformasi besar selama 30 tahun terakhir, seperti Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971. Pendekatannya dirangkum dalam Laporan No. 228, *Konspirasi untuk Menipu*, 1994, paragraf 1.18:

Komisi memandang kodifikasi hukum pidana sebagai ciri utama pekerjaannya . . . Hukum pidana mengontrol pelaksanaan kekuasaan negara terhadap warga negara, dan perlindungan warga negara terhadap perilaku yang melanggar hukum, dan penting bahwa

peraturannya harus ditentukan oleh Parlemen dan bukan oleh metode common law yang terkadang serampangan. Hal ini hanya dapat dicapai jika undang-undang tersebut diwujudkan dalam bentuk undang-undang secara komprehensif. Penting juga dari sudut pandang efisiensi, ekonomi dan administrasi peradilan yang tepat bahwa undang-undang tersebut harus dinyatakan dalam istilah yang jelas dan mudah diakses.

Sebuah komentar dibuat oleh Buxton J yang mengatakan secara ekstrajudisial ('Undang-undang Hak Asasi Manusia dan hukum pidana substantif' [2000] Crim LR 331): '... undang-undang kuno yang campur aduk, tambahan-tambahan yang lebih modern, dan banyak sekali keputusan pengadilan harus diganti dengan hukum pidana yang akan menguraikan hukum pidana dalam bahasa yang rasional, mudah diakses, dan modern'. Arden J menulis hal serupa dalam 'Hukum Pidana di Persimpangan Jalan: Dampak Hak Asasi Manusia dari Sudut Pandang Komisi Hukum dan Perlunya Kitab Undang-Undang' [1999] Kriminal LR 489: Hukum Pidana harus 'dipertimbangkan dengan baik, konsisten, koheren dan modern', tidak sebagaimana adanya, 'sangat cacat dan ketinggalan jaman'. Dia dengan tepat menambahkan bahwa kemauan politik diperlukan.

Laporan tersebut, KUHP untuk Inggris dan Wales (Law Com. No. 177), diterbitkan pada tahun 1989. Sebuah tim yang terdiri dari tiga akademisi telah menyusun versi awal dalam Kodifikasi Hukum Pidana: Laporan kepada Komisi Hukum Law Com . 143 Tahun 1985. Untuk menegaskan bahwa ini bukan merupakan bagian dari undang-undang Inggris tetapi merupakan kumpulan peraturan yang mungkin di kemudian hari akan diberlakukan, maka dalam buku ini disebut rancangan KUHP. Laporan tersebut terdiri dari rancangan RUU, contoh penerapan RUU, dan komentar. Prinsip-prinsip umum dapat ditemukan di Bagian I rancangan Kode Etik ini. Bagian II membahas pelanggaran-pelanggaran tertentu. Prinsip-prinsip umum ini berlaku untuk semua pelanggaran yang diatur dalam Kode Etik ini dan pelanggaran yang terjadi setelahnya, termasuk kejahatan seperti pelanggaran lalu lintas jalan raya yang tidak termasuk dalam Bagian II. Diharapkan bahwa beberapa kejahatan yang tidak termasuk dalam Bagian II pada saat ini akan terwujud di dalamnya, namun beberapa bidang hukum, misalnya. pelanggaran lalu lintas jalan, akan tetap diperlakukan tersendiri demi kenyamanan pengguna peraturan perundang-undangan. Jika diberlakukan, Kode ini akan berlaku untuk 90 persen dari seluruh pelanggaran yang dapat didakwakan. Laporan ini cukup komprehensif mengenai pekerjaan Komisi sebelumnya dalam bidang-bidang seperti tindak pidana pengrusakan, percobaan pembunuhan dan pemalsuan. Hukum tidak hanya dinyatakan kembali. Ada amandemen yang bertujuan untuk memperjelas dan mereformasi beberapa bagian undang-undang. Misalnya, usulan lembaga reformasi hukum seperti Komite Revisi Hukum Pidana dimasukkan. Namun Komisi Hukum pada kesempatan ini tidak memasukkan seluruh amandemen yang dianggap perlu dalam hukum pidana, misalnya. sehubungan dengan tanggung jawab kaki tangan. Komisi Hukum berpandangan bahwa perubahan tersebut adalah untuk Parlemen. Diharapkan bahwa pemberlakuan rancangan KUHP ini akan mengurangi lamanya persidangan dan upaya banding serta meningkatkan akses dan pemahaman terhadap hukum pidana. Tema rancangan Kode ini dinyatakan sebagai aksesibilitas, pemahaman, konsistensi dan kepastian. Kebutuhan akan kepastian merupakan hal yang

sangat penting dalam hukum pidana, yang antara lain mengatur hubungan antara warga negara dan negara.

Rancangan Kode ini mendapat kritik karena beberapa alasan. Apa pun jenis Kode yang dijalani orang-orang di Inggris dan Wales, akan ada kesulitan dalam akses dan cakupan. Bahkan dengan monitor komputer, kecil kemungkinan setiap orang dapat mengakses semua undang-undang mengenai suatu topik tertentu sepanjang waktu, dan karena fleksibilitas bahasanya, mustahil untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atas suatu pelanggaran sampai dia telah dicoba. Jika undang-undang melarang kendaraan memasuki taman, apakah sepeda anak-anak, sepeda roda satu, kuda, kuda, dan kereta termasuk dalam kendaraan? Kelenturan bahasa Inggris akan tercermin dalam hukum pidana apa pun. Namun rancangan Kode Etik ini dapat dikritik karena alasan lain. Tidak semua pelanggaran dimasukkan. Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan kelalaian utama. (Perlu dipertanyakan mengapa pelanggaran serius seperti menyebabkan kematian karena mengemudi secara berbahaya tidak dimasukkan, terutama ketika banyak pelanggaran ringan yang dimasukkan.) Yang juga dikecualikan adalah pelanggaran narkoba, banyak kejahatan yang sangat spesifik seperti pelanggaran di stadion olahraga dan kejahatan lainnya. peduli dengan perusahaan. Komisi Hukum menganggap bahwa akan merepotkan pengguna jika kejahatan tersebut ditangani dalam Kode, karena pengguna ingin melihat bagian-bagian yang dikecualikan dari undang-undang tersebut dimuat dalam undang-undang terpisah. Namun, mungkin ada argumen bahwa yang terbaik adalah menempatkan semua kejahatan di satu tempat. Rancangan Kode Etik ini bukanlah instrumen reformasi. Beberapa bagian direvisi sesuai dengan rekomendasi (di atas), namun bagian lain yang belum masuk usulan dibiarkan tidak direformasi. Rancangan Undang-Undang ini tetap terbuka untuk interpretasi yudisial mengenai istilah-istilah penting seperti niat, dan kemungkinan putusan yang tidak konsisten mengenai ketidakjujuran dalam pencurian tetap ada. Pilihan Komisi Hukum terhadap perbedaan pandangan terhadap hukum tidak selalu dapat dibenarkan oleh para anggotanya. Jika satu bentuk kecerobohan lebih disukai daripada yang lain demi kepentingan konsistensi, maka akan sama konsistennya jika memilih bentuk yang kedua dibandingkan yang pertama. Pilihan tersebut harus dibenarkan berdasarkan alasan kebijakan. Nilai-nilai tersebut perlu diartikulasikan dan diterapkan.

Saat ini perkembangan hukum pidana kurang disiplin. Meskipun demikian, upaya untuk menghilangkan anomali, menjadikan undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi jika rekomendasi dari badan-badan reformasi diberlakukan, dan menyatakan kembali undang-undang tersebut dalam bentuk yang resmi adalah hal yang bermanfaat. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh rancangan undang-undang ini adalah mengarah pada preferensi terhadap manfaat formal dari sebuah undang-undang dibandingkan dengan prinsip-prinsip keadilan. Tidak ada gunanya memiliki kode yang dapat diakses, kode yang komprehensif, kode yang konsisten, kode tertentu, jika nilai-nilai yang dikandungnya tidak mencapai keseimbangan antara perlindungan sosial dan kebebasan individu. Keutamaan formal menunjukkan di mana batas antara keduanya: mereka tidak menariknya untuk kita. Terlebih lagi, argumen besar yang menentang kodifikasi, yang menganggap bahwa kodifikasi akan menempatkan undang-undang sebagai sebuah

pengekangan, tidak tepat sasaran ketika dipahami bahwa secara konstitusional peran hakim dalam hukum pidana bukanlah membuat undang-undang karena hal tersebut merupakan tugas Parlemen. Jika Parlemen takut untuk mengambil tindakan, maka pengadilan juga harus takut untuk mengambil tindakan. Ada pendapat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998, kebutuhan akan kodifikasi menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Komisi Hukum telah berupaya agar rekomendasinya selaras dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Namun, DPR dan Menteri Dalam Negeri jarang mendengarkan laporan hukum pidana Komisi Hukum.

Perubahan dari undang-undang saat ini

Perubahan-perubahan yang diusulkan dalam rancangan Kode Etik, jika nanti menjadi undang-undang, akan ditangani dengan tepat. Berikut rincian perubahan yang mempengaruhi tanggung jawab.

- (a) Beban pembuktian. Beban pembuktian sehubungan dengan pembelaan atas keracunan yang tidak disengaja dibebankan pada terdakwa.
- (b) Elemen kesalahan minimum. Kecuali jika Parlemen menentukan secara berbeda, terdakwa tidak akan bersalah kecuali ia berani mengambil risiko ('kecerobohan subjektif'). Komisi Hukum dahulu merupakan pendukung kuat doktrin 'subjektivisme'. Seorang terdakwa tidak bersalah ketika ia bermaksud melakukan kejahatan atau jika ia mengetahui bahwa ia menanggung risiko terjadinya akibat tertentu. Faktanya, Komisi tidak pernah sepenuhnya memperdebatkan baik buruknya subjektivisme sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Sejak tahun 1989, Komisi Hukum terkadang menolak usulan ini. Pengadilan mengusulkan sebuah pelanggaran baru yaitu pembunuhan karena kecerobohan (dan pelanggaran serupa bagi perusahaan), merekomendasikan bahwa hanya kesalahan yang masuk akal dalam hal persetujuan yang dapat memberikan pembelaan kepada terdakwa atas pemerkosaan dan penyerangan tidak senonoh (yang memang menjadi undang-undang sebagai akibat dari Pelecehan Seksual). Undang-Undang Pelanggaran tahun 2003 namun diragukan apakah mereka yang mendukung RUU tersebut sudah memikirkan argumen Komisi), dan dalam Lapornya No. 229 tentang mabuk-mabukan telah menarik kembali usulannya dalam Makalah Konsultasi No. pembelaan mabuk bilamana terdakwa tidak memiliki keadaan pikiran yang disyaratkan dalam definisi kejahatan (baik Makalah Konsultasi maupun Laporan disebut Mabuk dan Hukum Pidana).
- (c) Pertahanan. Kesalahan adalah untuk menjadi pembelaan terhadap semua kejahatan dimana terdakwa secara jujur melakukan kesalahan. Kewajaran tidak dituntut. Undang-undang tentang kegilaan telah dirancang ulang sepenuhnya. Ada perubahan dalam hukum paksaan dan keracunan.
- (d) Tanggung jawab perwakilan dan perusahaan. Doktrin delegasi dihapuskan. Undang-undang tentang korporasi diubah.
- (e) Partisipasi. Kecerobohan terhadap keadaan sudah cukup untuk kejahatan utama. Seseorang akan dikecualikan jika ia bertindak 'dengan tujuan menghindari atau

membatasi konsekuensi berbahaya dari pelanggaran tersebut dan tanpa tujuan untuk melanjutkan perbuatannya’.

- (f) Pelanggaran kecil. Undang-undang yang disebut hukum ‘double inchoate’ telah dirasionalisasikan. Kecerobohan terhadap keadaan akan menjadi bagian dari unsur kesalahan jika hal itu cukup untuk melakukan pelanggaran penuh. Akan ada pertanggungjawaban atas persekongkolan dengan pasangan, korban, dan anak di bawah 10 tahun. Aturan dalam *Curr* [1968] 2 QB 944 dibalik: orang yang dihasut tidak lagi harus memiliki unsur kesalahan dalam kejahatan yang dihasut. *Fitzmaurice* [1983] QB 1083 akan dibalik: ketidakmungkinan tidak lagi menjadi pembelaan terhadap hasutan.
- (g) Pelanggaran terhadap orang tersebut. Undang-undang ini direvisi secara substansial. Kementerian Dalam Negeri biasanya menerbitkan makalah konsultasi pada tahun 1998 yang berjudul *Violence: Reforming the Offenses Against the Person Act 1861* (Undang-Undang Kekerasan: Reformasi Pelanggaran terhadap Pribadi tahun 1861), yang bertujuan untuk mereformasi pelanggaran non-fatal, namun pada saat artikel ini ditulis, belum ada kemajuan. Dapat dikatakan bahwa bidang hukum ini adalah bidang yang paling memerlukan modernisasi.
- (h) Pelanggaran seksual. Terdapat beberapa perubahan namun Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 dan berbagai perubahan undang-undang dan peradilan pada periode 1989–2003 telah membuat rekomendasi tersebut menjadi berlebihan.
- (i) Pencurian dan pelanggaran properti lainnya. Perubahan yang sangat kecil.

Aliran dokumen dan laporan dari Komisi Hukum, yang banyak ditangani oleh mantan Komisaris yang kini menjabat Buxton L J, terus berlanjut. Laporan-laporan yang dibuat adalah laporan-laporan yang mengarah pada penghapusan aturan satu tahun dalam pembunuhan dan hukuman bagi para penipu hipotek. Karena kurangnya waktu untuk berunding di parlemen, Komisi Hukum mengusulkan agar Kitab Undang-undang ini tidak disahkan dalam satu undang-undang, melainkan mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur berbagai bidang yang pada akhirnya akan dikonsolidasikan menjadi sebuah undang-undang. Pendekatan ini dikritik karena selektif. Tahap pertama adalah RUU Hukum Pidana yang ditemukan dalam Laporan No. 218, Peraturan Perundang-undangan KUHP Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas-asas Umum, 1993. Makalah konsultasi Kementerian Dalam Negeri yang disebutkan di atas memuat bagian-bagian pelanggaran non-fatal dari Laporan ini, bersama dengan rancangan undang-undang, namun bagian yang bersifat umum dihilangkan. Laporan Selanjutnya juga berisi RUU yang siap diundangkan. Pemerintah belum mengesahkan satu bagian pun dari RUU KUHP, meskipun pada saat penulisan ini, masih ada RUU mengenai pembunuhan korporasi, yang sebagian didasarkan pada Laporan Komisi Hukum.

Seperti yang dikatakan oleh mantan ketua Komisi Hukum, Brooke J, dalam (1994) 158 JP 345, banyak hukum pidana yang ‘memalukan, jika dinilai dari segi kesederhanaan, kejelasan dan aksesibilitasnya’. Uang terbuang sia-sia dan keadilan ditolak karena ketidakpastian hukum. Seperti yang dikatakan Henry LJ dalam *Lynsey* [1995] 2 Cr App R 667 dalam konteks

pelanggaran non-fatal, pengadilan mempunyai hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada menerapkan hukum yang buruk. Kata-kata ini diamini oleh Brooke LJ dalam Baker [1997] Crim LR 497 (CA). Brooke J masih memimpin Komisi Hukum ketika komisi tersebut mengajukan bagian kedua dari upayanya untuk memberlakukan bagian dari rancangan KUHP tahun 1989 ketika dinyatakan bahwa tujuannya khususnya dalam hukum pidana adalah 'untuk membuat hukum lebih sederhana, lebih adil dan lebih adil. lebih murah untuk digunakan': Perundang-undangan KUHP: Mabuk dan Pertanggungjawaban Pidana, Laporan No. 229, 1995, alinea 1.3. Teks buku ini menunjukkan kebenaran pernyataannya. Ketua Komisi Hukum sebelumnya mengatakan bahwa kecuali pemerintah bertindak cepat, pemerintah akan menunjukkan bahwa mereka puas 'menyerahkan pengadilan untuk memerangi kejahatan abad ke-21 dengan senjata abad ke-19' ((2000) *The Times*, 15 Juni, dikutip dalam J. Rowbotham dan K. Stevenson 'Distopia sosial dan utopia hukum?' (2000) 9 *Nottingham LJ* 25 di 37 n 63).

Komisi Hukum masih mengerjakan sebuah undang-undang, dan sejak tahun 2002 telah mengerjakan tujuh bagian yang akan merevisi Rancangan KUHP tahun 1989: unsur-unsur eksternal terutama sebab-akibat, kesalahan, pihak-pihak yang melakukan kejahatan, ketidakmampuan dan gangguan jiwa, pembelaan, pelanggaran pendahuluan dan bukti. Pekerjaan berjalan lambat karena proyek-proyek lain: pertahanan parsial terhadap pembunuhan, membantu dan mendorong kejahatan, dan kematian yang bukan karena kecelakaan atau cedera serius pada anak-anak. Makalah dan laporan konsultasi telah diterbitkan namun pemerintah, meskipun mengatakan dalam *Peradilan Pidana: Jalan ke Depan*, Kantor Dalam Negeri, 2001, bahwa pemerintah lebih menyukai hukum pidana, namun tidak memberikan petunjuk. Pemerintah lebih memilih untuk membuat undang-undang mengenai hal-hal yang menjadi perhatian media dibandingkan melakukan reformasi hukum: itulah sebabnya Undang-undang Pelanggaran Terhadap Manusia tahun 1861 yang kuno masih belum direvisi.

Bagian selanjutnya dari buku ini, Prinsip Umum, menguraikan bidang hukum pidana yang sering disebut 'bagian umum'. Kadang-kadang dikatakan bahwa tidak ada konsep yang disebut dengan 'bagian umum', yang ada hanyalah kumpulan contoh-contoh tunggal. Ada atau tidaknya pelanggaran masih diperdebatkan, namun perbedaan antara prinsip umum dan pelanggaran khusus membantu mengatur materi. Misalnya, seseorang tidak perlu mengulangi undang-undang tentang paksaan atau tanggung jawab tambahan setiap kali suatu pelanggaran disebutkan.

Ringkasan

Bab ini bertujuan memperkenalkan kepada pembaca kemungkinan definisi hukum pidana substantif dan perbedaan antara hukum perdata dan pidana serta prinsip-prinsip dasar atau landasan hukum, khususnya konsep *actus reus*, *mens rea* dan pertahanan. konsep-konsep yang mendasari sebagian besar sisa buku ini. Materi pengantar lainnya mencakup sistem banding dalam perkara pidana, penafsiran yudisial terhadap undang-undang hukum pidana, ruang lingkup hukum buatan hakim di bidang pidana, dan dampak Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 terhadap hukum pidana. Bagian ini diakhiri dengan

pembahasan mengenai beban pembuktian dan beban hukum (fokus pada dampak UU Hak Asasi Manusia terhadap penafsiran yudisial atas undang-undang) dan kodifikasi, khususnya peran Komisi Hukum dalam menyusun rancangan KUHP tahun 1989 dan upaya selanjutnya untuk melakukan pembuktian.

- Prinsip-prinsip dasar hukum pidana: Dengan menggunakan pendekatan Husak dalam bukunya *Filsafat Hukum Pidana*, penulis memandu pembaca melalui batasan-batasan utama hukum pidana: legalitas, *actus reus*, *mens rea*, persetujuan (biasanya dikenal di Inggris dan Wales sebagai 'contemporaneity'), kerugian, penyebab, pembelaan, dan bukti tanpa keraguan). Banyak dari unsur-unsur tersebut seperti *actus reus*, *mens rea* dan pembelaan dibahas secara panjang lebar di bab-bab selanjutnya, namun di sini fokusnya adalah pada legalitas, khususnya dalam konteks Pasal 7(1) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), dan hukum. hak untuk tidak dihukum atas suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak ada, hak untuk tidak melakukan retrospeksi hukum pidana.
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998: Undang-undang ini 'membawa pulang' khususnya hak asasi manusia yang terdapat dalam Konvensi Eropa. Undang-undang tersebut sejauh ini belum memberikan dampak yang besar (misalnya, tidak bertentangan dengan Konvensi untuk menetapkan pelanggaran yang bersifat tanggung jawab ketat: lihat Bab 4 untuk mengetahui arti dari kejahatan tersebut) namun undang-undang ini dapat sangat mempengaruhi definisi pelanggaran dan pelanggaran yang ada saat ini. pertahanan, mis. undang-undang tentang persetujuan mungkin bertentangan dengan Pasal 8, penghormatan terhadap kehidupan pribadi, dan kegilaan tampaknya bertentangan dengan Pasal 5, hak atas kebebasan.
- Upaya untuk mendefinisikan suatu kejahatan: Selama bertahun-tahun, berbagai definisi mengenai 'kejahatan' telah dibuat namun definisi standar yang ada adalah definisi melingkar mengenai 'kesalahan hukum yang dapat diikuti dengan proses pidana yang dapat mengakibatkan hukuman'. (Glanville Williams).
- Perbedaan antara hukum pidana dan perdata: Perbedaannya terletak pada terminologi, pengadilan, prosedur dan hasil persidangan.
- Hierarki pengadilan: Sebagian besar kasus hukum pidana dimulai di pengadilan magistrates dimana kasus-kasus tersebut disidangkan oleh magistrates atau oleh Hakim Distrik (Magistrates' Court), yang sebelumnya disebut 'stipendiaries'; hanya pelanggaran yang sangat serius yang disidangkan di Pengadilan Mahkota, di mana keputusan diambil oleh juri setelah mendengarkan instruksi hakim. Banding dari Pengadilan Mahkota terletak pada Pengadilan Banding dan kemudian ke House of Lords.
- Preseden dalam hukum pidana: Aturan preseden yang normal ada dalam hukum pidana kecuali bahwa Pengadilan Tinggi (Divisi Kriminal) tidak menganggap dirinya terikat oleh keputusan pendahulunya seperti halnya Divisi Perdata. Baru-baru ini Pengadilan Banding memutuskan untuk mengikuti kasus Dewan Penasihat dan lebih memilih kasus House of Lords.

- Penafsiran undang-undang hukum pidana: Kadang-kadang dikatakan bahwa undang-undang yang menimbulkan pelanggaran dibaca demi kebebasan; yaitu, menguntungkan terdakwa. Namun, banyak kasus yang mungkin ditemukan justru sebaliknya, yaitu menghukum orang yang 'ternyata bersalah' meskipun undang-undang tersebut dapat ditafsirkan menguntungkan terdakwa.
- Klasifikasi pelanggaran: Ada beberapa metode untuk mengklasifikasikan kejahatan, termasuk berdasarkan sumbernya (undang-undang atau hukum adat).
- Bolehkah hakim melakukan kejahatan? Jawaban singkatnya dalam seperempat abad terakhir ini adalah 'tidak, tapi mereka mungkin akan menerapkan undang-undang tersebut pada skenario baru.' Namun, larangan virtual terhadap penciptaan pelanggaran tidak berlaku pada pertahanan baru dan perkembangan situasi yang bersifat paksaan adalah contohnya. bagaimana pertahanan baru dapat diciptakan.
- Pembuktian: Dalam hukum pidana, beban pembuktian biasanya terletak pada penuntutan dan standar pembuktian adalah bahwa Mahkamah harus membuktikan setiap unsur pelanggaran tanpa keraguan. Memang benar, prinsip ini berlaku bahkan untuk pembelaan: untuk sebagian besar pembelaan, pihak penuntut harus menyangkal setiap unsur tanpa keraguan. Oleh karena itu, bahkan dalam hal pembelaan, terdakwa tidak perlu membuktikan apa pun: ia diberikan pembelaan jika penuntut tidak dapat menyangkal tanpa keraguan bahwa ia mempunyai pembelaan. Namun, karena Parlemen dapat berbuat apa saja, maka Parlemen dapat memberikan beban pembuktian kepada terdakwa, baik dalam hal pelanggaran maupun pembelaan. Misalnya, Parlemen telah membebani terdakwa untuk membuktikan bahwa ia termasuk dalam pembelaan atas tanggung jawab yang berkurang. Bilamana beban ada pada terdakwa, maka standar pembuktiannya adalah hukum perdata yang 'seimbang dengan probabilitas'. Ada satu pembelaan yang luar biasa, yaitu kegilaan, yang bebannya ditanggung oleh terdakwa berdasarkan hukum umum dan alasan di balik peraturan ini tampaknya adalah bahwa setiap orang dianggap waras: oleh karena itu, terdakwa harus membuktikan bahwa dia gila. . Apabila beban hukum pidana ada pada terdakwa, ada kemungkinan bertentangan dengan Pasal 6(2) ECHR, asas praduga tak bersalah, dan pengadilan Inggris termasuk House of Lords telah berupaya keras untuk menyesuaikan situasi di mana beban tersebut ada pada terdakwa. terdakwa dengan ECHR.
- Rancangan KUHP: Komisi Hukum menerbitkan rancangan KUHP pada tahun 1989. Rancangan KUHP belum diundangkan. Komisi Hukum saat ini tidak melihat adanya prospek bagi Parlemen untuk memberlakukan keseluruhan undang-undang tersebut sekaligus namun telah menerbitkan beberapa makalah konsultasi dan laporan mengenai berbagai aspek hukum pidana sejak tahun 1989 dan berharap bahwa bagian-bagian yang lebih kecil ini akan diberlakukan dan seiring berjalannya waktu akan membentuk sebuah undang-undang.

BAB 2

AKTUS REUS

Pendahuluan

Tujuan umum hukum pidana adalah untuk melarang jenis perbuatan tertentu, namun dalam sebagian besar kejahatan berat, terdakwa juga pasti bersalah secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran memiliki dua sisi: perilaku dan kesalahan. Persyaratan 'perilaku' berarti bahwa seorang terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya karena berpikir untuk melakukan suatu kejahatan. Terkadang pembelaan diri seperti kurangnya persetujuan dipandang sebagai kegagalan untuk membuktikan salah satu unsur di atas. Namun, beberapa pembelaan tidak dapat dengan mudah dilihat sebagai tindakan yang meniadakan perilaku atau kesalahan. Untuk tujuan mengkaji dan menjelaskan hukum pidana, pada abad ke-21 sudah menjadi hal yang lazim untuk membagi unsur-unsur pokok suatu kejahatan menjadi dua bagian, yang disebut *actus reus* (unsur tingkah laku dalam definisi kejahatan) dan *mens rea* (unsur mental dalam definisi kejahatan). Kedua bahan tersebut harus ada. Jika seseorang menabrak mobil tetangganya, ia belum tentu bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan. Jika seseorang melakukannya dengan sengaja atau ceroboh, maka dialah yang melakukannya. Dalam tindak pidana kerugian, seseorang hanya bersalah jika ia mempunyai pola pikir yang diperlukan, *mens rea* atau 'elemen kesalahan', sebagaimana rancangan KUHP Komisi Hukum (UU No. 177, 1989), pasal 6, menyebutnya. *Actus reus* disebut 'elemen eksternal', yang merupakan judul ke cl 15. Ini tidak didefinisikan dalam klausa definisi, cl 6. *Mens rea* adalah keadaan pikiran, atau dalam kasus kelalaian, kegagalan untuk mencapai standar perilaku tertentu, yang disyaratkan oleh definisi tersebut sebelum terdakwa dapat dihukum. *Actus reus* kadang-kadang didefinisikan secara negatif sebagai sisa pelanggaran setelah *mens rea* dikurangi.

- ❖ Karena mungkin terdapat pembelaan yang tidak didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan *mens rea* atau *actus reus* atau kedua-duanya, mungkin lebih baik menganggap *actus reus* sebagai tindakan (misalnya menyebabkan kematian dalam pembunuhan), kelalaian (seperti dalam tidak menunjukkan catatan pajak yang sah), atau keadaannya (seperti memiliki obat yang dikendalikan) daripada negatif.
- ❖ Dalam sebagian besar pelanggaran, keduanya harus ada. Kejahatan yang tidak *mens rea* terhadap satu atau lebih bagian dari *actus reus* disebut delik tegas (lihat Bab 4).
- ❖ Biasanya *actus reus* dan *mens rea* harus terjadi pada waktu yang sama (lihat Bab 3).
- ❖ Kedua bagian tersebut tidak ada secara terpisah. *Mens rea* memenuhi syarat *actus reus*. Misalnya, dalam tindak pidana perkosaan, terdakwa antara lain harus berniat melakukan hubungan seksual, dan mengetahui bahwa korban tidak menyetujuinya. Poin 'hubungan seksual', 'perempuan' atau 'laki-laki' dan 'persetujuan' merupakan *actus reus*. Niat, kecerobohan dan keadaan pikiran lain yang relevan ditetapkan sebagai *mens rea* pelanggaran. Untuk mengetahui unsur mental manakah yang diperlukan dalam kaitannya dengan setiap unsur *actus reus* merupakan tugas

mahasiswa hukum, karena setiap unsur luar mungkin mempunyai mens rea yang berbeda-beda.

- ❖ Terdapat kesulitan dalam membagi seluruh unsur kejahatan menjadi mens rea dan actus reus. Unsur kepemilikan obat terlarang terlihat seperti actus reus, namun menyembunyikan aspek mens rea: seseorang tidak memiliki sesuatu kecuali ia mengetahui bahwa ia memilikinya, dan pengetahuan adalah bagian dari mens rea. Kesulitan ini dieksplorasi di bagian selanjutnya (Beberapa Masalah) buku ini.

Istilah 'actus reus' dan 'mens rea' hanyalah singkatan, berguna untuk eksposisi. Mereka nyaman bagi pengacara. Hal ini telah dikemukakan sejak lama oleh Rollin Perkins, ('A rationale of mens rea' (1939) 52 Harv LR 905):

Beberapa tahun yang lalu doktrin mens rea dikritik dengan alasan bahwa frasa Latinnya 'menyesatkan'. Jika kata 'mens rea' dianggap sudah cukup jelas, maka kata tersebut akan terbuka terhadap keberatan ini, namun kata tersebut harus dianggap hanya sebagai label yang mudah ditempelkan pada fakta fisik apa pun yang cukup untuk menyatakan bersalah. Hal ini mencakup bidang yang terlalu rumit untuk frasa singkat yang dapat menjelaskan dirinya sendiri, dan karena penting untuk memiliki semacam singkatan dialektika untuk mengungkapkan gagasan tersebut, label yang sudah lama dikenal ini juga bisa digunakan untuk bidang apa pun.

Akan tetapi, sebagaimana telah terlihat, sejauh mana elemen-elemen ini harus ditunjukkan keberadaannya, jika memang ada, bergantung pada analisis pelanggaran tertentu yang didakwakan kepada terdakwa. Terlebih lagi, apakah suatu unsur suatu pelanggaran diklasifikasikan sebagai actus reus atau mens rea biasanya tidak menjadi masalah karena dalam kedua kasus tersebut terdakwa tidak bersalah. Satu pengecualian adalah doktrin yang berkembang tentang mendapatkan actus reus dari suatu kejahatan yang dibahas di Bab 5, namun doktrin tersebut mungkin tidak dapat bertahan dalam tantangan di House of Lords.

Ada juga masalah akibat kesalahan actus reus dan mens rea. Biasanya bahkan kesalahan yang tidak masuk akal pun akan diampuni, tetapi jika kejahatan tersebut merupakan kelalaian, maka terdakwa hanya mempunyai pembelaan jika kesalahan tersebut dilakukan dengan alasan yang masuk akal. Karena istilah-istilah tersebut bersifat legal, maka tidak perlu menggunakannya di hadapan orang awam. Lord Diplock tidak lagi menggunakannya di pengadilan dalam Miller [1983] 2 AC 161.

Itu akan akan kondusif bagi kejelasan analisis unsur-unsur kejahatan yang dibuat oleh undang-undang, seperti halnya sebagian besar tindak pidana saat ini, jika kita menghindari bahasa Latin yang buruk dan sebaliknya berpikir dan berbicaritentan g tingkah laku terdakwa dan keadaan pikirannya pada saat perbuatan itu dilakukan, daripada berbicara tentang actus reus dan mens rea.

Keinginannya telah dikabulkan dalam rancangan KUHP, namun istilah ini lebih banyak digunakan di pengadilan saat ini dibandingkan satu dekade yang lalu ketika Lord Diplock menyampaikan pernyataannya, tidak diragukan lagi karena para praktisi pernah menjadi pelajar yang diajari istilah-istilah ini. Tentu saja persyaratannya bisa dibatalkan. Penggunaannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pembunuhan: *actus reus* (sebagian) menyebabkan kematian *mens rea* (sebagian) dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka serius pada tubuh. Istilah *actus reus* dan *mens rea* tidak perlu digunakan, dan memang RUU KUHP tidak menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa pembunuhan sebagian didefinisikan sebagai menyebabkan kematian dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau menyebabkan luka yang parah pada tubuh. Karena istilah-istilah tersebut digunakan di pengadilan dan dunia akademis hukum, istilah-istilah tersebut digunakan dalam buku ini sebagai cara praktis untuk membedakan perilaku terdakwa dan keadaan pelanggaran dari keadaan pikirannya.

2.1 MASALAH YANG MUNCUL

(a) Ada kesulitan dalam mendefinisikan *actus reus* sebagai pelanggaran dikurangi *mens rea*. *Actus reus* suatu pelanggaran mungkin melampaui apa yang dilakukan terdakwa. *Actus reus* dapat menutupi kondisi mental korbannya. Dalam pemerkosaan, korban tidak boleh menyetujui. Persetujuan korban merupakan keadaan pikiran, namun bukan keadaan pikiran terdakwa. Ada juga pendapat bahwa dalam beberapa kejahatan tidak jelas apakah sesuatu tersebut termasuk *actus reus* atau *mens rea*. Dalam pelanggaran mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian, apakah unsur 'tanpa kehati-hatian dan perhatian' merupakan keadaan pikiran? Bisa dikatakan 'sembrono'. Jika kelalaian ('tanpa kehati-hatian dan perhatian') merupakan keadaan pikiran (lihat Bab 3), unsurnya adalah *mens rea*. Namun, dapat dikatakan bahwa frasa tersebut memenuhi syarat 'mengemudi'. Salah satunya adalah mengemudi sedemikian rupa sehingga mengemudi tidak memenuhi standar kehati-hatian dan perhatian. Seseorang hanya dapat memiliki sesuatu seperti narkoba yang dikendalikan jika ia mengetahui bahwa ia memilikinya: keadaan pikiran terdakwa adalah bagian dari *actus reus*. Tidak peduli apakah pengetahuan itu bagian dari *mens rea* atau *actus reus*. Penuntut harus membuktikannya tidak peduli bagaimana komentator mendefinisikannya. Dalam konspirasi, unsur 'kesepakatan' biasanya diperlakukan sebagai bagian dari *actus reus*, namun juga mengacu pada kondisi mental. Salah satu bentuk perampokan berat terjadi ketika terdakwa membawa senjata untuk melakukan pelanggaran. Apakah suatu pasal merupakan suatu pelanggaran tergantung pada niat terdakwa. *Actus reus* mencakup keadaan pikiran terdakwa. Pembagian menjadi *actus reus* dan *mens rea* mungkin tidak selalu jelas.

Dalam beberapa pelanggaran hanya *mens rea* yang salah – *actus reus* sama sekali tidak bersalah. Ilustrasi yang bagus adalah pencurian. Jika terdakwa mengambil sekaleng kacang dari rak supermarket, tidak ada yang salah dengan perbuatannya: kebanyakan orang memang melakukan hal yang sama setiap hari. Namun, penambahan (bagian dari) *mens rea*, ketidakjujuran, mengubah *actus reus* menjadi kejahatan. Kalau saja karena alasan ini, pembaca tidak boleh menerjemahkan *actus reus* sebagai 'tindakan bersalah'. Mungkin tidak ada yang 'bersalah' dalam hal ini.

Beberapa pertahanan juga menimbulkan kesulitan. Dalam keadaan terpaksa, terdakwa tampaknya mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dan menyebabkannya, namun ia mempunyai pembelaan. Pertahanan ini melampaui *mens rea* dan *actus reus*. Beberapa pembelaan bukanlah kegagalan dalam menunjukkan *actus reus* dan *mens rea*.

Dimana letak automatisme? Hal ini dapat berupa penyangkalan terhadap actus reus: terdakwa sebenarnya tidak sedang 'mengemudi' karena ia sedang diserang oleh segerombolan lebah, sebuah contoh yang diberikan dalam kehidupan baru di Bell [1984] 3 All ER 842. Bisa saja menjadi penolakan mens rea: ketika diserang oleh lebah dia tidak mempunyai pikiran (mungkin ada masalah dengan pelanggaran yang ketat dalam hal ini). Bahkan bisa disebut sebagai pertahanan sejati: dia sedang mengemudi dan dia tahu bahwa dia mengemudi dengan buruk, namun dia memiliki pertahanan otomatisme. Pendapat lain mengatakan bahwa analisa yang benar adalah sebelum tercapai tahapan actus reus dan mens rea, harus ditunjukkan bahwa terdakwa kehilangan kendali atas gerak tubuhnya. Seperti yang dikatakan Lord Denning dalam *Bratty v A-G untuk Irlandia Utara* [1963] AC 386: '. . . kategori tindakan tidak sukarela sangat terbatas'. Dalam sebagian besar kasus, kendali tidak menjadi masalah, dan kecuali jika terdakwa meragukan kendalinya, penuntut tidak perlu membuktikan secara tegas bahwa ia memegang kendali. Namun jika ia diserang oleh segerombolan lebah sehingga mengakibatkan ia tidak dapat mengendalikan kendaraannya, ia akan dibebaskan kecuali jika penuntut dapat menyangkal bukti-buktinya. Unsur ini terkadang diungkapkan sebagai berikut: apakah terdakwa bertindak secara sukarela? Ia tidak bertindak sukarela jika diserang lebah. Perlu dicatat bahwa jenis ketidaksengajaan ini berbeda dengan paksaan, dimana perilaku terdakwa ditentukan oleh ancaman yang mengharuskan terdakwa untuk bertindak dengan cara tertentu.

Dalam automatisme, perilaku sukarela terdakwa dinegasikan dengan hilangnya kendali kesadaran. Dalam keadaan paksaan, terdakwa mungkin secara sadar mengendalikan gerakannya namun tindakannya diarahkan oleh paksaan. Karena hubungan antara otomatisme dan definisi suatu pelanggaran belum terpecahkan, otomatisme tidak dapat secara rapi dimasukkan ke dalam perbedaan antara pembenaran dan alasan yang disebutkan dalam Bab 7. Untuk diskusi lebih lanjut tentang otomatisme lihat Bab 9.

(b) Actus reus berbeda dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya. Dalam perampokan, terdakwa harus memasuki suatu gedung atau bagian dari suatu bangunan tanpa izin pemiliknya. Dalam pencurian, terdakwa harus merampas harta benda milik orang lain. Mengatakan bahwa semua kejahatan mempunyai actus reus tidak berarti bahwa actus reus itu ada dalam setiap pelanggaran. Kita harus melihat setiap pelanggaran untuk menentukan apa actus reusnya. Satu actus reus mungkin cukup untuk beberapa pelanggaran. Dalam pembunuhan, pembunuhan berencana dan tindak pidana pembunuhan lainnya, terdakwa harus menyebabkan kematian korban. Actus reus juga dapat mencakup bagaimana suatu situasi muncul. Pengrusakan pidana yang disebabkan oleh kebakaran merupakan tindak pidana pembakaran (UU Kerusakan Pidana 1971, pasal 1(3)).

(c) Sebagaimana dinyatakan di atas, actus reus bukan sekedar 'tindakan bersalah', seperti yang kadang-kadang dikatakan oleh para siswa. Hal ini dapat mencakup keadaan tertentu, seperti memiliki barang untuk digunakan dalam perampokan, kepemilikan obat-obatan terlarang, keanggotaan dalam organisasi teroris terlarang, dan kelalaian (lihat di bawah). Perbedaan antara bentuk-bentuk perilaku ini mungkin tidak jelas, dan seseorang mungkin mengalami kesulitan membedakan antara tindakan dan kelalaian, ketika seseorang

bersalah jika ia bertindak tetapi tidak bersalah jika ia gagal bertindak (lihat *Fagan v MPC* [1969] 1 QB 439, dibahas nanti dalam bab ini). Apakah mengemudi dalam keadaan mabuk merupakan suatu tindakan atau suatu keadaan? Yang juga termasuk dalam *actus reus* adalah keadaan-keadaan yang relevan secara hukum. Dalam bigami, terdakwa harus sudah menikah. Dalam pemerkosaan, hubungan seksual harus dilakukan tanpa persetujuan korban.

(d) *Actus reus* harus dibuktikan. *Deller* adalah wewenang yang biasanya diberikan untuk menggambarkan proposisi ini.

Deller (1952) 36 Aplikasi Cr R 184

Terdakwa didakwa dengan alasan palsu dan sekarang melakukan penipuan yang bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang Pencurian tahun 1968. Ketika dia membawa mobilnya untuk ditukar, dia menyatakan bahwa tidak ada uang yang terhutang di dalamnya. Dia yakin ada pembayaran yang belum dibayar. Sepertinya dia telah membuat kepura-puraan palsu. Faktanya, pinjaman mobil itu batal dan secara hukum tidak ada. Oleh karena itu, dia tidak berhutang sepeser pun. Pernyataannya ternyata benar, meski ia secara keliru meyakini salah. Pengadilan Banding Pidana membatalkan hukumannya. Jaksa gagal membuktikan bahwa kepura-puraan itu salah.

Seseorang tidak bersalah atas suatu pelanggaran hanya karena ia yakin dirinya bersalah. Penuntut harus membuktikan keseluruhan *actus reus* dan, berdasarkan fakta, ada satu unsur yang hilang. *Deller* dapat mendukung proposisi bahwa seseorang tidak bersalah karena memiliki pikiran bersalah. *Mens rea* saja tidak cukup. Tuduhan saat ini merupakan salah satu upaya berdasarkan Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981.

Contoh hukum yang lebih modern yang tercantum dalam *Deller* adalah *McKoy* (2002), *The Times*, 17 Juni. Terdakwa rupanya mengira dia ditangkap secara sah ketika seorang petugas polisi memegang lengannya. Faktanya, dia ditahan secara tidak sah. Dia menggunakan kekerasan untuk melarikan diri. Pengadilan Banding memutuskan bahwa dia berhak menggunakan kekerasan yang wajar untuk menghindari pengekangan yang melanggar hukum. Kesalahan terdakwa tidak relevan, karena atas fakta yang sebenarnya ada ia berhak menggunakan kekerasan yang wajar. Keyakinan ini tidak menjadikan suatu perbuatan halal menjadi haram. Sayangnya, karena pengadilan tidak merujuk pada *Dadson*, yang akan dibahas selanjutnya, kewenangannya menjadi berkurang.

Kasus yang selalu dikontraskan dengan *Deller* adalah *Dadson*. Perbedaan antara kedua otoritas ini sering dikatakan bahwa di *Deller* tidak ada unsur pelanggaran sedangkan di *Dadson* tidak ada unsur pembelaan. Perbedaan ini penting karena terdakwa tidak bersalah di *Deller* namun bersalah di *Dadson*.

Dadson (1850) 4 Cox CC 358

Seorang polisi sedang menjaga sebuah pohon yang kayunya telah beberapa kali dicuri di masa lalu. Polisi melihat korban keluar dari semak-semak sambil membawa kayu. Kayu tersebut telah dicuri oleh korban. Dia menembak korban yang terluka. Dia didakwa melakukan penembakan dengan maksud untuk menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan. Pada saat itu, dianggap sah bagi seorang polisi untuk menembak penjahat yang melarikan diri. Mencuri kayu menjadi kejahatan hanya jika seseorang mempunyai dua hukuman sebelumnya,

yang juga dimiliki oleh korban. Polisi tidak mengetahui bahwa korban mempunyai hukuman sebelumnya. Polisi itu dinyatakan bersalah. Di Pengadilan untuk Kasus-kasus Mahkota yang Dicapadangkan, di mana para hakim berkumpul untuk membahas poin-poin hukum pidana, dinyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki pembelaan kecuali dia mengetahui fakta-fakta yang membenarkan pembelaan pada saat melakukan pelanggaran. (Keyakinan tersebut tampaknya sejalan dengan kebijakan, karena orang harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian mengambil gambar.)

Hasil sebenarnya di Dadson sekarang diatur oleh pasal 24(4) Undang-Undang Polisi dan Bukti Kriminal 1984 (PACE) (meskipun lih. komentar J. C. Smith tentang Chapman v DPP [1988] Crim LR 843), yang mengatur tentang pelanggaran yang dapat ditangkap. Terdakwa tidak lagi memerlukan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa korban telah melakukan tindak pidana yang dapat ditangkap jika ia menggunakan kekerasan untuk melakukan penangkapan, jika korban memang melakukan tindak pidana tersebut pada saat ditangkap (walaupun penangkapan tersebut mungkin masih melanggar hukum karena tidak dapat disebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut). alasan penangkapan pada saat itu berdasarkan pasal 28). Namun prinsipnya berbeda: terdakwa harus mengetahui keadaan yang membenarkan tindakannya.

Dadson berwenang atas proposisi bahwa keadaan pembenaran diperlakukan sebagai bagian dari elemen mental, bukan sebagai bagian dari actus reus. Terdakwa harus mengetahui keadaan pembenaran untuk mendapatkan pembelaan. Oleh karena itu, terdakwa bersalah atas baterai jika dia tersandung pada pencuri buku dari perpustakaan tetapi tidak mengetahui pencurian tersebut. Sering kali dikatakan bahwa Dadson salah. Korban adalah seorang penjahat dan oleh karena itu diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan untuk menangkapnya. Dia tidak melakukan apa pun yang dilarang oleh hukum. Tidak ada actus reus dan kasusnya ditangani Deller. Namun pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah kecuali ia mengetahui bahwa korbannya adalah penjahat: pengadilan tidak perlu mengambil keputusan demikian; bisa saja terdakwa mempunyai pembelaan jika korbannya memang penjahat. Jika Dadson salah, tidak akan ada celah dalam hukum, karena saat ini terdakwa akan bersalah atas upaya melakukan pelanggaran tersebut.

Rancangan KUHP Komisi Hukum (UU No. 177 Tahun 1989), jika diberlakukan akan membalikkan asas umum yang ada pada Dadson, sehingga memberikan pembelaan kepada terdakwa ketika ia tidak mengetahui keadaan yang membenarkan perbuatannya. Komisi Hukum percaya (secara keliru) bahwa PACE (lihat di atas) telah mengesampingkan Dadson mengenai keabsahan penangkapan tersebut. Namun, untuk menyelaraskan undang-undang tersebut dengan pembelaan diri, Komisi Hukum kemudian berubah pikiran dan Dadson dipertahankan dengan RUU Hukum Pidana yang dilampirkan pada Laporan No. 218 Tahun 1993. Kebijakan di balik Dadson dengan tepat dan ringkas dituangkan dalam paragraf 39.11 Laporan: 'warga negara yang bereaksi secara tidak wajar terhadap keadaan tidak boleh dibebaskan dari fakta yang tidak mereka sadari.'

(e) Ada kalanya seseorang selain terdakwa melakukan *actus reus* namun terdakwa tetap bersalah atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan *actus reus*. Contoh nyatanya adalah tanggung jawab perwakilan, yang dibahas di Bab 6.

(f) *Actus reus* dapat membantu membuktikan *mens rea*. Jika terdakwa menikam jantung korbannya dalam jarak dekat, terdapat bukti bahwa terdakwa mempunyai *mens rea* pembunuhan.

2.2 KEJAHATAN 'PERILAKU' DAN 'AKIBAT'

Sudah menjadi hal yang lazim untuk membagi pelanggaran menjadi pelanggaran 'perilaku' dan 'akibat'. Kejahatan 'perilaku' adalah kejahatan dimana hanya perbuatan terlarang yang perlu dibuktikan: tidak ada kerugian yang perlu ditimbulkan. Contohnya adalah mengemudi secara berbahaya, bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Tahun 1988 (sebagaimana diamandemen), yang mengatur mengenai *actus reus* bahwa seseorang bersalah ketika ia 'mengendarai kendaraan yang digerakkan secara mekanis di jalan raya'. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa ada hal lain yang terjadi. Terdakwa bersalah jika mengendarai kendaraan bermotor secara berbahaya di jalan raya. Tidak perlu ada akibat yang merugikan, seperti terdakwa mengendarai mobil di jalan umum dengan sangat berbahaya sehingga seseorang terjatuh. Dalam sumpah palsu, terdakwa bersalah jika ia membuat pernyataan di atas sumpah, mengetahui atau meyakini pernyataan itu palsu. Hasil dari kasus ini tidak perlu terpengaruh. Oleh karena itu, sumpah palsu merupakan kejahatan perilaku. Dalam kejahatan 'akibat', karena akibat terlarang merupakan bagian dari *actus reus*, maka kerugian yang ditentukan harus ditunjukkan. Dalam pembunuhan seseorang harus dibunuh. Akibat terlarang harus ditimbulkan.

Dalam melakukan tindak pidana, biasanya tidak ada masalah sebab-akibat, karena tidak ada akibat yang perlu dibuktikan. Akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus dibuktikan menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Tahun 1988 (sebagaimana telah diubah), penuntut harus menunjukkan bahwa terdakwa mengemudi dengan berbahaya dan menyebabkan kematian seseorang. (Untuk sebab-akibat secara umum, lihat di bawah.)

Salah satu persoalan yang timbul dalam tindak pidana akibat terjadi apabila pengertian delik tersebut mengandung konsep melawan hukum. Hingga *Albert v Lavin* [1981] 1 All ER 628 Pengadilan Divisi berpendapat bahwa kata ini menekankan bahwa hasil dari kejahatan bisa saja sah. Dalam pembunuhan, misalnya, seseorang tidak bersalah jika ia dibunuh dengan menjalankan tugas sebagai algojo di depan umum atau untuk membela diri. Pembelaan seperti itu akan muncul baik kata 'melanggar hukum' muncul atau tidak dalam definisi pelanggaran. Namun, baik *Kimber* [1983] 1 WLR 1118 (CA), di mana masalah persetujuan dalam kejahatan penyerangan tidak senonoh yang ada saat itu sedang dibahas, dan *Williams* [1987] 3 All ER 411 (CA) memutuskan bahwa 'melanggar hukum' adalah bagian dari tindakan tersebut. dari *actus reus* (lihat Bab 8 untuk mengetahui efeknya). Artinya, hal-hal seperti pertahanan diri merupakan bagian dari *actus reus*. Jika terdakwa termasuk dalam batas-batas pembelaan diri, maka penuntut telah gagal membuktikan seluruh *actus reus*. Menyebut bela

diri sebagai 'pertahanan' adalah istilah yang keliru jika istilah tersebut merujuk pada konsep ketiga selain *actus reus* dan *mens rea*. Meski demikian, terdakwa menanggung beban pembuktian.

Beberapa pelanggaran dapat dilakukan karena kegagalan bertindak, dan pelanggaran lainnya seperti kepemilikan ganja merupakan pelanggaran status atau keadaan. Sulit untuk menggambarkan pelanggaran-pelanggaran ini sebagai pelanggaran 'perilaku'. Kelalaian berarti kebalikannya, kurangnya perilaku.

Rancangan KUHP dan *actus reus*

Pada pasal 15, yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam Rancangan KUHP adalah "perbuatan" dan "juga, bila konteksnya memungkinkan".

. . . setiap akibat perbuatan itu, dan keadaan apa pun di mana perbuatan itu dilakukan atau akibat itu terjadi, itu merupakan unsur delik. Pada paragraf 16, 'tindakan' harus dibaca sebagai meliputi suatu kelalaian (lihat nanti), keadaan, atau kejadian jika kejahatan didefinisikan demikian.

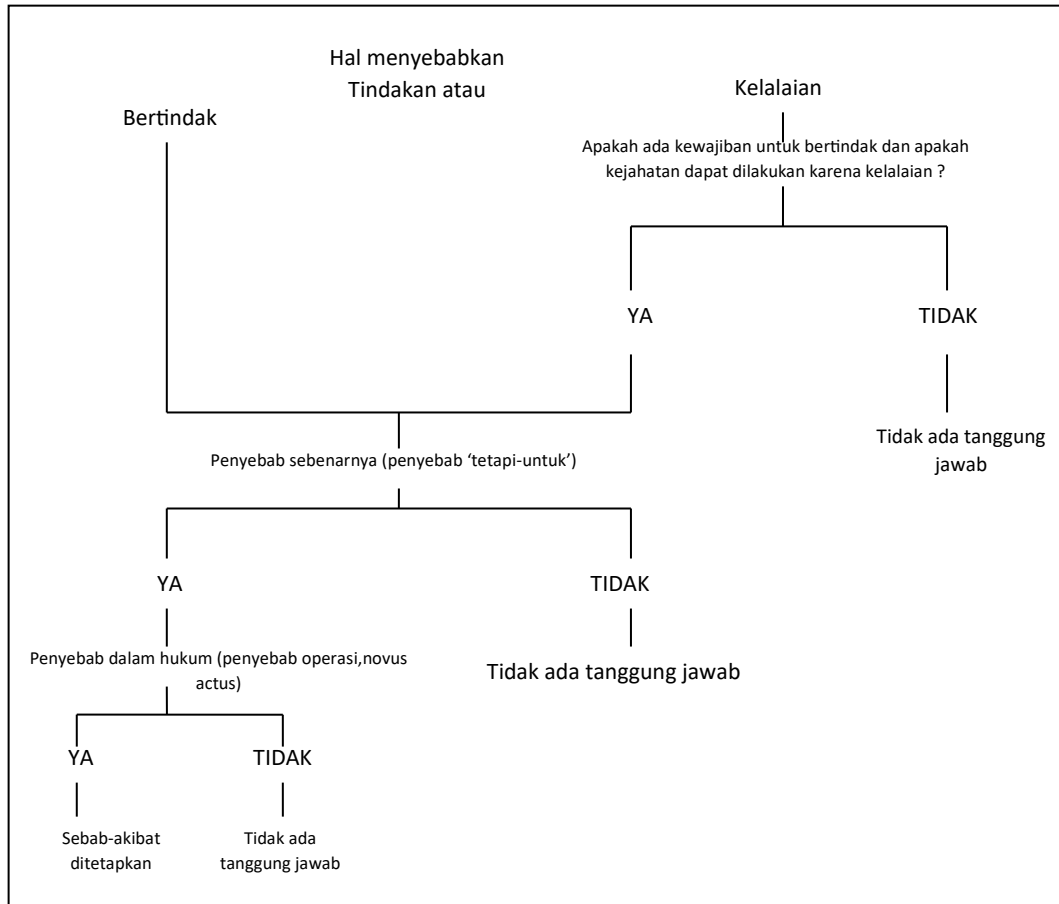
Hal menyebabkan

Tidak ada masalah hukum yang lebih sulit diselesaikan selain sebab-akibat (Criminal Law and Penal Methods Reform Committee, South Australia, Fourth Report, *The Substantive Criminal Law*, 1977, 50, dikutip dalam E. Colvin 'Causation in criminal law' (1989) 1 *Obligasi LR* 253).

Pertanyaan mengenai sebab-akibat muncul dalam banyak konteks hukum yang berbeda dan tidak ada satu teori pun tentang sebab-akibat yang dapat memberikan jawaban siap pakai terhadap pertanyaan apakah tindakan [terdakwa] harus diperlakukan sebagai penyebab atau sebab dari suatu peristiwa yang terjadi. Pendekatannya tentu harus pragmatis. . . (Lord Bridge dalam *Jaksa Agung Hong Kong v Tse Hung-lit* [1986] 1 AC 876 (PC)). Hukum dalam memutuskan persoalan sebab akibat memilih satu atau lebih sebab dari jumlah total kondisi sesuai dengan tujuan yang ada. . . (McGarvie dan O'Bryan JJ dalam *Demirian* [1989] VR 97, 110).

Penyebab dalam beberapa hal merupakan bidang hukum yang sulit (Gbr. 2.1), namun menurut Pengadilan Banding di Cato [1976] 1 WLR 110, Pagett (1983) 76 Cr App R 279 dan Cheshire [1991] 1 WLR 844 Persoalan penyebab faktual sebagian besar menjadi persoalan juri setelah pengadilan memutuskan bahwa terdapat cukup bukti untuk diserahkan kepada mereka, dan karena 'penyebab' adalah kata dalam bahasa Inggris biasa, dalam banyak kasus tidak ada arahan yang perlu diberikan. Seperti yang dikatakan Lord Salmon dalam *Alphacell Ltd v Woodward* [1972] AC 824 (HL) dalam sebuah bagian yang disetujui oleh House of Lords di *Badan Lingkungan Hidup v Empress Car Co (Abertillery) Ltd* [1999] 2 AC 22, 'Apa atau siapa yang memiliki menyebabkan suatu peristiwa tertentu terjadi pada dasarnya adalah pertanyaan praktis tentang fakta yang paling baik dijawab dengan akal sehat daripada teori metafisika abstrak.' Namun demikian, seperti yang diakui Lord Hoffmann dalam kasus *Empress*, ada prinsip-prinsip hukum yang terlibat juga, dan beberapa di antaranya mungkin rumit. Jawabannya mungkin tergantung pada pertanyaan yang diajukan. Apakah seseorang menyebabkan polusi dan apakah dia menyebabkan kematian mungkin memerlukan aturan

atribusi yang berbeda. Intervensi pihak ketiga dapat mencegah pihak ketiga bersalah namun tidak bersalah. Dokter boleh saja memberikan bukti apa yang mereka anggap sebagai penyebabnya, namun keputusan ada di tangan juri.



Gambar 2.1 Penyebab

Demikian pula, apakah suatu organisasi menyebabkan limbah cair masuk ke sungai masih menjadi pertanyaan fakta. Dalam kasus *Permaisuri*, Lords berpendapat bahwa hakim berhak memutuskan bahwa para terdakwa telah menyebabkan pencemaran sungai. Hanya jika perbuatan pihak ketiga itu 'luar biasa' dan bukan 'suatu kejadian biasa' barulah tergugat tidak bertanggung jawab. Mereka telah membangun tangki untuk solar di tempat dimana minyak akan mengalir ke sungai jika ada yang memutar keran. Seseorang melakukannya. Kegagalan memasang kunci pada tangki menyebabkan polusi. Kasus ini mendapat kritik keras karena tindakan pihak ketiga yang 'bebas, disengaja dan terinformasi' telah melepaskan minyak: tindakan ini sepertinya merupakan *novus actus interveniens*, sebuah konsep yang dibahas di bawah, namun frasa tersebut pada dasarnya berarti bahwa terdakwa dianggap tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Tampaknya sangat aneh jika tanggung jawab pidana seorang terdakwa bergantung pada tindakan pihak ketiga yang tidak dikenal. *Permaisuri* hanya terbatas pada kasus polusi: Kennedy (No. 2) [2008] 1 AC 269, dibahas di bawah. Pandangan alternatifnya adalah mengatakan bahwa Yang Mulia salah karena mereka hampir

tidak berurusan dengan otoritas standar mengenai sebab akibat: pemasangan tangki hanyalah penyebab polusi, bukan penyebabnya.

Persoalan sebab akibat hukum dapat ditarik kembali dari juri apabila hakim memutuskan bahwa perbuatan atau kelalaian terdakwa bukanlah sebab hukum. Pengadilan telah dengan mudah menyatakan apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang bukan. Ada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini mungkin tidak menyatu dengan doktrin, karena pengadilan dapat memperluas atau meninjau ulang cakupan prinsip-prinsip tersebut untuk menangkap atau membebaskan terdakwa. Jika seorang pengemudi truk tertidur saat mengemudi dan membunuh seorang pengendara mobil, apakah ia bertanggung jawab atau majikan yang menjamin dia mengemudi, atau bahkan sistem kapitalis yang mewajibkan dia bekerja? (Untuk undang-undang tentang penyebab pelanggaran sekunder, lihat Bab 5.)

Kasus sebab-akibat cenderung muncul dalam pembunuhan, namun prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara umum pada kejahatan yang diakibatkan, termasuk pelanggaran berat, meskipun polusi mungkin merupakan pengecualian. (Hal yang sama dapat dikatakan tentang konsep niat. Mengetahui hukum pembunuhan merupakan langkah besar menuju keseluruhan hukum pidana.) Tidaklah benar jika dikatakan bahwa hubungan sebab-akibat selalu diperlukan. Beberapa kejahatan ('melakukan kejahatan', lihat di atas) tidak memerlukan adanya akibat, dan beberapa kejahatan yang merupakan kejahatan akibat tidak memerlukan sebab akibat.

Seseorang bertanggung jawab secara perwakilan, yaitu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan orang lain, meskipun ia tidak menyebabkan perbuatan salah tersebut: pengadilan mencari sebab-akibat 'tetapi-untuk' (misalnya, korban tidak akan mati jika terdakwa menembaknya) – aspek ini terkadang disebut 'penyebab sebenarnya' dan sebab-akibat hukum (yaitu apakah hukum menghubungkan penyebab ini dengan terdakwa ini?). Jika tes 'tapi-untuk' digunakan sendirian, maka akan menimbulkan terlalu banyak tersangka. Misalnya, jika saya ditembak oleh perampok bank, saya tidak akan tertembak jika saya tetap di tempat tidur. Orang tidak akan mengatakan bahwa kegagalan saya untuk tetap di tempat tidur menyebabkan penembakan itu. Akal sehat berperan dalam keputusan juri. Dalam sebagian besar skenario, masuk akal bahwa terdawalah yang menyebabkan kejahatan, misalnya dengan menarik pelatuk. Ketika tidak ada kesulitan dalam menentukan sebab akibat, tidak ada arahan yang diberikan. Dalam beberapa kasus, tidak mudah untuk menentukan siapa penyebab kematian. Jika seseorang menolak transfusi darah untuk menyelamatkan nyawanya, orang tersebut dapat berpendapat bahwa dialah yang menyebabkan kematiannya sendiri. Hakim melihat lebih jauh dan memberikan arahan sebab akibat yang berpotensi menjerat terdakwa yang telah melukai korban hingga harus memilih antara transfusi atau kematian. Perlu dicatat bahwa ada lebih dari satu penyebab akibat. Dalam hukum pidana, penyidikannya adalah apakah terdakwa ini memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap akibat yang ditimbulkan, bukan apakah ada kontribusi lain yang signifikan atau tidak.

Jika terdakwa sebenarnya tidak menyebabkan akibat tersebut, maka ia tidak bersalah melakukan tindak pidana pokok. Dalam *White* [1910] 2 KB 124, terdakwa memasukkan

potasium sianida ke dalam limun dengan maksud membunuh korbannya. Dia meninggal bukan karena meminum racun, tetapi karena sebab alamiah. Oleh karena itu, terdakwa tidak menyebabkan kematiannya, meskipun apa yang ia maksudkan dan lakukan. Tuduhannya harus berupa percobaan pembunuhan. Hal serupa terjadi pada *Shoukatellie v R* [1962] AC 81 (PC), di mana korban yang dituju telah meninggal sebelum terdakwa melakukan pukulan yang jika tidak maka akan menjadi pukulan yang fatal. Sebuah kasus yang menunjukkan sebab-akibat 'tapi-untuk' adalah kasus Australia dari *Hallett* [1969] SASR 141. Korban diduga melakukan hubungan homoseksual kepada terdakwa ketika mereka sedang minum-minum di pantai pada malam hari. Terdakwa memukulinya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Air pasang datang dan menenggelamkannya. Terdakwalah yang menyebabkan kematiannya: namun atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban tidak akan tenggelam. Dia tidak akan bersalah, seandainya terjadi tsunami. Dalam *Dyson* [1908] 2 KB 959 Pengadilan Banding Pidana memutuskan bahwa terdakwalah yang menyebabkan kematian korban meskipun korban kemudian meninggal karena meningitis. Yang pertama telah mempercepat kematiannya. Sebagai bagian dari ujian 'tapi-untuk', kita harus selalu mengingat *Dalloway* (1847) 3 Cox CC 273: terdakwa harus mampu mencegah kejahatan. Faktanya, terdakwa tidak menyebabkan kematian seorang anak yang ditabraknya. Dia ceroboh tetapi kelalaiannya dalam mengemudi tidak menyebabkan kematian. Korban tetap saja akan meninggal dunia di bawah kemudi gerobak, karena meskipun terdakwa mengemudi dengan baik, tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan tersebut. Meskipun terdakwa lalai, anak tersebut tetap saja akan meninggal. Dalam istilah modern, seorang terdakwa tidak bersalah menyebabkan kematian karena mengemudi berbahaya jika, meskipun ia mengemudi dengan berbahaya, seorang anak tiba-tiba berlari keluar dan terbunuh di bawah kemudi mobil. Penyebabnya kurang. Aplikasi modern *Dalloway* adalah *Marchant* [2004] 1 WLR 442 (CA). Terdakwa, pengemudi kendaraan pertanian dengan unit pegangan di depan, tidak bersalah karena menyebabkan kematian karena mengemudi secara berbahaya ketika seorang pengendara sepeda motor tertusuk paku sepanjang satu meter pada unit pegangan tersebut. Paku itu tidak dilindungi oleh penjaga. Pengadilan memutuskan bahwa, meskipun demikian, tabrakan akan tetap terjadi; dan permohonan pengemudi dikabulkan. Satu ungkapan yang kadang-kadang digunakan adalah bahwa tindakan terdakwa harus merupakan *sine qua non* (prakondisi) dari kematian. Seperti yang akan kita lihat, meskipun dapat dikatakan bahwa terdakwa benar-benar menyebabkan kematian, ia mungkin tidak bertanggung jawab secara hukum pidana karena, misalnya, terdapat dalam pernyataan pengadilan di *Yordania* (1956) 40 Cr App R 152 Perawatan medis yang 'sangat salah', memutus rantai sebab-akibat dan membuat terdakwa tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ada dua tahapan: sebab-akibat faktual dan sebab-akibat hukum. Membuktikan sebab akibat yang faktual atau 'tetapi untuk' tidak membuktikan sebab akibat yang sah. Penyebab hukum berkaitan dengan apakah tanggung jawab pidana dapat dibebankan secara adil kepada terdakwa.

Aturan yang sama berlaku untuk pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana serta menyebabkan kematian karena mengemudi yang berbahaya. Dalam kejahatan ini bagian dari *actus reus* adalah 'menyebabkan kematian'. Karena sudah pasti kita semua akan mati suatu

hari nanti, *actus reus* lebih baik dinyatakan sebagai tuduhan yang mempercepat kematian. Karena percepatan kematian adalah kuncinya, tidak menjadi masalah jika korban menderita penyakit mematikan, seperti kanker: Adams [1957] Crim LR 365. Seperti kata-kata Lord Widgery CJ dalam *Cato* (di atas), 'Cukuplah jika penuntut dapat menetapkan bahwa hal tersebut merupakan suatu penyebab, dengan syarat bahwa hal tersebut merupakan penyebab yang berada di luar jangkauan de minimis dan secara efektif berdampak pada percepatan penyelesaian kasus. momen kematian korban.' (De minimis artinya sangat sepele sehingga tidak perlu diperhitungkan.) Hasil lain yang muncul dari definisi tersebut, meskipun tidak sepenuhnya diterima oleh Devlin J dalam Adams, adalah bahwa seorang dokter yang memberikan obat pereda nyeri obat-obatan yang diberikan kepada pasien yang sekarat merupakan bagian dari tindakan pembunuhan jika obat-obatan tersebut secara tidak sengaja memperpendek umur lebih dari jangka waktu yang tidak berarti. Kalau dokter meresepkan obat pereda nyeri untuk mempercepat kematian, tidak ada masalah. Dia telah menyebabkan kematian pasien. Hal ini terjadi meskipun ada permintaan dari pasien dan tingkat keparahan rasa sakitnya. Ada yang mungkin berargumentasi bahwa dokter harus mempunyai pembelaan atas kebutuhan, atau mungkin motifnya harus mengecualikannya. Hukumnya masih belum pasti. Nampaknya terdapat gerakan untuk memberikan pembelaan kepada dokter, meskipun ia mengetahui bahwa pengobatan tersebut akan mempercepat kematian, namun ia yakin bahwa ia melakukan pengobatan yang benar untuk mengurangi rasa sakit. Lihat persidangan Moor (tidak dilaporkan) sebelum Hooper J dibahas oleh Arlidge 'Persidangan Dr David Moor' [2000] Crim LR 31. Juga tidak pasti apakah, jika aturan ini terbatas pada dokter, ada, kasus perdata *Re A* [2001] Fam 167 (CA) telah mempengaruhinya. Para ahli bedah menyadari bahwa memisahkan kembar siam akan membunuh salah satu dari mereka. Dua Hakim Agung menyatakan bahwa begitu juri menemukan bahwa para dokter mengetahui bahwa (hampir) pasti salah satu saudaranya akan mati, mereka bermaksud untuk membunuh. (Tentu saja, biasanya seorang dokter tidak mempunyai alasan untuk melakukan pembunuhan.) Mungkin percepatan yang sepele saja tidak cukup. Devlin J. mengatakan dalam Adams bahwa percepatan kematian sebanyak 'menit, jam atau bahkan, mungkin, berhari-hari' akibat obat pereda nyeri bukanlah penyebab kematian. Tentu saja dapat diperdebatkan bahwa Devlin J mengacaukan motif (keinginan untuk menghentikan pasien yang menderita rasa sakit yang luar biasa) dengan sebab-akibat. Tentu saja dia tidak akan mengatakan hal yang sama tentang seorang terdakwa yang bukan seorang dokter yang memberikan tablet pereda rasa sakit dan mempercepat kematian kepada ibunya untuk menerima warisannya 'mungkin beberapa hari' lebih awal dari yang seharusnya dia lakukan? Devlin J menegaskan, penyebab adalah hal yang masuk akal untuk ditentukan oleh juri. Ini 'tidak berarti apa-apa secara filosofis, teknis, atau ilmiah'.

Sekali lagi, karena terdakwa harus dibuktikan hanya menyebabkan kematian, maka tidak menjadi masalah tindakan mana yang menyebabkan kematian selama ada yang menyebabkan kematian. Dalam Referensi Jaksa Agung (No. 4 Tahun 1980) [1981] 2 Semua ER 617 terdakwa mendorong korban ke belakang, mencekik dan menggorok lehernya, namun tetap bersalah atas perbuatan apapun yang menyebabkan kematian. (Meningat persyaratan

kesamaan mens rea dan actus reus, kita harus berasumsi bahwa terdakwa mempunyai mens rea di seluruh rangkaian perbuatan kecuali semua perbuatan itu dapat dianggap sebagai transaksi yang sama. Konsep transaksi yang tidak dapat dibagi-bagi adalah Kasus ini tidak diputuskan berdasarkan dasar yang akan menghukumnya jika ia memiliki mens rea pada saat penyerangan pertama dan setelah itu mengira ia membuang mayat yang sebenarnya adalah mayat hidup.) Jika terdakwa melakukannya tidak mempunyai mens rea pada permulaan rangkaian perbuatannya atau sepanjang perbuatannya, ia dibebaskan. Namun jika penuntut tidak dapat membuktikan tanpa keraguan bahwa pukulan terdakwa menyebabkan kematian korban ketika ada dua pukulan dari orang yang berbeda, yang mana salah satunya dapat menyebabkan kematian, maka terdakwa tidak bersalah: Dyos [1979] Crim LR 660 (Bailey Tua). Jaksa tidak dapat membuktikan bahwa pukulan terdakwa lah yang menyebabkan kematian korban.

Tidaklah penting bahwa tindakan terdakwa merupakan satu-satunya penyebab kematian, penyebab utama atau bahkan substansial: Pagett, di atas. Dalam *Benge (1865) 176 ER 665*, terdakwa, seorang mandor dari sebuah geng tukang pelat, dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan karena kecerobohannya meskipun orang lain turut menyebabkan kematian para korban. Tidak relevan jika tidak ada orang yang terbunuh jika orang lain bertindak berbeda. (Orang lain seperti masinis kereta api dan petugas sinyal juga bisa saja bertanggung jawab atas pembunuhan karena mereka juga berkontribusi besar terhadap kematian para korban.) Istilah 'substansial' hanya berarti bahwa penyebabnya harus lebih dari sekedar de minimis: Notman [1994] *Kejahatan LR 518 (CA)*. Oleh karena itu, bukanlah suatu penyesatan jika menggunakan kata 'substansial' dalam pengertian ini. Dalam *Malcherek [1981] 2 All ER 422* Pengadilan Tinggi secara tegas menyatakan bahwa penyebabnya tidak harus bersifat substansial. Pengadilan yang sama menyatakan dalam *Kimsey [1996] Crim LR 35* bahwa meskipun istilah 'substansial' dapat digunakan, istilah tersebut merupakan ekspresi yang berbahaya karena dapat membuat juri berpikir bahwa penyebabnya memang harus substansial. Maksud sebenarnya dari hal ini adalah bahwa perbuatan terdakwa harus lebih dari sekedar de minimis, yang mana hakim pengadilan dengan tepat menerjemahkannya sebagai 'kecil atau remeh'.

Demikian pula di *Cheshire*, pengadilan yang sama menekankan bahwa tindakan terdakwa tidak harus menjadi satu-satunya atau penyebab utama kematian. Cukuplah jika perbuatannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kematian korban. 'Secara signifikan' berarti 'lebih dari sekedar dapat diabaikan'. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan penyebab kematian yang dominan atau bahkan substansial. Korban ditembak di bagian paha dan perut oleh terdakwa. Trakeotomi dilakukan untuk memungkinkan dia bernapas. Ia meninggal karena penyempitan tenggorokan akibat bekas operasi. Meskipun rumah sakit gagal mendiagnosis apa yang salah pada korban, tindakan terdakwa masih memberikan kontribusi signifikan terhadap kematian korban. Dapat dikatakan bahwa fakta di *Cheshire* mirip dengan fakta di *Yordania*. Luka tetap ada namun tidak mengancam nyawa korban, dan pihak rumah sakit telah lalai. Perbedaannya terletak pada besarnya kelalaian para dokter di *Yordania*, yang memutus rantai sebab-akibat.

Dalam Armstrong [1989] Crim LR 149, keputusan Pengadilan Mahkota, terdakwa memberikan heroin kepada korban dan alat suntiknya. Kasus ini bermula dari korban yang menyuntik dirinya sendiri. Bukti menunjukkan bahwa kematian tersebut terutama disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol oleh korban. Heroin bukanlah penyebab kematian yang cukup signifikan. (Para ahli tidak yakin apakah heroin dapat mempercepat kematian secara signifikan: oleh karena itu, kasus ini dapat menjadi otoritas bagi proposisi bahwa *in causation de minimis non curat lex*: 'hukum tidak peduli dengan hal-hal sepele'.) Ada kemungkinan bahwa Armstrong tidak sejalan dengan Blaue [1975] 3 Semua ER 446 dibahas di bawah. Di Armstrong korban berada di bawah pengaruh obat-obatan. Mengapa terdakwa tidak mengambil korbannya saat dia menemukannya? Bandingkan juga Cato di atas (yang dibedakan dalam kasus Armstrong) di mana Pengadilan Banding mencari 'penyebab' dalam kematian yang berhubungan dengan heroin, bukan untuk 'tetapi-untuk' sebab-akibat dalam rangka menghukum terdakwa melakukan pembunuhan tidak berencana. Sekali lagi pengadilan menekankan bahwa permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang memiliki sebab-akibat substansial. Di Armstrong, terdakwa memasok heroin dan alat suntik kepada korban, namun dinyatakan tidak bersalah. Di Cato korban memberikan obat dan mencampurkannya, namun terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Berdasarkan analisis ini, kasus-kasusnya terlihat terbalik! Faktanya, perbedaan menurut pengadilan terletak pada identitas orang yang menyuntik narkoba tersebut.

Biasanya, jika terdakwa adalah penyebab kematian yang sebenarnya, maka dia juga merupakan penyebab hukum. Namun demikian, ada beberapa keadaan di mana kesimpulan ini tidak selalu dapat ditarik, dan hal ini menjadi pokok bahasan bagian selanjutnya bab ini. Yang terakhir, perlu dicatat bahwa ketika pengadilan berurusan dengan sebab-akibat, khususnya sebab-akibat hukum, mereka tidak benar-benar bertanya: Apakah terdakwa ini yang menyebabkan kematian? Mereka bertanya: Apakah adil untuk menghubungkan kematian tersebut dengan terdakwa ini? Pertanyaan tentang atribusi adalah pertanyaan tentang moralitas, bukan fakta.

2.3 BEBERAPA MASALAH KHUSUS DALAM SEBAB AKIBAT

(a) Novus actus interveniens

Frasa Latin ini telah menjadi istilah hukum. Artinya adalah bahwa 'tindakan intervensi tersebut sangat independen dari tindakan terdakwa sehingga tindakan tersebut harus dianggap dalam hukum sebagai penyebab kematian korban dengan mengesampingkan tindakan terdakwa' (menurut Robert Goff L. J. dalam Pagett (1983) 76 Aplikasi Cr R 279). Ketika suatu peristiwa memutus rantai sebab-akibat, hal itu disebut *novus actus interveniens*. Perbuatan terdakwa bukan lagi penyebab kematian, namun hanya bagian dari sejarah. Hakim mencatat bahwa para komentator akademis berbicara tentang putusannya rantai sebab-akibat jika intervensi dilakukan 'bebas, disengaja dan diinformasikan'. Intervensi tersebut pasti tidak normal. Dalam kasus air, kerusakan yang disebabkan oleh pengacau membuat pemilik pabrik tidak bertanggung jawab atas pencemaran sungai. Sebuah contoh yang diambil dari kasus Hallett di South Australian Full Court [1969] SASR 141 adalah seorang korban yang tidak

sadarkan diri di atas batas air tertinggi yang tenggelam oleh gelombang pasang. Namun jika korban tidak sadarkan diri di bawah tanda tersebut dan tenggelam, maka terdakwa yang meninggalkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri akan bertanggung jawab jika air pasang melanda dirinya.

Masalahnya diilustrasikan oleh Pagett. Polisi menembak dan membunuh seorang gadis yang digunakan sebagai tameng oleh terdakwa. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan mereka dalam menembaknya bersifat naluriah, merupakan tindakan membela diri atau bahkan untuk mempertahankan diri, dan dapat diperkirakan secara masuk akal. Alternatifnya, penembakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, kematiannya disebabkan oleh terdakwa yang menembak ke arah polisi. Seolah-olah terdakwa mendorong korban ke bawah kereta bawah tanah. Dalam istilah hukum, rantai sebab-akibat tidak terputus oleh penembakan korban oleh polisi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan polisi bersifat naluriah, tidak 'bebas, disengaja, dan berdasarkan informasi'. (Lih. *Empress*, dimana, meskipun pelepasan minyak disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak diketahui, perusahaan tetap bertanggung jawab. Pagett menegaskan kembali hukum ortodoks; *Empress* sudah keterlalu.) Oleh karena itu, apakah polisi terlibat dalam kematian korban atau tidak, tidak relevan. . Seandainya polisi menembak mati korban dengan cara yang sangat lalai, maka rantai sebab dan akibat mungkin telah terputus. Demikian pula, tindakan yang masuk akal untuk mempertahankan diri, seperti mencoba melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan terdakwa, tidak akan memutuskan rantai sebab-akibat: lihat (b) 'Kasus-kasus pelarian', di bawah. Menarik untuk dicatat bahwa dalam gugatan perdata terkait Pagett yang diberitakan *The Guardian*, 4 Desember 1990, para penembak jitu polisi dianggap bertanggung jawab atas kelalaiannya. Mereka tidak mengetahui bahwa korban adalah mantan pacar terdakwa; mereka mengabaikan nasihat ibunya; tidak ada pengawasan petugas bersenjata; petugas yang bertanggung jawab tidak memiliki pengalaman pengepungan; Petugas tidak bisa melihat di mana korban berdiri karena tidak ada lampu di lantai rumah susun tempat korban dibunuh. Tentu saja polisi tidak diadili di Pagett sendiri, sama seperti para dokter tidak berada di *Malcherek*, dimana posisi para dokter yang lalai tidak dibahas. Di *Malcherek* juga dapat dikatakan bahwa intervensi dokter, mematikan sistem pendukung kehidupan, dilakukan secara bebas, disengaja dan diinformasikan. Kedua kasus tersebut menunjukkan bagaimana dalam hukum pidana bisa terdapat lebih dari satu penyebab.

Kelalaian polisi dalam rangka hukum perdata tidak dengan sendirinya mempengaruhi kesalahan terdakwa dalam hukum pidana. (Lihat juga (f) 'Kelalaian yang berkontribusi', di bawah.) Dalam Pagett, kasus perisai manusia, para penembak bertindak secara naluriah untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Meskipun mereka merupakan penyebab langsung kematian, terdakwa dianggap sebagai penyebab kematian yang sah. Sekalipun penembakan terhadap korban melanggar hukum, nampaknya ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia juga menyebabkan kematian secara melawan hukum.

Aturan dasarnya adalah bahwa terdakwa lolos dari tanggung jawab hanya jika kejadian yang terjadi sangat tidak normal atau, dengan kata lain, tidak dapat diduga atau jika telah terjadi apa yang dikenal sebagai intervensi yang 'bebas, disengaja dan diinformasikan'.

Ungkapan tersebut adalah ungkapan Hart dan Honoré dalam edisi kedua risalah mereka *Causation in the Law* (OUP 1985). Apabila konsep keterdugaan yang digunakan, pengujiannya bersifat objektif. Karakteristik terdakwa, seperti kemudaan, kebodohan atau gender, tidak diperhitungkan: Marjoram [2000] Crim LR 372 (CA). Lord Parker CJ dalam Smith [1959] 2 QB 35 dalam *Courts-Martial Appeal Court* mengatakan bahwa:

Hanya jika penyebab kedua begitu besar sehingga membuat luka aslinya hanya menjadi bagian dari sejarah, barulah dikatakan bahwa kematian tidak berasal dari luka tersebut.

Jika tidak, tindakan terdakwa akan tetap menjadi penyebab efektif atau operatif. Berdasarkan fakta Smith, terdakwa tetap bersalah meskipun mendapat perawatan yang 'sangat buruk' dan meskipun korban memiliki peluang yang baik untuk sembuh sebelum perawatan tersebut. Ada dua penyebab kematian yang terjadi secara bersamaan, namun karena luka akibat penusukan terdakwa terhadap korban masih ada, maka terdakwalah yang menyebabkan kematiannya. Juri tidak memilih penyebab mana yang dominan. Hal ini menjawab pertanyaan apakah tindakan terdakwa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kematian tersebut.

Smith diterapkan di Gowans [2003] EWCA Crim 3935. Para terdakwa merampok seorang pengantar pizza, korbannya. Mereka membuatnya koma. Saat di rumah sakit dia terjangkit septikemia dan meninggal. Sumber infeksiya tidak diketahui. Terdapat bukti bahwa kondisi korban memerlukan pengobatan yang berisiko menimbulkan infeksi yang mengancam jiwa. Kay LJ menilai juri telah diarahkan dengan baik. Serangan tersebut membuat korbannya rentan terhadap infeksi; oleh karena itu, kematian tersebut disebabkan oleh para terdakwa. Akan berbeda jika serangan tersebut, seperti yang dikatakan Smith, adalah 'sekadar situasi di mana penyebab lain beroperasi'.

Ilustrasi lainnya adalah Dear [1996] Crim LR 595 (CA). Terdakwa mendengar bahwa korban telah melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya yang masih kecil. Dia menyayatnya berulang kali dengan pisau. Korban meninggal karena luka-lukanya dua hari kemudian. Terdakwa berargumentasi bahwa rantai sebab-akibat telah terputus karena korban membuka kembali lukanya (yakni, ia melakukan bunuh diri) atau karena kegagalan menghentikan aliran darah. Pengadilan memutuskan bahwa luka-luka yang disebabkan oleh terdakwa tetap menjadi penyebab utama kematian, terlepas dari apakah korban telah membuka kembali lukanya atau tidak. Selama tindakan terdakwa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kematian korban, pertanyaan apakah korban telah bertindak lalai atau sangat lalai atau apakah perilaku korban yang mengintervensi dapat diperkirakan tidaklah relevan. Dapat dikatakan bahwa jika benar bahwa korban membuka kembali luka-lukanya, perilakunya, menurut kata-kata Roberts (1971) 56 Cr App R 95 (CA), 'konyol' dan terdakwa seharusnya tidak dihukum: bunuh diri tidak dapat diperkirakan secara wajar. Roberts dibahas pada (b) di bawah. Jika argumen diterima bahwa selama perbuatan terdakwa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kematian korban, maka terdakwa bertanggung jawab, maka hukum telah berjalan, karena undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa rantai sebab-akibat diputus ketika perilaku korban tidak dapat diperkirakan secara masuk akal.

Anggapan sebaliknya adalah bahwa terdakwa harus mengambil korbannya ketika ia menemukannya, sebagaimana disebutkan pada (e) 'Terdakwa harus mengambil korbannya ketika ia menemukannya', di bawah. Jika menganggap korban sebagai orang yang menemukannya berarti 'mengambil seluruh korban termasuk keadaan mentalnya ketika seseorang menemukannya', maka tidak ada ruang bagi Roberts, karena perilaku yang tidak masuk akal (misalnya melarikan diri) adalah bagian dari keseluruhan manusia. Aturan dapat memberikan hasil yang berbeda. Misalnya, jika terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban dan korban berlari melintasi jalan yang sibuk lalu dibunuh, faktanya terlihat seperti skenario Roberts: terdakwa bersalah jika tindakan korban dapat diperkirakan secara masuk akal. Namun, jika korban menderita penderitaan mental pada saat penyerangan, kasusnya mirip dengan Blaue dan terdakwa bersalah terlepas dari apakah kematiannya dapat diperkirakan secara wajar atau tidak. Aturan mana yang diterapkan tidak dibahas dalam Dear. Nyatanya Dear adalah keputusan yang kurang memuaskan. Pengadilan mengatakan bahwa 'konsep novus actus interveniens dan foreseeability' tidak boleh 'melanggar hukum pidana', namun konsep ini telah digunakan selama bertahun-tahun.

Untuk kasus yang diduga bahwa bunuh diri dapat dipicu oleh tindakan terdakwa yang melukai korban, lihat Dhaliwal [2006] EWCA Crim 1139. Pembahasannya adalah obiter. Rantai sebab-akibat juga diputus oleh tindakan sukarela dari korban. Namun prinsip ini tidak diterapkan oleh Pengadilan Banding di Kennedy [1999] Crim LR 65, sebuah keputusan yang banyak dikritik. Terdakwa menyiapkan jarum suntik berisi heroin dan air untuk korban. Korban mengetahui isi jarum suntik tersebut dan menyuntik dirinya sendiri. Dia meninggal. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwalah yang menyebabkan kematian korban dan dia bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Pengadilan menekankan bahwa terdakwa memberikan obat tersebut kepada korban untuk segera digunakan. Fakta-fakta tersebut menjadi dorongan bagi korban untuk menyuntik dirinya sendiri. (Pengadilan berpendapat bahwa posisinya akan berbeda jika persediaan tersebut untuk digunakan nanti dan oleh karena itu tidak ada dorongan.) Apa yang seharusnya dinyatakan adalah bahwa tindakan sukarela korban adalah sebuah novus actus; Oleh karena itu, terdakwa tidak menyebabkan kematian korban. Apa yang dilakukannya adalah mengemukakan fakta-fakta yang mendasari kematian tersebut, namun dengan mengesampingkan kasus-kasus polusi, hal tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai penyebab kematian. Kasus ini terlihat seperti kasus di mana hakim menganggap terdakwa bersalah secara moral sehingga menjadikannya bersalah secara hukum.

Kennedy dirujuk oleh Komisi Peninjauan Kasus Pidana ke Pengadilan Banding dan dilaporkan sebagai Kennedy (No. 2) [2005] 1 WLR 2159. Keputusan Lord Woolf CJ sangat aneh. Dia mengatakan bahwa kedua pihak 'bersama-sama terlibat dalam penggunaan heroin' dan oleh karena itu terdakwalah yang menyebabkan kematian korban. Ini adalah hukum baru. Dalam kata-kata M. J. Allen dan S. Cooper, *Elliott & Wood's Cases and Materials on Criminal Law* (Thomson, 9th edn, 2006), hal. v, 'Pengadilan Banding mengejutkan dirinya sendiri dengan menciptakan kebingungan dalam tiga bidang hukum – sebab-akibat, pembunuhan berencana yang melanggar hukum, dan tanggung jawab tambahan – dengan lahirnya konsep

baru “bertindak bersama-sama”.¹ Untungnya, House of Lords sangat tegas menegaskan kembali keutamaan prinsip intervensi 'bebas, disengaja dan terinformasi' terhadap korban.

DPR memulihkan ortodoksi di Kennedy (No. 2) [2008] 1 AC 269. Fakta-faktanya adalah kasus Kennedy yang disebutkan di atas. Pengadilan Banding mengajukan pertanyaan berikut yang penting bagi masyarakat umum: 'Kapan waktu yang tepat untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan pembunuhan jika orang tersebut terlibat dalam penyediaan . . . obat yang dikendalikan, yang kemudian secara bebas dan sukarela diberikan sendiri oleh orang yang menerima obat tersebut, dan pemberian tersebut kemudian menyebabkan kematiannya?' Para Lord dengan tegas dan bulat menjawab dalam pidato yang disampaikan oleh Lord Bingham: 'Dalam kasus orang dewasa yang berpengetahuan penuh dan bertanggung jawab, tidak pernah! Heroin tersebut disiapkan oleh terdakwa dan ia memberikan jarum suntik tersebut kepada korban, yang kemudian secara sukarela meminum obat tersebut. Rantai sebab akibat telah terputus. Meskipun terdapat skenario dimana terdakwa dapat dikatakan terlibat bersama-sama dalam pemberian heroin, namun faktanya terdakwa telah memberikan obat tersebut kepada korban, yang mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan menyuntik atau tidak. Tidak ada administrasi bersama: 'almarhum . . . punya pilihan, mengetahui faktanya, apakah akan menyuntik dirinya sendiri atau tidak. Heroin tersebut, seperti yang diketahui dengan benar oleh pertanyaan resmi, digunakan sendiri, bukan dikelola bersama.' Memang benar, Law Lords membatasi tanggung jawab dalam kasus administrasi bersama pada fakta-fakta yang jarang terjadi: mereka mengesampingkan Rogers [2003] 1 WLR 1374, di mana terdakwa terikat tourniquet di lengan korban dan korban kemudian menyuntik sendiri. Jika kasus tersebut tidak dapat dilihat sebagai kasus pemberian bersama, maka akan jarang terdapat pertanggungjawaban terdakwa ketika ia bersama-sama memberikan obat tersebut. DPR, meskipun tidak ingin 'meragukan' pihak berwenang, juga mengambil kesempatan untuk membatasi kasus Permaisuri, di atas, pada fakta-fakta yang melibatkan pelanggaran lingkungan hidup. Dalam kata-kata Lord Bingham, kasus ini tidak 'menetapkan aturan umum yang mengatur sebab akibat dalam hukum pidana'. Sekali lagi, ortodoksi telah dipulihkan, namun dengan pengecualian berdasarkan kebijakan: 'penyebab bukanlah sebuah konsep tunggal yang tidak berubah yang dapat diterapkan secara mekanis tanpa memperhatikan konteks di mana pertanyaan tersebut muncul.' Oleh karena itu, terdapat ruang untuk argumen mengenai apakah ortodoksi prinsip umum Kennedy (No. 2) atau pengecualian Permaisuri berlaku. Memang benar, ada kemungkinan perdebatan lebih lanjut karena Lords tidak menjelaskan mengapa kasus pembunuhan berencana akibat narkoba termasuk dalam aturan ortodoks.

Contoh intervensi 'bebas, disengaja dan diinformasikan' terjadi di Latif [1996] 1 WLR 104. Terdakwa didakwa mengimpor heroin ke Inggris. Obat-obatan tersebut diberikan kepada petugas bea cukai Inggris di Pakistan dan dia membawanya ke yurisdiksi. House of Lords menyatakan bahwa terdakwa yang mengatur agar heroin tersebut diserahkan kepada petugas Administrasi Penegakan Narkoba AS yang kemudian menyerahkannya kepada petugas Inggris tidak bersalah atas pelanggaran penuh tersebut, meskipun dia mungkin bersalah atas upaya tersebut. melakukan pelanggaran penuh. Lord Steyn menyatakan: 'Prinsip umum adalah

bahwa intervensi bebas, disengaja dan diinformasikan dari orang kedua, yang bermaksud untuk mengeksploitasi situasi yang diciptakan oleh orang pertama, namun tidak bertindak bersama dengannya, dilakukan untuk membebaskan aktor pertama dari tindakannya. tanggung jawab pidana.' Kata-kata dari 'yang bebas. . .' dan seterusnya adalah tulisan Hart dan Honoré dalam *Causation in the Law*, meskipun Lord Steyn menghilangkan 'normalnya' sebelum 'meredakan'. Keputusan ini tidak sejalan dengan keputusan House of Lords dalam kasus *Permaisuri*. Dalam kasus terakhir, tindakan seorang perusak seharusnya memutus rantai sebab-akibat. Sebaliknya, Lords menyatakan bahwa para terdakwa bertanggung jawab atas tindakan perusakan tersebut karena perilaku tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Lord Nicholls dalam *Empress* mungkin telah mengacaukan hukum mengenai kejadian alam (yang pengujiannya merupakan salah satu hal yang dapat diperkirakan secara masuk akal) dan hukum mengenai pihak ketiga (yang pengujiannya adalah 'intervensi yang disengaja dan diinformasikan secara bebas' memutus rantai sebab-akibat). Sebagaimana dinyatakan di atas, Lords in *Kennedy (No. 2)* membatasi *Permaisuri* pada pelanggaran lingkungan.

Sebuah ilustrasi bidang hukum ini adalah malpraktek medis. *Beldam LJ* di *Cheshire*, di atas, mengatakan bahwa hanya 'dalam kasus yang paling luar biasa dan tidak biasa' saja perlakuan kelalaian, bahkan jika penyebab langsung kematian, tidak tergantung pada tindakan terdakwa sehingga dapat dianggap dalam hukum sebagai penyebabnya. kematian korban dengan mengesampingkan perbuatan terdakwa. Penganiayaan tersebut harus 'begitu kuat hingga menyebabkan kematian sehingga [juri] menganggap kontribusi yang diberikan oleh tindakannya tidak signifikan'. Kelalaian medis dengan sendirinya tidak akan memutus rantai sebab akibat. Hal ini dilakukan hanya jika tindakan tersebut sangat 'luar biasa' sehingga penganiayaan tersebut membuat tindakan terdakwa tidak signifikan dalam menyebabkan kematian. (Aturan ini sepertinya melindungi staf medis dari konsekuensi kecerobohan mereka.) Juri harus melihat konsekuensi dari pengobatan, dan bukan pada tingkat kesalahannya. Di *Cheshire*, hakim pengadilan telah mengarahkan juri dalam hal kecerobohan dalam memberikan perlakuan. Dia seharusnya menginstruksikan mereka untuk mempertimbangkan apakah hal tersebut merupakan penyebab kematian dan mengesampingkan tindakan terdakwa. Uji Pengadilan Banding mungkin sulit untuk diterapkan. Para juri harus menggunakan penilaian mereka untuk menentukan apakah kecerobohan tersebut 'begitu kuat' atau tidak, dan berdasarkan fakta yang sama, juri yang berbeda mungkin tidak setuju, sehingga satu terdakwa bersalah atas pembunuhan atau pembunuhan, sedangkan terdakwa lainnya dibebaskan. Kritik serupa mungkin dilontarkan terhadap 'begitu mandiri' dan 'luar biasa'. Isu tersebut menjadi atribusi normatif, bukan sebab-akibat 'tetapi-untuk'. Kritik lebih lanjut terhadap *Cheshire* adalah bahwa pada saat korban meninggal, tindakan terdakwa tidak lagi 'berkekuatan' untuk menyebabkan kematian. Seperti yang dinyatakan oleh pengadilan, kelalaian dalam penangananlah yang menjadi penyebab 'langsung' kematian. Meski begitu, terdakwa tetap bersalah. Selanjutnya, terdakwa menembak korban pada bagian dada dan kaki; kematian tersebut disebabkan oleh reaksi terhadap pemasangan selang di tenggorokannya untuk membantu pernapasan. Oleh karena itu, penyebab langsung kematian bukanlah perbuatan terdakwa, namun terdakwa bersalah

karena ia telah memberikan 'kontribusi yang signifikan' terhadap kematian tersebut. Salah satu kasus yang jarang terjadi di mana penganiayaan medis memutus rantai sebab-akibat adalah kasus berikut, di Yordania.

Jordan (1956) Aplikasi 40 Cr R 152

Terdakwa menikam korban, namun lukanya sebagian besar sudah sembuh. Namun saat menjalani perawatan, korban disuntik obat dan cairan dalam jumlah besar hingga meninggal dunia. Terdakwa tidak bersalah atas pembunuhan, karena perlakuan yang diberikan sangat tidak normal dan lalai ('sangat salah') sehingga luka tersebut hanyalah penyebab kematian, bukan penyebab kematian itu sendiri.

Jordan disebut sebagai 'kasus yang sangat khusus tergantung pada fakta sebenarnya': Blaue, di atas. Ini adalah upaya untuk membedakan Jordan dari keberadaannya. Di Malcherek, di atas, pengadilan mengatakan bahwa jika diwajibkan untuk memilih antara Jordan dan Smith, pengadilan akan memilih yang terakhir; Namun, mereka mengakui bahwa kedua kasus tersebut tetap merupakan hukum yang baik. Oleh karena itu, Yordania adalah kasus yang luar biasa. Hanya jika, seperti yang terjadi di Yordania, perlakuan yang diberikan "sangat salah", maka hal tersebut akan menjadi *novus actus interveniens*. (Perlu dicatat bahwa perawatan medis di Smith dikatakan 'sangat buruk', yang tampaknya sama dengan 'sangat salah', namun di Smith, terdakwa dinyatakan bersalah.) Jordan telah dikritik karena menekankan tindakan staf medis ketika terdakwa, dan bukan staf, yang diadili. Jordan tidak jauh berbeda dengan Cheshire, namun dalam kasus terakhir terdakwa dihukum tetapi tidak dalam kasus pertama. Agaknya pertanyaan yang diajukan setelah Cheshire seharusnya diutarakan bukan sebagai 'Apakah perlakuan yang diberikan jelas-jelas salah?' namun 'Apakah perlakuan tersebut tidak bergantung pada tindakan terdakwa dan begitu kuat dalam menyebabkan kematian sehingga kontribusi tindakan tersebut tidak signifikan?'

Aturan dasar Smith, bahwa penganiayaan medis tidak memutus rantai sebab akibat, diterapkan di Cheshire, di atas. Demikian pula dalam Mellor [1996] 2 Cr App R 245 (CA) terdakwa bersalah ketika korban pemukulannya meninggal karena pneumonia aspirasi, padahal ada peluang 90 persen untuk bertahan hidup jika ia diberi oksigen, pengobatan yang benar. Pengadilan memutuskan bahwa penuntut tidak harus membuktikan bahwa penganiayaan medis bukanlah penyebab kematian yang signifikan; harus membuktikan bahwa apa yang dilakukan terdakwa mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap kematian tersebut. Dalam kasus Kirikiri [1982] 2 NZLR 648 di Selandia Baru, terdakwa antara lain memukul wajah istrinya dengan senapan. Untuk membantunya bernapas, pipa plastik dimasukkan oleh rumah sakit melalui lehernya ke tenggorokannya. Entah kenapa pipa tersebut copot dan korban pun meninggal. Jeffries J di Pengadilan Tinggi mengajukan permohonan Smith. Luka aslinya masih menjadi penyebab operasi: 'kematian dapat dikatakan sebagai akibat dari luka tersebut, meskipun ada penyebab kematian lain yang juga terjadi', seperti yang dikatakan Lord Parker CJ.

Aplikasi yang menarik adalah Malcherek, dimana para dokter mematikan sistem pendukung kehidupan pasien yang sudah mati otak. (Agaknya hal yang sama berlaku untuk pasien dalam keadaan vegetatif persisten.) Tindakan ini dianggap bukan penyebab kematian.

Penganiayaan yang membuat korban masuk rumah sakit adalah. Lord Lane CJ menganggap aneh untuk mengatakan bahwa seorang dokter yang melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa adalah penyebab kematian korban. Pengadilan tampaknya menarik undang-undang sebab akibat untuk mengecualikan dokter dan polisi guna menangkap penyerang.

Jika kondisi kesehatan korban yang sudah ada sebelumnya tidak dapat diobati karena terdakwa melukai dirinya, maka terdakwa tetap bertanggung jawab atas kematiannya kecuali, tampaknya, penolakan untuk melakukan operasi tersebut 'luar biasa dan tidak biasa': McKechnie (1992) 94 Cr App R 51 (CA). Maag korban seharusnya bisa diobati, seandainya ia tidak dimasukkan ke rumah sakit karena terdakwa memukulinya dengan TV. Tidaklah penting apakah pengobatan yang diberikan benar atau tidak, asalkan hal tersebut masuk akal dan berdasarkan fakta: para dokter mengira korban mungkin akan meninggal karena anestesi. Kasus ini menggambarkan prinsip bahwa kematian seseorang bisa disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. Alternatifnya, seseorang dapat mengatakan bahwa penyebab langsung kematian adalah penolakan untuk melakukan operasi, namun penyebab utama dari penyebab langsung tersebut adalah apa yang dilakukan terdakwa.

Perbandingan yang menarik adalah dengan undang-undang yang berkaitan dengan penolakan berobat. Terdakwa mengambil risiko bahwa korban tidak akan menjalani pengobatan, namun bukan penganiayaan yang mandiri dan ampuh. Kasus seperti McKechnie juga penting untuk menunjukkan bahwa terdakwa dapat dianggap sebagai penyebab suatu konsekuensi meskipun secara medis dia tidak menyebabkan kematian. Penyebab medisnya adalah tukak duodenum yang pecah. Terdakwa tidak mempunyai kendali atas dokter, namun tanggung jawab dapat mengubah kompetensi dokter. Terakhir, dalam hal perawatan medis, perhatian harus diberikan pada masalah kompetensi dokter. Jika korban meninggal karena kelalaiannya, apakah adil untuk mengatakan bahwa terdakwa berkontribusi besar terhadap kematian tersebut dan oleh karena itu dia bersalah atas pembunuhan atau pembunuhan tidak berencana? Dalam kasus apa pun, bahkan jika ia tidak bersalah atas pelanggaran yang fatal, ia akan bersalah atas pelanggaran yang tidak fatal.

Satu fakta yang belum menjadi masalah bagi pengadilan Inggris adalah apakah kelalaian pihak ketiga dapat dianggap sebagai *novus actus*. Kelalaian tersebut diperkirakan tidak akan memutus rantai sebab-akibat karena tindakan terdakwa tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kematian atau cedera. Pihak ketiga juga mungkin bersalah atas suatu pelanggaran, tergantung pada faktanya.

Siswa tidak boleh terlalu memikirkan bidang hukum ini. Istilah Latin *novus actus interveniens* hanyalah singkatan dari pernyataan hukum secara utuh. Sebagaimana dinyatakan oleh Pengadilan Banding dalam Kennedy [1999] Crim LR 65: 'Apakah kita berbicara tentang *novus actus interveniens* atau hanya dalam kaitannya dengan sebab-akibat. . . . Pertanyaan kritis yang harus dipikirkan oleh juri, jika (seperti dalam kasus instan) ada tindakan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu sendiri, adalah apakah terdakwa dapat dikatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan

tersebut. pelaksanaan tindakan tersebut.' Hal yang sama juga berlaku apabila pihak ketiga secara bersama-sama melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian.

(b) Kasus-kasus 'pelarian'

Hal ini merupakan ilustrasi dari masalah *novus actus interveniens*. Terdakwa bersalah bila korban dibunuh saat mencoba melarikan diri, kecuali pelarian itu tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh orang yang berakal sehat. Ada beberapa kasus, kasus utama dalam bahasa Inggris adalah *Mackie (1973) 57 Cr App R 453*. Seorang anak laki-laki berusia tiga tahun jatuh ke bawah dan meninggal dalam upaya melarikan diri dari pukulan. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Lihat juga pembahasan *Roberts (1971) 56 Cr App R 95* dalam konteks penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh nyata, di bawah. Dalam kasus *Roberts*, pelarian seorang gadis dari mobil yang bergerak (dia menderita gegar otak dan lecet dan harus dirawat di rumah sakit selama tiga hari) akibat rayuan seksual yang dilakukan oleh terdakwa dikatakan memutuskan rantai sebab-akibat hanya jika hal itu terjadi. - tidak menarik dan 'gila'. Jika 'korban melakukan sesuatu yang "konyol". . . bahwa tidak ada orang yang berakal sehat yang dapat memperkirakannya. . . kemudian, hal itu sebenarnya disebabkan oleh tindakan sukarela dari pihak korban'. Jika tindakan tersebut dapat diperkirakan secara masuk akal, maka rantai sebab-akibat tidak akan terputus. Namun, dalam beberapa kasus narkoba dimana terdakwa memberikan heroin dan perlengkapannya kepada korban, ia tetap bertanggung jawab meskipun korban disuntik secara sukarela, seperti yang telah kita lihat. Terdakwa dinyatakan bersalah jika pelarian tersebut merupakan 'akibat wajar dari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh tersangka penyerang dalam arti bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang secara masuk akal dapat diperkirakan sebagai konsekuensi dari apa yang dilakukan atau dikatakannya'. *Roch LJ di Marjoram*, di atas, menyetujui rasio *Roberts*. Rantai sebab-akibat terputus hanya jika korban melakukan sesuatu yang tidak terduga sehingga dianggap 'konyol'. Pengadilan Banding dalam *Evans [1992] Crim LR 659* tampaknya meminta pelarian tersebut sebagai 'konsekuensi wajar' dari perilaku terdakwa. Dalam *Corbett [1996] Crim LR 594 (CA)*, korbannya adalah seorang pria cacat mental yang memiliki masalah alkohol. Dia berdebat dengan terdakwa yang telah minum bersamanya sepanjang hari. Terdakwa menanduknya tanpa bermaksud membunuhnya dan saat melarikan diri, dia terjatuh ke dalam selokan. Dia ditabrak dan dibunuh oleh mobil yang lewat. Terdakwa berpendapat bahwa juri seharusnya diinstruksikan untuk menyelidiki apakah kematian korban merupakan akibat wajar dari perbuatannya dan bahwa ia seharusnya dibebaskan jika kematian tersebut bukan merupakan akibat wajar. Pengadilan mengikuti *Roberts*. Selama apa yang dilakukan korban masih dalam jangkauan tindakan yang dapat diperkirakan, rantai sebab dan akibat tetap tidak terputus. Hanya jika perbuatan korban 'konyol' barulah rantainya putus. Kecacatan dan keracunannya tidak membuat reaksinya menjadi gila. Penuntut tidak perlu membuktikan bahwa kematian korban merupakan akibat wajar dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, permohonan banding terdakwa ditolak.

Otoritas utama Persemakmuran yang melibatkan pelarian adalah keputusan Pengadilan Tinggi Australia di *Royall*, yang membahas kasus-kasus Inggris.

Royall v R (1991) 65 ALJR 451

Korban ditemukan tergeletak di tanah di bawah jendela kamar mandi di flat tempat dia dan terdakwa tinggal selama empat bulan sebelumnya. Ada banyak tanda-tanda perjuangan. Terdakwa, meski tidak menyangkal kehadirannya, mengatakan bahwa korban secara sukarela melompat keluar jendela dan tidak bermaksud membunuh atau melukainya.

Mason CJ berpendapat dengan jelas dan ringkas (di 455):

[g]secara umum suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang demi kepentingan perlindungan diri, dalam menghadapi kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak lain, yang mengakibatkan matinya orang pertama, tidak mempunyai hubungan sebab akibat yang negatif antara kekerasan atau ancaman kekerasan dan kematian. Tindakan intervensi orang yang meninggal tidak memutus rantai sebab-akibat.

Kasus-kasus di Inggris menyatakan bahwa tindakan wajar yang dilakukan untuk melarikan diri tidak memutus rantai (Pagett (1983) 76 Cr App R 279); demikian pula jika tindakan melarikan diri dapat diperkirakan secara wajar (Roberts, di atas, didukung dalam DPP v Daley [1980] AC 237). Jika pengujian tersebut merupakan pengujian yang masuk akal dan dapat diperkirakan, Pagett juga dapat dijelaskan berdasarkan hal ini. Dapat diperkirakan bahwa jika seseorang menembak polisi bersenjata, mereka akan membalas tembakan.

Mason CJ melanjutkan (Royall di 456):

[i]dalam konteks sebab-akibat, prinsip ini paling baik dirumuskan sebagai berikut: apabila perbuatan terdakwa menimbulkan dalam diri korban suatu ketakutan yang beralasan akan terjadinya kerugian fisik sehingga menjadikannya suatu akibat yang wajar (atau masuk akal) yang akan ditimbulkan oleh korban. berusaha melarikan diri dan korban terluka pada saat melarikan diri, luka tersebut disebabkan oleh kelakuan terdakwa. Apakah perlu bagi penuntut untuk menetapkan juga bahwa cara melarikan diri yang digunakan adalah konsekuensi wajar dari kekhawatiran korban akan keselamatannya tidak muncul di sini karena orang yang meninggal tidak punya cara untuk melarikan diri selain melompat keluar dari jendela di tengah jalan. situasi yang diajukan. Pertanyaan ini dapat muncul hanya ketika korban melakukan sesuatu yang tidak rasional atau tidak terduga, yang mana akan lebih sulit untuk memastikan bahwa cedera yang dialaminya merupakan konsekuensi dari tindakan terdakwa dan bukan akibat dari tindakan sukarela korban. Dalam situasi seperti ini, banyak hal yang mungkin mempengaruhi sifat dan tingkat ketakutan yang beralasan dari korban; dan dapat diperkirakan bahwa orang-orang yang takut akan keselamatan mereka sendiri yang terpaksa bereaksi secara tiba-tiba tidak akan selalu membuat penilaian yang masuk akal atau masuk akal dan mungkin bertindak tidak rasional.

Dalam kasus-kasus di Inggris, uji konsekuensi alami telah dikaitkan dengan konsep kemampuan untuk dapat diperkirakan. Karena uji konsekuensi alami pasti mengundang dugaan tentang kemungkinan terjadinya suatu kejadian, penerapan uji ini tidak mungkin dipisahkan sepenuhnya dari konsep kemampuan meramalkan. Namun, dalam pandangan saya, mengundang juri untuk mempertimbangkan hal yang dapat diperkirakan akan lebih mungkin, setidaknya dalam sebagian besar kasus, membingungkan dibandingkan memperjelas permasalahan sebab-akibat. Dalam banyak kasus, dengan alasan yang hampir

sama, saya melihat tidak ada gunanya menghubungkan permasalahan tersebut dengan pola pikir terdakwa. Di sisi lain, dalam beberapa situasi, keadaan pikiran terdakwa akan relevan dengan permasalahan tersebut, misalnya jika terdapat bukti bahwa terdakwa bermaksud agar cedera tersebut mengakibatkan hal yang sama seperti yang dilakukannya dan jika tidak ada bukti kesengajaan, faktanya akan menimbulkan keraguan tentang sebab akibat.

Brennan J menggunakan uji foreseeability (pada 460).

Pertanyaan apakah seorang terdakwa yang perbuatannya menyebabkan kematian, bertanggung jawab secara pidana atas kematian tersebut ketika kematian tersebut disebabkan oleh tindakan fatal terakhir yang diambil oleh korban, dengan demikian bergantung pada kewajaran (atau proporsionalitas) upaya korban untuk bunuh diri. - pelestarian dan pandangan masa depan terdakwa, atau perkiraan yang masuk akal, mengenai kemungkinan bahwa korban akan mengambil langkah fatal terakhir dalam menanggapi perilaku terdakwa.

Deane dan Dawson JJ berharap hal-hal yang dapat diperkirakan sebelumnya dihilangkan dari ujian tersebut. Pertanyaannya adalah apakah ketakutan tersebut beralasan, beralasan, atau masuk akal (pada 464 – 465). Toohey dan Gaudron JJ (pada tahun 471) mengatakan bahwa: '... juri dapat diberitahu bahwa jika reaksi korban terhadap tindakan terdakwa yang dikatakan menyebabkan kematian tidak proporsional dengan tindakan tersebut atau tidak masuk akal, maka rantai sebab-akibat telah terputus'. Analisis paling menyeluruh dilakukan oleh McHugh J. Dia mencatat empat tes:

- (a) pengujian operasional dan substansial (yaitu lebih dari de minimis);
- (b) uji konsekuensi alamiah, seperti dalam *Beech* (1912) 7 Cr App R 197;
- (c) uji pandangan ke depan yang masuk akal, seperti dalam *Roberts*, di atas, *Mackie* (1973) 57 Cr App R 453, dan *DPP v Daley*, di atas;
- (d) tes *novus actus interveniens* – lihat *Dalby* [1982] 1 WLR 425 (CA), dimana pengadilan menyatakan bahwa penggunaan narkoba oleh korban memutus rantai. Seperti yang dikatakan *Waller LJ*, '... penyediaan obat-obatan itu sendiri tidak akan menimbulkan bahaya kecuali jika almarhum kemudian menggunakan obat-obatan tersebut dalam bentuk dan kualitas yang berbahaya.' *Dalby* masih benar dalam hal ini: *Khan* [1998] Crim LR 830 dan kedua pihak berwenang ini tidak dapat didamaikan dengan *Kennedy*, di Pengadilan Banding, dan ini merupakan hal yang salah. Di *Dalby*, terdakwa memberikan narkoba kepada korban yang kemudian menyuntik dirinya sendiri. Dia meninggal. Pengadilan memutuskan bahwa pemberian obat tersebut tidak menyebabkan kematian korban; yang menyebabkan hal ini adalah tindakan korban yang menyuntik dirinya sendiri. Tindakan itu memutus rantai sebab-akibat. Di *Kennedy*, Pengadilan Banding kembali menyetujui bahwa *Dalby* tetap menjadi hukum yang baik. Namun, hal ini membedakannya dengan alasan bahwa di *Kennedy*, terdakwalah yang menyiapkan jarum suntik dan menyerahkannya kepada korban, yang kemudian menyuntik dirinya sendiri. Perbedaan antara penyediaan obat-obatan (*Dalby*) dan penyediaan serta penyiapannya tidaklah jelas. Kedua kasus tersebut

melibatkan terdakwa yang mendorong korban untuk menggunakan obat-obatan terlarang.

Karena banyaknya pengujian yang berbeda, terbukalah jalan bagi Pengadilan Tinggi Australia untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan hukum dalam kasus pelarian atau ketakutan. McHugh J lebih menyukai uji perkiraan yang masuk akal, yang lebih mengutamakan otoritas, dibandingkan uji konsekuensi alamiah, karena uji konsekuensi alamiah ini bersifat ambigu (sangat mungkin terjadi atau mungkin terjadi?). Meskipun pengamatan Dalby menunjukkan hal yang sebaliknya, bukanlah suatu *novus actus interveniens* bahwa korban bertindak tidak wajar. Bunuh diri dan penolakan pengobatan medis tidak perlu memutus rantai sebab akibat. 'Dalam menentukan apakah orang yang berakal sehat dapat memperkirakan kerugian yang diderita oleh korban, tindakan korban yang tidak rasional atau tidak masuk akal akan menjadi faktor variabel yang harus dipertimbangkan berdasarkan seluruh keadaan kasus tersebut' (pada 482).

Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Australia berbeda pendapat mengenai masalah ini. Namun, pengadilan yang sama menyatakan dalam *McAuliffe v R* (1995) 69 ALJR 621 bahwa Royall berwenang dalam proposisi bahwa 'dalam kasus ketakutan, pelarian atau penyelamatan diri, biasanya tidak diinginkan untuk memusatkan perhatian pada hal yang dapat diperkirakan'. Sampai hukum Inggris yang menantang menerapkan uji perkiraan yang masuk akal dalam kasus-kasus pelarian.

Ada dugaan bahwa terdapat dikte yang kuat dalam *Environment Agency v Empress Car Co (Abertillery) Ltd* [1999] 2 AC 22, yang dibahas di atas, yang akan menyebabkan berakhirnya uji 'foreseeability'. Lord Clyde menyatakan (dan Lord Hoffmann berbicara dengan efek serupa):

Dalam memutuskan apakah suatu faktor tertentu mempunyai peranan yang begitu penting sehingga aktivitas apa pun yang dilakukan oleh terdakwa harus dianggap sebagai elemen penyebab yang sepenuhnya digantikan, hal ini tidak mempertimbangkan kemungkinan yang dapat diperkirakan, atau perkiraan yang masuk akal, dari faktor asing yang menurut saya tidak relevan. menjadi pantas, melainkan karakternya yang tidak wajar, luar biasa, atau tidak lazim.

Mungkin saja House of Lords membatasi pernyataannya pada kasus-kasus polusi (tentu saja, para Lords tampaknya berupaya keras untuk mencegah polusi), meskipun Pengadilan Banding di Finlay tidak mengambil pandangan seperti itu di atas. Lord Hoffmann mengatakan bahwa ketika menentukan sebab akibat, tujuan hukum harus dipastikan. Tujuannya dalam hal ini adalah untuk menghentikan pencemaran memasuki perairan yang terkendali. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disebabkan oleh perusahaan yang ikut serta dalam pencemaran tersebut (begitu juga dengan pihak ketiga yang membuka keran sehingga solar mengalir ke sungai). Biasanya kita mengharapkan intervensi pihak ketiga untuk memutus rantai sebab-akibat. Berdasarkan fakta, bukanlah hal yang luar biasa jika ada pihak ketiga yang tidak dikenal menyalakan keran tangki berisi solar, sehingga bahan bakar tersebut mencemari sungai. Melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda, pihak ketiga dapat menjadikan terdakwa bersalah atas suatu kejahatan dengan memilih untuk menyebabkan

pencemaran. (Apakah seorang penghuni rumah menyebabkan perampokan karena memiliki rumah? Sudah dapat diperkirakan bahwa perampokan dapat terjadi di rumah-rumah termasuk rumah ini.) Dan mungkin sulit untuk membedakan kejadian-kejadian yang tidak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa yang bertentangan dengan pandangan House of Lords. Jika Empress dan Finlay benar, intervensi pihak ketiga, termasuk korban, tidak akan memutus rantai sebab-akibat kecuali dalam keadaan luar biasa bahkan ketika pihak ketiga tersebut bertindak dengan cara yang 'bebas, disengaja, dan terinformasi'. Perluasan undang-undang tersebut tidak boleh dilakukan secara ad hoc, karena hal tersebut tentunya terjadi di Finlay (lihat Kennedy (No. 2) di atas), dan memerlukan pembenaran.

Tidak perlu memberikan instruksi tentang ujian di Roberts jika faktanya tidak memerlukannya. Misalnya, dalam Notman [1994] Crim LR 518, terdakwa yang dilarang masuk ke toko, membuat keributan dengan orang lain di dalamnya. Seorang polisi mengulurkan kakinya untuk menghentikan terdakwa yang menyerangnya dan menyebabkan cedera pada pergelangan kakinya. Terdakwa bersalah atas penyerangan yang menyebabkan luka fisik yang nyata. Kasusnya mudah, tidak memerlukan petunjuk sebab akibat yang rumit: cedera itu disebabkan oleh terdakwa atau bukan.

Tes apa pun yang diadopsi oleh hukum Inggris, hukumnya akan fleksibel. Hakim akan dapat menggunakan konsep-konsep seperti 'kebodohan' dan 'dapat diperkirakan' untuk menghukum orang-orang yang mereka anggap bersalah dan untuk membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Dalam kasus Roberts, korban melompat keluar dari mobil yang melaju cukup lambat ketika terdakwa mencoba melepaskan mantelnya sebagai bagian dari serangan seksual. Jika kendaraan tersebut melaju dengan cepat, menurut pengadilan, lompatannya dianggap 'konyol'. Akibatnya, korban tidak boleh mencoba melarikan diri dari kekerasan seksual ketika kendaraan sedang melaju dengan cepat, namun bebas untuk melarikan diri dari mobil yang melaju lambat. Namun dalam kedua situasi tersebut, penyebab sebenarnya dari upaya melarikan diri tersebut adalah tindakan terdakwa, dan pertanyaan apakah terdakwa bersalah menjadi salah satu kebijakan hukum. Dari segi kebijakan, dapat dikatakan bahwa terdakwa harus bersalah, tidak peduli seberapa cepat kendaraan melaju, karena perempuan harus mempunyai hak untuk melarikan diri dari kekerasan seksual dalam segala situasi dan bukan hal yang tidak terduga atau bodoh jika mereka harus melakukannya. lakukan itu. Perlu juga dinyatakan bahwa pengujian yang dapat diperkirakan secara masuk akal dalam kasus Roberts tidak sejalan dengan pengujian penyebab operatif dalam Smith, di atas, dan bahwa pengadilan tidak merujuk pada Smith. Tentu saja hakim-hakim Inggris, yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka dihadapkan pada kasus-kasus dengan ujian yang berbeda, belum memilih hakim mana yang harus memerintah. Memang benar, dalam Williams [1992] 1 WLR 380 (CA), Stuart-Smith LJ mengatakan bahwa terdakwa bersalah jika upaya korban yang meninggal untuk melarikan diri dari mobil yang bergerak dengan kecepatan sekitar 30 mph 'sebanding dengan ancaman, artinya, bahwa hal itu berada dalam batas kewajaran dan tidak terlalu bodoh sehingga menjadikannya sebagai tindakan sukarela yang merupakan *novus actus interveniens*'. Dalam menilai apakah korban bertindak wajar dalam upaya melarikan diri dari percobaan perampokan, juri harus mempertimbangkan

'karakteristik tertentu dari korban dan fakta bahwa dalam keadaan yang sangat menyedihkan ia dapat bertindak tanpa pemikiran dan pertimbangan'. (Hal serupa juga terjadi pada Marjoram di atas.) Meskipun juri harus mempertimbangkan karakteristik korban, mereka tidak boleh mempertimbangkan karakteristik terdakwa. Ujiannya adalah ujian yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat, bukan ujian yang, seperti dalam provokasi, melibatkan orang yang berakal sehat atau orang biasa yang memiliki sebagian besar ciri-ciri terdakwa. Pembaca yang telah mempelajari hukum kelalaian dalam perbuatan melawan hukum akan dapat menarik persamaannya. Mungkin ada perbedaan antara tes kisaran tanggapan yang masuk akal seperti dalam kasus ini dan tes tidak ada orang yang masuk akal yang dapat diharapkan untuk meramalkan tindakan korban di Roberts. Berdasarkan fakta Williams, meskipun hukuman atas pembunuhan tidak disengaja telah dibatalkan, tidak mudah untuk melihat apakah korban bertindak wajar. Dia sudah meninggal, dan pernyataan ketiga terdakwa tidak seragam mengenai ancaman yang mereka berikan kepadanya. Tanpa mengetahui sifat ancamannya, juri tidak dapat mengatakan apakah reaksi tersebut konyol atau proporsional. Kontrasnya dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan aturan bahwa seseorang mengambil korbannya sebagaimana ia ditemukan adalah hal yang jelas. Dalam kasus yang terakhir ini, kita tidak perlu menanyakan apakah perilaku korban, seperti menolak transfusi darah, adalah sesuatu yang 'konyol', sedangkan dalam kasus pelarian diri, reaksi berlebihan yang disebabkan oleh rasa takut yang berlebihan dari terdakwa memutus rantai sebab-akibat.

(c) Transaksi yang tidak dapat dibagi-bagi

Aturan umumnya adalah 'niat dan tindakan harus bersatu untuk membentuk kejahatan': *Fowler v Padget* (1798) 101 ER 1103, 1106. Tidak ada pembelaan jika serangkaian tindakan berujung pada kematian dan diklasifikasikan oleh pengadilan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. (Lihat juga bagian tentang kontemporer.) Pihak berwenang yang menetapkan hal ini adalah *Thabo Meli v R* [1954] 1 All ER 373. Tindakan membuat korban tidak sadarkan diri dan mendorongnya ke atas tebing di mana ia meninggal karena paparan adalah diklasifikasikan oleh Dewan Penasihat sebagai tidak dapat dibagi. Terdakwa bersalah melakukan pembunuhan meskipun penyebab kematian sebenarnya bukanlah perbuatannya. Kasus tersebut dilanjutkan di *Gereja* [1966] 1 QB 59 oleh Pengadilan Banding Pidana. Berbeda dengan di *Thabo Meli*, tidak ada rencana sebelumnya – yaitu membuang perempuan korban ke sungai – namun *Thabo Meli* diperluas dari pembunuhan menjadi pembunuhan berencana. *Thabo Meli* juga diikuti dalam *Moore* [1975] Crim LR 229 (CA), di mana para terdakwa tampaknya hanya bermaksud menyerang, bukan membunuh. Terdakwa pertama mempunyai dendam terhadap korban dan mengatur pertemuan dengannya. Terdakwa kedua menemani terdakwa pertama. Mereka membawa balok angin, kantong plastik, dan seutas tali. Korban masuk ke dalam mobil van dan terdakwa pertama memukulnya hingga pingsan dengan pentungan. Terdakwa pertama mengira dia telah membunuhnya. Dia membebani dia dengan balok angin dan melemparkannya ke pelabuhan, di mana dia meninggal karena tenggelam. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan.

Kasus yang menerapkan prinsip *Thabo Meli* adalah *Le Brun* [1992] QB 61 (CA). Saat terjadi pertengkaran, terdakwa memukul rahang istrinya hingga menyebabkan istrinya

tersungkur. Dia menjatuhkannya saat mencoba menyeretnya ke dalam rumah. Dia meninggal karena tengkoraknya retak. Terdakwa telah memukulinya tetapi tidak bermaksud menyakitinya secara serius. Dia tidak menjatuhkannya dengan sengaja. Pengadilan memutuskan bahwa dialah yang menyebabkan kematiannya dan berpandangan bahwa pukulan, menjatuhkan korban, dan kematian adalah bagian dari transaksi yang sama. Oleh karena itu, prinsip transaksi yang tidak dapat dibagi-bagi berlaku di luar wilayah pembuangan jenazah. Di bawah Thabo Meli, cukuplah bahwa terdakwa mempunyai mens rea kejahatan, dalam hal ini pembunuhan berencana, pada awal rangkaian kejadian. Alternatifnya, pengadilan mengadopsi prinsip pertama yang disebutkan di atas, bahwa ketika terdakwa menjatuhkan istrinya, tidak ada pemutusan rantai sebab-akibat yang mencegah pukulan tersebut menjadi penyebab kematian. Kematian sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Pengadilan berpendapat bahwa jika terdakwa berusaha membantu istrinya masuk ke rumah untuk membuat istrinya lebih baik, maka tindakan menjatuhkan tersebut mungkin merupakan novus actus interveniens. Sebenarnya, tindakannya adalah upaya untuk menyembunyikan serangannya terhadapnya, atau penyelesaian pertengkarnya dengannya. Dalam hal ini pengadilan bingung antara motif dan sebab akibat. Dikatakan bahwa jika terdakwa mempunyai motif yang baik, mencari pertolongan medis, maka dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak menyebabkan kematiannya; Namun, jika ia menjemput perempuan itu dengan motif buruk, seperti menyembunyikan serangan terhadap perempuan itu, maka ia bersalah, karena dengan demikian ia akan menyebabkan kematian perempuan itu. Alasannya membuat keadaan pikiran terdakwa relevan dengan sebab-akibat, tetapi aturannya adalah sebab-akibat merupakan bagian dari actus reus. (Agaknya dia juga bersalah atas pembunuhan yang disengaja karena kelalaian. Penjatuhannya terhadap wanita tersebut merupakan tindakan yang sangat lalai, jika juri berpendapat demikian. Jika anggapan ini benar, tidak perlu berdebat tentang niat untuk melakukan pemukulan dan penyebab kematian dipisahkan dalam satu kasus. waktu, karena dalam pembunuhan tidak berencana seperti ini mereka berada pada masa yang sama.)

Pihak berwenang saat ini prihatin dengan pembunuhan, namun prinsip-prinsip tersebut berlaku untuk pelanggaran lainnya.

(d) Penolakan perawatan medis

Kasus lama adalah Holland (1841) 2 Mood & R 351. Korban menolak pengobatan karena luka di jari dan meninggal karena tetanus. Terdakwa divonis bersalah atas pembunuhan di Liverpool Assizes dengan alasan bahwa luka adalah penyebab utama kematian. Hal yang sama juga berlaku jika korban tidak menjalani pengobatan karena alasan agama atau psikologis. Kasus yang paling sahih adalah Blaue, di atas, dimana seorang Saksi Yehova menolak transfusi darah. Pengadilan Banding memutuskan bahwa terdakwa harus mengambil korbannya ketika ia menemukannya (lihat (e) di bawah), sebuah proposisi yang serupa dengan aturan tengkorak kulit telur dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, luka tusuk itulah yang menyebabkan kematian korban. Lawton LJ mengatakan: 'Fakta bahwa korban menolak untuk menghentikan terjadinya hal ini tidak memutuskan hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kematian.' Pengadilan menolak argumen bahwa

karena perawatan medis telah membaik pada tahun-tahun sejak Belanda, maka hukum dalam kasus itu juga telah berubah. Boleh dikatakan bahwa Blaue mencontohkan kebijakan kebebasan beragama dalam hukum Inggris. Bukan berarti penolakan korban tidak beralasan. Aturan ini membedakan bidang hukum ini dari 'kasus pelarian' yang dibahas di atas. Untuk membuat penyerang bersalah atas pembunuhan, dapatkah korban menolak untuk memasang tourniquet, sebuah skenario yang tidak mungkin terjadi namun mungkin terjadi? Mengapa seorang terdakwa harus dinyatakan bersalah atas pembunuhan ketika korbannya secara tidak wajar menolak mencari pertolongan medis? Mengapa penolakan tersebut bukan merupakan *novus actus interveniens* padahal mungkin saja terdapat perlakuan yang sangat buruk? Haruskah terdakwa bersalah meskipun ia tidak memperkirakannya dan orang yang berakal sehat tidak memperkirakan penolakannya? Mengapa tanggung jawab atas pembunuhan harus bergantung pada apakah korban menolak untuk menjaga dirinya sendiri?

(e) Terdakwa harus membawa korbannya begitu ia menemukannya

Aturan sebab-akibat ini terkadang disebut aturan 'tengkorak telur' dan sama dengan aturan *tort*. Jika, misalnya, korban mempunyai tengkorak yang tipis dan tidak ada seorang pun termasuk terdakwa yang mengetahui fakta ini, jika korban meninggal karena terdakwa memukul kepalanya dengan tongkat baseball tetapi korban tidak meninggal, seandainya dia tidak mempunyai tengkorak yang tipis, maka terdakwa dianggap bertanggung jawab atas kematian tersebut, padahal ia tidak mengetahui tipisnya tengkorak tersebut (dan padahal orang berakal tidak akan mengetahuinya). Seperti yang bisa kita lihat dari Blaue, aturan ini tidak terbatas pada kondisi fisik (seperti hemofilia) namun sebagian besar situasi dalam praktiknya akan melibatkan kesejahteraan fisik korban dimana kondisi kesehatannya buruk. Agaknya peraturan ini dapat diperluas ke situasi di mana seorang perempuan, ketika diperkosa, bunuh diri: lihat juga *Dear* [1996] Crim LR 595, yang dibahas di atas. Tentu saja terdakwa harus bertindak atas risikonya sendiri jika korban mempunyai kondisi mental yang sudah ada sebelumnya seperti depresi. Patut dipertanyakan apakah prinsip ini berlaku atau tidak jika pihak ketiga yang menjadi penyebab langsung kematian, misalnya jika orang tua atau wali seorang bayi yang beragama Saksi Yehuwa menolak transfusi darah untuk bayi tersebut. Jika prinsip dalam Blaue tidak diterapkan karena mengarah pada hasil yang tidak adil, maka terdakwa tetap bersalah atas percobaan pembunuhan dan melukai dengan maksud untuk menimbulkan cedera tubuh yang parah.

Pembenaran atas aturan tersebut dikemukakan oleh McLachlin J di Mahkamah Agung Kanada dalam *Creighton* (1993) 105 DLR (4th) 632. Dia mengatakan bahwa aturan tengkorak kulit telur 'membutuhkan agresor, begitu mereka memulai tindakan berbahaya yang mungkin diperkirakan akan melukai orang lain, bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi, bahkan sampai kematian'. Undang-undang yang berlaku saat ini menghentikan pengadilan, menurut pendapat banyak orang, untuk menyelidiki manfaat dari keyakinan agama. Meskipun skenario ini kecil kemungkinannya, jika korban menolak transfusi karena rasa dendam terhadap terdakwa, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terdakwa tetap akan menyebabkan kematian terdakwa. Dapat diperdebatkan bahwa, meskipun terdakwa secara faktual telah menyebabkan kematian (karena masalah transfusi tidak akan timbul jika tidak demikian),

kematian tidak boleh secara hukum dianggap berasal dari dirinya. Hart dan Honoré, *Causation in the Law*, 2nd edn (OUP, 1985) 332, menilai bahwa seseorang yang menolak transfusi atas dasar agama bukanlah tindakan sukarela karena tekanan agamanya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa korban yang dengki itu bertindak secara sukarela. Mereka berpendapat, sebagaimana telah ditunjukkan, bahwa rantai sebab-akibat diputus oleh 'tindakan manusia yang bebas, disengaja dan diinformasikan' (pada 136). Dapat dikatakan bahwa julukan tersebut bersifat normatif dan tidak sepenuhnya deskriptif. Akan tetapi, 'sukarela' dan 'tidak disengaja' adalah kata-kata bunglon, dan jika terdakwa dianggap mengambil korbannya ketika ia menemukannya, mengapa ia tidak dapat menganggapnya dengki dan karenanya bersalah? Apakah seseorang yang menganut agama tertentu bertindak bebas jika ia menolak transfusi darah? Penerapan tengkorak cangkang telur oleh Cheshire adalah 'independen' dari tindakan terdakwa. Terlebih lagi, jika terdakwa di Blaue harus membawa korbannya saat ia menemukannya, mengapa aturan yang sama tidak berlaku bagi pengendara yang melaju kencang dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang penumpang (lihat Roberts, di atas)? Aturan-aturan ini, yang keduanya mengaktifkan respons korban, tidak konsisten. Tengkorak cangkang telur tidak dapat diperkirakan secara wajar. Mungkin tidak masuk akal bagi seorang wanita untuk bunuh diri setelah diperkosa, tetapi, menurut Blaue, pemerkosa tersebut akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Blaue berpotensi menelan kekuasaan di Roberts. Salah satu kemungkinannya adalah terdakwa tidak mengambil korban yang 'bodoh' saat ia menemukannya. Sebuah contoh akan terjadi jika korban mengira bahwa kanker dapat tertular dengan menghirup hembusan napas penyerang kankernya. Upaya lain untuk mendamaikan Blaue dan Roberts adalah dengan mengatakan bahwa di Blaue korban menolak untuk bertindak sedangkan di Roberts korban memang bertindak, dan oleh karena itu pembedaannya terletak pada apakah ada tindakan atau kelalaian. Alternatifnya, jika korban harus bereaksi secara wajar dalam kasus pelarian, mengapa tidak dalam kasus penolakan pengobatan? Argumen yang terkait adalah jika pelarian yang bodoh memutus rantai sebab-akibat, mengapa keputusan sukarela untuk tidak melakukan transfusi tidak memutusnya? Pasti ruginya kalau korban menolak berobat karena tidak suka dengan warna tembok rumah sakit? Cara lain untuk mendamaikan Blaue dan Roberts adalah dengan menyatakan bahwa Blaue adalah kasus khusus yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

Lihat D. Klimchuk 'Penyebab: tengkorak tipis dan kesetaraan' (1998) 11 *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 115. Disarankan bahwa tes 'ambil korban Anda' tidak boleh diterapkan jika hasilnya akan menyinggung akal sehat; oleh karena itu, jika korban telah bertindak dengan cara yang 'konyol' maka terdakwa tidak boleh bersalah atas pelanggaran yang didakwakan, meskipun ia mungkin masih bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan atau percobaan tersebut. Disarankan juga bahwa apakah korban mempunyai jantung yang lemah, menolak transfusi darah dan sejenisnya tidak mempengaruhi kesalahan moral terdakwa.

Bidang hukum ini dapat dibandingkan dengan bidang hukum yang berkaitan dengan kelalaian dalam perawatan medis. Terdakwa membawa dokter yang menemukannya; artinya,

kompetensi dokter (biasanya) tidak relevan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti halnya kepribadian korban yang tidak penting.

(f) Kelalaian yang berkontribusi

Fakta bahwa korban turut lalai sehingga menyebabkan kematiannya sendiri tidak membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana. Dalam Swindall dan Osborne (1846) 2 Cox CC 141 korban ditabrak dan dibunuh oleh salah satu dari dua terdakwa. Juri diinstruksikan bahwa tidak peduli apakah almarhum tuli, mabuk, atau ceroboh, dan apakah keberadaannya berkontribusi terhadap kematiannya. Namun, jika kelalaian yang berkontribusi sangat besar, maka rantai sebab-akibat dapat terputus, sehingga kelalaian besar akan dipandang sebagai sebuah *novus actus* (lihat di atas).

2.4 KESULITAN DALAM PEMBUKTIAN SEBAB-AKIBAT

Kita dapat melihat kesulitan dalam membuktikan sebab akibat dan akibat dari kegagalan tersebut pada diri Fisher.

Fisher [1987] Kejahatan LR 334

Terdakwa, seorang penjaga klab malam, ikut campur dalam perkelahian yang melibatkan korban. Penjaga tersebut beberapa kali membenturkan kepala korban ke tangga sambil menyeretnya menuruni tangga. Saat mereka sampai di bawah tangga, korban sudah meninggal. Jika kematian sebagian disebabkan oleh menyeret korban ke bawah, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan tidak berencana. Namun jika korban terbunuh oleh pukulan yang dilakukan terdakwa untuk membela diri, maka ia tidak bersalah. Karena jaksa penuntut tidak dapat membuktikan hal tersebut, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Hal serupa juga terjadi pada Bunn (1989) *The Times*, 11 Mei. Terdakwa memukul kepala korban dengan aba-aba snooker. Mungkin akibatnya, korban menderita penyakit mental dan bunuh diri tiga bulan kemudian. Jaksa membatalkan kasusnya karena tidak yakin bahwa juri yang masuk akal akan menjatuhkan hukuman karena tidak yakin apakah pukulan tersebut menyebabkan kematian. Dalam Evans [1992] *Crim LR 659 (CA)*, Mahkota tidak dapat membuktikan bahwa perilaku terdakwa menyebabkan korban melompat keluar jendela hingga tewas. Apabila korban melakukan bunuh diri, mungkin akan menjadi masalah jika menghubungkan kematian korban dengan terdakwa.

Usulan untuk reformasi sebab-akibat

Dalam rancangan KUHP Komisi Hukum, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989, kelas 17, antara lain berbunyi:

- (1) . . . seseorang menimbulkan akibat yang merupakan unsur delik apabila . . .
 - (a) ia melakukan suatu tindakan yang kontribusinya tidak dapat diabaikan; atau
 - (b) ia lalai melakukan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya tindakan tersebut dan yang menurut hukum wajib dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
- (2) Seseorang tidak menimbulkan akibat apabila setelah ia melakukan perbuatan itu atau melakukan kelalaian itu timbullah suatu perbuatan atau peristiwa. . .

- (a) yang merupakan penyebab langsung dan cukup dari akibat tersebut;
- (b) yang tidak dia duga sebelumnya, dan
- (c) yang dalam keadaannya tidak dapat diperkirakan secara wajar.

Dalam komentarnya, Komisi Hukum (halaman 188) menunjukkan bahwa mereka ingin menyatakan kembali undang-undang yang ada saat ini dalam kaitannya dengan sebab-akibat, menganggap korban sebagai korban yang ditemukan, melakukan tindakan intervensi termasuk kasus pelarian, penganiayaan medis termasuk prinsip di Yordania, di atas, dan penolakan pengobatan. Pernyataan kembali tersebut tidak langsung menunjukkan bahwa pilihan tindakan tersebut pada dasarnya merupakan tindakan normatif, bukan tindakan faktual. Suatu sebab dipilih dan dikaitkan dengan terdakwa atau tidak. Hukum yang berlaku saat ini kadang-kadang dikritik karena tidak menerapkan prinsip-prinsip ilmiah secara langsung, namun diragukan bahwa hukum dapat mencapai tahap di mana hanya ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan masalah sebab-akibat. Sebab-sebab fakta saja tidak cukup, dan mengatakan bahwa terdakwa menyebabkan sesuatu belum tentu merupakan pernyataan fakta. Dapat dikatakan bahwa terdakwa bersalah di Smith hanya karena perkelahian terjadi di Jerman, suatu keadaan yang tidak disengaja, dimana perlakuan pada saat itu buruk, suatu keadaan yang tidak disengaja lainnya, dan tentu saja baik Inggris maupun pemerintah Jerman Barat (saat itu) tidak dimasukkan ke dalam kasus tersebut. diadili karena tidak memberikan standar perawatan medis yang baik. Untuk kritik terhadap cakupan pasal 17(2) lihat Glanville Williams 'Finis for novus actus', [1989] CLJ 391. Tentu saja frasa seperti 'dapat diabaikan' dan 'segera dan cukup' terbuka untuk ditafsirkan.

Kelalaian

Seseorang harus berhati-hati ketika menerjemahkan *actus reus* ke dalam bahasa Inggris. Ini terlihat seperti 'tindakan bersalah'. Namun, terdakwa juga bisa bersalah jika ia gagal atau lalai melakukan sesuatu (*omission*). Jika dalam teori ortodoks hukum pidana membebankan kewajiban untuk berbuat dan terdakwa tidak melakukan perbuatan itu maka ia bersalah. Harus ada kewajiban untuk bertindak; jika tidak, semua orang yang tidak melakukan apa pun akan menyebabkan terjadinya *actus reus*. Hukum Inggris secara tradisional tidak selalu menyatakan seseorang bersalah karena gagal bertindak. Ada kasus-kasus luar biasa di mana terdakwa bertanggung jawab asalkan ia mempunyai *mens rea* yang diperlukan. Pengecualian ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun prinsip umumnya tetap bahwa pada umumnya seseorang tidak bersalah karena lalai melakukan sesuatu.

Generasi mahasiswa hukum sangat senang dengan kisah mengerikan tentang orang-orang yang menyaksikan seorang anak kecil tenggelam dalam air sedalam satu inci. Begitulah yang dikatakan C. Ryan, *Criminal Law*, 4th edn (Blackstone Press, 1995) 45. Padahal orang tua bersalah jika membiarkan anaknya tenggelam dalam keadaan seperti itu. (Apakah seorang anak akan mengalami *actus reus* pembunuhan jika dia membiarkan orang tuanya tenggelam dalam keadaan yang sama masih bisa diperdebatkan.) Kita tidak boleh berpikir bahwa kelalaian selalu tidak seserius komisi. Membuat seseorang mati kelaparan mungkin lebih tidak bisa diterima secara moral dibandingkan membunuh karena alasan belas kasihan. Meskipun

demikian, hukum pidana Anglo-Welsh membedakan antara tindakan (seperti penikaman) dan kelalaian (seperti tidak memberi makan bayi). Perbedaan ini didasarkan pada pandangan bahwa ada garis tegas yang dapat ditarik antara tindakan dan kelalaian, yang merupakan pandangan umum hingga saat ini di kalangan peradilan: lihat Phillimore LJ dalam *Lowe* [1973] QB 702 (CA).

Aturan umum dicontohkan oleh *Wychavon DC v National Rivers Authority* [1993] 1 WLR 125. Dewan tersebut dituduh menyebabkan benda-benda tercemar memasuki air yang dikendalikan yang bertentangan dengan Undang-Undang Air tahun 1989, pasal 107(1)(c). Watkins LJ di Pengadilan Divisi menyatakan bahwa kegagalan mencegah atau mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan penyumbatan dalam sistem yang menjadi tanggung jawabnya bukan merupakan pelanggaran. Tidak ada tindakan positif atau kesengajaan yang menyebabkan limbah tersebut masuk ke sungai. Keputusan ini bergantung pada konstruksi undang-undang, 'penyebab atau dengan sengaja mengizinkan': biasanya 'penyebab' mencakup tindakan dan kelalaian. (Mungkin kasusnya sendiri saat ini akan diputuskan secara berbeda: lihat antara lain, *National Rivers Authority v Yorkshire Water Services Ltd* [1995] 1 AC 444 (HL); namun, prinsipnya tetap berlaku.) Posisinya akan berbeda seandainya dewan tersebut didakwa dengan sengaja mengizinkan bahan-bahan yang tercemar memasuki perairan yang dikendalikan: *Badan Lingkungan Hidup v Empress Car Co (Abertillery) Ltd* [1999] 2 AC 22 (HL) (kasus ini juga dikenal sebagai *Empress Car Co (Abertillery) Ltd v National Rivers Authority*). 'Hanya diam-diam berdiri dan melihat' tidaklah 'menyebabkan': *Price v Cromack* [1975] 1 WLR 988 (DC). Seseorang dapat membiarkan sesuatu terjadi jika ia gagal mencegahnya. Aspek kasus ini termasuk dalam (b) di bawah. Pengecualian yang ada sekarang dirinci.

Poin (a)–(d) merinci pelanggaran yang dapat dilakukan karena kelalaian. Poin (e)–(i) menyatakan ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk bertindak sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang biasanya dilakukan oleh suatu tindakan, namun dapat dilakukan karena kelalaiannya, tanpa campur tangan. Daftar situasi di mana kewajiban hukum untuk bertindak dikenakan tidak tertutup: *Khan* [1998] Crim LR 830 (CA). Biasanya dikatakan bahwa hakimlah yang memutuskan apakah kewajiban tersebut ada, tetapi di *Khan* ditetapkan bahwa apakah kewajiban perawatan harus dilakukan oleh seorang pengedar narkoba kepada kliennya adalah sebuah fakta yang bergantung pada keadaan. Ada dugaan bahwa *Khan* salah. Juri tidak dapat memperluas dan mengontrak berbagai tugas untuk bertindak. Misalnya, juri tidak dapat mengubah hasil seperti contoh *Ryan* yang dikutip di atas, dengan mengubah undang-undang.

- (a) Karena supremasi legislatif Parlemen dapat mengubah hukum umum bahwa seseorang tidak bersalah karena lalai melakukan sesuatu. Undang-undang telah menciptakan pelanggaran yang hanya dapat dilakukan jika kelalaian seperti secara tidak jujur menyimpan kredit yang salah yang bertentangan dengan pasal 24A Undang-Undang Pencurian tahun 1968 sebagaimana disisipkan dalam Undang-undang Pencurian (Amandemen) tahun 1996 atau tidak menunjukkan spesimen nafas. Biasanya tanggung jawab dibebankan pada tipe orang tertentu, seperti penghuni atau

pengemudi. Berdasarkan Merchant Shipping Act tahun 1995, pasal 58(2)(b), nakhoda atau pelaut yang lalai melakukan apa pun yang diperlukan untuk menyelamatkan kapal dari kehilangan atau kerusakan serius dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran. Seseorang mungkin bersalah atas pelanggaran karena tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dirinya dan yang menyebabkan cedera atau kerusakan: Undang-undang Lalu Lintas Jalan 1988, s 170. Kegagalan dalam mengasuh anak merupakan pelanggaran di bawah Anak-anak dan Remaja. UU Perorangan tahun 1933, pasal 1(1). Ini adalah kejahatan pengabaian yang disengaja yang akan dibahas pada bab berikutnya. Dalam masing-masing pelanggaran ini perlu diperhatikan siapa yang dikenakan kewajiban: nakhoda atau pelaut, supir dan orang tua. Orang yang lewat tidak bertanggung jawab. Kewajiban ini terbatas pada kelompok orang tertentu. Kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan terorisme merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Terorisme tahun 2000, pasal 20, jika informasi tersebut sampai kepada terdakwa dalam perdagangan, profesi, bisnis atau pekerjaannya dan dia tidak mengungkapkannya kepada polisi sebagai segera setelah dapat dipraktikkan secara wajar. Luasnya tugas tergantung pada konstruksi dan dapat mencakup seluruh dunia, seperti yang ditunjukkan oleh undang-undang ini.

- (b) Dalam beberapa pelanggaran, bahasa undang-undang dapat dibaca sebagai pengenaan tanggung jawab karena tidak melakukan sesuatu. Seseorang mengizinkan pengemudinya melanggar hukum jika seseorang tidak mengambil langkah wajar untuk mencegah pelanggaran: *Inspektorat Kendaraan v Nuttall* [1999] 1 WLR 629 (HL). Seseorang bersalah melakukan penanganan dengan 'membantu penyimpanan' barang curian ketika seseorang meninggalkan uang di rekening Kantor Posnya: *Pitchley* (1972) 57 Cr App R 30 (CA). Demikian pula seseorang dapat menghalangi jalan raya dengan tidak memindahkan tembok yang runtuh setelah diberikan pemberitahuan untuk membongkarnya: *Gully v Smith* (1883) 12 QBD 121. Terdapat kejahatan karena menyimpan kredit yang salah secara tidak jujur: lihat Bab 17. In *Firth* (1990) 91 Cr App R 217 (CA) seorang dokter tertipu karena tidak mengungkapkan fakta sebenarnya. Kasus lainnya adalah *Shama* [1990] 1 WLR 661 (CA). Terdakwa bersalah atas tindak pidana pemalsuan dokumen yang diperlukan untuk tujuan akuntansi yang bertentangan dengan pasal 17(1)(a) Undang-undang Pencurian tahun 1968 ketika ia tidak mengisi formulir, yang merupakan kewajibannya untuk melakukannya. Namun, berdasarkan kata-kata kejahatannya, sulit untuk mengatakan bahwa dia memalsukan dokumen ketika dia tidak melakukan apa pun. Dalam *Greener v DPP* (1996) 160 JP 265 Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tindak pidana membiarkan seekor anjing berbahaya memasuki suatu tempat yang bukan merupakan tempat umum, namun tidak diperbolehkan, menutupi kegagalan terdakwa. untuk mengambil tindakan pencegahan yang memadai dengan mengikat anjing tersebut ke rantai yang mengakibatkan anjing tersebut keluar dari halaman belakang rumahnya dan menggigit wajah seorang anak yang berada di taman terdekat. Beberapa kata kerja dapat dibaca

termasuk kegagalan dalam bertindak. Lihat 'penyebab' pada (c) di bawah. Ada beberapa kasus yang bermasalah. Dalam *Speck* [1977] 2 All ER 859, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindakan tidak senonoh ketika ia gagal mencegah seorang anak melakukan tindakan tersebut dengannya. Seorang gadis muda meletakkan tangannya di penisnya. Dia mengalami ereksi. Dia dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Ketidaksenonohan terhadap Anak-anak tahun 1960. Undang-undang tersebut mensyaratkan adanya 'tindakan yang sangat tidak senonoh'. Pengadilan memutuskan bahwa kegagalannya untuk melepaskan tangan gadis itu, sebuah kelalaian, merupakan sebuah undangan baginya untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, ada suatu tindakan. Penafsiran ini jika dilihat dari faktanya seperti mengulur kata-kata untuk menangkap terdakwa. Dalam *Yuthiwattana* (1984) 80 Cr App R 55, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa kegagalan dalam mengganti kunci merupakan tindakan yang dianggap mengganggu ketenangan dan kenyamanan penyewa. Mungkin saja pengadilan tidak melihat pokok persoalannya, dan dalam *Ahmad* (1986) 84 Cr App R 64, pengadilan yang sama menetapkan bahwa kegagalan menyediakan kamar mandi bukanlah tindakan yang dianggap mengganggu kedamaian dan kenyamanan. Gagal menyelesaikan perbaikan bukanlah sebuah 'tindakan'. Kata-kata dalam undang-undang yang menciptakan pelanggaran sudah jelas, dan undang-undang yang menciptakan kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat. Ahmad tampaknya menetapkan aturan umum dalam hukum pidana bahwa jika suatu undang-undang menyatakan 'tindakan', maka istilah tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kelalaian. Untuk pembahasan lebih lanjut dalam konteks percobaan lihat Bab 10. Pengadilan di Ahmad membedakan *Miller* [1983] 2 AC 161, lihat di bawah, dengan alasan bahwa *Miller* tidak berlaku jika undang-undang secara tegas mensyaratkan suatu tindakan. Terdakwa di Ahmad tidak berkewajiban untuk bertindak seperti terdakwa di *Miller* karena menurut undang-undang tidak membebaskan kewajiban seperti itu. Namun, jika kita menggunakan apa yang disebut sebagai teori 'tindakan terus-menerus (atau terus-menerus)', maka kita bisa mendapatkan dukungan untuk menghukum terdakwa pada Ahmad. Ia bersalah apabila ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dan tidak mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah terjadinya *actus reus*. Situasi tersebut dianggap sebagai tindakan yang disengaja. Oleh karena itu, hal ini tergantung pada teori kelalaian mana yang digunakan untuk melihat apakah terdakwa bersalah. Lord Diplock di *Miller* memilih teori tugas dengan alasan bahwa teori tersebut lebih sederhana daripada teori lainnya untuk dijelaskan kepada juri. Pengadilan lain mungkin bisa dibujuk untuk mengadopsi teori tindakan berkelanjutan jika ingin menghukum terdakwa. Bagaimanapun juga, *Yuthiwattana* sepertinya salah. Parlemen menetapkan 'tindakan'. Jika apa yang dilakukan terdakwa tidak dapat digambarkan secara masuk akal sebagai suatu 'tindakan', maka ia tidak boleh bersalah.

Diperkirakan bahwa beberapa pelanggaran tidak dapat ditafsirkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian. Mustahil membayangkan seseorang

melakukan perampokan (pasal 8 UU Pencurian 1968) atau perampokan (pasal 9) karena kelalaian. Terdapat tindak pidana pelemparan peluru kendali pada pertandingan sepak bola. Pelanggaran ini tidak dapat dilakukan karena kelalaian. Kita mungkin mengira bahwa tidak mungkin melakukan pemerkosaan karena kelalaian karena pemerkosaan melibatkan penetrasi, namun Dewan Penasihat mengadakan banding dari Selandia Baru dalam *Kaitamaki v R* [1985] AC 147 bahwa seorang pria dapat memperkosa jika dia tidak menarik diri atas permintaan. Nasihat ini berkaitan dengan definisi pemerkosaan sebelum tahun 2003, namun undang-undang tersebut berlaku berdasarkan Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003, karena terdakwa hanya bersalah jika ia 'menembus vagina, anus, atau mulut orang lain dengan penisnya'. Untuk pembahasan lebih lanjut lihat Bab 14.

- (c) Kadang-kadang pengadilan menafsirkan hukum umum atau pelanggaran hukum sebagai penelesaian tanggung jawab atas kelalaian. Jika salah satu bagian dari *actus reus* pembunuhan dan pembantaian adalah 'menyebabkan kematian' (bukannya 'membunuh' yang tampaknya lebih membutuhkan tindakan positif, meskipun seseorang dapat 'membunuh' jika tidak melakukan), seseorang dapat menyebabkan kematian jika tidak mencegahnya. Kematian terjadi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat pembunuhan berencana karena kelalaian (Bab 12), namun tindakan pembunuhan tidak sah tidak dapat dilakukan karena kelalaian: *Lowe* [1973] QB 702 (CA). Oleh karena itu, 'menyebabkan' kadang-kadang dibaca sebagai sesuatu yang memerlukan suatu tindakan (lihat *Wychavon*, di atas) tetapi kadang-kadang sebagai menutupi suatu kelalaian. Disarankan agar hal ini ditafsirkan dalam pengertian terakhir ketika *actus reus* didefinisikan semata-mata dalam istilah 'menyebabkan' sesuatu terjadi, namun dalam pengertian sebelumnya ketika pelanggaran terdiri dari 'menyebabkan atau mengizinkan'; 'mengizinkan' mencakup kegagalan dalam bertindak, namun di sini 'menyebabkan' tidak mencakup kegagalan. Demikian pandangan House of Lords dalam *Environment Agency v Empress Car Co (Abertillery) Ltd* [1999] 2 AC 22.

Karena kematian dapat disebabkan oleh kelalaian, demikian pula dengan pelanggaran hukum yang lebih ringan, yaitu menyebabkan cedera tubuh yang parah dengan maksud yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861. 'Menimbulkan' dan 'luka' masih bisa diperdebatkan. Dulu dikatakan bahwa 'bentrokan' membutuhkan penyerangan, yang tampaknya hanya dapat dilakukan dengan suatu tindakan, namun House of Lords di *Wilson* [1984] AC 242 menyatakan bahwa penyerangan bukanlah elemen penting dalam menimbulkan cedera tubuh yang menyedihkan. Tidak diketahui secara pasti apakah pelanggaran non-fatal lainnya, baik yang bersifat hukum umum atau berdasarkan undang-undang, dapat dilakukan karena kelalaian. Pengadilan Banding dalam *Fagan v MPC* [1969] 1 QB 439 menyatakan bahwa penyerangan (dan karena itu juga penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh nyata yang memerlukan penyerangan atau penyerangan) tidak dapat dilakukan karena kelalaian (kasus ini sekarang dianggap sebagai satu yang

termasuk dalam (h) di bawah, meskipun rasio pengadilan adalah bahwa apa yang dilakukan terdakwa ketika tanpa disadari ia memarkir mobilnya di atas sepatu bot petugas polisi adalah suatu perbuatan, perbuatan yang terus-menerus, dan bukan kegagalan dalam menggerakkan mobil.) namun dalam DPP v K [1990] 1 WLR 1067 Pengadilan Divisi tidak meragukan bahwa penyerangan (istilah yang mencakup baterai) yang kadang-kadang melukai tubuh dapat dilakukan dengan tidak membersihkan pengering tangan yang telah dituangkan asam ke dalamnya. . Situasi tersebut dianalogikan seperti memasang jebakan yang membuat korban terjatuh. Jika pertanggungjawaban atas sebuah baterai membutuhkan suatu tindakan, maka aneh bahwa pelanggaran yang jauh lebih serius yaitu pembunuhan dapat dilakukan melalui suatu tindakan atau kelalaian. Jika seseorang mengambil prinsip ini terlalu jauh, maka ia akan melemahkan prinsip umum bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas kelalaian. Oleh karena itu, pembatasan pengadilan bahwa harus ada kewajiban menghambat pengembangan tanggung jawab atas pembunuhan jika seseorang lalai menyelamatkan korban. Ada juga masalah dengan luasnya sebab akibat dalam kasus-kasus seperti itu yang berpotensi menyebabkan banyak orang bersalah atas pembunuhan. Contoh sederhana dari pelanggaran hukum umum adalah menipu Pendapatan dengan tidak memberikan pengembalian pajak: Mavji [1987] 2 All ER 758 (CA).

- (d) Pelanggaran hukum umum yang jarang terjadi yang dapat dilakukan karena kelalaian adalah tindakan makar yang salah. Jika seseorang tidak melaporkan pengkhianatan kepada pihak berwenang, dia bersalah atas kejahatan ini. Kegagalan membantu polisi ketika dia meminta bantuan juga merupakan suatu pelanggaran. Disarankan bahwa terdakwa tidak akan bersalah jika ia mempunyai alasan yang sah atau jika membantu secara fisik tidak memungkinkan. Terdapat sangat sedikit pelanggaran hukum kelalaian, dan dalam praktiknya, tidak satu pun dari kedua hal tersebut yang pernah digunakan selama bertahun-tahun.
- (e) Tanggung jawab dibebankan karena kegagalan melakukan tugas yang dilakukan secara sukarela. Semakin banyak seseorang melakukan hal tersebut, semakin besar kemungkinannya untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban yang timbul jika terdakwa menolak menerima kewajiban untuk mengurus orang lain, tetapi kewajiban itu akan timbul jika dia melakukannya dan melaksanakannya dengan buruk. Otoritas lama adalah Instan [1893] 1 QB 450, di mana seorang keponakan telah gagal dalam tugasnya menjaga seorang bibi. Lord Coleridge di Pengadilan untuk Kasus Mahkota mengatakan bahwa terdakwa:

. . . berada di bawah kewajiban moral terhadap orang yang meninggal yang darinya timbul kewajiban hukum terhadapnya; bahwa kewajiban hukum yang dilakukan oleh narapidana dengan sengaja dan sengaja tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan percepatan kematian orang yang meninggal karena tidak dilaksanakannya kewajiban hukum tersebut.

Kasus yang lebih modern dengan akibat yang sama adalah kasus yang disebut oleh Lord Mustill dalam *Airedale NHS Trust v Bland* [1993] AC 789 sebagai masalah, Stone dan Dobinson [1977] QB 354, yang memiliki fakta mengerikan dan rasio yang tidak pasti. Pengadilan Banding menyatakan seorang pria dan majikannya bersalah atas pembunuhan tidak berencana ketika korban meninggal setelah mereka gagal mendapatkan pertolongan medis. Pria tersebut tuli, buta, dan mengalami kesulitan belajar; wanita itu digambarkan tidak memadai dan tidak efektif. Laki-laki tersebut adalah saudara laki-laki korban (namun tanggung jawabnya tidak didasarkan pada hubungan darah oleh pengadilan). Korban memberi terdakwa laki-laki Rp. 30.000 seminggu untuk uang sewanya, namun tanggung jawab tidak didasarkan pada kontrak, lihat (f) di bawah. Mereka tinggal di rumah yang sama. Terdakwa perempuan berusaha menjaga korban dengan meninggalkan makanan untuk dimakan, memanggil dokter dan memandikannya. Dengan demikian, dia telah melakukan kewajiban untuk merawat korban. (Namun, hanya jika dia mulai mengasuh saudaranya barulah dia dinyatakan bersalah.) Korban telah membayar uang sewa, namun kasusnya tidak diputuskan berdasarkan pendekatan kontrak yang disebutkan di bawah – dan seseorang tidak dapat dibawa ke pengadilan. membebaskan tanggung jawab pada tuan tanah yang tidak hadir untuk menjaga penyewa mereka. Karena terdakwa, paling tidak, kurang memiliki kecerdasan dan tidak dapat menggunakan telepon, maka menurut hukum, seseorang harus bertindak sebagaimana orang yang berakal sehat akan bertindak, bukan sebagai orang yang memiliki kecerdasan terbatas dan sebagainya. Poin ini mungkin berlaku untuk pengecualian lainnya. Tidak jelas hukum mengenai bagaimana para terdakwa dapat menghentikan tugas mereka untuk merawat orang yang meninggal. Mungkin cukup jika salah satu dari mereka memberi tahu pekerja sosial yang datang menemui putra terdakwa laki-laki. Selain itu, korban menolak makan dengan benar dan tidak bisa menggunakan telepon. Apakah fakta ini membebaskan terdakwa dari kewajibannya? Namun, seorang ayah dinyatakan tidak bersalah dalam *Lowe* [1973] QB 702 (CA): Phillimore LJ menarik garis untuk tujuan kejahatan tindakan pembunuhan yang melanggar hukum antara kelalaian, bahkan kesengajaan, seperti tidak memanggil dokter, dan komisi. Hukumnya tidak jelas. Pada akhirnya, para terdakwa tidak akan dinyatakan bersalah jika mereka menolak membiarkan korban tinggal di rumahnya. Membuat mereka bersalah ketika mereka melakukan yang terbaik (yang tidak memadai) tampaknya hampir kejam. Para terdakwa hampir tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, apalagi saudara perempuan terdakwa laki-laki (atau putranya yang sakit jiwa).

Kasus yang lebih baru dibandingkan Stone dan Dobinson adalah *Ruffell* [2003] EWCA Crim 122. Korban sempat menyuntik campuran kokain dan heroin di rumah terdakwa. Dia jatuh sakit pada malam hari, tidak sadarkan diri, dan terdakwa berusaha menghidupkannya kembali. Keesokan paginya terdakwa membawa korban keluar rumahnya dan korban meninggal karena mabuk opiat dan hipotermia. Berdasarkan

fakta, juri dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah menjalankan tugas kehati-hatian. Korban adalah seorang tamu di rumahnya dan terdakwa berusaha menyadarkannya dengan memercikkan air ke wajahnya, meletakkannya di samping radiator untuk menghangatkan diri, meletakkannya di dekat jendela yang terbuka untuk mencari udara, dan menutupinya dengan handuk.

Tanggung jawab ini mungkin diperluas di masa depan untuk mencakup, misalnya, partisipasi bersama dalam olahraga berbahaya seperti pot-holing. Pengadilan Banding di Khan [1998] Crim LR 830 membuka kemungkinan adanya kewajiban seorang pengedar narkoba untuk memanggil bantuan medis kepada seseorang yang mengalami koma akibat meminum heroin yang diberikannya. Salah satu kesulitan yang tidak dibahas adalah apakah suatu kewajiban dapat timbul dari situasi yang melanggar hukum. Para terdakwa bersalah memasok narkoba, korban memilikinya. Namun, disarankan bahwa hambatan ini bukannya tidak bisa diatasi. Di bidang hukum lain seperti kontrak ilegal, pengadilan memang mempertimbangkan perilaku yang melanggar hukum. (Khan juga dapat dilihat sebagai penerapan prinsip Miller yang dibahas pada (h) di bawah.) Pengadilan Tinggi memutuskan dalam Sinclair [1998] NLJ 1353 bahwa upaya untuk membantu korban tidak dengan sendirinya menimbulkan tanggung jawab. Namun faktanya, terdakwa memang mempunyai kewajiban untuk menjaga korban. Rose LJ berkata:

'... [terdakwa] adalah teman dekat almarhum selama bertahun-tahun dan keduanya hidup bersama hampir seperti saudara. Sinclair-lah yang membayar dan memasok metadon dosis pertama kepada almarhum dan membantunya mendapatkan dosis kedua. Ia mengetahui bahwa almarhum bukanlah seorang pecandu. Dia tetap bersama almarhum selama periode ketidaksadarannya dan, untuk jangka waktu tertentu, merupakan satu-satunya orang yang bersamanya. . . . [Disana ada . . . materi yang menjadi juri. . . bisa saja mengetahui bahwa Sinclair mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga almarhum.]'

Salah satu pertanyaan problematis adalah apakah, dan jika demikian, bagaimana seseorang dapat melepaskan suatu kewajiban setelah ia melaksanakannya. Haruskah seseorang memberitahu, misalnya, kepada Departemen Jaminan Sosial bahwa seseorang akan berhenti merawat kerabatnya yang lanjut usia beberapa minggu sebelumnya? Pertanyaan lain menyangkut seberapa jauh, setelah seseorang dengan sukarela memulai suatu tugas, ia harus melaksanakannya. Jika penyelamatan sesama pembuat pot berbahaya, haruskah seseorang tetap mencobanya? Apakah seseorang wajib mengeluarkan seluruh uangnya untuk merawat sanak saudaranya? Apakah cukup hanya memanggil dokter atau harus memberikan keahlian terbaiknya? Jika jawabannya adalah melakukan apa yang wajar bagi terdakwa dalam semua situasi termasuk risiko bahaya apa pun, Stone dan Dobinson terlihat keluar dari jalur, karena mereka mungkin telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Tidak dapat dipastikan apakah undang-undang menyatakan bahwa terdakwa harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat atau bahwa orang yang berakal sehat

tersebut memiliki ciri-ciri seperti kurangnya kecerdasan yang menimpa para terdakwa dalam kasus tersebut. Apapun aturannya, pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak memenuhi standar yang disyaratkan.

- (f) Jika seseorang gagal melaksanakan kewajiban yang dibebankan dalam kontrak, ia bersalah. Kasus yang selalu dikutip untuk proposisi ini adalah Pittwood (1902) 19 TLR 37 di Assizes. Wright J menolak argumen bahwa terdakwa tidak mempunyai kewajiban terhadap korban, dan berbicara tentang 'kelalaian berat dan kriminal' ketika seorang karyawan sebuah perusahaan kereta api gagal membuka gerbang perlintasan sebidang. Tampaknya ia menyiratkan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus yang murni non-feasance (tidak melakukan) tetapi salah satu kasus misfeasance (melakukan sesuatu yang salah). Terdakwa membuka pintu lalu lintas. Kereta korban datang dan kemudian dibunuh karena terdakwa tidak menutup pintu kereta api. Oleh karena itu, terdakwa menyebabkan kecelakaan karena melakukan pekerjaannya dengan buruk karena tidak menutup pintu gerbang yang sebelumnya dibuka. Kontrak tersebut tidak perlu dan tidak ada di Pittwood yang harus dibayarkan kepada korban. Agaknya penjaga pantai yang dipekerjakan oleh otoritas lokal di kolam renang atau resor tepi laut, atau seorang dokter, baik yang bekerja di NHS atau swasta, akan dianggap bersalah atas pembunuhan berencana berdasarkan pengecualian ini. Pengecualian ini dikembangkan dari pengecualian pada (e) dan Instan disebut-sebut sebagai otoritas atas tanggung jawab yang timbul *ex contractu*. Perlu dicatat bahwa Pittwood saat ini dapat dibenarkan sebagai kasus yang termasuk dalam (h), di bawah, sehingga menciptakan situasi berbahaya.
- (g) Tanggung jawab akan dibebankan jika seseorang gagal melakukan tugas yang diwajibkan oleh hukum. Tanggung jawab dapat muncul dari hubungan darah atau perkawinan atau dihasilkan oleh hukum umum dengan cara lain. Misalnya, ada pelanggaran yang disebut pelanggaran di kantor publik. Seorang petugas polisi yang sedang tidak bertugas dinyatakan bersalah atas pelanggaran ini ketika dia tidak menyelamatkan seorang pria yang ditendang sampai mati oleh penjaga di sebuah klub: Dytham [1979] QB 722 (CA). Ruang lingkup tugas ini tidak jelas. Apakah ini berlaku untuk petugas penjara, dokter, perawat, petugas Ambulans St John? Apakah ini berlaku bila terdakwa tidak terikat kontrak untuk bertugas? Dytham menyarankan bahwa terdakwa tidak akan bertanggung jawab 'jika keadaannya mengandung bahaya yang lebih besar daripada orang yang memiliki ketegasan biasa. . . mungkin diharapkan untuk ditemui'. Namun tentunya kita mengharapkan seorang petugas polisi melakukan lebih dari apa yang dilakukan orang biasa untuk menyelamatkan nyawa seseorang? Di era AIDS ini, apakah seseorang diharapkan memberikan resusitasi mulut ke mulut? Belum ada solusi terhadap masalah seberapa besar risiko yang harus dihadapi terdakwa sebelum ia dibebaskan dari tugas tersebut. Dytham juga tidak menjawab pertanyaan apakah seseorang akan dihukum ketika dia mulai membantu, merasa tugasnya terlalu berat, dan berhenti. Apakah penting bahwa intervensi tersebut menyebabkan orang lain tidak ikut serta? Kritik lebih lanjut terhadap Dytham adalah

kesulitan dalam memberi label yang tepat pada perilaku terdakwa. Fakta-fakta tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ia melakukan kesalahan dalam jabatan publik. Pelanggaran yang terlihat lebih dekat dengan fakta adalah pembunuhan tidak berencana, namun ada masalah dengan sebab akibat. Tidak berusaha menyelamatkan korban tidak ‘menyebabkan’ kematian korban: ia akan tetap meninggal meskipun polisi tersebut sedang berlibur di Ibiza.

Otoritas yang lebih baru adalah Singh [1999] Crim LR 582 (CA). Ayah pemohon memiliki sebuah rumah kos. Pemohon memungut uang sewa dan melakukan pemeliharaan. Ketika ayahnya pergi, ada keluhan tentang kebakaran gas di salah satu kamar. Pemohon tidak menemukan ada yang salah. Sepuluh hari kemudian, penghuni lain di kamar lain terbunuh karena keracunan karbon monoksida. Pengadilan menyatakan bahwa semua perannya harus dikonglomasikan dan dari konglomerasi tersebut timbullah kewajiban untuk menjaga. Tugas itu bisa dipenuhi dengan memanggil bantuan ahli. Namun dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, karena kelalaiannya, dia bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Terdapat risiko kematian yang jelas dan serius, dan terdakwa yang menyebabkan kematian tersebut.

Gambaran utama dari kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang adalah kewajiban orang tua untuk memberi makan kepada anaknya yang masih kecil. Dalam Gibbins dan Proctor (1918) 13 Cr App R 134, Pengadilan Banding Pidana menyatakan ayah bersalah atas pembunuhan ketika dia membuat anaknya kelaparan sampai mati. (Wanita simpanan dari pihak ayah bersalah berdasarkan prinsip (e) di atas karena dia telah menerima uang untuk membeli makanan.) Kasus ini menunjukkan bahwa seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya ketika dia dengan sengaja menolak untuk bertindak. Tidak semua kelalaian menandakan imajinasi yang buruk atau kurangnya simpati. Tidak pasti apakah anak-anak mempunyai kewajiban timbal balik kepada orang tuanya. Juga tidak jelas apakah sang ayah akan bersalah jika anak tersebut adalah anak normal berusia 16 tahun yang mampu mengurus dirinya sendiri. Kasus lama adalah Shepherd (1862) 9 Cox CC 123 yang menyatakan bahwa seorang ibu tidak mempunyai kewajiban untuk bertindak terhadap putrinya yang berusia 18 tahun. Ada hukum lama yang menyatakan bahwa seorang saudara laki-laki tidak mempunyai kewajiban untuk merawat saudara perempuannya: Smith (1826) 172 ER 203. Tidak ada kepastian apakah siswa yang berbagi flat akan bertanggung jawab karena tidak menjaga salah satu teman satu flatnya. Tanggung jawab mungkin bergantung pada seberapa dekat hubungan itu. Masih dipertanyakan apakah pengadilan akan menetapkan kewajiban seperti itu antara orang yang hidup bersama atau bahkan pasangan menikah yang tinggal terpisah, namun pengecualian untuk usaha sukarela atau kontrak dapat berlaku.

Tidak jelas sejauh mana ‘hubungan khusus’ ini meluas. Dalam Curtis (1885) 15 Cox CC 746, seorang anak meninggal setelah petugas yang memberikan bantuan gagal menjalankan tugasnya berdasarkan hukum miskin Victoria untuk memanggil bantuan medis kepada anak dari orang tua yang miskin. Dia akan dihukum karena pembunuhan, jika hakim tidak

mengarahkan juri bahwa terdakwa tidak menyebabkan kematian korban (penyebab dalam pelanggaran kelalaian sulit dilakukan: lihat di bawah). Orang tua telah diadili atas pembunuhan dengan alasan bahwa mereka dengan sengaja menolak memberikan insulin kepada putri mereka. Agaknya tugas orang tua mencakup wali, meski belum ada presedennya.

Kasus yang bisa dibandingkan dengan Curtis adalah Smith [1979] Crim LR 251. Sang istri menolak menemui dokter setelah melahirkan. Dia kemudian memberi izin kepada suaminya untuk memanggil dokter, namun dia meninggal. Sang suami didakwa melakukan pembunuhan. Hakim berpesan kepada juri, jika istri tidak terlalu sakit, ia boleh memerintahkan suaminya untuk tidak memanggil dokter. Dengan demikian dia akan dibebaskan dari kewajibannya, yang tidak secara otomatis dibebankan berdasarkan hubungan suami-istri mereka tetapi dapat dengan mudah disimpulkan dari kenyataan, untuk merawatnya. Bagaimana tepatnya seseorang dapat dibebaskan dari tugasnya masih diperdebatkan. Smith tidak mempunyai alasan yang kuat. Jika sang suami tidak berhutang kewajiban kepada isterinya padahal isterinya cakap secara mental, dapat dikatakan bahwa ketika isterinya hampir meninggal, isterinya sudah tidak cakap lagi dan oleh karena itu timbul lagi kewajiban tersebut. Terlebih lagi, jika kewajibannya hanya muncul ketika dia tidak lagi mampu secara mental, tidak ada bukti bahwa dialah yang menyebabkan kematiannya, dan sebab akibat adalah bagian dari *actus reus* dari segala bentuk pembunuhan tidak berencana.

Dukungan terhadap prinsip penghentian tugas ini datang dari *Airedale NHS Trust v Bland* [1993] AC 789 (HL). House of Lords, dalam upaya untuk melindungi para dokter agar tidak dihukum karena pembunuhan ketika mereka mematikan sistem pendukung kehidupan, memperlakukan penghentian makanan dan minuman serta ventilasi sebagai kelalaian, dan menyamakannya dengan tidak menyediakan makanan (argumennya adalah bahwa tidak memberi makan pasien hanya mengembalikan pasien ke posisi semula ketika dibawa ke rumah sakit), meskipun hal ini masih diperdebatkan. Tampaknya hal ini juga merupakan pandangan dari profesi medis. Lord Goff, yang menarik garis antara mengakhiri pengobatan (suatu tindakan) dan tidak melanjutkannya (suatu kelalaian), sebuah perbedaan yang sulit diterima (lihat pidato Lord Mustill, yang menganggap bahwa suatu tindakan dan kelalaian 'tidak dapat dibedakan' dari sebuah sudut pandang etika), mengatakan: 'dokter hanya membiarkan pasiennya mati dan berdasarkan prinsip umum, kelalaian seperti ini tidak melanggar hukum kecuali hal tersebut merupakan pelanggaran kewajiban terhadap pasien'. Penyebab kematian bukanlah karena alat bantu hidup dimatikan, namun merupakan alasan mengapa korban harus diberikan alat bantu hidup. Faktanya, tidak ada pelanggaran karena bukan kepentingan terbaik pasien untuk melanjutkan pengobatan bantuan hidup ketika tidak ada kemungkinan untuk sembuh. (Hampir tidak dapat dikatakan bahwa tidak memberinya makan adalah demi kepentingan terbaik pasien.) Tentu saja House of Lords mengutuk tindakan aktif untuk membunuh seorang pasien (seperti memberikan suntikan mematikan), namun dapat dikatakan bahwa penghapusan selang makanan atau ventilator merupakan langkah aktif, namun Bland menganggap langkah tersebut sebagai sebuah kelalaian: para dokter tidak menyediakan makanan atau alat untuk bernapas. Namun, House of Lords mengatakan bahwa jika tindakan dokter tersebut dilakukan oleh orang asing, maka itu adalah

sebuah tindakan! (Dianggap bahwa Bland tidak melanggar Pasal 2 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia karena meskipun terdapat hak untuk hidup, namun tidak ada kewajiban positif bagi negara untuk memperpanjang hidup; tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 3, dan tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 3). larangan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, karena korban harus sadar akan penganiayaannya. Poin-poin ini telah dikemukakan dalam kasus perdata, *NHS Trust A v M* [2001] Fam 348 (Pengadilan Tinggi).

Meskipun kewenangan ini bukan merupakan kasus pidana, terdapat dukungan dalam pidatonya agar tugas perawatan dihentikan oleh pasien sendiri dan bahkan oleh kerabat dekatnya ketika pasien tidak mampu memahami situasinya. Di Bland disarankan bahwa melanjutkan pengobatan oleh dokter yang bertentangan dengan keinginan pasien akan menjadi (setidaknya) sebuah baterai, namun usulan tersebut belum diuji. Belum dapat dipastikan apakah kasus ini dapat diterapkan secara umum. Bagaimana jika seseorang yang berakal sehat menyuruh pasangannya untuk membiarkan dia mati jika di kemudian hari dia menderita pikun? Tidak diketahui secara pasti sejauh mana kasus ini dapat digeneralisasikan sehingga memberikan titik akhir bagi semua kewajiban untuk bertindak, apa pun yang timbul. Jika seorang penjaga pantai sudah tidak bertugas dan telah diganti namun masih berada di tepi kolam, apakah dia dilepaskan dari tugas menjaganya? Apakah ada kewajiban untuk bertindak sampai saat kontrak kerjanya diputus? Kasus-kasus tersebut tidak membantu. Tidak diragukan lagi bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk melakukan intervensi jika anaknya tenggelam, namun bagaimana jika orang tuanya sedang hamil tua? Apakah dia dibebaskan dari tugasnya jika dia berteriak minta tolong? Alternatifnya, haruskah kita mengatakan bahwa tidak ada kewajiban yang timbul berdasarkan fakta tersebut? Sekali lagi pihak berwenang tidak memberikan panduan. Apakah kewajibannya berakhir ketika terdakwa menceraikan istrinya dan anak tersebut tinggal bersamanya? Jika dia ada urusan di Paris, apakah dia masih bertanggung jawab? Diperkirakan bahwa tugas tersebut berakhir ketika situasi yang menimbulkan hal tersebut berakhir. Oleh karena itu, sebagai jawaban atas dua pertanyaan terakhir, kewajiban tersebut dihapuskan jika terjadi perceraian, tetapi tidak jika terjadi perjalanan bisnis.

Dasar tanggung jawab yang diterima secara umum pada (e)–(g) adalah bahwa terdakwa bersalah karena ia dan korban tinggal bersama, atau memiliki hubungan tertentu, sehingga menimbulkan kewajiban untuk merawat korban. Kontrak dan hubungan darah, misalnya, pada dirinya sendiri hanyalah masalah pembuktian asumsi suatu kewajiban. Dasar ini menjelaskan bagaimana tugas dapat diakhiri. Orang tua tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anak yang, katakanlah, menikah dan tinggal jauh dari rumah, meskipun hubungan darah tetap ada. Prinsip ini berlaku meskipun anak tersebut masih di bawah umur.

(h) Jika seseorang tanpa disadari (yaitu tanpa *mens rea*) menciptakan situasi berbahaya, ia berkewajiban untuk memperbaikinya: Miller, di atas (lihat juga Bab 3). Seorang penghuni liar yang membakar kasur lalu pergi dianggap bersalah melakukan pembakaran ketika dia tidak melakukan apa pun untuk memadamkan api. Tindakan fisiknya yang menyebabkan kebakaran pada awalnya. Dianggap bahwa dia mempunyai kewajiban untuk

bertindak. Masalah penarikan diri jika tugas menjadi terlalu berat tidak dibahas di Miller. Kasus terbaru berdasarkan prinsip Miller adalah *DPP v Santana-Bermudez* [2004] Crim LR 471 (DC) dan *Matthews* [2003] 2 Cr App R 461 (CA). Dalam kasus sebelumnya, korban, seorang petugas polisi, meminta terdakwa untuk mengeluarkan sakunya, dan hal tersebut dilakukannya. Dia kemudian bertanya: 'Apakah Anda yakin tidak ada jarum atau benda tajam di tubuh Anda?' Dia menjawab tidak. Dia mulai mencarinya tetapi jarinya tertusuk jarum suntik. Pengadilan memutuskan dia bersalah atas penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh. Kegagalannya untuk memberi tahu dia tentang hipodermik tersebut merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Terdakwa berhutang kewajiban kehati-hatian seperti yang diberikan Miller kepada korbannya. Di *Matthews*, terdakwa mendorong korban ke sungai, tanpa mengetahui bahwa korban tidak bisa berenang. Ketika mereka menyadarinya, mereka berkewajiban untuk bertindak seperti Miller dan, karena mereka bermaksud membunuh atau melukai tubuh secara menyedihkan, mereka bersalah atas pembunuhan.

Tidak ada kepastian apakah seorang terdakwa bersalah jika kelalaiannya dalam bertindaklah yang menyebabkan situasi berbahaya. Jika ia gagal menopang bangunan yang berbahaya, mendengar suara retakan, melihat anak-anak yang ia benci bermain di tempat bangunan itu akan runtuh, kemudian memutuskan untuk tidak memperingatkan mereka, bisa dibilang ia bersalah melakukan pembunuhan jika ada anak yang terbunuh dan dia telah memikirkan kebencian sebelumnya, berdasarkan prinsip Miller, meskipun pada kenyataannya bukan tindakan fisiknya yang memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian anak tersebut. Dia bisa saja dinyatakan bersalah berdasarkan apa yang disebut kebalikan dari *Thabo Meli v R* [1954] 1 WLR 228 (lihat Bab 3). Dalam kasus terakhir, *mens rea* yang lebih awal ditambahkan ke *actus reus* yang kemudian. Di Miller, *actus reus* yang lebih awal bisa saja ditambahkan ke *mens rea* yang kemudian. Bintik di atas berbeda. Di sana gadis itu yang memulai sentuhannya, bukan terdakwanya. *Gully v Smith*, di atas, juga dapat diambil untuk menggambarkan prinsip ini: terdakwa telah mengadopsi gangguan tersebut dengan tidak menghilangkannya. *DPP v K* di atas merupakan ilustrasi prinsip Miller. Terdakwa telah menciptakan situasi berbahaya dengan memasukkan asam ke dalam pengering tangan. Dia kemudian gagal menghapusnya (atau memperingatkan bahwa itu ada di sana).

Jika disahkan, rancangan RUU Pelanggaran terhadap Orang yang dilampirkan pada Dokumen Konsultasi Kantor Dalam Negeri, Undang-undang Kekerasan: Reformasi Pelanggaran terhadap Orang tahun 1861, 1998, akan memasukkan Miller ke dalam bentuk undang-undang. Namun, pemerintah kurang menunjukkan minat untuk melakukan reformasi pada bagian undang-undang ini, yang sebenarnya menuntut adanya perubahan.

(i) Aturan umumnya adalah bahwa seseorang tidak bertanggung jawab jika gagal melakukan intervensi untuk mencegah kejahatan. Kehadiran di tempat kejadian perkara saja tidak berarti tanggung jawab. Namun, ada pengecualian. Apabila seseorang mempunyai hak kendali atas tindakan orang lain, maka ia bertanggung jawab karena gagal melaksanakan kendali tersebut ketika orang lain tersebut melakukan pelanggaran. *Tuck v Robson* [1970] 1 Semua ER 1171 mencontohkan situasi ini. Seorang tuan tanah tidak mengharuskan pelanggannya pergi setelah waktu tutup. Mungkin mengejutkan, kegagalan untuk melakukan

hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran. Pelangganlah yang bersalah atas pelanggaran substantif berupa mengonsumsi alkohol setelah jam kerja, namun Pengadilan Divisi memutuskan bahwa pemilik rumah bersalah karena membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran tersebut. Kasus-kasus yang termasuk dalam kategori ini sering kali melibatkan mengemudi. Pemilik yang merupakan penumpang dalam sebuah mobil mungkin mempunyai hak kendali atas pengemudinya. Dalam Halmo [1941] 3 DLR 6 Pengadilan Banding Ontario memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena menjadi pihak kedua dalam pembunuhan ketika dia berada di dalam mobil pada saat sopirnya yang mabuk membunuh korban. Di Inggris, undang-undang mencakup hak seorang instruktur untuk mengendalikan pengemudi pelajar: *Rubie v Faulkner* [1940] 1 KB 571.

Pengadilan Banding memutuskan di *Khan*, di atas, bahwa apakah kewajiban kehati-hatian muncul dari serangkaian fakta tertentu merupakan pertanyaan bagi juri. Namun, Pengadilan Banding kemudian memutuskan di *Singh*, bahwa kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab hakim. Ada pendapat bahwa *Singh* mewakili pandangan yang lebih baik, karena *Khan* mungkin akan mengarahkan juri untuk mengatakan bahwa karena korban sudah meninggal, maka timbul kewajiban untuk mencegah kematian tersebut.

Ahli teori Amerika G. Fletcher, dalam *Rethinking Criminal Law* (Little, Brown & Co, 1978) 421, telah memberikan taksonomi tanggung jawab atas kelalaian. Beberapa merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak. Misalnya, tidak melaporkan suatu kecelakaan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk bertindak. Tidak perlu ada salahnya. Terdakwa dihukum karena pelanggarannya. Bentuk kedua adalah 'komisi demi kelalaian'. Terdakwa mempunyai kewajiban untuk bertindak untuk mencegah terjadinya kerugian, seperti kematian. Klasifikasi ini mungkin berguna untuk memaparkan undang-undang untuk mengkategorikan ketika hukum melakukan intervensi. Hal ini mungkin berguna bagi pengadilan dalam menentukan apakah kerugian diperlukan untuk pertanggung jawaban.

Rancangan KUHP tahun 1989 tidak berusaha menyebutkan kapan seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena kelalaiannya. Komisi Hukum lebih memilih untuk meninggalkan bidang hukum ini untuk pengembangan peradilan dibandingkan untuk perumusan undang-undang. Oleh karena itu, baik daftar yang diberikan di atas maupun rekomendasi Komisi Hukum tidak membatasi perkembangan undang-undang tersebut: daftar tersebut tidak bersifat tertutup. Kita mungkin mengira bahwa tidak membatasi situasi di mana pertanggungjawaban pidana atas kelalaian dapat ditemukan akan melanggar Pasal 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan prinsip non-retroaktif, namun Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memutuskan bahwa common law memperluas tanggung jawab jargon melanggar Pasal itu: *SW v United Kingdom* [1996] 1 FLR 434.

Penyebab dalam kelalaian

Sekalipun ada potensi pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan, dalam kejahatan yang diakibatkannya harus dibuktikan bahwa terdakwa 'menyebabkan' kelalaian yang mengakibatkan kerugian. Membuktikan sebab akibat mungkin sulit. Misalnya, jika seorang polisi berdiri di dekat korban yang ditendang hingga tewas, apakah ia menyebabkan

kematian korban? 'Tetapi jika' jika dia tidak melakukan intervensi, apakah korbannya masih hidup?

Morby (1882) 15 Cox CC 35

Seorang anak sekarat karena penyakit cacar. Sang ayah menolak memanggil bantuan medis. Dia adalah anggota sekte yang disebut 'Orang Aneh' yang percaya bahwa doa dan urapan saja sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit. Dokter memberikan bukti bahwa peluang kelangsungan hidup anak tersebut akan lebih besar jika dokter dipanggil. Sang ayah diadili karena pembunuhan. Pengadilan untuk Kasus Crown Reserved setuju dengan arahan Hawkins J. Pertanyaannya adalah apakah kematian anak tersebut dipercepat karena kelalaian terdakwa. Lord Coleridge berkata:

Tidaklah cukup untuk mempertahankan tuduhan pembunuhan jika mengetahui bahwa orang tua telah lalai menggunakan segala cara yang masuk akal untuk menyelamatkan nyawa anaknya; Perlu ditunjukkan bahwa kelalaian orang tua berdampak memperpendek umur anak. Penuntut gagal membuktikan tanpa keraguan bahwa anak tersebut meninggal karena kelalaian.

Oleh karena itu, berlaku aturan sebab-akibat faktual dan hukum yang normal. Ahli teori utama Inggris mengenai topik ini tidak melihat perbedaan antara tindakan dan kelalaian: Hart dan Honoré, *Causation in the Law*, edisi ke-2 (Clarendon Press, 1985) 5. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan fakta Pittwood, di atas: korban, pengemudi kereta jerami, tidak akan terbunuh oleh kereta api, seandainya terdakwa, penjaga gerbang perlintasan sebidang, menutup pintu gerbang. Namun, terkadang ada argumen bahwa seseorang tidak dapat menyebabkan sesuatu karena kelalaian. Jika saya melihat anak saya tenggelam, bagaimana saya menyebabkan kematiannya? Saya tidak mendorong anak itu masuk; Saya bahkan tidak membuat kolam. Anak saya akan tetap tenggelam, seandainya saya berada di Italia daripada berjalan di tepi kolam. Salah satu tanggapannya adalah dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi merupakan penyimpangan luar biasa dari perilaku yang diharapkan dari orang tua. Pandangan ini dikemukakan oleh Hart dan Honoré (di 37). Pengadilan Inggris belum menangani potensi sumber kesulitan ini. Salah satu argumen yang mungkin berhasil adalah bahwa dalam kaitannya dengan tindakan, terdakwa mempunyai kendali lebih besar atas akibat yang ditimbulkan dibandingkan dengan kelalaiannya. Terdakwa, misalnya, bisa saja menggunakan kontrol atas gerakannya untuk menghentikannya mendorong korbannya ke dalam kolam, namun mungkin tidak berada dalam posisi untuk melakukan kontrol ketika orang lain mendorong seorang anak ke dalam air. Beberapa orang mungkin bertanggung jawab menyebabkan kelalaian.

Komisi Hukum dalam rancangan KUHP mengusulkan untuk mengganti tes 'tapi-untuk' di Morby dengan aturan bahwa terdakwa akan bersalah jika dia bisa mencegah *actus reus*. Hasilnya adalah tanggung jawab atas kelalaian dalam hal ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab atas tindakan, yang tampaknya aneh. Pasal 17(1) menyatakan:

. . . seseorang menyebabkan suatu akibat. . . Kapan . . .

Lalai melakukan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya tindakan tersebut dan yang menurut hukum wajib dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Ketentuan tersebut akan meringankan kedudukan pengadilan ketika dihadapkan pada dakwaan bahwa terdakwa tidak menyebabkan sesuatu dengan lalai untuk mencegahnya.

Kebijakan di balik tidak bertanggung jawabnya kelalaian secara umum

Terdapat perdebatan antara pihak yang ingin memperluas undang-undang tersebut untuk mencakup kelalaian pidana dan pihak yang tidak ingin memperluas undang-undang tersebut. Perdebatan ini dapat disimpulkan dengan menggunakan pandangan dua tokoh utama. Profesor Ashworth 'The scope of pidana pertanggungjawaban atas kelalaian' (1989) 105 LQR 424 berpendapat mendukung gotong royong bahwa:

Prinsip umum dalam hukum pidana adalah bahwa tanggung jawab kelalaian harus dimungkinkan jika suatu kewajiban ditetapkan, karena dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan moral yang mendasar antara tidak melakukan suatu tindakan dengan konsekuensi buruk yang telah diperkirakan sebelumnya dan melakukan suatu tindakan dengan konsekuensi buruk yang telah diperkirakan sebelumnya. konsekuensi buruk yang diramalkan sama.

Baginya, kehidupan adalah suatu nilai dasar yang harus dilestarikan. Penyelamatan nyawa adalah barang publik yang melebihi manfaat publik berupa kebebasan untuk tidak bertindak. Perilaku orang yang tidak melakukan penyelamatan sangat tercela sehingga harus ada sanksi pidana. Ada juga argumen bahwa karena salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk meningkatkan standar perilaku, maka tanggung jawab atas kegagalan mencapai standar tersebut harus dikenakan. Seseorang harus menyelamatkan jika tidak ada bahaya baginya. Ini adalah hal yang bertanggung jawab secara sosial untuk dilakukan. Negara-negara lain mempunyai undang-undang mengenai kegagalan penyelamatan. Mereka yang mengejar Putri Wales melalui Paris ketika dia terbunuh didakwa gagal membantu seseorang dalam bahaya. William Wilson, *Criminal Law: Doctrine and Theory*, edisi ke-3 (Pearson, 2008) 80, juga menunjukkan bahwa kelalaian secara moral mungkin lebih buruk daripada tindakan. 'Apa yang secara moral lebih buruk/lebih signifikan secara kausal: menembak seorang anak untuk mencegah penderitanya karena terbakar sampai mati dalam api yang menyala-nyala, tidak ada yang tidak berdaya untuk mencegahnya, atau gagal menyelamatkan anak serupa dari nasib serupa melalui mekanisme sederhana yang membuka kunci penyebab kematian anak tersebut. pintu di balik mana dia terjebak?'

Tidak selalu mudah untuk melihat perbedaan antara tindakan dan kelalaian. Apakah seseorang tidak berhenti di lampu merah atautkah seseorang melewati lampu merah? Glanville Williams menjawab 'Pengabaian pidana – pandangan konvensional' (1991) 107 LQR 86 dalam membela individualisme.

- (a) Terdapat perbedaan bahkan pada pendekatan Ashworth. Kelalaian menimbulkan tanggung jawab hanya jika ada kewajiban. Tidak ada kewajiban yang diperlukan untuk bertindak. (Dalam pandangan penulis buku ini, seseorang dapat menciptakannya, namun yang pasti masalahnya bukan muncul dalam tindakan positif: terdapat

kewajiban untuk tidak melakukan pembunuhan. Tidak perlu mengacu pada kewajiban tersebut.)

- (b) Ada perbedaan moral antara membunuh dan membiarkan mati (kecuali mungkin antara orang tua dan anak). Aku menembakmu dengan senjata lebih tercela daripada membiarkanmu mati kelaparan. Saya mendorong Anda ke laut di tengah lautan lebih tercela daripada saya tidak menyelamatkan Anda ketika ada pihak ketiga yang mendorong Anda masuk.
- (c) Mungkin sulit membedakan tindakan dan kelalaian (misalnya, apakah memutuskan saluran air merupakan tindakan atau kelalaian?), namun masalahnya melekat pada semua prinsip moral.
- (d) Hukum pidana harus diarahkan pada perbuatan salah yang aktif. Ini tidak cocok untuk membuat orang melakukan sesuatu. Selain itu, mewajibkan orang untuk melakukan tindakan merupakan hal sekunder selain tujuan utama menekan perilaku buruk.
- (e) Setiap orang dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dengan tidak menjual rumah dan memberikan hasilnya kepada lembaga bantuan, seseorang telah gagal mencegah kelaparan di Sudan.
- (f) Tidaklah adil jika menyebut orang yang tidak melakukan sebagai pelaku kesalahan jika bahasa undang-undang ditulis dalam istilah aktif.
- (g) Polisi, Kejaksaan, pengadilan dan penjara akan kewalahan jika tanggung jawab pidana atas kelalaian menjadi hal yang biasa. Benturan nilai adalah antara tugas antarpribadi dan otonomi pribadi.

Selain itu, orang tidak boleh diwajibkan untuk bertindak jika mereka tidak menginginkannya, terutama jika tindakan tersebut memerlukan pengeluaran waktu dan tenaga, seperti yang terjadi dalam bidang hukum ini. Mereka harus mengubah hidup mereka untuk mengakomodasi apa yang dilakukan orang lain. Membuat orang bertanggung jawab atas kelalaiannya akan mendorong orang lain untuk ikut campur dalam urusan yang bukan urusan mereka. Haruskah benar-benar menjadi hukum bahwa jika seseorang mendengar bayi menangis di dalam rumah yang terkunci, ia harus mendobrak pintu untuk memastikan bahwa bayi tersebut tidak diperlakukan dengan buruk? Masyarakat harus diijinkan untuk mendahulukan kepentingannya sendiri dan kepentingan orang-orang yang mereka sayangi di atas kepentingan orang asing. Ditinjau dari asas-asas yang dibahas pada awal Bab 1, perpanjangan tugas hukum untuk bertindak secara yuridis merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas.

Pernyataan ortodoks bahwa hukum pidana Inggris tidak mewajibkan orang untuk berbuat baik tetapi hanya mencegah mereka berperilaku buruk sedang mendapat serangan namun prinsip tersebut tetap bertahan.

2.5 REFORMASI TANGGUNG JAWAB ATAS KELALAIAN

Hukum kelalaian telah berkembang seiring berjalannya waktu tanpa banyak memperhatikan prinsip. Komite Revisi Hukum Pidana dalam Lapornya yang Keempatbelas, *Offenses Against the Person*, Cmnd 7844, 1980, paragraf 252–255, merekomendasikan bahwa

dalam kejahatan seperti ini, tanggung jawab atas kelalaian harus dikenakan hanya untuk pembunuhan, pembunuhan tidak disengaja, yang menyebabkan luka berat dengan sengaja (yang menggantikan tindakan menyakiti tubuh yang menyedihkan dan melukai dengan sengaja), penculikan dan penculikan serta penahanan yang melanggar hukum. (Hukum adat dibiarkan bebas berkembang ketika terdakwa mempunyai kewajiban untuk bertindak. Sebagaimana telah terlihat, rancangan KUHP mengadopsi proposisi terakhir.) Karena terdakwa tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang lebih kecil terhadap kejahatan. orang, dia juga tidak bertanggung jawab atas kerugian pidana.

Komisi Hukum dalam Rancangan KUHP tahun 1989 mengusulkan ketentuan umum mengenai pembiaran yang tidak terbatas pada yang direkomendasikan oleh Panitia Revisi Hukum Pidana. 'Menyebabkan' kerusakan kriminal dan 'menyebabkan' kematian harus digunakan sebagai *actus reus* yang dirancang ulang dari kerusakan kriminal dan pembunuhan dan pembantaian untuk menghindari masalah bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat dilakukan karena kelalaian (misalnya, hal ini mungkin sulit dilakukan) bahasa yang mengatakan bahwa seorang ayah membunuh putrinya ketika dia membuatnya kelaparan sampai mati). Usulan ini sangat sejalan dengan undang-undang saat ini. Kebijakan membebaskan tanggung jawab atas kelalaian hanya pada tindak pidana berat ditegaskan kembali oleh Komisi Hukum dalam Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran terhadap Orang dan Pokok-pokok Umum, Laporan No. 218, 1993. RUU Pelanggaran Non-Fatal terhadap Orang akan jika diundangkan tidak membebaskan tanggung jawab atas kelalaian sehubungan dengan dugaan kejahatan yang menyebabkan cedera serius secara sembrono, dengan sengaja atau ceroboh menyebabkan cedera dan penyerangan. Tidak ada daftar tugas untuk bertindak yang direkomendasikan. Hukum adatlah yang menentukan kapan suatu kewajiban timbul. Laporan tahun 1993 juga menegaskan prinsip Miller tentang *supervening* kesalahan.

Kita dapat berharap bahwa dalam reformasi hukum yang sesungguhnya, posisi tersebut akan diperjelas dengan kata-kata yang tegas yang memberikan tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan. Namun, harus ditekankan bahwa sekadar memperjelas apa yang tersirat tidak akan menyelesaikan beberapa kekhawatiran mengenai tanggung jawab atas kelalaian. Apakah seseorang yang menyaksikan seorang anak kecil tenggelam dalam air sedalam satu inci pun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus didasarkan pada prinsip dan kebijakan. Nilai-nilai yang seharusnya dimasukkan dalam hukum pidanalah yang harus didiskusikan. Inilah alasan mengapa tanggung jawab atas kelalaian masih menjadi topik kontroversial. Meskipun mengubah undang-undang dari 'merusak' menjadi 'menyebabkan kerugian pidana' dapat menyelesaikan satu permasalahan, hal ini tidak mengubah fakta bahwa permasalahan sebab-akibat ditangani dalam rancangan KUHP dengan cara yang terlihat terlalu inklusif. ('Mungkin mencegah': lihat di atas.) Apakah undang-undang saat ini dipertahankan atau rancangan Kode Etik diberlakukan, kembali ke awal bab ini, definisi *actus reus* dalam kaitannya dengan gerakan fisik atau tubuh tidak tepat karena gagal menangani dengan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian. Jika seseorang tidak dapat mendefinisikan 'tindakan', maka ia tidak dapat mendefinisikan 'kelalaian untuk bertindak'. Lord Mustill dalam Bland mengatakan bahwa 'keadaan hukum saat ini tidak memuaskan baik secara moral

maupun intelektual', dan bahwa perbedaan antara tindakan dan kelalaian sangatlah meragukan: apakah Anda setuju?

Ringkasan

Pembaca dipandu melalui definisi *actus reus* (perilaku, keadaan, keadaan) dengan contoh. Perbedaan akademis antara kejahatan 'perilaku' dan 'akibat' telah dilatih. Dua masalah utama dalam mempertimbangkan *actus reus*, sebab-akibat dan kelalaian, dibahas secara panjang lebar. Penyebab dijelaskan dengan menggunakan kosakata sebab-akibat faktual dan hukum standar dan hukum kasus dibahas. Penekanannya adalah pada menggambarkan definisi yang berbeda-beda mengenai faktor-faktor penyebab, prinsip-prinsip yang dapat memberikan hasil yang berbeda-beda. Aturan umum mengenai tanggung jawab kelalaian telah ditetapkan: misalnya, bagaimana beberapa undang-undang dapat dianggap membebaskan tanggung jawab atas kelalaian, sedangkan undang-undang lainnya tidak dapat dianggap membebaskan tanggung jawab atas kelalaian. Tugas hukumnya dijelaskan, misalnya. tanggung jawab atas kegagalan bertindak jika terdakwa adalah orang tua korban. Kaitan antara sebab-akibat dan kelalaian dieksplorasi: bagaimana seseorang bisa bersalah ketika ia hanya berada di tengah kerumunan yang menyaksikan seorang anak tenggelam? Terdapat diskusi mengenai kebijakan di balik undang-undang Anglo-Welsh tentang kelalaian, dengan fokus pada argumen yang dikemukakan oleh Glanville Williams dan Andrew Ashworth.

- Pendahuluan: Hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran berbagai bentuk perilaku, baik yang berupa tindakan, kelalaian, atau keadaan. Ini disebut *actus reus* atau unsur-unsur eksternal dari pelanggaran. Jika ditambahkan ke *mens rea*, terdapat pelanggaran (meskipun perhatikan Bab 4 tentang pertanggungjawaban ketat); mungkin juga ada pembelaan.
- Beberapa permasalahan: *Actus reus* tidak boleh diartikan semata-mata sebagai perilaku terdakwa: *actus reus* dapat, misalnya, mencakup perilaku korban. Contohnya adalah pemerkosaan, yang mencakup kurangnya persetujuan dari tersangka korban. Demikian pula, ketika mempertimbangkan pertahanan, sulit untuk mencocokkan beberapa pertahanan dengan analisis *actus reus*; *mens rea*; dan pertahanan. Beberapa pertahanan, mis. kesalahan, nampaknya tidak terpisah sama sekali dari pelanggaran: keduanya bukanlah unsur ketiga. Sebaliknya mereka meniadakan *actus reus* atau *mens rea* atau keduanya. Misalnya, kesalahan tampaknya ada karena kegagalan membuktikan pelanggarannya. Namun, paksaan dapat dilihat sebagai pembelaan sebagai unsur ketiga: terdakwa melakukan tindakan yang dilarang dan mempunyai pola pikir yang sesuai, namun ia mempunyai pembelaan karena ia dipaksa melakukan apa yang ia lakukan.
- Masalah-masalah lain termasuk masalah-masalah ini. 'Actus' tidak boleh diterjemahkan sebagai 'act' karena lebih luas dari itu; itu mencakup 'non-tindakan', kelalaian. *Actus reus* bervariasi dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya: mengetahui bahwa bagian dari *actus reus* untuk pencurian adalah 'properti' tidak membantu dalam *actus reus* pembunuhan. *Actus reus* tentunya harus dibuktikan: bagi mahasiswa, dalil

ini hendaknya dimaknai bahwa seluruh unsur *actus reus* (dan *mens rea*) harus diperhatikan.

- Kejahatan akibat perbuatan dan akibat: Pembagian tindak pidana modern adalah tindak pidana dimana penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa menyebabkan sesuatu terjadi (kejahatan 'akibat') dan kejahatan yang tidak menyebabkan terjadinya sesuatu (kejahatan 'melakukan'). Contoh nyata dari kejahatan ini adalah pembunuhan; harus dibuktikan bahwa terdakwalah yang menyebabkan kematian korban. Contoh yang terakhir adalah mengemudi dengan bahaya: tidak seorang pun perlu dirugikan, tidak ada kerusakan harta benda yang perlu terjadi. Bandingkan kejahatan yang menyebabkan kematian karena mengemudi berbahaya. Hal ini merupakan akibat kejahatan karena akibat tertentu, yaitu kematian, merupakan bagian dari tindakan pelanggaran tersebut.
- Sebab-akibat: Sebab-akibat bukanlah masalah dalam kejahatan yang dilakukan, hanya masalah akibat kejahatan. Hukum Inggris membagi sebab akibat menjadi dua bagian: sebab akibat fakta dan sebab akibat dalam hukum. Kalimat pertama, yang sering dikenal sebagai 'tetapi karena', menanyakan: tetapi atas tindakan terdakwa, apakah korban akan mati (dll.); jika demikian, para pengadil sebenarnya mempertimbangkan persoalan kedua, yaitu sebab akibat hukum. Biasanya, namun tidak selalu, pertanyaan pada tahap ini adalah: apakah terdakwa memberikan kontribusi signifikan terhadap kematian tersebut (dll.)? Terdapat prinsip-prinsip yang luar biasa, khususnya prinsip yang menyatakan bahwa 'terdakwa harus mengambil korbannya ketika ia menemukannya', sebuah prinsip yang sering disebut dengan aturan tengkorak tipis (*thin-skull rule*). Contoh kasusnya adalah penolakan seorang Saksi Yehuwa untuk menerima transfusi darah. Tidak semua kasus dapat diselesaikan secara langsung, namun secara umum *novus actus interveniens* akan memutus rantai sebab-akibat. Misalnya, jika korban melakukan tindakan yang bebas, disengaja dan diinformasikan, maka rantai sebab akibat akan terputus. Pernyataan undang-undang yang telah lama diterima ini semakin mendapat tekanan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sehubungan dengan pemasok obat-obatan yang hadir pada saat kematian pengguna narkoba, namun pihak berwenang menyatakan bahwa terdakwa tetap bersalah bahkan ketika korban meninggal. menolak perawatan medis mungkin dianggap serupa. Kasus pelarian merupakan sebuah prinsip yang telah ditetapkan bahwa jika korban melukai atau membunuh dirinya sendiri ketika melarikan diri dari terdakwa, maka terdakwa bertanggung jawab kecuali terdakwa telah melakukan sesuatu yang 'konyol'. Beberapa kasus sebab-akibat menunjukkan keinginan pengadilan untuk menghukum mereka yang telah menciptakan situasi berbahaya bahkan ketika *actus reus* dan *mens rea* tidak terjadi pada saat yang bersamaan. Ketika penuntut telah membuktikan sebab akibat, semua unsur *actus reus* lainnya harus dibuktikan.
- Kelalaian: Aturan umum hukum Inggris adalah bahwa tidak ada terdakwa yang dapat bertanggung jawab secara pidana karena tidak bertindak. Terdapat pengecualian terhadap aturan ini. Titik awalnya adalah karena Parlemen dapat melakukan apa pun,

maka Parlemen dapat membuat seseorang bersalah karena tidak melakukan sesuatu. Contohnya adalah tindak pidana tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Terkadang kata kerja dalam pengertian kejahatan dapat diartikan termasuk kegagalan dalam bertindak. Misalnya, seseorang dapat menghalangi jalan raya dengan tidak menghilangkan penyumbatan yang terjadi secara alami. Kejahatan kelalaian menurut hukum umum sangat jarang terjadi: kejahatan yang paling umum, meskipun jarang dituntut, adalah tidak membantu polisi berdasarkan permintaan. Namun, kesulitan utama adalah tanggung jawab atas kelalaian ketika ada kewajiban untuk bertindak atau tidak. Undang-undang tersebut telah dikembangkan dengan pesat selama sekitar seperempat abad terakhir oleh pengadilan dan situasi saat ini di mana terdapat kewajiban untuk bertindak yang mencakup hubungan darah, hubungan kontraktual (tidak harus hanya mencakup kedua pihak), asumsi sukarela atas tugas kehati-hatian, tugas hukum, dan situasi berbahaya yang diciptakan oleh terdakwa. Di luar situasi ini, hukum masih belum jelas, misalnya. apakah pemasok obat mempunyai kewajiban untuk menjaga pelanggannya? Persoalannya juga tidak jelas: seberapa jauh seseorang harus berusaha memenuhi kewajibannya? Dan bolehkah korban melepaskan terdakwa dari tugasnya? Undang-undang ini masih bersifat terbuka, sebuah skenario yang mungkin melanggar Art. 7 ECHR, prinsip non-retroaktif.

Penyebab kelalaian berpotensi menjadi masalah yang sulit. Dapat dikatakan bahwa saya telah menyebabkan kematian Anda jika saya gagal menyelamatkan Anda dari tenggelam, dan hukum Inggris, sejauh hal ini telah dipertimbangkan, telah menyatakan bahwa aturan normal mengenai sebab-akibat faktual dan hukum berlaku.

Apakah orang harus bertanggung jawab karena tidak melakukan sesuatu telah menjadi pemikiran para ahli teori hukum. Persoalannya cenderung menjadi seperti ini: apakah ada perbedaan moral antara membunuh dan membiarkan kematian? Argumen yang mendukung undang-undang saat ini bahwa tanggung jawab muncul ketika ada kewajiban untuk bertindak tetapi tidak mencakup: mengapa seseorang harus diwajibkan untuk bertindak, terutama ketika hal tersebut mungkin berbahaya seperti yang mungkin terjadi ketika mencoba menyelamatkan anak yang tenggelam.

BAB 3

MENS REA

Pendahuluan

Tidak ada istilah yang mengandung ambiguitas yang lebih besar daripada frasa Latin terhormat yang menghantui hukum pidana Anglo-Amerika: mens rea. (George Fletcher, *Memikirkan Kembali Hukum Pidana* (Little, Brown & Co, 1978) 398)

Mens rea atau unsur mental dalam kejahatan merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana substantif. Secara umum, seorang terdakwa hanya dapat bertanggung jawab jika ia mempunyai mens rea. Prinsip ini memastikan bahwa terdakwa bersalah hanya ketika ia bersalah, dan tidak adanya unsur tersebut dalam satu atau lebih elemen actus reus memberikan salah satu landasan kritik subjektif terhadap tanggung jawab ketat (lihat bab berikutnya). Bentuk sebenarnya dari mens rea bervariasi dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya. Dua jenis, niat dan kecerobohan, dibahas di bawah ini. Diskusi doktrinal mengenai kedua elemen kesalahan ini telah menyebabkan konsentrasi berlebihan pada istilah-istilah tersebut. Mengekspresikan unsur-unsur mental dalam istilah-istilah tersebut dalam proyek-proyek reformasi hukum telah mengaburkan fakta bahwa hukum yang ada saat ini dibedakan dengan banyak kata yang menunjukkan kesalahan. Tanggung jawab yang ketat, dimana tidak ada mens rea mengenai satu atau lebih elemen actus reus, merupakan pokok bahasan bab berikutnya. Unsur mental spesifik untuk setiap pelanggaran dibahas dalam bab terkait. Perlu dicatat bahwa bagian-bagian yang berbeda dari actus reus mungkin memiliki keadaan pikiran yang berbeda-beda. Bahkan pelanggaran berat pun memiliki unsur mental dalam definisinya. Doktrin mens rea menjamin bahwa pihak yang menyebabkan actus reus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut. Bab ini, selain membahas bentuk-bentuk umum mens rea termasuk kelalaian, juga membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan mens rea seperti apa yang disebut doktrin kebencian yang ditransfer dan masalah kontemporeritas atau persetujuan, yang mana disebutkan dalam hukum Inggris mens rea dan actus reus harus bertepatan pada waktunya.

Keadaan pikiran terdakwa relevan dalam beberapa bidang hukum pidana.

- (a) Kapasitas mental terdakwa dapat diselidiki. Misalnya, seorang anak di bawah 10 tahun tidak pernah bertanggung jawab secara pidana; seseorang yang berusia 10 hingga 14 tahun biasanya hanya bertanggung jawab jika ia mempunyai 'kebijaksanaan yang nakal' meskipun kebijakan tersebut berubah pada tahun 1998 (lihat Bab 7).
- (b) Keadaan pikiran yang mengalami gangguan mental dapat dilihat, misalnya. dalam pembelaan terhadap kegilaan dan berkurangnya tanggung jawab (lihat Bab 9).
- (c) Kadang-kadang keadaan pikiran relevan dengan pertanyaan tentang kesukarelaan. Apakah terdakwa bertindak atas kemauannya sendiri? Masalah ini dibahas dalam Bab 2 dan 9.
- (d) Makna keempat berkaitan dengan keadaan pikiran tertentu yang diperlukan sehubungan dengan unsur-unsur pelanggaran lainnya. Berikut adalah definisi dari

mens rea. Terkadang *mens rea* dinyatakan secara tegas; terkadang hal itu tersirat dalam definisi pelanggaran.

Landasan filosofis *mens rea* adalah terdakwa dapat mengontrol perbuatannya. Dia dapat memutuskan apakah akan melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Di satu sisi, hukum adalah mencegah perilaku berbahaya. Seseorang yang bertindak padahal ia mampu mengendalikan gerak-geriknya dan menyadari kemungkinan akibat buruk dari perilakunya, lebih bersalah daripada seseorang yang bertindak secara obyektif secara sembrono atau ceroboh, dan ia layak menerima hukuman yang lebih berat daripada orang yang melakukan tindakan tersebut. Ia sebagai manusia yang otonom telah memilih bentuk-bentuk perilaku tertentu dan patut diberi sanksi serta dicegah. Biasanya dikatakan bahwa menghukum perilaku tanpa *mens rea* tidak efektif dan tidak adil, misalnya. Andi, memiliki sebuah toko yang menjual produk elektronik. Andi mengetahui bahwa produk tertentu, misalnya baterai laptop, memiliki kandungan kimia berbahaya dan bisa menyebabkan kebakaran jika tidak disimpan dengan benar. Meskipun demikian, Andi tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun dan hanya menyimpan baterai tersebut sembarangan di tokonya.

Suatu hari, baterai tersebut terbakar, menyebabkan kebakaran besar di toko dan kerugian besar bagi para tetangga dan pelanggan yang ada di toko. Investigasi menunjukkan bahwa Andi tahu tentang risiko kebakaran, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya.

1. **Pasal 359 KUHP:** *"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun."*

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Jika seseorang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, ia dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun.

Contohnya, jika kebakaran tersebut menyebabkan kematian seseorang, maka Andi dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

2. **Pasal 188 KUHP:** *"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun."*

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran. Pasal ini menetapkan hukuman bagi orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran yang membahayakan jiwa orang lain atau properti.

Dalam kasus ini, Andi bisa dituntut berdasarkan pasal ini karena kebakaran di tokonya disebabkan oleh kelalaian dalam menyimpan barang-barang berbahaya.

3. **Pasal 480 KUHP:** *"Barang siapa membeli, menerima gadai, menerima untuk dijual, menukar atau menerima sebagai pemberian, dengan maksud untuk mendapat keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut dapat diduganya bahwa barang itu diperoleh karena suatu kejahatan, diancam karena penadahan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah."*

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penjualan barang berbahaya. Jika Andi terbukti sengaja menjual barang berbahaya tanpa memperhatikan risiko dan keamanan, dia bisa dituntut berdasarkan pasal ini.

Dalam contoh kasus di atas, mens rea Andi mungkin berupa kelalaian atau kecerobohan (tidak melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan meskipun mengetahui risiko yang ada). Karena Andi tahu tentang risiko yang ditimbulkan oleh produk yang dijualnya tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya, ini bisa dianggap sebagai kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu, Andi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal di atas. Ini adalah contoh sederhana yang menunjukkan bagaimana konsep mens rea (kelalaian dalam hal ini) dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana di Indonesia.

Seperti yang terlihat pada bab sebelumnya, pembagian antara actus reus dan mens rea, meskipun cocok untuk eksposisi, bersifat artifisial dan tidak disukai di tingkat House of Lords. Kedua istilah tersebut terus digunakan. Kata-kata tersebut harus digunakan bersamaan, karena seringkali 'actus' bukan 'reus' tanpa mens rea. Misalnya dalam pencurian, perampasan harta benda milik orang lain, actus reus, bersifat netral tanpa penambahan unsur mental. Jika Anda mengambil mobil pasangan Anda, Anda tidak bersalah atas pencurian. Penambahan mens rea, ketidakjujuran dan niat untuk merampas secara permanenlah yang mengubah aktivitas yang netral secara hukum menjadi kejahatan. Beberapa kata actus reus, seperti 'memiliki' dan 'mengizinkan', mempunyai unsur mens rea di dalamnya, misalnya. seseorang tidak dapat 'mengizinkan' sesuatu tanpa mengetahui keberadaannya.

3.1 DEFINISI MENS REA

Terjemahan literal dari mens rea adalah 'pikiran bersalah'. Namun demikian, terdakwa tidak perlu merasa bersalah secara moral atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya patut dicela secara moral. Hal serupa juga berlaku sebaliknya: seseorang mungkin tidak bersalah secara moral namun memiliki mens rea. Contohnya adalah seorang petugas polisi yang menyamar yang bergabung dengan geng kriminal. Ia bertanggung jawab, misalnya, atas konspirasi impor narkoba. Kesengajaan, pengetahuan atau kecerobohan berkenaan dengan semua unsur pelanggaran bersama dengan maksud tersembunyi apa pun yang disyaratkan dalam definisi kejahatan.

Ungkapan 'elemen pelanggaran' merujuk pada apa yang biasa disebut oleh para penulis sebagai 'segala akibat dan keadaan dari tindakan (atau keadaan) terdakwa yang merupakan actus reus'. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, ada banyak kata mens rea dalam hukum Inggris yang bukan merupakan 'niat, pengetahuan, atau kecerobohan'. Istilah 'niat tersembunyi' akan segera dibahas. Contoh penerapan definisi ini berasal dari pemerkosaan, yang dapat dirumuskan ulang seperti ini. Seorang laki-laki dinyatakan bersalah melakukan perkosaan apabila ia melakukan persetubuhan baik secara vagina maupun anal (actus reus), dengan sengaja melakukan dan mengetahui bahwa persetubuhan tersebut melanggar hukum (mens rea) dengan seorang perempuan atau laki-laki (actus reus) dan mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah seorang laki-laki. perempuan atau mengetahui bahwa laki-laki itu laki-laki (mens rea) yang tidak menyetujui (actus reus),

mengetahui bahwa korban tidak menyetujui atau mengetahui bahwa korban mungkin tidak menyetujui, atau tidak peduli apakah mereka menyetujui atau tidak (*mens rea*). Perlu dicatat bahwa menggunakan istilah 'pikiran' sebagai terjemahan dari *mens* adalah tidak tepat jika *mens rea* digunakan untuk menunjukkan tidak hanya keadaan pikiran tetapi juga kelalaian, yaitu kegagalan untuk mencapai standar tertentu. Ungkapan modern tentang 'elemen kesalahan' lebih berhasil dalam menangkap aspek *mens rea* dibandingkan dengan 'pikiran bersalah'.

Ada definisi lain. Lord Simon dalam *DPP v Majewski* [1977] AC 443 mengatakan bahwa "*mens rea* adalah keadaan pikiran yang distigmatisasi sebagai sesuatu yang salah oleh hukum pidana yang, jika digabungkan dengan perbuatan terlarang yang bersangkutan, merupakan suatu pelanggaran tertentu".

S. H. Kadish 'The kemunduran kepolosan' [1968] CLJ 273 di 274, menyatakan: "*Mens rea* hanya mengacu pada keadaan mental yang disyaratkan oleh definisi pelanggaran untuk menyertai tindakan yang menghasilkan atau mengancam kerugian." Definisi-definisi ini menekankan bahwa *mens rea* berkaitan dengan kriminalitas suatu tindakan, bukan moralitasnya, sebagaimana ditegaskan oleh House of Lords di *Kingston* [1995] 2 AC 355. Semua definisi dapat dikritik. Jika *mens rea* diartikan dengan sengaja, ceroboh, dan sadar, maka otomatis kelalaian bukanlah *mens rea*. Ada juga kata-kata lain dalam undang-undang yang mungkin tidak sesuai dengan definisi *mens rea*, misalnya, jika kejahatan didefinisikan dalam istilah 'mengizinkan', apakah seseorang mengizinkan sesuatu terjadi hanya jika ia mengetahui bahwa ia mengizinkannya? 'Dengan jahat' telah didefinisikan sebagai makna yang disengaja dan ceroboh. 'Dengan sengaja' dibahas di bawah ini. Jika seseorang mengecualikan kerangka berpikir tertentu yang diperlukan untuk memberikan keyakinan dari definisi *mens rea*, maka kita tentu bertanya mengapa hal tersebut merupakan bagian dari hukum pidana padahal kita tidak akan menanyakan pertanyaan tersebut jika *mens rea* didefinisikan sedemikian rupa sehingga mencakup hal tersebut.

Apa pun definisi yang digunakan, tidak akan membawa kita jauh dalam mengetahui *mens rea* yang diperlukan untuk setiap kejahatan, karena *mens rea* yang diperlukan untuk setiap kejahatan berbeda-beda, karena hal ini bervariasi dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya seperti halnya *actus reus* yang bervariasi dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya. Maknanya dalam setiap kejahatan harus ditentukan dengan melihat undang-undang dan kasus. *Mens rea* pada hakikatnya merupakan alat analisis, bukan norma yang bersifat preskriptif.

Untuk mengulangi poin yang telah disebutkan, *mens rea* tidak berarti pikiran yang salah secara moral, seperti halnya 'jahat' dalam hukum pidana tidak berarti 'dengki'. Seseorang dapat mengalami *mens rea* bahkan jika ia yakin bahwa tindakannya benar secara moral, misalnya euthanasia: 'Hukum pidana mewakili etika obyektif yang kadang-kadang harus bertentangan dengan keyakinan individu akan kebenarannya' (J. Hall, *General Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi ke-2 (Bobbs-Merrill, 1960) 385). Tidak ada istilah *mens rea*, bahkan istilah yang paling sering digunakan seperti niat dan kecerobohan, yang didefinisikan secara hukum. Oleh karena itu, kita harus menyelidiki kasus-kasus tersebut untuk melihat

bagaimana hakim mendefinisikan setiap kondisi mental yang disyaratkan oleh definisi pelanggaran. Sayangnya, seperti yang diungkapkan Lord Simon dalam DPP untuk Irlandia Utara v Lynch [1975] AC 653: *“Kesulitan utama dalam cabang hukum ini adalah terminologi yang kacau, baik dalam penilaian [atau] tulisan akademis”*.

Contoh mens rea

Pembunuhan adalah pelanggaran hukum umum. Mens rea-nya, yang disebut kedengkaan yang telah dipikirkan sebelumnya, adalah niat untuk membunuh atau melakukan kekerasan fisik yang menyedihkan). Dalam pencurian mens rea mengandung dua unsur, yaitu ketidakjujuran dan niat untuk merampas selamanya. Bagian pasal 339 KUHP *“Pembunuhan yang dilakukan karena keinginan untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan kejahatan lain, atau untuk memungkinkan melarikan diri diri pelakunya, atau untuk memastikan penguasaan atas barang yang telah diperoleh secara melawan hukum, atau untuk menghapus jejak dari kejahatan, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”*

Tentang pembunuhan yang dilakukan sehubungan dengan kejahatan lain. Pelanggaran ini memberikan sanksi kepada tindakan jahat yang melukai tubuh secara menyedihkan. 'Dengan jahat' berarti sengaja atau ceroboh dalam pengertian Cunningham (Cunningham [1957]. Pasal 351 KUHP Pasal ini membedakan tingkat keparahan tindakan berdasarkan hasil yang diakibatkan pada korban.

Terkadang unsur mental tidak ditetapkan oleh Parlemen. Permasalahan timbul mengenai mens rea yang mana, jika ada, yang diperlukan. Ilustrasinya mencakup bigami yang bertentangan dengan pasal 57 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861 dan penyerangan yang menyebabkan luka fisik yang bertentangan dengan pasal 47 UU yang sama. Bahkan undang-undang modern tidak selalu secara tegas menyatakan unsur mental yang diperlukan. Pasal 9(1)(a) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 menetapkan salah satu bentuk perampokan, memasuki gedung sebagai pelanggar dengan maksud untuk melakukan satu atau lebih dari beberapa pelanggaran seperti pencurian. Tidak ada mens rea yang melekat pada 'memasuki gedung sebagai pelanggar'. Haruskah terdakwa berniat memasuki suatu gedung sebagai pelanggar atau cukupkah dia sadar bahwa dia mungkin masuk sebagai pelanggar?

Kita harus berhati-hati untuk tidak berpikir bahwa actus reus dan mens rea bersifat berdampingan. Dalam pembunuhan, niat untuk menimbulkan kerugian yang serius saja sudah cukup, sedangkan bagian dari actus reus adalah membunuh. Dalam pasal 20 Undang-undang Pelanggaran Terhadap Manusia tahun 1861, actus reus sebagian menyebabkan luka fisik yang parah, namun mens rea sengaja atau secara ceroboh menyebabkan luka fisik, berat atau ringan. Jika unsur mentalnya tidak seluas actus reus, maka kejahatan tersebut kadang-kadang disebut kejahatan 'setengah ketat' atau 'setengah mens rea'. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan contoh tanggung jawab konstruktif. Terdakwa bersalah, baik ia bermaksud menimbulkan atau tidak, atau ceroboh sehingga menimbulkan luka yang berat. Nama kejahatannya adalah suatu istilah yang keliru.

Sebagai contoh sulitnya mengetahui bagaimana pengadilan akan bereaksi terhadap mens rea ketika Parlemen gagal mengungkapkannya, ada dua kasus yang saling bertentangan, Seorang petani bernama Sutarno menggunakan pupuk dan pestisida di ladangnya. Ia mengikuti rekomendasi dari pedagang pupuk dan pestisida tanpa melakukan penelitian lebih lanjut. Tanpa sepengetahuan Sutarno, penggunaan pupuk dan pestisida tersebut menyebabkan pencemaran sungai di dekat ladangnya, yang mengakibatkan kematian ikan dan kerusakan ekosistem di sungai tersebut. Sutarno didakwa dengan tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menentukan tingkat mens rea yang diperlukan (niat, pengetahuan, atau kelalaian) untuk tindak pidana tersebut. Undang-undang hanya menyatakan bahwa seseorang yang menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikenai sanksi.

Dalam kasus ini, pengadilan perlu menentukan apakah Sutarno telah bertindak dengan sengaja, tahu (pengetahuan), atau lalai dalam menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini bisa menjadi sulit karena undang-undang tidak menyatakan secara eksplisit tingkat mens rea yang diperlukan. Pengadilan harus menafsirkan undang-undang yang berlaku untuk menentukan bagaimana mens rea harus diartikan dalam konteks kasus ini. Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti praktik terbaik internasional, tujuan undang-undang, atau prinsip umum hukum pidana. Pengadilan mungkin perlu mempertimbangkan bukti dari saksi ahli tentang apakah tindakan Sutarno dapat dianggap sebagai kelalaian, karena ia mengikuti rekomendasi pedagang pupuk dan pestisida tanpa riset lebih lanjut. Setelah menafsirkan undang-undang dan mempertimbangkan bukti yang tersedia, pengadilan harus memutuskan apakah tindakan Sutarno memenuhi persyaratan mens rea untuk tindak pidana yang didakwakan.

Gagasan bahwa pengadilan tidak boleh memutuskan seseorang bersalah atas suatu pelanggaran terhadap hukum pidana kecuali ia mempunyai pikiran yang patut disalahkan adalah hal yang umum dalam semua sistem pidana yang beradab. Hal ini didasarkan pada penghormatan terhadap pribadi dan kebebasan kehendak manusia menjadi kriminal, kesalahan tersebut harus dilakukan secara sadar. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, unsur mental dan unsur fisik merupakan unsur penting yang menyertai kejahatan tersebut.

3.2 MOTIF

Meskipun hukum pidana memperhitungkan mens rea, pada umumnya hukum pidana mengabaikan motif. Oleh karena itu, masalahnya adalah membedakan motif dari mens rea. Seorang terdakwa dapat memperoleh mens rea meskipun mempunyai motif yang baik. Oleh karena itu, mens rea tidak berarti 'pikiran yang bersalah' secara moral. Seringkali mudah untuk menyatakan bahwa tujuan utama terdakwa adalah motifnya. Mengapa wanita ini mencuri sepotong roti? Dia mencuri karena ingin memberi makan anak-anaknya yang kelaparan, atau karena serakah, dan sebagainya. Mengapa terdakwa ini memasang bom di pesawat? Dia melakukannya untuk membunuh istrinya atau untuk mengklaim asuransi, ingin tinggal di rumah bersama majikannya. Dalam Mohan [1976] QB 1, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa niat berarti 'keputusan untuk mewujudkan dilakukannya pelanggaran tersebut, tidak peduli

apakah terdakwa menginginkan akibat dari perbuatannya atau tidak'. Yang diinginkan terdakwa adalah motif kejahatannya. Secara umum, motif didefinisikan sedemikian rupa sehingga tidak termasuk dalam *mens rea*. Menurut definisi, ini tidak relevan. Ilustrasi terbaru adalah *A-G v Scotcher* [2005] 1 WLR 1867 (HL), di mana seorang juri bersalah karena menghina pengadilan meskipun ia telah mengungkapkan pertimbangan juri dalam upaya mencegah keguguran keadilan. Contoh dari motif yang tidak relevan adalah kasus *Dewan Penasihat Wai Yu-Tsang v R* [1992] 1 AC 269. Terdakwa dihukum karena berkonspirasi untuk menipu ketika motifnya adalah untuk menghentikan pelarian bank di mana dia menjadi ketuanya. akuntan. Lord Goff menarik garis antara 'tujuan mendasar' (motif) dan 'tujuan langsung' (niat). Jika tujuan langsungnya melibatkan suatu kejahatan, dia bersalah meskipun tujuan mendasarnya terhormat. Otoritas yang lebih baru dan berbahasa Inggris adalah *Hales* [2005] EWCA Crim 1118. Terdakwa berlari dan membunuh seorang polisi yang berusaha menangkapnya. Karena dia 'siap membunuh untuk melarikan diri' (Keene LJ), dia bermaksud membunuh. Motifnya, mencoba melarikan diri, tidak relevan dengan pelanggaran yang dituduhkan. Dalam *Sood* [1998] 2 Cr App R 355 terdakwa, seorang dokter, menyatakan bahwa dia telah melihat almarhum pada hari kematiannya. Sebenarnya dia tidak melakukannya. Apa yang dia lakukan sesuai dengan praktik standar. Pengadilan Banding memutuskan bahwa dia bersalah karena dengan sengaja dan sengaja membuat pernyataan palsu. Keyakinannya bahwa praktik tersebut dapat diterima adalah motifnya. Seperti yang dikatakan Pengadilan, 'konsep motif, kesalahan dan kesalahan moral' mengarah pada hukuman, bukan rasa bersalah. Dalam *Yip Chiu-Cheung v R* [1995] 1 AC 111 Dewan Penasihat menyarankan bahwa seseorang yang merupakan petugas penegakan narkoba yang menyamar akan bersalah atas konspirasi untuk memperdagangkan narkoba meskipun motifnya baik. Kasus ini dibahas lebih lanjut pada Bab 10, dimana disebutkan bahwa Komisi Hukum mengusulkan untuk membatalkannya melalui peraturan perundang-undangan.

Namun terkadang, pengadilan tampaknya menafsirkan pelanggaran sebagai suatu motif. Dalam *Steane* [1947] KB 997, seorang warga negara Inggris dipaksa oleh Nazi untuk melakukan siaran demi kepentingan mereka di bawah ancaman kamp konsentrasi untuk keluarganya dan dirinya sendiri. Dia didakwa berdasarkan peraturan masa perang yang menciptakan pelanggaran 'melakukan tindakan yang mungkin membantu musuh dengan maksud untuk membantu musuh'. Apakah dia berniat membantu musuh? Berdasarkan definisi Mohan, dia memutuskan untuk membantu musuh. Dia tidak ingin melakukan hal itu. Memang benar dia berada di bawah tekanan. Pengadilan Banding Pidana membatalkan hukumannya. Lord Goddard CJ berpendapat bahwa terdakwa tidak bermaksud membantu musuh. Hasil yang diperoleh dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum dengan menyatakan bahwa terdakwa bertindak di bawah tekanan. Ketua Mahkamah Agung tidak berpikir bahwa pembelaan dapat dilakukan, namun mengingat kondisi hukum saat ini, nampaknya terdakwa akan mempunyai pembelaan terhadap dakwaannya. *Steane* tidak sejalan dengan definisi umum mengenai niat (lihat di bawah), meskipun hal ini menggambarkan dengan baik bagaimana pengadilan yang bersimpati terhadap penderitaan terdakwa dapat mengubah arti dari niat dengan menyebut motif terdakwa sebagai 'niat'.

Terlebih lagi, jika motif baik terdakwa menyebabkan hukumannya dibatalkan, motif apa pun yang baik atau buruk akan memberikan pembelaan kepada terdakwa. Dalam contoh *Glanville Williams*, jika terdakwa melakukan siaran untuk Nazi dengan sebungkus rokok, pengadilan harus secara konsisten menyatakan bahwa terdakwa tidak bermaksud melakukan siaran untuk Nazi. Namun, pembelaan terhadap *Steane* dapat dilakukan berdasarkan rancangan kejahatan. Peraturan tersebut memberikan sanksi kepada 'melakukan tindakan yang mungkin membantu musuh dengan maksud untuk membantu musuh'. Jika motifnya dikesampingkan, undang-undang tersebut akan dirancang sebagai 'sengaja melakukan tindakan yang mungkin membantu musuh'. Ungkapan sebenarnya membuka jalan bagi penilaian Lord *Goddard CJ*. Penyusunan peraturan masa perang tentu diperkirakan tidak akan sempurna. Hasilnya masih terdapat dua kemungkinan penafsiran mengenai kesengajaan dalam hukum pidana, sebagaimana terdapat dua atau tiga definisi kecerobohan. Hingga berlakunya RUU KUHP atau sejenisnya, persoalan persaingan definisi akan tetap ada.

Meskipun *Steane* dapat dilihat sebagai keputusan yang motifnya relevan, *Chandler v DPP* [1963] AC 763 memberikan contoh sebaliknya. Sebuah undang-undang dirumuskan sedemikian rupa sehingga motifnya tampak relevan tetapi ditafsirkan tidak memerlukan penyelidikan motif. Para terdakwa didakwa berkonspirasi untuk memasuki tempat terlarang 'untuk tujuan yang merugikan keselamatan negara', bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Rahasia Resmi tahun 1911. Mereka mengadakan protes di pangkalan angkatan udara dan menghentikan pendaratan pesawat. atau lepas landas selama enam jam untuk berdemonstrasi menentang senjata nuklir. Lord *Devlin* mengatakan bahwa jika 'tujuan' berarti motif, mata-mata yang mengumpulkan informasi demi uang tidak akan bersalah; penafsiran itu tidak mungkin benar. Lord *Radcliffe*, dengan persetujuan para Penguasa Hukum lainnya, menyatakan bahwa tujuan langsung terdakwa adalah untuk memblokir lapangan terbang, yang merugikan keselamatan negara. Kita tidak perlu mempertanyakan apakah tujuan jangka panjang para terdakwa merugikan atau tidak. Kedua pidato tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa para pemohon bersalah. Namun, ada permasalahan dalam pidato yang menunjukkan sulitnya membedakan *mens rea* (dalam hal ini 'tujuan') dari motif. Bagaimana jika seseorang memasuki lapangan terbang untuk menghentikan pesawat yang membawa bom lepas landas? Lord *Radcliffe* mengatakan bahwa mencegah kepergian pesawat bukanlah tujuan orang tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, pencegahan lepas landas adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Lord *Devlin* berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah *take-off*, namun tujuan tersebut tidak merugikan keselamatan negara.

Kesimpulannya, orang yang sinis mungkin berpendapat bahwa pengadilan dalam kasus-kasus ini hanya melampiaskan prasangka mereka. Dalam satu kasus, terdakwa mempunyai motif yang disetujui oleh hakim, namun dalam kasus lainnya tidak. Pandangan yang tidak terlalu sinis adalah dengan memperhatikan bagaimana pengadilan dapat memanipulasi hukum untuk membebaskan terdakwa, jika mereka menginginkannya. Tentu saja dengan menolak untuk melihat tujuan para terdakwa dalam kasus *Chandler*, Lords tidak perlu terlibat dalam diskusi politik mengenai senjata nuklir.

Ada pengecualian terhadap aturan bahwa motif tidak relevan. Dalam pemerasan, terdakwa mempunyai pembelaan jika permintaannya dibenarkan. Keyakinannya bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mengajukan tuntutan tersebut mungkin didasarkan pada motifnya. Dalam kejahatan penyerangan tidak senonoh sebelumnya, yang peristiwanya tidak jelas mengenai ketidaksenonohannya, terdakwa bersalah hanya jika ia mempunyai motif tidak senonoh, misalnya fetish bokong. 'Pelanggaran bermotif rasial' yang diciptakan oleh Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan tahun 1998 adalah kejahatan yang tercantum dalam Undang-undang tersebut yang dilakukan dengan motif rasial. Misalnya, pidana pengrusakan dijadikan pelanggaran yang lebih serius dari biasanya bila terdakwa menunjukkan permusuhan berdasarkan keanggotaan suatu kelompok agama atau jika pelanggaran tersebut seluruhnya atau sebagian dimotivasi oleh permusuhan terhadap anggota kelompok ras tertentu. Di sini motif secara tegas dijadikan bagian dari definisi pelanggaran. Di tempat lain, motif dapat 'diselundupkan' ke dalam hukum melalui konsep-konsep seperti ketidakjujuran dalam pencurian dan pembelaan atas kebutuhan. Oleh karena itu, DPR dapat membuat undang-undang tersebut secara tegas atau implisit dengan mempertimbangkan motif. Motif mencegah korban untuk memukul seseorang mungkin mendasari pembelaan diri.

Pengecualian motif dari pertimbangan dapat dilihat sebagai bagian dari 'objektivisasi' tindakan kriminal. Perilaku terdakwa diambil dari konteksnya seperti kelaparan dan keserakahan dalam contoh-contoh yang diberikan di awal bagian ini.

Maksud

Niat adalah kata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Maknanya dalam hukum meskipun penting sebagai konsep fundamental masih problematis, meski bisa dibilang tidak terlalu problematis dibandingkan sebelumnya. Definisi dasarnya, yang 'alami dan biasa', menurut Robert Walker LJ dalam perkara perdata *Re A* [2001] Fam 147 adalah 'tujuan'. Moloney [1985] AC 905, selain menegaskan bahwa kebencian yang dipikirkan sebelumnya memiliki dua bentuk dan menyatakan bahwa istilah kebencian yang dipikirkan sebelumnya adalah 'anakronistik dan sekarang sepenuhnya tidak pantas', juga menetapkan bahwa niat saja sudah cukup. Meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi tidaklah cukup. Perkiraan bahkan konsekuensi yang hampir atau sangat mungkin terjadi bukanlah niat atau setara dengan niat setelah Moloney. Namun, 'niat' tidak didefinisikan. Lord Bridge mengatakan kepada para hakim bahwa dalam sebagian besar kasus, mereka dapat menyerahkan definisi tersebut kepada 'akal sehat juri'. Misalnya, jika terdakwa mempunyai motif untuk membunuh korban, menggorok lehernya, dan mengetahui apa konsekuensi dari tindakan tersebut, maka sah bagi juri untuk mengatakan bahwa ia memang bermaksud membunuh. Dalam *Dudley dan Stephens* (1884) 14 QBD 273 para terdakwa memang berniat membunuh awak kabin, namun motifnya adalah memakannya agar bisa bertahan hidup. Mereka berargumentasi bahwa niat mereka adalah untuk menyelamatkan hidup mereka, namun pengadilan menolak anggapan tersebut. Mereka akan dengan senang hati tidak membunuh jika mereka bisa selamat, tapi mereka memutuskan untuk membunuh anak itu untuk memakan tubuhnya. Yang lebih mutakhir adalah *Wright* [2000] Crim LR 928 (CA). Korban ditemukan tak sadarkan diri di lantai

sel penjaranya. Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut. Oleh karena itu, entah dia telah memutuskan untuk membunuh atau tidak. Tidak ada ruang untuk arah miring (lihat di bawah). Niat mencakup keadaan pikiran ketika terdakwa bermaksud atau memutuskan untuk membunuh ("niat langsung"). Oleh karena itu, jika terdakwa memutuskan atau berniat untuk mencapai suatu akibat atau jika akibat itu adalah maksud atau tujuannya, ia bermaksud agar hasil tersebut terjadi. Tidak ada upaya di Moloney atau kasus-kasus berikutnya untuk membatalkan konsep niat langsung. Seperti yang dinyatakan Lloyd LJ dalam Walker dan Hayles (1990) 90 Cr App R 226, 'Tidak pernah dikatakan bahwa seorang pria tidak berniat mencapai apa yang ingin ia capai.' Brennan J dalam He Kaw Teh (1985) 157 CLR 523 (di 569) HCA memberikan definisi bentuk niat ini: 'Niat . . . mengandung pengertian suatu keputusan untuk mewujudkan suatu keadaan, sejauh hal itu mungkin dilakukan, untuk menghasilkan suatu tindakan tertentu atau akibat tertentu. Keputusan seperti itu menyiratkan keinginan atau keinginan untuk melakukan tindakan tersebut atau menghasilkan akibat seperti itu.'

Itu tetap merupakan niat meskipun menurutnya kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Agaknya, hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan jika terdakwa mengetahui bahwa hasil yang diperoleh tidak mungkin tercapai, namun hal tersebut akan terjadi jika ia memiliki niat langsung namun menganggap bahwa peluangnya untuk mencapai tujuannya kecil, seperti ketika ia, karena tembakannya yang buruk, menembak ke arah seseorang beberapa meter jauhnya.

Karena hakim pengadilan tidak boleh memberikan definisi apa pun tentang niat tersebut, juri dapat mengambil kesimpulan berbeda atas fakta yang sama, dan Pengadilan Tinggi tidak berdaya untuk melakukan intervensi. Seperti yang ditekankan Lord Bridge, 'niat' memiliki arti biasa, apa pun itu. Lord Scarman dalam Hancock dan Shankland [1986] AC 455 mengatakan bahwa juri harus menggunakan akal sehatnya untuk mengambil keputusan. Pedoman umum tidak dapat menggantikan penggunaan akal sehat juri terhadap fakta-fakta dalam setiap kasus. Oleh karena itu, pada titik analisis ini dapat dikatakan bahwa niat sebagai bagian dari hukum pembunuhan tidak mempunyai dan tidak boleh diberi arti teknis. Juri tidak boleh menggunakan sinonim seperti maksud atau tujuan. Tidak diragukan lagi juri akan menggunakan sinonim seperti itu. Kecuali jika diberitahu secara berbeda, mereka akan menerapkan definisi bahasa biasa.

Kadang-kadang dikatakan bahwa niat dalam hukum pidana (meskipun mungkin tidak dalam bahasa biasa) juga mencakup keadaan pikiran seseorang yang menganggap korbannya pasti akan mati, contoh yang umum adalah orang yang memasang bom di pesawat. untuk mendapatkan kembali uang asuransi pada kargo. Ia tidak ingin para penumpangnya mati dan akan sangat bahagia jika mereka selamat namun ia menunjukkan bahwa ia tidak menghargai kehidupan. Keadaan pikiran dalam kaitannya dengan penumpang, yang sering disebut dengan istilah 'niat miring', disebut oleh Glanville Williams (orang pertama yang menggunakannya dalam hukum pidana) sebagai 'efek samping' dari niat terdakwa (' Niat miring' [1987] CLJ 417). Penulis yang sama dalam Criminal Law: The General Part, edisi ke-2 (Stevens, 1961) 40, menekankan bahwa 'keraguan filosofis belaka, atau intervensi kebetulan yang luar biasa,

harus diabaikan'. Contoh kasus hukum adalah Mohan [1976] QB 1 (CA). Fakta kasusnya serupa dengan kasus Hales di atas. Untuk melarikan diri, tersangka mengendarai mobilnya ke arah petugas polisi.

Tujuannya adalah untuk melarikan diri. Efek samping dari niat langsungnya adalah upaya untuk melukai tubuh dengan maksud untuk melukai tubuh. Polisi itu mungkin akan menyingkir tetapi jika tidak, dia akan dirobohkan. Dengan kata lain, terdakwa bertindak untuk melarikan diri. Kata-kata yang dicetak miring menunjukkan apa niatnya dan bahwa pemecatan polisi bukanlah niatnya. Dia tidak mengemudi seperti yang dia lakukan untuk menabrak petugas polisi. Elemen mental ini, yaitu pandangan ke depan mengenai suatu kepastian virtual, kadang-kadang disebut 'niat miring', meskipun tidak semua penulis sepakat mengenai luasnya. Selain itu, tidak semua komentator sepakat apakah niat miring adalah niat. Jika bentuk kesengajaan ini merupakan bagian dari mens rea pembunuhan, mungkin akan terdapat kasus-kasus sulit di garis batas antara perkiraan kepastian dan perkiraan konsekuensi sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi, yang terakhir ini tidak merupakan bukti adanya kesengajaan. (Siswa harus berhati-hati dalam membaca karena jenis pandangan ke depan yang terakhir juga kadang-kadang disebut 'niat miring'. 'Niat miring' juga merupakan istilah yang digunakan untuk keadaan pikiran yang terjadi ketika tidak ada cara yang mungkin untuk mencapai tujuan seseorang, pelanggaran hukum, tanpa melanggar hukum lain. Misalnya, untuk menembak mati saingannya, terdakwa mungkin harus menembak melalui jendela yang sudah terpasang. Maksud langsungnya adalah untuk membunuh, maksudnya adalah untuk menyebabkan kerugian pidana.) 'Virtual' atau moral kepastian berarti 'kepastian kecuali akibat tindakan yang tidak dapat diduga', misalnya semua penumpang selamat dari ledakan dan pesawat mendarat dengan selamat. Tidakkah memuaskan jika tergantung pada penulisnya, kerangka berpikir yang berbeda disebut dengan nama yang sama. Selain itu, niat dan pandangan ke depan, bahkan yang pasti, bisa menjadi konsep yang sangat berbeda. Dengan menenggak alkohol, Anda mungkin memperkirakan bahwa Anda akan mabuk sebagai akibat tertentu, namun Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda berniat untuk mabuk. C. Finkelstein menulis dalam 'No Harm No Foul? Objektivisme dan Hukum Percobaan' (1999) 18 Hukum dan Filsafat 69, 75: 'Niat miring sebenarnya bukanlah niat apa pun. Ini adalah label untuk kondisi mental yang berbeda, yaitu pandangan ke depan. Menyebutnya sebagai suatu jenis niat adalah suatu kebingungan belaka'. Namun demikian, beberapa komentator menganggap bahwa maksud langsung dan pandangan ke depan dari suatu kepastian virtual tidak dapat dibedakan; keduanya salah secara moral karena sama-sama mengabaikan kehidupan manusia.

Untuk memahami apa arti niat, kita harus mempertimbangkan lima kasus penting: Moloney, faktanya dinyatakan dalam Bab 11, Hancock dan Shankland, Nedrick [1986] 1 WLR 1025, Walker dan Hayles (1990) 90 Cr App R 226 (sebuah kasus yang saat ini kurang penting dibandingkan kasus aslinya) dan Woollin [1999] AC 82. Masih banyak lagi yang bisa dikatakan namun penafsiran di bawah ini menghilangkan sejarah topik tersebut kecuali sejauh pengetahuan otoritas sebelumnya diperlukan untuk memahami hukum saat ini.

Moloney

Meskipun ada kritik terhadap Moloney di Hancock dan Shankland, kasus ini tetap menjadi kasus penting karena beberapa alasan.

- (a) Undang-undang ini menghapuskan undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa kematian atau cedera tubuh yang parah sudah merupakan kejahatan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Hal ini menegaskan pandangan Wien J dalam Belfon [1976] 3 All ER 46 tentang pelanggaran non-fatal bahwa pandangan ke depan bukanlah bagian dari niat. Perkiraan kemungkinan terjadinya cedera merupakan bagian dari bukti yang digunakan untuk membuktikan niat, bukan berbagai niat itu sendiri. Seperti yang dikatakan Lord Hailsham: 'Tinjauan ke masa depan dan kemampuan untuk memperkirakan masa depan tidak sama dengan niat.' Lord Bridge menekankan bahwa: 'Belum ada seorang pun yang menyatakan bahwa kecerobohan dapat memberikan unsur penting dalam kejahatan pembunuhan.' Pandangan sebaliknya, bahwa dalam dalam bahasa biasa, pandangan ke depan tentang kemungkinan adalah niat, pandangan yang telah mendapat dukungan dari setidaknya satu Penguasa Hukum, ditolak.
- (b) Pandangan masa depan terdakwa, bagaimanapun, hanyalah satu bagian, tetapi hanya satu bagian, dari bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan oleh juri dalam menentukan apakah terdakwa memang bermaksud membunuh atau menimbulkan luka fisik yang parah. Oleh karena itu, niat dapat disimpulkan dari tinjauan ke masa depan, namun bukti dari tinjauan ke masa depan, bahkan dari kepastian yang virtual, bukanlah bukti dari niat. Para juri menemukan kesulitan dengan gagasan ini dan meminta panduan hakim pada Moloney, Hancock dan Shankland dan Nedrick. Masih harus dilihat apakah juri akan memerlukan bantuan seperti itu setelah Woollin.
- (c) Untuk menghindari kebingungan di benak juri, kecuali dalam kasus-kasus luar biasa, hakim tidak perlu memberikan arahan tentang arti 'niat'. Dalam hal ini House of Lords menegaskan undang-undang sebelumnya: Beer (1976) 63 Cr App R 222 (CA), yang telah disetujui oleh Dewan Penasihat dalam Leung Kam Kwok v R (1984) 81 Cr App R 83. Nedrick, di atas, O'Connor [1991] Crim LR 135, Bowden [1993] Crim LR 380 (CA), Hawkins [1993] Crim LR 888 dan Fallon [1994] Crim LR 519 baru-baru ini mendukung proposisi ini. Lord Bridge mengatakannya seperti ini di Moloney:

Aturan utamanya adalah bahwa hakim harus menghindari penjelasan atau parafrase apa pun tentang apa yang dimaksud dengan niat dan menyerahkan kepada akal sehat juri untuk memutuskan apakah terdakwa bertindak dengan niat yang diperlukan. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menangani instruksi mengenai konsekuensi alamiah, namun rujuk ke Hancock dan Shankland, di bawah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai poin ini. Dalam hal ini, Moloney saat ini sama benarnya dengan dulu. 'Aturan emasnya' adalah: juri tidak boleh diarahkan sesuai dengan istilah Moloney, Hancock, dan Shankland kecuali terdapat bukti bahwa terdakwa bermaksud melakukan sesuatu selain kejahatan yang dituduhkan. Jika penuntut mendakwa bahwa ia bermaksud membunuh atau melakukan penganiayaan berat namun terdakwa

menyangkal tuduhan tersebut, maka tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Namun, jika dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud demikian namun ingin memasang bom di pesawat untuk mengklaim uang asuransi, diperlukan arahan dari Moloney/Hancock dan Shankland.

- (d) Dalam pembunuhan tidak ada persyaratan bahwa terdakwa harus 'membidik' korban. Ada dikte Viscount Kilmuir di DPP v Smith [1961] AC 290 dan Lord Hailsham di Hyam v DPP [1975] AC 55 yang menyatakan bahwa korban harus menjadi sasaran terdakwa, namun Lord Hailsham menarik ucapannya dan anggota House of Lords lainnya dengan suara bulat menyetujui pengunduran dirinya. Konsesi ini membuka jalan bagi hukuman bagi teroris yang memasang bom, meskipun dia tidak mengarahkan bom ke korban sebenarnya.
- (e) House of Lords tidak menyetujui pandangan Lord Hailsham di Hyam bahwa niat untuk mengekspos calon korban pada risiko serius yang mengakibatkan cedera tubuh yang menyedihkan adalah bagian dari mens rea pembunuhan. House of Lords berpikir bahwa jika kejahatan seperti ini diterima, maka pengemudi yang nekat dan melakukan pembunuhan dapat dihukum karena pembunuhan, suatu akibat yang mereka benci.
- (f) Yang Mulia terus membedakan niat dari motif dan keinginan. Dalam 'contoh sederhana' Lord Bridge: Seorang pria yang, di bandara London, menaiki pesawat yang diketahuinya akan berangkat ke Manchester jelas-jelas berniat untuk melakukan perjalanan ke Manchester meskipun Manchester adalah tempat terakhir yang ia inginkan dan motifnya menaiki pesawat tersebut hanyalah untuk menghindari kejaran. (Lord Bridge mengatakan bahwa naik pesawat Manchester 'secara meyakinkan menunjukkan niatnya untuk pergi ke sana, karena merupakan kepastian moral bahwa di sanalah dia akan tiba'. Pernyataan ini tampaknya mencampuradukkan konsep niat dan maksud yang berasal dari pandangan ke depan tentang kepastian moral. Hal ini dibahas di bawah, khususnya mengacu pada Woollin.)

Contoh yang lebih sederhana lagi adalah: Anda mungkin berniat pergi ke dokter gigi tanpa memiliki keinginan sedikit pun untuk pergi ke dokter gigi. Memang benar, Anda mungkin takut duduk di kursi dokter gigi! Alasan emosional – keserakahan, kecemburuan, ambisi dan sejenisnya di balik pembunuhan tersebut diabaikan. Hanya niat untuk membunuh atau melukai tubuh yang menyedihkan yang dipertimbangkan.

Ringkasan singkat dari Moloney adalah bahwa pandangan ke depan dan motif bukanlah niat dan kecuali dalam kasus yang jarang terjadi, 'niat' harus diserahkan kepada juri. Kesulitan utamanya adalah memahami dan menerapkan beberapa ungkapan Lord Bridge. Pada salah satu pidatonya – yang sayangnya merupakan poin penting, karena ia menyatakan apa yang harus disampaikan hakim kepada juri dalam kasus-kasus luar biasa – ia menggunakan istilah 'konsekuensi wajar'. Apakah terdakwa melihat kematian atau kerugian yang sangat serius sebagai akibat wajar dari perbuatannya dan apakah hal tersebut memang merupakan akibat wajar? Apa yang dia maksudkan adalah bahwa suatu akibat akan terjadi 'kecuali ada sesuatu yang tidak terduga yang mencegahnya', seperti yang dia katakan di tempat lain (dalam pengertian ini 'alami' berarti sama dengan 'hampir pasti'), namun hal ini bisa juga berarti

bahwa terdakwa bersalah apabila kematian tersebut memang merupakan suatu akibat yang wajar, yaitu langsung, tanpa konsekuensi tersebut secara moral pasti (atau bahkan sangat mungkin) terjadi. Menggunakan ilustrasi komentator, 'Konsepsi adalah konsekuensi alami dari hubungan seksual namun belum tentu mungkin terjadi' (Glanville Williams 'Oblique Niat' [1987] CLJ 417). Dalam pengertian kedua ini, 'alami' tidak mencakup kepastian virtual. Istilah 'pasti secara moral' berarti kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di bagian lain dalam pidatonya ia menyatakan bahwa terdakwa bersalah hanya jika ia memperkirakan kemungkinan hasil yang akan diperoleh tidak terlalu besar. Lord Hailsham mengatakan hal yang sama di *Hyam v DPP* di atas.

Kesulitan lain dalam pidato Lord Bridge adalah ketika ia mendefinisikan niat, ia merujuk tidak hanya pada pandangan ke depan mengenai konsekuensi alamiah namun juga pada fakta bahwa kerugian adalah konsekuensi alamiah. Tidak jelas mengapa fakta tersebut relevan dengan *mens rea* terdakwa. Masalah lain dengan *Moloney* adalah bahwa terdakwa sama sekali tidak memperkirakan adanya risiko kematian atau cedera tubuh yang menyedihkan; oleh karena itu, apa pun yang dikatakan tentang perkiraan konsekuensi, alami atau tidak, adalah obiter. Lord Bridge menggunakan contoh seorang pembom teroris yang meninggalkan bom yang belum meledak. Dia bermaksud menakut-nakuti orang dan memberikan peringatan kepada polisi. Pasukan penjinak bom dipanggil. Saat mencoba menjinakkan bom, seorang tentara terbunuh. Lord Bridge berasumsi bahwa kejahatan itu adalah pembunuhan. Namun, ada dugaan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pembunuhan berencana: teroris tidak memperkirakan kematian atau GBH prajurit tersebut sebagai konsekuensi yang pasti.

Terlepas dari kebingungan yang ditimbulkan oleh *Moloney*, keputusan ini tetap merupakan keputusan yang sangat penting untuk memperjelas poin-poin yang disebutkan di atas, dan faktanya ini merupakan kasus yang sederhana. Pertanyaan yang diajukan juri adalah fakta: apa yang ada di benak terdakwa saat menarik pelatuk? Jika dia tahu bahwa pistol itu diarahkan ke kepala ayah tirinya, juri, seperti yang dikatakan Lord Bridge, 'pasti akan menghukumnya atas pembunuhan.' Sebaliknya, jika mereka berpikir mungkin benar bahwa, dalam kondisi pemohon mabuk dan dalam konteks tantangan yang konyol, tidak pernah terlintas dalam kepala pemohon ketika ia menarik pelatuk yang diarahkan oleh pistol. [ayah tirinya], dia seharusnya dibebaskan dari pembunuhan dan dihukum karena pembunuhan tidak berencana.' Arahan *Moloney* tidak relevan dengan fakta *Moloney*!

Hancock dan Shankland

House of Lords membahas hal ini dalam kasus berikutnya dalam rangkaian ini. Kasus ini melibatkan dua orang penambang Welsh yang melakukan pemogokan, yang selama pemogokan tahun 1984 - 1985 penambang mendorong balok beton melewati tembok pembatas ke jalan raya dengan tujuan mendorong pekerja penambang untuk berhenti bekerja. Sopir taksi yang membawa penambang itu tewas. Mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan oleh juri, tetapi House of Lords tidak setuju. Pidato utama disampaikan oleh Lord Scarman. Seperti House of Lords di *Moloney*, ia membedakan *mens rea* niat dari bukti yang diperlukan untuk membuktikannya. Di *Moloney* Yang Mulia telah menyatakan bahwa para juri harus bertanya pada diri mereka sendiri dalam kasus luar biasa di mana mereka harus

mempertimbangkan hal-hal tersebut (dalam kasus-kasus normal jelas bahwa, katakanlah, terdakwa menikam korban, dengan maksud untuk membunuh atau menyebabkan penderitaan yang menyedihkan. cedera tubuh) apakah akibat tersebut merupakan akibat wajar dari perbuatan terdakwa. Lord Scarman menambahkan pada pertanyaan ini bahwa kematian atau cedera juga kemungkinan besar merupakan akibat dari tindakan tersebut. Jika tidak, terdakwa hanya akan bertanggung jawab atas konsekuensi langsung, sedangkan maksud sebenarnya dari pidato Lord Bridge di Moloney adalah bahwa terdakwa hanya bertanggung jawab jika juri menyimpulkan niatnya dari perkiraannya mengenai konsekuensi yang hampir pasti.

Meskipun tidak menetapkan batasan minimum yang dapat dipertimbangkan oleh juri, Lord Scarman menekankan bahwa jurilah yang menentukan fakta-fakta, termasuk tingkat pandangan ke depan terdakwa, apakah dia bermaksud membunuh atau menyebabkan luka fisik yang parah. Semakin besar tingkat tinjauan ke masa depan, semakin besar kemungkinan juri akan menyimpulkan bahwa terdakwa memang mempunyai niat tersebut. Lord Scarman berkata: 'Jika kemungkinan terjadinya kematian atau cedera serius tinggi, kemungkinan terjadinya hal tersebut mungkin . . . dapat dilihat sebagai bukti adanya niat untuk membunuh atau melukai.' Namun, pertanyaan yang diajukan masih berupa bukti, bukan hukum substantif. Persoalan yang dihadapi juri di Hancock dan Shankland, seperti halnya di Moloney, bukanlah persoalan yang rumit: apakah mereka percaya pada kasus penuntut atau terdakwa? Jika yang pertama diyakini, kejahatannya adalah pembunuhan; jika yang terakhir, kejahatannya adalah pembunuhan berencana. Kemungkinan terjadinya putusan yang tidak konsisten tetap ada: juri yang satu mungkin menyimpulkan niatnya, juri yang lain mungkin tidak, berdasarkan fakta yang sama, namun pengadilan tidak berdaya untuk melakukan intervensi. Penilaian mengenai sisi mana sesuatu yang jatuh merupakan hal yang sulit dalam hukum, namun masalah ini diperburuk dalam niat dimana hakim tidak dapat memberikan instruksi kepada juri mengenai arti dari niat tersebut. Lebih lanjut, Lord Scarman mengatakan bahwa juri dapat menyimpulkan niat dari probabilitas yang tinggi, tes yang lebih rendah daripada tes kepastian virtual Lord Bridge.

Nedrick

Lord Scarman dalam Hancock dan Shankland berpendapat bahwa pedoman tidak mempunyai tempat dalam hukum pidana, namun Pengadilan Banding menetapkan prinsip-prinsip tersebut dalam Nedrick, di atas, yang diikuti dalam Barr (1989) 88 Cr App R 362 (CA), sebuah keputusan dari 1986.

Nedrick [1986] 1 WLR 1075

Terdakwa menuangkan parafin melalui kotak surat sebuah rumah dan ke pintu depan. Dia membakarnya. Rumah itu terbakar dan seorang anak terbunuh. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan setelah adanya arahan dari hakim pengadilan yang mengikuti hukum pra-Moloney yang ditetapkan dalam Hyam v DPP, di atas, sebuah kasus dengan fakta serupa, bahwa perkiraan akan terjadinya cedera tubuh yang menyedihkan harus diperlakukan sebagai tindakan yang disengaja. alasan untuk menyebabkannya. (Kasus ini disidangkan di hadapan Moloney.) Pengadilan Banding mengizinkan banding dengan alasan bahwa, menurut

Moloney, pandangan ke depan tidak bisa disamakan dengan niat. Pandangan ke depan hanyalah sebuah langkah menuju pembuktian niat.

Pengadilan memberikan nasihat kepada hakim pengadilan tentang bagaimana mereka harus mengarahkan juri ketika terdakwa melakukan tindakan berbahaya yang mengakibatkan seseorang meninggal. Seperti biasa, perlu diperhatikan bahwa jika terdakwa mempunyai niat langsung untuk membunuh atau melakukan penganiayaan berat, hakim tidak boleh mengacu pada pedoman ini. Hal ini hanya digunakan jika akibat yang terjadi bukan merupakan tujuan terdakwa.

- (a) Seseorang dapat mempunyai niat untuk membunuh atau menimbulkan luka badan yang parah meskipun ia tidak menginginkan akibat tersebut.
- (b) Semakin besar kemungkinan akibat yang ditimbulkan, semakin besar kemungkinan bahwa terdakwa telah meramalkannya; dan jika konsekuensinya sudah diperkirakan sebelumnya, semakin besar kemungkinan bahwa terdakwa memang sengaja melakukan hal tersebut. (Pernyataan ini mengikuti Hancock dan Shankland jika ini berarti bahwa juri dapat menyimpulkan niatnya berdasarkan perkiraan kepastian yang sebenarnya. Namun, jika ini berarti bahwa terdakwa bermaksud melakukan sesuatu ketika dia memperkirakan konsekuensinya sudah pasti, hal ini tidak konsisten dengan Moloney.)
- (c) Jika terdakwa tidak meramalkan adanya kematian atau luka badan yang parah, maka ia tidak bermaksud demikian.
- (d) Jika terdakwa memang memperkirakannya, namun menganggap bahwa risiko terjadinya hal itu kecil, juri dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa ia tidak bermaksud demikian.
- (e) Jika terdakwa menyadari bahwa kematian atau cedera serius adalah suatu hal yang pasti terjadi ('kecuali ada intervensi yang tidak terduga'), juri mungkin akan dengan mudah mengatakan, untuk menyimpulkan, bahwa ia memang sengaja melakukan hal tersebut. Dalam hal ini pengadilan menyetujui ungkapan Lord Bridge dalam Moloney bahwa hasilnya harus berupa 'kepastian moral' atau 'sedikit terlalu berlebihan'. Proposisi ini dapat diparafrasekan seperti ini. Dalam hidup hanya sedikit hal yang pasti. Keadaan yang tidak terduga dapat terjadi sehingga mencegah terjadinya sesuatu.

Penumpang mungkin masih hidup ketika sebuah bom meledak di pesawat pada ketinggian 30.000 kaki, namun jika tidak terjadi keadaan yang tidak terduga, mereka akan mati. Pelaku bom masih bisa berniat membunuh meski menyadari kecil kemungkinan penumpangnya selamat. Oleh karena itu, jenis tinjauan ke masa depan ini berbeda dengan tinjauan ke masa depan terhadap sesuatu yang kemungkinannya (sangat) tinggi akan terjadi. Berdasarkan fakta Nedrick, hasilnya adalah bahwa terdakwa tidak memiliki niat yang diperlukan untuk melakukan pembunuhan karena dia tidak melihat kematian atau cedera tubuh yang menyedihkan sebagai suatu kepastian; oleh karena itu, niatnya tidak dapat disimpulkan. (Jika juri berhak menyimpulkan niat dari perkiraan kepastian virtual, secara logis niat tidak dapat mencakup perkiraan kepastian virtual.)

Pengadilan Banding menyimpulkan, dalam beberapa kalimat yang hampir menyatakan bahwa pandangan ke depan atas suatu kepastian virtual adalah suatu bentuk niat, bahwa:

Ketika seseorang menyadari bahwa dalam semua tujuan praktis, tindakannya tidak dapat dihindarkan bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian atau bahaya serius, kesimpulannya mungkin tidak dapat ditolak bahwa ia memang menginginkan akibat tersebut, betapapun kecilnya keinginan atau keinginannya untuk hal itu terjadi. Keputusan harus diambil oleh juri setelah mempertimbangkan semua bukti.

Kutipan ini mungkin tidak konsisten dengan Hancock dan Shankland, yang tidak selalu terbatas pada memperoleh niat dari perkiraan kepastian virtual, namun mungkin mencakup memperoleh niat dari tingkat tinjauan ke masa depan yang lebih rendah daripada perkiraan kepastian virtual. Namun Pengadilan Banding bermaksud menerapkan kewenangan tersebut. Nedrick menekankan bahwa pandangan ke depan mengenai konsekuensi yang hampir pasti tidak dapat dianggap sebagai niat. Dengan kata lain, pandangan ke depan atas suatu kepastian yang sebenarnya bukan merupakan suatu kesengajaan, melainkan hanya sebagian dari bukti apakah terdakwa memang menginginkan hasil yang dilarang tersebut. Keputusan ini tidak sepenuhnya jelas di Moloney dimana pertanyaan yang diajukan House of Lords adalah apakah *mens rea* pembunuhan ditetapkan berdasarkan bukti pandangan ke depan 'bahwa kematian atau kerugian serius mungkin akan terjadi'. House of Lords menolak pandangan jauh ke depan sebagai kejahatan yang telah dipikirkan sebelumnya. Pedoman tersebut tidak konsisten dengan pidato Lord Scarman di Hancock dan Shankland, di mana dia mencela penggunaan pedoman. Lord Lane CJ, anggota terkemuka pengadilan di Nedrick, kemudian berkata di luar hukum bahwa dia tidak bisa sejelas yang dia inginkan karena dia dihadapkan pada dua keputusan House of Lords.

Pengadilan Banding di Purcell (1986) 83 Cr App R 45 tidak menetapkan pedoman rinci, sementara pengadilan yang sama di Ward (1987) 85 Cr App R 71 menegaskan kembali pandangan yang diambil di semua otoritas bahwa kecuali dalam kasus-kasus sulit saja diperlukan arah niat yang sederhana: tidak diperlukan instruksi tentang perbedaan antara keinginan dan niat, kecuali perbedaan tersebut memang diperlukan oleh fakta. Contoh yang lebih baru adalah Fallon [1994] Crim LR 519. Jaksa menuduh bahwa terdakwa bermaksud membunuh seorang polisi yang sedang menggeledahnya dengan menembakkan pistol. Terdakwa berpendapat bahwa penembakan itu tidak disengaja. Pengadilan Banding menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, penembakan tersebut disengaja atau tidak. Pandangan ke depan terdakwa tidak mempengaruhi kasus tersebut. Oleh karena itu, hakim persidangan salah jika mengarahkan juri untuk melihat ke depan.

Walker dan Hayles

Kasus keempat melibatkan terdakwa yang melemparkan korbannya dari balkon lantai tiga. Mereka diadili karena percobaan pembunuhan. Satu-satunya unsur mental dalam pelanggaran tersebut adalah niat untuk membunuh. Pengadilan Banding mengatakan:

- (a) menggemakan Belfon [1976] 3 Semua ER 46, lihat di atas, bahwa orang awam tidak kesulitan mengetahui apa maksudnya; arti inti dari niat adalah 'tujuan'. Pengadilan menyatakan: 'Tidak pernah ada anggapan bahwa seseorang tidak berniat mencapai

apa yang ingin ia capai.' Jarang sekali diperlukan arahan yang rumit tentang niat tersebut. Kasus luar biasa adalah kasus di mana terdakwa mencapai hasil yang tidak ia coba dapatkan. Permintaan dari juri untuk instruksi seperti itu tidak membuat kasus ini menjadi kasus yang luar biasa;

- (b) bukanlah suatu penyesatan bagi seorang hakim untuk mengarahkan bahwa tingkat kemungkinan terjadinya suatu hasil sangat tinggi, asalkan niat tetap menjadi urusan juri dan garis antara kesengajaan dan kecerobohan telah ditarik. Pandangan ke depan tidak bisa disamakan dengan niat. Namun, lebih baik menggunakan frasa 'kepastian virtual', seperti yang dilakukan Nedrick. Sekali lagi pengadilan menekankan bahwa perkiraan akan adanya konsekuensi tertentu bukanlah sesuatu yang disengaja.

Akibatnya, pengadilan menyamakan 'kepastian virtual' dan 'tingkat kemungkinan yang sangat tinggi'. Namun ada perbedaan besar antara kepastian virtual dan probabilitas tinggi. Jika sesuatu sudah pasti, maka hal itu hampir tidak dapat dielakkan akan terjadi. Jika suatu peristiwa sangat mungkin terjadi, kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Kedua konsep tersebut tidak sama. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi hipotetis bom di pesawat, karena, misalnya, kejadian yang tidak disengaja, hanya sedikit hasil yang pasti. Seorang pembunuh bisa saja berniat membunuh seorang kaisar, meski di detik-detik terakhir sang permaisuri mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil kekuatan penuh pelurunya. Perkiraan tingkat kemungkinan yang sangat tinggi tampak seperti *mens rea* dari salah satu bentuk pembunuhan tidak berencana. Akibatnya, para juri mungkin tidak yakin mengenai tingkat minimum tinjauan ke masa depan yang diperlukan sebelum mereka dapat menyimpulkan maksud dari tinjauan ke masa depan. Dapatkah seseorang menyimpulkan niatnya ketika terdakwa meramalkan suatu akibat yang mungkin terjadi, mungkin saja terjadi, dan seterusnya? Mungkin hakim harus menggunakan rumusan Lord Lane CJ dalam Nedrick: apakah terdakwa berpikir bahwa konsekuensinya – kematian atau cedera tubuh yang parah – adalah 'tidak dapat dihindari'? Memang benar Lord Lane CJ, hakim di Nedrick, mengatakan dalam debat House of Lords mengenai Laporan Nathan (Report of the Select Committee of the House of Lords on Murder and Life Imprisonment, 1989) bahwa dia tidak mempertimbangkan kepastian virtual dan probabilitas yang tinggi. seperti menutupi tanah yang sama. Jika tidak, juri dalam beberapa kasus mungkin berpikir bahwa kepastian virtual diperlukan, sementara dalam kasus lain mereka mungkin percaya bahwa hal itu sudah cukup sehingga kemungkinan besar akan tercapai.

Walker dan Hayles bukanlah keputusan yang membantu dalam menjelaskan niat dan (b) hal di atas salah setelah Woollin. Para terdakwa saat ini akan bersalah atas pembunuhan dan bukan pembunuhan. Kasus yang bisa dibandingkan dengan Walker dan Hayles adalah Donnelly [1989] Crim LR 739. Terdakwa dan seorang lainnya melakukan perampokan bersenjata. Yang lainnya memukul kepala penjaga keamanan beberapa kali dengan pistol. Pistolnya meledak, menewaskan penjaga itu. Pengadilan Banding menyatakan bahwa mengatakan bahwa jika dia menggunakan pistol sebagai pentungan, dan tidak berniat melakukan kejahatan serius, juri dapat memutuskan bahwa dia bermaksud untuk menembak. Tidak ada bukti bahwa kemungkinan ledakan senjata merupakan sebuah 'kepastian yang

nyata'. Oleh karena itu, dia tidak bersalah atas pembunuhan tetapi atas pembunuhan yang tidak disengaja. Namun, jika dia menggunakan pistol itu sebagai pentungan dengan maksud untuk melukai tubuh secara parah dan pistol itu meledak secara tidak sengaja, dia akan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan. Penyebabnya tidak relevan. Penuntutan akan membuktikan sebab akibat, kematian, dan satu bentuk kejahatan yang telah dipikirkan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, tidak relevan apakah senjata itu mungkin meledak atau tidak.

Wol [1999] 1 AC 82

Bayi terdakwa mulai tersedak makanan. Terdakwa marah dan melemparkan bayi tersebut ke arah kereta dorong bayinya yang bersandar pada tembok. Kepala bayi membentur dinding atau mungkin lantai. Bayi itu meninggal. Dalam persidangan pembunuhan, terdakwa mendakwa bahwa ia tidak bermaksud menyebabkan kematian atau luka tubuh yang menyedihkan. Jaksa tidak berusaha membuktikan bahwa dia melakukannya. Hakim memutuskan bahwa juri dapat menyimpulkan niatnya jika terdakwa memperkirakan kerugian serius sebagai 'risiko besar' dari tindakannya. Juri memvonis bersalah. Pengadilan Banding menolak banding tersebut, namun House of Lords mengizinkannya karena hukumannya tidak aman.

Pidato utama disampaikan oleh Lord Steyn.

- (a) Referensi hakim terhadap 'risiko besar' adalah salah. Dia telah mengaburkan perbedaan antara niat dan kecerobohan. Terdakwa bersalah atas pembunuhan berencana, bukan pembunuhan.
- (b) Nedrick benar dalam menyatakan bahwa penuntut harus membuktikan kepastian yang nyata sebelum juri dapat memutuskan bahwa terdakwa bermaksud memberikan konsekuensi. Dengan kata lain, referensi terhadap 'probabilitas tinggi' dan tingkat kemungkinan lainnya adalah salah. Meskipun Woollin tidak secara tegas menolak Walker dan Hayles, otoritas tersebut harus diambil agar bisa ditolak.
- (c) Seorang hakim tidak boleh mengarahkan juri untuk melihat ke masa depan apabila terdakwa memang menginginkan suatu hasil. Dalam situasi tersebut, tidak ada definisi niat yang harus diberikan kepada juri, yang menurut Moloney harus menggunakan akal sehatnya untuk menentukan apakah terdakwa memang berniat membunuh atau menyebabkan luka tubuh yang parah atau tidak. Ilustrasi pasca-Woollin adalah Hales [2005] EWCA Crim 1118. Terdakwa mengendarai mobil Volvo-nya ke arah polisi untuk melarikan diri. Dia bermaksud membunuh atau tidak. Tidak ada ruang untuk petunjuk tentang pandangan ke depan. Arahan Nedrick diperlukan hanya ketika terdakwa 'mungkin tidak mempunyai keinginan untuk mencapai hasil tersebut'.
- (d) Lord Lane CJ, bagaimanapun, salah dalam penilaian Nedrick ketika merujuk pada seberapa besar kemungkinan konsekuensinya (yang merupakan masalah *actus reus*) dan apakah terdakwa meramalkan konsekuensi tersebut. Masalah-masalah ini tidak membantu juri.
- (e) Arahan Lord Lane pada Nedrick, yang menurut Lord Steyn merupakan 'bantuan berharga bagi hakim pengadilan', telah diubah. Dia mengatakan: 'juri harus diarahkan

bahwa mereka tidak berhak menyimpulkan niat yang diperlukan kecuali mereka merasa yakin bahwa kematian atau cedera serius adalah suatu kepastian'. House of Lords menyatakan bahwa 'menyimpulkan' harus diganti dengan 'menemukan'. ('Menyimpulkan', seperti yang digunakan dalam Nedrick, juga merupakan bahasa dari Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1967, pasal 8, bahwa 'Seorang... juri... tidak terikat oleh hukum untuk menyimpulkan bahwa [terdakwa] bermaksud... .. akibat dari tindakannya hanya dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan akibat yang wajar dan mungkin terjadi dari tindakan tersebut'.) Seorang teroris yang tidak memperkirakan kematian seorang ahli penjinak bom sebagai akibat yang pasti dari penanaman bom bukanlah bersalah atas pembunuhan, bertentangan dengan pendapat Lord Bridge di Moloney.

- (f) Ada perdebatan mengenai apakah Lord Scarman dalam Hancock dan Shankland bermaksud agar juri dapat menemukan niat ketika bukti mengungkapkan sesuatu yang kurang dari perkiraan kepastian virtual. House of Lords di Woollin menyatakan bahwa karena Lord Scarman telah menyetujui semua yang dikatakan Lord Bridge di Moloney kecuali rujukan pada 'konsekuensi alami', dia telah menyetujui ambang batas minimum tinjauan ke masa depan dari suatu kepastian virtual (atau dengan kata lain, di mana kemungkinannya) terjadinya konsekuensi tidak terlalu berlebihan) untuk menemukan niat.
- (g) Hancock dan Shankland tidak mengesampingkan penyusunan arah model.
- (h) Nedrick konsisten dengan pasal 8 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1967 karena juri harus mempertimbangkan semua bukti.
- (i) Pengadilan Tinggi telah salah dalam membedakan antara kasus-kasus dimana satu-satunya bukti adalah milik terdakwa dan konsekuensinya (di mana Nedrick diperlukan) dan kasus-kasus di mana terdapat bukti lain (dimana instruksi Nedrick tidak dilakukan). diperlukan).
- (j) Lord Steyn mengatakan bahwa definisi niat dapat berbeda-beda di seluruh hukum pidana. Aspek ini dibahas di bawah ini.

Klarifikasi utamanya terletak pada (e), di atas. Lord Steyn berpikir bahwa dia hanya sekedar memperjelas undang-undang tersebut, namun berdasarkan penafsiran paling umum dari Woollin dia mengubahnya. Pandangan ke depan tidak lagi sekadar bukti niat. Juri sekarang dapat menemukan maksud dari perkiraan kepastian virtual. Salah satu interpretasi dari frasa ini adalah bahwa ada lagi dua bentuk niat untuk membunuh dan sebagian besar kejahatan yang disengaja lainnya. Pertama, ada niat langsung, dimana 'niat' berarti 'tujuan', 'tujuan' atau 'keinginan'; kedua, ada maksud yang tidak jelas, yaitu pihak yang dituduh sudah memperkirakan bahwa akibat yang akan terjadi sudah pasti. Pendekatan ini adalah adanya perubahan hukum substantif. Keadaan pikiran yang kedua ini bukan merupakan suatu cara untuk menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai niat, tetapi ada suatu bentuk niat tersendiri. Hukumnya akan jelas dan tidak akan ada masalah dalam menyimpulkan suatu keadaan pikiran dari keadaan pikiran yang lain. Penafsiran ini berasal dari penggantian kata 'find' dengan 'infer' di (e), persetujuan pidato Lord Bridge di Moloney bahwa jika seseorang meramalkan

kemungkinan suatu konsekuensi tidak terlalu besar, maka hal ini 'cukup untuk menetapkan niat yang diperlukan', dan pernyataan Lord Steyn bahwa efek Nedrick adalah bahwa 'suatu hasil yang diperkirakan pasti adalah hasil yang diharapkan'. Pandangan alternatifnya adalah bahwa keadaan pikiran yang kedua masih hanya merupakan bukti dari kerangka berpikir yang pertama. Pandangan ke masa depan mengenai suatu kepastian bukanlah definisi dari niat, hanya bukti yang dapat digunakan oleh juri, namun tidak perlu, untuk menemukan niat. Penafsiran ini didukung oleh persetujuan dari sisa kalimat Lord Lane, yang dikutip di atas, bahwa kesimpulan dari niat 'mungkin tidak dapat ditolak'.

Tidak ada apa pun di sini tentang 'harus menjadi sangat menarik', bahkan jika seseorang mengganti 'penemuan' dengan 'kesimpulan'. Oleh karena itu, juri dapat berpandangan bahwa suatu akibat yang sudah diperkirakan pasti oleh terdakwa tidak dimaksudkan olehnya meskipun dalam banyak kasus mungkin memang demikian. Seandainya Lord Steyn ingin mengubah undang-undang tersebut, dia akan mengatakan bahwa juri harus menemukan niat, bukan bahwa mereka berhak menemukan niat. Masalahnya adalah Lord Steyn dan para Penguasa Hukum lainnya tampaknya tidak memahami bahwa ada perbedaan antara tinjauan ke masa depan sebagai niat dan tinjauan ke masa depan sebagai bukti niat. Pihak berwenang seperti Moloney, Hancock, dan Shankland juga dianggap tidak konsisten dengan Woollin.

Satu atau dua tahun setelah Woollin, disarankan agar Woollin mengambil pendekatan yang pertama: terdakwa mempunyai niat jika ia memperkirakan suatu akibat sebagai konsekuensi yang pasti. Hal ini akan membawa undang-undang tersebut sejalan dengan usulan Komisi Hukum dalam pasal 18(b) Rancangan KUHP tahun 1989, yang dikutip di bawah ini. Hasil ini tentunya akan memperjelas hukum, seperti yang diinginkan Lord Steyn. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang diambil dalam keputusan Pengadilan Banding pertama setelah Woollin: *Re A (Anak-Anak) (Kembar Siam: Perawatan Medis)* [2001] Fam 147 (CA), kasus perdata. Para ahli bedah yang memisahkan bayi kembar siam bermaksud membunuh ketika mereka meramalkan kematian salah satu bayi kembar siam sebagai akibat yang pasti. Tidak ada diskusi apakah berdasarkan fakta juri akan 'berhak menemukan' maksudnya. Ward LJ berkata: 'Ujiannya adalah apakah para dokter menyadari bahwa kematian atau cedera serius hampir pasti terjadi (kecuali ada intervensi yang tidak terduga) akibat pelaksanaan operasi ini. Jika demikian, dokter bermaksud membunuh atau melakukan tindakan yang membahayakan' Brooke LJ menyatakan hal serupa dan karena itu mayoritas mendukung penyamaan kedua pola pikir tersebut. Namun Robert Walker LJ mengatakan, meski kematian salah satu kembarannya sudah pasti, para dokter tidak berniat membunuh karena itu bukan tujuan mereka. Namun, terdapat otoritas yang bertentangan baru-baru ini dalam bentuk *Matthews* [2003] 2 Cr App R 461 (CA), yang mana *Re A* tidak disebutkan: pandangan ke depan mengenai kepastian virtual tetap menjadi bukti adanya kesengajaan dan, pada hakekatnya, bukan merupakan kesengajaan. Para terdakwa melemparkan korban ke sungai meskipun korban mengatakan bahwa korban tidak bisa berenang. Dia tenggelam. Mereka tidak menginginkan kematiannya; mereka tidak memutuskan untuk membunuhnya. Mereka dihukum pada tingkat pertama. Meskipun hakim di persidangan telah menyamakan

perkiraan kepastian virtual dengan niat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa juri akan yakin bahwa para terdakwa mengetahui kepastian virtual mengenai fakta bahwa korban akan meninggal dan bahwa juri akan mengetahui kepastian virtual tersebut. menemukan bahwa para terdakwa bermaksud membunuh. Namun, arahan model yang diberikan dalam Nedrick dan diubah dalam Woollin ('menyimpulkan' menjadi 'menemukan') bukanlah aturan hukum substantif melainkan salah satu bukti. Seperti yang ditunjukkan oleh pengadilan mengenai fakta-fakta dalam kasus-kasus tertentu seperti Matthews, batas antara aturan hukum substantif dan bukti tidaklah lebar: sangat mudah, mungkin tidak dapat ditolak, bagi juri untuk menemukan niat ketika terdakwa melemparkan korban yang mereka tahu tidak bisa berenang, terjun ke sungai.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, hampir mustahil bagi juri untuk tidak menyimpulkan bahwa terdakwa telah meramalkan kematian korban sebagai sesuatu yang pasti. Akan lebih sulit bagi juri untuk menemukan niat ketika terdakwa bertindak untuk tujuan yang baik.

House of Lords di Moloney dan Hancock dan Shankland membatalkan gagasan bahwa menurut hukum, niat miring sudah cukup untuk kejahatan yang telah dipikirkan sebelumnya. Juri dapat, namun tidak perlu, menyimpulkan maksud dari semua fakta, termasuk apa yang diramalkan oleh terdakwa. Seperti yang telah kita lihat, Woollin mungkin telah menghidupkan kembali gagasan bahwa pandangan ke depan tentang suatu kepastian virtual adalah suatu niat, dan bukan sekedar bukti dari niat. Namun menurut Moloney, juri dapat menyimpulkan maksud dari kepastian yang sebenarnya, namun persyaratan ini telah dilemahkan dalam kasus-kasus selanjutnya. Kritik utamanya adalah bahwa tanpa adanya more, mustahil untuk menyimpulkan satu konsep hukum dari yang lain jika kedua konsep tersebut berbeda. Jika tinjauan ke masa depan bukanlah suatu kesengajaan, maka pembuktian kejelian bahkan mengenai kepastian yang sebenarnya tidak membuktikan adanya kesengajaan. Tambahan yang harus dibuktikan oleh penuntut masih belum ditentukan. Namun, hanya dalam kasus-kasus luar biasa saja hakim perlu mengarahkan juri sehubungan dengan tinjauan ke masa depan, karena biasanya tidak ada keraguan bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membunuh atau melakukan penganiayaan fisik yang parah. Jika terdakwa menusukkan pisau ke perut korban, pertanyaannya adalah: apakah ia mempunyai niat yang diperlukan? Entah dia melakukannya atau tidak. Masalahnya adalah satu fakta. Hanya jika tujuan terdakwa bukan untuk membunuh atau menyebabkan luka fisik yang parah, maka arahan Woollin diperlukan. Namun hakim bahkan tidak bisa mengatakan kepada juri bahwa jika tujuan terdakwa memang demikian, maka ia memang menginginkan konsekuensi tersebut. Dalam kasus-kasus luar biasa, para juri harus diinstruksikan bahwa tinjauan ke masa depan bukanlah sesuatu yang disengaja, namun mereka diberitahu bahwa pola pikir kedua mungkin merupakan pola pikir yang pertama ketika mereka yakin bahwa terdakwa telah meramalkan akibat yang akan terjadi sebagai hasil yang pasti.

Harus diingat bahwa jika terdakwa memang berniat membunuh atau melakukan GBH, maka itulah akhir dari pertanyaannya: Woollin tidak relevan. Hakim pengadilan dalam kasus-kasus seperti itu harus menjauhkan juri dari 'konsep bunglon'. . . pandangan ke depan akan konsekuensi dan kesadaran akan risiko' (Wright [2000] EWCA Crim 28).

Karena niat merupakan pertanyaan bagi juri, bukti medis tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah orang biasa menginginkan suatu hasil. Namun, kata Pengadilan Banding dalam Toner (1991) 93 Cr App R 382, dapat disimpulkan untuk menemukan pengaruh episode hipoglikemik ringan terhadap niat karena keadaan pikiran seperti itu berada di luar pengalaman juri biasa

Kita dapat merangkul hukum tersebut dengan mengatakan, seperti yang dilakukan Matthews, bahwa para juri 'tidak berhak menemukan maksud yang diperlukan kecuali mereka [merasa] yakin bahwa kematian atau cedera tubuh yang serius adalah suatu kepastian yang nyata sebagai akibat dari tindakan [terdakwa] dan bahwa [dia] menghargai bahwa hal ini terjadi'. Meski begitu, para juri dapat menolak bukti tersebut dan menyatakan bahwa dia tidak bermaksud melakukan konsekuensinya.

3.3 KRITIK

Moloney dan keturunannya tidak mencerminkan hukum Inggris. Lord Bingham CJ dalam 'Lord Chief Justice menyerukan hukum pidana' (1998) 148 NLJ 1134 menyatakan: 'bahkan pengagum common law yang paling terengah-engah pun harus menganggapnya sebagai celaan bahwa setelah tujuh ratus tahun pengambilan keputusan peradilan pengadilan tertinggi kita seharusnya diminta berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir untuk mempertimbangkan unsur mental dalam pembunuhan, kejahatan tertua dan paling serius.' Mengapa pengadilan tidak dapat mendefinisikan konsep inti dalam kasus yang sangat serius ini? Juri dapat membebaskan atau memvonis bersalah atas fakta yang sama. Karena tidak ada definisi pasti, terdakwa yang tidak berjasa bisa memenangkan banding atas arahan hakim padahal mereka mungkin tidak bisa mengajukan banding jika hukumnya jelas.

Kritik C. M. V. Clarkson terhadap Moloney dkk. tetap tepat:

Konsep seperti 'ketidakjujuran' melibatkan penilaian nilai. . . dan juri, sebagai corong nilai-nilai masyarakat, mungkin merupakan lembaga yang paling tepat untuk menyampaikan penilaian tersebut. Namun hal yang sama tidak berlaku dalam hal niat. . . Demi kepastian dan kepastian hukumlah yang menentukan apa maksudnya. . . House of Lords, dengan membiarkan niatnya tidak ditentukan, berusaha untuk mempertahankan fleksibilitas maksimum sehingga juri tidak perlu mengambil keputusan yang salah untuk menghukum mereka yang dirasa pantas dihukum. Banyak . . . pelaku bom teroris yang belum tentu bermaksud membunuh bisa lepas dari tanggung jawab atas pembunuhan jika definisi niat yang jelas dan sempit ditetapkan. Ini adalah posisi yang tidak dapat ditoleransi dan mengundang prasangka, diskriminasi, dan pelecehan. Hal ini melibatkan pengabaian semua standar dalam bidang hukum yang mana standar tersebut sangat penting untuk ditetapkan dengan jelas. (Pemahaman Hukum Pidana (Fontana, 1987) 62)

Kata-kata yang sedikit berbeda muncul di edisi keempat (2005), Thomson, 61–3. Tidak ada yang dapat menghentikan juri untuk mengambil tindakan sendiri dan memvonis bersalah terdakwa atas pembunuhan meskipun mereka tidak dengan sengaja berupaya membunuh atau menyebabkan luka fisik yang parah.

Kritik berikutnya sudah sering dilontarkan. Jika seseorang berhadapan dengan maksud miring, menurut definisinya tidak ada maksud langsung. Oleh karena itu, 'maksud', 'tujuan', 'keputusan' dan sejenisnya bukanlah maksud yang serong. Terlebih lagi, sebagai aturan umum, motif atau keinginan tidak relevan dengan rasa bersalah; oleh karena itu, hal-hal tersebut juga tidak dapat merupakan suatu maksud yang tidak jelas. Karena tujuan, maksud, keputusan, motif dan keinginan dikesampingkan, bahan apa yang digunakan juri untuk menentukan apakah apa yang diramalkan oleh terdakwa sebagai konsekuensi tertentu yang mengubah keadaan pikiran menjadi niat? Dengan kata lain, satu keadaan pikiran, niat, tidak dapat disimpulkan dari keadaan pikiran lain, pandangan ke depan tentang suatu kepastian virtual.

Bagaimana jika terdakwa mengetahui bahwa suatu akibat sudah pasti akan terjadi namun ia bermaksud sebaliknya? Misalnya, asumsikan saya adalah seorang pemula dalam memanah dan saya sering kali memperkirakan akan meleset dari sasaran; namun demikian, saya memang berniat untuk mencapai target tersebut, meskipun saya tahu bahwa saya pasti akan meleset. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk memukul tetapi pada saat yang sama saya tahu bahwa hampir pasti saya akan meleset. Namun setelah Woollin, pengadilan dapat mengatakan bahwa saya bermaksud untuk mencapai (keinginan atau tujuan) dan pada saat yang sama saya bermaksud untuk meleset (pandangan ke depan saya tentang suatu kepastian virtual). Hasilnya tidak masuk akal!

Kritik juga bisa ditujukan pada lebarnya maksud yang miring. Hal ini dikemukakan dengan sangat baik oleh S. Uniacke 'Apakah kematian Mary adalah pembunuhan?' (2001) 9 Medical LR 208, 217: 'menganggap semua pembunuhan yang diramalkan oleh aktor sebagai suatu kepastian virtual karena pembunuhan yang direncanakan tampaknya mencakup terlalu banyak hal. Misalnya, jika rem mobil saya rusak, saya mungkin dengan sengaja membelok ke jalan setapak, dengan firasat bahwa saya akan membunuh satu orang yang tidak dapat menghindar tepat waktu, daripada mengambil jalan lurus dan menabrak sekelompok sekolah-anak-anak di penyeberangan pejalan kaki.'

Kritik lainnya adalah bahwa dalam undang-undang saat ini, terdakwa bisa saja bersalah jika ia melihat konsekuensinya sebagai sesuatu yang pasti. Selain itu, ada pernyataan bahwa akibat yang sebenarnya harus ada akibat yang pasti sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Tes objektif ini tidak konsisten dengan sifat subjektif dari niat. Jika teroris memasang bom, mengetahui bahwa sudah pasti ada orang yang akan terbunuh, mengapa hal ini mempengaruhi tanggung jawab bahwa penghalang anti bom telah dipasang pada hari itu antara bom dan korban yang dituju? Keadaan pikirannya tidak berubah. Yang berubah hanyalah sesuatu di luar dirinya.

Seperti yang ditulis oleh J. Stannard dalam Perkembangan Terkini dalam Hukum Pidana (SLS, 1988) 38, kebencian yang telah dipikirkan sebelumnya merupakan hal yang membingungkan karena pengadilan menggeser batas-batas untuk menangkap orang-orang yang mereka ingin dihukum karena pembunuhan, sementara mengecualikan orang lain. Ada ketegangan dalam hukum. Beberapa orang ingin agar hukum bersifat fleksibel, seperti yang dikatakan Jeremy Horder ('Intention incriminal law: a rejoinder' (1995) 58 MLR 678) 'ruang

sikut moral' di mana juri dapat bekerja. Pendekatan sebaliknya adalah karena pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat serius, maka pembunuhan tersebut harus didefinisikan secara tepat: dengan kata lain, apakah seseorang dihukum karena pembunuhan tidak harus bergantung pada kesukaan dan ketidaksukaan juri. Yang dilakukan juri adalah mempertimbangkan moral terdakwa; Namun, menurut Woollin, hal tersebut harus mempertimbangkan tingkat kewaskitaan tertentu yang dimiliki terdakwa ketika dia bertindak. Masalah utamanya melibatkan teroris. Lord Bridge di Moloney, seperti telah kita lihat, memberikan ilustrasi seorang pelaku bom yang memberikan peringatan. Apakah dia bersalah karena membunuh ahli penjinak bom yang dia harapkan akan dipanggil? Lord Bridge tampaknya berpikir demikian, seperti yang dilakukan Lord Hope di Woollin, tetapi dalam definisinya, pelaku bom tidak memiliki niat jahat sebelumnya. Tidak ada keinginan atau tujuan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius, maupun perkiraan kematian atau bahaya serius yang dapat dipastikan. Posisinya tetap sama setelah Woollin: kematian atau cedera tubuh yang parah tidak dianggap sebagai konsekuensi yang pasti. Pengadilan ingin menyatakan teroris bersalah atas pembunuhan, namun mengecualikan orang-orang seperti Moloney dari tuduhan tersebut. Namun, teroris dapat dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sehingga mempertahankan konsep niat yang 'murni'. Terlebih lagi, jika konsep niat diperluas dan dikontrak untuk mencapai hasil yang diinginkan, mengapa Ny. Hyam dinyatakan bersalah atas pembunuhan? Mungkin seperti yang disarankan oleh C. Fennell 'Niat dalam pembunuhan: kekacauan, kebingungan dan kompleksitas' (1990) 41 NILQ 325 di 337–338 harus ada pelanggaran pembunuhan tingkat dua jika terdakwa menyadari risiko kematian atau berniat untuk melakukannya. menimbulkan rasa takut. Proposal ini akan menangkap teroris yang mengambil risiko terbunuh atau terluka parah.

Sangat disayangkan bahwa definisi modern tentang niat sebagian besar ditetapkan dalam kasus pembunuhan. Hasilnya mungkin 'ditarik' oleh fakta, namun hukum dalam kasus ini berlaku di seluruh hukum pidana. Jika kita melihat contoh Lord Bridge di Moloney tentang seorang teroris yang menanam bom dan memberikan peringatan, ia meramalkan bahwa seseorang mungkin berusaha menjinakkannya tetapi ia tidak melihat kematian atau bahaya serius sebagai hal yang pasti. Ahli penjinak bom tidak menjadi ahli penjinak bom dengan terbunuh atau terluka! Namun Lord Bridge akan menghukum teroris atas pembunuhan jika ahlinya meninggal. Kesulitannya terletak pada menyelaraskan makna inti pembunuhan sebagai pembunuhan yang disengaja dan kebutuhan untuk memuaskan opini publik bahwa mereka yang mengambil risiko dan membunuh (seperti teroris) bersalah atas pembunuhan. Keinginan untuk menghukum teroris atas pembunuhan 'menarik' hukum ke satu arah; keinginan untuk tidak menghukum dokter atas pembunuhan menyebabkan hal ini terjadi secara berbeda. Di Moor, yang disebutkan di atas, hakim pengadilan dalam kasus seorang dokter yang meresepkan obat-obatan penghilang rasa sakit kepada seorang pasien yang ia yakini sakit parah mengarahkan juri dengan maksud langsung namun tidak menyebutkan perkiraan mengenai konsekuensi tertentu, maksud tidak langsung. . Namun jika dia

melakukan hal tersebut, juri seharusnya dapat menyimpulkan bahwa dokter tersebut mengetahui bahwa percepatan kematian sudah pasti terjadi.

Mengutip Lord Mustill dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994) [1998] AC 245: Pembunuhan secara luas dianggap sebagai kejahatan paling parah. Kita dapat mengharapkan suatu sistem yang dikembangkan untuk mewujudkan hukum pembunuhan yang cukup jelas sehingga menghasilkan hasil yang tegas berdasarkan serangkaian fakta tertentu, hasil yang sesuai dengan keadilan dan memiliki dasar intelektual yang kuat. Hal ini tidak terjadi di Inggris dimana hukum pembunuhan dipenuhi oleh anomali, fiksi, penalaran yang keliru dan usang.

Ini adalah masalah nyata bagi hakim dan juri. Hakim harus menggunakan kata-kata bahasa Inggris biasa agar juri memahami instruksinya, namun 'niat' tetap tidak dapat didefinisikan dengan jelas oleh pengadilan.

Apakah definisi 'niat' dalam pembunuhan berlaku di seluruh hukum pidana?

House of Lords di *Moloney* dan *Hancock* dan *Shankland* tidak membatasi pernyataannya pada pembunuhan. Definisinya telah diterapkan secara umum. Dalam *AMK (Property Management) Ltd* [1985] Crim LR 600, Pengadilan Banding menerapkan undang-undang ini pada pelanggaran berdasarkan pasal 1(3) Undang-Undang Perlindungan dari Penggusuran tahun 1977: melakukan tindakan yang dianggap mengganggu kedamaian atau kenyamanan a penghuni tempat tinggal dengan maksud untuk menyebabkan dia berhenti bekerja. (Lihat, namun, di bawah.) Dalam *Bryson* [1985] Crim LR 669, pengadilan yang sama menerapkan hukum untuk melukai dengan maksud untuk melukai tubuh secara menyedihkan, bertentangan dengan *Offenses Against the Person Act 1861*, s 18, ketika terdakwa mengemudi dan menjatuhkan empat pria yang sedang merayakan pernikahan salah satu kelompok mereka. Seperti yang telah kita lihat, *Walker* dan *Hayles*, di atas, terlibat dalam percobaan pembunuhan, dimana satu-satunya *mens rea* adalah niat untuk membunuh. Pengadilan Banding Irlandia Utara menyatakan dalam *Murphy* [1993] NI 57 bahwa 'akal sehat, kenyataan dan pengalaman' menghasilkan kesimpulan bahwa ketika IRA meluncurkan roket dan menembakkan senapan ke kantor polisi, mereka memang bermaksud membunuh. Tidak ada peringatan yang diberikan, dan senjata yang digunakan bukanlah senjata untuk menghancurkan bangunan. Agaknya definisi tersebut berlaku juga apabila istilah 'kesengajaan' tidak berdiri sendiri dalam pengertian delik, melainkan kejahatan dinyatakan dalam istilah 'sengaja atau ceroboh' misalnya pidana kerugian. Namun dalam situasi ini, definisi kesengajaan kurang penting dibandingkan dengan tiga kejahatan yang baru saja disebutkan di mana terdakwa tidak bersalah jika ia bertindak ceroboh. Di *Woollin*, House of Lords membatasi pernyataannya pada pembunuhan. Jika *Woollin* tidak berlaku, masalahnya adalah menemukan tes mana yang berlaku. Mungkin dalam kaitannya dengan kejahatan percobaan, niat langsung saja sudah cukup, sehubungan dengan konsekuensinya. Artinya, tujuan terdakwa haruslah menimbulkan akibat terlarang; tidaklah cukup bahwa ia memperkirakan hal itu sebagai konsekuensi yang pasti.

Di *Moloney* the Lords menyetujui *Steane* [1947] KB 997, di mana Pengadilan Kriminal

Bandung menetapkan definisi niat yang lebih sempit. Akibatnya, tidak ada satu definisi pun yang berlaku dalam hukum pidana. Terdakwa dihukum karena melakukan tindakan yang

mungkin membantu musuh ketika dia melakukan siaran untuk Nazi demi menyelamatkan keluarganya dari kamp konsentrasi. Pengadilan Banding Pidana membatalkan hukuman tersebut. Dinyatakan bahwa niatnya adalah untuk menyelamatkan keluarganya, niat tersebut bukan bagian dari *mens rea* kejahatan; oleh karena itu, dia tidak bermaksud membantu musuh. Namun, niatnya bukan sekadar untuk menyelamatkan keluarganya; dia juga bermaksud membantu musuh dengan menyiarkannya untuk mereka. Terdakwa tidak ingin membantu Nazi, namun hukum yang berlaku saat ini menyatakan bahwa keinginan atau motif terdakwa tidak relevan dengan 'niat'. Seseorang dapat menginginkan sesuatu tanpa menginginkannya: Mohan, di atas, dan Nedrick, bagian yang relevan dikutip di atas. Motif baik terdakwa, yaitu melindungi keluarganya, tidak relevan. Demikian pula, motif buruk, katakanlah, keinginan untuk menyingkirkan seorang istri demi kepentingan orang yang lebih muda, tidaklah penting. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 'keinginan', lihat bagian motif di Bab 3. Berdasarkan pendekatan Moloney, tentu saja dia meramalkan bahwa (setidaknya) hampir pasti bahwa dia akan membantu musuh, dan juri dapat menyimpulkan bahwa dia memang berniat untuk membantu musuh. bantuan. Terlebih lagi, Lord Bridge di Moloney mengatakan bahwa terdakwa bermaksud pergi ke Manchester jika satu-satunya cara dia bisa lolos dari polisi adalah dengan pergi ke sana, 'meskipun Manchester adalah tempat terakhir yang dia inginkan'. Bukankah terdakwa di Steane berniat melakukan siaran untuk Nazi meskipun itu adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan? Steane tampak seperti kasus penyempitan hukum untuk membebaskan terdakwa. Pengadilan ingin memastikan bahwa hukuman terdakwa tidak dapat ditegakkan, dan dengan demikian pengadilan memanipulasi maksud dari niat tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena tidak ada satu definisi kesengajaan yang dapat diterima untuk semua pelanggaran. Steane mengacaukan area yang sudah membingungkan dan harus dikesampingkan. Steane juga tidak konsisten dengan kasus-kasus modern mengenai paksaan yang berpendapat bahwa pertahanan tidak berfungsi untuk meniadakan niat. Terdakwa memang berniat, tapi dia punya pembelaan.

Baru-baru ini dalam kasus perdata *Airedale NHS Trust v Bland* [1993] AC 789 (HL)

Lord Goff mengatakan bahwa sudah menjadi 'aturan yang ditetapkan' bahwa seorang dokter dapat meresepkan obat penghilang rasa sakit karena mengetahui bahwa obat tersebut akan memperpendek umur, namun tidak bersalah atas pembunuhan. Re A, di atas, adalah kasus kembar siam, serupa: para ahli bedah mengetahui bahwa jika dipisahkan, salah satu dari si kembar akan meninggal, namun Pengadilan Tinggi kesulitan untuk menemukan aturan atau peraturan yang akan mengecualikan dokter jika mereka diadili. . Moor, yang dikutip di atas, adalah kasus pidana yang mempercepat kematian seorang dokter tetapi dinyatakan tidak bersalah. Hakim pengadilan Hooper J mengatakan: 'seseorang bermaksud membunuh orang lain jika dia melakukan suatu tindakan untuk tujuan membunuh orang itu. Jika [terdakwa] berpikir bahwa kemungkinan besar kematian akan menyusul, maka penuntut tidak akan dapat membuktikan bahwa ia bermaksud membunuh. Hal ini terlihat seperti hakim yang mengatakan bahwa pengobatan yang tepat, termasuk memberikan obat pereda nyeri yang justru memperpendek umur, bukanlah suatu niat untuk membunuh. Jika demikian, pembelaan ini memerlukan diskusi publik.

Jenis niat di Steane, terkadang disebut 'niat langsung', mungkin berlaku di tempat lain. Dalam kasus Ahlers [1915] 1 KB 616 (CCA) yang terkenal, pengadilan memutuskan bahwa seorang konsul Jerman tidak bersalah atas pengkhianatan ketika dia membantu sesama warga negara untuk kembali ke tanah air mereka. Ia tidak bermaksud membantu musuh-musuh Inggris, hanya sekedar menjalankan tugas konsulernya. Menerapkan hukum modern, seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah. Alternatifnya, definisi niat yang berbeda, yaitu 'tujuan', berlaku untuk pelanggaran ini. Beberapa undang-undang tampaknya memerlukan tujuan tertentu. Dalam perampokan, salah satu bentuk kejahatannya adalah masuk tanpa izin dengan maksud untuk melakukan salah satu dari daftar pelanggaran. Pastilah maksud dalam konteks ini berarti 'tujuan'. Dalam pemerasan, terdakwa harus bertindak dengan 'niat' untuk memperoleh atau menimbulkan kerugian. 'Niat' berarti niat langsung. Demikian pula dalam Undang-Undang Perlindungan dari Penggusuran tahun 1977, yang disebutkan di atas, 'niat' berarti 'tujuan' dan terdakwa tidak bertanggung jawab jika ia tidak bertindak dengan tujuan untuk mengeluarkan penyewa, bahkan jika ia memperkirakannya sudah pasti bahwa akibat itu akan terjadi. Dalam kejahatan yang menggunakan atau mengancam dengan kekerasan untuk tujuan mengamankan akses ke suatu tempat, niat langsung saja sudah cukup. Dalam kasus seperti ini, niat miring saja tidak cukup. Intinya adalah bahwa Steane bukanlah keputusan yang berdiri sendiri dan Moloney dkk. tidak berlaku untuk semua kejahatan 'yang disengaja'. Ada perdebatan di kalangan akademisi mengenai apakah dan jika demikian, kejahatan mana yang dipuaskan hanya jika terdakwa bertindak dengan niat langsung.

Proposal untuk mendefinisikan niat

Laporan Komite Pemilihan House of Lords tentang Pembunuhan dan Penjara Seumur Hidup (HL Paper 78 –1, 1989) dan Laporan Komisi Hukum, KUHP untuk Inggris dan Wales (Law Com. No. 177, 1989) keduanya merekomendasikan tinjauan ke masa depan kepastian virtual harus sama dengan niat. Diberlakukannya rekomendasi ini berarti bahwa tinjauan ke masa depan akan kembali menjadi bagian dari hukum substantif, bukan sekedar bagian dari pembuktian. Komisi Hukum menyatakan bahwa 'niat' harus didefinisikan demi kejelasan dan konsistensi. Panitia Pemilihan juga ingin menghapuskan niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya, yaitu niat untuk menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan, dan menggantinya dengan niat untuk menyebabkan cedera pribadi yang serius, dengan menyadari bahwa kematian dapat terjadi. Oleh karena itu, Panitia Pemilihan menyetujui pasal 54(1) rancangan KUHP, yang menyatakan:

[seseorang] bersalah melakukan pembunuhan jika dia menyebabkan kematian orang lain:

- (a) bermaksud menyebabkan kematian; atau
- (b) bermaksud untuk menimbulkan kerugian pribadi yang serius dan menyadari bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kematian.

Definisi tersebut disetujui oleh Lord Steyn di Powell; English [1998] AC 147. Dalam pandangannya, 'definisi unsur mental dalam pembunuhan yang ada sekarang mengakibatkan terdakwa diklasifikasikan sebagai pembunuh padahal sebenarnya bukan pembunuh'. 'Menyadari' berarti pengetahuan subjektif. Tidaklah cukup jika orang yang berakal sehat

mengetahui hal tersebut tetapi terdakwa tidak mengetahuinya. Mungkin tesnya akan sulit untuk diterapkan. Lebih jauh lagi, tampaknya hanya ada sedikit, jika ada, perbedaan moral antara niat untuk menimbulkan kerugian serius karena menyadari bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kematian dan sekadar menyadari bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Kedua pola pikir tersebut adalah pola pikir yang mengambil risiko, kecerobohan. Niat didefinisikan oleh paragraf 18(b) mencakup niat langsung dan niat miring:

Seseorang bertindak 'dengan sengaja' sehubungan dengan akibat ketika ia bertindak untuk mewujudkannya atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam peristiwa biasa. Oleh karena itu, niat harus didefinisikan sebagai melampaui niat langsung, sesuatu yang tidak dilakukan dalam bahasa biasa. Terdakwa di Steane akan bersalah. Komisi Hukum menilai perubahan ini dituntut keadilan. Hal ini akan mengecualikan pandangan ke depan mengenai sesuatu yang kurang dari kepastian virtual. Definisi ini mendapat persetujuan Lord Lane CJ dalam perdebatan Laporan Komite Seleksi. Klausul 18(b) tidak mencakup teroris yang memasang bom dengan tujuan merusak harta benda dan menimbulkan ketakutan namun tidak membunuh atau melukai. Profesor Smith mengkritik lebarnya formulasi tersebut. Dia ingin hal itu menutupi teroris yang mengetahui bahwa setengah dari bomnya tidak akan meledak. 'Dalam kejadian-kejadian biasa' dia tidak yakin bahwa korbannya akan meninggal. Ia mengusulkan untuk menyusun ulang (ii) dengan memasukkan situasi di mana 'tujuannya adalah untuk menimbulkan akibat lain dan ia mengetahui bahwa, jika ia berhasil, tindakannya, dalam keadaan biasa, akan menyebabkan akibat tersebut' ([1990] Crim LR 85). Komisi Hukum menerima revisi ini dalam Peraturan Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, Law Com. Nomor 218 Tahun 1993. Ayat 1(a) RUU KUHP yang dilampirkan dalam Laporan menyatakan: Seseorang bertindak 'dengan sengaja' sehubungan dengan suatu hasil ketika;

- (i) tujuannya menyebabkan hal itu, atau
- (ii) walaupun ia tidak mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut, ia mengetahui bahwa hal tersebut akan terjadi dalam kejadian biasa jika ia berhasil dalam tujuannya untuk menimbulkan akibat lain.

Penggantian kata 'untuk' dengan 'tujuan' dianggap membantu kejelasan; 'tahu' diganti 'sadar' karena Komisi Hukum berpendapat bahwa kesadaran mengandung makna penghayatan yang kurang jelas dibandingkan pengetahuan; dan pengetahuan dikaitkan dengan tujuan, berbeda dengan RUU KUHP yang bertujuan untuk menjelek-jelekkan masyarakat yang niatnya bisa menutupi kecerobohan. Komisi Hukum menolak perluasan niat untuk meningkatkan kesadaran akan tingkat probabilitas apa pun yang kurang dari kepastian virtual. Pemikiran seperti itu merupakan suatu kecerobohan. Oleh karena itu, kata yang digunakan adalah 'akan'. Terdakwa harus mengetahui bahwa suatu peristiwa pasti akan terjadi kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa. Batasan antara konsep kesengajaan dan kecerobohan akan digambarkan dengan jelas. Seandainya drafnya adalah 'dia tahu hal itu mungkin terjadi', maka pola pikir tersebut adalah kecerobohan.

Komisi Hukum menerbitkan Lapornya no. 306 Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi pada bulan November 2006. Hal ini didasarkan pada Makalah Konsultasi

bulan Desember 2005, A New Homicide Act for England and Wales? Komisi berpandangan bahwa unsur mental dalam pembunuhan tingkat pertama haruslah niat untuk membunuh dan niat untuk menimbulkan luka berat, dengan menyadari bahwa perbuatan seseorang mengandung risiko serius yang dapat menyebabkan kematian. Pembunuhan tingkat dua juga terdiri dari keadaan pikiran yang didefinisikan dalam bentuk niat: niat untuk menyebabkan cedera serius, dan niat untuk menyebabkan cedera, takut akan cedera atau risiko cedera, menyadari bahwa tindakan seseorang mengandung risiko kematian yang serius. Oleh karena itu, niat akan tetap menjadi *mens rea* pembunuhan tetapi akan ada gradasi dalam pembunuhan tergantung pada keadaan pikiran terdakwa.

Komisi kemudian dihadapkan pada pendefinisian 'niat'. Mereka telah mendalilkan dua definisi dalam Makalah Konsultasi namun setelah memutuskan bahwa hukum yang ada saat ini tidak bisa diserahkan kepada hukum adat, mereka memutuskan untuk mengkodifikasikan hukum yang ada saat ini (walaupun tidak ada argumen pendukung yang diberikan dalam Laporan mengenai mengapa hukum umum harus dikodifikasikan. dikodifikasikan) dan diputuskan untuk tidak memberikan makna yang lebih luas, yang telah menjadi salah satu opsi yang dibahas dalam Makalah ini. Definisi yang direvisi diatur dalam paragraf. 3.27:

- (1) Seseorang hendaknya tertarik pada suatu akibat jika ia bertindak untuk mewujudkannya.
- (2) Dalam hal hakim berpendapat bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan kecuali jika diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai niat, juri harus diarahkan sebagai berikut: niat untuk menghasilkan suatu hasil dapat ditemukan jika terbukti bahwa terdakwa berpendapat bahwa akibat yang ditimbulkannya merupakan akibat pasti dari perbuatannya.

Oleh karena itu, definisi ini mencakup terdakwa dalam situasi ini (paragraf 3.13):

D sedang dalam proses mencuri mobil V. V melompat ke kap mobil untuk mencegah D agar tidak pergi. D berakselerasi hingga 100 mil per jam dan V jatuh dari mobil. Kejatuhan membunuh V. D mengklaim dia tidak bermaksud membunuh V atau menyebabkan V cedera serius tetapi hanya bertekad untuk melarikan diri, apa pun yang terjadi.

Common law menyerahkan masalah ini kepada juri, dan jika diberlakukan, rekomendasi dalam Laporan akan melakukan hal yang sama. Perlu juga diingat bahwa seperti halnya dengan undang-undang saat ini, jarang sekali ada instruksi yang 'hampir pasti': biasanya, hanya arahan pertama ('untuk mewujudkannya') yang diperlukan, yang lagi-lagi merupakan arahan pertama ('untuk mewujudkannya'). sama dengan hukum yang berlaku saat ini. Secara kebetulan, Komisi Hukum berpendapat bahwa juri akan menemukan maksud dari contoh yang diberikan (lihat paragraf 3.14) namun tetap saja masalahnya adalah juri. Komisi juga mengklarifikasi bahwa seseorang berpendapat bahwa suatu konsekuensi pasti akan terjadi 'selama ia berpikir bahwa sudah pasti apakah ia melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Misalnya, jika seseorang memasang bom di pesawat dengan maksud untuk meledakkannya saat pesawat berada di udara, mengingat bahwa mereka bermaksud meledakkannya, mereka dapat dianggap meramalkan kematian penumpangnya jika mereka menyadari bahwa bom tersebut adalah bom yang dibuat oleh pesawat tersebut. bom tidak

dapat diandalkan dan mungkin gagal meledak sesuai rencana.' (catatan kaki 9 di hal. 56) Komisi mengakui bahwa pendekatan yang mereka usulkan menyerahkan kebijaksanaan pada juri tetapi mengatakan (pada paragraf 3.21): '. . . Kadang-kadang juri perlu dan diharapkan memiliki unsur diskresi jika alternatifnya adalah seperangkat aturan hukum yang lebih kompleks yang harus mereka terapkan. Ini adalah harga untuk menghindari kerumitan.'

Ada seruan untuk definisi lain dari para akademisi. Misalnya, dalam *Hukum Pidana: Teks dan Materi*, Edisi ke-6 (Thomson, 2007) hal. 142 – 44, C. M. V. Clarkson, H. Keating dan S. R. Cunningham mengajukan definisi yang tidak menyimpang terlalu jauh dari bahasa biasa: tujuan. Hal ini juga mencakup peramalan konsekuensi sebagai sesuatu yang pasti, namun bukan peramalan sebagai sesuatu yang pasti. Apakah usulan ini akan mencegah pelaku pembom yang membunuh demi mendapatkan uang asuransi yang dihukum karena pembunuhan? Orang mungkin bertanya-tanya apakah ada perbedaan konseptual antara tinjauan ke masa depan sebagai hal yang pasti dan pandangan ke masa depan sebagai hal yang pasti. Terdapat juga kampanye yang panjang untuk mengurangi bentuk-bentuk kebencian menjadi satu hal: niat untuk membunuh, dengan alasan bahwa istilah 'pembunuhan' seharusnya hanya ditujukan kepada para pembunuh yang paling parah. Jadi, membatasi definisi ini juga berarti bahwa tidak perlu menarik garis pemisah antara kerangka berpikir yang berbeda, melihat ke masa depan mengenai suatu konsekuensi sebagai hal yang pasti, dan melihat ke masa depan tentang suatu konsekuensi sebagai hal yang kurang pasti. Apa pun yang terjadi, 'demi kejelasan dan penerapan hukum pidana yang konsisten untuk mendefinisikan niat', sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Hukum (di 193). Undang-undang saat ini tidak memiliki kejelasan tersebut. Seperti yang ditulis Stanley Yeo dalam *Fault in Homicide* (Federation Press, 1997) 50: 'Undang-undang tersebut tidak memiliki definisi yang jelas tentang niat, yang merupakan kegagalan besar pengadilan Inggris mengingat pentingnya peran konsep ini dalam menentukan bersalahnya pembunuhan. dan, tentu saja, untuk banyak pelanggaran lainnya.'

Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, seseorang yang membunuh karena sudah pasti akan meninggal atau mengalami luka fisik yang parah, bisa jadi adalah seorang pembunuh. Di bawah skema reformasi dia akan menjadi seorang pembunuh.

3.4 KENEKATAN

G [2004] AC 1034

Pembaca setia buku teks ini pasti sudah memperhatikan penurunan peringkat Caldwell [1982] AC 341 (HL) dari 'kasus paling penting' dalam hukum pidana Anglo-Welsh menjadi 'selama satu dekade dianggap sebagai kasus paling penting'. House of Lords kini telah menolak Caldwell, sehingga dalam praktiknya menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus paling tidak penting dalam hukum pidana Anglo-Welsh. Namun demikian, masa jabatan Caldwell yang berusia 20 tahun atau lebih tetap signifikan secara teoritis dan bahkan setelah kehancurannya, hukum kecerobohan obyektif tetap penting, seperti yang akan segera dijelaskan.

Fakta dan keputusan

Seperti Caldwell, fakta G sederhana saja. Dua anak laki-laki, berusia 11 dan 12 tahun, membakar beberapa surat kabar di halaman belakang sebuah toko. Mereka membuang kertas-kertas yang menyala itu ke bawah tempat sampah. Api menyebar ke toko dan menyebabkan kerusakan senilai Rp. 1 Miliar. Anak-anak tersebut didakwa melakukan pembakaran yang bertentangan dengan pasal 1(1) dan (3) Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971. Mereka dinyatakan bersalah pada tingkat pertama, hakim pengadilan mengarahkan juri sesuai dengan Caldwell. House of Lords menolak Caldwell dan menyatakan bahwa anak-anak itu tidak bersalah atas pembakaran. Mereka tidak memperkirakan kerugian akibat tindak pidana. DPR mengadopsi definisi Rancangan KUHP Komisi Hukum (Laporan No. 177, 1989): 'Seseorang berbuat sembarangan dengan hormat

- (i) suatu keadaan ketika ia menyadari adanya risiko yang ada atau akan ada;
- (ii) akibat ketika ia menyadari adanya risiko yang akan terjadi, dan dalam keadaan yang dia ketahui, tidak masuk akal untuk mengambil risiko tersebut.'

Sebenarnya ada satu cara di mana anak-anak tersebut bisa dihukum karena melakukan pembakaran. Jika mereka mengambil risiko bahwa dengan melempar koran yang menyala mereka akan membakar sampah yang ada di bawah tempat sampah, maka hal ini akan membakar tempat sampah itu sendiri, dan kemudian mereka akan ceroboh dalam melakukan tindakan kriminal (pada tempat sampah), dan karena ini kebakaran menyebabkan kerusakan pada toko, maka mereka seharusnya dihukum karena melakukan pembakaran terhadap toko.

Apa yang diputuskan Caldwell?

Caldwell berpendapat bahwa untuk tujuan pasal 1 Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971, seseorang bertindak ceroboh jika (1) terdapat risiko kerusakan yang jelas (dan serius) dan (2a) dia tidak memikirkan kemungkinan risiko tersebut. atau (2b) dia menyadari adanya risiko namun tetap melanjutkan. Ini adalah bentuk singkat dari definisi yang diberikan oleh Lord Diplock dan untuk penjelasan lengkap dari definisi ini pembaca disarankan untuk membaca halaman 118-26 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana edisi keenam. (2b) terkadang dikenal sebagai 'kecerobohan subjektif' apakah terdakwa ini melihat risiko yang relevan? Jenis kecerobohan ini telah ada selama lebih dari satu abad dan otoritas utamanya tetap Cunningham [1957] 2 QB 396 (CCA). Kata-kata yang digunakan adalah: 'Terdakwa telah meramalkan bahwa jenis kerugian tertentu mungkin terjadi namun tetap mengambil risiko.' (2a) adalah kecerobohan obyektif: mungkinkah orang yang berakal sehat meramalkan risiko terjadinya kerugian tertentu. ? G ditolak (2a), sering dikenal sebagai kecerobohan Caldwell. Kecerobohan subyektif (2b) masih ada. Karena anak laki-laki tersebut tidak memperkirakan risiko kerusakan, mereka tidak bersalah atas pembakaran, yaitu kejahatan yang menyebabkan kerusakan kriminal dengan api.

Untuk sementara pada tahun-tahun setelah Caldwell, kecerobohan obyektif diterapkan pada semua pelanggaran kecerobohan kecuali jika Parlemen menetapkan lain: Seymour [1983] 2 AC 493 (HL) per Lord Roskill. Pelanggaran yang dilakukan secara jahat, yang menurut Cunningham berarti, 'sengaja atau ceroboh', merupakan contoh utama pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Parlemen, dan kecerobohan subjektif terus diterapkan pada

pelanggaran tersebut: lihat Savage [1992] 1 AC 699 (HL). Namun, bahkan kejahatan seperti pemerkosaan, yang pada saat itu mengandung unsur mental melakukan hubungan seksual dengan mengetahui bahwa korban tidak menyetujuinya atau bersikap ceroboh mengenai apakah korban menyetujui atau tidak, dianggap sebagai bentuk kecerobohan obyektif: lihat mungkin nama yang tepat untuk kasus Pigg [1982] 1 WLR 762 (CA). Namun, pengadilan memulai apa yang bisa disebut sebagai kemunduran dari Caldwell, dengan menyatakan bahwa pelanggaran tertentu termasuk pemerkosaan bukanlah kejahatan yang disengaja. Parlemen juga menghapuskan dua kejahatan utama yaitu kecerobohan obyektif, mengemudi sembrono dan menyebabkan kematian karena mengemudi sembrono (lihat Lawrence [1982] AC 510 (HL) dan Reid [1992] 1 WLR 793 (HL)). Untuk rincian lebih jauh mengenai penyimpangan dari Caldwell, lihat M. Jefferson ('Recklessness: The objectivity of the Caldwell test' (1999) 63 JCL 57. Pada tahun 2000, sulit untuk menemukan kejahatan yang bersifat kecerobohan obyektif selain dari kerusakan pidana, namun cerdik mengetahui tentang menerbangkan pesawat microlight secara sembarangan dan menyalahgunakan data pribadi secara sembarangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data tahun 1984.

Seberapa jauh G melangkah?

Semua Ahli Hukum berpendapat bahwa penafsiran Caldwell terhadap pasal 1 Undang-Undang Kerusakan Pidana tidak benar. Parlemen tidak bermaksud untuk memberikan definisi baru mengenai kecerobohan ketika Parlemen mengganti kejahatan yang bersifat merusak dengan kejahatan yang disengaja atau sembrono. Empat Yang Mulia juga mengatakan bahwa Caldwell, selain salah secara hukum, juga menjijikkan secara moral: seperti yang dikatakan Lord Bingham, jelas tidak tercela melakukan sesuatu yang menimbulkan risiko cedera pada orang lain jika seseorang benar-benar tidak menyadari risikonya'. Orang seperti itu bisa saja 'dituduh bodoh atau kurang imajinasi, namun kegagalan tersebut tidak boleh membuat dia dihukum karena melakukan kejahatan serius atau menghadapi risiko hukuman. Menghukum terdakwa bukanlah tindakan yang bermoral dan tidak adil pada kekuatan apa yang orang lain akan tangkap jika terdakwa sendiri tidak mempunyai ketakutan tersebut'. (Lord Bingham, bagaimanapun, tidak meragukan apa yang kadang-kadang dikenal sebagai 'kecerobohan konstruktif', yaitu menganggap terdakwa ceroboh ketika mabuk alkohol atau obat-obatan untuk kejahatan dengan niat dasar dalam pembelaan mabuk: lihat Majewski [1977] AC 443 dan bagian Caldwell yang membahas tentang keracunan). Lord Bingham juga tidak menyetujui Elliott v C [1983] 1 WLR 939 (DC, kasus di mana seorang gadis berusia 14 tahun yang lelah, lapar dan 'terbelakang' dihukum karena pembakaran): 'Ini tidak bermoral atau hanya menghukum a terdakwa (apalagi anak-anak) mengenai kekuatan dari apa yang akan ditangkap seseorang jika terdakwa tidak memiliki ketakutan seperti itu.' DPR bisa saja membatasi pidato mereka hanya pada mengesampingkan Elliott v C karena para terdakwa adalah anak-anak, sehingga mempertahankan Caldwell untuk orang dewasa atau setidaknya mereka yang bukan penyandang disabilitas, seperti yang disarankan oleh pertanyaan yang diajukan oleh Pengadilan Banding tetapi mereka tidak melakukannya: baik penafsiran undang-undang maupun pertimbangan moral memerlukan penolakan terhadap Caldwell.

Namun doktrin supremasi parlemen tidak boleh dilupakan. Pada saat House of Lords dalam kapasitas yudisialnya menghapuskan kecerobohan obyektif, House of Lords dalam kapasitas legislatifnya dan House of Commons mengesahkan Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Keyakinan yang tidak masuk akal terhadap persetujuan korban tidak lagi menjadi pembelaan. Undang-undang tersebut, menyedihkan namun tidak mengherankan, tidak jelas mengenai anak-anak sebagai terdakwa. Kutipan pertama dari Lord Bingham di atas melanjutkan: 'Orang seperti itu [yaitu. seseorang yang secara obyektif ceroboh] bisa saja dituduh bodoh atau kurang berimajinasi, namun tidak satu pun dari kegagalan ini yang bisa membuatnya terkena hukuman kejahatan serius atau risiko hukuman.' Pemerkosaan adalah kejahatan serius; hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Namun hal ini sekarang dapat dilakukan oleh seseorang yang percaya atas dasar alasan yang tidak masuk akal atas persetujuan korban. Parlemen tidak mengindahkan G. Menteri Dalam Negeri saat itu merasa senang dengan revisi definisi pemerkosaan, dan memang ada sedikit hal yang bisa dikatakan mendukung kecerobohan obyektif dalam pelanggaran seksual, namun mengecewakan melihat argumen akademisi. komentator tidak diperhitungkan oleh Parlemen mengenai isu penting tersebut. Akan menarik untuk melihat bagaimana pengadilan menangani anak laki-laki berusia 11 dan 12 tahun yang didakwa melakukan pemerkosaan dan yang berpendapat bahwa mereka tidak memikirkan apakah korban menyetujui atau percaya bahwa korban menyetujuinya atau tidak. ketika orang yang berakal tidak akan begitu percaya. *Elliott v C* menghasilkan hasil yang buruk; tentunya kita harus bisa mencegah ketidakadilan serupa pada anak. Mari kita ingat bahwa perluasan tindakan kejahatan pemerkosaan terhadap anak laki-laki di bawah usia 14 tahun diberlakukan baru-baru ini pada tahun 1993 dan baru pada tahun 1998 doktrin kebijaksanaan nakal dihapuskan.

(b) Kasus seperti G dan B menunjukkan kembalinya ke *mens rea* subjektif. Perlu dicatat bahwa tidak ada apa pun di G yang memengaruhi pembunuhan berencana karena kelalaian. Tentu saja, pelanggaran tersebut menurut Seymour digantikan dengan pembunuhan yang sembrono tetapi House of Lords di *Adomako* [1995] 1 AC 171 kembali melakukan pembunuhan karena kelalaian besar, menghidupkan kembali hukum *pra-Caldwell* (lihat Bab 12). Demikian pula, tidak ada satu pun di G yang mempengaruhi paksaan, baik karena ancaman atau keadaan. Pengadilan Banding dalam *Graham* [1982] 1 WLR 294, yang disetujui oleh House of Lords dalam *Howe* [1987] AC 417, menyatakan bahwa dalam melakukan paksaan, keyakinan terdakwa akan adanya ancaman harus didasarkan pada alasan yang masuk akal. Lord Steyn di G berpendapat bahwa *Graham* dan *Howe* benar. Ada beberapa otoritas yang bertentangan, *Martin* [2000] 2 Cr App R 42 (CA): lihat buku ini untuk rincian lebih lanjut. *Martin*, seperti yang ditunjukkan, salah. G juga tidak mempengaruhi hukum keracunan. Terdakwa mabuk bersalah karena secara sembrono menyebabkan *actus reus* jika dia mabuk berat, meskipun dia tidak memperkirakan akibatnya. Jenis kecerobohan ini kadang-kadang dikenal sebagai 'kecerobohan konstruktif'. Untuk informasi lebih lanjut tentang keracunan, lihat Bab 8.

(c) Baik dalam kecerobohan subjektif maupun objektif terdapat prasyarat bahwa perilaku terdakwa tidak dapat dibenarkan. Jika tindakan tersebut dapat dibenarkan, maka

tidak ada kecerobohan. Misalnya, jika seorang pengemudi mobil berbelok untuk menghindari seorang anak kecil dan akibatnya menabrak sebuah mobil van, maka atas tuduhan pidana pengrusakan terhadap mobil tersebut pengemudi tersebut tidak gegabah karena tindakannya itu dibenarkan, meskipun ia meramalkan adanya tindak pidana. kerusakan mungkin terjadi pada van. Pada tahap ini pengujiannya bersifat obyektif bahkan dalam kecerobohan subyektif: apakah terdakwa menganggap tindakannya dapat dibenarkan atau tidak, itu tidak relevan.

Beberapa kritik terhadap kecerobohan obyektif

(a) Sudut pandang otoritas hukum. Ketika Parlemen mengesahkan Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971, Parlemen tidak bermaksud mengubah undang-undang tersebut. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk menggantikan istilah kuno 'jahat' dengan istilah modern 'sembrono'. Lord Diplock berpikir sebaliknya, tapi ternyata salah. Undang-undang tersebut didasarkan pada Laporan Komisi Hukum, Tindak Pidana Perusakan, Laporan No. 29 Tahun 1970, yang menginginkan agar UU tersebut melakukan hal yang sama. Pengadilan Banding di Briggs [1977] 1 WLR 605, Parker [1977] Crim LR 102 dan Stephenson [1979] QB 695 tidak berusaha untuk menyatakan hukum kecerobohan dalam tindak pidana pengrusakan dengan cara apa pun selain yang mendasari proposal tersebut. Komisi Hukum dan UU tahun 1971. Hukum pidana sebelumnya membatasi pelanggaran yang paling serius antara mengambil risiko secara tidak sengaja (bersalah) dan tidak sengaja melakukannya (tidak bersalah). Caldwell menjalankan pola pikir yang berbeda secara moral ini bersama-sama. Ada sedikit dukungan untuk Caldwell dalam undang-undang sebelumnya. Misalnya, House of Lords dalam *Andrews v DPP* [1937] AC 576 menyamakan kecerobohan dan kelalaian besar, dengan mendalilkan standar perilaku yang obyektif, namun kasus tersebut terjadi sebelum ketentuan undang-undang tersebut diselesaikan. (Dalam perbuatan melawan hukum, kecerobohan bersifat subyektif, setidaknya dalam kaitannya dengan memagari pelanggaran anak-anak: hukum melihat ke arah yang salah.)

(b) Sering dikatakan bahwa hukum pidana didasarkan pada pilihan. Seorang terdakwa seharusnya bersalah hanya jika dia mempunyai pilihan untuk melakukan kejahatan. Pilihan mencakup keputusan sadar untuk mengambil risiko yang menyebabkan kerugian. Dengan kata lain, kecerobohan subjektif bisa diterima. Namun, jika terdakwa tidak mempertimbangkan apakah dapat menimbulkan kerugian, maka ia tidak memilih untuk melanggar hukum.

(c) Caldwell memvonis bersalah orang-orang yang sebelumnya tidak bersalah karena ceroboh, namun kini ceroboh. (Kebetulan tugas jaksa menjadi lebih mudah.) Mahkamah Agung Kanada dalam *Sansregret v R* (1985) 17 DLR (4th) 577 mengatakan bahwa kelalaian tidak boleh disamakan dengan kecerobohan.

Kelalaian diuji dengan standar obyektif orang yang berakal sehat. Penyimpangan dari kebiasaannya dalam berperilaku sadar dengan tindakan atau kelalaian yang menunjukkan kepedulian yang kurang wajar akan menimbulkan tanggung jawab di hukum perdata namun tidak menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana. . . [R]kecerobohan, untuk menjadi bagian dari pidana mens rea, harus ada unsur subjektifnya. Hal ini terdapat pada sikap seseorang yang sadar akan adanya bahaya yang perbuatannya dapat menimbulkan akibat

yang dilarang oleh hukum pidana, namun tetap bertahan meskipun ada resikonya. Dalam pengertian inilah istilah 'kecerobohan' digunakan dalam hukum pidana dan jelas berbeda dengan konsep kelalaian perdata.

(d) Salah satu teori penghukuman adalah pencegahan khusus: seorang terdakwa harus dicegah dengan hukuman agar tidak melakukan pelanggaran. Namun, jika dia tidak berani mengambil risiko, dia tidak bisa dicegah.

Ini adalah masalah kebijakan apakah orang yang tidak memikirkan suatu risiko harus bertanggung jawab secara pidana. Lord Diplock tidak berpendapat bahwa hukum harus membedakan antara dua keadaan pikiran, yaitu waspada dan mengambil risiko di satu sisi dan tidak waspada di sisi lain. Dalam pandangannya, keduanya merupakan kerangka berpikir yang sama-sama bersalah. Masyarakat disalahkan karena tidak menjaga. Jika seorang scaffolder menjatuhkan sebuah peralatan secara sembarangan, ia akan disalahkan jika peralatan tersebut mengenai kepala seseorang di jalan. Lagi pula, hukuman terhadap orang yang ceroboh seperti itu mungkin akan membuat mereka berhati-hati di lain waktu. House of Lords di Reid [1992] 1 WLR 793 juga mengadopsi pandangan ini. Memang benar Lord Keith berkata bahwa kecerobohan Cunningham sulit diterapkan. Proposisinya sulit diterima, karena ribuan juri selama bertahun-tahun telah menggunakan definisi subjektif tanpa mempertanyakannya. Para komentator akademis, secara keseluruhan, menolak pendekatannya. S. France 'Pendekatan sembrono terhadap tanggung jawab' (1988) 18 VUWLR 141 di 152–153 menyatakan:

Bahaya sebenarnya dari Caldwell terletak pada potensinya untuk membawa kekuatan hukum pidana ke dalam situasi kehidupan sehari-hari dengan menyamakan tindakan kelalaian dengan tindakan kedengkian yang disengaja dan disengaja. Tindakan tersebut tidak melibatkan aktivitas antisosial yang berbahaya secara sadar.

Apakah kita benar-benar ingin terdakwa bersalah melakukan pembakaran dalam *Elliott v C* [1983] 1 WLR 939 (DC)? Terdakwa berusia 14 tahun, lelah, lapar dan mengalami kesulitan belajar. Dia membakar gudang setelah memercikkan cairan yang mudah terbakar ke sekitarnya; dan dinyatakan bersalah atas pembakaran. Dia tidak memilih untuk melanggar hukum, dan dia tidak memiliki kapasitas untuk menyadari bahwa apa yang dia lakukan berbahaya. Bukan karena tindakannya menunjukkan ketidakpedulian terhadap kerugian yang ditimbulkannya, namun karena dia tidak mampu memperkirakan risiko apa pun karena kesulitan belajarnya.

Kebijakan hukum juga mengemuka ketika kita mempertimbangkan tuntutan Caldwell dan *B v DPP* [2000] 2 AC 428 (HL). Ketentuan terakhir menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang selama bertahun-tahun merupakan kejahatan yang bersifat tanggung jawab ketat: *mens rea* dalam artian diperlukan pengetahuan mengenai usia korban; Namun, Caldwell menyatakan bahwa untuk pelanggaran kecerobohan objektif, pengetahuan tidak diperlukan.

3.5 PEMBARUAN

Baik sebelum maupun sesudah badan reformasi hukum Caldwell merekomendasikan untuk melanjutkan definisi Cunningham. Komisi Hukum dalam Unsur Mental dalam Kejahatan, Laporan Nomor 89 Tahun 1978, Laporan Keempat Belas Panitia Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, dan Rancangan KUHP (UU No. 177 Tahun 1989), semuanya mengadopsi pendekatan Cunningham. Lord Diplock tidak mengacu pada proposal bahasa Inggris apa pun. Satu-satunya masalah reformasi hukum yang ia perhatikan adalah Model KUHP AS, dan itu pun ia lakukan secara selektif. Komentar akademis mendukung kembalinya ke Cunningham, yang dianggap mudah diterapkan, bukan Caldwell, yang dianggap sulit dipahami oleh juri dan juri. Kecerobohan memerlukan definisi karena tanpa definisi tersebut juri mungkin menganggap kecerobohan dan kelalaian adalah sama. Rancangan KUHP, pasal 18(c), mendefinisikan 'sembrono' dalam kaitannya dengan pelanggaran yang terkandung dalam KUHP sebagai berikut:

Seseorang bertindak 'sembrono' sehubungan dengan:

- (i) suatu keadaan ketika ia menyadari adanya risiko yang ada atau akan ada;
- (ii) akibat ketika ia menyadari adanya risiko yang akan terjadi dan, dalam keadaan yang dia ketahui, tidak masuk akal untuk mengambil risiko (Definisi yang sama terdapat dalam Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran Terhadap Pribadi dan Asas Umum, UU Com. No. 218, 1993, dan yang diadopsi oleh House of Lords di G.) Kecerobohan yang didefinisikan dengan cara ini akan menjadi tingkat kesalahan minimum dalam pelanggaran Kode, kecuali ditentukan lain (cl 20(1)). Komisi Hukum menyatakan bahwa pasal 8(c) memiliki dampak yang sama dengan definisi yang diusulkan dalam laporannya tahun 1978, *The Mental Element in Crime* (hal. 193). Komisi Hukum berpendapat bahwa seseorang harus bertanggung jawab hanya jika ia secara sadar mengambil risiko, dan Komisi Hukum lebih memilih untuk menggunakan pendekatan subjektif, dan membiarkan Parlemen tetap terbuka untuk menetapkan Caldwell, jika Parlemen menghendakinya. Jika terdakwa tidak menyadari risikonya, kelalaian tersebut merupakan kelalaian dan bukan bagian dari Kode Etik.

Ada dua atau tiga perbedaan antara Cunningham dan rancangan Kode Etik. Pertama, tidak ada referensi di Cunningham mengenai justifikasi risiko tersebut, namun kelalaian tersebut segera diperbaiki. Jika risiko ini dapat dibenarkan, maka tetap saja terdakwa tidak ceroboh berdasarkan definisi Cunningham. Kedua, Cunningham tidak mengacu pada risiko sehubungan dengan keadaan, namun rancangan Kode Etik ini merujuk pada hal tersebut. Ketiga, Cunningham mengacu pada pandangan ke masa depan mengenai jenis kerugian ini sedangkan rancangan Kode mengacu pada kerugian aktual yang ditimbulkan, dan dalam hal ini definisi Cunningham tampak lebih luas dibandingkan dengan rancangan Kode.

House of Lords di Reid [1992] 1 WLR 793 menyatakan bahwa orang yang tidak memikirkan kemungkinan bahaya atau kerusakan besar ketika mengendarai mobil sama tercelanya dengan seseorang yang mempertimbangkan risikonya. Pembaca diajak untuk mempertimbangkan apakah dia setuju atau tidak. House of Lords juga menyatakan bahwa

keadaan pikiran (kurangnya) yang lama merupakan mens rea. Lord Keith berkata: 'Ketidakhati-hatian terhadap risiko juga merupakan keadaan pikiran dibandingkan dengan mengabaikan risiko yang sudah diketahui.' Lord Diplock di Caldwell menyatakan bahwa diperlukan 'analisis yang cermat' untuk membedakan antara terdakwa yang memperkirakan adanya risiko dan orang yang seharusnya melakukannya. telah meramalkannya. Apa kamu setuju?

'Dengan sadar'

Parlemen terkadang menggunakan kata ini untuk memaksakan persyaratan mens rea. Misalnya, seseorang bersalah dalam menangani hanya jika dia mengetahui atau meyakini barang tersebut akan dicuri. Jika definisi pelanggaran tidak mencakup 'mengetahui', pengadilan kadang-kadang membacanya (lihat Bab 4 mengenai pelanggaran berat).

Pengadilan pidana mengakui beberapa tingkat pengetahuan.

- (a) Pengetahuan aktual. Otoritas utamanya adalah *Roper v Taylor's Central Garages (Exeter) Ltd* [1951] 2 TLR 284 (DC). Devlin J mengatakan, pengetahuan jenis ini adalah ketika terdakwa mengetahui secara pasti suatu fakta bahwa sesuatu itu ada atau benar.
- (b) Kebutaan yang disengaja. Devlin J dalam *Roper* menyebut keadaan pikiran ini sebagai 'pengetahuan tingkat kedua'. Lord Bridge dalam *Westminster CC v Croyalgrange Ltd* [1986] 1 WLR 674 mengatakan bahwa pengetahuan dapat didasarkan 'pada bukti bahwa terdakwa sengaja menutup mata terhadap hal yang sudah jelas atau menahan diri untuk bertanya karena dia mencurigai kebenarannya tetapi tidak ingin mengetahui kebenarannya. kecurigaan terbukti'. Meskipun Lord Bridge berbicara tentang 'inferensi', dapat dikatakan bahwa aturan tersebut adalah hukum: *Roper*, di atas.
- (c) Pengetahuan yang konstruktif. Sekali lagi istilah ini diperluas di *Roper*. Tingkat pengetahuan ini terjadi ketika terdakwa sebagai orang yang berakal sehat seharusnya melakukan penyelidikan. Ini adalah kelalaian (lihat di bawah).

Tipe pertama selalu ditutupi dengan 'mengetahui' atau 'dengan sadar'. Tipe kedua biasanya tertutup, tapi tidak selalu. Dalam penanganannya, kebutaan yang disengaja saja tidak cukup (lihat Bab 17). Yang ketiga jarang terjadi dalam hukum pidana tradisional tetapi muncul ketika Parlemen menciptakan suatu pelanggaran yang terdakwa mempunyai alasan yang cukup untuk mempercayainya. Contohnya adalah pasal 25 Undang-Undang Senjata Api tahun 1968. Seseorang dianggap bersalah jika dia menjual senjata api atau amunisi kepada siapa pun yang dia kenal atau punya alasan kuat untuk meyakini bahwa dia sedang mabuk. Contoh terbaru datang dari UU Perlindungan dari Pelecehan (1997). Seseorang dianggap bersalah jika ia seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya akan melecehkan korbannya.

Seseorang tidak akan mengetahui bahwa ia memiliki sesuatu jika ia telah melupakannya: *Russell* (1984) 81 Cr App R 315. Namun, bisa saja seorang terdakwa terus mengetahui sesuatu jika ia mempunyai kapasitas untuk mengingat hal yang relevan. informasi: *Bello* (1978) 67 Cr App R 288 (CA).

Berdasarkan rancangan KUHP, pasal 18:

Seseorang bertindak secara sadar berkenaan dengan suatu keadaan tidak hanya ketika dia menyadari bahwa keadaan itu ada atau akan ada, tetapi juga ketika dia menghindari

mengambil langkah-langkah yang mungkin menegaskan keyakinannya bahwa keadaan itu ada atau akan ada.

Oleh karena itu, 'kebutaan yang disengaja' harus ditutupi dengan 'secara sadar'. 'Dengan sengaja' Seperti 'sengaja', 'sengaja' adalah istilah yang biasanya menimbulkan mens rea. Otoritas utamanya adalah Sheppard [1981] AC 394 (HL). Berdasarkan pasal 1 (1) Undang-Undang Anak dan Remaja tahun 1933:

[Jika] siapa pun yang telah mencapai usia enam belas tahun dan mempunyai hak asuh, tanggung jawab, atau perawatan atas anak atau remaja mana pun di bawah usia tersebut, dengan sengaja menyerang, menganiaya, mengabaikan, menelantarkan, atau mengekspos dia dengan cara yang mungkin menyebabkan penderitaan atau cedera kesehatan yang tidak perlu orang itu akan bersalah.

Lord Diplock mengatakan bahwa 'dengan sengaja' biasanya dikonotasikan dengan niat atau kecerobohan dalam kaitannya dengan 'penyerangan, perlakuan buruk. . . , meninggalkan atau mengekspos'. Hal ini tidak berarti bahwa terdakwa harus bertindak secara sukarela. Kasus-kasus yang menyatakan bahwa 'dengan sengaja' hanyalah sinonim dari 'secara sukarela' mungkin perlu direvisi setelah Sheppard. Karena perilaku sukarela tersirat dalam pelanggaran, maka pernyataan bahwa 'dengan sengaja' berarti 'secara sukarela' mengarah pada proposisi bahwa 'dengan sengaja' tidak berarti apa-apa atau mungkin Parlemen mengungkapkan apa yang sudah tersirat. Namun terkait penelantaran yang dipermasalahkan di Sheppard, ia menilai kegagalan memanggil dokter yang mengakibatkan anak tersebut meninggal. Tidak dapat digambarkan dengan tepat sebagai 'disengaja' kecuali orang tua (1) telah mengarahkan pikirannya pada pertanyaan apakah ada risiko bahwa kesehatan anak tersebut mungkin terganggu kecuali ia diperiksa oleh dokter, dan telah membuat keputusan secara sadar tidak mengadakan pemeriksaan kesehatan tersebut, atau (2) tidak melakukan hal tersebut karena tidak peduli apakah anak tersebut memerlukan perawatan medis atau tidak.

Penjelasan ini setara dengan kecerobohan ala Caldwell pada era sebelum G [2004] 1 AC 1034. Namun berbeda dengan Caldwell, Lord Diplock menyatakan bahwa terdakwa yang bertindak 'karena ketidaktahuan atau kurangnya kecerdasan' bukanlah orang yang disengaja. 'Dengan sengaja' bukan merupakan 'istilah yang salah' dalam rancangan KUHP. Oleh karena itu, tidak didefinisikan di dalamnya.

Walaupun biasanya kata 'dengan sengaja' merupakan kata mens rea, pengadilan terkadang menyatakan bahwa 'dengan sengaja' mengatur satu bagian dari actus reus namun tidak mengatur bagian yang lain. Jika seseorang dengan sengaja memusnahkan pohon ek yang tunduk pada perintah pelestarian pohon, ia bersalah jika ia mengetahui bahwa ia sedang menebang pohon; kita tidak perlu tahu bahwa ada perintah pelestarian yang melekat padanya: *Maidstone BC v Mortimer* [1980] 3 All ER 502 (DC). Oleh karena itu, seseorang tidak perlu melakukan kejahatan ini dengan sengaja terhadap seluruh bagian dari actus reus. Oleh karena itu, pelanggaran merupakan salah satu tanggung jawab yang ketat, sebuah topik yang akan dibahas pada bab berikutnya. Kasus sebaliknya adalah *Willmott v Atack* [1977] QB 498 (DC). Seorang terdakwa bersalah karena dengan sengaja menghalangi seorang polisi hanya

jika dia tahu bahwa dia menghalangi petugas tersebut. Tidaklah cukup bahwa dia melakukan suatu tindakan yang sebagian menghalanginya.

Kelalaian

Pelanggaran kelalaian seperti mengemudi sembarangan tidak dianggap oleh semua akademisi sebagai pukka. Profesor Hogan menulis: 'Kelihatannya tidak ada kebodohan . . . untuk menjadi dasar yang memadai bagi pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sangat serius oleh masyarakat' ('Strict Liability' ([1978] Crim LR 593). Glanville Williams dalam *Criminal Law: The General Part*, edisi ke-2 (Stevens, 1961) 122, menambahkan: 'Beberapa manusia dilahirkan tanpa pertimbangan, kikuk, tidak berpikir, lalai, tidak bertanggung jawab, dengan ingatan yang buruk dan "waktu reaksi" yang lambat. Dengan kemauan terbaik di dunia, kita semua pada saat tertentu dalam hidup kita membuat kesalahan karena kelalaian. sulit untuk melihat bagaimana keadilan (yang berbeda dari alasan utilitarian) mengharuskan kesalahan untuk dihukum.' Cacat-cacat ini tidak patut disalahkan secara moral. Terlebih lagi, hukum pidana adalah metode negara yang paling serius dalam mewajibkan masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu, jika mereka melakukan hal tersebut. tidak dapat menghentikan diri mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut karena, misalnya, mereka ceroboh, bagaimana hukuman dapat menghentikan mereka? Namun demikian, kaum utilitarian beralasan bahwa kejahatan kelalaian dapat mewajibkan orang untuk berpikir sebelum bertindak. Perilaku yang tidak masuk akal harus dikenakan sanksi pidana. Memang terdapat banyak pelanggaran hukum karena kelalaian, sebagian besar merupakan pelanggaran ringan, sama halnya dengan banyak kejahatan hukum yang bersifat tanggung jawab ketat. George Fletcher menulis: 'Kelalaian dicurigai sebagai penyimpangan dari paradigma kriminalitas yang disengaja' ('Teori kelalaian kriminal: analisis komparatif' (1971) 119 U Pa LR 401 at 403).

Ketika seseorang berpindah dari kesengajaan dan kecerobohan subjektif ke kelalaian, fokusnya berpindah dari aktivitas sadar ke kecerobohan. Hanya sedikit pakar yang membahas definisi kelalaian, namun yang dimaksud dengan kelalaian adalah ini. Terdakwa gagal mencapai standar objektif yang disyaratkan oleh hukum pidana. Salah satu argumen yang menentang kelalaian sebagai dasar untuk menjatuhkan tanggung jawab hukum pidana adalah bahwa terdakwa dinilai berdasarkan kriteria obyektif, bukan berdasarkan keadaan pikirannya. Dalam konteks pembunuhan karena kelalaian berat Pengadilan Banding dalam Referensi Jaksa Agung (No. 2 Tahun 1999) [2000] QB 796 ditegaskan dalam sebuah bagian yang disetujui oleh Pengadilan Divisi di DPP ex p Jones [2000] IRLR 373 bahwa pengujian kelalaian adalah obyektif dan tidak ada bukti yang perlu diberikan mengenai keadaan pikiran terdakwa. Kelalaian sebagai standar tanggung jawab tidak dibangun atas dasar kesalahan individu. Oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Argumen sebaliknya adalah bahwa kelalaian berarti bahwa terdakwa seharusnya menyadari adanya risiko kerugian yang tidak dapat dibenarkan. Di Inggris, diterima bahwa tanggung jawab atas kelalaian memerlukan standar obyektif: apakah terdakwa ini tidak memenuhi standar yang disyaratkan oleh orang yang berakal sehat?

'Alasan yang mendasari subjektivisme tampaknya adalah bahwa subjektivisme memperbolehkan hukuman hanya ketika seseorang melakukan suatu pilihan dan mencegah

hal yang wajar, hukuman bagi mereka yang tidak punya pilihan' (C. Wells 'Swatting the subjectivist bug' [1982] *Kejahatan LR* 209 di 212). Seorang subjektivis akan mengatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum jika dia tidak mampu mengubah perilakunya untuk berhenti melakukan pelanggaran. Kritik atas kelalaian dapat dikurangi jika standar yang bervariasi diadopsi. Standar tanggung jawab yang lebih tinggi mungkin dikenakan pada otoritas lokal atau perusahaan besar dibandingkan pada anak berusia 14 tahun yang terbelakang, lelah, dan lapar. Sekalipun standar umumnya adalah standar orang yang berakal sehat, standar yang lebih tinggi, yakni variabel, sudah dikenakan pada orang yang mempunyai pengetahuan khusus. Karena standarnya bervariasi ke atas, mengapa tidak variabel ke bawah dalam kaitannya dengan usia, ukuran, kecerdasan dan sejenisnya? Mungkin timbul pertanyaan apakah anak berusia 14 tahun yang terbelakang, lelah, dan lapar pantas mendapatkan hukuman meskipun orang yang berakal sehat memang pantas menerima hukuman tersebut. Lebih jauh lagi, kadang-kadang ada pendapat bahwa tanggung jawab tidak boleh dikenakan jika terdakwa tidak mempunyai kesempatan yang adil untuk menyadari risikonya. Apakah seorang gadis berumur 14 tahun yang terbelakang, lelah dan lapar mempunyai kesempatan seperti itu? Meskipun demikian, seseorang mungkin tidak selalu ingin mengecualikan beberapa terdakwa meskipun mereka memiliki karakteristik pribadi. Apakah seseorang ingin menemukan seseorang yang tidak bersalah mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian karena dia masih muda, lelah, lapar, dan kurang cerdas? Demikian pula, kita mungkin ingin, seperti halnya undang-undang saat ini, untuk menjaga standar yang sama bagi pengemudi yang berpengetahuan dan berpengalaman. Tampaknya aneh bahwa hukum perdata harus lebih mencerminkan karakteristik pribadi dalam hal ini dibandingkan hukum pidana (lihat *BRB v Herrington* [1972] *AC* 877, tentang pelanggar anak). Harus diingat bahwa pembelaan yang umum diterapkan pada pelanggaran kelalaian, termasuk pelanggaran yang didasarkan pada kapasitas mental seperti kegilaan dan masa bayi. Bahkan dalam kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran ini, orang yang tidak waras tidak diperlakukan sebagai orang yang waras. Anak berusia sembilan atau sebelas tahun tidak diperlakukan sebagai orang berusia 35 tahun.

Salah satu pendukung terkuat subjektivisme dalam hukum Inggris, J. C. Smith, menulis dalam 'Subjektif atau objektif? Naik turunnya uji pertanggungjawaban pidana di Inggris' [1981–82] *Villanova LR* 1179 at 1214 (ejaan dalam bahasa Inggris):

[T]o mendukung teori subjektivis pertanggungjawaban pidana bukan berarti menyangkal bahwa terdapat tempat bagi pelanggaran yang memerlukan pengujian obyektif, seperti halnya pelanggaran kelalaian. Misalnya saja, kelalaian merupakan kriteria tanggung jawab yang tepat dalam banyak pelanggaran peraturan, yang tujuan sebenarnya adalah untuk memastikan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan tertentu seperti penjualan makanan dan obat-obatan, dimana kelalaian dapat sangat merugikan bagi para pihak. Kelalaian, tentu saja, menurut definisinya adalah kesalahan; tetapi tidak setiap kesalahan harus menimbulkan tanggung jawab. Proses penegakan hukum pidana memerlukan biaya yang besar dan menimbulkan banyak penderitaan. Tanggung jawab

pembuktian harus ada pada kaum obyektifis untuk menunjukkan bahwa kita memerlukan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian.

Namun, karena Parlemen dapat membuat undang-undang baru, maka hal ini dapat menimbulkan pelanggaran kelalaian yang baru. Pemerkosaan, yang merupakan pelanggaran serius, sebagian didefinisikan dalam Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 sebagai kejahatan yang pelakunya 'tidak cukup yakin' bahwa korban menyetujuinya. Hal ini menjadikan pelanggaran berat menjadi tindak pidana kelalaian. Hal serupa juga terjadi pada kejahatan yang menyebabkan atau membiarkan kematian seorang anak atau orang dewasa yang rentan, yang bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang KDRT, Kejahatan dan Korban tahun 2004.

Beberapa komentator berpendapat bahwa *mens rea* menunjukkan keadaan pikiran terdakwa sendiri. Gagal memenuhi standar bukanlah suatu keadaan pikiran. Oleh karena itu, kelalaian bukanlah *mens rea*. Namun argumen ini bersifat definisional: jika seseorang mendefinisikan *mens rea* secara negatif sebagai pelanggaran dikurangi *actus reus*, maka kelalaian termasuk dalam definisi ini. Terkadang juga dikatakan bahwa *mens rea* adalah keadaan pikiran. Akan tetapi, jika seseorang bertindak lalai, menurut definisinya dia tidak mempunyai tataran cita atau dia mempunyai tataran cita yang kosong. Jika pikiran seseorang kosong sehubungan dengan suatu risiko, bagaimana seseorang bisa lalai? Ketika pikiran kosong, ia tidak bisa lebih kosong lagi. Kritik ini ditanggapi dengan tanggapan bahwa kelalaian adalah kegagalan untuk mematuhi norma obyektif. Seseorang bisa saja gagal, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil.

Pengadilan Banding di Misra [2005] 1 WLR 1 menyinggung definisi *mens rea* dalam konteks pembunuhan berencana karena kelalaian berat. Dikatakan bahwa *mens rea* berarti keadaan pikiran terdakwa atau 'bahan yang menjadi penyebab kesalahan atau kesalahan yang diperlukan'. Dalam pengertian yang pertama, kelalaian bukanlah *mens rea*; dalam pengertian yang terakhir memang demikian. Untuk tujuan kejahatan ini kelalaian adalah unsur mentalnya.

Beberapa komentator melangkah lebih jauh. Mereka berpandangan bahwa hukum pidana seharusnya hanya menghukum orang-orang yang berbuat dengan sengaja, yaitu sengaja atau secara subyektif ceroboh. Kelalaian tidak seharusnya menjadi *mens rea* karena seseorang tidak menyadari konsekuensi dari perilakunya. Barangkali dalilnya bisa diutarakan dengan cara yang berbeda, yaitu: 'Bagaimana seseorang bisa memiliki keadaan pikiran yang salah, a *mens rea*, jika ia tidak mempunyai kerangka berpikir sama sekali?' Pikirannya kosong terhadap akibat-akibat bila ia bertindak lalai. Sebaliknya kelalaian dapat dilihat sebagai tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan seperti halnya kesengajaan dan kecerobohan yang disengaja. Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya karena lalai. Dia bersalah dan patut disalahkan. Diperkirakan, orang awam akan menganggap seseorang bersalah ketika dia mengemudi tanpa lampu di tengah malam di bagian jalan raya yang gelap. Tidak selalu ditanyakan apakah dia tahu lampunya belum dinyalakan. Menghukum orang seperti itu mungkin bermanfaat secara sosial. Lebih jauh lagi, keadaan mengubah kasus. G. Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law* (Little, Brown & Co, 1978) menggunakan ilustrasi berikut:

apakah seseorang yang melemparkan korek api ke dalam ember berisi cairan dapat disebut lalai? Agaknya orang akan melakukannya jika ember itu berada di pompa bensin, tetapi tidak jika ember itu berada di bawah pipa pembuangan di taman.

Argumen lain yang menentang kelalaian adalah bahwa menghukum orang karena bertindak ceroboh tidak akan membuat mereka patah semangat, meskipun permasalahannya masih diragukan. Terlebih lagi, mengatakan bahwa orang yang lalai itu berbahaya adalah tindakan yang terlalu inklusif. Jika demikian, mengapa tidak mens rea dihapuskan sama sekali?

H. L. A. Hart berargumentasi bahwa bukanlah suatu hal yang tidak adil bagi seseorang untuk menghukum seseorang yang telah melakukan kelalaiannya. Bertentangan dengan pandangan sebagian besar akademisi Inggris, tidak boleh ada garis batas antara orang yang meramalkan akibat terlarang dan orang yang tidak mengumumkannya. Terdakwa harus dihukum apabila ia tidak menaruh perhatian pada apa yang dilakukannya atau tidak memeriksa keadaan di mana ia berada. Asalkan kecerobohnya tidak masuk akal, ia harus bertanggung jawab secara pidana. Namun, hukum pidana tidak boleh mencakup orang-orang yang tidak dapat mencegah terjadinya kerugian dengan tindakan yang wajar. Hukum juga tidak boleh mencakup orang-orang yang karena kekurangan mental tidak dapat melakukan apa yang mereka lakukan (lih. *Elliott v C*, di atas). Anak-anak akan dikecualikan jika mereka tidak dapat memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jika terdakwa bersalah, ia bertanggung jawab secara pidana karena gagal memeriksa situasi di mana ia berada dan menilai risikonya, dan bukan karena pola pikirnya yang tidak menyadari konsekuensi dari perilakunya. Dalam kata-kata Hart, 'kelalaian tidak berarti keadaan pikiran yang kosong, melainkan keadaan pikiran yang kosong kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap bahaya dengan memeriksa situasi' (*Hukuman dan Tanggung Jawab* (Clarendon Press, 1968) 148). Oleh karena itu, Hart mendalilkan kewajiban untuk mengambil tindakan yang wajar terhadap bahaya, dan hukum pidana harus diarahkan pada orang-orang yang ceroboh, bukan karena kondisi pikiran mereka, tetapi karena mereka memasuki kondisi mental tersebut. Oleh karena itu, terdakwa dihukum karena gagal menggunakan kemampuan mentalnya seperti penilaian, yang jika digunakan akan menghindari kerugian.

Tesis Hart telah dikritik karena beberapa alasan:

- (i) Tesis ini tidak menjelaskan mengapa kita menghukum mereka yang berniat lebih dari mereka yang ceroboh, dan mereka yang ceroboh lebih banyak daripada mereka yang ceroboh.
- (ii) Undang-undang tidak mengatur apakah terdakwa sendiri yang seharusnya memeriksa situasi tersebut, meskipun mungkin memang seharusnya demikian.
- (iii) Orang yang lalai, menurut pendapatnya, tidak pantas dihukum. Namun, mungkin ada alasan lain untuk membebaskan tanggung jawab.

Ada yang berpendapat bahwa karena polisi dan pihak kejaksaan tidak mampu mengatasi kejahatan yang disengaja dan ceroboh, maka kelalaian tidak boleh menjadi dasar pertanggungjawaban, setidaknya sampai pihak berwenang tersebut diberi lebih banyak sumber daya.

Banyak pelanggaran dapat dilakukan dengan sengaja atau ceroboh tetapi tidak karena kelalaian. Semakin luas cakupan kecerobohnya, semakin kecil pula alasan untuk melakukan kelalaian. Ketika Caldwell, di atas, dan Lawrence [1982] AC 510 memperluas tanggung jawab menjadi bagian dari wilayah yang sebelumnya tercakup dalam kelalaian, kritik akademis berfokus pada perluasan ini. Argumen Lord Diplock dalam Caldwell adalah bahwa orang yang bertindak tanpa berpikir sama tercelanya dengan seseorang yang memikirkan risiko tetapi terus maju. Dalam masyarakat modern, ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk menghukum mereka yang ceroboh, namun untuk menentukan bahwa mereka sama bersalahnya dengan mereka yang menyatakan risiko tersebut bukanlah penilaian yang adil terhadap berbagai kondisi pikiran, meskipun orang yang berakal sehat mungkin tidak setuju. Caldwell 'diberangkatkan' oleh House of Lords di G [2004] 1 AC 1034.

Ada jenis pembunuhan yang disebut pembunuhan karena kelalaian berat. Ini adalah salah satu dari dua pelanggaran kelalaian yang umum, meskipun juri harus berpendapat bahwa terdakwa tidak hanya lalai tetapi sangat lalai: Besar [1939] 1 Semua ER 753 (CCA). Otoritas utamanya adalah *Andrews v DPP* [1937] AC 576 dan sekarang menjadi *Adomako* [1995] 1 AC 171. Terminologi dalam kasus seperti *Andrews*, di mana House of Lords menyebut perilaku 'sembrono' sebagai sinonim untuk perilaku yang sangat lalai, adalah tidak tepat dan tidak pasti, namun penekanannya diberikan pada kecerobohan yang kasar. Kelalaian hukum perdata saja tidaklah cukup. Lihat Bab 12 untuk jenis pembunuhan tidak berencana ini. Perlu dicatat bahwa tidak ada kejahatan yang menimbulkan kerugian, bahkan kerugian yang serius, dengan cara yang sangat lalai.

Pembelaan hukum umum yang kedua atas kelalaian adalah gangguan publik. Pengusaha bertanggung jawab atas perbuatan pekerjanya yang menimbulkan keresahan masyarakat. Mereka tidak perlu mengetahui tindakan-tindakan itu: cukuplah mereka menyadarinya secara wajar. House of Lords di *Rimmington* [2006] 1 AC 459 memutuskan bahwa definisi ini berlaku setelah G. Dengan kata lain *mens rea* kelalaian tetap bertahan dari kebangkitan kecerobohan subjektif.

Berdasarkan undang-undang terdapat pelanggaran dimana terdakwa bersalah jika dia secara tidak sengaja mengambil risiko. Salah satu kejahatan tersebut adalah menjual senjata api kepada seseorang yang terdakwa mempunyai alasan kuat untuk percaya bahwa dia sedang mabuk. Oleh karena itu, jika seharusnya terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sedang mabuk, maka ia bersalah.

Pelanggaran kelalaian yang paling umum adalah mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian atau tanpa pertimbangan yang wajar bagi pengguna jalan lain (pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas Jalan Tahun 1988 digantikan dengan pasal 2 Undang-undang Lalu Lintas Jalan tahun 1991). Hal ini berbeda dengan pelanggaran sebelumnya yaitu mengemudi secara sembrono ('sembrono' menurut definisi Caldwell) di mana terdakwa bersalah meskipun risiko kerugiannya tidak serius. Pelanggaran serupa menyebabkan kematian karena mengemudi secara ceroboh dan tidak hati-hati, bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Tahun 1988, yang disisipkan dalam Undang-Undang Keselamatan Jalan Tahun 2006, pasal 20 (tidak berlaku pada saat penulisan artikel ini). Delik bigami diperlakukan sebagai delik

kelalaian karena tersangka fanatik yang melakukan kesalahan sehingga perkawinannya terdahulu dibatalkan atau dibubarkan, mempunyai pembelaan hanya jika kesalahan itu didasarkan pada alasan yang masuk akal.

Apabila pelanggarannya merupakan kelalaian, Parlemen dapat memberikan pembelaan khusus. Ilustrasi utamanya adalah hubungan seksual yang melanggar hukum dengan orang yang cacat mental, bertentangan dengan pasal 7(1) Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 yang sekarang sudah dicabut. Oleh pasal 7(2):

[Seorang] pria tidak bersalah atas pelanggaran berdasarkan bagian ini, jika dia tidak tahu dan tidak punya alasan untuk mencurigainya cacat. Pembelaannya adalah 'tidak ada kelalaian'. Jika terdakwa sendiri tidak mengetahui dan orang yang mempunyai ciri-ciri termasuk mental tidak mengetahui bahwa perempuan itu cacat, maka ia mempunyai pembelaan. Oleh karena itu, pengujian ini bukanlah pengujian yang murni obyektif, seperti dapat dilihat dari kata-kata pada pasal 7(2).

Kata-kata pembelaan mendefinisikan apa yang harus ditunjukkan. Undang-Undang Keamanan Pangan tahun 1990, pasal 21(2), memberikan pembelaan kepada terdakwa jika ia dapat membuktikan uji tuntas (yaitu tidak ada kelalaian) dan bahwa cacat tersebut disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak ketiga seperti produsen. Trade Descriptions Act 1968, pasal 24(1)(b), memberikan pembelaan ketika 'dia melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan semua uji tuntas untuk menghindari dilakukannya' salah satu dari beberapa pelanggaran tanggung jawab ketat. Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba tahun 1971, pasal 28(2), memberikan pembelaan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa 'dia tidak mengetahui atau mencurigai atau mempunyai alasan untuk mencurigai adanya fakta yang dituduhkan oleh jaksa', bukti fakta yang diperlukan untuk keyakinan. House of Lords memutuskan Lambert [2002] 2 AC 545 yaitu 28(2) hanya mengenakan beban pembuktian pada terdakwa. Hal ini dilakukan dengan mengandalkan asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 6(2) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Namun, tidak semua ketentuan reverse onus kini dapat ditafsirkan dengan cara yang sama. Lihat Bab 1 untuk rincian lebih lanjut. Mungkin juga ada pembelaan setidaknya terhadap kelalaian mengemudi ketika terdakwa mengandalkan instruksi dari orang lain yang bersalah dalam menyuruh pengemudi untuk melanjutkan. Dalam Thornton v Mitchell [1940] 1 All ER 339 seorang sopir bus dibebaskan dari tuduhan mengemudi sembarangan ketika dia membalikkan busnya melewati pejalan kaki, dengan mengandalkan sinyal dari kondektur. Martin Wasik 'A learner's ceroboh Driving' [1982] Crim LR 411 berpendapat bahwa hal yang sama berlaku untuk pelajar yang mematuhi perintah instruktur.

Reformasi. Komisi Hukum Pelanggaran Kerusakan Properti, Laporan No. 29, 1970, 44, menyatakan bahwa 'di bidang kejahatan berat . . . unsur kesengajaan, pengetahuan atau kecerobohan selalu diperlukan sebagai dasar pertanggungjawaban. Kecenderungannya adalah untuk memperluas dasar ini ke cakupan pelanggaran yang lebih luas dan membatasi area pelanggaran yang unsur mentalnya lebih rendah [misalnya. kelalaian] diperlukan.' Komisi Hukum bersimpati dengan pandangan ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan-badan reformasi hukum selama 40 tahun terakhir adalah mendorong pendekatan subjektif dalam

kaitannya dengan pelanggaran berat. Rancangan KUHP, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989 melanjutkan proses ini. Kecuali jika Parlemen menentukan secara berbeda, kecerobohan dalam keadaan subjektifnya akan menjadi kondisi mental yang paling rendah kesalahannya dalam pelanggaran Kode Etik. Namun Parlemen memilih mengambil jalan lain. Pada tahun 2003, tindakan ini menjadikan pemerkosaan sebagai pelanggaran kelalaian. Karena pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat serius, terbuka peluang untuk menjadikan pelanggaran lebih lanjut menjadi kelalaian, bahkan pelanggaran yang sangat serius.

3.6 BEBERAPA MASALAH MENS REA

Bagian ini menyatukan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan unsur mental yang dapat dipetik dari bab ini dan Bab 2.

- (a) Tidak ada terminologi yang pasti. Apakah kelalaian besar sama dengan kecerobohan?
- (b) Batasan konsep mungkin sangat tidak tepat. Apakah niat miring itu bagian dari niat atau kejelian? Dan apa sebenarnya maksud miring itu? Sungguh menakutkan bahwa gagasan mendasar seperti niat tidak dapat didefinisikan setelah ratusan tahun.
- (c) Istilah dapat mencakup lebih dari satu kondisi mental. Kecerobohan Caldwell dulunya adalah contoh nyata yang mencakup baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan apakah kebutaan yang disengaja Caldwell merupakan kecerobohan?
- (d) Istilah-istilah yang lebih lama mungkin memerlukan definisi yang berbeda untuk setiap pelanggaran. Mungkin tidak ada definisi pasti dalam hukum pidana. Stephen J dalam Tolson (1889) 23 QBD 168 at 187, mengatakan: 'Kebencian mempunyai arti yang satu dalam kaitannya dengan pembunuhan, hal yang lain dalam kaitannya dengan Tindakan Kejahatan yang Berbahaya, dan yang ketiga dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik, dan juga penipuan dan kelalaian.'
- (e) Beberapa istilah mungkin 'dibengkokkan' untuk menangkap orang-orang yang seharusnya ditangkap tetapi tidak termasuk dalam cakupan konsep yang lazim. Kelompok orang yang paling jelas cocok dengan hukum ini adalah teroris.
- (f) Apabila terdakwa mempunyai pembelaan seperti pencegahan kejahatan, sulit untuk menggambarkan keadaan pikirannya sebagai mens rea.

Rancangan KUHP, Law Com. 177 Tahun 1989 berupaya menghindari beberapa kesulitan tersebut dengan cara penggunaan yang konsisten dan kepastian makna. Mens rea, disebut unsur kesalahan, terdiri dari kesengajaan, pengetahuan, dan kecerobohan, kecuali jika ditentukan lain oleh DPR. Berdasarkan pasal 19(1) '[A]n tuduhan dalam surat dakwaan atau informasi mengenai pengetahuan atau niat mencakup tuduhan kecerobohan.' Unsur kecerobohan dipenuhi dengan niat atau pengetahuan (cl 19(2)). Elemen kesalahan minimum adalah kecerobohan (cl 20(1)).

Kebencian yang ditransfer

Dalam Latimer (1886) 17 QBD 359 terdakwa bertengkar dengan seseorang di sebuah pub. Dia melepas ikat pinggangnya dan mengarahkan pukulan ke arahnya. Pukulan tersebut mengenai korban yang berdiri di dekatnya. Dia terluka parah. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melukai korban secara tidak sah dan jahat. Dia memiliki mens rea

dan *actus reus* atas kejahatan tersebut. Ia tidak menduga apa yang terjadi dan dalam hal ini, kejadian tersebut merupakan suatu kebetulan, namun hukum menetapkan ia bersalah berdasarkan doktrin kejahatan yang ditransfer. Kondisi mentalnya ('kebencian') ditransfer. Doktrin ini tidak terbatas pada kejahatan karena niat jahat atau kesengajaan, namun meluas hingga pengalihan elemen mental, betapapun definisinya. Dalam *McBride v Turnock* [1964] Crim LR 456 terdakwa memukul seseorang tetapi memukul seorang polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Dia bersalah atas pelanggaran penyerangan terhadap seorang polisi dalam pelaksanaan tugasnya, suatu tindakan yang sangat buruk, meskipun 'kebenciannya' hanya berupa penyerangan biasa. Kedua tindak pidana tersebut mempunyai *mens rea* yang sama karena terdakwa bersalah atas tindak pidana berat meskipun ia tidak mengetahui bahwa yang diserang adalah seorang polisi. Asas yang sama juga berlaku terhadap tindak pidana penyerangan terhadap pegawai pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula jika di *Latimer* ada seorang ayah yang membidik putrinya dengan tangannya yang bermaksud memberikan hukuman yang wajar dan tangannya mengenai temannya yang berdiri di sampingnya, pembelaannya akan dialihkan.

Agar apa yang disebut doktrin dapat diterapkan, *mens rea* dan *actus reus* harus bertepatan (sesuai dengan poin dalam *McBride v Turnock*, di atas). Dalam *Pembliton* (1876) LR 2 CCR 119, terdakwa berkelahi di luar pub. Dia memecahkan jendela dengan batu. Dia ditahan oleh Pengadilan untuk Kasus Mahkota yang Dicapadangkan untuk tidak bersalah atas kerusakan yang berbahaya, yang merupakan cikal bakal kerusakan pidana. Terdakwa tidak mempunyai *mens rea* dalam tindak pidana tersebut. Seseorang juga dapat mendakwa percobaan penganiayaan fisik yang nyata atau berat, yang mencakup apa yang dimaksudkan terdakwa untuk dilakukan lebih baik daripada tindak pidana, yang merupakan akibat yang tidak disengaja dari tindakannya. Poin dasarnya tetap sama, bahwa *mens rea* tidak dapat ditransfer melalui kejahatan.

Pembatasan lain telah dinyatakan dengan baik oleh (ed. D. Ormerod) Smith dan Hogan, *Criminal Law*, edisi ke-12 (OUP, 2008) 127 (catatan kaki dihilangkan): Niat yang dialihkan harus bersifat *mens rea*, baik kesengajaan maupun kecerobohan. Jika D [terdakwa] menembak X dengan maksud membunuh karena X melakukan serangan mematikan terhadapnya dan ini adalah satu-satunya cara agar dia dapat menyelamatkan nyawanya, dia tidak bermaksud melakukan *actus reus* karena membunuh dalam keadaan seperti ini dibenarkan. Namun, jika D meleset dari X dan secara tidak sengaja membunuh V, orang yang tidak bersalah, hal tersebut menyebabkan *actus reus* untuk mengirim; hasil yang diinginkannya adalah hasil yang sah menurut hukum.

Harus disadari bahwa dalam banyak kasus seseorang tidak perlu mengacu pada doktrin ini. Seseorang dinyatakan bersalah karena secara sembrono merusak harta benda jika ia melempar batu ke jendela pub milik korban dan batu tersebut menembus jendela yang terbuka, serta merusak optik milik korban. Jika batu itu kebetulan memecahkan vas berharga yang ditinggalkan oleh seorang pembuat tembikar yang kelaparan sebagai pembayaran makanan, seseorang tetap bersalah atas kerugian pidana karena harta benda milik orang lain telah dihancurkan atau dirusak. Dalam pembunuhan seseorang bersalah jika ia membunuh

seorang manusia. Jika seseorang berniat membunuh seseorang dan secara tidak sengaja membunuh orang lain, maka ia bersalah atas pembunuhan. Kebencian yang dipikirkan sebelumnya mencakup pembunuhan korban secara sengaja. Tidak peduli siapa korbannya, asalkan korban masih ada pada saat penyerangan. Misalnya, penikaman terhadap pacar terdakwa menyebabkan meninggalnya seorang bayi yang lahir hidup prematur dalam *Acuan Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994) [1998] AC 245 (HL)*. Terdakwa tidak bersalah atas pembunuhan anak tersebut. Janin dianggap bukan bagian dari ibu. Lord Mustill berkata:

Terdakwa bermaksud melakukan dan memang langsung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap ibu. Dia tidak melakukan kekerasan apa pun terhadap janin yang bukan merupakan manusia, baik pada saat itu maupun di kemudian hari, dan tidak bermaksud menyakiti janin tersebut atau menjadi pribadi manusia. Saya tidak akan memaksakan gagasan tentang kebencian yang ditransfer dengan mencoba membuatnya sesuai dengan kasus ini.

Kebencian tidak boleh ditransfer dari ibu ke janin dan kemudian dari janin ke anak (yang akan menjadi seseorang untuk tujuan hukum pembunuhan hanya pada suatu waktu di masa depan). Tampaknya aneh bahwa tidak ada kebencian yang dapat membuat terdakwa bersalah atas pembunuhan, suatu pelanggaran pembunuhan, namun ia dihukum karena pembunuhan. Pendekatan alternatif adalah dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai 'niat umum' sehubungan dengan harta benda dan orangnya. Oleh karena itu, penggunaan doktrin ini jarang dilakukan. Terlebih lagi, jika terdakwa membunuh seorang korban, tidak menjadi masalah dengan cara apa dia membunuhnya. Jika mereka berada di gedung opera dan terdakwa menembak korban dengan maksud untuk membunuhnya tetapi peluru mengenai lampu gantung, yang jatuh menimpa korban dan membunuhnya, maka terdakwa bersalah.

Kebencian yang ditransfer dibatasi dalam pelanggaran partisipatif. Apabila perbuatan pelaku utama melampaui rencana yang telah disepakati, maka pembantu tidak bersalah atas tindak pidana yang terjadi. Dalam *Leahy [1985] Crim LR 99*, terdakwa menyuruh pelaku utama untuk 'kaca' X; kepala sekolah dengan sengaja memberikan kaca pada Y. Terdakwa tidak bersalah karena melakukan konseling untuk melukai tubuh yang menyedihkan. Hasilnya sesuai dengan kasus kuno *Saunders dan Archer (1573) 75 ER 706*. Atas saran 'aksesori', kepala sekolah memberikan istrinya sebuah apel beracun dengan maksud untuk membunuhnya. Dia berdiri sementara istrinya memberikan apel itu kepada anak mereka, yang memakannya dan meninggal. Diduga bahwa 'aksesori' tersebut tidak bersalah karena menjadi pelaku sekunder dalam pembunuhan tersebut. Ada perubahan yang disengaja dari rencana yang telah disepakati. Kasus ini akan menjadi salah satu kejahatan yang ditransfer dengan aksesori yang sekarang bersalah jika pembunuhan anak tersebut tidak disengaja dalam arti bahwa kepala sekolah tidak dapat mencegahnya.

Rancangan KUHP Komisi Hukum (UU No. 177, 1989) mengusulkan untuk menahan kebencian yang dialihkan karena 'percobaan dakwaan mungkin tidak mungkin dilakukan (bila tidak diketahui hingga persidangan bahwa terdakwa mengaku memiliki X [korban yang dituju] dan bukan Y [korban sebenarnya] dalam kontemplasi); atau tidak pantas (karena tidak menggambarkan kerugian yang ditimbulkan secara memadai untuk tujuan pelabelan atau

hukuman). Selain itu, kecerobohan sehubungan dengan Y mungkin tidak cukup untuk menetapkan pelanggaran atau tidak dapat dibuktikan' (paragraf 8.57). Pasal 24(1) RUU KUHP mengatur:

Dalam menentukan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, niatnya untuk menimbulkan, atau kecerobohannya apakah ia menimbulkan, suatu akibat terhadap orang atau benda yang dapat menjadi korban atau pokok tindak pidana itu diperlakukan sebagai suatu niat untuk menyebabkan atau, tergantung kasusnya, kecerobohan apakah ia menyebabkan akibat yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu yang dipengaruhi oleh tindakannya.

Ayat ini diulangi dalam RUU Hukum Pidana yang dilampirkan pada Laporan Komisi Hukum No. 218, Undang-undang KUHP – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, 1993, dengan penggantian 'kecerobohan' dengan 'kesadaran akan suatu risiko': cl 32(1). Perubahan tersebut karena 'kecerobohan' dalam RUU tersebut mempunyai arti tertentu, namun RUU tersebut berlaku untuk kata-kata mens rea lainnya. Pasal 24(2) rancangan KUHP mengkodifikasikan poin yang dikemukakan oleh Smith dan Hogan yang dikutip di atas:

Pembelaan apa pun yang mungkin diandalkan oleh seseorang sehubungan dengan seseorang atau sesuatu yang berada dalam pertimbangannya, terbuka baginya atas tuduhan pelanggaran yang sama sehubungan dengan seseorang atau sesuatu yang tidak berada dalam pertimbangannya.

Ketentuan ini kini menjadi pasal 32(3) RUU KUHP.

Istilah yang dipilih oleh Komisi Hukum untuk doktrin tersebut adalah 'transfer kesalahan', sedangkan 'kesalahan' adalah istilah Komisi Hukum untuk mens rea atau unsur mental. Terminologi ini lebih baik dipilih daripada terminologi yang biasa digunakan saat ini mengenai kejahatan yang ditransfer karena hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak terbatas pada kejahatan yang unsur mentalnya adalah kedengkian. Lord Mustill dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1994), di atas, menyebut doktrin transfer kebencian sebagai sebuah fiksi dan mengatakan bahwa doktrin tersebut memiliki judul yang menyesatkan, namun 'sesuatu yang terlalu tertanam kuat untuk dibuang'. Namun demikian, harus dikatakan bahwa Latimer, di atas, mencerminkan akal sehat. Tentunya kita tidak ingin terdakwa dalam kasus tersebut tidak bersalah. Jika terdakwa membunuh atau melukai manusia, mengapa yang dituju bukanlah manusia yang dirugikan tersebut? Ada anggapan bahwa 'kesalahan yang ditransfer' sebenarnya bisa dengan mudah digantikan 'kebencian yang ditransfer'. Mungkin nama doktrin yang lebih modern akan membuat kebencian yang ditransfer lebih dapat diterima oleh Lord Mustill.

3.7 KESEJAMANAN

Pertimbangkan situasi fakta ini. Terdakwa memutuskan untuk menyingkirkan pasangannya. Sebelum dia dapat membunuhnya dengan sengaja, dia secara tidak sengaja menabraknya dan membunuhnya. Dia memiliki mens rea untuk pembunuhan dan dialah yang menyebabkan kematiannya. Namun, mens rea dan actus reus tidak bersamaan dan tidak adil untuk menghukumnya atas pembunuhan. Namun, ada situasi di mana tidak adil untuk

menghukum. Prinsipnya adalah prinsip kontemporer atau, sebagaimana sebagian orang Amerika menyebutnya, kesatuan *actus reus* dan *mens rea*. Contoh lainnya adalah kejahatan perampokan. Salah satu bentuk pelanggaran ini adalah memasuki suatu bangunan atau bagiannya dengan maksud untuk melakukan salah satu dari empat kejahatan. Jika terdakwa melakukan *actus reus* dan kemudian memutuskan untuk mencuri dll, dia tidak bersalah atas perampokan jenis ini. Dapat dikatakan bahwa prinsip tersebut merupakan persyaratan yang fleksibel atau jumlah pengecualian telah meningkat.

- (a) Keberanian Belanda berkuasa. Terdakwa yang memutuskan untuk melakukan kejahatan dan sampai dalam keadaan mabuk untuk melakukannya, bersalah atas kejahatan tersebut meskipun pada saat melakukan kejahatan itu dia dalam keadaan mabuk berat sehingga dia tidak punya pikiran, dan tanpa 'laki-laki' seseorang tidak dapat memiliki *mens rea*. House of Lords di Jaksa Agung untuk Irlandia Utara v Gallagher [1963] AC 349 memutuskan demikian.
- (b) Berdasarkan DPP v Majewski [1977] AC 443 seseorang bersalah atas kejahatan melakukan sesuatu secara sembrono jika melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. House of Lords memutuskan berdasarkan kebijakan bahwa mabuk secara sembarangan akan menambah kecerobohan atas kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Setelah MPC v Caldwell di atas, pendekatan Majewski tidak diperlukan karena tergugat dianggap tidak menyadari risiko yang mungkin sudah diketahui oleh orang awam pada saat *actus reus*. Dalam pandangan ini unsur mental dan *actus reus* bertepatan. Namun, penggunaan kata 'dianggap' seharusnya mengingatkan kita akan fakta bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi.
- (c) Keadaan yang berkelanjutan. Dalam Fagan v MPC [1969] 1 QB 439, terdakwa secara tidak sengaja menabrak sepatu petugas polisi. Petugas polisi menunjukkan apa yang telah dilakukan terdakwa. Terdakwa sengaja meninggalkan kemudi di atas kaki sebentar. Ada berbagai kutukan. Terdakwa dihukum karena baterai. Fagan menunjukkan kekuatan sepatu polisi – polisi tersebut hanya mengalami dua memar di jari kakinya setelah Mini diparkir di kakinya – dan cara pengadilan dapat menerapkan hukum yang lebih luas untuk menangkap terdakwa. Masalahnya adalah aki dianggap (pada saat itu) sebagai pelanggaran yang tidak dapat dilakukan jika kelalaian, dan meninggalkan mobil dengan berjalan kaki tampak seperti kelalaian. Pengadilan memutuskan bahwa *actus reus* of battery dapat menjadi perbuatan yang berkelanjutan. Tindakan tersebut terus berlanjut hingga terdakwa menyadari perbuatannya dan memutuskan untuk tidak pergi. Terdakwa tetap melakukan kekerasan dengan tidak mengeluarkan mobilnya, dan ia melakukannya dengan sengaja. Dengan cara ini *actus reus* dan *mens rea* terjadi bersamaan. Oleh karena itu, unsur mental tidak diperlukan untuk menyertai *actus reus* sepanjang rangkaian peristiwa. Kekontemporan untuk sesaat saja sudah cukup. Selain itu, karena *actus reus* dianggap terus berlanjut, tidak sulit untuk menyatakan bahwa keduanya saling tumpang tindih pada suatu saat. Jika Fagan diterima sebagai orang yang menetapkan

aturan hukum, maka terdapat banyak masalah terkait luasnya aturan tersebut. D. Husak, *Filsafat Hukum Pidana* (Rowman & Littlefield, 1987) 178, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Misalkan terdakwa memproduksi mobil dan dengan sengaja mengambil jalan pintas dengan memasang rem darurat yang rusak. Setahun kemudian dia melihat salah satu mobilnya diparkir di atas bukit. Karena rem daruratnya rusak, maka rem tersebut menggelinding ke belakang dan terhenti di kaki polisi. Terdakwa gagal membantu polisi selama beberapa saat, menikmati penderitaannya. Di sini terdakwa memulai rantai sebab akibat yang berpuncak pada kerugian. Apakah rangkaian tersebut 'dianggap' sebagai 'babak tunggal' yang sebanding dengan Fagan? Tidak ada fakta mengenai bagaimana pertanyaan ini harus dijawab. [Ejaan diinggriskan dan catatan kaki dihilangkan.]

Fagan dikatakan telah diputuskan berdasarkan faktanya sendiri menurut House of Lords di Miller [1983] 2 AC 161, yang setara dengan mengatakan bahwa Fagan tidak boleh diikuti. Fagan sekarang berada dalam (d) di bawah, menyebabkan bahaya dan sengaja tidak memperbaikinya. Fagan, kata Lords, harus dilihat sebagai kasus di mana terdakwa mengadopsi perilaku sebelumnya. Disarankan agar rasio Fagan sekarang digunakan hanya jika *actus reus* bersifat berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan 'kewajiban', pengadilan dapat menghindari pertanyaan apakah suatu *actus reus* merupakan suatu tindakan yang berkelanjutan atau apakah tindakan tersebut sudah selesai pada saat terdapat *mens rea*.

- (d) Prinsip Miller. Di Miller, di atas, House of Lords memutuskan bahwa seseorang yang tanpa disadari menciptakan situasi berbahaya dan kemudian menyadari apa yang telah dilakukannya, adalah bersalah jika dia gagal menghindari konsekuensi yang dilarang. Kasus ini dibahas di atas dan di Bab 2. Kasus ini bisa saja dianggap sebagai salah satu pengecualian terhadap kontemporer, namun sebaliknya ditangani sebagai kasus di mana *common law* membebaskan tanggung jawab atas kelalaian. Terdakwa mempunyai kewajiban untuk bertindak. Asas Miller dipertahankan dalam rancangan KUHP, pasal 23.
- (e) Prinsip yang ditetapkan dalam *Thabo Meli v R* [1954] 1 WLR 228. Situasi ini kebalikan dari Fagan. Dalam *Thabo Meli*, *mens rea* mendahului *actus reus*. Di Fagan, permulaan *actus reus* mendahului *mens rea*. Fakta *Thabo Meli*, korban dipukuli dan dibiarkan mati. Mayatnya dilempar ke tebing, dan dia meninggal karena terpapar. Dewan Penasihat menguatkan hukuman para pemohon atas pembunuhan atas dasar bahwa rangkaian peristiwa merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan menjadi tindakan-tindakan yang terpisah: 'Adalah dasar penilaian yang terlalu halus untuk mengatakan hal itu, karena mereka berada dalam kesalahpahaman di satu tahap dan mengira bahwa tujuan bersalahnya telah tercapai sebelum sebenarnya tercapai, oleh karena itu mereka menghindari hukuman hukum.' Meskipun rencana para terdakwa untuk membunuh telah selesai pada saat mereka percaya bahwa korban telah melakukannya. mati dan mendorong apa yang mereka yakini sebagai mayat ke atas tebing adalah bagian dari rencana untuk membuang mayat tersebut, keseluruhan

rangkaian dianggap sebagai satu tindakan. Para pemohon bisa saja dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, namun dengan menyatakan seperti yang dilakukan Dewan Penasihat, mereka bersalah atas pembunuhan.

Thabo Meli disusul di Gereja [1966] 1 QB 59 oleh Pengadilan Banding Pidana. Tidak ada rencana untuk membunuh tetapi terdakwa mengira dia telah membunuh korbannya. Dia memasukkannya ke sungai, di mana dia tenggelam. Hukuman atas pembunuhan tidak disengaja ditegakkan. Otoritas terbaru adalah Le Brun [1992] QB 61, yang menegaskan bahwa prinsip dalam Thabo Meli v R diterapkan pada pembunuhan berencana (di mana tidak ada rencana untuk membunuh) sama seperti yang diterapkan pada pembunuhan (di mana memang ada).

Le Brun [1992] QB 61

Terdakwa memukul bagian dagu korbannya. Dia jatuh. Dalam upaya menyembunyikan baterainya, dia memindahkannya. Kepalanya secara tidak sengaja membentur trotoar. Tengkoraknya retak dan dia meninggal. Lord Lane CJ di Pengadilan Banding memutuskan bahwa penerapan kekerasan yang melanggar hukum dan tindakan yang menyebabkan kematian adalah bagian dari transaksi yang sama. Tidak masalah jika terdapat jarak waktu yang cukup lama antara kedua peristiwa tersebut. Posisi ini bahkan lebih pasti jika tindakan terdakwa selanjutnya dirancang untuk menyembunyikan serangan sebelumnya dan rantai sebab-akibat (lihat Bab 2) tidak terputus.

Dampaknya akan berbeda jika orang yang lewat memutuskan rantai sebab-akibat dengan menjatuhkan kepala korban yang masih hidup ke trotoar. Mungkin sudah menjadi hukum bahwa terdakwa tidak akan bersalah jika dia mencoba menyeret korban ke rumah sakit ketika kepalanya terbentur. Pengadilan Banding dalam Referensi Jaksa Agung (No. 4 Tahun 1980) [1981] 1 WLR 705 sebelumnya sempat meragukan apakah pengadilan di Gereja benar jika memasukkan Thabo Meli ke dalam pembunuhan berencana. Dalam kasus tersebut, terdakwa memukul korban. Dia terjatuh beberapa langkah dan kepalanya terbentur. Terdakwa menyeretnya ke atas dengan tali, mengeringkan darahnya, dan membedahnya. Masalahnya adalah tidak mungkin untuk menyatakan tindakan mana yang menyebabkan kematian. Jika tidak dapat dipastikan tindakan mana yang menyebabkan kematian, maka tidak mungkin untuk mengetahui apakah terdakwa mempunyai mens rea pada saat kematian. Berdasarkan fakta, terdakwa telah mens rea untuk melakukan pembunuhan berencana baik (secara normal) pada saat menjatuhkan korban ke bawah dan (mengikuti Thabo Meli) pada saat ia menggorok lehernya. Ada serangkaian tindakan yang dapat dianggap sebagai satu transaksi; terdakwa telah mens rea pada suatu saat dalam transaksi tersebut; oleh karena itu dia bersalah. Semua kasus mengenai topik ini masih berkaitan dengan pembunuhan namun diperkirakan prinsipnya tidak begitu dibatasi.

Aturan dalam otomatisme. Sedangkan dalam mabuk-mabukan terdapat asas dalam pembelaan otomatis bahwa terdakwa tidak akan mendapat pembelaan jika ia membawa keadaan tersebut. Seolah-olah aturan kontemporer berlaku pada pembelaan ini. Prinsip ini ditetapkan dalam Quick [1973] QB 910, dengan ketentuan bahwa kondisinya harus dapat diperkirakan secara wajar. Jika dapat diperkirakan bahwa terdakwa akan jatuh ke dalam

keadaan otomatisme karena tidak meminum obat yang diresepkan atau tidak makan secara teratur, maka ia tidak dapat melakukan pembelaan tersebut. Di *Bailey* [1983] 2 All ER 503, Pengadilan Tinggi mengundurkan diri dari posisinya di *Quick*. Terdakwa tidak bersalah jika terdakwa sendiri tidak melihat akibat dari kelambanannya, bahkan jika orang yang berakal sehat akan melakukannya. *Quick* dan *Bailey* harus dibandingkan dengan *Kay v Butterworth* (1945) 173 LT 191, di mana masalahnya dapat dihindari. Terdakwa tertidur saat mengemudi dan menabrak tentara. Dia dinyatakan bersalah karena mengemudi dengan ceroboh, bukan karena menabrak tentara ketika dia sedang tidur tetapi karena tidak berhenti untuk memulihkan kelelahan setelah bekerja di pabrik amunisi ketika dia masih terjaga. Kasus ini merupakan kewenangan yang berguna namun berguna bagi jaksa hanya jika tindakan tersebut dapat digambarkan sebagai tindakan yang berkelanjutan, seperti halnya mengemudi.

Terdakwa bersalah apabila dengan *mens rea* ia menetapkan suatu rangkaian peristiwa yang akan menimbulkan *actus reus*, meskipun ia tidak lagi *mens rea* pada saat *actus reus* itu terjadi.

Jika pengecualian ini tidak berlaku, maka harus ada kekinian. Dalam *Edwards v Ddin* [1976] 1 WLR 942, terdakwa meminta petugas bengkel untuk mengisi tangkinya. Dia bermaksud membayar. Ketika bensin sudah ada di dalam tangki, dia dengan tidak jujur pergi tanpa membayar. Pada saat itu, berdasarkan hukum perdata, bensin adalah miliknya. Ia tidak mengambil alih harta milik orang lain pada saat ia mempunyai *mens rea* karena harta itu miliknya. Oleh karena itu, dia tidak bersalah atas pencurian tersebut. Tidak ada *actus reus* pada saat *mens rea*. (Parlemen turun tangan untuk membuat pelanggaran untuk menutupi situasi ini. Pelanggaran tersebut disebut kabur tanpa pembayaran dalam pasal 3 Undang-Undang Pencurian tahun 1978.)

Ringkasan

Ini adalah bab kedua yang membahas 'bahan dasar' hukum pidana. Kali ini konsentrasinya bukan pada sisi fisik melainkan pada sisi mental. Bagaimana keadaan pikiran terdakwa ketika dia melakukan *actus reus*? Setiap kejahatan terdiri dari *actus reus* dan biasanya *mens rea*, namun *actus reus* tidak hanya berbeda dari satu pelanggaran ke pelanggaran lainnya, tetapi juga *mens rea*. Misalnya, *mens rea* pembunuhan adalah niat untuk membunuh atau niat untuk melukai tubuh secara menyedihkan, namun *mens rea* pencurian adalah ketidakjujuran dan niat untuk merampas secara permanen. Siswa harus mengetahui *actus reus* dan *mens rea* atas kejahatan yang diajarkan di mata kuliahnya. Pembahasan kemudian dikonsentrasikan pada kata-kata *mens rea* yang utama dalam hukum pidana: kesengajaan, kecerobohan, pengetahuan, kesengajaan dan kelalaian, meskipun sehubungan dengan yang terakhir ada perdebatan apakah kurangnya keadaan pikiran ('Saya tidak') 'I think') dapat dianggap sebagai keadaan pikiran, *mens rea*. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang berbagai isu seputar *mens rea*, termasuk perlunya persamaan *actus reus* dan *mens rea* serta doktrin yang biasa dikenal dengan transfer niat jahat.

- Definisi *mens rea*: *Mens rea* dapat didefinisikan sebagai 'keadaan mental yang diperlukan oleh definisi pelanggaran untuk menyertai tindakan yang menghasilkan atau mengancam bahaya' (S. H. Kadish).

- Contoh mens rea: Mens rea pembunuhan, juga dikenal sebagai niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya, sebagian terdiri dari niat untuk membunuh atau melakukan penganiayaan fisik yang menyedihkan. Dalam pencurian, unsur mentalnya adalah 'ketidakjujuran' dan 'niat untuk merampas selamanya'. Mens rea, seperti actus reus, berbeda dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya.
- Motif: Secara umum motif terdakwa tidak relevan dalam hukum pidana. Misalnya, tidak masalah jika saya membunuh Anda untuk mendapatkan uang Anda atau kekasih Anda atau jika saya melakukannya untuk menyelamatkan Anda dari kehidupan yang penuh dengan kesakitan. Akan tetapi, beberapa pelanggaran memang menjadikan motifnya relevan dalam arti bahwa pelanggaran tersebut didefinisikan sedemikian rupa sehingga para pengadil harus mempertimbangkan alasan mengapa terdakwa berperilaku seperti itu. Sebuah ilustrasi adalah pemerasan. Jika terdakwa yakin bahwa ia dibenarkan melakukan tindakan seperti yang ia lakukan, tidak ada pelanggaran dan 'dijamin' mencakup motif terdakwa. Undang-undang modern terkadang menjadikan kejahatan menjadi lebih serius jika terdakwa bertindak karena motif tertentu, misalnya. kejahatan bermotif rasial.
- Niat: Definisi niat adalah salah satu definisi dasar dalam hukum pidana Inggris, sebagian karena beberapa pelanggaran mungkin dilakukan hanya dengan sengaja, namun yang lebih mendasar karena niat secara moral adalah keadaan pikiran terburuk yang dapat dilakukan seseorang: misalnya. pembunuhan lebih serius daripada pembunuhan tidak disengaja, bukan karena actus reus (yang sama saja), tetapi karena pembunuhan hanya dapat dilakukan jika terdakwa bermaksud membunuh atau melukai tubuh secara menyedihkan. Biasanya sangat mudah untuk memutuskan apakah terdakwa menginginkan konsekuensi tertentu atau tidak. Jika dia memutuskan untuk membunuh, jika maksud atau tujuannya adalah untuk membunuh, jika dia memutuskan untuk membunuh, dia bermaksud untuk membunuh. Keadaan pikiran ini terkadang dikenal sebagai 'niat langsung'. Jika terdakwa tidak memutuskan untuk membunuh tetapi memperkirakan kematian sebagai konsekuensi yang pasti (dan kematian sebenarnya sudah pasti terjadi), maka juri mungkin namun tidak perlu memutuskan bahwa terdakwa bermaksud membunuh. Oleh karena itu, fakta bahwa dia meramalkan kematian sebagai hal yang pasti tidak berarti bahwa dia bermaksud membunuh; itu berarti dia mungkin bermaksud membunuh, tapi pertanyaannya adalah fakta bagi juri. Lagi pula, undang-undang yang menyatakan bahwa juri mungkin menemukan niat mempunyai akibat wajar bahwa juri dapat memutuskan untuk tidak menemukan niat. Keadaan pikiran seperti ini sering disebut dengan 'niat miring'. Diperkirakan namun tidak ditentukan secara tegas bahwa definisi kesengajaan yang diberikan pada paragraf sebelumnya berlaku di seluruh hukum pidana. Komisi Hukum mengusulkan untuk mendefinisikan maksud yang mencakup maksud langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini, perkiraan terdakwa bahwa sesuatu pasti akan terjadi pasti merupakan kesengajaan, tidak seperti sekarang yang hanya sekedar bukti kesengajaan.

- Kecerobohan: Beberapa kejahatan seperti tindak pidana pengrusakan dapat dilakukan dengan sengaja dan ceroboh namun tidak sembarangan. Oleh karena itu, kecerobohan dibedakan dari kesengajaan dan kecerobohan. House of Lords di masa lalu kembali menetapkan satu definisi tentang kecerobohan (setidaknya sebagian besar) kejahatan. Jika seorang terdakwa meramalkan suatu hasil yang mungkin terjadi, dia dikatakan ceroboh. Pola pikir seperti ini sering disebut sebagai 'kecerobohan subjektif'. Selama dua puluh tahun atau lebih hingga tahun-tahun awal milenium ini, terdapat definisi kedua yang saling bersaing: apakah terdakwa tidak menghiraukan risiko yang nyata dan serius dari terjadinya suatu konsekuensi? Definisi ini, terkadang disebut 'kecerobohan obyektif', tidak menggantikan tes subjektif: beberapa kejahatan didefinisikan dalam istilah kecerobohan obyektif, dan beberapa kejahatan didefinisikan dalam istilah kecerobohan subjektif. Oleh karena itu, undang-undang yang berlaku saat ini menyatakan bahwa kecerobohan subjektif berlaku dalam semua kejahatan, kecuali jika Parlemen menetapkan sebaliknya.
- Secara sadar: Pengetahuan 'aktual' adalah ketika terdakwa mengetahui fakta bahwa sesuatu itu benar. Kadang-kadang hukum ini meluas hingga ke 'kebutaan yang disengaja': terdakwa menutup mata terhadap hal-hal yang sudah jelas. 'Pengetahuan yang konstruktif' adalah ketika orang yang berakal sehat mengetahui fakta-fakta tertentu namun terdakwa tidak mengetahuinya: terkadang hukum meluas sampai sejauh ini.
- Sengaja: Istilah ini biasanya berarti 'sengaja atau ceroboh'.
- Kelalaian: Hanya sedikit kejahatan serius yang dapat dilakukan secara sembarangan, kecuali pembunuhan berencana karena kelalaian besar. Kejahatan ringan seperti mengemudi sembarangan bisa saja dilakukan karena kelalaian. Yang dimaksud dengan kelalaian adalah bahwa terdakwa tidak memenuhi standar orang yang berakal sehat. Apakah seseorang harus dihukum karena melakukan kelalaian masih diperdebatkan, dan dengan beberapa pengecualian, Komisi Hukum berusaha untuk berpegang pada posisi bahwa tingkat minimum hukuman untuk pelanggaran serius adalah kecerobohan.
- Kebencian yang ditransfer: Jika seseorang menyerang seseorang namun menyerang orang lain, niatnya ('kebencian') untuk menyerang orang pertama 'dipindahkan' ke orang kedua. Demikian pula, serangan terhadap satu bagian properti dapat dialihkan ke properti lainnya. Akan tetapi, niat terhadap seseorang tidak dapat dialihkan terhadap harta benda atau sebaliknya.
- Kontemporanitas: Aturan umumnya adalah bahwa *actus reus* dan *mens rea* harus bertepatan pada titik waktu. Jika saya memutuskan untuk membunuh Anda dan kemudian berubah pikiran tetapi kemudian secara kebetulan saya membunuh Anda, mungkin dengan menabrak Anda, saya tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. *Mens rea* dan *actus reus* saya tidak terjadi secara bersamaan. Kadang-kadang undang-undang tidak hanya memperhatikan satu titik waktu saja, melainkan keseluruhan transaksi, yang mungkin terjadi dalam suatu periode. Misalnya, saya menyerang Anda

dan membiarkan Anda mati; Anda tidak mati tetapi Anda kemudian mati karena terpapar. Di sini, penyerangan dan kematian dipandang dalam hukum sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dan saya akan bersalah atas pembunuhan atau pembunuhan tidak disengaja tergantung pada mens rea saya.

BAB 4

TANGGUNG JAWAB YANG KETAT

Pendapat bahwa cedera dapat dianggap sebagai kejahatan hanya jika dilakukan dengan sengaja bukanlah gagasan yang bersifat sementara atau bersifat sementara. Hal ini bersifat universal dan persisten dalam sistem hukum yang matang seperti halnya keyakinan akan kebebasan kehendak manusia dan konsekuensinya adalah kemampuan dan kewajiban individu normal untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. (Mahkamah Agung AS, *Morissette v Amerika Serikat* (1952) 342 US 246, 250)

Dalam beberapa pelanggaran, penuntut tidak perlu membuktikan *mens rea* mengenai satu atau lebih unsur *actus reus*. Kejahatan-kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dengan pertanggungjawaban ketat. Oleh karena itu, meskipun *actus reus* harus selalu ada, tidak selalu harus ada unsur mental dalam kaitannya dengan setiap bagian dari *actus reus*. Misalnya, sebuah undang-undang melarang tukang daging menjual daging yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Jika ada yang melakukannya, pengadilan dapat menyatakan bahwa dia bersalah meskipun dia tidak mengetahui bahwa daging tersebut buruk. Maka tidak ada *mens rea*, pengetahuan, mengenai ketidaksesuaian. Namun kiranya tukang daging harus mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah 'menjual' dan yang dijual adalah daging. Oleh karena itu, pelanggaran berat mungkin memerlukan *mens rea* terhadap beberapa unsur *actus reus*, dan oleh karena itu tanggung jawab tegas berarti bahwa tidak ada *mens rea* terhadap satu (atau lebih) unsur *actus reus*. Hal ini tidak berarti bahwa penuntut umum lepas dari kewajiban pembuktian *mens rea*. Definisi ini tampaknya diterima oleh pengadilan: lihat Lord Edmund-Davies dalam *Lemon* [1979] AC 617 (HL).

Diperkirakan ada sekitar 11.000 pelanggaran dalam hukum Inggris. Sekitar setengah dari peraturan ini bersifat ketat. Mereka bukanlah penyelundup yang aneh namun merupakan bagian besar dari struktur hukum pidana. Pelanggaran berat yang dilakukan sebagian besar terjadi dalam penuntutan pidana, dan di pengadilan. Lebih dari separuh pelanggarannya bersifat ketat. Jumlah yang mengejutkan ini sebagian disebabkan oleh banyaknya kejahatan kendaraan bermotor yang bersifat ketat, misalnya, dalam ngebut seseorang bersalah padahal ia tidak mengetahui ia melanggar batas kecepatan. Banyak pelanggaran berat berkaitan dengan pengaturan perilaku, dan oleh karena itu pelanggaran berat sering kali dikenal sebagai 'pelanggaran peraturan'. Namun, kita tidak boleh berpikir bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran berat adalah kecil. Seseorang atau perusahaan mungkin bersalah atas pelanggaran tersebut setelah menyebabkan kematian puluhan orang dalam bencana transportasi.

Paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada yang aneh dalam hukum Inggris mengenai pelanggaran berat. Ada juga beberapa pelanggaran yang kadang-kadang disebut kejahatan 'setengah ketat' atau 'setengah *mens rea*'. Ini adalah kejahatan yang unsur kesalahannya tidak atau tidak perlu berhubungan dengan unsur eksternal. Dalam penyerangan yang mengakibatkan luka yang nyata, terdakwa bersalah jika ia ceroboh dalam

menggunakan kekerasan (*mens rea*) tetapi menyebabkan luka yang nyata (*actus reus*). Dalam pembunuhan, kematian harus disebabkan tetapi terdakwa hanya bermaksud menyakiti tubuh yang menyedihkan. Pelanggaran tanggung jawab ketat tidak diisolasi dalam undang-undang. Memang dapat dikatakan bahwa hanya sedikit kejahatan yang dapat didefinisikan hanya sebagai tindakan yang disengaja atau ceroboh.

Dampak dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 agak tidak pasti. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa pelanggaran tanggung jawab ketat melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk tidak dihukum dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, dan Pasal 6(2), hak minimum dalam persidangan pidana. Jika pemberian beban pada terdakwa bertentangan dengan Konvensi, maka pelanggaran berat juga harus dilakukan. Dalam hal ini, pengadilan mungkin akan mengajukan pembelaan atas uji tuntas. Pengadilan Eropa menyatakan dalam kasus *Salabiaku v Perancis* (1988) 13 EHRR 379 bahwa pelanggaran berat tidak dilarang berdasarkan Pasal 6(2), meskipun praduga pembuktian mungkin dilarang, terutama jika pelanggaran tersebut tidak dapat dibantah. Saat ini undang-undang tersebut sedang berubah-ubah karena dua keputusan House of Lords baru-baru ini. Dampak yang akan ditimbulkan dari peraturan tersebut masih belum jelas, namun nampaknya sebagai dampaknya (tidak dapat dipastikan secara pasti karena pengadilan Inggris mempunyai kecenderungan untuk tidak menerapkan prinsip-prinsip dalam bidang pelanggaran yang tegas) dan karena Konvensi, pengadilan akan lebih jarang menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku. Suatu pelanggaran lebih ketat dibandingkan sebelumnya, namun suatu kejahatan dapat dianggap ketat meskipun Undang-undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 dan dua kasus Lords telah berlaku: *Muhamad* [2003] QB 1031 (CA), yang berkaitan dengan pelanggaran berkontribusi secara material terhadap, atau meningkatkan tingkat, kebangkrutan karena perjudian. Pengadilan mengutip *Salabiaku*: 'Negara-negara pihak pada Persetujuan dapat menghukum suatu fakta yang sederhana atau obyektif seperti itu, terlepas dari apakah hal tersebut diakibatkan oleh niat kriminal atau kelalaian.' Dalam *Gemmell* [2003] Cr App R 23, *Dyson LJ* di Pengadilan Tinggi mengatakan: 'Sejauh menyangkut Pasal 6, keadilan hukum substantif dari Negara-negara pihak pada Persetujuan bukanlah suatu hal yang perlu diselidiki. Isi dan penafsiran undang-undang substantif dalam negeri tidak diatur dalam Pasal 6.' Pengadilan Divisi dalam kasus *Barnfather v London Borough of Islington* [2003] 1 WLR 2318 menyatakan bahwa Pasal 6(2) tidak membatasi pembuatan pelanggaran berat oleh Parlemen, dan pengadilan yang sama di *R* (tentang *Permohonan Grundy & Co. Excavations Ltd*) v Pengadilan Magistrat Divisi Halton [2003] EWHC 272 (Admin) juga menyatakan bahwa Pasal 6(2) tidak mempengaruhi hukum substantif. Otoritas terbaru adalah *G* [2006] 1 WLR 2052 (CA). Terdakwa didakwa melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak berusia di bawah 13 tahun yang bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Pengadilan memutuskan bahwa pelanggaran ini sangat ketat sesuai dengan usia korban namun dalam hal ini tanggung jawab yang ketat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. asas praduga tak bersalah terdapat pada Pasal 6(2). Sekali lagi pengadilan mengatakan bahwa Pasal 6(2) berkaitan dengan keadilan prosedural, bukan hukum pidana substantif. House of Lords memberikan izin

untuk mengajukan banding: [2006] 1 WLR 3181. House [2008] UKHL 37 dengan suara bulat menegaskan keputusan pengadilan yang lebih rendah mengenai Pasal 6(2). Ada pendapat bahwa pengadilan-pengadilan ini bertindak terlalu meremehkan dan argumen-argumen tersebut akan diajukan lagi. Tampaknya tidak masuk akal bahwa Pasal 6(2) berlaku ketika beban pembuktian suatu unsur ada pada terdakwa, tetapi tidak berlaku ketika unsur tersebut dihilangkan seluruhnya dalam pelanggaran tanggung jawab ketat!

4.1 PELANGGARAN YANG KETAT DAN MUTLAK

Dahulu pertanggungjawaban ketat sering disebut pertanggungjawaban absolut. Ungkapan ini terkadang masih digunakan di Inggris dan Wales serta di Persemakmuran: lihat misalnya. Pengadilan Tinggi Selandia Baru dalam kasus Jackson v Jaksa Agung untuk dan atas nama Departemen Pemasyarakatan [2005] NZHC 377 dan Pengadilan Banding dalam kasus G, di atas. Namun saat ini, sudah lazim dikatakan bahwa pelanggaran berat bukanlah pelanggaran mutlak. Tanggung jawab mutlak berarti bahwa terdakwa bersalah tanpa unsur mental sama sekali dan dia tidak mempunyai pembelaan baik menurut hukum adat maupun menurut undang-undang. Pelanggaran berat memerlukan semacam kondisi mental, seperti yang telah kita lihat, dan semua pertahanan tersedia. Misalnya, seorang anak di bawah 10 tahun tidak dapat dihukum atas pelanggaran berat, seperti halnya ia tidak dapat dihukum atas kejahatan yang mens rea sepenuhnya. Kadang-kadang pembelaan khusus dapat dibuat oleh undang-undang yang menetapkan pelanggaran berat. Dalam pasal 3 UU Pangan tahun 1984, terdapat pembelaan bagi terdakwa untuk menunjukkan bahwa pemalsuan makanan merupakan 'konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari proses persiapan'. House of Lords di *Smedleys Ltd v Breed* [1974] AC 839, sebuah kasus pendahulu Undang-undang tahun 1984, Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan tahun 1955, menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki pembelaan jika mereka telah mengambil semua tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Kehadiran ulat bulu di dalam kaleng kacang polong bukannya 'tidak bisa dihindari'. Keputusan ini tampaknya sesuai dengan apa yang diinginkan Parlemen untuk terwujud. Jika Parlemen dengan sengaja menciptakan pelanggaran yang tegas dan kemudian memberikan pembelaan, mungkin Parlemen ingin pembelaan tersebut ditafsirkan secara sempit sehingga tidak menelan pelanggaran tersebut. Terlebih lagi, jika negara tersebut menginginkan pembelaan dengan mengambil semua tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, maka negara tersebut akan menyatakan demikian. Itu tidak. Kata yang digunakan adalah 'tidak dapat dihindari' dan tidak dapat dihindari untuk memasukkan ulat ke dalam kaleng.

Selain pembelaan, terdakwa tidak akan dihukum kecuali dapat ditunjukkan bahwa ia bertindak secara sukarela. Terkadang persyaratan ini dianggap sebagai pertahanan terpisah, yaitu otomatisme, dan akan ditangani seperti itu. Terkadang ada anggapan bahwa persyaratan tindakan sukarela merupakan bagian dari kejahatan yang terpisah dari *actus reus* dan *mens rea*. Apapun itu, jika terdakwa tidak bertindak secara sukarela dalam artian ia tidak mempunyai kendali atas gerak tubuhnya, maka tidak akan ada hukuman. Tiga kasus akan memperjelas hal ini:

Hill v Baxter [1958] 1 QB 277: obiter, seseorang yang disengat lebah saat mengemudi tidak sedang 'mengemudi' untuk keperluan Undang-undang Lalu Lintas Jalan ketika dia mengalami kecelakaan, sehingga tidak dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan yang melibatkan mengemudi, apakah ketat atau tidak. Watmore v Jenkins [1962] 2 QB 572: seseorang yang tidak sadarkan diri selama episode diabetes tidak bertindak secara sukarela. Bratty v Jaksa Agung untuk Irlandia Utara [1963] AC 386: House of Lords menyatakan bahwa seorang pria tidak bertindak secara sukarela ketika dia sedang mengalami serangan epilepsi, atau setidaknya jenis kejang yang melibatkan gerakan tersentak-sentak.

Dalam kasus-kasus tersebut, terdakwa tidak dapat dikatakan memiliki kendali atas tindakannya, dan hukum tidak mengizinkan adanya hukuman dalam keadaan seperti itu. Proposisi ini berlaku untuk pelanggaran berat. Dalam ilustrasi tukang daging, tukang daging tidak akan bersalah karena menjual daging yang terkontaminasi, suatu pelanggaran berat, jika seseorang memukul kepalanya dengan alat tumpul dan sebagai 'robot' terdakwa telah 'menjual' daging tersebut. Seperti halnya pengemudi yang disengat lebah tidak 'mengemudi', demikian pula tukang daging yang menderita gegar otak tidak 'menjual'. Untuk rincian automatisme sebagai pertahanan umum, lihat Bab 9. Bagian ini hanya menekankan bahwa pelanggaran berat memerlukan aktivitas mental. Oleh karena itu, bahkan dalam pelanggaran berat sekalipun, penuntut harus melakukan lebih dari sekadar membuktikan bahwa terdakwa sengaja melakukan tindakan, kelalaian, atau keadaan terlarang tersebut. Dan jangan lupa, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tukang daging tidak akan bersalah atas pelanggaran berat jika dia memiliki pembelaan. Jadi, jika Anda mengancam akan menembak seorang tukang daging kecuali dia menjual daging jelek kepada pelanggan berikutnya, dia akan mendapat pembelaan bahkan terhadap pelanggaran berat, yaitu paksaan.

Oleh karena itu, pelanggaran dibagi menjadi tiga jenis: (a) mens rea one; (b) yang ketat; dan (c) yang mutlak: Kota Sault Ste Marie [1978] 2 SCR 1299 (SCC). Pelanggaran mutlak dibahas selanjutnya.

Kasus-kasus luar biasa

Pengecualian utama terhadap pernyataan bahwa penuntut harus menunjukkan lebih dari actus reus bahkan dalam pelanggaran berat adalah Larsonneur, sebuah keputusan Pengadilan Banding Pidana.

Larsonneur (1993) Aplikasi 24 Cr R 74

Terdakwa, Nyonya Larsonneur, datang dari Perancis ke Inggris dan dideportasi ke Dublin. Polisi Irlandia mengirimnya kembali. Setibanya di Holyhead dia didakwa sebagai imigran ilegal yang bertentangan dengan Aliens Order 1920, yang telah dicabut, karena dia ditemukan di Inggris dan kehadirannya di sana adalah ilegal. Bandingnya atas hukuman ditolak.

Dia bersalah meskipun dia tidak punya pilihan apakah dia harus datang ke Inggris: dia bersalah meskipun tidak bersalah. Fakta-fakta yang lengkap mengungkapkan bahwa terdakwa ikut bertanggung jawab atas keadaan yang dialaminya, namun pengadilan tidak mempertimbangkan kesalahan apa pun.

Kasus ini terus-menerus dikritik oleh para komentator.

- (a) Berdasarkan alasan pengadilan, tidak menjadi masalah apakah terdakwa dibius dan dibawa ke Wales, atau dipaksa terjun payung ke Holyhead. Dia akan bersalah meskipun tanpa melaksanakan keinginannya dia bisa menghindari memasuki negara itu. Sulit untuk melihat bahwa dia mempunyai keadaan pikiran sama sekali. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, tapi tindakannya dilakukan di bawah kendali orang lain. Seseorang mungkin membandingkan posisinya dengan seorang petani yang menjual susu palsu, suatu pelanggaran berat. Orang tersebut mempunyai pilihan apakah akan menjual susu atau tidak; Nyonya Larssonneur tidak punya pilihan.
- (b) Penuntut tidak perlu menuntutnya atas pelanggaran apa pun. Sulit untuk melihat manfaat apa yang didapat Inggris jika dia dinyatakan bersalah.
- (c) Dapat dikatakan bahwa tidak perlu mendefinisikan kejahatan sebagai kejahatan yang tidak memerlukan tindakan yang patut dicela. Kejahatan tersebut dapat dengan mudah didefinisikan sebagai ditemukan di Inggris, dengan sengaja atau sengaja memasuki Inggris, dan seperti yang dinyatakan dalam Perintah, menjadi orang asing yang ditolak untuk mendarat di Inggris.
- (d) Hakim utama dalam kasus ini umumnya dianggap sebagai hakim hukum pidana terburuk atau terburuk kedua di abad ke-20.
- (e) Hakim masih terus menyebut pelanggaran berat sebagai pelanggaran yang bersifat 'mutlak', misalnya. Auld LJ di Loukes [1996] 1 Cr App R 444 (CA). Namun, jika terdapat perbedaan, hakim telah menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap tanggung jawab absolut. Dalam Mayer v Marchant (1973) 5 SASR 567 Zelling J menyebutnya sebagai 'kemunduran ke bentuk konsep yang sangat primitif'.

Karena alasan-alasan ini, disarankan agar Larssonneur tidak dapat bertahan menghadapi tantangan langsung di House of Lords.

Perlu dicatat bahwa Nyonya Larssonneur dikirim ke penjara, tidak seperti kebanyakan pelanggar yang memiliki tanggung jawab berat, dan bahwa hukuman tersebut berkaitan dengan masalah kehidupan pribadinya. Sebagian besar kejahatan berat mengakibatkan denda dan berkaitan dengan urusan bisnis atau otomotif. Untuk komentar akademis yang mendukung Larssonneur, lihat D. Lanham 'Larssonneur revisited' [1976] Crim LR 276, sebuah artikel yang memberikan lebih banyak fakta tentang kasus tersebut, memungkinkan pembaca untuk memahami hasilnya dengan lebih mudah dibandingkan jika seseorang hanya mempertimbangkan laporan singkatnya. kasus itu sendiri. Ia berargumentasi bahwa terdakwalah yang menyebabkan situasi yang dialaminya, namun ia tidak mungkin bersalah seandainya ia dipaksa secara fisik untuk masuk ke Inggris jika ia tidak secara bersalah menyampaikan fakta-fakta yang menimbulkan dugaan pelanggaran tersebut.

Meskipun terdapat kritik terhadap Larssonneur, yang tampaknya sangat luar biasa dan tidak dapat diikuti, hal ini diikuti oleh Pengadilan Divisi dalam Winzar v Chief Constable of Kent (1983) The Times, 28 Maret. Tanggung jawab pidana dalam kasus-kasus ini terkadang dikenal sebagai 'tanggung jawab situasional', nama alternatifnya adalah 'pelanggaran status'.

Winzar v Kepala Polisi Kent (1983) The Times, 28 Maret

Terdakwa dinyatakan bersalah karena ditemukan mabuk di jalan raya, meskipun telah dikeluarkan dari rumah sakit dan dibawa dengan tandu, para pengangkut percaya bahwa dia sakit, dan dengan hati-hati ditempatkan di trotoar oleh polisi, bertentangan dengan s 12 Undang-Undang Perizinan tahun 1872. Ia berdalih tidak ditemukan mabuk di jalan raya karena polisi membawanya ke sana. Pengadilan menyatakan bahwa 'ditemukan mabuk' berarti 'dianggap mabuk'. Polisi mengira dia mabuk di jalan raya. Oleh karena itu, dia ditemukan mabuk di jalan raya, dan karenanya bersalah.

Namun, bahkan jika seseorang menerima bahwa 'ditemukan mabuk' berarti 'dianggap mabuk' dan tidak melibatkan mens rea di pihak terdakwa, tentu saja dia dianggap mabuk di koridor rumah sakit, dimana polisi telah dipanggil. . Dia tidak dianggap mabuk pada tahap selanjutnya ketika dia dilempar ke trotoar. Oleh karena itu, bertentangan dengan pandangan pengadilan, dia tidak dianggap mabuk ketika dia berbaring di trotoar, dan bahkan berdasarkan alasan pengadilan dia tidak seharusnya bersalah karena ditemukan mabuk di jalan raya. Tampaknya dia akan bersalah jika dia terlempar keluar dari mobil yang melaju kencang ke trotoar! Alternatifnya, ada yang berpendapat bahwa dia benar-benar dihukum karena mabuk, tapi itu bukan kejahatan. Jika terdakwa benar-benar dihukum karena mabuk (yang terkadang dikenal sebagai 'kesalahan sebelumnya') atau karena tidak meninggalkan rumah sakit meskipun ada banyak permintaan untuk melakukannya, maka undang-undang harus menyatakan demikian. Kita juga dapat menyalahkan Parlemen karena mengesahkan undang-undang yang dapat dibaca seperti yang dilakukan pengadilan di Winzar. Seperti yang dikomentari Smith dan Hogan (D. Ormerod, ed.), Hukum Pidana, edisi ke-12 (OUP, 2008) 59:

Larsonneur dan Winzar dihukum karena pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh polisi; dan ini tampaknya sangat menyinggung (catatan kaki dihilangkan). Seperti yang diduga, polisi tidak diadili karena melakukan pelanggaran, namun inilah yang sebenarnya terjadi. C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, 4th edn (Thomson, 2005) 47 mengambil pandangan serupa: Rasa keadilan kita akan dirugikan oleh undang-undang yang menyatakan bahwa penyakit campak merupakan suatu kejahatan – suatu kondisi yang tidak dapat dicegah oleh siapa pun.

Ini adalah poin 'yang tidak mungkin dicegah' yang bertentangan dengan kedua kasus ini. Paksaan bukanlah pembelaan. Para terdakwa bersalah meskipun mereka tidak mempunyai kendali atas perbuatannya pada saat penangkapan. Terlepas dari kritik terhadap Larsonneur bahwa terdakwa akan tetap bersalah meskipun dibius dan dibawa ke Inggris, disarankan bahwa bahkan pengadilan yang terikat oleh Larsonneur dan Winzar akan membedakan otoritas tersebut ketika dihadapkan pada situasi di mana laras senjata a seseorang telah dipaksa masuk ke Inggris atau dipaksa keluar rumah dan berbaring dalam keadaan mabuk di trotoar. Selain itu, pengadilan dapat memutuskan kasus-kasus tersebut hanya berdasarkan fakta-fakta tertentu dan House of Lords tentu saja tidak terikat pada kedua kasus tersebut. Pembelaan seperti paksaan dan, a fortiori, masa kanak-kanak berlaku bahkan untuk pelanggaran mutlak. Masih harus dilihat apakah kasus-kasus tersebut akan bertahan dalam pengujian berdasarkan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.

4.2 TANGGUNG JAWAB YANG KETAT

Setelah mengklarifikasi beberapa masalah, kita dapat melanjutkan ke pembahasan mengenai pelanggaran berat. Meskipun ada beberapa perselisihan mengenai kejahatan mana yang pertama kali dipertanggungjawabkan secara ketat (lihat Singer 'The resurgence of mens rea: naik dan turunnya pertanggungjawaban pidana yang ketat' (1989) 30 Boston College LR 377), Woodrow (1846) 153 ER 907 umumnya diperlakukan sebagai yang pertama berurusan dengan pelanggaran hukum (tentu saja kejahatan hukum umum berupa pencemaran nama baik dianggap ketat sebelum Woodrow). Terdakwa dinyatakan bersalah memiliki tembakau oplosan yang bertentangan dengan Undang-Undang Tembakau 1842, pasal 3, meskipun ia tidak mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam tembakau tersebut. Woodrow mencontohkan satu pandangan mengenai pelanggaran tegas: bahwa pelanggaran tersebut membentuk semacam 'hukum pidana administratif', seperti yang diungkapkan Profesor Leigh dalam bukunya *Strict and Vicarious Liability* (Sweet & Maxwell, 1982) 101. Dalam pendekatan ini, pelanggaran tegas bukanlah kejahatan yang sebenarnya, seperti pembunuhan tetapi merupakan bagian dari sistem pengaturan kegiatan, dan inilah sebabnya mengapa pelanggaran berat kadang-kadang disebut 'pelanggaran peraturan': pelanggaran ini mengatur perusahaan demi kepentingan publik. Perlu disebutkan bahwa pemikiran hukum di balik Woodrow tampaknya adalah bahwa pada tahun 1846 masalah tersebut belum diselesaikan dimana beban pembuktian seharusnya berada, dan tampaknya tidak adil untuk menempatkan beban pembuktian tersebut pada terdakwa, yang bagaimanapun juga memiliki tembakau miliknya.

Meskipun pengaturan usaha terdengar seperti hal yang baik, kritik terhadap pelanggaran yang tegas sangat kuat. Argumen dasarnya adalah bahwa pertanggungjawaban yang ketat terkadang menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan moral. Contohnya adalah *Sweet v Parsley*, sebuah kasus yang akhirnya sampai ke House of Lords, namun keputusan pengadilan sedang dipertimbangkan di sini.

Manis v Peterseli [1970] AC 132

Ms Sweet adalah seorang guru muda yang bekerja di Oxford. Dia menyewa sebuah rumah pertanian tujuh mil jauhnya di pedesaan. Dia menyewakan rumahnya kepada apa yang oleh para juri disebut sebagai 'beatnik' ketika dia tinggal di sebuah flat di Oxford karena mobilnya (dijuluki 'Young Maiden's Misery', karena surat registrasi YMM) rusak. Para beatnik menghisap ganja. Dia dinyatakan bersalah mengelola tempat yang digunakan untuk tujuan merokok ganja. Dia kehilangan pekerjaannya, meskipun dia tidak mengetahui bahwa sub-penyewa melanggar hukum dan meskipun dia tidak memiliki kendali atas mereka.

Kasus ini menunjukkan bahwa ketika seseorang dihukum karena pelanggaran berat, ia masih menderita stigma sosial karena dicap sebagai penjahat dan namanya dimuat di surat kabar lokal. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika Nona Sweet mengajukan banding.

Kejahatan yang memerlukan mens rea dan kejahatan yang tidak memerlukan mens rea

Kita sampai pada permasalahan yang sulit dalam menentukan kejahatan mana yang tegas terhadap satu atau lebih unsur *actus reus* dan mana yang merupakan kejahatan yang

full mens rea. Tidak ada aturan yang sederhana, namun hukum tidak sepenuhnya tidak dapat diprediksi.

- (a) Secara umum, semua kejahatan besar, terutama yang melibatkan pelanggaran moral, memerlukan mens rea, misalnya. pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian. Namun, harus dikatakan bahwa akibat dari pelanggaran aturan dalam pelanggaran berat bisa sangat serius. Seorang korban dapat terbunuh akibat ngebut, sebuah pelanggaran berat.
- (b) Semua kejahatan menurut common law memerlukan mens rea kecuali yang tercantum di bawah ini. Karena tidak ada pelanggaran hukum umum baru yang dapat dilakukan, daftar ini bersifat definitif.
 - (i) Gangguan masyarakat. Kasus yang biasa dikutip adalah *Stephens* (1866) LR 1 QB 702, namun kasus tersebut sebenarnya merupakan kewenangan perwakilan, dan mungkin di zaman modern mens rea diperlukan untuk pelanggaran ini. Dalam otoritas terbaru, *Shorrock* [1993] 3 All ER 917 (CA), pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak perlu mengetahui pelanggaran yang dilakukannya. Cukuplah dia mengetahui bahwa akan terjadi gangguan akibat aktivitasnya di tanah itu.
 - (ii) Penghinaan terhadap pengadilan. Pihak yang berwenang adalah *Evening Standard Co. Ltd* [1954] 1 QB 578. Parlemen secara tegas mengakui 'aturan tanggung jawab ketat', sebagaimana mereka menyebut prinsip ini, ketika Parlemen membuat Undang-Undang Penghinaan terhadap Pengadilan tahun 1981.
 - (iii) Berbagai bentuk pencemaran nama baik pidana. Semua bentuk yang dikatakan oleh Lord Salmon dalam *Lemon* di atas adalah ketat. Tentu saja *Lemon* memutuskan, Lords Diplock dan Edmund-Davies berbeda pendapat, bahwa dalam pencemaran nama baik tidak ada persyaratan niat untuk membuat marah orang-orang Kristen ketika menerbitkan sebuah puisi yang menggambarkan Kristus sebagai seorang homoseksual, meskipun masih ada beberapa mens rea, niat untuk menerbitkannya. Pencemaran nama baik yang bersifat penistaan dihapuskan berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Peradilan Pidana dan Imigrasi tahun 2008, yang mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2008. Namun, pencemaran nama baik yang bersifat menghasut mungkin memerlukan mens rea: *Bow Street Magistrates Court ex parte Choudhury* [1991] 1 QB 429 (CA) .
 - (iv) Memalukan kesopanan publik. Pengadilan Banding di *Gibson* [1990] 2 QB 619 menerapkan *Lemon* dari pelanggaran serumpun pencemaran nama baik terhadap kejahatan hukum umum ini. Seseorang bersalah, baik ia bermaksud merusak atau menghina kesusilaan umum, atau ceroboh dalam menentukan apakah ia merusak atau menghina kesusilaan umum.
- (c) Berdasarkan undang-undang, banyak pelanggaran yang melibatkan individu. Kita tidak dapat menyatakan bahwa jika Parlemen tidak menyebutkan mens rea, maka pengadilan akan membacanya atau tidak. Tidak ada pedoman resmi mengenai faktor-faktor mana yang penting. Lord Nicholls dalam *B v DPP* [2000] 2 AC 428 (HL)

memberikan contoh faktor-faktor berikut: 'bahasa yang digunakan, sifat pelanggaran, kenakalan yang ingin dicegah, dan keadaan lain apa pun yang mungkin membantu dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. niatnya pantas untuk dikaitkan dengan Parlemen'. B v DPP kembali menegaskan adanya anggapan *mens rea*. Mungkin diperlukan waktu beberapa tahun sebelum dampak penuh dari kewenangan ini dapat dirasakan. Tentu saja kecil kemungkinannya dibandingkan sebelumnya bahwa kejahatan seks akan dianggap sebagai pelanggaran berat, namun pengecualian masih muncul, seperti dalam *Doring [2002] Crim LR 817* (lihat di bawah).

Banyak delik yang menyangkut kesejahteraan masyarakat tidak memerlukan unsur mental. *Wright J* dalam *Sherras v de Rutzen [1895] 1 QB 918* mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mengkriminalisasi orang-orang yang tindakannya 'bukan merupakan kejahatan dalam arti sebenarnya tetapi merupakan tindakan yang demi kepentingan umum dilarang dengan hukuman'. Dia mencontohkan kepemilikan tembakau palsu. Frasa ini terus digunakan, mis. oleh *Lord Scarman* dan *Viscount Dilhorne* dalam *Alphacell Ltd v Woodward [1972] AC 824*. Istilah lain adalah pelanggaran 'peraturan'. Sayangnya istilah-istilah seperti 'kepentingan umum' dan 'peraturan' bersifat menyimpulkan dan tidak menjelaskan. Mereka tidak memberi tahu kita kejahatan mana yang berat dan mana yang tidak. Dua kategori lain yang disebutkan oleh *Wright J* adalah kasus-kasus gangguan publik dan 'kasus-kasus di mana, meskipun proses hukumnya berbentuk pidana, hal ini sebenarnya hanya merupakan ringkasan dari penegakan hak-hak sipil' seperti pelanggaran yang tidak disengaja dalam mengejar hewan buruan.

Jenis pelanggaran ini kadang-kadang disebut 'kuasi-kriminal', misalnya *Lord Reid* yang menyatakannya dalam *Warner v MPC [1969] 2 AC 256*. Namun, istilah ini tidak terlalu membantu: apakah menjual daging jelek merupakan kejahatan atau tindakan kuasi-kriminal? -kejahatan? Dengan tetap berpegang pada pokok permasalahan mengenai pelanggaran kesejahteraan masyarakat, kita dapat menyatakan bahwa pokok permasalahan dari beberapa pelanggaran lebih memerlukan tanggung jawab yang ketat dibandingkan dengan pelanggaran lainnya. Penjualan makanan tercemar mungkin tidak memerlukan *mens rea*; misalnya *Parker v Alder [1899] 1 QB 20*, dimana kejahatannya adalah menjual susu jelek, sedangkan bigami adalah kejahatan yang memerlukan unsur mental: *Gould [1968] 2 QB 65* mengesampingkan Gandum dan Saham [1921] 2 KB 119. *Lord Diplock* adalah memiliki efek serupa dalam *Sweet v Parsley* di atas, ketika ia berbicara tentang aktivitas yang melibatkan 'potensi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, atau moral masyarakat'. Warga mempunyai pilihan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut atau tidak. Jika dia melakukannya, dia dikenakan kewajiban perawatan yang lebih tinggi dari biasanya. 'Kewajiban untuk mengambil tindakan apa pun yang mungkin diperlukan untuk mencegah tindakan yang dilarang, tanpa memperhatikan pertimbangan biaya atau kepraktisan bisnis yang berperan dalam penentuan apa yang diperlukan dari tindakan tersebut untuk memenuhi hukum umum yang biasa. tugas menjaga.' Dalam pikiran *Lord Diplock* mungkin ada pikiran tentang tukang daging, apoteker, tukang susu. Perlu disebutkan bahwa bigami kadang-kadang dilihat sebagai pelanggaran yang bertentangan dengan moralitas, namun ini bukan pelanggaran yang tegas dan, lebih jauh lagi, pembunuhan melibatkan bahaya nyata terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,

namun tidak tegas. Apa yang dimaksud Lord Diplock adalah bahwa ada banyak kemungkinan korban dalam kejahatan berat; misalnya, satu dari satu juta pelanggan mungkin menderita jika susu terkontaminasi.

Setidaknya di luar bidang makanan dan obat-obatan, pengadilan sering kali tidak bersedia memberikan beban yang tidak masuk akal kepada terdakwa. Dalam *Sherras v de Rutzen*, di atas, seorang pemilik pub dinyatakan tidak bersalah karena memasok minuman keras kepada polisi yang sedang bertugas, bertentangan dengan pasal 16(2) Undang-Undang Perizinan tahun 1872, karena menurut salah satu dari dua hakim dia tidak punya cara mudah untuk memeriksa apakah polisi sedang bertugas atau tidak. Kasus yang kontras dengan *Sherras* adalah *Cundy v Le Cocq* (1884) 13 QBD 207, di mana seorang tuan tanah dihukum berdasarkan pasal 13 Undang-undang yang sama karena menjual minuman keras kepada seorang pemabuk. Salah satu perbedaan antara kedua kasus tersebut adalah bahwa tuan tanah diharapkan mengetahui bahwa seorang pemabuk memang mabuk. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengadilan pada umumnya enggan untuk menghukum seseorang ketika tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi: bagaimana seseorang dapat melaporkan kecelakaan di jalan raya, padahal seseorang tidak mengetahui adanya kecelakaan di jalan raya? Dalam kasus *Dewan Penasihat Lim Chin Aik v R* [1963] AC 160, terdakwa tidak dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia dilarang memasuki Singapura, hukuman tidak ada gunanya, dan karenanya tidak bersalah. Dia tidak diharapkan untuk memeriksa apakah dia diizinkan masuk setiap saat. Alasan ini tidak selalu diikuti; sering kali seseorang dihukum meskipun mereka telah mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan.

Upaya rekonsiliasi kasus terkenal *Sherras* dan *Cundy* tidak menjelaskan semuanya. Dua kasus yang sama terkenalnya adalah *Prince* (1875) LR 2 CCR 154 dan *Hibbert* (1869) LR 1 CCR 184. Kedua kasus tersebut berkaitan dengan apa yang menjadi pasal 20 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956: Merupakan pelanggaran bagi seseorang yang bertindak tanpa wewenang atau alasan yang sah untuk mengambil seorang gadis yang belum menikah yang berumur di bawah enam belas tahun dari kepemilikan orang tua atau walinya di luar kehendaknya.

Di *Prince*, terdakwa percaya bahwa gadis itu berusia 18 tahun; dia sebenarnya berusia di bawah 16 tahun dan dia dinyatakan bersalah (mayoritas, delapan hakim, mengatakan bahwa kata-kata dalam undang-undang harus dibaca secara harfiah, yang lain (minoritas enam orang) mengatakan bahwa mengambil gadis itu tidak bermoral dan salah dan terdakwa (yang menurut kata-kata Stephen J dalam *Tolson* (1889) 23 QBD 168 dapat disamakan dengan 'penggoda dan penculik', yang harus dikatakan bahwa Tuan *Prince* tidak bertindak atas risikonya sendiri, dan satu hakim berbeda pendapat), namun hanya enam bertahun-tahun sebelumnya pengadilan yang sama, Pengadilan untuk Kasus Mahkota Dicaadangkan, telah memutuskan di *Hibbert* bahwa seorang terdakwa tidak bersalah ketika dia tidak mengetahui bahwa gadis yang dia bawa adalah milik orang tuanya. Oleh karena itu, pasal 20 harus dibaca sebagai berikut: terdakwa bersalah apabila ia mengambil seorang anak perempuan, padahal ia mengetahui bahwa anak perempuan itu perempuan, yang belum kawin, mengetahui bahwa

ia belum kawin, di luar kepemilikan orang tua atau walinya, mengetahui - ing dia memiliki orang tua atau wali, dan dia kebetulan berusia di bawah 16 tahun. Perbedaan yang kuat antara kedua kasus ini belum ditemukan. Mungkin perbedaannya adalah di Hibbert, terdakwa tidak berniat mengambil gadis itu dari milik siapa pun, sedangkan terdakwa di Prince berniat. Namun, tentu saja, kejahatannya tidak begitu jelas. Usia gadis itu adalah elemen yang paling material. Tuan Pangeran tidak akan bersalah jika gadis itu berusia di atas 16 tahun. Terlebih lagi, jika terdakwa bersalah meskipun dia tidak tahu usianya, mengapa dia tidak bersalah padahal dia bahkan belum memeriksa apakah gadis itu punya ayah? Perlu dicatat bahwa terdakwa dalam Prince tetap bersalah tidak peduli seberapa dalam dia menyelidiki usia gadis tersebut dan tidak peduli seberapa masuk akal kesalahannya mengenai usia gadis tersebut. Prince dikritik habis-habisan (obiter) dalam *B v DPP* di atas, namun hal itu tidak ditolak dan sampai saat itu, ia tetap berwenang terhadap apa yang menjadi pasal 20 UU tahun 1956. *B v DPP* tidak terjadi pada kasus 20. Namun, sebagai akibat dari dua kasus berikutnya yang disebutkan, sulit untuk melihat Prince bertahan lebih lama lagi. Kedua keputusan tersebut diambil dengan suara bulat oleh House of Lords.

B v DPP [2000] 2 AC 428 (HL)

Terdakwa mendesak seorang gadis berusia 13 tahun untuk melakukan seks oral padanya. Dia menolak. Dia didakwa menghasut seorang gadis di bawah 14 tahun untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketidaksenonohan dengan Anak-anak tahun 1960, sebuah pelanggaran yang dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Pembelaannya adalah bahwa dia yakin gadis itu sudah berakhir. 14. Pengadilan Divisi menyatakan bahwa, seperti halnya Prince (di atas), tanggung jawab mengenai usia gadis tersebut sangat ketat, dan hukuman telah ditegaskan. Pengadilan Divisi beralasan bahwa tujuan undang-undang tahun 1960 adalah untuk melindungi anak-anak di bawah 14 tahun; oleh karena itu, tidak penting jika terdakwa salah menyebutkan usia gadis tersebut. (Usia dinaikkan menjadi 16 tahun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana dan Pelayanan Pengadilan tahun 2000, pasal 39.)

Undang-undang tahun 1960 diundangkan karena seorang terdakwa tidak bersalah melakukan penyerangan tidak senonoh terhadap anak apabila ia tidak menggunakan ancaman (penyerangan) atau kekerasan (baterai). Tujuan ini akan gagal jika terdakwa mempunyai pembelaan ketika ia keliru mengenai usia. Selain itu, Parlemen terkadang memberikan pembelaan berdasarkan kesalahan tersebut, namun tidak melakukan pembelaan atas pelanggaran ketidaksenonohan terhadap anak-anak. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang tahun 1960 menciptakan sebuah pelanggaran dengan stigma sosial yang berat dan dengan hukuman maksimum 10 tahun penjara: pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat peraturan. Brooke LJ menyatakan: 'Parlemen terus membuat undang-undang mengenai hal ini secara ad hoc sedikit demi sedikit, dan menolak meluangkan waktu untuk membuat pilihan kebijakan yang diperlukan sehubungan dengan persyaratan mens rea sehubungan dengan perubahan undang-undang yang ditetapkannya, biarkan saja saja banyak bagian hukum yang dibiarkan tidak berubah. Berjam-jam harus dihabiskan di pengadilan dan

di tempat lain untuk memikirkan masalah ini.' Pengadilan menyatakan bahwa ada masalah hukum yang penting bagi masyarakat umum, namun menolak izin untuk mengajukan banding.

House of Lords menolak Pengadilan Divisi dan memutuskan bahwa pelanggaran tersebut bukanlah tanggung jawab yang ketat. Diputuskan bahwa terdakwa tidak bersalah jika dia melakukan kesalahan jujur mengenai usia gadis tersebut. Tidak ada aturan khusus mengenai usia: praduga mens rea diterapkan pada semua unsur pelanggaran. Kesalahannya tidak harus didasarkan pada alasan yang masuk akal. Lord Steyn berbicara tentang 'prinsip konstitusional' bahwa mens rea harus dicantumkan dalam sebuah undang-undang. Lord Nicholls menerapkan anggapan common law bahwa mens rea adalah bagian dari pelanggaran hukum kecuali Parlemen menyatakan sebaliknya, baik secara tersurat maupun tersirat. Implikasi atas dasar alasan yang masuk akal saja tidak cukup. Implikasinya harus 'sangat jelas'. Ini adalah rintangan besar yang harus dilewati, dan jika benar, banyak pihak berwenang lainnya yang mengambil keputusan yang salah. (Penguasa Hukum yang lain menyatakan hal yang sama. Misalnya, Lord Hutton mengatakan bahwa implikasi bahwa undang-undang tersebut mengesampingkan mens rea harus menjadi hal yang 'perlu' (penekanannya).) Fakta bahwa pelanggaran tersebut serius memperkuat anggapan tersebut, begitu pula fakta bahwa kejahatan tersebut mencakup berbagai fakta mulai dari 'pendekatan predator yang dilakukan oleh seorang pedofil yang jauh lebih tua' hingga 'eksperimen seksual suka sama suka antara remaja dewasa sebelum waktunya yang pelakunya mungkin lebih muda dari keduanya'. Fakta bahwa kadang-kadang tindak pidana tersebut digunakan untuk melindungi anak-anak yang rentan tidaklah cukup untuk menjadikan kejahatan tersebut sebagai suatu tanggung jawab yang ketat. Selain itu, masih belum pasti apakah tanggung jawab yang ketat akan menghasilkan penegakan kejahatan yang lebih baik. Ia menambahkan, sepanjang penalaran Prince tidak sesuai dengan asas mens rea, maka hal itu salah; anggapan tersebut berlaku meskipun perbuatan terdakwa tidak bermoral; pergeseran anggapan tersebut harus dilakukan secara jelas; dan hal ini tidak tergantikan dengan membandingkan dua bagian yang dirancang dengan buruk. Lord Nicholls menekankan bahwa keputusan tersebut tidak terbatas pada kasus-kasus di mana usia korban merupakan unsur pelanggarannya. Lord Steyn mengatakan bahwa House of Lords di *Sweet v Parsley* mungkin mengira bahwa keputusan mereka akan mengesampingkan Prince. Ia mengatakan bahwa wewenang tersebut 'tidak sejalan dengan tren modern dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seorang terdakwa harus diadili berdasarkan fakta-fakta yang ia yakini'. Dia menambahkan bahwa Pangeran 'adalah peninggalan dari zaman yang sudah mati dan tiada'. Segala bentuk reformasi undang-undang adalah untuk Parlemen, yang meskipun telah mendapat nasihat ahli dari Komite Revisi Hukum Pidana dan Komisi Hukum selama bertahun-tahun, namun belum mengambil tindakan tegas. Dalam kritiknya harus dikatakan bahwa ketika Parlemen memberlakukan kembali kejahatan yang dipermasalahkan di Prince, Parlemen melakukannya atas dasar bahwa Prince memiliki otoritas.

B v DPP diterapkan di K [2002] 1 AC 462 (HL). Tidak ada implikasi yang diperlukan bahwa seorang terdakwa bersalah atas penyerangan tidak senonoh terhadap korban yang berusia di bawah 16 tahun padahal ia dengan jujur meyakini bahwa korban berusia di atas 16

tahun; dia juga memberitahunya bahwa dia berusia 16 tahun. Kedua kasus tersebut berkaitan dengan kesalahan dalam hal usia, seperti halnya Pangeran, tetapi rasio keduanya tidak dibatasi. Dalam kritiknya harus dikatakan bahwa ketika Parlemen mengesahkan Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956, hal itu tidak bermaksud untuk mempengaruhi Prince. Baik B v DPP maupun K sekarang tunduk pada Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 yang menetapkan bahwa kesalahan mengenai usia seorang anak tidak relevan jika ia berusia di bawah 13 tahun dan, jika anak tersebut berusia antara 13 dan 16 tahun, hanya kesalahan yang dilakukan dengan alasan yang wajar. alasan cukup. Sehubungan dengan anak di bawah 13 tahun, tanggung jawab sekarang sangat ketat. Pertanggungjawaban bagi kelompok 13–16 bisa dibilang tidak ketat karena aturan umum dalam B v DPP dan K. Sebaiknya DPR mencantumkan undang-undang tersebut dengan jelas dalam UU tahun 2003. Namun, kasus-kasus tersebut tetap bersifat otoritatif sebagai pernyataan umum mengenai hukum pertanggungjawaban ketat. Baik Lords Steyn maupun Bingham dalam K mengatakan bahwa asas praduga mens rea merupakan asas konstitusi.

Kasus yang lebih kuat daripada Hibbert dan Sherras v de Rutzen yang memberikan contoh pengadilan yang menyiratkan mens rea word ke dalam definisi kejahatan menurut undang-undang adalah Harding v Price [1948] 1 KB 695. Pengadilan Divisi menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena tidak melaporkan kecelakaan di jalan raya hanya jika dia tahu bahwa memang ada kecelakaan itu. Keputusan ini mengejutkan ketika kita menyadari bahwa undang-undang yang dipermasalahkan adalah Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Tahun 1930. Parlemen 'secara sadar' menghilangkan undang-undang tersebut, padahal dalam undang-undang pertama yang mengatur masalah ini, Undang-Undang Mobil Bermotor tahun 1903, undang-undang tersebut memang memuat ketentuan ini. kata yang sebenarnya. Tidak akan sulit bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa kelalaian tersebut disengaja dan bahwa Parlemen bermaksud agar pelanggaran tersebut dilakukan secara tegas. Lihat juga Tolson (1889) 23 QBD 168 dimana, seperti dalam Prince, tidak ada mens rea word, namun terdakwa tidak bersalah. Wills J menyatakan bahwa keadaan dapat mengubah kasus.

Panduan lain yang bermanfaat adalah bahwa jika hukuman atas kejahatan tersebut berat, terkadang ada anggapan bahwa mens rea diperlukan. Lord Nicholls dalam B v DPP mengatakan: 'Semakin serius pelanggarannya, semakin besar bobot yang harus diberikan pada anggapan tersebut, karena semakin berat hukumannya dan semakin besar pula stigma yang menyertai suatu hukuman.' Awalnya merupakan kejahatan. yang dibicarakan dalam B v DPP memiliki hukuman maksimal dua tahun penjara namun dinaikkan menjadi 10 tahun. Namun anggapan ini tidak selalu berlaku, misalnya. pada hukuman kedua karena mencemari sungai, suatu pelanggaran berat, terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara; demikian pula pasal 5(b) Undang-Undang Narkoba Berbahaya tahun 1965 yang memberikan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, namun tetap dianggap tegas. Dalam Howells [1977] QB 614, Pengadilan Tinggi menetapkan tindak pidana kepemilikan senjata api sebagai tindak pidana yang berat, namun hukumannya maksimal lima tahun. Inkonsistensi terus berkembang. Dalam Blake [1997] 1 WLR 1167 (CA) hukuman maksimal dua tahun menjadikan pelanggaran tersebut 'benar-benar kriminal', sedangkan dalam Harrow London Borough

Council v Shah [1999] 2 Cr App R 457 (DC) dikatakan sama maksimal tidak menjadikan pelanggaran tersebut benar-benar kriminal. (Kedua kasus tersebut dibahas lebih lanjut di bawah.) Oleh karena itu, fakta bahwa pemenjaraan adalah hukuman tidak berarti bahwa kejahatan tersebut merupakan tindakan yang mens rea one: Wells St Magistrates [1986] 1 WLR 1046. Kesimpulan ini mungkin tidak dapat ditentang berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998. Misalnya, seperti yang disebutkan, hukuman maksimum di Howells cukup tinggi, namun Parlemen belum memberikan pembelaan uji tuntas. Ada dugaan bahwa Howells mungkin melanggar Pasal 3 (perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia) atau Pasal 6 (praduga tak bersalah) atau kedua-duanya. Terlalu banyak tidak boleh dianggap sebagai beratnya hukuman maksimum. Karena delik berat juga dapat dilakukan dengan sengaja, sembrono, dan lalai, maka maksimalnya diperuntukkan bagi kesengajaan yang menimbulkan actus reus. Hukuman untuk pelanggaran tanggung jawab ketat atas pelanggaran yang sama mungkin ringan: Matudi [2003] EWCA Kriminal 697.

Kata-kata dalam undang-undang kadang-kadang ditafsirkan menimbulkan tanggung jawab yang ketat. Ilustrasi penawaran berikut ini. Humphreys J dalam Grade v DPP [1942] 2 Semua ER 118 (DC) mengatakan bahwa 'menjual' tidak memerlukan pengetahuan, tetapi 'izin' memerlukannya. Di Grade, terdakwa didakwa secara tidak sah menampilkan bagian dari drama panggung baru sebelum bagian tersebut disahkan oleh Lord Chamberlain, bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang Teater tahun 1843, sejak dihapuskan. Sebuah lelucon telah dimasukkan ke dalam pertunjukan musik di ruang musik To See Such Fun tanpa sepengetahuan terdakwa, ketika dia berada jauh dari tempat tersebut, dan bertentangan dengan instruksinya. Meski begitu, dia bersalah. Dalam James & Son Ltd v Smee [1955] 1 QB 78 pelanggaran yang mengizinkan seseorang menggunakan kendaraan yang remnya rusak dianggap bukan pelanggaran berat. Terdakwa bersalah hanya jika dia mengetahui bahwa remnya rusak. Namun, kejahatan mengizinkan penggunaan kendaraan tanpa asuransi merupakan kejahatan yang ketat: lihat misalnya. Braaugh v Crago [1975] RTR 453 dan Kepala Polisi Norfolk v Fisher [1992] RTR 6 (DC). Dalam kasus terakhir, yang juga dikenal sebagai DPP v Fisher, Newbury v Davies [1974] RTR 367 (DC) dibedakan. Dalam Newbury v Davies pemilik dinyatakan tidak bersalah atas pelanggaran tersebut ketika dia mengizinkan penggunaan kendaraan hanya dengan syarat bahwa putrinya mengatur perlindungan asuransi. Karena, dengan syarat memperoleh izin, penggunaan tidak diperbolehkan, penggunaan mobil tanpa izin tidak diperbolehkan. Di Fisher, yang melibatkan pelanggaran yang sama, terdakwa mengetahui bahwa seseorang telah didiskualifikasi dan mengizinkan dia memiliki mobil hanya jika dia menyuruh orang lain untuk mengemudi. Dia melakukannya, tetapi orang lain itu tidak diasuransikan. Pemiliknya dihukum. Perbedaan antara kasus-kasus tersebut lemah. Tentunya tidak menjadi masalah apakah syarat untuk tidak mengemudi tanpa asuransi diberlakukan secara langsung karena dalam 'mengizinkan' pelanggaran bersifat ketat tetapi yang lain tidak, sebuah kesimpulan yang tidak terlalu membantu tetapi didasarkan pada kasus-kasus tersebut. 'Penggunaan' dianggap menimbulkan tanggung jawab yang ketat: Green v Burnett [1955] 1 QB 78. Oleh karena itu, menggunakan kendaraan dengan rem yang rusak merupakan pelanggaran berat tetapi mengizinkan atau memperbolehkan seseorang mengendarai mobil

dengan rem yang rusak bukanlah pelanggaran berat! Bahkan 'sengaja' dibaca sebagai tidak mengimpor pengetahuan sehubungan dengan pasal 86(3) Undang-undang Kepolisian tahun 1996, penghalangan yang disengaja terhadap petugas polisi: *Rice v Connolly* [1966] 2 QB 414 dan *Lewis v Cox* [1985] QB 509 Namun, House of Lords yang diadakan di Sheppard [1981] AC 394 menyatakan bahwa 'dengan sengaja' dalam pasal 1 Undang-Undang Anak dan Remaja tahun 1933, yang menciptakan kejahatan pengabaian yang disengaja, berarti dengan sengaja mengabaikan anak dan mengetahui risikonya. bahwa kesehatan anak mungkin terganggu atau tidak mengetahui risikonya karena terdakwa tidak peduli apakah anak tersebut memerlukan perawatan medis atau tidak.

Oleh karena itu, kejahatan tersebut bukan merupakan tanggung jawab yang ketat tetapi merupakan kecerobohan obyektif. Selain itu, 'izin' memerlukan mens rea, menurut Lord Diplock dalam *Sweet v Parsley*, di atas, seperti halnya 'mengadakan' dan mungkin 'menderita'. Dalam semua kasus kecuali satu (*Brooks v Mason* [1902] 2 KB 743), 'secara sadar' dianggap memerlukan mens rea. Tidak dapat dibayangkan bahwa *Brooks v Mason* akan diikuti, terutama setelah *B v DPP* dan *K*.

Fakta bahwa mens rea diwajibkan dalam satu bagian undang-undang tetapi tidak di bagian lain tidak berarti bahwa mens rea tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut: *Sherras dan Lim Chin Aik, B v DPP*, semuanya di atas. Kasus serupa terjadi di New South Wales. Dalam *Turnbull* (1944) 44 NSWLR 108, frasa 'dengan sengaja membuat' seorang gadis di bawah 18 tahun berada di rumah yang terkenal buruk, bertentangan dengan pasal 91D Undang-Undang Kejahatan 1900, dibacakan sehingga terdakwa bersalah hanya jika ia mengetahui hal tersebut. gadis itu berusia di bawah 18 tahun (lih. Pangeran di atas). Kasus sebaliknya termasuk *Cundy*, di atas, yang disetujui dalam *Hobbs v Winchester Corp* [1910] 2 KB 471, dan *Neville v Mavroghenis* [1984] Crim LR 42: dalam kasus terakhir, yang mengacu pada pasal 13(4) dari Undang-Undang Perumahan Pada tahun 1961, pengadilan memutuskan bahwa sub-bagian tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yang satu mengandung 'sengaja', dan yang lainnya tidak: bagian kedua dianggap ketat. Yang kurang lebih serupa adalah pernyataan Lord Goff dalam *PSGB v Storkwain Ltd* [1986] 1 WLR 903 (HL) bahwa dalam *Medicines Act 1968* Parlemen telah memperjelas dengan menggunakan atau menghilangkan kata mens rea mana pelanggaran yang berat dan mana yang berat. bukan. Namun harus dikatakan bahwa ada atau tidaknya mens rea word lebih bergantung pada keanehan penyusunannya daripada pemikiran sebelumnya. Misalnya, Lords Steyn dan Hutton dalam *B v DPP* mengatakan bahwa, meskipun dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 sebagian ditujukan untuk melindungi kelompok rentan, undang-undang konsolidasi tersebut berisi campuran kejahatan yang berbeda-beda, sehingga fakta bahwa laki-laki rea dinyatakan dalam beberapa bagian tetapi tidak pada bagian lain tidak berarti bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran tanggung jawab yang ketat.

Fakta adanya pembelaan atas uji tuntas merupakan indikasi yang baik bahwa pelanggaran tersebut bersifat serius. Jika pelanggarannya tidak berat, maka tidak perlu ada pelanggaran 'no lalai' karena penuntut harus membuktikan kesalahannya, kelalaiannya. Pasal 7(1) Undang-Undang Anak dan Remaja tahun 1933 memberikan pembelaan untuk melakukan

semua tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan uji tuntas terhadap kejahatan penjualan tembakau kepada anak di bawah 16 tahun.

Pedoman di atas hanyalah pedoman, meskipun tunduk pada apa yang dikatakan House of Lords dalam *B v DPP* dan *K*. Sangat mudah untuk menunjukkan kasus-kasus yang tidak konsisten. Dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh Parlemen, kita harus melihat kata-kata dalam undang-undang dan niat Parlemen, seperti yang dinyatakan oleh pengadilan. Kata-katanya penting, mis. jika Undang-undang mengatakan 'dengan sadar' maka harus dibuktikan bahwa terdakwa bertindak dengan sadar: *Westminster CC v Croyalgrange Ltd* [1986] 1 WLR 674 (HL), dengan sengaja mengizinkan tempat untuk digunakan sebagai tempat usaha seks. Beberapa hakim telah melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa persyaratan *mens rea* dianggap perlu ketika Parlemen tidak menyatakannya. Brett MR dalam *Jaksa Agung v Bradlaugh* (1885) 14 QBD 689 berkata:

Hal ini bertentangan dengan seluruh hukum yang berlaku di Inggris (kecuali undang-undang mengenai hal tersebut dengan jelas memberlakukannya) untuk mengatakan bahwa seseorang dapat bersalah atas suatu kejahatan di Inggris tanpa niat yang salah. Sentimen serupa berlimpah, mis. *Gua J dalam Tolson* di atas menyatakan bahwa penghapusan *mens rea* adalah: sangat menjijikkan dari sudut pandang moral sehingga kita memerlukan bukti yang paling jelas dan tak terbantahkan bahwa itulah makna Undang-undang tersebut.

Dalam salah satu kasus terpenting mengenai topik ini, *Sweet v Parsley*, di atas, Lord Diplock melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa: Fakta bahwa Parlemen telah menetapkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana menimbulkan beberapa implikasi mengenai unsur mental.

Tidak sulit menemukan sentimen sebaliknya. Dalam *Mallinson v Carr* [1891] 1 QB 48, hanya dua tahun setelah *Tolson*, pengadilan memutuskan bahwa undang-undang pidana harus dibaca secara harfiah dan jika tidak ada *mens rea* yang dinyatakan, maka tidak ada yang tersirat. Namun demikian, tren modern yang kuat seperti yang dicontohkan oleh *Sweet v Parsley*, *B v DPP* dan *K* adalah bahwa dalam kata-kata Lord Nicholls dalam kasus kedua, anggapan *mens rea* dalam pelanggaran hukum dapat digantikan hanya dengan 'implikasi yang diperlukan' dengan menggunakan 'memaksa'. bukti jelas'. Bukti tersebut terkadang mudah ditemukan. Undang-Undang Pelanggaran Seksual (Amandemen) tahun 2000, pasal 3(1) (lihat sekarang Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003), menyatakan melakukan aktivitas seksual dengan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun merupakan suatu pelanggaran jika terdakwa mempunyai kepercayaan terhadapnya. Dia mempunyai pembelaan jika dia membuktikan bahwa dia tidak tahu dan tidak dapat diharapkan untuk mengetahui bahwa dia berusia di bawah 18 tahun. Pembelaan ini tidak akan berpengaruh kecuali pelanggarannya sangat ketat sesuai usia. Berikut adalah contoh bahwa Parlemen, berdasarkan bukti yang sangat jelas, bermaksud agar pelanggaran ini ditegakkan.

4.3 BAGAIMANA PENGADILAN MENERAPKAN PEDOMAN INI

Pembaca, setelah memahami apa yang telah dikatakan pada bagian sebelumnya, mungkin merasa ragu mengenai bagaimana hukum yang dinyatakan di sana harus diterapkan.

Bagian ini mengkaji beberapa kasus untuk menunjukkan bagaimana pengadilan menangani masalah ini.

Otoritas yang relevan adalah Bradish [1990] 1 QB 981. Terdakwa ditemukan memiliki tabung berisi gas CS. Ia didakwa memiliki senjata terlarang yang bertentangan dengan pasal 5(1)(b) Undang-Undang Senjata Api tahun 1968. Apakah terdakwa mengetahui bahwa yang dibawanya adalah tabung gas CS? Tidak ada unsur mental yang disebutkan dalam paragraf tersebut. Auld J, saat memberikan keputusan Pengadilan Banding, mengacu pada Warner v MPC [1969] 2 AC 256 karena proposisi bahwa pokok permasalahan yang berbahaya dari kejahatan tersebut, ditambah dengan kata-kata sederhana yang digunakan, mungkin akan membantah anggapan mens rea. Dalam Undang-Undang Senjata Api tahun 1968 tidak ada pengecualian yang memberikan pembelaan kepada terdakwa jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak percaya bahwa barang tersebut berbahaya seperti yang telah dilakukan terdakwa berdasarkan pasal 28(3) Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba tahun 1971. Kasus-kasus sebelumnya telah menganggap bagian lain dari Undang-undang tahun 1968 bersifat ketat. Dalam Howells [1977] QB 614 dan Hussain [1981] 1 WLR 416, s 1, kepemilikan senjata api tanpa sertifikat dianggap sebagai pelanggaran berat; dalam Harrison [1996] Crim LR 200 (CA) s 19, memiliki senapan yang terisi peluru di tempat umum dianggap sebagai kejahatan dengan tanggung jawab yang ketat; sementara di Pierre [1963] Crim LR 513, s 17, penggunaan senjata api untuk melawan penangkapan dianggap ketat. Auld J berkata:

Tujuan yang jelas dari undang-undang senjata api adalah untuk menerapkan kontrol ketat terhadap penggunaan senjata yang sangat berbahaya. Untuk mencapai pengendalian yang efektif dan untuk mencegah konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, diperlukan tanggung jawab yang ketat, seperti halnya dalam bidang narkoba yang sama berbahayanya. . . Mengingat bahwa s 1 dianggap menimbulkan pelanggaran tanggung jawab yang ketat, maka pertimbangan ini berlaku a fortiori terhadap s 5 yang berkaitan dengan senjata yang lebih serius, seperti pistol otomatis dan senapan mesin, dan mengenakan hukuman maksimum yang lebih tinggi.

Dia menambahkan: 'kemungkinan dan konsekuensi dari penghindaran akan terlalu besar untuk pengendalian yang efektif' jika pelanggaran tersebut bukan merupakan tanggung jawab yang ketat, dan 'dengan argumen bahwa pemilik atau pembawa senjata api atau senjata terlarang tidak bersalah berada dalam risiko hukuman yang tidak adil harus ada keseimbangan antara kebijakan publik yang penting di balik undang-undang yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan senjata berbahaya tersebut'.

Oleh karena itu, pengadilan mengacu pada keputusan pada bagian lain dari Undang-undang tahun 1968 dan masalah berbahaya lainnya, yaitu narkoba. Yang menarik dari kasus-kasus lain adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa hukuman yang berat merupakan salah satu faktor yang membuat pelanggaran tersebut dianggap berat, sedangkan dalam kasus-kasus lain hakim mengatakan bahwa karena hukumannya rendah, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang diatur dan sangat ketat. ! Kasus perbandingannya adalah Berry (No. 3) [1995] 1 WLR 7. Terdakwa didakwa membuat bahan peledak, pengatur waktu elektronik, bertentangan dengan pasal 4(1) Undang-Undang Bahan Peledak tahun

1883. Bagian tersebut memberikan hukuman 'orang yang membuat atau dengan sengaja mempunyai atau menguasai bahan peledak apa pun 'Kata 'dengan sadar' tidak ditempatkan sebelum 'membuat' tetapi kata tersebut tersirat dalam Pengadilan Banding. Pengadilan tidak memberikan alasan untuk tidak mengikuti perselisihan yang berhasil terjadi di otoritas senjata api. Pengadilan beralasan bahwa pembuat bahan tersebut tidak diragukan lagi bahwa dialah yang membuatnya. Dalam penilaian Lord Taylor CJ, penambahan 'secara sadar' 'hanya menekankan bahwa dalam hal penguasaan atau penguasaan itu menjadi landasan, maka terdakwa harus mengetahui barang itu ada dalam miliknya, misalnya di rumahnya atau di mobilnya. Tidak ada orang yang membuat bahan tersebut yang tidak menyadari bahwa dia telah melakukannya.' Hukuman yang diberikan, maksimal 14 tahun, tidak disebutkan, dan tidak ada referensi mengenai perlunya 'pengendalian ketat' terhadap alat peledak.

Ilustrasi kedua tentang aktivitas peradilan di bidang ini adalah Miller [1975] 1 WLR 1222. Terdakwa didakwa mengemudikan kendaraan di jalan raya sambil didiskualifikasi. Pembelaannya adalah dia tidak mengetahui bahwa tempat dia mengemudi adalah 'jalan' dalam pengertian UU Lalu Lintas Jalan. Pengadilan Banding menolak anggapannya. Pertama, meskipun tidak adanya kata 'dengan sadar' atau 'kelalaian' di bagian terkait tidak bersifat konklusif, hal ini merupakan sebuah faktor; kedua, kejahatan tersebut bukanlah kejahatan yang 'benar-benar kriminal', melainkan kejahatan tersebut ada 'untuk menjaga keselamatan masyarakat dengan melarang suatu tindakan yang dikenakan sanksi hukuman'; dan ketiga, otoritas sebelumnya telah memperlakukan pasal tersebut sebagai penerapan tanggung jawab yang ketat. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut sangat berat mengingat prinsip dan presedennya. Kasus yang kontras adalah Phekoo [1981] 1 WLR 1117, dimana Pengadilan Tinggi menyaring faktor-faktor serupa dan mencapai kesimpulan yang berlawanan. Terdakwa harus percaya bahwa orang yang diajaknya melakukan 'tindakan yang diperhitungkan untuk mengganggu kedamaian atau kenyamanan penghuni tempat tinggal' dengan maksud untuk menyebabkan mereka berhenti menempati tempat tersebut yang bertentangan dengan pasal 1(3) dari Undang-undang Perlindungan dari Penggusuran tahun 1977 memang merupakan penghuni tempat tinggal dan bukan, misalnya, penghuni liar.

Contoh lain dari inkonsistensi pengadilan, kali ini di tingkat House of Lords, terlihat dari perbedaan antara Warner v MPC dan Sweet v Parsley, keduanya di atas. Di Warner Yang Mulia, Lord Reid berbeda pendapat, menyatakan bahwa kepemilikan obat-obatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkoba (Pencegahan Penyalahgunaan) tahun 1964 merupakan pelanggaran berat. Lords Morris dan Guest hanya mengikuti kata-kata dalam Undang-undang tersebut. Lord Pearce mempertimbangkan beratnya kejahatan tersebut, sementara dia dan Lord Wilberforce mengatakan bahwa pelanggaran tersebut tidak terlalu ketat karena terdakwa harus mengetahui bahwa dia memiliki sesuatu, yaitu penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dia memiliki sesuatu, dan bila ternyata obat itu adalah obat terlarang, maka terbukti tindak pidananya. (Sejak Warner, ada hukuman karena memiliki resin ganja ketika terdakwa memasukkannya ke dalam dompetnya dua tahun sebelumnya dan melupakannya: Martindale [1986] 1 WLR 1042 (CA).) Pihak yang berbeda pendapat juga melihat keseriusan kasus tersebut. pelanggaran tetapi memutuskan bahwa

karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang serius, mens rea diperlukan. Warner sepertinya mengambil keputusan kebijakan melawan narkoba.

Argumen di Warner ada di benak orang-orang ketika *Sweet v Parsley* mencapai House of Lords. DPR meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ms Sweet tidak peduli dengan pengelolaan rumah pertanian yang digunakan untuk menghisap ganja. Kasusnya melibatkan narkoba, namun Lords tidak menghukumnya. Lord Reid mengulangi poin stigma dari Warner: kejahatan tersebut tidak ketat karena orang yang bersalah mengalami stigma sosial. Mens rea memang bisa diduga, namun anggapan itu bisa dibantah. Apakah tindakan tersebut tidak bergantung pada apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau merupakan tindak pidana semata-mata karena tuntutan kesejahteraan masyarakat. Lord Pearce mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki kendali atas orang-orang di rumah pertanian dan oleh karena itu tidak bersalah. House of Lords memutuskan bahwa, untuk tujuan pasal 5(b) Undang-Undang Narkoba Berbahaya tahun 1965, tujuan yang disebutkan haruslah tujuan manajer tempat tersebut. Di sini tujuannya bukan untuk menyediakan tempat yang akan digunakan untuk tujuan merokok ganja. Tujuannya adalah untuk menyediakan rumah tinggal bagi para 'beatnik'. Tidak jelas apakah Parlemen benar-benar menginginkan pasal 5(b) ditafsirkan sebagaimana yang dilakukan oleh Yang Mulia. Salah satu bacaan dari undang-undang tersebut adalah bahwa Ms Sweet prihatin dengan pengelolaan tempat tersebut dan tempat tersebut digunakan untuk tujuan merokok ganja. Jika konstruksi itu benar, Ms Sweet seharusnya dinyatakan bersalah. Jika Anda seorang mahasiswa di asrama, bayangkan apa yang akan dipikirkan oleh otoritas perguruan tinggi Anda mengenai hasil tersebut! Tentu saja House of Lords sangat ingin membebaskan Nona Sweet, dan meskipun putusannya sangat banyak, kasus ini tidak memberikan panduan yang pasti untuk masa depan. *Sweet v Parsley* dinilai menandai perubahan sikap para juri. Jika Parlemen mengesahkan perundang-undangan dan tidak melakukan tindakan apa pun mengenai mens rea, sikap diam tersebut dianggap berarti bahwa tanggung jawab terhadap hal tersebut tidak ketat. House of Lords tidak mengesampingkan kasus-kasus yang tanggung jawabnya dianggap ketat, sehingga anggapan tersebut dapat dibantah. Seperti yang akan kita lihat, kasus-kasus berikutnya terus menerapkan tanggung jawab yang ketat, dan memang *Bradish* [1990] 1 QB 981 menunjukkan Pengadilan Tinggi menjunjung tinggi tanggung jawab yang ketat pasca-*Sweet v Parsley*. Barangkali Sweet berwenang atas proposisi bahwa sejak keputusan tersebut, pengadilan meneliti semua faktor untuk melihat apakah tanggung jawab yang ketat dapat dibenarkan atau tidak: pengadilan tidak menerapkan tanggung jawab yang ketat tanpa berpikir panjang, seperti yang kadang-kadang mereka lakukan di masa lalu. Parlemen mengesahkan hasil Sweet dalam pasal 8(d) Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba tahun 1971, yang mengharuskan penuntut untuk membuktikan bahwa terdakwa bertindak dengan sengaja.

Namun, undang-undang di tempat lain belum diklarifikasi oleh Parlemen, dan pengadilan dibiarkan sendiri. Komisi Hukum Unsur Mental dalam Kejahatan, Laporan No. 89 Tahun 1978, mengatakan hal berikut tentang *Sweet and Warner*: [T]kasus-kasus ini secara jelas menggambarkan perbedaan pandangan dan penekanan yang dapat terjadi bahkan di pengadilan tertinggi ketika berhadapan dengan masalah umum dalam menghubungkan niat

kepada Parlemen sehubungan dengan unsur mental (jika ada) dalam suatu pelanggaran ketika. Parlemen tidak memberikan indikasi jelas mengenai niat tersebut.

Tanggung jawab yang ketat terus menimbulkan pertanyaan di pengadilan tertinggi. Dalam kasus Sheppard di atas, mayoritas berpendapat bahwa jika dengan sengaja mengabaikan, terdakwa harus menyadari bahwa anak tersebut memerlukan perhatian medis. House of Lords berpendapat bahwa pengadilan saat ini cenderung tidak menyatakan bahwa suatu pelanggaran adalah pelanggaran yang ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam kasus pertama yang mencapai Yang Mulia setelah Sweet, *Alphacell Ltd v Woodward* [1972] AC 842, para pemohon dinyatakan bersalah karena menyebabkan limbah cair memasuki sungai dari pabrik mereka, bertentangan dengan pasal 2(1)(a) dari Rivers (Pencegahan Polusi) Act 1951, dengan demikian menunjukkan bahwa House of Lords masih bersedia menerapkan tanggung jawab yang ketat. Para pemohon telah menyebabkan pencemaran melalui desain sistem penanganan limbah cair. Dengan membangun saluran pembuangan dari sistem mereka ke sungai, mereka menyebabkan limbah masuk ke sungai ini ketika sistem mereka tidak mampu mengatasinya. Lords Wilberforce dan Cross hanya melihat kata-kata dalam undang-undang tersebut dan memberikan arti yang masuk akal untuk 'menyebabkan', sebuah istilah yang tidak memerlukan *mens rea*. Viscount Dilhorne mempertimbangkan sifat pelanggarannya, namun tidak seperti Lord Wilberforce, dia menekankan bahwa bagian tersebut mengatakan 'penyebab atau dengan sengaja mengizinkan': bagian tersebut tidak mengatakan 'dengan sengaja menyebabkan atau mengizinkan', yaitu posisi istilah *mens rea* sangat penting. Jika dalam ayat tersebut disebutkan 'dengan sengaja menyebabkan atau mengizinkan', maka 'izin' menjadi tidak masuk akal, karena 'dengan sengaja menyebabkan' termasuk 'dengan sengaja mengizinkan'. Lord Salmon nama baik bagi seorang hakim yang berurusan dengan polusi menunjukkan konsekuensi sosial yang serius yang akan terjadi jika pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab yang ketat: polusi tidak akan dapat dikendalikan jika kelalaian harus dibuktikan. Ia menyatakan, jika terdakwa tidak bertindak dengan *mens rea*, maka hanya dikenakan denda ringan. Ia menambahkan: 'Hal ini dapat dianggap sebagai bahaya yang tidak adil dalam menjalankan bisnis yang dapat menyebabkan polusi di tepi sungai.' Dengan kata lain, perusahaan yang membangun pabrik di tepi sungai bertindak atas risiko yang mereka tanggung. Seperti yang diungkapkan M. Cremona dan J. Herring dalam *Criminal Law 2nd edn* (Macmillan, 1998) 83 (bukan dalam 5th edn (Palgrave, 2007, oleh J. Herring):

Maka, pertanyaannya adalah untuk mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan publik: dalam Sweet v Parsley, stigma hukuman dianggap penting: dalam *Alphacell Ltd v Woodward*, bukti adanya polusi diberi bobot yang lebih besar. Hal ini kemudian diperkuat dengan mengkarakterisasi pelanggaran dalam kasus pertama sebagai 'benar-benar kriminal', dan dalam kasus terakhir sebagai 'semu-kriminal'.

Meskipun para terdakwa dinyatakan bersalah di *Alphacell*, House of Lords berusaha keras untuk menekankan bahwa terdakwa lain yang didakwa dengan pelanggaran yang sama bukannya tidak berdaya. Lord Wilberforce menyatakan bahwa terdakwa akan mendapat pembelaan jika tindakan yang menyebabkan pencemaran adalah tindakan pihak ketiga, Lord

Pearson akan memberikan pembelaan jika pembuangan limbah adalah tindakan Tuhan atau akibat campur tangan pelanggar, dan Lord Cross mengatakan bahwa ada pembelaan jika kejadian tersebut terjadi di luar kendali terdakwa atau di luar perkiraannya. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pemilik pabrik di tepi sungai tidak bersalah karena menyebabkan pencemaran jika kerugian tersebut disebabkan oleh perusak atau pengemudi truk yang menumpahkan minyak solar.

Dalam *B v DPP* di atas, House of Lords terpecah belah apakah menafsirkan kata-kata dalam suatu undang-undang sehingga pembacaan *mens rea* efektif dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Lord Hutton berkata: 'Tujuan ini mungkin terhambat jika kebahagiaan dan stabilitas anak di bawah 14 tahun dirusak oleh pelanggaran terhadap kepolosannya oleh tindakan tidak senonoh atau hasutan untuk melakukan ketidaksenonohan yang dilakukan oleh orang yang secara jujur beriman. bahwa anak tersebut berusia lebih dari 14 tahun', sedangkan Lord Nicholls menyatakan: 'Tidak ada kesepakatan umum bahwa tanggung jawab yang ketat diperlukan untuk penegakan hukum yang melindungi anak-anak dalam masalah seksual.' Tentu saja *B v DPP* dan *K* telah dikritik habis-habisan oleh para komentator karena tidak melindungi anak-anak. Di antara kritik yang kurang mengecam adalah (mohon ganti dengan) C. M. V. Clarkson, H. Keating dan S. R. Cunningham, *Criminal Law: Text and Materials*, edisi ke-6 (Thomson, 2007) pada tahun 200: 'dasar dari *K* cacat. Dampak dari kasus ini adalah seorang pedofil paruh baya dapat lepas dari tanggung jawab atas [kejahatan yang ada saat itu, yaitu] penyerangan tidak senonoh terhadap seorang gadis di bawah usia 16 tahun atas dasar bahwa ia benar-benar yakin, meskipun secara tidak masuk akal, bahwa gadis tersebut berusia 16 tahun. Tentu saja, jika pria lanjut usia ingin berhubungan seks dengan "anak-anak", mereka harus memastikan bahwa orang tersebut setidaknya berusia 16 tahun'

Bahkan dalam kaitannya dengan kejahatan seks, pengadilan terkadang masih menafsirkan undang-undang untuk memberikan pertanggungjawaban yang ketat. Contohnya adalah *G* [2006] 1 WLR 2052. Pengadilan Banding menyatakan bahwa pasal 5 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003, pemerkosaan terhadap anak di bawah 16 tahun, merupakan pelanggaran yang sangat ketat sesuai dengan usia korban. Pengadilan mengatakan dengan mengacu pada bagian lain dari Undang-undang tersebut bahwa hal ini memang demikian 'dengan implikasi yang diperlukan', menggunakan kata-kata Lord Steyn dalam *K*. Bagian terdekat lainnya mengacu pada keyakinan yang masuk akal mengenai usia, sedangkan pasal 5 tidak. Oleh karena itu, terdakwa tetap bersalah atas pelanggaran ini meskipun ia yakin dengan alasan yang masuk akal bahwa anak tersebut berusia di atas 13 tahun. *HL* [2008] UKHL 37 berkonsentrasi pada dampak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Doring [2002] *Crim LR* 817 (CA) membedakan *B v DPP* dan *K* dalam efeknya. Pengadilan Banding memutuskan, bagaimanapun, pelanggaran bertindak sebagai direktur suatu perusahaan sebagai orang yang pailit yang belum dibebaskan dan terlibat dalam pengelolaan perusahaan yang dikenal dengan nama terlarang. Lord Steyn di *K* berkata: 'anggapan [*mens rea*] hanya dapat digantikan dengan bahasa tertentu, yaitu ketentuan yang tegas atau implikasi yang diperlukan.' Namun pengadilan tidak hanya memperhatikan bahasa yang

digunakan tetapi juga kepentingan umum, yang mana setelah *B v DPP dan K*, pengadilan tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Buxton LJ mengatakan bahwa *B v DPP* tidak mengimbangi yurisprudensi yang sudah ada sebelumnya sehingga 'kebijakan sosial dan kehati-hatian' dapat menggantikan anggapan *mens rea*.

Penyebutan singkat juga harus dilakukan mengenai *Wings Ltd v Ellis* [1985] AC 272. Terdakwa didakwa membuat pernyataan palsu yang mereka tahu tidak benar, bertentangan dengan pasal 14(1)(a) dari *Trade Descriptions Act 1968*. Terdakwa telah menerbitkan deskripsi palsu di brosur perjalanan, menyadari kesalahannya, dan memperbaikinya, namun seseorang telah membaca brosur yang tidak dikoreksi. House of Lords memutuskan bahwa mereka bersalah, dan menyatakan bahwa hasilnya sesuai dengan tujuan undang-undang. Oleh karena itu, tanggung jawab yang ketat diberlakukan, meskipun terdakwa telah melakukan yang terbaik untuk mencegah siapa pun mengandalkan brosur untuk memesan liburan.

Seseorang mungkin setuju dengan Wright J dalam *Sherras v de Rutzen*, di atas: 'Ada banyak kasus mengenai masalah ini dan tidak mudah untuk merekonsiliasinya.'

Kita tidak selalu bisa memprediksi apakah *mens rea* akan diimpor. Sebaiknya Parlemen menyelesaikan undang-undang tersebut. House of Lords dalam kasus *B v DPP dan K* telah memberikan keputusan tegas kepada Parlemen: pelanggaran hanya akan diperberat jika Parlemen secara tegas menyatakan demikian atau jika hal tersebut merupakan implikasi yang diperlukan. Salah satu upaya untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin mempengaruhi pengadilan dikemukakan oleh Lord Pearce dalam *Sweet v Parsley*, di atas:

Sifat kejahatan, hukumannya, tidak adanya fitnah sosial, kejahatan tertentu dan bidang kegiatan di mana kejahatan tersebut terjadi, serta kata-kata pada bagian tertentu dan konteksnya dapat menunjukkan bahwa Parlemen bermaksud agar tindakan tersebut harus dilakukan. dicegah dengan hukuman apapun niat atau pengetahuannya.

Diktum ini berpengaruh dan diterapkan, misalnya, *Pheko* [1981] 1 WLR 1117, lihat di atas. Pertimbangan seperti ini mungkin mengesampingkan anggapan *Sweet* bahwa Parlemen tidak berniat melakukan pelanggaran berat. Kasus yang menggambarkan bantahan terhadap anggapan *mens rea* adalah *PSGB v Logan* [1982] Crim LR 443 (Croydon Crown Court). Terdakwa didakwa menjual produk obat yang tidak ada dalam daftar penjualan umum tanpa diawasi oleh apoteker, bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang Obat tahun 1968. Hakim mengatakan: Parlemen bermaksud membatasi penjualan produk obat di pasar obat. kepentingan keselamatan; produk dapat dikunci atau toko tutup bila apoteker tidak ada; pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran yang benar-benar kriminal: oleh karena itu, kejahatannya sangat ketat. Terlebih lagi, mengatakan bahwa pelanggaran berat melibatkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan sosial tidaklah tepat sasaran. Pemerkosaan dan pembunuhan, keduanya merupakan kejahatan *mens rea*, merupakan keprihatinan sosial.

Perlu dicatat bahwa ketika pengadilan menyatakan bahwa mereka mencari maksud dari Parlemen, mereka sebenarnya tidak melakukan hal tersebut, karena sebagai akibat dari peraturan penyangkalan diri, mereka tidak dapat dengan mudah memiliki akses terhadap materi terbaik yang tersedia, Hansard, laporan dari proses persidangan di Parlemen, untuk mengetahui apa maksud sebenarnya dari Parlemen, kecuali kata-kata yang menimbulkan

pelanggaran bersifat ambigu (*Pepper v Hart* [1993] AC 593); itu selalu asalkan tubuh dapat memiliki keadaan pikiran. Seringkali *Hansard* tidak membantu. Dalam *B v DPP* di atas, *Rougier J* di Pengadilan Divisi mengatakan bahwa perlunya *mens rea* tidak dibahas di DPR mana pun dan *Lord Steyn* di *House of Lords* mencatat bahwa Laporan Komite Revisi Hukum Pidana yang mengarah pada pembentukan kejahatan yang dipermasalahkan juga tidak membahasnya.

4.4 ALASAN TANGGUNG JAWAB YANG KETAT

- (a) Jika seseorang menjalankan bisnis dengan baik, hukum tidak boleh dilanggar. Jika dia melakukan kejahatan *actus reus*, dia menjalankan bisnisnya dengan tidak semestinya. (Namun, tidak semua pelanggaran berat melibatkan bisnis. Kejahatan di *Prince* dapat dilihat sebagai moralitas publik.)
- (b) Kegiatan tertentu harus dilarang demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang merugikan masyarakat harus dihentikan. Beberapa di antaranya merupakan pelanggaran peraturan (di Amerika disebut sebagai pelanggaran 'pedagang'), namun ada pula yang bukan merupakan pelanggaran, khususnya pelanggaran narkoba. Argumen utilitarian terkadang dikemukakan: ada manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan standar daripada tidak menghukum orang yang tidak bersalah. *Yeandel v Fisher* [1966] 1 QB 440 menggambarkan prinsip tersebut. *Lord Parker* berkata: 'Narkoba merupakan bahaya besar saat ini dan undang-undang telah memperketat pengendalian narkoba.' Pengadilan mencari aktivitas yang berbahaya secara sosial ketika mereka menerapkan doktrin pertanggungjawaban yang ketat. Jadi dalam *Searle v Randolph* [1972] Crim LR 779 terdakwa bersalah memiliki ganja ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki puntung rokok, tetapi tidak mengandung ganja. Selain itu, pelanggaran peraturan mungkin lebih serius daripada kejahatan 'standar'. *Leonard Leigh* memberikan contoh ini dalam bukunya *Strict and Vicarious Liability* (*Sweet & Maxwell*, 1982): 'Apakah jelas bahwa pencurian merupakan pelanggaran yang lebih berat terhadap aturan dasar dibandingkan dengan pencemaran pantai di sebuah resor yang bergantung pada perdagangan musim panas untuk mencapai kesejahteraan?'

Sebagaimana dinyatakan di atas, jenis perilaku tertentu lebih menarik tanggung jawab ketat dibandingkan yang lain, misalnya. polusi (*Alphacell*, di atas), beberapa pelanggaran pemegang lisensi, mis. menyajikan alkohol kepada pemabuk (*Cundy v Le Cocq*, di atas), dan kejahatan anti-inflasi (*St Margaret's Trust* [1958] 2 All ER 289). Seperti yang dikatakan *Donovan J* dalam kasus terakhir:

Tidak ada gunanya menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh melanggar pertahanan terhadap banjir, dan pada saat yang sama memaafkan siapa pun yang melakukannya dengan tidak bersalah.

Ia mengatakan, tidak ada praduga *mens rea*. Demikian pula peraturan mengenai pangan sering kali sangat ketat, misalnya. *Pearks Gunston dan Tee v Ward* [1902] 2 KB 1: menjual makanan dengan kualitas yang tidak sesuai permintaan. Beberapa pelanggaran lalu lintas jalan raya bersifat ketat, seperti mengemudi di jalan

raya saat didiskualifikasi (Miller [1975] 1 WLR 1222, di atas), namun tidak semuanya didiskualifikasi. Kita harus mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan sebelum kita dapat tidak melaporkannya: *Harding v Price*, di atas, dan kejahatan mengemudi berbahaya, yang dihapuskan pada tahun 1977, tidak ketat: *Gosney* [1971] 2 QB 674.

Kasus-kasus berikut memberikan beberapa pelanggaran peraturan yang dianggap ketat: terlibat dalam penyelenggaraan hiburan musik publik (pesta acid house) di tempat yang tidak memiliki izin: *Chichester DC v Silvester* (1992) *The Times*, 6 Mei (DC), pengadilan mempertimbangkan kejahatan publik yang harus dihindari, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dan kurangnya *mens rea* word dalam sub-sub-ayat yang relevan ketika subayat saudaranya memuat kata-kata *mens rea*; menebang pohon yang melanggar perintah pelestarian, meskipun undang-undang tersebut memuat kata 'dengan sengaja': *Maidstone BC v Mortimer* [1980] 3 All ER 502; tidak menyekolahkan anak secara rutin: *Crump v Gilmore* [1970] Crim LR 28; tidak memberikan pemberitahuan 28 hari sebelumnya mengenai pekerjaan yang menggunakan asbes biru dan tidak memberikan perlindungan terhadap asbes kepada pekerja: *Atkinson v Sir Alfred McAlpine & Son Ltd* (1974) 16 KIR 220; melaksanakan pekerjaan tidak sah pada bangunan yang terdaftar: *Wells St Magistrates* [1986] 1 WLR 1046; terdakwa tidak perlu mengetahui bahwa bangunan tersebut terdaftar. Kekhawatiran publik atas serangan Rottweiler dan pit bull terrier adalah salah satu alasan untuk memutuskan bahwa kejahatan menjadi pemilik seekor anjing yang lepas kendali di tempat umum adalah tindakan yang tegas: *Bezzina* [1994] 1 WLR 1057 (CA). Pemiliknya tidak perlu mengetahui bahwa anjingnya mungkin berperilaku berbahaya. Demikian pula, terdakwa tidak perlu mengetahui bahwa ia telah mengizinkan seekor anjing berbahaya memasuki tempat terlarang: *Greener* (1996) 160 JP 265. Pengadilan Divisi memutuskan bahwa jika *mens rea* harus dibuktikan, hukuman akan hampir mustahil jika terdakwa terbukti. tidak menemani anjingnya. Dalam kedua pelanggaran terakhir, pengadilan tidak menerima argumen bahwa kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara bukanlah pelanggaran berat. Prinsip ini melampaui pelanggaran peraturan. Dalam *Densu* [1998] 1 Cr App R 400 (CA) terdakwa dihukum karena membawa senjata ofensif, meskipun dia tidak mengetahui tujuannya. Benda itu adalah tongkat teleskopik, tapi dia mengira itu adalah tongkat udara.

Seperti dapat dilihat dari kasus narkoba, prinsip dalam bagian ini tidak terbatas pada apa yang orang awam mungkin tidak anggap sebagai kejahatan, namun mencakup kepemilikan paspor yang diubah (*Chajutin v Whitehead* [1938] 1 KB 306) dan iklan untuk pengembalian barang 'tidak ada pertanyaan yang diajukan' (*Denham v Scott* (1983) 77 Cr App R 210). Pengadilan menyatakan bahwa sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, mereka tidak mencoba untuk menghukum tindakan tertentu namun melarangnya. Misalnya, dalam putusan terakhir, pengadilan mengatakan bahwa tidak ada stigma yang melekat pada terdakwa yang melakukan kejahatan: dia tidak membaca iklan; perbuatan tersebut bertentangan dengan kebijakan publik: pelanggaran tersebut tidak benar-benar merupakan tindak pidana,

dan hukum tidak mungkin ditegakkan jika pelanggaran tersebut bersifat mens rea one. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab yang ketat dapat dibenarkan.

- (c) Kesulitan pembuktian dapat diatasi jika penuntut tidak harus membuktikan mens rea. Orang yang bersalah tidak akan lolos karena kurangnya bukti. Faktor ini telah disebutkan dalam beberapa kasus, misalnya. *Maidstone BC v Mortimer*, di atas. Alasan ini berlaku khususnya bagi perusahaan. Misalnya, seseorang tidak perlu menunjukkan bahwa salah satu direktur, yang merupakan pimpinan perusahaan, mengetahui bahwa perusahaannya membuang limbah ke sungai.
- (d) Lebih mudah untuk menegakkan hukum ketika mens rea tidak relevan dibandingkan ketika penuntut harus membuktikannya. Alasan ini disebutkan oleh Dewan Penasihat dalam *Lim Chin Aik* [1963] AC 160, lihat di atas, dan disetujui oleh Lord Diplock dalam *Sweet v Parsley* di atas. Sebuah ilustrasi yang cukup baru mengenai cara berpikir ini terjadi dalam kasus Dewan Penasihat berikut ini.

Gammon (Hong Kong) Ltd v Jaksa Agung Hong Kong [1985] AC 1

Para terdakwa didakwa melakukan penyimpangan materil dari rencana bangunan yang telah disetujui, bertentangan dengan Undang-undang Bangunan Hong Kong. Mereka beralasan tidak bersalah karena tidak mengetahui bahwa penyimpangan tersebut bersifat materil. Komite Yudisial berpendapat bahwa pelanggaran tersebut tidak memerlukan pengetahuan jika penyimpangan tersebut bersifat material dan bahwa pelanggaran tersebut tidak memerlukan pengetahuan tentang materialitas penyimpangan dari rencana. Menegaskan deliknya berarti orang-orang yang berkedudukan sebagai terdakwa wajib melakukan pengendalian dan kewaspadaan untuk menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk mengatur lokasi bangunan yang berbahaya bagi pekerja dan masyarakat. Perlindungan masyarakat akan sangat melemah jika pelanggarannya tidak dilakukan dengan tegas. Oleh karena itu, tujuan pelanggaran tersebut adalah untuk menjaga standar dan mens rea tidak relevan dengan tujuan tersebut.

Gammon memberikan contoh yang baik tentang pendekatan hakim Inggris saat ini dalam menganalisis apakah suatu kejahatan bersifat ketat atau tidak. Pertama, Lord Scarman menyatakan adanya praduga mens rea; kedua, anggapan ini dapat dihilangkan dengan mempertimbangkan kata-kata dan pokok bahasan undang-undang tersebut (dalam hal ini ada 'keprihatinan sosial' dalam 'keselamatan publik'), dan dengan menyelidiki apakah tindakan tersebut 'benar-benar kriminal' (a frase tendensius, harus dikatakan) dan apakah tanggung jawab yang ketat akan membantu dalam mencegah tindakan terlarang; ketiga, hukuman maksimumnya cukup besar, namun fakta tersebut hanya menunjukkan betapa seriusnya Hong Kong memandang kurangnya pengawasan terhadap lokasi pembangunan. Gammon, yang merupakan kasus Dewan Penasihat, tunduk pada keputusan House of Lords dalam *B v DPP* dan *K* bahwa anggapan mens rea dapat digantikan hanya jika Parlemen secara tegas menyatakan demikian atau jika anggapan tersebut dikecualikan karena implikasi yang diperlukan. Terlebih lagi, bukankah semua undang-undang mencerminkan 'kepedulian sosial'? Gammon sering dikutip dalam kasus-kasus tersebut, misalnya. *Bezzina*, di atas. Contohnya adalah *Collett* [1994] Crim LR 607. Penggunaan tanah yang bertentangan dengan

pemberitahuan penegakan perencanaan merupakan kejahatan pertanggungjawaban yang ketat karena tujuan di balik undang-undang yang relevan adalah untuk mendorong pengguna tanah untuk memeriksa apakah pemberitahuan tersebut berlaku. Contoh lainnya adalah Brockley (1994) 99 Cr App R 385 (CA). Undang-undang yang melarang orang yang bangkrut untuk menjadi direktur perusahaan adalah masalah kepedulian sosial. Jika tidak, ia dapat menghindari konsekuensi kebangkrutannya dengan mengubah dirinya menjadi sebuah perusahaan. Jika penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia tidak dibebaskan, hal ini akan melemahkan keinginan Parlemen. Gammon diterapkan atas dasar bahwa, dalam kata-kata Lord Scarman, 'penciptaan tanggung jawab ketat akan efektif untuk memajukan objek undang-undang dengan mendorong kewaspadaan yang lebih besar untuk mencegah dilakukannya tindakan yang dilarang'. Henry LJ mengatakan bahwa 'tidak dapat diterima' bagi seorang bangkrut yang tidak bertanggung jawab untuk mengubur kepalanya di pasir dan dengan demikian gagal untuk menetapkan status sebenarnya. Dalam Blake [1997] 1 WLR 1167 Pengadilan Banding menyatakan bahwa kejahatan penggunaan peralatan untuk telegrafi nirkabel merupakan pelanggaran berat karena dengan melakukan hal tersebut akan mendorong operator radio untuk menghindari melakukan pelanggaran tersebut, dan mengganggu layanan darurat dan komunikasi udara. Pengendalian lalu lintas merupakan urusan keselamatan masyarakat, padahal pelanggaran tersebut benar-benar merupakan tindak pidana karena ada kemungkinan pidana penjara. Gammon diterapkan. Ilustrasi terbaru penerapan Gammon adalah Jackson [2006] EWCA Crim 2386, yang menyatakan bahwa menerbangkan pesawat militer di bawah 100 kaki merupakan pelanggaran tanggung jawab ketat.

Penerapan Gammon adalah Harrow London Borough Council v Shah [1999] 2 Cr App R 457 (DC). Para terdakwa didakwa menjual tiket Lotere Nasional kepada anak-anak di bawah 16 tahun yang bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Lotere Nasional tahun 1993. Mereka percaya dengan alasan yang masuk akal bahwa pembelinya berusia di atas 16 tahun namun sebenarnya dia berusia 13 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia, Mitchell J berpendapat bahwa pelanggaran tersebut bukanlah tindak pidana yang sebenarnya (mengggunakan bahasa Wright J dalam Sherras v de Rutzen [1895] 1 QB 918 dan Lord Reid dalam Sweet v Parsley [1970] AC 132), bahwa perjudian merupakan isu yang menjadi perhatian sosial khususnya bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun, bahwa hukuman maksimum, dua tahun, meskipun berat, tidak meyakinkan (tiga tahun di Gammon), dan bahwa memberikan tanggung jawab yang ketat pada kejahatan ini 'tidak diragukan lagi- mampu mendorong kewaspadaan yang lebih besar dalam mencegah dilakukannya tindakan terlarang tersebut. Ia menambahkan bahwa tidak ada stigma yang melekat pada pelanggaran tersebut, dan keyakinan para terdakwa dapat diperhitungkan saat menentukan hukuman. Tentu saja dalam kritiknya Parlemen bermaksud menjadikan pelanggaran ini sebagai pelanggaran yang 'benar-benar kriminal' ketika mereka menjatuhkan hukuman maksimal dua tahun penjara.

Bahkan setelah pengadilan B v DPP dan K Inggris menerapkan Gammon. Di Muhamad, di atas, Pengadilan Banding mengutip Gammon ketika menangani apakah pelanggaran yang berkontribusi secara material terhadap kebangkrutan melalui perjudian itu ketat. Hukuman

maksimumnya adalah dua tahun penjara, sedangkan hukuman maksimum untuk beberapa pelanggaran lain berdasarkan undang-undang adalah sepuluh tahun, dan oleh karena itu pengadilan tidak yakin apakah pelanggaran tersebut ‘benar-benar kriminal’. (Seperti yang telah kita lihat, dalam kasus Blake, pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara maksimal dua tahun membuat pelanggaran menjadi berat, sedangkan dalam kasus Harrow London Borough Council v Shah, pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara maksimum yang sama tidak membuat pelanggaran menjadi berat.) Pengadilan kemudian membahasnya B v DPP, berpendapat bahwa bahasa, hukuman maksimal dan kepedulian sosial menghasilkan kesimpulan bahwa pelanggarannya berat.

Lord Scarman mengambil pandangan serupa tentang ‘kepedulian sosial’ dalam Wings Ltd v Ellis, di atas. Pendekatannya diikuti dalam PSGB v Storkwain Ltd dan Wells St Magistrates, keduanya di atas. Dalam kasus pertama, terdakwa memberikan obat-obatan dengan resep yang konon ditandatangani oleh dokter. Faktanya, resep tersebut dipalsukan. Para terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Divisi, meskipun mereka ditipu, karena alasan yang dikemukakan oleh Lord Scarman. Saat naik banding, House of Lords mengonfirmasi keputusan tersebut tanpa menyebut Gammon. Memang benar bahwa House of Lords di Storkwin tidak terlalu mempertimbangkan fakta bahwa hukuman maksimalnya adalah dua tahun penjara atau bahwa prinsip yang mendukung mens rea seharusnya dipertimbangkan. Harus diakui bahwa banyak bidang hukum pidana tradisional, seperti pembunuhan dan pemerkosaan, juga merupakan permasalahan sosial, namun bukan merupakan pelanggaran berat. Hal yang sama berlaku untuk bidang non-tradisional, seperti perencanaan. Parlemen kemungkinan besar tidak akan membuat undang-undang yang bukan merupakan permasalahan sosial.

Ketidaksetujuan masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku dapat ditandai dengan penggunaan sanksi tanpa bukti kesalahan. Pelaku bisnis tidak boleh mencemari sungai, dan jika mereka melakukannya, mereka harus membayar biayanya. Tanggung jawab yang ketat mencegah orang lain melakukan pelanggaran yang sama. Doktrin ini mewajibkan masyarakat untuk menerapkan standar kepedulian yang tinggi dalam perdagangan dan aktivitas lainnya. Beldam LJ berkata dalam Hallett Silberman Ltd v Cheshire CC [1993] RTR 32:

‘Alasan terciptanya pelanggaran tanggung jawab ketat adalah untuk memberikan tekanan pada orang-orang yang tidak berpikir panjang dan tidak efisien untuk melakukan seluruh tugas mereka demi kepentingan kesehatan atau keselamatan masyarakat.’ Orang-orang tidak suka nama mereka tercantum di surat kabar, jadi mereka akan berusaha keras agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Fakta bahwa beberapa orang dihukum padahal mereka tidak bersalah tidak seimbang dengan peningkatan standar pada umumnya. Misalnya, di Bezzina, penerapan tanggung jawab ketat dibenarkan oleh pengadilan sebagai dorongan bagi pemilik untuk lebih merawat anjing mereka yang berbahaya dibandingkan sebelumnya.

Karena tanggung jawab yang ketat, pengadilan tidak terbebani dengan penuntutan yang berupaya membuktikan pelanggaran kecil.

Apabila seseorang menimbulkan suatu risiko dan mengambil keuntungan dari risiko itu, maka ia harus bertanggung jawab jika terjadinya risiko itu menimbulkan masalah. Alasan

ini pertama kali dikemukakan oleh Kennedy LJ dalam *Hobbs v Winchester Corp* [1910] 2 KB 471, di atas. Kasus polusi Alphacell di atas dapat memberikan gambaran tentang prinsip ini. Terdakwa bisa saja membuat sistem cadangan untuk membuang limbah cair tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukannya untuk menghemat uang. (Argumen ini tidak bisa diambil terlalu jauh. Argumen ini mengasumsikan bahwa semua aktivitas bisnis dijalankan untuk mendapatkan keuntungan, padahal belum tentu demikian.)

Alasan-alasan ini menunjukkan kepada beberapa orang bahwa pelanggaran berat tidak selalu menjijikkan secara moral, dan bahwa kadang-kadang lebih baik menghukum orang yang tidak bersalah untuk mencegah sejumlah besar orang merusak kesejahteraan daripada membiarkan orang yang tidak bersalah pergi. Namun, beberapa argumen ini terbukti terlalu berlebihan. Tentunya kenyamanan pengacara dalam argumentasi (h) tidak boleh melebihi prinsip *mens rea*. Jika ya, mengapa pembunuhan mempunyai *mens rea*? Akan lebih mudah untuk memvonis seseorang melakukan pembunuhan jika penuntut tidak harus membuktikan adanya niat jahat, namun pembunuhan adalah kejahatan yang memang membutuhkan unsur mental. Argumen seperti itu membawa kita ke bagian selanjutnya.

Alasan mengapa tidak boleh ada pelanggaran tanggung jawab yang ketat

- (a) Seperti yang dikatakan Dickson J di Mahkamah Agung Kanada di Kota Sault Ste Marie (1978) 85 DLR (3rd) 161, tidak ada bukti bahwa standar dimunculkan oleh tanggung jawab yang ketat. Demikian pula dalam kasus *B v DPP* di atas, Lord Nicholls menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan umum apakah tanggung jawab tegas digunakan dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Terlebih lagi, serangkaian denda kecil tidak akan memberikan efek jera. Publisitas yang buruk mungkin merupakan metode yang lebih baik daripada pertanggungjawaban ketat untuk meningkatkan standar.
- (b) Menghukum orang yang tidak secara sukarela melanggar hukum adalah salah secara moral. Orang-orang ini tidak tercela dan tidak seharusnya bersalah. Tidak semua pelanggaran berat bersifat ringan sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman ringan atas pelanggaran hukum dapat diterima secara etis. Misalnya saja dalam kasus *Prince* di atas, hukuman maksimalnya adalah dua tahun penjara, sedangkan dalam kasus *Chajutin v Whitehead* di atas, terdakwa dideportasi.
- (c) Sekalipun seseorang telah melakukan semua tindakan yang wajar, ia bersalah, namun ia tidak pantas dihukum. Misalnya, dalam *Callow v Tillstone* (1900) 83 LT 411 (DC) seorang tukang daging bersalah karena menjual daging yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia meskipun ahli bedah hewan menyatakan daging tersebut sehat. Dalam *PSGB v Storkwain* di atas, seorang apoteker bersalah meskipun resepnya palsu. Dia akan tetap bersalah meskipun dia sudah memeriksakan diri ke dokter.
- (d) Undang-undang tentang tanggung jawab tegas tidak selalu ditegakkan dengan tegas. Pengawas pabrik jarang melakukan penuntutan sampai mereka memperingatkan pemilik tentang pelanggaran. Tentunya aturan seperti ini paling baik ditegakkan melalui mekanisme yang bukan hukum pidana. Dalam keadaan apa pun, harus ada kendali atas keleluasaan untuk melakukan penuntutan. Argumen bahwa penuntutan

jarang diajukan kecuali terdakwa bersalah dikatakan lemah oleh Pengadilan Tinggi dalam kasus *Barnfather v London Borough of Islington*, di atas.

- (e) Kehormatan terhadap hukum berkurang karena orang yang tidak bersalah dihukum. A. A. Cuomo mengatakan dalam (1967) 40 S Cal LR 463, 518, tanggung jawab yang ketat 'hanya dapat menimbulkan rasa frustrasi dan rasa tidak hormat terhadap hukum. . .'. Terdakwa mempunyai keyakinan, namun tidak tercela.
- (f) Masyarakat (misalnya tukang daging, mungkin) akan gulung tikar jika undang-undang pertanggungjawaban yang ketat selalu ditegakkan. Hal seperti ini mungkin tidak diinginkan oleh masyarakat. Seseorang tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Memasukkan pelanggaran berat ke dalam kasus kelalaian akan menjamin terjaganya standar yang masuk akal. Namun, sebagai J. Brady menyatakannya 'Pelanggaran tanggung jawab ketat: sebuah pembenaran' (1972) 8 Crim L Bull 217: Pertama, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa dampak dari pelanggaran pertanggungjawaban ketat telah membuat perusahaan-perusahaan yang memberikan manfaat sosial ini menjadi kurang menarik. [Kedua], . . . seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan (misalnya) perusahaan susu sedemikian rupa untuk mencegah pemalsuan susu tidak boleh dilindungi hanya dengan alasan bahwa ia terlibat dalam usaha yang 'bermanfaat secara sosial'. Orang yang tidak kompeten dalam menjalankan suatu usaha yang mempunyai bahaya kerugian yang meluas. . . tidak terlibat dalam usaha yang 'bermanfaat secara sosial'.
- (g) Ketika seorang hakim menangani suatu pelanggaran berat, dia mengecualikan dari juri semua argumen tentang niat, kecerobohan dan kecerobohan, namun argumen tersebut relevan dengan hukuman. Mereka diajukan ke hakim setelah dinyatakan bersalah. Sebenarnya hakimlah yang memutuskan bagaimana keadaan pikiran terdakwa. Oleh karena itu, tidak benar bila dikatakan bahwa tanggung jawab yang ketat menghemat waktu.
- (h) Pihak berwenang cenderung tidak melakukan penuntutan atas pelanggaran berat kecuali jika terdakwa, secara sengaja atau subyektif, bertindak ceroboh. Karena *mens rea* dipertimbangkan pada tahap pengambilan keputusan untuk mengadili, *mens rea* juga harus dipertimbangkan ketika kejahatan terjadi dan terdakwa diadili.
- (i) Jika kita mempertimbangkan teori-teori hukuman, seseorang yang melanggar aturan tanggung jawab ketat tidak dapat dikenai sanksi secara individu dan tidak ada pencegahan secara umum. Ia tidak akan direformasi berdasarkan putusan bersalah, dan ia tidak akan dilumpuhkan kecuali ia dimasukkan ke dalam penjara atau izinnya dicabut, sanksi yang mungkin tidak sebanding dengan pelanggaran hukum.

Argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab ketat harus seimbang. Pengadilan belum menempatkan argumen-argumen ini dalam urutan prioritas apa pun. Saran untuk reformasi undang-undang yang berkaitan dengan pertanggungjawaban ketat:

- (a) Fiksi bahwa Parlemen bermaksud untuk memperberat atau tidak melakukan pelanggaran tidaklah membantu dan harus dihapuskan. Seperti yang diungkapkan Jordan CJ dalam kasus *Turnbull* di New South Wales (1944) 44 NSWLR 108, lihat di atas,

jika pembuat undang-undang mengetahui bahwa pengadilan akan selalu membacakan *mens rea*, mereka akan segera terbiasa menyatakan apakah pelanggaran yang dilakukan bersifat tegas atau tidak. . Situasi saat ini mengarah pada litigasi dan banyaknya kasus yang dilaporkan, banyak diantaranya yang tidak dapat didamaikan. Komisi Hukum, dalam *The Mental Element in Crime*, Laporan No. 89, 1978, merekomendasikan penghapusan fiksi.

- (b) Salah satu usulan reformasi adalah bahwa semua pelanggaran peraturan harus ditangani oleh pengadilan, bukan pengadilan. Terdakwa akan mengetahui bahwa dia diadili karena pelanggaran kesejahteraan masyarakat, bukan karena kejahatan. Namun, dampak dari kehadiran di pengadilan mungkin sama dengan proses persidangan di pengadilan bagi terdakwa yang akan ditampilkan kepada publik, dan tentu saja beberapa pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkoba, tidak dapat dikeluarkan dari hukum pidana.
- (c) Dalam Laporan No. 89, 1978 (lihat di atas), Komisi Hukum merekomendasikan agar pelanggaran berat tetap berada dalam hukum pidana, namun diperlakukan sebagai kejahatan kelalaian. Proposal ini mirip dengan gagasan 'rumah singgah' Lord Diplock dalam *Sweet v Parsley* di atas. Beban pembuktian akan berada di pihak penuntut. Misalnya, dalam *PSGB v Storkwin*, apoteker tidak akan bersalah kecuali jika penuntut membuktikan bahwa ia tidak memeriksa tanda tangan dokter pada resep tersebut. Salah satu kelemahan dari saran ini adalah bahwa pengadilan mungkin menerapkan standar pelayanan yang sangat tinggi. Dalam *Evans [1963] 1 QB 412* terdakwa, seorang pengemudi pelajar, didakwa melakukan pelanggaran yang menyebabkan kematian karena mengemudi berbahaya, suatu pelanggaran yang telah dicabut. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik, dia menjatuhkan seseorang dan membunuhnya. Pengadilan memutuskan dia bersalah karena dia tidak memenuhi standar yang diharapkan dari seorang pengemudi yang baik. Pendekatan ini membuat kelalaian tidak jauh berbeda dengan pertanggungjawaban ketat, meskipun dakwaan ini memungkinkan terdakwa untuk mengemukakan bukti bahwa ia tidak bersalah.
- (d) Tanggung jawab pembuktian dapat dibebankan pada terdakwa. Terdakwa untuk mendapatkan pembelaan harus menunjukkan bahwa dia tidak memiliki *mens rea* atas pelanggaranannya dan tidak lalai. Lord Reid mengisyaratkan reformasi ini dalam *Tesco Supermarkets Ltd v Natrass [1972] AC 153*. Alasan ini memiliki beberapa dukungan sejarah. Dalam *Grade v DPP [1942] 2 All ER 118*, Humphreys J memperlakukan *Sherras v de Rutzen [1895] 1 QB 918* sebagai kasus di mana terdakwa harus menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui bahwa polisi sedang bertugas. Hari J di *Sherras* mengatakan bahwa penghilangan kata 'secara sadar' mengalihkan beban. Pandangan yang sama diambil dalam *Harding v Price*, di atas, tetapi diragukan dalam *Roper v Taylor's Central Garages (Exeter) Ltd [1951] 2 TLR 284* dan *Lim Chin Aik*, di atas, dan ditolak oleh Lord Pearce dalam *Warner v MPC [1969] 2 AC 256*. Baru-baru ini House of Lords di *B v DPP*, di atas, juga menolak versi 'rumah singgah' ini.

- (e) Kita harus melihat setiap kejahatan untuk melihat apakah ada alasan yang memadai untuk mempertahankan pelanggaran tersebut sebagai salah satu tanggung jawab yang ketat.
- (f) Lord Reid di Warner siap untuk menoleransi tanggung jawab yang ketat ketika orang-orang bekerja di bisnis tertentu seperti pemilik pub dan tukang daging dan di mana hukumannya ringan dan stigmanya kecil. Ia berpendapat bahwa doktrin tersebut hanya dapat ditoleransi untuk melindungi masyarakat, dan ia menganjurkan pembelaan jika 'kecacatan tersebut benar-benar tersembunyi sehingga tidak seorang pun dapat menemukannya'.
- (g) Komentator lain telah mengusulkan pengecualian bagi orang-orang yang tidak ceroboh (pembelaan 'tanpa kelalaian'). Ketentuan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah. Dalam Undang-Undang Pangan tahun 1984, ss 2–3, tuduhan memiliki makanan yang terkontaminasi dapat dibela jika terdakwa dapat menunjukkan bahwa pemalsuan tidak dapat dihindari.
- (h) Salah satu usulan yang paling menarik adalah usulan David Tench dalam pamfletnya *Towards a Middle System of Law, Consumers' Association, 1981*. Ia berpendapat bahwa tidak selalu perlu menjadikan kejahatan sebagai sesuatu yang harus dilarang atau dilarang. dikendalikan. Beberapa bentuk tindakan seperti pembunuhan dan pencurian harus tetap merupakan pelanggaran, namun tindakan lainnya – tidak menunjukkan SIM, parkir di jalur kuning dan sejenisnya – harus dikenakan apa yang disebut 'hukuman perdata' dan tidak dikenakan hukuman penjara atau hukuman penjara. Bagus. Dia menulis: Sungguh menggelikan jika Parlemen terus membuat undang-undang yang menjadikan hal-hal kriminal padahal tidak ada orang beradab yang benar-benar menganggapnya kriminal. Proposal ini akan menghemat waktu dan uang. Tidak akan ada penyelidikan dan tidak perlu pergi ke pengadilan, dan hukuman dapat ditetapkan. Ia menyarankan agar masyarakat lebih siap menaati hukum pidana yang masih berlaku. Ke dalam sistem tengah ini Tench juga akan memasukkan pelanggaran peraturan seperti yang menimpa tukang daging di *Hobbs v Winchester Corp*, di atas, diskriminasi seksual dan ras, sanksi pajak, tindakan pencegahan, dan undang-undang baru tentang privasi. Tench ingin sistem hukum menengah ditangani oleh hakim, yang kini mengadili pelanggaran paling berat. Idenya belum diambil. Namun sanksi perdata kini digunakan di bidang perpajakan langsung dan PPN.
- (i) Baroness Wootton dari Abinger menulis dalam *Kejahatan dan Hukum Pidana*, edisi ke-2 (Stevens, 1981), bahwa kejahatan tidak boleh mengandung *mens rea*. Terdakwa seharusnya bersalah bukan karena kesalahannya, tetapi karena terdakwa telah berbuat pidana. Dia menginginkan pelanggaran yang tegas menggantikan *mens rea* one, dan membiarkan elemen kesalahan menjadi relevan hanya setelah hukuman dijatuhkan untuk tujuan hukuman. Dalam pandangannya (pada 46): Jika Karena fungsi utama Pengadilan dianggap sebagai pencegahan tindakan terlarang, maka tidak ada alasan untuk terganggu oleh banyaknya pelanggaran yang bersifat tanggung jawab ketat. Jika undang-undang mengatakan bahwa hal-hal tertentu tidak boleh dilakukan,

maka tidak masuk akal untuk membatasi larangan ini hanya pada saat-saat di mana hal-hal tersebut dilakukan karena niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya Seorang pria juga sama matinya apakah dia ditikam atau ditabrak oleh pengendara yang mabuk atau yang tidak kompeten.

Dalam pandangannya, pelanggar harus diperlakukan (misalnya diajar untuk mengemudi dengan lebih baik), bukan dihukum. Balasan terhadap upaya penghancuran mens rea ini datang dari sesepuh pengacara kriminal Inggris, J. C. Smith, dalam esainya 'Responsibility in Criminal Law' dalam P. Bean dan B. Whytes (eds), Barbara Wootton (Tavistock, 1986). Smith membalas:

- (a) Orang yang tidak bersalah dan membunuh secara tidak sengaja berhak mendapatkan simpati, bukan stigma.
- (b) Pandangan Wootton akan menstigmatisasi orang yang tidak bersalah dan menempatkan mereka pada kategori yang sama dengan orang yang dengan sengaja melanggar hukum. Orang yang ditanami obat tidak boleh diperlakukan sama seperti orang yang dengan sengaja menyimpan obat dalam jumlah besar.
- (c) Jika kita melihat masalah kesalahan pada tahap pidana, kita tidak bisa menghilangkan kesulitan dalam menentukan derajat kesalahan.
- (d) Tanggung jawab yang ketat mengarah pada hukuman terhadap orang-orang seperti Nyonya Tolson yang dituntut karena bigami meskipun dia mengira suaminya sudah meninggal. Dia dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan dan lima dari 14 hakim di Pengadilan untuk Kasus Mahkota yang Dicaadangkan ((1889) 23 QBD 168). Seharusnya ia tidak dituntut sama sekali, apalagi dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun penjara.
- (e) Wootton menginginkan hukum pidana mencegah terulangnya tindakan terlarang, tetapi Nyonya Tolson tidak akan melakukan hal yang telah dia lakukan lagi.
- (f) Pekerjaan polisi dan pengadilan akan berlipat ganda jika semua pelanggaran hukum pidana yang tidak disengaja harus dituntut.
- (g) 'Menghilangkan unsur kesalahan berarti mengosongkan isi hukum moral' (pada 154). Perlu ditambahkan bahwa pendidikan ulang sebanyak apa pun tidak dapat mengubah perilaku beberapa orang yang dihukum karena pelanggaran berat. Akankah pendidikan ulang membantu tuan tanah dalam *Cundy v Le Cocq* (1884) 13 QBD 207, di atas? Secara keseluruhan, pemabuk itu tidak terlihat mabuk.
- (h) Rancangan KUHP versi 1985, Komisi Hukum, Laporan No. 143, tercantum dalam pasal 24(1):

Kecuali timbul maksud yang sebaliknya, seseorang tidak melakukan pelanggaran Kitab Undang-undang kecuali ia bertindak dengan sengaja, sengaja, atau ceroboh sehubungan dengan masing-masing unsurnya selain unsur kesalahan.

Oleh karena itu, jika Parlemen benar-benar mengindikasikan bahwa suatu pelanggaran bersifat ketat maka penafsirannya harus diadopsi, namun jika Parlemen tidak

menetapkannya, maka pelanggaran tersebut merupakan kejahatan mens rea. Pengadilan akan diizinkan untuk hanya melihat 'syarat-syarat berlakunya'. Ketentuan serupa muncul dalam versi 1989 (UU No. 177):

Setiap pelanggaran memerlukan unsur kesalahan kecerobohan terhadap masing-masing unturnya, selain unsur kesalahan, kecuali ditentukan lain (klausul 20(1)). Seperti versi tahun 1985, versi tahun 1989 tidak akan diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada sebelum Kitab Undang-undang ini ("pelanggaran sebelum Kitab Undang-undang Hukum"). Contoh yang diberikan Komisi Hukum adalah (UU No. 177, 157):

Berdasarkan pasal 147, seseorang melakukan perampokan jika ia memasuki suatu bangunan sebagai pelanggar dengan maksud untuk mencuri di dalam bangunan tersebut. Tidak ada yang dikatakan mengenai kesalahan apa pun yang diperlukan sehubungan dengan fakta bahwa peserta adalah pelanggar. Pelanggaran dilakukan hanya jika peserta mengetahui hal itu, atau ceroboh apakah ia melakukan pelanggaran.

Contoh kedua akan membalikkan *Alphacell Ltd v Woodward*, di atas, secara prospektif: Pelanggaran yang menyebabkan masuknya bahan pencemar ke aliran air dilakukan setelah Kode Etik ini mulai berlaku. Jika tidak ada ketentuan yang sebaliknya maka pelanggaran tersebut memerlukan (a) niat untuk menyebabkan benda tersebut memasuki aliran air atau kecerobohan apakah akan melakukannya, dan (b) pengetahuan bahwa benda tersebut merupakan pencemar atau kecerobohan.

Komisi Hukum berpendapat bahwa pasal 20 akan memperjelas keadaan ketidakpastian hukum yang 'sangat disesalkan'. Perlu dicatat bahwa pasal 20 tidak berlaku jika Parlemen secara tegas atau tersirat telah menyatakan sebaliknya. Alasannya adalah bahwa pengadilan secara konstitusional berkewajiban untuk menerapkan undang-undang yang telah diputuskan oleh Parlemen, baik undang-undang tersebut dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. Kemungkinan terjadinya pelanggaran berat mungkin masih memberikan ruang bagi ketidakpastian.

Kesimpulan

Pelanggaran berat telah ditangani secara panjang lebar karena beberapa alasan.

- (a) Fakta adanya kejahatan semacam itu menunjukkan bahwa hukum pidana tidak didasarkan pada pelanggaran kode moral. Kejahatan adalah apa yang menurut Parlemen atau pelanggaran berat yang menurut hakim adalah kejahatan.
- (b) Dari dalil ini dapat disimpulkan bahwa mens rea tidak berarti suatu kerangka berpikir yang jahat atau bersalah. Moral dan hukum membentuk seperangkat aturan yang berbeda.
- (c) Banyak kejahatan terjadi tanpa ada tindakan yang dilakukan secara sengaja atau ceroboh. Oleh karena itu, mens rea tidak harus ada dalam setiap kejahatan yang berkaitan dengan setiap unsur *actus reus*. Memang demikianlah definisi pertanggungjawaban yang ketat.
- (d) Topik ini mengajak kita melihat dasar pemikiran undang-undang tertentu dan hukum secara umum. Haruskah orang yang tidak secara sadar bersalah dihukum? Bisakah hukum pidana digunakan untuk meningkatkan standar? Mengapa pembunuhan dan

pencemaran sungai merupakan kejahatan? Apakah hukum pidana ditujukan kepada warga negara untuk mengubah perilakunya atau ditujukan kepada polisi, Kejaksaan dan pengadilan untuk menangkap, mengadili dan menghukum mereka yang melanggar standar?

- (e) Topiknya mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran hukum lainnya. Misalnya, jika Parlemen menetapkan bahwa melakukan X adalah suatu pelanggaran, bagaimana pengadilan dapat mengatakan bahwa hanya melakukan X dengan sengaja merupakan suatu kejahatan berdasarkan doktrin kedaulatan Parlemen? Jika ada yang berargumentasi bahwa Parlemen mengesahkan undang-undang dengan latar belakang common law yang mempunyai asas praduga mens rea, mengapa seringkali tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan unsur mentalnya, dan mengapa common law tidak selalu memperkenalkan mens rea? Glanville Williams menyatakannya seperti ini dalam *Hukum Pidana: Bagian Umum*, edisi ke-2 (Stevens, 1961) 260: 'Hukum mens rea termasuk bagian umum dari hukum pidana, dan tidak masuk akal untuk mengharapkan Parlemen setiap saat. itu menciptakan kejahatan baru untuk melakukannya. . .!'
- (f) Hukum bukanlah seperangkat aturan yang harus dipelajari dengan menghafal. Ada hal-hal yang bersifat pasti, namun terkadang hukum terdiri dari prinsip-prinsip yang bobotnya berbeda-beda, tergantung pada keadaan. Berdasarkan fakta-fakta tertentu, mungkin sulit untuk memprediksi apakah pengadilan akan memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan bersifat tegas atau tidak. Namun orang-orang dihukum dan dipenjarakan karena keputusan tersebut. Hukum pidana bukanlah suatu permainan; juga bukan ilmu pasti. Ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, misalnya, mempercepat, dan mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan masyarakat. Memang, bagi sebagian orang itu adalah pekerjaan mereka.
- (g) Studi mengenai dampak undang-undang pertanggungjawaban yang ketat tidak secara tegas mendukung para akademisi yang ingin menghapus doktrin tersebut. Mereka yang terlibat dalam penegakan aturan tersebut tidak selalu menggunakan hukum sebagai modus serangan pertama mereka. Misalnya, dalam menangani kecelakaan di tempat kerja, Inspektorat Kesehatan dan Keselamatan sangat bergantung pada persuasi, namun adanya pelanggaran yang tegas membantu inspektur untuk menegakkan hukum ketika cara lain gagal. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum dalam teori dan hukum dalam praktik.
- (h) Hukum pidana hanyalah salah satu cara untuk mengendalikan kegiatan yang merugikan. Ada pula yang lain seperti peringatan, pengawasan, pemeriksaan, penyitaan peralatan, persuasi, dan tidak memberikan dampak terhadap perilaku salah tersebut.

Terakhir, komentar dari N. Lacey et al., *Reconstructing Criminal Law*, edisi ke-3 (LexisNexis, 2003) 50: 'Contoh dari tanggung jawab ketat adalah . . . dimarginalkan sebagai hal yang luar biasa, relatif tidak serius dan memerlukan pembenaran khusus.' Namun seperti yang telah kita lihat, sekitar setengah dari kalender pidana terdiri dari pelanggaran berat, dan

sebagian besar kejahatan bersifat berat. Tidak ada yang marginal dalam tanggung jawab yang ketat. Ada yang serius, dan sebagai pembenarannya, bagaimana menurut Anda?

Ringkasan

Bab ini membahas doktrin tanggung jawab ketat; yaitu, dalam kejahatan yang, jika menggunakan definisi Smith dan Hogan, tidak ada *mens rea* mengenai satu atau lebih elemen dalam *actus reus*. Ambil contoh, kejahatan seorang tukang daging yang menjual daging jelek. *Mens rea* dapat dianalisis sebagai berikut: (1) tukang daging harus mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah 'menjual'; (2) ia harus mengetahui bahwa yang ia jual adalah 'daging'; (3) namun jika ia bersalah meskipun ia tidak mengetahui bahwa daging yang ia jual itu 'buruk', maka pelanggaran yang dilakukan adalah tanggung jawab berat. Perbedaannya dibuat antara kejahatan absolut (lihat Larssonneur (1933) dan Winzar (1983)) dan tanggung jawab ketat. Ada beberapa kejahatan hukum umum yang bersifat tanggung jawab ketat dan hal ini telah dicatat. Pengadilan-pengadilan dari waktu ke waktu mempunyai pendekatan yang berbeda-beda terhadap pelanggaran tanggung jawab ketat yang mana sumber kejahatannya adalah undang-undang. Pendekatan yang ada saat ini adalah pendekatan yang diadopsi oleh House of Lords dalam dua kasus baru-baru ini dan terdapat perbedaan antara undang-undang saat ini dan pendekatan sebelumnya. Bab ini diakhiri dengan diskusi ekstensif mengenai argumen yang mendukung dan menentang doktrin tersebut, termasuk berbagai saran untuk reformasi (misalnya memperkenalkan pembelaan uji tuntas).

- Pelanggaran berat dan pelanggaran mutlak: Pelanggaran berat harus dibedakan dari pelanggaran mutlak, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki *mens rea* dan tidak ada pembelaan terhadapnya. Namun, kasus-kasus lama menggunakan 'tanggung jawab absolut' sebagai sinonim dari tanggung jawab ketat. Contoh pelanggaran absolut yang ditemukan oleh pengadilan adalah kejahatan sebelumnya ditemukan di Inggris secara ilegal dan pelanggaran ditemukan mabuk di jalan raya. Istilah yang digunakan dalam literatur untuk mengartikan tanggung jawab absolut adalah 'tanggung jawab situasional'.
- Tanggung jawab yang ketat dan kejahatan berdasarkan hukum yang berlaku umum: Jarang sekali dalam hukum umum terdapat kejahatan yang bersifat ketat, namun yang berikut ini adalah: gangguan publik, penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik dan tindakan yang melanggar kesopanan publik.
- Tanggung jawab yang ketat dan kejahatan hukum: Pengadilan menafsirkan undang-undang dan sering kali Parlemen tidak menyatakan *mens rea* yang diperlukan. Dalam hal ini, para hakim mempertimbangkan 'bahasa yang digunakan, sifat pelanggaran, kejahatan yang ingin dicegah, dan keadaan lain yang mungkin membantu dalam menentukan niat apa yang pantas untuk diatribusikan ke Parlemen' (menurut Lord Nicholls dalam *B v DPP* [2000] 2 AC 428 (HL) Yang juga dipertimbangkan adalah apakah terdakwa dapat menghindari melakukan kejahatan dan apakah hukuman maksimumnya berat. Fakta bahwa pertimbangan-pertimbangan ini hanya berupa pedoman berarti bahwa tidak selalu dapat diprediksi bagaimana caranya. Meskipun pandangan pengadilan mengenai pelanggaran berat berbeda-beda selama bertahun-

tahun, pendapat yang ada saat ini adalah adanya anggapan yang cukup kuat bahwa suatu pelanggaran bersifat ketat dan biasanya mens rea dibacakan.

- Argumen yang mendukung dan menentang pertanggungjawaban yang ketat: Terdapat perdebatan selama bertahun-tahun mengenai apakah pertanggungjawaban yang ketat dapat dibenarkan atau tidak. Argumen yang mendukung hal ini adalah kemudahan pembuktian dan anggapan 'pengganggu', yaitu bahwa tanggung jawab yang ketat memaksa orang untuk menerapkan standar yang tinggi. Pendekatan sebaliknya mencakup argumen bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan pada mereka yang tidak bersalah dan tidak boleh diterapkan pada mereka yang tidak dapat dicegah.
- Saran untuk reformasi: Beberapa usulan telah dibuat untuk reformasi undang-undang. Hal ini termasuk mengubah semua pelanggaran berat menjadi pelanggaran yang berbasis kelalaian dan memberikan pembelaan atas uji tuntas terhadap semua pelanggaran berat.

BAB 5

PIHAK-PIHAK UTAMA DAN PELAKU SEKUNDER

Pendahuluan

Arahan Spesimen Tanggung Jawab Bersama Dewan Kajian Yudisial antara lain berbunyi: Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka masing-masing dari mereka dapat memainkan peranan yang berbeda-beda, tetapi jika mereka terlibat bersama-sama sebagai bagian dari rencana atau kesepakatan bersama untuk melakukannya, maka mereka masing-masing bersalah. Kata 'rencana' dan 'kesepakatan' bukan berarti harus ada formalitas apapun. Kesepakatan bisa saja terjadi secara mendadak. Tidak ada yang perlu dikatakan sama sekali. Itu bisa dilakukan dengan anggukan dan kedipan mata, atau tatapan penuh pengertian. Suatu kesepakatan dapat disimpulkan dari perilaku para pihak.

Dewan Pengkajian Yudisial memberikan contoh instruksi hukum kepada hakim pengadilan untuk diberikan kepada juri. Bidang hukum ini sering dikenal sebagai 'partisipasi sekunder'. Grundy adalah ilustrasi topik ini.

Grundy [1989] Krim LR 502 (CA)

Dua terdakwa memukuli seorang polisi di tangga menuju sebuah restoran India. Terdakwa pertama bergabung setelah beberapa detik. Polisi itu menderita patah hidung dan luka lainnya. Ketiganya didakwa. Terdakwa pertama dihukum karena membantu (lihat definisi di bawah) pelanggaran tersebut.

Pengadilan memutuskan bahwa seluruh luka yang diderita polisi tersebut merupakan luka tubuh yang menyedihkan. Terdakwa pertama membantu melakukan pelanggaran segera setelah dia bergabung. Oleh karena itu, tidak penting jika dia bergabung setelah terdakwa lain mulai melukai dan mematahkan hidung petugas. Dua terdakwa lainnya merupakan pelaku utama. Keduanya menyerang petugas. Mereka melakukan tindakan yang merugikan. Terdakwa pertama adalah pelaku sekunder atau pihak yang terlibat dalam cedera selain patah hidung. Di Grundy, orang-orang yang menyebabkan kerugian adalah para pelaku bersama. Prinsipal didefinisikan sebagai orang yang melakukan atau berkontribusi pada *actus reus*. Pihak sekunder atau aksesori adalah seseorang yang mendorong atau membantu kepala sekolah. Definisi-definisi ini, yang dijelaskan di bawah, tunduk pada berbagai pengecualian seperti doktrin hak pilihan yang tidak bersalah, namun dalam situasi fakta umum, definisi-definisi ini sudah cukup.

Dalam kasus-kasus umum, pihak sekunder hanya bersalah jika pelaku melakukan pelanggaran dengan ketentuan *actus reus* dan *mens rea*, meskipun pelaku utama tidak perlu diidentifikasi, apalagi diadili dan dihukum. Prinsip ini disebut 'kewajiban derivatif'. Hukum modern mulai menjauh dari bentuk pertanggungjawaban ini (lihat Howe [1987] AC 417, dibahas di bawah, dan DPP v K&B [1997] 1 Cr App R 36 (DC), meskipun kasus terakhir dapat dijelaskan sebagai otoritas yang berwenang dalam hal ini. prosedur dimana prinsip-prinsip yang berbeda mungkin berlaku) tetapi biasanya masih berlaku. Seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung Victoria dalam Demirian [1989] VR 97, 116: 'Aksesori tersebut mungkin

memainkan peran yang dominan, setara, atau tambahan sehubungan dengan dilakukannya kejahatan.' Para godfather mafia, misalnya, mungkin adalah lebih buruk dari antek-anteknya yang melakukan tindakan pembunuhan.

Lord Goddard CJ di Abbott [1955] 2 QB 497, yang terkenal di Grundy, mencatat masalah dengan orang-orang yang didakwa bersama. Jika dua orang secara bersama-sama didakwa melakukan kejahatan dan bukti-bukti tidak menunjuk pada salah satu dari yang lain, dan tidak ada bukti bahwa mereka bertindak bersama-sama, juri harus mengembalikan putusan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Keduanya karena jaksa penuntut belum membuktikan kasusnya.

Dalam Aston (1991) 94 Cr App R 180 Pengadilan Tinggi membatalkan hukuman para pemohon atas kekejaman dan pembunuhan karena tidak dapat dibuktikan apakah ibu korban atau orang yang memperlakukan korban sebagai putrinya sendiri yang menyebabkan kerugian. Kedua orang tersebut, para pemohon, mempunyai peluang untuk menimbulkan luka yang fatal, namun tidak dapat dibuktikan bahwa yang satu ini, bukan yang lainnya, yang terbunuh, bahwa keduanya bertindak bersama-sama, bahwa mereka secara tegas atau diam-diam telah menyetujui bahwa korban akan dibunuh. harus disakiti, atau salah satu pihak mendorong pihak lain untuk menyakiti. Ada beberapa kasus serupa yang melibatkan orang tua, seperti Lane (1986) 82 Cr App R 5 dan Strudwick (1994) 99 Cr App R 326 (CA) yang mengikuti Abbott dan Lane, serta pasangan atau teman hidup: Collins v Chief Constable of Merseyside [1988] Crim LR 247 (DC), yang juga mengikuti Abbott dan Lane. Salah satu pihak yang mengajukan banding bisa saja memutus meteran dari pasokan listrik. Tidak ada usaha bersama dalam kasus-kasus ini, dan masing-masing pihak dapat bertindak tanpa sepengetahuan pihak lain. Undang-undang tersebut dengan rapi diringkas dalam Collins sebagai berikut: 'bila dua orang didakwa bersama-sama dan bukti-bukti tidak mengarah pada satu orang saja, mereka berdua harus dibebaskan karena penuntut tidak membuktikan kasusnya. Ketidakpastian tersebut tidak dapat diselesaikan dengan memvonis keduanya. (Lihat UU KDRT tahun 2004, pasal 5, yang disebutkan di halaman berikutnya.) Ringkasnya, jika penuntut dapat membuktikan bahwa salah satu dari dua orang bersalah, namun tidak dapat membuktikan siapa yang melakukan pelanggaran, demikian pula dengan bersalah, kecuali jika terbukti bahwa yang satu adalah pelaku utama dan yang lain sebagai pembantu. Dalam situasi itu tidak menjadi masalah mana yang menjadi prinsipal, yang mana aksesorinya.

Jika para persidangan menemukan bahwa salah satu terdakwa harus menjadi prinsipal dan yang lainnya harus menjadi pendukung, maka Undang-Undang Aksesoris dan Abetors 1861, s 8, menganggap aksesoris sebagai prinsipal dan keduanya bersalah. Mohan v R [1967] 2 AC 187 (PC) menggambarkan proposisi ini. Dua terdakwa menyerang korbannya dengan kacamata. Tidak dapat dibuktikan siapa yang melakukan pukulan fatal tersebut. Keduanya bersalah atas pembunuhan. Masing-masing saling memberi semangat. Mereka berdua bermaksud (setidaknya) melukai tubuh secara menyedihkan. Tidak masalah jika mereka tidak membunuh karena adanya kesepakatan di antara mereka. Dalam Fitzgerald [1992] Crim LR 660, yang mirip dengan Mohan v R, terdakwa membakar skuter dengan mengeluarkan korek api dari mobil yang dikendarainya atau penumpangnya yang melakukannya. Dia adalah pelaku

utama atau terlibat dalam perusahaan gabungan yang melanggar hukum. Dia dapat dihukum atas dasar apa pun, demikian pula jika dia adalah pelaku atau pendukungnya. Dalam *Swindall & Osborne (1846) 2 Cox CC 141* terdakwa pertama membunuh korban dengan cara menabraknya, dengan terdakwa kedua sebagai pendukung, atau terdakwa kedua membunuhnya, terdakwa pertama sebagai pendukung. Kedua belah pihak bersalah apabila terbukti masing-masing harus bertanggung jawab baik sebagai prinsipal maupun tambahan. Otoritas ini diterapkan di *Giannetto [1997] 1 Cr App R 1 (CA)*. Terdakwa telah membunuh istrinya sendiri atau dia menyewa orang lain untuk melakukannya. Dia bersalah atas pembunuhan. Apakah dia berpartisipasi sebagai kepala sekolah atau sebagai pendukung, itu tidak relevan. Asalkan dia mempunyai *mens rea* pembunuhan atau menjadi pihak kedua dalam pembunuhan, dia bersalah. Prinsip ini dapat diterapkan pada orang tua. Dalam pelanggaran berat dalam keadaan seperti ini tidak ada pihak yang bersalah kecuali penuntut dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai *mens rea* untuk menjadi pihak kedua: *Smith v Mellors (1987) 84 Cr App R 279*. Berdasarkan fakta yang ada, masing-masing terdakwa harus mengetahui bahwa yang lainnya melebihi batas karena tidak dapat dibuktikan siapa yang mengemudi.

Undang-Undang Kejahatan dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 memberikan solusi parsial terhadap sulitnya membuktikan siapa di antara dua atau lebih terdakwa yang menyerang seorang anak. Undang-undang tersebut berbeda dengan Laporan Komisi Hukum, Anak-anak: Kematian Bukan karena Kecelakaan atau Cedera Serius (Pengadilan Pidana), Law Com. Nomor 279 dan 282 Tahun 2003. Menimbulkan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya anak atau orang lain yang rentan. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan membunuh atau tidak melindungi anggota rumah tangga terdakwa dari ancaman yang diketahui atau dari ancaman yang seharusnya diketahui dari orang lain dalam rumah tangga tersebut, dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang wajar. diharapkan dapat melindungi korbannya. Pembunuhan korban harus terjadi dalam keadaan yang telah diramalkan atau seharusnya diramalkan oleh terdakwa. Meskipun ini merupakan pelanggaran serius seperti pembunuhan berencana, kelalaian (dan bahkan kelalaian berat) saja sudah cukup sebagai unsur mentalnya. Ancaman hukumannya maksimal 14 tahun penjara.

Bab ini membahas pelanggaran partisipatif yang berasal dari common law. Terdapat ketentuan undang-undang serupa seperti pasal 28(1) Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956: mendorong hubungan seksual yang melanggar hukum dengan seorang gadis di bawah 16 tahun yang menjadi tanggung jawabnya. Kecuali Parlemen mengecualikan kemungkinan tersebut, seseorang dapat menjadi pihak sekunder dalam pelanggaran apa pun: *Jefferson [1994] 1 All ER 270 (CA)*. Misalnya, seseorang dapat menjadi kaki tangan dalam suatu percobaan pelanggaran, karena suatu percobaan itu sendiri merupakan suatu pelanggaran.

Berdasarkan rancangan KUHP, Law Com. 177, 1989, seseorang dapat bertanggung jawab sebagai prinsipal atau tambahan, dan pembelaan berlaku untuk keduanya, kecuali sehubungan dengan kedua proposisi tersebut Parlemen menentukan lain (cl 25). Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan atau tindakan dengan unsur kesalahan yang

disyaratkan, atau 'melakukan setidaknya satu tindakan tersebut dan mengadakan, membantu atau mendorong tindakan serupa lainnya yang dilakukan oleh orang lain; atau (c) mengadakan, membantu atau mendorong tindakan serupa lainnya yang dilakukan oleh orang lain yang tidak bersalah atas pelanggaran tersebut karena:

(i) ia berusia di bawah 10 tahun; atau (ii) ia melakukan tindakan tersebut tanpa kesalahan yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran; atau (iii) dia mempunyai pembelaan' (cl 26(1)). Ayat (1)(c): berlaku meskipun definisi pelanggaran – (a) menyiratkan bahwa tindakan tertentu harus dilakukan oleh pelaku secara pribadi; atau (b) menunjukkan bahwa pelaku harus mematuhi uraian yang hanya berlaku untuk orang lain sebagaimana dimaksud dalam sub-klausul (1)(c).

Berdasarkan pasal 28(2)(a) seseorang dapat dihukum sebagai pendukung meskipun pelakunya belum diidentifikasi, didakwa atau dihukum. Pada umumnya baik undang-undang saat ini maupun rancangan KUHP didasarkan pada 'tanggung jawab derivatif'. Kesalahan pidana pelaku sekunder berasal dari tanggung jawab pelaku utama. Pihak sekunder tidak bertanggung jawab sampai pelanggaran utama dilakukan. Terobosan telah dilakukan dalam doktrin ini dan mungkin saja seorang kaki tangan dapat dinyatakan bersalah jika hanya *actus reus* dari pelanggaran utama yang dilakukan (lihat di bawah) dan oleh karena itu tersangka pelaku tidak bersalah.

Usulan Komisi Hukum yang dijabarkan di bawah ini akan menjadikan upaya pendampingan dan mendorong kejahatan menjadi pelanggaran ringan seperti yang dibahas dalam Bab 10, sehingga menghapuskan prinsip tanggung jawab derivatif.

5.1 DEFINISI DAN TERMINOLOG

Kepala sekolah adalah orang yang melakukan kejahatan. Pihak sekunder adalah pihak yang dalam arti tertentu membantu atau mendorong kepala sekolah. Seseorang harus menjadi pihak sekunder dari suatu pelanggaran yang dituduhkan. Misalnya, seseorang adalah kaki tangan pembunuhan dan bukan sekedar kaki tangan. Berdasarkan *Accessories and Abettors Act 1861*, s 8, sebagaimana telah diubah, siapa pun yang membantu, bersekongkol, menasihati, atau membuat dilakukannya suatu pelanggaran yang dapat didakwakan, dapat diadili, didakwa, dan dihukum sebagai pelaku utama.

Terdapat ketentuan serupa untuk kejahatan ringkasan: Undang-Undang Pengadilan Magistral tahun 1980, pasal 44. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dapat dituntut sebagai pelaku utama. Dampaknya sangat nyata. Orang yang mendorong pelaku utama untuk membunuh, bersalah atas kejahatan yang sama dengan si pembunuh. Praktiknya seharusnya menuntut sebagai pelengkap untuk memberikan rincian dakwaan kepada terdakwa: DPP untuk *NI v Maxwell* [1978] 1 WLR 1350 (HL). Namun, praktik ini tampaknya jarang diterapkan, dan aksesori dibebankan sebagai prinsipal. Praktik tersebut dianggap tidak melanggar Pasal 6(3) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dalam *Mercer* [2001] EWCA Crim 638, meskipun terdapat kata-kata dalam Pasal tersebut bahwa seorang terdakwa berhak untuk diberitahu 'secara rinci tentang sifat dan penyebab tuduhan terhadapnya'. Cukuplah bagi terdakwa untuk

didakwa sebagai salah satu dari tiga orang yang melakukan usaha patungan (lihat di bawah) padahal sebenarnya dia adalah sopir yang melarikan diri.

Kaki tangan dikenakan hukuman yang sama dengan kepala sekolah, meskipun tingkat partisipasi dapat mempengaruhi hukuman. Khususnya, Undang-Undang Pelanggar Lalu Lintas Jalan tahun 1988, pasal 34(5), menetapkan bahwa diskualifikasi aksesori bersifat diskresi tetapi diskualifikasi pelaku adalah wajib. Dalam kasus terkenal Craig dan Bentley (1952) *The Times*, 10 –13 Desember, terdakwa yang membunuh tidak dapat digantung karena dia masih di bawah umur. Namun, pihak sekunder pada s 8 dapat dihukum sebagai kepala sekolah dan digantung, meskipun dia tidak melepaskan tembakan. (Bentley menerima pengampunan anumerta pada tahun 1998.) Dapat diperdebatkan bahwa meskipun terkadang aksesori lebih buruk daripada prinsipal (seperti ketika dia menjadi 'ayah baptis'), berdasarkan fakta dalam kasus ini – dan mungkin sebagian besar – aksesori tersebut tidak boleh dapat dihukum sama beratnya dengan kepala sekolah, karena kesalahannya mungkin lebih ringan dibandingkan kepala sekolah. Saat ini hanya ada sedikit perbedaan antara prinsipal dan aksesori. 'Undang-undang tidak lagi memperhatikan tingkat kehalusan partisipasi dalam kejahatan' adalah bagaimana Pengadilan Banding menyatakannya dalam Cogan dan Leak [1976] QB 217. Perbedaan utama antara hukum substantif adalah bahwa seseorang tidak dapat menjadi pelengkap dalam suatu percobaan kejahatan. kejahatan, terdapat perbedaan mens rea pelaku dan aksesorisnya, hanya pelaku yang dapat bertanggung jawab secara perwakilan, terkadang hanya orang-orang tertentu yang dapat bersalah sebagai pelaku (hanya laki-laki yang dapat dihukum karena pemerkosaan sebagai pelaku tetapi perempuan dapat dihukum sebagai pelaku aksesori), dan undang-undang tentang tanggung jawab ketat tidak berlaku untuk aksesori (lihat di bawah). Di luar hal-hal ini, kapasitas yang digunakan terdakwa untuk bertindak tidaklah relevan. Apakah seseorang bertindak sebagai aksesori atau prinsipal bersama tidaklah penting.

Terminologi telah berubah sejak kasus-kasus lama dilaporkan. Seorang kepala sekolah pada tingkat pertama saat ini menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah pada tingkat kedua adalah seorang pemberi bantuan, pendukung dan mungkin pemberi. Dia membantu pada saat pelanggaran itu dilakukan. Aksesori sebelum kejadian tidak ada di TKP. Dia sekarang menjadi konselor, penyedia atau pemberi bantuan. Tambahan setelah kejadian tersebut, seseorang yang membantu setelah kejahatan tersebut, bersalah atas kejahatan yang sekarang dihapuskan. Pelanggaran tersebut sebagian telah digantikan oleh pasal 4(1) ('menghalangi') dan pasal 5(1) ('menyembunyikan dan memberikan informasi palsu') dalam Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1967 (lihat di bawah). Meskipun beberapa terminologi telah dimodernisasi, tidak semuanya diperbarui. Orang di jalan mungkin mengalami kesulitan dalam mendefinisikan 'abet'.

Seorang aksesori dapat bertanggung jawab sebagai pihak sekunder terhadap kejahatan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh pelaku. House of Lords juga memerintah dalam Howe [1987] AC 417, dengan mengesampingkan otoritas sebelumnya yang menyatakan sebaliknya. Kesalahan terdakwa tergantung pada keadaan pikirannya, bukan pada pelanggaran yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, seseorang mungkin bersalah

karena membantu pembunuhan jika pelakunya hanya bersalah karena melukai tubuh yang menyedihkan. Howe mewakili terobosan dari teori pertanggungjawaban derivatif Inggris ortodoks: tidak ada satu pun pelanggaran utama yang melibatkan terdakwa. Pelanggaran yang lebih serius yang dimaksudkan tidak terjadi. Berdasarkan pasal 2(4) Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957, pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab satu pihak tidak mempengaruhi tanggung jawab pihak lain. Hal yang sama, diperkirakan, juga berlaku pada bentuk-bentuk pembunuhan tidak berencana lainnya.

Untuk dapat bertanggung jawab sebagai kaki tangan, pelanggaran pokok harus dilakukan. Itulah sebabnya tanggung jawab sekunder terkadang dikatakan didasarkan pada prinsip 'kewajiban derivatif'. Secara umum, kaki tangan tidak bertanggung jawab kecuali pelaku utama bertanggung jawab. Tanggung jawab sekunder berasal dari tanggung jawab prinsipal. Otoritas kuno yang mendukung proposisi ini adalah Vaux (1591) 76 ER 992. Jika belum, mungkin masih ada hukuman untuk salah satu pelanggaran kecil: penghasutan, percobaan dan konspirasi. Oleh karena itu, jika seseorang memberi nasihat tentang suatu pelanggaran, tetapi kepala sekolah tidak melakukan pelanggaran tersebut, orang tersebut bukanlah seorang konselor, melainkan seorang penghasut. Baik hasutan maupun hasutan didasarkan pada upaya salah satu pihak untuk membujuk pihak lain agar melakukan sesuatu. Undang-undang yang berlaku saat ini telah dikritik dengan alasan bahwa mendasarkan tanggung jawab pelaku sekunder pada tanggung jawab pelaku tidak mendukung kebijakan intervensi sebelum kejahatan dilakukan.

Menjadi kaki tangan bukanlah suatu pelanggaran. Harus ada pelanggaran pokok yang menjadi kaki tangan seseorang. Tuduhannya bukan, misalnya, 'membantu dan bersekongkol' tetapi 'membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan' (atau pencurian, dan seterusnya).

'Bantuan, bersekongkol, menasihati atau mengadakan'

Pihak sekunder adalah pihak yang membantu, bersekongkol, menasihati atau membuat dilakukannya pelanggaran. Dalam Bryce [2004] 2 Cr App R 35 (CA) dikatakan bahwa 'perbedaan antara keduanya tidak jelas.' Oleh karena itu, tuduhan sering kali melibatkan keempat istilah tersebut. Istilah-istilah ini dikatakan (secara keliru jika dilihat dari sudut pandang sejarah) memiliki arti yang berbeda dengan alasan bahwa 'Parlemen akan membuang-buang waktu dengan menggunakan empat kata, sedangkan dua atau tiga kata sudah cukup': Referensi Jaksa Agung (No. 1 tahun 1975) [1975]QB 773 (CA). Sayangnya pengadilan tidak menyatakan dalam hal apa perbedaan kata kerjanya dan sulit untuk melihat bagaimana bersekongkol menambahkan sesuatu yang belum tercakup dalam tiga istilah lainnya.

(a) Membantu dan bersekongkol

Dalam Bentley v Mullen [1986] RTR 7 Pengadilan Divisi menyatakan:

Sebagaimana dikemukakan dalam Referensi A-G (No. 1 Tahun 1975), kata 'membantu' dan 'bersekongkol' harus diberikan arti alaminya yang biasa. Arti alami dari 'bantuan' adalah memberikan bantuan, dukungan atau bantuan dan arti alami dari 'abet' adalah menghasut, menghasut, atau mendorong.

Diduga bahwa terdakwa, seorang instruktur mengemudi, membantu dan bersekongkol dalam tindak pidana gagal berhenti setelah kecelakaan ketika dia berjalan pergi bersama pengemudi dan kemudian keduanya kembali, dengan harapan bahwa kekacauan telah dibersihkan dan mereka dapat mengemudi. pergi tanpa kesulitan. Disarankan bahwa 'abet' tidak memiliki arti biasa karena tidak lagi digunakan dalam bahasa biasa dan definisi yang diberikan dalam *Bentley v Mullen* juga berlaku untuk 'nasihat'. Namun, dalam *NCB v Gamble* [1959] 1 QB 11 dan *Lynch v DPP* untuk NI [1975] AC 653, 'aid' dan 'abet' dianggap sama. Dalam *NCB v Gamble* Devlin J mengatakan bahwa konseling terjadi sebelum kejahatan terjadi, sedangkan persekongkolan terjadi pada saat pelanggaran terjadi, namun perbedaan ini tampaknya telah hilang selama setengah abad terakhir. Di *Lynch*, 'bantuan dan bersekongkol' dianggap sebagai konsep yang sama: 'bantuan' adalah *actus reus* dari konsep tersebut; 'abet' adalah *mens rea*. Tidak ada otoritas yang diberikan untuk proposisi ini. Berdasarkan undang-undang saat ini, pemberi bantuan adalah terdakwa yang membantu pelaku utama, misalnya dengan menyediakan senjata api atau peralatan pemotong logam, dan pelaku adalah orang yang bertindak untuk menghasut, menghasut, atau mendorong pelaku pada saat melakukan pelanggaran. Pengadilan Banding di *Giannetto* (di atas) keduanya menyatakan bahwa bersekongkol mencakup 'keterlibatan apa pun, mulai dari sekedar dorongan ke atas' dan menyetujui pernyataan hakim bahwa menepuk punggung seseorang dan mengatakan 'oh, bagus' merupakan bersekongkol jika dilakukan dan dikatakan sebagai tanggapan. kepada kepala sekolah mengatakan 'Saya akan membunuh istrimu'.

Definisi bersekongkol sangat mirip dengan konseling. Aider memberikan bantuan atau dukungan kepada kepala sekolah seperti yang terjadi ketika terdakwa mengantar kepala sekolah ke tempat kejadian perkara. Pemberian pertolongan dapat dilakukan sebelum atau pada saat terjadinya kejahatan. Devlin J dalam *NCB v Gamble* dan Lord Lowry di Pengadilan Banding Pidana Irlandia Utara dalam *DPP* untuk NI v *Maxwell*, di atas, mengadopsi definisi serupa.

(b) Konseling

Konselor adalah orang yang sebelum dilakukannya pelanggaran (dan seringkali tidak di tempat kejadian) bersekongkol untuk melakukannya, menasihati pelaksanaannya atau dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku: *DPP* untuk NI v *Maxwell* (HL). Pemberian informasi dan desakan kepada kepala sekolah juga termasuk dalam kategori 'konseling'. Terdakwa harus berhubungan dengan kepala sekolah.

Perbedaan lama antara bersekongkol dan konseling adalah bahwa bersekongkol terjadi pada saat terjadinya pelanggaran, sedangkan konseling terjadi sebelumnya. Persyaratan kehadiran dalam tindak pidana tampaknya sudah hilang, meskipun kadang-kadang masih disebutkan dalam kasus-kasus tersebut. Dalam *Jaksa Agung v Able* [1984] 1 QB 795, sebuah kasus perdata, terdapat diskusi tentang apakah seseorang membantu dan bersekongkol untuk bunuh diri dengan menerbitkan buklet tentang berbagai metode. Berdasarkan undang-undang lama, tuduhan yang pantas adalah konseling untuk bunuh diri, bukan membantu dan bersekongkol, karena penulis tidak akan hadir pada saat pembunuhan diri tersebut. Demikian pula dalam kasus perdata *Gillick v West Norfolk* dan *Wisbech* AHA

[1986] AC 112 House of Lords membahas apakah seorang dokter akan membantu dan bersekongkol dalam hubungan seksual dengan seorang gadis di bawah 16 tahun, yang merupakan kejahatan, dengan meresepkan alat kontrasepsi untuk dia. Jika tindakan membantu dan bersekongkol hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat terjadinya pelanggaran, maka sangat sulit untuk membayangkan kehadiran dokter pada saat terjadinya hubungan seksual yang tidak sah tersebut. Entah House of Lords seharusnya mendiskusikan konseling dan pengadaan atau peraturan tersebut telah hilang. Dalam Rook [1993] 1 WLR 1005 terdakwa mengatur pembunuhan istri salah satu terdakwa lainnya. Pengadilan Tinggi menerapkan hukum yang sama terhadap prinsipal bersama (lihat di bawah) baik dia hadir atau tidak. Jika kehadiran di tempat kejadian perkara diperlukan, seperti yang terjadi pada saat *Bowker v Premier Drug Co Ltd* [1928] 1 KB 217, maka 'tempat kejadian' ditafsirkan secara luas dengan mencakup tempat di mana petugas pengawas berada. Namun tetap ada anggapan bahwa aturan lama ini sudah tidak ada lagi. (Lih. Lynch di mana terdakwa, yang bersalah sebagai pembantu dan pendukung, membawa sekelompok teroris ke tempat kejadian perkara.) Jika bersekongkol berarti bantuan pada saat pelanggaran terjadi, kemungkinan besar terdakwa ada di tempat kejadian tetapi dia tidak perlu menjadi seperti itu. Dalam bersekongkol, terdakwa dan prinsipal tidak perlu sepakat terlebih dahulu bahwa pelaku harus ikut serta dalam: *Mohan v R*, di atas.

(c) Pengadaan

Lord Widgery CJ dalam Acuan Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1975) mengatakan bahwa 'mengadakan' berarti 'menghasilkan dengan usaha'. (Tidak pasti apakah 'dengan usaha' menambah sesuatu pada 'menghasilkan'.) Dengan kata lain, pihak penyedia barang memicu atau menyebabkan kejahatan tersebut. Hasutan tersebut bisa berupa persuasi atau bahkan ancaman. Meskipun putusan ini sempit, Pengadilan Divisi dalam *Blakely v DPP* [1991] Crim LR 763 memberikan arti yang lebih luas pada 'pengadaan'. Terdakwa memperoleh jika dia melihat sesuatu sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi dari perilakunya. Jika demikian halnya, dalam pengadaan, bertentangan dengan kewenangan sebelumnya, terdakwa tidak perlu menyebabkan pihak prinsipal melakukan pelanggaran. Namun, dalam *Marchant* [2004] 1 WLR 442 (CA), terdakwa yang mengarahkan pengemudi untuk mengemudi di jalan raya, dinyatakan tidak bersalah karena menyebabkan kematian karena mengemudi secara berbahaya ketika seorang pengendara sepeda motor melaju ke pagar pembatas. unit di depan kendaraan pertaniannya. Mengemudikan kendaraan di jalan umum tidak menyebabkan kematian korban dan terdakwa tidak menyediakan pengemudi yang menyebabkan kematian. Kasus berikutnya menggambarkan pentingnya hukum. Dalam Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1975), Ketua Hakim menyatakan terdakwa bersalah karena menyuruh kepala sekolah (yang tidak menyadari apa yang terjadi) untuk mengemudi dengan konsentrasi alkohol dalam darah di atas batas hukum ketika dia telah mencampurkan minumannya dengan alkohol. Tuan rumah yang memberi banyak minuman beralkohol kepada tamunya harus menyadari keputusan ini. Lord Widgery menganggap bahwa jika kepala sekolah menyadari bahwa minumannya telah dicampur, tersangka aksesori mungkin tidak bersalah melakukan pelanggaran ini karena pengetahuan kepala sekolah dan keputusannya yang 'bebas, disengaja

dan diinformasikan' untuk pergi akan memutus rantai. hal menyebabkan. Dahulu dikatakan bahwa pengadaan dilakukan sebelum dilakukannya pelanggaran utama, namun nampaknya tidak ada alasan mengapa hal ini tidak dapat mencakup produksi melalui usaha pada saat pelanggaran tersebut dilakukan.

(d) 'Hubungan sebab akibat'

Dalam bersekongkol dan menasihati nampaknya harus ada konsensus antara pihak sekunder dan prinsipal; yaitu, kepala sekolah harus menyadari bahwa ia dibantu atau diberi dorongan, meskipun tidak perlu dibuktikan bahwa ia tidak akan melakukan pelanggaran tanpa bantuan atau dorongan tersebut: Calhaem [1985] 1 QB 808. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena menjadi pihak kedua dalam pembunuhan ketika dia menyewa seorang pria untuk membunuh saingannya dalam cinta, meskipun dia telah memutuskan untuk tidak membunuhnya tetapi berubah pikiran ketika dia berteriak dan dia membunuhnya. Dalam membantu tidak perlu ada konsensus. Kepala sekolah tidak perlu (tetapi dapat) sadar bahwa dia sedang dibantu. Dalam pengadaan pihak sekunder harus terbukti melakukan pelanggaran. Misalnya, dalam Surat Acuan Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1975), terdakwa bersalah karena menyuruh kepala sekolah mengemudi dengan alkohol berlebih di tubuhnya ketika dia diam-diam menenggak minumannya. Lord Widgery CJ mengatakan: 'Anda tidak dapat melakukan pelanggaran kecuali ada hubungan sebab akibat antara apa yang Anda lakukan dan tindakan pelanggaran tersebut.' Oleh karena itu, terdakwa tidak akan bersalah karena mengemudi dengan alkohol berlebih jika kepala sekolah sudah selesai. batas ketika dia memberinya alkohol. Namun, tidak perlu ada komunikasi dan konsensus di antara para pihak. Dalam hal ini ada pernyataan bahwa biasanya dalam membantu, bersekongkol dan menasihati para pihak telah bertemu, namun pertemuan bukanlah syarat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam pengadaan, para pihak tidak perlu saling kenal dan, seperti yang ditunjukkan oleh fakta, prinsipal tidak perlu mengetahui bahwa ia dibantu untuk melanggar hukum, dan juga tidak perlu mengambil keputusan untuk melanggar hukum pidana. Disarankan bahwa apa pun unsur mental dalam bentuk pertanggungjawaban kaki tangan lainnya, seseorang hanya dapat memperoleh hasil dengan sengaja ('dengan usaha').

Dalam Bryce [2004] 2 Cr App R 35, pengadilan memutuskan bahwa untuk semua jenis partisipasi sekunder, terdakwa harus memiliki apa yang disebut Lord Widgery CJ sebagai 'hubungan sebab akibat' dengan kepala sekolah. Terdakwa mengantar pelaku utama ke karavan dekat tempat tinggal korban. Keesokan harinya kepala sekolah membunuh korban. Diduga ada hubungan sebab akibat yang mengakibatkan terdakwa bersalah karena memberikan nasihat kepada kepala sekolah. Telah dikemukakan, khususnya oleh Sir John Smith, bahwa tidak perlu ada hubungan sebab akibat dalam konseling namun kasus ini menyatakan bahwa untuk semua bentuk partisipasi harus ada hubungan sebab akibat. Namun kaitan tersebut hanya dapat dipatahkan oleh adanya 'peristiwa supervening yang luar biasa', yang menjadikan perilaku terdakwa hanya dianggap sebagai pelanggaran.

(e) Membingkai tuduhan

Tuduhan tersebut umumnya berupa 'membantu, bersekongkol, memberi nasihat atau mengadakan'. Terdakwa dinyatakan bersalah jika ia berpartisipasi dalam salah satu cara berikut: *Ferguson v Weaving* [1951] 1 KB 814. Hal ini dilakukan karena 'perbedaan antara [istilah-istilah ini] jauh dari jelas': Bryce, di atas. Salah satunya adalah pihak sekunder dalam pelanggaran utama. Seseorang tidak 'membantu' secara umum tetapi membantu kejahatan tertentu. Membantu (dll.) itu sendiri bukanlah suatu kejahatan tetapi suatu cara di mana suatu kejahatan dilakukan.

5.2 KEGAGALAN UNTUK BERTINDAK

Aturan dasarnya, seperti halnya hukum pidana lainnya, adalah bahwa kelalaian tidak menimbulkan tanggung jawab kecuali ada kewajiban untuk bertindak. Kehadiran di lokasi kejadian pelanggaran utama tidak selalu berarti bahwa terdakwa adalah pendukung, meskipun hal tersebut dapat menjadi bukti dorongan. Otoritas lama adalah *Coney* (1882) 8 QBD 534, di mana berdiri menonton pertarungan hadiah tidak berarti bahwa penonton membantu pertandingan tinju ilegal. Hawkins J mengatakan bahwa 'beberapa langkah aktif harus diambil dengan kata-kata atau tindakan'. Terdakwa akan bersalah jika dia bersorak atau bertepuk tangan. Kasus lama lainnya adalah *Atkinson* (1869) 11 Cox CC 330. Seorang majikan tidak bersalah karena menjadi pihak kedua dalam kerusuhan yang dilakukan karyawannya ketika dia tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya. Yang lebih baru adalah *Clarkson* [1971] 3 All ER 344 (CMAC) dimana tentara mabuk berdiri di sekitar sementara seorang gadis diperkosa di barak. Kasus yang mungkin lebih buruk adalah kasus *Salajko* [1970] 1 Can CC 352 di Ontario, di mana terdakwa, yang celana panjangnya melingkari mata kaki, menyaksikan pemerkosaan beramai-ramai. Ada beberapa kasus serupa seperti *Bland* [1988] Crim LR 41 (CA): terdakwa tidak bersalah karena menjadi pihak sekunder dalam kejahatan kepemilikan obat-obatan terlarang secara melawan hukum dengan terus berbagi kamar dengan pelaku utama setelah dia mengetahui tentang obat tersebut. Tidak dapat disimpulkan bahwa dia membantunya dalam kepemilikan obat-obatan tersebut. Dia akan bersalah jika dia mendorong kepala sekolah atau jika dia mempunyai hak untuk mengontrol (lihat di bawah). Kehadiran di suatu kejahatan adalah beberapa bukti bahwa terdakwa memang mendorong pelaku: misalnya. *Allen v Irlandia* [1984] 1 WLR 903 (CA). Tekad rahasia untuk membantu teman dalam perkelahian tidaklah cukup: *Allan* [1965] 1 QB 130 (CCA). Oleh karena itu harus ada tindakan dorongan atau bantuan (tetapi lihat di bawah untuk situasi tugas). Sebuah kasus yang menarik perhatian adalah *Wilcox v Jeffery* [1951] 1 All ER 464 (CCA) di mana terdakwa mengundang pemain saksofon alien, Coleman Hawkins, ke Inggris bertentangan dengan Aliens Order, menemuinya di bandara, bertepuk tangan atas penampilannya dan menulis tentang dia. Dia bersalah karena membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran Perintah dengan mendorong pihak utama. Hal serupa juga terjadi pada *Ellis* [2008] EWCA Crim 886. Mendorong penyerang berarti berpartisipasi dalam kejahatan; akan berbeda jika, seperti di *Clarkson*, terdakwa hanya berdiri saja sementara korban dipukuli. Selain itu, terdakwa tidak perlu hadir di tempat kejadian perkara utama: *JF Alford Transport Ltd* [1997] 2 Cr App R 326

(CA). Dalam kasus ini terdakwa, sebuah perusahaan dan manajernya, bersalah karena membantu dan bersekongkol dengan karyawannya untuk membuat catatan palsu pada catatan takograf (yang menyatakan berapa mil yang telah ditempuh pengemudi dalam sehari). Mereka tahu apa yang dilakukan karyawannya. Mereka mempunyai hak hukum untuk menghentikannya, namun mereka tidak melakukan apa pun.

Apabila terdapat kewajiban untuk bertindak guna mengendalikan tingkah laku pelaku, maka terdakwa bersalah menjadi pembantu (asalkan unsur-unsur lain terpenuhi) jika ia tidak melakukan apa pun untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terdakwa harus mengetahui bahwa dia mempunyai kesempatan untuk melakukan intervensi untuk mencegah dilakukannya kejahatan substantif: Webster [2006] EWCA Crim 415. Dalam *Rubie v Faulkner* [1940] 1 KB 571, seorang instruktur pengemudi pelajar dihukum karena membantu dan bersekongkol dalam mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian. Tidak diperlukan kontrol langsung atas roda kemudi. Hilbery J berkata: *“pengawas dapat melihat bahwa pengemudi akan melakukan tindakan melanggar hukum yang membuatnya dihukum [mengemudi secara ceroboh] dan hakim menemukan bahwa pengawas tersebut tetap pasif”*. Baginya, menahan diri untuk tidak melakukan apa pun ketika dia melihat bahwa tindakan yang melanggar hukum akan segera dilakukan, dan tugasnya adalah mencegah tindakan yang melanggar hukum, jika dia bisa, berarti dia membantu dan bersekongkol.¹ Dalam sebuah kasus di Bogor, seorang pemilik Bar tidak menyuruh pelanggannya pergi. Dia dihukum karena membantu mereka mengonsumsi alkohol setelah beberapa waktu. Sekadar menyerukan 'Waktu, tolong kaca mata' dan mematikan lampu utama tidak berarti membebaskan pemilik rumah. Kegagalan untuk mencegah juga dianggap sebagai bantuan atau dorongan (yaitu, seseorang tidak perlu membuktikan bahwa kelalaian terdakwa memang mendorong atau membantu kepala sekolah) dalam kasus lain di Tuban, di mana pemilik mobil yang pada saat melakukan pelanggaran pokok adalah penumpang, tidak menghentikan pengemudinya untuk mengemudi dengan kecepatan yang berbahaya. (Sebenarnya tidak bisa dibuktikan siapa yang mengemudi. Kalau pemilik yang mengemudi, dialah pelaku utama. Kalau dia penumpang, dia punya hak kendali. Di mana pun dia duduk, dia bersalah.) Sama saja Akibatnya terjadi ketika, misalnya, seorang ibu menyaksikan suaminya membunuh anaknya. Dia mempunyai kewajiban untuk campur tangan. (Orang asing tidak mempunyai kewajiban seperti itu: lihat Bab 2.) Demikian pula seorang petugas polisi mempunyai kewajiban untuk mencegah petugas lain memukul tersangka.

Hasil dalam kasus-kasus ini akan berbeda jika terdakwa tidak mempunyai hak kendali atau kewajiban untuk bertindak. Dalam hal ini, ketidakaktifan bukanlah merupakan pihak sekunder. Untuk menjamin hukuman, penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa mendorong atau membantu. Misalnya, dalam kasus yang terjadi di Jakarta, jika mobil itu milik pihak lain, maka terdakwa tidak mempunyai hak kendali atas mobil tersebut. Sebagai penumpang dia tidak akan bersalah kecuali dia mengizinkan atau mendorong mengemudi yang berbahaya. Kasus-kasus diatas sudah mulai memakan waktu lama. Otoritas modern perlu menentukan ruang lingkup pengecualian terhadap aturan umum tidak bertanggung jawab atas kelalaian. Bantuan atau dorongan mencakup bantuan atau dorongan yang timbul

karena kegagalan seseorang dalam mengambil langkah-langkah yang wajar dalam menjalankan wewenangnya atau melaksanakan tugas apa pun yang dimilikinya untuk mengendalikan tindakan-tindakan yang relevan dari pemberi izin guna mencegah dilakukannya pelanggaran.

Means Rea

Seseorang tidak bertanggung jawab sebagai aksesori kecuali ia memiliki unsur mental yang diperlukan. Unsur-unsur ini berlaku untuk semua pelanggaran pokok, termasuk pelanggaran tanggung jawab ketat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara mens rea delik sekunder dengan delik utama. Pengadilan Banding di Rook di atas yang disetujui di Bryce di atas menyatakan bahwa unsur mental itu sama untuk membantu, bersekongkol, menasihati dan pengadaan. Hukum ini relatif belum berkembang. Berikut ini upaya untuk merangkumnya. Terdakwa harus berniat melakukan perbuatan yang bersifat mendorong, menasihati, atau membantu. Salah satu otoritas di antara beberapa otoritas adalah Bryce.

Niat untuk mendorong, menasihati atau membantu

Seorang aksesori bersalah hanya jika dia melakukan tindakan yang dia tahu mampu mendorong dan membantu: JF Alford Transport Ltd (di atas). Tidak perlu dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud agar kejahatan tersebut dilakukan: Rook, di atas, yang didukung oleh Bryce, di atas. Potter LJ berkata di Bryce: *“cukuplah pihak sekunder pada saat perbuatannya.”* Mempertimbangkan dilakukannya suatu pelanggaran, yaitu mengetahui bahwa pelanggaran tersebut akan dilakukan atau menyadari bahwa ada kemungkinan yang nyata bahwa pelanggaran tersebut akan dilakukan. Seperti di tempat lain dalam hukum pidana, motifnya tidak relevan.

NCB v Judi [1959] QB 11

Seorang pegawai Dewan Batubara Nasional, pendahulu British Coal, adalah operator jembatan timbang. Dia memberi tahu pengemudi bahwa truknya kelebihan muatan. Mengendarai kendaraan yang kelebihan muatan merupakan pelanggaran. Sopir mengatakan bahwa dia siap mengambil risiko tertangkap dan karyawan tersebut memberinya tiket jembatan timbang, yang tanpanya pengemudi tidak dapat meninggalkan lubang. Apakah karyawan tersebut bersalah karena menjadi pihak kedua dalam pelanggaran utama mengemudikan truk yang kelebihan muatan?

Pengadilan Divisi menyatakan bahwa dia memang benar. Devlin J berkata:

Ketidakpedulian terhadap akibat kejahatan tidak dengan sendirinya menimbulkan dampak negatif. Jika seseorang dengan sengaja menjual senjata kepada orang lain untuk digunakan membunuh orang ketiga, dia mungkin tidak peduli apakah orang ketiga itu hidup atau mati dan hanya tertarik pada keuntungan tunai yang diperoleh dari penjualan tersebut, namun dia tetap bisa menjadi seorang pembunuh. pembantu dan pembantu. Jika kita berpendapat sebaliknya, maka kita akan meremehkan aturan bahwa mens rea hanyalah masalah niat saja dan tidak bergantung pada keinginan atau motif.

Karena karyawan tersebut dengan sengaja membantu kepala sekolah, maka dia bertanggung jawab sebagai pembantu. Efek NCB v Gamble harus diperhatikan. Jika terdakwa

mengetahui bahwa sekantong gula yang baru saja dijualnya kepada kepala sekolah dapat digunakan olehnya untuk menipu seorang wanita tua di sebuah rumah di mana kepala sekolah akan mencari-cari uang untuk dicuri, maka dia bersalah karena menjadi pembantu. perampokan yang parah. Niatnya bukan agar kepala sekolah akan menipu wanita tua itu. Dia senang telah melakukan penjualan dan tidak peduli bagaimana kepala sekolah akan menggunakan gula tersebut. Prinsipnya juga menjerat pemilik rumah yang menjual alkohol kepada pria yang diketahuinya berniat mengemudi.

Tujuan terdakwa tidak perlu menjadi tindakan kejahatan; niat miring saja sudah cukup, seperti yang dikatakan *JF Alford Transport Ltd* di atas. Yang penting adalah niat untuk membantu, bersekongkol, menasihati atau mengadakan, dan memang kadang-kadang dikatakan bahwa pengetahuan bahwa tindakan dapat membantu sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban, meskipun kasus-kasus seperti *Gamble* menolak pendekatan ini. Terdapat otoritas sebelumnya untuk proposisi bahwa hal tersebut bukanlah konseling atau pengadaan ketika terdakwa berharap bahwa pelanggaran tersebut tidak akan dilakukan, setidaknya jika terdakwa mencoba menghentikan pihak utama yang melakukan pelanggaran tersebut (lih. *Lynch v DPP* untuk NI, di atas, dimana terdakwa, yang mengantarkan teroris ke tempat di mana mereka membunuh korbannya, adalah bersalah namun harus dikatakan bahwa dia tidak melakukan upaya keras untuk mencegah pembunuhan tersebut). Dalam *Fretwell (1862) 9 Cox CC 471 (CCR)*, seorang kekasih memberi wanitanya obat untuk melakukan aborsi dengan ancaman bunuh diri. Dia berharap dia tidak mengambilnya tetapi dia mengambilnya. Dia meninggal. Dia dianggap bukan pihak kedua dalam bunuh diri yang dilakukannya, yang pada saat itu merupakan pelanggaran. Kasus ini tampaknya salah diputuskan mengingat *NCB v Gamble* karena motifnya membebaskan terdakwa: dia tidak ingin melihat terdakwa meninggal. Dalam perkara perdata *Jaksa Agung v Able [1984] QB 795* dikatakan terbatas pada faktanya saja. Namun, *Fretwell* dikutip dengan setuju di *Gamble* atas proposisi bahwa dengan sengaja menyediakan sebuah artikel tidak berarti bermaksud untuk membantu, dan hal tersebut tidak ditolak. Dalam kasus *Bryce* di atas, Pengadilan Banding menegaskan kembali undang-undang bahwa seseorang dapat bermaksud membantu seorang kepala sekolah meskipun ia bermaksud menghalangi rencananya. Hal yang sama juga terjadi di *Lynch*. Dalam *Rook* di atas, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah meskipun ia tidak bermaksud melakukan tindak pidana pokok.

Ada pernyataan dalam *NCB v Gamble* bahwa aksesori tidak bertanggung jawab jika sebelum penyerahan kepemilikan telah berpindah dan terdakwa tidak mengetahui tujuan ilegal tersebut sampai kepemilikan telah berpindah. (Pada faktanya kepemilikan batu bara berpindah ketika karyawan memberikan tilang kepada pengemudi.) Jika diktum ini benar, dan hukum masih belum jelas, maka jika orang yang diduga sebagai aksesori menjual senjata kepada prinsipal tetapi sebelum menyerahkannya mengetahui bahwa senjata itu akan digunakan untuk membunuh seseorang, maka dia tidak bersalah, padahal dia akan bersalah jika dia mengetahui sejak awal transaksi bahwa senjata itu akan digunakan untuk membunuh. Demikian pula, jika menggunakan fakta-fakta dalam kasus awal, jika terdakwa menyerahkan jemmy kepala sekolah kepadanya, ia tidak akan bertanggung jawab, karena ia melakukan apa

yang menurut hukum wajib dilakukannya. Ada anggapan bahwa perbedaan ini tidak mempunyai tujuan apa pun. Hal ini juga tidak didasarkan pada hukum perdata, seperti yang dipikirkan oleh Pengadilan Divisi. Kontrak ilegal tidak dapat dilaksanakan tidak peduli kapan penjual, aksesori, mengetahui ilegalitas tersebut. Yang lebih baru adalah *Garrett v Arthur Churchill (Glass) Ltd* [1970] 1 QB 92 (CA). Lord Parker CJ mengatakan, kewajiban hukum untuk menyerahkan barang tersebut berada di bawah kepentingan umum untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap barang tersebut. Persoalan ini diatur dalam pasal 27(6)(c) rancangan KUHP, dimana terdakwa tidak bersalah apabila ia yakin bahwa ia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan perbuatannya dan berbuat 'tanpa maksud untuk melanjutkan perbuatannya. dari pelanggaran'. Oleh karena itu, seseorang yang memasok barang dalam kegiatan usaha sehari-hari tidak bertanggung jawab.

Pengetahuan tentang 'hal-hal penting'

Lord Goddard CJ berkata dalam *Johnson v Youden* [1950] 1 KB 544 (yang disetujui dalam *Churchill v Walton* [1967] 2 AC 224 (HL), kasus konspirasi, oleh Dewan Penasihat di *Mok Wai Tak v R* [1990] 2 AC 333 dan oleh Pengadilan Banding di *Roberts* [1997] Crim LR 209) bahwa:

Sebelum seseorang dapat dihukum karena membantu dan bersekongkol dalam melakukan suatu tindak pidana, ia setidaknya harus mengetahui hal-hal penting yang merupakan tindak pidana tersebut. Ia tidak perlu benar-benar mengetahui bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan, karena ia mungkin tidak mengetahui bahwa fakta-fakta tersebut merupakan suatu pelanggaran dan ketidaktahuan akan hukum bukanlah suatu pembelaan.

Pengacara tidak bersalah karena menghibahkan rumah dengan harga di atas harga maksimum, padahal mereka tidak mengetahui harganya. Meskipun tidak jelas, frasa 'hal-hal penting' tampaknya mencakup keadaan *actus reus*, segala konsekuensi yang relevan, dan mungkin unsur kesalahan pelaku. Keadaan adalah fakta-fakta yang menimbulkan terjadinya pelanggaran. Jika seseorang menyediakan tangga, dia tidak bersalah membantu perampokan kecuali dia mengetahui 'fakta-fakta [yang] merupakan pelanggaran'. Namun, terdakwa, seperti yang dikatakan Lord Goddard CJ, 'tidak perlu benar-benar mengetahui bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan, karena dia mungkin tidak mengetahui bahwa fakta-fakta tersebut merupakan suatu pelanggaran dan ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan'. 'Kebutaan yang disengaja' sudah cukup: *D Stanton & Sons Ltd v Webber* [1973] RTR 86 (DC) dan *Roberts*, di atas.

Dikatakan dalam *Carter v Richardson* [1976] Crim LR 190 bahwa 'mengetahui hal-hal penting' mencakup kecerobohan terhadap keadaan dan kebutaan yang disengaja terhadap risiko bahwa fakta-fakta yang merupakan pelanggaran utama mungkin akan terjadi (lihat Bab 3). Pengawas seorang pengemudi pelajar dinyatakan bersalah karena mendorong pelajar tersebut mengemudi dengan konsentrasi alkohol dalam darah di atas batas. Dia tahu bahwa pelajar tersebut berada di atas batas, tetapi pengadilan menyatakan bahwa dia akan bersalah jika dia berpikir bahwa pengemudi mungkin melebihi batas, suatu keadaan pikiran yang dikenal sebagai kecerobohan subjektif. Dalam *Blakely v DPP* di atas, hukuman terdakwa karena meminta seseorang mengemudi di atas batas tersebut dibatalkan karena hakim

menggunakan definisi Caldwell. Terdakwa adalah simpanan kepala sekolah dan temannya. Mereka membubuhi minuman non-alkoholnya dengan vodka sebagai upaya untuk mencegah dia kembali ke istrinya. Faktanya, dia pergi sebelum mereka bisa mengatakan yang sebenarnya. Pengadilan Divisi mengatakan bahwa pengetahuan terdakwa bahwa tindakannya dapat membantu dilakukannya pelanggaran utama sudah cukup untuk membantu, bersekongkol dan memberi nasihat dan mungkin untuk mendapatkan. *Blakely v DPP* disetujui di Webster [2006] EWCA Crim 415. 'Adalah pandangan ke depan terdakwa bahwa kepala sekolah kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran yang harus dibuktikan dan bukan hanya bahwa dia seharusnya memperkirakan bahwa kepala sekolah kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran tersebut. pelanggaran.'

Bisa jadi *Blakely* lebih lebar dari *Carter v Richardson*. Dalam kasus terakhir, pihak kedua ceroboh dalam hal keadaan, yaitu jumlah alkohol dalam darah, namun sengaja untuk mendorong kepala sekolah mengemudi, sedangkan dalam kasus pertama dia ceroboh dalam hal keduanya dan akan dihukum karena arah yang tepat. Jika demikian, momok tanggung jawab tuan rumah dalam pesta akan muncul kembali. Dia akan bersalah karena membantu mengemudi dalam keadaan mabuk jika dia sadar bahwa tindakannya dapat mendorong dilakukannya pelanggaran ini. Namun menurut definisinya, pengadaan mensyaratkan bahwa terdakwa harus berniat melakukan pelanggaran pokok. Seperti yang dikatakan pengadilan dalam *Blakely v DPP*: '. . . kesadaran bahwa [pelanggaran utama] mungkin terjadi tidaklah cukup'. Namun demikian, meskipun menyatakan bahwa kecerobohan Caldwell yang ada pada saat itu juga tidak cukup, hal tersebut tidak mengesampingkan kecerobohan subjektif. Rancangan KUHP tidak mengizinkan kecerobohan Caldwell dan akan menegaskan pandangan pengadilan dalam *Blakely v DPP* bahwa kecerobohan didefinisikan dalam istilah *Cunningham*. Klausul 27(1)(b), yang dikutip di bawah, akan mempertahankan kecerobohan dalam hal keadaan, hasil yang sesuai dengan hukum percobaan yang berlaku saat ini, namun harus ada niat sehubungan dengan perilaku pelaku: *Carter v Richardson* akan ditolak. Jika *Carter v Richardson* benar, ini mungkin hanya berlaku untuk pelanggaran berat.

Pengadilan Divisi dalam *Blakely v DPP* mengatakan bahwa dalam pengadaan dan mungkin konseling dan perintah harus ditunjukkan bahwa terdakwa bermaksud melakukan pelanggaran pokok dan bahwa posisinya mungkin berbeda dalam kaitannya dengan bentuk partisipasi lain yang dibantu oleh terdakwa. kepala sekolah. Sehubungan dengan bentuk partisipasi sekunder seperti konseling dimana terdakwa memberikan dorongan kepada pelaku sebelum melakukan pelanggaran, terdakwa sulit dikatakan 'mengetahui' fakta-fakta seputar kejahatan tersebut. Lebih baik dikatakan bahwa terdakwa harus yakin bahwa akan terjadi tindakan yang akan menimbulkan suatu pelanggaran. Sulit untuk menyamakan kewenangan ini dengan definisi pengadaan sebagai 'produksi melalui usaha'. Pengadaan tampaknya hanya membutuhkan niat saja.

Contoh persyaratan pengetahuan adalah *Ferguson v Weaving* [1951] 1 KB 814. Seorang pemilik pub tidak bersalah karena membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran mengonsumsi alkohol setelah jam kerja ketika dia tidak mengetahui bahwa pelanggannya melakukan hal tersebut. Aturan ini bahkan berlaku untuk pelanggaran berat. Dalam *Callow v*

Tillstone (1900) 19 Cox CC 576, seorang tukang daging dihukum karena pelanggaran berat karena menjual daging yang tidak sehat. Dokter hewan yang memeriksa sapi dara tersebut atas permintaan tukang jagal, tidak bersalah karena membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran tersebut karena dia tidak mengetahui ketidaksehatan daging tersebut. Ia tidak bersalah meski melakukan pemeriksaan sembarangan. Dari segi keadilan, kasus ini terlihat kacau balau. Tukang daging yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjual daging yang tidak sehat bersalah, sedangkan dokter hewan, yang ceroboh dalam masalah penting seperti itu, tidak bersalah.

Sebagaimana dinyatakan di atas, pengetahuan tentang ‘hal-hal penting’ mencakup pengetahuan tentang mens rea kepala sekolah. Terdakwa tidak membantu pembunuhan jika kepala sekolah tidak memiliki niat jahat sebelumnya.

Niat untuk mendorong atau membantu dan pengetahuan (sesuai dengan Carter v Richardson) tentang fakta-fakta penting diperlukan untuk keyakinan sebagai tambahan. Lebar aturan ini harus diperhatikan. Jika seseorang menyediakan kamar kepada kepala sekolah, dan menutup mata terhadap kenyataan bahwa kepala sekolah akan menempatkan gadis-gadis di rumah bordil, dia bersalah karena menjadi pendukung penghidupan dari pendapatan para pelacur. Pertanyaan apakah seorang dokter yang meresepkan alat kontrasepsi kepada seorang gadis di bawah usia 16 tahun bermaksud membantu dan mendukung hubungan seksual yang melanggar hukum telah menjadi perhatian. House of Lords tidak menganggap Gillick v West Norfolk dan Wisbech AHA [1986] AC 112, sebagai kasus perdata, tetapi keputusan tersebut tampaknya salah. Ada anggapan bahwa dokter tidak bersalah karena motifnya yang baik, meskipun pada kenyataannya motif hukum pidana tidak memberikan pembelaan. Gagasan lain adalah bahwa pembelaan terhadap kebutuhan berlaku. Pandangan alternatifnya adalah bahwa ‘niat’ dalam bidang hukum ini berarti ‘niat langsung’. Karena dokter tidak bermaksud mendorong terjadinya hubungan seks yang melanggar hukum, maka tindakan tersebut bukanlah aksesoris. Namun otoritas lain tidak membatasi niat pada tujuan. Jika Gillick benar, Fretwell (dibahas di atas) mungkin juga benar. Sehubungan dengan partisipasi sekunder, dimana actus reus merupakan kelalaian, seperti dalam Tuck v Robson (di atas), mens rea dinyatakan dalam JF Alford Transport Ltd (di atas) sebagai berikut: (i) pengetahuan bahwa prinsipal melakukan tindakan kejahatan; (ii) dengan sengaja menutup mata terhadap kejahatan tersebut; dan (iii) pengetahuan bahwa kepala sekolah didorong untuk melakukan kejahatan tersebut.

Unsur tanggung jawab tambahan yang bersifat eksternal dan kesalahan dinyatakan kembali dalam pasal 27(1) rancangan KUHP:

Seseorang bersalah melakukan pelanggaran sebagai aksesoris jika;

- (a) ia dengan sengaja melakukan, membantu atau mendorong tindakan yang merupakan atau mengakibatkan dilakukannya pelanggaran oleh pelaku; Dan
- (b) ia mengetahui, atau (jika kecerobohan saja sudah cukup dalam kasus prinsipal) ceroboh sehubungan dengan, keadaan apa pun yang merupakan unsur pelanggaran; Dan

- (c) ia bermaksud agar pemberi kuasa bertindak, atau mengetahui bahwa ia sedang atau mungkin bertindak, atau bahwa ia dapat bertindak, dengan kesalahan (jika ada) yang diperlukan untuk pelanggaran tersebut.

Dengan sub-klausul (2), '[dalam] menentukan apakah seseorang bersalah atas suatu tindak pidana sebagai pelengkap, tidak penting jika pemberi kerja tidak mengetahui tindakan pengadaan atau bantuan yang dilakukan orang tersebut.' Klausula 27(1) (b) mempertahankan hasil dalam *Carter v Richardson*, di atas. Terdakwa dengan sengaja membantu atau mendorong perbuatan (mengemudi) sembrono terhadap suatu keadaan (kelebihan alkohol). Namun nyonya dalam *Blakely v DPP* di atas tidak akan bersalah karena dia tidak mendapatkan suatu keadaan. Mengemudi bukanlah suatu keadaan tetapi suatu tindakan. Keadaannya adalah kelebihan alkohol, tapi dia memang menginginkan keadaan itu: dia berada dalam kondisi pikiran yang termasuk dalam 'tahu', bukan 'sembrono'. Oleh karena itu, frasa dalam tanda kurung tidak relevan. Dia tidak dengan sengaja mengadakan suatu tindakan, mengemudi, karena niatnya adalah untuk mencegah kepala sekolah mengemudi.

Oleh karena itu, 'bantuan, bantuan, nasihat atau pengadaan' diganti dengan 'pengadaan, bantuan, atau dorongan'. Istilah-istilah ini harus diberi arti sehari-hari, dan tidak menjadi masalah jika aksesori tersebut tidak ada di tempat kejadian perkara. Kata 'dorongan' dihilangkan dari sel 27(2). Dampaknya adalah sehubungan dengan jenis partisipasi sekunder tersebut, kepala sekolah harus mengetahui adanya dorongan. *Carter v Richardson* diperluas untuk tidak hanya mencakup kejahatan yang unsur kesalahannya dipenuhi dengan tanggung jawab yang ketat, namun juga kecerobohan. Komisi Hukum menyatakan, pemberlakuan *Carter v Richardson* sekadar memperjelas hukum. Terdakwa sengaja membantu perbuatannya (mengemudi) dan ceroboh mengenai apakah darah pengemudi mengandung alkohol berlebih.

Hasil dalam *Gillick* dipertahankan oleh pasal 27(6)(b), yang menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab sebagai pendukung jika ia bertindak untuk mencegah akibat yang merugikan asalkan ia melakukannya 'tanpa tujuan untuk melanjutkan' pelaksanaan tugas tersebut. pelanggaran. Komisi Hukum (hal. 209) memberikan contoh penyediaan jarum suntik kepada pengguna narkoba untuk mencegah penyebaran AIDS. Sangat diragukan bahwa pembelaan seperti itu masih ada pada saat ini.

Perenungan terhadap berbagai pelanggaran

Tidak masalah jika aksesori tidak mengetahui kapan dan bagaimana pelanggaran utama akan terjadi: *Bullock* [1955] 1 WLR 1. Di sisi lain, tidak cukup bahwa pelaku akan melanggar penyederhanaan hukum. Di *Bainbridge* [1960] 1 QB 129 terdakwa mengira peralatan oxyacetylene akan digunakan untuk memotong barang curian. Bahkan digunakan untuk membobol Midland Bank, Stoke Newington, London. Terdakwa tidak bersalah. Dia akan bersalah jika dia tahu bahwa perampokan akan terjadi tetapi dia tidak tahu kapan atau di gedung mana (mengikuti *Bullock*).

Setelah *Bainbridge*, terdakwa dianggap bersalah jika dia mengetahui, dalam kata-kata Lord Parker CJ, bahwa 'kejahatan seperti yang dimaksud memang disengaja'. Persyaratan ini merupakan tambahan terhadap 'pengetahuan tentang hal-hal penting'. Otoritas utama

meskipun Bainbridge tidak pernah ditolak dan menjadi kasus Inggris sekarang adalah DPP untuk *NI v Maxwell*, di atas. Empat Penguasa Hukum berpendapat bahwa jenis uji kasus yang sama harus diperluas. Lord Scarman mengadopsi rumusan Lord Lowry CJ di Pengadilan Banding Irlandia Utara. Rasa bersalah yang menyertainya muncul 'dari kenyataan bahwa ia mempertimbangkan dilakukannya satu (atau lebih) dari sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan ia dengan sengaja memberikan bantuannya agar kejahatan tersebut dilakukan'. Terdakwa dipidana menasihati tindak pidana yang sebenarnya terjadi apabila ia memikirkan serangkaian tindak pidana dan tindak pidana yang sebenarnya terjadi adalah salah satu di antaranya. Maxwell berbeda dengan Bainbridge, yang tidak dikesampingkan, karena (a) tidak diperlukan pengetahuan; (b) terdakwa harus mengetahui terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan; (c) 'jenis' pelanggaran tidak relevan: kita melihat pada rentang pelanggaran yang direncanakan. Penguasa Hukum kelima, Lord Hailsham, mengatakan 'peluru, bom, atau alat pembakar, memang sebagian besar, jika tidak semua jenis kekerasan teroris', menimbulkan pelanggaran serupa di Bainbridge. 'Fakta bahwa, jika pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dikristalisasi menjadi salah satu alternatif yang mungkin ada dalam pertimbangannya, bukan yang lain, hanya berarti bahwa jika dia adalah pihak yang ikut serta dalam pelanggaran tertentu itu dan bukan salah satu dari yang lain. '

Akibat mayoritas pendapat Maxwell, maka hukumnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

- (a) jika terdakwa mengetahui pelanggaran yang dilakukannya, ia bertanggung jawab sebagai pembantu;
- (b) jika terdakwa mengetahui bahwa satu atau lebih dari serangkaian pelanggaran akan terjadi, maka ia bersalah jika satu atau lebih dari pelanggaran tersebut terjadi;
- (c) jika terdakwa bermaksud untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi tindak pidana lain yang serupa terjadi, maka ia tidak bersalah. Hasilnya akan berbeda di bawah Bainbridge;
- (d) jika terdakwa hanya mengetahui jenis pelanggarannya secara umum, dan tidak mengetahui pelanggarannya secara spesifik, maka nampaknya ia bersalah.

Salah satu masalah yang diangkat tetapi belum terselesaikan di Maxwell adalah: seberapa jauh tanggung jawab akan diperpanjang di masa depan? Apakah terdakwa bersalah sebagai pelengkap pelanggaran 60 tahun ke depan? Ada pendapat yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh meluas sejauh ini, namun kebijakan yang mendasari pertanggungjawaban kaki tangan, yaitu memberikan efek jera bagi mereka yang mendorong terjadinya kejahatan, dapat mendukung penetapan hukuman. Masalah lain mengenai Maxwell dikemukakan dengan baik oleh P. Seago, *Criminal Law*, 4th edn (Sweet & Maxwell, 1994) 127 (kata-katanya sedikit berbeda dalam A. Reed dan B. Fitzpatrick, *Criminal Law*, 3rd edn (Thomson, 2006) 113):

Jika Boni mencurigai Aksa akan melakukan perampokan dan peralatan yang disediakan akan digunakan untuk membuka paksa jendela-jendela di tempat itu, apakah ia bertanggung jawab jika rencana Aksa yang dilakukannya adalah memperkosa gadis yang tinggal di sana? Reaksi langsung Anda adalah mengatakan bahwa ini adalah kejahatan yang

sama sekali berbeda dari kejahatan yang direncanakan Boni. Namun, bila Aksa memasuki rumah sebagai pelanggar dengan maksud memperkosa seseorang, ini adalah perampokan. . . dan perampokan adalah kejahatan yang direncanakan Boni. Mungkin pengadilan akan mengambil pandangan yang masuk akal dan menganggap Boni tidak boleh dihukum sebagai pihak yang melakukan tindak pidana tertentu dia tidak akan mendukung. [Terdakwa tidak akan menjadi pihak yang terlibat dalam pemerkosaan itu sendiri.]

Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa 'didukung' melibatkan motif dan cukup jika terdakwa dengan sengaja membantu atau mendorong perampokan tersebut dan oleh karena itu dia bersalah. Sebagai contoh kasus Budi adalah seorang pemilik rumah yang mengalami kerusakan serius pada bangunannya akibat pekerjaan renovasi yang buruk yang dilakukan oleh perusahaan kontraktor, PT. Renovasi Maju. Budi mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap PT. Renovasi Maju karena kelalaian dalam pekerjaan mereka. PT. Renovasi Maju membela diri dengan menyatakan bahwa kerusakan terjadi karena bahan bangunan yang digunakan dalam renovasi itu buruk, yang disediakan oleh pemasok, CV. Bahan Bagus. PT. Renovasi Maju juga mengajukan gugatan terhadap CV. Bahan Bagus sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kualitas bahan bangunan yang buruk.

Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen dari semua pihak, pengadilan memutuskan bahwa CV. Bahan Bagus harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada rumah Budi karena mereka telah memasok bahan bangunan yang cacat. Pengadilan juga memutuskan bahwa PT. Renovasi Maju harus menanggung biaya yang dikeluarkan Budi dalam proses litigasi, namun PT. Renovasi Maju dapat meminta penggantian biaya tersebut dari CV. Bahan Bagus karena pihak ketiga tersebut dianggap bertanggung jawab atas kerusakan.

Dalam kasus ini, keputusan pengadilan memungkinkan Budi untuk mendapatkan penggantian kerugian dari PT. Renovasi Maju, tetapi PT. Renovasi Maju pada gilirannya dapat meminta penggantian biaya litigasi dan biaya ganti rugi yang harus mereka bayarkan kepada Budi dari CV. Bahan Bagus, yang dianggap sebagai pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas masalah tersebut.

seseorang bisa saja bersalah atas suatu tindak pidana yang bersifat tambahan meskipun ia tidak mengetahui, atau tidak mengetahui, suatu keadaan dari tindak pidana yang bukan merupakan unsur dari tindak pidana tersebut (misalnya, identitas korban atau waktu atau tempat dilakukannya, dalam hal hal itu bukan merupakan unsur delik). Apabila tindakan pengadaan, bantuan atau dorongan yang dilakukan seseorang dilakukan dengan maksud untuk melakukan suatu pelanggaran hanya sehubungan dengan orang atau benda tertentu, maka ia tidak bersalah sebagai pihak yang turut serta dalam hal tersebut. suatu pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku terhadap orang atau benda lain.

Ringkasan elemen perilaku dan kesalahan

Dalam kasus di atas, Pengadilan Tinggi merangkum undang-undang tersebut sebagai berikut. Untuk dapat dinyatakan bersalah membantu, bersekongkol, memberi nasihat atau mendatangkan terdakwa harus dibuktikan telah melakukan :

- (a) suatu tindakan yang sebenarnya membantu dilakukannya pelanggaran di kemudian hari;

- (b) terdakwa] melakukan perbuatan itu dengan sengaja karena menyadari bahwa perbuatan itu mampu membantu tindak pidana;
- (c) [terdakwa] pada saat melakukan perbuatan itu sedang mempertimbangkan untuk melakukan tindak pidana dengan [pihak prinsipal] yakni ia meramalkan hal tersebut sebagai 'risiko nyata atau substansial' atau 'kemungkinan nyata'; Dan
- (d) [terdakwa] ketika melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk membantu [kepala sekolah] dalam apa yang dilakukannya.

5.3 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BERSAMA

Apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk melaksanakan suatu tujuan bersama, suatu usaha patungan atau perusahaan patungan, maka pihak sekunder bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh prinsipal dalam melaksanakan tujuan tersebut, bahkan kejahatan yang tidak terduga, asalkan tidak ada 'kejahatan mendasar'. Perbedaan antara perbuatan yang disepakati dan perbuatan yang dilakukan. Kejahatan semacam ini kadangkala dikenal sebagai 'pelanggaran tambahan'. Dia bersalah terlepas dari peran sebenarnya yang dia mainkan dalam usaha tersebut. Doktrin ini berarti bahwa jika seorang anggota suatu perusahaan yang melanggar hukum melakukan pembunuhan, anggota kelompok tersebut juga dapat dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan meskipun mereka tidak melakukan *actus reus* pembunuhan tersebut. Poin ini menandai perbedaan antara bentuk tanggung jawab ini dan tanggung jawab tambahan biasa. Dalam kasus terakhir, terdakwa harus mendorong atau membantu pelaku dalam melakukan pelanggaran.

Dalam kasus pertama, terdakwa bersalah tanpa dorongan bantuan. Di Bandung, dua terdakwa mengambil sebuah mobil. Terdakwa pertama mengemudi dengan sangat ceroboh hingga membunuh seseorang. Dia bersalah atas pembantaian manusia. Ada anggapan bahwa tujuan bersama adalah mengemudi secara sembrono. Terdakwa kedua dihukum karena bersekongkol dalam pembunuhan berencana, meskipun pembunuhan itu tidak direncanakan olehnya. Seringkali kasus melibatkan dua pihak yang hendak merampok sebuah rumah. Seseorang membunuh penjajah. Yang lain bersalah atas pembunuhan jika kejahatan itu dilakukan demi tujuan bersama mereka, yaitu perampokan. Kekerasan tidak perlu dipikirkan sejak awal usaha mereka. Tidak masalah jika pelakunya tidak dapat diidentifikasi: Conroy, tidak dilaporkan, 10 Februari 2013. Begitu pula jika terjadi kekerasan spontan, yaitu kekerasan yang tidak direncanakan (bedakan dengan ada rencana tetapi salah satu terdakwa melampaui batas yang telah disepakati), yang menjadi pertanyaan bagi juri adalah apakah tindakan para peserta dan pelakunya tidak direncanakan. Berdasarkan fakta yang ada, terdapat bukti bahwa salah satu terdakwa mengejar korban karena usaha patungan dengan orang lain. Ketika korban lainnya menyerang dan membunuh korban, dia sedang memegang tongkat kriket di lokasi pembunuhan dan tampaknya memberikan semangat kepada mereka. Namun yang lainnya bukan merupakan bagian dari perusahaan patungan tersebut. Mereka awalnya merupakan bagian dari kelompok yang menyerang korban namun tidak ikut mengujarnya ke tempat lain. Pengejaran itu bukan bagian dari rencana bersama. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa kedua terdakwa tersebut berada pada saat pembunuhan bagian dari perusahaan

patungan tersebut. Namun jika tidak ada usaha bersama, tetapi salah satu dari dua orang dapat melakukan pelanggaran tersebut, sebagaimana telah kita lihat, tidak ada yang bersalah jika tidak dapat dibuktikan siapa pelakunya. Misalnya dalam kasus di banyumas, dimana pencegahan pencatatan aliran listrik melalui kotak hitam harus dilakukan oleh pemilik rumah atau istrinya, tidak ada yang dapat dihukum. Keduanya akan bertanggung jawab jika keduanya mengetahui keberadaan kotak hitam dan mens rea serta actus reus lainnya. Demikian pula dalam kasus lain jika tidak ada usaha patungan dimana dua orang datang secara terpisah ke tempat parkir mobil dan salah satu dari mereka menendang korban hingga tewas. Mereka belum saling mengkomunikasikan fakta bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, hukuman mereka atas pembunuhan tidak disengaja dibatalkan. Undang-undangnya, perbuatan terpisah yang dilakukan oleh dua orang terdakwa bukan merupakan suatu usaha bersama. Mereka harus berbagi tujuan yang sama.

Perusahaan patungan berbeda dengan tanggung jawab prinsipal bersama. Dalam kasus terakhir kedua terdakwa mempunyai unsur luar dan unsur kesalahan atas pelanggaran pokok. Pada kasus pertama, hanya satu terdakwa yang melakukan hal tersebut. Tanggung jawab terdakwa lainnyalah yang dipermasalahkan dalam bagian ini. Terdapat perdebatan, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, mengenai apakah perusahaan patungan hanya merupakan salah satu bagian dari hukum tanggung jawab tambahan atau merupakan suatu bidang yang terpisah. Kalau undang-undangnya tersendiri, maka asas perusahaan patungan adalah bahwa terdakwa bertanggung jawab menurut mens rea-nya sendiri. Oleh karena itu, kepala sekolah mungkin seorang pembunuh, tetapi terdakwa hanya bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Jika tertuduh benar-benar merupakan pihak sekunder, ia bertanggung jawab sebagai pihak yang turut serta dalam pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku. Contoh dari hal ini adalah: jika dua orang terdakwa mempunyai tujuan yang sama, mereka melakukan suatu usaha bersama; Namun, jika salah satu terdakwa secara spontan membantu terdakwa lainnya, hal tersebut tidak akan terjadi, namun akan ada hukuman seperti biasa untuk partisipasi sekunder.

Namun jika ada usaha patungan, tetapi salah satu pihak dengan sengaja melampaui apa yang telah disepakati, maka pihak tambahan tidak bertanggung jawab atas keadaan yang tidak terduga. Pukulan dengan pisau tidak termasuk dalam kontemplasi seorang aksesori yang mengharapkan pukulan dengan kepalan tangan. Apakah prinsipal melampaui cakupan perjanjian adalah pertanyaan fakta. Dalam suatu kasus komunitas motor di Jakarta selatan, terjadi perkelahian antar geng di jalan raya KH. Abdullah Syafei. Terdakwa pertama menikam korban hingga tewas. Terdakwa kedua, meskipun anggota geng yang sama, tidak mengetahui pisau tersebut. Terdakwa pertama bersalah atas pembunuhan, namun terdakwa kedua tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Penggunaan pisau itu di luar pertimbangannya. Demikian pula, ditinggalkannya sebuah mobil oleh pengemudi yang sedang bersenang-senang di dalamnya dan meninggalkannya dalam keadaan persneling sehingga mobil tersebut berjalan di trotoar dan membunuh seorang bayi di dalam kereta bayi tidak termasuk dalam pertimbangan terdakwa; tindakan yang sangat lalai tersebut bukan merupakan upaya

bersama (joy-riding) namun melampaui apa pun yang dianggap oleh terdakwa sebagai kemungkinan nyata.

Jika terdakwa mengetahui bahwa prinsipal akan melakukan suatu pelanggaran jika diperlukan untuk menjalankan perusahaan bersama, maka ia akan bertanggung jawab jika prinsipal memang melakukan pelanggaran tersebut.

Powell; Bahasa Inggris [1998] AC 147

Di Powell kedua terdakwa pergi ke rumah seorang pengedar narkoba untuk membeli narkoba. Dealer tersebut ditembak mati, rupanya oleh pihak ketiga. Para terdakwa dihukum karena pembunuhan atas dasar bahwa mereka mengetahui bahwa pihak ketiga bersenjata senjata dan memperkirakan bahwa ia mungkin menggunakannya untuk membunuh atau menyebabkan cedera serius pada dealer. House of Lords menolak banding mereka. Dalam bahasa Inggris kedua terdakwa bersama-sama menyerang seorang sersan polisi dengan tiang kayu. Orang ketiga membunuhnya dengan pisau. Para terdakwa tidak mengetahui bahwa ia mempunyai pisau. Terdakwa pertama mengajukan banding terhadap arahan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah melakukan pembunuhan jika ia ikut serta dalam usaha patungan yang melanggar hukum, karena mengetahui bahwa terdapat risiko besar bahwa orang ketiga dapat membunuh atau menyebabkan cedera tubuh yang parah. Permohonan banding dikabulkan.

Proposisi berikut dapat diambil dari pidato dan perkembangan selanjutnya.

- (a) 'Pihak sekunder dalam suatu usaha kriminal mungkin dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang lebih besar yang dilakukan oleh pelaku utama yang jenisnya sudah diperkirakan sebelumnya namun tidak disengaja' (Lord Steyn). Nasihat Dewan Penasihat dalam *Chan Wing-siu v R* [1985] AC 168 dan *Hui Chi-ming v R* [1992] 1 AC 34 telah disetujui. Oleh karena itu, para terdakwa di Powell bersalah atas pembunuhan. Perlu dicatat bahwa pihak sekunder harus ceroboh baik mengenai *actus reus* dari tindak pidana pokok maupun apakah *actus reus* tersebut disebabkan oleh pelaku dengan *mens rea*. Kasus-kasus sebelumnya tampaknya hanya memerlukan kecerobohan dalam kaitannya dengan *actus reus*. Mengapa aksesori tersebut bertanggung jawab atas pembunuhan padahal dia tidak bermaksud membunuh atau menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan?
- Pertama, House of Lords di *Moloney* [1985] AC 905 dan *Hancock dan Shankland* [1986] AC 455 (yang dibahas di Bab 3) tidak menetapkan aturan apa pun mengenai aksesori. Oleh karena itu, mereka tidak berwenang terhadap hukum yang disebut Lord Steyn sebagai 'prinsip aksesori', yaitu bahwa 'pertanggungjawaban pidana bergantung pada bukti pandangan subjektif ke depan dari pihak pelaku kejahatan bahwa pelaku utama mungkin melakukan tindakan yang lebih besar. pelanggaran'.
 - Kedua, apabila pihak sekunder mempunyai *mens rea* yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku utama, maka tanggung jawabnya bukan merupakan bentuk tanggung jawab konstruktif. House of Lords tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'tanggung jawab konstruktif', namun ilustrasi terbaik saat ini adalah pembunuhan tidak berencana yang konstruktif. Terdakwa tetap

bertanggung jawab meskipun ia tidak meramalkan kematian atau luka fisik yang parah: cukuplah ia meramalkan kejahatan yang lebih ringan seperti penyerangan.

- Ketiga, meskipun diterima bahwa merupakan suatu hal yang tidak wajar jika seorang aksesori dapat dinyatakan bersalah atas pembunuhan meskipun ia hanya ceroboh hingga menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang parah, 'pertimbangan praktis dan kebijakan', seperti yang dikatakan Lord Steyn, bertentangan dengan hal sekunder. Pihak tidak dihukum karena pembunuhan. Jika niat memang diperlukan, hal ini akan sulit dibuktikan, sehingga melemahkan 'kegunaan prinsip aksesori'. 'Pengalaman menunjukkan bahwa tindakan kriminal bersama dengan mudah berkembang menjadi tindakan pelanggaran yang lebih besar. Untuk menangani masalah sosial yang penting ini, prinsip aksesori diperlukan dan tidak dapat dihapuskan atau dilonggarkan' (Lord Steyn). Masyarakat harus dilindungi dari geng. Sir John Smith 'Pertanggungjawaban pidana atas aksesori: hukum dan reformasi hukum' (1997) 113 LQR 453 menambahkan: 'Aksesori terhadap pembunuhan harus dibuktikan bahwa mereka ceroboh, tidak hanya apakah kematian dapat disebabkan, tetapi juga apakah pembunuhan dapat dilakukan; dia pasti sadar, bukan hanya bahwa kematian atau luka parah pada tubuh bisa saja diakibatkannya, tapi hal itu mungkin disebabkan dengan sengaja' Lord Steyn menyetujui bagian ini dalam Powell; Bahasa Inggris, di atas. Dalil sebaliknya adalah bahwa terdakwa yang tidak berniat membunuh atau melakukan GBH secara definisi tidak bersalah melakukan pembunuhan. Dia mungkin ceroboh dalam hal kematian atau GBH tetapi itu tidak cukup mens rea untuk pembunuhan sebagai pelaku utama. Oleh karena itu, ia patut dihukum karena melakukan pembunuhan berencana, karena ia telah memperkirakan adanya risiko kepala sekolah akan membunuh atau melakukan GBH. Ada perbedaan pendapat yang kuat oleh Kirby J dalam Clayton v R [2006] HCA 58 pada poin bahwa aksesori mungkin merupakan pembunuh tanpa adanya niat jahat sebelumnya. Dia ingin 'mengembalikan keselarasan yang lebih besar antara kesalahan moral dan tanggung jawab pidana' dengan mengganti undang-undang yang 'sangat tidak berprinsip' bahwa pelaku sekunder dapat bertanggung jawab atas pembunuhan 'hanya karena adanya kemungkinan'.

- (b) Lord Hutton menyatakan sehubungan dengan tingkat tinjauan ke masa depan yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman: 'pihak kedua dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika ia menganggap tindakan yang menyebabkan kematian sebagai kemungkinan terjadinya usaha patungan, kecuali jika risikonya memang demikian. sangat jauh sehingga juri berpandangan bahwa pihak sekunder benar-benar menolaknya karena dianggap dapat diabaikan'.
- (c) Seperti yang dikatakan Lord Parker CJ dalam Anderson dan Morris [1966] 2 QB 110, 'jika salah satu petualang melampaui apa yang telah disepakati secara diam-diam sebagai bagian dari usaha bersama, rekan petualangnya tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang tidak sah itu'. Tidak perlu ada kesepakatan diam-diam;

tinjauan ke masa depan sudah cukup: Hyde [1991] 1 QB 134 (CA) telah disetujui. Faktanya masih menjadi pertanyaan apakah pelaku utama telah bertindak dengan cara yang secara fundamental berbeda dari apa yang disepakati: Referensi Jaksa Agung (No. 3 tahun 2004) [2006] Krimin LR 63 (CA).

Pemohon banding dalam bahasa Inggris termasuk dalam prinsip ini. Penggunaan pisau dalam kata-kata Lord Hutton 'pada dasarnya berbeda dengan penggunaan tiang kayu', meskipun keduanya dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius. Terdakwa tidak bersalah atas pembunuhan atau pembunuhan berencana. Apakah pelaku bertindak di luar lingkup perusahaan patungan merupakan 'masalah fakta yang masuk akal bagi juri' (Lord Hutton). Keputusan Pengadilan Banding selanjutnya termasuk Rafferty [2007] EWCA Crim 1846 secara seragam menerapkan hukum 'penyimpangan substansial' ini. Beberapa otoritas sebelum Powell; English berpandangan bahwa jika pelaku utama telah melampaui batas seperti yang diperkirakan oleh terdakwa, pihak sekunder, pihak kedua tersebut bersalah atas pelanggaran yang tidak terlalu serius dibandingkan pelaku utama. Misalnya, jika kepala sekolah melampaui rencana dan membunuh, dia bersalah atas pembunuhan: aksesori bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Pihak-pihak yang berwenang sebelumnya sekarang harus dianggap salah. Dalam Mitchell [1999] Crim LR 496 Pengadilan Banding mengatakan obiter bahwa pihak sekunder tidak dapat lagi dihukum karena pembunuhan ketika prinsipal melampaui lingkup perusahaan patungan dan bersalah atas pembunuhan. Namun jika pelaku bermaksud melakukan tindak pidana berat tetapi pelaku tindak pidana tambahan hanya bermaksud melakukan tindak pidana ringan, maka jika korban meninggal maka pelaku bersalah melakukan pembunuhan tetapi pelaku hanya melakukan pembunuhan tidak berencana.

Contoh yang diberikan oleh Pengadilan Banding Pidana Irlandia Utara dalam Gilmour [2000] 2 Cr App R 407 adalah dua pihak sepakat untuk melakukan konspirasi untuk mengirimkan bom pembakar melalui kotak surat. Prinsipal menginginkan kematian atau cedera serius; aksesori memperkirakan bahaya yang dangkal. Korban meninggal. Aksesori tersebut bersalah karena (menjadi pihak kedua dalam) pembunuhan tidak disengaja, bukan pembunuhan. Lord Carswell CJ tidak melihat 'alasan yang meyakinkan mengapa seseorang yang bertindak sebagai pembantu prinsipal yang melaksanakan perbuatan yang dimaksud oleh keduanya tidak boleh bersalah atas tingkat pelanggaran yang sesuai dengan kepentingan yang dilakukannya. Ini bukanlah kasus penyimpangan (seperti kasus Anderson dan Morris) namun kasus mens rea yang berbeda. Hasilnya adalah hasil yang menyelaraskan mens rea terdakwa dengan kejahatannya, dan patut dipuji, namun ada satu hasil yang aneh yang harus diperhatikan. Terdakwa dalam bahasa Inggris meramalkan adanya luka fisik yang menyedihkan tetapi tidak bersalah; Terdakwa di Gilmour tidak melihat adanya bahaya seperti itu, namun dia bersalah! Mungkin saja Gilmour dan Powell; Bahasa Inggris tidak dapat didamaikan. Powell; English nampaknya berpandangan bahwa seorang terdakwa bisa saja bersalah atas kejahatan yang sama dengan pelaku atau tidak

bersalah sama sekali, sedangkan Gilmour memperbolehkan hukuman untuk pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan yang dilakukan oleh pelaku.

Ada aliran otoritas yang berbeda. Kasus-kasus seperti Day [2001] Crim LR 984, Gilmour, Stewart dan Schofield [1995] 3 All ER 159 dan Reid (1975) 62 Cr App R 109 mendukung pandangan bahwa pihak sekunder dapat bersalah (menjadi aksesori) pelanggaran yang lebih ringan seperti pembunuhan tidak berencana ketika pihak utama bersalah atas kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan. Di Gilmour, misalnya, pengadilan membedakan kasus-kasus seperti Anderson dan Morris dan English sebagai kasus di mana 'pemilik meninggalkan perusahaan patungan dan melakukan tindakan yang lebih serius yang tidak terduga oleh pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus aksesori tidak bertanggung jawab sama sekali atas tindakan tak terduga tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa akibat yang sama harus terjadi apabila pemberi kuasa melaksanakan tindakan yang dimaksudkan oleh pihak yang menyertainya, meskipun pemberi tindakan tersebut tidak menyadari bahwa pemberi kuasa bermaksud memberikan akibat yang lebih serius' Dalam keadaan seperti itu, aksesori dapat dihukum karena pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Klarifikasi dari House of Lords akan sangat membantu.

- (d) Sehubungan dengan penyimpangan dari usaha tersebut, Lord Hutton berpendapat: 'jika senjata yang digunakan oleh pihak utama berbeda, tetapi sama berbahayanya dengan, senjata yang akan digunakan oleh pihak sekunder, maka pihak sekunder tidak boleh melarikan diri. pertanggungjawaban pembunuhan karena perbedaan senjata, misalnya jika ia meramalkan bahwa pihak utama mungkin menggunakan senjata untuk membunuh dan pihak kedua menggunakan pisau untuk membunuh, atau sebaliknya'.

Powell; Bahasa Inggris diterapkan oleh Pengadilan Banding di Uddin [1999] QB 31. Terdakwa ikut menyerang pria lain yang sedang bertengkar dengan pengemudi mobil yang di dalamnya ada teman terdakwa. Total ada enam pria yang menyerang korban dengan tongkat atau jeruji. Almarhum tewas akibat tertusuk pisau yang dipegang salah satu terdakwa. Rupanya tersangka tidak mengetahui keberadaan pisau tersebut. Dia dihukum pada tingkat pertama. Pengadilan Banding mengizinkan banding dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak aman. Penggunaan pisau jentik adalah 'jenis yang sama sekali berbeda' dengan penggunaan tongkat. Namun, pengadilan memerintahkan persidangan ulang karena juri belum diarahkan mengenai penggunaan pisau oleh si pembunuh dan apakah terdakwa mengetahui bahwa si pembunuh mungkin menggunakannya. Keputusan pengadilan yang dilindungi undang-undang disampaikan oleh Beldam LJ. Dia menganggap bahwa Powell; Bahasa Inggris tidak dapat secara langsung diterapkan pada kasus-kasus di mana terdapat 'perilaku spontan dari sekelompok individu tidak rasional yang bersama-sama menyerang korban bersama, masing-masing bermaksud untuk menimbulkan kerugian serius dengan cara apa pun yang mereka miliki dan tidak memikirkan cara yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. orang lain secara individu akan melakukan pelanggaran serupa terhadap orang yang sama'. Powell; Bahasa Inggris adalah otoritas atas perilaku yang dilakukan sebagai hasil dari suatu rencana.

Beldam L J menetapkan tujuh prinsip yang mengatur jenis kasus yang ditanganinya. Harus ditekankan bahwa ketujuh prinsip tersebut hanyalah: prinsip-prinsip tersebut bukanlah aturan hukum (O'Flaherty [2004] 2 Cr App R 315 (CA)). Itu adalah masalah pembuktian, bukan hukum substantif. Pengadilan menekankan bahwa hal ini bertujuan untuk menghindari 'terciptanya doktrin yang rumit mengenai apakah satu senjata (misalnya pisau) memiliki karakter yang berbeda dengan senjata lainnya (misalnya palu cakar) dan senjata mana yang lebih mungkin menimbulkan luka. cedera fatal'.

- (i) Apabila beberapa orang bergabung untuk menyerang seorang korban dalam keadaan yang menunjukkan bahwa mereka bermaksud untuk menimbulkan kerugian yang serius dan sebagai akibat dari penyerangan tersebut korban mengalami luka yang fatal, mereka secara bersama-sama bertanggung jawab atas pembunuhan, namun jika luka tersebut disebabkan oleh maksud tersebut. terbukti disebabkan semata-mata oleh tindakan salah satu peserta yang sama sekali berbeda dari tindakan yang diperkirakan peserta lain sebagai bagian dari penyerangan, hanya saja peserta tersebut bersalah atas pembunuhan.
- (ii) Dalam memutuskan apakah tindakan tersebut merupakan jenis yang berbeda, penggunaan senjata oleh pihak tersebut merupakan faktor yang penting. Jika karakter senjatanya, mis. kecenderungannya untuk menyebabkan kematian, berbeda dengan senjata apa pun yang digunakan atau direncanakan oleh orang lain dan jika digunakan dengan maksud tertentu untuk membunuh, orang lain tidak bertanggung jawab atas kematian tersebut kecuali terbukti bahwa mereka mengetahui atau memperkirakan kemungkinan terjadinya kematian. penggunaan senjata seperti itu.
- (iii) Jika beberapa atau semua orang lain menggunakan senjata yang dianggap mempunyai kemungkinan yang sama untuk menimbulkan cedera fatal, maka fakta bahwa senjata yang digunakan berbeda tidaklah penting.
- (iv) Jika juri berkesimpulan bahwa kematian korban disebabkan oleh perbuatan salah satu peserta yang dapat dikatakan berbeda sama sekali dengan yang dimaksudkan oleh peserta lain, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang terlibat. kematian apakah itu pembunuhan atau pembunuhan berencana. Meskipun demikian, mereka mungkin bersalah atas pelanggaran yang melukai atau menimbulkan luka fisik yang parah dengan niat yang mereka lakukan sendiri-sendiri.
- (v) Jika selama penyerangan bersama, sebuah senjata dihasilkan oleh salah satu peserta dan pihak lain mengetahui bahwa ia memiliki senjata tersebut dalam keadaan di mana ia dapat menggunakannya selama penyerangan, ikut atau terus ikut serta dalam penyerangan. menyerang, mereka akan bersalah atas pembunuhan jika senjata tersebut digunakan untuk menimbulkan luka yang fatal.
- (vi) Dalam kasus di mana setelah dilakukan penyerangan bersama terbukti bahwa korban meninggal akibat luka senjata yang mematikan, misalnya. luka tusuk, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan siapa di antara peserta yang menggunakan senjata tersebut, maka jika penggunaannya diperkirakan oleh para pelaku penyerangan, mereka semua akan bersalah atas pembunuhan, meskipun peserta yang melakukan pukulan fatal

tersebut tidak dapat diidentifikasi. (lihat Powell). Namun, jika keadaan tidak menunjukkan bahwa para partisipan meramalkan penggunaan senjata jenis ini, tidak satupun dari mereka akan bersalah melakukan pembunuhan, meskipun mereka secara individu mungkin telah melakukan pelanggaran selama penyerangan tersebut.

- (vii) Fakta bahwa dengan menyerang korban secara bersama-sama, masing-masing dari mereka mempunyai niat untuk melukai korban secara serius, tidaklah cukup untuk membuat mereka bertanggung jawab atas kematian korban yang disebabkan oleh penggunaan senjata mematikan yang digunakan oleh salah satu dari mereka. peserta dengan niat yang sama atau bersama.

Pengadilan Banding di O'Flaherty di atas menyatakan bahwa jenis senjata sama atau tidak, itu urusan juri. Oleh karena itu, hakim pengadilan sudah benar dalam menyerahkan kepada juri apakah palu cakar, pemukul kriket, dan pecahan botol memiliki jenis senjata yang sama dengan pisau, yang digunakan untuk membunuh pelaku utama.

Powell; Bahasa Inggris di atas juga diterapkan di *Greatrex* [1998] Crim LR 733. Setidaknya enam orang menyerang korban. Salah satu dari mereka membunuhnya dengan batang logam. Tidak ada orang lain yang tahu tentang bar itu. Yang lain tidak bersalah atas pembunuhan karena kepala sekolah bertindak dengan cara yang secara fundamental berbeda dari apa yang diperkirakan oleh yang lain. Mereka meramalkan penggunaan tendangan tetapi bukan batang logam. Oleh karena itu, meskipun orang lain bermaksud untuk menyebabkan cedera serius, mereka tidak bersalah atas pembunuhan atau pembunuhan, seperti yang terjadi pada *Mitchell* di atas. Sidang ulang diperintahkan agar juri dapat menentukan apakah memukul dengan mistar berbeda secara mendasar dengan menendang.

Seperti yang diilustrasikan oleh *Greatrex*, persoalan apakah kepala sekolah bertindak dalam perang yang 'berbeda secara fundamental' adalah persoalan yang menjadi tanggung jawab juri. Asumsikan bahwa di *Greatrex*, calon anggota setuju untuk menendang korban hingga mati, namun sebelum mereka dapat melakukannya, kepala sekolah menembak dan membunuhnya. Semua terdakwa bermaksud membunuh dan satu orang memang membunuh. Mengapa menjadi penting jika modus pembunuhan pada dasarnya berbeda dari apa yang disepakati oleh mereka yang bukan pelaku pembunuhan? House of Lords mempertimbangkan kembali aturan 'perbedaan mendasar' dalam *Rahman* [2008] UKHL 45. Sebuah geng bersenjata tongkat kayu dan logam berangkat untuk menyerang korban. Salah satu peserta membunuh korban dengan pisau. Apakah anggota geng lainnya bersalah sebagai pihak sekunder dalam pembunuhan atau adakah perbedaan mendasar antara niat mereka dan penikaman kepala sekolah? DPR berpendapat bahwa doktrin 'perbedaan mendasar' tidak berlaku hanya karena asesoris tersebut memiliki pola pikir yang berbeda dengan si pembunuh pada saat pembunuhan. Oleh karena itu, peserta sekunder bersalah atas pembunuhan dengan cara biasa, sama seperti orang yang menikam korban sampai mati. Ada ringkasan hukum yang berguna yang diberikan oleh Lord Brown:

Jika B [pemilik] menyadari tanpa menyetujui tindakan tersebut digunakan bahwa A [pelaku utama] dapat membunuh atau dengan sengaja menimbulkan luka serius, namun tetap ikut serta dengan A dalam usaha tersebut, maka hal tersebut merupakan elemen mental yang

cukup. agar B dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan jika A, dengan niat yang diperlukan, membunuh dalam perjalanan kecuali (i) A tiba-tiba memproduksi dan menggunakan senjata yang tidak diketahui oleh B dan yang lebih mematikan daripada senjata apa pun yang dianggap B oleh A. atau peserta lain mungkin membawa dan (ii) oleh karena itu tindakan A dianggap berbeda secara mendasar dari apa pun yang diperkirakan oleh B.

Bagian pertama dari kutipan ini didasarkan pada Hyde di atas, dan bagian kedua (setelah 'kecuali') berasal dari Powell; Bahasa Inggris, di atas.

Terdakwa dapat dipidana sebagai pembantu meskipun ia tidak menyetujui perbuatannya. Dalam Day [2001] Crim LR 984 (CA), terdakwa berpendapat bahwa dia tidak menyetujui rekan-rekan terdakwa yang menendang kepala almarhum. Pengadilan memutuskan bahwa kurangnya persetujuan ini tidak relevan. Dia bersalah jika meramalkan penendangan itu akan terjadi. Apalagi, ia tidak perlu meramalkan kemungkinan terjadinya kematian atau GBH akibat penendangan tersebut. Rekan terdakwanya dihukum karena pembunuhan; ia didakwa melakukan pembunuhan dengan alasan bahwa ada 'perusahaan patungan yang setidaknya akan menimbulkan kerugian' dan tidak peduli bahwa para terdakwa lainnya bermaksud untuk setidaknya menimbulkan GBH. Sepanjang undang-undang ini pihak sekunder tidak bertanggung jawab jika ia seharusnya menyadari risikonya. Prinsip ini berlaku bahkan ketika kejahatannya merupakan kelalaian: Reid (1975) 62 Cr App R 109, obiter. Pengadilan Banding menilai pihak sekunder seperti sudah mengetahui maksud dari prinsipal sehingga ia pantas divonis bersalah.

Dalam McKechnie (1992) 94 Cr App R 51 salah satu terdakwa bertindak demi usaha patungan. Dia terprovokasi oleh korban yang dia bunuh. Dianggap bahwa ledakannya berarti bahwa para pimpinan gabungan lainnya tidak bertanggung jawab. Tindakan si pembunuh berada di luar tujuan umum orang lain. Namun undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas dan tampaknya tidak dapat didamaikan dengan Calhaem [1985] 1 QB 808. Salah satu pihak mengamuk dan membunuh. Namun demikian, terdakwa bersalah karena menasihati pelanggaran tersebut. Mengapa kerusuhan yang terjadi tidak memutus rantai sebab-akibat?

Apakah perusahaan patungan merupakan bagian dari tanggung jawab sekunder?

Terdapat perdebatan apakah hukum perusahaan patungan terpisah dari tanggung jawab sekunder. Paragraf ini membahas argumen dan otoritas. Kebanyakan kasus tidak merujuk pada perbedaan apa pun. Rook [1993] 1 WLR 1005 dengan tegas menyatakan bahwa doktrin perusahaan patungan berlaku baik terdakwa hadir atau tidak. Tidak peduli apakah bantuan itu diberikan sebelum atau sesudah pelanggaran pokok. Di Bryce, Pengadilan Banding menerapkan undang-undang tentang mens rea tanggung jawab perusahaan patungan terhadap seseorang yang bukan merupakan bagian dari perusahaan patungan. Ada otoritas lain yang melakukan hal ini.

Namun, ada otoritas yang bertolak belakang. Dalam Stewart [1995] 3 All ER 159 Pengadilan Banding mengatakan bahwa meskipun seorang pembantu hanya bertanggung jawab atas pelanggaran sekunder meskipun ia dapat dituntut sebagai pelaku utama, maka orang yang mengambil bagian dalam perusahaan patungan ikut serta dalam pelanggaran

utama. pelanggaran. Doktrin tersebut 'menyebabkan masing-masing pihak dalam suatu perusahaan patungan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan selama menjalankan perusahaan patungan tersebut.' Hasilnya adalah bahwa penasihat dan pihak penyedia tidak terlibat dalam perusahaan patungan karena mereka tidak hadir ketika prinsipal pelanggaran dilakukan.

Pengadilan yang sama menyatakan hal bahwa dengan tuduhan menjadi pendukung percobaan pembunuhan, cukuplah terdakwa mengetahui bahwa pelaku akan membunuh; tidak perlu dibuktikan bahwa dia tahu kepala sekolah akan membunuh. Otoritas terbaru adalah Bryce, di atas. Pengadilan Banding menyatakan bahwa doktrin perusahaan patungan berbeda dengan partisipasi sekunder karena dalam doktrin partisipasi sekunder diperlukan adanya niat untuk membantu prinsipal, sedangkan dalam doktrin partisipasi sekunder, niat tersebut tidak diperlukan. Pengadilan juga menyatakan bahwa mereka yang membantu pada 'tahap awal' adalah pembantu, sedangkan mereka yang membantu pada saat terjadinya pelanggaran adalah peserta usaha patungan. Meskipun kasus-kasus tersebut tidak sampai pada rinciannya, satu perbedaan nampaknya terletak pada *mens rea*. Dalam skenario perusahaan patungan, terdakwa bersalah jika ia memperkirakan bahwa prinsipal akan melakukan pelanggaran, sedangkan dalam partisipasi sekunder, ia bersalah hanya jika ia mengetahui 'fakta-fakta penting'. Namun, ada anggapan bahwa pandangan Pengadilan Banding keliru. Undang-undang tentang perusahaan bersama benar-benar merupakan bagian dari tanggung jawab tambahan. *Venturer* patungan ikut serta sebagai pemberi bantuan, dsb. Yang membedakannya dengan undang-undang tentang pihak-pihak sekunder adalah bahwa pembuktian kesalahan lebih mudah apabila dua orang atau lebih terlibat dalam suatu perusahaan patungan dibandingkan jika mereka tidak ikut serta. Partisipasi bersama memberikan bukti adanya bantuan dan dorongan. Dalam Reardon [1999] Crim LR 392 Pengadilan Tinggi menyetujui arahan hakim bahwa dalam perusahaan patungan, terdakwa dapat dikenakan tanggung jawab sekunder jika ia memperkirakan pelanggaran utama 'sebagai kemungkinan besar'.

Pernyataan ini merupakan arahan yang digunakan dalam hukum partisipasi sekunder tanpa perusahaan patungan. Pikiran pengadilan tidak tertuju pada permasalahan yang ada saat ini. Namun hukum sebagaimana dinyatakan dalam Reardon tidak sejalan dengan Stewart dan O'Brien. Salah satu kritik terhadap Reardon adalah tidak adanya usaha patungan di antara para pihak. Oleh karena itu, seharusnya pengadilan tidak membahas perusahaan patungan. Pengadilan Tinggi Australia menilai doktrin tersebut terpisah dalam *McAuliffe v R* (1995) 69 ALJR 621 karena untuk bertanggung jawab dalam suatu perusahaan patungan seseorang tidak harus membantu, bersekongkol, menasihati atau mengadakan, namun dalil tersebut salah. Masalah ini tidak dibahas dalam Powell; Inggris, namun karena semua pidato memperlakukan pihak-pihak dalam usaha patungan sebagai aksesoris, maka disarankan bahwa pidato tersebut bertentangan dengan prinsip yang dinyatakan dalam Stewart. Klarifikasi diperlukan.

Argumen bahwa perusahaan patungan dan tanggung jawab sebagai pihak sekunder adalah doktrin yang berbeda dikemukakan oleh A. P. Simester 'The mental element in complicity' (2006) 122 LQR 578. Artikel ini sangat layak untuk dipelajari.

Perusahaan patungan dan ECHR

Pengadilan Banding di Concannon [2002] Crim LR 213 menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan bersama tidak melanggar Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu ketentuan tentang hak atas peradilan yang adil. Terdakwa dan pembunuh pergi ke flat seorang pengedar narkoba, berniat merampoknya. Pembunuhnya menggunakan pisau untuk membunuh pedagang. Juri memvonis terdakwa (sebagai pendukung) pembunuhan. Pembela berpendapat bahwa terdakwa tidak boleh bersalah melakukan pembunuhan apabila ia tidak bermaksud membunuh atau melakukan GBH. Pengadilan memutuskan bahwa Pasal 6 hanya berlaku untuk masalah prosedural dan bukan masalah substantif. Undang-undang perusahaan patungan mungkin tidak adil, namun perubahan apa pun adalah demi kepentingan Parlemen. Hukum mungkin tidak adil. Doktrin perusahaan patungan mungkin tidak adil, seperti halnya hukum pembunuhan, namun ketidakadilan bukanlah dasar untuk menentukan bahwa suatu hukum pidana melanggar Pasal 6.

Reformasi perusahaan patungan

Tanggung jawab dalam perusahaan patungan tetap ada dalam rancangan KUHP, melalui pasal 27(1)(a) dan (c). Undang-undang yang ada saat ini sulit untuk diterapkan, karena telah mengalami perubahan sejak tahun 1989 ketika rancangan undang-undang ini diundangkan dan memerlukan penyederhanaan. Untuk proposal reformasi selanjutnya, lihat di bawah.

5.4 TIDAK ADANYA HUKUMAN TERHADAP PELAKU UTAMA

Tidak ada actus reus dan pembebasan pokok

Jika pelaku utama tidak bersalah karena tidak melakukan actus reus, maka pelaku tambahan juga tidak bersalah. Otoritasnya adalah Thornton v Mitchell [1940] 1 Semua ER 339. Sebuah bus

kondektur memberi isyarat kepada pengemudi untuk mundur. Dua pejalan kaki terjatuh. Pengemudi dinyatakan tidak bersalah karena mengemudi sembarangan. Dia mengemudi dengan hati-hati dan penuh perhatian karena dia mengandalkan sinyal kondektur. Oleh karena itu tidak ada actus reus. Kondektur dinyatakan oleh Pengadilan Divisi tidak bersalah karena membantu dan bersekongkol. Tidak ada pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak yang diduga sebagai pihak sekunder. Hukum ini secara ringkas dikemukakan oleh Avory J dalam Morris v Tolman: *“Seseorang tidak dapat membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukannya.”* Doktrin keagenan yang tidak bersalah tidak dapat diterapkan karena lagi-lagi tidak ada actus reus di mana kondektur bisa saja bersalah (lihat di bawah).

Namun, jika seorang pelaku dibebaskan karena tidak ada bukti yang dapat diterima untuk memberatkannya (misalnya karena hanya desas-desus), pelaku dapat bersalah jika ada bukti yang dapat memberatkannya (misalnya dia telah mengaku).

Pembebasan dari tanggung jawab

Seseorang dapat dipidana sebagai pembantu meskipun ia tidak dapat dipersalahkan sebagai pelaku. Bahkan ketika seorang anak laki-laki di bawah 14 tahun tidak bisa bersalah

atas pemerkosaan, dia bisa saja bersalah sebagai pelengkap. Seorang wanita tidak bisa bersalah sebagai pemerkosa tetapi dia bisa bersalah sebagai pelaku sekunder. Yang lebih mutakhir adalah tuduhan sebagai pendukung pemerkosaan yang dilakukan terhadap Rosemary West di 25 Cromwell Street, Gloucester, yang terkenal kejam. Dia membantu suaminya Fred membunuh wanita yang tinggal di rumah mereka.

Sejauh ini posisi asesor yang bersalah telah ditangani. Bagaimana jika kepala sekolah tidak bersalah bukan karena tidak ada *actus reus* tetapi karena dia dikecualikan? Dalam keadaan seperti itu, aksesori lah yang bersalah. Pada suatu waktu seorang ayah tidak mungkin bersalah karena mencuri anak. Namun, aksesori yang membantu ayah dalam penjabretan tersebut bersalah sebagai pihak sekunder. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa ayah tersebut telah melakukan pelanggaran namun dibebaskan dari tuntutan. Dengan demikian, terjadi suatu tindak pidana yang terdakwanya dapat menjadi pihak sekunder. Kata-kata dalam undang-undang tersebut adalah bahwa seseorang yang mengklaim hak atas kepemilikan anak tersebut tidak boleh 'dapat dituntut'. Keputusan tersebut menggambarkan prinsip tanggung jawab derivatif.

Apakah 'korban' bisa dijadikan aksesori?

Tidak ada aturan umum bahwa 'korban' tidak dapat menjadi pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan. Misalnya, jika 'korban' mendorong terdakwa untuk menyakitinya secara serius, maka korban dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran partisipatif. Kadang-kadang hakim berpendapat bahwa ketika suatu undang-undang dimaksudkan untuk melindungi seseorang, anggota kelompok tersebut tidak dapat dihukum sebagai aksesoris. Seorang gadis di bawah 16 tahun tidak dapat dihukum atas pelanggaran yang melibatkan hubungan seksual yang melanggar hukum karena undang-undang yang menghukum perilaku tersebut disahkan untuk melindungi anak perempuan dari diri mereka sendiri. Tidak relevan apakah dia yang memulai tindakan tersebut. Kasus serupa terjadi di Whitehouse. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun dianggap termasuk dalam kelas yang dilindungi oleh pasal 10 dan 11 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 yang berlaku saat itu, yang menghukum laki-laki karena melakukan inses dengan anak perempuan mereka. Hasil di Whitehouse dengan cepat diubah oleh undang-undang tetapi prinsipnya tetap berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh Pickford, yang dibahas dalam bab tentang penghasutan. Tyrrell diterapkan. Seorang anak laki-laki di bawah 14 tahun menjadi korban kejahatan inses dengan ibunya. Ayah tiri bersalah karena menghasut istrinya untuk melakukan inses dengan anak tirinya, namun pada saat itu tidak dapat dinyatakan bersalah karena menghasut anak tirinya untuk melakukan inses dengan istrinya. Ia juga tidak dapat dinyatakan bersalah karena membantu dan bersekongkol dengan anak tirinya untuk melakukan kejahatan inses. Pada saat itu Parlemen melindungi anak laki-laki di bawah 14 tahun dengan memutuskan bahwa anak laki-laki tersebut tidak bersalah melakukan kejahatan hubungan seksual, yang termasuk dalam kategori inses. Aturan tersebut telah dihapuskan tetapi prinsipnya tetap berlaku. Tidak ada *actus reus*. Dalam kasus di Majalengka, ditetapkan bahwa seorang pelacur tidak dapat dihukum karena bersekongkol dengan suaminya (atau geromo lainnya) untuk hidup dari penghasilannya, suatu pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Dia harus dilindungi dari eksploitasinya terhadap

dirinya. Hukum berlaku baik perempuan itu menghasut laki-laki atau tidak. Dengan kata lain, perempuan sebenarnya tidak perlu menjadi korban kepala sekolah. Cukuplah bahwa dia termasuk dalam kelas yang secara tegas atau tersirat dilindungi oleh Parlemen. Pelanggaran hidup dari penghasilan yang tidak bermoral telah dihapuskan oleh Undang-Undang Pelanggaran Seksual nomor 35 Tahun 2014 namun prinsipnya tetap ada.

Tidak diketahui secara pasti sejauh mana doktrin 'korban' ini berlaku. Kadang-kadang dikatakan bahwa hal ini hanya berlaku untuk pelanggaran seksual. Keputusan ini bisa dibilang sangat bergantung pada penafsiran undang-undang namun prinsipnya sudah menjadi prinsip umum. Cacat mental membentuk kelas yang dilindungi. Ada anggapan bahwa kekebalan tidak berlaku bagi perempuan yang melakukan aborsi yang melanggar hukum meskipun perempuan tersebut tidak dapat dihukum karena menggunakan alat untuk melakukan aborsi sendiri. Jika argumennya adalah bahwa undang-undang tersebut tidak dirancang untuk melindungi perempuan, maka hasilnya masuk akal. Namun, jika undang-undang tersebut ditujukan untuk pelaku aborsi jalanan, perempuan memang termasuk dalam kelas yang dilindungi, dan terdakwa tidak seharusnya dinyatakan bersalah sebagai pihak tambahan. Dalam Brown dihukum karena membantu dan bersekongkol dalam penyerangan terhadap diri mereka sendiri. Mereka bukanlah 'korban' untuk tujuan peraturan ini. Orang-orang yang melakukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap mereka adalah orang yang bersalah melakukan kejahatan terhadap 'korban'. Orang-orang yang sama bukanlah korban untuk satu tujuan tetapi untuk tujuan lain!

Apabila tujuan dari suatu undang-undang yang menimbulkan suatu tindak pidana adalah untuk melindungi sekelompok orang, tidak ada anggota dari golongan tersebut yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut yang dapat bersalah atas tindak pidana tersebut sebagai tambahan.

Pelanggaran harus ditujukan kepada korban (pada 210). Perlu diingat bahwa pengecualian ini hanya berlaku bagi korban yang dilindungi undang-undang, misalnya, dari hubungan seksual yang melanggar hukum. Jika seorang gadis berusia 15 tahun membantu seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang gadis berusia 14 tahun, maka dialah pihak kedua, karena dia bukan korban. Yang menjadi korban adalah gadis berusia 14 tahun dia tidak bersalah sebagai pelengkap. (Seorang pelacur dapat dihukum karena hidup dari penghasilan pelacur lain.)

Agensi yang tidak bersalah

Apabila 'kepala sekolah' melakukan tindakan *actus reus* atas suatu tindak pidana dengan bantuan atau dorongan dari terdakwa, namun jika 'kepala sekolah' mempunyai pembelaan atau tidak *mens rea*, maka terdakwa yang seharusnya menjadi pendukung kadang-kadang diperlakukan seolah-olah dia adalah pelakunya. kepala sekolah. Dia berada di posisi orang yang seharusnya menjadi pelaku utama. (Penerapan langsung prinsip tanggung jawab derivatif akan membuat orang yang seharusnya menjadi pihak sekunder tidak bersalah.) Jika seorang tukang pos mengirimkan bom parcel, dia tidak bersalah dan pasti sebagian besar dari kita bahkan tidak akan berpikir untuk menuntutnya. , tetapi orang yang mengirimkan parcel akan bertanggung jawab sebagai pelanggar utama. Contoh sederhananya adalah theo dan

Petrus. Orang yang menyuruh orang gila untuk membunuh seseorang dianggap sebagai pelaku utama ketika dia melakukannya. Kasus serupa adalah Michael. Terdakwa memberikan sebotol laudanum, sebuah racun, kepada pengasuh anak, dengan maksud untuk memberikannya kepada anaknya. Dia bilang itu obat. Faktanya, anak pengasuh anak, yang berusia lima tahun, memberikannya kepada anak tersebut tanpa mengetahui apa isinya. Anak itu meninggal. Diduga bahwa anak dari pengasuh anak tersebut adalah agen yang tidak bersalah. Terdakwa dihukum karena pembunuhan. (Seandainya agen yang tidak bersalah, yaitu sang anak, berusia di atas 10 tahun dan anak tersebut mengetahui racun tersebut, anak di bawah umur tersebut akan menjadi pelaku utama dan orang dewasa yang memberikan racun tersebut akan menjadi pelaku tambahan.) Dalam kasus di Manado, terdapat seorang terdakwa merupakan pelaku utama ketika ia menyuruh seorang anak berusia sembilan tahun untuk mengambil uang dari kasir ayahnya. Prinsip ini tidak terbatas pada situasi di mana 'prinsipal' mempunyai pembelaan seperti kegilaan atau masa bayi. Ini berlaku jika 'kepala sekolah' tidak mempunyai mens rea. Dalam kasus lain, Axel merupakan terdakwa secara tidak jujur mengirimkan faktur palsu melalui sistem akuntansi suatu perusahaan sehingga uang ditransfer dari perusahaan kepadanya. Diduga bahwa dialah yang mengambil alih untuk tujuan pencurian karena dialah yang bertanggung jawab atas staf rekening yang mengambil alih apa yang ingin dia curi. Stafnya adalah agen yang tidak bersalah. Dia adalah pelaku utama. Stringer sesuai dengan kasus lama Butt. Terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai pendukung karena tersangka pelaku tidak melakukan kejahatan. Ilustrasi terakhir adalah ketika Adam seorang terdakwa membujuk orang lain untuk mencuri mobil dari garasi. Orang yang dengan polosnya mengambil mobil itu tidak bersalah, tetapi orang yang membujuknya untuk mengambil mobil itu bersalah karena melakukan perampokan sebagai pelaku utama. Terdakwa mengirimkan obat terlarang melalui kurir. Kirby J dikutip dari Brooking JA dalam Franklin: *'Hukum menganggap dalang yang menyebabkan kejahatan yang dilakukan oleh boneka tersebut.'* Kurir adalah agen yang tidak bersalah: perusahaan mengirimkan obat-obatan tetapi terdakwa 'menyediakannya sesuai dengan pengertian peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, doktrin keagenan yang tidak bersalah tidak berlaku apabila terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan actus reus. Dalam kasus di atas, kondektur tidak dapat dikatakan telah melakukan tindakan mengemudi yang ceroboh melalui kepolosan pengemudi sebenarnya karena dia tidak mengemudi sama sekali. 'Mengemudi' mengharuskan terdakwa sendiri yang melakukan tindakan tersebut. Seseorang tidak akan mengendarai mobil ketika tangan orang lain berada di kemudi dan kaki sibuk menginjak pedal. Masalahnya bahkan lebih jelas lagi pada bigami. Ambil contoh situasi ini. Seorang laki-laki mengira istrinya sudah meninggal, padahal istrinya masih hidup. Seorang wanita mengetahui bahwa istrinya masih hidup tetapi membujuk pria tersebut untuk menikah lagi. Suami tidak bersalah melakukan bigami karena tidak mempunyai mens rea. Apakah dia agen yang tidak bersalah? Jika ya, wanita itu akan menjadi kepala sekolah. Namun jika dikatakan demikian berarti perempuan tersebut telah 'menikahi' 'istri' kedua dari laki-laki tersebut, namun seorang perempuan tidak boleh 'menikahi' perempuan lain. Keadaan ini diperburuk jika

perempuan tersebut belum menikah. Bigami mensyaratkan *actus reus* 'menikah, menikah lagi', namun berdasarkan fakta ini perempuan tersebut belum menikah. Tidaklah mungkin untuk mengatakan bahwa dia, setelah menikah, menikah lagi. Terlebih lagi, agar seseorang dapat bertanggung jawab sebagai aksesori, pelanggaran pokok harus dilakukan. Dalam kasus-kasus yang dibahas dalam paragraf ini tidak ada pelaku utama dan berdasarkan aturan pertanggungjawaban derivatif, terdakwa seharusnya tidak dihukum.

Dalam *Cogan dan Leak* [1976] QB 217, suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa yang yakin bahwa istrinya menyetujuinya. Hukuman terdakwa atas pemerkosaan dibatalkan di tingkat banding: tidak ada *mens rea* (lih. *Bourne* yang mana terdapat *actus reus*). Pengadilan Banding memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada suami sebagai pihak sekunder dapat dipertahankan. Teori derivatif partisipasi sekunder tidak diterapkan dalam kasus ini. Bagian *Cogan dan Leak* ini bisa saja terus berlanjut meskipun bagian yang dibahas selanjutnya salah. Sampai saat ini, seorang suami tidak boleh bersalah atas pemerkosaan sebagai kepala sekolah. Namun, di *Cogan dan Leak*, *Lawton LJ* melampaui *Bourne*. Ia juga mengatakan, sang suami menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan, suatu pelanggaran yang kemudian tidak dapat dilakukannya sebagai pelaku. Jika kasus ini benar, *Bourne* bisa saja diputuskan dengan cara yang sama, meskipun sulit untuk menemukan seseorang bersalah atas pelanggaran yang secara fisik tidak dapat dilakukannya. Apalagi alasan *Cogan dan Leak* bisa diterapkan pada perempuan. Apabila seorang perempuan memaksa laki-laki lain untuk berhubungan badan dengan laki-laki yang tidak mengetahui bahwa perempuan kedua tidak menyetujuinya, apakah perempuan pertama bersalah melakukan pemerkosaan melalui pelaku yang tidak bersalah dari laki-laki kedua, meskipun hanya laki-laki, berdasarkan definisi tersebut. tindak pidana perkosaan, dapatkah bersalah sebagai pelakunya? *Lawton LJ* mengatakan dalam *Cogan dan Leak* bahwa 'hukuman tidak boleh dibatalkan hanya karena alasan teknis dari pembelaan', namun apa yang terjadi dalam undang-undang tampaknya lebih dari sekedar teknis.

Keputusan dalam *Cogan dan Leak* bahwa terdakwa dapat melakukan pemerkosaan melalui alat kelamin orang lain pada prinsipnya tampaknya tidak benar. Jika seseorang tidak bisa 'menyetir' orang lain, bagaimana seseorang bisa melakukan hubungan seks vagina melalui orang lain? Sulit untuk mengatakan bahwa seseorang yang berdiri di dekatnya sedang melakukan hubungan intim. Hal ini tidak berarti bahwa suami tidak boleh bersalah atas sesuatu hal. Hanya dengan mengubah doktrin tanggung jawab derivatif yang mendasari pelanggaran sekunder maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Tidak ada satu pun keputusan yang memberikan banyak pembenaran teoritis atas tanggung jawab. Ambil ilustrasi lain yang diberikan oleh B. Mitchell, *Law Relating to Violent Crime*:

. . . Seorang wanita menipu wanita lain untuk mengunjungi rumah seorang pria dan, sambil menodongkan pistol ke keduanya, memerintahkan pria tersebut untuk memerkosa wanita tersebut. Pria tersebut memiliki pembelaan yang baik terhadap tuduhan pemerkosaan atas dasar paksaan. . . , dan perempuan tersebut tidak dapat dihukum karena pemerkosaan sebagai pelaku (laki-laki diperlakukan sebagai agen yang tidak bersalah) karena jenis kelaminnya. . . .

Tampaknya tidak memuaskan bahwa perempuan tersebut dapat lolos dari tanggung jawab pidana karena 'hal-hal teknis' ini.

Dalam catatan kakinya, Mitchell menambahkan: '*Jelas, dia tidak dapat dihukum karena terlibat dalam pemerkosaan karena tidak ada pelanggaran pemerkosaan yang dilakukan.*'

Dalam Millward terdakwa telah memberikan instruksi kepada karyawannya untuk menarik trailernya. Halangan trailer tidak dirawat dengan baik. Trailer tersebut terlepas, menabrak mobil dan menewaskan seorang penumpang. Karyawan tersebut dibebaskan dari tuduhan menyebabkan kematian karena mengemudi secara sembrono (kejahatan sekarang dihapuskan). Terdakwa didakwa melakukan kejahatan tersebut. Ia berargumentasi bahwa ia tidak dapat dihukum karena tindak pidana sekunder bila tidak ada tindak pidana pokok, karena dengan dibebaskannya karyawan tersebut berarti tidak ada tindak pidana yang dapat menyebabkan ia menjadi salah satu pihak. Namun pengadilan menolak bandingnya. Oleh karena dalam pengadaannya tidak perlu ada kesengajaan bersama di antara para pihak, maka pembantu dapat dipertanggungjawabkan bilamana pemberi kuasa dibebaskan karena tidak mempunyai unsur mental untuk melakukan kejahatan itu atau karena mempunyai pembelaan pribadi terhadapnya, dengan syarat ada akta. kembali. Karyawan tersebut tidak memiliki mens rea atas pelanggaran yang dituduhkan dan oleh karena itu tidak bersalah. Actus reus membawa kendaraan yang rusak ke jalan raya sehingga menyebabkan kematian. Terdakwa telah mendapatkan actus reus tersebut. (Namun, ada keraguan bahwa terdakwa mempunyai mens rea untuk melakukan pengadaan.) Pengadilan membedakan Thornton v Mitchell, di atas. Sopir tersebut tidak bersalah karena mengemudi secara ceroboh ketika ia membalikkan busnya atas instruksi terdakwa dan membunuh seorang pejalan kaki. Dia tidak punya actus reus. Oleh karena itu, tidak ada actus reus yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa. Dengan kata lain, pengemudinya tidak sembarangan; tidak ada tindak pidana pokok dan terdakwa tidak dapat dipidana bersekongkol dalam sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana.

Pengadilan memutuskan bahwa kasus tersebut berada pada posisi keempat dengan Cogan dan Leak, di atas. Scott Baker J berkata:

wewenang Cogan & Leaklah yang relevan dengan keputusan yang harus kita ambil. Dalam pandangan pengadilan, actus reus dalam perkara ini adalah membawa kendaraan dalam keadaan rusak ke jalan raya sehingga mengakibatkan kematian anak kecil tersebut. Itu diperoleh oleh pemohon ini. Mens rea yang diperlukan adalah hadiah Pemohon menyebabkan [karyawan] mengemudikan kendaraan tersebut dalam kondisi seperti itu seperti halnya Leak yang menyebabkan Cogan melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

Mr Cogan percaya bahwa Mrs Leak menyetujui hubungan seks padahal dia tidak. Leak dihukum karena membantu dan bersekongkol dalam pemerkosaan. Pengadilan di Cogan dan Leak mengatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan telah terjadi, bukan hanya actus reus, dan terdakwa merupakan pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut, meskipun tersangka pelaku tidak bertanggung jawab. Di Millward, pengadilan mengatakan bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi tetapi actus reus yang melakukannya. (Situasi yang sama

terjadi pada pencurian seperti yang terjadi pada kasus Cogan dan Leak, namun pengadilan di Cogan dan Leak menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan bukan hanya actus reus.) Dalam hal ini, kasusnya berbeda dan peraturannya baru. Perkembangan ini dikritik karena menciptakan kejahatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pengadilan mengatakan di Millward bahwa aturan barunya berlaku untuk pengadaan (dan mungkin aturan tersebut terbatas pada pengadaan) dan bahwa Cogan dan Leak pada dasarnya adalah kasus pengadaan. Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah apakah terdakwa memang melakukan hal tersebut. Dia tidak melakukan upaya untuk menyebabkan kematian korban. Dia tidak mencoba membunuh siapa pun. Dia ceroboh mengenai kemungkinan terjadinya kematian, namun kecerobohan saja tidak cukup untuk melakukan pengadaan. Selain itu, masih belum jelas apakah prinsip yang dikemukakan dalam kasus ini berlaku untuk cara partisipasi lainnya. Mahkamah menegaskan, dalam pengadaan pikiran para pihak tidak perlu menjadi satu. Perbedaan ini mungkin menempatkan pengadaan pada kategori yang berbeda dari kategori lainnya. Perlu ditekankan bahwa Millward melepaskan diri dari doktrin tanggung jawab derivatif yang mendasari undang-undang ini. Seseorang sekarang pasti dapat memperoleh suatu tindak pidana yang mana pelakunya tidak bertanggung jawab dalam keadaan dapat dikatakan telah terjadi actus reus suatu tindak pidana. Millward telah disetujui obiter oleh Pengadilan Banding di Wheelhouse [1994] Crim LR 756. Pengadilan mengatakan bahwa penggunaan penipuan oleh terdakwa untuk mengeluarkan mobil dari garasi adalah contoh dari Millward. Sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang melibatkan pihak yang tidak bersalah. Tidak ada kesulitan untuk mengatakan bahwa terdakwa melakukan perampokan, sedangkan di Cogan dan Leak dan Millward seseorang tidak dapat menganggap terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau mengemudi. Namun demikian, dapat diperdebatkan bahwa terdakwa dapat memperkosakan dan melewati agen. Tampaknya doktrin hak pilihan yang tidak bersalah tidak dibahas di Millward. Mungkin juga ditanyakan apakah terdakwa di Millward memiliki mens rea sebagai pelengkap. Tahukah dia bahwa halangan itu tidak dirawat dengan baik? Jika tidak, dia seharusnya tidak dinyatakan bersalah. Kritik lain terhadap Millward adalah bahwa aturan tersebut dinyatakan sebagai salah satu tindakan yang menghasilkan kejahatan. Dalam kejahatan sebelumnya yaitu mengemudi secara sembrono, kepala sekolah harus mengemudi sedemikian rupa sehingga menimbulkan risiko yang nyata dan serius yang dapat menyebabkan cedera fisik. Elemen ini merupakan bagian dari actus reus. Karena kepala sekolah tidak mengemudi dengan cara seperti itu, tidak ada actus reus yang dapat dilampirkan pada terdakwa. Oleh karena itu, dia seharusnya dinyatakan tidak bersalah. Analisis yang sama, disarankan, juga berlaku untuk mengemudi yang berbahaya.

Millward diterapkan di DPP v K&B [1997] 1 Cr App R 36 (DC). Dua anak perempuan, sebagai terdakwa, mendapatkan seorang anak laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, yang usianya lebih tua dari 10 tahun tetapi lebih muda dari 14 tahun dan yang mungkin masih dalam masa kanak-kanak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang anak perempuan berusia 14 tahun tanpa persetujuannya, yaitu dengan tunduk pada membela diri saat masih bayi, dia memperkosanya. Pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa bersalah atas

pemeriksaan, meskipun anak laki-laki tersebut tidak bersalah. Pengadilan berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa seorang perempuan yang menipu seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dapat dihukum karena tindak pidana pemeriksaan meskipun pelanggaran tersebut dibatasi oleh Parlemen untuk pelaku laki-laki. Sebagaimana dinyatakan di atas, DPP v K&B merupakan pelanggaran terhadap teori derivatif tentang tanggung jawab partisipasi sekunder.

Bisa jadi kasus-kasus seperti Millward dan DPP v K&B tidak dapat didamaikan dengan keputusan House of Lords di Powell; Bahasa Inggris, di atas. Lords mengatakan bahwa terdakwa bersalah hanya jika dia menyadari bahwa pelaku dapat melakukan pelanggaran dengan mens rea yang sesuai. Namun para terdakwa di Millward dan DPP v K&B tidak menyadari hal itu. Mungkin kasus-kasus tersebut dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa Millward dan DPP v K&B adalah kasus-kasus pengadaan yang mana prinsip-prinsip yang berbeda dapat diterapkan.

Dalam Pickford [1995] 1 Cr App R 420 Pengadilan Tinggi membedakan Bourne dan Cogan dan Leak. Pengadilan mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika seseorang dituduh membantu dan bersekongkol dengan seorang anak laki-laki untuk melakukan inses dengan ibunya. Pada saat itu anak laki-laki di bawah 14 tahun dianggap tidak mampu melakukan kejahatan yang melibatkan hubungan seksual. Hukum J mengatakan bahwa dalam Bourne dan Cogan dan Leak 'orang yang melakukan perbuatan tersebut dikatakan merupakan pelanggaran pokok sepenuhnya mampu secara hukum melakukan pelanggaran yang dipermasalahan, tetapi memiliki pembelaan penuh atas fakta-fakta. Pihak-pihak yang berwenang ini tidak mendukung usulan bahwa jika pelaku utama tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan kejahatan yang dimaksud, maka pelaku lain mungkin bersalah karena membantu dan bersekongkol dengannya.'

Tunduk pada doktrin keagenan yang tidak bersalah dan kasus-kasus seperti Cogan dan Leak, pelanggaran utama harus dilakukan sebelum terdakwa dinyatakan bersalah sebagai pendukung, meskipun pelakunya tidak perlu dihukum. Tanpa pelaku utama, terdakwa tidak bersalah: lihat Morris v Tolman [1923] 1 KB 166, dimana pemberi kerja tidak bersalah karena menggunakan mobil van komersial untuk keperluan pribadi karena hanya penerima lisensi yang dapat bersalah atas pelanggaran ini tetapi itu adalah karyawan dari pemegang lisensi yang telah menggunakan kendaraan untuk tujuan yang tidak tercakup dalam lisensi, dan oleh karena itu karyawan tersebut tidak bersalah karena membantu. Tidak ada actus reus. Pengadilan Banding di Loukes [1996] 1 Cr App R 444 menerapkan Thornton v Mitchell dan membedakan Millward. Terdakwa didakwa sebagai pihak sekunder dalam pelanggaran yang menyebabkan kematian karena mengemudi berbahaya. Hakim pengadilan mengarahkan juri untuk membebaskan pengemudi tersebut. Pengadilan Banding memutuskan bahwa karena tidak ada pelanggaran utama, maka terdakwa tidak dapat bersalah melakukan pelanggaran tersebut. Tidak ada actus reus (kejelasan bagi pengemudi yang kompeten bahwa mobil itu berbahaya) yang diperoleh terdakwa (lih. Millward). Posisinya akan berbeda jika tersangka pelaku utama dinyatakan tidak bersalah dengan alasan bahwa ia tidak mempunyai mens rea. Dalam hal ini Millward akan mengajukan permohonan, dan terdakwa dapat dinyatakan

bersalah karena mendapatkan *actus reus*. Dengan demikian, kejahatan pokoknya adalah pelanggaran berat dan *mens rea* tidak relevan. Pengadilan meminta Parlemen untuk mengubah undang-undang tersebut. Dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghambat pencegahan kejahatan, karena alasan mengapa pelanggaran utama tidak terjadi mungkin bersifat kebetulan.

Kejahatan menurut undang-undang yang mendorong bunuh diri harus diperhatikan. Tidak ada kejahatan bunuh diri, namun seseorang mungkin bersalah karena bersekongkol untuk bunuh diri. Mungkin pada kenyataannya 'mendorong bunuh diri' paling tepat digambarkan sebagai pelanggaran utama dan pelakunya sebenarnya adalah pelaku utama. Demikian pula terdapat tindak pidana pengadaan pelaksanaan suatu jaminan yang berharga. Dalam konteks ini 'pengadaan' merupakan pelanggaran utama. Aksesori akan bersalah atas pengadaan [*sic*] pelaksanaan keamanan yang berharga!

Doktrin keagenan yang tidak bersalah (dan 'semi-innocent') merupakan bagian dari rancangan KUHP, pasal 26(1)(c), yang dikutip di awal Bab ini, yang menganggap orang yang bertindak melalui agen sebagai pelakunya. . Terdakwa di Bourne akan bersalah sebagai pelaku utama, bukan sebagai pendukung. Komisi Hukum (di 205 –206) menyatakan keraguan apakah rancangan mereka akan mengarah pada hukuman konduktor di Thornton v Mitchell sebagai kepala sekolah (dia tidak akan bertanggung jawab sebagai pendukung karena pasal 27(1)(a), yang mempertahankan hukum bahwa harus ada pelaku yang bersalah). Anehnya, Komisi Hukum menyerahkan tanggung jawab untuk memutuskan hal ini ke pengadilan.

Penarikan

Hukum Inggris memberikan pembelaan kepada pihak sekunder yang mengundurkan diri sebelum melakukan pelanggaran penuh. Salah satu alasan yang mungkin adalah bahwa terdakwa diberi insentif untuk mencegah kejahatan tersebut; alasan lainnya adalah bahwa terdakwa tidak begitu tercela dibandingkan dengan orang yang melanjutkan. Untuk pandangan modern tentang kemungkinan alasan, lihat komentar A. J. Ashworth tentang O'Flaherty [2004] Crim LR 751 (CA). Apabila dalam suatu perkara yang melibatkan kekerasan yang telah direncanakan sebelumnya, terdakwa membantu atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi mengundurkan diri sebelum tindak pidana itu terjadi, maka ia tidak bertanggung jawab sebagai pihak sekunder, dengan syarat ia secara tegas atau tersirat menyampaikan pertobatan atau pencabutannya kepada, diperkirakan, semua pelaku, namun mungkin tetap bertanggung jawab atas konspirasi atau hasutan atau keduanya. Terdakwa harus memberikan 'peringatan yang jelas' bahwa ia telah menarik diri dari tindakan kriminal: Becerra (1976) 62 Cr App R 212 (CA), yang masih menjadi kasus utama, dan Whitefield (1984) 79 Cr App R 36. Dalam kasus terakhir Dalam kasus ini, Pengadilan Banding mengabulkan permohonan banding terdakwa ketika terdakwa telah mengatakan kepada rekan-rekan konspiratornya bahwa ia telah memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam perampokan sebuah flat di sebelahnya. Terdakwa harus memberikan 'komunikasi yang tegas' mengenai penarikan diri. Tidaklah cukup untuk menghindari kesalahan yang dituduhkan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan mengundurkan diri (Rook [1993] 1 WLR 1005, mengikuti Whitefield, di mana Pengadilan Tinggi mengatakan: 'Jika... partisipasi terbatas pada nasihat

atau dorongan [orang yang diduga sebagai aksesori] setidaknya harus mengomunikasikan perubahan pikirannya kepada orang lain'), dan menurut Becerra, mengatakan 'ayo pergi' saja tidak cukup. Di Benteng dikatakan bahwa terdakwa harus mengkomunikasikan penarikan dirinya dengan tegas. Di Baker kata-kata '*Saya tidak melakukannya*' dianggap samar-samar. Itu bisa berarti, 'Saya akan tinggal tetapi tidak melakukan apa pun setelah melakukan pukulan'. Terdakwa tidak menunjukkan penarikan diri yang efektif melalui perbuatan atau perkataannya. Demikian pula dalam Nawaz (1999) *Independen*, 19 Mei, menyatakan mundur dari perusahaan patungan saja tidak cukup. Pengunduran dirinya harus dilakukan dengan tegas, diberitahukan kepada peserta lain dan mencakup upaya untuk menghalangi peserta lain untuk melanjutkan. Mungkin penarikan diri di Becerra dan Baker hanya akan efektif jika terdakwa berusaha untuk menahan terdakwa lainnya. Jika komunikasi memungkinkan, tidak perlu melapor ke polisi. Jika tidak ada komunikasi yang memungkinkan, kiranya terdakwa harus menghubungi polisi. Glanville Williams, *Textbook of Criminal Law*, 2nd edn (Stevens, 1983) 127, mengutip dari sebuah kasus di AS: 'Niat yang dinyatakan untuk menarik diri dari konspirasi untuk meledakkan sebuah bangunan tidaklah cukup jika sekiranya telah dipasang. Dia harus menyalakan sumbunya.' Lloyd LJ di Rook berkata, obiter, bahwa penarikan diri tersebut mungkin efektif jika terdakwa telah melakukan yang terbaik untuk mengatasi sumbu tersebut. Dengan kata lain, terdakwa harus melakukan lebih dari sekedar mengkomunikasikan penarikan diri secara efektif: harus ada penolakan terhadap bantuan tersebut. Pertanyaan apakah terdakwa telah mengundurkan diri adalah pertanyaan yang diajukan juri: Grundy [1977] *Crim LR* 543. Dalam kasus tersebut, terdakwa memberikan informasi kepada dua orang tentang sebuah rumah yang kemudian mereka rampok. Dua minggu sebelum dilakukannya kejahatan, dia telah berusaha menghentikan mereka. Ada bukti penarikan yang efektif. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan fakta yang diajukan terhadap Grundy, serta beberapa kasus lain seperti Whitefield, seharusnya tidak ada pembelaan, karena informasi tersebut tetap berharga setelah penarikan diri.

Meskipun demikian, Pengadilan Banding di O'Flaherty menyetujui Grundy dan Whitefield. Pengadilan Banding di Perman [1996] 1 Cr App R 24 berpendapat bahwa dalam skenario perusahaan patungan, terdakwa tidak dapat menarik diri setelah kegiatan kriminal dimulai. Pernyataan itu adalah obiter. Pengadilan mendalilkan bahwa apa yang dianggap sebagai penarikan dalam keadaan seperti itu sebenarnya adalah bahwa prinsipal telah melampaui ruang lingkup perusahaan patungan sehingga terdakwa tidak lagi bertanggung jawab. Pengadilan Banding Irlandia Utara menghadapi masalah serupa dalam Graham [1996] NI 157. Dalam kasus perusahaan patungan, tidak cukup untuk mendesak agar korban tidak dibunuh. Pengadilan tidak ingin menyatakan apa yang diperlukan, sehingga nilai kasus ini sebagai preseden agak terbatas, namun dikatakan bahwa bahkan memberi tahu polisi mungkin tidak akan menjadi penarikan diri jika pelaku kejahatan, di sini adalah pembunuh teroris, adalah pelaku kejahatan. hampir melakukan pelanggaran.

Pengadilan Banding di Mitchell [1999] *Crim LR* 496 mengatakan tanpa menyebutkan otoritas bahwa komunikasi penarikan diri, meskipun diperlukan ketika kekerasan direncanakan, bukanlah persyaratan untuk penarikan diri ketika kekerasan terjadi secara

spontan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pengadilan mengatakan bahwa terdakwa telah mundur ketika berhenti berkelahi, melemparkan tongkat yang dibawanya dan pergi. Mitchell mungkin dikritik dengan alasan bahwa terdakwa tidak berusaha untuk mengakhiri dorongan yang telah dia berikan sebelumnya dan bahwa hukum perusahaan patungan tidak didasarkan pada perbedaan antara kekerasan terencana dan kekerasan spontan. Di Pengadilan Banding di Robinson, tidak dilaporkan, 3 Februari 2000 Otton LJ mengatakan bahwa Mitchell, yang juga memberikan keputusan utama, adalah pengecualian. Bahkan ketika kekerasan terjadi secara spontan, penarikan diri harus dikomunikasikan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berhenti 'kecuali jika hal tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak masuk akal untuk dikomunikasikan seperti dalam . . . Mitchell dimana terdakwa melemparkan senjatanya dan menjauh sebelum pukulan terakhir dan fatal dilakukan'. Mitchell bukanlah kasus perusahaan patungan tetapi diterapkan pada perusahaan patungan di O'Flaherty, di atas. Dua orang terdakwa yang semula menyerang korban tidak mengejar korban bersama dengan yang lainnya hingga ke jalan berikutnya. Mereka tidak menyampaikan pengunduran diri mereka tetapi tidak mengejanya. Pengadilan Banding memutuskan, jika terjadi kekerasan spontan, tidak perlu mengkomunikasikan penarikan diri tersebut kepada pihak lain. Dalam hal ini O'Flaherty bertentangan dengan Robinson.

Mantell LJ merangkum hukum tersebut dalam O'Flaherty:

Pertobatan saja tidaklah cukup. Untuk melepaskan diri dari suatu insiden, seseorang harus berbuat cukup untuk menunjukkan bahwa dia menarik diri dari perusahaan patungan. Ini pada akhirnya menjadi pertanyaan tentang fakta dan derajat juri. Pertimbangan akan dipertimbangkan antara lain sifat dari bantuan dan dorongan yang telah diberikan dan seberapa besar dampak yang akan terjadi atau kerugian atau kerugian yang fatal, serta sifat dari tindakan yang dikatakan sebagai penarikan diri.

Apabila pertobatan terdakwa tidak ikhlas, seperti ketika ditangkap polisi, maka ia tetap bertanggung jawab sebagai penasihat, bahkan sebagai penghasut jika ia masih memberi semangat kepada pasangannya, seperti yang dikatakan terjadi dalam kasus terkenal. Craig dan Bentley (1952)

The Times, 10–13 Desember, di atas. (Alternatifnya adalah dengan mengatakan bahwa terdakwa pertama melampaui lingkup usaha bersama mereka dengan membunuh seorang petugas polisi dan, oleh karena itu, terdakwa kedua tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut.) Jika terdakwa berada dalam tahanan polisi, ia akan tetap bertanggung jawab. untuk dorongan atau bantuan yang telah diberikan sebelumnya: Johnson dan Jones (1841) 174 ER 479. Tidak dapat dipastikan apakah pembelaan tersedia ketika terdakwa secara fisik tidak dalam posisi untuk menolak bantuannya. Mungkin seharusnya tidak demikian, karena bantuan yang diberikan kepada kepala sekolah tetap berguna baginya.

Paragraf sebelumnya berbicara tentang 'pertobatan', dan beberapa kasus dalam bahasa Inggris melakukan hal yang sama. Maksud dari istilah tersebut adalah bahwa terdakwa harus menarik diri secara efektif. Tidak perlu ada pertobatan sejati. Jika terdapat lebih dari satu pelaku utama, maka tidak dapat dipastikan apakah terdakwa dapat menarik diri hanya

dengan memberitahukan secara tegas kepada mereka semua atau apakah pemberitahuan kepada salah satu saja sudah cukup. Kasus hukum dalam hal ini akan sangat membantu.

Berdasarkan rancangan KUHP, Law Com. 177, 1989, ada pembelaan penarikan (cl 27(8)). Namun, tidak seperti undang-undang saat ini, terdapat persyaratan dalam pasal 27(8)(a) bahwa penarikan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran sepenuhnya. Faktanya Whitefield menolak prasyarat itu. Komisi Hukum juga berpandangan bahwa komunikasi penarikan diri kepada salah satu dari beberapa pelaku sudah cukup, karena hal ini merupakan 'keinginan yang cukup dari pihak yang terkait untuk menarik diri'. Lihat bagian selanjutnya untuk usulan Komisi Hukum tahun 1993.

Proposal reformasi: mendorong dan membantu kejahatan

Usulan reformasi dimuat dalam Makalah Konsultasi Komisi Hukum yang panjang, No. 131, Membantu dan Mendorong Kejahatan, 1993. Dalam dokumen yang substansial dan radikal ini Komisi Hukum merekomendasikan:

- (a) penghapusan undang-undang partisipasi saat ini termasuk pasal 8 Undang-undang Aksesoris dan Abettors tahun 1861 dan Referensi Jaksa Agung (No. 1 tahun 1975) dan penghasutan, dan
- (b) terciptanya dua pelanggaran baru, yang membantu kejahatan dan mendorongnya.

Kedua pelanggaran tersebut, tidak seperti bentuk pertanggungjawaban kaki tangan yang ada saat ini, merupakan pelanggaran awal seperti halnya penghasutan, yaitu pelanggaran utama tidak perlu dilakukan. Batasan antara bersekongkol dan hasutan akan hilang karena konsep di belakangnya sama, yaitu mendorong kejahatan. Prinsip tanggung jawab derivatif akan dihapuskan.

Tindak pidana memberi bantuan dimaknai sebagai berikut.

Seseorang melakukan tindak pidana membantu apabila ia:

- (a) mengetahui atau meyakini bahwa orang lain ('pemilik') sedang melakukan, atau menyebabkan dilakukannya, tindakan yang melakukan atau akan melibatkan dilakukannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi pinjaman; Dan
- (b) mengetahui atau meyakini bahwa pelaku, dengan bertindak demikian, melakukan atau akan melakukan hal tersebut dengan kesalahan yang diperlukan untuk pelanggaran yang dimaksud; Dan
- (c) melakukan tindakan apa pun yang ia ketahui atau yakini membantu atau akan membantu prinsipal dalam melakukan pelanggaran tersebut.

Komentar berikut tentang bantuan ditawarkan.

- (a) Bantuan meliputi penyediaan alat, pemberian nasehat, pengantaran pelaku ke TKP, dan menyesatkan polisi.
- (b) Kejahatan pokok harus dapat diidentifikasi pada saat memberikan bantuan tetapi terdakwa tidak perlu mengetahui waktu, tempat, atau korban, misalnya. dia harus tahu bahwa perampokan akan terjadi tetapi bukan perampokan di Midland Bank, Stoke Newington. Undang-undang di Bainbridge yang mengatur tentang pengetahuan tentang jenis kejahatan dihapuskan. Komisi Hukum mengatakan bahwa Bainbridge

merupakan sebuah 'penghindaran' terhadap persyaratan bahwa terdakwa harus mengetahui 'hal-hal penting' (Johnson v Youden, di atas) (paragraf 3.22).

- (c) Saat ini bantuan yang diberikan sebelum terjadinya kejahatan tidak menimbulkan tanggung jawab sampai pelanggaran pokok dilakukan. Komisi Hukum berpendapat bahwa 'mungkin dianggap tidak memuaskan jika lembaga penegak hukum harus menunggu sampai kejahatan tersebut benar-benar terjadi sebelum mereka dapat melakukan intervensi untuk mengendalikan perilaku para pembantu' (paragraf 4.20). Dilakukannya pelanggaran penuh mungkin juga tidak disengaja. Bahkan saat ini tidak ada persyaratan bahwa terdakwa menyebabkan pelaku utama melakukan kejahatan tersebut, dan kesalahannya dinilai berdasarkan kesalahannya dalam memberikan bantuan: hal ini tidak bergantung pada apakah pelaku melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Penghasutan dan percobaan pembunuhan sudah merupakan pelanggaran kecil. Komisi Hukum berpandangan bahwa peralihan ke tanggung jawab yang masih baru dalam praktiknya tidak akan memperluas cakupan hukum karena biasanya 'tindakan pemberian bantuan hanya akan terungkap, atau dianggap layak untuk dituntut, jika kejahatan utama sebenarnya telah dilakukan'. (paragraf 4.26). Namun, hal ini akan menangkap tuan rumah sosial dimana kepala sekolah, yang tadinya bermaksud untuk mengemudi, ternyata meninggalkan mobilnya dan berjalan pulang, namun pelanggaran seperti itu kemungkinan besar tidak akan dituntut. Peralihan ke bentuk yang belum sempurna akan menghilangkan hukum kaki tangan dari dasar tanggung jawab derivatifnya saat ini.
- (d) Pemberian bantuan harus diterapkan pada semua pelanggaran, baik hukum umum maupun hukum.
- (e) Kelalaian untuk bertindak seharusnya tidak membantu. Tuck v Robson akan terbalik.
- (f) Tidak boleh ada pembelaan de minimis.
- (g) Unsur mental mencakup situasi di mana terdakwa acuh tak acuh terhadap dilakukannya pelanggaran penuh namun tidak curiga bahwa pelaku dapat melakukan pelanggaran. Keyakinan bahwa pelanggaran akan terjadi merupakan salah satu aspek dari mens rea. Tes ini akan mengecualikan mereka yang menjual barang sebagai bagian dari bisnis mereka, bahkan ketika penjualan tersebut ditujukan kepada 'pelanggan yang mencurigakan' (paragraf 4.85).
- (h) Situasi yang muncul dalam DPP untuk Irlandia Utara v Maxwell, dengan mempertimbangkan serangkaian kemungkinan pelanggaran, dipenuhi dengan ketentuan bahwa terdakwa bersalah 'jika dia mengetahui atau yakin bahwa pelaku bermaksud melakukan salah satu dari sejumlah pelanggaran. pelanggaran dan melakukan tindakan apa pun yang ia ketahui atau yakini akan membantu pelaku dalam melakukan pelanggaran apa pun yang sebenarnya dikehendaki oleh pelaku. Aturan dasar bahwa pengetahuan diperlukan menggantikan ambang batas bawah di Maxwell, pertimbangan kemungkinan pelanggaran dari 'daftar belanja', namun prinsip dasar Maxwell tetap dipertahankan.

- (i) Undang-undang dalam *Callow v Tillstone*, di mana dokter hewan tidak bertanggung jawab sebagai pelaku, ketika ia secara lalai mengesahkan sapi dara sebagai sehat, namun tukang daging bertanggung jawab sebagai prinsipal karena memperlihatkan daging yang tidak sehat untuk dijual, ditegaskan.
- (j) Pengecualian 'korban' di *Tyrrell* diperluas pada paragraf 4.103: 'seseorang tidak bersalah atas keterlibatannya dengan membantu suatu pelanggaran jika pelanggaran tersebut didefinisikan sedemikian rupa sehingga tindakannya pasti merupakan insidental terhadap perbuatannya dan tindakan tersebut tidak dijadikan pidana. dengan pelanggaran itu'. Pembelaan ini tidak akan diberikan jika tujuan pemberi bantuan adalah melakukan pelanggaran penuh.
- (k) Pekerja tidak bertanggung jawab jika membantu pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja selama mereka bekerja. Mereka akan bertanggung jawab untuk membantu pelanggaran yang dapat didakwakan karena kebijakan pencegahan kejahatan lebih besar daripada kebijakan yang memberikan 'beban yang tidak semestinya' pada pekerja (paragraf 4.111). Pembelaan kerja tidak akan tersedia sama sekali jika pekerja memang bertujuan untuk membantu (paragraf 4.138).
- (l) Tidak boleh ada pembelaan bahwa orang yang membantu bertindak dalam urusan sehari-harinya seperti memasok batu bara yang menyebabkan truk kelebihan beban dalam *NCB v Gamble*. 'Memang benar, dari sudut pandang untuk mencegah atau menghambat dilakukannya kejahatan utama, mungkin diperlukan agar pemasok "bisnis", di atas segalanya, dicegah untuk menyediakan sarana kejahatan' (paragraf 4.116).
- (m) 'Pembantu sosial' seperti tuan rumah yang memberikan alkohol kepada seseorang yang menjadi tidak sehat karena mabuk saat mengemudi harus tetap bertanggung jawab.
- (n) Motif yang baik seharusnya tidak mempengaruhi tanggung jawab (lih. *Gillick v West Norfolk dan Wisbech Health Authority*).
- (o) Harus ada pembelaan yang melindungi orang yang membantu tetapi dengan tujuan mencegah dilakukannya kejahatan seperti agen yang menyamar.
- (p) Pembelaan lainnya adalah bantuan yang dilakukan 'dengan tujuan menghindari atau membatasi konsekuensi berbahaya dari pelanggaran tersebut dan tanpa tujuan untuk melanjutkan tindakannya', seperti menyediakan kondom kepada tahanan laki-laki untuk mencegah penyebaran AIDS melalui buggery. Baik pembelaan dalam (o) atau (p) tidak akan tersedia bila tujuan pemberi bantuan adalah melakukan pelanggaran utama.
- (q) Pembelaan untuk mengundurkan diri harus diberikan kepada asisten ketika mereka mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah dilakukannya pelanggaran penuh. Namun, kelanjutan pembelaan ini sulit dilakukan jika tidak mendasarkan pemberian bantuan pada tindakan pelanggaran utama.

Komentar berikut ini ditujukan kepada dugaan pelanggaran yang mendorong kejahatan.

- (a) Definisi yang disarankan adalah:

- (1) Seseorang melakukan tindak pidana mendorong terjadinya kejahatan apabila ia –
 - meminta, memerintahkan atau mendorong orang lain ('pemilik') untuk melakukan atau menyebabkan dilakukannya suatu tindakan atau tindakan yang, jika dilakukan, akan mengakibatkan dilakukannya suatu pelanggaran oleh pemberi pinjaman; Dan
 - bermaksud agar tindakan tersebut dilakukan oleh prinsipal; Dan
 - mengetahui atau yakin bahwa pelaku, dengan bertindak demikian, akan melakukan kesalahan yang diperlukan untuk pelanggaran yang dimaksud.
- (2) Ajakan, perintah atau dorongan tersebut harus diberitahukan kepada kepala sekolah, namun tidak relevan dengan kesalahan orang tersebut apakah kepala sekolah bereaksi atau tidak terhadap atau dipengaruhi oleh ajakan, perintah atau dorongan tersebut.
- (3) Terdakwa tidak perlu mengetahui identitas kepala sekolah, dan tidak perlu mengetahui siapa pun kepala sekolah atau kelompok kepala sekolah tertentu, asalkan ia bermaksud bahwa komunikasinya akan ditindaklanjuti oleh siapa pun yang menjadi perhatiannya.
(Untungnya atau tidak, tidak ada definisi yang diberikan mengenai 'niat' namun Komisi memperkirakan 'tahu atau percaya' dapat diartikan sebagai penanganan.)
- (b) Pelanggaran ini akan menggantikan hasutan, konseling dan bersekongkol.
- (c) Ini merupakan pelanggaran yang masih kecil.
- (d) Hal ini dapat dilakukan karena kelalaian. Undang-undang yang disebutkan di atas akan terus berlaku.
- (e) Mens rea baru akan membatalkan aturan dalam *Curr* [1968] 2 QB 944 (pengetahuan tentang mens rea kepala sekolah).
- (f) Pembelaan terhadap bantuan seperti pekerjaan, penegakan hukum dan pembatasan kerugian, yang disebutkan di atas, tidak boleh diterapkan pada dorongan dalam pelanggaran ini tujuan terdakwa adalah untuk membuat pelaku melanggar hukum.
- (g) Mungkin ada pembelaan jika 'korban' mendorong terjadinya kejahatan seperti ketika seorang anak perempuan di bawah 16 tahun mendorong anak laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengannya.
- (h) Penarikan diri harus menjadi suatu pembelaan, namun dapat dikatakan bahwa apabila hal tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan hal tersebut, pemberi semangat tidak hanya harus membalas dorongannya namun juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran tersebut. . .'. Oleh karena itu, pembelaan dirumuskan secara berbeda untuk pemberi bantuan dan pemberi semangat.
- (i) Terdakwa perlu mengetahui identitas korban atau rincian lainnya.

Komisi membuka diskusi mengenai isu apakah pelanggaran yang diusulkan harus diterapkan dalam kaitannya dengan pelanggaran ringkasan. Seharusnya tidak ada pembelaan atas ketidakmungkinan: *Fitzmaurice* [1983] QB 1083 (CA) tentang penghasutan akan dibatalkan. Tidak mungkin membantu atau mendorong upaya atau konspirasi; kejahatan tersebut dapat dicoba dan orang-orang dapat bersekongkol untuk melakukannya. Pidana maksimum untuk

tindak pidana baru harus sama dengan pidana pokok. Diusulkan tindak pidana pengadaan dimana terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar dilakukan suatu pelanggaran berat atau dengan ceroboh apakah perbuatan itu akan mengakibatkan dilakukannya pelanggaran tersebut. Komisi tidak yakin apakah undang-undang perusahaan patungan harus dipertahankan atau dihapuskan jika undang-undang tersebut digantikan dengan kejahatan membantu. Disarankan agar hal tersebut dipertahankan. Jika para terdakwa bertindak bersama-sama dan salah satu dari mereka membunuh korban tetapi juri tidak yakin yang mana, maka tidak ada yang dapat dihukum karena pembunuhan dan tidak juga dapat dihukum karena membantu. Agensi yang tidak bersalah tetap dipertahankan. Untuk mempertahankan hukuman di Bourne dan Cogan dan Leak akan ada tanggung jawab pada terdakwa dimana pihak utama memiliki pembelaan atas paksaan atau bertindak berdasarkan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa. Komisi merasa skeptis terhadap doktrin yang sejak Makalah ini diterbitkan telah dikaitkan dengan Millward (1994) 158 JP 1091, yaitu pengadaan actus reus. Mereka berpendapat bahwa doktrin tersebut 'dalam kegelisahannya menghadapi kasus-kasus' seperti Bourne, Cogan dan Leak 'akan mencapai batas yang terlalu jauh'.

Untuk komentar lihat K. J. M. Smith 'The Law Commission Consultation Paper on complicity: (1) A blue print for reform' [1994] Crim LR 239, G. R. Sullivan 'Fault elements and joint enterprise' [1994] Crim LR 252 dan Sir John Smith 'Secondary partisipasi dalam kejahatan bisakah kita hidup tanpanya?' [1994] NLJ 679. Salah satu kritik utama adalah bahwa usulan pelanggaran yang membantu kejahatan akan menyatukan mereka yang memulai kejahatan dan mereka yang membantu setelah kejahatan dimulai. Apakah orang yang mengantar pembunuh bayaran ke tempat kejadian sama tercelanya dengan orang yang mempekerjakan si pembunuh? Salah satu perbedaan antara undang-undang yang diusulkan dan undang-undang saat ini adalah dalam hal ini. Saat ini terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana jika penuntut dapat membuktikan bahwa ia ikut serta dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu. Keuntungan ini akan hilang jika ada usulan ini. Undang-undang ini dikembangkan secara serampangan, sehingga menimbulkan kompleksitas, dan isu-isu kebijakan serta analitis belum ditangani. Reformasi sudah terlambat.

Rekomendasi Komisi Hukum pada tahun 2006 mengenai keterlibatan dalam pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana

Komisi Hukum menerbitkan Laporannya No. 304 Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi pada akhir tahun 2006. Di dalamnya diusulkan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab sebagai kaki tangan pembunuhan tingkat pertama atau kedua (untuk rincian mengenai dua tingkatan pembunuhan yang direkomendasikan ini, lihat Bab 11) jika:

dia (D) bermaksud membantu atau mendorong pelaku utama (P) untuk melakukan jenis pembunuhan yang relevan, (misalnya, D akan bertanggung jawab atas pembunuhan tingkat pertama yang dilakukan oleh P jika D bermaksud agar P harus atau meramalkan bahwa dia mungkin melakukan unsur perbuatan pembunuhan tingkat pertama dengan unsur kesalahan yang dipersyaratkan dalam pembunuhan tingkat pertama) atau D terlibat dalam

usaha kriminal bersama dengan P dan menyadari bahwa P mungkin melakukan tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan.

Tujuan bersama yang disepakati oleh D dan P sebelumnya tidak perlu masuk dalam proposal 'usaha kriminal bersama'; cukuplah D yang mendorong atau membantu P melakukan tindak pidana. Dalam hal ini reformulasi perundang-undangan akan sama dengan apa yang ada pada common law saat ini. Komisi berpendapat (pada paragraf 4.11) bahwa 'D mempunyai kesalahan tambahan karena terlibat dalam usaha patungan dengan P untuk melakukan kejahatan. Orang-orang yang melakukan tindak pidana secara berkelompok telah terbukti lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan dibandingkan mereka yang bertindak sendiri, dan hal ini dapat dianggap sebagai pengetahuan umum.' Perlu juga dicatat bahwa D akan bertanggung jawab sebagai kaki tangan untuk pertama-tama pembunuhan tingkat, meskipun dia tidak berniat membunuh atau tidak bermaksud menyebabkan cedera serius karena menyadari bahwa ada risiko kematian yang serius, kondisi mental yang diusulkan untuk pembunuhan tingkat pertama. Dalam hal ini D sekarang dapat bertanggung jawab atas pembunuhan tingkat pertama meskipun dia tidak memiliki mens rea untuk itu sedangkan pelaku (P) tentu saja harus memiliki mens rea yang diperlukan. Komisi Hukum dalam Laporan tahun 2006 menggambarkan Laporannya yang Berpartisipasi dalam Kejahatan tahun 2007 yang merekomendasikan pembelaan atas tindakan untuk mencegah dilakukannya kejahatan dan tindakan untuk mencegah atau membatasi terjadinya kerugian dan pembelaan ini akan berlaku juga terhadap pelanggaran yang fatal. seperti kejahatan lainnya. Dalam hal ini, kerasnya peraturan yang ada saat ini dan yang diusulkan mengenai keterlibatan sebagai pelaku usaha patungan dalam pembunuhan tingkat pertama akan dikurangi. Demikian pula, mungkin terdapat keadaan-keadaan di mana pembunuhan tersebut dilakukan, yang 'terlalu jauh dari apa yang diantisipasi D untuk menjadikan pembunuhan tersebut sebagai bagian dari upaya patungan yang telah diperkirakan sebelumnya. Pertanyaannya tergantung pada fakta dan tingkat yang akan diputuskan oleh juri.' (paragraf 4.30, catatan kaki dihilangkan) Hukuman untuk pembunuhan tingkat pertama, baik yang dilakukan oleh pelaku utama atau pelaku sekunder, adalah hukuman penjara seumur hidup; untuk pembunuhan tingkat dua, hukumannya seumur hidup.

Usulan ini akan memperbaiki anomali dimana jika D dan P terlibat dalam usaha patungan dan P melakukan pembunuhan yang tidak diperkirakan oleh D, maka D akan lepas dari segala tanggung jawab pidana. Menurut Komisi Hukum (paragraf 4.5), 'Hal ini memperlakukan D terlalu murah hati jika D mengetahui bahwa P bermaksud menyakiti V [korban], bahkan jika D tidak menyadari bahwa P mungkin melakukan pembunuhan.'

Sehubungan dengan pembunuhan tidak berencana, yang merupakan pelanggaran tidak fatal tingkat ketiga, Komisi mengusulkan agar D dapat dikenakan hukuman pembunuhan jika: D dan P merupakan pihak dalam usaha patungan, P melakukan tindak pidana pembunuhan tingkat satu atau pembunuhan tingkat dua ketika memenuhi tujuan bersama tersebut, D bermaksud atau meramalkan bahwa kerugian (yang tidak serius) atau ketakutan akan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh P, dan 'orang yang berakal sehat di posisi D, dengan pengetahuan D tentang fakta-fakta yang relevan, akan memperkirakan risiko

kematian atau cedera serius yang jelas yang disebabkan oleh salah satu pihak dalam usaha tersebut.' (paragraf 4.6)

Pelanggaran ini disebut 'pembunuhan tidak disengaja'. Ada beberapa argumen dalam Makalah Konsultasi No. 177 Undang-Undang Pembunuhan Baru untuk Inggris dan Wales? (2005) yang mendahului Laporan ini bahwa kejahatan tersebut seharusnya disebut sebagai 'keterlibatan dalam pembunuhan di luar hukum' namun dalam Laporrannya Komisi menetapkan pembunuhan tidak berencana. Konsep 'orang yang berakal sehat di posisi D' dalam definisi yang diusulkan akan mencakup usia D, namun faktor lain mana yang akan dipertimbangkan oleh juri akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus.

5.5 LAPORAN KOMISI HUKUM NO. 306 IKUT SERTA DALAM KEJAHATAN

Usulan Komisi dalam Laporan No. 306 tidak dimaksudkan untuk menggantikan namun untuk melengkapi usulan Laporan tahun 2006 tentang keterlibatan dalam pembunuhan. Laporan tahun 2007 dapat dilihat sebagai mitra dari Laporan Komisi Hukum No. 300, Kewajiban Kecil untuk Membantu dan Mendorong Kejahatan, 2006. Hubungan antara pelanggaran kecil dan pelanggaran sekunder merupakan inti dari Laporan ini: tanpa rekomendasi mengenai tanggung jawab kecil, maka usulan mengenai pelanggaran sekunder tidak akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kedua Laporan tersebut harus dibaca bersama-sama, dan Komisi Hukum berpandangan bahwa keduanya berdiri bersama. Pemerintah nampaknya mengambil pandangan bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut. Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Kejahatan Berat pada tahun 2007, yang menggantikan pelanggaran penghasutan yang masih bersifat umum. Undang-undang ini didasarkan pada, namun tidak sepenuhnya mengikuti, Laporan No. 300.

Perkenalan

Laporan Komisi Hukum berfokus pada situasi di mana satu pihak membantu atau mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan, pelanggaran pokok, dan pelanggaran tersebut selesai. Apabila pelanggaran pokok tidak diselesaikan, terdapat kemungkinan pertanggungjawaban awal saat ini atas penghasutan untuk melakukan pelanggaran utama, namun bila pelanggaran utama diselesaikan, tanggung jawab sekunder terjadi, dan pelanggar sekunder dapat dituntut seolah-olah dia adalah pelaku utama dan dikenakan potensi hukuman yang sama dengan pelaku utama. Yang juga termasuk, setidaknya bisa dibilang dalam pelanggaran sekunder, adalah doktrin usaha bersama yang terjadi ketika pihak sekunder setuju untuk melakukan pelanggaran dengan pihak utama. Ini adalah bidang-bidang yang dicakup dalam Laporan ini.

Titik awalnya adalah usulan dalam Laporan tahun 2006 untuk memperluas hukum tanggung jawab yang masih kecil. Saat ini terdapat tanggung jawab untuk mendorong pelaku utama melakukan pelanggaran utama ketika pelanggaran tersebut tidak dilakukan, namun tidak ada tanggung jawab untuk membantunya melakukan hal tersebut. Laporan tahun 2006 merekomendasikan agar tanggung jawab yang masih kecil diperluas hingga mencakup bantuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Hukum pada paragraf. 1.3 Laporan tahun 2007.

Rekomendasi ini kini memungkinkan permasalahan mengenai ruang lingkup tanggung jawab sekunder untuk ditangani bersama dengan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan sifat tanggung jawab tersebut, tanpa mengalihkan perhatian pada sifat dan ruang lingkup tanggung jawab yang belum terselesaikan.

Dampak dari diberlakukannya kedua Laporan tersebut, pendapat Komisi pada paragraf. 1.4 akan menghasilkan 'skema dimana tanggung jawab kecil dan tanggung jawab sekunder akan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dengan cara yang rasional dan adil'.

Cacat hukum yang ada saat ini

Laporan ini dimulai dengan kritik terhadap undang-undang yang berlaku, khususnya bagaimana pihak sekunder dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pihak utama meskipun dia tidak secara pribadi melakukan pelanggaran tersebut tetapi hanya membantu, bersekongkol, menasihati atau menyediakannya, namun dia tetap melakukan hal tersebut. bertanggung jawab seolah-olah dia sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut. Misalnya, mens rea pembunuhan pelaku utama adalah niatnya untuk membunuh atau menimbulkan luka fisik yang parah, namun pihak sekunder bertanggung jawab atas pembunuhan dengan mens rea yang lebih kecil, yaitu keyakinan bahwa pelaku dapat melakukan pelanggaran tersebut. Komisi merekomendasikan bahwa agar terdapat 'kesetaraan kesalahan' antara pelaku utama dan pelaku sekunder, pelaku yang terakhir harus dihukum sebagai pelaku sekunder hanya jika ia bermaksud agar pelaku utama melakukan pelanggaran tersebut; jika tidak, orang yang sekarang menjadi pelaku sekunder akan bersalah atas tindak pidana yang direkomendasikan yaitu membantu atau mendorong tindak pidana utama. Akan tetapi, jika terdapat usaha patungan, Komisi berpandangan bahwa pihak sekunder harus bertanggung jawab karena pihak sekunder telah setuju atau memang berniat untuk ikut serta dalam usaha pidana tersebut, dan bahwa perjanjian atau maksud tersebut merupakan 'persamaan kesalahan' dengan prinsipal. pelanggaran: jika, misalnya, pihak kedua dalam suatu perusahaan patungan meramalkan bahwa pelaku utama akan membunuh, maka ia layak diberi label sebagai pembunuh, sama seperti pelaku utama yang memang membunuh dan berniat membunuh. Komisi mengatakan pada paragraf. 1.23 bahwa:

fakta persetujuan saja sudah cukup untuk membuat D [terdakwa] bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah disepakati, tanpa ada persyaratan bahwa D melakukan apa pun lebih lanjut sebagai dorongan atau bantuan. Sebaliknya, jika D dan P [pelaku utama] bukan merupakan pihak dalam suatu usaha kriminal bersama, harus ada tindakan dorongan atau bantuan yang terpisah.

Oleh karena itu, rancangan undang-undang yang dilampirkan pada Laporan ini membahas usaha patungan secara terpisah dari bentuk partisipasi sekunder lainnya.

Kritik kedua yang diajukan Komisi mengenai pertanggungjawaban sekunder adalah definisi mens rea dan pembelaan yang mungkin tersedia bagi terdakwa. Komisi tidak memberikan komentar mendalam mengenai undang-undang tersebut pada bagian utama Laporan, namun memberikan komentar pada Lampiran B ketika membahas undang-undang ini dan komentar mengenai posisi tersebut diambil di bawah ketika rekomendasi dibahas.

Ringkasnya, terdapat perdebatan mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak jika ia meramalkan bahwa pelaku dapat (bukannya akan) melakukan pelanggaran pokok; terdapat pula kontroversi mengenai kapan terdakwa bersalah atau tidak bersalah ketika pelaku melakukan tindak pidana yang berbeda dari yang disepakati, yang disebut dengan pelanggaran 'jaminan': apakah pelanggaran tambahan tersebut 'secara fundamental berbeda' dengan kejahatan yang disepakati?; Yang juga dapat diperdebatkan adalah tanggung jawab pihak sekunder atas serangkaian pelanggaran, misalnya, jika ia meminjamkan senjata kepada kepala sekolah untuk digunakan pada satu kesempatan, apakah ia bertanggung jawab pada setiap kesempatan yang digunakan oleh kepala sekolah untuk membunuh orang lain? Komisi mengacu pada poin-poin kesulitan lainnya: kapan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku sekunder ketika ia hanya berdiam diri dan tidak mengendalikan tindakan pelaku yang melakukan pelanggaran utama? Apakah terdakwa tidak bersalah jika dia melakukan tugas yang diberikan kepadanya oleh undang-undang? Misalnya, dalam *NCB v Gamble*, Devlin J mengatakan bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab secara pidana jika dia mengembalikan jemmy dalam keadaan berikut (Law Commission Report, paragraf 1.19): 'P [pelanggar utama] meminjamkan D [calon pihak sekunder] jemmy. Kemudian P meminta jemmy itu kembali.

D mengetahui bahwa P bermaksud menggunakan jemmy tersebut untuk merampok tempat milik V [korban]. D yang membenci V mengembalikan jemmy tersebut agar P bisa melakukan perampokan. P melakukan perampokan.' Permasalahan lebih lanjut dicatat oleh Komisi. Salah satunya adalah ruang lingkup doktrin keagenan yang tidak bersalah ketika keanehan bahasa Inggris dapat menimbulkan kesulitan. Masalah ini dikemukakan dengan baik oleh Komisi pada paragraf. 1.29: Permasalahannya, baik aktual maupun persepsian, muncul ketika pelanggaran pokok hanya dapat dilakukan oleh orang yang memenuhi deskripsi tertentu dan D [orang yang biasanya menjadi pelaku sekunder] tidak memenuhi deskripsi tersebut. Misalnya D yang belum menikah menyebabkan X [pihak yang biasanya menjadi pihak utama] yang sudah menikah 'menikahi' V [korban] dengan berbohong kepada X bahwa istrinya telah meninggal. Di satu sisi, menghukum D sebagai pelaku [sebagaimana doktrin keagenan yang tidak bersalah] adalah tidak logis karena definisi bigami menetapkan bahwa pelaku utama dapat melakukan pelanggaran hanya jika dia sudah menikah.

Terakhir, dan sekali lagi mengutip Komisi Hukum (paragraf 1.30): jika D 'mendapatkan' dilakukannya suatu pelanggaran yang tidak ada kesalahannya (pertanggungjawaban ketat) oleh P, P bersalah atas pelanggaran tersebut sebagai pihak utama dan D bersalah sebagai pihak sekunder. Namun, menurut pandangan kami, meminta pertanggungjawaban D atas pelanggaran tersebut sebagai pihak sekunder tidak secara akurat mencerminkan sifat kesalahan yang dilakukan D. Hal ini karena pada kenyataannya D melakukan pelanggaran melalui P. Komisi Hukum mengusulkan pelanggaran baru untuk menghadapi situasi ini.

Proposal

Pertanyaannya kemudian menjadi salah satu cara untuk menangani masalah ini. Makalah Konsultasi Komisi Hukum tahun 1993 merekomendasikan penghapusan pelanggaran sekunder. Namun, Komisi kini mengusulkan untuk mempertahankan bidang hukum tersebut

tetapi dalam bentuk yang dimodifikasi, seperti yang telah dinyatakan dalam Lapornya pada tahun 2006. Ada (paragraf 1.38):

kasus-kasus di mana kesalahan D sedemikian rupa sehingga D tidak cukup dihukum dan diberi label jika dia dihukum hanya karena membantu atau mendorong dilakukannya pelanggaran utama dan bukan dihukum karena pelanggaran itu sendiri. Kasus yang nyata, khususnya D yang menjadi penghasut, adalah ketika D membantu atau mendorong P dengan maksud agar P melakukan pelanggaran pokok.

Keuntungan lain dari mempertahankan tanggung jawab sekunder terjadi ketika tidak mungkin untuk membuktikan pihak mana yang merupakan pelaku utama dan pihak mana yang merupakan pelaku sekunder: saat ini tidak relevan lagi apakah terdakwa merupakan pelaku utama atau pelaku sekunder asalkan ia harus menjadi salah satu pihak. Menghapuskan tanggung jawab sekunder demi (hanya) membantu atau mendorong akan menghilangkan keuntungan forensik ini.

Solusi Komisi terhadap permasalahan seputar tanggung jawab sekunder dapat ditemukan dalam salah satu rancangan undang-undang yang dilampirkan pada Laporan. Usulannya adalah:

- kejahatan membantu atau mendorong pihak utama: mens rea terdakwa adalah bahwa ia bermaksud (sebagaimana didefinisikan dalam Bab 3: lihat Woollin [1999] 1 AC 82 (HL)) pelanggaran utama yang akan dilakukan (klausul 1);
- suatu kejahatan yang membuat terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan apa pun, baik yang disepakati atau yang dijamin, yang dilakukan selama suatu tindakan kriminal: mens rea adalah bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa pelanggaran tersebut mungkin dilakukan (klausul 2).

Juga akan ada klausul yang berhubungan dengan lembaga yang tidak bersalah dan doktrin yang ada saat ini akan dihapuskan. Komisi menyatakan (paragraf 1.52):

D akan bertanggung jawab atas suatu pelanggaran sebagai pelaku utama jika dia dengan sengaja menyebabkan P, agen yang tidak bersalah, melakukan unsur perilaku [yaitu. the actus reus] melakukan pelanggaran tetapi P tidak melakukan pelanggaran karena P:

1. berusia di bawah 10 tahun;
2. memiliki pembelaan terhadap kegilaan; atau
3. perbuatan tanpa kesalahan yang diperlukan untuk dihukum karena pelanggaran tersebut.

Komisi menambahkan pada paragraf berikutnya bahwa rekomendasi tersebut 'akan memastikan bahwa D dapat dihukum karena pelanggaran pokok sebagai pelaku utama meskipun pelanggaran tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang memenuhi kriteria tertentu dan D tidak sesuai dengan kriteria tersebut'. . Dengan cara ini Komisi menangani ilustrasi anak bujangan dan bigami yang disebutkan di atas. Komisi juga mengusulkan untuk mengatasi permasalahan yang juga disebutkan di atas mengenai terdakwa yang saat ini bersalah sebagai pihak sekunder dalam tindak pidana berat yang dilakukan oleh pelaku. Sebaliknya terdakwa akan bersalah sebagai pelaku utama. Salah satu dampak dari skema ini adalah pengadaan dalam arti sengaja menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tidak lagi

menjadi bagian dari tanggung jawab sekunder. Sebaliknya, terdakwa akan bersalah sebagai prinsipal.

Komisi selanjutnya mengusulkan untuk menyempurnakan pembelaan terhadap pelanggaran baru. Pertama, pengecualian Tyrrell dipertahankan. Pasal 6 RUU ini akan membebaskan terdakwa (baik sebagai pihak sekunder maupun sebagai pelaku utama melalui doktrin innocent agency) jika tindak pidana pokok ditujukan untuk melindungi suatu kelompok orang dan dia termasuk dalam kelompok tersebut dan dia adalah pihak yang dirugikan. korban pelanggaran tersebut. Kedua, Komisi mengusulkan pembelaan ketika terdakwa bertindak untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran atau untuk mencegah atau membatasi kerugian. Beban pembuktian sehubungan dengan pembelaan ini terletak pada terdakwa, dan juri akan mempertanyakan apakah terdakwa melakukan tindakan yang wajar. Komisi memberikan contoh penerapan pembelaan ini di paragraf. 1.59:

D dan P berada di sebuah pub setelah pertandingan sepak bola dan bertemu dengan sekelompok pendukung saingan. P, bersama beberapa orang lainnya, berencana menyerang geng saingannya dan menusuk anggota mereka yang paling vokal (V). D yang tidak ingin V disakiti berhasil membujuk P dan yang lainnya untuk merusak salah satu barang milik V. D didakwa mendorong P melakukan tindak pidana pengrusakan.

Juri harus mempertimbangkan semua fakta, misalnya. seberapa seriuskah bahaya yang bisa dicegah? Haruskah terdakwa memanggil polisi?

Membaca Laporan No. 300 dan 306 bersama-sama akan menghasilkan usulan keadaan hukum sebagai berikut:

- (a) Apabila pelaku utama tidak melakukan tindak pidana dengan dibantu atau didorong, maka terdakwa yang membantu atau mendorong pelaku akan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang masih dalam tahap awal. Dia akan bersalah jika dia melakukan tindakan yang mampu mendorong atau membantu orang yang akan menjadi pelaku utama ('P') jika pelanggaran utama telah dilakukan, dan bermaksud untuk membantu atau mendorong P untuk melakukan *actus reus* dari pelaku utama. melakukan pelanggaran ATAU yakin bahwa perbuatannya akan mendorong atau membantu P melakukan tindakan *actus reus*; dan apabila dalam semua kasus kejahatan pokoknya bukanlah suatu pelanggaran berat, maka terdakwa juga harus yakin bahwa P akan melakukan *actus reus* dengan *mens rea* yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran tersebut dan keadaan pikiran terdakwa sendiri sedemikian rupa sehingga ia dapat melakukan tindakan tersebut. untuk melakukan unsur perilaku, [s]dia akan melakukannya dengan [*mens rea*] yang diperlukan' (paragraf 1.61]
- (b) Apabila pelaku utama [P] melakukan pelanggaran pokok, terdakwa ['D']: akan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan P sebagai pihak sekunder dengan syarat D bermaksud agar P terlibat dalam [*actus reus*] pelanggaran tersebut dan:
 - (1) D berkeyakinan bahwa P akan melakukan [*actus reus*] dengan kesalahan yang harus dipidana; atau

- (2) Keadaan pikiran D sedemikian rupa, sehingga seandainya dia melakukan [actus reus], maka hal itu sudah memenuhi [mens rea] yang diperlukan untuk dapat dihukum atas pelanggaran tersebut. (paragraf 1.63)

Salah satu akibat dari pemberlakuan delik-delik baru ini adalah bahwa terdakwa tidak lagi bersalah sebagai pihak sekunder jika ia membantu atau mendorong tetapi tidak peduli apakah delik pokok itu terjadi; namun jika terdakwa yakin bahwa pelaku utama akan melakukan tindak pidana pokok, maka ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut di atas membantu atau mendorong dengan keyakinan bahwa pelaku utama akan dibantu atau didorong untuk melakukan actus reus. Dengan kata lain, terdakwa bisa saja bersalah melakukan pelanggaran ringan, meskipun pelakunya telah melakukan pelanggaran pokok!

Sehubungan dengan perusahaan patungan, terdakwa akan bersalah atas pelanggaran apa pun dalam lingkup usaha tersebut. Juri akan menentukan apakah pelanggaran utama termasuk dalam lingkup usaha tersebut. Sekalipun terdakwa menentang pelanggaran tambahan tersebut, tetap ada tanggung jawab.

Sehubungan dengan bentuk tanggung jawab baru yang masih baru dan tanggung jawab sekunder, menurut Laporan ini, terdapat dua pembelaan yang diuraikan di atas. UU Kejahatan Berat tahun 2007 menyatukan kedua pembelaan ini dan Komisi kini mengusulkan untuk melakukan hal yang sama sehubungan dengan partisipasi sekunder untuk menjaga konsistensi kedua bidang hukum ini: Makalah Konsultasi No. 183, Konspirasi dan Percobaan, 2007.

Membantu pelanggar dan memperparah pelanggaran yang dapat ditangkap. Berdasarkan pasal 4(1) Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1967: [w]di sini seseorang telah melakukan pelanggaran yang dapat ditahan, orang lain yang, mengetahui atau meyakini dia bersalah atas pelanggaran tersebut atau pelanggaran lain yang dapat ditahan, melakukan tanpa wewenang yang sah atau alasan yang masuk akal untuk melakukan tindakan apa pun dengan maksud untuk menghalangi penangkapannya atau penuntut harus bersalah atas suatu pelanggaran.

Tidak menjadi soal bahwa tersangka pelaku utama telah dibebaskan (Donald (1986) 83 Cr App R 49 (DC)), asalkan dalam persidangan terdakwa dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersalah. Tidak dapat dipastikan apakah kata pembuka hanya mengacu pada pelaku pelanggaran ataukah frasa tersebut mencakup aksesori.

Actus reus mencakup 'tindakan apa pun'. Contoh yang jelas termasuk melindungi kepala sekolah, menghancurkan barang bukti, berbohong kepada polisi tentang keberadaan kepala sekolah dan menyediakan mobil untuk melarikan diri atau paspor. Terdakwa sebenarnya tidak perlu melakukan sesuatu yang membantu pelaku. Cukupilah perbuatan itu dilakukan dengan niat yang diperlukan. Karena suatu tindakan diperlukan, kelalaian untuk memberi tahu polisi tentang keberadaan pelaku utama tidak menimbulkan tanggung jawab. Mens rea terdiri dari niat menghalangi dan pengetahuan atau keyakinan. Ungkapan 'dengan niat untuk' dapat berarti bahwa hanya niat langsung yang dimasukkan (lihat Bab 2) dan bahkan pandangan ke depan bahwa tindakan tersebut (hampir) mempunyai konsekuensi tertentu sudah cukup. 'Mengetahui atau memercayai' mungkin mencakup kebutaan yang

disengaja, namun tidak dianggap sebagai kecerobohan (lihat Bab 3 lebih lanjut untuk mengetahui pengetahuan dan kebutaan yang disengaja). Frasa yang sama muncul dalam penanganan tindak pidana dan preseden dari tindak pidana tersebut mungkin relevan dengan penafsiran pasal 4(1). Terdakwa tidak perlu mengetahui identitas kepala sekolah: Brindley [1971] 2 QB 300 (CA). Pembelaan terhadap otoritas yang sah akan mencakup keputusan Kejaksaan Agung untuk membatalkan penuntutan. Ada pendapat bahwa 'alasan yang masuk akal' mungkin mencakup seorang istri yang membantu suaminya: lihat D. Ormerod (ed.), Smith dan Hogan, *Criminal Law*, edisi ke-12 (OUP, 2008) 240, n. 29. Tidak ada tanggung jawab untuk melakukan percobaan pelanggaran ini: Undang-undang Percobaan Kriminal tahun 1981, pasal 1(4)(c).

Berdasarkan pasal 5(1) dari Undang-undang yang sama: [w]di sini seseorang telah melakukan suatu pelanggaran yang dapat ditahan, setiap orang lain yang, mengetahui atau meyakini bahwa pelanggaran tersebut atau suatu pelanggaran lain yang dapat ditahan telah dilakukan, dan bahwa ia mempunyai informasi yang mungkin dapat membantu dalam menjamin penuntutan atau penuntutan. menerima atau menyetujui untuk menerima karena tidak mengungkapkan informasi tersebut, pertimbangan apa pun selain perbaikan kerugian atau cedera yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, atau pemberian kompensasi yang wajar atas kerugian atau cedera tersebut akan bertanggung jawab. . .

Kata 'pertimbangan' terkenal dalam hukum kontrak. Ini tentu saja akan mencakup uang dan manfaat dalam bentuk barang. 'Mengetahui atau percaya' memiliki arti yang sama seperti pada pasal 4 (1). Tidak ada persyaratan 'dengan niat untuk' dalam pasal 5(1). Seperti pasal 4(1) pelanggaran ini tidak dapat dilakukan: Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, pasal 1(4)(c). Seseorang tidak bersalah atas pelanggaran pasal 5(1) hanya dengan tidak melaporkan pelanggaran yang dapat ditangkap tetapi ada pelanggaran hukum umum, kesalahan makar, karena tidak melaporkan makar. Tidak ada penuntutan yang dapat diajukan atas pelanggaran ini tanpa persetujuan DPP.

Ringkasan

Bukan hanya pelaku yang bersalah atas suatu pelanggaran tetapi orang-orang yang membantu mungkin juga bersalah. Pelaku adalah pelaku (pelanggar); pembantu adalah pelaku atau kaki tangan sekunder. Misalnya, jika saya membantu Anda membunuh musuh Anda dengan menyerahkan senjata, Anda, si pembunuh, adalah pelaku utama. Dalam hukum, mereka yang membantu disebut *aiders*, *abettors*, *counselor*, dan *procurers*. Undang-undang tersebut rumit dan dipecah menjadi beberapa bidang masalah seperti unsur mental pihak sekunder, apakah terdakwa dapat membantu tanpa melakukan apa pun, dan apa yang terjadi jika orang yang seharusnya menjadi pihak utama dibebaskan dari tanggung jawab, apakah a korban pelanggaran juga bisa menjadi kaki tangan. Doktrin hak pilihan yang tidak bersalah dipertimbangkan. Ada penjelasan mengenai rencana reformasi Komisi Hukum. Bab ini diakhiri dengan pelanggaran membantu pelanggar dan menambah pelanggaran yang dapat ditahan.

- Definisi: Pelaku utama adalah orang yang melakukan pelanggaran utama: ia menikam korban, membakar rumah, memperkosa pelapor. Orang lain, aksesori, kaki tangan, atau pihak sekunder, dengan berbagai cara dapat mendorong atau membantu kepala

sekolah. Misalnya, mereka mungkin menyerahkan pisau, meneriakkan kata-kata penyemangat kepada pelaku pembakaran rumah, atau menahan korban dalam tindak pidana pemerkosaan. Kaki tangan dapat dikenakan hukuman maksimum yang sama dengan kepala sekolah, namun kesalahannya akan mempengaruhi hukuman; dan kaki tangannya mungkin bertanggung jawab karena menjadi pihak sekunder dalam pelanggaran yang lebih serius daripada yang dilakukan oleh pelaku. Teori di balik pelanggaran sekunder adalah bahwa pelanggaran utama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadinya pelanggaran sekunder: ini adalah doktrin 'tanggung jawab derivatif'. Misalnya, seseorang tidak boleh ikut serta dalam pembunuhan sebelum pembunuhan itu terjadi. (Seseorang mungkin bersalah karena bersekongkol untuk melakukan pembunuhan, menghasut untuk melakukan pembunuhan, atau percobaan pembunuhan jika pembunuhan tersebut belum terjadi.) Namun, teori tanggung jawab derivatif terkadang tidak diikuti.

Undang-undang menyatakan bahwa pembantu, pelaku, konselor, dan penyedia adalah cara-cara di mana kaki tangan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Aider adalah orang yang membantu, membantu atau mendukung pihak utama, seperti ketika dia memasok senjata. Seorang penghasut tampaknya sama, tetapi mungkin istilah ini lebih tepat untuk mencakup mereka yang mendorong, menghasut, atau menghasut dilakukannya pelanggaran utama.

Konselor adalah orang yang memberikan nasehat atau bantuan. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara bentuk tanggung jawab sekunder ini sulit ditemukan atau tidak ada. Namun, ada satu bentuk tanggung jawab sekunder yang definisinya lebih pasti dibandingkan tiga bentuk tanggung jawab lainnya, yaitu 'pengadaan'. Pengadaan adalah orang yang menghasilkan suatu hasil melalui 'usaha', seperti yang dinyatakan dalam kasus-kasus tersebut.

Apa pun bentuk partisipasi sekundernya, harus ada 'hubungan sebab akibat' antara bantuan atau dorongan dan pelanggaran utama, namun hubungan tersebut mungkin bersifat lemah, misalnya. seseorang bisa saja bersalah karena menjadi pendukung meskipun terdakwa utama tetap melakukan kejahatan tersebut. Pengadaan barangkali merupakan pengecualian karena harus ada hubungan sebab akibat yang kuat antara pengadaan dan tindakan yang dilakukan.

- Kegagalan untuk bertindak: Biasanya, seperti yang kita lihat di Bab 2, tidak ada tanggung jawab pidana atas kelalaian, tergantung pada pembebanan tugas untuk bertindak. Satu pengecualian adalah ketika terdakwa, pelaku sekunder, memiliki kendali atas pelaku, seperti yang terjadi ketika instruktur mengemudi gagal mengendalikan pelajarnya.
- Mens rea: Unsur mental untuk aksesori bersifat kompleks namun dapat dinyatakan sebagai: (i) maksud untuk menasihati, membantu atau mendorong; dan (ii) pengetahuan tentang 'hal-hal penting' dari pelanggaran utama (meskipun kecerobohan juga tampaknya sudah cukup); dan (iii) dalam kasus di mana terdapat lebih dari satu pelanggaran yang sedang dipikirkan oleh terdakwa, mengetahui bahwa pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

- Tanggung jawab perusahaan bersama: Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa hakim berpandangan bahwa ketika dua orang atau lebih berencana melakukan kejahatan (misalnya perampokan) dan salah satu dari mereka melakukan tindakan lebih jauh (dan, misalnya, membunuh), terdapat doktrin tanggung jawab bersama. perusahaan yang terpisah dari pertanggungjawaban asesoris yang mengatur pertanggungjawaban pihak yang tidak melakukan tindak pidana pokok (di sini pembunuhan). Pendirian yang diambil dalam buku ini adalah bahwa tidak ada dua doktrin yang terpisah namun perusahaan patungan merupakan bagian dari tanggung jawab sekunder, namun perbedaannya terletak, bukan pada hukum substantifnya, namun pada kemudahan pembuktiannya.
- Non-konviksi dari prinsipal: Karena tanggung jawab sekunder didasarkan pada teori tanggung jawab derivatif, kesulitan akan dihadapi ketika orang yang seharusnya menjadi prinsipal dibebaskan, dibebaskan dari tanggung jawab atau tidak melakukan *actus reus*. Jika tidak ada *actus reus*, tidak ada tanggung jawab tambahan; Namun jika orang yang seharusnya menjadi pihak utama dikecualikan, maka terdapat *actus reus* hanya saja terdakwa tidak dapat dihukum – dan oleh karena itu pihak tambahan dapat dipidana.
- Bolehkah korban menjadi aksesori? Secara umum tidak ada masalah. Misalnya, jika seorang masokis menghasut seorang sadis untuk melakukan tindakan sadis terhadap dirinya, maka masokis tersebut dapat dianggap bersalah karena menjadi kaki tangan kejahatan pelaku. Namun, kejahatan hukum dapat diartikan sebagai melindungi anggota golongan tertentu. Dalam hal ini orang yang seharusnya menjadi pelaku sekunder tidak bertanggung jawab karena dia dilindungi. Ilustrasi yang umum adalah anak perempuan di bawah 16 tahun yang mendorong anak laki-laki berusia di atas 16 tahun untuk melakukan hubungan seksual dengan mereka; anak perempuan merupakan kelas yang dilindungi secara khusus dan tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan anak laki-laki.
- Agensi yang tidak bersalah: Jika orang yang seharusnya menjadi kepala sekolah adalah anak di bawah 10 tahun atau tidak waras, pihak yang ikut dianggap sebagai kepala sekolah. Misalnya, jika Peter membantu Queenie melakukan perampokan, biasanya Peter adalah pelengkap kepala sekolah Queenie; Namun, jika dia gila, Peter seolah-olah akan menggantikannya dan dia menjadi kepala sekolah. Mertua Queenie dikatakan sebagai agen yang tidak bersalah.
- Penarikan diri: Terdapat pembelaan jika terdakwa menarik diri sebelum melakukan pelanggaran pokok. Batasan pembelaan tampaknya berbeda-beda sesuai fakta. Hal ini dapat berupa sekadar mengkomunikasikan fakta penarikan diri, menghentikan pelanggaran, atau memberi tahu polisi.
- Reformasi hukum: Komisi Hukum telah membahas hal ini dalam makalah konsultasi baru-baru ini. Ini diuraikan.
- Membantu pelanggar dan memperparah pelanggaran yang dapat ditahan: Kejahatan yang bersifat tambahan setelah faktanya dihapuskan pada tahun 1967 dan sebagian

digantikan dengan membantu pelaku (untuk menghindari penangkapan atau penuntutan atas pelanggaran yang dapat ditahan) dan dengan tidak mengungkapkan informasi 'yang mungkin bantuan material dalam menjamin penuntutan atau penghukuman pelaku atas pelanggaran yang dapat ditahan dengan imbalan imbalan seperti uang. Kejahatan yang terakhir ini dikenal sebagai 'penggabungan' atau 'penggabungan pelanggaran yang dapat ditahan'.

BAB 6

TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DAN PERUSAHAAN

6.1 PENGANTAR TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN

Dalam hukum pidana, seseorang pada umumnya tidak bertanggung jawab atas kejahatan orang lain. Hal ini sesuai dengan moralitas Yahudi-Kristen: mengapa seseorang harus bersalah atas kejahatan orang lain? Biasanya hanya satu orang yang bertanggung jawab secara pidana atas tindakan atau kelalaiannya. Contoh terbaru adalah keputusan House of Lords di *Seaboard Offshore Ltd v Menteri Transportasi Negara* [1994] 2 Semua ER 99. Setelah bencana kapal feri *Zeebrugge*, yang menyebabkan hampir 200 orang tewas ketika kapal feri roll-on roll-off tenggelam di lepas pantai Belgia, kejahatan baru terjadi, kegagalan pemilik atau penyewa kapal untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa kapal dioperasikan dengan cara yang aman. 'Masuk akal' didefinisikan sebagai 'masuk akal baginya untuk mempertimbangkan keadaan kasus tersebut'. House of Lords berpendapat bahwa kejahatan tersebut tidak mengizinkan pertanggungjawaban perwakilan, dan penekanannya diberikan pada frasa 'untuk dia'. Oleh karena itu, pemilik kapal atau penyewa tidak bersalah apabila awak kapal atau petugas perusahaan mengoperasikan kapalnya dengan cara yang tidak aman. Kewajiban itu bersifat pribadi bagi pemilik atau penyewa. Lord Keith mencatat bahwa akan menjadi aneh jika Parlemen membebaskan tanggung jawab pada pemilik dan penyewa atas semua tindakan bawahan mereka termasuk kegagalan pramugari kabin dalam menutup jendela kapal. Ada pengecualian, dan pengecualian tersebut membentuk topik tanggung jawab perwakilan.

Dalam hukum tort terdapat doktrin yang bernama sama, namun luas kedua perangkat hukum tersebut berbeda. Dalam perbuatan melawan hukum, pemberi kerja biasanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya selama masa kerja mereka. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban merupakan pengecualian karena sebagai aturan umum pertanggungjawaban dan oleh karena itu stigma dihukum karena suatu pelanggaran bersifat pribadi bagi terdakwa. Kasus lama *Huggins* (1730) 92 ER 518, dimana terdakwa, sipir penjara Fleet, London, dibebaskan dari pembunuhan ketika kematian korban disebabkan oleh penahanannya di sel yang tidak sehat oleh seorang sipir penjara, memberikan contoh pembedaan tersebut. Kepala penjara tidak mengetahui fakta sebenarnya. Dalam perbuatan melawan hukum dia akan bertanggung jawab; dalam hukum pidana dia tidak bersalah. Kepala penjara dan sipir penjara, dalam kata-kata pengadilan, 'masing-masing harus bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing dan bertahan atau gugur karena perilakunya sendiri'. Bagian selanjutnya membahas pengecualian di mana seseorang bertanggung jawab secara perwakilan.

Pengecualian ini bertujuan untuk mewajibkan terdakwa untuk melakukan kontrol atas orang lain, namun mungkin tidak adil untuk menghukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain dan terdakwa mungkin tidak dapat digoyahkan di masa depan. Pelaku

juga akan bersalah atas pelanggaran tersebut baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung.

Pengecualian

- (a) Menurut hukum adat, dua pelanggaran menimbulkan tanggung jawab perwakilan. Pengecualian terhadap gangguan umum ditetapkan dalam Stephens (1866) LR 1 QB 702. Karena tujuan penuntutan bukan untuk menghukum terdakwa tetapi untuk mencegah berlanjutnya gangguan tersebut, maka terdakwa bersalah jika para pelayannya membuang sampah ke dalam a sungai dan dengan demikian menghambat navigasi. Pengadilan berargumen bahwa persidangan pada hakekatnya bersifat perdata: seolah-olah doktrin hukum perdata tentang tanggung jawab perwakilan (vicarious liability) diterapkan. Diasumsikan bahwa jika persidangannya benar-benar bersifat pidana, doktrin tersebut mungkin tidak berlaku. Sulit membedakan tujuan pidana dan perdata. Tentu saja Stephens tidak dapat diterapkan pada gangguan undang-undang, di mana terdakwa bersalah hanya jika kata-kata undang-undang menuntut hal tersebut. Kejahatan hukum umum lainnya yang mengimpor tanggung jawab perwakilan adalah pencemaran nama baik pidana: lihat Holbrook (1878) 4 QBD 42. Terdakwa bertanggung jawab atas tindakan karyawannya dalam menerbitkan pencemaran nama baik pidana hanya jika dia bertindak lalai: Libel Act 1843, s 7.
- (b) Beberapa undang-undang secara tegas menetapkan satu pihak bertanggung jawab atas tindakan pihak lain. Misalnya, Undang-Undang Transportasi tahun 1982, pasal 31, secara meyakinkan berasumsi bahwa pemilik kendaraan adalah pengemudinya pada saat melakukan pelanggaran tertentu, namun pemilik dapat menghindari tanggung jawab dengan membuktikan bahwa orang lain sedang mengemudi tanpa persetujuannya. Seorang tertuduh, pemegang izin tempat, dianggap bersalah melakukan tindak pidana jika dia atau pelayannya menjual minuman keras yang memabukkan kepada seseorang di luar jam yang diperbolehkan.
- (c) Kadang-kadang Undang-undang Parlemen ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membuat seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Oleh karena itu prinsip ini kadang-kadang dikenal sebagai 'konstruksi ekstensif'. Komisi Hukum dalam Makalah Konsultasinya No. 135, Pembunuhan Tidak Disengaja, 1994, menyebutnya sebagai 'konstruksi yang diperluas'. Hubungan yang ada tidak perlu seperti hubungan antara pemberi kerja dan pekerja (lihat di bawah). Tanggung jawab jenis ini timbul apabila kewajiban tersebut dikatakan bersifat mutlak, yaitu bersifat pribadi terhadap terdakwa. Ia tidak bisa lepas dari tanggung jawab untuk mendelegasikan kewajiban tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini tanggung jawab terdakwa bersifat pribadi, bukan perwakilan. Jenis pertanggungjawaban perwakilan ini hanya berlaku jika undang-undang menimbulkan pelanggaran berat. (Jika pelanggarannya tidak berat, pengecualian keempat di bawah ini mungkin berlaku.) Prinsipal bertanggung jawab atas tindakan fisik agennya, namun tidak bertanggung jawab atas unsur mentalnya. Untuk melihat apakah prinsip ini berlaku, pengadilan dalam *Moussell Bros v LNWR* [1917] 2 KB 836 menyatakan bahwa tujuan Undang-undang, kata-katanya, dan sifat

tugas harus diselidiki serta 'orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. kepada siapa hukuman itu dijatuhkan, kepada siapa hukuman itu biasa dilakukan, dan kepada siapa hukuman itu dijatuhkan. Ini adalah sebuah contoh.

Adipati Leinster [1924] 1 KB 311

Seorang bangkrut yang dirahasiakan dihukum berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Kebangkrutan tahun 1914 karena memperoleh kredit lebih dari £10 tanpa mengungkapkan situasi keuangannya. Dia bersalah, meskipun dia telah mengatakan kepada agennya untuk tidak mendapatkan pujian tersebut.

Di antara kata-kata yang menimbulkan bentuk tanggung jawab perwakilan ini adalah 'penggunaan'. Pengusaha 'menggunakan' kendaraan ketika karyawan atau kontraktor independen mengendarainya: *Green v Burnett* [1955] 1 QB 78 dan *Hallett Silberman Ltd v Cheshire CC* [1993] RTR 32 (DC). Baik majikan maupun pengemudi 'menggunakan' kendaraan tersebut. Kata lain yang diartikan adalah 'jual'. Majikan bersalah karena menjual sesuatu yang dilarang untuk dijual (seperti rokok kepada seseorang yang berusia di bawah 16 tahun) ketika penjualan sebenarnya dilakukan oleh seorang karyawan: *Coppen v Moore (No. 2)* [1898] 2 QB 306. Tidak Hal ini dikarenakan pemberi kerja tidak mengetahui adanya penjualan (atau penggunaan) tersebut dan bahkan tidak berada di negara tersebut pada saat itu. Pendekatan alternatif terhadap kasus-kasus seperti ini adalah dengan mengatakan bahwa pemberi kerja adalah pemilik sah atas barang-barang yang dijual; hanya mereka yang bisa menjualnya; mereka menjual melalui perantara asisten penjualan; oleh karena itu, mereka bertanggung jawab secara langsung, bukan secara perwakilan. Pengusaha juga memiliki suatu barang meskipun sebenarnya karyawannya yang mengendalikannya. Mereka menyediakan video kepada orang di bawah umur dan memiliki barang melalui karyawannya. Terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum tersebut meskipun secara fisik bukan pelakunya. Misalnya, seseorang, termasuk perusahaan, bisa menyebabkan pencemaran masuk ke sungai, padahal yang sebenarnya mencemari sungai itu adalah pegawai. Namun, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat ditafsirkan sebagai menjadikan pemberi kerja atau prinsipal bertanggung jawab. Diperkirakan bahwa orang-orang tersebut tidak 'mengemudi' ketika tangan karyawan atau agen merekalah yang memegang kemudi. (Bandingkan *Thornton v Mitchell* [1940] 1 Semua ER 339.) Hanya ada sedikit diskusi di pengadilan mengenai mengapa beberapa kata ditafsirkan untuk memaksakan tanggung jawab dan beberapa lainnya tidak.

Selain pembatasan bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris harus mengacu pada terdakwa, tindakan tersebut harus dilakukan dalam rangka pekerjaan atau agensi. Misalnya, jika pegawai suatu agen perumahan mengambil premi yang tidak sah untuk sebuah sewa, pemberi kerja tidak bertanggung jawab karena pekerja tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengambil premi: *Barker v Levinson* [1951] 1 KB 342. Bdk. kasus seperti *Coppen v Moore (No. 2)*, di atas, yang melibatkan tindakan yang sah, menjual, dengan cara yang tidak sah. Mengambil premi bukanlah cara untuk melakukan pekerjaan, sedangkan menggunakan mobil adalah cara untuk melakukannya. Seperti dalam hukum tort, terdakwa bertanggung jawab meskipun delegasinya bertindak bertentangan dengan instruksi, seperti yang diilustrasikan oleh *Coppen v Moore (No. 2)*. Majikan tidak akan menggunakan kendaraan

ketika terdakwa sedang bersenang-senang seperti ketika ia sedang mengantar keluarganya ke pantai pada hari Minggu musim panas. Perlu dicatat bahwa prinsip konstruksi ekstensif ini dikatakan tidak berlaku pada pelanggaran perizinan: *McKenna v Harding* (1905) 69 JP 354. Juga berdasarkan prinsip ini, kata kerja atau kata keterangan tidak boleh mengimpor *mens rea*, misalnya, 'mengizinkan' (lihat *DPP v Kellest* [1994] Crim LR 916 (DC) tetapi lihat *Greener* (1996) 160 JP 265 (DC) yang kontra) dan 'sengaja' biasanya dilakukan. Seperti yang ditunjukkan oleh *Coppen v Moore* (No. 2), terdakwa tetap bertanggung jawab meskipun ia telah melarang karyawannya melakukan tindakan terlarang, dalam hal ini menjual ham Amerika dengan nama 'Scotch ham'. House of Lords menyetujui prinsip ini dalam *Director General of Fair Trading v Pioneer Concrete (UK) Ltd* [1995] 1 AC 456, sebuah kasus penghinaan terhadap pengadilan.

Kemampuan untuk menghubungi pemiliknya sangat berguna jika terdapat beberapa cabang. Karena terdakwa tidak mempunyai kendali langsung atas masing-masing cabang, ia tidak akan bertanggung jawab jika penuntut harus membuktikan bahwa ia mengetahui kesalahannya. Namun, pandangan Card, Cross dan Jones, *Criminal Law*, 17th edn (OUP, 2006), 854, harus disebutkan.

Nampaknya di bawah prinsip konstruksi ekstensif, hanya tindakan pekerja, dll., dan bukan *mens rea*, yang dapat diperhitungkan kepada pemberi kerja, dll. Akibatnya, prinsip ini hanya terbatas pada pelanggaran tanggung jawab ketat. Di mana pelanggaran pertanggungjawaban yang ketat memerlukan *mens rea* mengenai [beberapa] elemen, pemberi kerja harus mempunyai *mens rea* mengenai unsur-unsur tersebut sebelum [dia] dapat bertanggung jawab secara perwakilan.

Perlu dicatat bahwa pengecualian ini tidak terbatas pada hubungan pemberi kerja/karyawan namun mencakup, misalnya, pemegang lisensi bersama dari rumah minuman: *Linnett v MPC* [1946] KB 290. Contoh lainnya termasuk anggota komite klub untuk staf bar, pemberi kerja untuk sub-kontraktor, mitra untuk mitra, dan prinsipal untuk agen. Masalahnya adalah apakah seseorang mempunyai kendali atas orang lain. Perlu juga dicatat bahwa konstruksi ekstensif sebenarnya bukan merupakan contoh pertanggungjawaban perwakilan, melainkan pertanggungjawaban pribadi. Perbuatan satu orang diperlakukan seolah-olah itu adalah perbuatan terdakwa.

Pengecualian keempat adalah prinsip delegasi, yang dapat membuat terdakwa bertanggung jawab secara perwakilan jika pelanggarannya merupakan *mens rea* *one*. Berbeda dengan pengecualian ketiga, *mens rea* diberikan kepada pemberi kerja, atau prinsipal, atau delegasi lainnya. Majikan bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Tanpa doktrin ini, terdakwa dapat lolos dari tanggung jawab pidana dengan mendelegasikan tugasnya dan hukum pidana akan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Kegunaan utama dari doktrin ini adalah dalam kaitannya dengan pemegang lisensi dan prinsip ini tampaknya terbatas pada mereka yang memiliki status tertentu. Otoritasnya adalah *Allen v Whitehead*.

Allen v Whitehead [1930] 1 KB 211

Terdakwa mempekerjakan seorang manajer untuk menjalankan sebuah kafe di London. Dia menginstruksikannya untuk tidak mengizinkan pelacur berkumpul di lokasi

tersebut, dan mengunjungi kafe satu atau dua kali sehari. Selama delapan hari berturut-turut, para pelacur tinggal di sana mulai jam 8 malam. sampai jam 4 pagi. Dia dinyatakan bersalah karena dengan sengaja mengizinkan pelacur untuk tetap berada di tempat penyegaran, bertentangan dengan pasal 44 Undang-Undang Polisi Metropolitan tahun 1839. Dia bersalah meskipun manajernya telah melanggar instruksinya, meskipun dia telah melakukan kesalahan. pemberitahuan memberitahu pelacur untuk tidak duduk di kafe, dan meskipun dia tidak tahu bahwa pelacur telah berkumpul. (Manajer dapat dihukum karena menjadi aksesori.)

Delegator dihukum karena tidak melakukan apa pun (kelalaian), dan bahkan jika ia melarang tindakan tersebut. Lord Hewart CJ mengatakan bahwa jika terdakwa tidak bersalah, 'undang-undang ini akan dianggap tidak berlaku'. Jika ada pelimpahan maka terdakwa bersalah baik dia berada di kamar sebelah atau di daerah sebelah. Terdakwa bertanggung jawab secara perwakilan bahkan atas tindakan karyawan yang berada dalam hierarki rendah dan meskipun dia jauh dari tempat kerjanya. Doktrin ini memastikan bahwa perorangan dan badan hukum tidak lepas dari tanggung jawab ketika mereka telah mendelegasikan tugas kepada pekerja tingkat rendah namun perlu dicatat bahwa doktrin tersebut berlaku meskipun terdakwa telah sangat berhati-hati dalam memilih karyawannya. Sebagian besar kasus di bidang ini, termasuk *Allen v Whitehead*, berkaitan dengan kepemilikan tempat tertentu atau pelanggaran perizinan.

Sopp v Panjang [1970] 1 QB 518

Terdakwa adalah sekretaris sebuah perusahaan yang mengelola prasmanan stasiun di Windsor. Manajer wanita itu memberikan sedikit wiski. Terdakwa dihukum berdasarkan pasal 24(1) Undang-undang Berat dan Ukuran tahun 1963. Dia 'menjual' wiski, yang disajikan oleh orang di tempat, yang kepadanya pengelolaan tempat tersebut telah didelegasikan.

Jika pengecualian ketiga, yaitu konstruksi ekstensif, diterapkan pada pelanggaran perizinan, maka pemegang izin akan 'menjual' sesuai dengan makna undang-undang. *Sopp v Long* menggambarkan bahwa prinsip delegasi berlaku untuk subdelegasi. Jika seseorang, penerima lisensi, mendelegasikan pengelolaan restoran kepada orang lain yang mensub-delegasikannya kepada pihak ketiga, berdasarkan prinsip ini penerima lisensi bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga tersebut.

Prinsip delegasi mempunyai tiga batasan:

(i) Delegasi harus lengkap. Kasus yang penting adalah otoritas House of Lords dalam kasus *Vane v Yiannopoulos*.

Vane v Yiannopoulos [1965] AC 486

Terdakwa, seorang pemilik restoran, memiliki izin yang menyatakan bahwa ia hanya boleh menyajikan minuman beralkohol kepada orang yang sedang makan. Dia memerintahkan stafnya untuk mematuhi ketentuan lisensi. Seorang pelayan tidak mengikuti instruksinya. Dengan mayoritas tiga banding dua dan sedikit antusiasme terhadap doktrin tersebut, House of Lords menyatakan bahwa hanya ada sebagian delegasi, yang tidak cukup untuk memberikan keyakinan. Terdakwa tidak berada di lantai tempat minuman beralkohol disajikan, namun berada di lokasi.

Kekuasaan harus didelegasikan secara umum: Winson [1969] 1 QB 371, mengikuti perintah Lords Reid dan Evershed, dua dari mayoritas di Vane. Oleh karena itu, berdasarkan fakta Allen v Whitehead di atas, jika terdakwa belum mendelegasikan kendali sepenuhnya, dia tidak bersalah karena mengizinkan pelacur berkumpul, meskipun dia seharusnya mengetahui kehadiran mereka dan meskipun dia memegang kendali.

Batasan antara delegasi 'lengkap' atau 'umum' dan 'sebagian' mungkin tidak mudah untuk ditarik berdasarkan fakta-fakta kasus. Kasus yang dibandingkan dengan Vane adalah Howker v Robinson [1972] 2 All ER 786. Seorang pemegang lisensi, terdakwa, mendelegasikan pengelolaan bar lounge kepada seorang bartender, namun tetap mengendalikan bar umum. Alkohol disajikan kepada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Penerima lisensi dianggap bersalah. Fakta-faktanya tidak terlihat seperti delegasi yang lengkap dan hasilnya tampak tidak sesuai dengan Vane. Howker dapat didukung dengan alasan bahwa pertanyaan tentang delegasi adalah sebuah fakta, dan karena hakim menganggap delegasi tersebut merupakan delegasi penuh, Pengadilan Divisi hanya mengkonfirmasi keputusan tersebut. Namun demikian, berdasarkan fakta, Howker terlihat seperti kasus delegasi sebagian, dengan bartender di ruang tunggu memang seperti itu, bartender dan bukan delegasi dengan otoritas penuh, sehingga pemegang lisensi tidak seharusnya bersalah secara perwakilan. Terlebih lagi, bahkan menerima bahwa hanya ada sebagian delegasi tidak akan membebaskan terdakwa. Sub-bagian yang mendakwa terdakwa tidak hanya menangkap 'pelayan' yang menjual minuman beralkohol kepada seseorang di bawah umur. Hal ini juga berlaku untuk 'pemegang lisensi', yaitu terdakwa di Howker. Tidak perlu memperluas fakta agar sesuai dengan doktrin karena terdakwa tetap bertanggung jawab secara pribadi. Howker v Robinson menunjukkan bahwa prinsip delegasi berlaku bahkan ketika karyawan itu sendiri yang bertanggung jawab dan dengan demikian tujuan undang-undang tersebut dipromosikan.

Meskipun pengadilan tidak memberikan alasan seperti ini, Howker tampil menonjol dalam Bradshaw v Ewart-James [1983] QB 671 (DC). Nakhoda kapal menentukan arah yang sesuai dengan Peraturan Tabrakan. Dia menyerahkan arloji itu kepada kepala petugas dan meninggalkan jembatan. Saat berada di bawah pengawasan petugas, kapal tersebut dinavigasi sedemikian rupa sehingga Peraturan dilanggar. Nakhoda kapal dianggap tidak bersalah. Salah satu cara untuk membenarkan hasil tersebut adalah dengan mengatakan bahwa delegasi sementara (seperti di sini dimana terdakwa tertidur) bukanlah delegasi yang lengkap. Demikian pula, pengadilan di Howker seharusnya tidak menyatakan bahwa terdapat delegasi yang lengkap.

(ii) Prinsip delegasi hanya berlaku untuk pelanggaran mens rea. Lord Parker CJ dalam Winson, di atas, memutuskan bahwa prinsip delegasi tidak berlaku jika pelanggaran utamanya adalah pelanggaran yang ketat. Jika pelanggarannya berat (di mana tidak ada mens rea yang melekat pada unsur apa pun dari actus reus: lihat Bab 4), terdakwa dapat bertanggung jawab berdasarkan pengecualian ketiga. Oleh karena itu, jika ada pelimpahan penuh, terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan mens rea. Jika hanya ada pendelegasian sebagian, maka terdakwa yang tidak mengetahui fakta-faktanya tidak bertanggung jawab berdasarkan asas ini

tetapi dapat bertanggung jawab apabila undang-undang tersebut dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup apa yang dilakukannya.

(iii) Delegasi harus bertindak sesuai dengan kewenangannya. Seperti halnya konstruksi ekstensif, delegator tidak bertanggung jawab jika delegasi tersebut bertindak atas proyek yang tidak sah. Ia tetap bertanggung jawab atas tindakan yang sah dengan cara yang tidak sah.

Berdasarkan pengecualian keempat, jika penerima lisensi bersalah (sebagai pelaku utama), orang yang melakukan tindakan tersebut bertanggung jawab sebagai pelengkap. Jika pengecualian ketiga berlaku, kedua belah pihak mungkin bertanggung jawab sebagai prinsipal bersama. Misalnya, baik pengemudi maupun majikannya 'menggunakan' kendaraan atau 'menjual' ham. Doktrin delegasi hanya berlaku untuk perorangan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat bertanggung jawab berdasarkan prinsip ini.

Poin terakhir dalam doktrin delegasi adalah ini. Jika terdapat delegasi penuh, maka majikan bertanggung jawab tidak peduli seberapa baik dia memilih bawahannya. Namun jika pendelegasiannya tidak lengkap, ia tidak bertanggung jawab betapapun buruknya ia mengawasi bawahannya.

Tanggung jawab dan upaya perwakilan: tanggung jawab perwakilan dan partisipasi sekunder

Gardner v Ackroyd [1952] 2 QB 743 berpendapat bahwa tidak ada tanggung jawab perwakilan untuk mencoba melakukan pelanggaran bahkan ketika kejahatan tersebut adalah kejahatan yang membebaskan tanggung jawab perwakilan ketika selesai. Demikian pula, *Ferguson v Weaving* [1951] 1 KB 814 memutuskan bahwa doktrin tersebut tidak berlaku untuk membantu dan bersekongkol dalam suatu pelanggaran, meskipun pelanggaran tersebut membebaskan tanggung jawab perwakilan pada pelaku utama. Untuk dapat dinyatakan bersalah sebagai pelaku sekunder, terdakwa harus mengetahui fakta-fakta penting yang mendasari pelanggaran tersebut, bahkan kejahatan yang bersifat tanggung jawab ketat. Dia tidak akan mengenal mereka jika dia bertanggung jawab secara perwakilan.

6.2 ALASAN TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN

Bagian ini membahas argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab perwakilan. Pembeneran doktrin ini adalah kebijakan sosial. Undang-undang ini diberlakukan melalui tanggung jawab perwakilan. Seperti yang dikatakan Lord Reid dalam *Vane v Yiannopoulos*, di atas:

Jika tidak ada ketentuan yang membuat pegawai tersebut dapat dituntut, maka tidak mungkin menegakkan hukum secara memadai jika dalam setiap kasus diperlukan pembuktian *mens rea* pada pemegang izin.

Lord Reid menilai, dampaknya adalah mewajibkan pengusaha untuk memilih karyawan yang peduli. Namun, pemberi kerja bertanggung jawab apakah mereka sendiri yang berhati-hati dalam pemilihan pekerja, jika pendelegasiannya sudah total. Terdakwa tetap bersalah meskipun mereka telah menginstruksikan agennya untuk mematuhi hukum. Alasan kedua dapat diilustrasikan sebagai berikut: jika seseorang membuat pemilik mobil bertanggung jawab untuk membayar kelebihan biaya parkir meskipun orang lain meninggalkan mobilnya

terlalu lama di meteran, maka polisi akan menghemat waktu dan uang dalam menemukan orang yang tepat. Alasan ketiga adalah bahwa pemberi kerja mungkin mendapat keuntungan finansial dari kesalahan tersebut.

Dasar pemikiran hukum dan pernyataan doktrin delegasi disatukan oleh Lord Evershed di Vane. Jika ruang lingkup dan tujuan Undang-undang yang relevan adalah pemeliharaan standar ketertiban umum yang pantas dan diterima di tempat yang memiliki izin atau tempat lain yang sebanding, maka berdasarkan undang-undang tersebut timbul apa yang disebut Channell J dalam *Emary v Nolloth* [1903] 2 KB 264, 'pelanggaran kuasi-kriminal' yang membuat pemegang lisensi atau pemilik bertanggung jawab secara pidana atas tindakan para pegawainya, meskipun tidak ada mens rea di pihaknya. Di sisi lain, ketika undang-undang terkait mengimpor kata 'dengan sadar' hasilnya akan berbeda. Namun, jika tidak ada bukti pengetahuan yang sebenarnya, pemegang lisensi atau pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban jika dia diperlihatkan secara efektif telah 'mendelegasikan' fungsi kepemilikan atau manajerialnya.

Ungkapan pelanggaran 'kuasi-kriminal' adalah salah satu yang populer sekitar akhir abad kesembilan belas dalam kasus pertanggungjawaban perwakilan dan perusahaan. Pembeneran yang digunakan oleh J. Edwards, *Mens Rea dalam Statutory Offenses* (Macmillan, 1955) 243 adalah:

[s]elama hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk menjamin standar legislatif mengenai perilaku perdagangan, bisnis dan kesejahteraan sosial yang benar, maka sah untuk menggunakan prinsip pertanggungjawaban perwakilan.

Misalnya, pencemaran sungai sangat merugikan. Hal ini bermanfaat untuk mencegah limbah masuk ke dalam air. Jika pengusaha tidak bertanggung jawab atas tindakan pekerjanya yang membiarkan sungai menjadi tercemar, polusi tidak akan dapat dikendalikan – yang akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Efektivitas undang-undang ditingkatkan dengan tanggung jawab perwakilan dan terdakwa diwajibkan untuk meningkatkan pelatihan, jumlah personel pengawas dan pemeriksaan mesin. Demikian pula penjualan video dewasa kepada anak-anak tidak akan dapat dicegah jika harus dibuktikan bahwa sutradara mengetahui usia anak tersebut: *Tesco Stores Ltd v Brent LBC* [1993] 2 All ER 718 (DC). Perusahaan tersebut diduga 'menyediakan' sebuah video kepada seorang anak di bawah umur ketika video tersebut dijual oleh seorang penjaga toko. Dia mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa anak tersebut masih di bawah umur. Keadaan pikirannya dibebankan kepada majikannya yang oleh karena itu tidak mempunyai pembelaan bahwa mereka tidak mengetahui atau mempunyai alasan yang masuk akal untuk mempercayai bahwa anak tersebut sudah melebihi usia.

Argumen sebaliknya dapat diringkas sebagai berikut.

- (a) Merupakan prinsip dasar bahwa tanggung jawab pidana harus bersifat pribadi. Mengapa orang yang tidak bersalah harus dihukum atas perbuatan orang lain? Devlin J mengemukakan hal ini dengan baik dalam *Reynolds v GH Austin & Sons Ltd* [1951] 2 KB 135: 'Jika seseorang dihukum karena tindakan yang dilakukan oleh orang lain, yang secara wajar tidak dapat diharapkan untuk dipengaruhi atau dikendalikan olehnya,

maka hukumlah yang menentukan. terlibat, bukan dalam menghukum kecerobohan atau ketidakefisienan, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam menyerang korban yang paling nyaman.'

- (b) Terdakwa bisa saja bersalah meskipun ia tidak mengetahui bahwa ada pelanggaran yang telah dilakukan.
- (c) Ia bersalah meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah pelanggaran tersebut. Misalnya, dia mungkin telah memberi tahu karyawannya untuk tidak melakukan apa yang dia lakukan.
- (d) Argumen yang menyatakan bahwa dampak undang-undang tersebut akan diminimalkan jika pengadilan tidak membacakan tanggung jawab perwakilan adalah argumen yang lemah. Hal ini tentu saja tidak terbukti. Seharusnya Parlemen, bukan pengadilan, yang memutuskan kapan seseorang bersalah atas suatu kejahatan. Cara lain untuk menyatakan hal yang sama adalah bahwa doktrin tersebut merupakan penemuan pengadilan. Bukan wewenang peradilan untuk menciptakan kejahatan baru. Jika Parlemen tidak menyatakan bahwa terdakwa bersalah, pengadilan tidak boleh ikut campur. Jika penyusunan rancangan undang-undang oleh Parlemen buruk, penyelesaiannya tidak ada di tangan pengadilan. Pembaca mungkin tertarik untuk membandingkan tanggung jawab yang ketat dimana kadang-kadang hakim membaca *in mens rea* ketika Parlemen (mungkin karena penyusunannya yang buruk) tidak secara tegas menyatakan unsur kesalahan yang diperlukan.
- (e) Doktrin delegasi mendapat kritik khusus. Jika terdakwa tetap berada di tempat dan tidak ada delegasi yang lengkap, maka ia tidak bertanggung jawab betapapun cerobohnya ia dalam memilih delegasi. Akan tetapi, jika terdakwa tidak berada di tempat dan telah mendelegasikan sepenuhnya, ia tetap bertanggung jawab meskipun ia telah berhati-hati dalam menunjuk seorang bawahan. Salah satu dampak dari argumen ini adalah bahwa pemilik restoran dan sejenisnya hanya boleh mendelegasikan sebagian saja. Namun, tentu saja tanggung jawab tidak boleh bergantung pada selesai atau tidaknya pendelegasian karena pemilik restoran mungkin melakukan pekerjaan lain sebagai pemberi kerja yang memerlukan perhatiannya dan seseorang tidak ingin dia berhenti melakukan tugas-tugas ini untuk memberikan pengawasan penuh setiap saat. .

Kekuatan argumen-argumen ini, baik yang pro maupun yang kontra, bergantung pada fakta-fakta kasus individual, kecuali jika kita yakin bahwa hukum pidana hanya berlaku bila terdakwa melakukan *actus reus* dan mempunyai *mens rea* atas pelanggaran yang didakwakan.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 pada saatnya nanti dapat mempengaruhi hukum pertanggungjawaban perwakilan. Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melarang hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan di sini terdakwa dihukum atas tindakan orang lain.

Rancangan KUHP

Rancangan KUHP Komisi Hukum, Law Com. 177, 1989, pasal 29, memperbolehkan pertanggungjawaban perwakilan hanya atas tindakan agen dan bukan atas keadaan

pikirannya. *Mens rea* dalam undang-undang harus dibuktikan terhadap terdakwa (cl 29(2)). Salah satu dampaknya adalah menghapuskan prinsip delegasi di masa depan (cl 29(3)). Jika tidak, pasal 29(2) menyatakan: *suatu unsur pelanggaran (selain unsur kesalahan) dapat diatribusikan kepada seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain hanya jika orang tersebut:*

- (a) ditentukan dalam definisi pelanggaran sebagai orang yang tindakannya dapat dikaitkan, atau
- (b) bertindak dalam lingkup pekerjaan atau wewenangnya dan definisi pelanggarannya menentukan unsur yang berlaku bagi kedua orang tersebut.

Situasi dimana undang-undang secara tegas membuat seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain dijelaskan dalam (a); (b) berurusan dengan pengecualian; (c) (lihat hal 211, di atas), konstruksi ekstensif. Klausul 29(1)(b) akan mempertahankan hasil kasus seperti *Coppen v Moore* (No. 2), di atas, dan terdakwa tetap bersalah meskipun ia memerintahkan pelaku untuk tidak melakukan perbuatan terlarang tersebut, sebagai contoh. yang diberikan oleh Komisi Hukum memberikan gambaran (contoh, 29(ii), memberikan fakta *Coppen*).

Sebuah undang-undang menetapkan bahwa merupakan pelanggaran bagi seseorang untuk menjual barang yang menerapkan deskripsi perdagangan palsu. Tidak ada kesalahan yang diperlukan untuk pelanggaran ini. E, seorang asisten yang bekerja di toko D, menjual ham sebagai ham 'Scotch'. D sebelumnya telah memberikan instruksi bahwa ham tersebut tidak boleh dijual dengan nama tempat atau asal tertentu. Ham sebenarnya adalah ham Amerika. Baik D maupun E sama-sama bersalah atas pelanggaran tersebut sebagai pelaku.

Versi tanggung jawab perwakilan yang tegas menurut undang-undang dapat ditemukan dalam contoh 29(i): Sebuah undang-undang menetapkan bahwa merupakan pelanggaran bagi pemegang izin hakim baik oleh dirinya sendiri, pegawainya atau agennya untuk memasok minuman keras yang memabukkan di tempat yang memiliki izin di luar jam yang diizinkan. Tidak ada kesalahan yang diperlukan untuk pelanggaran ini. D adalah pemegang lisensi rumah publik. E, pelayan barnya, menyajikan minuman untuk temannya di luar jam yang diizinkan D bersalah atas pelanggaran sebagai kepala sekolah. Dengan asumsi kesalahan di pihak E, maka E bersalah sebagai aksesori.

Rancangan KUHP, seperti undang-undang saat ini, tidak terbatas pada pengusaha dan pekerja saja, namun juga mencakup kontraktor independen. Komisi Hukum berpandangan (di nomor 212) bahwa undang-undang tersebut sebaiknya diserahkan pada penafsiran yudisial, namun Komisi Hukum berpendapat bahwa seorang penghuni rumah tidak akan 'menggunakan' mobil pengangkut milik pengangkut ketika hendak pindah rumah, sedangkan seseorang boleh 'menggunakan' truk ketika dia telah mengontrakkan pengiriman kepada orang lain.

Tanggung jawab perusahaan

Bagian ini membahas situasi di mana suatu perusahaan bertanggung jawab secara pidana (*corporate* tanggung jawab). Hanya perusahaan yang dapat bertanggung jawab dengan cara ini, bukan kemitraan atau asosiasi tidak berbadan hukum. Akan tetapi, suatu

perkumpulan bertanggung jawab jika undang-undang tersebut menghukum seseorang, kecuali terdapat maksud sebaliknya.

Selama bertahun-tahun perusahaan tidak bertanggung jawab secara pidana. Salah satu masalahnya adalah hukum pidana dirancang untuk terdakwa perorangan. Misalnya, perusahaan tidak dapat diadili dan tidak dapat digantung atau dimasukkan ke dalam penjara. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar pembatasan ini dihapuskan namun perusahaan masih belum dapat dinyatakan bersalah atas pembunuhan karena satu-satunya sanksi adalah penjara seumur hidup dan seseorang tidak dapat memenjarakan entitas yang tidak berwujud. Masalah masih tetap ada. *Mens rea* adalah doktrin yang membahas kesalahan manusia, bukan entitas buatan. Masalah membubuhkan *mens rea* pada suatu perusahaan dibahas di bawah ini. Reformasi terkait pembunuhan (hanya) muncul dalam Undang-Undang Pembunuhan Korporat dan Pembunuhan Korporasi tahun 2007, yang, kecuali beberapa ketentuan yang tidak relevan di sini, mulai berlaku pada tanggal 6 April 2008.

Tanggung jawab perusahaan sangat penting karena sebagian besar produk cacat dipasarkan oleh, sebagian besar polusi disebabkan oleh, sebagian besar kecelakaan terjadi pada transportasi yang dijalankan, dan sebagian besar kecelakaan kerja terjadi di lokasi yang ditempati oleh perusahaan. Lord Hoffmann di Dewan Penasihat dalam kasus perdata (tetapi prinsip yang sama berlaku dalam hukum pidana) *Meridian Global Funds Asia Ltd v Securities Commission* [1995] 2 AC 500 menyarankan bahwa apakah suatu perusahaan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum bergantung pada ketentuan pemberlakuannya, isinya dan kebijakannya. Persoalannya adalah apakah suatu perusahaan bertanggung jawab atas tindakan manajer investasi seniornya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Komite Yudisial memutuskan bahwa, setelah menyelidiki kebijakan undang-undang tersebut, yang memaksa pengungkapan identitas orang-orang yang telah memperoleh keamanan substansial. Dalam suatu perusahaan, orang-orang tersebut adalah mereka yang mempunyai kewenangan perusahaan untuk memperoleh sekuritas. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab. Kasus ini menandai terobosan dari undang-undang sebelumnya.

Ada beberapa cara di mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Setiap mode mempunyai aturan tersendiri. Orang dalam perseroan yang sebenarnya melakukan tindak pidana itu bersalah sebagai prinsipal bersama.

- (a) Undang-undang dapat membebankan tanggung jawab pada suatu perusahaan sama seperti pada siapa pun. Jika undang-undang memberikan sanksi kepada penghuni tempat, dan perusahaan adalah penghuninya, maka perusahaan tersebut bersalah. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan dan sub-kontraktor, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini menyebabkan perusahaan bertanggung jawab secara pidana. Misalnya, di *Gateway Foodmarkets Ltd* [1997] 2 Cr App R 40 (CA) sebuah perusahaan bertanggung jawab jika gagal menjamin keamanan lift dan seorang karyawan terbunuh. Undang-undang dapat membebankan tanggung jawab baik secara tegas atau dengan implikasi yang diperlukan. Demikian pula korporasi sebagai pemilik kendaraan bersalah atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi: *Transport Act 1982*, s 31 (lihat di bagian *vicarious liability*).

Dulu ada beberapa kesulitan yang dihadapi penuntutan. Perusahaan tidak dapat hadir secara pribadi di pengadilan; suatu perusahaan tidak dapat diadili; dan sebuah perusahaan tidak dapat digantung. Kesulitan-kesulitan ini pada waktunya dapat dihindari, dan tidak ada yang menjadi masalah saat ini.

- (b) Jika pelanggarannya berat, seperti gangguan publik dan pencemaran nama baik, tidak ada masalah dalam mengenakan pertanggungjawaban: *Great North of England Railway Co (1846) 2 Cox CC 70*. Perusahaan bertanggung jawab atas penghalangan jalan raya sementara membangun jalur kereta api. Oleh karena itu, tanggung jawab dikenakan atas tindakan yang dilakukan, bukan hanya karena kelalaian dalam bertindak. *Denman CJ* mengatakan tanggung jawab dikenakan untuk menghalangi perusahaan.
- (c) Perusahaan bertanggung jawab atas kelalaian. Meskipun terdapat kesulitan konseptual dalam memahami bagaimana suatu perusahaan dapat bertindak, tidak ada satupun cara untuk menghukum perusahaan yang gagal bertindak.
- (d) Suatu perusahaan bertanggung jawab secara perwakilan dengan cara yang sama seperti seseorang. Tanggung jawab perwakilan perusahaan sama besarnya dengan tanggung jawab perwakilan orang perseorangan. Setidaknya di sebuah perusahaan kecil terdapat banyak pengawasan terhadap karyawannya. Tanggung jawab perwakilan menghukum kegagalan dalam melakukan perawatan. Aktor manusia (karyawan) dipandang sebagai agen perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa perusahaan, seperti halnya perorangan, bertanggung jawab meskipun tidak bersalah. Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan *mens rea*. Dalam *Moussell Bros v LNWR*, di atas, sebuah perusahaan bersalah karena secara curang menghindari biaya pengiriman. Perusahaan akan bertanggung jawab atas penghindaran pajak, pemagaran mesin, tidak memegang SIM, menjual makanan yang terkontaminasi, dan sebagainya. Dalam *Chuter v Freeth & Pocock Ltd [1911] 2 KB 832*, dinyatakan bahwa sebuah perusahaan 'percaya' melalui agennya. Aturan ini berlaku meskipun perusahaan telah memerintahkan karyawannya untuk tidak melakukan tindakan tersebut: *Griffiths v Studebakers Ltd [1924] 1 KB 103*. Namun, jika aktivitas terlarang tersebut mengharuskan orang perseorangan, maka perusahaan tidak akan bertindak secara langsung. bertanggung jawab meskipun orang perseorangan akan sangat bertanggung jawab. Misalnya, suatu perusahaan tidak dapat mengemudikan kendaraan, sedangkan orang perseorangan dapat. Oleh karena itu, suatu perusahaan tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang memiliki 'drives' sebagai bagian dari *actus reus*: lihat *Richmond-upon-Thames LBC v Pinn & Wheeler Ltd [1989] Crim LR 510 (DC)*.

Seperti dalam pertanggungjawaban perwakilan, ada pengecualian terhadap pertanggungjawaban. Perusahaan tidak bertanggung jawab secara perwakilan atas bantuan dan bersekongkol. Korporasi harus mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya pelanggaran melalui agen yang bertanggung jawab,

meskipun korporasi tidak perlu mengetahui bahwa suatu kejahatan telah dilakukan: *John Henshall (Quarries) Ltd v Harvey* [1965] 2 QB 233.

Tidak dapat terlalu ditekankan bahwa ketika pertanggungjawaban perwakilan diterapkan, majikan (baik perorangan atau badan hukum) bertanggung jawab atas aktivitas seluruh karyawan, bahkan bawahannya. Doktrin tersebut, tidak seperti doktrin identifikasi di bawah, tidak terbatas pada petugas pengendali: lihat *National Rivers Authority v Alfred McAlpine Homes (East) Ltd* (1994) 158 JP 628 (DC) dan *Tesco Stores Ltd v Brent LBC*, di atas. Dalam kasus yang pertama, suatu perusahaan bertanggung jawab menyebabkan pencemaran, semen basah, masuknya air yang dikendalikan, sungai, padahal pencemaran itu sebenarnya disebabkan oleh karyawan dan pengelola lokasi yang tidak mengarahkan pikiran perusahaan. Hal ini mendapat persetujuan dari Lords in *Director General of Fair Trading v Pioneer Concrete (UK) Ltd*, di atas.

Kita mungkin mengharapkan kasus-kasus seperti *Tesco Stores Ltd v Brent LBC* diselesaikan dengan menggunakan doktrin identifikasi. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan dengan pasti apakah suatu perusahaan akan bertanggung jawab atas seluruh karyawannya secara perwakilan seperti dalam kasus ini atau hanya jika individu tersebut merupakan bagian dari pikiran dan kehendak yang mengarahkan perusahaan.

- (e) Ada diktum dalam *Seaboard*, di atas, bahwa perusahaan akan bertanggung jawab atas kejahatan karena gagal memastikan bahwa kapal dioperasikan dengan aman jika perusahaan tersebut tidak menyediakan sistem untuk memastikan operasi yang aman. Jika diktum ini benar, perusahaan akan bertanggung jawab meskipun penuntut tidak dapat membuktikan bahwa ada orang yang bersalah. Jika diikuti, diktum tersebut akan menelan doktrin identifikasi, yang akan dibahas selanjutnya.
- (f) Berdasarkan doktrin identifikasi (yang juga dikenal sebagai doktrin alter ego), perusahaan bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini tidak bertanggung jawab secara perwakilan. Ia dianggap melakukan pelanggaran itu sendiri. Istilah yang akan digunakan dalam konteks ini adalah tanggung jawab langsung. Doktrin ini membuat perusahaan bertanggung jawab atas pelanggaran mens rea. Pengetahuan orang yang menerima delegasi penuh diperlakukan sebagai pengetahuan perusahaan. Berdasarkan doktrin ini, suatu perusahaan tetap bertanggung jawab meskipun orang perseorangan tidak bertanggung jawab. Metode penetapan tanggung jawab korporasi pada (a)–(d) sama dengan metode yang diterapkan pada perseorangan, namun hal ini menandai terobosan dari teori ortodoks dan memberikan sanksi kepada perusahaan sebagai perseroan terbatas, bukan sebagai pengganti perorangan. Jika pertanggungjawaban perwakilan berlaku, perusahaan bertanggung jawab terlepas dari status karyawannya, namun tesis identifikasi hanya berlaku jika karyawan tersebut adalah pejabat pengendali. Doktrin ini berlaku baik untuk hukum umum maupun pelanggaran hukum. Hal ini tergantung pada penafsiran undang-undang ketika

kejahatan tersebut menurut undang-undang: Meridian, di atas (lih. konstruksi ekstensif, dibahas di atas).

Hingga Meridian menjadi otoritas utama, *Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass* [1972] AC 153, Lord Reid menyatakan dasar doktrin sebagai berikut:

Manusia yang hidup mempunyai akal yang dapat mempunyai ilmu atau niat atau lalai dan mempunyai tangan untuk melaksanakan niatnya. Sebuah korporasi tidak memiliki satu pun dari hal-hal ini: ia harus bertindak melalui orang-orang yang hidup. Maka orang yang bertindak bukanlah berbicara atau bertindak untuk perusahaan. Dia bertindak sebagai perusahaan. Dia tidak bertindak sebagai pelayan, wakil, agen atau delegasi. Jika [pikirannya] adalah pikiran yang bersalah, maka kesalahan itu adalah kesalahan perusahaan.

Perusahaan, sebagai lembaga hukum, tidak dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Ia tidak dapat mengambil tindakan atau memiliki keadaan pikiran. Prinsip yang terkadang dikenal dengan doktrin alter ego ini ditetapkan dalam trilogi kasus tahun 1944. Dalam *DPP v Kent & Sussex Contractors Ltd* [1944] KB 146 Macnaghten J berkata:

Apabila seorang wakil perusahaan yang bertanggung jawab mengajukan atas namanya suatu dokumen yang diketahuinya palsu dan dengan maksud untuk menipu, niat dan keyakinannya harus diperhitungkan kepada perusahaan.

Artinya, perbuatan pejabat pengendali perseroan dianggap merupakan perbuatan perseroan. Hal serupa juga terjadi pada pola pikir petugas. Sebuah perusahaan yang bukan merupakan perorangan tidak memiliki pikiran tetapi keadaan pikiran orang lain dikaitkan dengannya. Di Meridian, di atas, Lord Hoffmann menyebut metode yang dengannya tindakan dan keadaan pikiran dikaitkan dengan 'aturan atribusi' perusahaan. Keputusan di *Kent & Sussex* telah disetujui di *ICR Haulage Ltd* [1944] KB 551 (CCA). Sebuah perusahaan dianggap bertanggung jawab atas konspirasi, yang kemudian merupakan pelanggaran hukum umum. Seseorang secara umum tidak dapat bertanggung jawab secara perwakilan atas kejahatan yang dilakukan berdasarkan hukum umum (pengecualian adalah pencemaran nama baik dan gangguan publik), namun perusahaan tetap bertanggung jawab. Pengadilan mengadopsi tes identifikasi. Tindakan dan pola pikir direktur pelaksana dianggap sebagai tindakan perusahaan. Berbeda dengan doktrin delegasi, tidak perlu ada tugas mutlak atau pribadi yang harus didelegasikan sebelum perusahaan bertanggung jawab. Kasus berikutnya adalah *Moore v I Bresler Ltd* [1944] 2 Semua ER 515. Pengembalian palsu dilakukan untuk membeli formulir pajak. Pengadilan Divisi memutuskan bahwa tindakan sekretaris perusahaan dan manajer cabang harus diperlakukan sebagai tindakan perusahaan. Dalam Meridian Lord Hoffmann menyarankan agar pertanyaan tindakan dan keadaan pikiran siapa yang dikaitkan dengan perusahaan dijawab 'dengan menerapkan kanon penafsiran yang biasa, dengan mempertimbangkan bahasa peraturan (jika itu adalah undang-undang) dan konten dan kebijakannya'. Respons ini sangat problematis dalam kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan berdasarkan hukum adat, namun kewenangan selanjutnya mengenai pembunuhan korporasi (lihat di bawah) menyatakan bahwa kejahatan berdasarkan hukum umum masih diatur oleh *Tesco v Nattrass* dan tidak terpengaruh oleh Meridian, meskipun ada otoritas hukum perdata yang mengatur

hal tersebut. Meridian digunakan secara umum. Hukum sekarang menjadi lebih tidak pasti dibandingkan setelah *Tesco v Nattrass*.

Moore mengangkat persoalan apakah aktivitas seluruh karyawan dianggap sebagai aktivitas perusahaan. Hukum modern dulu menekankan bahwa hanya tindakan pejabat pengendali yang dianggap sebagai tindakan perusahaan. Pertanyaannya adalah: seberapa jauh rantai komando yang dijalankan oleh pengadilan? Metafora yang sering digunakan adalah 'otak' dan 'tangan', istilah yang berasal dari penilaian hukum perdata Denning LJ dalam *HL Bolton (Engineering) Co Ltd v TJ Graham & Sons Ltd* [1957] 1 QB 159. Berdasarkan perbedaan antropomorfik ini, yang mana YZ Stern dalam 'Corporatecriminal Personal Liability: Who is the Corporation?' (1987–88) 13 *Journal of Corporation Law* 125 at 130 disebut sebagai 'deskripsi lain yang plastik dan tidak berguna', perusahaan hanya bertanggung jawab atas tindakan terlarang atau kelalaian dari itu 'otaknya', dan bukan 'tangannya'. Leigh menulis ('Oleh siapa perusahaan mengizinkan?' (1966) 29 *MLR* 568): 'Dikotomi "otak" dan "tangan" pada dasarnya mewakili jurnalisme yang hidup. Ini bukan pengganti analisis.' Namun, kasus-kasus tersebut sangat bergantung pada fakta: satu peran di satu perusahaan mungkin menjadi 'otak' namun menjadi 'tangan' di perusahaan lain. Hal ini ditekankan dalam Meridian di mana Lord Hoffmann menyarankan agar kebijakan di balik undang-undang tersebut harus diselidiki untuk menentukan apakah tindakan dan keadaan pikiran seseorang dapat dikaitkan dengan perusahaan. Penggunaan istilah 'tangan' dan 'otak' merupakan pengalih perhatian dari tugas ini. Misalnya, dalam kasus *Moore v I Bresler Ltd*, pengadilan benar dalam menghubungkan *mens rea* dari pelayan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pengembalian ke perusahaan, namun keputusan tersebut tidak secara otomatis berlaku untuk kejahatan lain seperti pembunuhan tidak disengaja, sedangkan *Tesco v Nattrass* menyalakan kata-kata dari undang-undang yang relevan dan tidak menetapkan aturan umum. Dalam *Worthy v Gordon Plant (Services) Ltd* [1989] RTR 7 (DC) *actus reus* dan *mens rea* seorang manajer lalu lintas diperhitungkan ke sebuah perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa doktrin identifikasi tidak terbatas pada direktur (seperti yang dipikirkan Lord Diplock dalam *Tesco v Nattrass*).

Manajer Penjualan Eropa dari divisi pesawat terbang sebuah perusahaan: *Redfern* [1993] *Crim LR* 43 (CA). Pengadilan mengatakan bahwa doktrin tersebut bergantung pada pendelegasian wewenang manajemen yang sebenarnya, bukan pada fungsi administratif atau eksekutif, tidak peduli betapa pentingnya fungsi tersebut. Manajer berada empat peringkat di bawah kepala eksekutif.

Dalam *Tesco v Nattrass*, manajer hanyalah satu dari 800 manajer. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin mudah untuk mengatakan bahwa seseorang adalah 'tangan'. Tampaknya tidak adil jika perusahaan besar lepas dari tanggung jawab sedangkan perusahaan kecil tidak. Lord Reid mendalilkan bahwa uji identifikasi diterapkan ketika terdapat pendelegasian fungsi manajemen secara substansial. Hanya sedikit orang seperti direktur pelaksana dan anggota dewan yang menduduki posisi tersebut. Mayoritas mencari orang-orang yang 'mewakili pikiran dan kemauan perusahaan serta mengendalikan apa yang dilakukannya'. Ungkapan 'mengarahkan pikiran dan kemauan' yang sering digunakan saat ini berasal dari kasus perdata, *Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd* [1915] AC

705. Lord Hoffmann dalam Meridian berpesan agar pengadilan tidak terlalu menekankan pada frasa ini.

Sebaliknya, mereka harus menanyakan apakah tindakan dan pola pikir seseorang dapat dikaitkan dengan perusahaan untuk tujuan undang-undang yang relevan. Viscount Dilhorne dalam *Tesco v Nattrass* mencari seseorang yang 'sebenarnya mengendalikan operasi perusahaan dan siapa yang tidak bertanggung jawab kepada orang lain untuk, cara dia melaksanakan tugasnya Lord Reid mencari substansi transaksinya, bukan hanya pada bentuknya seperti yang dilakukan Lord Diplock. Dia misalnya 'dewan direksi, direktur pelaksana dan mungkin pejabat atasan lainnya [WHO] berbicara dan bertindak sebagai perusahaan'. Lord Diplock memberikan ujian yang lebih sempit lagi, yaitu ujian mekanis. Perusahaan-perusahaan dengan anggaran dasar 'Tabel A' hanya bertanggung jawab jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan dalam Tabel A, yaitu para direktur. Apapun tes yang diambil, Kent & Sussex terlihat salah dalam kaitannya dengan manajer transportasi. Dan mungkin saja *Moore v I Bresler Ltd* salah sebelum Meridian sehubungan dengan manajer cabang. Sekarang hal ini benar sebagai masalah konstruksi undang-undang. *Tesco v Nattrass* sekarang harus dilihat sebagai kasus interpretasi undang-undang: Meridian. Manajer bukanlah 'otak', untuk tujuan undang-undang yang relevan. Seorang manajer mungkin menjadi 'otak' untuk tujuan lain. *Tesco v Nattrass* adalah keputusan yang buruk dalam hal mengendalikan kesalahan: mungkin Meridian menandai era baru. Namun, dalam kritik terhadap Meridian dapat dikatakan bahwa sampai ada keputusan pengadilan, seseorang tidak akan mengetahui apakah aktivitas seseorang dapat dikaitkan dengan perusahaan.

Satu pengamatan tentang *Tesco v Nattrass* harus dilakukan. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat peraturan. Tanggung jawab perusahaan bisa saja didasarkan pada tanggung jawab perwakilan: tidak perlu menyelidiki doktrin identifikasi. Dengan menerapkan tanggung jawab perwakilan, perusahaan akan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya termasuk manajer toko. Seharusnya tidak ada bedanya jika pelanggaran tersebut diungkapkan dalam bentuk pelanggaran ditambah dengan pembelaan bahwa terdakwa telah melakukan semua uji tuntas untuk mencegah terjadinya kejahatan. (C. Wells 'Pertanggungjawaban perusahaan atas kejahatan *Tesco v Nattrass* ada dalam daftar bahaya?' [1996] 1 Archbold News 5 jam 6, menyebut keputusan tersebut 'aneh'.)

Penerapan penting dari doktrin identifikasi terjadi di *P & O European Ferries (Dover) Ltd*, di atas, namun tidak dilaporkan mengenai hal ini. Kasus ini muncul dari tenggelamnya *Herald of Free Enterprise* di Zeebrugge. Asisten bosun, yang tertidur ketika kapal meninggalkan pelabuhan, dan kepala petugas, yang seharusnya memeriksa apakah pintu haluan ditutup tetapi tidak bisa karena dia berada di anjungan, tidak cukup senior untuk dianggap sebagai kelalaian mereka. menjadi kecerobohan perusahaan. Kegagalan untuk membuktikan kecerobohan terhadap manajemen senior meskipun para direktur telah diperingatkan akan bahaya berlayar dengan pintu haluan terbuka berarti bahwa persidangan perusahaan atas pembunuhan tidak disengaja gagal. Kasus ini membuat orang berpikir tentang alasan di balik tes identifikasi dan luasnya. Jika peraturan Lord Diplock diterapkan,

perusahaan akan jarang bertanggung jawab. Namun dapat dengan mudah dikatakan bahwa kegagalan bosun dan chief officer menunjukkan kegagalan perusahaan dalam menjalankan tugasnya untuk tidak membunuh atau melukai penumpang dan awak kapal. Selain itu, Direksi tidak ingin memasang lampu yang menunjukkan bahwa pintu terbuka karena mereka mempekerjakan seorang laki-laki untuk memeriksa, namun dia sedang tidur dan tidak ada perlindungan yang disediakan oleh perusahaan. Memang benar, Dewan tampaknya berpuas diri. Dengan kata lain, perusahaan lalai. Lebih jauh lagi, jika dasar pemikiran doktrin ini adalah untuk menghilangkan keuntungan perusahaan karena pelanggaran hukum, mengapa doktrin tersebut tidak diterapkan pada manajer menengah ke bawah yang telah menghasilkan keuntungan bagi perusahaan? Mungkin lebih baik berbicara tentang pengendalian perusahaan daripada manajemen, tergantung pada seberapa jauh seseorang menginginkan undang-undang tersebut diterapkan, seperti yang dilakukan Woolf J dalam *Essendon Engineering Co Ltd v Maile* [1982] RTR 260. Hakimlah yang memutuskan apakah seseorang adalah 'otak' atau 'tangan'.

P&O European Ferries (Dover) Ltd adalah kasus pembunuhan berencana, yang merupakan kejahatan hukum umum. Oleh karena itu, Meridian yang berbicara tentang penafsiran undang-undang tidak dapat diterapkan secara langsung. Eksplorasi pembunuhan korporasi baru-baru ini terjadi dalam Referensi Jaksa Agung (No. 2 Tahun 1999) [2000] QB 796 (CA), sebuah kasus kecelakaan kereta api yang menewaskan tujuh orang. Diputuskan bahwa sebuah perusahaan (dan, sebagaimana Pengadilan Divisi diadakan di *Rowley v DPP* [2003] EWHC 693 (Admin), otoritas lokal) tidak dapat bertanggung jawab atas pembunuhan karena kelalaian berat kecuali jika terdakwa manusia telah dihukum karenanya. Doktrin identifikasi tetap menjadi aturan atribusi untuk pelanggaran hukum umum ini. Orang yang menjadi 'pengarah pikiran dan kemauan' dalam *Tesco v Nattrass* harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Efek mengikuti *Tesco v Nattrass* mudah diungkap. Jika doktrin tersebut mengharuskan seorang direktur untuk bertanggung jawab secara pidana, maka di perusahaan yang lebih besar hampir tidak mungkin seorang direktur dapat dinyatakan bersalah. Seorang direktur tidak mengemudikan kereta, tetapi masinis kereta yang mengemudikannya; namun kelalaian besar pengemudi tidak dapat dikaitkan dengan perusahaan – hierarkinya terlalu rendah. Namun, sulit untuk menunjukkan bahwa keputusan direktur telah menyebabkan kematian penumpang jika penyebab langsungnya adalah, misalnya, pengemudi yang melewati lampu merah. Lebih lanjut, Rose LJ dalam *Acuan Jaksa Agung* (No. 2 Tahun 1999) mengatakan bahwa 'akan membawa keburukan hukum jika setiap tindakan dan pola pikir seorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan yang sepenuhnya tidak bersalah'; namun demikian, doktrin tersebut merupakan doktrin dalam hukum tort Inggris tentang pertanggungjawaban perwakilan dan merupakan aturan umum pertanggungjawaban pidana di AS.

Ada dua batasan pada doktrin identifikasi. Pertama, disarankan bahwa ini hanya berlaku ketika 'otak' menjalankan fungsi manajerial. Suatu perusahaan tidak akan bertanggung jawab secara hukum pidana (walaupun perusahaan tersebut mungkin dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum) jika direktur pelaksanaannya menabrak seseorang, karena mengemudi bukanlah fungsi manajerial. Tidak jelas apakah proposisi ini mewakili

undang-undang atau tidak, namun sulit dipercaya bahwa hakim akan menganggap suatu perusahaan bertanggung jawab jika direktur pelaksana mencuri asbak meskipun ia sedang dalam perjalanan bisnis. Kedua, doktrin ini hanya berlaku ketika satu atau lebih 'otak' bertanggung jawab secara individual. Seseorang tidak dapat menggabungkan beberapa pemikiran dan aktivitas yang mengarahkan untuk membuat perusahaan bertanggung jawab: *R v HM Coroner untuk East Kent, ex parte Spooner (1989) 88 Cr App R 10 (DC)*. Setiap 'otak' individu harus bertanggung jawab sebelum perusahaan dapat dihukum berdasarkan doktrin identifikasi. Dalam perusahaan besar, di mana keputusan sering dibuat bersama-sama, kecil kemungkinannya bahwa seorang pejabat pengendali mempunyai pengetahuan yang diperlukan. Di era perusahaan multinasional besar, baik prinsip identifikasi maupun doktrin delegasi tidak berlaku karena kebutuhan untuk mendelegasikan lebih jauh hierarki perusahaan agar perusahaan dapat bekerja di pasar yang kompetitif. Disarankan bahwa bahkan jika doktrin agregasi diadopsi, undang-undang tersebut tidak akan mengharuskan perusahaan yang tidak memiliki kebijakan perusahaan mengenai masalah yang relevan, seperti keselamatan di tempat kerja, bersalah. Oleh karena itu, perusahaan tergugat di *P&O European Ferries (Dover) Ltd (di atas)* mungkin masih tidak bersalah.

Batasan tanggung jawab

Perusahaan tidak bertanggung jawab dalam situasi tertentu.

- (a) Suatu perusahaan hanya dapat dihukum atas pelanggaran yang diancam dengan denda. Itu tidak bisa dipenjara atau digantung. Oleh karena itu, tidak dapat dinyatakan bersalah atas pengkhianatan atau pembunuhan, karena bagaimana seseorang dapat memasukkan konstruksi hukum ke dalam penjara? Karena sebagian besar pelanggaran saat ini dapat dihukum dengan denda atau metode non-fisik lainnya, pembatasan ini minimal. Pengecualian ini diterima di *ICR Haulage dan P & O European Ferries (Dover) Ltd, di atas*, begitu pula pengecualian kedua, meskipun sumpah palsu masih bisa diperdebatkan. Argumen yang bertentangan dengan pandangan bahwa suatu perusahaan hanya dapat dihukum atas pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan denda adalah bahwa harus ada hukuman lain yang tersedia, seperti 'masa percobaan perusahaan' dan pembubaran perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran karena tidak ada sanksi yang tersedia, maka terdakwa lain mungkin bersalah secara normal. Namun, bab ini dikhususkan untuk tanggung jawab perusahaan.
- (b) Tampaknya ada beberapa pelanggaran yang tidak dapat dilakukan oleh seorang pekerja dalam lingkup pekerjaannya. Ada diktum *Finlay J dalam Cory Bros & Co [1927] 1 KB 810* yang menyatakan bahwa sumpah palsu adalah salah satu pelanggaran tersebut. Namun, diktum ini bisa saja salah, karena direktur yang bersumpah palsu bisa saja diidentikkan dengan perusahaan. Namun, argumen yang menyatakan sebaliknya sangatlah kuat. Hanya orang yang telah disumpah secara sah yang dapat bersalah atas sumpah palsu, dan suatu perusahaan tidak dapat disumpah secara sah. Pelanggaran lainnya termasuk menjadi nakal dan gelandangan, bigami, inses dan pemerkosaan. Kejahatan-kejahatan ini dapat disebut sebagai pelanggaran pribadi. Misalnya, suatu

perusahaan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Namun, suatu perusahaan dapat bertanggung jawab sebagai perusahaan atas pelanggaran tersebut. Sebuah ilustrasi diberikan oleh A. Reed dan B. Fitzpatrick, *Criminal Law*, 3rd edn (Thomson, 2006) 168: 'If Z, direktur pelaksana X Company Ltd, sebuah perusahaan film, mengawasi pembuatan film persetubuhan antara M, seorang laki-laki berusia 18 tahun, dengan N, seorang gadis berusia 15 tahun, tidak ada alasan mengapa Z dan oleh karena itu perusahaan film tidak boleh dihukum sebagai pihak sekunder dalam hubungan seksual yang melanggar hukum tersebut.' Untuk sebagian besar kejahatan seperti pencurian dan perampokan tidak ada masalah dalam menemukan perusahaan yang bertanggung jawab. Lord Steyn dalam *Deutsche Genossenschaftsbank v Burnhope* [1995] 1 WLR 1580 memberi contoh: 'Jika pimpinan perusahaan secara tidak jujur memerintahkan karyawan yang tidak bersalah untuk memasuki gudang dan mengeluarkan tas yang berisi barang-barang berharga, perusahaan tersebut dapat dinyatakan bersalah melakukan perampokan.'

- (c) Dalam *Cory Bros* di atas, dikatakan di Assizes bahwa suatu korporasi tidak dapat diadili atas kejahatan kekerasan pribadi termasuk pembunuhan tidak disengaja. Kasus itu dikritik dalam *ICR Haulage* di atas. Di *Northern Strip Mining Construction Co Ltd*, yang tidak dilaporkan, pada tahun 1965, sebuah perusahaan diadili atas tuduhan pembunuhan namun masalah kelayakan dakwaan tidak dibahas dan perusahaan tersebut dibebaskan; di *ex parte Spooner*, di atas, *Bingham LJ* dengan tentatif menerima bahwa sebuah perusahaan bisa saja bersalah atas pembunuhan tidak berencana.

Terobosan terakhir terjadi di *P&O European Ferries (Dover) Ltd*, di atas; Pengadilan Tinggi menerima perubahan undang-undang tersebut dalam *Acuan Jaksa Agung (No. 2 Tahun 1999)*, di atas. Bagian ini dilaporkan. Perusahaan penerus dari firma pemilik *Herald of Free Enterprise* ditahan untuk diadili atas pembunuhan tidak disengaja.

Namun, pada bagian persidangan yang tidak dilaporkan, kasus penuntutan gagal karena tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan petugas pengawas secara objektif ceroboh. Tidak ada orang yang cukup bijaksana yang menduduki posisi masing-masing anggota staf senior yang akan menyadari bahwa risiko kapal yang meninggalkan pelabuhan adalah hal yang 'jelas dan serius'. (Lihat juga pembahasan mengenai pembunuhan tidak berencana yang sembrono dan kelalaian berat di Bab 12, yang menyatakan bahwa pembunuhan tidak disengaja yang obyektif telah dihapuskan.) Poin ini tercapai meskipun ada penyelidikan dari *Sheen J* mengenai kejadian terbalik tersebut, yang menyatakan bahwa para manajer seharusnya tidak melakukan hal tersebut. menyadari bahwa ada risiko nyata jika feri meninggalkan pelabuhan dengan pintu terbuka dan tidak ada perintah tetap untuk menutup pintu haluan. Para direktur tidak memikirkan jenis instruksi apa yang harus mereka berikan agar kapal dapat meninggalkan pelabuhan dengan selamat. Namun, 'kecerobohan' setiap orang, demikian *Sheen J* menyebutnya, tidak dapat digabungkan untuk membuat perusahaan bertanggung jawab. Tidak ada kecerobohan. Sistem kapal telah bekerja di lebih dari 60.000 pelayaran. Para perwira kapal bersaksi bahwa mereka tidak memikirkan risikonya; oleh karena

itu, hal ini tidak mungkin terlihat jelas. Kapal feri tersebut telah meninggalkan pelabuhan beberapa kali dengan pintu terbuka, namun tidak ada insiden dan baik Departemen Perhubungan maupun perusahaan asuransi tidak memerlukan sistem pelaporan kepada kapten bahwa pintu ditutup atau pemasangan lampu di jembatan. Untuk menunjukkan bahwa mereka memang benar. Diperkirakan bahwa kembalinya kasus pembunuhan berencana karena kelalaian tidak akan memberikan pengaruh apa pun pada hasilnya. Perwira kapal yang cukup terampil tidak akan mengoperasikan moda pelayaran yang berbeda dari pelabuhan. Kasus ini juga menggambarkan pentingnya tanggung jawab perusahaan. Setiap tahun ada sekitar 600 – 800 kasus pembunuhan. Tenggelamnya Herald of Free Enterprise menyebabkan sekitar 30 persen kematian tersebut terjadi pada tahun 1988.

Meskipun kasus ini gagal, P&O European Ferries (Dover) Ltd menyatakan bahwa sebuah perusahaan mungkin bertanggung jawab atas kejahatan kekerasan. Pengecualian ketiga telah hilang. Kesulitan pembuktian tidak akan muncul dalam setiap kasus. Perusahaan pertama yang dihukum karena pembunuhan adalah perusahaan yang dituduh menyebabkan tragedi kano Lyme Bay: OLL Ltd, tidak dilaporkan, 9 Desember 1994. Perusahaan tersebut didenda £60.000. Perusahaan tersebut dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan karena kelalaian besar. Direktur pelaksana, yang merupakan pengendali perusahaan, mengetahui bahwa standar keselamatan rendah. Pengetahuannya diperhitungkan ke perusahaan. Dampak dari denda tersebut adalah membuat perusahaan tersebut dilikuidasi. Perbedaannya dengan P&O European Ferries (Dover) Ltd tampaknya terletak pada perbedaan ukuran perusahaannya. Perusahaan kedua yang dihukum karena pembunuhan adalah Jackson Transport (Ossett) Ltd, tidak dilaporkan, 19 September 1996 (Pengadilan Bradford Crown). Mantan direktur pelaksana adalah 'pengarah' perusahaan dan menjalankan bisnis secara pribadi. Korban meninggal saat membersihkan bahan kimia dari truk tangki. Perusahaan tersebut divonis bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja (dan individu yang dituduh menerima hukuman 12 bulan penjara). Satu-satunya hukuman lainnya adalah Jackson Transport (Ossett) Ltd (1996), English Brothers Ltd (2001), Teglgard Hardwood Ltd (2003), Dennis Clothier and Sons Ltd (2003), Nationwide Heating Services Ltd (2004) dan Keymark Services (2006). Dendanya masing-masing adalah: £15.000, £25.000, £25.000, £4.000, £90.000 (termasuk untuk pelanggaran Kesehatan dan Keselamatan) dan tidak diketahui. Contoh kasus pertama adalah: seorang karyawan terbunuh setelah bahan kimia beracun disemprotkan ke wajahnya ketika dia sedang membersihkan residu bahan kimia dari sebuah kapal tanker. Dia tidak diawasi atau dilatih dan dia tidak diberi peralatan pelindung. Pada saat yang sama, denda untuk pelanggaran kesehatan dan keselamatan juga meningkat, sehingga melemahkan argumen yang mendukung reformasi seluruh hukum tanggung jawab perusahaan.

Pada tahun 1989 terdapat 143 kematian dan 4.010 luka serius di lokasi pembangunan. Banyak diantaranya disebabkan oleh hal yang sama, seperti runtuhnya parit atau perancah. Oleh karena itu, penanggung jawab perusahaan konstruksi tersebut harus mewaspadai kejadian seperti itu. Oleh karena itu, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal serupa juga dapat dikemukakan mengenai kebakaran di bawah tanah King's Cross. Antara

tahun 1956 dan 1988 terjadi 46 kebakaran di eskalator, 32 di antaranya disebabkan oleh kebiasaan merokok. Angka-angka ini diambil dari D. Bergman 'Recklessness in the boardroom' (1990) 140 NLJ 1496 at 1501. Ia menambahkan:

Jalinan hukum umum pembunuhan yang tidak disengaja dapat dihindari dalam situasi ini jika terjadi kejahatan baru, yang mana seorang direktur akan dikenakan denda yang besar dan kemungkinan dipenjara jika kegagalannya dalam menjalankan tugasnya menyebabkan seseorang meninggal. Bergman memperkirakan dalam 'Lemah dalam kejahatan – lemah dalam penyebab kejahatan' [1997] NLJ 1652 bahwa telah terjadi lebih dari 10.000 kematian di tempat kerja dalam 10 tahun sebelumnya dan G. Slapper dan S. Tombs, *Kejahatan Korporasi* (Longman, 1999) 69, diperkirakan 1.316 pada tahun 1994, peningkatan substansial dari jumlah 376 yang dilaporkan oleh Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan. Komisi Kesehatan dan Keselamatan melaporkan 212 kematian dan 28.605 cedera serius di tempat kerja (Statistik Kesehatan dan Keselamatan 2005/06, 2006).

Keyakinan dalam kasus Lyme Bay terjadi karena kecilnya ukuran perusahaan. Direktur pelaksanaannya adalah perusahaan. Poin pentingnya adalah belum ada perusahaan menengah atau besar yang dihukum. Perlu dicatat bahwa doktrin ultra vires tidak berlaku dalam hukum pidana dan bahwa direktur dapat didiskualifikasi oleh pengadilan berdasarkan Undang-Undang Diskualifikasi Direktur Perusahaan tahun 1986, pasal 2, jika mereka salah mengelola masalah kesehatan dan keselamatan perusahaan. Dalam persidangan yang tidak dilaporkan di Pengadilan Lewes Crown, R. J. Chapman dilarang selama dua tahun karena membuat karyawannya terkena bahaya jatuhnya batu. Direktur pertama yang dipenjara karena pembunuhan dalam kaitannya dengan bisnisnya adalah Peter Kite, direktur pelaksana di OLL Ltd. Dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas empat dakwaan, untuk dijalankan secara bersamaan tetapi hukumannya dikurangi menjadi dua tahun di tingkat banding.

Kritik terhadap hukum

Setelah bencana transportasi dan industri, reformasi tanggung jawab perusahaan menjadi agenda, dan peraturan perundang-undangan masih berubah-ubah. Masyarakat menganggap perusahaan bersalah karena gagal mencegah kejadian serupa. Bencana-bencana ini tidak lagi dipandang sebagai kecelakaan (bandingkan dengan bencana Aberfan yang terjadi lebih dari 40 tahun yang lalu): bencana-bencana ini dipandang sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan dan dicegah. Perusahaan dipandang bersalah dan ada keinginan untuk mengubah kesalahan moral menjadi tanggung jawab pidana. Ungkapan 'pembunuhan korporasi' kini dikenal oleh masyarakat awam.

Salah satu kesulitan dalam membuat perusahaan bertanggung jawab secara pidana atas tindakan atau kelalaian mereka adalah bahwa hukum pidana didasarkan pada tanggung jawab pribadi, dan kesulitan lainnya adalah bahwa pihak penuntut lambat dalam menindak 'kejahatan di dalam suite'. Misalnya, kematian di lokasi konstruksi jarang sekali diketahui polisi, namun hanya ditangani oleh Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan. Sikap ini dikritik karena tidak menganggap serius kematian di tempat kerja. Posisinya berubah. Ada beberapa alasan untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Perusahaan akan lolos dari peraturan hukum pidana jika mereka tidak bertanggung jawab, dan peraturan

terkadang merupakan hal yang baik. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk mengadopsi kebijakan yang mengarah pada prosedur yang hati-hati. Hanya perusahaan yang dapat memperbaiki beberapa hal yang menyebabkan kematian tersebut. Misalnya, hanya P&O yang dapat memasang lampu untuk menandakan bahwa pintu haluan telah ditutup. Asisten bosun tidak bisa. Mungkin secara prosedural mudah untuk menuntut perusahaan. Perusahaan lebih besar kemungkinannya untuk mampu membayar denda dibandingkan individu. Pemegang saham mungkin didorong untuk melakukan kontrol, dan perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh kekayaan yang tidak adil melalui denda. Namun denda harus ditetapkan cukup tinggi sehingga melebihi keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran hukum; jika tidak maka tidak akan ada pencegahan dan denda akan dianggap sebagai pengeluaran bisnis. Menghukum orang perseorangan saja tidak akan berdampak pada penyebab kesalahannya: orang perseorangan mungkin hanya sekedar antek. Memang benar, kesalahannya mungkin ada pada perusahaan, bukan pada individu. Adanya tanggung jawab perusahaan mungkin dapat membantu mencegah perusahaan memberikan tekanan pada karyawannya untuk melanggar hukum. Publisitas yang merugikan dan denda dapat menjadi efek jera. Memang benar, publisitas yang buruk mungkin lebih merupakan efek jera dibandingkan denda, yang seringkali tidak berarti. Namun demikian, harus diakui bahwa dampak publisitas yang merugikan terhadap konsumen masih belum pasti, meskipun dampaknya lebih besar dibandingkan jika hanya individu yang melakukan kesalahan saja yang diadili. Opini publik mungkin mendukung pengenaan tanggung jawab pada perusahaan yang aktivitasnya menyebabkan bencana. Hal ini tidak mendukung penerapan tanggung jawab hanya pada karyawan yang berada di tingkat dasar hierarki perusahaan, dan ketika ada orang yang dibunuh, maka timbul perasaan bahwa perusahaan harus dihukum atas kejahatan 'normal' seperti pembunuhan tidak berencana dan bukan hanya atas kesehatan dan keselamatan. pelanggaran. Perusahaan dipandang sebagai penyebab kematian dan cedera. Mereka sebenarnya bisa mencegah dampak buruknya. Sering dikatakan bahwa polisi dan Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan tidak memperlakukan pelanggaran korporasi sebagai kejahatan yang 'nyata'. Nama pelanggarannya mungkin tidak mencerminkan kesalahannya, mungkin ada kelambanan pihak penuntut, dan dendanya mungkin bersifat cemoohan.

Namun, tidak semua argumen tersebut kuat. Besarnya denda tidak sebanding dengan besarnya pengayaan; denda berdampak berbeda pada perusahaan dan individu; pemegang saham sangat jarang melakukan kendali atas perusahaan; dan dendanya mungkin terlalu kecil untuk dicegah. Kebijakan perusahaan di perusahaan besar diperkirakan tidak terpengaruh oleh pengenaan denda: Anon 'Meningkatkan kontrol masyarakat atas kejahatan perusahaan – masalah sanksi' (1961) 71 Yale LJ 280 di 290. Tentu saja, fakta bahwa denda tidak tepat dikalibrasi tidak berarti bahwa perusahaan tidak boleh dihukum. Beberapa perusahaan seperti universitas tidak memiliki pemegang saham. A. M. Polinsky dan S. Shavell berpendapat 'Haruskah karyawan dikenakan denda dan penjara mengingat adanya tanggung jawab perusahaan?' (1993) 13 International Review of Law and Economics 239 di 255, bahwa (a) kendali perusahaan terhadap karyawannya tidak akan bertambah dengan pembebanan tanggung jawab korporasi karena pengendalian telah dilaksanakan pada tingkat yang optimal

secara sosial, dan (b) perusahaan tidak boleh bertanggung jawab lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya karena jika tidak, biaya produksinya akan meningkat, sehingga menekan tingkat konsumsi optimal. Tentu saja argumen-argumen ini tidak membedakan antara 'otak' dan 'tangan' seperti yang dilakukan oleh doktrin identifikasi. Terlepas dari kelemahan beberapa argumen, J. A. Andrews membuat komentar yang masuk akal dalam [1973] Crim LR 91 di 94:

Apabila kita menggunakan hukum pidana untuk mendukung peraturan fiskal, kesehatan dan keselamatan serta peraturan lainnya, maka perusahaan harus ikut serta dalam sistem tersebut. Di sisi lain, ketika kita menggunakan proses pidana untuk mencegah terjadinya kenakalan, kita harus menyadari bahwa perusahaan bukanlah pihak yang melakukan kenakalan, hanya manusia saja yang melakukan hal tersebut. Selain itu, ada beberapa negara bagian, seperti Italia, yang tidak memiliki undang-undang pertanggungjawaban perusahaan. Argumennya adalah bahwa korporasi tidak memiliki moralitas, tidak memiliki kepribadian, yang mana hukum pidana dan hukuman dapat diubah. Menuntut perusahaan saja mungkin akan mengabaikan individu yang menyebabkan kerugian.

Rancangan KUHP

Rancangan KUHP Komisi Hukum, Law Com. 177 Tahun 1989, halaman 30, mengusulkan beberapa reformasi.

- (a) Perusahaan tidak akan bertanggung jawab jika pejabat pengendali bertindak melawan kepentingan perusahaan. Rekomendasi ini membalikkan *Moore v I Bresler* di atas. Sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Komisi Hukum No. 44 Tahun 1972 alinea 39: [P]asas yang ditetapkan dalam *Moore v I Bresler* jelas tidak adil karena prinsip ini memberikan sanksi kepada perusahaan dan pemegang sahamnya atas tindakan yang menipu perusahaan dan merugikan pemegang sahamnya.
- (b) Korporasi akan terus bertanggung jawab secara perwakilan: cl 30(1).
- (c) Prinsip identifikasi tetap dipertahankan. Tindakan dan pola pikir petugas pengendali yang bertindak dalam lingkup kantornya adalah milik perusahaan: sel 30(2). Petugas pengendali adalah 'seseorang yang ikut serta dalam pengendalian korporasi dalam kapasitas sebagai direktur, manajer, sekretaris atau pejabat serupa lainnya (baik dia ditunjuk atau secara sah ditunjuk untuk jabatan tersebut)' (cl 30(3)). Sub-klausul ini dimaksudkan sebagai pemberlakuan berbagai definisi Penguasa Hukum dalam *Tesco v Nattrass* di atas. Setidaknya salah satu petugas pengendali harus memiliki keseluruhan unsur mental pelanggaran.
- (d) Aturan bahwa suatu perusahaan tidak dapat bersalah atas kejahatan yang tidak dapat dihukum dengan denda tetap dipertahankan: cl 30(7).
- (e) Oleh sel 30(8):
Suatu korporasi mempunyai pembelaan yang terdiri atas atau meliputi:
 - (a) keadaan pikiran hanya jika –
 - ◆ semua petugas pengawas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut; atau
 - ◆ jika tidak ada pejabat pengawas yang berkepentingan, semua pegawai atau agen lain yang berkepentingan, mempunyai pemikiran demikian;

- (b) tidak adanya pola pikir hanya jika tidak ada petugas pengendali yang bertanggung jawab atas pokok pelanggaran yang memiliki pola pikir tersebut;
 - (c) kepatuhan terhadap standar perilaku yang disyaratkan oleh korporasi itu sendiri hanya jika standar tersebut dipatuhi oleh pejabat pengawas yang bertanggung jawab atas pokok pelanggaran.
- Kecuali usulan (a), usulan ini mencerminkan hukum yang berlaku saat ini.

6.3 USULAN REFORMASI NON-PEMERINTAH

Reformasi lain telah disarankan. Rodger Pannone, kepala pengacara bencana di Inggris, berpendapat bahwa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab secara perdata atas hukuman ganti rugi. N. J. Reville 'Corporate manslaughter' [1989] LSG No. 37, 17 at 19, mengusulkan denda besar-besaran. Namun, denda yang besar dapat menyebabkan likuidasi, suatu hasil yang mungkin tidak sesuai. Saat ini, denda mungkin tidak menghilangkan keuntungan yang diperoleh perusahaan secara tidak sah, dan denda tersebut mungkin tidak cukup tinggi untuk memberikan efek jera. Gary Slapper dalam 'A safe place to work' [1992] LSG No. 37, 24, menunjukkan bahwa ketika BP Ltd didenda Rp.15.000.500.000 oleh pengadilan Skotlandia pada tahun 1987, jumlah tersebut adalah 0,05 persen dari laba setelah pajak perusahaan dan setara dengan denda Rp.150.000 untuk seseorang yang berpenghasilan Rp.301.504.000 per tahun. Sistem 'denda satuan', yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1991 namun sejak dicabut, tidak berlaku bagi perusahaan. Meskipun demikian, denda pasca tahun 2000 untuk pelanggaran kesehatan dan keselamatan mungkin cukup besar. Meskipun Pengadilan Banding mengurangi denda Balfour Beatty atas kecelakaan kereta api Hatfield sebesar Rp. 50.251.157.850, denda tetap sebesar Rp. 150.754.420.875 : Balfour Beatty Rail Infrastructure Services Ltd [2006] EWCA Crim 1586. Itu adalah pemegang saham (dan pelanggan) yang terkena denda. Pemegang saham tidak menggunakan hak hukum perusahaannya untuk mengendalikan pejabat perusahaan. Selain itu, denda yang besar dapat menyebabkan perusahaan tidak mempunyai cukup uang untuk memperbaiki situasi. Karyawan mungkin harus diberhentikan jika tidak ada kesalahan yang melekat pada mereka.

David Bergman dalam bukunya *Deaths at Work: Accidents or Corporate Crime* (WEA, 1991) menyarankan agar penuntutan atas kematian di tempat kerja harus diadili hanya berdasarkan dakwaan dan bahwa pengadilan harus dapat menjatuhkan hukuman penjara pada direktur atau manajer yang tidak kompeten. seorang pekerja terbunuh atau terluka parah. Dia telah beberapa kali selama bertahun-tahun mengkritik Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan karena gagal menangani kasus pembunuhan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Sanksi lain telah disarankan, misalnya. pembubaran perusahaan, nasionalisasi, pemantauan kegiatan perusahaan, masa percobaan perusahaan (yang berarti bahwa para profesional, seperti akuntan, mengawasi dan memantau kegiatan perusahaan), pelayanan masyarakat, mencegah perusahaan bekerja di bidang usaha tertentu, melarang perusahaan melakukan kegiatannya kontrak pemerintah, mempublikasikan pelanggaran hukum dengan cara yang resmi. Metode terakhir telah dicoba di AS, namun pengalaman di negara tersebut

menunjukkan bahwa kontrol ketat terhadap iklan semacam itu harus dilakukan, jika tidak, perusahaan hanya akan menerbitkan iklan di jurnal yang jarang dibaca. Sejak tahun 1948, Sir Roland Burrows menulis dalam 'Tanggung jawab perusahaan berdasarkan hukum Inggris' (1948) 1 *Journal of Criminal Science* 1 di 19, 'Pembatasan kegiatan dan bahkan pemusnahan karena penyitaan bukanlah hal yang mustahil dan tidak masuk akal.'

Pekerjaan penelitian harus dilakukan untuk melihat apakah metode ini akan efektif. Pencegahan, seperti pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan atau peningkatan jumlah Inspektur Kesehatan dan Keselamatan, mungkin lebih bermanfaat dibandingkan hukum pidana, dan hukum pidana harus digunakan untuk mencegah bahaya. Undang-undang yang dibuat untuk perorangan tidak selalu dapat dengan mudah diterapkan pada perusahaan. Tentu saja saat ini terdapat ketidakseimbangan antara penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk kasus pengutulan ringan dan non-penuntutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bawah kesehatan dan keselamatan kerja serta polusi, dimana penuntutan dipandang sebagai tindakan terakhir. setelah berbagai teguran. Jika hukum pidana berperan dalam mengatasi permasalahan sosial modern seperti polusi dan kebersihan makanan, maka prinsip tanggung jawab perusahaan harus jelas dan ditegakkan. Reformasi tanggung jawab perusahaan dan pembunuhan tidak disengaja sangatlah penting. Kesulitan di satu bidang diperburuk oleh kesulitan di bidang lain.

Terlepas dari argumen-argumen yang diuraikan dalam bagian ini, kadang-kadang dikatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak ada gunanya. Para penulis buku teks terkenal, Smith dan Hogan, *Criminal Law*, edisi ke-10 (Butterworths, 2002) 206, menulis, seperti yang mereka lakukan dalam edisi sebelumnya: 'Perlunya tanggung jawab pidana korporasi menunggu demonstrasi.' (Komentar ini tidak menjelaskan hal tersebut. muncul dalam edisi kedua belas, 2008, OUP, edisi kedua diedit oleh D. Ormerod.)

G. R. Sullivan berkomentar 'Mengekspresikan kesalahan perusahaan' (1995) 15 *OJLS* 281 di 289:

Jika kita mengikuti Smith dan Hogan, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan, polusi, kebersihan, dll. akan dihapuskan dari perusahaan dan hanya dibatasi pada individu saja. Ini akan menjadi deregulasi yang melampaui imajinasi para pelaku pasar bebas yang paling doktriner. Dalam penegakan hukum pidana terhadap perseroan terbatas, kita harus terus mengupayakan perbaikan besar dalam standar keselamatan.

Usulan Komisi Hukum

Komisi Hukum menerbitkan Lapornya No. 237, Perundang-undangan KUHP: Pembunuhan Tidak Disengaja, pada tahun 1996. Laporan tersebut menyarankan kelanjutan prinsip identifikasi, namun tidak merekomendasikan perluasan tanggung jawab perwakilan terhadap pembunuhan tidak disengaja di perusahaan atau penerapan doktrin tersebut. agregasi. Oleh karena itu, OLL Ltd, di atas, tidak akan terpengaruh oleh perubahan hukum apa pun. Usulan utamanya adalah pelanggaran baru berupa pembunuhan korporasi, sebuah pelanggaran khusus yang hanya berlaku bagi perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinyatakan

bersalah melakukan tindak pidana apabila '(a) kegagalan pengelolaan yang dilakukan oleh korporasi menjadi penyebab atau salah satu penyebab meninggalnya seseorang; dan (b) kegagalan tersebut merupakan tindakan yang jauh di bawah apa yang dapat diharapkan dari korporasi dalam situasi tersebut'. Kegagalan manajemen pada gilirannya didefinisikan sebagai kegagalan manajemen atau organisasi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan orang-orang yang dipekerjakan atau terkena dampak kegiatannya. Kegagalan manajemen dapat menjadi 'penyebab kematian seseorang meskipun penyebab langsungnya adalah tindakan atau kelalaian seseorang'. Penekanan pada manajemen menunjukkan pergeseran dari membebaskan tanggung jawab perusahaan berdasarkan pada pengidentifikasian arah pikiran dan kemauan lembaga yang lebih tinggi dengan perusahaan. Hukumannya berupa denda dengan kemungkinan sanksi baru, perintah perbaikan. Perintah ini merupakan perintah yang akan digunakan oleh pengadilan untuk mengarahkan perusahaan 'untuk mengambil langkah-langkah tersebut, dalam waktu yang ditentukan oleh perintah tersebut, untuk memperbaiki kegagalan yang dipermasalahkan dan masalah apa pun yang menurut pengadilan merupakan akibat dari kegagalan tersebut dan merupakan akibat dari kegagalan tersebut. penyebab atau salah satu penyebab kematian'.

Definisi pembunuhan korporasi sama dengan dugaan tindak pidana pembunuhan karena kecerobohan yang disebutkan dalam Bab 12, dengan perbedaan bahwa sehubungan dengan orang perseorangan, risiko kematian atau cedera serius harus jelas bagi orang yang berakal sehat dalam posisinya. dan dia pasti mampu menghargai risikonya. Dalam hal ini, Laporan ini berbeda dengan Makalah Konsultasi No. 135, Pembunuhan Tidak Disengaja, yang mana Komisi Hukum telah merekomendasikan bahwa dalam hal ini tidak boleh ada perbedaan antara perorangan dan badan hukum. Komisi Hukum berkomentar (pada paragraf 8.1) bahwa pembunuhan terhadap korporasi adalah 'mencontoh pelanggaran yang kami usulkan yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sangat ceroboh, namun dengan adaptasi yang ditentukan oleh karakteristik khas korporasi'. Ciri-ciri tersebut mencakup fakta bahwa suatu risiko tidak dapat terlihat jelas oleh perusahaan karena ia tidak dapat dirasakan dan karena alasan yang sama perusahaan tersebut tidak mampu menilai suatu risiko. Komisi Hukum mengecualikan karakteristik berikut ini sebagai hal yang tidak relevan dengan tanggung jawab perusahaan atas kematian: 'Dalam menilai perilaku seorang terdakwa, hukum harus secara adil mempertimbangkan karakteristik pribadi yang mungkin membuatnya lebih sulit untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin dialami oleh orang lain. ; namun pertimbangan yang sama hampir tidak berlaku bagi tergugat korporasi (paragraf 8.3, penekanan dihilangkan). Salah satu dampak dari penghapusan persyaratan kejelasan bagi orang yang berakal sehat dalam posisi terdakwa dan kapasitasnya untuk menilai risiko adalah bahwa orang di perusahaan tidak perlu menyadari bahwa perilaku perusahaan telah gagal. di bawah standar yang disyaratkan.

Kondisi bahwa perilaku perusahaan berada jauh di bawah standar yang dapat diharapkan secara wajar dalam situasi tersebut berarti bahwa pelanggaran hanya terjadi jika kelalaiannya sangat besar dan bahwa juri dapat mempertimbangkan kepraktisan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. kematian atau cedera serius, manfaat sosial dari

kegiatan tersebut dan apakah terdapat penyimpangan dari norma-norma industri yang bersangkutan. Kegagalan manajemen harus dibedakan dari kelalaian yang dilakukan oleh seorang karyawan (Komisi Hukum dapat menjelaskan konsep ini secara lebih mendalam) namun, meskipun hubungan sebab-akibat masih menjadi pertanyaan bagi juri, kematian mungkin masih disebabkan oleh perusahaan meskipun ada kesalahan dalam manajemen. Kecerobohan karyawan adalah penyebab langsung kematian: 'Kegagalan manajemen mungkin disebabkan oleh kegagalan mengambil tindakan pencegahan terhadap kegagalan yang sebenarnya terjadi. Kesalahan perusahaan terletak pada kegagalannya mengantisipasi kelalaian karyawannya yang dapat diduga terjadi, dan setiap akibat dari kelalaian tersebut harus dianggap sebagai konsekuensi kesalahan perusahaan'.

Jika tidak, maka perusahaan akan lepas dari tanggung jawab dengan berargumentasi bahwa perusahaan tersebut hanya menyebabkan kematian dan bukan penyebab hukumnya. Usulan ini, yang menyimpang dari hukum sebab-akibat normal yang dibahas dalam Bab 2, diilustrasikan dengan mengacu pada bencana Zeebrugge: 'Bahkan jika penyebab langsung kematian tersebut adalah tindakan asisten bosun dan Chief Officer atau keduanya, penyebab lain dari kematian tersebut adalah akibat dari tindakan asisten bosun dan Chief Officer atau keduanya. penyebabnya adalah kegagalan perusahaan dalam merancang sistem yang aman untuk pengoperasian kapal ferinya; dan kegagalan itu jauh di bawah alasan- telah diharapkan dengan baik'. Oleh karena itu, perusahaan tersebut dapat dinyatakan bersalah atas pembunuhan korporasi. Hanya jika tindakan atau kelalaian seseorang benar-benar memutuskan rantai sebab akibat barulah perusahaan dapat lepas dari tanggung jawab. Perlu juga dicatat bahwa perusahaan dan masing-masing karyawan dapat dihukum atas dugaan kejahatan pembunuhan karena kecerobohan dan pembunuhan yang sembrono. Misalnya, sebuah perusahaan dapat dihukum karena karyawannya mengetahui adanya risiko serius namun tetap melanjutkan tindakannya. Kritik utama dunia usaha terhadap proposal yang mendasarkan tanggung jawab pada 'kegagalan manajemen' adalah bahwa perusahaan tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari tanggung jawab.

Definisi pembunuhan korporasi, diperkirakan, akan mempermudah penuntutan menjadi lebih berhasil dibandingkan saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi Zeebrugge. Revisi ini sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap perilaku perusahaan yang mematikan. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai kecelakaan, tragedi, atau bencana kini dipandang sebagai pembunuhan tidak disengaja, dan terdapat kekesalan karena perusahaan tidak pernah dihukum di masa lalu. Penghapusan hambatan terhadap hukuman mungkin bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat, namun reformasi masih perlu dilakukan dan kemudian dilaksanakan sepenuhnya. Namun demikian, terdapat argumen bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat memberikan hasil yang berbeda dalam skenario Zeebrugge. Jika perusahaan bertindak sebagaimana perusahaan berpengalaman dalam bidang bisnis yang sama akan bertindak, hal tersebut tidak jauh di bawah apa yang dapat diharapkan secara wajar.

Komisi Hukum mengusulkan sanksi baru, perintah perbaikan, sebagai tambahan atau pengganti denda. Perusahaan mungkin diminta untuk menghilangkan hal yang menyebabkan

kematian. Penuntut, Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan atau badan yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri harus mengajukan permohonan perintah tersebut dan kedua belah pihak dapat memberikan bukti mengenai kata-katanya. Sanksi jika tidak mematuhi perintah tersebut adalah denda. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak mematuhi perintah tersebut, hukum tidak akan menjamin penghapusan masalah yang menyebabkan kematian tersebut. Pembunuhan korporasi merupakan kejahatan yang tidak memerlukan kesengajaan atau kecerobohan subjektif, pilihan atau kemampuan untuk meramalkan akibat. Dalam konteks pendekatan bahasa Inggris modern terhadap *mens rea*, hal ini bukanlah kejahatan *mens rea*. Hal ini didasarkan pada kecerobohan yang besar. Dengan demikian, tidak akan ada kesulitan dalam membuktikan niat atau pandangan ke depan. Tanggung jawab perusahaan akan mempunyai struktur tersendiri yang terpisah dari tanggung jawab perseorangan. Pemisahan tanggung jawab pidana individu dan korporasi ini berarti bahwa perusahaan besar dapat dihukum karena melakukan pelanggaran serius, karena tidak perlu mengacu pada keadaan pikiran dan tindakan pikiran yang mengarahkan. Komisi berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang akan meningkat jika pelaku tidak dibiarkan melarikan diri, bahwa kelemahan dalam doktrin identifikasi tidak lagi menjadi penghalang untuk menjatuhkan hukuman, dan bahwa perusahaan akan dicegah untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kematian. atau cedera serius. Pembatasan rekomendasi terhadap pembunuhan merupakan konsekuensi dari perhatian Laporan ini terhadap pembunuhan yang tidak disengaja, namun tidak ada yang bisa menghentikan terciptanya pelanggaran baru yang merugikan perusahaan dan kerugian serius. Akan sangat disayangkan jika suatu perusahaan dihukum karena melakukan kejahatan jika korbannya meninggal dunia, tetapi tidak melakukan pelanggaran jika dia masih hidup. Perlu juga dicatat bahwa Laporan ini tidak membahas masalah mendasar, yaitu mencegah karyawan dan orang lain agar tidak terbunuh atau terluka. Rekomendasi mengenai perintah perbaikan hanya berlaku setelah kejadian. Pembunuhan korporasi mungkin menghalangi perusahaan untuk melakukan salah urus yang parah, namun solusi yang disarankan mungkin tidak akan berhasil. Pelatihan dan pengawasan dalam bidang usaha ini mempunyai nilai yang lebih baik dibandingkan dengan hukum pidana.

Reformasi yang dilakukan Komisi Hukum masih terlalu lambat jika dibandingkan dengan reformasi yang terdapat dalam Undang-Undang KUHP Australia tahun 1995, yang berlaku untuk pelanggaran federal. Selain doktrin identifikasi (yang diperluas ke 'agen manajerial tinggi'), tanggung jawab dikenakan jika budaya perusahaan telah menyebabkan situasi di mana pelanggaran telah terjadi. Budaya perusahaan diturunkan dari sikap, tindakan, kebijakan, praktik, atau aturan perusahaan (atau departemen dalam perusahaan). Tujuannya untuk menjerat perusahaan-perusahaan besar yang saat ini tidak bertanggung jawab karena telah mendelegasikan kewenangannya kepada karyawan tingkat bawah. Reformasi ini sama sekali tidak sejalan dengan gagasan Fisse dan Braithwaite 'The alokasi tanggung jawab atas kejahatan korporasi' (1988) 11 Sydney LR 468 untuk menyimpulkan kesalahan korporasi dari kemandirian perusahaan dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya. Gagasan ini akan menghapuskan persyaratan kesalahan yang ada pada masa *Actus Reus*. Pendekatan ini

terkadang disebut 'kesalahan reaktif'. Kesulitannya adalah menemukan pelanggaran yang tepat yang dapat dituduhkan kepada suatu perusahaan. Jika orang yang meninggal terbunuh di tempat kerja karena kelalaian perusahaan, maka pembunuhan berencana adalah tindakan yang tepat karena kesalahan reaktif ditujukan untuk melakukan tindakan setelah kejahatan tersebut. Jika terjadi pelanggaran baru, dapat dikatakan bahwa hal ini akan memarginalisasi kegagalan perusahaan dalam melakukan tindakan pencegahan.

6.4 USULAN PEMERINTAH

Pada tahun 2000 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Makalah Konsultasi, Reformasi Hukum Pembunuhan Tidak Disengaja: Usulan Pemerintah. Pemerintah menerima rekomendasi Komisi Hukum bahwa pembunuhan korporasi harus dikriminalisasi untuk 'memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum'. Namun, mereka mengusulkan untuk memperluas kemungkinan terdakwa yang berasal dari perusahaan saja ke 'usaha' seperti sekolah, kemitraan, organisasi sukarela, badan amal, dan perwalian rumah sakit (namun tetap mempertahankan sebutan 'pembunuhan perusahaan'). Penuntutan tidak hanya dapat dilakukan oleh Crown Prosecution Service dan Health and Safety Executive tetapi juga oleh badan-badan seperti Otoritas Penerbangan Sipil. Pemerintah juga berpandangan bahwa pejabat perusahaan yang berkontribusi terhadap kegagalan manajemen harus didiskualifikasi dari menjalankan peran manajerial dalam setiap usaha di Inggris, meskipun dalam surat tertanggal 10 September 2002 kepada industri sektor swasta dengan dampak yang fatal/ tingkat cedera parah lebih dari 250 per 100.000 karyawan, Kelompok Kebijakan Kriminal Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa reformasi tidak akan mencakup undang-undang terpisah tentang diskualifikasi. Rekomendasi ini mungkin bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia jika para petugas tidak menyadari kegagalannya. Selain itu, ada usulan agar proses pembunuhan korporasi akan dilanjutkan terhadap perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Kementerian Dalam Negeri selanjutnya mengusulkan agar manajer dan direktur perusahaan dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran jika mereka secara signifikan berkontribusi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Untuk mencegah penghindaran denda, Kementerian Dalam Negeri bertanya-tanya apakah pengadilan seharusnya mempunyai kewenangan untuk membekukan aset perusahaan. Untuk meninjau usulan pemerintah, lihat Bob Sullivan 'Pembunuhan perusahaan beberapa usulan pemerintah' [2001] Crim LR 31.

Pada bulan Oktober 1997, Menteri Dalam Negeri saat itu, Jack Straw, berjanji bahwa pelanggaran pembunuhan korporasi akan diberlakukan. Manifesto Partai Buruh tahun 2001 menjanjikan 'untuk membuat ketentuan yang menentang pembunuhan yang dilakukan oleh perusahaan. Akhirnya Undang-Undang Pembunuhan Korporat dan Pembunuhan Korporasi tahun 2007 mulai berlaku pada tanggal 6 April 2008. Komisi Hukum bermaksud untuk menerbitkan makalah konsultasi mengenai tanggung jawab korporasi secara umum pada akhir tahun 2009.

Undang-Undang Pembunuhan Korporat dan Pembunuhan Korporat 2007

Undang-undang ini mengatur tanggung jawab perusahaan atas kematian di Inggris dan Wales. Ini menggantikan common law yang dihapuskan. Pelanggaran ini disebut pembunuhan korporasi di Inggris dan Wales (s 2(5)). Sebagian besar ketentuan mulai berlaku pada tanggal 6 April 2008. Namun, karena ketentuan ini hanya mengatur tanggung jawab perusahaan atas kematian, dan bukan tanggung jawab perusahaan misalnya atas cedera, yang masih menjadi hukum umum, terdapat kemungkinan adanya bentuk tanggung jawab ganda. Jika suatu perusahaan menyebabkan kematian seseorang dan cedera pada orang lain melalui tindakan kelalaian yang sama, maka kematian tersebut termasuk dalam Undang-Undang namun cedera tersebut tunduk pada hukum umum, dan kemudian berlaku bahkan orang yang terluka tersebut akan meninggal, seandainya dia tidak diselamatkan oleh intervensi paramedis segera. Menurut situs web Komisi Kesehatan & Keselamatan, terdapat 241 kematian terkait pekerjaan pada tahun 2006–2007 (perhatikan bahwa angka ini tidak termasuk kematian akibat penyakit industri seperti asbestosis dan tidak jelas berapa banyak kematian terkait pekerjaan di jalan raya yang terdapat dalam angka tersebut. angka) tetapi 141.350 cedera. Undang-undang ini hanya akan berdampak pada kematian. Perlu ditambahkan bahwa UU ini tidak hanya terbatas pada kematian yang berhubungan dengan pekerjaan dan tidak hanya mencakup pembunuhan terhadap pekerjanya oleh perusahaan, tetapi juga pembunuhan anggota masyarakat. Undang-undang ini difokuskan pada tanggung jawab badan-badan yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada direktur dan manajer senior berdasarkan Undang-undang tersebut, dan mereka tetap bertanggung jawab atas pembunuhan yang tidak disengaja menurut hukum umum karena kelalaian berat. Memang benar, setiap undang-undang pidana membebaskan pertanggungjawaban sekunder kecuali jika Parlemen menetapkan lain dan dalam Undang-Undang Parlemen telah menetapkan demikian. Pengecualian ini mungkin mengejutkan, karena yang menyusun dan melaksanakan kebijakan adalah para direktur dan eksekutif senior, bukan organisasi inkorporeal.

Pasal 1 UU tersebut antara lain berbunyi:

- (1) Suatu organisasi yang menerapkan bagian ini bersalah melakukan pelanggaran jika cara kegiatannya dikelola atau diorganisir –
 - ◆ menyebabkan kematian seseorang, dan
 - ◆ merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban perawatan relevan yang menjadi kewajiban organisasi terhadap almarhum.

Pemerintah mengantisipasi perluasan konsep sebab-akibat melalui Badan Lingkungan Hidup dan pada periode menjelang keputusan House of Lords di Kennedy (No. 2) [2008] AC 269 (lihat Bab 2) akan menghilangkan kebutuhan untuk merujuk pada doktrin *novus actus interveniens* tetapi DPR telah kembali ke undang-undang sebelumnya di Kennedy (No. 2). Masalahnya adalah: jika kematian tersebut disebabkan oleh kelalaian karyawan junior, apakah organisasi juga menyebabkan kematian tersebut dalam pasal 1(1)(a)? Jika tindakan yang dilakukan karyawan bersifat sukarela, maka pada prinsip normal ia bertanggung jawab dan tindakan atau kegagalannya memutus rantai sebab-

akibat, kecuali jika tindakan organisasi tersebut juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembunuhan tersebut. Akan lebih baik untuk mengulanginya dengan menambahkan 'dan organisasi tersebut tetap bersalah meskipun faktanya tindakan atau kelalaian seseorang adalah penyebab langsung kematian'.

Bagian 1 berlanjut:

- (2) Organisasi yang menerapkan bagian ini adalah –
- (a) suatu korporasi;
 - (b) suatu departemen atau badan lain yang tercantum dalam Jadwal 1;
 - (c) kepolisian;
 - (d) suatu persekutuan, atau serikat buruh atau asosiasi pengusaha, yang merupakan pemberi kerja.

Perlu dicatat bahwa meskipun judul undang-undang tersebut mengacu pada pembunuhan tidak berencana yang dilakukan oleh perusahaan, undang-undang tersebut tidak terbatas pada perusahaan saja. Hal ini sejalan dengan Dokumen Konsultasi Kementerian Dalam Negeri, Reformasi Undang-Undang tentang Pembunuhan Tidak Disengaja: Usulan Pemerintah, 2000.

Bagian 1 selanjutnya memberikan:

- (3) Suatu organisasi dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan bagian ini hanya jika cara aktivitasnya dikelola atau diorganisir oleh manajemen seniornya merupakan elemen penting dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Untuk tujuan Undang-undang ini –
- (a) 'tugas kehati-hatian yang relevan' memiliki arti sebagaimana dijelaskan pada bagian 2, dibaca dari bagian 3 sampai 7;
 - (b) pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian yang dilakukan suatu organisasi merupakan pelanggaran 'berat' apabila tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berada jauh di bawah apa yang dapat diharapkan dari organisasi dalam situasi tersebut;
 - (c) 'manajemen senior', dalam kaitannya dengan suatu organisasi, berarti orang-orang yang memainkan peran penting dalam –
 - ◆ pengambilan keputusan tentang bagaimana keseluruhan atau sebagian besar kegiatannya dikelola atau diorganisir, atau
 - ◆ pengelolaan atau pengorganisasian keseluruhan atau sebagian besar kegiatan tersebut.

Penggunaan konsep 'manajemen senior' menimbulkan pertanyaan sejauh mana Undang-Undang tahun 2007 melanggar, sebagaimana seharusnya, dari undang-undang identifikasi sebelumnya, yang menjadi rujukannya. Tentu saja, menurut hukum umum, tidak ada persyaratan bagi satu orang senior tertentu untuk bersalah; dalam hal ini agregasi diperbolehkan berdasarkan Undang-undang tahun 2007. Konsep ini memastikan bahwa tindakan karyawan yang lebih rendah tidak dikaitkan dengan organisasi namun harus dipahami bahwa manajemen seniorlah yang menetapkan kebijakan umum, misalnya perekrutan staf. Sehubungan dengan persyaratan pelanggaran 'berat', pertanyaan apakah

perilaku organisasi berada jauh di bawah apa yang dapat diharapkan dalam situasi tersebut merupakan pertanyaan bagi juri dan tidak dapat dipastikan seberapa jauh di bawah standar yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut. bertanggung jawab secara pidana. Juga tidak jelas apa yang dimaksud dengan 'dalam situasi tersebut': tentunya hal ini tidak dapat berarti bahwa suatu organisasi tidak melanggar kewajibannya ketika organisasi tersebut memutuskan untuk tidak mematuhi karena kekurangan uang dan akibatnya seseorang terbunuh: Organisasi yang bersalah melakukan pembunuhan korporasi. . . bertanggung jawab atas putusan bersalah atas dakwaan denda.

Bagian 2 berbunyi sebagian:

- (1) 'Kewajiban kehati-hatian yang relevan', sehubungan dengan suatu organisasi, berarti salah satu dari kewajiban berikut yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut berdasarkan hukum kelalaian –
 - (a) kewajiban yang harus dibayar kepada para karyawannya atau kepada orang-orang lain yang bekerja untuk organisasi atau yang melakukan pelayanan untuk organisasi tersebut;
 - (b) kewajiban sebagai penghuni tempat;
 - (c) kewajiban yang harus dibayar sehubungan dengan –
 - ◆ penyediaan barang atau jasa oleh organisasi (baik untuk dipertimbangkan atau tidak),
 - ◆ pelaksanaan operasi konstruksi atau pemeliharaan oleh organisasi,
 - ◆ pelaksanaan aktivitas lain apa pun yang dilakukan oleh organisasi secara komersial, atau
 - ◆ penggunaan atau penyimpanan pabrik, kendaraan atau benda lain apa pun oleh organisasi;
 - (d) suatu kewajiban yang harus dibayar kepada seseorang yang, karena alasan menjadi orang dalam ayat (2), merupakan seseorang yang keselamatannya menjadi tanggung jawab organisasi.
- (2) Seseorang termasuk dalam ayat ini jika –
 - (a) ia ditahan di lembaga kustodian atau di tempat penahanan di pengadilan atau kantor polisi;
 - (b) ia ditahan di pusat pemindahan atau fasilitas penahanan jangka pendek;
 - (c) ia diangkut dengan kendaraan, atau ditahan di tempat mana pun, sesuai dengan pengaturan pengawalan penjara atau pengaturan imigrasi;
 - (d) ia tinggal di tempat tinggal yang aman di mana ia ditempatkan;
 - (e) dia adalah pasien yang ditahan.
- (3) Ayat (1) tunduk pada pasal 3 sampai dengan pasal 7.
- (4) Referensi pada ayat (1) pada suatu kewajiban yang terutang berdasarkan hukum kelalaian mencakup rujukan pada suatu kewajiban yang seharusnya terutang berdasarkan hukum kelalaian, tetapi pada ketentuan undang-undang yang mana tanggung jawab dikenakan sebagai pengganti tanggung jawab. di bawah undang-undang itu.

- (5) Untuk keperluan Undang-undang ini, apakah suatu organisasi tertentu mempunyai kewajiban untuk menjaga individu tertentu adalah masalah hukum.
- ◆ Hakim harus membuat temuan fakta apa pun yang diperlukan untuk memutuskan pertanyaan itu.
- (6) Untuk tujuan Undang-undang ini harus diabaikan –
- (a) peraturan hukum umum yang mempunyai dampak mencegah kewajiban kehati-hatian yang harus dibayar oleh seseorang kepada orang lain karena fakta bahwa mereka bersama-sama terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
 - (b) aturan apa pun yang berdampak mencegah kewajiban kehati-hatian yang harus dibayarkan kepada seseorang karena ia menerima risiko kerugian.
- (7) Di bagian ini –
- 'operasi konstruksi atau pemeliharaan' berarti operasi dari salah satu uraian berikut –
- (a) konstruksi, pemasangan, perubahan, perluasan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan, dekorasi, pembersihan, pembongkaran atau pembongkaran –
 - setiap bangunan atau struktur,
 - segala sesuatu yang membentuk, atau akan membentuk, bagian dari tanah, atau
 - setiap tanaman, kendaraan atau benda lainnya;
 - (b) operasi yang merupakan bagian integral dari, atau merupakan persiapan untuk, atau untuk menyelesaikan, setiap operasi dalam paragraf (a);
- 'lembaga pemasyarakatan' berarti penjara, lembaga pelanggaran remaja, pusat pelatihan yang aman, lembaga pelanggaran remaja, pusat pelaku remaja, pusat peradilan anak atau rumah tahanan; 'pasien yang ditahan' berarti ;
- (a) seseorang yang ditahan di tempat mana pun berdasarkan;
 - i. Bagian 2 atau 3 Undang-undang Kesehatan Mental tahun 1983 ('UU 1983'), atau
 - (b) seseorang yang (selain karena alasan penahanan sebagaimana disebutkan dalam ayat (a)) dianggap berada dalam tahanan yang sah oleh;
 - i. pasal 137 UU 1983; pengaturan pengawalan imigrasi' berarti pengaturan yang dibuat berdasarkan pasal 156 Undang-Undang Imigrasi dan Suaka tahun 1999 'hukum kelalaian' mencakup;
 - (a) sehubungan dengan Inggris dan Wales, Occupiers' Liability Act 1957), Undang-Undang Tempat Cacat tahun 1972 dan Undang-Undang Kewajiban Penghuni tahun 1984); 'pengaturan pengawalan penjara' berarti pengaturan yang dibuat berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1991 atau berdasarkan pasal 102 atau 118 Undang-Undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum tahun 1994;
- 'pusat pemindahan' dan 'fasilitas penampungan jangka pendek' mempunyai arti sesuai dengan pasal 147 Undang-undang Imigrasi dan Suaka tahun 1999;
- 'akomodasi yang aman' berarti akomodasi, yang tidak terdiri dari atau merupakan bagian dari lembaga kustodian, yang disediakan untuk tujuan membatasi kebebasan orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Pembatasan terhadap tugas-tugas perawatan yang sudah ada sebelumnya tidak dijelaskan dalam Dokumen Konsultasi Kantor Pusat, yang disebutkan di atas, atau makalah atau laporan konsultasi Komisi Hukum. Mungkin dipertanyakan apakah penggunaan doktrin hukum perdata dalam hukum pidana memiliki tujuan yang berguna: House of Lords dalam Hinks [2001] 2 AC 241 dan Pengadilan Banding dalam Wacker [2003] QB 1207 dapat disebut sebagai pihak yang berwenang dalam hal tersebut. memengaruhi. Tidak jelas apa tujuannya: bagaimanapun juga, manusia, baik secara alami maupun hukum, mempunyai kewajiban untuk tidak membunuh.

Bagian 3 mengecualikan fungsi-fungsi publik tertentu dari cakupan Undang-undang. Bunyinya:

- (1) Kewajiban kehati-hatian apa pun yang harus dibayar oleh otoritas publik sehubungan dengan pengambilan keputusan mengenai masalah kebijakan publik (termasuk khususnya alokasi sumber daya publik atau mempertimbangkan kepentingan publik yang bersaing) bukan merupakan 'kewajiban kehati-hatian yang relevan'.
- (2) Kewajiban kehati-hatian apa pun yang harus dilakukan sehubungan dengan hal-hal yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi publik secara eksklusif bukan merupakan 'kewajiban kehati-hatian yang relevan' kecuali hal tersebut termasuk dalam bagian 2(1)(a), (b) atau (d).
- (3) Kewajiban kehati-hatian apa pun yang harus dibayar oleh otoritas publik berkenaan dengan inspeksi yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi undang-undang bukan merupakan 'kewajiban kehati-hatian yang relevan' kecuali hal tersebut termasuk dalam pasal 2(1)(a) atau (b) .
- (4) Di bagian ini 'fungsi publik yang eksklusif' berarti fungsi yang termasuk dalam hak prerogatif Kerajaan atau, berdasarkan sifatnya, hanya dapat dilaksanakan dengan wewenang yang diberikan;
 - (a) dengan melaksanakan hak prerogatif tersebut, atau
 - (b) oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang;
 'fungsi undang-undang' berarti suatu fungsi yang diberikan oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

Bagian 4, 5 dan 7 masing-masing berkaitan dengan kegiatan militer dan polisi serta perlindungan anak, yang tidak termasuk dalam cakupan buku ini. Namun, Bagian 6, yang membahas keadaan darurat, mungkin relevan.

- (1) Kewajiban kehati-hatian apa pun yang harus dibayar oleh suatu organisasi dalam ayat (2) sehubungan dengan cara organisasi tersebut merespons keadaan darurat bukan merupakan 'kewajiban kehati-hatian yang relevan' kecuali hal tersebut termasuk dalam bagian 2(1)(a) atau (B).
- (2) Organisasi-organisasi yang termasuk dalam ayat ini adalah:
 - (a) otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan di Inggris dan Wales
 - (b) organisasi lain yang menyediakan layanan tanggap terhadap keadaan darurat;
 - ◆ sesuai dengan pengaturan yang dibuat dengan suatu organisasi dalam paragraf (a), atau

- ◆ (jika tidak sesuai dengan pengaturan tersebut) selain berdasarkan komersial;
- (c) badan NHS yang relevan;
 - ◆ suatu organisasi yang menyediakan layanan ambulans sesuai dengan pengaturan
 - ◆ dibuat oleh, atau atas permintaan, badan NHS terkait, atau
 - ◆ dibuat dengan Menteri Luar Negeri atau dengan Menteri Welsh;
 - ◆ suatu organisasi yang menyediakan jasa pengangkutan organ, darah, peralatan atau personel sesuai dengan pengaturan yang disebutkan dalam poin terakhir;
 - ◆ suatu organisasi yang menyediakan layanan penyelamatan;
 - ◆ angkatan bersenjata.
- (3) Untuk tujuan ayat (1), cara organisasi merespons keadaan darurat tidak mencakup cara:
 - (a) perawatan medis dilakukan, atau
 - (b) keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat.
- (4) Keputusan-keputusan dalam ayat ini merupakan keputusan-keputusan mengenai pelaksanaan pengobatan, selain keputusan-keputusan mengenai urutan pemberian pengobatan kepada seseorang.
- (5) Kewajiban kehati-hatian yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan, atau upaya pelaksanaan, operasi penyelamatan di laut dalam keadaan darurat bukan merupakan 'kewajiban kehati-hatian yang relevan' kecuali hal tersebut termasuk dalam pasal 2(1)(a) atau (b).
- (6) Setiap kewajiban kehati-hatian sehubungan dengan tindakan yang diambil –
 - (a) untuk mematuhi arahan berdasarkan Jadwal 3A pada Merchant Shipping Act 1995. (petunjuk keselamatan), atau
 - (b) berdasarkan paragraf 4 dari Jadwal tersebut (tindakan sebagai pengganti arahan), bukan merupakan 'tugas kehati-hatian yang relevan' kecuali hal tersebut termasuk dalam bagian 2(1)(a) atau (b).
- (7) Di bagian ini 'keadaan darurat' berarti keadaan yang sedang terjadi atau akan segera terjadi dan –
 - (a) menyebabkan, atau mungkin menyebabkan, kerugian serius atau memperburuk kerugian tersebut, atau
 - (b) kemungkinan besar menyebabkan kematian seseorang; 'perawatan medis' mencakup segala perawatan atau prosedur yang bersifat medis atau sejenisnya; 'badan NHS yang relevan' berarti;
 - (c) suatu Otoritas Kesehatan Strategis, Perwalian Perawatan Primer, perwalian NHS, Otoritas Kesehatan Khusus atau perwalian yayasan NHS di Inggris 'kerusakan serius' berarti;
 - (d) cedera serius atau penyakit serius (termasuk penyakit mental) pada seseorang;
 - (e) kerusakan serius terhadap lingkungan hidup (termasuk kehidupan dan kesehatan tumbuhan dan hewan);
 - (f) kerusakan serius terhadap bangunan atau properti lainnya.

(8) Yang dimaksud dengan keadaan darurat pada bagian ini meliputi acuan terhadap keadaan yang diyakini sebagai keadaan darurat. Pasal 8(1) mendefinisikan pelanggaran berat bagi juri:

- ❖ Bagian ini berlaku jika;
 - (a) ditetapkan bahwa suatu organisasi mempunyai kewajiban yang relevan terhadap seseorang, dan
 - (b) juri yang memutuskan apakah terdapat pelanggaran berat terhadap kewajiban tersebut.
- ❖ Juri harus mempertimbangkan apakah bukti menunjukkan bahwa organisasi gagal mematuhi undang-undang kesehatan dan keselamatan terkait dengan dugaan pelanggaran, dan jika demikian:
 - (a) seberapa serius kegagalan tersebut;
 - (b) seberapa besar risiko kematian yang ditimbulkannya.
- ❖ Juri juga dapat:
 - (a) mempertimbangkan sejauh mana bukti menunjukkan adanya sikap, kebijakan, sistem, atau praktik yang diterima dalam organisasi yang kemungkinan besar mendorong kegagalan seperti yang disebutkan dalam ayat (2), atau menimbulkan toleransi terhadap kegagalan tersebut.
 - (b) memperhatikan panduan kesehatan dan keselamatan apa pun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Tidak jelas mengapa juri harus mengacu pada kebijakan dan sejenisnya, namun harus mengacu pada undang-undang kesehatan dan keselamatan.

Bagian 8 berlanjut:

- ❖ Bagian ini tidak menghalangi juri untuk memperhatikan hal-hal lain yang mereka anggap relevan.
- ❖ Dalam bagian ini, 'panduan kesehatan dan keselamatan' berarti setiap kode, panduan, manual atau publikasi serupa yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan dan dibuat atau dikeluarkan (berdasarkan ketentuan undang-undang atau lainnya) oleh otoritas yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. peraturan kesehatan dan keselamatan apa pun.

Bagian 9 menambah sanksi biasa berupa denda, kewenangan untuk mengeluarkan perintah perbaikan:

- (1) Pengadilan yang mengadili suatu organisasi yang dihukum karena pembunuhan korporasi. . . dapat membuat perintah (“perintah perbaikan”) yang mewajibkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki –
 - (a) pelanggaran yang disebutkan dalam bagian 1(1) (“pelanggaran yang relevan”);
 - (b) segala hal yang menurut pengadilan merupakan akibat dari pelanggaran yang bersangkutan dan menjadi penyebab kematian;

- (c) setiap kekurangan, sehubungan dengan masalah kesehatan dan keselamatan, dalam kebijakan, sistem atau praktik organisasi yang mana pelanggaran terkait tersebut tampaknya merupakan indikasi di pengadilan.
- (2) Perintah perbaikan hanya dapat diberikan atas permohonan penuntut umum yang menyebutkan syarat-syarat perintah yang diajukan. Perintah tersebut harus berdasarkan syarat-syarat (baik yang diajukan atau yang lain) yang dianggap tepat oleh pengadilan dengan mempertimbangkan setiap pernyataan yang dibuat, dan setiap bukti yang diajukan, sehubungan dengan masalah tersebut oleh penuntut atau atas nama organisasi.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perintah perbaikan, penuntut harus berkonsultasi dengan otoritas penegak hukum atau pihak berwenang yang dianggap tepat dengan mempertimbangkan sifat pelanggaran yang bersangkutan.
- (4) Perintah perbaikan –
 - (a) harus menentukan jangka waktu untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - (b) dapat meminta organisasi untuk memberikan bukti bahwa langkah-langkah tersebut telah diambil kepada otoritas penegakan hukum yang dikonsultasikan berdasarkan ayat (3), dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini dapat diperpanjang atau diperpanjang lebih lanjut atas perintah pengadilan atas permohonan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu atau jangka waktu yang diperpanjang itu.
- (5) Organisasi yang gagal mematuhi perintah perbaikan dianggap bersalah melakukan pelanggaran, dan dapat dikenakan hukuman denda.

Bagian 10 baru. Ini memberi pengadilan wewenang untuk mengeluarkan perintah publisitas:

- (1) Pengadilan yang mengadili suatu organisasi yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan korporasi atau pembunuhan korporasi dapat mengeluarkan perintah (“perintah publisitas”) yang mewajibkan organisasi tersebut untuk mempublikasikan dengan cara tertentu:
 - (a) fakta bahwa ia telah dihukum karena melakukan pelanggaran;
 - (b) rincian pelanggaran tertentu;
 - (c) jumlah denda yang dikenakan;
 - (d) syarat-syarat perintah perbaikan yang dibuat.
- (2) Dalam memutuskan syarat-syarat perintah publisitas yang akan dibuatnya, pengadilan harus:
 - (a) memastikan pandangan dari otoritas penegakan hukum atau pihak berwenang (jika ada) yang dianggap tepat, dan
 - (b) memperhatikan pernyataan apa pun yang dibuat oleh penuntut atau atas nama organisasi.
- (3) Perintah publisitas –

- (a) harus menentukan jangka waktu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (b) dapat meminta organisasi untuk memberikan kepada otoritas penegakan hukum yang pandangannya telah dipastikan berdasarkan ayat (2), dalam jangka waktu tertentu, bukti bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi.
- (4) Sebuah organisasi yang gagal mematuhi perintah publisitas dianggap bersalah melakukan pelanggaran, dan dapat dikenakan hukuman denda.

Pada saat penulisan ini, pasal 10 belum diberlakukan.

Pasal 17 mengatur bahwa penuntutan atas pembunuhan korporasi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan DPP. Ketentuan ini dikritik karena menempatkan penuntutan di tangan pejabat yang ditunjuk pemerintah. Hal ini bertentangan dengan rekomendasi Dokumen Konsultasi Rumah, yang disebutkan di atas, dan Laporan Komisi Hukum No. 237, yang Mengatur KUHP: Pembunuhan Tidak Disengaja, 1996, yang merupakan dasar dari sebagian besar undang-undang tersebut.

Undang-undang ini mungkin tidak menghasilkan lebih banyak penuntutan per tahun dibandingkan sebelum undang-undang tersebut, namun hal ini merupakan puncak dari kekhawatiran masyarakat atas kegagalan perusahaan yang berujung pada kematian.

Ringkasan

Bab ini mengkaji hukum yang berkaitan dengan doktrin vicarious dan tanggung jawab korporasi. Berkenaan dengan pertanggungjawaban perwakilan, doktrin tersebut menimbulkan tanggung jawab salah satu pihak atas perbuatan pihak lain: hal ini jarang terjadi dalam hukum pidana dan jika pembaca telah melakukan Hukum Tort, maka ia tidak boleh berasumsi bahwa hukum gugatan tersebut berlaku dalam hukum pidana. Dimana tanggung jawab perwakilan merupakan pengecualian terhadap prinsip bahwa seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan orang lain. Tanggung jawab luar biasa dalam hukum pidana diuraikan. Ada dua aspek tanggung jawab perwakilan yang dapat menimbulkan kesulitan: bagaimana doktrin tersebut diterapkan pada upaya pembunuhan dan pelaku sekunder. Topik selanjutnya adalah tanggung jawab korporasi: yaitu, kapan perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab pidana? Untuk beberapa pelanggaran seperti pembunuhan, perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban: satu-satunya hukuman untuk pembunuhan adalah penjara seumur hidup namun perusahaan tidak dapat dipenjarakan. Tanggung jawab perwakilan atas perilaku korporasi dan doktrin konstruksi undang-undang yang ekstensif diperiksa sebelum membahas inti perdebatan utama, yaitu doktrin identifikasi. Doktrin ini didasarkan pada teori bahwa pejabat tinggi tertentu di perusahaan seperti anggota dewan direksi adalah perusahaan: apa yang mereka lakukan adalah apa yang dilakukan perusahaan. Kemudian terjadi pembahasan mengenai hal-hal seperti sanksi terhadap pelanggaran korporasi, yang berujung pada reformasi undang-undang, khususnya upaya Komisi Hukum dan pemerintah untuk merevisi undang-undang pembunuhan korporasi, yang pada akhirnya berujung pada Pembunuhan Tidak Sengaja dan Pembunuhan Korporat. Undang-Undang Pembunuhan Perusahaan 2007.

- ❖ Tanggung jawab perwakilan: Jarang sekali dalam hukum pidana seseorang bertanggung jawab atas kejahatan orang lain. Pengecualiannya adalah:
 - (1) gangguan umum dan publikasi pencemaran nama baik;
 - (2) dimana Parlemen secara tegas membuat seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain;
 - (3) dimana undang-undang ditafsirkan dengan efek yang sama melalui doktrin konstruksi ekstensif, otoritas yang paling terkenal adalah *Coppen v Moore* (No. 2) [1898] 2 QB 306;
 - (4) prinsip delegasi. Doktrin ini tunduk pada pembatasan bahwa delegasi harus lengkap (lihat *Vane v Yiannopoulos* [1965] AC 486 (HL)), prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran *mens rea*, dan delegasi harus bertindak dalam lingkup pelanggarannya. atau otoritasnya.

Perlu dicatat bahwa tidak ada tanggung jawab perwakilan atas percobaan kejahatan atau partisipasi sekunder dalam kejahatan.

Terdapat perdebatan yang sudah berlangsung lama mengenai apakah dapat diterima untuk membuat seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Argumen utama yang mendukung hal ini adalah bahwa tanpa hal tersebut, perilaku kriminal tidak akan dihukum; argumen utama yang bertentangan adalah bahwa tanggung jawab pidana harus bersifat pribadi bagi terdakwa.

- ❖ Tanggung jawab perusahaan: Perusahaan mungkin bertanggung jawab secara pidana:
 - (1) undang-undang dapat membebaskan tanggung jawab;
 - (2) perusahaan bertanggung jawab atas pelanggaran tanggung jawab tegas;
 - (3) perusahaan bertanggung jawab atas kelalaian dengan cara biasa (lihat Bab 2);
 - (4) Tanggung jawab perwakilan berlaku bagi perusahaan sebagaimana berlaku bagi perorangan;
 - (5) Secara kontroversial, doktrin identifikasi membuat perusahaan bertanggung jawab atas perilaku dan pola pikir pejabat tinggi perusahaan: lihat *Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass* [1972] AC 153 (HL) dan untuk pelanggaran hukum lihat *Meridian Global Funds Asia Ltd v Securities Komisi* [1995] 2 AC 500 (PC). Terdapat perdebatan mengenai seberapa jauh seseorang dapat melangkah ke bawah dalam hierarki perusahaan untuk menjadikan perusahaan bertanggung jawab dan salah satu kritik utama terhadap bentuk tanggung jawab ini adalah karena lebih banyak hal yang dapat didelegasikan ke bawah dalam rantai komando di perusahaan besar dibandingkan di perusahaan kecil, maka hal ini jauh lebih besar. kemungkinan besar perusahaan kecil akan dimintai pertanggungjawaban pidana dibandingkan perusahaan besar.

Ada beberapa pelanggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh perusahaan. Salah satunya adalah pembunuhan. Hukuman untuk pembunuhan harus penjara seumur hidup dan perusahaan yang bukan perorangan tidak dapat dipenjarakan. Contoh lainnya adalah pemerkosaan: sebuah perusahaan tidak boleh memasukkan penisnya ke dalam satu atau lebih anus, mulut, atau vagina korban.

Argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab pidana korporasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan reformasi lebih lanjut akan segera dilakukan.

BAB 7

MASA BAYI, TEKANAN, PAKSAAN, KEBUTUHAN, TEKANAN KEADAAN

7.1 PENGANTAR PERTAHANAN

Hukum pidana tidak hanya didasarkan pada serangkaian pelanggaran, yang berkaitan dengan pencegahan kerugian akibat sanksi, tetapi juga pada sejumlah pembelaan yang memenuhi syarat pelanggaran tersebut. Seperti yang akan terlihat, beberapa pembelaan (seperti pembelaan diri) berlaku untuk semua pelanggaran, sementara beberapa pembelaan hanya berlaku untuk beberapa pelanggaran (misalnya pengurangan tanggung jawab hanya berlaku untuk pembunuhan dan mengurangi pelanggaran menjadi pembunuhan tidak disengaja; paksaan tidak berlaku untuk pembunuhan, percobaan pembunuhan dan beberapa bentuk pengkhianatan). Seseorang dapat menganalisis semua pelanggaran ke dalam *actus reus* dan *mens rea*, sehingga tidak ada ruang untuk pembelaan. Pembunuhan akan menjadi pembunuhan di luar hukum dengan niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya. Jika terdakwa membunuh untuk membela diri, maka hal tersebut bukanlah pembunuhan karena pembunuhan tersebut tidak melanggar hukum. Untuk keperluan eksposisi, gaya yang dianut dalam buku ini adalah pertahanan merupakan unsur tersendiri. Pembunuhan untuk membela diri bukanlah pembunuhan karena meskipun terdakwa memang membunuh dan berniat melakukannya, ia mempunyai pembelaan. Metode ini memudahkan pembelajaran karena tidak perlu disebutkan apakah suatu pembelaan tertentu menghilangkan *actus reus* atau *mens rea* (atau kedua-duanya) dan tidak ada kesulitan dalam menyatakan beban pembuktian. Oleh karena itu, seseorang dapat melihat pelanggaran dan pertahanan dengan cara ini: apakah ada *actus reus*? Jika ya, apakah ada *mens rea* yang relevan? Jika ya, apakah terdakwa mempunyai pembelaan? Beberapa pembelaan khusus untuk pelanggaran tertentu, yang paling jelas adalah provokasi, yaitu pembelaan hanya untuk pembunuhan. Kadang-kadang sulit untuk menyatakan apakah suatu perkara merupakan kegagalan penuntut untuk membuktikan bagian dari pelanggaran atau apakah itu merupakan pembelaan. Dalam pemerkosaan, persetujuan perempuan merupakan bagian dari definisi kejahatan. Jika perempuan tersebut menyetujui hubungan seksual, maka tindak pidana pemerkosaan tidak terjadi. Namun, jika seseorang menyetujui apa yang seharusnya disebut sebagai baterai ketika ia terlibat dalam olahraga, maka persetujuan korban tampaknya lebih tepat untuk dijadikan pembelaan dan bukan kegagalan penuntut untuk membuktikan semua unsur kejahatan. Melihat persetujuan sebagai pembelaan terpisah memungkinkan kita untuk mempertimbangkannya secara keseluruhan dan tidak secara independen dalam setiap pelanggaran.

Setiap pertahanan mempunyai aturannya sendiri dan tidak boleh bertukar dengan yang lain. Jika ada tema yang sama, pasti ada semacam penyimpangan pikiran, seperti perubahan kimiawi dalam keadaan mabuk, kurangnya tanggung jawab mental pada masa bayi dan

mungkin dalam keadaan paksaan, atau penurunan tingkat mental seperti pada penyakit jiwa. Tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang yang dipaksa melakukan kejahatan harus mendapat pembelaan dan bahwa seorang anak kecil tidak boleh menerima hukuman karena melanggar hukum pidana ketika dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan salah secara moral. Mengapa menghukum orang yang tidak bisa berubah?

Seperti yang dikatakan Jordan CJ di Turnbull:

Seseorang tidak pernah dianggap dapat dipertanggungjawabkan pidana atas suatu perbuatan yang walaupun secara fisik merupakan perbuatan tubuhnya, tetapi dilakukan dalam keadaan pikirannya tidak normal sehingga sama sekali tidak dapat dianggap sebagai perbuatannya, misalnya. jika dia berjalan dalam tidur, atau masih sangat muda, atau sudah gila, sehingga tidak mampu mengetahui bahwa dia sedang bertindak atau sifat dan kualitas tindakannya.

Perlu dicatat bahwa meskipun permasalahan dalam bab ini dan dua bab berikutnya disebut sebagai ‘pembelaan’, beban pembuktian pada sebagian besar bab ini terletak pada pihak penuntut, yang harus menyangkal pembelaan tersebut tanpa keraguan. Pengecualiannya adalah kegilaan dan berkurangnya tanggung jawab, dimana pembela harus membuktikannya secara tegas tetapi hanya berdasarkan keseimbangan probabilitas.

Sampai saat ini, pembelaan tidak dikategorikan: apakah diterapkan atau tidak. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengklasifikasikan pertahanan. Klasifikasi atau taksonomi utama modern membedakan antara pembenaran dan alasan.

7.2 PEMBENARAN DAN ALASAN

Hukum Inggris dulu membedakan antara pembenaran dan alasan sehubungan dengan pembunuhan. Ada pembunuhan yang dibenarkan, ada pula yang dimaafkan. Perbedaan tersebut menjadi tidak ada relevansinya dengan terdakwa, apapun jenis pembunuhan yang terjadi, dia tidak bersalah. Hingga awal abad kesembilan belas, perbedaan tersebut mempunyai arti penting. Pembunuhan yang dapat dimaafkan menyebabkan barang milik si pembunuh diserahkan kepada Kerajaan. Penyitaan tidak terjadi ketika pembunuhan itu dapat dibenarkan. Namun akhir-akhir ini, sudah menjadi hal yang biasa di AS untuk membagi pembelaan menjadi pembelaan yang memberikan pembenaran dan pembelaan yang memberikan alasan. Pembagian adalah alat analisis. Hal ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pertahanan harus diperluas atau dikurangi. Komentator utamanya adalah G. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*. Pembaca yang mengalami kesulitan dengan konsep pembenaran dan alasan harus melihat pembelaan individu terlebih dahulu dan kemudian kembali ke bagian ini.

Pembenaran berarti bahwa tindakan terdakwa tidak disetujui, misalnya. dalam pembelaan diri, dalam penggunaan kekerasan untuk melakukan penangkapan yang sah, dalam persetujuan, dan dalam hukuman yang sah terhadap seorang anak. Terdakwa tidak tercela karena telah diputuskan bahwa perbuatannya diperbolehkan. Tindakan yang melanggar hukum adalah hal yang sah. Undang-undang tidak berupaya untuk menghalangi

perilaku tersebut: undang-undang tidak berupaya untuk menghukum orang yang melakukan tindakan tersebut. Joshua Dressler menyatakannya sebagai berikut ('Provocation: Partial justification or parsialalasan' (1988) 51 MLR 467, 468): 'Ada perbedaan moral yang besar antara mengatakan bahwa pembunuhan yang disengaja dibenarkan (sebagian atau seluruhnya), dan mengatakan bahwa hal ini sepenuhnya salah tetapi pelakunya sebagian atau seluruhnya secara moral tidak bersalah atas perbuatan salahnya.' Mungkin cara lain untuk menyatakan hal yang sama adalah dengan mengatakan bahwa terdakwa ketika ia bertindak, katakanlah, dalam pencegahan kejahatan, melakukan hal yang sama. tidak melakukan actus reus. Jika terdakwa membunuh penyerang dalam pencegahan serangan yang sah, maka dia tidak bersalah melakukan pembunuhan karena tidak ada pembunuhan di luar hukum. Dia tidak bersalah karena dia tidak termasuk dalam larangan ketika kejahatannya sudah jelas. Oleh karena itu, hukum pidana tidak mempersalahkan perbuatannya. Kita tidak akan melihat keadaan pikiran terdakwa ini. Dalam pembelaan membenaran, karena terdakwa dipandang tidak melakukan kesalahan, aturan membenaran memberikan pedoman bagi warga negara. Seseorang yang mempunyai pembelaan diri tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, orang lain tidak akan melakukan pelanggaran jika mereka melakukan apa yang dia lakukan. Namun, dalam pembelaan beralasan, perilaku terdakwa sendiri diselidiki. Dia tidak bersalah karena tidak ada rasa bersalah yang melekat padanya. Mungkin dia salah memahami kenyataan, dan karenanya dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Dia telah bertindak salah tetapi posisinya sedemikian rupa sehingga dia dimaafkan. Orang gila tidak tercela. Atas dasar ini, pembelaan ini hanya akan memberikan alasan: tekanan baik karena ancaman maupun keadaan, mabuk-mabukan, kesalahan, kegilaan, berkurangnya tanggung jawab, otomatisme, masa kanak-kanak dan provokasi. Pembelaan seperti provokasi dan berkurangnya tanggung jawab tidak sepenuhnya membebaskan terdakwa. Alasan-alasan tersebut terkadang disebut sebagai 'alasan parsial'. Untuk diskusi tentang paksaan, provokasi dan kesalahan, lihat di bawah. Para hakim juga menyatakan hal serupa. Dalam Harding [1976] VR 129 Gowans J menyatakan bahwa paksaan 'sebaiknya digolongkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kriminal karena kemauan atau niat yang dilakukan'.

Satu hal yang dihilangkan dari daftar tersebut adalah keharusan. Pembelaan itu bisa dianggap sebagai membenaran atau alasan. Disarankan agar hal ini menjadi membenaran bila kerugian yang diancamkan kepada terdakwa lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya. Apabila kerugian yang ditimbulkan sama dengan kejahatan yang diakibatkannya, maka dapat dikatakan bahwa pelakunya dimaafkan namun tindakannya tidak dapat dibenarkan. Mungkin hal yang sama juga berlaku terhadap paksaan, baik oleh ancaman maupun karena keadaan, asalkan pelanggaran yang dilakukan lebih ringan dibandingkan tindakan yang diancam. Harus dinyatakan bahwa setidaknya dalam hal tekanan dan kebutuhan, tempat mereka dalam skema ini tidak aman dan mungkin bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika seseorang mengatakan bahwa terdakwa ketika berada di bawah ancaman melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat karena baik dia maupun teladan tersebut tidak dapat melawan, maka pembelaan tersebut bersifat

dalih. Jika ada yang mengatakan bahwa pembelaan didasarkan pada pilihan terdakwa untuk melakukan kejahatan yang lebih ringan, dan melanggar aturan hukum, maka hal tersebut merupakan pembenaran. Membunuh dua orang untuk menyelamatkan satu orang mungkin bisa dimaafkan; itu tidak bisa dibenarkan. Hukum Inggris melihat paksaan sebagai hal yang bisa dimaafkan. Dickson J mengatakan di Mahkamah Agung Kanada dalam *Perka v R* (1984) 13 DLR (4th) 1: *'pujian memang tidak diberikan, tetapi pengampunan diberikan, ketika seseorang melakukan tindakan salah di bawah tekanan.'* Pandangan saat ini tentang perlunya adalah tidak selalu diterima.

L. Vandervort 'Keadilan sosial dalam negara regulasi modern: paksaan, keharusan dan model konsensus dalam hukum' (1987) 6 Law & Phil 205 memperlakukannya sebagai pembelaan atas pembenaran. Komisi Hukum dalam Laporan No. 218 tahun 1993 yang disebutkan dalam bab ini tampaknya memandang paksaan sebagai alasan (pikiran sudah diatasi) namun keharusan sebagai pembenaran (pilihan diperbolehkan). Perbedaan antara kedua bentuk keharusan ini adalah ketika hal tersebut berfungsi sebagai pembenaran, maka harus ada pilihan yang buruk; tidak ada persyaratan seperti itu jika digunakan sebagai alasan. Pada gilirannya, jika alasan tersebut digunakan sebagai alasan bahwa terdakwa telah bertindak atau gagal bertindak karena adanya tekanan yang diberikan kepadanya, namun jika alasan tersebut digunakan sebagai pembenaran, tidak ada persyaratan seperti itu: maka terdakwa dapat bertindak dengan tenang dan rasional. Jika paksaan dapat dibenarkan, maka banyak batasan dalam penerapannya, misalnya paksaan bukan merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, akan hilang. Salah satu kesulitannya adalah politik akan menjadi bagian dari hukum karena seseorang harus mempertimbangkan kejahatan untuk menentukan mana yang lebih kecil.

Masalah serupa juga muncul sehubungan dengan provokasi. Salah satu alasan yang mungkin untuk pembelaan ini adalah bahwa terdakwa telah kehilangan kendali diri dan tidak berencana untuk membunuh; oleh karena itu, sebenarnya dia tidak memilih untuk membunuh; rasa bersalah yang melekat padanya berkurang; oleh karena itu, dia punya alasan. Alasan alasan ini menjelaskan bagian pertama, tapi bagaimana dengan tes 'orang yang berakal sehat'? Terdakwa yang karena alasan-alasan yang masuk akal kehilangan pengendalian diri mempunyai pembelaan, demikian pula orang yang tidak mempunyai alasan yang masuk akal. Dalam kedua kasus tersebut, terdakwa telah merespons dengan cara yang masuk akal. Salah satu penjelasannya adalah mengenai kebijakan: aturan bahwa terdakwa harus melakukan kontrol yang wajar adalah aturan yang mendorong pengendalian diri dalam menghadapi provokasi. Jika pembelaan adalah sebuah pembenaran, maka dapat diterima bahwa beberapa pembunuhan, misalnya pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, dll. pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dapat dibenarkan. Kemarahan itu beralasan. Jika ini adalah alasan sebenarnya, maka keputusan dalam *Smith* [2001] 1 AC 146, yang kini ditolak, masih kontroversial. Jika seseorang dibenarkan melakukan perbuatannya, maka karakteristik pribadi terdakwa tidak boleh dipertimbangkan. Untungnya undang-undang tersebut telah kembali ke posisi sebelum *Smith*. Kesalahan juga menimbulkan masalah. Jika seseorang menerima kesalahan tersebut secara *negative mens rea*, maka hal tersebut bukanlah suatu

pembelaan, melainkan kegagalan untuk membuktikan semua unsur pelanggarannya. Jika kesalahan dalam beberapa hal merupakan pembelaan, argumennya adalah bahwa terdakwa harus dimaafkan karena dia melakukan kesalahan. Profesor Williams [1982] Crim LR 33 menganggap pembelaan diri dapat dibenarkan jika terdapat fakta yang memungkinkan terjadinya kekerasan, namun hanya dapat dimaafkan jika terdakwa salah meyakini bahwa fakta tersebut ada. Disarankan bahwa jika terdakwa yakin bahwa ia bertindak untuk membela diri namun kenyataannya tidak, maka seseorang dapat mengatakan bahwa jika kesalahan tersebut dilakukan secara beralasan, maka ia harus mendapatkan pembelaan, namun jika kesalahan tersebut dilakukan secara tidak wajar, maka ia harus melakukan pembelaan. tidak boleh, karena orang yang melakukan kesalahan yang tidak wajar tetap patut dicela. Namun undang-undang saat ini mengecualikan keduanya: Williams [1987] 3 All ER 411 (CA). Teori ini dapat menjelaskan perbedaan antara kebutuhan menurut sebagian besar pihak berwenang untuk melakukan kesalahan yang masuk akal dalam bentuk paksaan (sebuah alasan) dan fakta bahwa sebuah kesalahan yang jujur sudah cukup untuk membela diri (sebuah pembenaran), namun jika tidak diketahui secara pasti apakah sebuah pembelaan dapat dilakukan. alasan atau pembenaran, perbedaan tersebut kehilangan dasar sebagai alat analisis.

Para akademisi, khususnya di Amerika, yang mencoba memanfaatkan pembagian ini mempunyai sejumlah alasan mengapa dikotomi ini bermanfaat.

- (a) Apabila pembelaan penyerang bersifat pembenaran, maka orang yang diancam oleh tindakan tersebut tidak berhak melawan karena terdakwa yang menggunakan atau mengancam kekerasan bertindak sesuai dengan hukum, sedangkan jika pembelaan bersifat pembenaran maka ia berhak untuk melakukan perlawanan. berhak menolak. Misalnya saja, seseorang tidak berhak menolak penangkapan yang sah oleh polisi, namun ia berhak menolak serangan orang gila, robot, atau anak-anak karena orang tersebut bertindak salah.
- (b) Apabila prinsipal mempunyai pembelaan yang bersifat justifikasi, maka pihak yang membantu prinsipal berhak memberikan bantuan tersebut. Orang yang membantu berperilaku baik. Tindakan yang dapat diterima tidak boleh dianggap kriminal. Namun, jika pembelaannya bersifat dalih, maka pihak sekunderlah yang bertanggung jawab. Kenyataan bahwa perbuatan terdakwa dapat dimaafkan tidak berarti bahwa bantuan dari pembantu juga dapat dimaafkan. Seseorang yang membantu orang lain untuk memukuli korban harus bertanggung jawab sebagai pelengkap bahkan ketika orang lain memiliki pembelaan otomatis. Sebuah 'kejahatan' telah dilakukan; oleh karena itu, dengan menerapkan teori tanggung jawab derivatif (lihat Bab 5), pihak sekunder dapat membantu dan mendukung 'kejahatan' tersebut. Akan tetapi, jika pelaku dapat dibenarkan dalam bertindak seperti yang dilakukannya, maka tidak ada pelanggaran pokok yang dapat dilakukan oleh pihak tambahan.
- (c) Apabila terdakwa mempunyai pembelaan yang dapat dibenarkan, pengadilan tidak harus mencegah terulangnya perilaku tersebut. Pertahanan yang bersifat pembenaran harus mengarah pada upaya untuk menghentikan terulangnya perilaku tersebut. Alasan ini akan mendukung penggunaan semacam pengawasan yang diperintahkan pengadilan

terhadap mereka yang dibebaskan. Hasil ini mungkin bukan sesuatu yang diinginkan oleh seorang terdakwa yang saat ini telah dibebaskan sepenuhnya, katakanlah karena alasan otomatisme. Perbedaan ketiga ini mungkin hanya bersifat definisional, meskipun terlihat penting.

Perbedaan yang lain mungkin adalah bahwa terdakwa hanya mempunyai pembelaan yang bersifat dalih apabila ia mengetahui fakta-fakta yang menimbulkan alasan tersebut, sedangkan dalam pembelaan yang bersifat membenaran, terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab meskipun ia tidak mengetahui fakta-fakta yang menimbulkan membenaran tersebut. Dapat ditambahkan bahwa jika suatu pembelaan diklasifikasikan sebagai membenaran, maka pembelaan tersebut harus dapat diterapkan pada semua pelanggaran; namun, ada yang berpendapat bahwa kebijakan publik bisa saja memberikan efek bahwa seseorang dapat dibebaskan dari kesalahannya untuk beberapa pelanggaran, namun tidak untuk kesalahan yang lain. Misalnya, seseorang dapat dibebaskan dari penyerangan yang menyebabkan luka fisik, namun tidak dapat dibebaskan dari pembunuhan. Tentu saja sulit untuk memahami konsep bahwa seseorang hanya dapat dibenarkan sebagian dalam melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, jika seseorang membunuh, maka ia harus dibebaskan, dan bukan hanya bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja, jika pembelaannya dapat dibenarkan. Disebutkan pula, jika terdakwa melakukan kesalahan dalam hal membenaran, ia mempunyai pembelaan jika kesalahannya dilakukan dengan jujur, sedangkan dalam kaitannya dengan alasan, kesalahan tersebut harus dilakukan dengan alasan yang masuk akal.

Perbedaan antara membenaran dan membenaran, menurut pendapat saya, merupakan hal yang paling penting ketika mempertimbangkan reformasi hukum. Sehubungan dengan salah satu pembelaan, Komisi Reformasi Hukum (Irlandia), Homicide: The Plea of Provocation, Consultation Paper 27 (2003) 105, menyatakan hal ini dengan sangat baik:

Alasan yang kontras antara membenaran dan alasan. . . mencerminkan tujuan kebijakan yang bersaing. Di satu sisi, ada perasaan bahwa hukum pidana harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahan kodrat manusia. Di sisi lain, ada harapan umum bahwa anggota masyarakat harus menerapkan standar minimum pengendalian diri. Aspirasi untuk menetapkan standar yang diilhami oleh harapan ini tidak sejalan dengan rasa empati yang timbul dari kepedulian terhadap kelemahan manusia. Pembelaan terhadap provokasi merupakan kompromi antara tujuan-tujuan kebijakan yang saling bersaing; memang unsur membenaran dan alasan sering kali tercampur dalam pembelaan. Namun, sejarah pembelaan saat ini telah dibentuk oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat memaafkan, sehingga isu mengenai membenaran telah dikesampingkan.

Pembahasan utama dalam bahasa Inggris terdapat pada Bab 1 dari J. C. Smith Justification and Excuse in the Criminal Law (Stevens, 1989). Ia percaya bahwa teori ini berguna dalam kaitannya dengan perlawanan seseorang yang terancam oleh suatu serangan. Seseorang dapat menolak serangan yang dilakukan oleh anak berusia sembilan tahun (masa bayi adalah sebuah alasan), namun seseorang tidak dapat menolak penangkapan yang sah karena

penangkapan tersebut dapat dibenarkan. Namun jika penangkapan itu dilakukan dengan kekerasan, tentu saja seseorang berhak melawan kekerasan tersebut ketika polisi telah melakukan kesalahan mengenai identitas orang yang ditangkapnya. Hasilnya tetap sama, terlepas dari apakah perilaku polisi tersebut dibenarkan atau dimaafkan. Perbedaan kedua, membantu orang yang memiliki pertahanan, akan berhasil dengan baik, kata Smith, pada kondisi ekstrem. Seseorang yang membantu anak berusia sembilan tahun untuk membunuh adalah bersalah berdasarkan doktrin keagenan yang tidak bersalah, sedangkan seseorang yang membantu polisi dalam melakukan penangkapan tidak bersalah melakukan pelanggaran meskipun penangkapan tersebut melanggar hukum karena tidak ada kejahatan yang dilakukan. tempat. Namun, dalam kasus lain, pembagian menjadi alasan dan pembenaran tidak membantu. Jika ada anggapan bahwa polisi yang menembak untuk melakukan penangkapan dapat dimaafkan namun tidak dapat dibenarkan dalam tindakannya, mengapa orang yang membantu mereka dalam melakukan penangkapan harus bersalah karena polisi salah mengira bahwa orang tersebut adalah pelakunya? menangkapnya adalah penjahat yang kejam? Seseorang harus melihat pada apa yang diyakininya, bukan pada apa yang diyakini polisi.

Berkenaan dengan pembedaan kesadaran akan keadaan, Smith berpendapat bahwa apakah terdakwa harus mengetahui keadaan yang membenarkan atau membenarkan perbuatannya, sebagaimana diatur dalam *Dadson* (1850) 4 Cox CC 358 sehubungan dengan penembakan. penjahat yang melarikan diri, merupakan masalah kebijakan, dan tidak dapat ditentukan melalui penyelidikan apakah pembelaan tersebut bersifat pembenaran atau pembenaran. Menurut teori *Dadson* salah, karena polisi itu mencegah kejahatan, sebuah pembelaan yang dapat dibenarkan. Dia mengilustrasikan hal ini melalui pembelaan terhadap masa bayi, yang bersifat pembenaran. Jika seorang anak berusia sembilan tahun mengira dirinya berumur 10 tahun, tentunya ia tidak boleh dihukum karena ia tidak mengetahui alasan yang membenarkan bahwa ia baru berumur sembilan tahun. Hasilnya adalah masalah hukum, dan apa yang diyakini anak tersebut tidak relevan. Argumen serupa menunjukkan bahwa bahkan dalam pembelaan yang bersifat justifikasi, terdakwa harus mengetahui keadaan yang mendasari pembelaan tersebut. Jika Alf membantu Beth membobol Kantor Pos yang dijalkannya, dia pasti bersalah meskipun tanpa sepengetahuannya Beth mengancam keluarganya bahwa dia akan membunuh mereka kecuali dia membantunya.

Dorongan dasar dari komentar mending Profesor Smith tampaknya adalah bahwa pembedaan ini ada kalanya berguna namun tidak boleh dibiarkan mendikte hasil yang bertentangan dengan akal sehat atau kebijakan. Jika hasilnya akan 'merusak' atau 'keterlaluan' maka dikotomi tidak boleh diterapkan. Seperti yang ditulis Smith di tempat lain, [1991] Crim LR 151, dia 'tidak yakin bahwa penerimaan teori tersebut ke dalam hukum Inggris dapat dipraktikkan atau diinginkan. . .'. Kesulitan lainnya adalah mengetahui apakah terdakwa mempunyai alasan atau apakah penuntut gagal membuktikan *mens rea*. Misalnya, ada otoritas baru-baru ini yang berpendapat bahwa kegilaan bukanlah pembelaan terhadap pelanggaran berat karena hal itu berdampak pada *mens rea*. Jika demikian, kegilaan sebenarnya adalah kegagalan penuntut untuk membuktikan semua unsur pelanggaran, dan

perbedaan antara alasan dan pembenaran tidak dapat diterapkan. Ada banyak kritik Amerika terhadap dikotomi ini. Buku seperti ini tidak bisa membahas semuanya. Salah satu cara untuk memahami literatur ini adalah melalui 'Rekonstruksi pembelaan pidana: pentingnya pembenaran' (1986) oleh T. Morawetz 77 JCL & Crim 277. Meskipun terdapat kritik seperti itu, istilah-istilah tersebut menyusup ke dalam wacana hukum pidana Inggris dan dianut oleh Komisi Hukum pada tahun rancangan KUHP tahun 1989. Pasal 45 (1) merujuk pada 'Perbuatan yang dibenarkan atau dibenarkan oleh' undang-undang.

Ringkasan satu kalimat pembedaannya adalah bahwa terdakwa yang mempunyai alasan telah bertindak benar; dia yang memiliki alasan bertindak dalam semacam kecacatan. Ringkasan satu kalimat lain dari undang-undang tersebut adalah: 'Hukum pidana Inggris tidak membuat perbedaan yang jelas antara pembenaran dan alasan.' (Per Brooke LJ in *Re A (Children) (Si Kembar Siam: Pemisahan Bedah)* [2001] Fam 147.) Apakah seharusnya demikian untuk buku teori hukum pidana.

MASA BAYI

Undang-undang ini membebaskan bayi di bawah usia 10 tahun dari tanggung jawab atas tindakan kriminal atau kelalaian. Pembelaan terhadap masa bayi (terkadang disebut non-usia) berlaku untuk semua kejahatan termasuk pelanggaran tanggung jawab ketat. Oleh karena itu, pembelaan ini tidak didasarkan pada tidak adanya kapasitas mental untuk melakukan pelanggaran. Kebijakannya sepertinya anak-anak tidak bisa membedakan mana (moral) yang benar dan salah. Dapat ditambahkan bahwa hukuman tidak akan memberikan banyak manfaat, karena beberapa anak di bawah umur tidak dapat menghubungkan hukuman tersebut dengan pelanggaran hukum sehingga tidak akan membuat mereka jera di masa depan. Namun, sejak tahun 1998, anak-anak berusia 10 tahun ke atas diperlakukan seolah-olah mereka adalah orang dewasa untuk tujuan pertanggungjawaban pidana.

- (a) Sampai dengan 10 tahun (yaitu sembilan tahun ke bawah): Seorang anak tidak dapat dihukum atas pelanggaran apa pun: Undang-Undang Anak dan Remaja tahun 1933, pasal 50, sebagaimana diubah dengan Undang-undang dengan nama yang sama tahun 1963, pasal 16. Orang tersebut dapat, bagaimanapun, harus menjalani proses perawatan di pengadilan remaja. Salah satu dampak dari masa bayi adalah tidak adanya rasa bersalah pada anak. Jika orang dewasa mendorong seorang anak untuk melakukan kejahatan dan anak tersebut melakukan *actus reus*, maka anak tersebut adalah agen yang tidak bersalah dan orang dewasa tersebut dianggap sebagai pelaku utama. Lihat Bab 5. Selain itu, karena anak tersebut tidak bersalah atas pencurian, maka orang yang seharusnya bersalah menangani barang curian tersebut tidak bersalah karena barang tersebut tidak dicuri. Dalam *Walters v Lunt* (1951) 35 Cr App R 94 (DC) seorang anak berusia tujuh tahun mengambil sepeda roda tiga milik anak lain dalam keadaan di mana, jika ia sudah dewasa, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pencurian. Karena ia tidak dapat dihukum, sepeda roda tiga tersebut tidak dicuri dan orang tuanya tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang sekarang disebut penanganan.

(b) 10 sampai 13 (inklusif): Hingga tahun 1998 terdapat anggapan yang dapat dibantah bahwa anak tidak dapat membentuk mens rea. Anggapan ini dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai 'kebijaksanaan yang nakal', yaitu bahwa anak tersebut mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah secara moral atau serius. Undang-undang ini disetujui dalam Buku Putih, Kejahatan, Keadilan dan Perlindungan Masyarakat, Cm 965, 1990. 'Pemerintah tidak bermaksud untuk mengubah pengaturan ini yang memberikan ruang bagi fakta bahwa pemahaman, pengetahuan dan kemampuan berpikir anak-anak masih terbatas. berkembang.' Anggapan tersebut tidak lagi menyelamatkan anak-anak dari hukuman gantung, namun tetap menjadi perlindungan bagi anak-anak. Setiap anak harus diperiksa satu per satu.

Doktrin ini telah mendapat serangan selama beberapa waktu karena penerapannya yang berbeda terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga yang baik, yang – karena mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah – lebih besar kemungkinannya untuk dihukum dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga yang buruk, dan karena – di suatu era pendidikan untuk semua – anak-anak mengetahui kapan mereka melakukan kesalahan. Namun harus dikatakan bahwa kata-kata Lord Lowry dalam *C v DPP* [1996] 1 AC 1 'pendidikan formal yang lebih baik, dan kecanggihan yang lebih dini, tidak menjamin bahwa anak akan lebih mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah'. House of Lords menerapkan kembali undang-undang yang menyatakan bahwa bukti bahwa anak tersebut melakukan *actus reus* tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia mengetahui bahwa tindakannya benar-benar salah, tidak peduli apakah tindakannya mengerikan atau dinilai sebagai kesalahan serius oleh orang biasa, dan bukti tersebut bahwa anak tersebut mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah nakal tidak menunjukkan bahwa dia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan kesalahan yang serius. Namun, undang-undang yang ada saat itu dikutuk oleh beberapa Yang Mulia. Lord Jauncey adalah perwakilannya: 'Hampir merupakan penghinaan terhadap akal sehat untuk berasumsi bahwa seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun yang mencuri mobil bertenaga tinggi, merusak mobil lain saat mengendarainya, menabrak seorang petugas polisi berseragam dan kemudian melarikan diri ketika dia sedang mengemudi. dihentikan tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan.' Dia (seorang hakim Skotlandia) juga mencatat bahwa anggapan tersebut tidak berlaku di Skotlandia.

House of Lords di *C v DPP* menyerukan revisi undang-undang tersebut oleh parlemen, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan tahun 1998. Komisi Hukum dalam rancangan KUHP tahun 1989, sebelumnya tidak merekomendasikan perubahan karena tidak ingin melihat perubahan tersebut. perluasan penggunaan hukum pidana dalam menangani anak. Negara-negara Eropa sangat bervariasi dalam usia minimum tanggung jawab pidana. Jumlahnya tujuh di Siprus, Irlandia, Liechtenstein, dan Swiss, serta di Irlandia Utara dan Skotlandia, namun 16 di Andorra, Polandia, Portugal, dan Spanyol, serta 18 di Belgia dan Luksemburg. Seruan ini ditanggapi oleh pemerintahan Partai Buruh.

Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan tahun 1998, pasal 34, menghapuskan anggapan yang dapat dibantah bahwa anak-anak berusia 10 –13 tahun tidak bersalah

melakukan kejahatan kecuali, selain *actus reus* dan *mens rea*, penuntut membuktikan bahwa mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang melanggar hukum. salah besar. Makalah Konsultasi Kementerian Dalam Negeri, Mengatasi Kejahatan Remaja, 1997, mengusulkan untuk menghapuskan anggapan tersebut karena:

- (a) Seorang anak di atas 10 tahun dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah pada usia wajib belajar universal;
- (b) Anak tersebut tidak lagi membutuhkan perlindungan dari hukuman negara karena pengadilan remaja mempunyai banyak pilihan hukuman;
- (c) Anggapan tersebut tidak masuk akal karena dapat dibantah dengan menunjukkan bahwa perkembangan mental terdakwa normal untuk anak pada usia tersebut, namun terdakwa dianggap tidak mengetahui benar dan salah;
- (d) Kepentingan keadilan dan korban tidak terpenuhi dengan tidak memidana anak;
- (e) Penghentian penuntutan bukan merupakan kepentingan pelaku muda jika hal ini berarti hilangnya kesempatan untuk mengambil tindakan yang tepat guna mencegah terulangnya kembali pelanggaran; dan
- (f) 'Keadilan paling baik ditegakkan dengan mengizinkan pengadilan untuk mempertimbangkan usia dan kedewasaan anak pada saat dijatuhi hukuman, bukan dengan mengikat pengadilan untuk berasumsi bahwa anak-anak normal tidak mampu melakukan penilaian moral yang paling mendasar'.

Buku Putih, *No More Excuses*, Cm 3809, 1997, menekankan bahwa anak-anak berusia 10 –14 tahun mengetahui perbedaan antara kenakalan dan perbuatan salah yang serius dan, oleh karena itu, anggapan tersebut bertentangan dengan akal sehat. Selain itu, alasan tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran.

Pandangan umum yang ada adalah bahwa pertanggungjawaban pidana anak usia 10 – 13 tahun kini disamakan dengan pertanggungjawaban pidana orang yang lebih tua. Namun ada pandangan berbeda yang dikemukakan oleh N. Walker 'The end of an old song' (1999) 149 NLJ 64. Hal ini menyatakan bahwa meskipun anggapan tersebut dihapuskan, anak-anak masih dapat memperoleh pembelaan jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah besar. Harus dikatakan bahwa hal inilah yang ditolak oleh Buku Putih. Untuk kasus yang mendukung pandangan Walker, lihat *Crown Prosecution Service v P* [2007] EWHC 946 (Admin). Namun, dalam *T* [2008] EWCA Crim 815 pengadilan menolak *CPS v P*, dengan menyatakan bahwa pasal 34 dari Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan tahun 1998 tidak hanya menghapuskan anggapan ketidakmampuan yang dapat dibantah tetapi juga seluruh konsep bahwa seorang anak berusia 10 –13 tahun inklusif tidak dapat melakukannya. bersalah atas kejahatan apa pun.

Masa bayi dan hak asasi manusia

Menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 10 tahun tidak melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Dalam *T v UK* [2000] Crim LR 187, ECHR berpendapat bahwa tidak ada 'standar umum di antara negara-negara anggota Dewan Eropa mengenai usia minimum tanggung jawab pidana. Sekalipun Inggris dan Wales termasuk di antara sedikit yurisdiksi Eropa yang menerapkan batas usia yang rendah untuk bertanggung

jawab pidana, usia sepuluh tahun tidak dapat dikatakan terlalu muda sehingga berbeda secara tidak proporsional dari batas usia yang diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya.' Oleh karena itu, ada tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 3, yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Usia tanggung jawab pidana adalah 8 tahun di Skotlandia. Namun Pengadilan di T v UK mengatakan bahwa: '. . . Adalah penting bahwa seorang anak yang dituduh melakukan suatu pelanggaran ditangani dengan cara yang mempertimbangkan sepenuhnya usianya, tingkat kedewasaan dan kapasitas intelektual dan emosionalnya, dan bahwa langkah-langkah diambil untuk meningkatkan kemampuannya untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses persidangan.'. Pengadilan menyatakan bahwa persidangan para terdakwa dalam T v UK memang melanggar Pasal 6 karena negara gagal memastikan bahwa anak-anak tersebut memahami sifat proses pidana yang dilakukan terhadap mereka.

7.3 PAKSAAN

Hukum paksaan dapat dilihat sebagai hasil dari dua prinsip yang saling bertentangan. Yang pertama dikemukakan oleh Sir James Fitzjames Stephen dalam bukunya *History of the Criminal Law of England* (Sweet & Maxwell, 1883) 107:

Tentu saja merupakan suatu kemalangan bagi seseorang jika ia ditempatkan di antara dua api, namun akan menjadi kemalangan yang jauh lebih besar bagi masyarakat luas jika para penjahat dapat memberikan impunitas kepada agen-agen mereka dengan mengancam mereka dengan kematian atau kekerasan jika mereka menolak untuk melakukan hal tersebut. menjalankan perintah mereka.

Sentimen ini disetujui oleh Pengadilan Banding di *Gotts* [1991] 2 Semua ER 1. Undang-undang ini ada sebagai pencegah bagi orang-orang yang menyerah pada ancaman. Alasan yang kontras diadopsi oleh Pengadilan Banding lainnya di *Ortiz* (1986) 83 Cr App R 173:

Inti dari pembelaan ini adalah bahwa kehendak subjek ancaman tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri karena ketakutan yang ditimbulkan oleh ancaman tersebut.

Menghukum seseorang dalam situasi paksaan adalah tindakan yang tidak manusiawi. Orang-orang ini tidak bersalah. Hukuman tidak akan ada gunanya. Ungkapan yang terkadang digunakan dalam konteks ini adalah bahwa tindakan terdakwa 'secara moral tidak disengaja'. Dia mau tidak mau melakukan hal yang sama, meskipun tindakannya bukan tanpa disengaja karena dia mempunyai kendali atas anggota tubuhnya: memang, dia mungkin mempunyai *actus reus* dan *mens rea* atas pelanggaran tersebut.

Alasan kedua diadopsi oleh Komisi Hukum dalam Laporanannya No. 83, Pembelaan atas Penerapan Umum, 1978. Paksaan harus dilihat sebagai sebuah konsesi terhadap kelemahan manusia: terdakwa telah memilih satu kejahatan, yang jelas merupakan pelanggaran hukum, ketika dihadapkan pada dua pilihan kejahatan, yang kedua adalah menderita cedera serius

atau kematian baik secara pribadi atau pihak ketiga (lihat nanti untuk kemungkinan kualifikasi proposisi ini). Pengadilan Banding mengulangi alasan 'pilihan kejahatan' dalam Abdul-Hussain [1999] Crim LR 570 karena dugaan kejahatan harus merupakan 'respon yang masuk akal dan proporsional' terhadap ancaman tersebut. Pandangan Komisi Hukum diterima oleh House of Lords dalam Howe [1987] AC 417. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi dalam Shepherd (1988) 86 Cr App R 47, alasan ini gagal untuk mengungkapkan mengapa paksaan merupakan pembelaan, daripada faktor yang meringankan hukuman. Hal ini juga tidak menjelaskan mengapa paksaan bukanlah pembelaan terhadap semua kejahatan. (Bandingkan provokasi yang mana dengan semua kejahatan kecuali pembunuhan merupakan unsur dalam pengurangan hukuman, bukan pembelaan terhadap pelanggaran tersebut.)

Paksaan dan kewajaran

Dalam kasus penting Graham [1982] 1 WLR 294 terdakwa, seorang homoseksual, tinggal bersama istri dan seorang laki-laki. Dia mengonsumsi obat-obatan untuk mengatasi kecemasan. Laki-laki lainnya, orang yang kejam, cemburu pada istrinya. Atas saran laki-laki tersebut, terdakwa dan laki-laki tersebut membunuh istrinya. Hukuman terdakwa atas pembunuhan dikuatkan. Pengadilan Banding memutuskan bahwa tidak masalah jika ketabahnya dilemahkan oleh obat-obatan. Orang yang sadar tidak akan menyerah. Pengadilan menyatakan bahwa ujian kelemahan manusia adalah: bagaimana reaksi orang yang sadar dan berakal sehat dengan karakteristik terdakwa (ras, jenis kelamin, usia, dll.)? (Sebutan 'sadar' dihilangkan jika tidak ada bukti mabuk. Bahkan dalam provokasi, dari mana tes ini, terdakwa mempunyai pembelaan jika karena mabuk ia yakin ada provokasi padahal sebenarnya tidak ada.) Orang tua yang berakal sehat dan lemah tidak diharapkan mencapai standar ketabahan orang muda yang berakal sehat dan kuat. Mengenai fakta Graham, pertanyaannya adalah: bagaimana reaksi pria biseksual yang berakal sehat? Tes ini diimpor dari pembelaan terhadap provokasi yang kemudian dirumuskan dan disetujui oleh House of Lords di Howe, di atas. Seperti halnya provokasi, ada tes subjektif dan objektif. Apakah dia menyerah? Mungkinkah orang yang berakal sehat dan memiliki karakteristik yang relevan secara hukum akan menyerah? Argumen yang mendukung Graham adalah sebagai berikut. Terdakwa telah melakukan apa yang seharusnya merupakan pelanggaran tetapi bertindak di bawah tekanan. Jika seseorang yang memiliki ketabahan yang wajar mungkin menyerah terhadap ancaman tersebut, dan terdakwa memang melakukannya, maka terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab.

Dalam Bowen [1996] 2 Cr App R 157 Pengadilan Tinggi mengumpulkan proposisi berikut sehubungan dengan permasalahan kedua dari kasus tersebut (Stuart-Smith LJ pada 166 –167):

- (1) Fakta bahwa terdakwa lebih lunak, rentan, penakut atau rentan terhadap ancaman dibandingkan orang normal bukan merupakan ciri-ciri yang sah untuk menginvestasikan orang yang berakal/biasa untuk tujuan mempertimbangkan uji objektif.
- (2) Terdakwa mungkin termasuk dalam kategori orang yang menurut juri kurang mampu menahan tekanan dibandingkan orang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Contoh yang jelas adalah usia, dimana seorang anak muda mungkin tidak sekuat orang

dewasa; mungkin seks, meskipun banyak perempuan pasti menganggap mereka memiliki keberanian moral yang sama besarnya untuk melawan tekanan seperti laki-laki; kehamilan, dimana ada ketakutan tambahan terhadap bayi yang belum lahir; cacat fisik yang serius, yang dapat menghambat perlindungan diri; penyakit mental atau kondisi kejiwaan yang dikenali, seperti gangguan stres pasca-trauma yang menyebabkan ketidakberdayaan yang dipelajari.

- (3) Karakteristik yang mungkin relevan dalam mempertimbangkan provokasi, karena berkaitan dengan sifat provokasi itu sendiri belum tentu relevan dalam kasus adanya paksaan. Jadi homoseksualitas mungkin relevan dengan provokasi jika kata-kata atau tindakan provokatif terkait dengan karakteristik ini; hal ini tidak relevan jika terjadi paksaan, karena tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kaum homoseksual kurang kuat dalam melawan ancaman yang relevan dalam kasus paksaan.
- (4) Karakteristik akibat kekerasan yang dilakukan sendiri, seperti alkohol, obat-obatan atau menghirup lem, tidak relevan.

Tidak jelas mengapa pengadilan berpendapat bahwa 'penyakit mental atau kondisi kejiwaan yang diakui' diperlukan. Diktum ini disetujui oleh Pengadilan Banding di Moseley, tidak dilaporkan, pada tanggal 21 April 1999. Kita harus fokus pada apakah terdakwa ini mampu menolak ancaman tersebut. Juga tidak pasti mengapa beberapa karakteristik yang tercantum dalam (2) dapat mempengaruhi standar ketabahan. Apakah seseorang yang menderita 'kecacatan fisik yang serius', bahkan yang mungkin 'menghambat perlindungan diri', diharapkan mampu menolak tekanan dibandingkan orang yang berbadan sehat? Selain itu, kecanduan, misalnya alkohol, tidak termasuk dalam kategori penyakit mental. Namun referensi tersebut memastikan bahwa orang-orang yang dianiaya dapat mengajukan bukti sebagai keringanan hukuman untuk menunjukkan bahwa keinginan mereka telah dilanggar: Emery (1993) 14 Cr App R (S) 394. Demikian pula, dalam Antar [2006] EWCA Crim 2708 bukti bahwa terdakwa menderita kesulitan belajar dapat diterima dalam menentukan apakah tes obyektif mengenai ketabahan yang masuk akal dapat dipenuhi. Bertentangan dengan asumsi Howe, undang-undang mengenai tes obyektif ini tidak sepenuhnya memasukkan hukum provokasi. Hal ini dijelaskan oleh pengadilan pada (3) tetapi (4) juga berbeda dengan provokasi; lihat Bab 12 yang membahas tentang mengendus lem. Pengadilan berpendapat bahwa IQ rendah bukanlah suatu karakteristik yang membuat mereka yang memiliki IQ kurang berani dibandingkan orang biasa. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dikaitkan dengan orang yang memiliki ketegasan wajar yang digunakan dalam pengujian ini. Namun pengadilan menganggap bahwa gangguan mental dan cacat mental merupakan karakteristik yang relevan. Perbedaan antara kondisi tersebut dan IQ rendah mungkin tidak jelas. Pengadilan di Bowen memutuskan bahwa cacat mental yang mengurangi kemampuan terdakwa untuk melawan ancaman dapat dibebankan kepada orang yang berakal sehat untuk tujuan pemaksaan, namun larangan ini tidak sejalan dengan undang-undang yang disebutkan pada paragraf berikutnya. Perlu dicatat bahwa seperti dalam provokasi, ungkapannya bergeser dari 'orang yang berakal sehat' menjadi 'orang biasa', dan seperti dalam provokasi pada kasus biasa, satu-satunya karakteristik yang relevan adalah usia dan jenis kelamin. Karena keputusan

dalam *Howe dan Bowen the Lords* melemahkan ujian 'orang yang berakal sehat' dalam hal provokasi: *Smith* [2001] 1 AC 146; namun, Dewan Penasihat di *Holley* [2005] 2 AC 580 memulihkan undang-undang pra-*Smith*.

Pengadilan di *Graham* menyatakan bahwa pengujiannya sesuai dengan kebijakan publik. Namun, ada yang mengatakan bahwa ancaman yang sama mungkin lebih menarik bila digunakan terhadap orang yang lemah dibandingkan ancaman pada orang normal. Jika dasar konseptual dari paksaan adalah bahwa individu tidak diharapkan untuk melawan ancaman yang sangat mendesak, maka beberapa orang tidak mampu melawan ancaman seperti orang lain. Namun undang-undang menuntut agar orang yang pemalu sekalipun harus mengikuti standar perilaku yang tinggi: hukum tidak memberikan kelonggaran terhadap kelemahan orang yang pemalu. Fakta bahwa terdakwa rentan (*Horne* [1994] Crim LR 584 (CA)), memiliki kepribadian yang lemah karena pelecehan seksual saat masih anak-anak (*Hurst* [1995] 1 Cr App R 82 (CA)), pernah menderita sakit- pengobatan dan kekerasan (*Moseley*, tidak dilaporkan, 21 April 1999 (CA), yang menegaskan bahwa untuk memasukkan karakteristik mental, penyakit tersebut harus merupakan penyakit yang diakui secara medis) atau tidak stabil (*Hegarty* [1994] Crim LR 353 (CA) 'keadaan neurotik yang sangat tinggi') tidak relevan. Jika karakteristik ini dimasukkan dalam uji keteguhan yang masuk akal, hal tersebut akan melemahkannya. Seseorang yang memiliki keteguhan yang masuk akal menurut definisi bukanlah orang yang memiliki keteguhan rendah. Seperti yang dikatakan pengadilan di *Horne*: 'Seseorang yang memiliki keteguhan yang wajar adalah rata-rata anggota masyarakat; belum tentu seorang pahlawan, bukan seorang pengecut, hanya orang biasa.' Menarik untuk dicatat bahwa ketidakstabilan mental yang dialami terdakwa di *Hegarty* sebelumnya telah memberinya pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab atas tuduhan membunuh istrinya. Mengabaikan poin ketabahan yang masuk akal sehubungan dengan paksaan adalah sebuah penyesatan. Karena orang yang berakal tidak mabuk, maka terdakwa yang mabuk harus diadili berdasarkan standar orang yang berakal sehat. Di *Graham*, terdakwa telah mengonsumsi valium dan alkohol. Pengadilan Banding memutuskan bahwa juri harus mengabaikan fakta bahwa obat-obatan atau minuman atau keduanya telah mengurangi kemampuan terdakwa untuk melawan ancaman. Keadaan mabuknya tidak dapat dikaitkan dengan orang yang berakal sehat ketika menilai bagaimana reaksi orang yang berakal sehat dengan karakteristik yang relevan secara hukum. Kasus *Kingston* [1995] 2 AC 355 (HL) merupakan pengingat akan kemungkinan keracunan yang tidak disengaja. Bisa jadi seorang terdakwa yang minumannya telah dibubuhi racun akan diadili berdasarkan standar wajar orang yang mabuk tanpa disengaja. Kecanduan narkoba yang disebabkan oleh diri sendiri ditolak sebagai karakteristik yang relevan di *Flatt* [1996] Crim LR 576 (CA). Terdakwa kecanduan kokain. Kecanduannya tidak dapat dikaitkan dengan 'orang yang memiliki keteguhan yang masuk akal' ketika menilai penolakannya terhadap pengedar narkoba. Kecanduan ini merupakan keadaan yang disebabkan oleh diri sendiri, bukan suatu karakteristik. Akibatnya, semua karakteristik yang ditimbulkan oleh diri sendiri menjadi tidak relevan. *Flatt* harus dibandingkan dengan *Morhall* [1996] 1 AC 90, dimana House of Lords berpendapat bahwa mengendus lem dapat menjadi karakteristik orang biasa untuk tujuan

pembelaan terhadap provokasi. Para penguji fakta mungkin mengalami kesulitan membayangkan apa yang diminta untuk mereka lakukan, dan mereka tidak terbantu dengan pengecualian bukti-bukti yang cenderung menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketegasan yang masuk akal seperti bahwa ia lemah, rentan atau rentan terhadap ancaman. Tidak dapat dipastikan apakah perubahan dalam hukum provokasi akan berdampak pada pembelaan terhadap paksaan.

Karena tekanan dalam sebagian besar argumen merupakan sebuah alasan dan bukan sebuah membenaran, kita mungkin berharap bahwa tes 'orang yang berakal sehat' akan berperan dan teori tersebut sebagian tercermin dalam kasus hukum. Di Graham, pengadilan juga memutuskan bahwa terdakwa harus mempunyai alasan yang baik atas keyakinannya, dan bahwa keyakinannya harus didasarkan pada alasan yang masuk akal. Terdakwa tidak mempunyai alasan kuat atas keyakinannya jika ia tidak berpikir bahwa ancaman tersebut akan dilaksanakan. Tes obyektif ini juga disetujui di Howe dan diikuti dalam DPP v Davis [1994] Crim LR 600 (DC) dan Abdul-Hussain [1999] Crim LR 570 (CA). Namun, terdapat pandangan sebaliknya, yaitu mengingat semakin berkembangnya subjektivisme di House of Lords (K [2002] 1 AC 462, B v DPP [2000] 2 AC 428, dan G [2004] 1 AC 1034) tidak ada ruang untuk unsur obyektif, kewajaran kesalahan. Bahkan sebelum adanya otoritas ini, dalam Martin [2000] 2 Cr App R 42 Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa sehubungan dengan paksaan dengan ancaman, pengujian keyakinan bersifat subjektif. Terdakwa harus diadili berdasarkan fakta-fakta yang tampak di hadapannya. Mantell LJ mencatat analogi antara paksaan dan kesalahan yang disebutkan Lord Lane CJ dalam Graham. Karena tes kesalahan bersifat subyektif, maka tes tersebut juga harus dilakukan terhadap kedua bentuk paksaan tersebut. Pandangan alternatifnya adalah bahwa kasus ini salah! Salah satu alasan yang menentang Martin adalah: paksaan adalah sebuah alasan; oleh karena itu, apa yang dilakukan terdakwa di bawah tekanan adalah salah; oleh karena itu, ia harus mendapat pembelaan hanya jika ia mempunyai penjelasan yang masuk akal atas tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Dalam Martin Mantell LJ mengaku mengikuti keputusannya sebelumnya dalam kasus paksaan keadaan Cairns [1999] 2 Cr App R 137 (Pengadilan Banding) namun kenyataannya dia telah menggunakan tes obyektif dalam keputusan tersebut ('diyakini secara wajar'). Pengadilan Banding di Safi [2004] 1 Cr App R 14 mengesahkan pertanyaan kepada House of Lords apakah keyakinan terdakwa didasarkan pada alasan yang masuk akal atau (hanya) benar, namun DPR menolak izin untuk mengajukan banding. Namun, dalam Hasan [2005] 2 AC 467 Lords berpendapat bahwa pendekatan obyektif adalah benar. Tuan Bingham berkata: '*. . . tidak ada alasan untuk melonggarkan persyaratan bahwa keyakinan tersebut harus masuk akal dan tulus.*' Oleh karena itu, Martin salah. Perlu dicatat bahwa, asalkan terdakwa cukup yakin bahwa ada ancaman, maka ancaman tersebut sebenarnya tidak ada.

Jika terdakwa mempunyai keyakinan yang masuk akal terhadap ancaman tersebut, maka tidak perlu dibuktikan bahwa ancaman tersebut benar-benar ada: Cairns. Namun, ada pihak berwenang yang menyatakan sebaliknya. Dalam Abdul-Hussain dikatakan bahwa bahaya itu pasti ada 'secara obyektif' dan pernyataan ini disetujui oleh Pengadilan Tinggi

dalam S [2001] 1 WLR 2206. Sayangnya semua kasus ini disidangkan di pengadilan yang sama, dan pihak berwenang tidak konsisten.

Jika RUU KUHP diundangkan, Law Com. 177, 1989, pasal 41(1), akan membalikkan Graham dengan berpendapat bahwa kesalahan apa pun, masuk akal atau tidak, akan menimbulkan pembelaan ('seseorang yang bertindak dengan keyakinan bahwa suatu keadaan ada mempunyai pembelaan bahwa ia akan melakukan hal tersebut.) miliki jika keadaan itu ada'), sedangkan pasal 42(3) akan mempertimbangkan kemampuan terdakwa sendiri untuk melawan. Komisi Hukum terus menyetujui reformasi ini: Laporan No. 218, Perundang-undangan Hukum Pidana – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, 1993. Argumennya adalah bahwa kewajaran berkaitan dengan bukti, bukan hukum substantif. Tentu saja ujian obyektif terhadap kepercayaan terhadap Graham dan Howe terlihat lemah setelah keputusan House of Lords dalam B v DPP [2000] 2 AC 428, K [2002] 1 AC 462 dan G [2004] 1 AC 1034 yang sangat mendukung tes subjektif dari keyakinan yang salah.

Pertanyaan tentang kewajaran masuk akal dalam provokasi karena kita membandingkan terdakwa dengan orang yang mempunyai ketegasan yang masuk akal yang memiliki karakteristik yang sama dengan terdakwa untuk melihat apakah orang yang dihipotesiskan akan melakukan seperti yang dilakukan terdakwa. Namun dalam keadaan paksaan, kejadian tersebut tidak berhubungan dengan karakteristik terdakwa. Mereka disodorkan padanya. Dalam pendekatan ini, uji kewajaran dalam paksaan tidak memiliki fungsi yang sama dengan dalam provokasi, dan orang mungkin bertanya apakah hal ini diperlukan. Barangkali tidak ada gunanya kecuali menolak pembelaan terhadap orang-orang yang seharusnya memilikinya. Tentu saja provokasi dan paksaan bukanlah pembelaan yang dapat dibandingkan secara langsung. Provokasi hanya merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, sedangkan paksaan bukanlah pembelaan terhadap kejahatan tersebut, dan provokasi didasarkan pada hilangnya kendali diri, sedangkan pandangan Inggris modern tentang paksaan adalah bahwa hal tersebut didasarkan pada pilihan kejahatan, terdakwa melanggar hukum untuk menghindari kejahatan yang lebih besar (argumen konsesi terhadap kelemahan manusia).

Untuk daftar sebagian besar batasan dalam pembelaan terhadap paksaan, lihat penilaian Smith J dalam Hurley dan Murray [1967] VR 526 dan Abdul-Hussain [1999] Crim LR 570 (CA). Terdakwa harus mengetahui fakta-fakta yang mendasari pembelaan tersebut.

Efek dari keberhasilan permohonan paksaan

Terdakwa lolos dari hukuman jika penuntut gagal membuktikan adanya paksaan tanpa keraguan. Ada pernyataan yang bertentangan dalam pidato perbedaan pendapat Lord Simon di Lynch v DPP untuk Irlandia Utara [1975] AC 653 tetapi mereka salah: lihat House of Lords, Howe, di atas. Beban pembuktian untuk semua pembelaan terletak pada penuntutan, dengan satu pengecualian hukum umum (kegilaan). Parlemen dapat memberikan tanggung jawab kepada terdakwa namun tidak melakukan hal tersebut karena adanya paksaan (lihat berkurangnya tanggung jawab).

Beban pembuktian

Ada beberapa kasus, seperti Gill [1963] 1 WLR 841, yang menyatakan bahwa penuntut harus menyangkal adanya paksaan. Untuk otoritas Australia lihat Smyth [1963] VR 737. Hakim harus menginstruksikan juri bahwa penuntutlah yang menanggung bebannya. Dikta yang bertentangan dalam Steane [1947] KB 997 tidak benar. Lynch akhirnya menyelesaikan masalahnya. Namun terdakwa menanggung beban pembuktian. Dia harus memberikan bukti bahwa pikirannya dipengaruhi oleh paksaan.

Paksaan, actus reus dan mens rea

Ada tiga teori mengenai bagaimana paksaan cocok dengan actus reus dan mens rea.

- (a) *Terdakwa tidak mempunyai mens rea.* Pendekatan ini berarti bahwa paksaan tidak akan menjadi pembelaan terhadap pelanggaran pertanggungjawaban ketat, bertentangan dengan keputusan Pengadilan Divisi dalam *Eden DC v Braid* [1998] pada 12 Mei. Pendekatan ini ditolak oleh Lords Edmund-Davies dan Kilbrandon di Lynch, di atas, Pengadilan Banding Pidana Irlandia Utara di Fitzpatrick [1977] NI 20, dan House of Lords di *Howe* [1987] AC 417, menolak untuk mengikuti perintah Lord Goddard CJ dalam *Bourne* (1952) 36 Cr App R 125. Seseorang yang bertindak di bawah tekanan tetap berniat untuk bertindak, mengetahui konsekuensinya, meskipun kebebasan bertindak dibatasi oleh kekuatan koersif dari pihak yang memaksa.
- (b) *Terdakwa tidak bertindak sukarela karena kehendaknya dilampaui.* Namun karena paksaan, dia tidak akan melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada actus reus. Sudut pandang ini ditolak di Lynch. (Bandingkan automatisme dimana terdakwa tidak bertindak secara sukarela, namun dalam arti yang berbeda. Terdakwa bukannya tidak sadar ketika ia bertindak di bawah tekanan.) Terdakwa bertindak di bawah tekanan namun ia tidak dipaksa oleh tangan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Dia punya pilihan. Namun demikian, hal ini bertentangan dengan Lynch yang mengatakan bahwa ketika dia bertindak di bawah tekanan, dia terpaksa melakukannya dengan cara yang tidak berbeda dengan tindakan yang tidak disengaja. Sehubungan dengan teori 'kehendak yang berlebihan', disarankan bahwa ada tekanan-tekanan yang mengalahkan keinginan seperti halnya paksaan, namun tidak merupakan paksaan atau pembelaan lainnya. Misalnya, tekanan keuangan mungkin membebani surat wasiat, namun bukanlah pembelaan untuk mengatakan bahwa terdakwa mencuri karena surat wasiatnya dibebani oleh kekhawatiran mengenai hipotek.
- (c) *Terdakwa mempunyai actus reus dan mens rea, namun paksaan menjadi alasan mengapa ia lolos dari hukuman.* Pendirian ini tampaknya diterima di Lynch, Fitzpatrick dan Howe. Di Lynch Lord Wilberforce mengatakan bahwa terdakwa 'menyelesaikan tindakannya dan mengetahui bahwa dia melakukannya; namun penambahan unsur paksaan membuat hukum tidak bisa memperlakukan apa yang dilakukannya sebagai kejahatan'. Lord Simon berkata, "Ada actus reus dan mens rea. . . paksaan tidak bertentangan dengan tindakan dan kemauan. . .'. Perbuatan terdakwa dapat dimaafkan, meskipun ia bermaksud merugikan, karena masyarakat menetapkan bahwa ia tidak

dapat diharapkan untuk bertindak sebaliknya: dihadapkan pada dua pilihan kejahatan, ia memilih untuk melanggar hukum.

Teori mana pun yang benar, harus ada bukti yang mendasari adanya paksaan. Dalam *O'Too*, tidak dilaporkan, tertanggal 4 Maret 2004, terdakwa mengatakan bahwa ia berhubungan dengan anggota geng kriminal namun bukan anggota geng tersebut. Karena dia bukan anggota geng, tidak ada ruang untuk paksaan berdasarkan hukum yang disebutkan di bagian selanjutnya. Dalam *Giaquinto* [2001] EWCA Crim 2696 dikatakan bahwa hakim tidak boleh menyerahkan pembelaan kepada juri jika bukti terdakwa bertentangan.

Bergaul dengan penjahat

Pada pertengahan tahun 1970-an, Pengadilan Banding Kriminal Irlandia Utara menyatakan bahwa paksaan bukanlah pembelaan jika terdakwa secara sukarela bergabung dengan penjahat yang melakukan kekerasan dan dengan demikian membuka dirinya terhadap risiko dipaksa oleh tekanan kekerasan untuk melakukan pelanggaran: *Fitzpatrick*, di atas. Terdakwa telah bergabung dengan organisasi teroris, IRA. Pengadilan memutuskan bahwa dia tidak memiliki pembelaan terhadap tuduhan perampokan. House of Lords menolak izin untuk mengajukan banding; jadi asumsinya adalah hukum tersebut seperti yang dinyatakan oleh Pengadilan Irlandia Utara. Di *Howe*, di atas, Lord Hailsham menyetujui *Fitzpatrick*. Sejak itu pengadilan Inggris mengadopsi doktrin: *Sharp* [1987] QB 853, *Shepherd*, di atas, dan *Ali* [1995] Crim LR 303 (semua CA). Terdakwa tidak perlu bergabung dengan suatu organisasi: cukuplah ia ikut dalam suatu persekongkolan satu kali saja. *Hasan* [2005] 2 AC 467 (L) adalah kasus pendukung yang paling otoritatif. Di *Ali*, terdakwa, seorang pecandu heroin, adalah pengedar paksaan. Dia menggunakan seluruh kelompok untuk dirinya sendiri, sehingga menempatkan dirinya dalam hutang kepada pihak yang memaksa, yang memberinya senjata dan menyuruhnya merampok bank atau lembaga pembangunan: jika tidak, dia akan dibunuh. Pengadilan memutuskan bahwa dia tidak dapat mengandalkan paksaan karena dia secara sukarela bergabung dengan orang yang melakukan kekerasan. Kasus serupa terjadi pada *Heath* [2000] Crim LR 109 di mana terdakwa berhutang budi kepada seorang pengedar narkoba dan dengan demikian menerima risiko bahwa ia mungkin diancam dengan kekerasan jika ia tidak bertindak sebagai pengedar narkoba. Pengadilan Banding memutuskan dalam *Lewis* (1993) 96 Cr App R 412 bahwa agar aturan ini dapat diterapkan, perusahaan pidana dan ancamannya tidak boleh terlalu jauh satu sama lain. Terdakwa ikut serta dalam perampokan dengan paksaan. Keduanya dipenjara dan yang terakhir menyerang yang pertama saat mereka berdua di penjara. Terdakwa menolak untuk memberikan bukti terhadap paksaan tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa dia tidak bersalah karena menghina pengadilan. Perampokan itu terlalu jauh dari dugaan pelanggaran. Pengadilan Banding di *Sharp* menyatakan bahwa terdakwa harus menjadi anggota aktif organisasi pada saat ada tekanan agar aturan ini diterapkan.

Tekanan terhadap terdakwa harus berupa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap terdakwa atau anggota keluarga dekatnya: *Baker* [1999] 2 Cr App R 335 (CA). Mungkin tekanan terhadap terdakwa melalui ancaman terhadap pihak ketiga sudah cukup. Hal ini akan membuat undang-undang tersebut konsisten dengan undang-undang mengenai

paksaan dan keadaan pada umumnya. Baker juga menggambarkan bahwa pengecualian ini tidak terbatas pada bergabung dengan geng kriminal; cukuplah bergaul dengan orang-orang yang melakukan kekerasan. House of Lords di Hasan menyatakan bahwa terdakwa tidak diberikan pembelaan ketika ia secara sukarela mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang yang melakukan kekerasan: jaksa tidak perlu membuktikan bahwa ia mengetahui bahwa ia akan dipaksa untuk melakukan pelanggaran, apalagi bahwa ia mengetahui bahwa ia melakukan pelanggaran. akan dipaksa untuk melakukan pelanggaran yang sebenarnya terjadi. Saran apa pun mengenai hal itu di Baker tidak benar. Terdakwa, yang menjabat sebagai anggota DPR, tidak mempunyai pembelaan ketika dia mengetahui atau seharusnya mengetahui, bahwa dia mungkin diancam.

Terkadang hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat mengandalkan paksaan, seperti ketika ia bergabung dengan organisasi teroris atau geng kekerasan: Baker. Jika tidak, juri akan bertanya apakah terdakwa menerima risiko kekerasan saat bergabung dengan geng atau melakukan aktivitas kriminal (Baker). Di Ali, pengadilan mengatakan bahwa aturan ini berlaku setiap kali terdakwa mengetahui bahwa dia akan menjadi bagian dari suatu kejahatan. Dia tidak perlu mengetahui kejahatan spesifik apa (misalnya perampokan) yang akan diperintahkan kepadanya. House of Lords menyetujui prinsip ini di Hasan.

Undang-undang tentang bergabung dengan geng-geng kekerasan tidak lagi berlaku ketika terdakwa telah menjalani hukumannya dan meninggalkan kehidupan kriminal. Ancaman berikutnya yang dilakukan oleh mantan konspirator kini akan membuat terdakwa mendapatkan kembali pembelaan atas paksaan.

Pengadilan Banding di Harmer [2002] Crim LR 401 menolak argumen bahwa terdakwa harus memiliki pembelaan atas paksaan ketika dia tidak memperkirakan bahwa dia mungkin akan diminta untuk melakukan kejahatan, meskipun dia telah memperkirakan bahwa dia mungkin akan menjadi sasaran kekerasan. Cukuplah dia secara sukarela menghadapi ancaman dengan berhutang budi kepada pemasok obat-obatan. Heath, di atas, serupa.

Ada yang mungkin berpendapat bahwa pembatasan ini tidak seharusnya menjadi bagian dari undang-undang. Jika dasar pembelaannya adalah kemauan terdakwa dilampaui, maka kemauannya dilampaui ketika ia dipaksa melakukan tindak pidana oleh komplotan yang diikutinya. Terlebih lagi, perilaku yang dituju oleh pengadilan adalah keanggotaan pada badan-badan yang melakukan tindakan ilegal. Pembelaan atas paksaan bukanlah tempat yang tepat bagi pengadilan untuk menghukum tindakan ini. Di Lynch, di atas, Lord Morris mengatakan bahwa terdakwa tidak boleh menempatkan diri mereka di bawah pengaruh gangster tiran. Diragukan apakah pembatasan ini benar-benar membantu menghilangkan penaklukan terhadap mereka yang berada di bawah kekuasaan tiran tersebut. Bukankah seharusnya ada kelonggaran terhadap kelemahan jika terdakwa secara sukarela menanggung risiko paksaan? Meski demikian, Komisi Hukum dalam Laporannya No. 218, Perundang-undangan KUHP: Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum tahun 1993 mengusulkan agar peraturan ini tetap berlaku.

Jenis ancaman yang cukup untuk meningkatkan pertahanan ini

- i. Ancaman kematian atau kekerasan fisik yang serius sudah cukup. Misalnya, ancaman untuk memotong dua gadis di jalanan Salford sudah cukup menjadi ancaman dalam *Hudson dan Taylor* [1971] 2 QB 202 (CA). Dewan Penasihat dalam *Sepkela v R* [1954] Crim LR 723 membatasi tekanan pada jenis ancaman ini dan Pengadilan Banding dalam *A*, tidak dilaporkan, 12 Mei 2003, meragukan apakah ancaman pukulan di wajah cukup untuk menimbulkan pertahanan ini. 'Kerugian serius' belum banyak dibahas dalam kasus-kasus tersebut. Dalam *Quayle* [2006] 1 WLR 3642 dinyatakan bahwa rasa sakit saja tidak cukup: diperlukan kematian atau cedera serius. Penghindaran rasa sakit yang parah tidak boleh dianggap sebagai penghindaran ancaman terhadap nyawa atau cedera serius. Count of Appeal mencatat bahwa rasa sakit melibatkan 'sebuah elemen subjektivitas yang besar.' Oleh karena itu, mengonsumsi ganja untuk menghindari rasa sakit tetap merupakan suatu pelanggaran. Seharusnya memiliki arti yang sama dengan cedera tubuh yang menyedihkan, sebuah frasa yang mencakup cedera kejiwaan yang serius tetapi lihat (f) di bawah. Apabila ancaman tidak cukup untuk memberikan pembelaan, hal tersebut merupakan faktor yang meringankan hukuman.
- ii. Ancaman untuk menjatuhkan seseorang pada tuduhan yang melibatkan perbuatan amoral tidaklah cukup; misalnya *Valderrama-Vega* [1985] Kejahatan LR 220 (CA) yang melibatkan homoseksualitas. Demikian pula, seperti yang terjadi dalam kasus tersebut, ancaman yang akan membuat terdakwa kehilangan uang harus diabaikan.
- iii. Ancaman terhadap properti tampaknya tidak cukup. Dalam *M'Growther* (1746) 18 State Tr 391 terdakwa bersalah ketika teman-teman Bonnie Prince Charlie memaksanya untuk bergabung dalam pemberontakan mereka di bawah ancaman antara lain mencuri ternaknya. Pengadilan Divisi mengadakan *DPP v Milcoy* [1993] Crown Office Digest 200 bahwa ancaman dari orang yang tinggal bersama terhadap kuda poni dan anjing pasangannya tidak menimbulkan pembelaan atas paksaan.
- iv. Ancaman penjara hampir pasti tidak cukup, namun terdapat diktum Lord Goddard CJ yang bertentangan dalam *Steane* [1947] KB 997. Kasus-kasus modern hanya mengacu pada kematian dan luka serius.
- v. Ancaman untuk mengungkapkan posisi keuangan terdakwa tidak cukup: *Valderrama-Vega*, di atas. Di *Lynch* Lord Simon mengatakan bahwa ancaman untuk membuat anak terdakwa bangkrut bukanlah suatu pembelaan, karena hukum harus membuat batasan tertentu dan ancaman semacam ini berada di bawah batasan tersebut.
- vi. Ancaman kerugian psikologis yang serius saja tidak cukup: *Baker* [1999] 2 Cr App R 335 (CA). Ini adalah wewenang yang didasarkan pada tekanan keadaan, namun dalam hal ini prinsip yang sama berlaku. Keputusan tersebut tidak sejalan dengan hukum pelanggaran non-fatal. Lihat *Ireland*; *Meledak* [1998] AC 147 (HL). Ada anggapan bahwa *Baker* salah dalam hal apa perbedaan antara kerugian fisik dan psikologis jika keduanya parah? Pengadilan Banding dalam *Shayler* [2001] 1 WLR 2206 mengatakan bahwa paksaan ada untuk melindungi 'kesejahteraan fisik dan mental seseorang' namun tidak dapat dikatakan bahwa pengadilan memikirkan masalah ini ketika

melakukan hal tersebut. (Kasus ini merupakan kasus yang disebabkan oleh keadaan tetapi prinsip yang sama berlaku.)

- vii. Harus ada ancaman. Melakukan kejahatan karena yakin tidak punya pilihan tidaklah cukup.
- viii. Keadaan luar yang mendorong kecenderungan bunuh diri dianggap tidak menjadi alasan yang menimbulkan paksaan dalam Rodger [1998] 1 Cr App R 143 (CA). Hukumnya adalah bahwa ancaman tersebut tidak boleh diberikan kepada terdakwa. Pengadilan mengatakan bahwa mengizinkan pembelaan atas paksaan berdasarkan kecenderungan bunuh diri akan memberi orang izin untuk melakukan kejahatan jika mereka rentan. Uji paksaan merupakan standar obyektif, bukan subyektif. Rodger mungkin dikritik dengan alasan bahwa alasan mengapa para terdakwa memiliki kecenderungan seperti itu adalah karena Menteri Dalam Negeri telah meningkatkan hukuman mereka, yang merupakan penyebab eksternal, namun pengadilan mengatakan bahwa keadaan tersebut 'semata-mata' subjektif bagi para terdakwa. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi latar belakang kecenderungan bunuh diri, bukan penyebab hukum dari keinginan untuk melarikan diri dari penjara.

Tampaknya aneh jika paksaan didasarkan pada teori kemauan yang berlebihan, maka hanya satu jenis ancaman yang dianggap cukup untuk menguasai kemauan, padahal sebenarnya jenis ancaman lain telah menyebabkan terdakwa bertindak seperti itu. Jika rasa takut akan paksaan adalah faktor pendorongnya, mengapa rasa takut lainnya tidak diperhitungkan? Jika saya mencuri untuk menghindari kebangkrutan, saya tidak punya pembelaan. Jika saya mengemudi dengan cara yang berbahaya untuk menghindari pemerkosaan, saya tidak punya pembelaan.

Dalam kasus Graham di atas, Pengadilan Banding membatasi modelnya pada ancaman kematian atau cedera fisik yang serius. Dalam kasus Abdul-Hussain di atas, Pengadilan Banding berbicara tentang 'kematian atau cedera serius'. Dua kasus yang analog dengan pembelaan atas paksaan keadaan memerlukan 'kematian atau cedera serius'/'kematian atau cedera tubuh yang serius' (Conway [1989] QB 290 (CA)) dan 'kematian atau cedera serius'/'kematian atau cedera fisik yang serius cedera' (Martin [1989] 1 Semua ER 652). Tidak jelas apakah pengadilan memang bermaksud mengecualikan cedera mental yang serius, hal ini tidak diangkat berdasarkan fakta. Komisi Hukum dalam Laporan No. 218 tahun 1993 merekomendasikan agar pembatasan terhadap kematian dan cedera serius harus dilanjutkan.

Ancaman yang dirasakan terdakwa tidak harus merupakan ancaman yang memang ada. Cukuplah bahwa terdakwa percaya dengan alasan yang masuk akal bahwa ia mempunyai alasan kuat untuk takut akan kematian atau bahaya yang serius. Di Cairns, di atas, seorang pengemudi pergi dengan seorang pemuda mengenakan kap mobilnya. Dia ketakutan baik pada pemuda yang wajahnya menghadap kaca depan maupun pada teman-teman pemuda yang mengikuti mobil sambil berteriak dan menggerakkan tangan. Bahkan mereka berusaha mengajak pemuda tersebut untuk turun dari mobil. Pengadilan memutuskan bahwa tidak masalah jika sebenarnya tidak ada ancaman: yang penting adalah persepsi terdakwa terhadap situasi tersebut. Ancaman tidak harus menjadi satu-satunya penyebab terdakwa bertindak

seperti itu. Pembelaan berlaku jika dia tidak melakukan pelanggaran tetapi karena ancaman: Valderrama-Vega, Ortiz (keduanya di atas).

Ancaman kepada siapa?

Penerapan pembelaan yang berhasil di Inggris telah melibatkan terdakwa atau keluarga dekatnya. Dalam K (1984) 78 Cr App R 82 (CA), ancaman melibatkan ibu terdakwa. Dalam Wright [2000] Crim LR 510 (CA) ancamannya ditujukan kepada pacar terdakwa. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa harus menganggap dirinya bertanggung jawab atas orang yang diancam, dan Pengadilan Tinggi menyetujui pembatasan ini dalam S [2001] 1 WLR 2206, yang juga dikenal sebagai Shayler. Dalam kasus Ortiz di atas, pengadilan berasumsi bahwa ancaman terhadap istri dan anak saja sudah cukup, sedangkan dalam kasus Shepherd di atas, Mustill LJ tidak mengacu pada fakta bahwa ancaman tersebut ditujukan kepada terdakwa dan keluarganya. Lord Mackay dalam Howe, di atas, menyebutkan hubungan dekat seperti 'anak yang sangat disayangi'. Rose LJ dalam Abdul-Hussain, di atas, berbicara tentang 'bahaya atau kematian atau cedera serius yang akan terjadi pada terdakwa atau mereka yang menjadi tanggung jawabnya'. Pembatasan ini berasal dari contoh arahan yang diberikan oleh Dewan Studi Yudisial ('orang yang secara wajar dianggap bertanggung jawab oleh [terdakwa]'). Lord Bingham menyampaikan hal yang sama dalam Hasan di atas. Ada anggapan bahwa hukum Inggris tidak mengakui pembatasan tersebut. Mahkamah Agung Victoria melangkah lebih jauh dalam Hurley dan Murray [1967] VR 526 dengan menyatakan bahwa pembelaan tersedia ketika ancamannya terhadap wanita simpanan. Dalam DPP v Milcoy, pengadilan tidak mempertanyakan bahwa ancaman terhadap orang yang tinggal bersama sudah cukup. Tampaknya tidak ada tempat untuk berhenti meskipun ada batasan dalam Wright dan S, seperti yang dinyatakan dalam kasus terakhir, 'seseorang atau beberapa orang yang menjadi tanggung jawabnya atau . . . orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam situasi tersebut. Sebagaimana dicatat oleh Pengadilan Banding dalam S, Pommell [1995] 2 Cr App R 607 (CA) berbeda, karena ancamannya adalah untuk membunuh berbagai orang yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Ancaman terhadap sandera yang tidak berhubungan dengan terdakwa sudah cukup. Dalam keadaan darurat, ancaman terhadap terdakwa atau orang lain sudah cukup (Conway – ancaman terhadap penumpang di dalam mobil terdakwa, pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan darah, perkawinan atau jenis kelamin – Martin, keduanya di atas). Jika ancaman tersebut cukup dalam keadaan yang memaksa, yang mana menerapkan aturan-aturan dari paksaan, maka ancaman tersebut juga harus cukup dalam paksaan itu sendiri. Terlebih lagi, seperti yang ditulis oleh salah satu pakar hukum pidana AS, R. M. Perkins: 'Perbuatan yang dipaksakan dinyatakan kembali' (1981) 33 Hastings LJ 403:

[seseorang] mungkin bersedia mengambil risiko bahwa ancaman pembunuhan, jika ditujukan kepada orang tersebut, hanyalah sebuah gertakan, namun mungkin tidak bersedia mengambil risiko jika ancaman tersebut merupakan ancaman untuk membunuh pasangan atau anaknya.

Argumen ini mungkin juga berlaku untuk orang asing. Tentu saja orang yang berakal sehat khawatir akan keselamatan orang lain. Dalam RUU KUHP pasal 42(3)(a)(i) disebutkan ancamannya bisa terhadap pihak lain (UU No. 177 Tahun 1989). Usulan yang sama muncul dalam rekomendasi terbaru: lihat 'Usulan reformasi' di bawah. Hubungan antara terdakwa dan orang yang diancam dapat diperhitungkan ketika menentukan apakah ia dapat menolak ancaman tersebut atau tidak. Ancaman untuk membunuh anak-anak seseorang mungkin lebih besar dibandingkan ancaman terhadap orang asing. Dapat ditambahkan bahwa masih bisa diperdebatkan apakah seorang terdakwa boleh mengatakan bahwa dia melukai orang asing untuk mencegah cedera pada orang asing lainnya.

Peluang untuk melarikan diri

Paksaan tidak tersedia jika terdakwa dapat menghindari ancaman tanpa merugikan dirinya sendiri atau orang lain: Heath [2000] Crim LR 1011 (CA). Terdakwa diperintahkan untuk membantu mengangkut narkoba keesokan harinya atau dia akan dirugikan. Diasumsikan bahwa dia diberi cukup waktu untuk melapor ke polisi untuk mendapatkan perlindungan atau dia bisa saja pindah ke rumah kerabatnya di Skotlandia. Pengadilan juga mengatakan bahwa fakta bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk melapor ke polisi tidak mempengaruhi hukum bahwa ia dapat melapor ke polisi dalam situasi ini. Hal serupa juga terjadi pada Hasan. Tuan Bingham berkata: '*. . . apabila hukuman yang diancamkan terhadap terdakwa atau keluarganya atau orang yang secara wajar dianggap bertanggung jawab tidak sesuai dengan harapannya untuk segera atau hampir dalam waktu dekat. . . mungkin hanya ada sedikit keraguan bahwa ia dapat mengambil tindakan mengelak, baik dengan melapor ke polisi atau dengan cara lain, untuk menghindari kejahatan tersebut*'. Tidak boleh ada peluang untuk menempatkan diri di bawah perlindungan resmi yang efektif (seperti yang ditunjukkan oleh Baker: perlindungan polisi mungkin tidak menghentikan para pemberi paksaan yang berhutang uang untuk ganja), seperti yang diberikan oleh polisi dan sipir penjara: Lynch, Tajam, keduanya di atas. Dalam kasus Gill di atas, pengadilan menilai bahwa terdakwa tidak akan mendapat pembelaan jika ancamannya tidak segera dilakukan karena ia bisa saja meminta perlindungan polisi. Tampaknya hukumnya adalah bahwa terdakwa diadili berdasarkan bagaimana reaksi seseorang yang berusia dan berjenis kelamin sama dengan dia serta karakteristiknya yang relevan: Baker [1999] 2 Cr App R 335 (CA).

Pandangan modern adalah bahwa terdakwa dapat diberikan pembelaan jika ancamannya sudah dekat; ancamannya tidak harus berupa ancaman yang bisa segera dilaksanakan: Abdul-Hussain, di atas. Para terdakwa membajak sebuah pesawat untuk melarikan diri dari Irak. Aturan yang berlaku saat ini adalah bahwa ancaman yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat sudah cukup; tidak masalah bahwa hal itu tidak dapat dilakukan saat itu juga. Para terdakwa dapat berhasil mengajukan permohonan paksa pada saat sebelum permintaan ekstradisi dari negara yang pesawatnya mereka bajak. Dalam *Eden DC v Braid*, di atas, Lord Bingham CJ berbicara tentang terdakwa 'tidak punya pilihan lain'. Dalam kasus *Jaksa Agung v Whelan* [1934] IR 518 Murnaghan J yang terkenal di Irlandia mengatakan: '*. . . jika ada peluang yang masuk akal bagi keinginan untuk menegaskan kembali*

dirinya, tidak ada pembenaran yang dapat ditemukan dalam ancaman yang mendahuluinya'. Pengadilan Banding menyatakan hal serupa dalam kasus Abdul-Hussain: 'Bahaya harus timbul dalam pikiran terdakwa ketika ia melakukan tindak pidana, sehingga dapat menahan kehendaknya. . .'. Namun Pengadilan Banding di Hudson dan Taylor memutuskan bahwa terdakwa mempunyai pembelaan karena polisi tidak dapat memberikan perlindungan pada semua kesempatan. Anak-anak perempuan di Hudson melakukan sumpah palsu 'karena tekanan yang langsung dan tidak dapat dihindari'. Lord Parker CJ mengatakan, tidak masalah ancaman itu tidak bisa dilakukan 'secara instan, tetapi setelah jeda'. Seperti yang dikatakan Lord Griffiths dalam Howe: 'Jika paksaan diperkenalkan sebagai sebuah konsesi yang penuh belas kasihan terhadap kelemahan manusia, maka tampaknya sulit untuk menolaknya bagi seseorang yang mengetahui dengan baik bahwa perlindungan resmi apa pun yang ia cari tidak akan efektif untuk menyelamatkannya dari penyakit. ancaman kematian yang dilakukannya.' Pernyataan ini cukup kuat. Tidaklah cukup jika terdakwa yakin bahwa perlindungan resmi tidak akan efektif: ia harus mengetahui 'sepenuhnya' bahwa memang demikian adanya. Tampaknya aneh jika lembaga peradilan, salah satu cabang negara, mengatakan bahwa cabang negara lainnya, yaitu polisi, tidak dapat melindungi warga negara. Semua keadaan termasuk usia terdakwa harus diperhitungkan. Berdasarkan fakta yang ada, mungkin ada keraguan bahwa ancaman tersebut akan segera terjadi.

Hudson dan Taylor mungkin memerlukan pertimbangan ulang mengingat Cole [1994] Crim LR 582 (CA) dan Hasan (HL). Pengadilan di Cole menyatakan bahwa harus ada hubungan langsung dan langsung antara ancaman dan kejahatan. Faktanya, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perampokan di lembaga pembangunan, untuk mendapatkan uang guna membayar kembali pemberi pinjaman, tidak mempunyai kaitan erat dengan ancaman terhadap dirinya sendiri, pacarnya dan anak mereka. Ancamannya tidak cukup spesifik. Pengadilan menyatakan bahwa paksaan hanya berlaku ketika pihak yang memaksa telah menyatakan kejahatannya. (Bidang hukum ini mungkin merupakan wilayah yang tekanan keadaannya berbeda.) Konsep pencalonan mungkin sulit untuk diterapkan: jika saya menyuruh Anda mencuri uang, apakah saya telah mencalonkan kejahatan jika Anda memperoleh uang dengan cara curang?

Pengadilan mencari reaksi yang jauh lebih spontan daripada yang terjadi pada Hudson dan Taylor. Lord Bingham dalam Hasan menyatakan bahwa Hudson dan Taylor salah: 'Saya tidak bisa, secara konsisten dengan prinsip, menerima bahwa seorang saksi yang memberikan kesaksian di Pengadilan Kerajaan di Manchester tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari mematuhi ancaman yang tidak mampu dieksekusi pada saat itu juga.' Namun Hudson dan Taylor diajukan oleh Pengadilan Banding di Abdul-Hussain. Rose LJ berkata dengan kata-kata yang mengerikan: 'Jika Anne Frank mencuri mobil untuk melarikan diri dari Amsterdam dan dituduh melakukan pencurian, prinsip hukum Inggris tidak akan . . . telah menolak pembelaannya atas tekanan keadaan, dengan alasan bahwa dia seharusnya menunggu sampai Gestapo mengetuk pintunya.' Cole ragu: reaksi spontan tidak diperlukan. Aturan yang sama juga diperlukan: ancaman tidak harus berupa ancaman yang memaksa terdakwa untuk segera bertindak, sebagaimana diilustrasikan oleh fakta-fakta dalam Re A

[2001] Fam 147, yang dibahas di bawah ini. Salah satu kembaran tidak akan menyebabkan kematian saudara kembar lainnya kecuali ahli bedah segera melakukan operasi. Sudah cukup bahwa tanpa pemisahan, salah satu saudara kembar akan segera menyebabkan kematian saudara kembarnya.

Setelah ancaman selesai, terdakwa harus berhenti, misalnya. *DPP v Davis*, di atas, dimana mengemudi sejauh dua mil untuk menghindari rayuan seksual yang tidak diinginkan dengan kandungan alkohol berlebih dalam darah terdakwa mengesampingkan pembelaan. Hal serupa terjadi pada kasus *Lawrence* [1980] NSWLR 122 di New South Wales. Navigator kapal diancam dengan kekerasan jika tidak melanjutkan navigasi. Dia mempunyai peluang yang masuk akal untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ancaman tersebut tidak lagi berlaku. Dalam salah satu kasus terbaru di Inggris, *DPP v Tomkinson* [2001] RTR 583 (DC), terdakwa berkendaraan sejauh 72 mil untuk melarikan diri dari suaminya yang kejam. Pembelaannya terhadap paksaan terhadap tuduhan mengemudi dengan alkohol berlebih gagal karena dia mengemudi lebih jauh dari yang diperlukan untuk menghindari bahaya. Otoritas yang lebih baru adalah *DPP v Mullally* [2006] EWHC 3448 (Admin). Terdakwa kehilangan pembelaannya atas paksaan atas tuduhan mengemudi dengan alkohol berlebih dalam darahnya karena dia diikuti oleh polisi.

Pelanggaran yang bukan merupakan pembelaan atas paksaan

Paksaan memang memberikan pembelaan terhadap sebagian besar kejahatan, misalnya. sumpah palsu (*Hudson dan Taylor*, atas), penghinaan terhadap pengadilan (*K*, atas, dan *Lewis*, atas), yang sekarang disebut pencurian (*Gill*, atas), kepemilikan amunisi (*Subramaniam* [1956] 1 WLR 965 (PC)), pembajakan (*Abdul-Hussain*) dan apa yang sedang ditangani (*Jaksa Agung v Whelan*, di atas). Perhatikan bahwa seseorang tidak menggunakan gradasi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ancaman kematian saja sudah cukup untuk menimbulkan pembelaan dalam kasus penghinaan, namun ancaman kerugian yang serius saja sudah cukup untuk, katakanlah, sumpah palsu. Ada pernyataan dalam kasus-kasus tersebut bahwa paksaan bukanlah pembelaan terhadap semua tindak pidana berat dan tidak ada pembelaan terhadap perampokan. Bagian ini membahas pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum Inggris modern, meskipun pengecualian keempat belum ditetapkan secara pasti.

- (a) Menurut *Abbott v R* [1977] AC 755, di mana Dewan Penasihat dibagi tiga menjadi dua, paksaan bukanlah pembelaan bagi pelaku pembunuhan. Terdakwa membunuh seorang wanita Inggris atas perintah orang jahat. Korban antara lain ditancapkan pedang pendek ke tenggorokannya dan dikubur hidup-hidup. Dewan Penasihat memutuskan bahwa terdakwa tidak memiliki pembelaan meskipun ia bertindak di bawah tekanan dari seseorang yang dalam istilah bahasa Inggris adalah bos geng. Lord Salmon memperkuat kesimpulannya dengan mengacu pada penjahat perang: mereka tidak diperbolehkan bergantung pada paksaan atau perintah atasan meskipun mereka mungkin atau akan ditembak jika tidak patuh. Dia juga merujuk pada pidato Lord Simon di *Lynch* di atas, yang menyatakan bahwa jika pembelaan diberikan, maka hal itu akan memberikan piagam bagi teroris, pemimpin geng, dan penculik. Argumen Lord

Simon telah diremehkan oleh perkembangan aturan yang berkaitan dengan keanggotaan sukarela dalam geng kriminal: lihat di atas. Abbott disetujui oleh House of Lords di Howe (atas). Terdakwa bertindak di bawah pengaruh jahat Murray. Mereka telah menyerang satu orang yang kemudian dibunuh oleh orang lain; mereka adalah partisipan dalam pembunuhan itu dan sebenarnya membunuh korban lainnya atas perintah Murray. Hasilnya adalah terdakwa tidak mempunyai pembelaan terhadap pembunuhan meskipun dia akan dibunuh jika dia tidak membunuh. Hukum yang menyatakan bahwa paksaan bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan masih tetap berlaku hingga saat ini seperti 30 tahun yang lalu: Wilson [2007] *The Times*, 6 Juni.

- (b) Howe memutuskan bahwa paksaan bukanlah pembelaan jika dikaitkan dengan pembunuhan. Lynch, di atas, telah berangkat. Lord Hailsham LC berkata:
- i. Hukum harus melindungi orang yang tidak bersalah;
 - ii. Seseorang yang memiliki ketabahan biasa mampu melakukan kepahlawanan, yaitu akan mengorbankan nyawanya daripada mengambil nyawa yang tidak bersalah (Lord Hailsham mencatat bahwa jika terdakwa memang membunuh, dia tidak dapat mengandalkan prinsip bahwa dia memilih kejahatan yang lebih ringan, namun seperti yang telah kita lihat, hukum paksaan di Inggris tidak didasarkan pada prinsip 'kejahatan yang lebih kecil');
 - iii. Hukum seharusnya tidak melindungi para pengecut dan polisi;
 - iv. Hukuman dapat dikurangi dengan upaya hukum administratif, seperti yang terjadi dalam *Dudley dan Stephens* (1884) 14 QBD 273, yang dapat dilihat di bawah. Hak prerogatif belas kasihan dapat digunakan; hakim tidak perlu merekomendasikan hukuman minimal seumur hidup; dan Dewan Pembebasan Bersyarat dapat merekomendasikan pembebasan.

Lord Mackay menekankan bahwa hukum tidak boleh memberikan kekuasaan kepada siapa pun untuk memilih siapa yang akan bertahan hidup. Lord Griffiths berbicara tentang 'kesucian khusus yang melekatkan hukum pada kehidupan manusia'. Kehidupan yang tidak bersalah harus dilindungi bahkan dengan mengorbankan nyawa terdakwa atau orang lain. Ada kasus-kasus di yurisdiksi lain di mana paksaan dianggap bukan sebagai pembelaan bagi pihak-pihak sekunder dalam pembunuhan seperti *Brown* [1968] SASR 467 dan *Harding* [1976] VR 129, dan para penulis institusional Inggris pada umumnya mendukung aturan tersebut.

House of Lords di Howe dan undang-undang yang gagal memberikan pembelaan terhadap pembunuhan dapat dikritik karena beberapa alasan.

- i. Keadaan dapat terjadi ketika seseorang yang mempunyai ketegasan biasa akan mengajukan ancaman. Mengapa seseorang harus dipenjara seumur hidup karena tidak berperan sebagai pahlawan?
- ii. Jika terdakwa diperintahkan di bawah ancaman kematian untuk melukai seseorang secara serius, misalnya dengan memukul lututnya, dan korbannya mati, maka ia bersalah atas pembunuhan. Ancamannya adalah: melukai seseorang atau dibunuh, dan terdakwa tidak mempunyai pembelaan. Dalam pendekatan pilihan

kejahatan, terdakwa memilih kejahatan yang lebih ringan. Bagaimana jika ancamannya ditujukan kepada keluarga terdakwa? Benarkah kedudukan hukum yang mendorong seseorang untuk berdiam diri sementara keluarganya dibunuh? Terdakwa tetap bersalah atas pembunuhan meskipun korban menolak transfusi darah karena dia adalah seorang Saksi Yehuwa. Tampaknya sulit untuk menghukum terdakwa pembunuhan dalam situasi seperti ini.

- iii. Kebijaksanaan untuk tidak menuntut tidak selalu menyelamatkan hukum dari absurditas. Terdakwa diadili dalam *Anderton v Ryan* [1985] AC 560 (HL) bahkan dalam keadaan di mana Komisi Hukum memperkirakan tidak akan ada penuntutan. Hal yang sama juga bisa diterapkan dalam keadaan terpaksa.
- iv. Hukuman satu-satunya untuk pembunuhan adalah penjara seumur hidup. Paksaan tidak dapat diperhitungkan dalam hukuman seperti halnya dalam pelanggaran lainnya. Tentunya yang menentukan hukumannya adalah pengadilan, dan bukan eksekutif?
- v. Sungguh kasar menyebut seseorang yang menyerah pada ancaman pembunuhan keluarganya sebagai pengecut dan poltroon. Apakah hanya seorang pengecut yang memilih untuk membunuh pihak ketiga?
- vi. Lord Griffiths mengatakan bahwa Laporan Komisi Hukum No. 83, Pembelaan Penerapan Umum, 1978, belum ditindaklanjuti oleh Parlemen. Oleh karena itu, menurutnya DPR tidak ingin mengubah undang-undang tersebut. Namun jika memang demikian, ketidakaktifan Parlemen juga menunjukkan bahwa Parlemen tidak ingin mencabut Lynch, yang 12 tahun sebelumnya telah memutuskan dengan cara yang berlawanan dengan Howe.
- vii. Dua kasus yang diandalkan oleh House of Lords tidaklah kuat. *Tyler* (1839) 172 ER 643 sudah ketinggalan zaman karena pada saat itu dianggap bahwa paksaan bukanlah pembelaan sama sekali. *Dudley dan Stephens* mementingkan kebutuhan, bukan paksaan. Kedua pertahanan tersebut terkait tetapi tidak sama. Misalnya, kebutuhan bukanlah pembelaan terhadap pencurian, namun paksaan yang menjadi pembelaan. Dalam kasus ketiga, *Kray* (1969) 53 Cr App R 569, Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa paksaan merupakan pembelaan terhadap pelengkap pembunuhan namun bagian yang relevan dihilangkan dalam serangkaian laporan hukum utama.
- viii. Di Howe tidak ada seorang pun yang mengajukan pertanyaan: jika calon terdakwa menolak membunuh dan dibunuh, apa yang dapat mencegah pelaku mengancam orang lain dengan kematian dan sebagainya? Undang-undang ini menganjurkan pembunuhan terhadap dua orang atau lebih dan melarang pembunuhan terhadap satu orang. Bukan hasil yang membahagiakan! Perbandingan yang berguna adalah dengan penggunaan 'pembom proksi' oleh IRA di Irlandia Utara. Organisasi tersebut mungkin akan terus membunuh orang sampai seseorang menyerah dan membawa bahan peledak ke pos pemeriksaan. Faktanya, pelaku bom proksi tidak diadili. Jika ya, mereka tidak akan mempunyai pembelaan terhadap pembunuhan.

- ix. Hukum menjadi tercela dalam keadaan seperti itu. Seperti kata-kata Lord Morris di Lynch di atas, 'Hukum akan bersifat mencela dan tidak manusiawi jika tidak mengakui penderitaan yang mengerikan dari seseorang yang mungkin tiba-tiba mendapati hidupnya dalam bahaya kecuali dia tunduk dan patuh.'
 - x. House of Lords di Howe mengacu pada pihak berwenang mengenai provokasi ketika menyetujui proposisi bahwa penerima paksaan harus bertindak sebagaimana orang yang memiliki ketegasan yang wajar dapat bertindak. Namun provokasi merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, namun paksaan bukanlah pembelaan. Apakah orang yang membunuh karena provokasi kurang tercela secara moral dibandingkan orang yang membunuh karena paksaan? Memang benar bahwa orang yang membunuh karena paksaan lebih tidak tercela dibandingkan orang yang membunuh karena provokasi.
 - xi. Mayoritas dalam kasus *Abbott v R* menolak memberikan pembelaan kepada terdakwa atas tuduhan pembunuhan dengan alasan bahwa warga negara yang bersangkutan mungkin percaya bahwa putusan 'tidak bersalah' menyiratkan bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa adalah hal yang benar secara moral untuk dilakukan. , namun karena paksaan adalah sebuah alasan, sebuah konsesi terhadap kelemahan manusia, dan bukan sebuah pembenaran, argumen ini tidak tepat. Terdakwa dimaafkan karena kelemahannya; pembunuhannya tidak dibenarkan.
 - xii. Penyimpangan dari *Abbott v R* merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, prinsip non-retroaktif. Terdakwa bersalah atas suatu pelanggaran padahal dia tidak bersalah di hadapan Howe.
- (c) Lord Griffiths di Howe melangkah lebih jauh dari saudara-saudaranya. Ia berpendapat bahwa paksaan bukanlah pembelaan, bukan hanya terhadap pembunuhan, karena merupakan pelengkap pembunuhan dan beberapa bentuk pengkhianatan (lihat (d) di bawah), namun juga terhadap percobaan pembunuhan. Lord Hailsham berpendapat bahwa undang-undang tersebut memerlukan pertimbangan ulang. Sampai tahun 1996, undang-undangnya adalah, jika terdakwa bermaksud membunuh dan korban meninggal dalam waktu satu tahun satu hari, maka pelanggaran adalah pembunuhan. Namun jika korban bertahan lebih lama namun tetap meninggal, maka tidak mungkin dijerat dengan dakwaan pembunuhan, yang ada hanya dakwaan percobaan pembunuhan. Mengapa tanggal kematian korban mempengaruhi posisi apakah ada paksaan? House of Lords dengan mayoritas tiga hingga dua di *Gotts* [1992] 2 AC 412 menerima bahwa paksaan bukanlah pembelaan terhadap percobaan pembunuhan. (Kasus ini tidak membahas pasal 18, namun demi keanggunan hukumnya harus sama.) Ayah terdakwa mengancam bahwa kecuali terdakwa membunuh ibunya, ia akan ditembak. Dia menikam tetapi tidak membunuh ibunya. Dia mungkin sudah meninggal tetapi harus segera mendapat perawatan. Lord Lane CJ di Pengadilan Banding menolak argumen bahwa ada perbedaan antara pembunuhan dan percobaan pembunuhan sehubungan dengan paksaan. Para komentator awal

tidak membedakan keduanya, dan tidak ada aturan hukum umum mengenai masalah ini. Hukum harus turun tangan. Ketua Hakim berkata di Pengadilan Banding:

Kita dapat membayangkan sebuah situasi di mana seorang pria di bawah tekanan menembakkan senapannya untuk membunuh dua pria yang berdiri bersama. Dia membunuh yang satu dan melukai yang lainnya. Akan terasa aneh jika dia dihukum terhadap satu korban dan dibebaskan sama sekali sehubungan dengan korban yang lain ketika kematian korban yang satu dan kecacatan terhadap korban lainnya disebabkan oleh perbuatan yang sama, yang dilakukan dengan maksud yang sama.

Kepolosan atau rasa bersalah tidak boleh bergantung pada kebetulan. Ia berpendapat bahwa aturan percobaan pembunuhan tidak berlaku pada konspirasi dan hasutan untuk melakukan pembunuhan karena pelanggaran tersebut 'secara umum' lebih jauh dari pelanggaran penuh dibandingkan upaya pembunuhan; lagi pula, di mana pun garis itu ditarik, anomali akan muncul. Lord Jauncey di House of Lords mengatakan: '[seorang] pria yang menembak untuk membunuh tetapi kehilangan organ vitalnya hanya dapat membenarkan tindakannya seperti halnya orang yang memukul organ tersebut. Ini murni kebetulan bahwa percobaan pembunuhan tersebut bukanlah seorang pembunuh.' Ia menambahkan: 'Hukum menganggap kesucian hidup manusia dan perlindungannya sebagai hal yang sangat penting.' Ia membiarkan diskusi di masa depan terbuka mengenai apakah pembelaan harus tersedia untuk kejahatan serius apa pun. Namun, paksaan akan meringankan hukumannya. Kelompok minoritas, yang dipimpin oleh Lord Lowry, berpendapat bahwa ada paksaan. Ia berpendapat bahwa, jika ada garis yang ditarik antara pelanggaran yang mana paksaan merupakan pembelaan atau bukan (misalnya apakah paksaan merupakan pembelaan terhadap konspirasi atau hasutan untuk membunuh?), maka akan terdapat anomali. Dia berkata:

Percobaan pembunuhan, betapapun kejinya kami menganggapnya, adalah pelanggaran ringan. . . [ketika] percobaan pembunuhan menjadi tindak pidana, kejahatan tersebut, seperti banyak tindak pidana berat lainnya, tetap memiliki pembelaan terhadap paksaan.

Gotts terbuka terhadap kritik dalam beberapa hal.

- i. Ada masalah dengan pelanggaran lainnya. Penghasutan dan konspirasi, seperti halnya upaya percobaan, merupakan pelanggaran yang masih kecil. Mengapa pembelaan harus diterapkan pada dua orang namun tidak pada yang ketiga? Bagaimana dengan kejahatan lain seperti pembakaran yang bertujuan membahayakan nyawa? Lord Jauncey menyarankan bahwa paksaan tidak boleh diterapkan pada 'semua kejahatan yang sangat serius', sebuah istilah yang tidak ia definisikan. Tentunya sebelum dihapuskannya aturan satu tahun

satu hari, akan menjadi suatu anomali jika terdakwa yang menyerang korban bersalah melakukan pembunuhan jika korban meninggal dalam waktu satu tahun satu hari tetapi tidak bersalah karena sengaja melukai tubuh secara serius. jika dia bertahan lebih lama. Jika paksaan merupakan pembelaan terhadap pasal 18 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861, namun tidak untuk pembunuhan, maka terdapat ketidakkonsistenan. Kedua pelanggaran tersebut memiliki unsur mental berupa niat untuk melakukan luka fisik yang menyedihkan. Mengesampingkan pembelaan atas pembunuhan, namun tidak untuk pasal 18 adalah hal yang aneh. Selain itu, perbedaan antara pembunuhan dan pasal 18 mungkin hanya kebetulan. Asumsikan bahwa terdakwa menikam korbannya dengan maksud untuk membunuh. Jika korbannya meninggal, itu adalah pembunuhan: namun, jika, karena keberuntungan, ada ahli bedah yang hebat dan korbannya tidak mati, itu bukanlah pembunuhan. Mengapa perbedaan antara hukuman dan pembebasan bergantung pada keberuntungan? Pembelaan atas pemaksaan (lihat bagian selanjutnya) yang terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1925 dibatasi. Ini tidak berlaku untuk pengkhianatan dan pembunuhan, namun merupakan pembelaan terhadap percobaan pembunuhan. Dikatakan bahwa perancang undang-undang tersebut mengambil posisi common law karena adanya paksaan. Karena paksaan dan paksaan merupakan pembelaan yang paralel, aturan yang sama juga harus diterapkan dalam paksaan.

- ii. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa percobaan pembunuhan tidak akan memberikan alasan untuk pembelaan, kecuali Komisi Kerajaan tahun 1879 (C 2345).
- iii. Pembunuhan mempunyai hukuman wajib. Hukuman ini menandai pembunuhan dari kejahatan lainnya. Oleh karena itu, dapat ditarik garis batas antara pembunuhan dan pelanggaran lainnya, dan garis ini dapat memisahkan pembunuhan dan percobaan pembunuhan dengan paksaan.
- iv. Kelompok yang berbeda pendapat menyatakan pandangan bahwa jika terdakwa mempunyai niat untuk membunuh di bawah tekanan, maka ia tidak terlalu tidak bermoral sehingga hukum harus mencabut pembelaan darinya.
- v. Haruskah orang yang membunuh untuk menyelamatkan orang lain diperlakukan berbeda dengan orang yang membunuh untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Bisa dibayangkan ada perbedaan moral.
- vi. Dalam hukum pidana, peluang memang berperan dalam definisi pelanggaran. Jika seseorang mengemudi dengan buruk tetapi karena keberuntungan tidak membunuh siapa pun, ia bersalah karena mengemudi dengan berbahaya; jika seseorang secara tidak sengaja membunuh seseorang, maka ia bersalah karena menyebabkan kematian karena mengemudi secara berbahaya. Hukuman untuk kejahatan yang terakhir ini lebih berat daripada hukuman untuk kejahatan yang

pertama, namun faktor keberuntungan mungkin menjadi faktor yang membedakan mereka. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan biasa: Saya terjatuh secara sembarangan dan tidak ada cedera yang terjadi; Aku terjatuh secara sembarangan dan sialnya aku menjatuhkan seseorang. Hanya dalam situasi terakhir ini orang yang lewat mungkin akan menganggap saya bersalah, tetapi apa yang saya lakukan dan lakukan dengan ceroboh sama persis. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memperlakukan pembunuhan dan percobaan pembunuhan dengan cara yang sama. Ada banyak literatur yang membahas peran 'keberuntungan moral' dalam hukum pidana. Salah satu cara untuk masuk ke dalam literatur adalah A. Ashworth, 'Taking the consequences', dalam S. Shute, S. Gardner dan J. Horder (eds), *Action and Value in the Criminal Law* (OUP, 1993).

- (d) Ada keraguan apakah paksaan merupakan pembelaan terhadap pengkhianatan. Lord Goddard CJ dalam *Steane*, di atas, mengatakan obiter bahwa paksaan bukanlah pembelaan tetapi pernyataannya mungkin per incuriam. M'Growther, di atas, dan Purdy (1946) 10 JCL 182 (obiter) adalah kontra, Purdy tidak dikutip dalam *Steane* (meskipun terdapat kesamaan faktual), dan Lord Morris dalam *Lynch* menerima bahwa diktum tersebut tidak benar. Ungkapan pengecualian ini tetap sama: paksaan adalah pembelaan terhadap 'beberapa bentuk pengkhianatan'. Ungkapan tersebut digunakan dalam *Abdul-Hussain* di atas. Frasa ini berarti bahwa tindakan makar kecil memang menarik pihak pembela. Namun, mungkin sulit untuk membedakan tindakan bantuan besar dan kecil, dan Nelson J di Pengadilan Penuh Victoria menolak pembedaan dalam kaitannya dengan mereka yang membantu dalam jumlah besar dalam suatu pembunuhan dan mereka yang melakukan tindakan kecil: *Harding*, di atas. Jika paksaan merupakan pembelaan, maka paksaan hanya akan berlaku jika terdakwa melarikan diri pada kesempatan pertama: *Oldcastle* (1419) dicatat dalam 3 Co Inst 10, dan tampaknya hanya jika terdakwa tidak terlibat dalam pertempuran: *Axtell* (1660) 84 ER 1060.

Sebagaimana dinyatakan oleh Pengadilan Banding dalam *Abdul-Hussain*, di atas, yang disetujui oleh pengadilan yang sama dalam S [2001] 1 WLR 2206, sebuah kasus yang juga dikenal sebagai *Shayler*: '. . . pembelaan terhadap paksaan, baik melalui ancaman atau keadaan, umumnya tersedia dalam kaitannya dengan semua kejahatan substantif, kecuali pembunuhan, percobaan pembunuhan dan beberapa bentuk makar. . .'. Untuk saran reformasi topik ini, lihat di bawah. Hukum yang ada saat ini adalah contoh utama dari ketidaklogisan. Beberapa hakim, seperti Lord Hailsham dalam *Howe*, dengan senang hati menolak logika dan konsistensi demi mendukung preseden, namun para reformis hukum tidak perlu bekerja dalam batasan common law. Reformasi hukum harus berpihak pada Lord Bingham, yang dalam *Hasan* di atas mengatakan bahwa argumen untuk memperluas paksaan hingga pembunuhan tidak dapat ditolak.

Haruskah ada pembelaan umum terhadap paksaan?

Paksaan lebih sering diajukan dibandingkan pada masa Hudson dan Taylor (1971) dan pengadilan telah mengambil sikap keras dalam beberapa tahun terakhir mengenai lebarnya pembelaan: lihat pidato House of Lords di Hasan. Jika dasar dari paksaan adalah bahwa undang-undang menganggap pembelaan diri sebagai pembenaran terhadap suatu perbuatan pidana, maka paksaan harus menjadi pembelaan terhadap semua pelanggaran, dan pengecualian tersebut dihapuskan. Alasan ini diberikan sepenuhnya pada pembelaan diri, yang merupakan pembelaan terhadap semua kejahatan termasuk pembunuhan. (Perbedaannya adalah bahwa korban yang melakukan tekanan adalah orang yang tidak bersalah namun ia tidak sedang membela diri.) Hukum tidak boleh menghukum orang yang bertindak karena suatu paksaan yang tidak mampu mereka tolak dan tidak menuntut standar kepahlawanan dari orang lain. orang biasa seperti terdakwa di Gottts. Disarankan bahwa jika seseorang bertindak secara wajar di bawah tekanan yang diberikan oleh ancaman, mereka harus mempunyai pembelaan. Perbandingan dengan berkurangnya tanggung jawab, yang merupakan pembelaan terhadap pembunuhan, dapat memberikan pelajaran. Orang yang tidak normal dapat mengandalkan pertahanan ini, tetapi seseorang, bahkan orang normal yang berakal sehat, tidak dapat memiliki pertahanan terhadap tekanan jika dia membunuh. Mengatakan bahwa mereka bersalah tetapi hukuman mereka akan dikurangi, seperti yang dilakukan Lords Keith dan Templeman di Gottts, tidak memenuhi argumen ini. Dan hukuman untuk pembunuhan, penjara seumur hidup, adalah wajib. Paksaan sebagai mitigasi bukan sebagai pengecualian tidak mempunyai pengaruh. Selain itu, hukuman yang diatur dalam undang-undang tidak berfungsi baik sebagai retribusi atau pencegahan dalam situasi di mana pembelaan berpotensi diterapkan.

Komisi Hukum, yang selalu mendukung pemaksaan sebagai pembelaan umum dan bukan sekedar faktor yang meringankan, dalam Laporan No. 83, Pembelaan Penerapan Umum, 1978 (lihat di atas), mengemukakan argumen-argumen berikut yang menentang pemaksaan sebagai sebuah pembelaan umum. pertahanan umum:

- (a) Melakukan kesalahan tidak pernah bisa dibenarkan.
- (b) Individu tidak boleh menyeimbangkan perbuatan salah dengan menghindari kerugian terhadap dirinya sendiri atau orang lain.
- (c) Paksaan dapat digolongkan hanya sebagai motif melakukan kejahatan, dan hukum pidana tidak memperhitungkan motif.
- (d) Hukum pidana sendiri merupakan suatu sistem ancaman, dan struktur tersebut akan dirusak jika sistem ancaman lain dibiarkan.
- (e) Mengizinkan pembelaan berarti memberikan piagam bagi teroris, penculik dan sejenisnya.

Argumen lebih lanjut yang menentang paksaan mungkin bisa diajukan. Lord Morris di Lynch mengatakan bahwa 'Paksaan tidak boleh dibiarkan menjadi jawaban mudah bagi mereka yang tidak dapat memberikan penjelasan lain atas perilaku mereka. . .'. Dapat dikatakan bahwa seseorang bersalah dan layak mendapat hukuman jika ia menyerah pada ancaman. Selain itu, argumen yang mendukung paksaan mungkin saja salah. Undang-undang tidak akan

memberikan efek jera jika ada paksaan untuk melakukan semua pelanggaran termasuk pembunuhan.

Laporan Komisi Hukum tahun 1978 mempertimbangkan argumen-argumen ini dan merekomendasikan hal-hal berikut:

- (a) Paksaan harus menjadi pembelaan yang tersedia secara umum, yaitu paksaan harus diterapkan pada pengecualian pengkhianatan dan pembunuhan. Namun Komisi Hukum mengakui kesucian hidup manusia. (Versi tahun 1989, di bawah, lebih menyukai rekomendasi ini, namun mengingat undang-undang yang berlaku saat ini, tidak memberikan pembelaan terhadap pembunuhan dan percobaan pembunuhan. The Select Committee of the House of Lords on Murder and Life Imprisonment (HL Paper 78–1, 1989) merekomendasikan penghapusan hukuman wajib untuk pembunuhan. Paksaan kemudian dapat diperhitungkan dalam hukuman. Komite yang dipimpin oleh Lord Nathan ini menolak pandangan bahwa paksaan seharusnya mengurangi pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja.)
- (b) Ancaman untuk menyakiti terdakwa atau orang lain sudah cukup, namun ancaman terhadap harta benda tidak cukup.
- (c) Unsur mentalnya adalah bahwa terdakwa percaya:
 - apakah atas dasar alasan yang masuk akal atau tidak –
 - (i) Bahwa kerugian yang diancam adalah kematian atau cedera serius (fisik atau mental);
 - (ii) Bahwa ancaman tersebut akan dilakukan segera jika ia tidak mengambil tindakan yang dimaksud atau, jika tidak segera, sebelum ia mempunyai kesempatan nyata untuk mencari perlindungan resmi; dan
 - (iii) Bahwa tidak ada cara lain untuk menghindari atau mencegah bahaya yang mengancam. Rekomendasi ini akan membalikkan graham, di atas, dengan keyakinan yang masuk akal. Komisi hukum menerima rekomendasi tersebut dalam ruu kuhp tahun 1989.
 - (iv) Ancaman harus sedemikian rupa sehingga 'dalam semua keadaan kasusnya. . . Dia tidak bisa diharapkan untuk menolaknya'. Lihat juga bagian 'usulan reformasi paksaan melalui ancaman' di bawah.

Komisi Hukum juga merekomendasikan penghapusan pembelaan atas paksaan dalam perkawinan (lihat bagian selanjutnya). Usulan-usulan ini merupakan bagian dari pasal 42 RUU KUHP tahun 1989 dan pasal 36(2)(b) RUU KUHP yang dilampirkan pada Surat Komisi UU No. 218, 1993. DPR belum mengambil tindakan atas kedua rekomendasi tersebut. Komisi Hukum dalam Laporrannya pada tahun 1993 menganggap bahwa setelah House of Lords di Howe dan Gotts menyerukan intervensi parlemen, sudah waktunya bagi Parlemen untuk memperjelas besarnya tekanan yang ada. Perlu dicatat bahwa usulan-usulan tersebut memberikan tugas yang tidak menyenangkan bagi juri untuk menyeimbangkan satu kerugian dengan kerugian lainnya, dan juri mungkin berpendapat bahwa pembunuhan selalu begitu keji sehingga paksaan bukanlah pembelaan, sehingga melemahkan usulan reformasi yang pertama. Juri juga harus menempatkan dirinya pada posisi terdakwa dengan karakteristik jangka panjang

tertentu. Dalam provokasi, pendekatan ini dapat menimbulkan kesulitan. Agaknya hal yang sama bisa terjadi dalam keadaan terpaksa. Salah satu usulan reformasi yang tidak diajukan adalah dengan menghubungkan tingkat keparahan ancaman dengan kejinya kejahatan yang dilakukan: semakin besar kerugian yang ditimbulkan akibat paksaan, semakin besar pula ancaman yang ditimbulkan. Pada tahun 1970-an di *Lynch v DPP untuk Irlandia Utara* [1975] AC 653 dan *Abbott v R* [1977] AC 755, keduanya dibahas di atas, terdapat diktat yang mendukung pendekatan semacam itu. Jika diterima, salah satu dampaknya adalah tidak akan ada batasan mengenai sifat kejahatan yang terancam. Ancaman penjara saja sudah cukup jika tuntutan yang diajukan tidak terlalu besar. Reformasi seperti ini akan menyamakan tekanan dengan pertahanan diri dimana tidak ada batasan mengenai jenis ancaman yang diucapkan atau digunakan. Mungkin masih ada pembatasan terhadap jenis kerugian yang diancam (misalnya tidak ada pembelaan jika kerugiannya adalah hilangnya pekerjaan terdakwa) atau kejahatan yang akan dilakukan (misalnya tidak ada pembelaan terhadap makar). Terdakwa berdasarkan rancangan KUHP tidak akan mendapat pembelaan jika ia membawa sendiri keadaan paksaan tersebut.

7.4 PROPOSAL REFORMASI

Komisi Hukum menyelidiki pemaksaan dalam Lapornya No. 218, Peraturan Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, Cm 2370, 1993. Ayat 25 berbunyi:

- (1) Perbuatan seseorang tidak merupakan suatu delik apabila perbuatan itu dilakukan di bawah paksaan dan ancaman.
- (2) Seseorang melakukan perbuatan di bawah paksaan dengan ancaman, apabila ia melakukannya karena ia mengetahui atau meyakini –
 - (a) Bahwa telah dilakukan ancaman yang mengakibatkan kematian atau luka serius pada dirinya sendiri atau orang lain jika tindakan tersebut tidak dilakukan, dan
 - (b) Bahwa ancaman akan segera dilakukan apabila ia tidak melakukan tindakan tersebut atau, jika tidak segera, sebelum ia atau orang lain tersebut dapat memperoleh perlindungan resmi yang efektif, dan
 - (c) Bahwa tidak ada cara lain untuk mencegah ancaman tersebut dilakukan, dan ancaman tersebut adalah ancaman yang, dalam segala keadaan (termasuk setiap karakteristik pribadinya yang mempengaruhi beratnya) ia tidak dapat diharapkan untuk menolaknya. Terdakwa harus menunjukkan bahwa alasan perbuatannya adalah karena pengetahuan atau keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sampai (c).
- (3) Bagian ini berlaku sehubungan dengan kelalaian sebagaimana berlaku sehubungan dengan perbuatan.
- (4) Bagian ini tidak berlaku bagi seseorang yang dengan sadar dan tanpa alasan yang masuk akal menempatkan dirinya pada risiko ancaman yang dibuat atau diyakini telah dilakukan.

Jika timbul pertanyaan apakah seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan yang masuk akal telah mengekspos dirinya pada risiko tersebut, maka dialah yang harus menunjukkan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut.

Klausul 26, yang memiliki istilah serupa, mengatur tentang paksaan keadaan. Karena klausa-klausa tersebut dirumuskan dengan cara yang sama, maka klausa-klausa tersebut tidak akan dibahas secara terpisah. Definisi paksaan keadaan yang ditemukan dalam cl 26(2) telah disetujui oleh Pengadilan Banding di Baker [1999] 2 Cr App R 335. Salah satu perkembangan yang terjadi setelah penerbitan Laporan adalah Cole [1994] Crim LR 582, di mana pengadilan membedakan antara dua jenis pemaksaan dengan mengacu pada apakah pemaksa mengajukan kejahatan (ancaman) atau tidak (keadaan). Tidak pasti sejauh mana pihak yang memaksa harus menyatakan kejahatan tersebut. Tentu saja dia tidak perlu menentukan cabang lembaga bangunan tertentu yang harus dipertahankan: Ali [1995] Crim LR 303 (CA). Sulit dipercaya bahwa perbedaan ini benar-benar mewakili hukum. Mengapa harus ada tekanan berupa ancaman jika saya mengatakan 'Mencuri dari toko', tetapi ada tekanan karena keadaan jika saya mengatakan 'Ambilkan saya uang'? Usulan-usulan tersebut sebagian mengubah dan sebagian lagi merangkum hukum yang ada saat ini. Misalnya, pasal 25(2)(a) menyatakan bahwa ancaman terhadap pihak ketiga (misalnya sandera) sudah cukup. Komisi Hukum berpendapat dalam Makalah Konsultasi No. 122 yang mendahului Laporan (namanya sama) bahwa terdakwa tidak akan mendapat pembelaan jika ia yakin bahwa perlindungan resmi tidak akan menguntungkannya (seperti di Hudson dan Taylor [1971] 2 QB 202). Rekomendasi ini tidak mendapat tempat dalam Laporan. Tidak ada definisi 'efektif'. Terlebih lagi, pasal 25(2)(c) tidak membahas isu mengenai keyakinan bahwa perlindungan resmi tidak tersedia (bukannya perlindungan resmi tersedia namun tidak efektif). Usulan tersebut, walaupun diajukan sebagai usulan yang mencerminkan undang-undang yang berlaku saat ini, mungkin sebenarnya merupakan perluasan dari usulan tersebut dan menguntungkan terdakwa. Dia tidak perlu lagi mengetahui sepenuhnya, seperti yang dikatakan Lord Griffiths dalam Howe [1987] AC 417, bahwa perlindungan tidak efektif tetapi dia memiliki pertahanan jika dia mengetahui atau meyakinkannya.

Salah satu perbedaan dari undang-undang saat ini adalah perluasan pembelaan terhadap semua pelanggaran termasuk pembunuhan. Hal ini merupakan komitmen Komisi Hukum yang telah lama ada, dan House of Lords di Hasan, berpendapat bahwa perluasan kasus terhadap semua kejahatan adalah hal yang 'tidak dapat ditolak'. Jika Parlemen tidak menyukai usulan ini, Komisi Hukum menyarankan agar paksaan mengurangi kejahatan menjadi pembunuhan tidak berencana. Persemakmuran Australia dalam Undang-Undang KUHP tahun 1995 mengizinkan paksaan sebagai pembelaan terhadap pembunuhan.

Perubahan lainnya adalah usulan penghapusan unsur objektif dalam Graham [1982] 1 WLR 294: apakah terdakwa terpaksa bertindak karena, sebagai akibat dari apa yang ia yakini telah dikatakan atau dilakukan pihak lain, ia mempunyai alasan kuat untuk takut akan kematian. atau cedera serius? Ujian Graham mengenai ketabahan yang masuk akal harus dihapuskan. Rasa takut dapat dipertimbangkan. Namun, terdakwa masih harus diadili berdasarkan standar orang yang masuk akal. Oleh karena itu, terdakwa yang pemalu diadili

berdasarkan standar orang yang pemalu dan wajar. Pengadilan Banding di Baker tidak memperhatikan bahwa istilah keyakinan yang masuk akal dan alasan yang baik untuk percaya tidak ditemukan dalam definisi yang diusulkan tentang paksaan keadaan.

Komisi Hukum mengusulkan perubahan beban pembuktian sehubungan dengan pasal 25(2) dan (4) dan menganggap bahwa perubahan tersebut tidak akan melanggar Pasal 6(2) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Komisi Hukum nampaknya mengambil pandangan ini untuk membuat Parlemen menerima bahwa paksaan harus diterapkan pada pembunuhan. Alasan yang dikemukakan untuk melakukan amandemen tersebut adalah bahwa fakta-fakta yang menimbulkan paksaan tersebut terutama berada di dalam lingkup pengetahuan terdakwa dan anggota geng yang melakukan kekerasan dapat lolos dari kesalahan jika mereka mengarang cerita tentang paksaan. Undang-undang mengenai geng kekerasan belum pernah menimbulkan masalah di masa lalu dan doktrin 'pengetahuan khusus' telah lama diledakkan dalam kasus pembunuhan, dan jika doktrin ini diterapkan pada paksaan, maka doktrin tersebut juga harus diterapkan pada, katakanlah, provokasi; orang yang selain terdakwa mempunyai firasat tentang apa yang terjadi sudah mati. Tidak ada tempat berhenti sehubungan dengan doktrin. Jika terdakwa membunuh, meskipun tidak ada provokasi, tidak boleh ada orang lain yang hadir sebagai saksi. Almarhum memiliki pengetahuan khusus tentang kejadian tersebut, dan korbannya sudah meninggal. Pengadilan Banding Pidana di Spurge [1961] 2 QB 205 dengan tegas menolak doktrin 'pengetahuan aneh' dalam kaitannya dengan provokasi dan pembelaan diri. Paksaan juga demikian. Komisi Hukum berpendapat bahwa jika pembelaan merupakan bagian dari satu insiden, maka penuntut harus memikul bebannya. Jadi, dalam pembelaan diri, tanggung jawab ada pada Mahkota karena terdakwa langsung bereaksi terhadap penggunaan atau ancaman kekerasan, sedangkan dalam paksaan terdapat kesenjangan antara ancaman dan tindakan yang salah. Akan tetapi, untuk membela diri, seseorang dapat melakukan serangan terlebih dahulu, dan dalam keadaan terdesak, ancaman tersebut dapat langsung dikaitkan dengan tindakan: 'lakukan ini sekarang atau saya akan membunuhmu sekarang'. Lebih jauh lagi, dalam keadaan darurat, ancaman hampir selalu dikaitkan dengan tindakan: 'kecuali saya menjatuhkan orang ini dari tangga, kita semua akan mati dalam hitungan detik'. Komisi Hukum kemudian menolak rekomendasinya dan tidak ingin lagi memberikan beban hukum kepada terdakwa. Ada anggapan bahwa hal ini bertentangan dengan pandangan Komisi bahwa usulan tersebut akan melanggar Pasal 6(2), asas praduga tak bersalah, karena Pasal 6(2) tidak memperbolehkan beban hukum bagi terdakwa apabila pengalihan tanggung jawab tersebut tidak proporsional. Lihat juga Lambert [2002] 2 AC 545 (HL), dibahas di Bab 1.

Salah satu aspek dari definisi yang diusulkan harus diperhatikan. Rekomendasi tersebut menegaskan undang-undang saat ini bahwa ancaman kematian atau cedera serius saja sudah cukup untuk memberikan tekanan. Namun, beberapa ancaman yang lebih kecil dapat membuat manusia biasa kewalahan. Lord Simon, berbeda pendapat, dalam *Lynch v DPP* untuk Irlandia Utara [1975] AC 653 menyatakan:

. . . ancaman terhadap harta benda, dalam keadaan tertentu, sama kuatnya dalam menghalangi keinginan pelaku untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang seperti halnya ancaman kekerasan fisik. Misalnya, ancamannya bisa berupa membakar rumahnya kecuali penghuni rumah sekadar berjaga-jaga agar tidak ada gangguan saat kejahatan terjadi. Atau seorang yang melarikan diri dari pengadilan mungkin berkata, 'Saya mempunyai kuasa untuk membuat anak Anda bangkrut. Anda dapat menghindarinya hanya dengan mengantar saya ke bandara.' Bukankah banyak masyarakat awam yang menyerah terhadap ancaman seperti itu, dan bertindak berlawanan dengan keinginan mereka untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum?

Alasan konsesi terhadap kelemahan manusia akan mendukung peraturan tersebut meskipun harus diakui bahwa dasar tersebut telah dirusak oleh otoritas House of Lords yang kemudian, *Howe*, di atas, dan *Gotts* [1992] 2 AC 412. Namun demikian, ada adalah dukungan hukum untuk pembelaan dalam keadaan seperti itu. Undang-Undang Pengrusakan Pidana tahun 1971, pasal 5(2)(b), menetapkan bahwa jika seseorang menghancurkan atau merusak properti 'untuk melindungi properti milik orang lain', ia mempunyai alasan yang sah untuk melakukan pelanggaran pidana pengrusakan.

Dalam *Hurley dan Murray* [1967] VR 526, Pengadilan Penuh Victoria mengatakan bahwa 'Seluruh badan hukum yang berkaitan dengan paksaan berada dalam kondisi yang sangat kabur dan tidak memuaskan. Undang-undang tersebut telah ditegakkan tetapi masih kontroversial. Kami belum mendengar reformasi paksaan yang terakhir, namun menyerukan perubahan, dalam *Hurst* [1995] 1 Cr App R 82, *Cole* [1994] Crim LR 582, *Baker*, dan *Abdul-Hussain* [1999] Crim LR 570, tetap ada tidak dipedulikan oleh pemerintah. Pengadilan Banding mencatat dalam *Safi* di atas, bahwa Parlemen tampaknya puas menyerahkan pengembangan undang-undang tersebut kepada hakim.

7.5 USULAN KOMISI HUKUM TAHUN 2006

Komisi Hukum mengeluarkan Laporan No. 306 tentang Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi pada akhir tahun 2006. Di dalamnya diusulkan bahwa, bertentangan dengan undang-undang saat ini, paksaan baik karena ancaman atau karena keadaan harus menjadi pembelaan terhadap pembunuhan tingkat pertama dan kedua serta percobaan pembunuhan. Untuk pembunuhan tingkat pertama dan kedua. Usulannya berbeda dengan yang dimuat dalam Makalah Konsultasi Undang-Undang Pembunuhan Baru untuk Inggris dan Wales? pada bulan Desember 2005, yang mengusulkan bahwa pembelaan yang berhasil terhadap paksaan akan mengurangi pembunuhan tingkat pertama menjadi pembunuhan tingkat dua, dan juga merekomendasikan bahwa paksaan harus menjadi pembelaan penuh terhadap pembunuhan tingkat dua dan percobaan pembunuhan. Disebutkan (paragraf 6.60) bahwa undang-undang saat ini memberikan hasil yang aneh sehubungan dengan alasan: '. . . dalam kasus provokasi dan berkurangnya tanggung jawab, D tidak membunuh untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah, namun dia memiliki sebagian alasan. Sebaliknya, orang yang memohon paksaan adalah orang yang berusaha menghindari kematian atau cedera fisik yang serius terhadap orang yang tidak bersalah (tidak harus dirinya

sendiri) dengan melakukan tidak lebih dari yang diperlukan untuk menghindari bahaya tersebut. Namun, provokasi dan berkurangnya tanggung jawab bisa dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan, sedangkan paksaan tidak bisa dibenarkan.' (catatan kaki dihilangkan) Komisi sangat mendukung peraturan mengenai luasnya paksaan sebagai pembelaan yang ditetapkan dalam Z [2005] 1 WLR 1269 (CA), yang dikenal sebagai seperti Hasan di House of Lords, mengenai risiko ancaman terhadap pengendara bahwa ancaman yang diyakini ada harus berupa kematian atau bahaya yang mengancam jiwa: saat ini sudah cukup bahwa ancaman tersebut berupa 'bahaya serius', apakah terdakwa yakin ancaman tersebut mengancam jiwa atau tidak. Perlu dicatat bahwa apakah kerugian tersebut mengancam jiwa atau tidak, sebagian bergantung pada usia dan kerentanan korban; Komisi Hukum memberikan contoh berikut: 'juri mungkin akan menyimpulkan bahwa D cukup yakin bahwa ancaman penyiksaan terhadap anaknya yang berusia lima tahun mengandung risiko bahaya yang mengancam nyawa, namun ia mengambil pandangan berbeda jika ancaman penyiksaan ditujukan kepada pasangan D. (paragraf 6.75). Yang berbeda dengan undang-undang saat ini adalah rekomendasi bahwa sehubungan dengan ketiga pelanggaran tersebut, beban pembuktian hukum harus ada pada terdakwa (standar pembuktiannya adalah pada keseimbangan probabilitas).

Komisi Hukum menolak usulan pembelaan sebagian atas paksaan sehubungan dengan pembunuhan tingkat pertama, namun pembelaan penuh terhadap pembunuhan tingkat kedua dan percobaan pembunuhan karena (1) perbedaan hasil yang besar tergantung pada apakah terdakwa mempunyai unsur kesalahan pada pembunuhan tingkat pertama. pembunuhan tingkat, (2) unsur kebetulan, yang diilustrasikan dengan contoh berikut (paragraf 6.26–7):

D, di bawah tekanan, menembakkan V1 dan V2 dengan maksud untuk membunuh, membunuh V1 tetapi tidak membunuh V2 [Jika rekomendasi Makalah Konsultasi telah diadopsi,] D akan mendapat pembelaan sebagian sehubungan dengan pembunuhan V1 tetapi pembelaan penuh sehubungan dengan percobaan pembunuhan V2. Unsur peluang tersedia atau tidaknya pertahanan penuh, tergantung berhasil tidaknya D menjalankan instruksinya, menjadikan opsi ini kurang menarik.

Komisi juga berpandangan kuat bahwa 'secara prinsip' (paragraf 6.28) paksaan harus menjadi pembelaan menyeluruh terhadap pembunuhan tingkat pertama. Mengutip Laporan Komisi Hukum No. 83 tentang Pembelaan Penerapan Umum, 1977, paragraf 2.43, apabila paksaan begitu kuat sehingga terdakwa tidak dapat diharapkan untuk menolaknya, itu akan tidak adil bahwa terdakwa harus menderita stigma hukuman bahkan untuk pembunuhan yang tidak disengaja. Kami berpendapat bahwa tujuan sosial tidak akan tercapai jika undang-undang menetapkan standar determinasi dan kepahlawanan seperti itu.

Selain itu, apa manfaatnya jika terdakwa dihukum dalam kondisi seperti ini? Komisi mengutip pandangan dari Asosiasi Pengacara Kriminal (paragraf 6.51): 'jika paksaan bukan merupakan pembelaan penuh terhadap pembunuhan tingkat pertama, hal ini akan memberikan kesan bahwa, secara hukum, "lebih baik mencegah kematian orang asing daripada mencegah kematian anak-anaknya."'

Komisi menolak analogi apa pun dengan provokasi dan berkurangnya tanggung jawab, yang menurut skema yang diusulkan hanya akan menjadi pembelaan terhadap pembunuhan tingkat pertama dan akan berujung pada hukuman atas pembunuhan tingkat kedua. Komisi mencatat bahwa kadang-kadang tekanan namun bukan provokasi atau pengurangan tanggung jawab hampir merupakan pembelaan yang dapat dibenarkan dan Komisi memberikan contoh, yang diambil dari keadaan yang memaksa, di mana seorang pendaki gunung yang bertali memotong tali untuk menyelamatkan nyawanya sendiri padahal dia tidak melakukannya. hentikan, keduanya akan mati. Ia menolak argumen bahwa seseorang yang dengan sengaja membunuh tidak seharusnya mempunyai pembelaan yang lengkap. Hal ini juga menolak anggapan bahwa membunuh demi membela diri sendiri secara moral lebih buruk daripada membunuh demi membela orang lain. Perjanjian ini memberikan (paragraf 6.56) beberapa contoh yang mendukung tidak adanya pembedaan, termasuk: 'Seorang paman yang diancam akan dibunuh melakukan pembunuhan agar ia dapat mendonorkan ginjalnya kepada keponakannya yang sakit parah.' Perjanjian ini menolak argumen bahwa pihak utama dan pihak sekunder dapat menjadi pihak yang terlibat. dibedakan karena kaki tangan yang bertindak di bawah tekanan mungkin sama bersalahnya dengan pelaku. 'Misalnya, seorang suami dan istrinya diberitahu bahwa anaknya akan dibunuh kecuali mereka membunuh V yang merupakan saudara laki-laki sang suami. Mereka sepakat bahwa sang istri akan melakukan pembunuhan dan sang suami akan berjaga-jaga. Adalah salah jika memberikan pembelaan sepenuhnya kepada suami, tetapi tidak kepada istri.' (paragraf 6.57)

Komisi Hukum juga mengusulkan untuk mempertahankan batasan 'keyakinan yang masuk akal'; yaitu, bahwa terdakwa harus yakin atas dasar alasan yang masuk akal bahwa suatu ancaman memang ada dan bahwa ancaman tersebut akan dilaksanakan: Graham di atas disetujui oleh House of Lords di Howe, di atas. Rancangan KUHP tahun 1989 dan Laporan Komisi Hukum No. 218, Peraturan Perundang-undangan KUHP: Penganiayaan terhadap Pribadi dan Asas-asas Umum, tahun 1993, sebelumnya telah menyerukan adanya uji subyektif, sebagaimana hukum dalam pembelaan diri dan provokasi, namun Laporan tahun 2006 membedakan pembelaan tersebut: jika terjadi tekanan, terdakwa biasanya mempunyai waktu untuk memikirkan ancamannya, sedangkan dia tidak akan melakukan pembelaan diri dan provokasi; lebih jauh lagi, karena dalam kaitannya dengan pencurian dan pelanggaran lainnya, undang-undang menyatakan bahwa harus ada keyakinan yang masuk akal, maka akan menjadi anomali jika tes subjektif digunakan dalam pembunuhan tingkat pertama dan kedua serta dalam percobaan pembunuhan.

Namun, 'kami tidak melihat alasan mengapa karakteristik tertentu dari D tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah keyakinannya diterima secara wajar atau tidak. Hal ini akan memungkinkan pertimbangan mengenai usia dan kerentanan D.' (paragraf 6.81) Lebih lanjut diusulkan agar undang-undang tentang paksaan harus diselaraskan dengan undang-undang tentang provokasi (lihat A-G untuk *Jersey v Holley* [2005] 2 AC 580 (PC) dibahas dalam Bab 12) sehubungan dengan kriteria 'ketegasan yang wajar': 'juri berhak untuk mempertimbangkan semua keadaan D, termasuk usianya, selain dari yang mempengaruhi kemampuannya untuk menahan tekanan.' (paragraf 6.84) Rekomendasi ini akan mengarah

pada pembalikan Bowen di atas dalam kaitannya dengan tiga kejahatan yaitu pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua dan percobaan pembunuhan: karena kejahatan lainnya Bowen akan tetap ada.

Paksaan

Pemaksaan (jarang digunakan) merupakan pembelaan yang serupa dengan paksaan, namun hanya dapat dilakukan oleh wanita yang sudah menikah. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut sebagai 'paksaan perkawinan' untuk membedakannya dari pembelaan terhadap paksaan. Sebelum tahun 1925, orang tersebut mendapat pembelaan jika dia melakukan kejahatan selain pengkhianatan atau pembunuhan di hadapan suaminya. Salah satu argumen yang mendukung pembelaan ini adalah jika sang suami dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, ia tidak akan digantung karena pelanggaran pertama karena, jika ia dapat membaca ayat tertentu dari Alkitab, ia tidak akan dieksekusi (ia menerima 'keuntungan dari pendeta'.) sedangkan perempuan yang tidak mampu menjadi ulama akan digantung. Argumen yang menentang adanya pembelaan ini dikemukakan dengan kuat dalam kasus Amerika, *US v de Quilfeldt* (1881) 5 F 276. Pemaksaan adalah 'peninggalan keyakinan akan ketidaktahuan dan sifat pengecut perempuan'. Undang-undang tersebut kini tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1925, namun tidak mendefinisikan pemaksaan.

Segala anggapan hukum bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang isteri di hadapan suaminya, dilakukan di bawah paksaan suami dengan ini dihapuskan, tetapi atas tuduhan terhadap isteri atas tindak pidana apa pun selain makar atau pembunuhan, maka anggapan tersebut merupakan suatu perbuatan baik. pembelaan untuk membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan di hadapan, dan di bawah paksaan, suami.

Pembalikan beban pembuktian mungkin menjadi satu-satunya alasan diberlakukannya pasal 47. Ada anggapan bahwa beban pembuktian hanya dibebankan pada istri, namun kasusnya tidak demikian. Bebannya ada pada keseimbangan probabilitas: Richman [1982] Crim LR 507 (Crown Court).

Tidak diketahui situasi fakta mana yang dapat menimbulkan pembelaan ini. Pada suatu waktu ada anggapan bahwa pemaksaan hanyalah sebuah nama untuk pembelaan terhadap paksaan jika terdakwanya adalah seorang wanita yang sudah menikah. Dengan kata lain, batas-batas paksaan adalah batas-batas pemaksaan. Pandangan modern berpendapat bahwa pemaksaan lebih luas daripada paksaan dan mencakup hal-hal seperti ancaman dari suami untuk tidak membelikan makanan untuk istri dan anak-anaknya, ancaman untuk meninggalkan istri, dan ancaman untuk membawa simpanan ke dalam rumah perkawinan. Karena baik Parlemen maupun common law tidak mendefinisikan istilah tersebut, Lord Simon dalam *Lynch v DPP untuk Irlandia Utara* [1975] AC 653, di atas, mengatakan bahwa pemaksaan 'digunakan dalam pengertian biasa

. . .'. Hal ini tidak terbatas pada ancaman. Richman berpendapat bahwa tidak diperlukan kekuatan fisik. Pengadilan Banding di *Ditta* [1988] Crim LR 43 menolak pembelaan ketika istri bertindak karena kesetiaan. Ujian bagi pemaksaan dalam diri Richman adalah: apakah dia bertindak dengan sukarela? Pemaksaan dapat berupa tindakan yang berlebihan terhadap

keinginan dengan cara moral yang tidak setara dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan tersebut. Tes ini disetujui oleh Pengadilan Banding di Shortland [1996] 1 Cr App R 116. Dalam Ditta tesnya adalah: *'Apakah dia dipaksa oleh suaminya baik oleh proses fisik, moral, psikologis atau mental, untuk melakukan apa yang tidak dia inginkan? sebaliknya telah melakukan?'* Dalam tekanan, ancaman untuk mengungkap homoseksualitas terdakwa tidaklah cukup. Apakah ancaman untuk mengungkapkan lesbianisme istri kepada pers tabloid merupakan ancaman yang menyebabkan tekanan 'moral, psikologis, atau mental'? Jika ancamannya berupa kematian atau cedera serius, baik paksaan maupun paksaan mungkin bisa dilakukan, namun perlu dicatat bahwa paksaan lebih sempit daripada paksaan dalam satu hal: 'kejahatan' harus dilakukan di hadapan suaminya. Istilah 'kehadiran' belum menjadi subjek panduan resmi. Dalam Caroubi (1912) 7 Cr App R 149 dinyatakan bahwa istri cukup berada dalam jangkauan pandangan suami. Kehadirannya tak sebatas berada di samping suami. Dalam Whelan [1937] SASR 237 pengadilan memutuskan bahwa 'cukuplah jika suami berada dalam situasi di mana dia cukup dekat untuk mempengaruhi istri dalam melakukan apa yang ingin dilakukannya, bahkan jika dia tidak secara fisik hadir di dalam ruangan'.

Ditta adalah kasus yang berwibawa. Terdakwa ketiga didakwa terlibat dalam impor heroin. Dia berpendapat bahwa terdakwa kedua, yang dia yakini sebagai suami darinya, telah membujuknya untuk mengikatkan obat tersebut ke tubuhnya saat berada di pesawat yang akan mendarat di Heathrow. Pengadilan menyatakan bahwa undang-undang tersebut, yang secara lugas, tidak memberikan pembelaan dalam situasi seperti itu. Dia harus membuktikan bahwa dia menikah dengan si pemaksa. Fakta bahwa dia percaya, bahkan dengan alasan yang masuk akal, bahwa dia menikah dengannya tidaklah cukup. (Bandingkan dengan paksaan ketika terdakwa mempunyai pembelaan jika ia yakin dengan alasan yang masuk akal bahwa ia wajib melakukan hal tersebut.) Pengadilan tidak menjawab pertanyaan apakah perkawinan poligami akan menimbulkan pembelaan ini, namun petunjuknya adalah bahwa itu tidak akan terjadi. Pengadilan membedakan pembelaan atas kesalahan dengan bigami, yang hanya bisa dilakukan bila terdakwa melakukan kesalahan atas dasar yang masuk akal, karena memperhatikan kesalahan sebagai elemen penting dalam pelanggaran, sedangkan dalam pemaksaan, kesalahannya adalah pembelaan. Oleh karena itu, apabila seseorang meyakini dengan alasan yang masuk akal bahwa suaminya telah meninggal, maka ia tidak bersalah atas pelanggaran bigami, namun jika ia meyakini dengan alasan yang masuk akal bahwa ia telah menikah maka ia tidak dapat melakukan pembelaan atas paksaan. Tentu saja seorang wanita simpanan tidak mempunyai pembelaan seperti ini.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Komisi Hukum pada tahun 1978, 1989 dan 1993 mengusulkan penghapusan pemaksaan. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan modern tentang pernikahan dan berbasis gender. Mungkin mengejutkan bahwa ia bisa bertahan begitu lama.

Satu hal yang harus diwaspadai pembaca adalah bahwa terminologi yudisial dan akademis berbeda-beda. Terkadang paksaan seperti paksaan digunakan sebagai sinonim dari paksaan. Biasanya di zaman modern, pemaksaan berarti pembelaan tersendiri berdasarkan undang-undang tahun 1925.

7.6 KEBUTUHAN DAN PAKSAAN KEADAAN

Jika teroris mengarahkan pesawat ke Canary Wharf di London, bolehkah Angkatan Darat menembak jatuhnya? Lord Goff dalam *Richards*, tidak dilaporkan, 10 Juli 1986 (HL) mengatakan: 'Bahwa terdapat pembelaan atas kebutuhan dalam common law, yang mungkin . . . digunakan untuk membenarkan apa yang seharusnya merupakan pelanggaran terhadap tanah, tidak diragukan lagi. Namun ruang lingkup pembelaannya sama sekali tidak jelas.' Pernyataan ini tidak jelas, namun memberikan gambaran mengenai topik ini. Lord Goff telah mengembangkan pandangannya melalui *Re F* [1990] 2 AC 1, sebuah kasus perdata. Dia menyatakan bahwa pembelaan memang ada berdasarkan common law untuk membuat hal-hal yang seharusnya menjadi kriminal menjadi sah: (1) kebutuhan publik (misalnya untuk membuat sekat api pada Kebakaran Besar di London); (2) kebutuhan pribadi (misalnya menyebabkan kerusakan kriminal pada properti tetangga untuk menyelamatkan diri dari bahaya); dan (3) 'Tindakan yang dilakukan karena kebutuhan untuk membantu orang lain tanpa persetujuannya.' Contoh kategori ketiga yang beliau berikan adalah menyeret seseorang dari jalur kendaraan yang melaju. Ia membatasi kategori (3) pada kasus-kasus di mana komunikasi dengan orang yang dibantu tidak dapat dilakukan dan tindakan yang dilakukan adalah 'seperti yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dalam segala situasi, bertindak demi kepentingan terbaik orang yang dibantu'. Fakta *Re F* termasuk dalam kategori ketiga. Seorang pasien yang sakit jiwa dapat disterilkan ketika dia tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan persetujuan asalkan operasi tersebut adalah demi kepentingan terbaiknya. Tidak dapat dipastikan apakah klasifikasi Lord Goff bersifat menyeluruh.

Kasus-kasus modern cenderung berasumsi bahwa ada pembelaan. Dalam *Pengadilan Magistrat Hutchinson v Newbury*, yang tidak dilaporkan, pada tanggal 9 Oktober 2002, *Pengadilan Administratif Divisi Queen's Bench* mengatakan bahwa permohonan yang berhasil memerlukan respons yang masuk akal dan proporsional terhadap bahaya yang ada dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Formula serupa diadopsi oleh pengadilan yang sama dalam *DPP v Hicks*, tidak dilaporkan, 19 Juli 2002. Tidak ada pembelaan atas kebutuhan dimana terdakwa mengemudi dengan alkohol berlebih dalam darahnya untuk mendapatkan sebotol obat dari apotek karena tidak ada risiko bahaya serius pada anak atau penggunaan obat tidak akan mengurangi risiko bahaya. Dalam *S* [2001] 1 WLR 2206 *Pengadilan Tinggi* menetapkan persyaratan pembelaan sebagai berikut: 'perbuatan tersebut harus dilakukan hanya untuk mencegah suatu perbuatan kejahatan yang lebih besar: kejahatan tersebut harus ditujukan kepada terdakwa atau seseorang. . . untuk siapa dia mempunyai tanggung jawab. . . ; tindakan tersebut harus masuk akal dan proporsional dengan kejahatan yang dihindari.'

Kasus-kasus baru-baru ini berfokus pada kebutuhan sebagai upaya untuk menghindari penggunaan obat-obatan terlarang seperti ganja untuk meringankan dampak cedera yang melemahkan. Dalam *Altham* [2006] EWCA Crim 7 dinyatakan bahwa terdakwa tidak dapat mengandalkan Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (tidak ada perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia) untuk memperkuat pembelaan karena kondisi terdakwa tidak diperburuk oleh negara mana pun. bertindak. Dalam *Quayle* [2006] 1 WLR 3642 (CA) dinyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menggunakan ganja untuk

menghilangkan rasa sakit. Membiarkan pembelaan tidak sesuai dengan skema undang-undang untuk mengatur obat-obatan terlarang. Pengadilan tidak memutuskan apa yang akan menjadi undang-undang jika tidak ada undang-undang di lapangan. Pengadilan menekankan bahwa tidak ada doktrin keharusan yang menyeluruh, namun hanya ada satu contoh saja. Kasus-kasus tunggal tersebut diputuskan berdasarkan fakta-fakta khusus yang ada. Sejauh pembelaan itu ada, maka pembelaan tersebut serupa dengan paksaan dan harus dijaga dalam batas-batas yang sama dengan pembelaan seperti yang ditetapkan dalam Hasan (di atas). Pengadilan mengesahkan suatu poin hukum yang penting bagi masyarakat umum tetapi menolak izin untuk mengajukan banding. Pengadilan di Quayle juga memutuskan bahwa menolak pembelaan atas fakta-fakta tersebut tidak melanggar Pasal 8 Konvensi.

Dalam salah satu kasus terbaru tentang kebutuhan sebagai pembelaan pilihan kejahatan, *Jones v Gloucestershire Crown Prosecution Service* [2005] QB 259 (CA) pengadilan menyatakan bahwa ketika terdakwa mengira dia memiliki pilihan antara melakukan kejahatan yang tidak terlalu serius dan melakukan tindakan yang lebih serius dan dia memilih yang pertama, yang terakhir pasti merupakan kejahatan menurut hukum Inggris. Oleh karena itu, ketika para terdakwa melakukan berbagai pelanggaran di RAF Fulford dengan tujuan, menurut mereka, untuk mencegah agresi Inggris dan Amerika Serikat terhadap Irak, mereka tidak mempunyai pembelaan karena tidak ada kejahatan agresi dalam hukum Inggris, bahkan jika itu adalah kejahatan agresi. suatu pelanggaran dalam hukum internasional. House of Lords juga menyatakan hal serupa: *Jones* [2006] UKHL 16.

Dalam paksaan, terdakwa mempunyai pilihan untuk melanggar hukum atau melakukan kejahatan terhadap dirinya atau orang lain oleh seseorang. Dalam keadaan terpaksa terdakwa berada pada kedudukan yang sama, kecuali pilihan itu dibebankan kepadanya oleh peristiwa alam atau oleh keadaan lain yang bukan merupakan ancaman dari seseorang dalam bentuk 'lakukan ini atau yang lain' (saya akan membunuhmu, dll.) . Dalam *Howe* di atas, House of Lords menganggap paksaan sebagai sebuah kebutuhan. Namun paksaan pada umumnya merupakan suatu pembelaan, sedangkan keharusan pada umumnya bukan merupakan pembelaan, seperti yang baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Pengadilan Tinggi dalam *Rodger* di atas. Dalam *Cichon v DPP* [1994] Crim LR 918 Pengadilan Divisi menerima adanya pembelaan ini tetapi berpegang pada fakta bahwa Parlemen telah mengecualikannya sehubungan dengan kejahatan membiarkan seekor pit bull terrier berada di tempat umum tanpa moncong oleh kata-kata pelanggarannya. Parlemen telah melakukan pelanggaran demi keselamatan publik. Kebijakan tersebut tidak boleh dirusak oleh keputusan terdakwa yang menyatakan bahwa pelepasan moncong senjata melebihi keselamatan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pencabutan moncong tersebut merupakan perwujudan fisik dari motif baik terdakwa, yaitu pencegahan kekejaman terhadap anjing: terdakwa melepaskannya karena anjing tersebut sedang batuk. Alasan pengadilan lemah. Keharusan, jika ada, merupakan pembelaan terhadap semua pelanggaran (kecuali mungkin pelanggaran yang bukan merupakan pembelaan terhadap paksaan), termasuk pelanggaran hukum. Parlemen jarang menyatakan secara tegas bahwa pembelaan tertentu berlaku terhadap kejahatan yang ditimbulkannya. Mungkin pengadilan akan mengizinkan pembelaan jika terdakwa melepaskan

moncongnya sehingga anjingnya bisa menggigit lengan orang yang sedang merampok kantor pos. Cara lain untuk mencapai hasil yang sama adalah dengan mengatakan bahwa pada kenyataannya tidak ada pembelaan terhadap kebutuhan karena kejahatan didefinisikan dalam bentuk mengizinkan anjing berbahaya berada di tempat umum. Terdakwa bisa saja menyimpannya di tempat pribadi sampai batuknya sembuh. Dengan cara ini kemungkinan pembelaan bisa diterima. *Cichon v DPP* juga menggambarkan perbedaan antara tekanan keadaan dan pembelaan yang sebenarnya atas kebutuhan. Pembelaan pertama hanya berlaku jika terdakwa bertindak untuk mencegah kematian atau cedera serius pada seseorang, dan seekor anjing bukanlah seseorang. Keharusan tidak begitu dibatasi dan berlaku kapan pun kebaikan yang lebih besar dilakukan, dan faktanya mungkin saja ada kebaikan yang lebih besar. Di *Rodger* para terdakwa keluar dari penjara karena memiliki kecenderungan bunuh diri. Pengadilan menganggap paksaan dan keadaan sebagai hal yang sama, namun sebenarnya tidak demikian. Sekalipun membobol penjara adalah hal yang lebih baik daripada melakukan bunuh diri, pembelaan bukanlah suatu keharusan, namun karena paksaan keadaan. Mereka bertindak di bawah ancaman terhadap kehidupan mereka.

Oleh karena itu, misalnya, seorang dokter tidak dapat mengambil darah dari orang yang tidak memberikan persetujuannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Hal ini bukanlah pembelaan, meskipun tindakan terdakwa memberikan nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh jika ditaati oleh hukum. Kerugian sosial yang ditimbulkan mungkin lebih kecil dengan memberikan pembelaan dibandingkan jika tidak memberikan pembelaan.

Bagian ini mempertimbangkan kebutuhan dan paksaan keadaan. Ada pendapat bahwa alasan pembelaan ini, jika ingin dibedakan (hukum kasusnya masih belum jelas), berbeda. Jika perlu, terdakwa memilih kejahatan yang lebih ringan: tekanan harus sangat besar. Dalam keadaan terdesak, terdakwa bertindak karena tekanan: ia tidak perlu memilih kejahatan yang lebih ringan. Jeremy Horder dalam 'Self-defence, necessity and force: Understanding the Relationship' (1998) 11 *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 143 membedakannya sebagai berikut:

Dalam kasus-kasus yang membutuhkan, isu kuncinya adalah keharusan moral untuk bertindak: yang penting adalah apakah dalam situasi tersebut tindakan tersebut merupakan keharusan secara moral, bahkan jika hal ini mungkin melibatkan tindakan yang salah, untuk meniadakan atau menghindari kejahatan lainnya. Dalam kasus-kasus paksaan, persoalan utamanya adalah pengorbanan pribadi yang diminta untuk dilakukan oleh [terdakwa]: apakah [terdakwa] diharapkan melakukan pengorbanan pribadi dengan menolak menyerah pada ancaman yang memaksa, daripada menghindari penerapan ancaman paksaan? ancaman paksaan dengan berbuat salah?

Disarankan bahwa bertentangan dengan pandangan Lord Woolf CJ di S, di atas, terdapat perbedaan. Landasan yuridis, ancaman karena paksaan dan pilihan kejahatan yang lebih ringan jika diperlukan, telah disebutkan. Seperti yang akan kita lihat, Pengadilan Banding dalam *Re A* [2001] Fam 147 mengizinkan pembelaan atas dasar kebutuhan terhadap fakta-fakta yang merupakan pembunuhan, jika kasus tersebut merupakan kasus pidana, setidaknya

berdasarkan fakta-fakta khusus dari kasus tersebut. Paksaan bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan. Selain itu, paksaan hanya terbatas pada ancaman kematian atau luka fisik yang parah, namun disarankan agar tidak demikian halnya dengan keharusan. Apakah ada keraguan bahwa seseorang mungkin akan menembak jatuh sebuah pesawat yang disita oleh teroris yang bermaksud untuk menabrakkannya ke Canary Wharf? Terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh *Re A*, kebutuhan dapat menciptakan kewajiban untuk bertindak; namun, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, paksaan tidak menimbulkan kewajiban seperti itu. House of Lords dalam *Shayler* [2003] 1 AC 247 yang merupakan banding dari *S* mengatakan bahwa Law Lords tidak setuju dengan semua yang dikatakan di Pengadilan Banding tentang perlunya tetapi sayangnya tidak merinci secara spesifik poin-poin yang mana. mereka tidak setuju.

Dudley dan Stephens

Alasan utama mengapa kebutuhan tidak muncul sebagai pembelaan adalah *Dudley dan Stephens* (1884) 14 QBD 273, salah satu kasus hukum pidana Inggris yang paling terkenal. Empat pria terapung di dalam perahu. Dua orang, setelah beberapa hari tanpa makanan dan air, berdoa (bukan Grace!) dan membunuh yang paling lemah, Parker, awak kabin. Setelah dirujuk ke pengadilan yang terdiri dari lima hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman gantung. Namun hukumannya diubah menjadi enam bulan penjara. (Untuk rincian lebih lanjut tentang kejadian ini dan kejadian serupa lainnya, lihat A. W. B. Simpson, *Cannibalism and the Common Law* (University of Chicago Press, 1984).)

Dudley dan Stephens adalah kasus yang menarik. Tidak diketahui secara pasti apakah korban akan meninggal. Tidak lama setelah dia terbunuh, para korban berhasil diselamatkan. Awak kabin tidak membawa terdakwa mendekati kematian. Kasusnya tidak seperti kasus hipotetis yang melibatkan dua orang pendaki gunung yang bertali; yang lebih rendah jatuh, menyeret yang atas ke bawah; beberapa detik sebelum mereka berdua terbunuh, yang di atas memotong talinya sehingga mempercepat kematian yang di bawah. Orang yang lebih rendah tidak punya peluang untuk bertahan hidup, apa pun yang terjadi. Berdasarkan fakta tersebut, orang yang lebih rendah sedang menyeret orang yang lebih tinggi menuju kematiannya. Parker tidak rela mati, dan dia mungkin masih hidup, seandainya dia diizinkan memakan salah satu dari yang lain. Lebih jauh lagi, meskipun terdakwa tidak mempunyai pembelaan, tidak dapat dipastikan apa yang mereka tidak punya pembelaan. Ada tiga pandangan:

- (a) *Dudley dan Stephens* berpendapat bahwa tidak ada pembelaan umum atas keharusan dalam hukum pidana. Lord Coleridge mengatakan bahwa jika keadaan darurat dibiarkan, maka hal ini akan menjadi tabir bagi 'nafsu yang tidak terkendali dan kejahatan yang keji'. Pendekatan ini merupakan pandangan terluas mengenai rasio.
- (b) Kebutuhan bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan. Ini adalah pendirian tegas dari hakim, Lord Coleridge. House of Lords mengambil pendekatan ini di *Howe*, di atas. Pandangan ini memungkinkan *Dudley dan Stephens* untuk dibedakan dari kasus-kasus yang akan segera disebutkan dimana kebutuhan adalah pembelaan.
- (c) Pandangan yang paling sempit adalah bahwa fakta-fakta tersebut tidak diperlukan. Oleh karena itu, pengadilan tidak menolak pembelaan baik secara umum maupun

husus sehubungan dengan pembunuhan. Begitulah pendekatan yang dilakukan Pengadilan Victoria di Loughnan [1981] VR 443. Kasus ini, seperti banyak kasus di AS, menangani seorang tahanan yang melarikan diri dari penjara untuk menghindari pembunuhan. Pengadilan memutuskan bahwa dalam keadaan luar biasa diperlukan pembelaan. Syarat-syarat pembelaan adalah: kejahatan harus dilakukan untuk menghindari kejahatan yang tidak dapat diperbaiki terhadap terdakwa atau terhadap orang-orang yang wajib dilindunginya; bahayanya harus segera terjadi; dan responsnya harus proporsional dengan bahayanya. Pendekatan ini mendapat dukungan dari putusan khusus juri yang menyatakan bahwa terdakwa kemungkinan besar akan mati jika mereka tidak memakan anak tersebut, namun putusan tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada peluang nyata untuk bertahan hidup kecuali dengan memakan seseorang. Jika tidak ada kebutuhan, semua yang dikatakan tentang pertahanan adalah obite.

Apapun pandangan Dudley dan Stephens yang sebenarnya, kasus ini telah menghambat perkembangan hukum yang rasional. Perlu juga dicatat bahwa:

- (a) Fakta-fakta dalam kasus ini sangat aneh. Ada keadaan darurat. Diperlukan tindakan segera berdasarkan fakta-fakta yang dinilai oleh para terdakwa. Kadang-kadang dikatakan bahwa memberikan pembelaan atas kebutuhan akan berbahaya karena dapat digunakan sebagai alasan yang mudah. Namun, tidak ada yang palsu tentang fakta Dudley dan Stephens. Bahkan kerabat awak kabin pun tidak menganggap bahwa para terdakwalah yang patut disalahkan. Menurut pandangan ini, buruknya situasi yang dialami para terdakwa seharusnya menjadi alasan bagi mereka. Mereka tidak berargumen bahwa nyawa anak laki-laki tersebut lebih rendah nilainya dibandingkan nyawa mereka (sebuah pendekatan yang bersifat pembenaran, jika berhasil) namun mereka tidak patut disalahkan karena situasi yang mereka alami.
- (b) Pengadilan enggan memberikan pembelaan jika terdapat tindakan amoral. Lord Coleridge, saat memberikan penilaian utama, mencatat bahwa pihak yang paling lemah telah dipilih untuk dibunuh, dan dia mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, orang-orang berkewajiban untuk mengorbankan nyawa mereka.
- (c) Karena situasi yang sangat ekstrem, maka tidak ada tindakan jera untuk mengancam hukuman atau bahkan menggantung terdakwa. Dengan membunuh korban, terdakwa memperoleh sedikitnya beberapa bulan kehidupan, dan berdasarkan fakta, mereka memperoleh sisa kehidupan alami mereka. Jika mereka tidak memakan awak kabin, mereka mungkin sudah mati sebelum bisa diselamatkan. 'Alasan mendasar untuk mengizinkan pembelaan yang diperlukan adalah karena mengingat keadaan, tujuan hukuman yang lazim berdasarkan hukum pidana tidak akan terpenuhi.' Demikian tulis M.R. Conde (1981) 29 UCLA LR 409 (ejaan dalam bahasa Inggris). Sekalipun tidak adanya pembelaan yang diperlukan dapat dibenarkan dengan alasan bahwa hukum pidana ada untuk memberikan efek jera, pembenaran tersebut tidak menunjukkan mengapa orang-orang yang melakukan tindakan seperti kebanyakan orang harus dihukum.

- (d) Menghukum Dudley dan Stephens berarti menerapkan standar di atas standar orang yang berakal sehat, sebagaimana dicatat oleh pengadilan. Tentu saja hukum pidana tidak boleh didasarkan pada kesucian. Lord Hailsham, bagaimanapun, di Howe, di atas, berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu orang yang berakal sehat akan mati. Hukum pidana mungkin juga dipandang memberikan dukungan terhadap etika Yahudi-Kristen: Jangan membunuh. Pembunuhan yang disengaja tidak dapat diterima. Memberikan pembelaan mungkin akan membuat sebagian masyarakat percaya bahwa beberapa bentuk pembunuhan yang disengaja dapat diterima.
- (e) Berdasarkan fakta Dudley dan Stephens, dapat dikatakan bahwa kedua kemungkinan kerugian tersebut tidak dapat diseimbangkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat mengukur kematian. Terdakwa, dalam jargon AS, membuat pilihan yang tidak dapat dimaafkan. Prinsip-prinsip yang berbeda mungkin berlaku jika terdakwa menimbulkan kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan ancaman akibat kejadian alam.
- (f) Dalam situasi serupa, pengadilan AS, Pengadilan Sirkuit untuk Distrik Timur Pennsylvania, memutuskan dalam *US v Holmes (1846)* 26 Fed Cas 360 bahwa harus ada seleksi melalui undian. Memilih berdasarkan undian akan mengecualikan pelaut yang membuang penumpang ke laut dengan sekoci yang kelebihan muatan. Dudley dan Stephens dapat dibedakan karena kasusnya tidak melibatkan seleksi secara kebetulan. Agaknya mereka yang dibuang ke laut secara hukum tidak mempunyai hak untuk melawan agar tidak dibuang ke laut, meskipun orang yang menolak akan diadili terlepas dari apakah perlawanannya berhasil atau tidak. Secara kebetulan pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada terdakwa, hasil akhir yang sama seperti yang dijatuhkan pada Dudley dan Stephens.

Mungkin Lord Coleridge tidak akan berargumen seperti itu seandainya dia tahu bahwa terdakwa benar-benar akan digantung, meskipun menurut pendapat penulis, pandangan seperti itu tidak boleh dipercaya berdasarkan ungkapan pidatonya. Namun demikian, harus diingat bahwa dari sudut pandang preseden, kasus ini bukanlah kasus House of Lords.

Meskipun ketiga hakim tersebut mengatakan hal yang berbeda, Ward LJ yang duduk di Pengadilan Tinggi di *Re A*, di atas, dalam kasus perdata, mengatakan bahwa dalam beberapa keadaan yang diperlukan adalah pembelaan terhadap pembunuhan. Faktanya ahli bedah yang memisahkan kembar siam tidak bersalah melakukan pembunuhan meskipun mereka tahu pasti salah satu dari si kembar akan meninggal. Brooke LJ membedakan Dudley dan Stephens. Pertama, kata dia, keputusan membunuh awak kabin itu sewenang-wenang, tapi di *Re A* sudah pasti kembaran mana yang akan mati. Kedua, Lord Coleridge dalam Dudley dan Stephens mengatakan bahwa jika hukum pidana memberikan pembelaan kepada terdakwa, maka akan terjadi perceraian total antara hukum dan moralitas; namun, di *Re A* beberapa orang akan mengatakan bahwa membunuh saudara kembar yang lebih lemah untuk menyelamatkan saudara yang lebih kuat bukanlah hal yang tidak bermoral daripada membiarkan mereka berdua mati. Kasus ini setidaknya sebagian berdasarkan pada faktanya sendiri: saudara kembar yang meninggal membawa saudara kembar lainnya semakin dekat dengan kematian, namun saudara kembar tersebut dapat bertahan hidup sendiri. Dengan

kata lain, jika kebutuhan memiliki alasan yang 'lebih kecil kejahatannya', maka membunuh salah satu saudara kembar adalah lebih rendah kejahatannya daripada membiarkan keduanya mati.

Sulit untuk merekonsiliasi keputusan ketiga Hakim Agung di *Re A. Brooke LJ* dipersiapkan berdasarkan fakta untuk memungkinkan pembelaan jika diperlukan. Keharusan memiliki tiga syarat: tindakan tersebut diperlukan untuk menghindari 'kejahatan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diperbaiki', terdakwa tidak boleh melakukan lebih dari yang diperlukan secara wajar untuk menghindari kejahatan; dan kejahatan yang dilakukannya tidak boleh sebanding dengan kejahatan yang dapat dicegah. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa ketiga kondisi ini terpenuhi dalam diri Dudley dan Stephens, yang oleh karena itu seharusnya mendapat pembelaan. Sebaliknya dia, bersama saudara-saudaranya, mengatakan bahwa para pelaut tersebut memang pantas dihukum. Walker LJ, obiter, berpikir bahwa kebutuhan harus diperluas untuk mencakup kasus ini tetapi tidak lebih jauh lagi. Ward LJ mengizinkan pembelaan tetapi hanya dalam keadaan berikut: '. . . mustahil mempertahankan kehidupan X tanpa mengakibatkan kematian Y, . . . Y dengan keberadaannya yang terus-menerus pasti akan menyebabkan kematian X dalam waktu singkat, dan. . . X mampu hidup mandiri tetapi Y tidak mampu dalam kondisi apapun. . . keberadaan independen yang layak.' Oleh karena itu, hanya Brooke LJ yang akan sampai pada kesimpulan yang berbeda dari Coleridge J dalam Dudley dan Stephens.

Dudley dan Stephens juga tidak sejalan dengan beberapa otoritas Persemakmuran. Dalam *Perka v R (1984) 13 DLR (4th) 1* Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa para terdakwa memiliki pembelaan, yang oleh hakim disebut sebagai alasan, ketika mereka membawa perahu mereka ke perlindungan perairan Kanada saat terjadi badai. Mereka didakwa mengimpor ganja untuk tujuan penjualan. Dickson J (yang kemudian menjadi CJ) mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu dari 'situasi mendesak yang jelas dan akan segera terjadi bahaya ketika kepatuhan terhadap hukum terbukti mustahil'. Tidak ada alternatif sah yang masuk akal. Hakim menyatakan bahwa tidak menjadi masalah jika terdakwa melakukan sesuatu yang melanggar hukum, namun hal tersebut tidak menjadi suatu keharusan jika kesalahan terdakwa turut menyebabkan keadaan darurat tersebut. *Perka v R* dibedakan oleh Mahkamah Agung Kanada di *Latimer v R [2001] SCR 1*. Seorang ayah tidak memiliki pembelaan ketika dia membunuh putrinya yang lumpuh. Dia tidak berada dalam bahaya; dia mempunyai alternatif yang masuk akal selain melanggar hukum; dan kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding dengan kerugian yang bisa dihindari. Hal serupa terjadi dalam satu kasus di Skotlandia, *Tudhope v Grubb 1983 SCCR 350*, seorang sheriff berpendapat bahwa kebutuhan adalah pembelaan di mana terdakwa mengemudi dengan alkohol berlebih dalam darahnya untuk menghindari penyerangan. Mungkin kasus ini dapat dijelaskan saat ini sebagai contoh keadaan yang terpaksa, lihat di bawah.

Selain Dudley dan Stephens, kapankah kebutuhan memberikan atau tidak memberikan pembelaan? Hukum akibat *Re A* berada dalam keadaan berubah-ubah. Pembangunan akan terjadi kasus per kasus. Kebutuhan terkadang menjadi pertahanan dalam kasus tertentu. Undang-undang ini menggunakan pendekatan 'pebble-dash'. Contoh-contoh ini adalah kerikil

pertahanan di tembok yang tidak memiliki pertahanan. Namun tentu saja, seseorang tidak akan menuduh seorang tahanan melarikan diri dari penjara yang terbakar, apalagi menghukumnya. Seperti yang dinyatakan oleh pengadilan Amerika: 'Dia tidak boleh digantung karena dia tidak mau dibakar' (US v Kirby (1869) 7 Wall 482). Bahkan sebelum Undang-Undang Aborsi tahun 1967, pelestarian kehidupan perempuan merupakan pembelaan terhadap aborsi: Bourne [1939] 1 KB 687. Bourne dapat dilihat sebagai kasus yang kadang-kadang disebut sebagai 'kebutuhan tersembunyi'. Terdakwa, seorang ahli bedah, didakwa menggunakan instrumen secara tidak sah dengan maksud untuk menyebabkan keguguran, bertentangan dengan pasal 58 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861. Hakim memberikan instruksi kepada juri bahwa terdakwa tidak bertindak melawan hukum jika ia melakukan tindakan tersebut. bonafid untuk menyelamatkan nyawa wanita korban pemerkosaan berusia 14 tahun itu. Penggunaan kata 'melanggar hukum' memungkinkan hakim seolah-olah menyelundupkan pembelaan. Contoh lainnya adalah membuang kargo (kasus Mouse (1608) 77 ER 1341, otoritas hukum perdata) dan membawa anak yang terinfeksi ke jalan-jalan untuk mendapatkan nasihat medis (Vantandillo (1815) 105 ER 762). Kasus-kasus seperti Bourne sekarang dapat diperlakukan sebagai kasus-kasus yang disebabkan oleh keadaan (lihat di bawah). Taksonomi Lord Goff di Re F, yang disebutkan di awal bagian ini, tidak mencakup Bourne.

Setelah Buckoke v GLC [1971] Bab 655, pelestarian properti atau nyawa bukanlah pembelaan yang baik terhadap tuduhan melewati lampu lalu lintas di warna merah yang diajukan terhadap petugas pemadam kebakaran, meskipun Lord Denning MR mengatakan bahwa terdakwa harus diberi ucapan selamat. (Undang-undang tersebut telah diubah untuk mengizinkan petugas pemadam kebakaran, polisi, dan paramedis melewati lampu merah dan melebihi batas kecepatan dalam keadaan darurat.) Menurut hakim yang sama dalam Southwark LBC v Williams [1971] Bab 734, pembela melakukannya tidak meluas ke tunawisma atau kelaparan. Oleh karena itu, seorang tunawisma tidak boleh masuk ke dalam rumah kosong untuk berjongkok, dan seorang perempuan juga tidak boleh mencuri untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Hukum kejahatan yang lazim selalu mengabaikan pembelaan terhadap 'kebutuhan ekonomi'. Buckoke dan Southwark LBC mungkin sekarang harus tunduk pada pembelaan atas tekanan keadaan. Jika, misalnya, makanan diambil untuk mencegah seseorang mati kelaparan, maka terdakwa akan mendapat pembelaan; namun jika hal ini dilakukan hanya untuk menyembuhkan kelaparan, maka pertahanan tidak akan tersedia. Mengizinkan pembelaan karena kebutuhan dalam keadaan yang disebutkan dalam paragraf ini akan memungkinkan terdakwa untuk mengandalkan motif. Saya mengambil makanan itu karena anak saya lapar. Aku mencuri; Namun, motifku bagus. Jika pengadilan mengizinkan motif untuk dikesampingkan, bukti seperti dampak kapitalisme harus dikemukakan. Juga tidak jelas mengapa seorang pemilik toko harus menderita akibat lingkungan sosio-ekonomi yang kita tinggali.

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara tegas memberikan pembelaan terhadap kebutuhan, beberapa undang-undang dapat dianggap mencakup situasi yang diperlukan. Ilustrasi yang paling jelas adalah Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971,

pasal 5. Bagian ini mendefinisikan pembelaan atas ‘alasan yang sah’. Ungkapan itu mencakup perlindungan harta benda. Oleh karena itu, merobohkan sebuah rumah untuk membuat sekat api – sebuah situasi yang diperlukan – akan menimbulkan pembelaan berdasarkan undang-undang seperti halnya yang terjadi dalam undang-undang.

Pasal 34(3) Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Tahun 1988 mengecualikan seseorang dari hukuman karena mengemudi kendaraan di tempat lain selain di jalan raya 'jika ia dapat membuktikan kepada pengadilan bahwa kendaraan tersebut dikendarai dengan cara yang bertentangan dengan pasal ini untuk tujuan penyelamatan. kehidupan atau pemadaman api atau pertemuan darurat lainnya'. Ada bagian lain yang serupa alamnya. Komentar Profesor Smith mengenai *Wood v Richards* [1977] Crim LR 295 (DC), di mana terdakwa dihukum, juga harus diperhatikan. Atas tuduhan mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian, seorang petugas polisi yang bergegas ke keadaan darurat harus memiliki pembelaan: 'kehati-hatian' berarti 'sesuai dengan keadaan'. Namun, hal itu tidak akan memberikan pembelaan jika polisi tersebut bergegas menuju bola polisi, meskipun dia melakukan tindakan yang persis sama. Mungkin ada keadaan-keadaan lain yang bersifat kebutuhan tersembunyi berdasarkan undang-undang.

Usulan reformasi yang diperlukan pada tahun 1970an

Melihat hukum ini, kita mungkin berharap bahwa keharusan harus dibuat konsisten dengan paksaan dengan memberikan pembelaan dalam situasi serupa. Namun, terkadang ada argumen bahwa lebih baik mempertimbangkan dan kemudian meringankan hukuman seperti yang terjadi pada *Dudley dan Stephens*. Namun ada beberapa argumen yang menentang pandangan ini. Hukuman untuk pembunuhan adalah hukuman wajib seumur hidup. Hukuman itu tidak dapat dikurangi oleh pengadilan. Menghukum seseorang ketika ia telah bertindak dengan benar juga merupakan tindakan yang salah, dan kemungkinan hukuman dapat menjadi penghambat untuk bertindak dengan cara yang benar: seseorang akan distigmatisasi oleh hukuman tersebut dan memiliki catatan kriminal bahkan jika ia mendapat pembebasan penuh. Argumen-argumen seperti ini mengarah pada anggapan bahwa jika diperlukan suatu dampak dalam hukum pidana, maka hal tersebut harus dijadikan sebagai pembelaan, dan bukan sebagai faktor yang meringankan.

Namun pada akhir tahun 1970-an, Komisi Hukum dalam Lapornya No. 83 tentang Pembelaan terhadap Penerapan Umum di atas, dengan tegas menentang alasan ini. Ada dua rekomendasi utama. Pertama, tidak boleh ada upaya Parlemen untuk melakukan pembelaan ini; kedua, sepanjang pembelaan tersebut ada berdasarkan common law, maka pembelaan tersebut harus dihapuskan. Komisi Hukum berpendapat bahwa pembelaan tidak diperlukan karena hanya mencakup sedikit kemungkinan; bahwa kebijaksanaan untuk tidak menuntut akan mencakup situasi-situasi yang diperlukan; kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan selama masa hukuman; dan bahwa dalam beberapa pelanggaran selalu ada pembelaan khusus seperti ‘tanpa alasan yang sah’ yang mencakup fakta-fakta yang seharusnya termasuk dalam pembelaan yang diperlukan. Pendekatan ini terbuka terhadap kritik. Jika semua aspek pertahanan dihapuskan, apa yang akan dilakukan terhadap kasus-kasus di mana sebagian besar orang akan setuju bahwa beberapa pertahanan harus tersedia, misalnya dalam kasus-

kasus di mana sebagian besar orang akan setuju bahwa beberapa aspek pertahanan harus tersedia? operasi darurat pada anak-anak?

Tentunya harus ada semacam pembelaan dalam keadaan seperti yang terjadi dalam Kitson (1955) 39 Cr App R 66, yang merupakan salah satu kasus menggelikan dalam hukum Inggris pasca perang. Penumpang di dalam mobil, setelah minum, tertidur. Dia terbangun dan menemukan pengemudinya telah pergi dan mobilnya meluncur menuruni bukit. Dia memegang kemudi dan dengan melakukan itu mencegah kecelakaan. Tentunya dia patut diberi ucapan selamat, bukan diadili, seperti istilah Lord Denning MR yang dikutip di atas. Jika dituntut karena mengemudi dalam keadaan mabuk, ia harus mendapat pembelaan. Demikian pula, jika seseorang melanggar batas kecepatan untuk menghindari kecelakaan, hasil yang telah dicapai di New York: *People v Cataldo* (1970) 65 Misc 2d 286. Tidak dapat diperkirakan dalam keadaan apa permohonan akan kebutuhan akan diajukan. Untuk itu diperlukan pembelaan secara umum. Tentunya tidak adil jika menghukum narapidana yang kabur dari selnya yang terbakar. Dia tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Memang benar, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa kebijakan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong perilaku seperti yang terjadi di Kitson. Argumentasi Komisi Hukum juga bisa dikritik. Minimnya tuntutan akan suatu pertahanan tidak berarti bahwa pertahanan tersebut tidak boleh ada. Seseorang yang tidak seharusnya dihukum, tidak seharusnya bergantung pada diskresi eksekutif untuk tidak mengadili atau pada diskresi yudisial untuk menjatuhkan hukuman yang ringan. Undang-undang harus dengan jelas menyatakan bahwa ia mempunyai pembelaan. Paksaan keadaan yang berkembang setelah Laporan Komisi Hukum menjawab sebagian namun belum sepenuhnya kritik tersebut. Pada akhirnya, fakta bahwa terdapat pembelaan khusus yang terkait dengan pelanggaran tertentu tidak melemahkan klaim bahwa seharusnya ada pembelaan umum untuk mengisi kesenjangan dalam undang-undang yang ada.

Paksaan keadaan sebagai pembelaan tersendiri

Argumen-argumen ini menunjukkan bahwa harus ada pembelaan. Baru-baru ini – dan undang-undang tersebut belum sepenuhnya diselesaikan – pengadilan telah menunjukkan diri mereka lebih menerima dibandingkan sebelumnya dalam menciptakan pembelaan dengan cara common law yang biasa dan serampangan. Pengadilan Banding di Conway [1989] QB 290 menetapkan pembelaan yang disebut ‘paksaan keadaan’ dan kasus-kasus berikutnya telah mengkonfirmasi keberadaannya. Terdakwa didakwa mengemudi sembarangan. Ia mengaku mengemudi sembarangan karena takut dua pria yang mendekati mobilnya akan menewaskan penumpangnya. Pengadilan mengizinkan bandingnya. Para hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut merupakan paksaan; tekanan itu adalah contoh dari keharusan; dan apakah paksaan suatu keadaan disebut paksaan atau keharusan, tidak menjadi masalah. Perlu dicatat bahwa ancaman tersebut datang dari pihak manusia, bukan dari, katakanlah, kelaparan, yang merupakan penyebab alami, seperti yang diungkapkan Dudley dan Stephens di atas. Dalam istilah membenaran dan alasan, paksaan terhadap suatu keadaan terlihat seperti sebuah membenaran, padahal biasanya setidaknyanya paksaan adalah sebuah alasan.

Pembelaan dibatasi dengan cara yang sama seperti paksaan: terdakwa harus bertindak untuk menghindari ancaman kematian atau cedera fisik yang serius, seperti yang dikatakan, misalnya, dalam Abdul-Hussain [1999] Crim LR 570 dan Quayle. Oleh karena itu, ancaman kerugian psikologis saja tidak cukup: Baker, di atas; lih. hukum pelanggaran non-fatal, dan tidak pasti apakah undang-undang tentang paksaan keadaan harus diselaraskan dengan hukum pelanggaran non-fatal: DPP v Rogers [1998] Crim LR 202 atau dia harus bertindak untuk menghindari pelanggaran yang jujur (lihat Cairns, di atas) membayangkan ancaman yang sama; dan ia harus bertindak dengan ketabahan yang wajar seperti yang diharapkan dari warga negara biasa dalam situasi terdakwa. Artinya, pengujian dalam Graham di atas diterapkan. Pengadilan menyatakan bahwa suatu poin hukum yang penting secara umum telah muncul tetapi House of Lords menolak izin untuk mengajukan banding. Baru-baru ini, di Hampshire County Council v E [2007] EWHC 2584 (Admin) diadakan bahwa tes obyektif harus diterapkan: semoga 'kegagalan putranya untuk hadir secara teratur di sekolah. . . Apakah hal ini disebabkan oleh ketakutan yang beralasan di pihak responden bahwa jika ia mencoba menyekolahkan anaknya, maka ia atau putrinya akan menghadapi risiko kematian atau cedera serius di tangan responden? Persyaratan objektif mengecualikan penggunaan elemen subjektif, seperti kecenderungan bunuh diri yang ditemukan pada Rodger (di atas) dan rasa sakit yang diduga ada pada Quayle. Di Quayle, salah satu alasan kegagalan pertahanan adalah tidak adanya risiko kematian atau cedera serius akibat rasa sakit. Kesamaan lainnya adalah bahwa paksaan tidak tersedia ketika terdakwa bisa saja melakukan hal lain selain melanggar hukum. Dalam kasus Moss v Howdle tahun 1997 SLT 782 di Skotlandia, terdakwa melanggar batas kecepatan agar dapat mengemudi secepat mungkin ke bengkel terdekat untuk mendapatkan perawatan medis bagi penumpangnya yang menangis kesakitan. Pengadilan menolak pembelaan dengan alasan bahwa ada alternatif seperti berhenti di pundak yang keras.

Oleh karena itu, undang-undang tentang paksaan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Hasan di atas, menetapkan batas-batas paksaan keadaan. Namun satu perbedaan yang ditetapkan oleh Pengadilan Banding dalam Cole di atas adalah bahwa paksaan karena ancaman terjadi ketika pengancam menyatakan kejahatannya (misalnya sumpah palsu dalam Hudson dan Taylor, di atas), sedangkan dalam paksaan karena keadaan tidak ada. nominasi seperti itu. Di Cole, para rentenir tidak melakukan perampokan dan oleh karena itu pembelaannya tidak dapat dipaksakan dengan ancaman. Cole berpendapat bahwa kedua pertahanan tersebut terkait, tetapi tidak tumpang tindih. Mereka tidak perlu bingung. Pengadilan Banding di Abdul-Hussain di atas menyatakan bahwa Cole salah dalam perbedaan tersebut. Rose LJ berkata: 'Kami tidak melihat alasan prinsip atau otoritas untuk membedakan kedua bentuk paksaan tersebut. . . Secara khusus, kami tidak menganggap putusan pengadilan terhadap Cole sebagai upaya untuk menarik perbedaan semacam itu.' Dalam kata-katanya, harus ada 'keterkaitan yang erat antara ancaman dan tindak pidana' namun tidak ada persyaratan 'tindakan yang sebenarnya'. reaksi sesaat'. Cole menetapkan aturan bahwa harus ada hubungan langsung dan segera antara bahaya dan kejahatan. Faktanya, tidak ada hubungan seperti itu karena adanya jeda satu jam 50 menit antara kejahatan, perampokan di

lembaga pembangunan, dan pembayaran uang yang dicuri di sana kepada pemberi pinjaman. Ada anggapan bahwa Cole salah dalam hal ini. Ancaman tersebut bersifat langsung, apalagi yang akan segera terjadi, ketika terdakwa melakukan perampokan. Salah satu pertimbangan yang menarik adalah bahwa pembelaan atas paksaan keadaan diciptakan pada saat yang sama ketika pembelaan atas paksaan dengan ancaman dibatasi dengan penerapan batasan baru pada kejahatan yang diterapkan dan penggunaan ketiga tujuan tersebut.

Pengadilan Banding di Conway yakin bahwa mereka terikat dengan keputusan mereka dalam *Willer (1986) 83 Cr App R 225*, sebuah kasus yang jelas bukan kasus yang berkaitan dengan paksaan dan ancaman. Istilah 'paksaan keadaan' tidak digunakan. Penggunaan pertama di Conway. Terdakwa di *Willer* didakwa mengemudi sembarangan. Dia mengemudi dengan sangat lambat di sepanjang trotoar untuk menghindari sekelompok pemuda. Pengadilan menyatakan dia mengemudi di bawah tekanan, namun kenyataannya tidak. Para pemuda itu tidak secara tersirat memerintahkannya: mengemudilah di trotoar atau kami akan menghajarmu. Memang, mereka sangat ingin dia tetap di tempatnya. Kasus ini benar-benar suatu keharusan. Sebagaimana *Smith dan Hogan, Criminal Law, 12th edn (OUP, 2008, ed. D. Ormerod) 343*, menulis: 'pengadilan hanya mengizinkan pembelaan atas kebutuhan. . . Tentu saja tidak ada bedanya apakah D [terdakwa] mengemudi di trotoar untuk melarikan diri dari para pemuda, atau kawanan sapi jantan yang menyerang, truk yang melarikan diri, atau banjir, jika ia melakukannya untuk menghindari kematian atau cedera tubuh yang serius. .' Ungkapan serupa muncul dalam (*D. Ormerod, ed.*) *Smith dan Hogan, Criminal Law: Cases and Materials*, edisi ke-9 (*OUP, 2006*) 431. *Simon Brown J* dalam *Martin* mengatakan bahwa pembelaan ini muncul dari 'bahaya obyektif' dan hanya dalam 'keadaan ekstrim'.

Kedua kasus ini, *Conway dan Willer*, ditindaklanjuti dengan kasus *Martin [1989] 1 All ER 652*, dimana Pengadilan Banding menetapkan batasan pembelaan. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah orang yang memiliki ketegasan yang wajar dan memiliki karakteristik yang sama dengan terdakwa akan memberikan tanggapan seperti yang dilakukan terdakwa. Seperti halnya pemaksaan, terdakwa harus yakin secara masuk akal bahwa ia mempunyai alasan kuat untuk takut akan kematian atau cedera serius (persyaratan kewajaran sebagai keyakinan dihilangkan oleh Pengadilan Divisi dalam *DPP v Rogers [1998] Crim LR 202*, namun hal ini salah dalam terang *Howe* tentang paksaan dan kasus-kasus sebelumnya tentang paksaan keadaan). Batasan ini tampaknya tidak diperlukan sebagai suatu pembelaan. Pengadilan Divisi dalam *DPP v Harris [1995] 1 Cr App R 170* mengatakan bahwa terdakwa harus bertindak wajar dan proporsional, seperti yang dilakukan pengadilan di *Martin*. *McCowan LJ* berpikir dubitante bahwa memang ada pembelaan atas kebutuhan tetapi pembelaan tersebut tidak diperlukan dalam tuduhan mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian karena istilah 'jatuh tempo' mencakup rentang pembelaan. Hakim yang lain menganggap bahwa kebutuhan adalah pembelaan terhadap kejahatan ini. Pengadilan menilai tidak dihadapkan pada situasi terpaksa dan menganggap *Willer* juga demikian. Oleh karena itu, kasus ini tidak konklusif. Namun, jika seorang pengemudi yang didiskualifikasi membawa istrinya ke rumah sakit dengan mobil ketika istrinya terkena serangan jantung di pedesaan terpencil, maka situasinya bukanlah suatu paksaan melainkan suatu keharusan. Pengadilan Banding di *Backshall [1998]*

1 WLR 1506 menyatakan, bertentangan dengan McCowan LJ, bahwa paksaan keadaan (yang oleh pengadilan disebut 'keharusan') adalah pembelaan untuk mengemudi tanpa kehati-hatian dan perhatian dan bukan bagian dari analisis apakah ada perhatian yang semestinya. Dengan kata lain, fakta memunculkan alasan, paksaan keadaan; hal tersebut tidak mengakibatkan terdakwa tidak mempunyai unsur kesalahan seperti yang didefinisikan dalam pelanggaran tersebut. Perlu dicatat bahwa di Martin, ancamannya adalah bahwa pengancam akan bunuh diri kecuali jika terdakwa, yang didiskualifikasi, mengantar putranya (anak tirinya) ke tempat kerja, yaitu ancamannya adalah untuk menyakiti dirinya sendiri dan bukan seperti yang selalu terjadi. sejauh ini dengan paksaan untuk menyakiti terdakwa atau pihak ketiga. (Ancaman, 'Saya akan meledakkan diri kecuali Anda melakukan sumpah palsu', seharusnya menimbulkan pembelaan atas paksaan, asalkan semua batasan atas paksaan dipenuhi.) Sebenarnya fakta-fakta Martin akan tampaknya merupakan situasi paksaan dengan ancaman. Istri terdakwa memberikan ancaman dengan rumusan paksaan klasik: 'melanggar hukum atau saya akan melakukan ini dan itu'. (Tidak masalah apakah ancaman istri untuk bunuh diri adalah sah.) Bandingkan dengan Willer: terdakwa tidak diperintahkan untuk mengemudi di trotoar atau dia akan dibunuh. Memang benar geng tersebut tidak ingin dia mengemudi di area beraspal karena dengan melakukan itu dia lolos dari ancaman mereka. Permasalahan lain yang diangkat oleh Martin adalah apakah ancaman tersebut harus merupakan ancaman yang melanggar hukum. Bunuh diri bukan lagi kejahatan menurut hukum Inggris. Hal ini tidak dibahas oleh Pengadilan Banding. Jika Cole di atas benar, Martin seharusnya diperlakukan sebagai kasus yang dipaksakan dan diancam.

Meskipun Backshall berpandangan bahwa paksaan keadaan merupakan pembelaan yang tersedia bagi pengemudi yang ceroboh, dan bukan bagian dari pelanggaran itu sendiri, ada situasi di mana fakta-fakta yang menimbulkan apa yang seharusnya menjadi pembelaan atas paksaan keadaan diperhitungkan ketika menentukan apakah atau tidak, itu merupakan pelanggaran. Dalam kejahatan yang bersifat kecerobohan subjektif, harus dibuktikan bahwa terdakwa mengambil risiko yang tidak akan diambil oleh orang yang berakal sehat. Dalam mengkaji besarnya risiko, para penguji fakta dapat mengatakan bahwa orang yang berakal pasti telah mengambil risiko yang menyebabkan kerugian untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Jika demikian, maka terdakwa tidak bersalah karena penuntut umum gagal membuktikan seluruh unsur pelanggarannya; bukan berarti semua unsurnya sudah terbukti tetapi ada pembelaannya. Ancaman yang menjadi pokok pembelaan haruslah ancaman yang secara obyektif mengancam terdakwa atau orang lain dan membuatnya langsung takut akan bahaya. Fakta bahwa hati nurani seseorang memerintahkan seseorang untuk melanggar hukum pidana bukanlah suatu ancaman. Dalam *Blake v DPP* [1993] Crim LR 586 pemohon percaya bahwa suara Tuhan memerintahkan dia untuk menulis kutipan dari Alkitab pada pilar beton dekat Gedung Parlemen sebagai protes terhadap Perang Teluk. Tidak ada bahaya langsung bagi dirinya sendiri atau orang lain, dan pembelaannya terhadap tuduhan pidana kerusakan gagal.

Willer diikuti di *DPP v Bell* [1992] RTR 335 (DC), lagi-lagi kasus mengemudi. Terdakwa tidak bersalah karena mengemudi dengan membawa alkohol berlebih ketika ia

mengemudi mobilnya untuk menghindari ancaman cedera serius pada dirinya sendiri. Kasus serupa adalah DPP v Whittle [1996] RTR 154 (CA). Setelah ancaman selesai, terdakwa harus berhenti mengemudi; jika tidak, dia akan bersalah atas kejahatan ini: DPP v Jones [1990] RTR 33 dan DPP v Mullally, di atas.

Kasus pertama karena paksaan adalah pelanggaran kendaraan bermotor. Tidak pernah ada keraguan bahwa hal ini juga diterapkan pada kejahatan lain (seperti pembajakan: Abdul-Hussain, di atas, dan penanaman ganja: Blythe (1998) *The Independent*, 4 April (Warrington Crown Court)) dan Pommell [1995] 2 Cr App R 607 (CA) menegaskan penerapan umum pertahanan dengan tunduk pada pengecualian yang sama yang ditemukan dalam tekanan dan ancaman. Oleh karena itu, pembelaan berdasarkan fakta Pommell tersedia bagi seorang terdakwa yang mengambil senapan mesin ringan dari temannya yang bermaksud membunuh orang yang telah membunuh teman dari temannya tersebut. Tidak ada hubungan antara terdakwa dan pihak ketiga ini dan setelah Hasan, Pommell mungkin saja salah dalam hal ini. Pengadilan juga menyatakan bahwa batasan obyektif dari paksaan dengan ancaman yang diterapkan pada pelanggaran ini ('keyakinan yang masuk akal', 'tujuan baik' dan 'orang yang memiliki ketegasan yang masuk akal') serta aturan bahwa ancaman tersebut harus berupa kematian atau hukuman serius. cederanya dan terdakwa harus melapor ke polisi sesegera mungkin: namun penundaan dapat dijelaskan begitu saja. Pommell juga menggambarkan hukum bahwa paksaan suatu keadaan tidak harus datang dari keadaan alamiah tetapi dapat timbul karena sebab manusia. Pengadilan menekankan bahwa kebutuhan dalam kedok 'kejahatan yang lebih kecil' bukanlah sebuah pembelaan, sedangkan paksaan adalah keadaan. Pommell mengilustrasikan perbedaan antara paksaan dan kebutuhan. Tidak ada ancaman; oleh karena itu, kasus tersebut tidak mungkin merupakan kasus yang bersifat paksaan, bertentangan dengan pemikiran pengadilan. Apa yang dilakukan terdakwa adalah mengambil senjata dari terdakwa padahal alternatifnya adalah membiarkan terdakwa lain membunuh dengan senjata tersebut. Fakta-fakta ini memunculkan pembelaan pilihan yang jahat. Terdakwa mempunyai pilihan untuk melanggar hukum, memiliki senjata api tanpa izin, atau membiarkan pihak lain melakukan pembunuhan. Dia memilih kejahatan yang lebih kecil. Perlu atau tidaknya fakta-fakta ini ada merupakan masalah kebijakan, namun keyakinan terhadap fakta-fakta tersebut mungkin telah memberikan sinyal yang salah kepada publik.

Sebagaimana telah dinyatakan, terdakwa harus mempunyai keyakinan yang masuk akal bahwa ia mempunyai alasan kuat untuk takut terhadap ancaman tersebut. Persyaratan keyakinan yang masuk akal terkadang diabaikan, namun untuk menjaga konsistensi dengan paksaan dan ancaman, kondisi ini harus dipertahankan. Howe dan Hasan adalah otoritas House of Lords.

Paksaan keadaan dan kebutuhan

Undang-undang yang berlaku saat ini diringkas di Conway: 'Tampaknya masih belum jelas apakah terdapat pembelaan umum mengenai kebutuhan atau, jika ada, dalam kondisi apa pembelaan tersebut tersedia.' Namun terdapat indikasi bahwa kebutuhan tersebut akan segera ada. diakui sebagai pembelaan. Re A sangat penting dalam hal ini. Namun, sistem peradilan masih menunjukkan kebingungan mengenai dasar hukum dari paksaan dan

keharusan. Misalnya, sebagaimana dinyatakan di atas, Lord Hailsham dalam Howe menganggap paksaan sebagai suatu kebutuhan. Dan ada pula yang mengatakan 'paksaan keadaan' adalah nama lain dari kebutuhan. Dalam pandangan Quayle, pembelaan terhadap paksaan keadaan dikatakan sebagai pembelaan 'kebutuhan karena keadaan'.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh C. Gearty, 'Necessity: a important defence in criminal law?' [1989] CLJ 357:

Orang-orang yang bermaksud baik dan berpikir bahwa dunia ini adil percaya bahwa pembelaan terhadap kebutuhan akan membuat dunia menjadi lebih adil. Para hakim, yang mengetahui lebih baik, menyadari bahwa hal ini akan menunjukkan ketimpangan dan kelemahan yang melekat pada kekayaan kita, tanpa pernah mengancam untuk menghilangkannya – Pengadilan Kerajaan bukanlah tempat yang tepat untuk menghapuskan hukum properti.

Oleh karena itu, orang yang lapar tidak boleh mencuri, dan yang tunawisma tidak boleh jongkok. Dia melanjutkan:

Kemana perginya pertahanan dari sini? Setelah Martin, paksaan keadaan tampaknya mempunyai penerapan umum di seluruh hukum (selain pembunuhan, menurut dugaan). Masih harus dilihat apakah pengadilan akan begitu bersemangat untuk menerapkannya ketika kejahatan yang dianggap perlu ternyata lebih mengerikan daripada pelanggaran kendaraan bermotor (misalnya melukai atau menculik). Dan tidak ada satupun yang menyarankan bahwa [terdakwa] harus diminta untuk memilih kejahatan yang lebih ringan – namun kalkulus utilitarian seperti itu adalah inti dari kebutuhan. Kita masih jauh dari pembelaan yang mungkin dapat merangsang kelompok yang membutuhkan untuk menjadi bandit.

Hukum yang ada saat ini belum mencapai tahap penyeimbangan kejahatan yang oleh sebagian orang dilihat sebagai landasan konseptual dari keharusan, yang di Amerika kadang-kadang dikenal sebagai 'pilihan kejahatan'. Namun, karena menggunakan kekuatan yang masuk akal untuk melukai seseorang yang merusak properti merupakan bentuk pembelaan, maka rasanya tidak masuk akal untuk tidak memberikan pembelaan kepada seseorang yang mencuri properti untuk memberi makan anak yang kelaparan. Pommell dianggap sebagai awal dari dibukanya pintu air menuju pertahanan kebutuhan skala penuh. Dalam pandangan penulis masa kini, Pommell tidak melangkah sejauh itu. Paksaan dalam keadaan tetap dibatasi pada persyaratan yang sama seperti yang diterapkan pada paksaan karena ancaman. Pencurian dan jongkok jarang dibenarkan karena adanya ancaman; demikian pula mereka jarang sekali bisa dimaafkan karena paksaan keadaan. Keharusan dibedakan dari paksaan keadaan dengan alasan keseimbangan kejahatan. Paksaan keadaan tidak mempunyai alasan: kehendak terdakwa dikesampingkan oleh ancaman. Kebutuhan adalah sebuah pembelaan yang bersifat membenaran, sedangkan paksaan dalam kedua bentuk tersebut merupakan sebuah alasan. Berdasarkan pembedaan yang dibahas pada awal bab ini, seorang terdakwa yang bertindak di

bawah paksaan apa pun dapat dimaafkan, namun terdakwa yang bertindak karena terpaksa dapat dibenarkan.

Namun Conway dan Martin menyarankan agar beberapa kasus lama yang memerlukan pembelaan harus ditinjau ulang. Menariknya, kasus-kasus saat ini kecuali Cole, di atas, dimana pembelaan gagal berkaitan dengan pelanggaran tanpa korban namun diasumsikan bahwa pembelaan tidak begitu dibatasi.

Dalam satu contoh, Parlemen telah mengesampingkan pembelaan atas tekanan keadaan. Undang-Undang Fertilisasi dan Embriologi Manusia tahun 1990, pasal 37, mengamandemen pasal 5(2) Undang-Undang Aborsi tahun 1967, yang sekarang menetapkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan keguguran adalah melanggar hukum kecuali diizinkan oleh pasal 1, yang mewajibkan praktisi medis terdaftar untuk melakukan aborsi.

Posisi yang diambil dalam buku ini

- (1) Adanya pembelaan atas paksaan (dengan ancaman).
- (2) Meskipun pembelaan mungkin masih dalam proses muncul, terdapat pembelaan karena adanya tekanan keadaan.
- (3) Kebutuhan, yang harus dibedakan dari tekanan keadaan, merupakan embrio pertahanan yang matang untuk berkembang.

Reformasi karena paksaan keadaan dan kebutuhan

Bidang hukum ini akan mendapat imprimatur Komisi Hukum jika rancangan KUHP-nya, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989 diundangkan. Klausul 43 dengan tepat menyatakan kembali undang-undang yang ada saat ini:

- (1) Seseorang tidak bersalah melakukan suatu pelanggaran. . . ketika dia melakukan suatu tindakan di bawah tekanan keadaan.
- (2) Seseorang melakukan suatu perbuatan karena paksaan jika –
 - (a) ia melakukan hal tersebut karena ia mengetahui atau meyakini bahwa hal tersebut perlu segera dilakukan untuk menghindari kematian atau kerugian pribadi yang serius terhadap dirinya sendiri atau orang lain; Dan
 - (b) bahaya yang ia ketahui atau yakini ada sedemikian rupa sehingga dalam semua keadaan (termasuk setiap karakteristik pribadinya yang mempengaruhi tingkat keparahannya) ia tidak dapat diharapkan untuk bertindak sebaliknya.

Rekomendasi-rekomendasi ini tertuang dalam Laporan Komisi Hukum No. 218, Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran Terhadap Pribadi dan Asas-asas Umum, 1993, yang dibahas di atas di bawah tekanan. Definisi tahun 1993 akan memberikan pertanyaan kepada juri apakah para terdakwa di Dudley dan Stephens mempunyai alasan untuk membunuh awak kabin. Klausul 43(3) menolak pembelaan terhadap pembunuhan dan percobaan pembunuhan untuk menjaga hukum tetap konsisten dengan Howe dalam hal paksaan. Komisi Hukum lebih memilih pembelaan diterapkan secara umum. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tumpang tindih antara pembelaan ini dan pembelaan lainnya. Klausul 43(3)(b)(iii) menyatakan bahwa pembelaan tidak berlaku jika orang tersebut 'dengan sengaja dan tanpa alasan yang masuk akal telah mengekspos dirinya pada bahaya'. Pendekatan tersebut juga diterapkan di

AS dalam Model Official Draft KUHP, 1985, s 3.02(2) dan dalam common law, misalnya. *State v Diana* (1979) 604 P 2d 1312, keputusan Pengadilan Banding Washington. Namun undang-undang AS berbeda dengan undang-undang Inggris yang diusulkan dalam hal menyeimbangkan kerugian. Model KUHP, pasal 3.02(2), menyatakan bahwa 'kejahatan atau kejahatan diupayakan untuk dihindari . . . lebih besar dari apa yang ingin dicegah', sementara *State v Diana* menetapkan bahwa 'kebutuhan tersedia sebagai pembelaan ketika kekuatan fisik alam atau tekanan keadaan menyebabkan terdakwa mengambil tindakan yang melanggar hukum untuk menghindari kerugian yang dianggap lebih besar oleh kebijakan sosial. daripada kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum. Seperti yang ditulis Gearty, yang dikutip di atas, hukum Inggris belum mengadopsi kalkulus utilitarian ini. Oleh karena itu, saat ini hukum keharusan sedang dalam keadaan berubah-ubah.

Dalam Rancangan KUHP Tahun 1989, Komisi Hukum tidak mendefinisikan perlunya namun menyerahkannya pada pengembangan peradilan. Demikian pula dalam Laporan tahun 1993, mereka tidak mengusulkan untuk menempatkan kebutuhan, jika memang ada, sebagai landasan hukum. Kasus hukum harus dikembangkan sebelum pembelaan dapat diringkas oleh Parlemen. Oleh karena itu, kebutuhan sebagai pembenaran tidak disentuh, sedangkan kebutuhan sebagai alasan (paksaan keadaan) harus dikemas dalam sebuah undang-undang karena kemiripannya dengan paksaan dan ancaman. Siapa tahu: sebelum ujian Anda, undang-undang mungkin berubah lagi! Negara bagian Queensland dan Australia Barat di Australia memberikan pembelaan jika seseorang bertindak atau tidak melakukan tindakan 'dalam keadaan darurat yang tiba-tiba atau luar biasa sehingga orang biasa yang memiliki kekuatan pengendalian diri biasa tidak dapat diharapkan untuk bertindak sebaliknya' – dan langit belum runtuh.

Ringkasan

Tiga bab berikutnya membahas pertahanan. Bagian ini dimulai dengan garis besar 'teori pembelaan', yang terutama melihat upaya untuk membagi pembelaan menjadi pembenaran (di mana perilaku terdakwa terpuji atau setidaknya diperbolehkan) dan alasan (di mana tindakan tersebut tetap merupakan kejahatan namun terdakwa dimaafkan (karena misalnya dia bertindak di bawah tekanan). Perlu dicatat bahwa pembelaan yang dibahas dalam teks ini hanya sehubungan dengan kegilaan dan berkurangnya tanggung jawab yang menjadi beban pembuktian bagi terdakwa. Biasanya, meskipun 'pembelaan' disebut demikian, bebannya ada pada pihak penuntut, dan bukan hanya itu saja, namun pihak penuntut harus menyangkal pembelaannya tanpa keraguan. Bab ini berkonsentrasi pada pembelaan yang secara umum berkaitan dengan kesukarelaan dalam melakukan kemungkinan tindak pidana. tidak bertindak atas kemauannya sendiri karena, misalnya, mereka tidak dapat memperkirakan akibat dari perilaku mereka. Undang-undang tersebut baru-baru ini telah berubah sehingga anak-anak berusia 10 –13 tahun kini mempunyai tanggung jawab pidana yang sama dengan orang dewasa, dan komentarnya adalah dibuat atas perubahan itu. Paksaan (juga dikenal sebagai paksaan per minas) terjadi ketika terdakwa diancam akan dibunuh atau disakiti secara serius oleh dirinya sendiri atau orang lain kecuali dia melakukan kejahatan. Batasan yang berat, terutama setelah keputusan House of Lords di Hasan, diteliti dengan cermat, begitu pula

kejahatan yang saat ini tidak dapat dibela dengan paksaan (pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan 'beberapa bentuk makar'). Pembelaan berikutnya yang dibahas adalah pemaksaan, yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah. Sifat dan pembenaran pembelaan ini diteliti dengan cermat. Berikut ini dugaan pembelaan atas kebutuhan, yang mempunyai beberapa definisi di sini, definisi 'pilihan yang jahat' dikemukakan (sebagian sehubungan dengan pembelaan berikutnya). Re A (2001), perkara perdata pemisahan anak kembar siam, dipertimbangkan. Paksaan keadaan merupakan perkembangan hukum yang cukup baru dimana ancaman tidak datang dari sumber manusia seperti pada paksaan (per minas). Hubungan antara paksaan dan paksaan keadaan merupakan salah satu fokus penyelidikan. Yang terakhir, terdapat pertimbangan ekstensif mengenai upaya-upaya yang telah lama dilakukan oleh Komisi Hukum untuk mereformasi undang-undang, yang berpuncak pada Makalah Konsultasi bulan Desember 2005, *A New Homicide Act for England and Wales?* No. 177 dan Laporan Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi No. 306 Tahun November 2006.

- Masa Bayi: Anak-anak di bawah 10 tahun tidak boleh dihukum karena pelanggaran apa pun; anak-anak di atas 10 tahun dapat dihukum karena pelanggaran apa pun. Undang-undang atau anggapan bahwa anak-anak berusia 10 –14 tahun tidak dapat dihukum atas pelanggaran apa pun kecuali jika penuntut dapat membuktikan tidak hanya *actus reus* dan *mens rea* tetapi juga fakta bahwa anak tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan yang serius (atau secara moral) dihapuskan dalam UU tersebut. 1998. Namun, perlu dicatat bahwa doktrin *mens rea* terkadang menguntungkan anak-anak: mereka mungkin tidak bermaksud atau memperkirakan konsekuensinya ketika orang dewasa yang memiliki posisi yang sama juga menginginkan atau meramalkan hal tersebut.
- Paksaan: Pertahanan ini, juga dikenal sebagai paksaan dengan ancaman, didasarkan pada pemikiran bahwa orang tidak dapat diharapkan untuk menolak ancaman kematian yang serius terhadap diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai (dan mungkin juga orang asing). Dasarnya adalah: 'lakukan ini atau yang lain', mis. 'kecuali kamu melakukan kejahatan pencurian, aku akan membunuhmu'. Pembelaannya cukup terbatas dan House of Lords di Hasan baru-baru ini menekankan kembali bahwa pembelaannya sempit. Batasannya adalah:
 1. Tidak ada pembelaan terhadap paksaan untuk membunuh, percobaan pembunuhan, dan beberapa bentuk makar;
 2. Ancamannya harus berupa kematian atau cedera serius;
 3. Tampaknya ancaman tersebut pasti ditujukan terhadap terdakwa atau keluarganya atau mungkin seseorang yang mempunyai hubungan khusus dengan terdakwa: namun demikian, dapat dikatakan bahwa ancaman tersebut dapat ditujukan kepada orang asing;
 4. Ancaman harus merupakan ancaman yang dapat segera (dibaca secara luas) dilaksanakan: jika terdapat peluang untuk melarikan diri, penerima paksaan

harus memanfaatkannya; dan untuk alasan serupa, setelah paksaan selesai, terdakwa harus berhenti melakukan tindakan kriminal;

5. Terdakwa harus bertindak secara wajar untuk menghindari ancaman: ia harus bertindak sebagaimana orang yang sadar dan berakal sehat akan berperilaku;
 6. Keyakinan bahwa orang tersebut diancam akan dibunuh atau mengalami penderitaan serius harus didasarkan pada alasan yang masuk akal;
 7. Terdakwa harus mempunyai 'alasan kuat untuk khawatir bahwa jika dia tidak melakukan tindakan tersebut [pihak yang memaksa] akan membunuhnya atau menyebabkan dia cedera serius' (Graham (1982) CA, disetujui oleh House of Lords di Howe (1987)) ; Dan
 8. tidak ada pembelaan yang tersedia jika terdakwa secara sukarela bergabung dengan organisasi kriminal yang ia tahu atau seharusnya tahu akan membuat dia terkena risiko penggunaan paksaan.
- Pemaksaan: Pembelaan ini mirip dengan paksaan namun hanya berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Istri harus membuktikan bahwa dia bertindak di bawah paksaan dan di hadapan suaminya: Undang-Undang Peradilan Pidana 1925, pasal 47. Perhatikan bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa. Pemaksaan diperkirakan mempunyai arti yang lebih luas daripada paksaan dan mencakup, misalnya, ancaman dari suami untuk meninggalkan istrinya; 'kehadiran' tidak hanya sebatas istri berada di ruangan yang sama dengan suami, namun meluas hingga berada di hadapan suami. Suami dan istri harus benar-benar menikah: keyakinan yang masuk akal dari pihak yang diduga istri bahwa mereka menikah tidaklah cukup.
 - Paksaan keadaan: Kasus-kasus selama dua puluh tahun terakhir telah menjadi alasan pembelaan atas nama ini. Pembelaan serupa dengan paksaan, yaitu pembatasan-pembatasan yang disebutkan di atas sehubungan dengan paksaan juga berlaku untuk paksaan keadaan tetapi rumusan dasarnya berbeda dengan paksaan yang sebagaimana disebutkan, berbentuk 'lakukan ini atau yang lain' (misalnya, lakukan kejahatan ini) atau kami akan memukul lututmu!) sedangkan paksaan keadaan berbentuk: 'ada keadaan darurat dan terdakwa harus menghindarinya dengan melanggar hukum'. Sebuah contoh terjadi ketika pengemudi mobil berkendara di trotoar untuk menghindari pria bersenjata bertopeng: pria bersenjata tersebut tidak mengatakan: 'kami akan menembak Anda kecuali Anda melanggar hukum dengan mengemudi di trotoar'.
 - Kebutuhan: Kadang-kadang paksaan dari keadaan disebut keharusan dan kadang-kadang kebutuhan disebut paksaan dari keadaan. Pandangan yang diambil di sini adalah bahwa paksaan terhadap keadaan serupa dengan pembelaan terhadap paksaan: keduanya mempunyai batasan yang sama, misalnya juga bukan pembelaan terhadap pembunuhan. Kebutuhan berbeda dalam hal ini merupakan pertahanan pilihan terhadap kejahatan tanpa batasan seperti itu; Oleh karena itu, ini bisa menjadi pembelaan terhadap semua kejahatan termasuk pembunuhan. Status pertahanan ini

masih belum jelas, namun ada pandangan modern yang menyatakan bahwa pertahanan ini memang ada.

BAB 8

KESALAHAN, MABUK-MABUKAN, DAN MEMBELA DIRI

8.1 KESALAHAN

Hukum Inggris membagi kesalahan sebagai kemungkinan pembelaan dalam hukum pidana menjadi dua bagian: kesalahan hukum dan kesalahan fakta. Kaidah umumnya adalah bila terdakwa melakukan kekeliruan hukum maka ia bersalah, sedangkan bila ia melakukan kekeliruan fakta maka ia tidak bersalah. Sayangnya undang-undang ini lebih kompleks daripada yang dimungkinkan oleh proposisi ini. Poin awal adalah bahwa jika seorang terdakwa karena 'penyakit pikiran' membuat kesalahan hukum, ia mungkin mendapat pembelaan atas kegilaan. Pertahanan ini dibahas dalam bab berikutnya.

Kesalahan dan ketidaktahuan akan hukum

Dalam *Esop* (1836) 173 ER 203 terdakwa dihukum karena pelanggaran berdasarkan hukum Inggris, *buggery*; berdasarkan hukum pribadinya tidak ada pelanggaran seperti itu. Oleh karena itu, apabila terdakwa mempunyai *actus reus* dan *mens rea* yang bersangkutan dengan tindak pidana tersebut, maka ia bersalah meskipun ia tidak mengetahui bahwa *actus reus* itu dilarang oleh hukum pidana. Dia keliru mengenai aturan hukum Inggris. Selain itu, ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan: *Bailey* (1800) 168 ER 657. Terdakwa dihukum karena kejahatan yang dibuat oleh Parlemen ketika dia berada di laut lepas, dan tidak ada cara untuk mengetahui bahwa suatu undang-undang telah disahkan. *diberlakukan*. Kasus ini diambil untuk menyatakan bahwa ketidaktahuan bukanlah pembelaan. Namun, *Bailey* mungkin harus dibaca secara berbeda. Kasus ini dirujuk ke semua hakim. Mereka merekomendasikan pengampunan. Karena pada saat itu pengampunan merupakan satu-satunya cara untuk membatalkan keputusan tingkat pertama, mungkin saja mereka tidak setuju dengan anggapan bahwa ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan. Namun *Bailey* dianggap sebagai penentu hal itu, dan aturan tersebut telah diterima, misalnya, *Carter v McLaren* (1871) LR 2 Sc & D 120. Aturan tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Banding di *Lightfoot* (1993) 97 Cr App R 24: '. . . Pengetahuan tentang hukum. . . tidak relevan. . . Fakta bahwa seorang laki-laki tidak mengetahui mana yang pidana dan mana yang tidak. . . tidak dapat menyelamatkan dia dari hukuman jika apa yang dia lakukan, ditambah dengan keadaan pikirannya, memenuhi semua unsur kejahatan yang dituduhkan kepadanya.' Sebuah ilustrasi adalah *Broad* [1997] Crim LR 666 (CA). Para terdakwa tetap divonis bersalah meskipun mereka tidak mengetahui hukum. Mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka buat adalah obat terlarang yang dilarang oleh hukum pidana. Tentu saja tidak selalu mudah untuk mengetahui apakah suatu RUU telah disahkan atau suatu undang-undang telah mulai berlaku. Jika terdakwa yakin bahwa ia menggunakan kekerasan untuk mencegah suatu kejahatan, tetapi kejahatan tersebut tidak terjadi, maka ia telah melakukan kesalahan terhadap hukum dan tidak mempunyai pembelaan.

Ilustrasi kesalahan hukum yang cukup baru adalah *Hipperson v DPP*, tidak dilaporkan, 3 Juli 1996 (DC). Para terdakwa menggunakan pemotong baut untuk menerobos pagar

perimeter Pabrik Senjata Atom, Aldermaston, tempat produksi penangkal atom Inggris. Mereka berpendapat bahwa mereka memiliki pembelaan terhadap kerusakan pidana karena mereka bertindak untuk mencegah genosida atau konspirasi untuk melakukan genosida. Namun, definisi genosida di Inggris terbatas pada tindakan 'dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, sosial atau agama', dan tidak mencakup, seperti yang diajukan oleh para terdakwa, hingga kehancuran seluruh atau sebagian umat manusia. Oleh karena itu, para terdakwa telah melakukan kesalahan hukum dan tidak mempunyai pembelaan.

Aturan bahwa ketidaktahuan akan hukum bukanlah pembelaan didukung oleh argumen bahwa jika hal tersebut merupakan pembelaan, maka pintu air akan terbuka dan pengadilan akan dibanjiri oleh klaim ketidaktahuan yang palsu, masyarakat tidak akan mencoba dan mencari tahu apa sebenarnya hukum itu; 'floodgates' adalah argumen yang lemah terhadap keadilan dan mustahil bagi penuntut untuk menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar tidak mengetahui hukum. Namun, harus dikatakan bahwa tidak ada orang yang mengetahui semua kemungkinan pelanggaran, dan mungkin tidak adil untuk menghukum seseorang ketika hanya sedikit orang yang mengetahui kejahatan tersebut. Hakim, pengacara, dan mahasiswa hukum dalam kehidupan profesionalnya tidak diharapkan mengetahui semua kejahatan. Tentunya warga negara biasa tidak seharusnya seperti itu!

Tidak ada pembelaan jika terdakwa berkonsultasi dengan pengacara yang menyatakan bahwa kegiatannya bukan kejahatan padahal: *Shaw v DPP* [1962] AC 220 (HL). Para terdakwa ingin mengetahui apakah menerbitkan daftar pelacur dan layanan mereka, *The Ladies' Directory*, adalah sah. Lords berpendapat bahwa mereka bersalah atas konspirasi meskipun mereka telah diberi nasihat hukum. Ketergantungan fortiori pada nasihat hukum dari paralegal tidak memberikan jawaban: *Brockley* [1994] Crim LR 671 (CA). Ketergantungan pada otoritas lokal atau nasihat polisi juga tidak dapat dijadikan pembelaan: *Cambridgeshire dan Isle of Ely CC v Rust* [1972] 2 QB 426. Pengadilan Divisi memerintahkan hakim untuk menghukum terdakwa atas kejahatan mendirikan kios di jalan raya tanpa alasan yang sah, meskipun dia telah meminta nasihat dan telah membayar harga kiosnya kepada dewan setempat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan hukum harus menjadi pembelaan jika terdakwa berusaha mencari tahu hukum atau mengandalkan nasihat resmi. Dia berusaha mematuhi hukum, namun gagal. Diragukan apakah menghukumnya memiliki tujuan lain selain mencegah pembelaan palsu, dan para pengadil fakta bisa melakukan hal tersebut: menemukan pembelaan yang lemah sebagai tidak benar adalah bagian dari peran mereka. Saat ini, mengandalkan nasihat resmi tidak berarti membebaskan, namun hanya meringankan hukuman, misalnya. *Howell v Falmouth Boat Construction Co* [1951] AC 837 (HL), obiter, dan *Surrey CC v Battersby* [1965] 2 QB 194 (DC). Kasus terakhir melibatkan kejahatan mengasuh anak tanpa memberi tahu dewan bahwa anak-anak tersebut akan menghabiskan lebih dari sebulan di rumah. Dia telah menerima nasihat bahwa dia tidak bersalah atas pelanggaran tersebut karena tidak ada satu periode pun yang melebihi satu bulan karena orang tuanya membawa anak-anaknya pergi pada akhir pekan tertentu. Dia dianggap bersalah. Istirahat dihitung hanya jika pengaturan baru dibuat setelah istirahat. Kita mungkin berpikir bahwa

Pengadilan Divisi mungkin berpendapat bahwa undang-undang pidana harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Memberinya pembebasan mutlak tidak menyelesaikan masalah. Dia telah bertindak dengan itikad baik; dia adalah orang yang tepat untuk merawat anak-anak; dan dia telah mengikuti nasihat dewan, dewan yang sama yang mengadilinya, dan dewan seharusnya mengetahui hukum yang dijalankannya. Tidak ada keuntungan yang diperoleh dengan menstigmatisasi terdakwa sebagai pelaku kejahatan, dan akibatnya mungkin akan membawa sistem hukum ke dalam keburukan. Terdapat beberapa indikasi dalam kasus-kasus dimana terdakwa bergantung pada nasihat resmi, hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang dari badan yang memberikan nasihat untuk mengadili, dan meskipun tidak ada pembelaan yang diberikan, proses pidana tetap dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. proses. Dalam satu kasus di mana para terdakwa mengandalkan saran dari departemen perencanaan pemerintah setempat bahwa mereka tidak memerlukan izin perencanaan untuk mendirikan papan iklan namun pihak berwenang menuntut mereka karena mendirikan papan reklame, Pengadilan Divisi menunda proses tersebut. Peradilan yang merupakan penyalahgunaan proses bisa saja melanggar Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil.

Aturan yang sama berlaku pada ketergantungan pada keputusan pengadilan yang kemudian ditolak: Younger (1793) 101 ER 253 (melalui inferensi). Juga tidak ada pembelaan jika terdakwa bergantung pada undang-undang yang didelegasikan ultra vires. Tidak diragukan lagi, dengan meningkatnya legislasi dan penilaian Komisi Eropa, ketergantungan pada undang-undang Inggris yang kemudian ditemukan bertentangan dengan norma-norma Komisi Eropa tidak akan memberikan pembelaan. Orang seperti ini tidak bersalah. Hakim membuat kesalahan hukum: mengapa kita memiliki doktrin per incuriam, Pengadilan Banding dan House of Lords dan Pernyataan Praktik yang mengizinkan House of Lords untuk mengesampingkan otoritas sebelumnya? Namun mereka tidak bersalah atas pelanggaran tersebut. Dalam Campbell (1972) 1 CRNS 273 Kearns DCJ berpendapat bahwa jika warga negara yang mengandalkan penilaian membuat kesalahan maka mereka bersalah namun hakim yang keputusannya dibatalkan pada tingkat banding tidaklah 'menggembirakan'. Tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa masyarakat biasa diharapkan mengetahui hukum lebih baik daripada lembaga peradilan. Langit tidak akan runtuh jika kesalahan hukum yang mengandalkan nasihat resmi diterima sebagai pembelaan. Afrika Selatan tidak memiliki aturan seperti itu: S v de Blom (1977) 3 SA 513 (A), dan Kanada memiliki aturan seperti itu (MacDougall (1983) 1 CCC (3d) 65 (SCC)), dan beberapa negara bagian AS memiliki aturan seperti itu sebuah pembelaan. Misalnya, KUHP New York, pasal 15.20(2), yang mengandalkan Model KUHP, memberikan pembelaan. Beberapa negara bagian tidak memberikan pembelaan. Dalam kasus Hopkins v State (1950) di Maryland (1950), ketergantungan pada nasihat Jaksa Negara bukanlah pembelaan. Singkatnya P. Brett 'Kesalahan hukum sebagai pembelaan pidana' (1966) 5 Melb ULR 179 di 203, menulis:

Jika kita ingin mencapai rasa hormat terhadap hukum, tentu tidak bijaksana untuk memberitahu warga negara bahwa mereka harus mengabaikan saran dari pejabat publik yang tugasnya menjalankan hukum dan oleh karena itu diharapkan untuk

memberi tahu warga negara mengenai hal tersebut. bahwa nasihat yang mereka terima secara bonafide dari pengacara yang berkualifikasi dianggap tidak berguna.

Brett menyebut Battersby sebagai 'ketidakadilan yang mencolok'. Tidak adil jika negara melalui pengadilannya mengabaikan nasihat pejabatnya seperti Direktur Penuntutan Umum dan menghukum terdakwa pelanggaran berdasarkan fakta yang menurut pejabat tersebut bukanlah pelanggaran. Sudah lazim bagi Parlemen untuk memberikan pembelaan kepada seseorang yang bergantung pada nasihat resmi. Dalam Undang-Undang Pengendalian Pencemaran tahun 1974, pasal 3(4), merupakan pembelaan terhadap pelanggaran pembuangan limbah tanpa izin dimana terdakwa 'berhati-hati memberikan informasi kepada dirinya sendiri dari orang-orang yang mempunyai posisi untuk memberikan informasi'.

Faktanya ada beberapa kasus yang menyimpang dimana kesalahan hukum menjadi pembelaan. Parlemen dapat memberikan pembelaan kepada seseorang yang melakukan kesalahan hukum. Ilustrasi yang jelas adalah pasal 2(1)(a) Undang-Undang Pencurian tahun 1968, yang menetapkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan tidak jujur untuk tujuan pencurian jika ia yakin, baik atas dasar alasan yang masuk akal atau tidak, bahwa ia mempunyai hak hukum untuk merampas barang bukti. korban harta bendanya. Jika dia yakin dia melakukannya tetapi dia salah, dia tidak bersalah. Dalam Sekretaris Negara untuk Perdagangan dan Industri v Hart [1982] 1 Semua ER 817, Pengadilan Divisi sehubungan dengan pelanggaran berdasarkan undang-undang perusahaan yang bertindak sebagai auditor, mengetahui dirinya didiskualifikasi, menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena dia tidak tahu bahwa dia didiskualifikasi. Tidak cukup hanya mengetahui fakta yang membuatnya didiskualifikasi. Ketidaktahuannya terhadap hukum adalah sebuah pembelaan. Dia tidak memiliki mens rea yang diperlukan. Dia seharusnya tidak bertindak sebagai auditor karena dia adalah direktur perusahaan yang dia audit. (Jika dia tahu dia didiskualifikasi tetapi tidak bertindak sebagai auditor ketika didiskualifikasi merupakan suatu pelanggaran, dia tidak akan melakukan pembelaan: dia akan melakukan kesalahan hukum.) Hukum saat ini dinyatakan dalam Smith [1974] QB 354, di mana seorang penyewa menghancurkan harta benda yang telah menjadi hak tuan tanahnya karena hukum perdata dengan keyakinan bahwa harta itu masih miliknya. Terdakwa memang bermaksud merusak barang, namun tidak bermaksud merusak barang milik orang lain. Memang dia bermaksud merusak harta benda miliknya. Dia membuat kesalahan mengenai siapa pemilik properti itu. Hukum yang berlaku saat ini terkadang dinyatakan sebagai kesalahan alasan hukum perdata. Hart dapat dijelaskan sebagai kasus kesalahan hukum perdata.

Salah satu masalah yang mempunyai dampak berbeda-beda tergantung jenis kesalahannya, perdata atau pidana, adalah tidak jelasnya apakah kesalahan tersebut berkaitan dengan hukum perdata atau pidana, misalnya. kesalahan mengenai apakah suatu barang 'dicuri' untuk keperluan penanganan merupakan kesalahan hukum pidana. Dalam Grant v Borg [1982] 1 WLR 638 House of Lords berpendapat bahwa kesalahan mengenai apakah izin telah diberikan kepada pengunjung untuk tetap tinggal di Inggris bukanlah suatu pembelaan meskipun 'cuti' terlihat sangat mirip dengan konsep hukum perdata. Entah House

of Lords sendiri yang melakukan kesalahan (dan Hart tidak konsisten dengan keputusan tersebut) atau Smith adalah keputusan yang patut dipertanyakan jika menetapkan aturan bahwa kesalahan hukum perdata adalah pembelaan.

Aturan dasar bahwa ketidaktahuan atau kesalahan hukum tidak ada pembelaan telah dilestarikan dalam rancangan KUHP (UU No. 177, A Criminal Code for England and Wales, 1989), pasal 21. Parlemen tentu saja mempunyai wewenang untuk membuat pengecualian. Yang juga dipertahankan adalah aturan yang ada saat ini bahwa kesalahan hukum memberikan pembelaan 'yang mana hal itu meniadakan unsur kesalahan dalam pelanggaran'. Komisi Hukum (paragraf 8.32) mengubah pengecualian tersebut menjadi terdakwa tidak mempunyai unsur kesalahan. Komisi Hukum merasa tidak mampu memberikan pembelaan atas ketergantungannya pada nasihat resmi atau keputusan pengadilan. Rancangan KUHP pasal 46 juga menyatakan kembali undang-undang yang berlaku saat ini bahwa:

- (1) Seseorang tidak bersalah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan apabila –
 - (a) pada saat tindakannya, instrumen tersebut belum dikeluarkan oleh Kantor Alat Tulis Yang Mulia; Dan
 - (b) pada saat itu belum diambil langkah-langkah yang wajar untuk memberitahukan maksud dari instrumen tersebut kepada publik, atau orang-orang yang mungkin terkena dampaknya, atau orang tersebut.

8.2 FAKTANYA SALAH

Hukum Inggris menarik garis tajam antara kesalahan hukum (bersalah) dan kesalahan fakta (biasanya tidak bersalah), namun garis tersebut tidak selalu jelas. Menurut House of Lords di *Brutus v Cozens* [1973] AC 854, kasus tentang makna 'menghina' dalam pasal 5 Undang-Undang Ketertiban Umum tahun 1936, yang telah dicabut, konstruksi kata biasa dalam sebuah undang-undang adalah sebuah fakta, bukan hukum, meskipun aturan tersebut tampaknya lebih dihormati jika dilanggar dibandingkan dengan dipatuhinya. Dua kasus yang sulit untuk didamaikan adalah *Norton v Knowles* [1967] 3 All ER 1061 dan *Pheko* [1981] 1 WLR 1117, keduanya berkaitan dengan istilah 'penghuni perumahan'. Dalam kasus sebelumnya, apakah terdakwa percaya bahwa korbannya adalah penghuni rumah merupakan masalah hukum dan oleh karena itu ia tidak mempunyai pembelaan; dalam kasus terakhir, istilah tersebut dianggap sebagai pertanyaan fakta dan oleh karena itu terdakwa mempunyai pembelaan dimana ia yakin bahwa korban adalah penghuni liar dan bukan penghuni perumahan. Dipostulasikan bahwa kesalahan fakta merupakan pembelaan karena seperti pembelaan lainnya, menghukum terdakwa tidak akan membuat dia jera. Alasan ini dikatakan berasal dari J. Bentham, *An Pengantar Prinsip Moral dan Perundang-undangan* (Methuen, 1982, pertama kali diterbitkan tahun 1789) Bab 13, Bagian 3, meskipun dapat dikatakan bahwa, meskipun menghukum orang yang melakukan kesalahan akan berakibat buruk. tidak menghalanginya, hal itu mungkin menghalangi orang lain.

Secara logika kesalahan fakta seharusnya meniadakan *mens rea*, yaitu penuntut tidak membuktikan unsur tersebut. Tidak ada yang istimewa dari kesalahan. Dalam hal ini kesalahan

bukanlah suatu pembelaan. Namun, pengadilan telah mengembangkan aturan pembatasan khusus. Ada tiga alasan yang dapat dihipotesiskan untuk menjelaskan perkembangan ini. Pertama, pada abad kesembilan belas teori *mens rea* subjektif yang ada saat ini belum dirumuskan; oleh karena itu, pengadilan melewatkan kesempatan untuk menyatakan bahwa kesalahan tersebut tidak sesuai dengan unsur kesalahannya. Kedua, para hakim sangat ingin untuk tidak melepaskan terdakwa yang, meskipun mengatakan yang sebenarnya, telah memberikan pendapatnya dengan lalai. Ketiga, hakim khawatir juri akan menerima pembelaan palsu. Oleh karena itu mereka menetapkan aturan bahwa kesalahan harus wajar. Baru-baru ini pengadilan secara umum telah menetapkan kesalahan yang lebih sesuai dengan *mens rea*. Perlu diingat bahwa walaupun pengadilan sudah tidak lagi mewajibkan adanya kesalahan yang dilakukan atas dasar alasan yang masuk akal, Parlemen dapat menetapkan bahwa suatu kesalahan haruslah merupakan kesalahan yang wajar. Contohnya adalah pasal 14(3) Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1956 (pembelaan terhadap tuduhan kejahatan penyerangan tidak senonoh yang ada ketika perkawinannya dengan seorang gadis di bawah 16 tahun tidak sah 'jika ia meyakini gadis itu adalah istrinya dan mempunyai alasan yang masuk akal. untuk keyakinan').

'Kesalahan yang tidak relevan'

Karena kekeliruan itu ada kaitannya dengan *mens rea*, maka bila pelanggaran berat, maka terdakwa tidak mendapat pembelaan kalau kesalahannya termasuk salah satu unsurnya yang tegas. Dalam *Prince (1875) LR 2 CCR 154, s 55 of the Offences Against the Person Act 1861* dipermasalahkan: 'Siapa pun yang mengambil secara melawan hukum. . . gadis mana pun yang belum menikah, yang berusia di bawah 16 tahun, di luar kepemilikan ayahnya. . .' akan bersalah atas suatu pelanggaran. Terdakwa yakin bahwa gadis tersebut berusia di atas 16 tahun. Dia tidak berniat melakukan apa yang dilarang oleh hukum. Pengadilan memutuskan bahwa dia bersalah. Korban penculikan adalah seorang gadis; dia belum menikah; dia berusia di bawah 16 tahun; dia diambil dari milik orang tuanya. Dia tahu bahwa dia adalah seorang gadis, bahwa dia belum menikah, dan bahwa dia akan membawanya keluar dari kepemilikan orang tuanya. Dia tidak perlu tahu bahwa dia berusia di bawah 16 tahun. Dia bersalah karena kesalahannya tidak relevan karena dia salah mengenai usianya. Kesalahan hanya relevan jika kesalahan tersebut berkaitan dengan unsur *mens rea*. Dalam *Hibbert (1869) LR 1 CCR 184* terdakwa didakwa dengan pelanggaran yang sama. Keyakinannya dibatalkan. Dia tidak tahu bahwa gadis itu mempunyai orang tua. Kesalahannya tergolong relevan karena berkaitan dengan unsur *mens rea*. Sebelum dia bisa dihukum, dia harus tahu bahwa dia memiliki orang tua. Dia tidak mengetahui fakta itu. Oleh karena itu, keyakinannya dibatalkan. Aturan di *Prince* tidak terpengaruh oleh perkembangan di tiga bagian berikutnya, namun, seperti yang telah kita lihat di Bab 4, doktrin tanggung jawab ketat mengalami kemunduran: semakin sedikit pelanggaran berat yang dilakukan, semakin kecil ruang untuk 'kesalahan yang tidak relevan'.

Tolson

Apabila terdapat kesalahan yang relevan, dinyatakan selama bertahun-tahun bahwa terdakwa tidak mempunyai pembelaan kecuali kesalahannya dilakukan secara beralasan. Jika

dia melakukan kesalahan yang tidak wajar karena dia ceroboh, dia tidak punya pembelaan. Penguasa utamanya adalah Tolson (1889) 23 QBD 168. Terdakwa, setelah menikah, tidak berniat menikah lagi sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana bigami, karena mengira suaminya sudah meninggal. Pengadilan memberinya pembelaan atas kesalahan. Argumennya adalah ketika Parlemen memberikan pembelaan terhadap bigami bahwa pasangannya telah absen selama tujuh tahun, Parlemen tidak bermaksud untuk menghukum seseorang yang percaya atas dasar ketidakhadirannya selama tujuh tahun bahwa pasangannya telah meninggal. Undang-undang tersebut tidak memuat pembelaan bagi seseorang yang yakin dengan alasan yang masuk akal bahwa pasangannya telah meninggal. Alasan yang masuk akal adalah dia mengira dia tersesat di laut.

Beberapa komentar dapat dibuat.

- (a) Nyonya Tolson tidak berniat menikah lagi; Tuan Pangeran tidak berniat kawin lari atau menculik seorang gadis di bawah 16 tahun. Dia tidak bersalah; dia bersalah. Secara hukum, dia melakukan kesalahan yang relevan, sementara suaminya melakukan kesalahan yang tidak relevan.
- (b) Pengadilan memutuskan bahwa keyakinan yang salah merupakan pembelaan hanya jika diyakini secara wajar.

Stephen J di Tolson yakin:

Dapat ditetapkan sebagai aturan umum bahwa tersangka pelaku dianggap telah bertindak berdasarkan fakta-fakta yang diyakininya dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang masuk akal ketika ia melakukan tindakan yang dituduhkan sebagai pelanggaran. Saya tidak dapat menyarankan pengecualian apa pun terhadap peraturan ini, dan tidak ada satu pun yang pernah disarankan kepada saya.

Mengatakan bahwa kesalahan merupakan pembelaan hanya jika dilakukan secara wajar sama dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak akan mendapat pembelaan jika ia ceroboh. Bray CJ mengomentari hukum Australia yang sama dengan Tolson bahwa 'hukum pidana dirancang untuk menghukum orang yang kejam, bukan orang yang bodoh atau mudah percaya' (Brown (1975) 10 SASR 139) dan bahwa aturan tersebut adalah 'keluarnya anomali dan tidak dapat dibenarkan' (Brambles Holdings Ltd v Carey (1976) 15 SASR 270). Dalam hal ini, pembelaan Tolson mengubah pertanyaan dari mens rea menjadi kelalaian. Bigami dalam hal ini telah menjadi kejahatan kelalaian. Jika ada anggapan bahwa kesalahan seharusnya meniadakan mens rea, yang dilakukan Tolson adalah mencampuradukkan bukti dan hukum substantif. Seorang terdakwa yang melakukan pembelaan atas keyakinan yang tidak masuk akal mungkin gagal untuk memberikan bukti yang cukup untuk menimbulkan keraguan yang masuk akal mengenai kesalahannya di benak para penguji fakta; namun bahkan keyakinan yang tidak masuk akal sekalipun harusnya berlaku jika para hakim pada kenyataannya menerima bukti-bukti yang diajukan terdakwa.

- (c) Kesalahan Tolson tidak berkaitan dengan kegagalan jaksa dalam membuktikan unsur pelanggaran bigami. Terdakwa diberikan pembelaan. Kesalahannya terkait dengan pembelaan itu.

Diplock J mengikuti Tolson di Gould [1968] 2 QB 65 di mana terdakwa yakin bahwa pernikahan pertama telah bubar. Hanya kesalahan yang masuk akal yang bisa menghasilkan pembelaan. Demikian pula keyakinan bahwa perkawinan pertama batal, membebaskan terdakwa, asalkan kesalahannya beralasan: Raja [1964] 1 QB 285 (CA). Dalam pendekatan Tolson, unsur 'menikah' dalam bigami dipenuhi dengan kecerobohan. Jika bigami dipandang sebagai pelanggaran berat, maka aneh jika dilakukan secara sembarangan. Kasus terpenting di bidang ini adalah DPP v Morgan.

DPP v Morgan [1976] AC 182

Salah satu terdakwa, seorang sersan di RAF, mengundang tiga pria untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa jika dia menolak atau berteriak, dia hanya menikmati tindakan seksual tersebut. Para lelaki itu melakukan hubungan intim dengannya secara paksa. Sebenarnya dia tidak menyetujuinya. Para pria tersebut didakwa melakukan pemerkosaan sebagaimana didefinisikan pada saat itu. Dengan mayoritas tiga banding dua, House of Lords memutuskan bahwa laki-laki mempunyai pembelaan jika mereka (secara jujur) yakin bahwa perempuan menyetujuinya. Keyakinan mereka yang salah tidak harus dianut secara masuk akal. (Faktanya, House of Lords memutuskan bahwa tidak ada juri yang berakal sehat yang akan mempercayai cerita mereka, dan oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam penyampaian keadilan. Prosedur ini disebut 'menerapkan ketentuan': menurut hukum, laki-laki tersebut tidak akan bersalah. Seandainya bukti-bukti mereka dipercaya, namun ternyata tidak. Berdasarkan putusan mereka, juri percaya bahwa bukti-bukti yang diajukan para pemohon adalah 'sekumpulan kebohongan' dan bahwa yang terjadi adalah 'pemukosaan berulang kali', bukan 'pesta seksual' seperti yang dikatakan Lord Cross. .)

House of Lords tidak mengesampingkan Tolson. Tidak ada alasan bagus untuk mempertahankan Tolson yang diberikan oleh mayoritas. DPR juga sempat menolak Tolson dalam B v DPP [2000] 2 AC 428 namun tidak diambil. Namun, Lord Nicholls mengkritik persyaratan kewajaran yang ditemukan di Tolson. 'Dianggap sebagai sebuah prinsip, pendekatan keyakinan yang jujur harus lebih diutamakan. Menurut definisi, unsur mental dalam suatu kejahatan berkaitan dengan keadaan pikiran subjektif. Sejauh tujuan utama batas maksimum ('atas dasar yang masuk akal') diberlakukan, unsur subyektifnya digantikan.' Bisa jadi, unsur tindak pidana bigami, 'menikah', ada mens rea kelalaiannya. Artinya, apabila seseorang mempunyai unsur mental kelalaian terhadap actus reus perkawinan, maka unsur delik itu terpenuhi. Karena kesalahan yang tidak masuk akal menunjukkan kelalaian, hanya kesalahan yang masuk akal yang akan menghasilkan pembebasan.

Ada beberapa cara untuk mendamaikan Morgan dengan Tolson.

- (a) Tolson menerapkan pelanggaran hukum, Morgan menerapkan pelanggaran hukum umum. Argumen ini tidak akan hilang. Morgan telah diterapkan pada pelanggaran

undang-undang dan dimasukkan ke dalam bentuk undang-undang untuk pemerkosaan dalam Undang-Undang Pelanggaran Seksual (Amandemen) tahun 1976 yang, namun, dicabut oleh Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Undang-undang tersebut memberikan ujian atas keyakinan akan persetujuan. berdasarkan alasan yang masuk akal.

- (b) Mungkin ada perbedaan antara kesalahan Tolson yang berkaitan dengan pembelaan dan kesalahan Morgan yang berkaitan dengan kegagalan penuntut untuk membuktikan bagian dari pelanggaran (atau akan melakukan hal tersebut, seandainya bukti-bukti yang dimiliki orang-orang tersebut dipercaya) . Namun, batas antara menyerang dan bertahan sulit atau bahkan mustahil untuk ditarik, seperti yang dapat dikemukakan dari diskusi di Bab 1 tentang pengecualian ketiga terhadap Woolmington. Parlemen bisa saja dengan mudah membuat pembelaan terhadap bigami yang mempercayai kematian pasangannya, namun merumuskannya sebagai bagian dari pelanggaran: 'siapa pun yang tidak percaya pada kematian pasangannya yang sudah menikah akan menikah lagi'. Namun, perlu diingat bahwa kesalahan menerima paksaan dan paksaan keadaan harus dilakukan secara wajar. Apakah kekeliruan itu mengenai kealahan perbuatannya ataukah mengenai pembelaannya? Jika seseorang yakin bahwa dirinya sedang dikenai paksaan padahal sebenarnya tidak, apakah ia bertindak secara sah karena ia tidak mempunyai mens rea atas pelanggaran yang didakwakan atau apakah ia mempunyai pembelaan? Jika yang pertama, menurut perbedaan, kesalahan itu dapat diampuni, tetapi menurut undang-undang yang sekarang tidak demikian, karena diperlukan kesalahan yang wajar.
- (c) Ada yang ganjil dalam tata letak delik bigami. Bagian yang relevan, Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861, pasal 57, menetapkan pelanggaran yang diikuti dengan ketentuan. Tidak ada kekhususan dalam tindak pidana pemerkosaan. Lord Hailsham sepertinya mengisyaratkan perbedaan ini ketika dia berpendapat bahwa Tolson adalah keputusan yang sempit berdasarkan interpretasi undang-undang.
- (d) House of Lords di Morgan mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mengacaukan kasus bigami. Oleh karena itu, aturan yang berbeda berlaku untuk pelanggaran yang berbeda. Jelas sekali konsistensi tidak dipandang sebagai suatu kebajikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir House of Lords secara konsisten mengambil pandangan subjektif: *B v DPP* [2000] AC 428, *K* [2002] 1 AC 462 dan *G* [2004] 1 AC 1034. Mungkin saat ini Tolson tidak akan selamat dari tantangan Lords.
- (e) Lord Cross di Morgan rupanya berpandangan bahwa Morgan dikurung pada pemerkosaan, namun yang lain tidak. Namun Lord Cross menarik perbedaan lain: antara pelanggaran seperti pemerkosaan yang kata-kata penentunya secara tegas atau tersirat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah jika ia meyakini sesuatu itu benar, dan pelanggaran seperti bigami yang definisinya ada di dalamnya. menghadapi seseorang yang menimbulkan tanggung jawab yang ketat.

- (f) Tolson mungkin tidak hanya menerapkan bigami, namun hanya pada kejahatan kelalaian. Mungkin ada pelanggaran dan pembelaan lain yang dapat dikatakan demikian. Sehubungan dengan pembelaan diri, misalnya, ambil situasi dari Pagett (1983) 76 Cr App R 279, yang dibahas di Bab 2. Jika polisi punya waktu untuk memeriksa apa yang dilakukan korban, tentu saja itu hanya kesalahan yang masuk akal. Tindakan tersebut harus dikecualikan: tidak berlebihan jika mengharapkan polisi memeriksa sebelum menembak, asalkan tidak membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain.
- (g) Dalam situasi yang melibatkan pencegahan kejahatan, tentu saja harus ada kejahatan yang harus dicegah. Di Baker (CA), di atas, Brooke LJ, yang mengadopsi argumen penasihat hukum, mengatakan: 'Jika terdakwa dengan jujur percaya bahwa seseorang sedang makan ikan dan keripik dan bahwa makan ikan dan keripik adalah kejahatan, hukum tidak akan mengizinkan dia untuk bergantung pada s 3 [UU Hukum Pidana 1967] sebagai pembelaan terhadap dakwaan penyerangan terhadap orang pemakan ikan dan keripik karena menurut hukum tidak ada tindak pidana. . . telah dilakukan.' Dengan kata lain, kesalahan hukum bukanlah pembelaan.

Ada argumen bahwa hukum di Morgan tidak memuaskan sehubungan dengan pemerkosaan: terdakwa dapat dengan mudah memeriksa apakah korban menyetujuinya. Kecerobohnya seharusnya tidak membebaskannya dari tuduhan. Parlemen mengambil pandangan ini dalam Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Prinsip dalam Morgan telah dicabut untuk kejahatan seks namun masih tetap berlaku di tempat lain.

'Mundurinya Morgan' dan naiknya Morgan

Untuk beberapa waktu, Pengadilan Banding diperkirakan membatasi Morgan untuk melakukan pemerkosaan. Dalam Barrett (1981) 72 Cr App R 212 para terdakwa berpendapat bahwa perintah pengadilan yang dikirimkan juru sita diperoleh dengan cara curang dan mereka menggunakan kekerasan untuk menolaknya. Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan hukum perdata hanya berlaku jika didasarkan pada alasan yang masuk akal. Dalam Phekoo [1981] 1 WLR 1117 dikatakan, obiter, bahwa kesalahan bahwa penghuni perumahan adalah penghuni liar memberikan pembelaan hanya jika hal itu dilakukan secara wajar. Barrett dapat dibenarkan sebagai kasus yang tidak berkaitan dengan kesalahan fakta. Apa pun yang terjadi, Morgan berhasil menang.

Hal ini terjadi karena apa yang Lord Hailsham di Morgan sebut sebagai 'logika yang tidak dapat dielakkan'.

Setelah seseorang menerimanya . . . bahwa perbuatan yang dilarang dalam pemerkosaan adalah hubungan seksual yang tidak dilakukan atas dasar suka sama suka, dan bahwa keadaan pikiran yang bersalah adalah adanya niat untuk melakukannya, tampaknya. . . untuk mengikuti logika yang tidak dapat dielakkan bahwa tidak ada ruang untuk 'pembelaan' atas keyakinan atau kesalahan yang jujur atau pembelaan atas keyakinan atau kesalahan yang jujur dan masuk akal. Entah penuntut membuktikan bahwa terdakwa mempunyai niat yang diperlukan atau tidak. Dalam kasus pertama, hal ini berhasil, dan dalam kasus kedua, gagal.

Pengadilan Banding memutuskan dalam Kimber [1983] 1 WLR 1118 tentang kejahatan penyerangan tidak senonoh yang ada pada saat itu bahwa Morgan tidak terbatas pada pemerkosaan dan bahwa perintah terhadap hal tersebut di Phekoo adalah salah. Terdakwa didakwa melakukan penyerangan tidak senonoh setelah dia melakukan gangguan seksual terhadap pasien gangguan jiwa. Pengadilan menyatakan bahwa keyakinan yang salah bahwa perempuan tersebut menyetujui adalah sebuah pembelaan, terlepas dari apakah kesalahan tersebut didasarkan pada alasan yang masuk akal atau tidak. Sekarang diterima bahwa Morgan menerapkan semua pelanggaran mens rea subjektif. Hukumnya sama di Kanada: Pappajohn v R (1980) 111 DLR (3d) 1. Bisa jadi Tolson dibatasi pada bigami.

Morgan juga diterapkan pada beberapa pertahanan. Dalam Williams [1987] 3 All ER 411 terdakwa percaya bahwa seseorang sedang diserang oleh X. Faktanya X menangkapnya secara sah. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa harus diadili berdasarkan fakta-fakta yang diyakininya. Dia percaya bahwa penyerangan sedang terjadi. Oleh karena itu, ia tidak bersalah melakukan penyerangan yang mengakibatkan luka fisik terhadap X ketika ia menyerang X. Terdakwa tidak bermaksud menggunakan kekerasan yang melawan hukum. Dia bermaksud menggunakan kekuatan yang sah; yaitu, pemaksaan untuk mencegah kejahatan atau untuk membela diri. Kesalahannya meniadakan mens rea-nya. Williams dengan demikian merupakan aplikasi dari Morgan. (Hukuman tersebut dibatalkan karena hakim pengadilan telah salah mengarahkan juri mengenai beban pembuktian, sehingga hal di atas adalah obiter.) Pengadilan menekankan bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur mental apa pun yang diperlukan untuk pembelaan dan kasus tersebut dapat dibatalkan. dibedakan atas dasar ini. Williams disetujui oleh Dewan Penasihat dalam kasus berikut.

Beckford v R [1988] AC 130

Terdakwa, seorang petugas polisi bersenjata, sedang menyelidiki laporan bahwa seorang pria bersenjata sedang meneror keluarganya. Faktanya pria itu tidak bersenjata. Terdakwa menuduh bahwa pria tersebut telah menembak dan terbunuh ketika api kembali menyala. Dia berpendapat bahwa dia melakukan pembelaan diri atas fakta-fakta yang dia anggap ada secara keliru.

Pertanyaan yang harus diajukan dalam kasus kesalahan pembelaan diri adalah apakah respons terdakwa sepadan dengan tingkat risiko yang ia yakini ditimbulkan oleh serangan yang ia yakini terjadi: Oatridge (1992) 94 Aplikasi Cr R 367 (CA). Perkembangan hukum yang secara umum baik pelanggaran maupun pembelaan hanya memerlukan keyakinan yang jujur telah disetujui oleh House of Lords dalam B v DPP [2000] 2 AC 428. Lord Nicholls berkata:

Menurut definisi, unsur mental dalam kejahatan berkaitan dengan keadaan pikiran subjektif, seperti niat atau keyakinan. Sejauh batasan obyektif utama ('atas dasar yang masuk akal') diterapkan, maka unsur subyektifnya akan digantikan. Sejauh itu seseorang yang tidak memiliki niat atau keyakinan yang diperlukan tetap dapat melakukan pelanggaran. Ketika hal ini terjadi, 'kesalahan' terdakwa semata-mata terletak pada tidak terpenuhinya standar obyektif. Kejahatannya terletak pada kelalaiannya. Suatu undang-undang dapat mengaturnya secara tegas atau dengan implikasi yang diperlukan. Namun hal ini tidak mendapat tempat dalam prinsip common law,

penerapan umum, yang berkaitan dengan perlunya unsur mental sebagai unsur penting dalam suatu tindak pidana.

B v DPP diikuti oleh House of Lords di K [2002] 1 AC 462. Kesalahan mengenai usia korban dalam kejahatan penyerangan tidak senonoh yang ada saat itu merupakan pembelaan jika kesalahan tersebut dilakukan dengan jujur. Keyakinan tersebut tidak harus didasarkan pada alasan yang masuk akal.

Hukum berbeda dalam hal paksaan dan mungkin karena paksaan keadaan. Terdakwa harus yakin dengan alasan yang masuk akal bahwa dia berada di bawah ancaman. Garis yang kadang-kadang ditarik antara Williams dan Graham [1982] 1 WLR 294 adalah bahwa dalam kasus pertama kesalahan meniadakan elemen mental sehubungan dengan elemen actus reus sedangkan dalam kasus kedua kesalahan terkait dengan pertahanan yang sebenarnya, sebuah konsep yang terpisah dari actus reus dan mens rea. Tidak dapat dipastikan apakah perbedaan ini merupakan hukum. Tentu saja kesalahan dalam paksaan tidak meniadakan mens rea. Rekonsiliasi yang disarankan adalah bahwa sehubungan dengan pembelaan yang bersifat pembenaran, seperti pencegahan kejahatan, kesalahan apa pun akan dikecualikan, namun kesalahan yang masuk akal diperlukan sehubungan dengan alasan seperti paksaan. Selain sulit untuk menarik garis, sulit untuk mengetahui alasan perbedaan tersebut. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa di luar bigami dan beberapa pembelaan merupakan suatu kesalahan, masuk akal atau tidak, sehubungan dengan unsur yang relevan dari suatu pelanggaran atau pembelaan memberikan pembelaan, pengadilan tidak selalu menerapkan hukum dengan benar. Dalam Brown (1985) 80 Cr App R 36, pengadilan memerlukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa seorang perempuan bukanlah pelacur biasa dengan tuduhan berusaha untuk menjadikan seorang perempuan menjadi pelacur biasa. Lord Nicholls dalam B v DPP tidak menganjurkan adanya paksaan ketika dia berurusan dengan anggapan hukum umum yang menyatakan bahwa kesalahan yang jujur akan terhapuskan. Lord Steyn berbicara tentang 'ketidakharmonisan' yang akan terjadi jika dalam beberapa pelanggaran hanya kesalahan yang wajar saja yang dikecualikan, namun sekali lagi dia tidak berusaha untuk mengesampingkan otoritas yang tidak konsisten. Tolson adalah salah satu otoritas tersebut.

Peraturan di Morgan tidak mempengaruhi pelanggaran dimana Parlemen memberikan pembelaan hanya jika kesalahannya wajar. Sehubungan dengan pemerkosaan, Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 membatalkan Morgan: pembelaan kini tersedia hanya jika terdakwa yakin dengan alasan yang masuk akal bahwa korban menyetujuinya. Demikian pula Morgan tidak mempengaruhi pembelaan terhadap paksaan dengan ancaman dan paksaan dalam keadaan di mana terdakwa harus mempercayai sesuatu dengan alasan yang masuk akal (misalnya adanya ancaman serius). Aturan ini memang ditetapkan setelah Morgan. Tampaknya tidak ada pembenaran untuk memperlakukan tekanan dan pembelaan diri secara berbeda.

Kesalahan dan kejahatan kecerobohan dan kelalaian

Seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak wajar akan berperilaku lalai. Oleh karena itu ia dapat dipidana karena melakukan pelanggaran kelalaian. Hanya pembelaan yang

didasarkan pada alasan yang masuk akal yang dapat mengecualikan. Kejahatan kecerobohan Cunningham ditangani berdasarkan prinsip Morgan.

Keracunan dan kesalahan

Topik ini dibahas di bagian keracunan.

- (a) Bukti mabuk untuk mendukung keyakinan keliru mengenai persetujuan wanita untuk melakukan hubungan seksual tidak diakui dalam Woods (1982) 74 Cr App R 312. Mabuk tidak menjelaskan kesalahan dalam menyetujui. Pasal 88 RUU KUHP Tahun 1989 menerima asas Woods dalam tindak pidana seksual. Akan tetapi, untuk tindak pidana lain, bukti mabuk yang menyebabkan kesalahan akan diakui apabila mabuk merupakan pembelaan terhadap tindak pidana yang didakwakan.
- (b) Dalam Fotheringham (1988) 88 Cr App R 206 (CA), hubungan seksual dalam keadaan mabuk dengan pengasuh bayi berusia 14 tahun di ranjang perkawinan dengan keyakinan yang salah bahwa itu adalah istrinya tidak menimbulkan pembelaan. Kesalahan mabuk mengenai identitas tidak relevan.
- (c) Secara umum, kesalahan yang disebabkan oleh mabuk tidak dapat dibenarkan.

O'Grady [1987] QB 995 (CA)

Terdakwa meminum delapan botol sari buah apel. Dia kemudian membunuh temannya. Dia berargumen bahwa jika dia tidak membunuh temannya, dia pasti dibunuh olehnya. Pengadilan menyatakan, tampaknya melalui diktum, bahwa jika terdakwa keliru dalam keyakinannya bahwa kekerasan apa pun, atau kekerasan yang ia gunakan, diperlukan, namun kesalahan tersebut disebabkan oleh mabuk yang disengaja, maka pembelaan gagal. Tidak peduli apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang disengaja atau disengaja.

Tidak ada keadaan mabuk di Williams, di atas, sehingga kasus itu dapat dibedakan. Lord Lane CJ, yang memberikan keputusan di kedua otoritas tersebut, mengatakan bahwa pengadilan dihadapkan pada dua prinsip yang saling bersaing. Yang pertama adalah bahwa terdakwa hanya bertindak berdasarkan apa yang ia yakini perlu untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua, korban dibunuh karena kesalahan terdakwa dalam keadaan mabuk dan masyarakat harus dilindungi. 'Alasannya menyimpang dari kesimpulan bahwa dalam keadaan seperti itu, terdakwa berhak meninggalkan pengadilan tanpa noda pada karakternya.'

O'Grady diikuti di O'Connor [1991] Crim LR 135 (CA). Terdakwa sedang minum banyak-banyak. Dia terlibat adu mulut dengan korban, yang ditanduknya sebanyak tiga kali. Diputuskan bahwa jika terdakwa, karena mabuk yang dilakukan sendiri, membentuk keyakinan yang salah bahwa dia bertindak untuk membela diri, pembelaan tersebut gagal. Hakim pengadilan benar karena tidak mengarahkan juri bagaimana mabuk mempengaruhi pembelaan diri. Di O'Connor pengadilan berasumsi bahwa O'Grady mengikat, namun kenyataannya terdakwa di O'Grady dihukum karena pembunuhan. Apa pun yang pengadilan katakan tentang pembunuhan adalah obiber.

O'Grady terbuka terhadap kritik. Hal ini menciptakan pengecualian terhadap aturan Williams bahwa seseorang mempunyai pembelaan diri jika dia membuat kesalahan fakta. Tidak ada satu pun pendapat Williams yang menyatakan bahwa pengadilan bermaksud

membuat pengecualian seperti itu. Salah satu akibat dari O'Grady adalah jika terdakwa mabuk berat sehingga tidak ada unsur kesalahannya, dia akan dibebaskan dari pembunuhan; Namun, jika terdakwa mabuk dan yakin bahwa korban sedang menyerangnya, maka ia tidak dapat mengandalkan pembelaan diri. O'Grady tidak sejalan dengan kasus-kasus yang memberikan pembelaan terhadap mabuk untuk pelanggaran dengan maksud tertentu.

Komisi Hukum, Laporan No. 177, KUHP untuk Inggris dan Wales, 1989, merekomendasikan pada paragraf 8.42 bahwa prinsip O'Grady harus dihapuskan karena 'tidak terpikirkan untuk menghukum pembunuhan seseorang yang karena alasan apa pun berpikir bahwa dia telah melakukan pembunuhan. bertindak untuk menyelamatkan nyawanya dan akan bertindak wajar jika dia benar'. Dalam usulan tersebut, keadaan mabuk akan diperhitungkan untuk menentukan apakah terdakwa percaya akan adanya kondisi pengecualian seperti pembelaan diri. Kemungkinan lain yang dikemukakan oleh J.C. Smith dalam CLP 101 [1994] adalah menghukum terdakwa atas pembunuhan berencana karena kelalaian berat.

Ringkasan hukum kesalahan fakta

Jika terdakwa melakukan kesalahan fakta mengenai salah satu unsur *actus reus*, maka kesalahan tersebut tidak relevan jika pelanggaran tersebut termasuk dalam tanggung jawab tegas (Pangeran); jika pelanggarannya merupakan salah satu *mens rea*, maka terdakwa mempunyai pembelaan jika ia melakukan kesalahan dengan jujur (Morgan), kecuali pelanggaran tersebut bersifat bigami yang mana kesalahan tersebut harus dilakukan dengan alasan yang masuk akal (Tolson). Parlemen dapat mengubah salah satu peraturan ini seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003.

Pembaruan

Rancangan KUHP tidak memuat klausul yang mengatur kesalahan fakta. Tim akademisi yang menyusun pendahulu RUU KUHP memang memberikan klausul bahwa 'ketidaktahuan atau kekeliruan. . . sebenarnya. . . dapat meniadakan unsur kesalahan dari suatu pelanggaran'. Dalam catatan kaki pada paragraf 8.32, Komisi Hukum berkomentar:

Maksud sebenarnya dari pernyataan ini adalah bahwa bahkan suatu kesalahan yang tidak mempunyai dasar yang masuk akal dapat menjadi alasan mengapa seseorang tidak mempunyai kesalahan yang diperlukan untuk melakukan suatu pelanggaran. Bahwa hal ini tidak selalu terlihat jelas terlihat dari keputusan-keputusan modern yang harus menunjukkan bahwa jika, untuk merupakan suatu pelanggaran, perilaku seseorang harus disengaja sehubungan dengan keadaan tertentu, maka tidak konsisten jika menuntut hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut. mengecualikan tanggung jawab, kesalahan sehubungan dengan keadaan tersebut harus didasarkan pada alasan yang masuk akal.

Berdasarkan pasal 41(1), 'kecuali ditentukan lain, seseorang yang bertindak dengan keyakinan bahwa suatu keadaan memang ada, mempunyai pembelaan apa pun yang akan ia miliki jika keadaan itu ada'. Tidak ada persyaratan kewajaran, meskipun tidak adanya kewajaran merupakan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mempunyai keyakinan. Oleh karena itu, jika diberlakukan klausul ini akan mengubah undang-undang terkait kesalahan dan beberapa pembelaan seperti paksaan. Jika rekomendasi Komisi Hukum

dilaksanakan, maka hukumnya adalah tidak akan ada ‘pembelaan atas kesalahan’, logikanya kesalahan tersebut hanyalah kegagalan jaksa untuk membuktikan niat, pengetahuan, atau kecerobohnya. J. M. Williams menulis ‘Fakta yang salah: Warisan Pappajohn v Sang Ratu’ (1985) 63 CBR 597 pada 604 – 605 (catatan kaki dan penekanan dihilangkan):

Kesalahan fakta bukanlah sebuah ‘pertahanan’ dalam pengertian yang sama seperti provokasi, pembelaan diri, paksaan, dan kebutuhan adalah pembelaan. Pembelaan terakhir ini membenarkan atau membenarkan, baik sebagian atau seluruhnya, apa yang seharusnya merupakan tindakan kriminal. Suatu kesalahan fakta yang meniadakan mens rea menjadikan perbuatan yang dilakukan tidak bersalah dan dengan demikian tidak pernah timbul pertanyaan mengenai pembebasan dari tuduhan tindak pidana.

Kesalahan menjelaskan mengapa terdakwa tidak mens rea. Klausul 41 akan mengesampingkan anomali yang ada saat ini, yang menyatakan bahwa keyakinan yang masuk akal diperlukan dalam menghadapi paksaan, namun (hanya) keyakinan yang jujur dalam membela diri. Bahwa pembedaan undang-undang saat ini tidak dapat dipertahankan telah ditunjukkan dengan baik oleh Profesor D. W. Elliott 'Necessity, duress and self-defence' [1989] Crim LR 611. Jika seorang pengendara mobil mengendarai mobilnya di X untuk membela diri, ia akan mendapat pembelaan diri. -pertahanan, jika dia secara tidak wajar membuat kesalahan bahwa X menyerangnya padahal X tidak. Namun, jika dia secara tidak masuk akal percaya bahwa X sedang menyerangnya padahal X tidak menyerangnya, dia tidak dapat mengandalkan pembelaan atas tekanan keadaan.

Pembaca diajak untuk berspekulasi mengapa pengadilan di Tolson, Prince dan Morgan mengambil tiga kesimpulan berbeda ketika mereka dihadapkan pada tiga kejahatan yang termasuk dalam bidang pelanggaran seksual.

Reformasi kesalahan dalam pemerkosaan

Komisi Hukum dalam Makalah Kebijakannya, Persetujuan dalam Pelanggaran Seks, 2000, mengkaji argumen-argumen yang mendukung penerapan persyaratan keyakinan yang masuk akal atas persetujuan korban. Yang mendukung revisi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) ‘Kepercayaan pada persetujuan adalah pembelaan yang mudah untuk diajukan namun sulit untuk disangkal.’
- (b)) ‘Hal ini mendorong dilakukannya pembelaan yang sesuai dengan asumsi-asumsi yang ketinggalan jaman dan ofensif mengenai hakikat hubungan seksual. Semakin bodoh dan seksis pria tersebut serta sikapnya, semakin besar peluang dia untuk dibebaskan atas dasar ini.’
- (c) ‘Kerusakan terjadi pada wanita [sic] karena tindakan pemerkosaan. Perempuan berhak untuk mengharapkan perlindungan hukum pidana jika, dalam pandangan apa pun, laki-laki tersebut bertindak berdasarkan asumsi yang tidak masuk akal mengenai persetujuannya.’
- (d) ‘Keyakinan yang salah muncul dalam situasi di mana harga atas kelalaian laki-laki (yang sangat besar) sangat tinggi, dan dibayar oleh perempuan, sedangkan biaya yang harus

ditanggung laki-laki dalam hal waktu dan usaha untuk mengetahui posisi tersebut adalah minimal jika dibandingkan. .'

Yang mendukung tes subjektif adalah argumen berikut:

- (a) 'Seseorang tidak boleh bersalah atas pelanggaran seksual yang serius. . . atas dasar kelalaian.'
- (b) 'Bebannya ada pada mereka yang menginginkan perubahan. . . untuk menunjukkan bahwa seseorang dibebaskan secara tidak patut. . . Tidak ada bukti seperti itu yang dihasilkan."
- (c) Kewajaran siapa yang berlaku? Apakah itu milik terdakwa, juri, atau orang yang masuk akal secara hipotetis?
- (d) Juri dapat memilah fakta dan fiksi.
- (e) Jarang sekali seorang terdakwa menyatakan bahwa ia mempunyai suatu keyakinan namun ia tidak mempunyai dasar yang masuk akal.
- (f) Penerapan kewajaran mungkin akan membuat jumlah juri yang menghukum pemerkosaan menjadi lebih sedikit dibandingkan saat ini.

Komisi Hukum berpendapat bahwa pendekatan subjektif harus dipertahankan. Akan tetapi, terdakwa tidak mempunyai pembelaan jika ia mabuk dan dalam menilai apakah terdakwa yakin bahwa korban memberikan persetujuannya, juri harus mempertimbangkan apakah ia menggunakan kesempatan tersebut untuk memastikan apakah korban memberikan persetujuannya atau tidak.

Pemerintah menolak untuk menerima rekomendasi Komisi dan dalam Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003, hanya kesalahan yang masuk akal yang dapat memberikan pembelaan. Akibatnya, menurut kata-kata Komisi Hukum, 'seseorang [sekarang] bersalah melakukan pelanggaran seksual yang serius atas dasar kelalaian.'

8.3 KEADAAN MABUK

Kami mengakui bahwa doktrin yang menyentuh kasus-kasus seperti ini tidak ditempatkan secara jelas dalam buku-buku (Bishop's Criminal Law, Vol 1, 9th edn (Little, Brown & Co, 1923) paragraf 320).

Bagian ini membahas keracunan sebagai pembelaan, bukan sebagai pelanggaran. Ini berkonsentrasi pada situasi di mana terdakwa melakukan tindakan yang dilarang, tidak memiliki unsur mental yang diperlukan, namun bertanggung jawab atas kenyataan bahwa ia tidak memilikinya karena mabuk yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Mabuk adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda dari tahun 1607 (4 Yakobus 1, c 5) hingga 1828 (9 Geo 4, c 61, s 35) tetapi hukum tersebut tampaknya belum ditegakkan. Sekarang tidak ada pelanggaran (sederhana) mabuk, tetapi beberapa contoh dihukum, misalnya. mabuk dan tidak tertib serta mengemudi dalam keadaan mabuk. Hubungan antara mabuk-mabukan dan kriminalitas bukanlah hubungan sebab-akibat: mabuk tidak berarti bahwa terdakwa akan melakukan pelanggaran. Namun, beberapa obat-obatan seperti alkohol melepaskan hambatan, dan banyak orang yang melakukan kejahatan telah menggunakan narkoba, baik yang berbahaya maupun yang tidak diklasifikasikan dalam

undang-undang sebagai berbahaya, misalnya. alkohol. Diperkirakan sebagian besar pelanggaran non-fatal dilakukan ketika terdakwa sedang mabuk. Menteri Dalam Negeri saat itu, Jack Straw, dilaporkan di *The Guardian*, 18 Juli 2000, mengatakan: 'Sekitar 40% kejahatan dengan kekerasan dilakukan ketika pelaku berada di bawah pengaruh alkohol, begitu pula 78% penyerangan dan 88% kekerasan. insiden kerusakan kriminal.' Lebih dari 50% pemerkosa dalam keadaan mabuk, menurut situs Alcohol Concern, www.alcoholconcern.org.uk. Di sini mabuk dianggap sebagai pembelaan baik seluruhnya atau sebagian, namun perlu dicatat bahwa mabuk terkadang membuat kejahatan menjadi lebih serius daripada yang seharusnya, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk.

Keracunan yang tidak disengaja

Bagian ini sebagian besar dibatasi pada keracunan sukarela. Jika mabuk disebabkan oleh obat yang diresepkan secara medis, terdakwa salah mengira minuman keras sebagai non-minuman keras (misalnya mengira narkoba adalah parasetamol), seseorang yang membubuhkan minuman terdakwa (misalnya dengan memasukkan LSD atau Rohypnol ke dalam minuman terdakwa) vodka), memaksanya untuk minum alkohol, atau mungkin orang dewasa yang menipu seorang remaja agar meminum alkohol, pertanyaan apakah terdakwa akan dihukum karena suatu pelanggaran dianggap bergantung pada keadaan pikirannya. Pihak yang berwenang jarang ada tetapi termasuk Pearson (1835) 168 ER 131. Satu-satunya otoritas modern adalah otoritas kontroversial dari Kingston [1995] 2 AC 355. Seorang pria membujuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun ke apartemennya dan memberinya obat tidur. Anak laki-laki itu tertidur. Untuk memerasnya, pria tersebut mengundang pemohon ke apartemennya. Dia rupanya juga membiusinya. Pemohon melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki tersebut. Pria itu memotret dan merekam dia melakukan hal itu. Pemohon mengakui bahwa dia adalah seorang pedofil homoseksual. Hakim pengadilan mengarahkan juri bahwa jika terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak bermaksud melakukan kejahatan tersebut, maka dia tidak bersalah tetapi jika dia melakukannya meskipun ada niat untuk melakukannya, dia bersalah karena niat untuk menggunakan obat tersebut tetaplah sebuah niat. . Juri memvonis bersalah tetapi hukuman itu dibatalkan. Pengadilan Banding menyatakan bahwa apabila minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada terdakwa, ia tidak bersalah jika karena mabuk ia mempunyai niat yang tidak akan ia lakukan seandainya ia dalam keadaan sadar. 'Niat itu sendiri muncul dari keadaan yang tidak dipersalahkannya.' Oleh karena itu, ia dibebaskan meskipun ia memiliki mens rea atas kejahatan tersebut. Dia tidak bersalah secara moral. Kingston di Pengadilan Banding mendapat kritik keras. Terdakwa memang berniat melakukan penyerangan tidak senonoh. Dia punya mens rea. Oleh karena itu, dia seharusnya dihukum. Fakta bahwa dia tidak dapat menahan dorongan hatinya tidaklah relevan (seperti dalam keadaan gila), begitu pula fakta bahwa seseorang membuatnya mabuk. Bertentangan dengan pandangan pengadilan, keracunan yang dilakukannya tidak meniadakan mens rea. Tentu saja dia tidak bertanggung jawab untuk masuk ke dalam keadaan mabuk, tapi dia mungkin bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dalam keadaan itu. Jika Kingston (CA) benar, maka hal ini mungkin berlaku ketika seorang penjahat memaksa terdakwa meminum alkohol

atau mengancamnya atau orang lain dengan kekerasan jika dia tidak meminumnya, dan mungkin ketika terdakwa menggunakan narkoba secara tidak sengaja. Untuk upaya mendukung Kingston (CA) jika terdakwa bukan seorang pedofil, lihat G. R. Sullivan 'Intoxication and beyond' [1994] Crim LR 272, yang berpendapat bahwa: 'Ini bukan ujian karakter yang adil untuk menghapus secara diam-diam hambatan seseorang dan hadapi dia dengan godaan yang biasanya ingin dia hindari.'

Di tingkat banding [1995] 2 AC 355 Lord Mustill, yang disetujui oleh Lord lainnya, mengatakan bahwa tidak ada prinsip dalam hukum Inggris, seperti yang dipikirkan oleh Pengadilan Tinggi, bahwa jika tidak ada kesalahan yang ditimpakan pada terdakwa, dia tidak melakukannya. memiliki mens rea dan karena itu tidak bersalah atas pelanggaran apa pun. Penilaian moral tidak mempengaruhi kriminalitas tindakan tersebut meskipun dapat mempengaruhi hukumannya. 'Rea' berarti salah secara kriminal, bukan secara moral. Menyalahkan berkaitan dengan hukuman, bukan hukum substantif. Tidak ada pembelaan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan seandainya dia sadar, kecuali karena kegilaan dimana terdakwa memang berniat melakukan pelanggaran. Lord Mustill menyetujui pandangan para komentator akademis sehubungan dengan keputusan Pengadilan Tinggi. Jika ada pembelaan atas fakta-fakta ini, klaim palsu mengenai keracunan yang tidak disengaja mungkin berhasil. Apakah keracunan itu disengaja atau tidak, 'niat mabuk tetaplah niat', sebagaimana dinyatakan dalam Sheehan [1975] 1 WLR 739 (CA). Meskipun House of Lords tidak terikat oleh otoritas apa pun, House of Lords menganggap bahwa ketika terdakwa mabuk tanpa sengaja sehingga dia tidak berniat, ada pembelaan. Namun, secara prinsip, tidak ada pembelaan terhadap dorongan yang tidak dapat ditolak yang berasal dari penyebab bawaan (contohnya adalah kleptomania), dan oleh karena itu tidak ada pembelaan terhadap dorongan yang tidak dapat ditolak yang timbul dari campuran kekuatan bawaan dan 'disinhibition eksternal'. Oleh karena itu, permohonan banding dikabulkan. Perlu dicatat bahwa perbedaan antara pelanggaran dengan maksud dasar dan pelanggaran dengan maksud khusus tidak berlaku untuk keracunan yang tidak disengaja. Dalam kritik terhadap Kingston (HL) dapat dikatakan bahwa pembelaan alasan tidak semuanya didasarkan pada tidak adanya mens rea.

Keracunan bukan tanpa disengaja ketika terdakwa tidak mengetahui bahwa anggur yang diminum mengandung alkohol tinggi: Allen [1988] Crim LR 698 (CA). Hasilnya dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa efek alkohol tidak dapat diprediksi. Menarik untuk membandingkan Allen dengan hukum yang disebutkan pada poin awal (e) di bawah. Kegagalan untuk meramalkan akibat dari anggur menyebabkan rasa bersalah; kegagalan untuk meramalkan konsekuensi narkoba menyebabkan pembebasan! Undang-undangnya mungkin berbeda jika terdakwa mengira anggur tersebut non-alkohol, bukan rendah alkohol. Dalam Shippam [1971] Crim LR 434, dinyatakan bahwa menambahkan minuman adalah alasan khusus untuk tidak mendiskualifikasi seseorang karena mengemudi dengan kadar alkohol dalam darah di atas batas yang ditentukan, tetapi argumen bahwa dia seharusnya tidak bersalah sama sekali memang demikian. tampaknya belum dipasang. Argumen yang berhasil di Shippam tampaknya adalah bahwa terdakwa mengemudi secara sukarela. Kemabukannya

yang tidak disengaja tidak relevan dengan fakta tersebut. Tidak dapat dipastikan apakah keracunan terjadi karena tidak disengaja jika terdakwa mempunyai kondisi medis yang tidak dia ketahui yang menyebabkan dia menjadi mabuk lebih cepat dibandingkan yang seharusnya.

Kemabukan yang disebabkan oleh diri sendiri juga bukan merupakan pembelaan jika terdakwa memang memiliki mens rea yang bersangkutan. Jika orang mabuk mempunyai niat membunuh dan memang membunuh, maka ia dihukum karena pembunuhan. Jika terdakwa membunuh istrinya karena sedang marah, alkohol mungkin bisa menjelaskan mengapa ia mudah terprovokasi. Hambatannya telah dihilangkan tetapi pelanggaran hambatan bukanlah suatu pertahanan. Dia bersalah atas pembunuhan. Demikian pula, fakta bahwa terdakwa tidak akan bertindak seperti yang dilakukannya jika dia tidak mabuk bukanlah pembelaan. Situasi yang kontras adalah ketika terdakwa dalam keadaan mabuk tersandung istrinya, sehingga menjatuhkannya ke bawah kereta. Kemabukan relevan karena dia mengklaim bahwa dia tidak melakukan niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya. Mabuk bukanlah pembelaan ketika terdakwa mengatakan bahwa dia tidak meramalkan akibat dari perilakunya karena mabuk.

Poin awal

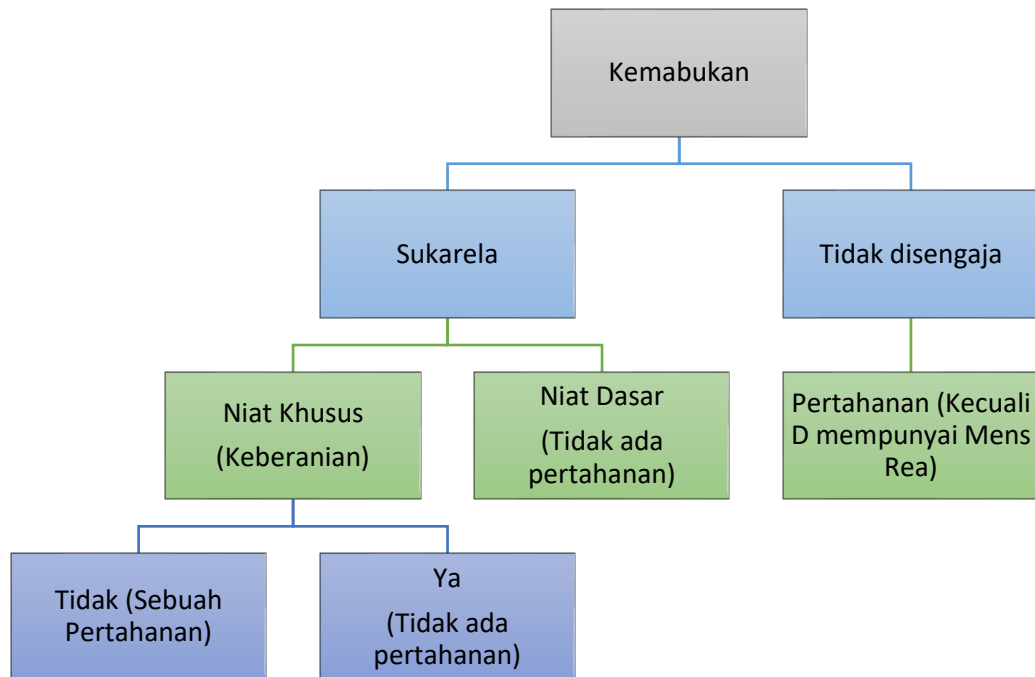
- (a) Terdakwa tidak mempunyai pembelaan jika ia mabuk untuk memberikan dirinya keberanian Belanda. Dalam *Jaksa Agung Irlandia Utara v Gallagher* [1963] AC 349 terdakwa berniat membunuh istrinya, meminum sebagian besar sebotol wiski, dan membunuhnya. (Lihat juga Bab 3 tentang kontemporer.) Dia tidak bisa menggunakan mabuk sebagai pembelaan dan bersalah atas pembunuhan.
- (b) Kemabukan harus bersifat 'sangat ekstrem' agar pembelaan dapat menerapkan: *Stubbs* (1989) 88 Cr App R 53. Pengadilan Tinggi Selandia Baru di *Kamipeli* [1975] 2 NZLR 610 tampaknya telah menyetujui arahan hakim pengadilan bahwa terdakwa pasti 'mabuk buta', meskipun menurut pengadilan, penuntut tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa 'bertindak seperti robot tanpa pikirannya berfungsi'. (Jika bukti tidak menunjukkan bahwa pikiran terdakwa tidak berfungsi karena alkohol, mungkin saja penuntut tidak dapat membuktikan bahwa ia bermaksud melakukan pelanggaran tersebut.) Mahkamah Agung Kanada dalam *Daviault v R* (1995) 118 DLR (4) 469 mengatakan bahwa terdakwa harus 'dalam keadaan mabuk yang ekstrim sehingga [dia] berada dalam keadaan seperti otomatisme atau kegilaan'. Jarang sekali seseorang berada dalam kondisi seperti itu. Pengadilan mengandalkan keputusan *Wilson J dalam Bernard* [1988] 2 SCR 833. Oleh karena itu, tidak cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah minum banyak alkohol karena efek alkohol bervariasi dari orang ke orang: *Broadhurst v R* [1964] AC 441. Misalnya, dalam *Groark* [1999] Crim LR 669 terdakwa meminum 10 liter bir tetapi tidak mabuk. Kasus-kasus di Inggris menyatakan bahwa terdakwa harus dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak melakukan niat yang disyaratkan sebagaimana ditentukan oleh definisi pelanggaran: lihat, misalnya, *McKnight, The Times*, 5 Mei 2000 (CA), mengandalkan nasihat Lord Hope dalam *Sooklal v Negara Bagian Trinidad dan Tobago* [1999] 1 WLR 2011 (PC). Di *McKnight*, terdakwa mengatakan bahwa ketika dia mabuk, dia tidak 'tidak berkaki'. Dia menceritakan secara lengkap kejadian pembunuhan korban tersebut. Pengadilan

Banding menyatakan bahwa persepsinya tidak diubah oleh alkohol dan oleh karena itu dia tidak memiliki pembelaan terhadap tuduhan pembunuhan. Hakim pengadilan benar karena tidak menyerahkan pembelaan atas mabuk kepada juri. Terdakwa tidak perlu terlalu mabuk hingga hampir tidak sadarkan diri: Brown [1998] Crim LR 485 (CA). Lord Denning di Gallagher mengatakan bahwa terdakwa harus 'dianggap sangat bodoh karena mabuk sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan . . . sebagai dimana. . . seorang pria mabuk mengira temannya adalah boneka teater dan menikamnya sampai mati'. Seperti yang akan kita lihat, bahkan jika terdakwa mabuk berat, ia tidak mempunyai pembelaan terhadap semua pelanggaran, namun hanya pembelaan terhadap pelanggaran dengan maksud tertentu. Faktanya, jumlah keracunan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan tampaknya tidak menimbulkan kesulitan: Laporan Komisi Reformasi Hukum Irlandia tentang Intoksikasi, LRC 51, 1995, 2.

- (c) Jika tindakan terdakwa terkesan tidak disengaja, maka pembelaannya adalah karena mabuk, bukan otomatisme, jika tindakan yang tidak disengaja tersebut disebabkan oleh mabuk. Dalam pengertian hukum, terdakwa bertindak atas kemauannya sendiri, dan berbuat demikian meskipun pemberian dan aktanya dipisahkan pada waktunya. Namun, jika keracunannya termasuk dalam aturan M'Naghten, pembelaannya adalah kegilaan, bukan keracunan. Karena alkohol dan obat-obatan lain adalah penyebab 'eksternal', jarang sekali keracunan bisa dianggap sebagai kegilaan. Delirium tremens ('DTs') adalah contoh penyakit pikiran di M'Naghten. Biasanya meskipun keracunan menyebabkan delusi, tidak akan ada penyakit pikiran. Dalam keadaan otomatisme dan kegilaan pada dasarnya terdakwa tidak dapat menghindari keadaan tersebut; dalam keadaan mabuk dia bisa. Untuk undang-undang tentang kegilaan, lihat Bab 9. Salah satu permasalahan yang muncul sehubungan dengan batas antara kegilaan dan mabuk adalah sebagai berikut. Seseorang tidak gila jika ia tidak mampu menahan suatu dorongan hati. Jika keragu-raguannya dalam menghadapi dorongan hati diperparah oleh alkohol, dia tetap tidak dapat membela diri atas kegilaan: Gallagher.
- (d) Beban pembuktian ada pada penuntut umum. Dikta sebaliknya dalam DPP v Beard [1920] AC 479 salah: Sheehan. Dewan Penasihat di Broadhurst menerima bahwa Woolmington v DPP [1935] AC 462 telah mengubah beban pembuktian.
- (e) Peraturan tentang keracunan sebagai pembelaan berlaku baik terhadap alkohol maupun obat-obatan yang dapat membuat penggunaannya menjadi agresif, berbahaya, atau tidak dapat diprediksi. Definisi 'minuman keras' tidak menjadi masalah bagi pengadilan. Namun obat penenang, seperti valium tidak boleh digolongkan dengan alkohol, menurut Bailey [1983] 2 Semua ER 503 (lihat di bawah otomatisme) dan Hardie [1984] 3 Semua ER 848 (CA). Di Hardie, terdakwa didakwa merusak properti dengan maksud membahayakan nyawa atau ceroboh mengenai apakah nyawa akan terancam. Dia telah meminum valium (tidak diresepkan untuknya) dan membakar kamar tidur. Ada pendapat bahwa efek obat penenang tidak sama dengan obat-obatan yang memabukkan atau alkohol, yang dapat menghasilkan agresi dan perilaku yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, terdakwa tidak (secara subyektif) gegabah

dalam meminum tabletnya, jika terdakwa tidak menyadari risiko perilaku yang mudah berubah. Mungkin tidak mudah untuk memutuskan obat mana yang memiliki efek berbahaya dan mana yang tidak. Agaknya obat-obatan seperti kokain dan LSD akan digolongkan sebagai obat-obatan berbahaya; heroin, yang merupakan candu, oleh karena itu harus dikategorikan sebagai valium, namun diragukan apakah pengadilan akan menyetujuinya. Namun pengadilan menyatakan bahwa dia tetap bersalah karena mengemudi secara sembrono. Jika demikian, dia saat ini bersalah karena mengemudi berbahaya. Agaknya argumennya adalah bahwa ia tidak boleh mengonsumsi obat apa pun tanpa mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, jika ia menyadari bahwa ia mungkin bertindak agresif, tidak dapat diprediksi, atau tidak terkendali, maka perilakunya adalah tindakan yang ceroboh dan ia bertanggung jawab atas segala kejahatan kecerobohan yang dilakukannya di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Dia tidak perlu meramalkan terjadinya risiko spesifik apa pun. Aturan ini berlaku baik obat tersebut diresepkan secara medis atau tidak. Batasan antara obat yang menenangkan dan obat yang menyebabkan agresi belum tentu jelas. Memang valium menyebabkan perilaku agresif pada beberapa orang. Anehnya, penentuan apakah setiap obat berbahaya atau tidak diserahkan kepada hakim.

- (f) Agaknya terdakwa akan mendapat pembelaan jika alkohol tersebut diresepkan oleh dokter. Alkohol yang diberikan kepada seseorang setelah kecelakaan diperkirakan akan diperlakukan serupa.
- (g) Hilangnya ingatan karena mabuk tidak membenarkan perbuatan terdakwa jika ia melakukan perbuatannya dengan sengaja: R v C [1992] Crim LR 642 (CA).
Pertahanan terhadap keracunan masih membingungkan (Gbr. 8.1). Tidak ada cara yang mudah untuk menyatakan hukum. Salah satu alasan kekacauan ini adalah karena mabuk menyediakan arena bagi dua prinsip yang saling bertentangan. Yang pertama adalah perlunya menghukum orang yang berbuat salah. Kedua, terdakwa yang mabuk mungkin tidak menyadari apa yang dilakukannya dan oleh karena itu tidak pantas dihukum.



Gambar 8.1 Intoksikasi

Aturan khusus tentang mabuk-mabukan

Undang-undangnya menyatakan bahwa jika juri menerima bukti mabuk, terdakwa tidak akan dihukum jika kejahatan tersebut memiliki 'niat khusus', namun akan dihukum jika pelanggaran tersebut merupakan salah satu 'niat dasar'. Misalnya, dalam tuduhan pembunuhan, pembunuhan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan maksud tertentu, keadaan mabuk yang dialami terdakwa relevan dengan pertanyaan apakah ia mempunyai niat jahat yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, niat dan mabuk-mabukan disatukan dalam satu kasus niat tertentu. Apabila terdakwa didakwa melakukan pembunuhan dan terdakwa mempunyai niat langsung atau tidak, maka keadaan mabuk diperhitungkan dalam menentukan apakah ia bermaksud membunuh atau melakukan GBH. Dalam kasus pembunuhan dengan niat miring, 'minuman relevan dengan pertanyaan apakah terdakwa memahami bahwa tindakannya hampir pasti mengakibatkan kematian atau cedera tubuh yang serius' (Hayes [2002] EWCA Crim 1945). Bertentangan dengan apa yang dipikirkan pada masa Beard – dan bertentangan dengan apa yang kadang-kadang masih dikatakan oleh Pengadilan Banding (lihat McKnight, di atas) – kita tidak menanyakan apakah terdakwa mampu menyatakan maksud spesifiknya tetapi apakah dia benar-benar melakukannya. mempunyai maksud: Sheehan dan kasus lain termasuk O'Connor [1991] Crim LR 135 (CA), Horton, tidak dilaporkan, 20 Januari 1992, Cole [1993] Crim LR 301 (CA), Hawkins [1993] Crim LR 888 dan Bowden [1993] Kejahatan LR 380 (CA). Hukum yang sama berlaku di Australia: O'Connor (1980) 54 ALJR 349 (HCA). Jika terdakwa memang mempunyai unsur kesalahan yang diperlukan, dia bersalah baik dalam keadaan mabuk atau tidak. Kita melihat pada pikiran terdakwa, bukan pada apa yang mungkin dipikirkan oleh orang yang berakal sehat. Istilah 'niat dasar' mencakup semua pelanggaran yang tidak dapat dibela dengan mabuk-mabukan, termasuk pelanggaran yang dapat dilakukan secara ceroboh atau lalai. Jika kejahatan itu

merupakan kejahatan yang disengaja, maka terdakwa tetap dihukum meskipun dia tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Dia bersalah meskipun dia tidak bermaksud atau mengumumkan akibat dari perilakunya. Kesulitannya adalah membedakan antara pelanggaran dengan maksud dasar dan pelanggaran dengan maksud khusus. Seperti yang dikatakan Lord Mustill di Kingston di atas: 'bidang hukum ini kontroversial, sehubungan dengan isi peraturan, landasan intelektualnya, dan kapasitasnya untuk memberikan solusi yang praktis dan adil'.

Undang-undang ini pertama kali diumumkan secara resmi dalam DPP v Beard [1920] AC 479. Sebelum tahun 1957, ada aturan bahwa pembunuhan dalam suatu tindak pidana adalah pembunuhan. Aturan ini disebut pembunuhan konstruktif atau aturan kejahatan/pembunuhan. Pemerksaan adalah kejahatan. Terdakwa melakukan pemerksaan terhadap seorang gadis. Dia menekan ibu jarinya di lehernya dan membunuhnya. Karena doktrin pembunuhan konstruktif, dia bersalah melakukan pembunuhan jika penuntut dapat menunjukkan bahwa dia bermaksud memperksa dan memang membunuh. Saat ini, tidak perlu lagi menunjukkan bahwa ia bermaksud membunuh atau melakukan tindakan yang melukai tubuh. Lord Birkenhead menyatakan bahwa dalam keadaan seperti itu terdakwa tidak memiliki pembelaan kecuali dia terlalu mabuk sehingga tidak mampu berniat melakukan pemerksaan. (Pertanyaannya sekarang adalah apakah dia memang mempunyai niat tersebut.) Terdakwa bisa saja melakukan niat tersebut. Oleh karena itu, dia bersalah atas pembunuhan. Lord Birkenhead melanjutkan dengan mengucapkan dikta otoritas tinggi.

- (1) Apabila terdakwa menjadi gila karena mabuk, misalnya delirium tremens, maka pembelaannya adalah kegilaan, bukan mabuk-mabukan. Fakta bahwa kegilaan itu disebabkan oleh mabuk tidaklah relevan;
- (2) Bukti mabuk yang menyebabkan terdakwa tidak mampu melakukan maksud khusus yang pokok untuk melakukan kejahatan itu, harus dipertimbangkan dengan fakta-fakta lain yang dibuktikan untuk menentukan apakah ia mempunyai maksud tersebut atau tidak.

Di Beard, terdakwa tidak membuat dirinya mabuk sehingga tidak bisa melakukan pemerksaan. Diktumnya dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, juri dapat menolak bukti dan menangani kasus tersebut dengan cara biasa. Selain itu, karena mabuk berkaitan dengan bukti kejahatan dengan maksud tertentu, maka keliru jika menyebut mabuk sebagai pembelaan; sebaliknya, hal ini merupakan kegagalan penuntut untuk membuktikan seluruh elemen pelanggaran, yaitu maksud yang diperlukan adalah definisi pelanggaran tersebut. Perlu juga dicatat bahwa keracunan tidak meniadakan mens rea; itu adalah bagian dari bukti yang ditambahkan ke semua bukti lainnya untuk menentukan apakah terdakwa memang mempunyai mens rea.

- (3) Bukti bahwa mabuk tidak memenuhi ketidakmampuan untuk membentuk niat yang diperlukan untuk melakukan kejahatan, dan hanya membuktikan bahwa pikirannya terpengaruh oleh minuman sehingga ia lebih mudah terjerumus ke dalam nafsu kekerasan, tidak membantah tuduhan tersebut. anggapan bahwa laki-laki menginginkan akibat wajar dari perbuatannya.

Pasal 8 UU Peradilan Pidana 1967 mengkualifikasi dalil ketiga. Pengadilan atau juri tidak lagi terikat untuk mengambil kesimpulan dari fakta bahwa seseorang memang menginginkan akibat wajar dari tindakannya. Para hakim fakta harus melihat seluruh bukti untuk memutuskan apakah terdakwa memang mempunyai niat atau pandangan ke depan yang diperlukan. Pasal 8 tidak menjadikan keadaan mabuk sebagai alat bukti semata, apakah terdakwa mempunyai mens rea atau tidak. Masih dianggap sebagai persoalan hukum substantif: DPP v Majewski [1977] AC 443.

Proposisi kedua adalah proposisi yang sulit. Tidak ada batasan terhadap kejahatan yang disengaja, meskipun kemungkinan besar Lord Birkenhead hanya mengartikan 'niat tertentu' sebagai 'niat'. Yang perlu dilakukan adalah membedakan antara pelanggaran yang disengaja secara khusus dan yang mendasar, meskipun istilah 'niat dasar' tidak muncul dalam pidato Lord Birkenhead. Seperti yang dikatakan oleh M. Goode, 'Beberapa pemikiran tentang keadaan "pertahanan" mabuk saat ini' (1984) 8 Crim LJ 104 di 105: 'Jika tidak ada perbedaan yang benar-benar koheren, maka labelnya "spesifik" dan "dasar" tujuannya hanya itu: label. Seseorang mungkin saja menyebut pembunuhan sebagai kejahatan "bacon" dan pembunuhan berencana sebagai kejahatan "telur".' Apa yang terjadi adalah bahwa para hakim menganggap bahwa 'niat tertentu' mempunyai arti yang pasti dalam undang-undang yang berbeda dengan 'niat' dan mereka telah berusaha membedakan maksud 'spesifik' dari 'dasar'. Perbedaannya terletak pada hukum Inggris.

Pengadilan kesulitan dalam mendefinisikan perbedaan tersebut. Di Gallagher, Lord Denning mengikuti Beard yang berpendapat bahwa mabuk bukanlah pembelaan kecuali jika itu merupakan kegilaan atau kejahatan itu merupakan niat tertentu. Dia mengatakan bahwa jika minuman mengganggu daya persepsi terdakwa sehingga dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan berbahaya, dia tidak memiliki pembelaan jika orang yang sadar dan berakal sehat di tempatnya akan menyadari bahaya tersebut. Proposisi ini tidak muncul dalam Jenggot, dan jika mabuk tidak sesuai dengan niat tertentu, mengapa tidak bertentangan dengan pandangan ke depan? Lord Denning menyatakan bahwa kurangnya pengendalian diri atau kesadaran moral yang disebabkan oleh keracunan bukanlah pembelaan. Di Gallagher, fakta bahwa keadaan psikomotorik terdakwa diperburuk oleh alkohol tidak memberinya pembelaan atas mabuk jika efek alkohol mempersulit terdakwa untuk melakukan pengendalian diri.

Lord Denning mengandalkan Beard dan kasus anonim dari tahun 1748 (di mana seorang perawat mabuk menaruh bayi di atas api, mengira itu adalah kayu gelondongan) untuk menunjukkan bahwa jika kejahatan tersebut memiliki niat tertentu, mabuk adalah pembelaan jika terdakwa tidak melakukannya. memiliki niat itu. Dapat dikatakan bahwa kasus perawat tersebut bukanlah kasus yang mempunyai tujuan khusus karena dia tidak mempunyai mens rea sama sekali. Lord Denning tampaknya telah mendefinisikan niat khusus sebagai kejahatan dengan niat tersembunyi (melakukan X dengan niat untuk melakukan X atau Y). Tentu saja semua kejahatan tersebut merupakan kejahatan dengan maksud tertentu, namun istilah 'niat khusus' lebih luas. Lord Birkenhead mungkin mengartikan 'niat khusus' yang berarti niat yang merupakan bagian dari elemen mental dalam pelanggaran. Unsur mental

dalam pembunuhan adalah niat untuk membunuh atau melakukan penganiayaan fisik yang menyedihkan. Niat tersebut adalah niat 'spesifik' dari pembunuhan. Dalam pendekatan ini, 'spesifik' tidak menambahkan apa pun pada 'niat'.

Di Gallagher, niat awal untuk membunuh ditambahkan ke dalam actus reus, yang terjadi setelah terdakwa mabuk. Aturan keberanian Belanda ini berbeda dengan prinsip umum kontemporer dalam hukum pidana. Argumennya adalah pelanggaran semacam itu dibenarkan dengan menangkap orang-orang berbahaya. Lipman [1970] 1 QB 152 memberikan contoh kecenderungan yang terus berlanjut dari para hakim yang tidak membiarkan terdakwa bebas seperti yang mereka lakukan jika prinsip-prinsip umum hukum diterapkan, namun membengkokkan hukum atau membuat pengecualian untuk menghukum orang-orang yang 'ternyata bersalah'. sesuatu, meskipun dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak bersalah secara nyata.

Lipman [1970] 1 QB 152

Terdakwa dan pacarnya meminum LSD. Di bawah pengaruh obat dia berhalusinasi bahwa dia sedang diserang oleh ular raksasa. Dia terbangun keesokan paginya dan menemukan pacarnya tewas, kain sepanjang delapan inci telah dimasukkan ke tenggorokannya. Lord Widgery CJ berpendapat bahwa keracunan melalui obat-obatan merupakan bagian dari pembelaan terhadap mabuk. Menerapkan pembunuhan Gallagher adalah kejahatan yang disengaja. Keracunan bukanlah pembelaan terhadap pelanggaran niat dasar. Oleh karena itu, terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana. House of Lords menolak izin untuk mengajukan banding.

Kritik terhadap Lipman sangat kuat. Di Beard, terdakwa yang bersalah bermaksud melakukan pemerkosaan. Di Lipman, terdakwa yang tidak bermaksud melakukan pelanggaran apapun, dinyatakan bersalah melakukan pembantaian. Terdakwa tidak 'berpikiran' karena berada di bawah pengaruh obat-obatan; bagaimana dia bisa mendapatkan mens rea? Pada saat pembunuhan terjadi, dia tidak mempunyai mens rea. Pada saat meminum obat tersebut dia tidak melakukan actus reus. Aturan kontemporer telah dilanggar. Lord Birkenhead mengatakan di Beard bahwa mabuk bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan tidak berencana, tetapi tidak menghubungkan pernyataannya dengan perbedaan antara niat spesifik dan niat dasar. Bahkan dalam pembantaian manusia, terdakwa hanya bersalah jika ia mempunyai semacam mens rea.

Jenis pembunuhan yang dipermasalahkan di Lipman adalah pembunuhan berencana yang konstruktif atau melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum pasti ada, tetapi terdakwa tidak melakukannya karena pikirannya tidak menyertai perbuatannya. Jika perbuatan melawan hukumnya adalah memasukkan kain spreng ke dalam mulut korban, maka saat itu korban sedang tidak sadarkan diri. Jika yang melanggar hukum adalah penggunaan narkoba, konsumsi tersebut tidak menyebabkan kematiannya dan bagaimanapun juga penggunaan narkoba bukanlah suatu pelanggaran: yang merupakan kejahatan adalah kepemilikan.

Kepemilikan narkoba tidak membunuh pacarnya. Lord Widgery CJ tidak menangani keberatan ini. Mungkin ada argumen bahwa pengadilan bisa saja mengandalkan bentuk lain

dari pembunuhan tidak disengaja, yaitu pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian besar, namun jika terdakwa tidak sadarkan diri pada saat itu, bagaimana dia bisa ceroboh? Masih terdapat perbedaan waktu antara kelalaian dalam mengonsumsi obat-obatan dan kematian. Lipman melihat tanggapan Pengadilan Banding terhadap narkoba, seperti halnya kasus berikutnya. Baik Lipman maupun Majewski di atas sebenarnya menghukum tindakan mabuk, tetapi hukumannya didasarkan pada hasil perbuatan terdakwa, baik terdakwa bertindak secara sadar atau tidak. Lord Salmon di Majewski menyetujui Lipman dan Beard.

DPP v Majewski [1977] AC 443

Seorang pria menghabiskan 24 jam untuk dibius dan mabuk. Dia memecahkan jendela dan menyerang seorang petugas polisi. Tujuh keputusan di House of Lords mengatakan hal yang berbeda tetapi pada dasarnya terdapat dukungan luas terhadap analisis Lord Russell terhadap pidato Lord Birkenhead di Beard.

Maksud khusus yang tercakup:

- (a) maksud yang tersembunyi atau lebih jauh seperti melukai dengan maksud untuk melukai tubuh secara menyedihkan;
- (b) apabila mens rea melampaui maksud untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam pendekatan ini, penyerangan adalah kejahatan dengan niat dasar. Actus reus mencakup pemahaman akan kekuatan. Mens rea adalah kesengajaan atau kecerobohan terhadap ketakutan korban terhadap kekerasan. Mens rea tidak melampaui actus reus.

Lord Simon menganggap bahwa 'niat khusus' berarti 'elemen tujuan' (yaitu niat langsung) dalam suatu kejahatan. Ia tidak mendefinisikan lebih jauh unsur tujuan, dan istilah ini sulit untuk disesuaikan dengan undang-undang saat ini. Pemerkosaan adalah kejahatan yang mempunyai tujuan, namun merupakan kejahatan yang mempunyai niat dasar, dan mabuk bukanlah pembelaan. Semua Penguasa Hukum setuju bahwa Beard harus berdiri dan meninggalkan Beard akan bertentangan dengan kebijakan publik karena aturan tersebut menghukum orang yang mabuk dan berperilaku buruk. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari kekerasan dalam keadaan mabuk, dan jika pelaku kekerasan dalam keadaan mabuk tidak dihukum, maka masyarakat akan merasa hina terhadap hukum. Oleh karena itu, bidang hukum ini tidak didasarkan pada logika. Tuan Salmon menyatakan:

Saya menerima bahwa ada ketidaklogisan dalam aturan bahwa mabuk boleh dimaafkan satu jenis niat dan bukan yang lain. Namun ketidaklogisan ini dapat diterima karena bagian peraturan yang baik hati menghilangkan kekerasan yang tidak semestinya tanpa membahayakan keselamatan, dan bagian peraturan yang lebih ketat berfungsi tanpa membahayakan keadilan. Akan sama konyolnya jika menghilangkan bagian yang baik dari peraturan tersebut sama halnya dengan mengambil alternatif menghilangkan bagian aturan yang lebih ketat demi menjaga logika absolut.

Seperti yang dikatakan Lord Edmund-Davies, 'Tidaklah etis untuk memvonis seseorang atas kejahatan yang membutuhkan keadaan pikiran yang bersalah ketika hipotesisnya dia tidak memilikinya.' Cara lain untuk menyatakan hal ini adalah dengan mengatakan bahwa mabuk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. . Misalnya, mabuk-mabukan

merupakan pembelaan terhadap tindakan menyakiti tubuh yang parah dengan sengaja, namun bukan untuk melakukan tindakan jahat yang menimbulkan cedera tubuh yang menyedihkan. Namun, jika mabuk-mabukan meniadakan mens rea dari pelanggaran sebelumnya, mengapa hal itu membuktikannya dalam pelanggaran yang terakhir? Mengatakan seperti yang dikatakan Lord Simon bahwa melakukan tindakan terlarang ketika tidak sadarkan diri karena minuman sama salahnya dengan mens rea tidak berarti bahwa terdakwa yang tidak peka menderita mens rea.

Sebelum seseorang dapat dihukum karena suatu pelanggaran yang unsur mentalnya adalah kecerobohan subjektif, penuntut harus membuktikan keadaan pikiran tersebut. Mereka tidak perlu membuktikannya ketika terdakwa dalam keadaan mabuk. Jika terdakwa berpendapat bahwa menurutnya tidak ada risiko karena mabuk, Majewski akan secara otomatis memvonisnya atas pelanggaran 'kecerobohan subjektif'. Asas praduga tak bersalah tidak diterapkan. Hasil dari Majewski adalah pengadilan tertinggi telah memutuskan adanya perbedaan antara maksud dasar dan maksud khusus, namun tidak dapat menyebutkan apa perbedaannya.

Kekhawatiran kebijakan publik di Majewski mendapat kritik. Orang yang mabuk kemungkinan besar tidak akan dihalangi oleh hukum, meskipun dia tahu apa yang dimaksud dengan hukum. Di negara-negara di mana keracunan alkohol diperhitungkan bersama dengan bukti-bukti lain dalam menentukan mens rea, tingkat kejahatan tidak lebih banyak dibandingkan di Inggris. Memang benar bahwa mabuk dengan menghilangkan hambatan mungkin menunjukkan bahwa terdakwa memang memiliki unsur kesalahan yang diperlukan untuk kejahatan yang didakwakan. Disebutkan juga bahwa adalah salah secara moral untuk menghukum seseorang atas suatu pelanggaran ketika bentuk perilaku yang seharusnya dihukum oleh hukum adalah perilaku mabuk. Saat ini orang-orang dihukum karena pelanggaran ketika mereka tidak memiliki mens rea yang disyaratkan.

Kasus yang paling otoritatif saat ini adalah MPC v Caldwell [1982] AC 341, yang dalam kaitannya dengan keracunan tidak terpengaruh oleh penolakan dalam G [2004] 1 AC 1034 (HL) tentang definisi kecerobohan Lord Diplock.

MPC v Caldwell [1982] AC 341

Terdakwa melakukan beberapa pekerjaan untuk pemilik hotel. Mereka bertengkar. Terdakwa mabuk dan membakar hotel. Tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa kerusakan. Dia didakwa, antara lain, melakukan pembakaran yang bertentangan dengan pasal 1(2) dan (3) Undang-Undang Pengrusakan Pidana tahun 1971, yaitu bahwa dia merusak properti dengan maksud untuk membahayakan nyawa atau bertindak ceroboh jika nyawanya terancam. Dia mengaku sangat mabuk sehingga dia tidak pernah mengira dia membahayakan nyawa.

Pidato mayoritas disampaikan oleh Lord Diplock. Dia berpendapat:

- (a) *'Jika satu-satunya keadaan mental yang mampu membentuk mens rea yang diperlukan untuk suatu pelanggaran berdasarkan pasal 1(2) adalah yang diungkapkan dalam kata-kata yang bermaksud menghancurkan atau merusak untuk membahayakan nyawa orang lain, maka keadaan mental tersebut adalah perlu untuk*

mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut akan diklasifikasikan sebagai salah satu tujuan “khusus” untuk tujuan supremasi hukum yang ditegaskan dan diterapkan oleh DPR ini dalam DPP v Majewski (1977); dan jelas sekali memang demikian.’ (Artinya, mens rea, niat untuk membahayakan nyawa, lebih dari sekadar actus reus, yaitu kerusakan kriminal.)

- (b) *'Namun, ini tidak sebuah penyelidikan yang relevan di mana “bersikap ceroboh, apakah nyawa orang lain harus terancam” adalah kondisi mental alternatif.'*
- (c) *'Pidato Lord Elwyn-Jones di Majewski, yang disetujui oleh Lord Simon, Lord Kilbrandon, dan saya, menyatakan bahwa keracunan yang dilakukan sendiri bukanlah pembelaan terhadap kejahatan yang kecerobohnya sudah cukup untuk menjadi mens rea yang diperlukan. '*
- (d) *'Merendahkan diri dengan minuman keras atau obat-obatan hingga mencapai kondisi di mana kendali nalar dan hati nurani terlepas dianggap sebagai tindakan yang sembrono.'* (Ada kekeliruan dalam penalaran antara (c) dan (d)). 'Sembrono' dipakai dalam dua pengertian yang berbeda. Pada (c) 'sembrono' mengandung makna mens rea. Pada (d) mengandung makna hukum bukan pidana. Dengan mabuk terdakwa tidak sadar akan perbuatannya. reus yang boleh dilakukannya dalam keadaan mabuk. Akibat-akibatnya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud dasar meskipun ia tidak mempunyai mens rea atas tindak pidana tersebut.)
- (e) *'Dalam kasus instan, fakta bahwa responden tidak menyadari risiko membahayakan nyawa penghuni hotel karena mabuk yang dilakukannya sendiri tidak akan menjadi pembelaan jika risiko tersebut jelas terlihat olehnya. apakah dia sudah sadar.'*

Perbedaan definisi sebelumnya (mens rea melampaui actus reus) dengan kecerobohan Caldwell terlihat dari tindak pidana yang didakwakan pada Caldwell itu sendiri. Dalam pasal 1(2) UU tahun 1971, mens rea (niat untuk membahayakan nyawa atau kecerobohan) lebih dari sekedar actus reus (kerusakan pidana). Namun, kecerobohan merupakan bagian dari mens rea, dan oleh karena itu kejahatan merupakan salah satu niat dasar.

Oleh karena itu, jika pembelaan hanya didefinisikan berdasarkan maksud, maka perbedaan antara maksud dasar dan maksud khusus menjadi relevan. Jika pelanggaran didefinisikan sebagai kecerobohan, maka mabuk adalah tindakan sembrono dan terdakwa bersalah atas pelanggaran tersebut tanpa harus dibuktikan oleh penuntut umum atas kecerobohnya. Bukti mabuk sama dengan bukti kecerobohan. Terdakwa dianggap ceroboh. Tidak perlu ditunjukkan bahwa pada saat mabuk, terdakwa sudah mengetahui actus reus dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan kata-kata Komisi Hukum dalam Lapornya No. 229, Perundang-undangan KUHP: Mabuk dan Tanggung Jawab Pidana, 1995, alinea 1.19, *'Pengambilan minuman keras dengan sengaja tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul, sebaiknya diperlakukan sebagai pengganti. untuk elemen mental yang biasanya diperlukan.'*

Lord Mustill membicarakan hal ini di Kingston, di atas. Terdakwa tidak dapat mengandalkan tidak adanya mens rea apabila hal itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri dalam keadaan mabuk. Namun pendekatan ini tidak mempertimbangkan prinsip persetujuan

yang dinyatakan pada awal Bab 1. Begitu terdakwa sudah mabuk, ia tidak lagi dianggap sebagai orang yang ceroboh. Oleh karena itu, dia tidak gegabah pada saat *actus reus*. Dalam Cullen [1993] Crim LR 936 (CA) pengadilan menetapkan hukum Inggris: setelah penuntut membuktikan bahwa terdakwa yang menyalakan api, dia bersalah atas pembakaran (yang diperparah) jika terdapat risiko kerusakan properti yang jelas dan serius dan dari bahaya bagi kehidupan. Dia tidak perlu memperkirakan risiko apa pun.

Posisinya bahkan lebih kuat lagi dalam kaitannya dengan pelanggaran berat dan kejahatan kelalaian. Terdakwa bersalah tanpa bukti kecerobohnya. Keadaan mabuk menunjukkan bahwa terdakwa lalai, dan dalam pelanggaran berat tidak ada keadaan pikiran yang relevan. Aturan tersebut tetap berlaku meskipun ada pemisahan waktu antara mabuk dan perbuatan terlarang.

'Kecerobohan konstruktif' ini juga tidak mungkin dibenarkan dari sudut pandang asas legalitas, yang juga dibahas dalam Bab 1. Yang relevan bukanlah unsur kesalahan yang disebutkan dalam tindak pidana, melainkan fakta bahwa terdakwa mabuk. Setelah Caldwell, semua kejahatan kecerobohan adalah pelanggaran niat dasar, yang mana keracunan memberikan unsur mental kecerobohan, karena penuntutan tidak harus membuktikan kecerobohan, hanya mabuk. Ini bukan kecerobohan subjektif atau objektif. (Apa yang terjadi dengan prinsip bahwa penuntut harus membuktikan semua unsur pelanggaran tanpa keraguan?) Hasilnya hanyalah sebuah fiksi. Terdakwa dianggap ceroboh. Seperti semua fiksi, hukum saat ini sulit untuk dibenarkan secara rasional.

House of Lords di Caldwell bersikukuh bahwa apakah ada kecerobohan adalah urusan juri, tapi proposisi itu sulit diterima ketika keracunan adalah unsur kecerobohan dalam suatu pelanggaran. Dampak Caldwell terhadap mabuk adalah sebagai berikut: penuntut harus menunjukkan bahwa terdakwa tidak memikirkan risiko yang nyata dan serius. Tidak relevan mengapa tidak ada pemikiran yang diberikan. Oleh karena itu, tidak penting bahwa mabuklah yang menyebabkan terdakwa tidak berpikir. Oleh karena itu, Majewski tidak tepat sasaran. Risiko bahaya akibat mabuk tidak harus berhubungan dengan cedera atau kerusakan sebenarnya yang ditimbulkan.

Uji jelasnya risiko menurut Caldwell adalah apakah risiko tersebut terlihat jelas atau tidak oleh pengamat yang bijaksana dan beralasan. Teladan itu tidak mabuk oleh alkohol atau obat-obatan. Fakta bahwa terdakwa mabuk tidak relevan. Fakta bahwa dia mabuk hanya menjelaskan mengapa dia tidak memikirkannya dan tidak memaafkannya. Kemabukannya menyuplai *mens rea* kecerobohan. Dia bersalah atas kejahatan dengan niat dasar jika dia sadar akan risikonya tetapi karena mabuknya.

Mahkamah Agung Kanada dalam *Daviault v R* (1995) 118 DLR (4th) 469 dengan mayoritas menolak pendekatan Caldwell karena bertentangan dengan prinsip dasar keadilan bahwa setiap unsur pelanggaran harus dibuktikan oleh penuntut. Undang-undang Inggris saat ini yang menggunakan bukti keracunan sebagai pengganti bukti kecerobohan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Para pembangkang berpendapat bahwa seseorang yang melakukan *actus reus* dari pelanggaran dengan niat umum (di Inggris, kejahatan dengan niat dasar) ketika mabuk berhak untuk distigmatisasi sebagai pelaku dan bahwa persyaratan

keadilan fundamental dipenuhi dengan bukti mabuk tanpa bukti mens. benar. Sopinka J mengatakan bahwa 'aturan keadilan fundamental dipenuhi dengan menunjukkan bahwa keadaan mabuk dicapai melalui perilaku terdakwa yang tercela'.

Aturan yang sama berlaku bagi seseorang yang menempatkan dirinya dalam keadaan otomatisme karena kesalahannya sendiri. 'Masyarakat berhak untuk menghukum mereka yang atas kemauannya sendiri membuat dirinya mabuk sehingga menimbulkan ancaman bagi anggota masyarakat lainnya.' Sopinka J menambahkan: 'untuk membiarkan terdakwa secara umum menyatakan tidak adanya mens rea di mana ia secara sukarela menyebabkan dirinya tidak mampu melakukan mens rea akan melemahkan, bahkan meniadakan, prinsip tanggung jawab moral yang ingin diterapkan oleh persyaratan mens rea.' Selain itu, mabuk juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. menjadi kecerobohan untuk kejahatan yang mens rea mencakup kecerobohan, hubungan yang biasa antara actus reus dan mens rea dianggap tidak diperlukan.

Misalnya, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan secara sembrono jika ia sedang mabuk dan kerugian terjadi akibat perbuatannya saat mabuk: ia tidak perlu secara sembrono menimbulkan kerugian pidana, namun ia bersalah atas pelanggaran tersebut.

Masalah yang luar biasa

(a) Salah satu akibat dari Caldwell adalah pertahanannya dipersempit. Lord Birkenhead di Beard dalam satu bagian mencatat bahwa niat khusus bukanlah hal yang luar biasa. Kelompok minoritas di Caldwell melihat bahwa ketika mens rea didefinisikan dalam istilah 'sengaja atau ceroboh', seperti yang sering terjadi dalam undang-undang modern, maka penuntutan tidak perlu membuktikan kecerobohan, yang ada hanyalah mabuk. Hanya ketika niat saja yang dituntut, keracunan mungkin bisa menjadi pembelaan.

Anomali tercipta. Keadaan mabuk dapat dianggap sebagai tindak pidana percobaan pemerkosaan, namun tidak termasuk dalam tindak pidana pemerkosaan itu sendiri. Pemerkosaan adalah kejahatan dengan niat dasar. Setelah Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003, mens rea mencakup kelalaian terhadap persetujuan korban. Semua upaya merupakan pelanggaran dengan maksud tertentu. Namun diakui bahwa posisi tersebut tidak jelas dan beberapa akademisi berpendapat bahwa karena beberapa upaya mungkin dilakukan secara sembarangan, hal tersebut kini merupakan pelanggaran yang disengaja. Argumennya adalah bahwa setelah Khan [1990] 1 WLR 815, mens rea pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan adalah sama ketika upaya tersebut didasarkan pada kegagalan terdakwa untuk melakukan penetrasi. Oleh karena itu, percobaan pemerkosaan berdasarkan unsur yang hilang ini juga merupakan kejahatan yang disengaja. Namun, jika unsur yang hilang dalam percobaan pemerkosaan adalah kurangnya persetujuan dari korban, maka mens rea percobaan pemerkosaan berbeda dengan pelanggaran penuh. Diperlukan adanya niat untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban dan bentuk percobaan pemerkosaan ini merupakan kejahatan dengan sengaja tertentu.

Dalam Fotheringham (1988) 88 Cr App R 206 (CA), terdakwa melakukan kesalahan dalam keadaan mabuk dengan mengatakan bahwa yang melakukan hubungan seksual adalah

istrinya, padahal itu adalah babysitter berusia 14 tahun yang disuruh istrinya. untuk tidur di ranjang pernikahan. Dia bersalah atas pelanggaran pemerkosaan seperti yang didefinisikan kemudian. Namun, jika dia berhenti melakukan penetrasi, dia tidak akan bersalah atas percobaan pemerkosaan. Hukum terlihat berlawanan arah. Dalam pemerkosaan, mens rea terdakwa antara lain adalah niat untuk melakukan penetrasi. Namun pemerkosaan selalu merupakan pelanggaran yang disengaja.

Fotheringham mungkin dikritik. Dalam pandangan Majewski, mabuk menghasilkan kecerobohan. Oleh karena itu, bukti-bukti selain mabuk, yang cenderung menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki pandangan jauh ke depan yang disyaratkan dalam kejahatan tersebut, tidak relevan: ia dianggap memiliki mens rea karena ia mabuk. Namun dalam kasus ini, terdakwa tidak melakukan kesalahan pada unsur 'sembrono', yaitu persetujuan, namun pada unsur yang didefinisikan semata-mata berdasarkan kesengajaan. Terdakwa tidak berniat melakukan persetubuhan yang melanggar hukum, yang kemudian dipahami sebagai 'melanggar hukum' adalah 'di luar nikah'. Ia berniat melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Itu sah. Kesalahannya adalah mengenai identitas wanita tersebut dan keadaan mabuk menjelaskan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Mabuk tidak menghasilkan niat. Cara lain untuk menyampaikan proposisi ini adalah dengan mengatakan bahwa pemerkosaan adalah kejahatan yang memiliki niat dasar untuk mendapatkan persetujuan (terdakwa bersalah pada saat itu jika dia ceroboh dalam mendapatkan persetujuan perempuan: setelah tahun 2003 hanya diperlukan kelalaian dalam mendapatkan persetujuan), namun merupakan tindak pidana dengan maksud tertentu sehubungan dengan korban yang bukan isterinya. Kecil kemungkinannya bahwa pengadilan akan berpandangan bahwa jawaban atas pertanyaan apakah pemerkosaan merupakan kejahatan yang disengaja atau bersifat spesifik, bergantung pada unsur pelanggaran mana yang membuat terdakwa melakukan kesalahan. Jika Fotheringham benar dalam menyatakan bahwa suatu pelanggaran adalah salah satu niat dasar jika ada elemen di dalamnya yang dilakukan secara ceroboh, daftar pelanggaran spesifik di bagian 'Posisi saat ini' harus direvisi. Misalnya, dalam perampokan, tidak semua elemen *actus reus* perlu dilakukan dengan sengaja. Pengadilan menyatakan: 'Dalam kasus pemerkosaan, keracunan yang dilakukan oleh diri sendiri bukanlah pembelaan, baik itu niat, persetujuan, atau kesalahan mengenai identitas korban.'

Dalam *Woods* (1982) 74 Cr App R 312, terdakwa banyak mabuk dan mengatakan bahwa dia tidak sadar bahwa wanita tersebut tidak menyetujuinya. Pengadilan Banding memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan pemerkosaan seperti yang didefinisikan ketika ia melakukan kesalahan atas persetujuan perempuan tersebut. Griffiths LJ mengatakan: 'Hukum, sebagai kebijakan sosial, telah menyatakan bahwa mabuk-mabukan yang disebabkan oleh diri sendiri bukanlah hal yang relevan secara hukum untuk dipertimbangkan ketika memutuskan apakah seorang wanita menyetujui atau tidak melakukan hubungan seksual.' Pernyataan ini memang benar. tidak menjelaskan mengapa kebijakan sosial ini tidak berlaku terhadap percobaan pemerkosaan dan semua pelanggaran yang disengaja. *Woods* adalah keputusan yang menyatakan bahwa keracunan bukanlah masalah yang relevan secara hukum ketika juri mempertimbangkan apakah wanita tersebut menyetujuinya. Berdasarkan undang-

undang yang berlaku saat itu, pasal 1(2) Undang-Undang Pelanggaran Seksual (Amandemen) tahun 1976 sebagaimana telah diubah (sekarang dicabut), juri harus menilai keyakinan laki-laki bahwa perempuan (atau laki-laki) menyetujui dan dapat mempertimbangkannya. memperhitungkan kewajaran keyakinannya dan 'hal-hal lain yang relevan'. Namun, mabuk-mabukan dianggap tidak termasuk. Itu bukanlah salah satu 'hal yang relevan'. Oleh karena itu, juri diundang untuk menanyakan apakah terdakwa yakin bahwa korban menyetujuinya tetapi mengecualikan mabuknya. Karena keracunan tersebut membuatnya percaya bahwa wanita tersebut menyetujuinya, dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia berpikir bahwa wanita (atau pria tersebut) menyetujuinya. Artinya, dia bersalah atas pemerkosaan, karena seandainya dia tidak dalam keadaan mabuk, dia pasti tahu bahwa dia (atau dia) tidak menyetujuinya. Dengan kata lain, karena terdakwa menyadari bahwa korban tidak memberikan persetujuannya jika ia sadar, maka secara otomatis ia bersalah atas pemerkosaan. Dia ceroboh dalam memberikan persetujuan, meski juri belum memperhitungkan mabuknya. Ada pandangan bahwa Woods dibatasi pada pemerkosaan. Dalam pelanggaran lain, mabuk menghilangkan persyaratan bahwa penuntut membuktikan kecerobohan dalam pelanggaran kecerobohan. Dalam kasus pemerkosaan, keracunan tidak termasuk dalam pertimbangan. Parlemen tentunya tidak memikirkan perbedaan ini ketika mereka mengesahkan UU tahun 1976. Woods tentu saja tidak konsisten dengan prinsip bahwa dalam kejahatan kecerobohan, keracunan menyebabkan kecerobohan, yaitu ketika keracunan terbukti, maka kecerobohan juga terjadi. Namun di Woods, pengadilan mengatakan bahwa terdakwa akan dibebaskan jika dia tidak mendapatkan mens rea pelanggaran jika dia sadar. Dengan kata lain, bukti selain mabuk adalah relevan jika bukti tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki pandangan jauh ke depan yang diperlukan dalam pelanggaran tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan Majewski. Mungkin rasio Woods dibatasi pada pemerkosaan karena dalam pelanggaran lainnya tidak ada ketentuan seperti pasal 1(2), dan sub-bagian tersebut telah dicabut oleh Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Kesulitan dengan mabuk sebagai bukti kecerobohan mungkin disebabkan oleh diselesaikan oleh Heard [2007] EWCA Crim 125. Alih-alih mabuk-mabukan yang menyebabkan kecerobohan, kedua negara dikatakan memiliki kesetaraan yang luas dalam hal kesalahan.

Kasus yang bisa dibandingkan dengan Woods adalah Richardson [1999] 1 Cr App R 392 (CA) kasus yang bukan pemerkosaan. Kedua terdakwa dan korban sedang minum-minum. Saat sedang asyik bermain kuda, yang pertama secara tidak sengaja menjatuhkan yang terakhir ke atas balkon: luka pada korbannya serius. Pengadilan mengatakan bahwa para terdakwa bersalah jika mereka memperkirakan risiko bahaya, jika mereka sadar. Namun, terdakwa dapat memberikan bukti mabuk untuk menunjukkan tidak adanya keyakinan akan persetujuan. Ini adalah keputusan yang mengejutkan. Tuduhannya adalah menyebabkan GBH, suatu pelanggaran dengan niat dasar, namun mabuk-mabukan relevan dengan bukti hukum persetujuan. Namun, karena dakwaan tersebut merupakan salah satu dari pasal 20 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861, mabuknya para terdakwa membuktikan bahwa mereka memiliki mens rea, yaitu firasat akan terjadinya kerugian.

(b) Kadang-kadang dikatakan bahwa mabuk berfungsi sebagai pembelaan terhadap pelanggaran serius dan terdapat kejahatan 'pengembalian' yang lebih kecil. Proposisi ini tidak benar. Lord Salmon mencatat hal ini dalam *Majewski* di atas, ketika ia mengatakan bahwa niat tertentu 'tidak terbatas pada kasus-kasus di mana, jika penuntut gagal membuktikan niat [khusus], terdakwa masih dapat dihukum karena pelanggaran yang lebih ringan'. Orang mungkin berpikir bahwa pemerkosaan merupakan pelanggaran yang disengaja dan penyerangan tidak senonoh sebagai kejahatan 'penggantian', namun kenyataannya pemerkosaan adalah kejahatan yang memiliki niat dasar. Undang-undang ini diringkas dan dikritik dengan baik dalam hal ini oleh C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, edisi ke-4 (Thomson, 2005) 114 –15.

Seluruh konsep 'niat khusus' dirancang untuk memungkinkan mabuk berfungsi sebagai faktor mitigasi substantif terhadap kejahatan tertentu, khususnya pembunuhan. Tetapi mabuk kadang-kadang hanya merupakan alasan parsial (jika terdapat pelanggaran yang lebih kecil dari niat dasarnya) namun kadang-kadang merupakan pembelaan penuh seperti halnya pencurian jika tidak ada pelanggaran yang termasuk lebih rendah. Tidak ada alasan yang mendasari perbedaan tersebut; hasilnya hanyalah sebuah kebetulan belaka. [Penekanan ditambahkan.]

(c) Pasal 8 Undang-Undang Peradilan Pidana Tahun 1967 terkadang dianggap menimbulkan kesulitan. Melaluinya para penguji fakta diinstruksikan untuk mempertimbangkan 'semua bukti'. Tidak disebutkan 'semua bukti kecuali mabuk'. Lord Diplock tidak menyebutkan angka 8 di *Caldwell*. (Di *Majewski* House of Lords mengatakan bahwa undang-undang tentang mabuk adalah masalah substantif, bukan bukti: s 8 hanya berkaitan dengan bukti yang relevan secara hukum. Mabuk tidak relevan secara hukum.) *Caldwell* menunjukkan bahwa bukti kecerobohan tidak diperlukan jika ada bukti yang cukup bahwa ia mabuk. Tampaknya House of Lords telah tidak menaati Parlemen dengan menciptakan anggapan yang ceroboh.

(d) Undang-undang tentang mabuk-mabukan yang berkaitan dengan pembelaan lainnya menimbulkan masalah. Dalam *O'Grady* [1987] QB 995 (CA), pengadilan mengatakan bahwa keracunan bukanlah pembelaan yang menyebabkan kesalahan. Tidak peduli apakah pelanggaran bersifat mendasar (di mana *Majewski* akan menerapkannya) atau spesifik. Bagaimanapun juga, mabuk bukanlah pembelaan. Terdakwa bersalah atas pembunuhan meskipun ia tidak bermaksud membunuh atau melukai tubuh secara melawan hukum karena ia yakin bahwa ia bertindak untuk mencegah kejahatan terhadap dirinya sendiri. Bandingkan *Williams* [1987] 3 All ER 411 (CA): terdakwa memiliki pembelaan untuk mencegah kejahatan ketika dia melakukan kesalahan yang tidak disebabkan oleh mabuk. Ada kegagalan untuk membuktikan semua unsur delik ketika terjadi kesalahan bukan mabuk. P. Seago, *Hukum Pidana*, edisi ke-4 (Sweet & Maxwell, 1994) 178, berkomentar:

- ❖ meskipun kasus tersebut melibatkan hukuman pembunuhan, Lord Lane menunjukkan bahwa hal yang sama [yaitu. bersalah] akan berlaku untuk pembunuhan. Jika demikian, berarti seseorang yang, karena mabuk secara sukarela, secara keliru percaya bahwa ia sedang menembak seekor gorila, akan mempunyai pembelaan terhadap pembunuhan

jika ia membunuh manusia, sedangkan terdakwa tidak akan mempunyai pembelaan jika ia secara keliru mempercayainya. , karena mabuk secara sukarela, dia akan diserang dengan kejam oleh seorang pria yang kemudian dia tembak. Sulit untuk membenarkan perbedaan tersebut atau melihat bagaimana Anda dapat memisahkan masalah kesalahan dan niat karena keduanya hanyalah cara berbeda dalam memandang masalah yang sama.

Untuk penggunaan contoh 'gorila' dalam teks penggantinya, lihat A. Reed dan B. Fitzpatrick, *Criminal Law*, 3rd edn (Thomson, 2006) 199–200. (Lihat juga kasus O'Connor dalam bahasa Inggris, di atas, di mana mabuk relevan dengan niat tetapi tidak untuk membela diri. Seorang juri yang berakal sehat mungkin tidak dapat melakukan perubahan mental ini. Pengadilan juga berpendapat bahwa diktum dalam O'Grady adalah rasio. Ini sebenarnya diktum karena terdakwa telah dibebaskan dari pembunuhan. Apa pun yang dikatakan tentang pelanggaran dengan niat tertentu seperti pembunuhan bukanlah rasio.) Meskipun ada kritik dari akademisi O'Grady, hal itu diikuti oleh Pengadilan Banding di Hatton [2006] 1 Cr App R 247. Terdakwa yang telah mengonsumsi lebih dari 20 liter bir, membunuh korban dengan palu godam. Dia berargumen bahwa dia yakin terdakwa adalah tentara SAS yang bersenjata pedang. Bandingnya terhadap hukuman pembunuhan ditolak. Pengadilan menyatakan bahwa ada masalah hukum yang menyangkut kepentingan publik, namun menolak izin untuk mengajukan banding. Sudah saatnya masalah ini diselesaikan oleh Tuhan. Argumen kebijakan yang menentang O'Grady adalah jika alasan peraturan tentang mabuk-mabukan adalah bahwa masyarakat harus dilindungi dari minuman keras, maka hukuman atas pembunuhan tidak disengaja sudah cukup dan tidak ada perlunya hukuman atas pembunuhan.

Kasus yang kontras adalah kasus kontroversial *Jaggard v Dickinson* [1981] QB 527 (DC) (lihat Bab 18). Berdasarkan Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971, pasal 5(2)(a), bukti mabuk digunakan untuk membuktikan keyakinan terdakwa. Terdakwa yakin dia memasuki rumah temannya; sebenarnya dia memasuki rumah orang lain. Dia mabuk dan tidak akan melakukan kesalahan ini seandainya dia sadar. Dia tidak bersalah atas kerugian pidana yang bertentangan dengan pasal 1(1) Undang-Undang tahun 1971, suatu pelanggaran dengan niat dasar. Dia mempunyai alasan yang sah bahwa orang tersebut, temannya, yang berhak menyetujui kerusakan tersebut, akan melakukan hal tersebut, seandainya temannya mengetahui keadaannya. Keputusan Lord Donaldson MR didasarkan pada bahasa undang-undang. Mustill LJ berbicara lebih umum. Mabuk pada fakta bukanlah niat negatif atau kecerobohan. Hal ini menjelaskan mengapa terdakwa mempunyai keyakinan seperti itu. Pada pasal 5(2) Parlemen telah mengisolasi keyakinan dari hukum umum tentang kecerobohan. Apa pun yang terjadi, menganggap mabuk sebagai kejahatan karena keyakinan tetapi bukan karena kecerobohan adalah hal yang aneh. Keanehan ini diperparah ketika kita mengingat kembali pasal 8 UU Peradilan Pidana tahun 1967 yang dibahas pada (c) di atas.

Mengapa pasal 5(2) UU Tahun 1971 tidak dibaca dengan cara yang sama? Jika intoksikasi tidak relevan di paragraf 8, mengapa di paragraf 5(2)? Pengadilan-Pengadilan Banding Militer di Young [1984] 1 WLR 654, 658 menggeneralisasikan *Jaggard v Dickinson*: 'Jika ada pembelaan menurut undang-undang yang bersifat exculpatory atas keyakinan yang

jujur, keracunan yang disebabkan oleh diri sendiri adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam konteks subjektif pertimbangan keadaan pikiran individu.' Dalam Young, dikemukakan bahwa keracunan yang dilakukan sendiri bukanlah pembelaan jika terdakwa, yang didakwa memiliki obat yang dikendalikan, berusaha membuktikan dalam pasal 28(3)(b) Penyalahgunaan Narkoba. Undang-undang tahun 1971 bahwa dia tidak percaya atau mencurigai, atau memiliki alasan apa pun untuk melakukannya, bahwa suatu zat atau produk adalah obat yang dikendalikan, padahal dia akan melakukannya ketika dalam keadaan sadar. Hasil keterkaitan antara Caldwell dan Jaggard v Dickinson sungguh menakjubkan. Jika terdakwa merusak barang milik orang lain karena yakin bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan keyakinan tersebut disebabkan oleh keadaan mabuk, maka ia bersalah melakukan pengrusakan pidana. Namun jika ia merusak barang milik orang lain karena ia yakin bahwa barang itu milik pihak ketiga yang menyetujui kerusakan itu, jika ia mengetahui keadaannya, maka ia tidak bersalah. Intinya bisa diambil lebih jauh.

Jaggard v Dickinson menjadikan terdakwa yang mabuk tidak bersalah atas kerugian pidana jika dia percaya pada persetujuan; namun, terdakwa yang mabuk dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan jika ia secara keliru mempercayai persetujuan wanita tersebut. Pengacara sudah kehilangan akal sehatnya! Salah satu kemungkinan perbedaan antara O'Grady dan Jaggard v Dickinson adalah bahwa yang pertama berlaku untuk pelanggaran hukum umum, dan yang kedua berlaku untuk pelanggaran hukum. Perbedaan ini tidak mencerminkan nilai kebijakan apa pun dan jika hal ini benar, maka hal ini akan sangat disayangkan dan bergantung pada faktor kebetulan.

(e) Bagaimana dengan keracunan sehubungan dengan pertahanan lainnya? Dalam provokasi dimana terdakwa berpendapat salah karena mabuk bahwa dirinya diprovokasi, diambil pandangan subjektif. Dia dinilai berdasarkan fakta yang dia yakini: Letenock (1917) 12 Cr App R 221 (CCA). Ada kemungkinan bahwa Letenock tidak akan diikuti saat ini karena undang-undang tentang keracunan dan provokasi telah berlaku sejak Perang Dunia Pertama. Namun, dalam kaitannya dengan paksaan dan paksaan keadaan, hukumnya adalah hanya kesalahan yang dilakukan dengan alasan yang masuk akal yang dapat dikecualikan: Graham [1982] 1 WLR 294 (CA). Kesalahan yang disebabkan oleh alkohol bukanlah kesalahan yang dilakukan secara wajar. Oleh karena itu, sehubungan dengan pertahanan ini, kesalahan dalam keadaan mabuk tidak ada gunanya.

Sehubungan dengan persetujuan untuk melakukan penyerangan, Pengadilan Banding memutuskan di Richardson, di atas, bahwa keyakinan yang salah bahwa korban menyetujui tindakan kasar adalah pembelaan terhadap pelanggaran yang menyebabkan GBH bertentangan dengan pasal 20 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861, padahal kesalahan itu disebabkan oleh mabuk. Undang-undang ini sangat kontras dengan undang-undang di O'Grady yang menyatakan bahwa kesalahan dalam keadaan mabuk untuk membela diri tidak memberikan pembelaan kepada terdakwa. Pengadilan tidak mempertimbangkan O'Grady atau kasus-kasus seperti Woods dan Fotheringham di atas. Selain itu, Richardson tidak konsisten dengan aturan bahwa mabuk bukanlah pembelaan terhadap kejahatan yang bertujuan dasar.

- (f) Masalah seriusnya adalah para pengacara gagal memberikan pernyataan yang memadai mengenai pelanggaran mana yang memiliki tujuan khusus.
- (i) Seperti yang telah kita lihat, Lord Simon dalam *Majewski* mengatakan bahwa kejahatan yang disengaja memiliki unsur yang bertujuan. Definisi ini telah dikritik.
 - (ii) Kadang-kadang dikatakan bahwa kejahatan dengan kesengajaan khusus adalah kejahatan di mana niat saja merupakan satu-satunya unsur mental sehubungan dengan satu atau lebih unsur *actus reus*. Pembunuhan, bagaimanapun, selama bertahun-tahun tidak didefinisikan semata-mata berdasarkan niat, namun tidak ada keraguan bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang disengaja. Penanganannya merupakan tindak pidana dengan maksud tertentu namun kesengajaannya bukan bagian dari *mens rea* yaitu ketidakjujuran dan pengetahuan atau keyakinan.
 - (iii) Definisi niat khusus yang dapat diterima adalah bahwa *mens rea* lebih dari sekedar *actus reus*. Ini adalah tip yang berguna tetapi bukan definisi. Semua pelanggaran dengan niat tersembunyi adalah kejahatan dengan niat tertentu, namun konsep kejahatan dengan niat khusus tidak terbatas pada kejahatan dengan niat tersembunyi, seperti yang ditunjukkan oleh pembunuhan itu sendiri. Ilustrasi lainnya adalah tindakan kriminal yang bertujuan untuk membahayakan nyawa atau bersikap ceroboh mengenai apakah nyawa terancam atau tidak. Kejahatan tidak hanya didefinisikan berdasarkan kesengajaan, namun *mens rea* juga melampaui *actus reus*. Salah satu definisinya pasti salah tetapi tidak jelas yang mana. Bagian 18 dari Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861 dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melukai dengan maksud untuk melukai tubuh secara serius. Dalam definisi ini, kejahatan ini merupakan kejahatan dengan maksud tertentu. Bentuk lainnya adalah menyebabkan luka fisik yang parah dengan maksud untuk melukai tubuh yang parah. Dalam definisi ini, kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki maksud dasar. Davies [1991] *Crim LR* 469, meskipun tidak dilaporkan dengan baik, tampaknya berpendapat bahwa melukai tubuh yang parah dengan niat untuk menolak penangkapan adalah kejahatan yang disengaja. Jika pendekatan ini benar, pembelaan terhadap keracunan tidak bergantung pada perbedaan antara kejahatan dengan niat dasar dan spesifik, melainkan dakwaan dengan niat dasar dan spesifik. Unsur mental dalam delik seperti pasal 18 ada yang bersifat niat dasar, ada pula yang bersifat niat khusus. Permasalahannya adalah bahwa pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran yang disengaja meskipun sebagian dari *mens rea* dipenuhi hanya dengan bukti kesengajaan. Contohnya adalah pemerkosaan. Terdakwa harus berniat melakukan hubungan seksual dan harus berniat melakukannya dengan seorang perempuan atau laki-laki, namun pemerkosaan tergolong kejahatan dengan niat dasar: lihat pembahasan Fotheringham di atas. Salah satu cara untuk mendamaikan pihak yang berwenang adalah dengan mengatakan bahwa pemerkosaan adalah kejahatan dengan niat tertentu dimana dakwaannya adalah pemerkosaan karena mengetahui bahwa korban tidak menyetujuinya namun dengan niat dasar dimana dakwaannya adalah pemerkosaan karena lalai dalam memberikan persetujuan. Alasan yang sama dapat

diterapkan pada semua pelanggaran yang didefinisikan sebagai perilaku buruk yang disengaja atau ceroboh, seperti kerusakan akibat pidana. Namun, pengadilan mengklasifikasikan berdasarkan kejahatannya, bukan berdasarkan dakwaannya atau setidaknya itulah pandangan mayoritas sampai Heard [2007] EWCA Crim 125, di mana Hughes LJ berkata: ‘tidak boleh dianggap bahwa setiap pelanggaran dapat dikategorikan hanya sebagai salah satu pelanggaran yang memiliki tujuan khusus atau mendasar: terdakwa didakwa melakukan pelecehan seksual yang bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003. Pasal 3(1) berbunyi: Seseorang (A) melakukan pelanggaran jika;

- (a) ia dengan sengaja menyentuh orang penulis (B),
- (b) sentuhannya bersifat seksual,
- (c) B tidak menyetujui sentuhan tersebut, dan
- (d) A tidak yakin secara wajar bahwa B menyetujuinya.

Terdakwa, dalam keadaan mabuk berat, menggosokkan penisnya ke paha seorang petugas polisi. Pengadilan menyatakan bahwa niat tertentu berarti niat tersembunyi (seperti dalam perampokan), suatu keadaan pikiran yang melampaui tindakan tersebut. Oleh karena itu, meskipun sentuhan tersebut harus disengaja, namun kejahatan tersebut merupakan salah satu niat dasar. Oleh karena itu, bahkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan sengaja mungkin merupakan kejahatan yang memiliki niat dasar. Apa hubungannya dengan pembunuhan!?

Kategorisasi pelanggaran niat khusus yang paling dapat diterima diberikan oleh Sopinka J (berbeda pendapat, tetapi tidak dalam hal ini) dalam Daviault v R, di atas. ‘Selain pelanggaran dengan maksud tersembunyi, terdapat pelanggaran-pelanggaran tertentu yang karena sifat seriusnya dan pentingnya unsur mentalnya digolongkan sebagai pelanggaran dengan maksud khusus meskipun pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang biasanya diasosiasikan dengan pelanggaran dengan maksud tersembunyi. Contoh yang paling menonjol adalah pembunuhan.’

Tak satu pun dari ketiga definisi ini memberikan bobot penuh pada preseden. Pengoperasian dikotomi dasar/spesifik tampak berubah-ubah. Untuk beberapa pelanggaran seperti pembunuhan, terdapat kejahatan dengan maksud dasar ‘pengunduran’, yaitu pembunuhan tidak berencana; namun untuk kejahatan lain seperti pencurian, tidak ada pelanggaran yang bersifat ‘pengembalian’. Tidak ada kebijakan yang merasionalisasikan perbedaan ini. Dapat dikatakan bahwa Lord Birkenhead tidak bermaksud menciptakan dikotomi ini.

Posisi saat ini

Salah satu jalan keluar dari kesulitan ini, walaupun tidak memuaskan dari sudut pandang prinsip, adalah dengan membuat daftar preseden-preseden tersebut. Tabel 8.1 melakukan hal tersebut untuk pelanggaran yang lebih penting.

Tampaknya semua pelanggaran ketidakjujuran merupakan kejahatan yang disengaja. Walaupun mabuk-mabukan merupakan pembelaan terhadap pencurian, seorang terdakwa

akan menyesuaikan diri ketika ia sudah sadar dengan mengambil alih hak-hak pemiliknya seperti menyembunyikan barang tersebut. Oleh karena itu, orang yang mabuk tidak menghindari tanggung jawab atas pencurian.

Mungkin bermanfaat pada saat ini untuk memberikan ilustrasi konkrit. Sehubungan dengan pasal 20 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861, hakim akan mengarahkan juri bahwa mereka akan menghukum jika mereka yakin bahwa terdakwa memperkirakan bahwa ia akan menyebabkan cedera atau memperkirakan bahwa tindakannya akan menyebabkan cedera jika dia tidak mabuk.

Tabel 8.1 Maksud dasar dan tujuan khusus – preseden

Nilai Dasar	Otoritas (seringkali ada yang lain)
Pembunuhan tidak disengaja	Lipman
Memperkosakan	Majewski (pengadilan persemakmuran terpecah dalam masalah ini)
Bagian 20, undang-undang pelanggaran terhadap orang	majewski
Pasal 47, undang-undang pelanggaran terhadap orang	Botton v crawley [1972] kejahatan LR222 (DC)
Penyerangan terhadap polisi	majewski
Berkendara dengan gembira (s.12 tindakan pencurian)	MacPherson [1973] RTR 157
Seperti menghapus artikel dari sebuah pameran juga merupakan kejahatan yang disengaja, meskipun tidak ada presedennya, kerusakan kriminal yang sembrono	caldwell
Pemenjaraan palsu dan penculikan	Hutchins [1988] kejahatan LR 379
Mengizinkan pitbuk terrier berada di tempat umum tanpa pengaman dan petunjuk	DPP v Kellet [1994] Kejahatan LR 916 (DC), Tapi lihat komentarnya, yang menyatakan bahwa terdakwa yang sadar tidak bersalah atas pelanggaran ini kecuali dia mengetahui dan menyetujui seekor anjing berbahaya di tempat umum sedangkan terdakwa yang mabuk bersalah. Meskipun dia tidak mengizinkan anjingnya berada di tempat seperti itu. Bagaimana seseorang mengizinkan sesuatu jika melalui minuman atau obat-obatan ia tidak tahu apa-apa mengenai hal tersebut ?
Niat khusus	Otoritas
Pembunuhan	beard
Bagian 18, undang-undang pelanggaran terhadap orang	Pordage [1975] crim LR 575 (CA)
Pencurian dan perampokan	Ruse v Baca [1949] 1 KB 377 (DC)
Perampokan dengan maksud mencuri	Durante [1972] 3 semua ER 962 (CA)
Penanganan	Kasus yang sama (meskipun tidak disebutkan 'niat' dalam definisinya)
Kerusakan kriminal yang di sengaja	Caldwell
Percobaan	(niatnya adalah satu-satunya hal yang tunduk pada pernyataan dalam teks tentang Upaya

sembrono dalam pemerkosaan dan kemungkinan pelanggaran lainnya)

Untuk pelecehan seksual, lihat Heard, diatas, Dimana Hughes LJ mengatakan “sentuhan seksual harus disengaja, tetapi mabuk secara sukarela tidak dapat dianggap sebagai meniadakan niat yang diperlukan”

Beberapa saran untuk reformasi mabuk-mabukan

Kesulitan dalam mereformasi undang-undang dinyatakan dengan baik oleh Komisi Hukum Skotlandia dalam Makalah Diskusi, Kegilaan dan Tanggung Jawab yang Berkurang, No. 122, 2003: ‘Masalahnya adalah menyelaraskan prinsip dasar mens rea dengan kondisi di mana seseorang sulit dikatakan mempunyai kapasitas mental sama sekali. Pada saat yang sama, konsekuensi sosial dari pengakuan mabuk sebagai [a] pertahanan penuh [] dalam segala situasi akan menjadi sangat serius.’

Pengadilan enggan mengizinkan orang yang mabuk untuk lepas dari konsekuensi tindakannya. Lipman dan Majewski mungkin bisa dijadikan contoh. Ada perasaan bahwa orang-orang ini seharusnya dinyatakan bersalah atas sesuatu. Ada beberapa ciri-ciri mabuk dan mabuk adalah keadaan di mana banyak pelanggaran dilakukan. Dapat dikatakan bahwa di Inggris dan Wales masyarakat mengetahui kejadian-kejadian yang dapat terjadi ketika seseorang mabuk atau menggunakan narkoba. Namun demikian, seperti yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Australia di O’Connor di atas, perbedaan antara maksud dasar dan maksud khusus tidak masuk akal secara mens rea.

Pelanggaran terhadap prinsip dasar mens rea, ketidaklogisan pembedaan maksud dasar/khusus, dan kurangnya dukungan empiris terhadap permasalahan kebijakan publik di balik Majewski menyebabkan penolakan Australia terhadap hukum Inggris. Apabila terdakwa tidak mempunyai mens rea karena mabuk, maka ia tidak dapat bersalah. Aturan ini bahkan berlaku untuk pembunuhan: Martin (1984) 58 ALJR 217, juga merupakan keputusan Pengadilan Tinggi Australia. Tidak peduli kekurangan mens rea disebabkan oleh keracunan. Seorang terdakwa baru bersalah jika ia mempunyai unsur mental dari pelanggaran yang didakwakan pada saat actus reus. Kenyataan bahwa terdakwa mabuk sembarangan tidak membuktikan bahwa ia mempunyai unsur kesalahan di kemudian hari. (Terlepas dari logika situasinya, RUU KUHP Australia tahun 1994 kembali ke pembedaan maksud khusus/dasar, New South Wales, setelah menerima O’Connor, kembali ke posisi Majewski dan Queensland tidak mengadopsi aturan O’Connor tetapi menerapkan Hukum Inggris.) Pada pendekatan ini tidak ada aturan khusus yang berlaku untuk mabuk.

Prinsip-prinsip normal hukum pidana berlaku. Komite Reformasi Hukum Pidana merekomendasikan dalam Laporrannya tentang Intoksikasi (Report on Intoxication), tahun 1984, bahwa Selandia Baru harus mengadopsi pendekatan subjektif Australia dan juga tidak boleh memberlakukan pelanggaran khusus terhadap orang-orang mabuk yang melakukan kejahatan actus reus, seperti yang diusulkan di Inggris (Lihat di bawah). Lihat juga Kamipeli di atas. Afrika Selatan mengikuti doktrin O’Connor: Chretien 1981 (1) SA 1097 (AD). Penelitian empiris yang dilakukan Hakim G. Smith dalam ‘Footnote to O’Connor’s case’ (1981) 5 Crim LJ 270 menunjukkan bahwa pendekatan Australia tidak mengarah pada pelanggaran hukum.

Pendekatan Australia harus dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan pemerintah Kanada sebelumnya setelah Majewski. Dalam Leary (1977) 74 DLR (ke-3) 103 (oleh mayoritas), yang ditolak dalam Daviault v R, di atas, dan Bernard [1988] 2 SCR 833, Mahkamah Agung menyetujui kebijakan di balik Majewski. Kebijakan tersebut diungkapkan oleh P. Healy 'R v Bernard: kesulitan dengan "keracunan sukarela" ' (1990) 35 McGill LJ 610 di 612–613: 'Orang-orang yang melakukan hal-hal buruk pantas mendapatkan hukuman.' Hal serupa juga disampaikan pada a abad yang lalu oleh Stephen J: 'Hampir sepele bagi saya untuk mengamati bahwa seseorang tidak dibebaskan dari kejahatan karena mabuknya. Jika memang demikian, Anda sebaiknya menutup pengadilan pidana, karena minuman keras merupakan penyebab sebagian besar kejahatan yang dilakukan' (Doherty (1887) 16 Cox CC 306). Pandangan sebaliknya adalah yang didukung oleh mayoritas dalam Daviault v R: 'Aspek mental dari suatu pelanggaran, atau mens rea, telah lama diakui sebagai bagian integral dari kejahatan. Konsep ini mendasar bagi hukum pidana kita.

Namun, mens rea yang diganti tidak dapat menetapkan mens rea untuk melakukan pelanggaran' (menurut Cory J). Pengadilan menolak pendekatan Australia dan tetap mempertahankan pembedaan niat dasar/khusus, namun menyatakan bahwa seseorang akan bersalah atas pelanggaran niat dasar jika ia memiliki niat minimum untuk melakukan tindakan yang dilarang tersebut.

Komite Butler untuk Pelanggaran Abnormal Mental, Cmnd 6244, 1975, paragraf 18.51–18.59, menyarankan dilakukannya pelanggaran baru, karena mabuk dan berbahaya. Terdakwa dapat dihukum karena pelanggaran ini jika didakwa melakukan penyerangan seksual, pelanggaran terhadap orang tersebut, dan tindak pidana pengrusakan yang membahayakan nyawa. Ada kelebihan dalam proposal ini. Masalah dalam membedakan antara maksud dasar dan maksud khusus akan hilang. Seseorang tidak akan sepenuhnya dibebaskan seperti yang terjadi saat ini ketika mereka didakwa melakukan kejahatan dengan niat tertentu dan tidak ada pelanggaran niat dasar yang bersifat 'pengembalian'. Selain itu, jika kenakalan tersebut benar-benar merupakan tindakan mabuk-mabukan, usulan kejahatan ini akan fokus pada kenakalan tersebut, tidak seperti undang-undang saat ini. Tiga Raja di Majewski menolak rekomendasi ini. Salah satu kelemahannya adalah bahwa hal ini akan menjadi pelanggaran status dengan sedikit atau tanpa mens rea yang melekat padanya. Usulan lainnya mencakup penciptaan kejahatan karena kelalaian yang menyebabkan cedera, reformasi pelanggaran sehingga selalu ada pelanggaran dengan maksud dasar 'pengunduran' dan perlakuan terhadap pelanggar mabuk di luar sistem hukum pidana. Undang-undang yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan apa yang para hakim anggap sebagai kebijakan sosial pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam Reniger v Fogossa (1551) 75 ER 1 (KB), pengadilan menyatakan bahwa mabuk bukanlah pembelaan, dan pembunuh yang mabuk akan dijatuhi hukuman gantung.

Sikap ini tampaknya didasarkan pada pemikiran bahwa, karena banyak kejahatan dilakukan ketika terdakwa sedang mabuk, maka memberikan pembelaan berarti hanya sedikit orang yang akan dihukum. Jika keracunan adalah pertahanan terhadap pembunuhan (seperti yang terjadi sekarang), 'tidak akan ada keselamatan bagi kehidupan manusia' (Carroll (1835)

173 ER 64 (NP)). Ada beberapa bukti yang mendukung pandangan bahwa pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas mabuk-mabukan memperparah kejahatan, tidak seperti sekarang ini yang meringankan pelanggaran atau memberikan pengecualian. Usulan reformasi yang ada saat ini sebagian besar didasarkan pada Laporan Keempat Belas Komite Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980. Rekomendasinya adalah:

- (a) Penghapusan dikotomi dasar/spesifik dan 'kecerobohan konstruktif' di Majewski.
- (b) Intoksikasi yang tidak sepenuhnya mengecualikan mens rea tidak boleh menjadi pembelaan.
- (c) Kemabukan yang tidak disengaja harus tetap menjadi sebuah pembelaan tetapi hanya 'jika hal tersebut meniadakan unsur mental', dan bukan jika hal tersebut menghilangkan hambatan.
- (d) Keracunan yang disebabkan oleh diri sendiri harus didefinisikan, seperti yang didefinisikan oleh Komite Butler, sebagai 'keracunan akibat meminum minuman atau obat-obatan dengan sengaja, mengetahui bahwa minuman atau obat-obatan tersebut mampu menimbulkan efek memabukkan dalam jumlah yang cukup, asalkan keracunan tersebut Tindakan tersebut tidak dilakukan secara sukarela jika hal tersebut disebabkan oleh suatu fakta yang tidak diketahui oleh terdakwa sehingga meningkatkan kepekaannya terhadap minuman atau obat-obatan tersebut.
- (e) Mayoritas berpendapat bahwa bukti mabuk secara sukarela harus mampu meniadakan unsur mental dalam pembunuhan (yang pada saat itu lebih luas daripada niat) dan niat yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran lainnya. Dalam pelanggaran-pelanggaran yang unsurnya adalah kecerobohan, jika terdakwa tidak menyadari risiko yang seharusnya ia sadari ketika ia sadar, maka ia tidak akan mendapatkan pembelaan. Rekomendasi-rekomendasi ini sebagian besar akan memberlakukan common law. Kelompok minoritas akan mengizinkan pembelaan jika terdakwa tidak menyadari risiko yang menyebabkan actus reus, namun akan sadar, jika dia sadar. Pihak yang berbeda pendapat terdiri dari dua profesor hukum di Komite Revisi Hukum Pidana.
- (f) Tidak boleh ada pelanggaran atas mabuk yang berbahaya, seperti yang diusulkan oleh Komite Butler. Kejahatan itu akan menyatukan pembunuh anak yang mabuk dan petarung yang mabuk. Mayoritas anggota Komite berpendapat bahwa pelanggaran dalam bidang mabuk-mabukan harus mengacu pada tingkat bahayanya sehingga, misalnya, seorang pembunuh dalam keadaan mabuk masih dapat dihukum karena melakukan pembunuhan tidak berencana. Terdakwa tidak boleh diberi label yang salah. Mayoritas berpendapat bahwa pemerkosa yang mabuk seharusnya bersalah atas pemerkosaan, bukan pelanggaran umum. Kelompok minoritas merekomendasikan putusan khusus bahwa pelanggaran tersebut dilakukan ketika terdakwa dalam keadaan mabuk. Ia akan dikenakan hukuman yang sama (kecuali pembunuhan, yang hukumannya setara dengan pembantaian) seperti yang akan ia terima jika ia terbukti bersalah. Kalimat tersebut akan mencerminkan kerugiannya. Dengan cara ini aturan 'kecerobohan konstruktif' yang ada saat ini akan dihapuskan.

Usulan Komisi Hukum tahun 1989, 1993 dan 1995

Rekomendasi tersebut muncul dalam RUU KUHP, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989, yang bila diberlakukan akan menghilangkan beberapa kesulitan dan anomali undang-undang yang ada saat ini. Rancangan KUHP didasarkan pada rekomendasi Komite Revisi Hukum Pidana tahun 1980. Sebagaimana dinyatakan dalam Bab 1, rancangan KUHP akan memberlakukan rekomendasi-rekomendasi terbaru dari badan-badan reformasi hukum tanpa adanya amandemen. Klausul utamanya adalah pasal 22(1), yang merupakan pengganti delik dengan niat dasar dan berlaku untuk kejahatan yang bagian dari *actus reus*nya adalah kecerobohan. Keseluruhan *actus reus* tidak perlu merupakan kecerobohan. Dalam pemerkosaan, salah satu unsur kesalahannya adalah niat untuk melakukan hubungan seksual, namun pemerkosaan merupakan pelanggaran yang hanya memerlukan kecerobohan dalam memberikan persetujuan. Rancangan KUHP memuat pasal sebagai berikut.

Pasal 22(1)

Jika suatu pelanggaran memerlukan unsur kesalahan kecerobohan (bagaimanapun dijelaskan), seseorang yang mabuk secara sukarela harus diperlakukan –

- (a) telah menyadari segala risiko yang mungkin dia sadari seandainya dia sadar;
- (b) sebagai tidak percaya akan adanya suatu keadaan yang dikecualikan (di mana keberadaan kepercayaan tersebut dipermasalahkan) jika dia tidak akan mempercayai hal tersebut seandainya dia dalam keadaan sadar.

Pasal 22(2)

Jika suatu pelanggaran membutuhkan unsur kesalahan berupa kegagalan untuk mematuhi standar perawatan, atau tidak memerlukan kesalahan, seseorang yang mabuk secara sukarela akan diperlakukan sebagai tidak percaya akan adanya keadaan yang dikecualikan (dimana keberadaan keyakinan tersebut adalah dalam masalah) jika orang yang waras dan waras tidak akan mempercayainya.

Pasal 22(3)

Jika definisi unsur kesalahan atau pembelaan merujuk, atau memerlukan referensi, pada keadaan pikiran atau perilaku yang diharapkan dari orang yang berakal sehat, maka orang tersebut harus dipahami sebagai orang yang tidak mabuk.

Pasal 22(4)

Ayat (1) tidak berlaku –

- (a) pembunuhan (yang berlaku pada pasal 55); atau
- (b) untuk kasus (yang mana pasal 36 berlaku) dimana ketidaksadaran atau keyakinan seseorang timbul dari kombinasi gangguan mental dan keracunan yang disengaja.

Pasal 55

Seseorang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan jika; ia tidak bersalah atas pembunuhan hanya dengan alasan bahwa, karena mabuk secara sukarela, ia tidak mengetahui bahwa kematian dapat disebabkan atau percaya bahwa ada keadaan yang dikecualikan.

Pasal 36

Putusan gangguan jiwa akan dikembalikan apabila; terdakwa dibebaskan dari suatu tindak pidana hanya karena, berdasarkan bukti gangguan jiwa atau kombinasi gangguan jiwa dan mabuk, diketahui bahwa ia bertindak atau mungkin telah bertindak dalam keadaan otomatis, atau tanpa kesalahan yang diperlukan. atas pelanggaran tersebut, atau meyakini adanya keadaan yang dikecualikan; . . .

Pasal 56(3)

Apabila seseorang yang menderita kelainan jiwa juga sedang mabuk, bagian ini hanya berlaku jika ia tidak sedang mabuk. [Klausul 56 menyangkut berkurangnya tanggung jawab.] Karena sebagian besar pelanggaran dalam rancangan KUHP didefinisikan sebagai kesengajaan atau kecerobohan, maka mabuk-mabukan jarang menjadi pembelaan.

Pada pasal 22(5)(a) 'minuman keras' mencakup 'alkohol atau benda lain apa pun yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengganggu kesadaran atau kendali'. Oleh karena itu, obat-obatan berbahaya termasuk di dalamnya. Pada sub-klausul (5)(b) 'kemabukan yang disengaja' mencakup meminum sesuatu sebagai minuman keras (kecuali untuk tujuan pengobatan), dengan mengetahui bahwa benda tersebut adalah atau mungkin merupakan minuman keras. Berdasarkan sub-klausul (5)(c) seseorang dianggap meminum minuman keras jika diberikan kepadanya. Pada sub-kl (6) Bailey dan Hardie, di atas, akan diberlakukan. Beban hukum tetap berada pada penuntut umum, namun beban pembuktian akan ditanggung oleh terdakwa (ayat (7)). Tidak ada ketentuan khusus mengenai aturan 'keberanian Belanda'.

Melalui usulan-usulan ini, Komisi Hukum berupaya mencapai penghapusan maksud khusus dan mendasar serta penggantian tanggung jawab atas kecerobohan yang ada saat ini. Terdakwa akan bersalah atas pelanggaran yang mungkin dilakukan secara sembrono jika dia mabuk. Klausul 22 menyatakan kembali hukum yang berlaku saat ini. Tidak perlu ada aturan khusus untuk kejahatan dengan maksud tertentu karena mabuk hanyalah bagian dari bukti. Jika kejahatan yang dilakukan secara 'jahat' masih lolos dari pemberlakuan KUHP, maka kejahatan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat kecerobohan. Menurut kelas 33(1)(b) seseorang yang tidak sadarkan diri karena minuman tidak memiliki pembelaan terhadap otomatisisme.

Klausul 22(1)(b) akan membalikkan *Jaggard v Dickinson* di atas. Komisi Hukum berkomentar (Laporan No. 177, paragraf 8.41) bahwa 'keputusan tersebut menimbulkan perbedaan yang ganjil (antara kekeliruan mengenai tidak adanya suatu unsur pelanggaran dan kekeliruan mengenai adanya suatu keadaan yang menyebabkan pembelaan) yang merupakan tindakan salah jika dilakukan dalam Kode'. Komisi Hukum juga ingin membalikkan diktum *O'Grady* di atas. Terdakwa akan dapat mengandalkan kesalahan yang disebabkan oleh mabuk untuk membela diri dalam pelanggaran yang satu-satunya unsur mentalnya adalah niat, termasuk pembunuhan. Dalam pandangan Komisi Hukum, 'hal ini akan tidak terpikirkan untuk menghukum seseorang yang melakukan pembunuhan karena alasan apa pun, bahwa ia bertindak untuk menyelamatkan nyawanya dan akan bertindak wajar jika ia benar'. Aturan ini akan menyamakan pembelaan diri dengan pembelaan lainnya ketika terdakwa sedang mabuk.

Hukum akan ditegakkan kembali dengan kesalahan yang tidak didasarkan pada keracunan (Williams [1987] 3 All ER 411).

Berkenaan dengan pelanggaran kecerobohan, keyakinan yang salah mengenai pembelaan diri tidak akan relevan jika keyakinan tersebut tidak dianut jika terdakwa dalam keadaan sadar. Komisi Hukum mencatat (Laporan No. 177, paragraf 8.42) bahwa pembalikan diktum O'Grady tidak akan membiarkan terdakwa bebas dari hukuman: ia akan dihukum karena pembunuhan tidak berencana atau dugaan pelanggaran yang menyebabkan kerugian secara sembrono. Komisi Hukum berpandangan bahwa tidak boleh ada aturan khusus untuk pembelaan diri, pembelaan umum dan swasta, pembelaan harta benda, dan pembelaan diri.

Perlu dicatat bahwa Komisi Hukum harus menetapkan aturan khusus untuk pembunuhan karena berdasarkan rekomendasinya, pembunuhan merupakan bagian dari pelanggaran kecerobohan yang mana pasal 22(1) akan diterapkan. Pembunuhan harus mengandung unsur kesalahan 'sadar bahwa dia mungkin membunuh', sebuah ungkapan tanggung jawab atas kecerobohan. Undang-undang saat ini tentang mabuk-mabukan dan pembunuhan tetap dipertahankan. Sebagaimana dicatat oleh Komisi Hukum (Laporan No. 177, paragraf 8.44) terdakwa dihukum karena pembunuhan yang tidak disengaja, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Hukuman seperti itu dianggap 'cukup untuk melindungi kepentingan umum'.

Sebagaimana dinyatakan kembali, undang-undang ini masih rumit. Keracunan tetap tidak hanya *mens rea* negatif. Aturan khusus akan tetap ada. Pemikiran Komisi Hukum berkembang dan berubah antara tahun 1989 dan 1995. Pada tahun 1993 Komisi Hukum mengeluarkan Makalah Konsultasi, Intoksikasi dan Pertanggungjawaban Pidana, LCCP No. 127. Makalah Konsultasi menyelidiki undang-undang yang ada saat ini tentang mabuk-mabukan dan berbagai alternatifnya. Persoalan tersebut dinilai menjadi arena konflik dua kebijakan: kebijakan tidak menghukum orang yang tidak mengetahui perbuatannya dan kebijakan melindungi warga negara dari kekerasan akibat minuman keras atau narkoba. Resolusi terkini atas benturan kebijakan ini adalah keputusan House of Lords di Majewski.

Namun, Majewski bergantung pada perbedaan antara kejahatan dengan niat dasar dan kejahatan yang disengaja. 'Perbedaan antara kedua jenis pelanggaran ini, alasan kebijakan perbedaan tersebut, dan dasar perbedaan tersebut, semuanya tidak jelas' (LCCP No. 127, 3). Hukum itu rumit dan mungkin saja diabaikan oleh para penguji fakta. Undang-undang ini tidak memajukan kebijakan kriminalisasi orang-orang yang mabuk secara langsung namun melalui peraturan teknis yang tidak selalu mencerminkan kebijakan tersebut. Hukum Inggris juga tidak sejalan dengan hukum di yurisdiksi lain yang telah menghapuskan peraturan khusus tentang mabuk-mabukan. Ada juga kesulitan dalam mengetahui apa yang diputuskan Majewski. Apakah semua pelanggaran merupakan pelanggaran yang memiliki tujuan dasar atau spesifik? Berdasarkan pandangan ini, pelanggaran yang ditemukan dalam pasal 18 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861 adalah kejahatan dengan sengaja tertentu.

Atau apakah pertanyaannya apakah suatu tuduhan mempunyai maksud yang spesifik atau mendasar? Dalam pendekatan ini, tuduhan bahwa terdakwa menyebabkan luka fisik

yang parah dengan maksud untuk melakukan hal yang berlawanan dengan pasal 18 merupakan pelanggaran yang disengaja, namun menyebabkan luka tersebut dengan maksud untuk melawan atau mencegah penangkapan merupakan kejahatan yang disengaja. Aturan mana pun yang diterapkan, terdapat kesulitan dalam kejahatan yang memiliki kesengajaan pada satu elemen namun kecerobohan pada elemen lainnya. Selain mabuk, terdakwa harus berniat melakukan salah satu pelanggaran yang tercantum dalam pasal 9(2) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 jika ia didakwa dengan jenis perampokan pasal 9(1)(a), tetapi kecerobohan saja sudah cukup dalam kaitannya dengan pelanggaran tersebut. Penerapan keracunan Majewski tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah terdakwa mengetahui bahwa ia masuk sebagai pelanggar namun dipertimbangkan sehubungan dengan pertanyaan apakah ia bermaksud melakukan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 9(2). Pertanyaan lain yang muncul sehubungan dengan Majewski adalah mengatakan bahwa aturan tersebut berlaku sehubungan dengan dugaan kesengajaan; yaitu 'pelanggaran dengan niat dasar' adalah sebuah konsep yang lebih luas daripada kejahatan karena kecerobohan karena mencakup beberapa kejahatan yang disengaja.

Komisi Hukum mencatat bahwa sebagian besar kejahatan telah dimasukkan ke dalam kategori niat dasar atau tujuan khusus. Namun, terdapat kesulitan dengan pelanggaran yang belum dialokasikan, karena lebar Majewski tidak pasti. Selain itu, perlakuan terhadap perbedaan antar pengadilan 'berarti tidak ada hubungan yang diperlukan antara keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan kategorisasinya. Pembunuhan adalah kejahatan yang disengaja, namun pembunuhan berencana adalah kejahatan yang memiliki niat dasar, namun keduanya merupakan pelanggaran serius. Pembunuhan tidak disengaja lebih serius daripada kejahatan melukai tubuh secara sengaja, namun kejahatan yang pertama adalah kejahatan dengan niat dasar, sedangkan kejahatan yang terakhir adalah kejahatan dengan niat khusus.

Selain itu, ada masalah dalam menerapkan Majewski pada beberapa pelanggaran, seperti yang telah kita lihat sehubungan dengan perampokan. Beberapa pelanggaran dengan niat khusus yang serius memiliki pelanggaran niat dasar 'pengunduran' yang menyertainya. Misalnya, pasal 18 adalah kejahatan dengan sengaja tertentu; seorang terdakwa dapat dihukum atas kejahatan 20, yang merupakan pelanggaran niat dasar. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk semua pelanggaran berat. Keracunan adalah pertahanan terhadap perampokan dan pencurian; namun terdakwa tidak bersalah atas kejahatan yang lebih ringan jika dia mabuk. Komisi Hukum juga menggugat perkara O'Grady [1987] QB 995. Terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana dimana ia melakukan kesalahan mengenai salah satu unsurnya, baik tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang bersifat pokok atau disengaja. Komisi Hukum dalam Lapornya pada tahun 1995 yang disebutkan di bawah ini tidak setuju dengan rekomendasi utama Makalah Konsultasi, namun Komisi Hukum mengulangi kritik-kritik tersebut.

Dalam Makalah Konsultasi, Komisi Hukum mengkaji opsi-opsi reformasi pertahanan. Pilihan pertama adalah membiarkan hukum apa adanya. Komisi Hukum menolak usulan ini karena gagal mencapai tujuan kebijakan dari undang-undang yang tidak rumit, undang-undang yang pasti, dan undang-undang yang sepenuhnya melaksanakan tujuan menegakkan

ketertiban umum sambil mengizinkan terdakwa yang mabuk untuk dibebaskan dari pelanggaran berat. Pilihan kedua adalah mengkodifikasi pendekatan Majewski namun memperbaiki inkonsistensi. Pendekatan ini tentu saja akan memastikan bahwa undang-undang tersebut pasti namun tidak akan memenuhi tujuan kebijakan lain yang telah disebutkan. Komisi Hukum juga menolak rekomendasi Komite Revisi Hukum Pidana pada tahun 1980 bahwa seorang terdakwa tidak boleh melakukan pembelaan atas mabuk sehubungan dengan unsur kejahatan yang didefinisikan sebagai kecerobohan jika dia menghargai risikonya seandainya dia sadar.

Dampak dari usulan tersebut adalah, misalnya, dalam keadaan mabuk karena perkosaan akan relevan dengan niat untuk melakukan hubungan seksual tetapi tidak relevan dengan kecerobohan dalam memberikan persetujuan. Mengapa terdakwa harus dibebaskan pada alasan pertama dan tidak pada alasan kedua? Selain itu, banyak orang yang berpendapat bahwa mabuk-mabukan seharusnya tidak menjadi alasan kebijakan untuk membela diri terhadap pemerkosaan. Komisi Hukum menilai usulan Panitia Revisi Hukum Pidana akan membingungkan juri: misalnya mereka menganggap mabuk sebagai kaitannya dengan niat untuk melakukan hubungan seksual, namun bukan sebagai kecerobohan dalam memberikan persetujuan. Selain itu, rekomendasi tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam penjatuhan hukuman. Terdakwa yang mabuk harus diperlakukan sebagai orang yang ceroboh. Haruskah dia dihukum karena dia ceroboh? Komisi Hukum berpendapat bahwa pelanggar harus dihukum karena apa yang sebenarnya ia lakukan, bukan karena apa yang bukan dirinya, yaitu karena ia adalah orang yang ceroboh namun bijaksana.

Opsi ketiga yang dipertimbangkan oleh Komisi Hukum adalah mengabaikan dampak keracunan dalam pelanggaran apa pun. Aturan niat khusus/dasar akan dihapuskan dan terdakwa tidak akan bisa mengandalkan mabuk sebagai peniadaan unsur kesalahan dalam pelanggaran apa pun bahkan yang saat ini dikategorikan sebagai pelanggaran dengan niat khusus. Pilihan ini akan menjadi pencegahan yang tidak dapat disangkal, karena terdakwa yang mabuk tidak akan mempunyai pembelaan. Komisi Hukum menganggap bahwa akibat seperti itu akan menjadi tindakan yang 'kejam' dalam masyarakat yang menoleransi alkohol. Dampaknya juga tidak sesuai untuk beberapa kejahatan. Dalam jenis perampokan yang ditemukan dalam pasal 9(1)(a) Undang-Undang Pencurian tahun 1968, keracunan tidak akan relevan dengan niat lebih lanjut atau tersembunyi, yaitu niat untuk melakukan salah satu dari empat pelanggaran yang tercantum dalam pasal 9(2). Hasilnya adalah bahwa penuntut harus membuktikan hanya bahwa terdakwa memasuki sebuah gedung sebagai pelanggar, namun entri seperti itu bukanlah suatu kejahatan: 'jika keadaan mabuk orang yang masuk mencegah terbentuknya niat tersembunyi, maka hal tersebut adalah tidak mungkin untuk mengkarakterisasi entri tersebut sebagai perampokan, dan dengan demikian juga tidak mungkin untuk menggunakan hukuman atas perampokan sebagai sanksi terhadap entri tersebut.'

Opsi keempat yang dikemukakan oleh Komisi Hukum sama dengan opsi ketiga, namun dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak akan dihukum jika ia dapat menunjukkan bahwa ia tidak memiliki mens rea yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran karena ia mabuk

secara sukarela. Namun Komisi Hukum berpendapat bahwa seseorang yang menyebabkan kerugian dalam keadaan mabuk tidak boleh bebas, yang akan berakibat jika terdakwa melakukan pembelaan. Opsi kelima adalah menghapuskan pendekatan Majewski. Keracunan hanya akan menjadi bagian dari bukti *mens rea*. Hukumnya akan sederhana. Mengingat yurisdiksi seperti negara bagian *common law* Australia yang telah mengadopsi solusi ini, tidak diperlukan aturan khusus untuk terdakwa dalam keadaan mabuk. Prinsip *mens rea* harus menjadi yang utama. Argumen bahwa Majewski menghalangi orang yang mabuk tidak didukung oleh fakta. Victoria, yang menghapuskan aturan niat khusus/dasar, tidak memiliki masalah yang lebih serius dengan pemabuk yang menyebabkan kerugian dibandingkan negara bagian yang tetap mempertahankan Majewski. Namun Komisi Hukum berpendapat bahwa keselamatan publik akan terganggu dan rasa hormat terhadap hukum akan berkurang jika terdakwa yang mabuk dibebaskan sepenuhnya. Komisi Reformasi Hukum Irlandia dalam Laporanannya tentang Intoksikasi berkomentar sebagai berikut: 'doktrin *mens rea* yang tradisional adalah doktrin yang tepat bagi penjahat yang berakal dan sadar, namun untuk mematuhi dengan cara yang teguh dan tidak fleksibel memungkinkan pelakunya sendiri, secara sukarela, bukan hanya untuk "memindahkan tiang gawang" tetapi menghapus semuanya! Intinya, dengan rapi, ditulis dalam istilah yang lebih tradisional oleh Lord Mustill. . . di Kingston, ketika ia berpendapat, pertama, bahwa meminum minuman keras dengan sengaja tanpa mempertimbangkan kemungkinan konsekuensinya merupakan pengganti elemen mental yang biasanya dibutuhkan; dan, kedua, bahwa terdakwa "diberhentikan". . . dari mengandalkan tidak adanya unsur mental jika unsur tersebut tidak ada karena tindakannya sendiri.' Komisi Reformasi Hukum Irlandia ingin agar keracunan sukarela tidak pernah menjadi pembelaan.

Opsi keenam adalah menghapuskan Majewski tetapi menggantinya dengan tindak pidana baru berupa mabuk-mabukan. Hukum pidana harus melindungi terdakwa yang mabuk. Orang-orang seperti itu bersalah karena melakukan kejahatan. Membebaskan mereka, mungkin akan dianggap salah secara moral dan memberikan pesan yang salah kepada mereka, karena mereka harus dicegah. 'Pelanggaran baru dapat disesuaikan dengan undang-undang untuk mencapai tujuan pendekatan Majewski dengan lebih tepat tanpa kesalahan Majewski itu sendiri, dan khususnya tanpa kesulitan praktis yang menyertai pengoperasiannya saat ini. Suatu pelanggaran baru dapat dilaksanakan secara langsung dan terang-terangan pertimbangan kebijakan dengan menetapkan peraturan yang jelas sehubungan dengan kebijakan tersebut.' Komisi Hukum menolak usulan Komite Butler mengenai pelanggaran mabuk-mabukan yang berbahaya dan gagasan minoritas Komite Revisi Hukum Pidana mengenai pelanggaran 'melakukan tindakan tersebut sambil berada dalam keadaan mabuk'.

keadaan mabuk secara sukarela', sebagian karena sehubungan dengan rekomendasi terakhir, juri harus menjawab pertanyaan hipotetis: apakah terdakwa akan melakukan apa yang dia lakukan, apakah dia dalam keadaan sadar? Komisi Hukum mengusulkan, pertama, bahwa keadaan mabuk harus diperhitungkan dalam menentukan apakah terdakwa mempunyai *mens rea* pelanggaran, apakah ia melakukan kesalahan, apakah ia dalam keadaan otomatis; kedua, terciptanya tindak pidana baru yaitu pidana mabuk-mabukan. Kejahatan

tersebut akan dilakukan oleh seorang terdakwa yang, meskipun dalam keadaan mabuk, menyebabkan kerugian yang dilarang oleh apa yang disebut sebagai pelanggaran yang 'terdaftar'. Tidak relevan jika terdakwa tidak memiliki unsur mental dari pelanggaran yang disebutkan atau bahwa ia berada dalam keadaan otomatisme. Pelanggaran yang diusulkan oleh Komite Butler hanya akan berlaku jika terdakwa tidak membuat mens rea pelanggaran.

Pelanggaran yang 'terdaftar' hanyalah pelanggaran yang terdaftar oleh Komisi Hukum. Hal ini dinyatakan sebagai: pembunuhan, penganiayaan fisik, pengrusakan kriminal, pemerkosaan, penyerangan tidak senonoh, pengacauan, penyerangan atau menghalangi polisi dalam melaksanakan tugasnya, kekacauan dengan kekerasan, keributan, membuat seseorang takut atau memicu kekerasan, dan menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut tidak berlaku untuk pelanggaran lain seperti percobaan, penyerangan, pencurian, dan perampokan. Hukuman maksimalnya akan lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran substantif karena terdakwa dalam keadaan mabuk lebih ringan kesalahannya dibandingkan dengan orang yang dengan sengaja atau ceroboh melakukan kejahatan. Seharusnya tidak ada batas maksimum khusus untuk pelanggaran tersebut karena dengan adanya satu batas maksimum tidak akan memberikan hukuman atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa dalam keadaan mabuk. Komisi Hukum berpendapat bahwa seharusnya ada maksimal dua pertiga dari maksimal pelanggaran yang 'terdaftar' tetapi dengan maksimal 10 tahun dimana maksimal pelanggaran tersebut adalah seumur hidup. Komisi Hukum juga merekomendasikan penghapusan prinsip O'Grady, dengan ketentuan bahwa terdakwa yang mabuk akan mendapat pembelaan atas kesalahannya dalam situasi pembelaan diri di mana orang yang sadar akan melakukan kesalahan yang sama.

Komisi Hukum merangkum keuntungan dari usulan pelanggaran tersebut:

- (i) Terdakwa tidak akan bertanggung jawab untuk dihukum atas pelanggaran apabila, menurut hukum, mereka tidak mempunyai kondisi mental yang disyaratkan untuk bersalah atas pelanggaran tersebut.
- (ii) Pada saat yang sama, hukum pidana akan dapat melakukan intervensi dalam kasus-kasus di mana terdakwa, meskipun tidak memenuhi persyaratan untuk dihukum atas kejahatan tertentu, melakukan tindakan yang berbahaya secara sosial dalam keadaan mabuk berat.
- (iii) Tujuan ini akan dicapai dengan memberikan kesempatan kepada pengadilan dan juri untuk menerapkan serangkaian aturan yang jelas yang mengharuskan mereka mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan faktual dan bukan pertanyaan-pertanyaan abstrak atau hipotetis; yang secara jelas menyebutkan di mana terdakwa dihukum karena mabuk dan bukan karena kesengajaan atau kecerobohan; dan dengan demikian memberikan panduan positif kepada pengadilan yang menjatuhkan hukuman mengenai dasar hukumannya. (LCCP No.127, 93)

Komisi Hukum menyimpulkan dengan menyatakan bahwa pelanggaran baru tersebut dapat secara langsung menerapkan kebijakan penahanan terdakwa dalam keadaan mabuk, akan berkonsentrasi pada kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh mereka, dan akan menghapuskan undang-undang rumit namun tidak pasti yang ditemukan di Majewski.

Salah satu kekhawatiran para komentator terkait dengan opsi keenam dan diunggulkan. Jika terdakwa melakukan pelanggaran yang terdaftar ketika mabuk berat, dia mempunyai pembelaan. Namun, bagaimana jika meskipun dalam keadaan mabuk, ia berniat melakukan pelanggaran tersebut? Tentunya seperti di Kingston, di atas, dia harus bertanggung jawab atas pelanggaran (yang terdaftar), bukan hanya atas pelanggaran yang diusulkan. Seperti yang ditegaskan Kingston, niat mabuk tetaplah sebuah niat.

Komisi Hukum menerbitkan Laporan No. 229, Intoksikasi dan Pertanggungjawaban Pidana, 1995, yang tercantum di bawah ini dan mengambil posisi yang sangat mirip dengan KUHP Model AS tahun 1962, pasal 2.08(1), sebagai tindak lanjut dari LCCP 127. Sementara itu, mereka mengeluarkan Laporan No. 218, Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, 1993. Laporan No. 218 dibatasi pada pelanggaran non-fatal dan tiga pembelaan umum. Berkenaan dengan pelanggaran non-fatal, pasal 21(1) mengatur hal itu seseorang yang mabuk secara sukarela pada suatu waktu harus dirawat

- (a) telah menyadari segala risiko yang mungkin dia sadari seandainya dia tidak mabuk, dan
- (b) karena tidak percaya pada keadaan apa pun yang dia yakini seandainya dia tidak mabuk.

Dokumen Konsultasi Kantor Dalam Negeri, *Violence: Reforming the Offenses Against the Person Act 1861*, 1998, menerima definisi ini untuk keperluan rancangan RUU Pelanggaran terhadap Persona. Yang perlu diperhatikan, terdakwa tidak lagi dianggap gegabah jika dalam keadaan mabuk. Dia dapat mengemukakan bukti yang menunjukkan bahwa meskipun mabuk dia tidak memiliki *mens rea* yang diperlukan. Untuk tujuan pelanggaran yang direvisi, 'seseorang yang secara sukarela mabuk pada suatu waktu harus dianggap tidak percaya pada keadaan apa pun yang tidak akan dipercayainya seandainya dia tidak mabuk' (cl 33).

Komisi Hukum berpendapat bahwa perbedaan yang ada saat ini antara kejahatan dengan niat dasar dan kejahatan dengan tujuan khusus tidak dapat 'dinyatakan dalam istilah undang-undang, karena batas-batasnya hampir tidak mungkin untuk ditentukan'. Demi kenyamanan, undang-undang tersebut harus dirumuskan ulang untuk diterapkan 'hanya terhadap tuduhan atau yang berkaitan dengan kecerobohan'. Dengan kata lain Majewski, untuk tujuan RUU Hukum Pidana yang dilampirkan pada Laporan No. 218 dibatasi pada pelanggaran kecerobohan, seperti yang dipikirkan Lord Elwyn-Jones dalam Majewski dan Lord Diplock dalam Caldwell. Namun, bukti keracunan dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kejahatan yang disengaja seperti kejahatan yang disengaja yang menyebabkan cedera serius. Dipertahankannya undang-undang tentang minuman beralkohol tidak sejalan dengan desakan Komisi Hukum mengenai kesalahan subjektif. Pasal 33 RUU KUHP ditujukan untuk menjaga aturan di O'Grady sambil menunggu laporan lengkap tentang mabuk-mabukan. Perlu diingat bahwa Komisi Hukum sebelumnya menyebut dampak O'Grady 'tidak terpikirkan'. Jadwal 3, paragraf 13(3) pada RUU tersebut akan merevisi pasal 5(2)(b) (perlindungan properti) dari Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971 agar konsisten dengan pernyataan kembali dalam pasal 33. *Jaggard v Dickinson*, sebuah kasus di s 5(2)(a), tidak akan terpengaruh.

Komisi Hukum secara mengejutkan menolak rekomendasi utama yang tercantum dalam Makalah Konsultasi ketika menerbitkan Peraturan Perundang-undangan KUHP: Mabuk dan Pertanggungjawaban Pidana, Laporan No. 229, 1995. Komisi Hukum menganggap bahwa 'kebijakan sosial yang bijaksana' (ayat 1.14) mengesampingkan asas umum hukum pidana bahwa terdakwa bersalah hanya apabila ia sadar akan risiko bahwa perbuatannya dapat menimbulkan kerugian. Mereka tidak boleh lepas dari tanggung jawab karena mereka mabuk karena masyarakat harus dilindungi dari kekerasan. Masuk akal untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas perilaku buruk saat mabuk. Peserta konsultasi menanggapi rekomendasi dalam Makalah Konsultasi bahwa penghapusan peraturan di Majewski tanpa penggantian (opsi 5) tidak dapat diterima karena akan mengakibatkan pembebasan terdakwa mabuk dan penciptaan pelanggaran baru (opsi 6) juga tidak dapat diterima. dengan alasan bahwa lebih banyak persidangan akan dilakukan, bukti ahli akan diperlukan mengenai apakah terdakwa mengalami gangguan kesehatan yang signifikan, lebih banyak waktu polisi akan dihabiskan untuk mengungkap tingkat mabuknya dan jaksa tidak akan mengetahui sebelum persidangan apakah pro - pelanggaran yang diajukan harus dimasukkan dalam dakwaan. Opsi 3 dan 4 tidak didukung pada konsultasi. Yang tersisa adalah opsi 1, tidak melakukan apa-apa, dan opsi 2, mengkodifikasi dan mengubah undang-undang yang berlaku saat ini. Opsi-opsi ini didukung oleh para peserta konsultasi: 'juri pada kenyataannya tidak mengalami banyak kesulitan dengan undang-undang yang ada saat ini seperti yang kita duga sebelumnya' (paragraf 1.28).

Opsi 1 ditolak karena tidak menyentuh permasalahan hukum seperti apakah suatu kejahatan mempunyai niat dasar atau niat khusus. Yang tersisa adalah pilihan 2. Di antara rekomendasi yang muncul dari keputusan tersebut adalah, pertama, bahwa sehubungan dengan tuduhan tujuan, niat, pengetahuan, keyakinan, penipuan dan ketidakjujuran, bukti mabuk harus dipertimbangkan bersama dengan semua bukti lainnya untuk menentukan apakah tuduhan tersebut terbukti; kedua, sehubungan dengan unsur-unsur mental lainnya seperti kecerobohan, terdakwa harus dianggap sadar akan segala sesuatu yang dia sadari, seandainya dia tidak mabuk; dan ketiga, jika terdakwa dalam keadaan mabuk, baik disengaja maupun tidak, menganut suatu keyakinan yang akan mengecualikannya jika ia sadar, maka keyakinan tersebut tidak akan membebaskannya jika ia tidak menganutnya kecuali karena mabuknya dan kejahatannya tidak. salah satu tujuan, maksud, pengetahuan, keyakinan, penipuan atau ketidakjujuran: lih. *Jaggard v Dickinson*, di atas. Contoh dari dua proposisi pertama adalah usaha. Terdakwa yang bersalah harus bermaksud melakukan pelanggaran sepenuhnya dan mabuk akan diperhitungkan; namun, kecerobohan dalam hal keadaan sudah cukup untuk melakukan percobaan jika hal tersebut cukup untuk kejahatan penuh: terdakwa tidak akan bisa mengandalkan keadaan mabuk sehubungan dengan kecerobohan seperti kecerobohan dalam hal persetujuan korban untuk melakukan pemerkosaan.

Setidaknya dengan cara inilah ketentuan ini diharapkan dapat berfungsi. Pengadilan mungkin mengatakan bahwa jika suatu kejahatan terdiri dari tuduhan kesengajaan dan kecerobohan, maka sebenarnya kejahatan tersebut merupakan kejahatan karena kecerobohan. Oleh karena itu, terdakwa bersalah jika dalam keadaan mabuk secukupnya.

'Mabuk' akan didefinisikan sebagai kejadian ketika kesadaran, pemahaman atau kontrol terganggu oleh minuman keras, yang akan didefinisikan sebagai 'alkohol, obat-obatan atau zat lain (dalam bentuk apa pun) yang, setelah dimasukkan ke dalam tubuh, telah kapasitas untuk mengganggu kesadaran, pemahaman atau kendali'. Keracunan yang tidak disengaja mencakup situasi di mana terdakwa meminum zat tersebut tanpa mengetahui bahwa zat tersebut adalah zat yang memabukkan, ia diberikan tanpa izin, ia meminumnya di bawah tekanan atau memiliki pembelaan lain, ia sangat rentan terhadapnya dan tidak mengetahuinya, atau akhirnya dia meminumnya semata-mata karena alasan medis dan tidak mengetahui kecenderungannya untuk menimbulkan perilaku agresif atau tidak terkendali atau (jika dia sadar) dia meminumnya dengan nasihat medis. Jika meskipun dia mabuk secara sukarela, dia tetap memiliki elemen mental yang diperlukan, dia akan bersalah: Kingston, di atas, tidak akan terpengaruh dan perbedaannya tampaknya sudah ada: lihat di atas), akan membatalkan aturan di Hardie, di atas, dan menggantinya dengan aturan tentang nasihat medis, akan menghapuskan prinsip O'Grady dan akan merapikan hukum keracunan yang tidak disengaja.

Usulan tersebut dikritik karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam rancangan KUHP. Rekomendasi-rekomendasi tersebut didasarkan pada kemampuan kerja, namun hal ini akan menimbulkan hukum yang rumit. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Makalah Konsultasi Kekerasan: Reformasi Pelanggaran terhadap Pribadi Undang-Undang 1861 pada tahun 1998. Di dalamnya pemerintah kembali menggunakan rancangan KUHP tahun 1989. Karena sifat dari dokumen tersebut, keracunan hanya dinyatakan kembali dalam kaitannya dengan pelanggaran non-fatal tetapi dalam Makalah Konsultasi tahun 2000 tentang pembunuhan tidak disengaja, Kementerian Dalam Negeri mengambil pandangan yang sama sehubungan dengan pelanggaran ini. Sejak saat itu, tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah.

8.4 REKOMENDASI KOMISI HUKUM TAHUN 2006

Komisi Hukum mengeluarkan Laporan No. 306 tentang Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi pada bulan November 2006. Di dalamnya, Komisi mengusulkan struktur tiga tingkat untuk pelanggaran fatal: pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua dan pembunuhan tidak disengaja: Sehubungan dengan mabuk-mabukan, Komisi Hukum mengusulkan agar hal ini menjadi pembelaan terhadap pembunuhan tingkat pertama dan kedua tetapi tidak untuk pembunuhan tidak berencana. Dengan demikian, rumusan maksud spesifik dan mendasar akan dipetakan ke dalam undang-undang baru. Namun, perlu dicatat bahwa salah satu bentuk unsur mental yang diusulkan dalam pembunuhan tingkat pertama adalah 'niat untuk menyebabkan cedera serius karena menyadari bahwa ada risiko kematian yang serius'.

Oleh karena itu, ini merupakan kejahatan yang sebagian didefinisikan dalam istilah kecerobohan (subyektif): kesadaran akan risiko kematian yang serius. Meskipun demikian, pembunuhan jenis ini akan tetap merupakan kejahatan dengan niat tertentu. Hal serupa juga dapat dikemukakan mengenai pembunuhan tingkat dua. Komisi Hukum bermaksud untuk

menerbitkan laporan tersebut pada akhir tahun 2008 namun tidak ada tanda-tanda akan menerbitkannya pada awal Januari 2009.

Pertahanan diri dan pencegahan kejahatan

Perkenalan

Bagian ini berkaitan dengan pembelaan menurut undang-undang untuk mencegah kejahatan dan melakukan atau membantu penangkapan yang terdapat dalam pasal 3(1) Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1967 dan pembelaan diri menurut hukum adat sepanjang hal tersebut masih berlaku setelah berlakunya pasal 3(1). Undang-Undang Peradilan Pidana dan Imigrasi tahun 2008, pasal 76, mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2008. Undang-undang ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, Jack Straw, sebagai langkah yang akan melindungi mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang berusaha mencegah dilakukannya pelanggaran. terhadap diri sendiri, orang lain, atau harta benda, khususnya rumah tangga yang menggunakan kekerasan terhadap pencuri, namun pada kenyataannya hal tersebut merupakan pemberlakuan kasus hukum yang berwajib. Pasal 76 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. 'Pertanyaan apakah tingkat kekerasan yang digunakan oleh D [terdakwa] masuk akal dalam keadaan tersebut harus diputuskan dengan mengacu pada keadaan yang diyakini oleh D. . . .' (hal 76(3)).
2. Pasal 76(4) mengatur:
Jika D mengaku menganut keyakinan tertentu mengenai adanya keadaan apa pun –
 - (a) masuk akal atau tidaknya keyakinan tersebut relevan dengan pertanyaan apakah D benar-benar menganutnya; Tetapi
 - (b) jika ditentukan bahwa D benar-benar memegangnya, D berhak mengandalkannya untuk tujuan ayat (3), baik
 - (i) itu salah, atau
 - (ii) (jika keliru) kesalahan tersebut wajar saja dilakukan.
3. Pasal 76(5) menetapkan: 'Tetapi ayat (4)(b) tidak memungkinkan D untuk mengandalkan keyakinan salah apa pun yang muncul secara sukarela.'
4. 'Tingkat kekerasan yang digunakan oleh D tidak dapat dianggap masuk akal dalam situasi seperti yang diyakini D jika tidak proporsional dalam situasi tersebut.' (s 76(6)).
5. Pasal 76(7) menyatakan bahwa:
Dalam memutuskan pertanyaan yang disebutkan dalam ayat (3) pertimbangan berikut harus dipertimbangkan (sepanjang relevan dengan keadaan kasus tersebut):
 - (a) bahwa seseorang yang bertindak untuk tujuan yang sah mungkin tidak dapat mempertimbangkan dengan tepat tindakan yang diperlukan; Dan
 - (b) bahwa bukti bahwa seseorang telah melakukan apa yang secara naluriah dianggap perlu oleh orang tersebut untuk tujuan yang sah merupakan bukti kuat bahwa hanya tindakan wajar yang diambil oleh orang tersebut untuk tujuan tersebut.

Apakah terdakwa memiliki tujuan yang sah ditentukan oleh pasal 76(10)(a):
pembelaan diri menurut hukum adat dan pencegahan kejahatan menurut undang-

undang dan melakukan atau membantu penangkapan berdasarkan Undang-undang tahun 1967.

6. Para pengadil fakta tidak terbatas pada dua alat bukti ini (s 76(8)).
7. Ayat (10) antara lain mengatur: ' (b) rujukan pada pembelaan diri mencakup tindakan membela orang lain; dan (c) rujukan pada tingkat gaya yang digunakan mengacu pada jenis dan jumlah gaya yang digunakan.'

Semua poin ini dibahas di bawah ini. Misalnya, poin dalam s 76(5) tentang kesalahan mabuk dibahas di bawah pada bagian (g) Kesalahan fakta. Pembaca akan segera mengetahui bahwa undang-undang tahun 2008 tidak menetapkan undang-undang baru namun mengkodifikasikan kasus hukum. Bahkan istilah 'timbang dengan baik' dalam pasal 76(7)(a) diambil dari kasus-kasus preseden. Namun, Pasal 76 hanyalah sebagian kodifikasi mengenai pertahanan diri dan pencegahan kejahatan; terlebih lagi, untuk memahami Pasal 76 kita perlu memahami hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Batasan bela diri dan pencegahan kejahatan

Dapat dikatakan bahwa pembelaan diri dan pencegahan kejahatan bukanlah pembelaan yang sebenarnya, tetapi, seperti pembelaan atas persetujuan, merupakan kegagalan untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum. Perbuatannya dibenarkan dan tidak ada *actus reus*. Oleh karena itu, tidak ada kejahatan. Dasar kebijakan pertahanan adalah untuk menghambat perilaku agresif. Pengadilan Banding dalam *Abraham* [1973] 1 WLR 1270 menekankan bahwa hakim harus menunjukkan kepada juri bahwa meskipun pembelaan diri disebut pembelaan, beban tetap ada pada penuntut untuk membuktikannya. Otoritas lain juga melakukan hal serupa, misalnya, *Khan* [1995] Kejahatan LR 78 (CA). Otoritas Dewan Penasihat adalah *Chan Kau v R* [1955] AC 206. Untuk Australia lihat *Viro* (1978) 52 ALJR 418 (HCA). Hakim harus mengarahkan juri pada pembelaan ini jika faktanya mendukung meskipun terdakwa tidak berusaha untuk mengandalkannya: *DPP v Bailey* [1995] 1 Cr App R 257 (PC).

Berdasarkan pasal 3(1) Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1967:

Seseorang dapat menggunakan kekerasan yang wajar dalam situasi pencegahan kejahatan, atau dalam melakukan atau membantu penangkapan yang sah terhadap pelanggar atau tersangka pelanggar atau terhadap orang-orang yang bebas secara tidak sah.

Aturan ini menggantikan hukum adat. Pembelaan terhadap diri sendiri dan orang lain serta terhadap harta benda juga merupakan pembelaan, kali ini dalam hukum umum. Pembelaan ini mungkin memiliki batasan yang sama dengan pasal 3, kecuali mungkin pembelaan *common law* dibatasi pada pembelaan terhadap penggunaan kekuatan, sedangkan pasal 3 tidak. Tingkat kekuatan yang sah dalam membela diri sama dengan yang berdasarkan Undang-Undang: *McInnes* (1971) 55 Cr App R 551 dan *Clegg* [1995] 1 AC 482 (HL). Dalam kasus terakhir Lord Lloyd menolak pandangan Lord Diplock dalam Referensi berdasarkan s 48A Undang-Undang Banding Pidana (Irlandia Utara) tahun 1968 (No. 1 tahun 1975) [1977] AC 105 bahwa seseorang yang menggunakan kekerasan untuk membela diri adalah lebih tercela daripada orang yang memanfaatkannya untuk mencegah kejahatan. Pembelaan diri dalam banyak keadaan bisa termasuk dalam s 3, dan kedua pembelaan

tersebut tersedia berdasarkan fakta yang sama: Cousins [1982] QB 526 dan Clegg. Ini adalah alasan lain untuk menolak pandangan Lord Diplock. Jika kekerasan yang digunakan tidak untuk pencegahan kejahatan, seperti ketika terdakwa membela diri terhadap serangan anak di bawah 10 tahun atau orang gila, maka pasal 3 tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, tidak ada tumpang tindih total. Perlu dicatat bahwa untuk melakukan pembelaan diri, serangan yang dibela oleh terdakwa tidak harus merupakan serangan yang melanggar hukum: menurut Ward LJ di *Re A (Anak-anak) (Si Kembar Siam: Perawatan Medis)* [2001] Fam 147 (CA), kasus perdata. Pengadilan Banding (Divisi Kriminal) di Kelleher [2003] EWCA Crim 3525, memang menyatakan bahwa harus ada perbuatan melawan hukum atau pidana yang menjadi dasar pembelaan diri para terdakwa, namun tidak mempertimbangkan kedudukannya, misalnya, anak-anak di bawah 10 tahun. Karena penanaman benih jagung hasil rekayasa genetika adalah halal, maka para terdakwa tidak mempunyai pembelaan. ('Melanggar hukum' di sini berarti menyiksa.)

Juri berhak untuk mempertimbangkan karakteristik fisik terdakwa dalam menilai apakah reaksinya masuk akal: Martin [2003] QB 1 (CA), kasus mantan Norfolk yang menembak seorang pencuri yang melarikan diri dari belakang, membunuhnya. Misalnya, fakta bahwa terdakwa lemah atau kecil atau kedua-duanya, sedangkan korban kuat atau tinggi atau keduanya dapat dipertimbangkan. Pengadilan menambahkan bahwa kondisi kejiwaan dapat dipertimbangkan 'dalam keadaan luar biasa'. Keadaan apa yang terjadi masih belum ditentukan. Terdakwa di Martin menderita paranoia tetapi kondisi kejiwaan tersebut tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, hukumnya tidak pasti.

- (a) Penafsiran pasal 3. Kekuatan harus digunakan untuk tujuan yang ditentukan. Contohnya adalah Renouf [1986] 2 Semua ER 449 (CA). Terdakwa didakwa mengemudi sembarangan. Dia telah memaksa sebuah kendaraan keluar dari jalan dan menabraknya setelah penghuninya menyerangnya dan merusak mobilnya. Dia dianggap bertindak untuk membantu penangkapan pelanggar yang sah. Apakah pemaksaan itu masuk akal merupakan pertanyaan bagi juri. Poin konstruksi lainnya adalah bahwa s 3 terbatas pada penggunaan kekuatan. Tidak ada definisi 'kekuatan'. Istilah ini sepertinya memerlukan semacam perilaku kekerasan. Oleh karena itu, menulis dengan ujung runcing pada tiang beton bukanlah gaya yang dipaksakan dalam s 3: *Blake v DPP* [1993] Crim LR 586. Bagaimana dengan menggunakan sesuatu yang lebih kecil dari gaya? Salah satu jawabannya adalah bahwa tindakan seperti itu termasuk dalam hukum umum dan pada prinsipnya jika kekerasan diperbolehkan, maka tindakan yang tidak diperbolehkan juga boleh dilakukan. Sebuah contoh yang diberikan oleh Jeremy Horder dalam 'Self-defence, necessity and force: Understanding the Relationship' (1998) 11 *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 143 at 144 adalah sebagai berikut: 'Jika satu-satunya cara saya dapat menghentikan pembunuhan terhadap calon penyerang jika saya melepaskan gas beracun ke dalam ruangan yang akan dilaluinya untuk mencapai saya, maka saya berhak untuk mengambil langkah tersebut yang dianggap perlu dan proporsional, meskipun tidak melibatkan penggunaan kekerasan.' Dalam Cousins, di atas, Milmo J mengatakan: 'Jika kekerasan

diperbolehkan, sesuatu yang lebih kecil, misalnya ancaman, juga harus diperbolehkan. Dalam *DPP v Bayer* [2004] 1 WLR 2856 (DC) para terdakwa merantai diri mereka ke traktor untuk mencegah pengeboran jagung hasil rekayasa genetika. Pengadilan menyarankan kepada obeter bahwa mereka mungkin mendapatkan pembelaan jika elemen pembelaan properti lainnya telah dipenuhi. Namun demikian, hukum tidak dapat dikatakan telah diselesaikan.

- (b) Penafsiran pembelaan diri. Bela diri mencakup perlindungan orang lain: *Duffy* [1967] 1 QB 63 (CCA). Hal ini juga mencakup perlindungan properti: *Hussey* (1924) 18 Cr App R 160 (CCA): pelanggar dapat dibunuh untuk mempertahankan rumahnya (tetapi kekerasan yang dilakukan harus masuk akal). Terdakwa menembak dan melukai dua teman induk semangnya, yang mencoba masuk ke kamarnya untuk mengusirnya secara ilegal. Seandainya fakta-fakta tersebut terjadi hari ini, teman-teman tersebut akan bersalah setidaknya atas dua pelanggaran dan oleh karena itu terdakwa akan bertindak dalam pencegahan kejahatan. Misalnya, seseorang mungkin membunuh anjing orang lain yang mengancam orang atau harta benda orang lain. Dalam *Workman v Cowper* [1961] 2 QB 143 (DC) terdakwa membunuh seekor anjing pemburu yang berkeliaran liar di lahan umum yang terdapat domba. Anjing itu tidak mengkhawatirkan domba-dombanya, tetapi saat itu sedang musim beranak. Dalam *Faraj* [2007] EWCA Crim 1033 dinyatakan bahwa seorang penghuni rumah dapat mengandalkan pertahanan diri untuk menahan pencuri. Faktanya, tersangka maling adalah seorang tukang reparasi gas. Lihat (g) di bawah untuk mengetahui kesalahan faktanya. Yang juga termasuk di dalamnya adalah mencegah pelanggaran, pelanggaran perdamaian dan melarikan diri dari penjara yang melanggar hukum. Tindakan membela diri tidak harus terjadi secara spontan: Referensi Jaksa Agung (No. 2 Tahun 1983) [1984] QB 456, disetujui dalam *Beckford v R* [1998] AC 130. Oleh karena itu, terdakwa dapat mempersiapkan diri untuk menolak serangan jika hal itu terjadi. serangan akan segera dimulai. Proposisi ini dapat memberikan pembelaan bagi perempuan yang mengalami kekerasan karena takut akan kekerasan lebih lanjut, asalkan serangan tersebut diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, jika pelaku sedang tidur, serangan tidak akan terjadi. Lord Griffiths di *Beckford* menekankan perlunya tindakan segera. Hukum Irlandia Utara juga sama. Persyaratan segera (atau kesegeraan) berarti bahwa masyarakat dapat 'mendapatkan serangan terlebih dahulu' jauh sebelum terjadinya serangan. Terdakwa tidak akan bertindak untuk membela diri jika ia menciptakan situasi berbahaya yang mana ia ingin menggunakan pembelaannya. Dengan kata lain, pembelaan dikesampingkan ketika terdakwa membujuk korban untuk menyerangnya. Dalam *Malnik v DPP* [1989] Crim LR 451 terdakwa hendak menemui seseorang yang diyakininya telah mencuri mobil milik temannya. Karena tersangka pencurinya melakukan kekerasan, maka terdakwa membawa cambuk beras, yaitu senjata yang digunakan dalam seni bela diri oriental. Dia ditangkap sebelum sampai di rumah tersangka pencuri. Pengadilan menolak anggapan bahwa ia dibenarkan membawa senjata karena takut diserang. Dialah yang

menciptakan situasi bahaya. Kasus ini disetujui dalam Salih [2007] EWCA Crim 2750. Hooper LJ setuju dengan Bingham LJ dalam *Malnik v DPP* bahwa 'kebijakan hukum' melarang mempersenjatai diri dengan senjata ofensif dan pengecualiannya sempit. Persyaratan untuk segera melakukan tindakan adalah salah satu alasan mengapa istri yang dianiaya mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembelaan ini. Menikam pasangan yang sedang tidur tidak menunjukkan situasi bahaya yang akan terjadi. Kesulitan lain bagi orang-orang tersebut adalah tingkat kekerasan yang mungkin berlebihan. Masalah ini dibahas pada (c) di bawah.

- (c) Orang yang diserang tidak mempunyai kewajiban untuk mundur: Julien [1969] 1 WLR 839. Dalam *Bird* [1985] 2 All ER 513, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu menunjukkan keengganan untuk mundur. berjuang untuk mendapatkan pertahanan ini. Apakah terdakwa memang mundur atau menunjukkan keengganan untuk melawan merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan: Referensi berdasarkan pasal 48A Undang-Undang Banding Pidana (Irlandia Utara) tahun 1968 (No. 1 tahun 1975), di atas, dan *Duffy v Kepala Polisi Polisi Cleveland* [2007] EWHC 3169 (Admin). Oleh karena itu, upaya untuk menarik diri merupakan bukti bahwa terdakwa bertindak wajar.
- (d) Beban pembuktian ada pada penuntut umum: *Lobell* [1957] 1 QB 547. Terdakwa memikul beban pembuktian. Sekalipun terdakwa tidak bergantung pada pembelaan, jika faktanya menunjukkan hal tersebut maka hakim harus mengajukannya kepada juri.
- (e) Tingkat kekuatan. Berdasarkan pasal 3 dan common law, kekuatan yang digunakan harus (pada kenyataannya) masuk akal dalam situasi tersebut. Apa yang masuk akal tergantung pada sifat ancamannya. Sudah lazim dikatakan bahwa kekuatan yang digunakan harus bersifat perlu dan proporsional. Tidak diperlukan proporsionalitas yang pasti: *Palmer v R* [1971] AC 814. Pengadilan Banding di *Rivolta* [1994] Crim LR 694 mengikuti *Palmer*, yang merupakan kasus Dewan Penasihat. Dalam *Oatridge* (1992) 94 Cr App R 367 Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah tanggapan terdakwa 'sepadan dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh serangan tersebut'. Apa yang secara naluriah diyakini oleh terdakwa sebagai hal yang perlu adalah bukti dari kewajaran kekerasan yang dilakukan: *Whyte* [1987] 3 Semua ER 416. Jika terdakwa menggunakan kekerasan yang berlebihan dan membunuh padahal tidak ada orang yang berakal sehat yang akan melakukannya, maka ia bersalah melakukan pembunuhan (jika ia memiliki niat jahat sebelumnya): *Palmer v R*, di atas. Pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri secara berlebihan terkadang dianggap tidak seserius pembunuhan yang sebenarnya, namun akibatnya bukanlah pembunuhan yang tidak direncanakan, melainkan pembunuhan. Ada beberapa seruan untuk reformasi undang-undang ini. House of Lords di *Clegg* menolak kesempatan untuk menyatakan bahwa pembunuhan untuk membela diri adalah pembunuhan tidak berencana. Pertanyaan mengenai kewajaran bagi juri adalah: Referensi berdasarkan pasal 48A; *Sepupu*, di atas. Dalam *Cousins* dikatakan bahwa ancaman kekerasan mungkin masuk akal, padahal kekerasan tidak masuk akal. Seperti

yang diadakan di Clegg, ketika bahaya telah berlalu maka tidak perlu lagi menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan yang digunakan bukan untuk membela diri atau mencegah kejahatan, melainkan ilegal. Berdasarkan fakta Clegg, bahaya telah berlalu dan terdakwa tidak bertindak untuk membela orang lain atau untuk mencegah kejahatan kematian karena mengemudi yang berbahaya. Asalkan terdakwa menggunakan kekerasan yang wajar, tidak menjadi masalah apakah terdakwa dalam keadaan ketakutan atau tenang. Lihat juga pembahasan Pasal 2 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada 'Kesimpulan' di bawah.

- (f) Pembelaan diri dan tekanan keadaan. Kedua pertahanan tersebut didasarkan pada ancaman. Jika terdakwa mengambil pisau dan menggunakannya untuk mencegah dirinya dibunuh, maka ia bertindak untuk membela diri dan berada di bawah pengaruh tekanan keadaan. Pembelaan diri terbatas pada penggunaan kekuatan, sedangkan paksaan tersedia untuk sebagian besar pelanggaran. Oleh karena itu, jika terdakwa tidak menggunakan kekerasan, maka paksaan keadaan merupakan pembelaan yang mungkin dilakukan. Pembelaan diri adalah pembelaan terhadap semua kejahatan, meskipun Pengadilan Banding dalam Symonds [1998] Crim LR 280 mengalami kesulitan dengan konsep pembelaan diri yang diterapkan di luar bidang pelanggaran terhadap orang tersebut (di sini, pelanggaran yang mendorong), tetapi paksaan keadaan bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan. Dalam paksaan, kerugian yang diancam harus berupa kematian atau cedera serius. Untuk membela diri, terdakwa hanya boleh menggunakan kekuatan yang masuk akal, sedangkan ujiannya mungkin lebih tinggi jika ada keadaan yang memaksa: apakah terdakwa ini tidak memenuhi standar seseorang yang memiliki ketegasan yang masuk akal? Anehnya, ujian dimana terdakwa tidak perlu menggunakan kekerasan (paksaan) lebih ketat dibandingkan ujian dimana dia menggunakan kekerasan (bela diri). Proposisi ini berlaku juga untuk poin berikutnya. Tes untuk kesalahan juga berbeda. Paksaan keadaan memerlukan keyakinan yang masuk akal. Perbedaan ini dapat menimbulkan putusan yang berbeda. Ambil variasi dari fakta Symonds. Asumsikan bahwa terdakwa keliru dengan apa yang dilakukan korban dan untuk melarikan diri ia mengarahkan mobilnya ke arah korban. Pertahanan adalah salah satu pertahanan diri. Kesalahannya, jika jujur, menimbulkan pembelaan. Akan tetapi, jika untuk melarikan diri, terdakwa melarikan diri dalam keadaan berbahaya, maka pembelaan dilakukan dengan menggunakan paksaan. Kesalahan yang tidak masuk akal bukanlah pembelaan. Hasilnya berbeda tergantung pada pertahanannya. Pengadilan Banding menyatakan bahwa pembelaan diri dan tekanan keadaan memiliki unsur yang sama, namun dalam kaitannya dengan keyakinan yang salah, keduanya tidak memiliki unsur yang sama (walaupun undang-undang tampaknya berubah). Terlebih lagi, paksaan bukanlah pembelaan terhadap pembunuhan, percobaan pembunuhan, menjadi pelengkap pembunuhan dan beberapa bentuk pengkhianatan; ancaman paksaan harus berupa kematian atau luka berat; dan tidak ada pembelaan terhadap paksaan jika terdakwa secara sukarela

- menempatkan dirinya pada posisi yang memungkinkan kelompok kriminal melakukan tekanan kekerasan terhadapnya. Kesalahan dalam membela diri dibahas selanjutnya.
- (g) Kesalahan fakta. Terdakwa harus diadili berdasarkan fakta yang ia anggap benar. Tes ini subjektif. Mengabaikan bagian undang-undang ini merupakan suatu penyesatan: Duffy, di atas. Jika terdakwa menggunakan kekerasan yang berlebihan karena ia melakukan kesalahan fakta, maka ia mempunyai pembelaan jika ia ingin melakukan pembelaan atas fakta-fakta yang ia yakini. Tidak perlu ada kesalahan yang masuk akal: Williams [1987] 3 All ER 411, Jackson [1984] Crim LR 674, Fisher [1987] Crim LR 334 (CA), Beckford, di atas Morrow [1994] Crim LR 58, di mana kasus pembelaan diri diterapkan pada pembelaan hukum untuk pencegahan kejahatan, dan Faraj, di atas, dimana hukum tentang kesalahan fakta diterapkan pada pembelaan properti. Lord Griffiths di Beckford menekankan bahwa mendasarkan hukum pembelaan diri yang salah pada keyakinan yang jujur dan bukan pada keyakinan yang masuk akal tidak akan membiarkan pembelaan palsu berhasil, karena para juri mahir dalam membedakan kebenaran dari kepalsuan. Pengadilan Banding memutuskan di Oatridge, di atas, bahwa dalam kasus kesalahan fakta yang jujur dalam pembelaan diri (dalam hal ini fakta bahwa terdakwa percaya bahwa pasangannya akan membunuhnya – dia telah menganiayanya sebelumnya) hakim harus mengarahkan juri mengenai apakah tanggapan korban sepadan dengan serangan yang diyakininya dihadapinya. Pemaksaan tersebut harus tetap masuk akal (secara obyektif) dalam keadaan yang diyakini (secara subyektif) ada oleh terdakwa: Owino [1996] 2 Cr App R 128 (CA). Apa pun yang dikatakan oleh Pengadilan Banding dalam Scarlett [1993] 4 Semua ER 629 yang menyatakan bahwa terdakwa berhak menggunakan kekerasan karena menurutnya wajar adalah tidak benar. Owino diikuti di Hughes [1995] Crim LR 957 (CA). Pengadilan memutuskan bahwa hakim pengadilan harus menjelaskan kepada juri akibat dari keyakinan yang salah. Undang-undangnya adalah bahwa seorang terdakwa yang keliru bahwa ia akan diserang, berhak untuk diadili berdasarkan fakta-fakta yang diyakininya ada, tetapi ia tidak boleh menggunakan kekerasan yang lebih dari yang wajar, kewajaran dinilai berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. dugaan tersangka memang ada. Sejak Beldam LJ memberikan penilaian pada Scarlett dan Hughes, Scarlett kini dianggap salah. Pengadilan Banding menyatakan hal serupa dalam DPP v Armstrong-Braun (1998) 163 JP 271. Meskipun fakta-fakta harus dinilai berdasarkan keyakinan terdakwa bahwa fakta-fakta tersebut ada, Pengadilan Tinggi dalam Martin [2003] QB 1 menyatakan bahwa persepsinya mengenai bahaya harus dinilai secara obyektif. Fakta bahwa terdakwa karena dia memiliki kepribadian paranoid melihat bahaya padahal tidak ada adalah tidak relevan. Pengadilan mengesahkan pertanyaan tentang hukum yang memiliki kepentingan umum: 'Apakah bukti ahli psikiatris dapat diterima sehubungan dengan persepsi terdakwa mengenai bahaya yang dihadapinya?' Sayangnya izin untuk mengajukan banding ditolak. Namun, Dewan Penasihat menyarankan dalam Shaw v R [2001] 1 WLR 1519 bahwa juri harus mempertimbangkan 'keadaan dan bahaya sebagaimana yang sejujurnya diyakini oleh

[terdakwa] 'Ada benturan otoritas. Ada anggapan bahwa Dewan Penasihat benar, karena tidak ada perbedaan antara 'fakta' dan 'bahaya'. Kontras antara Williams dan Clegg harus diperhatikan. Jika terdakwa salah dalam menentukan perlunya pembelaan diri, dia dibebaskan: Williams. Namun, jika terdakwa keliru mengenai tingkat kekerasan, dia bersalah, bahkan atas pembunuhan: Clegg. Sehubungan dengan situasi terakhir, perbandingan dengan provokasi adalah pelajaran. Dalam pembelaan diri, reaksi berlebihan akan menghasilkan rasa bersalah, bukan pembebasan, sedangkan dalam provokasi, reaksi berlebihan akan menghasilkan pembebasan atas tuduhan pembunuhan. Karena pembelaan yang berhasil atas provokasi mengarah pada hukuman atas pembunuhan yang tidak direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa ketika terdakwa melakukan pembunuhan untuk membela diri atau orang lain tetapi menggunakan kekerasan yang berlebihan, hal ini juga termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Namun, mungkin saja pembunuhan apa pun demi membela harta benda tidak dapat dibenarkan.

Empat poin terakhir mengenai kesalahan fakta harus dibuat. Pertama, 'Jika terdakwa menerapkan kekerasan kepada petugas polisi atau pengadilan, yang merupakan hal yang masuk akal jika orang tersebut bukan petugas polisi atau pengadilan, dan terdakwa yakin bahwa dia bukan petugas polisi atau pengadilan, maka meskipun keyakinannya tidak masuk akal, dia mempunyai hak untuk melakukan kekerasan terhadap polisi atau petugas pengadilan. pembelaan diri yang baik': *Blackburn v Bowering* [1994] 3 Semua ER 380 (CA, Divisi Sipil). Kedua, jika kesalahan disebabkan oleh mabuk, maka terdakwa tidak mempunyai pembelaan: *O'Grady* [1987] 3 All ER 420, yang disetujui dalam *Hatton* [2006] 1 Cr App R 247. Ketiga, jika terdakwa tidak percaya bahwa dia bertindak wajar dalam mencegah kejahatan atau membela diri, tetapi pada kenyataannya ada keadaan yang akan memberinya pembelaan, seandainya dia mengetahuinya, dia tidak memiliki pembelaan, untuk prinsip dalam *Dadson* (1850) 4 Cox CC 358 dijelaskan dalam Bab 2 berlaku.

Keempat, meskipun permasalahan ini belum diselesaikan secara meyakinkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, hukum Inggris yang berlaku saat ini yang ditetapkan oleh Williams mungkin tidak sejalan dengan Pasal 2 Konvensi Eropa, yang ditafsirkan oleh Pengadilan bahwa keyakinan terdakwa harus didasarkan pada alasan yang masuk akal: lihat *McCann v UK* (1995) 21 EHRR 97, *Andronicou v Cyprus* (1998) 25 EHRR 491 dan *Gul v Turkey* (2002) 34 EHRR 28. Pengadilan Eropa dalam *Brady v UK* (2001) 3 April berkesempatan untuk mempertimbangkan permasalahan ini namun nampaknya Pengadilan gagal menyadari adanya perbedaan. Hal yang sama harus dikatakan tentang *Caraher v UK* (2000) pada 11 Januari, sebuah keputusan penerimaan, dan *Bubbins v UK*, 17 Juni 2005, di mana persyaratan bahwa kekerasan yang digunakan oleh polisi harus 'mutlak diperlukan' dipenuhi oleh keyakinan jujur seorang polisi bahwa ada 'risiko nyata dan langsung terhadap nyawanya dan nyawa rekan-rekannya'. Collins J di Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa hukum Inggris dan Pasal 2 adalah sama dalam menilai kewajaran pemaksaan: R (tentang

Penerapan Bennett) v H.M. Pemeriksa untuk Inner South London (2006) 170 JP 109. Ia menambahkan, Pasal 2 berlaku untuk pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja. Perlu dicatat bahwa Pasal 2 dibatasi pada penggunaan kekuatan fatal untuk membela diri. Akan menjadi tidak masuk akal jika aturan yang berbeda diterapkan pada penggunaan kekuatan yang tidak fatal.

- (h) Aturan yang sama yang berlaku bagi warga negara biasa mengatur perilaku pasukan keamanan: Clegg. Lord Lloyd mencatat bahwa tidak ada pembelaan terhadap perintah atasan dalam hukum pidana dan menciptakan pengecualian bagi angkatan bersenjata berarti membuat undang-undang baru. Demikian pula, Pengadilan Tinggi dalam R (Bennett) v HM Koroner untuk Inner South London menyatakan bahwa Pasal 2 ECHR tidak hanya berlaku bagi aparat negara seperti petugas polisi tetapi juga bagi anggota masyarakat. Collins J berpendapat bahwa uji kewajaran dalam hukum bela diri Inggris sama dengan yang ditemukan dalam Pasal 2 tetapi sebagaimana dinyatakan pada (g), diktum ini patut dipertanyakan.
- (i) Pengadilan Banding memutuskan dalam Jones v Gloucestershire Crown Prosecution Service [2005] QB 259 bahwa 'kejahatan' dalam pasal 3 berarti suatu tindakan, kelalaian atau keadaan dan unsur mental yang merupakan kejahatan dalam hukum domestik Inggris. Oleh karena itu, istilah tersebut tidak mencakup sesuatu yang merupakan kejahatan di tempat lain atau dalam hukum internasional tetapi bukan merupakan kejahatan di Inggris dan Wales. Kejahatan internasional berupa agresi terhadap negara asing bukanlah pelanggaran dalam hukum Inggris. Oleh karena itu, agresi bukanlah sebuah 'kejahatan' untuk tujuan pasal 3, dan pihak yang mengajukan banding tidak dapat menggunakan pembelaan terhadap tuduhan yang timbul dari upaya menghentikan serangan Inggris dan AS terhadap Irak. House of Lords menolak banding dengan alasan yang sama [2006] UKHL 16. Obiter menyatakan bahwa meskipun kejahatan agresi ada dalam hukum domestik Inggris, para terdakwa tidak akan dapat mengandalkan pembelaan untuk mencegah kejahatan. karena menggunakan kekuatan untuk menghalangi kendaraan militer tidak akan mencegah kejahatan agresi.
- (j) Di Australia, seseorang tampaknya dapat membela dirinya sendiri, orang lain, dan harta bendanya dari serangan yang sah: Zecevic (1987) 71 ALR 641 (HCA). Aturan serupa juga berlaku dalam provokasi. Hukum Inggris masih harus dibuat. Dalam Re A [2001] Fam 147 Ward LJ menyatakan bahwa membunuh salah satu kembar siam adalah sah jika keberadaannya menyeret kembaran lainnya menuju kematian: jelas 'serangan' kembaran lainnya adalah sah. Ward LJ membandingkannya dengan pembunuhan seorang anak laki-laki berusia enam tahun yang menembak orang di taman bermain sekolah. Jika hukum Inggris menuntut serangan yang melanggar hukum, seseorang tidak akan mempunyai pembelaan diri terhadap tipe orang yang disebutkan sebelumnya, orang gila, automaton, dan mereka yang berusia di bawah 10 tahun. Namun, DPP v Bayer memiliki efek sebaliknya. Klaim pembelaan harta benda para tergugat gagal karena mereka tidak melakukan pembelaan terhadap perilaku

yang melanggar hukum. Tidak ada tindakan kriminal atau pidana dalam pengeboran benih jagung hasil rekayasa genetika.

- (k) Zecevic juga memberikan wewenang kepada Australia untuk menyatakan bahwa terdakwa 'tidak boleh menciptakan situasi darurat yang berkelanjutan dan memicu serangan yang sah terhadap dirinya sendiri namun tetap menuntut . . . hak untuk membela diri terhadap serangan itu'. Hukumnya berbeda dalam provokasi. Hukum di Irlandia Utara sama dengan yang dinyatakan dalam Zecevic: Browne [1983] NI 96. Namun, jika terdakwa membunuh korban dalam suatu pertengkaran yang disertai kekerasan, dia (terdakwa) dapat mengandalkan pembelaan jika reaksi korban tidak proporsional. terhadap perilaku terdakwa: Rashford [2006] Crim LR 528 (CA). Tidak diketahui secara pasti apakah Rashford telah menyelesaikan hukum Inggris mengenai hal ini tetapi tampaknya hal itu telah dilakukan.
- (l) Fakta bahwa terdakwa mempunyai pembelaan untuk membela diri tidak mencegahnya kehilangan tuntutan perdata atas kerugian sehubungan dengan perbuatan yang sama. Lihat *Revill v Newbery* [1996] 2 WLR 239.
- (m) Pembelaan terdakwa berakhir ketika korbannya tidak lagi mengancamnya. Jika ada insiden kemarahan di jalan, kedua pengemudi keluar dari mobilnya dan salah satu dari mereka mengancam yang lain dengan kekerasan, maka terdakwa berhak untuk membela diri. Jika orang pertama kemudian pergi, maka terdakwa tidak bertindak untuk membela diri jika ia mengikutinya untuk mengusirnya keluar dari jalan raya.
- (n) Tidak menjadi soal apakah terdakwa bertindak dengan tenang atau dalam keadaan teror. Persoalannya tetap pada apakah tindakannya masuk akal.
- (o) Pasal 3(1) berdampak pada hukum perdata dan pidana. Namun hukum perdata berbeda bukan hanya dalam hal standar pembuktian tetapi juga beban pembuktiannya. Terdakwa dalam hukum perdata harus membuktikan bahwa dia memiliki pembelaan: *Ashley v Kepala Polisi Sussex* (2006) *The Times*, 30 Agustus. Pengadilan Tinggi juga memutuskan, berbeda dengan hukum pidana, bahwa kesalahan mengenai apakah terdakwa harus bertindak dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan alasan yang masuk akal. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum perdata atas kesalahan dalam pembelaan diri lebih mirip dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia seperti yang ditafsirkan oleh McCann dibandingkan dengan hukum pidana!

Undang-undang saat ini dan usulan reformasi kesalahan fakta dan keracunan dibahas dalam judul tersebut.

Karena jika diperlukan, kata-kata undang-undang mungkin menyembunyikan pembelaan diri. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Senjata Api tahun 1968 '[Ini] merupakan pelanggaran bagi seseorang yang memiliki senjata api apa pun dengan niat untuk membahayakan kehidupan 'Meskipun tidak ada penyebutan secara tegas, pengacara penuntut mengakui dalam *Georgiades* [1989] 1 WLR 759 (CA) bahwa tindakan yang membahayakan nyawa untuk tujuan yang sah adalah pembelaan bagi terdakwa, seperti ketika terdakwa mengangkat tembakan pendek. pistol setinggi pinggang mengira dia akan diserang.

Perhatikan bahwa pemaksaan yang menyebabkan tindak pidana yang sederhana menimbulkan kerugian pidana termasuk dalam pembelaan yang disebutkan dalam Bab 18, yaitu alasan yang sah, sedangkan pemaksaan yang menyebabkan tindak pidana yang berat termasuk dalam pembelaan diri.

Rancangan KUHP (UU No. 177 Tahun 1989)

Komisi Hukum mengusulkan untuk menyatakan kembali pembelaan diri dengan cara berikut.

Pasal 44(1)

Seseorang tidak melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekerasan yang, dalam keadaan yang ada atau yang diyakininya ada, diperlukan dan beralasan:

- (a) untuk mencegah atau mengakhiri kejahatan, atau untuk melakukan atau membantu penangkapan yang sah terhadap pelaku atau tersangka pelaku atau terhadap orang yang bebas secara tidak sah;
- (b) untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran perdamaian;
- (c) untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari kekerasan yang melanggar hukum atau kerugian pribadi yang melanggar hukum;
- (d) untuk mencegah atau menghentikan penahanan yang tidak sah terhadap dirinya sendiri atau orang lain;
- (e) untuk melindungi harta benda (baik milik dirinya atau orang lain) dari perampasan, perusakan atau kerusakan yang melanggar hukum; atau
- (f) untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran terhadap orang atau propertinya.

Laporan Komisi Hukum No. 218, Perundang-undangan KUHP – Pelanggaran terhadap Pribadi dan Asas Umum, 1993, yang dapat dilihat di bawah, menolak persyaratan terpisah bahwa kekerasan harus segera diperlukan. Jika persyaratan untuk segera dihapuskan, orang yang dipukuli dan membunuh pasangannya yang sedang tidur atau mabuk mungkin akan mendapatkan pembelaan ini. Laporan tahun 1993 juga menghapus referensi dalam kata pembuka pasal 44(1) pada 'keadaan yang ada', sehingga memulihkan prinsip dalam Dadson (1850) 4 Cox CC 358.

Pasal 44(2)

Dalam bagian ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain, 'pemaksaan' mencakup, selain pemaksaan terhadap seseorang:

- (a) kekerasan terhadap harta benda;
- (b) ancaman kekerasan terhadap orang atau harta benda; Dan
- (c) penahanan seseorang tanpa menggunakan kekerasan.

Pasal 44(3)

Untuk tujuan bagian ini, suatu tindakan adalah 'melanggar hukum' meskipun seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran sehubungan dengan tindakan tersebut akan dibebaskan hanya dengan alasan bahwa:

- (a) usianya di bawah sepuluh tahun; atau
- (b) ia tidak mempunyai kesalahan yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran atau yakin bahwa ada keadaan yang dikecualikan; atau

- (c) ia bertindak berdasarkan kecurigaan yang beralasan; atau
- (d) ia bertindak di bawah tekanan, baik karena ancaman atau karena keadaan; atau
- (e) ia berada dalam keadaan otomatisme atau menderita penyakit jiwa berat atau cacat jiwa berat.

Pasal 44(4)

Tanpa mengesampingkan ayat (1), seseorang yang meyakini adanya keadaan yang membenarkan atau membenarkan penggunaan kekerasan berdasarkan ayat tersebut tidak mempunyai pembelaan jika:

- (a) ia mengetahui bahwa kekerasan digunakan terhadap seorang polisi atau orang yang membantu seorang polisi; dan
- (b) polisi sedang bertindak dalam melaksanakan tugasnya, kecuali ia yakin akan adanya paksaan segera diperlukan untuk mencegah kerugian pribadi terhadap dirinya sendiri atau orang lain.

(Hal ini sesuai dengan undang-undang saat ini, otoritas terbaru adalah Ball (1990) 90 Cr App R 378 (CA). Dengan memasukkan undang-undang tersebut ke dalam bentuk undang-undang, Komisi Hukum akan memberikan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana berperilaku dalam situasi kekuatan potensial atau aktual.)

Klausul 44(5)

Seseorang tidak melakukan tindak pidana dengan segera melakukan perbuatan persiapan untuk penggunaan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Klausul 44(6)

Ayat (1) tidak berlaku apabila seseorang menyebabkan tindakan yang melanggar hukum atau keadaan yang melanggar hukum dengan tujuan menggunakan kekerasan untuk menolak atau menghentikannya; tetapi ayat (1) dapat berlaku meskipun alasan untuk menggunakan kekerasan hanya timbul karena ia melakukan sesuatu yang boleh dilakukannya secara sah, dengan mengetahui bahwa hal tersebut mungkin timbul.

Klausul 44(7)

Fakta bahwa seseorang mempunyai kesempatan untuk mundur sebelum menggunakan kekerasan harus diperhitungkan, bersama dengan bukti lain yang relevan, dalam menentukan apakah penggunaan kekerasan diperlukan dan masuk akal.

Klausul 44(8)

Ancaman kekerasan mungkin masuk akal meskipun penggunaan kekerasan tidak masuk akal.

Klausul 44(9)

Bagian ini tidak mengurangi sifat umum dari bagian 185 (kerusakan pidana: perlindungan orang atau harta benda) atau pembelaan lainnya.

Ketentuan-ketentuan ini sebagian besar menyatakan kembali undang-undang tersebut. Namun, satu perbedaan ditemukan di cll 55 dan 59. Jika terdakwa membunuh dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan, maka kejahatan yang dilakukan bukan lagi pembunuhan melainkan suatu bentuk pembunuhan tidak berencana yang baru. Begitulah keadaan di Australia hingga doktrin tersebut dihapuskan pada tahun 1987. Arah Australia

dianggap terlalu rumit bagi juri. Namun, proposal bahasa Inggris tidaklah rumit. Reformasi ini juga diusulkan oleh Komite Revisi Hukum Pidana dalam Laporan Keempatbelasnya, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, serta (Nathan) Select Committee on Murder and Life Imprisonment (HL Paper 78 –1, 1989) para 89. Argumen utama yang mendukung pembunuhan tidak berencana adalah bahwa orang yang membunuh dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan tidaklah patut disalahkan secara moral seperti orang yang membunuh dan memang berniat melakukannya. Karena stigma yang melekat pada pembunuh, maka mereka yang membunuh dengan menggunakan kekuatan yang tidak masuk akal tidak boleh diklasifikasikan sebagai pembunuh. House of Lords di Clegg menilai reformasi ini tidak boleh dilakukan oleh lembaga peradilan. Lord Lloyd mengatakan bahwa masalahnya adalah mengenai hukuman wajib seumur hidup untuk pembunuhan, yang hanya dapat diselesaikan oleh Parlemen. Tentu saja ada kekhawatiran publik bahwa terlalu banyak orang yang terluka ketika bertindak membela harta benda yang dituntut.

Usulan Komisi Hukum Tahun 1993

Dalam Lapornya No. 218, Perundang-undangan KUHP Pelanggaran Terhadap Pribadi dan Prinsip Umum, 1993, Komisi Hukum merekomendasikan pernyataan kembali menurut undang-undang mengenai kapan penggunaan kekerasan dapat dibenarkan. Pasal 27(1) RUU Hukum Pidana yang dilampirkan pada Laporan ada dalam ketentuan tersebut.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang untuk tujuan-tujuan berikut ini, jika hal tersebut wajar dalam keadaan yang ia yakini, tidak merupakan suatu pelanggaran:

- (a) untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari cedera, penyerangan atau penahanan yang disebabkan oleh tindak pidana;
- (b) untuk melindungi dirinya sendiri atau (dengan wewenang orang lain itu) orang lain dari pelanggaran terhadap orang tersebut;
- (c) untuk melindungi propertinya dari perampasan, penghancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal atau dari pelanggaran atau pelanggaran;
- (d) untuk melindungi properti milik orang lain dari perampasan, penghancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal atau (dengan wewenang pihak lain) dari pelanggaran atau pelanggaran; atau
- (e) untuk mencegah kejahatan atau pelanggaran perdamaian.

Klausul ini menggabungkan undang-undang dalam Williams [1987] 3 All ER 411, menyatakan secara tegas untuk pertama kalinya bahwa kekerasan dapat digunakan terhadap properti untuk melindungi orang tersebut, dan merevisi pasal 5 Undang-Undang Kerusakan Pidana tahun 1971 agar sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1967 ini yang menyatakan bahwa pemaksaan tersebut harus wajar secara obyektif dan tidak sekedar masuk akal dari sudut pandang terdakwa. Klausul 27(1)(a)–(e) mencantumkan tujuan penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan.

Pasal ini menyatakan kembali pasal 44(1)(a)–(f) RUU KUHP dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Perlu dicatat bahwa tindakan yang sama mungkin termasuk dalam lebih dari satu kategori, misalnya, seorang terdakwa yang membela diri mencegah dilakukannya suatu pelanggaran dan melindungi dari penyerangan. Klausul 27(1)(e) layak untuk disebutkan.

Contoh yang diberikan Komisi Hukum adalah 'D melarang P yang jelas-jelas mabuk berbahaya untuk mengemudikan kendaraan bermotor milik P'. Di sini D tidak melindungi orang atau harta benda dirinya atau orang lain tetapi mencegah kejahatan. Terdapat ketentuan khusus yang memperbolehkan pembelaan terhadap tindakan non-kriminal yang dilakukan oleh orang di bawah 10 tahun, yang bertindak di bawah tekanan (keduanya), bertindak tanpa disengaja atau dalam keadaan mabuk, dan tidak waras (cl 27(3)).

Ketentuan ini diperlukan hanya apabila terdakwa mengetahui keadaannya, karena jika tidak maka ia akan diadili berdasarkan fakta-fakta yang diyakininya ada. Ada ketentuan khusus lain yang mengatur mengenai keadaan dimana terdakwa mengetahui fakta-fakta yang menjadikan perbuatan orang lain bukan pidana apabila orang lain telah melakukan kesalahan. Misalnya, terdakwa melakukan penangkapan terhadap warga negara yang sah; pihak lain tidak mengetahui hal ini dan mengira bahwa terdakwa sedang menyerang korban; dia campur tangan; terdakwa menggunakan kekerasan untuk melawan pihak lain; namun, terdakwa mengetahui bahwa pihak lain telah melakukan kesalahan. Berdasarkan pasal 27(6) reaksi terdakwa adalah sah. Komisi Hukum berpendapat: 'Perbuatan P sah hanya karena kesalahan atau dugaan P yang ternyata tidak benar. Meski begitu, D berada dalam posisi yang berpotensi menimbulkan bahaya yang tidak akan berkurang dengan cara apa pun karena kesalahan P, dan fakta bahwa D mengetahui kesalahannya tidak seharusnya menghalangi dia untuk bermain di lini pertahanan.'

Tidak ada persyaratan (terpisah) bahwa terdakwa harus tunduk atau takut akan serangan langsung. Dampaknya adalah semakin banyak perempuan korban kekerasan yang membunuh pelaku kekerasan saat tidur atau mabuk yang akan mendapatkan pembelaan ini. Klausul 29(2) mengecualikan tindakan tanggung jawab yang dilakukan segera sebelum penggunaan kekerasan seperti kepemilikan senjata api. Pasal 27(7) menghilangkan pembelaan dari orang yang dengan sengaja memprovokasi suatu serangan; namun, seorang terdakwa memiliki pembelaan saat dia menjalankan bisnisnya yang sah seperti yang diilustrasikan dalam *Beatty v Gillbanks* (1882) 9 QBD 308, kasus *Skeleton Army*. Saat ini tidak ada aturan bahwa terdakwa wajib mundur: pasal 29(4). Prinsip *Dadson* (1850) 169 ER 407 dipertahankan oleh RUU tersebut. Menurut kata-kata Komisi Hukum:

Hal ini mengikuti persyaratan agar terdakwa diadili berdasarkan keadaan-keadaan yang diyakininya, bahwa ia tidak dapat mengandalkan keadaan-keadaan yang tidak diketahuinya yang pada kenyataannya akan membenarkan perbuatan-perbuatannya yang tidak masuk akal berdasarkan fakta-fakta yang ia rasakan. Warga negara yang bereaksi secara tidak wajar terhadap keadaan tidak boleh dibebaskan dari fakta-fakta yang tidak mereka sadari.

Pemaksaan untuk melakukan atau membantu penangkapan yang sah mendapat perlakuan terpisah (cl 28). 'Force' di sel 27-29 tidak didefinisikan. Pernyataan kembali hukum mengenai penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan tidak mempengaruhi pembelaan terhadap paksaan keadaan atau kebutuhan. Oleh karena itu melukai seekor anjing yang sedang menyerang anak-anaknya dan membuat sekat api, tetap sah. Sebagaimana pembelaan terhadap provokasi mendapat kritik karena didasarkan pada jiwa laki-laki sehingga hanya

sedikit perempuan yang mampu melakukannya karena mereka tidak bereaksi dengan cara yang sama seperti laki-laki, demikian pula pembelaan untuk membela diri juga dikritik. . Komisi Reformasi Hukum Australia dalam Laporannya No. 69, *Equality before the Law: Justice for Women*, 1994, paragraf 12.2–3 menyatakan demikian.

Apa yang dianggap ‘masuk akal’ secara tradisional dinilai berdasarkan pengalaman laki-laki mengenai respons yang masuk akal terhadap situasi yang ada. Misalnya, dalam membangun pertahanan diri, harus ada ancaman langsung dan respon yang proporsional. Skenario tipikalnya adalah sebuah insiden terisolasi di tempat umum antara dua orang asing yang relatif sama ukuran tubuh, kekuatan dan kemampuan bertarungnya, yaitu model ‘tawuran di ruang bar’. Model ‘perkelahian di ruang bar’ tidak banyak membuahkan hasil kaitannya dengan situasi seorang perempuan yang menjadi sasaran kekerasan fisik, mental dan emosional yang berkepanjangan di dalam rumahnya oleh pasangan prianya. Dalam keadaannya yang ketakutan dan biasanya memiliki ukuran fisik serta kekuatan yang lebih rendah, satu-satunya pilihan yang masuk akal baginya adalah mengambil tindakan beberapa waktu kemudian ketika sudah aman baginya untuk melakukannya. Hal ini mungkin terjadi pada saat kekerasan sedang tenang, misalnya, ketika penyerang sedang tidur atau tidak berdaya karena alkohol. Namun, undang-undang mungkin menganggap tindakannya sebagai tindakan terencana yang timbul karena dendam yang sudah lama dipendam, dan bukan sebagai respons defensif yang dipicu oleh insiden tertentu. Oleh karena itu, ada argumen yang menyatakan bahwa pembelaan harus direvisi untuk mencerminkan pengalaman kekerasan dan tindakan mempertahankan diri yang dialami perempuan.

Jika juri dan hakim kurang memahami dinamika dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, mereka mungkin tidak melihat tanggapan perempuan tersebut sebagai hal yang ‘masuk akal’. Mereka mungkin menganggap penggunaan pistol atau pisau sebagai kekerasan yang berlebihan sehubungan dengan serangan fisik yang dilakukan oleh pasangannya yang tidak bersenjata. Mereka mungkin bertanya mengapa dia tidak pergi begitu saja. Pendekatan ini mengabaikan dampak kekerasan yang melemahkan perempuan, kesulitan-kesulitan praktis yang dihadapinya, seperti ke mana harus pergi dan bagaimana menghidupi dirinya dan anak-anaknya, serta ketakutannya akan adanya pembalasan jika ia pergi, khususnya ketika bantuan polisi tidak memadai dalam hal ini. masa lalu. [catatan kaki dihilangkan]

Kekuatan berlebihan dalam membela diri: Laporan Komisi Hukum tahun 2004

Komisi Hukum dalam Laporannya No. 290, *Pembelaan Sebagian terhadap Pembunuhan*, 2004, mempertimbangkan apakah kekerasan yang berlebihan seharusnya mengubah pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja seperti halnya pengurangan tanggung jawab dan provokasi. Saat ini pertahanan diri berfungsi sebagai pertahanan ‘semua atau tidak sama sekali’; Artinya, terdakwa berhasil dalam pembelaannya, dalam hal ini ia dibebaskan, atau ia gagal, dalam hal ini ia dihukum karena pembunuhan. Pemaksaan yang berlebihan ketika beberapa pemaksaan dianggap masuk akal dalam konteks Laporan berarti bahwa terdakwa dihukum karena pembunuhan. Kesimpulan ini sedikit banyak dilemahkan oleh hakim pengadilan yang memerintahkan juri untuk mempertimbangkan semua keadaan, termasuk, misalnya, jumlah terdakwa dan korban, bahwa mereka tidak boleh melihat ke

belakang, dan jika ada bukti adanya provokasi, mereka harus mempertimbangkan apakah pembelaan tersebut berhasil atau tidak sehingga menghasilkan putusan pembunuhan tidak disengaja.

Komisi menolak ketentuan pembelaan yang menggunakan kekuatan berlebihan. Sehubungan dengan pemilik rumah yang membunuh penyusup, mereka dianggap dapat melakukan pembelaan atas provokasi berdasarkan formula yang telah direvisi jika kondisi berikut terpenuhi: jika seseorang memiliki toleransi dan pengendalian diri yang normal, bertindak karena takut akan kekerasan fisik yang serius terhadap dirinya sendiri atau orang lain mungkin telah membunuh dan terdakwa memang membunuh, dia akan mendapat pembelaan. Berkenaan dengan orang dewasa atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan melakukan pembunuhan, karena takut akan penganiayaan lebih lanjut dan tidak melihat jalan keluar apa pun serta menyadari ketidaksesuaian fisik sehingga 'merespon secara langsung dan proporsional terhadap serangan atau serangan yang akan terjadi adalah sia-sia dan berbahaya' (paragraf 4.18), haruskah mereka mempunyai pembelaan diri jika mereka menggunakan kekuatan yang berlebihan ketika, misalnya, pelaku kekerasan sedang mabuk atau tertidur? Sekali lagi Komisi Hukum berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dapat masuk dalam definisi provokasi yang telah direvisi: apakah terdakwa benar-benar takut akan kekerasan yang serius dan mungkinkah orang yang memiliki toleransi dan pengendalian diri melakukan hal yang sama atau serupa? Dalam paragraf 4.29 Komisi mengatakan bahwa revisi definisi provokasi akan berhasil 'melalui pengakuan bahwa bahkan orang yang memiliki toleransi dan pengendalian diri, kadang-kadang, akan merespons dengan rasa takut dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan.'

Sebagai kesimpulan, Komisi Hukum sangat berpandangan bahwa tidak boleh ada pembelaan atas pembelaan diri yang berlebihan karena dalam situasi di mana pembelaan tersebut mungkin muncul, baik bagi rumah tangga dan korban kekerasan, pembelaan yang dirumuskan ulang dengan menggunakan provokasi akan tersedia. Namun, Komisi dalam laporannya No. 304 Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi, 2006, menyimpulkan bahwa seharusnya ada pembelaan seperti itu namun karena pembelaan diri adalah pembelaan umum, maka Komisi tidak akan membahasnya lebih lanjut dalam Laporan ini.

Kesimpulan

Menteri Dalam Negeri mengumumkan pada tahun 1995 bahwa, setelah pengajuan banding Prajurit Lee Clegg yang gagal, kelompok Kantor Dalam Negeri akan meninjau undang-undang tentang pembelaan diri yang berlebihan oleh anggota angkatan bersenjata dan polisi. Kelompok Pengarah Antar Departemen tentang Undang-Undang tentang Penggunaan Kekuatan Mematikan dalam Bela Diri atau Pencegahan Kejahatan tidak mengambil tindakan tegas atas perubahan apa pun dalam undang-undang tersebut, termasuk pembentukan pembelaan parsial yang tersedia atas tuduhan pembunuhan diri yang berlebihan. - Pembelaan dan amandemen terhadap pasal 3 Undang-undang Hukum Pidana tahun 1967 untuk menyempurnakan makna kekerasan yang masuk akal, ketika undang-undang tersebut dilaporkan pada tahun 1996 karena undang-undang tersebut lebih mengutamakan perbedaan yang lebih halus daripada pembunuhan atau pembunuhan berencana dan

pembunuhan berencana atau pembebasan, namun undang-undang tersebut menolak perbedaan apa pun di antara angkatan bersenjata dan polisi di satu sisi dan warga negara lainnya di sisi lain. Namun, ada argumen yang menyatakan sebaliknya. Penembak jitu polisi yang berpengalaman harus dinilai berdasarkan standar yang lebih tinggi dibandingkan warga biasa karena mereka ahli. Argumen seperti ini mungkin mengarah pada undang-undang yang menyatakan bahwa anggota kepolisian dan angkatan bersenjata hanya boleh mendapat pembelaan jika mereka telah melakukan kesalahan yang beralasan mengenai besarnya kekuatan yang diberikan. Selain itu, penggunaan kekerasan merupakan sebuah kontroversi politik, yang jarang terjadi jika kekerasan digunakan oleh individu. Karena Parlemen tidak menunjukkan kecenderungan untuk mendefinisikan pembunuhan atau mengubah hukuman atas pembunuhan, perubahan apa pun untuk menerapkan pembelaan diri yang berlebihan tidak akan terjadi.

Kejadian di Martin, di atas, dimana seorang petani Norfolk menembak seorang pencuri dari belakang, membunuhnya, menimbulkan protes keras yang memihak pada terdakwa; para pendengar program Today di Radio 4 memilih reformasi pertahanan diri sebagai prioritas utama dalam rancangan undang-undang tersebut, dan pada tahun 2005 Partai Konservatif mendorong perubahan terhadap undang-undang tersebut sehingga kekerasan akan diperbolehkan kecuali jika tindakan tersebut 'sangat tidak proporsional', sebuah resolusi yang lebih tinggi. ambang batas daripada 'tidak masuk akal' atau 'berlebihan'. Perasaan yang kuat tersebut memuncak dalam Pernyataan Bersama yang hambar (dalam pandangan penulis) dan singkat dari Kejaksaan Agung dan Asosiasi Petugas Kepala Polisi 'Perumah tangga dan Penggunaan Kekuatan terhadap Penyusup', pada bulan Februari 2005. Di antara pernyataan tersebut adalah: 'Selama Anda hanya melakukan apa yang Anda yakini secara jujur dan secara naluriah diperlukan di saat-saat yang panas, itu akan menjadi bukti terkuat bahwa Anda bertindak sesuai hukum dan membela diri [sic!]. Hal ini masih berlaku jika Anda menggunakan sesuatu sebagai senjata. Sebagai aturan umum, semakin ekstrim keadaan dan ketakutan yang dirasakan, semakin besar kekuatan yang dapat Anda gunakan secara sah untuk membela diri' dan 'jika, misalnya: setelah membuat seseorang pingsan, Anda kemudian memutuskan untuk menyakiti atau membunuh orang tersebut lebih lanjut untuk menghukumnya Anda akan bertindak dengan kekuatan yang sangat berlebihan dan tidak beralasan dan dapat dituntut.' Yang menarik, tidak disebutkan mengenai pembelaan properti.

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tidak mengizinkan penggunaan kekerasan untuk mencegah kerusakan properti. Oleh karena itu, seorang penghuni rumah yang membunuh seorang pencuri demi mempertahankan harta bendanya tidak akan dapat mengandalkan pembelaan diri dan pencegahan kejahatan. Namun, Konvensi ini memberikan pengecualian terhadap hak untuk hidup hanya jika 'penggunaan kekerasan tidak lebih dari kebutuhan mutlak'. Lihat keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam *Andronicou v Siprus* (1998) 25 EHRR 491 yang menyatakan bahwa kekerasan harus proporsional dengan ancaman yang ditimbulkan oleh korban. Faktanya, petugas polisi dibenarkan menggunakan senapan mesin ringan dalam upaya menyelamatkan seorang sandera. Ini adalah ujian yang lebih ketat dibandingkan undang-undang Inggris saat ini, yang berbicara tentang pemaksaan

yang 'wajar'. Baik undang-undang maupun common law harus dibatasi pada situasi di mana hanya kekuatan yang diperlukan yang digunakan. Yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga dapat membawa perubahan. Hukum Inggris saat ini mengizinkan pembelaan berdasarkan keyakinan yang salah.

Namun, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tampaknya mencari keyakinan yang jujur dan beralasan ("alasan yang baik"), seperti yang terjadi pada McCann, Andronicou, Gul dan Bubbins. Berkurangnya ruang lingkup bela diri dapat menimbulkan seruan untuk memperkenalkan metode bela diri yang berlebihan. Perbedaan lainnya adalah bahwa Konvensi, Pasal 2, hanya berlaku jika korban menggunakan 'kekerasan yang melanggar hukum'. Hukum Inggris berlaku baik korban menggunakan kekerasan yang melanggar hukum maupun yang sah. Kita mungkin berharap bahwa dua perangkat peraturan tidak akan muncul tergantung pada apakah pemaksaan tersebut sah atau tidak. Yang terakhir, hukum Inggris memperbolehkan penggunaan kekerasan untuk mencegah kejahatan namun tujuan tersebut tidak ada dalam Pasal 2(2), dan Pasal 2(1) dibatasi pada penggunaan kekerasan untuk membunuh sedangkan hukum Inggris tidak: hal ini mencakup situasi di mana korban tidak dibunuh.

Ringkasan

Bab kedua tentang pertahanan membahas tiga pembelaan: kesalahan, keracunan, dan pembelaan diri (yang saat ini kadang-kadang disebut pembelaan pribadi). Kesalahan hukum dan fakta akan ditangani, begitu pula kesalahan yang berkaitan dengan elemen yang 'tidak relevan' dalam definisi pelanggaran. Keracunan, baik karena alkohol atau obat-obatan, merupakan pembelaan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja, yang disebut kejahatan dengan maksud tertentu, sedangkan hal ini bukan merupakan pembelaan terhadap pelanggaran dengan maksud dasar. Berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk membagi kejahatan menjadi kejahatan dengan maksud yang spesifik dan mendasar mendapat kritik. Diagram pelanggaran yang bermanfaat dan penempatannya ke dalam kategori niat dasar atau khusus disediakan. Pembelaan terakhir yang dibahas dalam bab ini disebut pembelaan diri, namun pembelaan ini lebih dari sekedar pembelaan terhadap diri sendiri, namun juga pembelaan terhadap orang lain dan bahkan pembelaan harta benda. Hal ini juga mencakup pembelaan terhadap pencegahan kejahatan yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1967. Hubungan antara pembelaan ini dan hukum adat dianggap sebagai pembelaan diri. Terdapat diskusi mengenai apakah undang-undang Anglo-Welsh saat ini masih jauh dari standar yang diminta oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Proposal reformasi dibahas termasuk dalam laporan Pertahanan Parsial terhadap Pembunuhan, 2004.

- ❖ Kesalahan: Aturan dasarnya adalah bahwa kesalahan dalam undang-undang bukanlah pembelaan, namun Parlemen dapat membuat pembelaan seperti itu. Kesalahan fakta dapat memberikan pembelaan, tetapi tidak jika kesalahan tersebut termasuk dalam unsur yang tegas (yang tidak melekat pada mens rea) suatu pelanggaran. Kesalahan fakta biasanya hanya dilakukan secara jujur, namun bigami memberikan pengecualian:

kesalahan harus dilakukan dengan dasar yang masuk akal. Untuk kesalahan yang disebabkan oleh keracunan, lihat di bawah.

- ❖ Intoksikasi: Intoksikasi yang tidak disengaja merupakan pembelaan terhadap semua pelanggaran namun bukan pembelaan jika terdakwa mempunyai *mens rea* atas pelanggaran tersebut; keracunan sukarela merupakan pembelaan hanya terhadap pelanggaran dengan maksud tertentu (misalnya pembunuhan) namun tidak terhadap kejahatan dengan maksud dasar (misalnya pembunuhan tidak disengaja); dan kesalahan dalam keadaan mabuk bukanlah pembelaan terhadap semua pelanggaran termasuk pelanggaran dengan maksud tertentu. Perdebatan sengit mengenai definisi 'niat khusus' dan posisi obat tidur masih belum jelas. Sehubungan dengan maksud tertentu, setiap definisi yang disarankan memiliki argumen kontrafaktual, misalnya. jika pelanggaran yang disengaja adalah pelanggaran yang melibatkan 'elemen yang disengaja', mengapa pemerkosaan merupakan pelanggaran yang disengaja?; jika niat khusus berarti kejahatan yang hanya dapat dilakukan dengan sengaja (dan bukan dengan sengaja atau sembarangan), mengapa ketika niat jahat dalam pembunuhan didefinisikan lebih luas dibandingkan sekarang karena mencakup perkiraan akan kemungkinan terjadinya akibat yang sangat mungkin terjadi, apakah pembunuhan masih merupakan suatu kejahatan yang spesifik? pelanggaran yang disengaja? Meskipun undang-undang tersebut tidak jelas, nampaknya seseorang tidak mempunyai pembelaan terhadap keracunan jika dia mengetahui bahwa obat tidur akan membuatnya menjadi agresif atau melakukan kekerasan: undang-undang bukanlah apakah dia seharusnya mengetahuinya. mengenai efek obat pada dirinya.
- ❖ Pembelaan diri dan pencegahan kejahatan: Bagian 3 Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1967 memberikan pembelaan terhadap setiap pelanggaran dimana terdakwa menggunakan kekerasan yang wajar untuk mencegah kejahatan; ketika pembelaan tersebut tidak tersedia, *common law* memberikan pembelaan, pembelaan diri, terhadap semua pelanggaran yang tunduk pada kekuatan yang masuk akal. Misalnya, jika seorang anak di bawah 10 tahun mengusulkan untuk membunuh anak terdakwa, dan terdakwa membunuh pengancam, tidak ada kejahatan yang harus dicegah karena anak di bawah 10 tahun tidak dapat bersalah atas pelanggaran apa pun; namun, hukum adat turun tangan untuk memberikan pembelaan. Untuk kedua pertahanan tersebut, kekuatan yang digunakan harus masuk akal; artinya harus perlu dan proporsional. Kekuatan yang berlebihan tidak memberikan pembelaan. Jika terdakwa dengan jujur yakin bahwa dirinya sedang diserang atau orang lain sedang diserang, maka pembelaan berlaku berdasarkan fakta yang diyakini terdakwa. Namun jika kesalahan terdakwa disebabkan oleh alkohol, maka tidak ada pembelaan.

Perlu dicatat bahwa 'bela diri' adalah istilah yang keliru karena diterapkan pada pembelaan diri sendiri, orang lain, dan harta benda.

BAB 9

PERTAHANAN TERHADAP GANGGUAN JIWA

Terdakwa belum tentu memiliki pembelaan jika ia mengalami gangguan mental akibat skizofrenia, paranoia, demensia, atau berbagai gangguan lain yang memengaruhi pikiran. Untuk mendapatkan pembelaan, terdakwa harus termasuk dalam salah satu alasan yang diketahui: kegilaan, berkurangnya tanggung jawab, otomatisme. Masing-masing pembelaan ini memiliki definisi yang berbeda satu sama lain termasuk beban pembuktian dan hasil. Mereka tidak perlu bingung. Selain itu, pembelaan ini bersifat hukum: tidak boleh disamakan dengan diagnosis medis. Namun, pertahanan ini mungkin tumpang tindih. Ketika mereka melakukan hal tersebut, terdakwa akan mencari pembelaan yang paling menguntungkannya. Misalnya, dia akan dibebaskan atas dasar otomatisme; namun, jika ia berhasil mengaku gila, hingga saat ini ia akan ditahan di rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan) tahun 1964, sampai Menteri Dalam Negeri menyetujui pembebasannya (“perintah rumah sakit dengan pembatasan”). Ketentuan ini berarti bahwa ia akan ditahan untuk jangka waktu lebih lama dari biasanya bagi para pembunuh, hukuman ‘seumur hidup’ sekarang menjadi sekitar 15 tahun penjara ditambah ancaman penarikan kembali. Akibatnya mungkin terdakwa akan dijauhkan dari masyarakat lebih lama jika ia dibebaskan atas dasar kegilaan dibandingkan jika ia bersalah atas pembunuhan. Cara berpikir seperti ini bahkan berlaku lebih besar lagi pada pelanggaran yang lebih ringan. Dampaknya adalah terdakwa mungkin berusaha menghindari pembelaan! Terdakwa mungkin ingin masuk penjara di mana ia tidak akan menerima pengobatan atas penyakitnya. Namun, kepentingan masyarakat menuntut agar orang-orang dengan ketidakseimbangan mental yang ‘berbahaya’ harus ditahan dan jika mungkin diobati. Salah satu masalah besarnya adalah menentukan orang mana yang harus ditahan di rumah sakit, yang mana di penjara, dan mana yang dibebaskan. Undang-undang saat ini tidak memberikan perbedaan yang paling tepat dalam semua kasus, seperti yang akan kita lihat nanti. Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan Mengaku) tahun 1991 memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hasilnya bisa berupa pembebasan mutlak, kecuali untuk pembunuhan yang hukumannya harus berupa perintah rumah sakit dengan pembatasan pembebasan.

Dua prinsip mungkin bertabrakan: tanggung jawab individu atas kejahatan dan perlindungan masyarakat. Orang yang tidak tertib mungkin tidak memiliki keinginan bebas untuk mengendalikan tindakannya dan tidak dapat diubah melalui hukuman. Perintah-perintah hukum ditujukan kepada mereka yang mampu berpikir.

Bab ini menyelidiki kelainan mental pada saat melakukan pelanggaran atau, dalam kasus ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan, pada saat persidangan. Ada cara lain untuk menangani pelanggar, mis. seseorang yang bersalah melakukan pembunuhan tidak berencana dapat diberikan perintah rumah sakit berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Kesehatan Mental tahun 1983, jika hal tersebut merupakan cara yang paling sesuai untuk menyelesaikan kasusnya.

9.1 KETIDAKMAMPUAN UNTUK MEMOHON

Untuk diadili, terdakwa harus:

Memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami jalannya persidangan sehingga dapat membuat pembelaan yang tepat, untuk menantang juri yang mungkin ingin dia tolak dan memahami rincian bukti.

Demikian kata Alderson B dalam Pritchard (1836) 173 ER 135, sebuah kasus yang melibatkan seorang bisu tuli. Kasus ini merupakan ilustrasi bahwa pembelaan atas ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan tersedia tidak hanya bagi mereka yang tidak mampu secara mental tetapi juga bagi orang lain yang tidak dapat mengikuti proses persidangan. Tes ini adalah tes yang masih digunakan seperti yang ditunjukkan oleh Patel, tidak dilaporkan, 7 Agustus 1991 (CA) dan M, tidak dilaporkan, 14 November 2003 (CA). Terdakwa juga harus bisa mengajukan pembelaan terhadap dakwaan. Dia harus bisa memberi instruksi kepada penasihat. Pernyataan modern mengenai aturan ini diberikan oleh Otton LJ dalam Friend [1997] 2 All ER 1012: 'Ujian ketidaksesuaian adalah apakah terdakwa mampu memahami jalannya persidangan sehingga dapat membuat pembelaan yang tepat. Apakah ia dapat memahami dan menjawab dakwaan secara rasional jelas merupakan faktor yang relevan, namun juri juga harus mempertimbangkan apakah ia dapat menggunakan haknya untuk menantang juri, memahami rincian bukti yang diberikan, dan memberikan instruksi kepada hakim. penasihat hukum dan memberikan bukti sendiri jika dia menginginkannya.' Namun, tidak relevan jika terdakwa memiliki usia mental yang rendah: SC v UK [2005] 1 FCR 347 (ECHR) (anak laki-laki berusia 11 tahun dengan kapasitas intelektual sebesar enam atau delapan tahun). Pengadilan mengatakan: 'Terdakwa harus dapat mengikuti apa yang dikatakan oleh saksi-saksi penuntut dan, jika diwakili, menjelaskan kepada pengacaranya sendiri versinya mengenai kejadian tersebut, menunjukkan pernyataan apa pun yang tidak disetujuinya dan membuat mereka mengetahui fakta apa pun yang harus diajukan dalam pembelaannya.' Terdapat pelanggaran terhadap Pasal 6(1) sehubungan dengan anak-anak jika kriteria ini tidak dipenuhi. Kondisinya bersifat umum. Adalah tidak manusiawi jika mengadili orang yang tidak memahami apa pun tentang suatu persidangan, dan akan berdampak buruk pada hukum jika orang tersebut diadili. Fakta bahwa ia bertindak tidak normal dan tidak dapat bertindak demi kepentingan terbaiknya adalah tidak relevan, begitu pula fakta bahwa ia dapat berkomunikasi dengan orang lain mengenai masalah-masalah non-hukum. Sebelum tahun 1992, jika dia tidak dapat melakukan tugas-tugas ini, dia berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan) tahun 1964 dinyatakan tidak layak untuk mengajukan pembelaan di Pengadilan Negeri (yaitu prosedur ini tidak berlaku untuk sidang ringkasan) oleh juri yang ditugaskan secara khusus. 4(4)) dan dirawat di rumah sakit di tempat yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (s 5(1)) untuk jangka waktu tidak terbatas, suatu pembatasan yang cukup berat karena tuntutanannya tidak terlalu besar. Prosedur baru ini tetap tidak dapat diterapkan pada persidangan ringkasan, begitu pula seluruh hukum ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan. Sebaliknya hakim mempunyai wewenang untuk membuat perintah

rumah sakit. Tidak ada yurisdiksi yang dapat diserahkan kepada Pengadilan Mahkota agar juri memutuskan kelayakan untuk diadili.

Permasalahan ini dapat diajukan oleh terdakwa, penuntut atau hakim. Ketika terdakwa mengangkat isu tersebut, maka beban pembuktian ada pada dirinya berdasarkan keseimbangan probabilitas: Podola [1960] 1 QB 325. Hal ini dikritisi dengan alasan bahwa ketika terdakwa mengaku tidak layak untuk mengajukan pembelaan, ia hanya mengatakan bahwa penuntutan tidak dapat membuktikan semua unsur kejahatan yang didakwakan dan merupakan tanggung jawab penuntut untuk melakukan hal tersebut tanpa keraguan. Namun, jika persoalan tersebut diangkat oleh penuntut, atau mungkin jika diajukan oleh hakim, maka beban ada pada penuntut untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak sehat tanpa keraguan: Robertson [1968] 1 WLR 1767 (CA). Hakim dapat menunda persoalan ketidaklayakan mengajukan pembelaan hingga selesainya perkara penuntutan, sehingga memperbolehkan terdakwa untuk menyampaikan bahwa tidak ada perkara yang perlu dijawab. Diskresi ini harus diterapkan jika ada kemungkinan besar bahwa kasus yang diajukan oleh pihak penuntut tidak akan meyakinkan.

Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan Mengaku) tahun 1991

Undang-undang ini, yang pertama kali dipromosikan oleh Law Society, ditujukan untuk menghapuskan komitmen wajib terhadap rumah sakit jiwa meskipun terdakwa belum dihukum karena melakukan pelanggaran. Tata cara berdasarkan Undang-undang yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang KDRT, Kejahatan dan Korban tahun 2004 adalah:

- (a) Hakim memutuskan apakah terdakwa layak untuk mengajukan pembelaan. Hakim mendengarkan dua dokter, salah satunya disetujui oleh Menteri Dalam Negeri yang berpengalaman di bidang ini.
- (b) Jika hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak layak dalam dakwaannya, juri akan memutuskan apakah ia melakukan pelanggaran *actus reus*. Apabila permasalahan tersebut menjadi pertimbangan setelah dakwaan, permasalahan tersebut dapat diadili oleh juri yang sama atau berbeda. Proses ini terkadang dikenal sebagai 'percobaan fakta'. Penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan *actus reus* tanpa keraguan. Pasal 4A(2) UU Acara Pidana (Kegilaan) Tahun 1964, sebagaimana disisipkan dalam UU Tahun 1991, tidak menyebutkan hal tersebut secara tegas namun sesuai dengan asas hukum pidana. Apabila terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana yang berat kepadanya. Ada dukungan dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1998) [1999] 2 Cr App R 214 yang berpendapat bahwa pembelaan apa pun, seperti pencegahan kejahatan, harus dipertimbangkan oleh juri. Unsur mental tidak akan dipertimbangkan menurut pandangan yang berlaku umum, namun Pengadilan Tinggi dalam Egan [1997] Crim LR 225 mengatakan bahwa *mens rea* harus dibuktikan juga, dan penasihat hukum tidak memperdebatkan hal tersebut. Egan mendapat dukungan, karena Butler Committee on Mentally Abnormal Offenders mengacu pada bukti kondisi mental (Cmnd 6244, 1975, paragraf 10.24). Jika juri memutuskan bahwa dia melakukan

tindakan tersebut, hakim memiliki serangkaian pilihan hukuman, termasuk penahanan di rumah sakit jiwa dengan atau tanpa pembatasan, pembebasan mutlak, perintah pengawasan dan pelatihan berdasarkan Undang-undang tahun 1991, dan perintah perwalian berdasarkan Undang-undang. Undang-Undang Kesehatan Mental 1983. Seperti yang ditulis Stephen White dalam 'Kisah dan Fakta' (1998) 62 JCL 360, Egan salah karena jika 'tindakan' tidak terbatas pada *actus reus*, 'pembelaan kegilaan yang berhasil dapat menghalangi keputusan juri bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan sebagai pelanggaran, dan mempunyai wewenang untuk menahan dan mengendalikan berdasarkan Undang-undang tahun 1991, hampir tidak pernah mungkin dapat dilaksanakan'.

Pengadilan Banding memutuskan dalam Acuan Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1998) bahwa Egan salah dalam memutuskan. Penentuan tersebut dilakukan dalam konteks kegilaan dimana juri harus memutuskan apakah terdakwa 'melakukan perbuatan tersebut atau melakukan kelalaian yang dituntut' (Trial of Lunatics Act 1883, s 2). Apa yang dikatakan tentang ketidaklayakan untuk memohon adalah obiter, namun pengadilan menyatakan bahwa Egan diputuskan per incuriam. Jika pengadilan salah dalam hal ini, Egan dibatasi karena tidak layak untuk mengajukan pembelaan. House of Lords memutuskan di Antoine [2001] 1 AC 340 bahwa Egan tidak benar bahkan dalam kaitannya dengan ketidaksesuaian untuk mengajukan pembelaan. Antoine juga berpendapat bahwa 'tindakan' dalam pasal 4A(2) UU 1964 mencakup pembelaan lengkap seperti pembelaan diri (sering dikatakan bahwa pembelaan diri meniadakan *actus reus*). Hal ini membuka kemungkinan terjadinya provokasi. Namun, dalam Grant [2002] 1 Cr App R 528 (CA) dinyatakan bahwa provokasi, yang bergantung pada keadaan pikiran terdakwa, tidak termasuk dalam pasal 4A. Oleh karena itu, pembelaan terhadap provokasi tidak dapat diajukan pada tahap ini. (Jika persoalan ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan muncul selama persidangan, juri yang sama yang menentukan kelayakan menentukan apakah terdakwa melakukan *actus reus*.) Jika juri memutuskan bahwa terdakwa tidak melakukan *actus reus*, ia dibebaskan. Pengadilan Banding menetapkan langkah-langkah ini dalam O'Donnell [1996] 1 Cr App R 286. Ada satu situasi di mana *mens rea* diselidiki dan di situlah terdakwa didakwa sebagai kaki tangan. Dia harus mengetahui tindakan pelaku sebelum dapat dikatakan bahwa dia melakukan 'tindakan atau kelalaian yang dituduhkan': Martin [2003] EWCA Crim 357.

Berdasarkan undang-undang sebelumnya, hasil satu-satunya adalah perintah rumah sakit tanpa batasan waktu. Hasil tersebut tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang tahun 1991 hanya jika hukumannya ditetapkan oleh undang-undang, yaitu untuk pembunuhan. Undang-undang KDRT, Kejahatan dan Korban tahun 2004 mengatur bahwa rawat inap hanya dapat dilakukan jika bukti medis mengenai kondisi mental terdakwa membenarkan perintah rumah sakit. Hal yang sama berlaku untuk perintah pembatasan. (Setelah Undang-Undang tahun 1991, kemungkinannya adalah bahwa orang-orang yang seharusnya mengaku tidak layak untuk mengaku atau tidak waras atas tuduhan pembunuhan kini memilih untuk mengurangi tanggung jawab sebagai pembela karena, jika berhasil, mereka mungkin menerima hukuman yang pasti.) Menteri Dalam Negeri dapat (tidak harus) mengirimkan

untuk diadili ketika terdakwa telah pulih. Jika terbukti bersalah, semua hukuman biasa termasuk masa percobaan tersedia.

Karena pilihan pembuangan yang lebih luas, kemungkinan besar lebih banyak orang akan mengaku tidak sehat dan gila dibandingkan sebelumnya, dan hal ini tampaknya sedang terjadi. Dengan perluasan hukuman ini, muncullah hukuman baru berupa perintah pengawasan dan pengobatan, dimana seseorang yang dinyatakan gila dapat ditempatkan di bawah pengawasan pekerja sosial atau petugas masa percobaan tidak lebih dari dua tahun dan harus menjalani perawatan medis. Kemungkinan perintah perwalian dihapuskan oleh UU tahun 2004. Penelitian menunjukkan bahwa hakim waspada terhadap pilihan hukuman berdasarkan UU tahun 1991. Jika terdakwa dinyatakan tidak layak untuk mengajukan pembelaan, persidangan bahkan untuk pembunuhan pun berakhir. Oleh karena itu, seorang terdakwa yang dinyatakan tidak layak untuk mengajukan pembelaan tidak dapat menggunakan pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab untuk menghindari komitmen wajib untuk pembunuhan atas pengakuan tidak layak untuk mengajukan pembelaan yang berhasil: Antoine.

Pengadilan atas fakta-fakta tersebut mungkin dianggap melanggar Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 menjamin hak atas peradilan yang adil. Tampaknya tidak akan menjadi sebuah persidangan yang adil jika terdakwa tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya di dalamnya, seperti yang terjadi ketika ia tidak dapat memahami dakwaan yang didakwakan kepadanya. Seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Eropa di Winterwerp, orang yang tidak waras tidak boleh dicabut haknya untuk mendapatkan persidangan yang adil. Namun House of Lords memutuskan dalam H [2003] 1 WLR 411 bahwa tidak ada ketidaksesuaian antara s 4A dan Pasal 6, karena penentuan kelayakan untuk mengajukan pembelaan tidak melibatkan persidangan pidana. Untuk komentar mengenai H dan kesesuaiannya dengan yurisprudensi Strasbourg lihat A. Ashworth dalam komentar kasusnya mengenai H [2003] Crim LR 818. Tentu saja ada kemungkinan bahwa kriteria untuk menilai ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan tidak bertentangan dengan Pasal 6. Lihat juga pembahasan Hibah di bawah ini sehubungan dengan Pasal 5(1). Banding terletak pada kedua kasus tersebut ke Pengadilan Banding.

Undang-Undang Kesehatan Mental 1983, ss 47–48

Ada cara kedua dimana Menteri Dalam Negeri dapat memerintahkan agar tersangka ditahan di rumah sakit. Kekuasaan ini terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Mental tahun 1983, pasal 47-48, dan hanya tersedia jika Menteri Dalam Negeri menganggap perlu untuk mengirim seseorang yang ditahan untuk diadili ke rumah sakit demi kepentingan umum. Urutan ini disebut 'arah transfer'. Ia harus puas dengan laporan dari dua atau lebih praktisi medis bahwa terdakwa menderita penyakit jiwa atau gangguan jiwa berat dan terdakwa harus membutuhkan perawatan segera. Pasal 1(1) UU tahun 1983 mendefinisikan istilah terakhir sebagai:

Suatu keadaan perkembangan pikiran yang terhenti atau tidak sempurna yang mencakup gangguan parah pada kecerdasan dan fungsi sosial dan berhubungan dengan perilaku agresif yang tidak normal atau tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab.

Terdakwa dikirim untuk diadili ketika dia sudah pulih. Perlu dicatat bahwa definisi ini sama sekali tidak sama dengan definisi kegilaan. Seseorang dapat termasuk dalam s (1) tetapi masih belum memiliki pertahanan terhadap kegilaan.

Undang-undang tahun 1983 berlaku jika terdakwa ditahan untuk diadili. Ketidakmampuan untuk memohon muncul ketika dia diadili. Ketika Undang-Undang Kesehatan Mental tahun 2007, Sch 1, mulai berlaku, hakim akan dapat mengeluarkan perintah rumah sakit setiap kali terpidana menderita gangguan atau cacat pikiran.

Penyakit jiwa

Dalam pembelaan atas kegilaan (yang hanya berlaku di Pengadilan Kerajaan; di pengadilan hakim, kegilaan menghasilkan pembebasan total, bukan putusan 'tidak bersalah karena alasan kegilaan', meskipun ada prosedur pasca-pembebasan) terdakwa adalah gila pada saat melakukan pelanggaran tetapi layak untuk mengajukan pembelaan pada saat persidangan. Hal ini tidak sering diangkat saat ini. Misalnya, terdapat dua permohonan yang berhasil pada tahun 1974, tiga permohonan pada tahun 1978, tiga permohonan pada tahun 1981, tidak ada permohonan pada tahun 1988, satu permohonan pada tahun 1990, dua permohonan pada tahun 1991, tiga permohonan pada tahun 1992, dan 11 permohonan pada tahun 1996. Angka yang dapat dibandingkan untuk pembelaan pendamping atas pengurangan tanggung jawab adalah 78 pada tahun 1978, 75 orang pada tahun 1981 dan 50 orang pada tahun 1988. Diperkirakan bahwa lebih banyak orang yang secara hukum tidak waras dibandingkan angka-angka yang disebutkan di atas. Alasan mengapa kegilaan jarang digunakan antara lain:

- (a) Terdakwa berpendapat bahwa ia tidak waras, namun kini sudah waras: pembelaan tampaknya sulit dibuktikan di hadapan juri.
- (b) Beberapa orang yang sebelumnya mungkin menggunakan pembelaan ini sekarang didakwa melakukan pembunuhan bayi atau mendapat pembelaan atas tanggung jawab yang berkurang jika dakwaannya adalah pembunuhan. Misalnya, dalam Tickell (1958) *The Times*, 24 Januari, terdakwa, seorang penderita skizofrenia, berhasil mengaku berkurang tanggung jawabnya namun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebelum pembelaan dilembagakan, dia akan memiliki pembelaan atas kegilaan.
- (c) Jika hukumannya lebih ringan dari penjara seumur hidup, lebih baik terdakwa menghabiskan waktu di penjara beberapa tahun daripada harus dirawat di rumah sakit jiwa untuk waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, jika pembela menyadari bahwa hakim akan memutuskan bahwa pembelaan tersebut adalah pembelaan atas kegilaan, maka lebih baik bagi terdakwa untuk mengaku bersalah daripada dibebaskan atas dasar kegilaan. Dampaknya mungkin masyarakat tidak terlindungi. Dokter mungkin percaya bahwa terdakwa tidak waras secara hukum, namun mengetahui konsekuensi dari putusan kegilaan mungkin tidak dapat menjelaskan pandangan mereka kepada pengadilan. Selain itu, terdakwa mungkin berhasil dengan berkurangnya tanggung

jawab ketika argumennya tidak terlalu kuat untuk menghindari hukuman seumur hidup untuk pembunuhan. Dari 49 putusan atas kegilaan pada periode 1975–1988, 14 diantaranya merupakan kasus pembunuhan dan 23 kasus merupakan pelanggaran non-fatal.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, kegilaan tidak penting dalam hal jumlah, namun hal ini menjadi hal yang penting dalam penulisan hukum karena kebutuhan untuk membedakan kegilaan (di mana akibatnya mungkin terdakwa dikirim ke rumah sakit yang aman) dan otomatisme (di mana hasilnya adalah pembebasan penuh). Orang gila tersebut ditahan sampai Menteri Dalam Negeri atau Pengadilan Peninjauan Kesehatan Mental memerintahkan pembebasannya. Ada yang dibebaskan dengan cepat, ada pula yang tidak: R. D. Mackay 'Fakta dan fiksi tentang pembelaan atas kegilaan' [1990] Crim LR 247. Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan untuk Mengaku) tahun 1991 memberi hakim wewenang yang sama untuk melakukan pelepasan seperti yang dimilikinya ketika terdakwa dinyatakan tidak layak untuk mengajukan pembelaan (lihat di atas).

Mengenai ketidaklayakan untuk mengajukan permohonan, tidak ada perintah rumah sakit atau pembatasan yang dapat dibuat kecuali jika bukti medis membenarkan perintah tersebut. Kemungkinan adanya perintah perwalian, pengawasan dan pengobatan atau pembebasan mutlak membuat kegilaan menjadi permohonan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Metode pembuangan yang baru seiring berjalannya waktu dapat melemahkan argumen pada (c) di atas. Definisi kegilaan tidak ditetapkan oleh undang-undang tetapi harus dikumpulkan dari kasus-kasus yang ada. Undang-undang tersebut ditetapkan pada tahun 1843 dan menurut House of Lords di Sullivan [1984] AC 156 tidak perlu melangkah lebih jauh ke belakang. Lord Diplock dalam kasus tersebut mengatakan bahwa undang-undang tentang kegilaan adalah 'untuk melindungi masyarakat dari terulangnya perilaku berbahaya'. Ia berpendapat bahwa tujuan tes kegilaan adalah untuk mengidentifikasi bahayanya.

Sayangnya dia tidak menjelaskan mengapa pada tes itu penderita epilepsi berbahaya, namun sebagian penderita diabetes tidak. Hasil di Sullivan tidak terpengaruh oleh UU tahun 1991.

Ujian Kegilaan

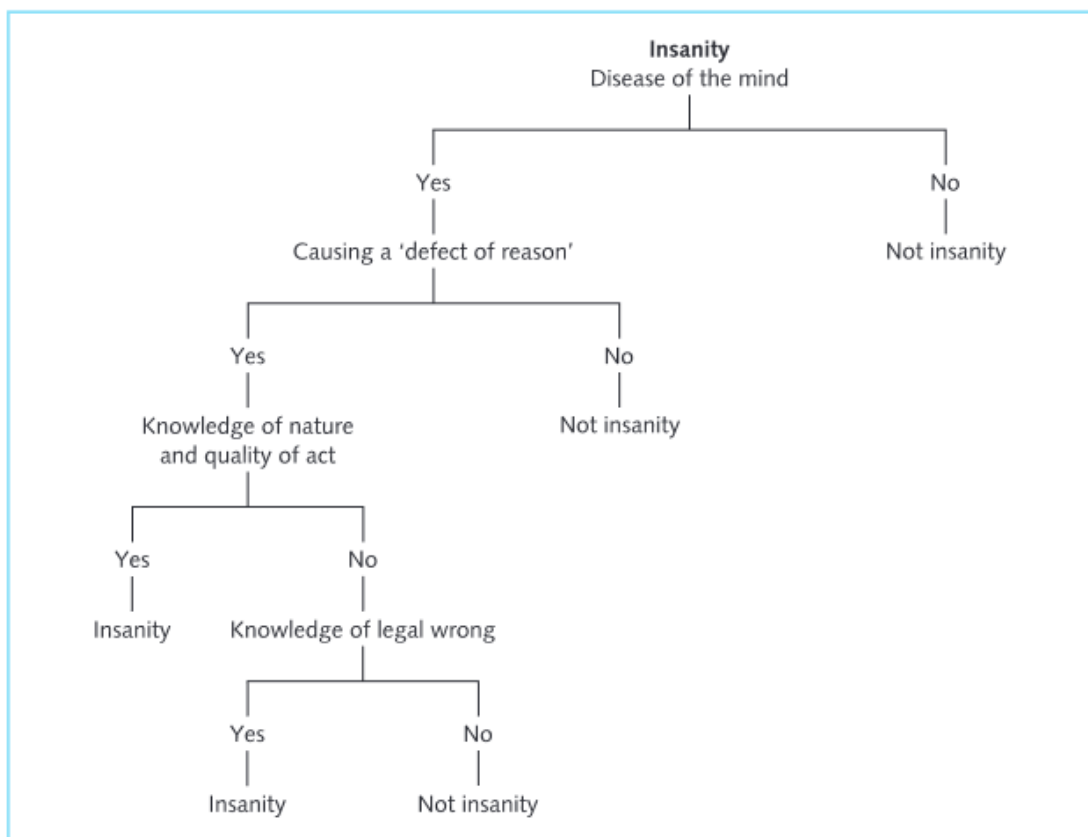
Dalam pembahasan bagian ini harus diingat bahwa definisi kegilaan (Gambar 9.1) adalah definisi legal, bukan medis, seperti yang ditunjukkan oleh Sullivan di atas, dan ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi dalam Hennessy [1989] 1 WLR 287. Perlu juga dicatat bahwa bagian ini terbatas pada pembahasan kegilaan dalam dakwaan. Jika terdakwa berhasil mengaku tidak waras dalam sidang ringkasan, dia dibebaskan begitu saja. Dikatakan dalam DPP v H [1997] 1 WLR 1406 oleh Pengadilan Divisi bahwa kegilaan tersedia di pengadilan hanya jika pelanggarannya merupakan salah satu mens rea. Proposisi ini dikritik di bawah ini. Lord Hutton, menyampaikan satu-satunya pidato Antoine di atas, mengatakan bahwa ketika kegilaan berhasil didakwakan, terdakwa tidak mempunyai mens rea atas pelanggaran yang didakwakan.

Prinsip yang mengatur kegilaan ditetapkan dalam Kasus M'Naghten (1843) [1843–60] Semua ER Rep 229. Terdakwa, yang percaya bahwa dia sedang dianiaya oleh Tories,

menembakkan senjatanya ke Perdana Menteri, Peel, tetapi membunuh Peel. sekretaris, Edward Drummond. Pendapat medis menunjukkan bahwa M'Naghten menderita delusi tidak wajar yang mungkin memengaruhi persepsinya tentang benar dan salah. Juri mengembalikan putusan tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Kasus ini sampai ke House of Lords, yang mengajukan serangkaian pertanyaan kepada hakim Inggris. Tanggapan utama disampaikan oleh Tindal CJ, yang tampaknya berupaya keras untuk menyatakan hukum agar terdakwa tidak dipersalahkan atas perbuatannya karena kurangnya kecerdasan atau daya nalar atau kemampuan untuk meramalkan akibat-akibat yang dapat membuat hukuman menjadi jera. baik terdakwa maupun orang lain.

Bagian utama dari pernyataan Tindal CJ dalam menjawab pertanyaan hipotetis adalah: para juri harus diberitahu dalam semua kasus bahwa setiap orang dianggap waras dan mempunyai alasan yang cukup untuk bertanggung jawab atas kejahatannya, sampai mereka terbukti sebaliknya; dan bahwa untuk melakukan pembelaan atas dasar kegilaan, harus dibuktikan dengan jelas bahwa, pada saat melakukan pelanggaran, terdakwa sedang bekerja dalam kondisi cacat nalar karena penyakit pikiran sehingga tidak mengetahui sifat dan kualitas tindakan yang dilakukannya; atau jika dia mengetahuinya, dia tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan.

Definisi ini tidak dipengaruhi oleh Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan Mengaku) tahun 1991.



Gambar 9.1 Kegilaan

Dari sudut pandang preseden, harus diingat bahwa kata-kata ini tidak diucapkan dalam kasus 'hidup'; namun, kata-kata tersebut, meskipun bukan rasio, telah diterima sebagai pernyataan hukum. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan oleh Tindal CJ sendiri, seseorang tidak boleh membuat 'penerapan singkat' dari kata-kata yang dikutip, tetapi kata-kata tersebut diperlakukan seolah-olah muncul dalam undang-undang. Tata cara pemanggilan hakim ke House of Lords untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terakhir kali digunakan pada tahun 1898 dan agaknya tidak akan digunakan lagi karena sejak pertengahan abad kesembilan belas sudah lebih banyak keahlian di House of Lords. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa ketika semua hakim Inggris menyatakan bahwa hukum itu anu (pengecualian dalam M'Naghten adalah Maule J) pendapat mereka berhak dihormati meskipun tidak otoritatif untuk tujuan tersebut. dari doktrin preseden. Argumen dari preseden tidak berlebihan karena Aturan M'Naghten telah diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan otoritas tertinggi. Meskipun ada kritik bahwa Peraturan ini tidak boleh dibaca seperti undang-undang, kata-kata tersebut digunakan seolah-olah memang demikian dan pembahasan berikut akan membahas konsep-konsep dalam definisi tersebut.

Penyakit Pikiran

Lord Denning dalam *Bratty v Attorney-General for Northern Ireland* [1963] AC 386 mengatakan bahwa penyakit pikiran adalah 'setiap gangguan mental yang bermanifestasi dalam bentuk kekerasan dan cenderung kambuh'. Definisi tersebut cukup luas dan memberikan dampak pada kebijakan bahwa orang berbahaya tidak boleh berada di jalan. Akan menjadi aneh jika kegilaan dibatasi pada kekerasan dan pengadilan tidak membatasinya. Putusan pokok Pengadilan Tinggi Australia dalam *Falconer* (1990) 65 ALJR 20 menyatakan bahwa gangguan jiwa yang bersifat sementara harus rawan kambuh jika ingin digolongkan sebagai penyakit pikiran. Kemungkinan kekambuhan menunjukkan 'kelemahan patologis yang mendasarinya'. Kriteria ini ditekankan oleh Lord Lane CJ dalam *Hennessy* di atas. Stres, kecemasan, dan depresi bisa menjadi penyakit pikiran meski disebabkan oleh faktor eksternal, namun rentan kambuh. Unsur kemungkinan terulangnya kembali merupakan dasar yang lemah untuk membedakan antara kegilaan dan otomatisme. Namun, Pengadilan Banding untuk sementara kurang memberikan penekanan pada kemungkinan kekambuhan di *Burgess* [1991] 2 QB 92. Lord Lane CJ mengatakan bahwa bahaya kekambuhan adalah alasan tambahan untuk mengkategorikan kondisi tersebut sebagai penyakit pikiran tetapi 'tidak adanya bahaya kekambuhan bukanlah alasan untuk mengatakan bahwa penyakit ini bukanlah penyakit pikiran'. (Perlu dicatat bahwa bahaya terulangnya perilaku kriminal pada orang yang waras bisa dibilang bukan alasan untuk memenjarakan mereka untuk jangka waktu yang lama.) Pengadilan tersebut sebaliknya menerima usulan Lord Denning. Dalam kritik terhadap pernyataan Lord Lane CJ dapat dikatakan bahwa kambuhnya suatu penyakit pikiran tidak serta merta menandakan bahwa terdakwa berbahaya. Dia mungkin sangat berbahaya pada saat melakukan pelanggaran

Salah satu kritik terhadap definisi tersebut adalah bahwa definisi tersebut bergantung pada sifat perilaku terdakwa dan bukan pada sifat penyakitnya. Karena alasan inilah epilepsi seperti dalam *Bratty* dan *Sullivan*, keduanya di atas, adalah penyakit pikiran, namun tidak

semua penderita epilepsi harus ditahan. Di Sullivan, terdakwa menderita epilepsi langka yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan. House of Lords menyelidiki penyebabnya, sehingga menunjukkan pada tingkat peradilan tertinggi bahwa diktum Lord Denning tidak sepenuhnya diterima namun Pengadilan Banding di Burgess memberikan semangat baru ke dalamnya. Saat ini terdapat dua aliran kewenangan, meskipun pengadilan tampaknya tidak memperhatikan masalah definisinya. Lord Diplock mencatat bahwa mungkin tampak sulit untuk menyebut penderita epilepsi sebagai orang gila, namun reformasi apa pun adalah untuk Parlemen.

Masalah lain yang berkaitan dengan 'penyakit pikiran' adalah ketidakpastiannya. Dua kasus selalu dikontraskan. Dalam Charlson [1955] 1 All ER 859 seorang ayah mengajak putranya untuk melihat ke luar jendela ke sungai di bawah dan melihat seekor tikus berenang di dalamnya. Ketika anak laki-laki itu melakukan hal tersebut, sang ayah memukul kepala anak laki-laki tersebut dengan palu dan melemparkannya ke luar jendela. Sang ayah mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa dia membunuh anak laki-laki tersebut tetapi tidak mengetahui alasannya. Dia menderita tumor otak. Barry J mengarahkan juri bahwa tumor adalah penyakit fisik, bukan penyakit pikiran dalam diri M'Naghten. Lord Denning menganggap Charlson salah mengambil keputusan di Bratty. Kasus pendamping Charlson adalah Kemp [1957] 1 QB 399.

Terdakwa menderita pengerasan pembuluh darah (arteriosklerosis) yang menyebabkan penumpukan darah di otak dan menyebabkan hilangnya kesadaran untuk sementara waktu. Dalam keadaan demikian, dia memukul kepala istrinya dengan palu. Devlin J mengatakan bahwa 'pikiran' dalam definisi tersebut mencakup kemampuan akal, ingatan dan pemahaman, sebuah ungkapan yang mendapat persetujuan Lord Diplock dalam Sullivan, dan bahwa, meskipun arteriosklerosis adalah penyakit fisik, kondisi pikiran mungkin dipengaruhi oleh dan jika pikiran terpengaruh, berarti ada penyakit pikiran. Oleh karena itu, penyebab fisik dari gangguan jiwa tidak relevan. Pandangan umum adalah bahwa Charlson dan Kemp tidak dapat dibedakan, namun Kemp lebih disukai karena orang yang melakukan kekerasan harus ditahan. Jika Kemp benar, kegilaan didefinisikan secara luas dan mencakup bentuk otomatisme yang tidak termasuk jika Charlson benar.

Jika kita mau, kita dapat membedakan kasus-kasus tersebut dengan mengatakan bahwa di Charlson tidak ada bukti medis, sedangkan di Kemp ada. Meski demikian, lebar Kemp masih belum jelas. Apakah itu akan menutupi serangan jantung? Penyebabnya sama dengan arteriosklerosis: suplai darah ke otak terhenti. Dalam kritik terhadap Kemp, orang mungkin bertanya apa penyebab arteriosklerosis itu. Jika jawabannya adalah makanan berkolesterol tinggi, maka makanan tersebut berasal dari luar, dan pertahanannya seharusnya bukan kegilaan, melainkan otomatisme. Kasus-kasus seperti Kemp menggambarkan bahwa penyakit 'fisik' juga termasuk di dalamnya, meskipun penyebab 'penyakit pikiran' tersebut tidak menjadi perhatian para psikiater. Hal yang sama juga berlaku pada diabetes dan epilepsi.

Di antara penyakit-penyakit yang tampaknya tercakup dalam kegilaan adalah kepikunan, cedera otak traumatis, psikosis organik (seperti yang disebabkan oleh sifilis), psikosis akibat obat-obatan, gangguan stres pasca-trauma, beberapa bentuk epilepsi, melankolia, manik depresi, dan skizofrenia. . 'Penyakit pikiran' dapat dibaca secara luas.

Memang tidak diperlukan 'penyakit'. Dalam Bell [1984] 3 Semua suara ER 842 dari Tuhan dikatakan sebagai penyakit pikiran. Dalam praktiknya, sekitar setengah dari mereka yang dianggap gila adalah penderita skizofrenia. Namun, penyakit pikiran tidak mencakup kerusakan sementara yang disebabkan oleh sesuatu yang bersifat eksternal: Quick [1973] QB 910 dimana Lawton CJ mengkritik definisi Lord Denning yang menyebabkan penderita diabetes diklasifikasikan sebagai gila. Quick menunjukkan bahwa meskipun terdakwa mempunyai kelainan mental yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan, namun terdakwa tidak selalu gila.

Terdakwa di Quick memiliki pembelaan terhadap otomatisisme. (Terdakwa utama dalam Quick sebenarnya sudah belasan kali dirawat di rumah sakit dalam keadaan setengah sadar atau tidak sadar: otomatisisme sebagai pertahanan adalah sesuatu yang lengkap, namun tentunya dia membutuhkan bantuan untuk mengendalikan diabetesnya.) Di Australia Ada anggapan bahwa gangguan fungsi pikiran yang bersifat sementara yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti pukulan di kepala atau alkohol bukanlah penyakit pikiran: Carter [1959] VR 105. Posisi yang sama juga diambil di Selandia Baru: Cottle [1958] NZLR 999 (CA). Faktor-faktor seperti itu, dan pengadilan menambahkan hipnotisme di Cottle, tidak bisa disebut 'penyakit'. Dalam Bailey [1983] 2 All ER 503, kegagalan mengonsumsi makanan untuk melawan efek insulin dikategorikan sebagai faktor eksternal dan oleh karena itu, koma yang diakibatkannya bukanlah penyakit pikiran. (Untuk informasi lebih lanjut lihat otomatisisme, di bawah.) Demikian pula, House of Lords mengatakan dalam Jaksa Agung Irlandia Utara v Gallagher [1963] AC 349 bahwa keadaan psikopat yang diperburuk oleh alkohol bukanlah penyakit pikiran.

Kasus-kasus tersebut tidak selalu mudah untuk diselesaikan, terutama kasus-kasus yang memberikan hasil yang berbeda bagi penderita epilepsi dan penderita diabetes. Benarkah penderita epilepsi lebih menimbulkan bahaya sosial dibandingkan penderita diabetes dalam kondisi hipoglikemik? Tentu saja tidak ada alasan untuk menahan penderita epilepsi di rumah sakit jiwa pada era sebelum metode pembuangan tambahan diberikan pada tahun 1992. Terlebih lagi, sangat jarang penderita epilepsi melakukan tindakan seperti yang terjadi di Sullivan. Apa yang harus diingat adalah, seperti yang dikatakan Lord Diplock dalam Sullivan, penyebab penyakit ini, jika bersifat internal, tidak relevan, baik permanen atau sementara.

Demikian pula fakta bahwa profesi medis tidak menyebut sesuatu sebagai penyakit pikiran adalah tidak penting. Kesulitannya adalah dalam membedakan berdasarkan kebijakan apakah Aturan M'Naghten ingin dipertahankan. Dalam kasus Porter di Australia (1933) 55 CLR 182, Dixon CJ mengatakan bahwa penyakit pikiran tidak mencakup 'kegembiraan orang normal, nafsu, bahkan kebodohan, kebodohan, kurangnya pengendalian diri, dan impulsif'. Ia menekankan, tidak perlu terjadi kerusakan fisik pada sel-sel otak. Dua kasus baru-baru ini membuat subjek ini lega karena menunjukkan luasnya istilah tersebut.

Di Sullivan, terdakwa menendang kepala dan tubuh temannya ketika dia sedang dalam masa pemulihan dari penyakit epilepsi. House of Lords berpendapat bahwa meskipun keadaan pikirannya hanya sementara, dia gila. Pembelaannya bukanlah otomatisisme karena penyebab

penyimpangan mentalnya bukan dari luar, melainkan dari dalam. Keputusan ini mendapat kritik keras. C. M. V. Clarkson, *Memahami Hukum Pidana* (Fontana, 1987) 44 –5, menulis:

Mungkin seseorang dapat memahami pemikiran di balik penghakiman tersebut. Jika perilaku yang tidak disengaja mempunyai penyebab internal maka kemungkinan besar perilaku tersebut akan terulang kembali; masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap terulangnya perilaku berbahaya tersebut; putusan kegilaan memungkinkan kendali tetap dipertahankan atas terdakwa. Namun, tampaknya tidak masuk akal sekaligus sangat menghina jika menggunakan vonis kegilaan di sini.

Edisi keempat (Thomson, 2005) menyampaikan poin yang sama tetapi dengan kata-kata yang sedikit berbeda (hlm. 39–42). Ia menambahkan (hlm. 42 dalam edisi ke-4) bahwa: ‘Tidak ada yang dapat dicapai dengan perintah apa pun yang dapat dijatuhkan berdasarkan temuan “tidak bersalah karena alasan kegilaan”’. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar orang-orang tersebut akan mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, seperti yang dilakukan Sullivan, dan sering kali akan menerima hukuman non-penahanan.

Jika, seperti yang dikemukakan Lord Diplock, Aturan M’Naghten dimaksudkan untuk membedakan antara individu yang berbahaya dan tidak berbahaya, mengapa penderita epilepsi berbahaya namun sebagian penderita diabetes tidak? Garis antara penyebab internal dan eksternal tidak memisahkan orang yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Terlebih lagi, meskipun terdakwa tidak waras, dia dapat mengubah pengakuannya menjadi bersalah, namun dia tetap berbahaya; setelah menjalani hukuman singkat, dia dilepaskan ke jalan. Memang, hukuman penjara tidak perlu diberikan. Klasifikasi beberapa penderita epilepsi sebagai orang gila membuat hakim Pengadilan Mahkota di McFarlane, *The Guardian*, 11 September 1990, menolak mengikuti Sullivan. Laporan singkat tersebut tidak memberikan alasan untuk tidak mengikuti preseden. Namun hakim tampaknya telah mengarahkan juri bahwa terdakwa tidak bersalah jika dia sedang mengalami serangan ketika dia menyebabkan luka fisik pada seorang polisi yang menggeledah rumahnya untuk mencari barang curian. (Dia mengatakan bahwa para psikiater tidak menganggap epilepsi sebagai penyakit pikiran dan oleh karena itu epilepsi bukanlah bagian dari hukum kegilaan. Ketika disadari bahwa apakah suatu kondisi termasuk penyakit pikiran, maka itu adalah pertanyaan hukum. , kita dapat menghargai kekeliruan argumen ini.) Lebih jauh seperti yang diungkapkan Lawton LJ dalam *Quick* di atas, hukum 'penyakit pikiran' tidak boleh menimbulkan keraguan di kalangan awam.

Kasus penting adalah *Burgess*, di atas. Terdakwa menyerang seorang temannya dengan perekam video dan mencoba mencekiknya. Dia sedang berjalan dalam tidur. Lord Lane CJ mengatakan bahwa 'pikiran terdakwa sampai batas tertentu mengendalikan tindakannya dan bukan akibat dari kejang otot, tetapi tanpa dia sadari apa yang dia lakukan'. Dia menolak otoritas sebelumnya yang secara konsisten berpendapat bahwa berjalan dalam tidur adalah otomatisme. Tidak ada penyebab eksternal. Lord Lane menerapkan sebagian dari definisi Lord Denning ('gangguan mental apa pun yang diwujudkan dalam kekerasan') namun mengatakan bahwa bagian terakhir ('dan cenderung kambuh') hanyalah alasan tambahan untuk mengklasifikasikan penyakit ini sebagai salah satu gangguan pikiran. . Faktanya, berjalan dalam tidur menunjukkan 'suatu kelainan atau kelainan, meskipun bersifat sementara, karena

faktor internal, baik fungsional maupun organik, yang terwujud dalam bentuk kekerasan'. Oleh karena itu, terdakwa, orang yang berjalan dalam tidur, secara hukum tidak waras, karena 'penghentian kemampuan mental, ingatan, dan pemahaman yang bersifat sementara dan terputus-putus' dapat dianggap sebagai kegilaan. Reformasi apa pun adalah untuk Parlemen. Tampaknya aneh bahwa seseorang yang berjalan dalam tidur harus diperlakukan sama seperti jika dia adalah seorang psikopat atau gangguan mental lainnya. Komentar ini digarisbawahi oleh fakta bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan terdakwa kemungkinan besar akan terulang kembali. Sulit dikatakan bahwa masyarakat membutuhkan perlindungan darinya. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa seorang somnambulist dapat dirawat di rumah sakit sehingga pembebasan yang murni dan sederhana tidaklah tepat. Tentu saja, melabeli orang yang berjalan dalam tidur sebagai 'gila' adalah hal yang lebih tidak pantas. Dan terkadang dikatakan bahwa orang yang berjalan dalam tidur hanya melakukan tindakan yang ingin dia lakukan saat sadar.

Ia dapat menghindari benda dan menaiki tangga meskipun ia belum memiliki kesadaran penuh. Dalam kritiknya terhadap Burgess dapat dikatakan bahwa tidur merupakan suatu kondisi alamiah. Berjalan dalam tidur adalah konsekuensi dari kondisi alam tersebut; oleh karena itu, berjalan dalam tidur bukanlah penyakit pikiran. Lebih lanjut, seperti yang diungkapkan F. Boland dalam *Anglo-American Insanity Defense Reform* (Dartmouth, 1999) 11: 'Jika disebabkan oleh keju [berjalan dalam tidur] akan memenuhi syarat untuk pembelaan otomatis karena keju mungkin akan dianggap sebagai penyebab eksternal' [catatan kaki dihilangkan]. Mahkamah Agung Kanada memutuskan dalam *Parks* (1993) 95 DLR (4th) 27 bahwa berjalan dalam tidur bukanlah penyakit pikiran. Berjalan dalam tidur muncul dari tidur, suatu penyebab yang dapat diterima secara sosial. Teori 'penyebab internal' di Quick ditolak. Rancangan KUHP tahun 1989 akan mengklasifikasikan tidur sambil berjalan sebagai otomatisme. Hasil ini akan lebih baik daripada yang sekarang, yaitu kegilaan, tetapi pembelaan otomatisme yang berhasil berarti terdakwa dibebaskan, dan tidak ada pengobatan yang diberikan. Solusi yang lebih baik adalah dengan membebaskan terdakwa namun kemudian mewajibkan dia menjalani perawatan medis yang sesuai seperti pemberian obat-obatan.

9.2 CACAT AKAL

Istilah ini didefinisikan sebagai pencabutan seluruh kekuatan nalar, yang dibedakan dari kegagalan untuk menggunakan kekuatan tersebut secara penuh, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Banding di *Clarke* [1972] 1 All ER 219. Seorang wanita yang mengalami depresi memasuki sebuah supermarket dan tanpa sadar memasukkan barang ke dalam keranjangnya. Dia didakwa melakukan pencurian. Penasihatnya menasihatinya untuk mengaku gila nasihat yang buruk! Bukti dari seorang dokter mengatakan bahwa depresi adalah penyakit mental (kecil). Dia sebelumnya melakukan hal-hal seperti memasukkan gula ke dalam lemari esnya. Syukurlah baginya, pengadilan menyatakan dia tidak memiliki cacat alasan. Kegagalan berkonsentrasi bukan merupakan cacat nalar. Melihat Peraturan M'Naghten, dapat dikatakan bahwa kegagalannya untuk memahami apa yang dia lakukan adalah suatu cacat nalar. Meskipun cacatnya hanya sementara, menerapkan Kemp, di atas, 'pertahanan' sebenarnya

adalah kegilaan, dan melihat Burgess, di atas, gerakannya bukan sekadar kejang otot. Faktanya, permohonan banding terdakwa dibolehkan karena ia tidak mempunyai mens rea yang menyatakan bahwa ia tidak jujur. Cara alternatif untuk mencapai hasil yang sama adalah dengan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai penyakit pikiran. Depresi ringan bukanlah suatu penyakit. Cacat nalar mungkin bersifat sementara atau permanen, seperti yang ditunjukkan dalam kasus epilepsi. Cacat akal tidak menutupi kebodohan: Kemp.

❖ Pengetahuan tentang sifat dan kualitas tindakan tersebut

Codere (1916) 12 Cr App R 21 (CCA) berpendapat bahwa frasa ini mengacu pada unsur fisik tindakan dan bukan pada konstitusi hukum atau moral, yaitu terdakwa tidak boleh mengetahui bahwa dia melakukan tindakan tersebut, bahwa dia tidak mampu meramalkan hasilnya, atau bahwa dia tidak mampu menghargai keadaan. Dalam Cottle di atas, Gresson P di Pengadilan Banding Selandia Baru menyatakan bahwa: 'tidak mengetahui sama sekali berarti tidak memahami sifat dan kualitas tindakan tersebut'. Sebuah contoh yang terkenal adalah ketika seorang pria gila menggorok leher seorang wanita karena khayalan bahwa dia sedang memotong sepotong roti. Dia mungkin mengetahui bahwa dia sedang menggunakan pisau, tetapi dia tidak mengetahui akibat dari penggunaannya sehingga tidak mengetahui sifat dan kualitas perbuatannya. Terdakwa di Sullivan tidak mengetahui sifat perbuatannya. Ada kemungkinan bahwa terdakwa termasuk dalam kategori ini dan kategori berikutnya. Dorongan yang tidak dapat ditolak bukanlah kurangnya pengetahuan tentang sifat dan kualitas tindakan tersebut.

❖ Pengetahuan bahwa tindakan tersebut salah

Ungkapan ini merupakan alternatif terhadap pengetahuan tentang hakikat dan mutu perbuatan. Ia menanyakan kepada terdakwa apakah dia tahu bahwa apa yang dia lakukan bertentangan dengan hukum: Windle [1952] 2 QB 826, bertentangan dengan otoritas sebelumnya. Tidak relevan apakah dia menganggap perbuatannya salah secara moral. Istri di Windle bisa dibilang gila. Sang suami seolah-olah tertular penyakit mental darinya (folie à deux, suatu bentuk gangguan mental yang dikomunikasikan). Dia memberinya 100 aspirin. Ketika ditangkap dia berkata: 'Saya kira mereka akan menggantung saya karena ini?' Pengadilan Banding Pidana memutuskan bahwa kata-katanya berarti bahwa dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah salah secara hukum, dan dia memang digantung. Perlu dicatat bahwa orang dewasa yang waras tidak mempunyai pembelaan atas kurangnya pengetahuan bahwa tindakan tersebut salah secara hukum, setidaknya jika tindakan tersebut salah secara pidana (lihat bagian pembuka Bab 8). Seorang psikopat mungkin tahu bahwa apa yang dia lakukan salah secara hukum dan, oleh karena itu, dia tidak gila. Di Bell, di atas, terdakwa mendengar apa yang dia pikir adalah suara Tuhan, yang menyuruhnya untuk menabrak gerbang kamp liburan dengan vannya. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah secara hukum. Tidaklah relevan jika dia berpikir bahwa dia bertindak dengan cara yang benar secara moral. Otoritas baru-baru ini yang menegaskan bahwa Windle tetap menjadi hukum yang baik adalah Johnson [2007] EWCA Crim 1978.

Nampaknya para hakim di M’Naghten mengartikan ‘salah’ sebagai salah secara moral. Dalam *Codere* di atas, tes tersebut dikatakan sebagai ‘standar biasa yang diadopsi oleh orang-orang yang berakal sehat’, sebuah tes moral, bukan tes hukum. Oleh karena itu, *Windle* tidak diikuti di Australia dalam kasus *Stapleton v R* (1952) 86 CLR 358. Jika pengadilan Australia benar, terdakwa di *Windle* mungkin memiliki pembelaan. Jika dia berpikir bahwa pembunuhan karena belas kasihan adalah pantas secara moral, dia tidak mengetahui bahwa tindakannya (secara moral) salah. Kanada telah mengadopsi pendekatan Australia: *Chaulk* (1990) 2 CR (4th) 1 (SCC). Terdakwa dianggap gila meskipun dia tahu bahwa tindakannya melanggar hukum jika dia yakin bahwa tindakannya dapat diterima secara moral. Namun, Pengadilan Banding di *Johnson*, di atas, menolak *Stapleton* sebagai bagian dari hukum Inggris.

Meringkas efek *Windle*, kita dapat mengatakan bahwa jika terdakwa berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah benar dan percaya bahwa hukum dan opini publik setuju dengannya, dia mempunyai pembelaan berdasarkan bagian dari Aturan M’Naghten ini. (Ia mungkin masih mengetahui sifat dan kualitas tindakannya.) Jika salah satu dari keyakinan ini hilang, ia tidak memiliki pembelaan berdasarkan Peraturan ini – dan jangan dilupakan bahwa pertanyaan apakah ia mengetahui bahwa tindakannya sah yang salah ditanyakan kepada seseorang yang menderita cacat nalar akibat penyakit pikiran! Kebanyakan pembunuh tahu bahwa pembunuhan adalah kejahatan. Efek dari *Windle* adalah mempersempit pertahanan dan di bawah aturan ini hanya mereka yang terkena dampak parah karena kurangnya kecerdasan yang akan termasuk di dalamnya. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan *Mackay* menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berpegang pada prinsip *Windle* namun menginstruksikan juri bahwa terdakwa mempunyai pembelaan meskipun ia berpikir bahwa ia melakukan sesuatu yang benar secara moral namun salah secara hukum. Psikiater yang memberikan bukti kegilaan sering kali mengambil pendekatan yang sama. *Johnson* menyadari bahwa hal ini sedang terjadi.

Lima hal prosedural

- (a) Karena berdasarkan Aturan M’Naghten setiap orang dianggap waras, maka terdakwa menanggung beban untuk menyangkal bahwa ia waras. Namun bebannya adalah hukum perdata adalah salah satu keseimbangan probabilitas: *Sodeman v R* [1936] 2 Semua ER 1138. Namun lihat poin (c) di bawah. Fakta bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa mungkin bertentangan dengan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan Tinggi menolak konvensi ini dalam *M* [2002] Crim LR 57, dengan menyatakan bahwa temuan bahwa terdakwa tidak waras tidak merupakan proses pidana berdasarkan Pasal 6(2) Konvensi. Tidak ada yang dihukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan. (Kasus ini juga disebut *Moore*.) Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Konvensi, lihat bagian berikutnya.
- (b)) Jika pembelaan berhasil, putusannya ‘tidak bersalah karena alasan kegilaan’. Dahulu putusannya ‘bersalah tapi gila’. Secara teknis saat ini hasilnya adalah pembebasan namun ada banding terhadap putusan ini berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan) tahun 1964, pasal 2.

- (c) Kadang-kadang dikatakan bahwa penuntut tidak dapat mengangkat masalah kegilaan. Namun di Bratty, di atas, keputusan otoritas tertinggi, Lord Denning mengatakan bahwa sudah menjadi tugas jaksa penuntut untuk mengangkat masalah kegilaan guna mencegah orang berbahaya bebas berkeliaran di jalanan. Namun, ia harus menyediakan bukti pembelaan yang mendukung kegilaan: Dickie [1984] 3 All ER 173 (CA). Namun, pihak penuntut dapat dengan jelas mengangkat permasalahan ketika terdakwa telah memberikan bukti berkurangnya tanggung jawab (UU Acara Pidana (Kegilaan) tahun 1964, pasal 6), dan ketika dia telah memberikan bukti ketidakmampuan mental. Terdapat konflik mengenai apakah dalam kondisi seperti ini penuntut harus menanggung beban pembuktian dan, jika ya, seberapa besar beban pembuktiannya. Diperkirakan bebannya ada pada penuntutan, dan standar pembuktiannya tidak diragukan lagi. Namun, sehubungan dengan kasus di mana terdakwa telah memberikan bukti kapasitas mental, ada diktum Lord Denning di Bratty bahwa standarnya adalah keseimbangan probabilitas. Diktum ini sepertinya tidak tepat. Hanya dalam kasus-kasus luar biasa seperti dalam tuduhan pembunuhan, terdakwa mengajukan pembelaan atas pengurangan tanggung jawab, hakim sua sponte (atas kemauannya sendiri) dapat mengajukan isu kegilaan: Dickie, di atas, dan Thomas [1995] Crim LR 314 (CA). Kasus pengecualian terjadi ketika semua bukti medis mendukung kegilaan, namun pembela tidak mengangkat isu tersebut.
- (d) Berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan untuk Mengaku) tahun 1991, pasal 1, juri tidak dapat mengembalikan putusan tidak bersalah karena alasan kegilaan kecuali ada bukti dari dua praktisi medis, yang salah satunya telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. memiliki pengalaman dalam gangguan mental, telah dikemukakan. Tampaknya jika semua bukti medis bersifat satu arah, juri harus mengandalkannya; Namun, jika bukti-bukti tersebut tidak memberikan dampak yang sama, juri harus memilih kesaksian mana yang dapat dipercaya.
- (e) Biasanya bukti kegilaan tidak terbantahkan dan baik pihak Kerajaan maupun psikiater pembela sepakat mengenai 'penyakit pikiran'. Meskipun demikian, hakim tidak dapat memutuskan terdakwa sampai juri memberikan putusan khusus tidak bersalah karena alasan kegilaan.

Kritik terhadap Aturan M'Naghten

- (a) Kritik lama terhadap Aturan M'Naghten adalah bahwa tidak ada seorang pun yang cukup gila untuk menjadi gila secara hukum dan melakukan pembelaan ini. Namun, setelah adanya kasus epilepsi dan berjalan dalam tidur, kekuatan kritik ini telah berkurang. Seorang psikotik mungkin tidak memiliki pembelaan ini karena definisinya mungkin tidak terpenuhi. Misalnya, Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, mengetahui sifat tindakannya dan kesalahannya. Kritik tersebut saat ini harus diutarakan sebagai berikut: dalam beberapa hal Peraturan ini terlalu sempit, sementara dalam beberapa hal lainnya terlalu luas.
- (b)) Frase kunci dalam definisi tersebut tidak jelas: apakah penyakit pikiran itu? Sampai saat ini, berjalan dalam tidur bukanlah sebuah penyakit, namun dianggap sebagai

sebuah ilustrasi pertahanan terhadap otomatisme. Oleh karena itu, luasnya frasa ini perlu diklarifikasi.

- (c) Berdasarkan Peraturan tidak ada pembelaan atas dorongan yang tidak dapat ditolak: True (1922) 27 Cox CC 287, Kopsch (1925) 19 Cr App R 50, Sodeman v R, di atas, dan Jaksa Agung Australia Selatan v Brown [1960] AC 432, meskipun ini merupakan bukti yang menunjukkan kedua 'bagian' ketiga dari tes M'Naghten. Ujian itu mengabaikan pengendalian diri. Demikian pula pertahanan tidak memenuhi faktor emosional. Terdakwa bersalah jika dia tahu apa yang dia lakukan dan bahwa apa yang dia lakukan itu salah secara hukum, meskipun dia tidak memiliki perkembangan emosional untuk memahami pengetahuan tersebut. Beberapa dari kritik ini telah diredakan dengan diperkenalkannya tanggung jawab yang berkurang. Lihat di bawah.
- (d) Tidak penting apakah kegilaan itu bersifat permanen atau sementara, dan bahkan apakah penyakit pikiran dapat disembuhkan.
- (e) Tes tersebut tidak ilmiah. Juri adalah badan yang memutuskan apakah seseorang gila, bukan dokter, setelah hakim memutuskan apakah ada bukti kegilaan. Juri mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang ada, dan terdapat beberapa bukti anekdotal bahwa Peraturan M'Naghten diabaikan: juri bertanya pada diri sendiri apakah terdakwa gila atau tidak. Juri dapat menolak bukti medis, seperti yang terjadi pada, misalnya, Benar, di atas. Ada dugaan bahwa undang-undang ini melanggar Pasal 5 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa orang yang sakit jiwa hanya dapat ditahan setelah bukti medis digunakan. Berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan untuk Mengaku) tahun 1991, bukti dari setidaknya dua praktisi medis, yang salah satunya telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, diperlukan sebelum juri dapat mengembalikan putusan tidak bersalah dengan alasan penyakit jiwa. Salah satu anomalinya adalah meskipun definisi kegilaan adalah definisi yang sah, terdakwa mungkin terikat pada lembaga yang menangani kondisi medis. Pasal 5(1) mensyaratkan 'bukti medis yang obyektif' menurut Winterwerp v Belanda (1979) 2 EHRR 387. Karena juri harus menerapkan definisi hukum, bukan medis, maka kemungkinan besar Pasal 5(1) adalah dilanggar. Hiperglikemia, epilepsi, dan berjalan dalam tidur tampaknya tidak menjadikan penderitanya sebagai 'orang yang tidak sehat' berdasarkan Pasal 5(1). Selain itu, Winterwerp menuntut agar gangguan mental tersebut harus merupakan jenis yang memerlukan pengurangan wajib; namun, hukum Inggris menyatakan bahwa seseorang yang dibebaskan dari pembunuhan karena alasan kegilaan harus ditahan di rumah sakit. Pengadilan Banding di Grant [2002] 1 Cr App R 528 menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu hal yang 'memiliki beberapa kesulitan' sehingga 'tidak ada seorang pun yang diwajibkan secara khusus untuk menjawab, sebelum orang tersebut ditahan, pertanyaan apakah ia menderita penyakit mental gangguan yang cukup serius sehingga memerlukan penahanan'. Penahanan tersebut mungkin bersifat 'sewenang-wenang' dan melanggar Pasal 5(1)(e), namun hal ini tidak terjadi berdasarkan fakta Grant karena dalam kasus apa pun terdakwa mengalami gangguan mental. Oleh

karena itu, dia 'tidak waras'. Dia juga berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinjauan Kesehatan Mental. Grant sendiri merupakan kasus yang tidak layak untuk diajukan, namun hal ini berlaku secara umum. Penyakit mental dan kecacatan bukanlah subjek yang tepat untuk pengadilan hukum pidana. Dalam pembunuhan, komitmen seperti itu tetap wajib, namun pelakunya mungkin tidak sakit jiwa secara medis. Banyak penyakit yang dibahas dalam bagian ini adalah penyakit yang dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Tidaklah pantas untuk menyebut kondisi seperti itu sebagai 'kegilaan'. Jika terdakwa tidak meminum obat yang diresepkan, masalahnya mungkin adalah apakah dia lupa pada suatu waktu atau apakah dia karena alasan tertentu tidak menggunakan obat tersebut. Undang-undang yang berlaku saat ini tidak mempertimbangkan masalah-masalah seperti itu.

- (f) Masalah ini dikemukakan dengan baik oleh Komisi Hukum Skotlandia dalam Makalah Diskusinya No. 122, *Kegilaan dan Tanggung Jawab yang Berkurang*, 2003. Aturan M'Naghten mungkin tidak sesuai dengan 'kriteria Winterwerp (bahwa harus ada (i) kondisi mental di waktu pembuangan [penekanan pada aslinya], (ii) ditetapkan berdasarkan bukti medis, yang (iii) memerlukan penahanan wajib). Aturan M'Naghten tidak serta merta memenuhi kriteria ini, karena berkaitan dengan kegilaan pada saat melakukan pelanggaran. . . , dan menggunakan definisi khusus penyakit pikiran yang tidak sesuai dengan pendekatan ilmu kedokteran. Namun masih jauh dari jelas bahwa pelanggaran terhadap Konvensi merupakan hasil dari tes yang digunakan untuk membuktikan kegilaan. Jika ada pelanggaran yang disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan akibat-akibat pelepasan pembelaan. Pasal 5(1)(e) dan keputusan Winterwerp tidak membahas kegilaan sebagai masalah tanggung jawab pidana namun mengenai batasan kekuasaan negara untuk menahan orang berdasarkan gangguan mental mereka. Hal ini berlaku sepanjang Konvensi prihatin, bahwa pengujian pertahanan dapat dilakukan secara luas atau sempit dan dapat mempertimbangkan berbagai pertimbangan kebijakan.
- (g) Penerapan Peraturan dapat menimbulkan masalah. Sebuah ilustrasi lama mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak akan lepas dari tanggung jawab jika khayalannya tidak berhubungan dengan kesalahan hukum. Oleh karena itu, jika seseorang meyakini dirinya sebagai Napoleon, ia tidak akan mendapat pembelaan ini karena Napoleon tidak diperbolehkan membunuh.
- (h) Beban pembuktiannya anomali. Kegilaan merupakan satu-satunya pembelaan common law di mana beban ada pada terdakwa, dan posisi ini sulit untuk dibenarkan kecuali secara historis. Bisa saja terjadi benturan dengan tugas jaksa untuk membuktikan mens rea. Pembuktian mens rea berarti terdakwa mengetahui sifat dan mutu perbuatannya. Namun aturan khusus bagi orang gila berarti ia harus membuktikan bahwa ia tidak mengetahui sifat dan kualitas perbuatannya. Jika penuntut telah membuktikan mens rea, kegilaan menuntut terdakwa untuk menyangkal apa yang telah dibuktikan! Masalah ini menunggu penyelesaian hukum. Konflik ini tidak terjadi ketika terdakwa berusaha menunjukkan bahwa dia tidak

mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah. Hubungan antara kegilaan dan mens rea belum terselesaikan secara memuaskan. Dalam *DPP v H* [1997] 1 WLR 1406 Pengadilan Divisi menyatakan bahwa kegilaan, berdasarkan fakta manik depresi ditambah dengan penilaian yang menyimpang dan gangguan pada perasaan moral dan pemahaman terdakwa tentang waktu, bukanlah pembelaan terhadap pelanggaran tanggung jawab ketat karena kegilaan berarti bahwa terdakwa tidak memiliki mens rea atas pelanggaran yang didakwakan, sedangkan menurut definisi pelanggaran tanggung jawab ketat tidak memiliki mens rea mengenai satu atau lebih unsur actus reus. *DPP v H* tampaknya salah. Mens rea bukannya bertentangan dengan kegilaan. Misalnya, seseorang mungkin berniat membunuh, tetapi tetap saja menjadi gila. Memang benar, bagian dari Peraturan M'Naghten yang berkaitan dengan pengetahuan terdakwa bahwa ia telah bertindak salah dalam hukum menyangkut orang-orang yang mempunyai mens rea. Jika terdakwa tidak menghargai sifat dan kualitas perbuatannya, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak bertindak secara sukarela dan oleh karena itu tidak ada actus reus. Kurangnya mens rea tidak relevan dalam situasi seperti ini. (*DPP v H* juga dikenal sebagai *DPP v Harper*.) Ada beberapa kasus di mana kegilaan menjadi pembelaan terhadap pelanggaran berat. Contoh yang terkenal adalah *Hennessy* [1989] 1 WLR 287 (CA), kasus mengemudi sambil didiskualifikasi. Kasus ini tidak dirujuk dalam *DPP v H*.

- (i) Pembelaan atas kegilaan merupakan satu-satunya pembelaan apabila hakim tidak dapat menerima pembelaan terdakwa. Dia dapat melakukan hal tersebut sebagai pembelaan 'mitra' atas berkurangnya tanggung jawab.
- (j) Psikiater tidak memiliki cara yang dapat diandalkan untuk mengetahui apakah seseorang tidak waras pada saat melakukan pelanggaran. Mereka hanya bisa mengandalkan apa yang dikatakan dan dilakukan terdakwa. Terdakwa yang cerdas mungkin saja berbohong. Atas dasar ini dia mungkin lolos dari hukuman atas kejahatannya.
- (k) Tampaknya sulit untuk membujuk orang yang 'tidak waras' untuk mengaku gila.
- (l) Ujiannya adalah semua atau tidak sama sekali. Entah terdakwa gila atau tidak. Tidak ada vonis 'sebagian gila'.
- (m) Beberapa orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa mungkin lebih berbahaya ketika mereka keluar daripada ketika mereka masuk.
- (n) Mengapa jawaban terhadap pertanyaan hipotetis harus mengikat secara hukum? Para hakim di M'Naghten tidak pernah bermaksud agar Peraturan mereka dibaca seolah-olah itu adalah kata-kata dalam sebuah undang-undang.
- (o) Sebagaimana dinyatakan di atas, mungkin lebih baik mengaku bersalah daripada mencoba membuktikan kegilaan karena masalah pembuangan. Mungkin lebih dapat diterima, kecuali dalam kasus pembunuhan, jika terdakwa menerima hukuman daripada pergi ke rumah sakit yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri, seperti yang terjadi sebelum tahun 1992. Bahkan sekarang, putusan bersalah mungkin lebih disukai terdakwa daripada hukuman kegilaan.

- (p) Penyakit pikiran sebagian ditentukan berdasarkan kemungkinan kambuhnya penyakit tersebut. Prediksi ini mungkin saja salah, namun orang-orang tergolong gila karenanya.
- (q) Tidak dapat dikatakan bahwa argumentasi mengenai kewarasan seseorang paling baik diadili di pengadilan pidana.

Kesimpulannya, mungkin kritik utama adalah yang pertama dan ketiga. Peraturan ini terlalu luas karena mencakup epilepsi (Sullivan, di atas) namun terlalu sempit karena tidak mencakup kurangnya kendali yang timbul dari kondisi mental. Jika Peraturan ini didasarkan pada teori yang masuk akal, penerapan fakta-fakta tidak akan sulit. Pembebasan cepat beberapa orang saat ini tidak membenarkan hukum.

9.3 PEMBARUAN

Komisi Kerajaan untuk Hukuman Mati, Cmd 8932, 1953, merekomendasikan agar seluruh rangkaian Aturan M'Naghten dihapuskan. Perlu dicatat bahwa juri (bukan dokter) harus menanyakan apakah terdakwa menderita penyakit pikiran 'sedemikian rupa sehingga ia tidak bertanggung jawab'. Jika kebijakan tersebut tidak dapat diterima, para anggota menginginkan dua pembelaan baru, yaitu dorongan yang tidak dapat ditolak dan tanggung jawab yang berkurang. Hanya usulan terakhir yang sebagian diberlakukan dalam Undang-undang Pembunuhan tahun 1957 (lihat di bawah). Permasalahan kegilaan tetap berada di tangan para juri karena dipandang sebagai masalah moralitas, bukan masalah pengobatan. Panitia Revisi Hukum Pidana mengusulkan dalam Laporan Kesebelasnya, Bukti (Umum), Cmnd 4991, 1972, 88, untuk menempatkan beban pembuktian hukum pada penuntut, dan hanya menyisakan beban pembuktian pada terdakwa. Komite Butler (Laporan Komite Pelanggar Abnormal Mental, Cmnd 6244, 1975) juga mengusulkan agar beban pembuktian ada pada penuntutan dan merekomendasikan agar orang yang mengalami gangguan mental terus dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Pertanyaannya adalah 'apakah pelakunya, akibat kegilaannya, jauh lebih tidak bertanggung jawab dibandingkan orang normal sehingga kita hanya bisa memperlakukannya sebagai orang yang sepenuhnya tidak bertanggung jawab'.

Orang yang tidak rasional tidak boleh dituntut secara pidana. Tidak perlu ada hubungan antara gangguan mental dan kejahatan. Peraturan M'Naghten tidak memuaskan dan harus dibatalkan. Putusan baru 'tidak bersalah berdasarkan bukti gangguan mental' telah diusulkan. Terdakwa akan mendapatkan pembelaan ini jika dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan atau menderita penyakit mental yang parah atau keadaan tidak normal yang parah. Pada tahap pertama, beban pembuktian ada pada penuntut, dan pembela tidak mencakup keadaan sementara yang timbul karena mabuk atau cedera fisik. Komite Butler berpikir bahwa definisi mereka akan lebih luas daripada Aturan M'Naghten karena akan mencakup orang-orang seperti orang-orang yang memiliki mental di bawah normal yang saat ini tidak memiliki pembelaan. Pada tungkai kedua:

Penyakit mental dikatakan parah bila memiliki satu atau lebih ciri-ciri berikut:

- (a) gangguan fungsi intelektual yang berkepanjangan yang ditunjukkan oleh kegagalan memori, orientasi, pemahaman dan kapasitas belajar;

- (b) perubahan suasana hati yang berlangsung lama hingga menimbulkan penilaian delusional terhadap situasi pasien, masa lalunya atau masa depannya, atau situasi orang lain, atau kurangnya penilaian apa pun;
- (c) keyakinan delusional, penganiayaan, cemburu atau muluk-muluk;
- (d) persepsi abnormal yang terkait dengan salah tafsir peristiwa secara delusional;
- (e) pemikiran yang tidak teratur sehingga menghalangi penilaian yang wajar terhadap situasi pasien atau komunikasi yang wajar dengan orang lain.

Oleh karena itu, definisi gangguan jiwa tidak mencakup penderita diabetes, orang yang berjalan dalam tidur, dan penderita epilepsi seperti yang diatur dalam undang-undang saat ini. Putusan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan terdakwa dimasukkan ke rumah sakit: hakim mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pelepasan, termasuk memberikan izin untuk keluar secara mutlak. Komite Butler mengusulkan agar beban pembuktian berada pada pihak penuntut, namun pasal 35 dari rancangan KUHP menetapkan bahwa pihak penuntut atau pembela harus diizinkan untuk membuktikan gangguan jiwa dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Usulan-usulan ini masih belum dilaksanakan. Komite Revisi Hukum Pidana pada tahun 1980, Laporan Keempat Belas, Pelanggaran terhadap Orang Cmnd 7844, merekomendasikan penerapannya. Mereka mendapat kesempatan hidup baru pada tahun 1985 ketika RUU KUHP memuat mereka (UU No. 143) dan pada tahun 1989 ketika Komisi Hukum mengusulkan pengesahannya (UU Laporan No. 177): KUHP untuk Inggris dan Wales. Klausul 35–36 akan menghapuskan pembelaan atas kegilaan, sehingga menghilangkan stigma sebagai orang yang tidak waras, sebuah sebutan yang dianggap 'ofensif' oleh Komisi Hukum, menggantikannya dengan pembelaan tidak bersalah atas bukti gangguan jiwa jika gangguan jiwa tersebut meniadakan laki-laki tersebut. *rea* dan dengan putusan 'gangguan jiwa' baik meniadakan *mens rea* atau tidak (dengan kata lain meskipun terdakwa tidak mempunyai unsur kejiwaan atas tindak pidana yang didakwakan, ia tetap dapat dikenakan pengekangan oleh sistem peradilan pidana.), dan untuk mendapatkan pembelaan ini, terdakwa harus menderita 'penyakit mental yang parah atau cacat mental yang parah'. Dorongan yang tidak terkendali tidak termasuk dalam istilah 'penyakit mental yang parah'. Tidak perlu ada hubungan sebab akibat antara gangguan mental dan kejahatan. Baik penuntut maupun pembela dapat membuktikan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa. Namun, Komisi Hukum tidak mengusulkan implementasi penuh Laporan Butler. 'Gangguan mental' tidak lagi mencakup depresi sementara, namun akan mencakup penderita diabetes yang tidak menggunakan insulin dan penderita epilepsi, dan orang dengan 'gangguan mental berat' akan dihukum terlepas dari apakah kejahatan tersebut disebabkan oleh penyakitnya atau tidak. Yorkshire Ripper pasti akan mendapat pembelaan jika proposal ini dilaksanakan. Undang-undang tahun 1991 mempertahankan komitmen wajib jika terdakwa melakukan pembunuhan.

Pandangan Komisi Hukum mengenai hal ini tidak diketahui. Baik pihak penuntut maupun pihak pembela berhak untuk mengajukan pembelaan, sedangkan Laporan Butler menempatkan beban pembuktian secara tegas pada pihak penuntut. Komisi pada saat laporan

ini ditulis bermaksud untuk mempertimbangkan ketidakwarasan dan ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan.

Pemberlakuan Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan Mengaku) tahun 1991 mungkin telah mengurangi tekanan untuk melakukan reformasi. Undang-undang tersebut mereformasi prosedur dan hukuman, namun tidak mengubah substansinya. Sangat disayangkan jika reformasi menghalangi amandemen undang-undang untuk mencegah orang-orang seperti terdakwa di Burgess distigmatisasi sebagai orang gila. Banyak reformasi lain yang diusulkan terutama di AS setelah John Hinckley dibebaskan dari percobaan pembunuhan Presiden saat itu, Ronald Reagan. Beberapa negara bagian benar-benar menghapuskan pembelaan terhadap kegilaan.

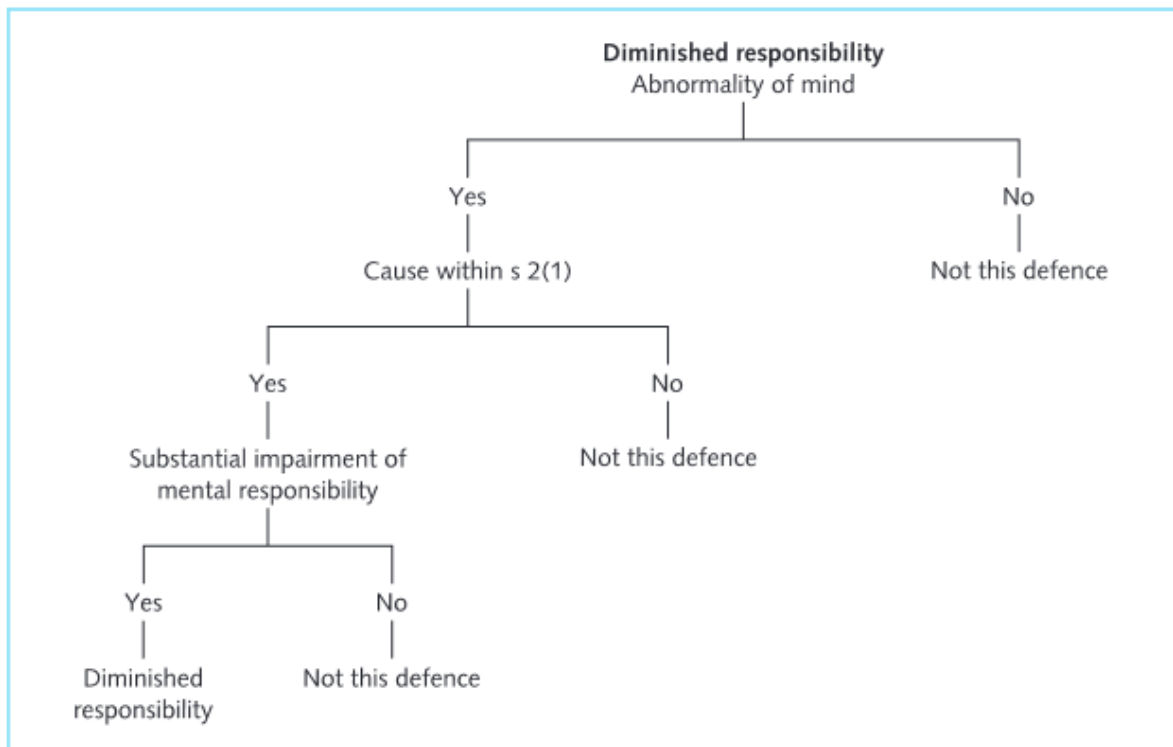
Pemberlakuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998 diperkirakan akan membawa perubahan pada undang-undang. Salah satu pendapat yang dikemukakan adalah penerapan Aturan M'Naghten dalam kasus seperti Burgess tidak lagi dapat dibenarkan. Burgess diputuskan, setidaknya sebagian, karena terdakwa berbahaya. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia mengatur penahanan yang sah terhadap mereka yang 'tidak waras' namun tidak mengizinkan penahanan atas dasar bahaya. Lihat juga pembahasan Winterwerp dan Grant di atas.

Tanggung jawab berkurang

Pertahanan ini 'melakukan sesuatu untuk mengkompensasi kurangnya pertahanan kegilaan yang dapat digunakan' (E. Griew 'The future of berkurangnya tanggung jawab' [1988] Crim LR 75 at 87). Tentu saja tekanan untuk mereformasi undang-undang tentang kegilaan menurun setelah tahun 1957. Sebuah statistik dari sebelum berlakunya Undang-Undang Pembunuhan menunjukkan kebenaran dari kutipan tersebut: pada tahun 1990 terdapat 49 permohonan pengurangan tanggung jawab yang berhasil, namun hanya satu yang mengajukan permohonan atas kegilaan. Angka serupa terjadi sepanjang tahun 1990an. Terdapat 46 kasus pada tahun 1997 namun hanya 15 kasus pada tahun 2001–02. Kebanyakan permohonan berhasil. Perlakuan akademis yang utama adalah S. Dell, *Murder to Manslaughter* (OUP, 1984). Ia mencatat bahwa dalam sebagian besar kasus, hakim menerima permohonan terdakwa (dan posisinya tetap sama hingga saat ini dengan kurang dari 15 persen permohonan yang mengarah ke persidangan). Jika hakim tidak melakukannya, sebagian besar terdakwa dihukum karena pembunuhan.

Dapat dikatakan bahwa seseorang yang tanggung jawab mentalnya terganggu tidak boleh dinyatakan bersalah sama sekali dan bahwa ia harus mendapat pembelaan terhadap semua kejahatan, namun pembelaan khusus yang hanya berlaku untuk pembunuhan (Gambar 9.2) telah dibuat oleh pasal 2(1) Undang-Undang Pembunuhan 1957: Apabila seseorang membunuh atau ikut serta dalam pembunuhan orang lain, maka ia tidak akan dihukum karena pembunuhan jika ia menderita kelainan pikiran tersebut (baik yang timbul dari kondisi terhambatnya atau terhambatnya perkembangan pikiran atau sebab-sebab bawaan atau sebab-sebab yang menyebabkannya). karena penyakit atau cedera) yang secara substansial melemahkan tanggung jawab mentalnya atas tindakan atau kelalaiannya dalam melakukan atau menjadi pihak dalam pembunuhan tersebut.

Oleh karena itu, berkurangnya tanggung jawab merupakan pembelaan khusus: yaitu, tanggung jawab hanya berlaku pada pembunuhan atau menjadi pihak sekunder (penolong, dll.) dalam pembunuhan. Ini bahkan bukan pembelaan terhadap percobaan pembunuhan: Campbell [1997] Crim LR 495 (Crown Court). Oleh karena itu, jika korban meninggal maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan tidak berencana, namun jika korban masih hidup maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan percobaan pembunuhan. Dalam hal ini berbeda dengan kegilaan yang berpotensi berlaku pada semua pelanggaran. Sehubungan dengan pelanggaran lainnya, pengurangan tanggung jawab dapat diperhitungkan dalam hukuman. Lebih jauh lagi, pengurangan tanggung jawab berlaku meskipun terdakwa mengetahui sifat dan kualitas tindakannya serta mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah secara hukum. Tidak perlu dibuktikan bahwa berkurangnya tanggung jawab menyebabkan kematian. Namun, seperti halnya kegilaan, beban pembuktian ada pada terdakwa: pasal 2(2). Hakim harus mengarahkan juri bahwa hal ini memang demikian: Dunbar [1958] 1 QB 1. Ia juga harus memberitahu mereka bahwa bebannya ada pada keseimbangan probabilitas. Kebalikan dari tanggung jawab yang ditemukan dalam pasal 2(2) tidak bertentangan dengan Pasal 6 Konvensi Eropa karena pembelaan bukan merupakan unsur dalam kejahatan pembunuhan: Lambert [2002] 2 AC 545 (HL), dibahas dalam Bab 1. Jika terdakwa diwakili oleh penasihat hukum, hanya pembela yang dapat mengajukan pembelaan ini: Campbell (1987) 84 Cr App R 255 (CA, obiter). Pengadilan mengatakan bahwa keputusan ini mengikuti pasal 2(2). Jika terdapat bukti berkurangnya tanggung jawab, hakim hanya dapat menunjukkan bukti tersebut kepada penasihat hukum terdakwa: pembelaan dalam hal ini bersifat opsional. Bandingkan dengan provokasi, yang beban pembuktiannya ada pada penuntut: hakim harus mengarahkan juri untuk melakukan provokasi meskipun terdakwa tidak ingin provokasi tersebut dipertimbangkan. Jika pembela berpendapat bahwa terdakwa mengalami pengurangan tanggung jawab, maka penuntut dapat memberikan bukti bahwa ia tidak waras: Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan) tahun 1964, pasal 6. Untuk situasi sebaliknya, lihat 'Hal-hal yang perlu diperhatikan' di bawah.



Gambar 9.2 Berkurangnya tanggung jawab

Pembahasan lebar pertahanan

'Kelainan pikiran', 'kerusakan substansial' dan 'tanggung jawab mental' tidak memiliki definisi hukum atau medis yang pasti. Pertimbangan utama pembelaan ini terjadi dalam *Byrne* [1960] 2 QB 396, dimana terdakwa mempunyai desakan yang tidak dapat ditolak dan menunjukkannya dengan memutilasi tubuh korbannya. Dia sadar akan apa yang dia lakukan dan tidak termasuk dalam aturan M'Naghten tentang kegilaan. Sebaliknya dia merasa mustahil atau hampir mustahil untuk menolak dorongan hatinya. Lord Parker CJ di Pengadilan Banding Pidana menyampaikan tiga poin.

- (a) 'Kelainan pikiran' mencakup ketidakmampuan untuk membuat penilaian rasional atau menggunakan kemauan keras untuk mengendalikan tindakan seseorang. Tidak perlu ada ketidakmampuan total untuk mengendalikan dorongan hati seseorang. Oleh karena itu, dorongan hati yang tidak dapat ditolak termasuk dalam 'kelainan pikiran'. Ini mencakup 'aktivitas pikiran dalam semua aspeknya'. Misalnya, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 'Pikiran' mencakup pemahaman, persepsi dan penilaian. Tidak ada batasan mengenai jenis gangguan jiwa yang dapat memenuhi syarat, namun kelainan jiwa tersebut harus berasal dari salah satu penyebab dalam tanda kurung pada pasal 2(1). Misalnya, termasuk keadaan psikopat, seperti keinginan abnormal untuk minum, dan tidak diragukan lagi beberapa kasus dorongan yang tidak dapat ditolak: lihat *Spriggs* [1958] 1 All ER 300 (CCA): psikopat dengan gangguan emosional. Dalam *Ahluwalia* [1992] 4 All ER 889 Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa penyakit depresi berat dapat menyebabkan berkurangnya tanggung jawab. Disosiasi juga merupakan kelainan pikiran. Dalam *Sanderson* (1994)

98 Cr App R 325 (CA) psikosis paranoid dikatakan muncul dari penyebab yang melekat dalam s 2(1) Undang-Undang Pembunuhan 1957. Berikut adalah tiga cara di mana berkurangnya tanggung jawab berbeda dari kegilaan: Aturan M'Naghten tidak mencakup dorongan yang tidak dapat ditolak; hal tersebut dibatasi sepengetahuan terdakwa; dan hal-hal tersebut tidak mencakup ketidakmampuan mengendalikan tindakan seseorang.

Lord Parker mengira ungkapan itu berarti sesuatu yang 'mendekati kegilaan'. Namun, dalam *Rose v R* [1961] AC 496 Lord Tucker berpendapat bahwa penjelasan ini tidak membantu seperti halnya Pengadilan Banding yang membatalkan hukuman ketika hakim pengadilan mengarahkan juri bahwa kondisi mental terdakwa mendekati kegilaan pada *Pelihat* (1984) 79 Cr App R 261, setidaknya jika penyakitnya merupakan penyakit depresi kronis. Depresi adalah kelainan pikiran, namun mungkin bukan penyakit pikiran dalam definisi kegilaan. Pengadilan di *Seers* membatalkan hukuman tersebut karena hakim pengadilan tidak mengarahkan juri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di *Byrne*, namun menggunakan frasa 'kegilaan sebagian'. Hilangnya tanggung jawab tidak harus disebabkan oleh kegilaan parsial dan tidak terjadi jika penyebabnya adalah depresi kronis. Demikian pula dalam *Brown* [1993] Crim LR 961 pengadilan menyatakan bahwa kelainan pikiran lebih luas daripada kegilaan dan gangguan mental. Ini termasuk penyimpangan persepsi, pemahaman dan penilaian. Di *Adams*, tidak dilaporkan, 29 Januari 1985, pengadilan mengatakan bahwa yang terbaik adalah menghilangkan referensi tentang kegilaan ketika tanggung jawab pembelaan berkurang. Tentu saja pembaca tidak boleh memvisualisasikan kedua pembelaan tersebut sebagai hal yang terpisah dalam kaitannya dengan gangguan mental: fakta yang sama dapat menimbulkan pembelaan yang mana pun. Penyakitnya tidak harus berupa penyakit pikiran.

- (b) Abnormalitas berarti 'keadaan pikiran yang sangat berbeda dengan manusia biasa sehingga orang yang berakal dapat menyebutnya abnormal'. Definisi Lord Parker CJ tampaknya hanyalah cara lain untuk menyatakan apa yang dinyatakan dalam undang-undang. Ia tidak dengan sendirinya membedakan keadaan pikiran yang abnormal dan normal. Ungkapan ini mencakup psikopat, seperti dalam diri *Byrne* sendiri, penderita depresi (tetapi bukan orang yang mengalami depresi sebagai respons terhadap pengaruh eksternal karena tidak ada 'penyebab bawaan', meskipun wanita yang mengalami kekerasan dan setidaknya satu pria yang mengalami depresi telah berhasil dalam hal ini. pembelaan atas dasar bahwa sindrom orang yang dipukuli disebabkan oleh cedera: lihat khususnya *Ahluwalia* [1992] 4 Semua ER 889) dan orang yang menderita dorongan hati yang tidak dapat ditolak. *Tony Martin*, terdakwa yang menembak mati seorang pencuri di rumah pertaniannya yang terpencil, menderita gangguan kepribadian paranoid dan depresi yang sudah berlangsung lama. Pengadilan Banding menyatakan bahwa dia berhak atas pembelaan ini: *Martin* [2003] QB 1. Termasuk orang yang membunuh karena cemburu: *Miller* (1972) *The Times*, 16 Mei; dan seorang wanita yang menderita PMT: antara lain, *Smith* [1982] Crim LR 531,

namun perhatikan bahwa dia kemudian dinyatakan bersalah karena mencoba membunuh seorang polisi. Kecemburuan yang tidak wajar termasuk dalam 'penyebab inheren': Vinagre (1979) 69 Cr App R 104 (CA). Paranoia dianggap sebagai 'penyebab inheren' dalam s 2(1) di Simcox [1964] Crim LR 402. Namun, Yorkshire Ripper Sutcliffe (1981) The Times, 23 Mei, dan pembunuh homoseksual di London utara Neilson, tidak dilaporkan, 1983, keduanya dinyatakan bersalah atas pembunuhan meskipun terdapat banyak bukti adanya kelainan. Sutcliffe tampak seperti seorang penderita skizofrenia paranoid namun hakim menolak untuk menerima kesepakatan antara jaksa dan pembela bahwa ia memiliki pembelaan ini. Bagi orang yang tidak terdidik, seorang penderita skizofrenia paranoid akan tampak lebih mudah kehilangan tanggung jawabnya karena kondisi mentalnya dibandingkan dengan seorang wanita dengan PMT, namun kasus-kasus tersebut memiliki dampak yang berlawanan. Sebuah kasus yang dilaporkan di mana Pengadilan Banding memutuskan bahwa tidak ada cedera pada pikiran adalah O'Connell [1997] Crim LR 683. Gangguan pikiran yang dialami terdakwa disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang diresepkan, bukan oleh 'cedera'.

Apabila bukti medis masih diperdebatkan, juri diinstruksikan untuk melakukan pendekatan terhadap penyebab ini dengan cara yang masuk akal. Lihat juga poin (d) dari Poin yang perlu diperhatikan, di bawah. Juri diperkirakan menggunakan akal moralnya, bukan menerapkan hukum. Dengan kata lain, jika juri berpendapat bahwa terdakwa harus menanggung stigma sebagai terpidana pembunuhan, mereka tetap memvonis bersalah meskipun terdapat bukti substansial adanya kelainan mental. Seperti yang akan kita lihat, terkadang bukti yang lemah mengarah pada kesimpulan sebaliknya: lihat (f) pada Hal-hal yang perlu diperhatikan, di bawah. Haruskah mereka melakukan hal tersebut? Disarankan bahwa bagian dari Byrne ini tidak terlalu membantu. Bagaimana jika sebagian juri berpendapat bahwa keadaan pikirannya tidak normal dan sebagian lagi tidak? Ini bukanlah dasar yang memuaskan untuk menyatakan seseorang bersalah.

- (c) Pertanyaan apakah terdakwa menderita kelainan pikiran dan apakah hal itu secara substansial mengganggu 'tanggung jawab mentalnya' (sebuah frase yang salah pilih: mungkin yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum, meskipun tidak ada hukum yang menafsirkannya) adalah tanggung jawab juri. menggunakan akal sehat, bukan untuk psikiater. Tidak boleh ada 'persidangan oleh psikiater': Roberts [2005] EWCA Crim 199. Misalnya, di Tulloch, tidak dilaporkan, 25 Februari 2000 (CA) terdakwa bersama orang lain telah merencanakan pembunuhan, pulang ke rumah untuk mengambil palu, memukuli korban dengan itu berulang kali, dan mengarang cerita palsu untuk polisi. Diduga bahwa meskipun ia mempunyai kelainan kepribadian yang disebabkan oleh kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan ayah tirinya, tanggung jawab mentalnya tidak mengalami gangguan yang berarti. Pembahasan tanggung jawab mental menurut Lord Parker CJ di Byrne melibatkan pertimbangan 'kemampuan terdakwa untuk menggunakan kemauan untuk mengendalikan tindakan fisiknya'.

Pengadilan Banding menegaskan pendekatan ini dalam Tandy [1989] 1 All ER 267. Juri membentuk 'orang yang berakal sehat' di (b). Namun demikian, psikiater memberikan bukti apakah menurut mereka terdakwa bertanggung jawab secara mental. Hakim dapat menarik kembali masalah ini dari juri jika bukti tidak mengungkapkan bahwa tanggung jawab mental terdakwa telah dirugikan secara substansial. Apa yang perlu dipertimbangkan oleh juri adalah apakah karena penyakit mentalnya, kemampuan terdakwa untuk mengendalikan perilakunya berkurang ('merugikan secara substansial') dan, jika demikian, apakah penurunan kapasitas tersebut mengurangi kesalahan moral atas tindakannya?

Dua poin penafsiran lainnya harus disebutkan. Kelainan tersebut harus timbul dari salah satu sebab yang tercantum dalam tanda kurung pada pasal 2(1). Pertanyaan apakah kelainan pikiran muncul dari salah satu penyebab yang disebutkan dalam paragraf 2(1) adalah untuk para dokter: Byrne, di atas. Temperamen buruk dan kecemburuan (tetapi lihat Miller, di atas) tidak termasuk. Jika sindrom wanita yang babak belur muncul karena kekerasan, penyebabnya mungkin termasuk dalam poin 2(1). Pengadilan Banding memutuskan di Hobson [1998] 1 Cr App R 31 bahwa sindrom ini dapat menimbulkan pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab. Agaknya sindrom ini berasal dari 'penyebab bawaan' atau 'cedera'. Pengadilan Banding memutuskan di Sanderson, di atas, bahwa 'yang disebabkan oleh penyakit atau cedera' mencakup 'cedera organik atau fisik atau penyakit pada tubuh termasuk otak' dan bahwa 'segala penyebab yang melekat' mencakup 'penyakit mental fungsional'. Psikosis paranoid termasuk dalam 'penyebab bawaan'. 'Penyakit' mencakup beberapa, jika tidak seluruh, penyakit pikiran yang termasuk dalam definisi kegilaan. Psikopat masih menjadi masalah. Mereka mungkin termasuk dalam 'penyebab inheren' atau mungkin 'perkembangan terhambat' karena kesadaran moral mereka tidak berkembang seperti orang normal. Pengadilan memutuskan di Sanderson bahwa hakim harus merujuk hanya pada sebab tertentu atau sebab-sebab yang timbul berdasarkan fakta. Kedua, hakim harus mengarahkan para juri mengenai permasalahan substansial dari kerugian tersebut dengan dasar (a) bahwa mereka harus menggunakan istilah 'substansial' dengan cara yang masuk akal atau (b) bahwa kata tersebut berarti 'lebih besar'. daripada suatu tingkat kecacatan yang sepele yang tidak memberikan perbedaan yang berarti terhadap kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri, namun hal ini berarti lebih kecil dari kecacatan total.' Pilihan ekspresi ini disetujui dalam Egan (1992) 95 Cr App R 278 (CA). Namun, Pengadilan Banding dalam Mitchell [1995] Crim LR 506 menyatakan bahwa arahan mengenai seberapa substansial 'substansial' tersebut tidak perlu diberikan.

Terdakwa akan mendapatkan pembelaan ini jika kata-kata pada sub-bagian terpenuhi. Misalnya, tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak mampu menahan dorongan hatinya, asalkan dorongan tersebut bukan dorongan kecil: Simcox [1964] Crim LR 402 dan Lloyd [1967] 1 QB 175. Lebih jauh lagi, hal ini memang tidak dapat dilakukan. pembunuhan itu tidak menjadi masalah jika ketentuan pasal 2(1) dipenuhi: Matheson [1958] 2 Semua ER 87. Jika semua unsur pembelaan dipenuhi, maka terdakwa mempunyai pembelaan. Tidak masalah kelainan mental itu tidak menyebabkan dia terbunuh.

Hal Yang Perlu Diperhatikan

- (a) Hilangnya tanggung jawab hanya merupakan pembelaan terhadap pembunuhan atau menjadi pelengkap pembunuhan. Ini bertindak sebagai pembelaan bahkan ketika ada bukti perencanaan: *Matheson* (atas). Ini mengatasi hukuman wajib dengan memberikan kebijaksanaan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dampaknya, tentu saja, dorongan yang tidak dapat ditolak tidak memberikan pembelaan terhadap tuduhan lain seperti pencurian. Meskipun ada keleluasaan, bukanlah hal yang luar biasa bagi seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa bila ia berhasil dalam pembelaannya, seperti yang terjadi di *Byrne* di atas. Perlu diingat bahwa bahkan setelah Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan Mengaku) tahun 1991, komitmen adalah wajib bagi kegilaan dalam kasus pembunuhan dan bahwa berkurangnya tanggung jawab adalah pembelaan (hanya) terhadap pembunuhan; oleh karena itu, seorang terdakwa lebih cenderung mengandalkan berkurangnya tanggung jawab daripada kegilaan ketika dituduh melakukan pembunuhan.
- (b) Hilangnya tanggung jawab bukanlah pembelaan yang lengkap namun hanya sebagian. Ini mengurangi pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembantaian, dan seperti halnya pembunuhan, ia harus menerima hukuman tersebut. Oleh karena itu, bagi beberapa terdakwa, dampak keberhasilan dalam pembelaan ini adalah nihil, seperti yang terjadi dalam *Gittens* [1984] QB 698. Sekitar 30 persen dari mereka yang berhasil dalam pembelaan ini menerima hukuman penjara. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah rumah sakit berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Kesehatan Mental tahun 1983.
- (c) Jika terdakwa berusaha membuktikan bahwa ia tidak waras, penuntut dapat mengajukan bukti bahwa pembelaannya tidak mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, penuntut harus membuktikan bahwa tanggung jawabnya telah berkurang tanpa keraguan.
- (d) Hakim tidak boleh menerima permohonan pengurangan tanggung jawab jika bukti medis tidak dapat disangkal: *Cox* [1968] 1 Semua ER 386. Permohonan tidak boleh diterima tanpa bukti yang jelas mengenai kelainan pikiran: *Vinagre*, di atas. *S. Dell* (atas) menemukan bahwa hanya 13 persen dari sampelnya yang dokternya tidak setuju, namun jika mereka setuju, pembelaannya kemungkinan besar akan gagal. Efek dari *Cox* adalah menghindari persidangan atas pembunuhan, mungkin menyelamatkan masyarakat dari rincian pembunuhan yang sangat keji. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus *Yorkshire Ripper*. Dalam kebanyakan kasus, permohonan pengurangan tanggung jawab diterima.
- (e) Semua bukti yang berkaitan dengan kelainan mental, bukan hanya bukti medis, harus diperiksa oleh juri, setidaknya jika bukti medis tersebut diperdebatkan: *Walton v R* [1977] AC 788 (PC), *Kiszko* (1978) 68 Cr App R 62. Seperti yang dikatakan *Lawton LJ* dalam *Robinson* (1979) 1 Cr App R (S) 108: 'kasus-kasus ini harus diadili oleh hakim dan juri dan bukan oleh psikiater.' Juri dapat menolak bukti medis jika ada bukti lain: *Byrne*,

Walton v R dan Tandy, semuanya di atas. Jika hanya ada bukti medis, juri harus menerimanya: Matheson, di atas dan Sanders (1991) 93 Cr App R 245 (CA), obiter, yang juga menyetujui pernyataan hukum kalimat sebelumnya. Bukti medis biasanya berupa riwayat gangguan mental seperti serangkaian upaya bunuh diri. Bukti dapat diberikan mengenai sifat pembunuhan dan perilaku terdakwa sebelum, pada saat, dan setelah actus reus. Seperti halnya kegilaan, bukti medis apa pun tidak akan muncul sampai beberapa saat setelah pembunuhan. Psikiater harus mencoba merekonstruksi keadaan pikiran terdakwa sejak dini. Fakta bahwa terdakwa telah membunuh tentu saja dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Di Sanders, dua psikiater memberikan bukti bahwa terdakwa menderita kelainan pikiran, depresi, dan jaksa penuntut menerima bahwa dia menderita kelainan pikiran. Namun, pihak Crown berpendapat bahwa kelainan tersebut tidak terlalu mengganggu tanggung jawab mentalnya. Dia telah membuat persiapan seolah-olah dia akan bunuh diri tetapi dia tidak memasukkan korbannya, kekasih lamanya, di antara penerima manfaat dan ketika dia menulis surat kepada tiga atau empat orang untuk mengantisipasi kematiannya, dia tidak menulis surat kepada dia. Tampaknya juri menganggap pembunuhan itu direncanakan. Pengadilan berpendapat bahwa surat wasiat dan surat-surat tersebut menunjukkan bahwa terdapat bukti selain yang diberikan oleh psikiater yang dapat digunakan juri untuk menolak pembelaan. Perlu dicatat bahwa dokter akan memeriksa terdakwa setelah dia diduga membunuh korban dan pembunuhan tersebut mungkin berdampak pada pikirannya, dan mereka harus menilai keadaan pikirannya pada saat pembunuhan dari pemeriksaan mereka terhadapnya. di kemudian hari.

- (d) Kadang-kadang bukti yang lemah digunakan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan pembunuhan, misalnya. Price (1971) The Times, 22 Desember: seorang ayah membunuh putranya yang cacat parah. Ini terlihat seperti pembunuhan karena belas kasihan. Undang-undang tersebut tidak memiliki kategori 'tidak bersalah karena alasan pembunuhan karena belas kasihan'. Terdakwa menderita keadaan disosiatif. Bisa jadi kondisi mentalnya disebabkan oleh penyebab eksternal, yaitu anak cacat. Namun, alasan ini tidak termasuk dalam pembelaan. Oleh karena itu, pengadilan harus berkonsentrasi pada disosiasi, bukan pada penyebab disosiasi. Beberapa orang berpendapat bahwa beberapa kasus istri yang dipukuli juga merupakan contoh dari bukti yang lemah karena terdakwa, bagaimanapun juga, telah melakukan pembunuhan, dan pembunuhan tidak diperbolehkan, dan bahwa penasihat hukum mengetahui bahwa juri cenderung bersimpati terhadap perempuan yang mengalami pelecehan. Sekali lagi pengadilan harus berkonsentrasi pada kondisi mental, misalnya depresi, bukan pada penyebab ketidaknormalan pikiran, yaitu pemukulan. Lawton LJ berkomentar di Vinagre, di atas, sebagai berikut: 'Ada bukti yang jelas mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami yang cemburu, yang hingga zaman modern, tidak seorang pun mengira itu adalah pembunuhan.'
- (e) Jika terdakwa mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, juri harus mengabaikannya: Gittens, di atas (CA), yang tidak menyetujui Turnbull (1977) 65 Cr

App R 242. Oleh karena itu, terdakwa harus membuktikan dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa pembunuhan itu diakibatkan oleh kelainan pikiran dan bukan karena mabuk. Gittens, yang disetujui House of Lords di Dietschmann [2003] 1 AC 1209, diterapkan di Egan, di atas. Dalam kasus tersebut, terdakwa, yang digambarkan sebagai orang yang tidak normal, membunuh seorang janda tua setelah menerobos masuk ke rumahnya. Dia telah banyak minum. Pengadilan dalam keputusannya memutuskan bahwa keracunan harus diabaikan oleh juri ketika mempertimbangkan apakah kelainan tersebut secara substansial mengganggu tanggung jawab mental terdakwa dan mempertimbangkan penyebab kelainan tersebut. Pengabaian seperti ini mungkin menyulitkan juri. Salah satu dampak dari pihak berwenang adalah bahwa terdakwa yang ingin mendapatkan pembelaan harus membuktikan bahwa dia akan mendapatkan pembelaan, seandainya dia tidak mabuk! Mending Profesor Griew mengkritik proposisi ini. Agar terdakwa dapat memperoleh pembelaan ini, tidak perlu menunjukkan bahwa kelainan pikiran menyebabkan pembunuhan; Pasal 2(1) memberikan pembelaan bila terdakwa membunuh karena menderita gangguan pikiran. Oleh karena itu, tidak diperlukan hubungan sebab akibat, namun situasinya berbeda ketika terdakwa dalam keadaan mabuk. Dia harus membuktikan bahwa pembunuhan itu disebabkan oleh kelainan pikiran, bukan karena mabuk. Di Dietschmann, terdakwa membunuh korbannya saat keduanya mabuk berat dan menderita gangguan penyesuaian akibat kematian pacarnya. Kasus penuntutannya adalah dia tidak akan membunuh, seandainya dia sadar. Dia dihukum karena pembunuhan dan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Banding. Namun, Lords mengizinkan bandingnya. Lord Hutton memberikan contoh arahan yang menyatakan kembali hukum tersebut: minuman tidak dapat diperhitungkan sebagai sesuatu yang menyebabkan kelainan mentalnya dan segala gangguan tanggung jawab mentalnya namun Anda [juri] mungkin berpendapat bahwa kelainan mental [terdakwa] dan minuman keras berperan dalam mengganggu tanggung jawab mentalnya dan bahwa dia tidak akan membunuh jika dia tidak minum. Jika Anda mengambil pandangan itu, maka pertanyaannya adalah: apakah [terdakwa] telah meyakinkan Anda bahwa, meskipun telah meminum minuman keras, kelainan mentalnya secara substansial mengganggu tanggung jawab mentalnya atas tindakan fatal yang dilakukannya?

Kasus-kasus yang bertentangan harus dikesampingkan: Hendy [2006] EWCA Crim 819 dan Robson [2006] EWCA Crim 2749. Dalam Fenton (1975) 61 Cr App R 261, Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan sendiri mabuk bisa menjadi kelainan pikiran. Proposisi ini disetujui di Gittens. Namun, dalam Fenton disebutkan bahwa keinginan untuk minum dapat menimbulkan pikiran yang tidak normal, yang penyebabnya tidak dapat dipungkiri. Cedera permanen pada otak yang disebabkan oleh alkohol adalah 'cedera' dalam s 2(1): Tandy, di atas (CA), yang disetujui di Egan. Seorang ibu, seorang pecandu alkohol, meminum sembilan persepuluh botol vodka dan mencekik putrinya. Apakah penilaian dan respons emosionalnya sangat terganggu; alternatifnya apakah dia secara kronis tidak mampu menahan dorongan untuk minum, yaitu apakah dia minum tanpa

disengaja? Dia tidak akan mempunyai pembelaan jika minuman hanya membuatnya kurang mampu menahan godaan. Berdasarkan fakta, dinyatakan bahwa tidak ada kelainan pikiran dalam s 2(1). Untuk komentar lihat

J. Goodliffe 'R v Tandy dan konsep alkoholisme sebagai penyakit' (1990) 53 MLR 809, menunjukkan bahwa terdakwa membunuh saat listrik padam; oleh karena itu dia tidak punya laki-laki, apalagi mens rea; namun dia tidak punya pembelaan. Komentar N. Lacey dkk., *Reconstructing Criminal Law*, edisi ke-3 (Butterworths, 2003) 772, bersifat instruktif.

Menarik untuk membandingkan 'biografi' Moloney [lihat di bawah pembunuhan] dan Tandy yang dibuat secara hukum. House of Lords jelas dapat mengidentifikasi kekacauan yang dialami Moloney, seorang tentara, saat mabuk. Pengadilan Banding tidak menunjukkan pemahaman mengenai trauma emosional yang dialami Tandy ketika dia mengetahui suaminya telah menganiaya putrinya.

Ada pendapat bahwa efek sementara alkohol pada otak dapat diklasifikasikan sebagai cedera, namun pengadilan tidak berpendapat demikian dalam *Di Duca* (1959) 43 Cr App R 167. Pengadilan Banding dalam *O'Connell* [1997] Crim LR 683 berpendapat bahwa efek sementara dari obat tidur (yang diresepkan) tidak dapat digambarkan sebagai 'cedera'. Jika ya, efek alkohol juga harus disebut sebagai 'cedera' dalam pasal 2(1).

Sindrom ketergantungan alkohol tampaknya diterima dalam *Inseal* [1993] Crim LR 35 sebagai penyebab yang dapat merusak otak, baik terdakwa sedang minum atau tidak pada saat pembunuhan. Jika ia telah minum alkohol dan sindrom tersebut membuat ia meminumnya tanpa disengaja, maka jika terjadi kerusakan pada otak, maka pertahanan tersedia. *Dietschmann* di atas menegaskan bahwa jika alkohol merusak otak, di situ terdapat kelainan pikiran.

Gittens dapat digeneralisasikan sebagai berikut: jika ada dua atau lebih penyebab kelainan pikiran, penyebab yang tidak termasuk dalam tanda kurung pada pasal 2(1) harus diabaikan. Ada contoh arahan Dewan Studi Yudisial yang harus diberikan ketika terdakwa mengajukan pembelaan atas tanggung jawab yang berkurang dan diduga sedang mabuk pada saat itu: *Roberts*, tidak dilaporkan, 27 Januari 2005 (CA). Namun, jika ada dua atau lebih penyebab yang sesuai dengan pasal 2(1), terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa salah satu penyebab tersebut merupakan 'kelainan pikiran'; cukuplah bahwa penyebab-penyebabnya secara bersama-sama merupakan 'kelainan pikiran': *Dietschmann*, di atas.

Komisi Kerajaan untuk Hukuman Mati, yang Laporrannya mengarah pada pembentukan pembelaan ini (Cmd 8932, 1953), menyatakan bahwa ada tingkatan kegilaan: kewarasan dan kegilaan saling berbayang. Demikian pula, tidak ada garis yang jelas antara tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab diperkenalkan untuk menyelaraskan undang-undang dengan persepsi-persepsi ini.

Undang-undang yang berlaku saat ini masih belum memenuhi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, jika terdakwa didakwa melakukan pembunuhan, pengadilan tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan apakah ketidakmampuan mental tersebut termasuk dalam jenis yang memerlukan komitmen wajib. Kedua, undang-undang tidak boleh

terlalu jauh menyimpang dari opini medis, namun seperti yang telah kita lihat, keputusan apakah pembelaan dapat diterapkan adalah keputusan juri, bukan psikiater.

Komentar

Penting untuk disadari bahwa seseorang yang pembelaannya atas tanggung jawab yang berkurang akan dihukum karena pembunuhan dan sering kali dipenjara. Persentase mereka yang dipenjara dibandingkan dirawat di rumah sakit telah meningkat selama 30 tahun terakhir. Beberapa di antaranya, mungkin sepertujuh, menerima hukuman seumur hidup. Hasil ini membuat masyarakat aman. Hal ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terdakwa. Terlebih lagi, pembenaran awal untuk pembelaan telah hilang. Ini dimulai sebagai pembelaan terhadap pembunuhan ketika hukuman untuk pelanggaran tersebut adalah kematian. Kematian bukan lagi hukuman untuk pembunuhan, melainkan hukuman penjara seumur hidup. Rasionalisasi modernnya adalah bahwa berkurangnya tanggung jawab berfungsi untuk mengurangi satu-satunya hukuman penjara tetap yang tersisa dalam hukum Inggris dengan memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk bersikap fleksibel dalam menjatuhkan hukuman. Jika pembunuhan pada suatu saat tidak lagi mempunyai hukuman wajib, maka pembelaan seperti ini tidak diperlukan lagi. Masalah dengan argumen ini adalah jika pengurangan tanggung jawab dihapuskan, terdakwa yang cacat mental mungkin tidak bisa membela kegilaan karena sempitnya hal tersebut, dan ia akan dihukum karena pembunuhan: namun, tentu saja terdakwa yang sakit mental harus tidak dihukum karena pembunuhan.

Alternatifnya, pengurangan tanggung jawab dapat diperluas ke semua pelanggaran. Mengapa penjahat yang mendapat izin sebagian harus mendapat pembelaan jika ia membunuh, namun tidak jika, misalnya, ia mencuri atau memperkosa? Terdakwa menurut definisinya tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin dampak utama dari pembelaan ini adalah memenjarakan orang-orang yang sebelum adanya Undang-Undang Pembunuhan akan dikirim ke rumah sakit yang aman. Apa yang terjadi adalah berkurangnya tanggung jawab dimaksudkan untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang tidak gila secara hukum. Sebaliknya istilah ini digunakan untuk orang-orang yang sebelum tahun 1957 sudah diklasifikasikan sebagai orang gila, serta mereka yang 'berada di ambang kegilaan'.

E. Griew merangkum posisi saat ini 'Masa depan tanggung jawab yang berkurang' [1988] Crim LR 75 di 87: Bagian 2 adalah kata-kata yang buruk Pengadilan, berkat pendekatan yang longgar terhadap interpretasi dan bukti ahli, telah memperluas cakupan bagian ini [Reformasi] dapat menjadikannya sebagai alat yang kurang efektif untuk menghindari hukuman wajib seumur hidup dibandingkan dengan posisi yang ada saat ini.

Posisinya tetap sama hingga saat ini. Undang-undang yang direformasi mungkin menyebabkan ayah pembunuh belas kasihan di Price (di atas) tidak diikutsertakan dalam pembelaan dan akibatnya dia akan dihukum karena pembunuhan.

9.4 REKOMENDASI UNTUK REFORMASI 1980–2000

Laporan Keempat Belas Komite Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Terhadap Orang, Cmnd 7844, 1980, merekomendasikan agar pembelaan ini direformasi sesuai dengan garis yang dikemukakan oleh Komite Butler (Cmnd 6244, 1975), di atas.

- (a) Pembelaan akan berhasil jika terdapat bukti bahwa terdakwa menderita ‘penyakit mental yang parah’ dan jika ‘gangguan mental tersebut menjadi alasan yang cukup kuat untuk mengubah pembunuhan menjadi pembunuhan tidak berencana’. Jika terdakwa setuju, dia akan langsung diadili atas pembunuhan tidak berencana, tanpa perlu mempertimbangkan pembunuhan.
- (b) Beban pembuktian harus ada pada penuntut, meskipun terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bukti.
- (c) Butler Committee berpendapat bahwa ‘ketentuan pengurangan tanggung jawab diperlukan hanya karena pelanggaran pembunuhan dapat diancam dengan hukuman wajib seumur hidup. Penerapan hukuman ini pada pelanggaran selain pembunuhan tidak dapat dibenarkan.’ Hukuman ini tidak diperlukan jika tidak ada hukuman wajib untuk pembunuhan (yang merupakan pilihan Komite).

Tim Komisi Hukum pada tahun 1985 (UU No. 143, Kodifikasi Hukum Pidana: Laporan kepada Komisi Hukum) dan sendiri pada tahun 1989 (UU No. 177, KUHP untuk Inggris dan Wales) mengusulkan untuk menetapkan rekomendasi ini. Rancangan KUHP versi 1989, pasal 56, menyebutkan:

- (1) Seseorang yang, kecuali dalam bagian ini, bersalah atas pembunuhan, tidak bersalah atas pembunuhan jika pada saat melakukan perbuatannya, ia menderita kelainan jiwa yang merupakan alasan yang cukup kuat untuk mengurangi pelanggarannya menjadi pembunuhan yang tidak disengaja.
- (2) Dalam bagian ini yang dimaksud dengan “kelainan jiwa” adalah penyakit jiwa, gangguan atau perkembangan pikiran yang tidak sempurna, gangguan psikopat, dan gangguan atau kecacatan pikiran lainnya, kecuali mabuk-mabukan.

Klausul 56(1) menjelaskan secara eksplisit apa yang tersirat dalam undang-undang saat ini: juri ditanya apakah kelainan mental terdakwa dapat mengubah pembunuhan menjadi pembunuhan tidak berencana. Apakah terdakwa termasuk dalam pasal 56(1) akan menjadi tanggung jawab juri, yang pasti akan mendengarkan bukti psikiatris. Ada kemungkinan salah satu juri mengatakan bahwa salah satu terdakwa termasuk dalam definisi kelainan mental, namun juri kedua berpendapat sebaliknya. Namun, istilah-istilah tersebut mencerminkan bahasa medis lebih baik daripada hukum yang berlaku saat ini. Sayangnya baik epilepsi dan diabetes masih termasuk dalam definisi ‘gangguan lain atau kecacatan pikiran’.

Berbeda dengan undang-undang saat ini, beban pembuktian akan berada pada penuntutan, dan persyaratan bahwa kelainan tersebut timbul karena sebab tertentu akan dihapuskan. Oleh karena itu, pembelaan yang diusulkan akan lebih luas dibandingkan dengan pembelaan yang ada saat ini. Namun, dalam praktiknya, perbedaannya mungkin minimal karena konsep ‘penyebab inheren’ dalam pasal 2(1) bersifat luas. Ungkapan ‘gangguan atau kecacatan lain’ juga akan membuat pembelaan ini lebih luas dibandingkan definisi yang ada

saat ini. Definisi tersebut terkesan plin-plan: apa yang dimaksud dengan 'cukup substansial'? Dan seberapa luas 'gangguan lainnya pikiran'? Apakah itu akan menutupi kecemburuan Othello? Namun demikian, ketentuan dalam pasal 56(2) lebih sempit dibandingkan dengan yang direkomendasikan oleh Komite Butler.

Komisi Hukum juga merekomendasikan dalam rancangan KUHP tahun 1989, bahwa pengurangan tanggung jawab (serta provokasi dan pembelaan diri ketika kekerasan berlebihan) harus diterapkan pada percobaan pembunuhan, dengan mengurangi pelanggaran menjadi percobaan pembunuhan tidak berencana: cl 61. Rekomendasi ini adalah berdasarkan usulan Laporan Keempat Belas Panitia Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran terhadap Orang, Cmdnd 7844, 1980. Belum ada tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan usulan tersebut.

Komite (Nathan) dari House of Lords on Murder and Life Imprisonment tahun 1989, merekomendasikan penghapusan hukuman wajib untuk pembunuhan tetapi ingin mempertahankan pembelaan atas pengurangan tanggung jawab untuk memberikan pembelaan bagi mereka yang menderita kelainan mental.

Reformasi Tanggung Jawab Yang Berkurang: Usulan Komisi Hukum Pada Tahun 2004

Selain meninjau provokasi dan kekerasan yang berlebihan dalam pembelaan diri, Komisi Hukum dalam Laporanannya No. 290, Pembelaan Sebagian terhadap Pembunuhan, 2004, mempertimbangkan apakah batas-batas pembelaan terhadap tanggung jawab yang berkurang harus diubah. Komisi setuju dengan para peserta konsultasi dalam Makalah Konsultasi mereka dengan nama yang sama, No. 173, 2003, bahwa pembelaan harus terus ada selama hukuman wajib untuk pembunuhan masih tetap ada. Jika definisi pembunuhan diubah dan hukuman wajib dihapuskan, maka bagaimana pengurangan tanggung jawab akan dirumuskan akan menjadi bahan diskusi.

Sebagaimana yang terjadi saat ini, terdapat perpecahan antara pihak yang berkonsultasi yang ingin mempertahankan pembelaan yang ada dan mereka yang menginginkan agar pembelaan tersebut dihapuskan. Mereka yang ingin mempertahankan hukuman tersebut, dan tetap melakukan hal tersebut meskipun hukuman wajib telah dihapuskan, berpendapat bahwa pembelaan tersebut merupakan masalah pemberian label yang adil: orang yang tanggung jawabnya dikurangi tidak boleh dihukum karena pembunuhan. Selain itu, permohonan kegilaan yang tidak direformasi tidak membantu mereka yang saat ini memiliki pembelaan atas berkurangnya tanggung jawab karena sempitnya aturan M'Naghten; para juri tidak boleh diwajibkan untuk memilih pembebasan (secara tidak wajar) ketika satu-satunya pilihan mereka adalah pembunuhan; kesalahan merupakan masalah bagi juri, bukan masalah hakim pada tahap hukuman; berkurangnya tanggung jawab terkadang merupakan satu-satunya pembelaan yang terbuka bagi perempuan korban kekerasan yang melakukan pembunuhan berdasarkan hukum yang berlaku saat ini; dan 'pembelaan dapat memungkinkan dilakukannya disposisi yang penuh belas kasihan namun adil terhadap kasus-kasus tertentu jika semua pihak menganggapnya memenuhi keadilan kasus tersebut' (paragraf 5.22).

Bahkan mereka yang mendukung dipertahankannya pembelaan tersebut berpendapat bahwa pembelaan tersebut mempunyai kelemahan, khususnya bahwa

pembelaan tersebut bersifat patologis atau menstigmatisasi beberapa orang yang termasuk dalam ketentuan tersebut, terutama perempuan yang dipukuli dan melakukan pembunuhan. Namun demikian, kelompok-kelompok tersebut tidak berupaya untuk merumuskan kembali pembelaan tersebut, setidaknya sebagian karena mereka tidak menginginkan definisi yang disetujui secara medis, yang akan menimbulkan stigma sebagai 'menderita' karena berkurangnya tanggung jawab.

Ada pula yang mendukung penghapusan dan argumen mereka dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, tidak masuk akal untuk menganggap berkurangnya tanggung jawab sebagai pembelaan; karena tanggung jawab berkurang, pembelaan tidak boleh menjadi pembelaan melainkan faktor yang meringankan. Seseorang yang membunuh tetapi mempunyai kelainan pikiran, dengan kata lain, tetaplah seorang pembunuh. Kedua, definisi tersebut tidak dapat direformasi dalam penggunaan konsepnya. Ketiga, penerapan pembelaan sangat kontroversial, misalnya mencakup pembunuhan karena alasan belas kasihan yang tidak sesuai dengan definisi pasal 2 Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957.

Mengingat perbedaan pendapat mengenai perlunya mempertahankan pembelaan dan, jika pembelaan tetap dipertahankan, maka dilakukan reformulasi, Komisi Hukum tidak mengusulkan perubahan apa pun terhadap pembelaan, termasuk beban pembuktian, sebelum peninjauan komprehensif atas pembelaan tersebut. hukum pembunuhan. Namun demikian, dan dengan sedikit keraguan, Komisi mengajukan formula yang saat ini lebih disukai jika tanggung jawab yang dikurangi tetap menjadi pembelaan terhadap pembunuhan. Definisi ulang tersebut dinyatakan pada par. 5.97. Perlu disebutkan secara lengkap.

Seseorang, yang seharusnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan, tidak bersalah atas pembunuhan, melainkan bersalah atas pembunuhan manusia - tertawaan jika, pada saat melakukan tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kematian,

(1) Kemampuan orang tersebut untuk:

- ❖ memahami peristiwa; atau
- ❖ menilai apakah tindakannya benar atau salah; atau
- ❖ mengendalikan diri;

secara substansial terganggu oleh kelainan pikiran yang timbul dari kondisi yang mendasarinya dan

(2) Kelainan tersebut merupakan penyebab penting dari kelakuan terdakwa dalam melakukan atau ikut serta dalam pembunuhan. 'Kondisi yang mendasari' berarti suatu kondisi mental atau psikologis yang sudah ada sebelumnya, selain yang bersifat sementara.

Komisi Hukum sangat berpendapat bahwa bertentangan dengan pandangan sebagian akademisi, provokasi dan berkurangnya tanggung jawab tidak boleh digabungkan. Keputusan mereka secara ringkas dan jelas diungkapkan sebagai berikut: '. . . kedua pertahanan parsial ini bertumpu pada landasan moral yang sama sekali berbeda dan fakta bahwa keduanya kadang-kadang dijalankan bersamaan bukanlah alasan untuk menggabungkan keduanya. Juri dapat memahami perbedaannya dan menerapkannya secara terpisah.'

Laporan Komisi Hukum No. 306 Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi. Komisi Hukum sebagian besar mendukung usulannya dalam Laporan No. 290 tentang Pembelaan Sebagian terhadap Pembunuhan (2004) dalam Laporannya No. 306 bulan November 2006 yang berjudul Pembunuhan, Pembunuhan dan Pembunuhan Bayi, yang didasarkan pada Makalah Konsultasi No. 177 A Undang-Undang Pembunuhan Baru untuk Inggris dan Wales? (Desember 2005). Namun, Laporan inilah yang merekomendasikan pendekatan tiga tingkat terhadap pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana: pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua, dan pembunuhan tidak berencana. Lihat Bab 11 untuk rincian usulan pengaturan ulang pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana sesuai dengan keseriusan unsur mental terdakwa.

Pertanyaan yang kemudian muncul: bagaimana berkurangnya tanggung jawab dapat dimasukkan ke dalam skema baru ini? Komisi mengusulkan bahwa pengurangan tanggung jawab harus tetap menjadi pembelaan terhadap pembunuhan tingkat pertama (yaitu ketika terdakwa membunuh dan berniat membunuh atau ketika dia membunuh dan bermaksud menyebabkan cedera serius namun sadar bahwa ada risiko kematian). Namun, sehubungan dengan pelanggaran lain, termasuk pembunuhan tingkat dua, pengurangan tanggung jawab tidak boleh dijadikan pembelaan. (Sanksi maksimum yang diusulkan untuk jenis pembunuhan ini adalah penjara seumur hidup; dengan kata lain, hukuman penjara seumur hidup tidak wajib, karena akan tetap berlaku untuk pembunuhan tingkat pertama.) Sehubungan dengan semua pelanggaran kecuali pembunuhan tingkat pertama, hakim akan memiliki diskresi sebagai untuk kalimat.

Komisi mengusulkan untuk tetap mengurangi tanggung jawab sebagai pembelaan terhadap pembunuhan tingkat pertama atas dasar 'pelabelan'. 'Faktor yang meringankan kelainan fungsi mental dapat sedemikian rupa sehingga seorang pembunuh yang bertindak di bawah pengaruhnya tidak pantas diberi label sebagai pembunuh tingkat pertama.' (paragraf 5.99) Contoh diberikan di paragraf. 5.100, salah satunya adalah: 'Seorang wanita membunuh suaminya karena telah dianiaya secara fisik dan mental oleh suaminya selama bertahun-tahun, sampai pada titik di mana dia mengakui bahwa dia "kehilangan kontak dengan kenyataan."' '

Rekomendasi bahwa pembunuhan tingkat pertama akan menjadi pembunuhan tingkat kedua ketika terdakwa berhasil mengaku tidak bertanggung jawab telah mendapat kritik. Salah satu argumennya adalah bahwa hal ini harus mengurangi pembunuhan tingkat pertama menjadi pembunuhan tidak disengaja, yang merupakan pelanggaran fatal tingkat ketiga. Komisi berpandangan bahwa karena provokasi dan pengurangan tanggung jawab sering kali dilakukan secara bersamaan, maka tidak dapat diterima jika kedua pembelaan tersebut menghasilkan hasil yang berbeda. Kedua, jika berkurangnya tanggung jawab menyebabkan pembunuhan tingkat pertama menjadi pembunuhan tidak berencana, maka hal ini juga merupakan pembelaan parsial terhadap pembunuhan tingkat dua. Jika tidak, mereka yang membunuh dengan unsur kesalahan hanya untuk pembunuhan tingkat dua akan diberi label yang lebih keras (karena mereka tidak dapat mengaku bertanggung jawab) dibandingkan

dengan mereka yang membunuh dengan unsur kesalahan untuk pembunuhan tingkat pertama namun berhasil mengakui pengurangan tanggung jawab.' (paragraf 5.88)

Namun, masih terdapat permasalahan mengenai definisi pertahanan. Komisi mengusulkan untuk memperbaruinya dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang psikiatri dan rekomendasinya mengenai tingkat pembunuhan. Menanggapi komentar terhadap definisi yang diusulkan dalam Laporan tahun 2004 yang dibahas di atas, Komisi telah mengubah definisi yang diusulkan. Perlu dicatat bahwa beban pembuktian akan tetap berada pada terdakwa.

- (a) Seseorang yang seharusnya bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat dua jika, pada saat ia berperan dalam pembunuhan tersebut, ia mempunyai kemampuan untuk:
 - (1) memahami sifat perilakunya; atau
 - (2) membentuk penilaian rasional; atau
 - (3) mengendalikan dirinya sendiri,
 mengalami gangguan substansial karena kelainan fungsi mental yang timbul dari kondisi mental yang diketahui, ketidakdewasaan perkembangan terdakwa yang berusia di bawah delapan belas tahun, atau kombinasi keduanya; Dan
- (b) kelainan, ketidakdewasaan perkembangan, atau kombinasi keduanya memberikan penjelasan atas kelakuan terdakwa dalam melakukan atau ikut serta dalam pembunuhan tersebut.

Frasa 'memahami sifat perbuatannya' pada (1) menggantikan 'memahami peristiwa' dalam rumusan tahun 2004 sehingga kurangnya pemahaman terdakwa terhadap (misalnya) 'peristiwa politik global' (catatan kaki 84 pada hal. 102) akan menjadi tidak memberikan pembelaan. Ungkapan pada (2) menggantikan 'menilai apakah tindakannya benar atau salah' karena seseorang yang percaya dirinya adalah Napoleon harus memiliki pembelaan, meskipun dia tahu bahwa membunuh itu salah secara moral dan hukum.

Salah satu dampak dari usulan tersebut adalah bahwa definisi tersebut tidak lagi dikaitkan dengan penyebab-penyebab penyimpangan mental yang sudah ketinggalan zaman seperti definisi tahun 1957: lihat frasa dalam tanda kurung dalam Undang-Undang Pembunuhan pasal 2(1). Definisi yang direvisi ini juga akan memperjelas peran para ahli medis: mereka harus memberikan pendapat mereka mengenai apakah terdakwa menderita kelainan fungsi mental yang berasal dari kondisi medis yang diketahui, dan apakah kelainan tersebut berdampak pada kemampuan terdakwa. kota. Istilah 'kondisi mental yang dikenali' akan memungkinkan pertahanannya dibatasi atau diperluas seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran.

Komisi memberikan contoh masing-masing dari tiga penurunan substansial (1)–(3) di atas:

- (1) 'memahami sifat perilakunya': 'seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang dibiarkan bermain video game yang sangat kejam selama berjam-jam sepanjang hidupnya, kehilangan kesabaran dan membunuh anak lain ketika anak tersebut mencoba untuk mengambil permainan darinya. Ketika diwawancarai, dia tidak menunjukkan

pemahaman yang nyata bahwa, ketika seseorang terbunuh, mereka tidak bisa dihidupkan kembali, seperti yang terjadi dalam permainan yang terus-menerus dia mainkan’;

- (2) ‘membentuk penilaian yang rasional’: ‘seorang wanita yang menderita gangguan stres pasca-trauma, akibat penganiayaan kekerasan yang dialami suaminya, menjadi percaya bahwa hanya dengan membakar suaminya sampai mati maka dosa-dosa suaminya akan terhapuskan’;
- (3) ‘mengendalikan dirinya sendiri’: ‘seseorang mengatakan bahwa kadang-kadang iblis menguasai dirinya, dan menanamkan dalam dirinya keinginan yang harus dilakukan sebelum iblis pergi’.

Komisi selanjutnya menyelidiki sebab-akibat. Dalam undang-undang yang berlaku saat ini nampaknya harus ada semacam sebab-akibat: kelainan pikiran harus secara substansial merugikan (yaitu menyebabkan kerugian) tanggung jawab mental terdakwa. Ungkapan yang lebih disukai Komisi adalah bahwa kelainan pikiran atau ketidakdewasaan perkembangan atau kedua-duanya harus memberikan penjelasan mengenai pembunuhan tersebut atau keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. ‘Hal ini memastikan adanya hubungan yang tepat (yakni, hubungan yang mendasari kasus mitigasi pelanggaran) antara kelainan fungsi mental atau ketidakdewasaan perkembangan dan pembunuhan. Namun hal ini membuka kemungkinan bahwa penyebab-penyebab lain (misalnya provokasi) bisa diakui memang berperan, tanpa mengesampingkan kemungkinan mitigasi.’ (paragraf 5.124) Sehubungan dengan ketidakdewasaan perkembangan, Komisi menyatakan: *‘adalah tidak realistis dan tidak adil untuk berasumsi bahwa semua anak berusia 10 tahun ke atas yang melakukan pembunuhan pasti memiliki rasa penilaian, kendali, dan pemahaman yang berkembang sehingga menjadikan hukuman pembunuhan tingkat pertama sebagai akibat yang tepat. Sebaliknya, rekomendasi kami adalah bahwa juri yang harus memutuskan dalam kasus individual apakah D mempunyai rasa menghakimi, mengontrol, atau memahami.’* (paragraf 5.131) Tidak peduli apa pun penyebab ketidakdewasaan tersebut. adalah: bisa jadi lingkungan anak atau faktor sosial atau biologi atau campurannya. Perlu juga diingat bahwa beban untuk membuktikan ketidakdewasaan perkembangan akan berada pada anak sebagaimana yang akan terjadi pada seluruh definisi revisi mengenai berkurangnya tanggung jawab.

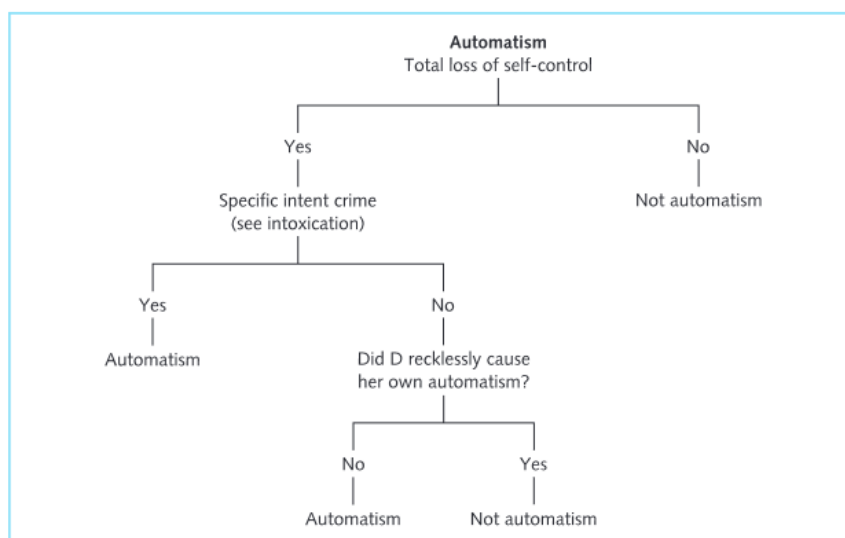
Definisi yang direvisi tidak akan mempengaruhi kegilaan yang akan terus berlanjut seperti sekarang.

9.5 OTOMATISME

Pendahuluan

Lawton CJ dalam Quick, di atas, menyebut pembelaan otomatisme, yang tampaknya berasal dari Chetwynd (1912) 76 JP 544, ‘sebuah rawa hukum yang jarang dimasuki saat ini kecuali oleh mereka yang sangat membutuhkan semacam pembelaan’. Ini adalah pertahanan yang sempit, yang dipersempit oleh aturan bahwa otomatisme yang tidak masuk akal adalah kegilaan, bukan otomatisme. Keputusan yang menentukan bahwa beberapa kelainan mental seperti epilepsi dan berjalan dalam tidur adalah kegilaan akan mempersempit potensi

otomatisme. Ini adalah pertanyaan hukum apakah penyebab dari kondisi mental terdakwa adalah gangguan pikiran dalam aturan kegilaan: Sullivan, di atas. Peningkat baru-baru ini mengenai undang-undang yang membedakan kegilaan dan otomatisme adalah Roach [2001] EWCA Crim 2700. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa apa pun sebutan dokter atas penyakit terdakwa, persoalannya adalah apakah terdakwa menderita kegilaan atau otomatisme. adalah masalah juri. Pengadilan mengatakan bahwa 'definisi hukum otomatisme memungkinkan fakta bahwa, jika faktor eksternal bekerja pada kondisi mendasar yang tidak akan menghasilkan keadaan otomatisme, maka pembelaan terhadap otomatisme yang tidak gila harus diserahkan kepada juri' . Di sini alkohol atau obat-obatan atau keduanya (faktor eksternal) telah mempengaruhi 'gangguan kepribadian campuran' (penyakit pikiran) yang diderita terdakwa sehingga menghasilkan kekerasan. Pembelaannya adalah otomatisme, bukan kegilaan. Jika diperbolehkan, ini merupakan pembelaan terhadap semua kejahatan, termasuk pelanggaran berat. Oleh karena itu, otomatisme tidak bisa sekadar penolakan terhadap mens rea, seperti yang dikatakan beberapa hakim, karena pelanggaran berat tidak memerlukan mens rea dalam kaitannya dengan satu atau lebih unsur actus reus. Namun otomatisme adalah pertahanan terhadap pelanggaran berat. Oleh karena itu, pembelaan bukanlah pembelaan dimana terdakwa hanya mengatakan bahwa dia tidak bersalah (Gambar 9.3). Apakah masuk ke dalam keadaan otomatisme secara sembrono tidak sejalan dengan otomatisme dibahas di bawah. Kadang-kadang dikatakan bahwa otomatisme meniadakan actus reus. Jika demikian, maka tidak menjadi masalah bagaimana terdakwa bisa menderita otomatisme, namun hukumnya adalah bahwa ia tidak mempunyai pembelaan jika ia bersalah karena masuk ke dalam kondisi otomatisme. Sekali lagi disarankan bahwa actus reus dan mens rea terkadang merupakan alat analisis yang berguna, namun tidak selalu. Terdakwa benar-benar mengatakan bahwa perbuatannya tidak dapat dianggap berasal dari dirinya. Dia bukanlah pelaku kejahatan tersebut.



Gambar 9.3 Otomatisme

Berbeda dengan kegilaan dan berkurangnya tanggung jawab, beban pembuktian ada pada penuntutan dan standar pembuktian tidak diragukan lagi. Kritik diarahkan pada keberhasilan otomatisme, pembebasan total, karena masyarakat mungkin tidak terlindungi dari serangan kedua. Lamer CJC dalam Parks (1993) 95 DLR (ke-4) 27 menginginkan 'kondisi yang tidak terlalu mengganggu yang berupaya menjamin keselamatan masyarakat', mungkin berupa perintah agar terdakwa menemui spesialis gangguan tidur. Namun terdakwa tidak ditemukan menderita gangguan jiwa dan bagaimana pengadilan dapat mengeluarkan perintah ketika terdakwa telah dibebaskan? Fakta bahwa hasil dari pembelaan otomatisme yang berhasil adalah pembebasan mungkin telah mempengaruhi pengadilan untuk menjaga pembelaan dalam batasan yang sempit.

Aturan Dasarnya: Kehilangan Kendali Sepenuhnya

Undang-undang ini tidak sepenuhnya jelas. Bertentangan dengan pandangan Neill J dalam Roberts v Ramsbottom [1980] 1 Semua ER 7, pertahanan melampaui ketidaksadaran total. Pengadilan Banding dalam Quick dan Isitt [1978] Crim LR 159 mengacu pada keadaan setengah sadar yang termasuk dalam definisi tersebut. Tidak ada garis yang jelas antara kesadaran dan ketidaksadaran. Pengadilan Banding dalam Referensi Jaksa Agung (No. 2 Tahun 1992) [1994] QB 91, bagaimanapun, mengatakan bahwa otomatisme menunjukkan kehancuran total kendali sukarela. Kontrol yang terganggu, berkurang atau parsial tidak cukup. 'Mengemudi tanpa kesadaran', misalnya dalam kondisi kesurupan, tidak berarti kehilangan kendali total. Oleh karena itu, terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah karena menyebabkan kematian karena mengemudi secara sembrono ketika ia mengemudikan truknya sejauh 700 yard di sepanjang bahu jalan raya yang keras sebelum menabrak sebuah mobil van yang tidak bergerak, menewaskan dua orang. Keadaan seperti trance dapat dihentikan dengan rangsangan seperti kilatan cahaya. Kasus ini dikritik karena menyatakan bahwa seseorang dalam keadaan seperti itu bertanggung jawab secara pidana, namun keputusan tersebut tampaknya tepat. Hukuman terhadap mereka yang membiarkan dirinya mengalami kondisi kesurupan di jalan raya dapat diterima. Charlson tampaknya tidak benar jika kasus ini diputuskan dengan benar karena di Charlson terdakwa tidak dapat memukul putranya dengan palu dan membelanya tanpa memiliki kendali atas gerakan tubuhnya. Broome v Perkins (1987) 85 Cr App R 361 memiliki efek yang sama dengan Referensi Jaksa Agung (No. 2 tahun 1992): harus ada kehilangan kendali total. Namun Pengadilan Mahkota memutuskan dalam T [1990] Crim LR 256 bahwa seorang wanita yang diperkosa menderita sindrom stres pasca-trauma ketika dia menikam korban saat perampokan. Dia jelas memiliki kendali atas gerakannya tapi dia bertindak seolah-olah dalam 'mimpi', dan karenanya memiliki pertahanan. Ada pendapat dari para akademisi bahwa persyaratan hilangnya kesadaran total hanya terbatas pada pelanggaran yang bersifat mengemudi atau pelanggaran tanggung jawab yang ketat, namun lembaga peradilan belum menyetujuinya.

Kondisi Mental Manakah Yang Menimbulkan Otomatisme?

Otomatisme non-gila adalah pembelaan ketika terdakwa tidak dapat mengontrol gerakannya karena sebab eksternal. Tindakannya tidak disengaja. Ia tidak bersalah kecuali gerakannya dikehendaki (walaupun mungkin ada masalah dengan kejahatan kelalaian,

dimana terdakwa bersalah tanpa gerakan tubuh). Suatu tindakan atau kelalaian yang relevan secara hukum hanya terjadi bila kehendak terdakwa mengarah pada tindakan tersebut. Jika terjadi gerakan otot tanpa kemauan, tanpa kemauan, maka tindakan tersebut tidak disengaja dan tergolong otomatisisme. Ini mencakup kondisi pikiran abnormal yang bukan merupakan kegilaan. Ini mencakup disosiasi dan trauma psikologis jika tidak cenderung terulang kembali, menurut Pengadilan Tinggi Australia dalam *Falconer* (1990) 65 ALJR 20, sementara Lord Diplock dalam *Sullivan* [1984] AC 156 berbicara tentang 'gegar otak atau pemberian anestesi untuk terapeutik tujuan'. Untuk kasus Australia yang melibatkan pukulan di kepala, lihat *Cooper v McKenna* [1960] Qd R 406. Dalam *King* (1962) 35 DLR (2d) 386 pengadilan Kanada menyatakan bahwa delirium yang disebabkan oleh organisme yang berasal dari luar tubuh adalah otomatisisme. Dalam *Hill v Baxter* [1958] 1 QB 277, Pengadilan Divisi merujuk pada kebingungan, delusi dan stroke, sementara *Charlson* [1955] 1 All ER 859 prihatin dengan tumor otak. Dalam *Bell* [1984] 3 All ER 842, Goff LJ merujuk pada seorang pengemudi yang diserang oleh 'segerombolan lebah atau penumpang yang jahat', ia 'dipengaruhi oleh rasa sakit yang tiba-tiba membutuhkan' dan ia menjadi 'tiba-tiba tidak sadarkan diri karena alasan pemadaman listrik'. Ini mungkin mencakup hipnotisme, menurut *Quick dan Paddison* [1973] QB 910. Karena persyaratan penyebab eksternal, *Charlson* dan beberapa kasus lain tampaknya tidak benar. Tumor otak adalah penyakit pikiran yang termasuk dalam aturan kegilaan.

Lord Denning dalam *Bratty v Jaksa Agung Irlandia Utara* [1963] AC 386 menyebutkan kejang, tindakan refleks, dan kejang. Beberapa dari pendapat ini mungkin memerlukan revisi berdasarkan *Sullivan*, di atas, dan *Hennessy* [1989] 1 WLR 287. Berjalan dalam tidur dianggap menimbulkan otomatisisme selama bertahun-tahun: lihat *Bratty*, mengandalkan *Stephen J dalam Tolson* (1889) 23 QBD 168; *Toohey J* tidak mempertanyakan di *Falconer* bahwa berjalan dalam tidur, seperti hipoglikemia, merupakan otomatisisme; dan dalam *Lillienfield* (1985) *The Times*, 12 Oktober, di mana orang yang berjalan sambil tidur menikam temannya sebanyak 20 kali, seorang hakim Pengadilan Kerajaan menganggap pembelaan tersebut bersifat otomatisisme. Di *Burgess*, di atas, Pengadilan Banding menganggap pembelaan tersebut tidak waras. Somnambulisme bukanlah faktor eksternal seperti pukulan di kepala, namun faktor internal yang dapat mengakibatkan kekerasan. (Lihat juga di bawah kegilaan.) Otoritas yang berlawanan dari *Boshears* (1961) *The Times*, 8 Februari, mungkin ditolak, seperti halnya kasus-kasus lain yang dicatat oleh *Glanville Williams dalam Hukum Pidana: Bagian Umum*, edisi ke-2 (*Stevens*, 1961) 483. Pengadilan lebih lanjut menyatakan bahwa 'penyebab eksternal' tidak mencakup tekanan dan kekecewaan biasa dalam kehidupan sehari-hari seperti cinta tak berbalas (kecuali jika ledakan tersebut mengungkapkan penyakit pikiran yang sebelumnya tersembunyi). Otomatisisme adalah pembelaan dimana terdakwa mengalami stres traumatis setelah pemerkosaan karena dianggap bahwa penyebab pemerkosaan adalah faktor eksternal: T, di atas (Pengadilan Mahkamah). Orang normal mana pun pasti terkena dampak pemerkosaan yang parah. T dikritik dengan alasan bahwa terdakwa sadar akan perbuatannya.

Dia mampu memilih untuk tidak ikut serta dalam perampokan. Hukum sehubungan dengan sindrom stres pasca-trauma masih berubah-ubah. Dalam *White* [1995] Crim LR 393

Pengadilan Banding memutuskan bahwa terdakwa, seorang penjaga pintu, yang sebelumnya telah ditikam, tidak boleh dihukum karena melukai tubuh dengan sengaja dengan sengaja menginjak kepala korban tetapi melakukan perbuatan yang sangat menyedihkan. melukai tubuh karena karena kelainannya dia tidak bermaksud untuk melukai tubuh secara pedih. Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah dia seharusnya dibebaskan sepenuhnya karena otomatisme. Jika berkendara tanpa kesadaran telah menimbulkan keadaan otomatisme dalam Acuan Jaksa Agung (No. 2 Tahun 1992), maka penyebab eksternalnya adalah kondisi jalan raya. Dorongan yang tidak dapat ditolak bukanlah otomatisme: Nakal. KUHP Model AS (Rancangan Resmi 1985), pasal 2.01(a), menyatakan bahwa:

Tindakan berikut ini bukan merupakan tindakan sukarela:

- (a) refleks atau kejang;
- (b) gerakan tubuh saat tidak sadarkan diri atau tidur;
- (c) perilaku selama hipnosis atau akibat sugesti hipnosis;
- (d) suatu gerakan tubuh yang bukan merupakan hasil usaha atau tekad pelaku, baik secara sadar maupun kebiasaan.

Model KUHP berupaya untuk menyatakan kembali hukum pidana Amerika yang terbaik. Definisi ini mirip dengan hukum di Inggris dan Wales.

Bukan otomatisme ketika pikiran terdakwa tidak berada dalam keadaan prima: Isitt, di atas, dimana tindakan terdakwa dalam mengemudi mempunyai tujuan (lihat juga di bawah). Dia pergi setelah kecelakaan. Pengadilan Banding memutuskan bahwa: 'karena panik atau stres atau alkohol, pikiran pemohon tertutup terhadap hambatan moral yang mengendalikan kehidupan sebagian besar dari kita. Namun faktanya hambatan moralnya tidak berfungsi dengan baik tidak berarti bahwa pikiran tidak bekerja sama sekali.' Jika otomatisme disebabkan oleh mabuk, pembelaannya adalah keracunan, dan aturan tentang otomatisme tidak berlaku. Kasus Skotlandia yang serupa adalah *Finegan v Heywood* 2000 SCCR 460.

Berbagai bentuk perilaku yang menimbulkan otomatisme ini menunjukkan bahwa sulit menemukan satu dasar untuk pembelaan ini. Menurut Gresson P dalam *Cottle* [1958] NZLR 999 di Pengadilan Banding Selandia Baru, kurangnya kesadaran adalah intinya. Dalam *Bratty* Lord Kilmuir mengatakan bahwa otomatisme adalah 'pertahanan karena pikiran tidak sejalan dengan apa yang sedang dilakukan'. Sulit juga memasukkan otomatisme ke dalam kategori 'pertahanan'. Kadang-kadang terdakwa diperlakukan seolah-olah dia tidak melakukan *actus reus* karena perbuatannya tidak disengaja atau tidak dikehendaki; alternatifnya, dia tidak memiliki *mens rea* untuk melakukan pelanggaran karena pikirannya kosong.

Pendekatan apa pun yang diambil, tidak ada pelanggaran karena penuntut gagal membuktikan unsur pelanggarannya. Oleh karena itu otomatisme bukanlah suatu pembelaan dalam artian terdakwa melakukan *actus reus* dan mempunyai *mens rea* tetapi dimaafkan atau perbuatannya dibenarkan. Ada keraguan apakah otomatisme cocok dengan dikotomi *actus reus/mens rea* tradisional. Bisa jadi, sebelum penuntutan mencapai tahap *actus reus* dan *mens rea*, mereka harus menunjukkan bahwa terdakwa bertindak sukarela. Terdakwa tidak bertindak sukarela jika melukai seseorang akibat kejang otot. Oleh karena itu,

ia tidak bersalah dan tidak tercapai tahap *actus reus* dan *mens rea*. Kasus Skotlandia yang menyebabkan hal tersebut adalah *Finegan v Heywood*, di atas.

Jika memang demikian, kita harus berhati-hati dalam membedakan tindakan yang tidak disengaja dan yang disengaja. Seperti yang dicatat oleh Lord Denning dalam *Bratty* mengenai pendekatan ini, suatu tindakan bukan merupakan tindakan yang tidak disengaja hanya karena aktor tersebut tidak dapat menahan dorongan hati tersebut atau tidak merencanakan konsekuensinya. Namun, untuk memasukkan terdakwa ke dalam definisi otomatisme, definisi perilaku tidak disengaja harus diperluas untuk mengakomodasi fakta *Charlson*. Jika terdakwa mengambil seorang anak, memukulinya dan melemparkannya melalui jendela, fakta-fakta tersebut hampir tidak memberikan gambaran tentang ketidaksengajaan dalam bahasa sehari-hari; perilakunya tampak memiliki tujuan. Dalam konteks ini *Charlson* harus dibandingkan dengan *Broome v Perkins* (1987) 85 Cr App R 361.

Terdakwa berkendara pulang dengan sangat tidak menentu dari tempat kerjanya. Dia bertabrakan dengan setidaknya satu mobil lain dan tampaknya tidak memiliki semua kemampuannya. Dia mengatakan bahwa dia hanya dapat mengingat awal perjalanannya dan istrinya memberinya Mars Bar untuk mengatasi hipoglikemia yang dideritanya. Ada bukti bahwa orang-orang di negara-negara tersebut dapat berkendara di sepanjang jalan yang biasa mereka lalui tanpa sadar telah melakukannya. Dia didakwa mengemudi sembarangan. Pengadilan Divisi mengizinkan banding penuntut melalui kasus yang dinyatakan. Terdakwa tidak berhak atas pembelaan otomatisme karena tindakannya bersifat sukarela. Pikirannya mengendalikan gerakannya, memungkinkan dia mengarahkan kendaraannya di sepanjang jalan. Dia telah berkendara sejauh enam mil dan menghindari tabrakan dengan truk. Keputusan ini menimbulkan keraguan pada *Charlson*, di mana sang ayah memukul kepala putranya dan melemparkannya ke luar jendela.

Tentunya dia seharusnya bersalah ketika menjadi terdakwa dalam *Broome v Perkins*. Dalam kedua kasus tersebut, tindakan tersebut 'bertujuan' sebagaimana dinyatakan oleh Pengadilan Divisi. Putusan *Charlson* mungkin didukung, bukan dengan mengatakan bahwa terdakwa bertindak secara otomatis, namun bahwa ia tidak mempunyai *mens rea*. Pandangan alternatifnya adalah berpendapat bahwa pembelaan sebenarnya di *Charlson* adalah kegilaan. *Broome v Perkins* dikritik karena menghukum seseorang yang melakukan yang terbaik. Dia ditahan dengan standar yang sangat ketat terutama ketika fakta lain ditambahkan. Dia pergi ke polisi untuk memberi tahu mereka bahwa dia mengira dia mengalami kecelakaan. Haruskah kita memberikan sanksi terhadap perilaku bertanggung jawab seperti itu?

9.6 ATURAN KHUSUS DALAM OTOMATISME

Setidaknya jika pelanggaran tersebut merupakan tanggung jawab atau kelalaian yang ketat dan dapat diartikan terjadi dalam jangka waktu tertentu, maka terdakwa tidak akan dibebaskan jika otomatisme tersebut disebabkan oleh kesalahannya, seperti yang terjadi dalam *Kay v Butterworth* (1945) 173 LT 191 dimana terdakwa tertidur. Terdakwa divonis bersalah karena mengemudi sembarangan, tindak pidana kelalaian, karena tidak menghentikan mobilnya sebelum tertidur. Kesalahannya merupakan kecerobohan yang

diperlukan untuk pelanggaran tersebut. Doktrin yang membuat terdakwa dihukum kadangkala dikenal sebagai 'kesalahan sebelumnya'. Doktrin ini tidak sejalan dengan aturan tentang kesezaman *actus reus* dan *mens rea* yang dibahas pada Bab 3. Mungkin Pengadilan Divisi menemukan bahwa terdakwa juga tertidur saat mengemudi di *Hill v Baxter*, yang disebutkan di atas. Aturan ini berlaku meskipun keadaan otomatis disebabkan oleh hipoglikemia (lihat di bawah) yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa dalam mengatasi kekurangan gula, seperti yang terjadi dalam *Marison* [1996] Crim LR 909 (CA). Terdakwa tahu bahwa dia rentan terhadap episode hipoglikemik. Dia mendapat serangan; mobilnya menabrak kendaraan yang melaju, dan pengemudinya tewas. Dia tidak memiliki pembelaan terhadap otomatisme karena dia tahu bahwa cara mengemudinya berbahaya ketika dia sedang mengalami serangan diabetes. Aturan ini terkadang diutarakan bahwa terdakwa tidak mempunyai pembelaan jika ia ceroboh dalam memasuki keadaan otomatisme. Mengemudi selama berjam-jam tanpa istirahat akan menjadi contoh dari aturan ini. Jika terdakwa 'mengemudi tanpa sadar', yaitu seperti kesurupan karena belum istirahat, maka pembelaan tidak dapat diberikan kepadanya. *Marison* menonjol dalam *G* [2006] EWCA Crim 3276, di mana terdakwa didakwa menyebabkan kematian karena mengemudi berbahaya. Dia menderita hipoglikemia pada saat kecelakaan terjadi dan tidak bersalah karena mengalami kondisi seperti itu.

Otomatisme yang dipicu oleh diri sendiri, seperti yang sering dikatakan, bukanlah pembelaan kecuali tindakan terdakwa 'pantas': *Quick dan Paddison*, di atas. Istilah ini tidak didefinisikan tetapi hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun, mungkin dia bersalah karena gagal mencegah koma diabetesnya, mungkin karena mengetahui apa yang terjadi jika dia tidak makan. Di *Quick*, penyebab otomatisme adalah obat, insulin, yang diresepkan oleh dokter. Namun, dapat dikatakan bahwa aturan ini tidak seharusnya ada. Jika pertahanan ini negatif *mens rea*, bagaimana hal itu dapat dihidupkan kembali karena kesalahan? Bisa jadi kasus tersebut tidak sejalan dengan otoritas sebelumnya. Dalam *Bailey* [1983] 2 All ER 503, Pengadilan Tinggi sangat meragukan pengecualian ini. Lihat di bawah untuk penjelasan lengkap tentang hubungan *Quick dan Bailey*.

Aturan lainnya adalah menurut Lord Morris dalam *Bratty*, 'Tidak setiap ungkapan alasan yang mudah diucapkan dapat memberikan penjelasan.' Tidaklah cukup untuk mengatakan 'Saya mengalami pemadaman listrik'. Perilaku yang dilakukan secara sukarela diasumsikan: oleh karena itu, terdakwa harus menunjukkan beberapa bukti perilaku yang tidak disengaja. Terdakwa harus menunjukkan sifat ketidakmampuannya seperti epilepsi psikomotor (*Bratty*) atau kesadaran abnormal (*Hill v Baxter*, di atas). Karena terdakwa dalam kasus terakhir tidak dapat menunjukkan bukti medis yang dapat dijadikan dasar pembelaannya, pengadilan mengarahkan hakim untuk menjatuhkan hukuman. Cara umum untuk menunjukkan otomatisme adalah dengan mengemukakan bukti medis: *Moses v Winder* [1983] Crim LR 233. Namun, beban pembuktian tetap ada pada penuntut: *Stripp* (1978) 69 Cr App R 318 dan *Bratty*. Diktum sebaliknya dari Lord Goddard CJ dalam *Hill v Baxter* tidak benar. Lord Justice-General Hope dalam kasus Pengadilan Tinggi Skotlandia *Ross v HM Advocate* 1991 SLT 564 mengatakan: 'Persyaratan bahwa faktor eksternal tidak boleh disebabkan oleh diri

sendiri, bahwa faktor tersebut harus merupakan faktor yang tidak dapat diramalkan oleh terdakwa. , dan bahwa hal ini pasti mengakibatkan keterasingan total atas nalar yang mengakibatkan hilangnya pengendalian diri, memberikan perlindungan yang memadai terhadap penyalahgunaan.' Hakim-hakim di Inggris pasti akan mengungkapkan sentimen serupa.

Otomatisme Dan Diabetes

Satu hal yang agak tidak pasti mengenai otomatisme adalah apakah diabetes menimbulkan pertahanan ini. Otoritas besar pertama adalah Quick, di atas. Terdakwa, seorang perawat laki-laki di rumah sakit jiwa, didakwa melakukan penyerangan yang menyebabkan luka fisik terhadap pasien lumpuh lumpuh. Dia memimpin bukti medis yang menunjukkan bahwa dia menderita diabetes. Dia telah mengonsumsi insulin tetapi tidak makan dengan benar. Dia telah dirawat di rumah sakit beberapa kali karena belum makan. Ia berpendapat bahwa pada saat penyerangan tersebut terjadi, ia menderita hipoglikemia (kekurangan gula dalam darah – serangan tersebut tidak harus disebabkan oleh diabetes: puasa dapat menyebabkannya) yang disebabkan oleh penggunaan insulin dan tidak makan, sehingga membuatnya tidak mengetahuinya. apa yang dia lakukan, dan kelainan ini memberinya pertahanan. Namun hakim pengadilan memutuskan bahwa gangguan tersebut adalah penyakit pikiran sesuai dengan Aturan M'Naghten. Di tingkat banding, pembela berpendapat bahwa kondisi yang bersifat sementara dan dapat disembuhkan bukanlah suatu penyakit pikiran. Keputusan tersebut disampaikan oleh Lawton LJ. Dia mengkritik definisi penyakit pikiran yang diberikan oleh Lord Denning dalam Bratty: 'setiap gangguan mental yang bermanifestasi dalam bentuk kekerasan dan cenderung kambuh'. Jika definisi tersebut benar, terdakwa harus ditahan di rumah sakit jiwa. Lawton LJ berkata:

Akal sehat dikecewakan oleh prospek seorang penderita diabetes dikirim ke rumah sakit, padahal dalam sebagian besar kasus, kondisi mental yang terganggu dapat diperbaiki dengan cepat hanya dengan memberikan segumpal gula. . . ke dalam mulut pasien.

Terhadap argumen yang masuk akal ini (dan Pengadilan Banding sangat berpandangan bahwa apakah kelainan mental merupakan penyakit pikiran harus didekati 'dengan cara yang masuk akal', sebuah cara yang ditentang oleh otoritas yang lebih baru mengenai hal ini. epilepsi, hiperglikemia, dan berjalan dalam tidur) adalah hukum bahwa penyakit pikiran tidak perlu disembuhkan atau permanen (lihat Devlin J dalam Kemp [1957] 1 QB 399, lihat di atas). Namun, undang-undang tersebut melangkah lebih jauh. Dalam Hill v Baxter Lord Goddard CJ tidak menyamakan ketidaksadaran akibat cedera mendadak dengan penyakit pikiran. Lawton LJ diadakan:

Gangguan fungsi pikiran akibat efek sementara, yang disebabkan oleh penerapan beberapa faktor eksternal pada tubuh, seperti kekerasan, obat-obatan, termasuk obat bius, alkohol, dan pengaruh hipnotis tidak dapat dikatakan secara adil disebabkan oleh penyakit Ketidakmampuan yang disebabkan oleh diri sendiri tidak bisa dijadikan alasan. . . juga bukan sesuatu yang dapat diperkirakan secara masuk akal sebagai akibat dari melakukan atau tidak

melakukan sesuatu, misalnya meminum alkohol tanpa izin medis setelah menggunakan obat resep tertentu, atau tidak makan secara teratur saat mengonsumsi insulin.

Di Quick, dianggap ada faktor eksternal. Kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh diabetes, namun karena penggunaan insulinnya. Oleh karena itu, pembelaan terhadap otomatisme seharusnya diajukan kepada juri. Pembelaannya bukanlah kegilaan, melainkan otomatisme. Namun dalam istilah medis, penyebab koma hipoglikemik mungkin bersifat internal ketika pankreas memproduksi terlalu banyak insulin. Apalagi, alasan terdakwa mengonsumsi insulin bersifat internal karena diabetes adalah masalah internal.

Quick dijelaskan di Bailey. Terdakwa, saat menderita hipoglikemik, memukul kekasih pacarnya dengan batang besi. Pengadilan Banding mengatakan obeter bahwa meskipun kegagalan mentalnya disebabkan oleh tindakannya sendiri, yaitu karena perbuatannya sendiri, dalam arti bahwa ia dapat menghindari pingsan dengan makan:

- (a) Otomatisme yang dilakukan sendiri membebaskan terdakwa dari kejahatan dengan niat tertentu. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dihukum karena melukai dengan sengaja. Aturan ini sama dengan aturan mabuk. Juri memutuskan apakah terdakwa bertindak sebagai robot.
- (b) Dalam kejahatan dengan niat dasar, aturan yang berkaitan dengan ketidakmampuan yang disebabkan oleh diri sendiri adalah aturan mabuk sebagai pembelaan, bukan otomatisme. Oleh karena itu, ini tidak berlaku untuk insulin. Juri ditanyai apakah terdakwa ceroboh dan oleh karena itu mempunyai unsur mental untuk kejahatan kecerobohan.

Aturan dalam Quick bahwa terdakwa tidak dapat membela diri jika dia bersalah adalah tidak benar. Namun, pengadilan mengatakan bahwa terdakwa tidak dapat memperoleh pembelaan ini jika dia ceroboh secara subyektif. Apakah dia ceroboh atau tidak, itu menjadi pertanyaan juri (lih. mabuk). Juri harus menyelidiki apakah terdakwa sendiri mengetahui bahwa tidak makan berarti dia akan bertindak berbahaya. Beberapa penderita diabetes, termasuk yang dituduh dalam Quick, rupanya tidak mengetahui dampak penyakit yang mereka derita. Disarankan bahwa pada tahun-tahun sejak Quick, efek insulin telah diketahui lebih luas dan saat ini lebih sedikit orang yang dapat mengandalkan kurangnya pengetahuan mereka dibandingkan 35 tahun yang lalu. Mungkin Quick akan mengambil keputusan yang berbeda saat ini: apakah dia mengetahui konsekuensi dari kegagalan mengonsumsi insulin? Dari kata-kata dalam penilaian, tes ini bersifat subyektif namun dalam Quick Lawton LJ dikatakan bahwa ketidakmampuan 'yang dapat diperkirakan secara wajar' (penekanan diberikan) tidak dapat dijadikan alasan, suatu rumusan yang obyektif. Dalam Hardie [1984] 3 All ER 848 Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa arah yang benar atas kecerobohan tidak jelas dan sayangnya tidak mengatur satu atau lain cara. Alasan perbedaan antara undang-undang tentang mabuk-mabukan dan otomatisme sulit untuk dipahami. Mengapa orang yang mabuk tidak memiliki pembelaan terhadap pelanggaran niat dasar, namun robot dalam beberapa keadaan memilikinya? Pengadilan di Bailey menekankan bahwa diabetes bukanlah penyakit pikiran. Itu bukanlah dasar kegilaan. Seperti yang telah kita lihat, House of Lords di Sullivan berpendapat bahwa epilepsi bisa menjadi penyakit pikiran. Oleh karena itu, penderita epilepsi, atau

setidaknya sebagian dari mereka, tidak dapat mengandalkan pertahanan ini. Sullivan menyetujui aturan 'faktor eksternal' yang ditetapkan dalam Quick.

Hasil penelitian Bailey terbuka terhadap kritik bahwa pada kenyataannya risiko perilaku berbahaya jika penderita diabetes tidak mengonsumsi makanan yang cukup setelah dosis insulin mungkin sudah menjadi rahasia umum. Hal ini tentu akan terjadi jika risiko tersebut dipublikasikan pada kemasan obat tersebut. Namun secara empiris, jawabannya tidak jelas. Faktanya, permohonan banding terdakwa ditolak karena tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa ia berada dalam keadaan otomatisme.

Kasus hiperglikemia (kelebihan gula dalam darah) yang menyebabkan kebingungan dan kemudian koma adalah kasus Hennessy di atas. Pengadilan Tinggi juga menyetujui dikotomi eksternal/internal. Terdakwa didakwa mengemudi sambil didiskualifikasi dan mengambil kendaraan tanpa persetujuan. Dia adalah seorang penderita diabetes, yang tidak mengonsumsi makanan atau insulin sesuai resep. Pengadilan setuju dengan hakim pengadilan bahwa pembelaan sebenarnya adalah kegilaan. Hennessy adalah salah satu dari beberapa otoritas yang selama 40 tahun terakhir telah memperluas hukum kegilaan dan dengan demikian mengurangi hukum otomatisme. Lord Lane CJ berkata: 'Stres, kecemasan, dan depresi tidak diragukan lagi disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, namun sebenarnya bukan faktor eksternal yang secara hukum mampu menyebabkan atau berkontribusi pada keadaan otomatisme. Mereka tidak memiliki ciri kebaruan atau kecelakaan.' Mereka tidak seperti obat bius atau pukulan di kepala. Oleh karena itu, pada faktanya mereka bukanlah otomatisme. Demikian pula permasalahan perkawinan bukan merupakan faktor eksternal. Seperti yang dikomentari N.J. Reville ([1989] LSG 19):

Implikasi perbedaan faktor eksternal/internal ini meresahkan karena menimbulkan aturan yang sewenang-wenang. Jika penderita diabetes seperti Pak Hennessy menderita episode hiperglikemik hanya karena tidak cukup makan, maka luka apa pun yang ditimbulkannya akan divonis gila karena kondisi mentalnya bukan disebabkan oleh faktor eksternal. Di sisi lain, jika penderita diabetes menghasilkan kondisi otomatismenya dengan mengonsumsi insulin (dan setelah itu tidak makan), ia akan dianggap berada dalam kondisi otomatisme yang tidak gila.

Salah satu perbedaan antara kedua bentuk ini adalah bahwa hiperglikemia dapat terjadi secara perlahan, sedangkan hipoglikemia dapat terjadi dengan cepat, namun kedua kondisi tersebut memiliki efek yang serupa: disorientasi yang diikuti dengan hilangnya kesadaran dan kematian. Oleh karena itu, aneh jika satu bentuk mengarah pada stigma sebagai orang gila sedangkan bentuk lainnya mengarah pada pembebasan total.

Tentu saja, perpecahan eksternal/internal tidak serta merta membedakan antara mereka yang seharusnya dibebaskan dan mereka yang harus dirawat atau dipenjarakan. Namun perbedaan antara hipoglikemia dan hiperglikemia dikonfirmasi di Bingham [1991] Crim LR 433 (CA). Terdakwa mengatakan bahwa karena hipoglikemia, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, mengambil sandwich dan cola dari toko. Pertahanan terhadap otomatisme telah tersedia.

Kesimpulannya, mengonsumsi terlalu banyak insulin merupakan faktor eksternal. Otomatisme adalah pertahanan yang mungkin. Tidak mengonsumsi insulin merupakan faktor internal, yang berarti otomatisme tidak tersedia. Kurangnya gula (hipoglikemia) adalah otomatisme; hiperglikemia (terlalu banyak) adalah kegilaan, namun keduanya melibatkan kadar darah/gula dan perbedaan hasilnya sangat besar. Dalam keadaan gila, terdakwa dapat dikirim ke rumah sakit yang aman bahkan setelah Undang-undang tahun 1991; dalam otomatisme putusannya adalah bebas. Undang-undang harus membedakan antara orang-orang yang berbahaya dan orang-orang lain, namun kenyataannya tidak demikian.

Hukum di Australia berbeda. Terdakwa yang menderita 'kelemahan mental yang mendasarinya' adalah orang gila, tetapi kelemahan mental sementara adalah otomatisme: lihat Falconer, di atas. Salah satu dampaknya adalah terdakwa di Hennessy akan dibebaskan karena otomatisme jika aturan Australia diimpor ke Inggris.

Kegilaan Dan Otomatisme

Bagian sebelumnya telah menunjukkan kesulitan membedakan pertahanan ini dalam konteks otomatisme. Cepat mengilustrasikan masalahnya. Kondisi terdakwa akibat suntikan insulin. Gangguan fungsi pikiran dianggap sebagai faktor eksternal, bukan penyakit. Namun, kadar darah/gula yang tinggi, hiperglikemia, adalah suatu penyakit dan Aturan M'Naghten berlaku. Dalam Quick Pengadilan Banding mengatakan bahwa pukulan di kepala merupakan faktor eksternal dan oleh karena itu pembelaannya bersifat otomatisme. Namun, jika pukulan tersebut menyebabkan kerusakan otak, maka pertahanannya termasuk kegilaan asalkan tidak ada pukulan eksternal lainnya. Dalam T di atas, jika stres traumatis setelah suatu penyakit dianggap sebagai penyakit pikiran, kemungkinan besar akibatnya adalah kegilaan; jika penyakitnya disebabkan oleh faktor luar, pertahanannya adalah otomatisme. Otomatisme yang gila adalah pertahanan yang langka dalam hal permohonan yang berhasil.

Perbedaan mendasarnya adalah bahwa otomatisme berasal dari 'kehilangan kesadaran sementara yang timbul secara tidak sengaja', seperti yang diungkapkan Devlin J dalam Hill v Baxter, sedangkan kegilaan disebabkan oleh penyakit mental. Dalam Falconer, di atas, di mana Pengadilan Tinggi Australia menolak perbedaan internal/eksternal, otomatisme dikatakan berasal dari 'kerusakan mental sementara yang tidak berulang yang disebabkan oleh kekuatan eksternal yang menghasilkan ketidakmampuan' untuk mengendalikan tindakan, sedangkan kegilaan adalah berdasarkan 'kelemahan mental yang mendasarinya'. Jika otomatisme yang dituduhkan adalah suatu penyakit pikiran, maka pembelaannya benar-benar merupakan suatu kegilaan, dan beban pembuktian ada pada terdakwa, sedangkan jika otomatisme tersebut merupakan jenis yang tidak gila, tanggung jawab ada pada penuntut untuk menyangkalnya tanpa keraguan. bahwa terdakwa memiliki pembelaan ini. Oleh karena itu, semakin luas 'penyakit pikiran', semakin sempit otomatisme. Dapat dikatakan bahwa jika gangguan mental yang dialami terdakwa tidak mungkin terulang kembali, maka tidak ada gunanya memasukkannya ke rumah sakit yang aman.

Sekalipun juri menolak bukti kegilaan, mereka berhak mempertimbangkan otomatisme: Burns (1973) 58 Cr App R 364 (DC). Seperti yang juga dikatakan Burns, juri harus diarahkan secara terpisah pada beban pembuktian yang berbeda. Kasus-kasus tersebut

menekankan bahwa beban otomatisme ada pada penuntutan: Budd [1962] Crim LR 49 dan Bratty, di atas.

Masih ada satu hal praktis yang tersisa. Penasihat hukum mempunyai tugas untuk memilih antara menasihati terdakwa (a) untuk mengaku bersalah dan mungkin mendapatkan hukuman yang ringan atau (b) mengaku otomatis dan membuka jalan menuju kegilaan. Misalnya, dalam kasus Sullivan di atas, karena terdakwa mengajukan pembelaan otomatisme, penuntut dapat mengajukan bukti kegilaan (yang harus mereka buktikan tanpa keraguan). Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan untuk Mengaku) tahun 1991, yang tidak berlaku pada masa Sullivan dan Hennessy, berarti bahwa komitmen tidak diwajibkan kecuali dalam kasus pembunuhan dan pengakuan atas kegilaan secara teori seharusnya menjadi lebih populer. daripada sebelumnya.

Pembaruan

Komisi Hukum dalam Laporrannya No. 177, A Criminal Code for England and Wales, 1989, cl 33(1), mengusulkan untuk membentuk sebagian besar Butler Committee on Mentally Abnormal Offenders, di atas:

Seseorang tidak bersalah melakukan suatu pelanggaran jika:

- (a) ia bertindak dalam keadaan otomatisme, yaitu tindakannya merupakan kejang atau kejang; atau terjadi pada saat ia berada dalam kondisi (baik dalam keadaan tidur, tidak sadarkan diri, gangguan kesadaran atau lainnya) yang membuat ia tidak dapat mengendalikan tindakan tersebut secara efektif; Dan
- (b) tindakan atau keadaan tersebut bukan merupakan akibat dari apa pun yang dilakukan atau dihilangkan dengan kesalahan yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran atau karena mabuk secara sukarela.

Proposal ini dikritik karena gagal mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'pengendalian efektif'. Yang masih dikecualikan dari pembelaan adalah penderita epilepsi dan diabetes, meskipun orang yang berjalan dalam tidur akan dimasukkan, berlawanan dengan Burgess, di atas.

Akan tetapi, berdasarkan pasal 34, terdakwa yang berada dalam keadaan otomatisme (bukan hanya karena mabuk) yang merupakan ciri dari suatu kelainan, baik organik maupun fungsional, dan baik berlanjut atau berulang, yang dapat menyebabkan keadaan serupa pada kesempatan lain akan dikenai hukuman. tunduk pada putusan gangguan jiwa, dan pada pasal 39 pengadilan akan memiliki kewenangan yang luas untuk menjatuhkan hukuman. Hukum otomatisme yang berlaku saat ini telah dikritik karena mengizinkan orang-orang yang seharusnya dirawat berkeliaran di jalanan.

Dampak dari pasal 33(1) dapat menghilangkan perdebatan internal/eksternal yang ada saat ini: tidak perlu lagi membicarakan kemauan, perilaku sukarela, atau kemauan. Karena pasal 33(1)(a) berbicara tentang perampasan 'kontrol efektif', Broome v Perkins dan Referensi Jaksa Agung (No. 2 tahun 1992), di atas, mungkin akan dibalik. Namun, frasa seperti 'gangguan kesadaran' dan 'pengendalian efektif' dapat diartikan secara luas atau sempit, dan hasilnya mungkin berbeda jika dilihat dari fakta yang sama, karena apa yang 'efektif' adalah pertanyaan tentang derajatnya. Rancangan KUHP tahun 1985 mensyaratkan bahwa terdakwa tidak dapat

mengendalikan gerakannya sama sekali. Dalam kritik terhadap rancangan tersebut, dapat dikatakan bahwa mencabut pembelaan ini pada saat terdakwa belum sepenuhnya kehilangan kendali tampaknya merupakan hal yang berat. Tentu saja dalam draft ini *Broome v Perkins* akan bertahan. Berjalan dalam tidur kembali menjadi bagian dari otomatisme. Perhatikan juga bahwa sub-cl (b) menghilangkan sebagian besar dari apa yang diberikan dalam sub-cl (a). Sub-klausul (b) juga berarti bahwa prinsip kontemporer tidak berlaku jika pasal 33(1) berlaku.

Ringkasan tabel pertahanan

Tabel 9.1 memberikan perbandingan singkat mengenai kegilaan, berkurangnya tanggung jawab, dan otomatisme.

Tabel 9.1 Kegilaan, berkurangnya tanggung jawab, otomatisme: perbandingan singkat

	<i>Insanity</i>	<i>Diminished responsibility</i>	<i>Automatism</i>
<i>Defence to</i>	All offences	Murder	All offences
<i>Cause</i>	Must be internal	Internal or external but must be listed in s 2(1), Homicide Act 1957	Must be external
<i>Definition requires</i>	Disease of the mind	Abnormality of mind	Loss of consciousness
<i>Burden of proof</i>	On the accused	On the accused	On the prosecution
<i>Standard of proof</i>	Balance of probabilities	Balance of probabilities	Beyond reasonable doubt
<i>Outcome if successful plea</i>	Not guilty by reason of insanity	(Voluntary) manslaughter	Acquittal

Kehilangan kendali atas mobil

Dalam *Spurge* [1961] 2 QB 205 pengadilan memutuskan bahwa hilangnya kendali atas sebuah mobil secara tiba-tiba dan total merupakan pembelaan, dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak mengetahui atau seharusnya dia mengetahui cacat tersebut. Demikian pula dalam *Burns v Bidder* [1967] 2 QB 227 terdakwa tidak bersalah karena tidak mendahulukan pejalan kaki di persimpangan ketika rem blong. Analoginya dengan otomatisme hampir sama dan memang pengadilan menggunakan contoh otomatisme yang sudah usang, yaitu seorang pengemudi diserang oleh segerombolan lebah ketika membebaskan pengemudinya. Demikian pula dalam *Bell* di atas, Goff LJ menyebutkan serangan yang dilakukan oleh segerombolan lebah dan hilangnya kendali, misalnya karena ledakan atau rem blong. Posisinya mungkin berbeda jika pejalan kaki melompat keluar. Berdasarkan *Neal v Reynolds* [1966] Crim LR 393 terdakwa bersalah, tapi kasus itu mungkin salah. Pengadilan belum konsisten dalam penggunaan terminologinya. Jika terdakwa mempunyai pembelaan atas otomatisme karena ia, misalnya, diserang oleh segerombolan lebah, pengadilan dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak mengemudi dan oleh karena itu tidak bersalah atas pelanggaran apa pun yang melibatkan *actus reus* mengemudi. Tindakan tersebut tidak disengaja; karenanya, tidak ada tindakan. Namun, dalam keadaan yang berbeda, pengadilan dapat mengatakan bahwa tindakan terdakwa bersifat sukarela meskipun dia tidak mengetahui

keadaan di balik tindakan tersebut. Jika seorang terdakwa mengemudi dengan kandungan alkohol di atas batas dalam darahnya karena minumannya telah dibubuhi, pengadilan memutuskan di Shippam [1971] Crim LR 434 bahwa dia bersalah, berdasarkan apa yang sekarang menjadi pasal 5 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan tahun 1988, karena mengemudinya bersifat sukarela. (Lihat bagian tentang mabuk-mabukan untuk undang-undang tentang mabuk karena paksaan.) Intinya adalah: berhati-hatilah dalam menggunakan istilah 'sukarela' dan 'tidak sukarela' di pengadilan. Terminologinya tidak konsisten.

Cakupan bab ini dirangkum dengan judul: 'pertahanan terhadap gangguan mental'. Pembelaan pertama yang dipertimbangkan di sini adalah ketidaksesuaian untuk mengajukan pembelaan. Hal ini terjadi apabila terdakwa dalam keadaan tidak waras pada saat persidangan. Pembelaan kedua, kegilaan, adalah ketika terdakwa sehat secara mental untuk diadili tetapi menuduh bahwa dia tidak waras pada saat pelanggaran dilakukan. Beban untuk membuktikan pembelaan ini terletak pada terdakwa. Dia harus membuktikan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada bahwa dia (i) bekerja dengan alasan yang tidak tepat (ii) karena penyakit pikiran (iii) bahwa dia (a) tidak mengetahui sifat dan kualitas tindakannya atau (b) bahwa dia tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah salah [secara hukum]. Kata 'secara hukum' ada dalam tanda kurung karena pembelaan ini tidak cukup jika terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah secara moral: jarang ada individu yang tidak mengetahui bahwa membunuh adalah salah secara hukum. Undang-undang ini didasarkan pada Aturan M'Naghten tahun 1843. Konsekuensi dari aturan tersebut ditentukan, misalnya. penderita epilepsi, orang yang berjalan dalam tidur, dan beberapa penderita diabetes mungkin digolongkan dalam undang-undang sebagai orang gila, tidak peduli apa kata dokter, sementara penderita diabetes lainnya mungkin memiliki pembelaan terhadap otomatisisme. Meskipun kegilaan menjadi pembelaan, terdakwa yang dinyatakan gila oleh juri dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Memang benar, terutama karena lembaga pembelaan atas tanggung jawab yang berkurang, permohonan atas kegilaan jarang terjadi.

Berkurangnya tanggung jawab, tidak seperti kegilaan yang diterapkan pada semua pelanggaran, merupakan pembelaan hanya pada pembunuhan, namun seperti kegilaan, beban pembuktian ada pada terdakwa. Seperti halnya kegilaan, ada tiga rintangan yang harus diatasi oleh terdakwa. Dia harus membuktikan bahwa pada saat pembunuhan dia (i) menderita kelainan pikiran (ii) yang timbul dari salah satu penyebab yang disebutkan dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Pembunuhan 1957 (iii) dan yang secara substansial merugikan dirinya. tanggung jawab mental atas kejahatan tersebut. Bagaikan kegilaan, ketiga isu tersebut merupakan pertanyaan fakta bagi juri.

Pembelaan ketiga yang melibatkan kondisi mental terdakwa adalah otomatisisme. Otomatisisme adalah pembelaan dimana pikiran terdakwa tidak dapat mengendalikan gerakannya. Terdapat perdebatan mengenai apakah terdakwa benar-benar telah kehilangan kendali, namun otoritas modern dapat melakukan hal tersebut. Di sini beban pembuktian ada pada penuntut: dan penuntut harus menyangkal pembelaannya tanpa keraguan.

- ❖ Ketidakmampuan untuk mengajukan pembelaan: Pembelaan ini terbuka bagi terdakwa yang pada saat persidangan tidak dapat memahami proses persidangan untuk membuat pembelaan yang tepat. Masalah kelayakan untuk mengajukan pembelaan adalah urusan juri. Kecuali untuk pembunuhan, Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidakmampuan Mengaku) tahun 1991 sebagaimana telah diamandemen memberikan serangkaian perintah.
- ❖ Kegilaan: Pembelaan berdasarkan hukum common law ini memberikan pembelaan kepada orang-orang yang 'gila' pada saat melakukan pelanggaran namun mampu untuk mengajukan pembelaan pada saat persidangan. Beban pembuktian ada pada terdakwa dan standar pembuktian ada pada keseimbangan probabilitas (lihat Bab 1). Ia harus membuktikan:
 - (a) dia menderita 'penyakit pikiran'
 - (b) yang menyebabkan cacat nalar dan salah satu;
 - (c) yang sedemikian rupa sehingga terdakwa tidak mengetahui sifat dan mutu perbuatan tersebut atau;
 - (d) yang sedemikian rupa sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah secara hukum (walaupun ia mengetahui bahwa ia telah bertindak salah secara moral). Kritik tajam terhadap aturan mengenai kegilaan telah dilakukan selama bertahun-tahun, khususnya terhadap 'penyakit pikiran', sebuah konsep yang mencakup epilepsi, berjalan dalam tidur, dan hipoglikemia.

Juri memutuskan apakah seseorang gila atau tidak, namun dua praktisi medis harus memberikan kesaksian mengenai kondisi mental terdakwa. Perintah yang sama setelah ditemukannya ketidakwarasan seperti yang dibuat setelah ditemukannya ketidaklayakan untuk mengajukan pembelaan dapat dilakukan kecuali sehubungan dengan pembunuhan ketika hanya satu perintah yang dimungkinkan: Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan dan Ketidaklayakan untuk Mengaku) tahun 1991.

Meskipun kegilaan menjadi pembelaan, terdakwa dapat mengajukan banding terhadap putusan 'tidak bersalah karena alasan kegilaan'.

- ❖ Berkurangnya tanggung jawab: Bagian 2(1) dari Undang-Undang Pembunuhan tahun 1957 memberikan pembelaan kepada terdakwa yang membuktikan berdasarkan kemungkinan bahwa ia menderita 'kelainan pikiran (baik yang timbul dari kondisi ditahan atau mengalami keterbelakangan perkembangan) pikiran atau penyebab bawaan apa pun atau yang disebabkan oleh penyakit atau cedera) yang secara substansial mempengaruhi tanggung jawab mentalnya atas tindakan atau kelalaiannya dalam melakukan atau menjadi pihak dalam pembunuhan tersebut.' Pelanggaran tersebut, sebagaimana sudah jelas, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang membunuh. atau merupakan aksesori untuk pembunuhan. Oleh karena itu pertahanan terdiri dari tiga elemen:
 - (a) kelainan pikiran
 - (b) suatu sebab yang merupakan salah satu penyebab yang terdapat dalam tanda kurung pada s 2(1) dan

(c) gangguan substansial tanggung jawab mental.

Ini bukanlah istilah-istilah yang mudah untuk dipahami (walaupun setiap isu adalah tanggung jawab juri) namun tujuan dari pasal 2(1) adalah untuk menyelamatkan para pembunuh yang mengalami gangguan mental dari hukuman mati dengan dasar yang lebih luas daripada hukuman kegilaan yang telah ditetapkan. Terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa pembelaan ini digunakan untuk memberikan belas kasihan kepada terdakwa dan sebagai pengganti pembelaan atas kegilaan dalam kasus pembunuhan.

- ❖ Otomatisisme: Otomatisisme, pembelaan terhadap semua kejahatan, didasarkan pada tindakan yang tidak disadari (seperti yang mungkin disebabkan oleh diabetes) atau refleks tubuh atau penerapan eksternal dari sesuatu, misalnya. paksaan kepada terdakwa yang menyebabkan dia kehilangan kendali penuh atas gerakan tubuh, bertindak tanpa disengaja. Jika terdakwa merasa dirinya berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak ada pembelaan jika dia bersalah. Jika otomatisisme disebabkan oleh kegilaan, pembelaannya adalah kegilaan, bukan otomatisisme. Beban pembuktian otomatisisme terletak pada penuntut, yang harus menyangkal hal tersebut tanpa keraguan.

BAB 10

PELANGGARAN YANG BELUM SEMPURNA

Hukum Inggris turun tangan untuk menghukum orang yang (belum) melakukan pelanggaran. Kejahatan yang menghukum perilaku sebelum dilakukannya kejahatan (penuh atau substantif) disebut pelanggaran awal. Menyediakan perubahan-perubahan ini adalah untuk mencegah pelanggaran dalam kategori ini. Pengecualian terhadap aturan ini adalah konspirasi untuk menipu: hasil yang ingin dicapai tidak harus berupa kejahatan. Konspirasi untuk menipu tidak dapat digambarkan sebagai pelanggaran yang masih kecil. Tidak seperti pelanggaran sekunder, kejahatan penuh tidak perlu terjadi sebelum terdakwa dinyatakan bersalah atas pelanggaran ringan. Jika pelanggaran pokok dilakukan, maka terdakwa juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak sekunder. Pelanggaran yang belum sempurna merupakan pidana hanya dalam kaitannya dengan pelanggaran penuh, yaitu seseorang tidak bersalah atas percobaan tetapi, misalnya, percobaan pembunuhan.

Ada tiga pelanggaran kecil: penghasutan, konspirasi, dan percobaan. Bab ini membahas pelanggaran-pelanggaran ini. Ada juga pelanggaran tertentu. Misalnya, terdapat pelanggaran menghasut seseorang untuk melakukan pembunuhan yang bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang tahun 1861 (lihat di bawah). Beberapa pelanggaran lain merupakan bagian dari sifat pelanggaran yang masih kecil. Dua contoh saja sudah cukup: pasal 3 Undang-Undang Pengrusakan Pidana tahun 1971 mengatur tentang kepemilikan sesuatu dengan maksud untuk merusak properti; pasal 1 Undang-Undang Pencegahan Kejahatan tahun 1953 menghukum membawa senjata ofensif. Dalam kejahatan mana pun, terdakwa tidak perlu merugikan properti atau orang mana pun. Ketika penyerangan dipandang sebagai upaya penyerangan (yang sekarang sudah tidak terjadi lagi), hal tersebut merupakan pelanggaran yang masih kecil. Salah satu bentuk perampokan, masuk ke dalam gedung sebagai pelanggar dengan maksud untuk melakukan tindakan kriminal, mencuri, atau melukai tubuh secara serius juga merupakan pelanggaran ringan. Delik-delik tersebut dibahas dalam urutan penghasutan, persekongkolan dan percobaan karena secara umum delik tersebut menunjukkan pergerakan menuju selesainya delik pokok. Misalnya saja, tindak pidana permufakatan jahat dilakukan pada tahap yang lebih awal dibandingkan upaya percobaan sehingga polisi dapat melakukan intervensi pada waktu yang lebih awal. Begitu pula urutannya dalam RUU KUHP, Law Com. Laporan No. 177, 1989, KUHP untuk Inggris dan Wales.

10.1 MENDORONG, MEMBANTU DAN MANTAN PELANGGARAN PENGHASUTAN

Undang-Undang Kejahatan Berat tahun 2007, yang mulai berlaku sebelum diterbitkannya edisi ini, menjadikan pelanggaran hukum yang lazim berupa penghasutan kejahatan (hasutan) menjadi undang-undang. Penjelasan mengenai delik common law dipertahankan di sini karena akan terus ada hingga definisi baru berlaku dan karena dapat dilakukan perbandingan antara definisi common law dan undang-undang.

Ketentuan mengenai pasal menghasut orang lain diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada buku ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026 yaitu:

PASAL 160 KUHP	PASAL 246 UU 1/2023
<p>arang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp.500 juta, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan

Bagian 2 dari undang-undang tahun 2007 menghapuskan pelanggaran hukum penghasutan (pasal 59) dan menciptakan kejahatan mendorong dan membantu, yang sama seperti tindak pidana penghasutan yang digantikannya, merupakan pelanggaran yang belum matang (pasal 49(1)). Perlu dicatat bahwa 'mendorong atau membantu' harus dibaca sebagai mencakup situasi di mana terdakwa memberikan tekanan pada orang lain untuk melakukan pelanggaran (s 65 (2)), sebuah definisi parsial yang aneh dari 'mendorong atau membantu' tetapi sepenuhnya masuk dalam konteks yang sama. sejalan dengan pelanggaran hukum umum yaitu penghasutan. Pasal 44(1) menetapkan kejahatan 'dengan sengaja mendorong atau membantu suatu pelanggaran'. Bunyinya;

Seseorang melakukan pelanggaran jika:

- (a) ia melakukan tindakan yang mampu mendorong atau membantu dilakukannya suatu pelanggaran; Dan
- (b) ia bermaksud untuk mendorong atau membantu pelaksanaannya.

1. **Pasal 44(2)** menyatakan dengan jelas bahwa:

ia tidak boleh dianggap bermaksud mendorong atau membantu dilakukannya suatu pelanggaran hanya karena dorongan atau bantuan tersebut merupakan konsekuensi yang dapat diperkirakan dari tindakannya.

2. **Pasal 45** menciptakan pelanggaran kedua, yaitu '*mendorong atau membantu suatu pelanggaran dengan keyakinan bahwa pelanggaran tersebut akan dilakukan*'. **Pasal 45(1)** menyatakan: 'Seseorang melakukan pelanggaran jika;
 - ia melakukan tindakan yang mampu mendorong atau membantu dilakukannya suatu pelanggaran; Dan
 - dia percaya bahwa pelanggaran tersebut akan dilakukan; Dan
 - bahwa tindakannya akan mendorong atau membantu pelaksanaannya.

Bagian **pasal 46** membahas apa yang kadang-kadang disebut sebagai contoh pemberian dorongan atau bantuan dalam 'daftar cucian', yaitu ketika terdakwa yakin bahwa satu atau

lebih pelanggaran mungkin telah dilakukan namun tidak yakin pelanggaran mana yang sebenarnya akan dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta ini, orang yang mendorong atau membantu dianggap bersalah ketika ia melakukan suatu tindakan yang mampu membantu atau mendorong dan ia yakin bahwa 'tindakannya akan mendorong atau membantu dilakukannya satu atau lebih' potensi pelanggaran.

Mendorong atau membantu' juga mencakup situasi berikut (s 66): Jika seseorang (D1) mengatur seseorang (D2) untuk melakukan suatu tindakan yang mampu mendorong atau membantu dilakukannya suatu pelanggaran, dan D2 melakukan tindakan tersebut bertindak, D1 juga harus dirawat seperti telah melakukannya.

Ada sebagian definisi 'bermaksud' dalam **pasal 44(1)(b)**: *'cukup untuk membuktikan bahwa ia bermaksud mendorong atau membantu dilakukannya suatu tindakan yang dapat menyebabkan dilakukannya pelanggaran tersebut.'* Definisi 'percaya' dalam pasal 45(1)(b) ditemukan sebagian dalam pasal **45(1)(b) 47(3)**:

itu cukup untuk membuktikan bahwa dia beriman:

- (a) bahwa suatu tindakan akan dilakukan yang merupakan tindakan pelanggaran tersebut; Dan
- (b) bahwa tindakannya akan mendorong atau membantu dilakukannya tindakan tersebut.

Ada penjelasan lebih lanjut mengenai unsur mental pada s 47(5):

Untuk membuktikan untuk tujuan bagian ini apakah suatu tindakan merupakan tindakan yang, jika dilakukan, akan dianggap melakukan suatu pelanggaran:

- (a) jika pelanggarannya memerlukan pembuktian kesalahannya, maka harus dibuktikan bahwa;
 - (i) D [terdakwa] percaya bahwa, jika perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan itu dilakukan karena kesalahannya;
 - (ii) D ceroboh apakah akan dilakukan kesalahan itu atau tidak; atau
 - (iii) Keadaan pikiran D sedemikian rupa sehingga, jika dia melakukannya, maka kesalahan itu akan terjadi.
- (b) apabila tindak pidana tersebut memerlukan pembuktian mengenai keadaan atau akibat tertentu (atau kedua-duanya), maka harus dibuktikan bahwa –
 - (i) D percaya bahwa, jika tindakan tersebut dilakukan, maka tindakan tersebut akan dilakukan dalam keadaan atau dengan konsekuensinya; atau
 - (ii) D ceroboh apakah hal itu akan dilakukan dalam keadaan seperti itu atau dengan konsekuensinya.

Untuk menghindari keraguan, pasal 47(8) mengatur bahwa suatu 'tindakan' mencakup kelalaian dan kelanjutan suatu tindakan. Pasal 49 mengatur sebagian bahwa seseorang dapat melakukan lebih dari satu pelanggaran berdasarkan pasal 44 – 46 berdasarkan fakta yang sama.

Ada pembelaan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran ini yang terdapat pada pasal 50, yaitu pembelaan dengan bertindak secara wajar. Ini merupakan pembelaan bagi terdakwa untuk membuktikan (ss (2)) 'bahwa ia meyakini adanya keadaan tertentu; bahwa

keyakinannya masuk akal; dan bahwa masuk akal baginya untuk bertindak seperti yang dia lakukan dalam situasi yang dia yakini akan terjadi'. Ayat (3) selanjutnya mengatur:

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah masuk akal bagi seseorang untuk bertindak seperti itu termasuk;

- (a) keseriusan pelanggaran yang diantisipasi;
- (b) tujuan apa pun yang menurutnya telah dilakukannya;
- (c) otoritas apa pun yang menurutnya ia bertindak.

Pasal 51 mengecualikan orang-orang yang dilindungi dari hukuman atas pelanggaran-pelanggaran ini. Orang yang dilindungi adalah orang yang dilindungi oleh 'pelanggaran protektif', yaitu pelanggaran yang dilakukan 'untuk melindungi kategori orang tertentu' (pasal 51(2)).

Undang-undang yang digantikan oleh Undang-Undang Kejahatan Berat dipertahankan sebagai perbandingan. Meskipun demikian, meminta atau mengundang seseorang untuk melakukan kejahatan merupakan pelanggaran hukum umum, bahkan jika permintaan tersebut tidak berpengaruh: Higgins (1801) 102 ER 269, ditegaskan dalam Whitehouse [1977] QB 868 (CA). Orang yang dihasut tidak perlu dibujuk untuk melakukan tindakan kriminal. Kejahatan selesai ketika terdakwa meminta. Misalnya, di Higgins, terdakwa meminta seorang pelayan untuk mencuri harta milik majikannya. Dia bersalah, terlepas dari apakah pelayan itu bertindak atas sarannya atau tidak. Mungkin kebetulan bahwa kejahatan yang dilakukan belum selesai. Terdakwa harus menunjukkan melalui kata-kata atau tindakannya bahwa ia bersedia melakukan kejahatan. Dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sesuai kebijaksanaan hakim pada saat perkara diadili berdasarkan surat dakwaan meskipun tindak pidana pokoknya jauh lebih kecil. Oleh karena itu, pelaku penyerangan berpotensi dikenakan hukuman penjara seumur hidup, namun hukuman maksimal bagi pelaku utama hanya enam bulan penjara. Penghasutan untuk melakukan pelanggaran singkat dapat dihukum sama dengan kejahatan yang telah selesai (Undang-Undang Pengadilan Magistrates 1980, pasal 45(3)). Hasutan untuk melakukan pelanggaran apa pun jika diadili secara singkat memiliki aturan yang sama (s 32(1)(b)). Oleh karena itu, terdakwa dapat dihukum lebih berat karena menghasut pelanggaran tersebut dibandingkan dengan orang yang melakukannya, terutama jika persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri. Penghasut mungkin telah menunjukkan bahwa ia dapat merencanakan suatu pelanggaran, sedangkan penghasut mungkin hanya diberi tahu apa yang harus dilakukan.

Aktus Reus

Harus ada persuasi atau dorongan: Race Relations Board v Applin [1973] QB 815 (CA), kasus yang berhubungan dengan kejahatan penghasutan kebencian rasial, Hendrickson [1977] Crim LR 356 (CA), James (1985) 82 Cr Aplikasi R 226 (CA) dan Marlow [1997] Crim LR 197 (CA). Di Marlow, terdakwa menerbitkan buku tentang cara menanam ganja dan mengiklankannya di majalah. Dia bersalah karena menghasut orang lain untuk mengembangkan obat yang dikendalikan meskipun orang lain tersebut bagaimanapun juga telah membudidayakan ganja dan meskipun informasi yang sama tersedia di tempat lain. Juga tidak relevan jika tindakan penghasutan dilakukan di depan umum. Pengadilan menyatakan sehubungan dengan definisi

hasutan bahwa 'mendorong' 'mewakili serta kata modern apa pun yang dapat mewakili konsep tersebut'.

Dalam James, para terdakwa tidak bersalah atas konspirasi untuk menghasut orang lain agar menggunakan listrik abstrak. Tujuan mereka adalah untuk menjual mesin yang membalikkan meteran tetapi mereka tidak membujuk pembeli untuk menggunakannya, seperti yang dituduhkan. Dia akan menjualnya kepada orang lain. Pengadilan Banding di Fitzmaurice [1983] QB 1083 berbicara tentang 'saran, usulan atau permintaan'. Dalam Goldman [2001] Crim LR 822 dinyatakan bahwa terdakwa menyarankan, mengusulkan, membujuk atau membujuk sebuah perusahaan ketika dia menulis surat kepada mereka untuk meminta video pornografi sebagai tanggapan atas iklan mereka. Seperti halnya Marlow, tidak penting jika kepala sekolah melakukan tindak pidana kepemilikan video porno tanpa dorongan apa pun dari terdakwa. Juga tidak penting bahwa orang yang dihasutlah yang mengundang terdakwa untuk mendorongnya, orang yang diundang, untuk melakukan suatu pelanggaran.

Dalam kritik terhadap Goldman dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak membujuk atau mendorong para pelaku pornografi anak untuk melakukan apapun. Mereka adalah penjual yang bersedia, dia adalah pembeli yang bersedia. Ancaman dan tekanan dapat berupa hasutan: *Invicta Plastics Ltd v Clare* [1976] Crim LR 131 (DC) dan James. Persuasi tidak harus dilakukan secara lisan. Di *Invicta Plastics*, perusahaan tersebut mengiklankan penjualan instrumen yang berguna untuk menghindari jebakan kecepatan polisi. Mereka bersalah karena menghasut suatu pelanggaran. Pengadilan Divisi menyatakan bahwa tidak seperti James, para terdakwa berusaha membujuk pengendara agar melanggar hukum. Namun, menurut James, penjualan apa yang disebut 'kotak hitam', yang tujuan utamanya adalah untuk mengambil listrik secara ilegal, bukan merupakan hasutan. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada upaya untuk membujuk atau mendorong orang lain untuk melanggar hukum ketika seseorang memfasilitasi mereka untuk melakukan hal tersebut.

Penghasutan tersebut mungkin ditujukan kepada dunia secara umum seperti dalam *Most* (1881) 7 QBD 244, dimana terdakwa menulis artikel di sebuah surat kabar yang menganjurkan pembunuhan. Penghasutan harus sampai ke perhatian penghasut namun tidak perlu menimbulkan dampak: *Krause* (1902) 18 TLR 238. Penghasutan tidak perlu menimbulkan dampak apa pun. Terdakwa bersalah meskipun yang menghasut tidak melakukan tindak pidana tersebut. Jika terdakwa adalah korban kejahatan, ia tidak dapat dinyatakan bersalah karena menghasut pelanggaran tersebut, asalkan pelanggaran tersebut dirancang untuk melindunginya: *Tyrrell* [1894] 1 QB 710. Aturan yang sama juga berlaku dalam konspirasi (lihat di bawah).

Salah satu hasil hukum yang dinyatakan sejauh ini adalah (tunduk pada Goldman) hal ini. Jika terdakwa membujuk orang lain secara lisan untuk melakukan kejahatan, ini disebut penghasutan. Namun, jika dia menjual senjata kepadanya karena mengetahui bahwa dia akan menembak seseorang, dia tidak bersalah melakukan penghasutan karena tidak ada bujukan atau dorongan, dan jika pihak lain tidak, misalnya, membunuh pihak ketiga tersebut, tidak ada tanggung jawab sekunder. salah satu.

Kasus terbaru yang sangat menarik adalah O'Shea [2004] Crim LR 896 (CA) (juga disebut O'Shea v Coventry Magistrates' Court). Terdakwa, yang telah mendaftar dan mengakses pornografi anak di situs AS, bersalah karena menghasut bisnis AS untuk mendistribusikan foto-foto tidak senonoh (pelanggaran substantif dapat berupa salah satu dari beberapa pelanggaran termasuk kepemilikan foto tidak senonoh seorang anak yang bertentangan dengan pasal 160 Undang-undang). Undang-Undang Peradilan Pidana 1988). Pengadilan tidak membahas apakah suatu korporasi dapat dihasut. Tidak pasti apakah ada manusia yang dihasut. Situs web tersebut sudah beroperasi sebelum terdakwa berlangganan dan tentunya seseorang tidak dapat menghasut mesin untuk melakukan pelanggaran? O'Shea adalah otoritas yang lemah.

Memang benar

Mens rea, sebagian, adalah pengetahuan atau kebutaan yang disengaja terhadap keseluruhan keadaan pelanggaran dan niat mengenai konsekuensinya. Oleh karena itu, untuk dinyatakan bersalah melakukan penghasutan untuk melakukan pembunuhan, terdakwa harus bermaksud agar korbannya dibunuh: niat untuk melukai tubuh secara menyedihkan saja tidak cukup. Terdakwa bersalah jika ia melakukan tindakan penghasutan dengan maksud agar pelaku utama melakukan pelanggaran tersebut. Tidak perlu menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai unsur-unsur kesalahan dalam pelanggaran penuh. Shaw [1994] Crim LR 365 (CA) tidak benar karena menyatakan bahwa terdakwa harus memiliki mens rea atas kejahatan yang dilakukan secara penuh.

Sulit untuk memahami mengapa penghasut pencurian harus mempunyai niat untuk merampas secara permanen dan tidak jujur seperti halnya pencuri itu sendiri. Barangkali persoalan itu tidak terlintas di benak para juri. Tentu saja penghasutan sudah selesai, tidak peduli apakah orang yang dihasut bermaksud melakukan pelanggaran: keadaan pikiran penghasut tidaklah relevan. Lihat juga bagian selanjutnya dari buku ini. Shaw juga berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah jika dia melakukan tindakan penghasutan untuk menunjukkan kegagalan keamanan di tempat majikannya. Motifnya berarti dia tidak bersalah. Putusan ini tidak benar mengingat hukum umum bahwa motifnya tidak relevan, terutama motif persekongkolan yang disebutkan di bawah ini: lihat pembahasan Yip Chiu-Cheung v R [1995] 1 AC 111. Karena terdakwa di Shaw membujuk rekan-rekannya untuk melakukan pencurian, dia seharusnya dinyatakan bersalah melakukan penghasutan, tidak peduli seberapa bagus motifnya.

10.2 PELANGGARAN HUKUM PENGHASUTAN

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 136-137) menerangkan bahwa:

1. *"Menghasut"* artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata *"menghasut"* tersimpul sifat *"dengan sengaja"*. Menghasut itu lebih keras daripada *"memikat"* atau *"membujuk"*, akan tetapi bukan *"memaksa"*.

Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, menurut Soesilo, bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung: *“seranglah polisi yang tidak adil itu, dan ambillah senjatanya!”* ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan: *“saudara-saudara apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, dan ambil senjatanya?”*

2. menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai, jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.

The Offenses Against the Person Act 1861, s 4 (sebagaimana diubah dengan UU Hukum Pidana 1977) menciptakan kejahatan penghasutan untuk membunuh. Terdakwa bersalah jika ia bertindak untuk 'meminta, mendorong, membujuk atau berusaha untuk membujuk atau mengusulkan kepada siapa pun untuk membunuh orang lain'. Pelanggaran tersebut, yang dipermasalahkan di *Most dan Krause*, tidak menambah apa pun terhadap pelanggaran hukum penghasutan dalam hukum substantif. Bagian 4 mencakup penghasutan warga negara asing di Inggris dan Wales untuk melakukan pembunuhan di luar negeri: *Abu Hamza [2006] EWCA Crim 2918*. Hal ini tidak terbatas pada ajakan warga Inggris untuk melakukan pembunuhan. Parlemen telah menciptakan pelanggaran penghasutan lainnya, misalnya, Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 (ada beberapa pelanggaran serupa dalam undang-undang), Undang-undang Penghasutan untuk Pemberontakan tahun 1797, dan Undang-Undang Penghasutan untuk Ketidakpuasan tahun 1934.

Hubungan antara hasutan dan pelanggaran penuh

- (a) Tidak penting jika pelanggaran penuh tidak dilakukan. Jika kejahatan memang terjadi, terdakwa dapat didakwa sebagai penghasut atau pihak sekunder atau kedua-duanya. Jika penghasut memberi jalan untuk memberikan dorongan, konspirasi dapat terjadi. Jika kejahatan tidak terjadi, terdakwa tidak dapat bersalah atas konseling tetapi mungkin bersalah atas penghasutan.
- (b) Jika kejahatan penuh tidak mungkin dilakukan, *Fitzmaurice* di atas mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah kecuali cara yang disarankan tidak memadai. (Pada kenyataannya, perampokan terhadap seorang perempuan yang diyakini membawa uang tunai dari pabrik ke bank merupakan suatu kejahatan yang mungkin terjadi, meskipun perempuan tersebut tidak ada, karena perempuan memang membawa uang dari pabrik ke bank.) Pengadilan Tinggi memang melakukan hal tersebut. Namun tidak mengesampingkan keputusan Pengadilan Banding Pidana dalam *McDonough (1962) 47 Cr App R 37* yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena menghasut orang lain untuk menerima karkas domba curian meskipun tidak ada karkas di tempat yang bersangkutan. Waktu. Di *Fitzmaurice*, pengadilan mengatakan bahwa *McDonough* benar karena mungkin saja terjadi suatu saat di masa depan. Pengadilan Divisi dalam *DPP v Armstrong [2000] Crim LR 379* menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena menghasut pelanggaran dengan menyebarkan foto-foto tidak senonoh anak-anak

ketika dia meminta seseorang untuk memberikan kepadanya pornografi yang melibatkan gadis-gadis 'tidak lebih muda dari katakanlah 12 tahun'. Tanpa sepengetahuan terdakwa, orang tersebut adalah seorang petugas polisi yang dituduh menangkap pedofil. Dia tidak akan menyediakan pornografi.

Pengadilan memutuskan bahwa kejahatan tersebut bukan tidak mungkin dilakukan karena petugas dapat memiliki akses terhadap stok pornografi. Aturan yang sama seperti penghasutan juga berlaku pada konspirasi yang tetap merupakan kejahatan menurut hukum umum. Namun, dalam kaitannya dengan percobaan dan konspirasi undang-undang, ketidakmungkinan bukanlah suatu pembelaan. Oleh karena itu, jika terdakwa meminta 'pelaku sebenarnya' untuk melakukan pemerkosaan namun perempuan tersebut sudah meninggal, maka tidak ada pelanggaran penghasutan. Pembelaan terhadap ketidakmungkinan hukum memang berlaku, yaitu terdakwa tidak bersalah apabila ia mengajak pelaku untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana.

Pelanggaran penuh pasti merupakan kejahatan: Whitehouse, di atas. Seorang anak perempuan dibebaskan dari tindak pidana melakukan inses dengan ayahnya, meskipun ayah bersalah atas pelanggaran pokok jika inses tersebut dilakukan. Oleh karena itu, terdakwa, sang ayah, tidak bersalah karena menghasutnya untuk melakukan inses. Meskipun prinsip tersebut tetap ada dan diterapkan di Pickford [1995] 1 Cr App R 420 (CA), fakta Whitehouse kini menimbulkan pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977, pasal 54, merupakan pelanggaran bagi laki-laki yang menghasut seorang gadis di bawah 16 tahun untuk melakukan hubungan seksual dengannya ketika dia mengetahui bahwa gadis tersebut adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan atau saudara tirinya. Namun kejahatan ini begitu jelas sehingga tidak ada pelanggaran bagi laki-laki yang menghasut gadis tersebut untuk melakukan hubungan seks inses dengan orang lain. Situasinya akan berbeda jika penghasut menerapkan paksaan kepada tersangka kepala sekolah. Penghasutnya dianggap bersalah. Argumennya adalah bahwa dalam pemaksaan, terdakwa mempunyai *actus reus* dan *mens rea* pelanggarannya, namun ancaman memberikan pembelaan kepadanya. (Perhatikan bahwa pasal 54 menimbulkan pelanggaran utama yaitu penghasutan: maka terdakwa dapat menghasut seseorang untuk melakukan pelanggaran ini. Secara teori, A dapat menghasut B untuk menghasut C agar melakukan pelanggaran menghasut hubungan inses.) Untuk pidana saat ini undang-undang tentang inses lihat Sexual Offenses Act 2003. Di Pickford, terdakwa didakwa menghasut anak tirinya untuk melakukan inses dengan ibunya, istri terdakwa. Pada saat itu anak laki-laki di bawah 14 tahun dianggap tidak mampu melakukan kejahatan yang melibatkan hubungan seksual. (Anggapan ini dihapuskan pada tahun 1993.) Anak tirinya berusia 13 tahun. Terdakwa dihukum pada tingkat pertama. Dia berpendapat bahwa dia telah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang tidak diketahui hukum, menghasut seorang anak laki-laki di bawah 14 tahun untuk melakukan inses dengan ibunya, karena menurut hukum anak laki-laki tersebut tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan ibunya pada saat itu dan hasutan untuk melakukan tindakan non-kejahatan bukanlah sebuah pelanggaran. Pengadilan memutuskan bahwa anggapan tersebut adalah untuk melindungi anak laki-laki, bukan orang dewasa. Aturan ini hanya berlaku untuk kejahatan yang

dilakukan oleh anak laki-laki, bukan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Seorang wanita bisa melakukan inses dengan putranya. Oleh karena itu, orang lain dapat menghasutnya untuk melakukan inses. Terdakwa bersalah atas pelanggaran tersebut, meskipun tidak menghasut anak laki-laki tersebut untuk melakukan inses, yang pada saat itu bukan merupakan kejahatan. Kasus terakhir adalah C (juga disebut Claydon) [2006] 1 Cr App R 20. Pengadilan Banding memutuskan, sehubungan dengan tuduhan menghasut seorang anak laki-laki berusia 13 tahun untuk melakukan pelanggaran buggery sebelum Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 1993 mengubah undang-undang tersebut. undang-undang yang memperbolehkan anak laki-laki berusia 12 dan 13 tahun untuk didakwa melakukan pelanggaran yang melibatkan hubungan seksual, bahwa karena tidak ada kejahatan substantif, maka tidak ada pelanggaran penghasutan untuk melakukan sesuatu yang pada saat itu bukan merupakan kejahatan.

Meskipun benar untuk mengatakan bahwa kegiatan yang dihasut harus merupakan suatu kejahatan, namun hal tersebut tidak perlu dianggap sebagai suatu kejahatan pada saat penghasutan tersebut dilakukan. Misalnya, seorang terdakwa bisa saja bersalah karena menghasut orang lain untuk menangani barang curiannya, padahal pada saat itu barang tersebut belum dicuri. Undang-undang ini harus dibedakan dari kemustahilan yang mengatur. Jika barang yang dibujuk oleh terdakwa untuk ditangani orang lain tidak pernah ada, maka tidak ada tindak pidana penghasutan (lihat (b) di atas).

Terdakwa tidak bersalah melakukan penghasutan apabila ia yakin bahwa pelakunya tidak mempunyai mens rea untuk melakukan pelanggaran pokok, atau jika ia mengetahui bahwa tersangka pelaku ternyata tidak mempunyai unsur mental untuk memenuhi syarat tersebut. Otoritas utama tetap pada keputusan yang banyak dikritik dalam Curr [1968] 2 QB 944 (CA). Tidak ditunjukkan bahwa para penghasut mempunyai mens rea atas pelanggaran yang dilakukan, dan terdakwa tidak bersalah karena menghasut mereka untuk melakukan pelanggaran tersebut. Pengadilan tidak membahas mens rea penghasut sebagaimana mestinya. Card, Cross and Jones, Criminal Law, edisi ke-14 (Butterworths, 1998) 528 (bukan dalam edisi ke-17, OUP, 2006) menulis: 'Sulit untuk melihat mengapa unsur mental orang yang dihasut harus relevan dengan tanggung jawab atas penghasutan karena tanggung jawab atas tindak pidana tersebut tidak bergantung pada tindak pidana yang dihasut yang dilakukan atau bahkan dimaksudkan oleh orang yang dihasut' (menggemakan kata-kata tim KUHP tahun 1985 Kodifikasi Hukum Pidana: Laporan ke Komisi Hukum (Law Com. Consultation Paper, Nomor 143)). Jika terdakwa yakin bahwa orang yang dibujuknya tidak memiliki mens rea untuk melakukan pelanggaran penuh, maka mereka adalah agen yang tidak bersalah dan dia akan menjadi pelaku utama jika pelanggaran penuh dilakukan. Dengan cara ini, terdakwa di Curr akan bersalah melakukan kejahatan. Curr dibedakan dalam DPP v Armstrong [2000] Crim LR 379. Pengadilan Divisi, yang tentu saja terikat oleh keputusan Pengadilan Banding, menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan penghasutan ketika dia meminta penghasut, seorang petugas polisi yang menyamar, untuk memberikan pornografi anak. Jika penghasut melakukan seperti yang diminta, dia akan melakukan kejahatan. Dikatakan bahwa pelanggaran di Curr mengharuskan para penghasut mengetahui bahwa mereka tidak berhak

memungut tunjangan kesejahteraan. Curr tidak ditolak, hanya dibedakan pada Armstrong. Namun pada C di atas, Pengadilan Banding akhirnya menyatakan bahwa Curr salah.

Undang-undang pada bagian ini menunjukkan bahwa penghasutan merupakan kejahatan yang terpisah dari tindak pidana pokok. Ia mempunyai actus reus dan mens rea yang berbeda. Karena alasan inilah Curr dan Shaw yang dibahas di atas salah. Seperti yang dikatakan pengadilan dalam DPP v Armstrong, tidak ada persamaan mens rea antara penghasutan dan kejahatan yang dilakukan.

Hasutan Dan Partisipasi

Tidak ada pelanggaran jika menghasut seseorang untuk meminta orang lain melakukan pelanggaran: Bodin [1979] Crim LR 176 (Crown Court). Orang yang dihasut harus melakukan kejahatan sebagai pelaku utama, bukan sebagai pelaku sekunder. Hasilnya mungkin dianggap aneh. Jika terdakwa membujuk orang lain untuk membunuh, itu adalah hasutan untuk membunuh; namun jika ia membujuk pihak lain, anggota organisasi teroris, untuk membagikan senjata kepada pihak lain guna membunuh anggota pasukan keamanan, maka hal tersebut bukanlah hasutan untuk melakukan pembunuhan. Tuduhan menghasut untuk menghasut kejahatan mungkin berhasil berdasarkan fakta berikut: lihat bagian selanjutnya. Meskipun Bodin disebutkan tanpa kritik oleh Pengadilan Tinggi dalam Sirat (1985) 83 Cr App R 41, ada dugaan bahwa keputusan tersebut salah. Tentunya harus ada pelanggaran menghasut orang lain untuk meminta, misalnya orang lain melakukan pembunuhan. Diperkirakan tidak ada pelanggaran berupa hasutan untuk memberi nasihat atau membantu dan bersekongkol. Aturan ini dipertahankan dalam rancangan KUHP tahun 1989, pasal 47(5). Asasnya, seseorang baru bersalah melakukan tindak pidana sekunder apabila tindak pidana pokok dilakukan. Jika tidak ada, aksesori tidak bertanggung jawab. Namun aturan dalam penghasutan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penghasut adalah suatu kejahatan. Namun, seseorang dapat menjadi pihak kedua dalam penghasutan dan pasal 47(5)(a) tetap mempertahankan aturan ini. Jika pelanggaran penuh telah dilakukan, penghasut juga bertanggung jawab sebagai pendukung.

Penghasutan Dan Kejahatan Kecil Lainnya

Bagian teks ini dikhususkan untuk apa yang kadang-kadang dikenal sebagai pelanggaran ganda yang masih kecil. Persoalannya sebagian adalah kejahatan manakah yang ada di antara enam kemungkinan tersebut dan sebagian lagi adalah apakah undang-undang harus mengkriminalisasi aktivitas yang dilakukan sebelum adanya penghasutan, konspirasi, atau upaya pembunuhan.

- (a) Hasutan untuk berkonspirasi dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977, pasal 5(7). Namun rancangan KUHP, pasal 47(5)(b), akan mengembalikan pelanggaran ini jika rancangan tersebut menjadi undang-undang. Tampaknya tidak ada gunanya menuntut penghasutan untuk mencoba, karena terdakwa biasanya akan melakukan pelanggaran penuh. Rancangan KUHP pasal 47(5)(b) secara tegas menyatakan bahwa ada tindak pidana penghasutan untuk mencoba. Komisi Hukum, KUHP untuk Inggris dan Wales, Law Com. 177, 1989, 239, diyakinkan bahwa kejahatan ini harus dilakukan demi kepentingan konsistensi dengan penghasutan untuk

menghasut dan menghidupkan kembali kejahatan penghasutan untuk berkonspirasi dan bahwa kejahatan tersebut akan mengisi kesenjangan yang dilihat oleh Smith dan Hogan, (D. Ormerod, ed.) Hukum Pidana, edisi ke-12 (OUP, 2008) 444 'D memberi E zat yang dia tahu tidak berbahaya, memberi tahu E bahwa itu racun dan mendesaknya untuk memberikannya kepada P. Jika E melakukan seperti yang diminta, dia akan bersalah atas percobaan pembunuhan. D hampir tidak bisa dikatakan menghasut pembunuhan, namun ada perdebatan bahwa dia harus bertanggung jawab karena menghasut percobaan pembunuhan' (catatan kaki dihilangkan). Oleh karena itu, terdakwa bersalah melakukan penghasutan untuk melakukan percobaan jika dia mengetahui bahwa pelaku utama tidak dapat melakukan lebih dari upaya untuk melakukan pelanggaran penuh. Misalnya, tidak mungkin melakukan pelanggaran melalui cara yang disarankan. Secara teori tidak ada alasan mengapa terdakwa tidak dapat bersalah karena menghasut seseorang untuk menghasut orang lain agar melakukan kejahatan, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam Sirat, di atas, dan Evans [1986] Crim LR 470. Namun, jika penghasutan yang kedua akan menimbulkan persekongkolan, bisa saja pengadilan tidak memperkenankan tuduhan penghasutan karena penghasutan merupakan penghindaran terhadap penghapusan penghasutan untuk bersekongkol. Hukumnya berbelit-belit. Rancangan KUHP akan menempatkan hasutan untuk menghasut sebagai landasan undang-undang.

- (b) Ada kejahatan mencoba menghasut: *ex parte* Amos [1973] Crim LR 437 (DC). Contohnya adalah ketika surat penghasutan gagal sampai ke kepala sekolah: *Banks* (1873) 12 Cox CC 393 dan *Ransford* (1874) 13 Cox CC 9. Yang lebih mutakhir adalah upaya yang gagal untuk meninggalkan pesan-pesan suara atau mengirim email. -surat. Mungkin ada kejahatan konspirasi yang dapat dihasut: *James*, di atas.
- (c) Salah satu pasangan dapat dinyatakan bersalah karena menghasut pasangannya untuk melakukan pelanggaran, meskipun mereka tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan persekongkolan jika hanya keduanya yang ikut serta dalam perjanjian.

Mungkin perlu dipertanyakan apakah penghasutan mempunyai tujuan apa pun ketika ada dua pelanggaran awal lainnya dan undang-undang tentang keterlibatan. Jawabannya mungkin karena hasutan menghalangi seseorang untuk mengajak orang lain melakukan kejahatan, dan hal ini memungkinkan polisi untuk melakukan intervensi sebelum pelanggaran dilakukan dengan cara yang sama seperti upaya percobaan dan konspirasi.

Pembaruan

Selain hal-hal yang disebutkan dalam teks tersebut, rancangan KUHP akan membalikkan *Fitzmaurice* tentang ketidakmungkinan. Rekomendasi pada pasal 50 ini sesuai dengan Laporan Komisi Hukum No. 102 Tahun 1980 tentang Percobaan dan Ketidakmungkinan Berkaitan dengan Percobaan, Persekongkolan dan Penghasutan. Dalam Laporan tersebut, Komisi Hukum menyatakan bahwa penghasutan akan memiliki aturan yang sama tentang ketidakmungkinan seperti halnya upaya dan konspirasi (menurut undang-undang) setelah Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, yaitu ketidakmungkinan tidak

ada pembelaan. Pengadilan Banding menggagalkan ekspektasi tersebut dan sekarang hasutan harus disejajarkan dengan pelanggaran-pelanggaran kecil lainnya.

Unsur-Unsur Pelanggaran Tercantum Dalam Pasal 47(1)

Seseorang bersalah atas penghasutan untuk melakukan suatu pelanggaran atau pelanggaran jika:

- (a) ia menghasut orang lain untuk melakukan atau menyebabkan dilakukannya suatu tindakan atau tindakan yang, jika dilakukan, akan mengakibatkan dilakukannya pelanggaran atau pelanggaran oleh pihak lain; dan
- (b) ia bermaksud atau meyakini bahwa pihak lain, jika ia bertindak sebagai penghasut, akan atau akan melakukan hal tersebut karena kesalahan yang diperlukan untuk pelanggaran atau pelanggaran tersebut.

Definisi yang diusulkan ini disebutkan dalam DPP v Armstrong di atas, sebagai pernyataan akurat dari hukum saat ini. Istilah ‘menghasut’ tetap dipertahankan dan bukan ‘mendorong’ seperti yang diusulkan oleh para penyusun KUHP versi 1985 (UU No. 143) karena orang yang dihasut sebenarnya tidak perlu didorong. Seseorang dinyatakan bersalah melakukan penghasutan padahal pihak pelaku sudah mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga tidak memerlukan dorongan. Arus akan dibalik dengan sub-cl (1)(b). Identitas penghasut tidak perlu diketahui (sub-cl (4)).

Aturan tentang korban yang dilindungi undang-undang yang ditemukan di Whitehouse dan Tyrrell tetap dipertahankan (cl 47(3)), begitu pula kebalikan dari hasil sebenarnya di Whitehouse (cl 103(3)). Penghasutan terhadap anak-anak di bawah 16 tahun untuk melakukan tindakan tidak senonoh (sejak dicabut) akan dianggap pidana berdasarkan pasal 114 –115 berdasarkan rekomendasi Laporan Kelimabelas Komite Revisi Hukum Pidana, Pelanggaran Seksual, Cmnd 9213, 1984, paragraf 7.12 dan 7.23. Aturan di Most dipertahankan (“pelanggaran atau pelanggaran” dalam pasal 47(1)).

Klausul 47(1)(b) akan berdampak pada perubahan undang-undang, seperti yang dibahas pada halaman 237–8 Laporan ini. Itu harus cukup jika penghasut yakin bahwa orang yang dihasut, jika dia bertindak, akan melakukannya karena kesalahan yang diperlukan. Misalnya, jika D berupaya membujuk E untuk melakukan hubungan seksual dengan Nyonya D, D dengan keyakinan bahwa E mengetahui bahwa Nyonya D tidak menyetujuinya, maka jelas ada kasus penghasutan untuk melakukan pemerkosaan. Seharusnya tidak perlu dibuktikan bahwa D memang bermaksud agar E mempunyai pengetahuan tersebut. Kapan pun kesalahan yang diperlukan untuk pelanggaran substantif mencakup pengetahuan atau kecerobohan terhadap keadaan (seperti tidak adanya persetujuan), hal ini mungkin lebih tepat untuk merujuk pada keyakinan penghasut bahwa pengetahuan atau kecerobohan tersebut memang ada dan bukan pada niatnya bahwa hal itu memang ada.

Penghasutan untuk melakukan pelanggaran ringan hanya dapat dituntut dengan persetujuan DPP. Komisi Hukum dalam Makalah Konsultasi No. 131, Pembantu dan Pendorong Kejahatan, 1993, mengusulkan penghapusan hasutan dan penggantinya dengan delik baru yang mendorong kejahatan. Perkembangan ini dibahas pada akhir Bab 5.

Butuh waktu 13 tahun bagi Komisi Hukum untuk menerbitkan Laporan No. 300 tentang Kewajiban Anak Usia Dini untuk Membantu dan Mendorong Kejahatan, tahun 2006. Komisi mengusulkan untuk menghapuskan penghasutan dan menggantinya dengan dua pelanggaran anak baru yaitu dengan sengaja mendorong atau membantu suatu tindak pidana dan mendorong atau membantu tindak pidana dengan keyakinan bahwa satu atau lebih di antaranya akan dilakukan. Kata-kata keduanya tertuang dalam rancangan undang-undang. Terdapat dua pembelaan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran ini: yaitu tindakan untuk mencegah dilakukannya suatu pelanggaran, yang akan menjadi pembelaan terhadap kedua pelanggaran tersebut, dan tindakan yang wajar, yang hanya akan menjadi pembelaan terhadap pelanggaran yang kedua. Pembelaan yang tersedia bagi korban (lihat Tyrrell di atas) akan terus berlaku. *Mens rea of intent* dalam pelanggaran pertama terbatas pada niat langsung (tujuan) dan perkiraan saja tidak cukup. Laporan ini bertujuan untuk mengatasi masalah ini:

Menurut hukum adat, jika D [terdakwa] mendorong P [pelaku utama] untuk melakukan suatu tindak pidana yang kemudian P tidak melakukan atau mencoba melakukannya, D tetap dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Sebaliknya, jika D membantu P melakukan pelanggaran, D tidak dikenakan tanggung jawab pidana menurut hukum adat jika kemudian P, karena alasan apa pun, tidak melakukan atau mencoba melakukan pelanggaran tersebut (paragraf 1.3). Keduanya akan bertanggung jawab jika ketentuan Laporan menjadi undang-undang. Lihat Pendahuluan untuk pelanggaran 'mendorong atau membantu', yang mulai berlaku sebelum publikasi edisi ini.

10.3 KONSPIRASI

Perkenalan

Lord Diplock dalam *DPP v Bhagwan* [1972] AC 60 (HL) mengatakan bahwa konspirasi common law adalah 'cabang hukum pidana Inggris yang paling tidak sistematis dan paling tidak rasional'. Konspirasi common law sebagian besar telah dihapuskan oleh pasal 5 (1) Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977. Pelanggaran tersebut sekarang sebagian besar merupakan pelanggaran hukum. Ketika pelanggaran penuh dilakukan, persekongkolan masih dapat dikenakan tuntutan, dan akan dikenakan tuntutan jika tuntutan tersebut diperlukan untuk memberikan kesan penuh atas perilaku kriminal tersebut. Dampaknya adalah membuat proses menjadi rumit. Namun, penuntut tidak akan diizinkan untuk melanjutkan kedua dakwaan tersebut jika penghitungan konspirasi merugikan terdakwa.

Untuk pelanggaran-pelanggaran yang masih merupakan konspirasi common law, definisi terkenal dalam *Mulcahy v R* (1868) LR 3 HL 306 tetap menjadi batu ujian: 'kesepakatan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melakukan tindakan yang sah dengan cara yang melanggar hukum'. Konspirasi menurut undang-undang didefinisikan dalam pasal 1(1) Undang-undang tahun 1977, pasal 1(1) yang baru digantikan oleh Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, pasal 5(1).

Tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut dari Bagian Undang-undang ini, jika seseorang setuju dengan orang atau beberapa orang lain bahwa suatu tindakan harus dilakukan yang jika perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan niatnya, baik:

- (a) akan berarti atau melibatkan dilakukannya pelanggaran atau pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak dalam perjanjian, atau
- (b) akan melakukan hal tersebut kecuali karena adanya fakta-fakta yang menyebabkan dilakukannya pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak mungkin dilakukan, dia bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan pelanggaran atau pelanggaran yang dimaksud.

Dampak dari amandemen tahun 1981 adalah membawa undang-undang tentang ketidakmungkinan melakukan persekongkolan menurut undang-undang sejalan dengan ketidakmungkinan melakukan percobaan (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini). Namun, untuk konspirasi yang tetap menjadi hukum adat, hukum sebelum tahun 1981 berlaku dan ketidakmungkinan merupakan pembelaan dalam keadaan tertentu.

Contoh s 1(1) adalah Mulligan [1990] STC 220 (CA). Ada pelanggaran hukum umum yaitu menipu pendapatan publik. Jika dua orang melakukan kejahatan ini bersama-sama, maka terjadilah persekongkolan. Dalam Drew [2000] 1 Cr App R 91 (CA) dinyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah melakukan persekongkolan meskipun dia adalah korban persekongkolan tersebut, misalnya ketika dia akan disuplai dengan obat-obatan. Untuk kasus-kasus luar biasa yang berkaitan dengan 'korban', lihat di bawah. Pasal 1(1) telah ditafsirkan sebagai berikut. Dalam pasal 1(1) 'orang lain' tidak perlu diidentifikasi: Phillips (1987) 86 Cr App R 18. Pihak yang sulit menjelaskan pasal 1(1) adalah Anderson [1986] AC 27 (HL). Terdakwa, seseorang yang ditahan, didakwa melakukan konspirasi untuk membuat tahanan melarikan diri. Dia berpendapat bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk melaksanakan rencana tersebut; artinya, dia tidak mempunyai mens rea. House of Lords menolak bandingnya. Ia telah sepakat dengan orang-orang lain bahwa suatu tindakan akan dilakukan, yang bila dilakukan 'sesuai dengan niat mereka' yaitu niat orang lain akan berarti atau melibatkan tindakan kejahatan. Dianggap bahwa terdakwa harus mengambil bagian dalam tindakan yang disepakati.

Terdakwa tidak bermaksud membiarkan tawanannya melarikan diri tetapi hal itu dianggap tidak relevan karena tidak harus dibuktikan bahwa terdakwa memang bermaksud agar perjanjian itu dilaksanakan. Alasan ini menimbulkan masalah jika hanya ada satu orang lain dalam perjanjian. Dalam hal itu perjanjian itu tidak akan terlaksana sesuai dengan niatnya, melainkan hanya sesuai dengan salah satu niatnya saja. Sedikitnya, penafsiran pasal 1(1) bersifat kaku dan Anderson bertentangan dengan maksud Parlemen. Pada susunan kata setidaknya dua orang terdakwa harus memiliki mens rea. Terdakwa bisa saja dihukum karena menjadi pihak sekunder, yang membantu dan bersekongkol dalam konspirasi tersebut.

Dalam otoritas Yip Chiu-Cheung v R [1995] 1 AC 111 (PC) yang banyak dikritik, seorang petugas penegak narkoba AS setuju untuk bertindak sebagai kurir heroin dari Hong Kong ke Australia untuk terdakwa. Terdakwa ditangkap di Hong Kong dan didakwa berkonspirasi dengan petugas untuk memperdagangkan heroin. Ia berpendapat bahwa petugas tersebut

tidak mungkin seorang konspirator karena ia tidak memiliki alasan untuk melakukan pelanggaran tersebut; oleh karena itu, tidak ada persekongkolan dimana dia dapat menjadi pihak karena suatu persekongkolan memerlukan dua partisipan. Diduga, berdasarkan fakta, petugas memang berniat melakukan tindak pidana perdagangan narkoba: ia memang memiliki *actus reus* dan *mens rea* untuk melakukan persekongkolan. Dia juga bisa dihukum karena konspirasi. Motif dan keberaniannya tidak bisa memaafkannya. Tidaklah penting bahwa ia tidak berharap untuk dituntut: 'fakta bahwa pihak berwenang tidak akan mengadili agen yang menyamar tersebut bukan berarti dia tidak melakukan kejahatan. Berbeda kedudukannya jika ia tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut. Dia tidak akan mendapat *mens rea* dan tidak akan ada konspirasi: Anderson, di atas. Rasio Yip Chiu-Cheung bertentangan dengan Anderson yang mengharuskan dua pihak berniat dan sepakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Rancangan KUHP Komisi Hukum, KUHP untuk Inggris dan Wales, Law Com. 177 Tahun 1989 menolak Anderson dan lebih memilih arti sederhana dari undang-undang tahun 1977, yang didasarkan pada Laporan Komisi Hukum, Konspirasi dan Reformasi Hukum Pidana, Law Com. 76, 1976. Salah satu rekomendasinya adalah: 'Keduanya harus bermaksud agar setiap konsekuensi dalam definisi pelanggaran akan terjadi.' Tentu saja keputusan House of Lords bertentangan dengan keinginan Parlemen. Pengadilan Banding di Edwards [1991] Crim LR 45 tidak mengikuti Anderson meskipun mereka mungkin tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Terdakwa setuju untuk memasok amfetamin namun dia mungkin bermaksud untuk memasok obat yang disebut efedrin. Karena tidak yakin apakah dia bermaksud memasok amfetamin, dia tidak bersalah melakukan konspirasi untuk memasok obat-obatan terlarang jenis tersebut. Bagaimanapun juga, keputusan Anderson tidak berlaku terhadap pelanggaran hukum umum yaitu konspirasi untuk menipu, karena Anderson didasarkan pada penafsiran undang-undang.

Ada dukungan di Hollinshead yang dilaporkan dalam [1985] AC 975 (CA) untuk proposisi bahwa frasa 'tindakan pelanggaran apa pun oleh satu atau lebih pihak harus dianggap memerlukan keterlibatan salah satu (atau lebih) pihak tersebut sebagai prinsipal. Oleh karena itu, jika dua pihak sekunder setuju untuk membantu pelaku dalam membunuh korban, mereka tidak bersalah melakukan konspirasi pembunuhan jika pelaku tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. (Agaknya mereka dapat dihukum karena melakukan persekongkolan untuk menghasut pelaku.) Putusan Pengadilan Tinggi dapat diringkas sebagai berikut: tidak ada persekongkolan berdasarkan undang-undang untuk menjadi pihak kedua dalam suatu pelanggaran. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat bersekongkol untuk membantu seorang pembunuh. Seseorang harus bersekongkol untuk melakukan pelanggaran penuh, pembunuhan, sebagai pelakunya. Pada tingkat banding, House of Lords tidak membahas masalah ini dan tidak menyetujui atau tidak menyetujui keputusan Pengadilan Banding.

Arti umum dari kata-kata dalam definisi undang-undang memberikan dukungan terhadap proposisi hukum Pengadilan Tinggi. Jika benar, ketika dua pihak setuju untuk membantu pihak ketiga yang bukan bagian dari perjanjian antara dua pihak pertama, mereka

tidak bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan pelanggaran apa pun yang dilakukan pihak ketiga tersebut. Pengadilan Banding di Kenning [2008] EWCA Crim 1534 menyatakan bahwa mengikat apakah alasan pengadilan yang sama di Hollinshead masih diperdebatkan, namun tidak ada kejahatan konspirasi yang menjadi pihak sekunder dalam pelanggaran pokok. Putusan ini sejalan dengan pasal 1(4)(b) Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran mencoba menjadi pihak sekunder.

Hollinshead hanya berlaku untuk konspirasi menurut undang-undang dan tidak berlaku untuk konspirasi hukum umum seperti konspirasi untuk menipu. Pasal 1(1) UU tahun 1977 mendefinisikan *actus reus* konspirasi. Kita mungkin mengira bahwa pasal 1(2) akan mendefinisikan *mens rea*, namun nampaknya hal ini hanya berlaku jika kejahatan yang disepakati adalah pelanggaran berat:

Jika tanggung jawab atas pelanggaran apa pun dapat timbul tanpa sepengetahuan orang yang melakukannya mengenai fakta atau keadaan tertentu yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran tersebut, namun orang tersebut tidak bersalah melakukan persekongkolan untuk melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan ayat (1) di atas, kecuali ia dan sekurang-kurangnya salah satu pihak lain dalam perjanjian itu bermaksud atau mengetahui bahwa fakta atau keadaan itu akan atau akan terjadi pada saat perbuatan yang merupakan pelanggaran itu terjadi.

Namun, seperti yang akan kita lihat dalam pembahasan mengenai *mens rea* konspirasi menurut undang-undang, ketentuan ini dibaca sebagai penerapan apa pun *mens rea* kejahatan yang akan dilakukan dan bukan hanya pada pelanggaran berat saja.

Kesepakatan untuk melakukan tindak pidana ringkasan merupakan konspirasi namun tidak dapat dituntut tanpa izin dari Kejaksaan Agung (pasal 4(1) Undang-Undang tahun 1977 dan Undang-undang Penuntutan Pelanggaran tahun 1985, pasal 1(7)). Namun, dalam upayanya, tidak ada pelanggaran dalam mencoba melakukan pelanggaran ringkasan.

Aktus Reus

Umum

Salah satu unsur *actus reus* adalah persetujuan, yang diwujudkan dalam beberapa cara misalnya dengan kata-kata, tindakan atau tulisan. Kesepakatan, yang bagi para pengacara sering dilihat sebagai pertemuan pikiran, tanpa manifestasi eksternal merupakan kondisi mental, dan hukum Inggris tidak menghukum orang yang memiliki pemikiran jahat. Namun demikian, 'kesepakatan' merupakan ambang batas yang rendah untuk suatu kejahatan: bandingkan percobaan pelanggaran di mana diperlukan suatu tindakan yang lebih dari sekedar persiapan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Perjanjian tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak lain: Scott (1979) 68 Cr App R 164. Harus sudah mencapai kesimpulan yang pasti dan para pihak harus berada di luar tahap mempertimbangkan kemungkinan melakukan kejahatan: King [1966] Crim LR 280. Dalam O'Brien (1974) 59 Cr App R 222 (CA) terdakwa telah berbicara tentang pelarian tiga tahanan nasionalis Irlandia dari Penjara Winson Green, Birmingham, tetapi dia belum mencapai tahap kesepakatan.

Oleh karena itu, pada tahap itu tidak ada konspirasi untuk melarikan diri. Dalam Barnard (1979) 70 Cr App R 28 terdakwa sedang berbicara dengan orang lain tentang mencuri

dari toko perhiasan. Yang lain telah memutuskan untuk merampok toko perhiasan tersebut dan bersalah atas konspirasi untuk merampok. Dia mengetahui bahwa toko perhiasan membawa pulang perhiasan terbaiknya pada malam hari. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lebih jauh karena cara mencurinya adalah dengan menembus langit-langit pada malam hari. Yang lain merampok toko perhiasan itu pada siang hari. Terdakwa tidak bersalah melakukan persekongkolan untuk merampok. Dia tidak setuju untuk ikut melakukan pelanggaran itu.

Para pihak tidak perlu bertemu sebelumnya asalkan mereka bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang diberitahukan kepada setidaknya satu pihak lain dalam konspirasi: *Meyrick (1929) 21 Cr App R 94 (CCA)*. Kasus ini menuai kritik karena tidak terbukti masing-masing pihak, pemilik tempat hiburan malam, mengetahui bahwa pihak lain memberikan suap kepada polisi yang sama agar polisi menutup mata terhadap pelanggaran undang-undang perizinan, dan dikemukakan dalam *Griffiths (1968) 49 Cr App R 279* bahwa masing-masing pihak mengetahui apa yang dilakukan pihak lain karena lokasinya berdekatan, namun fakta terakhir tersebut tidak menjelaskan mengapa pengadilan dapat menyatakan adanya kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan dan para pihak masih melakukan perundingan, situasinya terlihat seperti percobaan persekongkolan, namun tidak ada pelanggaran seperti itu: Undang-undang Hukum Pidana tahun 1977, pasal 5(7). Terdakwa tidak perlu berperan aktif dalam konspirasi: *Siracusa (1990) 90 Cr App R 340 (CA)*, tidak setuju dengan House of Lords di Anderson bahwa terdakwa bersalah hanya jika terdakwa berperan aktif bagian dalam memajukan kejahatan tersebut. *Siracusa* adalah otoritas penting, yang dianggap mewakili hukum, namun sayangnya *Hollinshead* merupakan keputusan House of Lords. Karena fokusnya adalah pada kesepakatan, maka tidak menjadi masalah jika para pihak melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka sepakati. Seperti yang diungkapkan Woolf LJ dalam *Bolton (1992) 94 Cr App R 74 (CA)*: yang penting adalah apa yang disepakati untuk dilakukan dan bukan apa yang sebenarnya dilakukan.' Berdasarkan fakta yang ada dalam kasus ini, tidak relevan jika penipu hipotek mengharapkan pembayaran dengan cek namun uang tersebut sebenarnya ditransfer secara elektronik.

Terkadang pengadilan menggunakan analogi kontrak untuk menentukan apakah suatu perjanjian ada. Dalam *Walker [1962] Crim LR 458 (CCA)*, tidak ada konspirasi dimana yang ada adalah negosiasi, tidak ada kesepakatan, untuk mencuri gaji. Perlu dicatat bahwa analogi dengan kontrak tidaklah tepat. Kepastian yang dibutuhkan dalam sebuah perjanjian dalam konspirasi lebih sedikit dibandingkan dengan sebuah kontrak. Berbeda dengan kontrak, tidak ada pertimbangan yang perlu dilewati. Berbeda dengan kontrak, konspirasi tidak dapat dilaksanakan di pengadilan. Dalam Kasus *Highwayman (1725)*, beberapa orang telah merampok kereta pos. Satu orang telah mengambil semua jarahannya. Yang lain mencoba menuntut bagiannya. Dia digantung!

Kalau sudah ada kesepakatan, itu sudah cukup. Konspirasi tidak perlu dilakukan. Karena persekongkolan merupakan pelanggaran yang berkelanjutan, maka para terdakwa tetap bersalah meskipun mereka tidak semuanya merupakan pihak dalam perjanjian yang sama pada waktu yang sama. Asalkan semua unsur lainnya ada, maka persekongkolan telah

selesai pada saat perjanjian dibuat. Jika, misalnya, dua orang teman setuju untuk mencuri mobil pada hari berikutnya, mereka bersalah, meskipun sebelum hari itu salah satu dari mereka memenangkan mobil dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mereka. Berdasarkan undang-undang, perjanjian tersebut harus berarti atau melibatkan tindakan kejahatan, jika dilakukan.

Donaldson LJ, sebagaimana dia saat itu, memberikan contoh ini dalam Reed [1982] Crim LR 819 (CA): 'A dan B setuju untuk berkendara dari London ke Edinburgh dalam waktu yang dapat dicapai tanpa melanggar batas kecepatan, tetapi hanya jika lalu lintas yang mereka temui sangat sepi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut bukan merupakan konspirasi.' Bagian ini disetujui di Jackson [1985] Crim LR 442 (CA). Dalam hal ini A, B dan C sepakat bahwa C akan ditembak pada bagian kaki apabila ia terbukti melakukan tindak pidana yang diadili agar pengadilan bersimpati terhadapnya dan memberikan hukuman yang ringan. Mereka bersalah atas konspirasi untuk memutarbalikkan jalannya keadilan. Oleh karena itu, perjanjian bersyarat ('Kami akan menembak Anda jika Anda terbukti bersalah') adalah sebuah konspirasi. Orang-orang itu bersalah meskipun persidangan terus berlanjut. Orang yang diadili bisa saja dibebaskan dari tuduhan perampokan namun pelaksanaan perjanjian tetap diperlukan dalam ketentuan 1 (1), karena 'harus' tidak berarti 'tidak dapat dihindari' tetapi 'jika perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. dengan rencana itu, suatu pelanggaran akan terjadi'. Di Reed, A dan B sepakat bahwa A akan mengunjungi orang-orang yang ingin bunuh diri dan membantu atau mengecilkkan hati mereka, tergantung pada pendekatan apa yang menurutnya merupakan pendekatan yang lebih baik. Dia bersalah karena bersekongkol untuk mendorong bunuh diri.

Demikian pula, perjanjian untuk membuat bom selama gencatan senjata IRA pada awal tahun 1990an untuk digunakan setelah gencatan senjata, jika berakhir, merupakan konspirasi untuk menimbulkan ledakan. Bagaimanapun, IRA melanggar gencatan senjata itu dengan meledakkan bom Canary Wharf. Di Jackson dan Reed, objek perjanjian tersebut melanggar hukum, sedangkan di contoh London–Edinburgh, pelanggaran batas kecepatan merupakan hal yang tidak disengaja dalam perjanjian. Garisnya mungkin sulit untuk ditarik. Kesepakatan untuk merampok bank ketika sudah aman untuk melakukannya adalah konspirasi (Reed, obiter). Tidak perlu seluruh tindak pidana dilakukan: yang penting terdakwa memang berniat demikian (*mens rea*).

Berdasarkan undang-undang, istilah 'tindakan' membatasi apa yang dapat dihukum oleh terdakwa karena melakukan konspirasi. Fakta Siracusa di atas menggambarkan proposisi ini. O'Connor LJ berkata: 'Jika penuntut mendakwa adanya persekongkolan yang bertentangan dengan pasal 170(2) Undang-undang Pengelolaan Bea dan Cukai tahun 1979 melalui impor heroin, maka penuntut harus membuktikan bahwa tindakan yang disepakati adalah tindakan impor tersebut. heroin. Sebab, hakekat tindak pidana permufakatan jahat itu adalah perjanjian dan sederhananya, tidak pembuktian perjanjian impor heroin dengan pembuktian perjanjian impor ganja.' Oleh karena itu para terdakwa dengan cara ini tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan permufakatan jahat meskipun mereka akan bersalah atas pelanggaran penuh dengan mengimpor heroin ketika mereka yakin bahwa zat tersebut adalah ganja. Untuk

memperjelas hal ini, O'Connor LJ menambahkan bahwa terdakwa tidak akan bersalah melakukan konspirasi pembunuhan kecuali mereka bermaksud membunuh, namun mereka bersalah atas pembunuhan itu sendiri jika mereka hanya bermaksud melukai tubuh secara menyedihkan. (Hukum mengenai konspirasi ini sama dengan hukum percobaan.)

10.4 PERSYARATAN DUA PIHAK

Konspirasi didasarkan pada kesepakatan. Tidak menjadi soal jika terdakwa tidak mengetahui identitas pasangannya, dan ia tidak perlu berhubungan dengan mereka semua. Seseorang tidak dapat bersekongkol dengan dirinya sendiri. Dalam McDonnell [1966] 1 QB 233 dinyatakan bahwa seseorang tidak bersalah melakukan persekongkolan apabila ia menjadi direktur tunggal suatu perusahaan, pihak lain yang diduga sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, padahal dalam hukum perusahaan mempunyai badan hukum yang terpisah dari direktornya. Masalah pertanggungjawaban atas persekongkolan dengan perusahaan yang teridentifikasi tidak terpengaruh oleh Undang-Undang tahun 1977.

Pasangan juga menyebabkan kesulitan. Dalam Mawji v R [1957] AC 126, Dewan Penasihat mengatakan, tanpa basa-basi, bahwa seorang suami tidak boleh bersekongkol dengan istrinya karena istrinya dianggap tidak mempunyai wasiat yang terlepas dari wasiat suaminya. Oliver J menerima diktum obiter ini sebagai hukum dalam *Midland Bank Trust Co Ltd v Green (No. 3)* [1979] Bab 496, keputusan hukum perdata. Tidak diketahui secara pasti apakah peraturan ini berlaku pada pernikahan poligami yang sebenarnya atau yang berpotensi terjadi. Aturan tersebut dipertahankan untuk persekongkolan menurut undang-undang dalam pasal 2(2)(a) Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977. Laporan Komisi Hukum, Konspirasi dan Reformasi Hukum Pidana, Law Com. 76 Tahun 1976 yang menjadi dasar undang-undang tersebut menganjurkan agar peraturan tersebut dipertahankan guna menjaga kestabilan perkawinan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada waktu itu yaitu menjaga hukum di luar perkawinan. Kalau ada pihak ketiga, semua bersalah melakukan konspirasi. Oleh karena itu, isteri bersalah jika ia membuat perjanjian dengan suaminya, padahal ia mengetahui bahwa suaminya bersekongkol dengan orang lain: *Chrastny* [1991] 1 WLR 1381. Tidak perlu ditunjukkan bahwa ia sendiri yang membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Jika para pihak menikah setelah perjanjian, mereka bertanggung jawab. Perlu dicatat bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk konspirasi dan bukan untuk hasutan atau partisipasi sekunder. Hal ini juga tentu saja tidak berlaku pada semua tindak pidana pokok seperti pembunuhan dan pencurian yang telah disepakati oleh suami istri. Tidak ada keraguan bahwa hal ini akan dihapuskan suatu saat nanti, seperti halnya kekebalan suami terhadap pemerkosaan terjadi pada awal tahun 1990an. Tampaknya saat ini tidak ada alasan bagus untuk menyimpannya. Fakta bahwa terdakwa sudah menikah tidak ada hubungannya dengan kesalahan perilaku kriminal terhadap korban.

Seorang terdakwa tidak bersalah melakukan konspirasi jika satu-satunya pihak lainnya berusia di bawah usia yang dapat bertanggung jawab pidana: pasal 2(2)(b) Undang-undang tahun 1977. Berdasarkan pasal 2(3) seorang anak berada di bawah usia tanggung jawab pidana apabila, berdasarkan Undang-Undang Anak dan Remaja tahun 1933, pasal 50, ia tidak

dapat bersalah atas pelanggaran apa pun. Rujukan pada tidak bertanggung jawabnya anak berarti bahwa pasal 2(2)(b) hanya berlaku untuk anak di bawah 10 tahun. Seorang anak berusia 10 –14 tahun bersalah melakukan persekongkolan seperti biasa. Pasal 2(2) memberikan pengecualian terhadap prinsip umum tanggung jawab apabila terdapat dua pihak dan jika Parlemen ingin mengecualikan pihak-pihak yang tidak disebutkan secara tegas maka Parlemen seharusnya menyatakan demikian. Undang-undang tersebut tidak mengatur apa pun tentang perjanjian dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental (yang tidak dapat membentuk niat yang diperlukan untuk melakukan konspirasi) tetapi apakah aturan yang sama harus diterapkan seperti untuk bayi di bawah 10 tahun masih diperdebatkan. Bagian 2 hanya berlaku untuk konspirasi menurut undang-undang. Disarankan agar aturan yang sama berlaku di common law.

Pasal 2(2) selanjutnya mengatur bahwa terdakwa tidak dapat dihukum karena bersekongkol dengan korban pelanggaran tersebut. Oleh karena itu jika terdakwa kawin lari dengan seorang gadis di bawah 16 tahun, dialah yang menjadi korban yang dituju. Berdasarkan pasal 2(2), terdakwa tidak bertanggung jawab atas konspirasi – mungkin dia seharusnya bertanggung jawab. Korban yang dituju juga tidak bersalah (pasal 2(1)). Jika dua terdakwa setuju dengan gadis di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual dengannya, mereka bersalah melakukan konspirasi; gadis itu bukan karena s 2(1). Undang-undang tahun 1977 tidak memberikan definisi mengenai 'korban yang dituju'. Bisa jadi istilah tersebut dibatasi pada anggota kelompok yang dilindungi oleh Parlemen seperti anak perempuan di bawah 16 tahun terkait dengan hubungan seksual yang melanggar hukum. Jika demikian, undang-undang tersebut akan konsisten dengan tanggung jawab penghasutan dan kaki tangan: lihat Tyrrell, di atas. Dalam pendekatan ini, korban yang dituju yang bukan anggota dari kelompok yang dilindungi secara khusus akan dianggap bersalah, begitu pula dengan rekan konspiratornya. Ilustrasi yang disarankan adalah ketika satu pihak sepakat dengan pihak lain bahwa pihak tersebut akan merugikan dirinya demi mengejar kenikmatan seksual. Keduanya akan bersalah meskipun dalam bahasa biasa salah satunya adalah korban yang dituju. Terdakwa yang menerima pasokan narkoba bukan merupakan 'korban' dalam pasal 2 dan oleh karena itu dapat dinyatakan bersalah melakukan konspirasi. Tidak ada otoritas hukum umum mengenai bayi dan korban. Untuk perjanjian-perjanjian yang menurut hukum adat tetap merupakan konspirasi (lihat nanti), terdakwa mungkin bersalah. Contohnya adalah bersekongkol untuk menipu bayi atau korban. Namun, sulit membayangkan seorang korban bersedia ditipu. Ada pendapat bahwa istilah 'korban yang dituju' hanya mencakup orang yang tidak dapat melakukan pelanggaran secara penuh atau dihukum sebagai pihak tambahan. Dalam pendekatan ini, seseorang yang berusia 15 tahun harus dihukum karena bersekongkol untuk melakukan pelanggaran homoseksual meskipun ia adalah korban dari pelanggaran tersebut karena ia bisa saja bersalah atas pelanggaran tersebut.

Apabila salah satu terdakwa tidak termasuk dalam salah satu pengecualian tersebut, maka ia bersalah melakukan persekongkolan meskipun ia tidak dapat melakukan tindak pidana yang telah disepakati. Kejahatan pemerkosaan memberikan ilustrasi terbaik. Jika seorang perempuan setuju dengan seorang laki-laki bahwa laki-laki tersebut akan

memperkosa pihak ketiga, maka perempuan tersebut bersalah atas konspirasi pemerkosaan meskipun dia tidak dapat melakukan pemerkosaan sebagai pelaku utama.

Imunitas Dan Pembebasan Pelaku Lainnya

Bolehkah seseorang dihukum karena melakukan konspirasi ketika orang lain dibebaskan atau kebal dari tuntutan?

- (a) Imunitas. Dalam *Duguid (1906) 21 Cox CC 200*, terdakwa setuju dengan seorang perempuan untuk mengeluarkan anak perempuan tersebut dari hak asuh wali yang sah, bertentangan dengan pasal 56 Undang-Undang Pelanggaran Terhadap Orang 1861 (sekarang dicabut). Dengan demikian, ibu kebal dari tuntutan. Diputuskan bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan konspirasi. Pengadilan untuk Kasus Mahkota tidak menyelidiki tanggung jawab ibu atas konspirasi. Bisa jadi dia bertanggung jawab, karena dalam *Whitchurch (1890) 24 QBD 420* seseorang dinyatakan bersalah karena bersekongkol untuk melakukan suatu pelanggaran yang dia tidak dapat dihukum sebagai pelakunya. Seorang perempuan yang tidak hamil tidak dapat dihukum karena melakukan aborsi, namun ia bersalah atas konspirasi tersebut (walaupun saat ini ia tidak pernah dituntut), sedangkan dalam *Burns (1984) 79 Cr App R 175* seorang ayah dinyatakan bersalah melakukan konspirasi untuk mencuri anaknya sendiri padahal dia tidak dapat dinyatakan bersalah sebagai pelaku utama. (Pengecualian tersebut telah dicabut.) Aturan ini tidak terpengaruh oleh pasal 2 (2) Undang-undang tahun 1977. Bertentangan dengan rekomendasi Komisi Hukum, Parlemen menolak untuk membatalkan *Whitchurch*, dan sejak UU tersebut juga ada *Burns*. Pengadilan Banding melihat tujuan dari undang-undang tersebut untuk melihat apakah pengecualian dari pelanggaran utama harus diterapkan pada konspirasi untuk melakukan pelanggaran tersebut. Tentu saja berdasarkan fakta *Burns*, di mana sang ayah dan 'sekelompok laki-laki' masuk ke rumah mantan istrinya untuk mengambil anak tersebut, sang suami tampaknya berhak untuk dihukum.
- (b) Pembebasan. Jika salah satu dari dua konspirator dibebaskan, pandangan lama menyatakan bahwa, jika keduanya diadili bersama-sama, yang lain tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan konspirasi. Namun, House of Lords berpendapat berbeda dalam *DPP v Shannon [1975] AC 717*. Dua Penguasa Hukum mengatakan bahwa pembebasan salah satu tidak menghalangi hukuman yang lain (Viscount Dilhorne dan Lord Simon); Lords Reid dan Morris mengatakan bahwa aturan tradisional harus diterapkan; pemungutan suara dilakukan oleh Lord Salmon yang mengatakan bahwa aturan ortodoks harus berlaku kecuali dalam keadaan khusus. Oleh karena itu, hukum umum menjadi kacau. Jika kedua terdakwa diadili secara terpisah, maka pembebasan salah satu terdakwa tidak menghalangi hukuman terhadap terdakwa lainnya. (Misalnya mungkin ada pengakuan dari satu pihak namun tidak dari pihak lain, dan penuntut tidak dapat membuktikan kasus tersebut.)

Sehubungan dengan persekongkolan menurut undang-undang, UU tahun 1977, pasal 5(8), menyatakan:

Kenyataan bahwa orang atau orang-orang yang, sejauh tampak dari dakwaan yang mendakwa seseorang telah dihukum karena persekongkolan, merupakan satu-satunya pihak lain dalam perjanjian yang menjadi dasar hukumannya, telah dibebaskan dari persekongkolan dengan mengacu pada perjanjian itu (baik setelah diadili bersama terpidana atau secara terpisah) tidak boleh menjadi dasar untuk membatalkan hukumannya kecuali dalam semua keadaan kasus, hukumannya tidak sejalan dengan pembebasan orang lain atau orang-orang yang bersangkutan.

Sub-bagian berikutnya, pasal 5(9), menghapuskan 'hukum atau praktik' yang tidak konsisten. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, pasal 5(9) menghapuskan hukum umum mengenai topik ini. Oleh karena itu, pasal 5(8) berlaku untuk konspirasi menurut undang-undang dan common law.

Menurut Merrick (1980) 71 Cr App R 130 (CA), Longman (1980) 72 Cr App R 121 (DC) dan Roberts (1983) 78 Cr App R 41 (DC), hakim dapat memerintahkan juri untuk membebaskan keduanya jika menghukum yang satu dan membiarkan yang lain pergi tidaklah konsisten. Jika bukti terhadap masing-masing anggota sama, hakim harus mengarahkan juri untuk menghukum semua atau membebaskan semua. Jika bukti yang memberatkan satu terdakwa jauh lebih kuat dibandingkan dengan terdakwa lainnya, hakim harus menginstruksikan juri untuk mempertimbangkan masing-masing pihak secara terpisah. Hasilnya mungkin juri menerima bahwa terdakwa pertama berkonspirasi dengan terdakwa kedua namun terdakwa kedua tidak berkonspirasi dengan terdakwa pertama!

Objek Persekongkolan Yang Melanggar Hukum

Pasal 1(1) Undang-Undang tahun 1977, sebagaimana digantikan oleh Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, pasal 5(1), yang dikutip di atas, dimulai dengan: 'Tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut 'Hal itu mengacu pada pasal 5 UU tahun 1977 yang menyatakan bahwa persekongkolan tertentu tetap merupakan kejahatan menurut hukum adat. Berdasarkan pasal 5 (2) perjanjian untuk menipu adalah kejahatan hukum umum. Berdasarkan pasal 5(3), persekongkolan yang merusak moral publik dan kemarahan terhadap kesopanan publik tetap merupakan pelanggaran hukum umum jika hal tersebut tidak berarti atau mengakibatkan kejahatan jika dilakukan oleh satu orang. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan suatu tindak pidana, maka pelanggaran tersebut harus didakwa sebagai persekongkolan menurut undang-undang. Untuk pembahasannya lihat dibawah ini. Berbeda dengan konspirasi hukum, ketidakmungkinan dalam beberapa bentuk merupakan pembelaan dalam konspirasi common law.

Konspirasi Untuk Menipu

Pelanggaran ini, yang secara tidak tepat diartikan sebagai persetujuan untuk melakukan penipuan terhadap seseorang, berguna dalam urusan keuangan dan ekonomi. Kesepakatan untuk menimbulkan kerugian dengan cara yang tidak jujur merupakan konspirasi untuk menipu. Untuk ilustrasi terbaru, lihat *Norris v Pemerintah Amerika Serikat* [2007] EWHC 71 (Admin), yang melibatkan kartel dengan perjanjian tidak jujur untuk menetapkan harga

oleh perwakilan perusahaan. 'Tidak jujur' adalah definisi normal Ghosh [1982] QB 1053: lihat Bab 15. Bentuk kedua dari konspirasi jenis ini adalah kesepakatan untuk membujuk seseorang dengan cara yang tidak jujur agar bertindak bertentangan dengan kewajibannya. Variasi yang pertama sangat luas dan telah dikritik atas dasar ini. Misalnya, merampas barang milik korban untuk sementara waktu bukanlah pencurian. Namun, jika dua orang sepakat untuk melakukan hal tersebut, maka terdapat pelanggaran persekongkolan untuk menipu.

Demikian pula, bukanlah tindak pidana pencurian jika seseorang mengambil keuntungan secara diam-diam dari harta milik orang lain (Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1985) [1986] QB 491 (CA) melalui otoritas Dewan Penasihat terbaru (Jaksa Agung Hong Kong v Reid [1994] 1 AC 324) bersifat kontra, lihat pembahasan 'Milik orang lain' di Bab 15), namun merupakan konspirasi untuk menipu jika dua orang setuju untuk melakukannya. Kritik utama terhadap pelanggaran ini justru membuat sesuatu yang dilakukan oleh dua orang menjadi haram, padahal seharusnya sah jika dilakukan oleh satu orang. Kritik kedua adalah bahwa pelanggaran ini tidak pasti lebarnya. Keuntungan bagi penuntut umum adalah kebalikan dari kritik-kritik tersebut, dan terdapat dukungan terhadap pandangan bahwa tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan dapat mencerminkan kriminalitas keseluruhan dari pelanggaran yang dilakukan para terdakwa. Tindakan yang saling terkait dapat dihubungkan dalam satu muatan. Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1987, pasal 12(1), menetapkan bahwa pelanggaran hukum umum dan pelanggaran konspirasi menurut undang-undang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesepakatan untuk melakukan penipuan bisa berupa keduanya. Dampaknya, hanya persekongkolan untuk menipu yang tidak melibatkan tindakan pelanggaran yang perlu dianggap sebagai persekongkolan menurut hukum adat. Berdasarkan pasal 12(3) hukumannya paling lama 10 tahun penjara. (Perlu dicatat bahwa undang-undang berbeda sehubungan dengan persekongkolan yang merusak moral masyarakat dan melanggar kesusilaan masyarakat. Jika terdapat pelanggaran substantif yang merusak moral masyarakat dan melanggar kesusilaan masyarakat, tuduhan persekongkolan untuk melakukan tindakan tersebut harus diajukan berdasarkan Undang-Undang tahun 1977)

Sampai baru-baru ini, definisi pelanggaran yang diberikan oleh Lord Diplock dalam Scott v MPC [1975] AC 819 (HL) dianggap benar: pelanggaran di mana terdakwa bermaksud menyebabkan (atau ceroboh menyebabkan) kerugian ekonomi pada orang lain. (atau merugikan kepentingan pribadi) atau membujuk orang lain untuk bertindak tidak jujur, bertentangan dengan kewajiban publiknya. Bagian kedua dari definisi ini berasal dari Welham v DPP [1961] AC 103 (HL) dan digunakan dalam Moses [1991] Crim LR 617 (CA). Terdapat persekongkolan ketika para pihak sepakat untuk memfasilitasi perolehan ijin kerja bagi para imigran yang dilarang bekerja dengan adanya stempel di paspor mereka dengan menipu Departemen Asuransi Nasional agar percaya bahwa paspor tersebut tidak memiliki stempel tersebut. Para anggota departemen telah bertindak bertentangan dengan tugas publik mereka. Korbannya, sang Mahkota, tidak perlu menderita kerugian. Lord Denning di Welham menolak anggapan bahwa diperlukan niat untuk menimbulkan kerugian ekonomi. Niat untuk menipu berarti niat untuk melakukan penipuan atau bertindak berdasarkan prasangka seseorang. Dalam bentuk konspirasi untuk menipu ini, tidak pernah ada kebutuhan untuk

membuktikan adanya niat untuk menimbulkan kerugian ekonomi. Masih belum jelas apakah sub-judul tugas publik memang dibatasi pada pejabat yang menjalankan kewajiban tersebut, namun seperti yang dinyatakan dalam paragraf berikutnya, konspirasi untuk melakukan penipuan semacam ini kini dilihat hanya sebagai ilustrasi dari prinsip umum.

Pada definisi bagian pertama harus ada perampasan karena ketidakjujuran dan dianggap ada niat untuk menyebabkan atau kecerobohan yang menyebabkan kerugian ekonomi: Scott, di atas, Referensi Jaksa Agung (No. 1 tahun 1982) [1983] QB 751 (CA) dan *Wai Yu-Tsang v R* [1992] 1 AC 269 (PC). Viscount Dilhorne dalam Scott mendefinisikan versi pelanggaran ini sebagai 'perjanjian oleh dua orang atau lebih secara tidak jujur untuk merampas sesuatu yang menjadi miliknya atau yang menjadi haknya atau akan menjadi haknya dan persetujuan oleh dua orang atau lebih. dengan ketidakjujuran untuk melukai beberapa hak milik'. Dalam Referensi Jaksa Agung (No. 1 tahun 1982), terdakwa setuju untuk menjual wiski di Lebanon yang diberi label palsu sebagai buatan perusahaan terkenal. Pengadilan menyatakan bahwa tujuan sebenarnya dari konspirasi tersebut adalah untuk menipu pembeli. Tidak ada persekongkolan untuk melakukan penipuan sehubungan dengan perusahaan tersebut karena kerugian mereka merupakan hal yang tidak disengaja terhadap obyek utama perjanjian. Kasus ini tampaknya tidak sejalan dengan kasus Scott yang tujuan utamanya adalah mendapatkan uang bagi para terdakwa, namun mereka bersalah atas konspirasi untuk menipu pemilik hak cipta. Terlebih lagi, dalam kebanyakan persekongkolan untuk menipu, tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang, namun perjanjian tersebut masih merupakan konspirasi untuk menipu. House of Lords di Scott tidak membedakan antara tujuan sebenarnya dari perjanjian tersebut dan dampak insidentalnya.

Niat miring sudah cukup seperti dalam Scott, *Hollinshead dan Cooke* [1986] AC 909, di mana pramugari kereta api bersalah karena berkonspirasi untuk menipu British Rail ketika tujuan mereka adalah menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. *Allsop* (1976) 63 Cr App R 29 (CA) berpendapat bahwa kecerobohan saja sudah cukup. Oleh karena itu, terdakwa bersalah jika ia berpikir ia dapat memperoleh jaminan yang baik yang telah diambilnya dengan melakukan kesepakatan yang baik mengenai suatu hal yang berbeda. Dewan Penasihat dalam *Wai Yu-Tsang v R* mengatakan bahwa para terdakwa bersalah jika mereka menyadari bahwa mereka telah setuju untuk melakukan suatu keadaan yang akan atau mungkin menipu korban untuk bertindak atau tidak bertindak sedemikian rupa sehingga korban akan melakukannya. menderita kerugian ekonomi atau kepentingan ekonominya akan terancam.

Allsop memiliki efek yang sama. Pembagian Lord Diplock pada Scott salah. Bentuk delik yang bersifat tugas umum bukanlah suatu kategori tersendiri melainkan hanya sekedar gambaran hukum umum. Tidak ada kerugian ekonomi yang diperlukan dalam kedua jenis kasus ini: cukuplah terdakwa merampas sesuatu dari terdakwa, baik aktual maupun prospektif, secara tidak jujur. Dalam *Adams v R* [1995] 1 WLR 52 Dewan Penasihat menekankan kriteria ini: 'harus ada hak atau kepentingan tertentu dalam diri korban yang dapat dirugikan baik karena kerugian nyata atau karena berada dalam risiko'. Oleh karena itu, terdakwa tidak bersalah apabila ia mempersulit korban untuk mengetahui apakah ia mempunyai kepentingan terhadap sejumlah uang. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di kasus

ini, Komite Yudisial berpendapat bahwa persetujuan yang tidak jujur dari para direktur untuk menghalangi sebuah perusahaan dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan keuntungan rahasia yang mereka hasilkan merupakan sebuah konspirasi untuk melakukan penipuan.

Terdakwa sendiri ikut serta dalam mendirikan suatu struktur perusahaan di luar negeri yang melaluinya ia menyembunyikan informasi secara tidak jujur, misalnya keuntungan rahasia, yang mana ia mempunyai kewajiban hukum untuk mengungkapkannya kepada perusahaan dimana ia menjadi direktornya. Dengan demikian perusahaan mempunyai suatu hak atau kepentingan yang dapat dirugikan. Ketidajujuran harus dibuktikan. Definisinya sama dengan pencurian (lihat Bab 15). *Adams v R* diikuti oleh Pengadilan Banding di *Fussell [1997] Crim LR 812*. Fakta bahwa para konspirator tidak ingin menyakiti korban adalah tidak relevan: *Wai Yu-Tsang v R*. Fakta bahwa para penipu tidak ingin menyakiti korban menyebabkan kerugian adalah motif, seperti yang juga diyakini *Allsop*. Dalam kasus *Wai Yu-Tsang v R*, keinginan terdakwa untuk berhenti melakukan penggelapan di bank adalah hal yang baik namun tidak relevan. Dapat dikatakan bahwa tujuan sebenarnya dia adalah menghentikan pelarian bank, namun dia bersalah. Kewenangan ini tidak sesuai dengan Acuan Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1982) di atas, sehingga sebaiknya dikesampingkan.

Scott v MPC [1975] AC 819, yang dibahas di atas, memberikan contoh bagian tugas non-publik dari definisi tersebut. Ada kesepakatan untuk menyuap pegawai bioskop agar film dapat disalin karena melanggar hak cipta. House of Lords menganggap perjanjian ini sebagai konspirasi untuk menipu. Tidak perlu ada penipuan. Di *Hollinshead*, di atas, perjanjian untuk membuat kotak hitam bagi orang lain untuk mendapatkan listrik gratis adalah sebuah konspirasi untuk menipu. Tindakan tersebut mungkin merupakan penipuan atau pelanggaran lain terhadap properti yang dilakukan oleh pihak ketiga yang membeli peralatan tersebut. Jika penipuan yang disepakati merupakan kejahatan, terdapat juga konspirasi berdasarkan Undang-Undang tahun 1977.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa seseorang bersalah melakukan persekongkolan berdasarkan Undang-undang hanya jika setidaknya salah satu pihak bermaksud melakukan pelanggaran tersebut. *Hollinshead*, seperti telah kita lihat, berpendapat berbeda mengenai konspirasi untuk menipu. Para pihak sendiri tidak perlu melakukan penipuan tersebut. Kesepakatan agar penipuan dilakukan oleh orang lain sudah cukup. Dalam *Dearlove (1989) 88 Cr App R 280*, pembelian barang (*Oxo cube*) secara tidak jujur dengan harga ekspor yang lebih rendah dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar dalam negeri sama dengan memperoleh properti dengan cara menipu, suatu pelanggaran sejak dihapuskan tetapi sekarang dimasukkan dalam penipuan yang bertentangan dengan *Fraud Act 2006*.

Komisi Hukum menerbitkan Kertas Kerja tentang Konspirasi untuk Menipu (No. 104) sejak tahun 1988. Kertas Kerja tersebut mencantumkan empat pilihan:

- (a) tidak berbuat apa-apa;
- (b) menuangkan undang-undang tersebut ke dalam undang-undang;

- (c) menghapus undang-undang dan menyesuaikan pelanggaran untuk menutupi kesenjangan tersebut;
- (d) menghapus undang-undang saat ini dan menggantikannya dengan kejahatan penipuan yang luas.

Bertentangan dengan (a) terdapat argumen kebijakan yang menyatakan bahwa hakim tidak seharusnya membuat undang-undang dan bahwa Parlemen adalah badan yang lebih baik daripada pengadilan untuk mengubah undang-undang. Bertentangan dengan prinsip (b) dalam UU tahun 1977 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh merupakan persekongkolan jika tidak merupakan suatu kejahatan jika dilakukan oleh satu orang. Berlawanan dengan (c) adalah kesulitan dalam melihat semua kesenjangan. Bertentangan dengan prinsip (d) yang menyatakan bahwa undang-undang harus dinyatakan dengan jelas dan tidak boleh samar-samar lebarnya. Komisi Hukum mengusulkan suatu pelanggaran luas yaitu tindakan tidak jujur menyebabkan orang lain menderita prasangka ekonomi atau risiko prasangka, atau secara tidak jujur memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Komisi Hukum menerbitkan Lapornya No. 228, Hukum Pidana: Konspirasi untuk Penipuan, 1994. Pada paragraf 1.17, komisi tersebut menyatakan bahwa mereka ingin 'untuk mengurangi panjang dan kompleksitas persidangan dengan menyederhanakan hukum, sambil selalu memastikan bahwa terdakwa dilindungi sepenuhnya.' Laporan tersebut merangkum kesimpulannya dalam paragraf 1.20: 'untuk alasan praktis, konspirasi untuk menipu mempunyai peran yang berguna dalam undang-undang ketidakjujuran yang ada saat ini, dan kami telah menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut harus tetap berlaku sambil menunggu peninjauan komprehensif terhadap undang-undang tersebut. Kami telah memutuskan bahwa tidaklah tepat, pada saat kami akan memeriksa kembali seluruh skema pelanggaran ketidakjujuran, untuk membuat rekomendasi sedikit demi sedikit untuk reformasi aspek-aspek lain dari hukum ketidakjujuran.' Para terdakwa dapat dihukum karena hal tersebut. kejahatan yang sesuai dengan perilaku mereka.

Komisi Hukum mengkritik ketidakpastian mengenai luasnya pelanggaran dan fakta bahwa konspirasi untuk melakukan penipuan adalah sah jika dilakukan oleh satu orang. Namun, hal ini mengacu pada kesenjangan hukum yang tidak diinginkan yang akan terbuka jika kejahatan tersebut dihapuskan, seperti konspirasi untuk memperoleh informasi rahasia dan menghindari tanggung jawab atau menunda pembayaran tanpa bermaksud untuk melakukan wanprestasi permanen. Kekosongan ini dinilai begitu besar sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat dihapuskan tanpa adanya penggantian. Ilustrasi kasus hukum setelah terbitnya Laporan adalah Preddy [1996] AC 815 (HL). Seorang penipu hipotek tidak bisa dihukum atas pelanggaran yang sudah dicabut, yaitu memperoleh properti dengan cara menipu, namun jika ada dua orang di antara mereka yang bertindak bersama-sama, mereka bisa dihukum karena konspirasi untuk melakukan penipuan.

Komisi Hukum kembali membahas masalah ini dalam Lapornya No. 276, Penipuan, 2002. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Makalah Konsultasi Reformasi Hukum Penipuan pada tahun 2004. Pemerintah dalam Reformasi Hukum Penipuan (2005) menolak

penghapusan pelanggaran tersebut sambil menunggu penyelesaiannya. Undang-Undang Penipuan tahun 2006. Dinyatakan bahwa tidak jelas apakah pelanggaran baru dalam undang-undang tahun 2006 akan menutupi semua kesenjangan dalam undang-undang yang saat ini dipenuhi oleh konspirasi untuk melakukan penipuan (paragraf 4). Ini tidak mencakup fakta Scott v MPC di atas, karena dalam kasus tersebut tidak ada pernyataan yang salah.

Pendapat bahwa konspirasi untuk melakukan penipuan bertentangan dengan Pasal 7 ECHR ditolak di Pengadilan Divisi di Norris, di atas. Pengadilan setuju bahwa konspirasi untuk menipu 'telah lama mengandung kejelasan dan ketepatan yang disyaratkan oleh Konvensi dan hukum umum, yaitu bukti bahwa dua atau lebih konspirator bermaksud secara tidak jujur untuk menipu orang lain seperti yang dijelaskan dalam Welham, Scott dan Wai Yu-Tsang.'

Konspirasi Untuk Merusak Moral Masyarakat Dan Merusak Kesusilaan Masyarakat

Dalam Shaw v DPP [1962] AC 220, para terdakwa menerbitkan The Ladies' Directory, sebuah buku setebal 28 halaman yang mengiklankan nama, nomor telepon, alamat dan layanan pelacur. House of Lords berpendapat, Lord Reid berbeda pendapat, bahwa ada pelanggaran hukum umum berupa konspirasi yang merusak moral publik. Tidak diperlukan bukti bahwa ada orang yang benar-benar korup. Hakimlah yang menentukan apakah kejahatan itu dilakukan berdasarkan fakta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak perlu ada tuduhan konspirasi karena para terdakwa bisa saja dihukum karena menerbitkan artikel cabul, sebuah kejahatan berdasarkan pasal 2 (4) Undang-Undang Publikasi Cabul tahun 1959. Karena Parlemen baru-baru ini berbicara mengenai topik tersebut, rasanya aneh bahwa House of Lords harus menciptakan kejahatan baru.

Ada kemunduran dari Shaw di Kneller (Publishing, Printing and Promotions) Ltd v DPP [1973] AC 435. Dua Penguasa Hukum, Morris dan Kilbrandon, berpikir bahwa keputusan Shaw benar. Dua Tuan, Reid dan Morris, menganggap itu salah. Lord Simon tidak mau mengesampingkan Shaw. Oleh karena itu, Shaw tetap menjadi bagian dari hukum. Namun ujian untuk merusak akhlak masyarakat diubah dari yang ada di Shaw, menyesatkan, menjadi merusak akhlak masyarakat.

Lords Simon dan Kilbrandon dan mungkin Morris berpikir di Kneller bahwa ada pelanggaran konspirasi yang melanggar kesopanan publik. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang dan Gibson [1990] 2 QB 619 (CA) berpendapat bahwa terdapat kejahatan substantif yang melanggar kesusilaan publik, seperti yang dilakukan antara lain, Rowley [1991] 1 WLR 1020 (CA) obiter, tuduhan itu merupakan permufakatan jahat yang bertentangan dengan pasal 1 UU Tahun 1977. Oleh karena itu, pelanggaran hukum umum yang dulu berupa konspirasi untuk menghina kesusilaan publik kini menjadi pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 5(3).

Pelanggaran yang berkonspirasi untuk menghina kesopanan publik tidak dapat dilakukan di rumah pribadi. 'Membuat marah' berarti merasa jijik. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang perlu marah; sudah cukup bahwa orang biasa mungkin akan marah jika melihat perilaku tersebut. Sulit untuk melihat jenis perilaku apa yang merupakan konspirasi untuk menghina kesusilaan publik jika dilakukan oleh dua orang, namun bukan kejahatan yang melanggar kesusilaan publik jika dilakukan oleh satu orang. Jika persekongkolan untuk

merusak moral publik merupakan kejahatan jika dilakukan oleh satu orang, persekongkolan tersebut bersifat hukum, bukan hukum umum: pasal 5(3)(b). Ada keraguan apakah ada pelanggaran yang merusak moral masyarakat. Pengadilan Banding Pidana di Shaw berpendapat bahwa memang ada, tetapi House of Lords hanya mempertimbangkan konspirasi dan bukan apakah ada pelanggaran substantif.

Seperti persekongkolan untuk menipu dalam pasal 5(2), penahanan persekongkolan dalam pasal 5(3) dimaksudkan hanya untuk sementara, sambil menunggu reformasi undang-undang tentang percabulan. Pemerintah mempunyai kesempatan untuk menghapuskan kejahatan-kejahatan ini ketika mereka memberlakukan undang-undang tersebut pada tahun 1977 namun menunda perubahan sampai Komite Kecabulan dan Sensor Film yang diketuai oleh Bernard Williams telah melaporkannya, namun ketika hal tersebut dilakukan pada tahun 1979, undang-undang tersebut tetap tidak berubah. Sehubungan dengan konspirasi common law ini, ketidakmungkinan merupakan pembelaan kecuali cara yang digunakan tidak memadai untuk melaksanakan rencana tersebut, dalam hal ini terdakwa bersalah. Petunjuk yang jelas bagi para jaksa penuntut adalah bahwa ketika fakta-fakta menimbulkan common law dan konspirasi undang-undang, maka yang terakhir harus didakwa karena ketidakmungkinan telah dihapuskan sehubungan dengan hal tersebut. Apa yang bisa disebut sebagai ketidakmungkinan selanjutnya adalah tidak adanya pembelaan karena persekongkolan selesai berdasarkan kesepakatan. Jika para pihak sepakat pada tanggal 1 Mei untuk mencuri permata pada tanggal 1 Juli tetapi kelompok lain mencurinya pada tanggal 1 Juni, pihak asli bersalah atas konspirasi.

Rancangan KUHP tidak mempengaruhi kedua jenis perjanjian tersebut (KUHP dirancang sebelum Gibson) dan persekongkolan untuk menipu. Karena undang-undangnya tidak jelas, tidak selalu jelas sebelum persidangan apakah suatu bentuk perilaku tertentu termasuk dalam konspirasi common law. Tidaklah memuaskan jika masyarakat tidak mengetahui apakah tindakan mereka ilegal dan memerlukan biaya serta tidak efisien untuk mengetahuinya melalui penuntutan.

Konspirasi untuk melakukan pelanggaran bertentangan dengan UU tahun 1977

Berdasarkan hukum adat, terdapat kejahatan berupa persekongkolan untuk melakukan pelanggaran, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut akan melanggar ranah publik atau akan menimbulkan lebih dari sekadar kerugian nominal. Jenis konspirasi ini dihapuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977. Pasal 6 – 10 dari Undang-undang tersebut menciptakan lima pelanggaran pidana baru. Persetujuan dua orang atau lebih untuk melakukan salah satu pelanggaran tersebut merupakan konspirasi menurut undang-undang. Kejahatan-kejahatan tersebut adalah:

- (a) menggunakan kekerasan untuk menjamin masuknya orang tersebut kecuali jika orang tersebut adalah penghuni tempat tinggal yang dipindahkan atau orang yang bertindak atas namanya (pasal 6(1)); terdapat pembelaan terhadap kewenangan yang sah sehingga seorang polisi dapat menggunakan kekerasan untuk mendapatkan izin masuk sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

- (b) tetap tinggal di lokasi, telah masuk sebagai pelanggar dan telah diminta untuk keluar oleh penghuni tempat tinggal yang dipindahkan atau penghuni yang akan dilindungi (pasal 7(1), sebagaimana telah diubah);
- (c) masuk tanpa izin sambil membawa senjata untuk menyerang tanpa izin yang sah atau alasan yang masuk akal (pasal 8(1));
- (d) masuk tanpa izin di lokasi misi diplomatik, atau lokasi konsuler atau tempat tinggal pribadi diplomat. Terdapat daftar jenis tempat yang dilindungi, pasal 9(2), yang diubah oleh Undang-Undang Tempat Diplomatik dan Konsuler tahun 1987 (pasal 9(1));
- (e) menghalangi petugas pengadilan yang sedang melaksanakan putusan atas kepemilikan suatu tempat (pasal 10(1)).

Ada juga pelanggaran pelanggaran berat dalam Undang-Undang Peradilan Pidana dan Ketertiban Umum tahun 1994 yang ditujukan untuk memburu penyabot.

10.5 KONSPIRASI LUAR NEGERI

Pengadilan menganggap *actus reus* konspirasi sebagai masalah yang berkelanjutan. Otoritas utamanya adalah DPP v Doot [1973] AC 807 (HL). Tak satu pun dari lima terdakwa adalah orang Inggris, dan perjanjian untuk melanggar undang-undang narkoba Inggris dengan mengimpor ganja dibuat di luar Inggris. Yang Mulia berpendapat bahwa konspirasi, yang merupakan pelanggaran berkelanjutan, belum selesai pada saat perjanjian dibuat. Ketika salah satu terdakwa tiba di Inggris, dia dan teman-temannya dapat didakwa melakukan konspirasi, meskipun pada awalnya pengadilan Inggris tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran tersebut. Viscount Dilhorne berkata: 'Konspirasi tidak berakhir dengan dibuatnya perjanjian. Ini akan terus berlanjut selama ada dua pihak atau lebih yang berniat melaksanakan desain tersebut.' Doot terlibat konspirasi sebelum UU 1977. Undang-undang tersebut tidak mengatur masalah tersebut, namun dianggap bahwa undang-undangnya tetap sama.

Di Doot ada aksi di Inggris. Bagaimana jika tidak ada tindakan seperti itu? Lord Salmon di Doot menilai ada konspirasi, begitu pula Lord Diplock di DPP v Stonehouse [1978] AC 55 (HL), meski Lord Keith berpendapat sebaliknya. Posisi tersebut diragukan hingga *Liangsiriprasert v Government of the USA* [1991] 1 AC 255 (PC), melalui banding dari Hong Kong, dimana undang-undang mengenai hal ini sama dengan di Inggris. Lord Griffiths berkata:

"Mengapa tindakan terbuka diperlukan untuk mendirikan yurisdiksi?" Dalam kasus konspirasi di Inggris, kejahatannya selesai setelah perjanjian dibuat dan tidak ada lagi tindakan terang-terangan yang perlu dibuktikan sebagai unsur kejahatan tersebut. Satu-satunya tujuan mencari tindakan terbuka di Inggris dalam kasus konspirasi yang dilakukan di luar negeri adalah untuk membangun hubungan antara konspirasi tersebut dan Inggris atau mungkin untuk menunjukkan bahwa konspirasi tersebut masih berlanjut. Namun, jika hal ini dapat dibuktikan dengan bukti lain, misalnya rekaman percakapan antara para konspirator yang menunjukkan kesepakatan yang kuat untuk melakukan kejahatan di masa depan, hal ini menggagalkan tujuan pencegahan dari kejahatan konspirasi yang harus menunggu sampai ada bukti yang jelas. perbuatan itu dilakukan berdasarkan persekongkolan.

Pelanggaran yang belum sempurna ditujukan untuk menggagalkan penyelesaian kejahatan. “Jika diperoleh bukti bahwa sel teroris yang beroperasi di luar negeri sedang merencanakan kampanye pengeboman di London, apa gunanya pihak berwenang ? tidak bertindak sampai sel tersebut datang ke Inggris untuk menanam bom dengan risiko teroris bisa lolos?’ la melanjutkan:

[t] Yang Mulia ahli waris tidak dapat menemukan preseden, rasa hormat, atau akal sehat apa pun yang dapat menghalangi hukum umum untuk menganggap sebagai kejahatan kecil yang dapat dibenarkan di Inggris yang dilakukan di luar negeri yang dimaksudkan untuk mengakibatkan dilakukannya pelanggaran pidana di Inggris. Oleh karena itu, persekongkolan yang dilakukan di Thailand dengan tujuan melakukan tindak pidana perdagangan narkoba di Hong Kong dapat dibenarkan di Hong Kong meskipun belum ada tindakan terang-terangan berdasarkan persekongkolan tersebut yang terjadi di Hong Kong.

Hasil ini sejalan dengan rekomendasi Laporan Komisi Hukum tentang Yurisdiksi Pelanggaran Penipuan dan Ketidakjujuran dengan Unsur Asing, Law Com. Nomor 180 Tahun 1989, alinea 4.4. Terdakwa yang didakwa melakukan 'pelanggaran terdaftar' akan diadili di Inggris dan Wales jika ada bagian dari konspirasi yang terjadi di sana.

Keputusan Dewan Penasihat di Liangsiriprasert diikuti oleh Pengadilan Banding di Sansom [1991] 2 QB 130. Terdakwa didakwa berkonspirasi untuk menghindari larangan impor obat-obatan terlarang, ganja, ke Inggris. Perjanjian tersebut dibuat di Maroko, dan tidak ada tindakan berdasarkan perjanjian tersebut yang dilakukan di Inggris. Taylor LJ dalam keputusannya menolak anggapan bahwa Liangsiriprasert hanya diterapkan pada konspirasi common law. Tidak ada satupun dalam Undang-Undang tahun 1977 yang mengindikasikan bahwa common law dan konspirasi undang-undang harus diperlakukan berbeda sehubungan dengan hal ini. Akan menjadi ‘tidak masuk akal’ jika Liangsiriprasert hanya menerapkan konspirasi untuk menipu, dan Dewan Penasihat akan membatasi pendapat mereka pada common law, jika saran mereka hanya berkaitan dengan common law. Faktanya, ada tindakan terang-terangan di Inggris, yakni menyewa kapal penangkap ikan untuk mengimpor obat-obatan dari Maroko. Oleh karena itu, Sansom seperti DPP v Doot. Meskipun pengesahan Liangsiriprasert bersifat obiter, namun tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut mewakili hukum.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan pasal 1(4) Undang-Undang tahun 1977, perjanjian untuk melakukan tindakan yang dilakukan di luar Inggris dan Wales bukanlah suatu konspirasi kecuali kejahatan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat diadili di Inggris dan Wales. Oleh karena itu, perjanjian untuk melanggar hukum pidana asing bukanlah suatu konspirasi yang dapat didakwa di Inggris dan Wales kecuali jika dilakukan di Inggris dan Wales merupakan suatu pelanggaran. Jika ada perjanjian yang dibuat di Inggris untuk melakukan di luar negeri apa yang termasuk tindak pidana konspirasi untuk menipu jika dilakukan di Inggris, pengadilan Inggris tidak mempunyai yurisdiksi: Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1982) [1983] QB 751 (CA) . Secara khusus, konspirasi pembunuhan dapat diadili di Inggris dan Wales meskipun hal tersebut tidak dapat diadili jika dilakukan sesuai dengan niat para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1993, yang mulai berlaku pada tahun 1999 (dan lihat Undang-undang Peradilan Pidana (Terorisme dan Konspirasi) tahun 1998), konspirasi untuk melakukan pelanggaran 'kelompok A' di Inggris atau di luar negeri dapat diadili di Inggris, baik itu terdakwa menjadi pihak dalam konspirasi di Inggris atau di luar negeri dan apakah 'tindakan atau kelalaian atau peristiwa lain sehubungan dengan konspirasi tersebut terjadi di Inggris atau tidak. Ketentuan ini menegaskan Liangsiriprasert dan Sansom, namun tidak terbatas pada pelanggaran yang terdaftar. Pelanggaran 'kelompok A' adalah salah satu pelanggaran yang tercantum dalam Undang-undang tahun 1993 sebagaimana telah diubah. Daftar tersebut mencakup pencurian, penipuan yang bertentangan dengan Fraud Act 2006, pemerasan, penanganan dan penghindaran tanggung jawab dengan penipuan.

Undang-undang tersebut juga memasukkan s 1A baru ke dalam Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977. Sehubungan dengan persekongkolan untuk melakukan pelanggaran 'kelompok A', terlepas dari apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dapat diadili di Inggris atau tidak, terdakwa kini dapat diadili di Inggris. Jika dia melakukan 'apa pun' di Inggris sehubungan dengan perjanjian sebelum pembentukannya, atau menjadi pihak di dalamnya di Inggris, atau melakukan atau tidak melakukan 'apa pun' di Inggris untuk melaksanakannya. Ketentuan lain berkaitan dengan konspirasi di mana tidak ada unsur yang perlu dibuktikan untuk melakukan pelanggaran yang terjadi di Inggris. Contohnya adalah jika terdakwa di Inggris bersekongkol dengan terdakwa lain di Perancis untuk mencuri Mona Lisa dari Louvre di Paris. Kedua terdakwa dapat diadili di Inggris, meskipun pelanggaran grup A sendiri tidak dapat diadili di Inggris. Ketentuan ini juga berlaku jika terdakwa di luar negeri telah menipu agen yang tidak bersalah di Inggris untuk memulai konspirasi untuk mencuri Mona Lisa. Namun, jika semuanya terjadi di luar negeri, maka tidak ada konspirasi yang dapat dibenarkan di sini. Contohnya adalah operasi murni Perancis untuk mencuri lukisan itu. Dalam kemungkinan ini, pengadilan Inggris tidak memiliki yurisdiksi.

10.6 MENS REA DALAM KONSPIRASI HUKUM

Elemen mental dalam konspirasi adalah niat untuk berperan dalam tindakan yang disepakati: Anderson, di atas. Kasus-kasus baru-baru ini, khususnya yang melibatkan narkoba, telah menekankan kembali bahwa kecerobohan saja tidak cukup: Harmer [2005] 2 Cr App R 23 (CA), Ali [2005] Crim LR 864 (CA), dan khususnya Saik [2007] 1 AC 18 (HL). Terdakwa juga harus mempunyai niat untuk melaksanakan perjanjian itu dan mempunyai mens rea yang diperlukan atas tindak pidana yang hendak dilakukannya. Misalnya, dalam persekongkolan mencuri, terdakwa harus mempunyai niat terus-menerus untuk merampas dan tidak jujur. Dalam permufakatan membunuh, terdakwa harus berniat membunuh; niat untuk melukai tubuh secara parah saja tidak cukup: Siracusa, di atas. Dalam konspirasi impor heroin, harus ada kesepakatan untuk mengimpor heroin, bukan sembarang narkoba. Alasannya adalah bahwa menurut pasal 1(1), tindakan yang disepakati harus dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan, dan perjanjian untuk melakukan penganiayaan fisik yang berat belum tentu mengakibatkan kematian korbannya ketika dilakukan.

Seseorang dianggap bersalah meskipun ia bermaksud ikut serta dalam sebagian perbuatan melawan hukum saja. Ia harus mengetahui bahwa sekurang-kurangnya salah satu dari para konspirator bermaksud melakukan pelanggaran secara penuh, namun tidak perlu ditunjukkan bahwa ia bermaksud melakukannya, tidak peduli pasal 1 Undang-undang Hukum Pidana tahun 1977 menyatakan 'sesuai dengan niatnya'. (penekanan ditambahkan). Di Anderson, fakta-fakta yang diberikan di atas, terdakwa dianggap bersalah. Jika dia bersalah meskipun dia tidak bermaksud untuk melaksanakan rencana yang telah disepakati, maka semua konspirator lainnya juga harus bersalah, bahkan jika mereka juga tidak bermaksud untuk melaksanakan perjanjian tersebut! Rasio Anderson tidak konsisten dengan s 1(1). Pasal 1(1) menyatakan jika diparafrasekan bahwa seseorang bersalah melakukan persekongkolan hanya jika dua orang terdakwa atau lebih bermaksud melaksanakan persetujuannya. Bagian dari Anderson ini bertahan dari klarifikasi yang diterima bagian lain dari Anderson di Siracusa, yang dibahas di bawah.

House of Lords dalam *Churchill v Walton* [1967] 2 AC 224 (HL) berpegang pada common law bahwa dalam kaitannya dengan pelanggaran berat, terdakwa bersalah hanya jika dia mengetahui keadaannya. Oleh karena itu, persetujuan untuk melakukan suatu delik tegas memerlukan mens rea. Sehubungan dengan persekongkolan menurut undang-undang, Pasal 1(2) UU Tahun 1977 juga menganut pendirian yang sama. Hal yang sama juga berlaku jika mens rea pelanggaran substantif dipenuhi oleh sesuatu yang kurang dari sekedar pengetahuan. Otoritas utama adalah Saik, di atas. Kecurigaan merupakan unsur mental yang relevan namun bukan kejahatan yang berkonspirasi untuk melakukan pelanggaran tersebut. Lord Nicholls mengatakan bahwa 'tahu' berarti keyakinan yang benar; kecurigaan bukan merupakan pengetahuan. Pasal 1(2) berlaku untuk semua pelanggaran yang permasalahannya adalah adanya fakta atau keadaan. Ini tidak membatasi pada pelanggaran berat.

Jika tanggung jawab atas pelanggaran apa pun dapat timbul tanpa sepengetahuan orang yang melakukannya mengenai fakta atau keadaan tertentu yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran tersebut, orang tersebut tetap bersalah atas persekongkolan untuk melakukan pelanggaran tersebut kecuali dia dan sekurang-kurangnya salah satu pihak lain dalam perjanjian itu bermaksud atau mengetahui bahwa fakta atau keadaan itu akan terjadi pada saat perbuatan yang merupakan pelanggaran itu terjadi.

Disarankan bahwa s 1(2) pada dasarnya tidak konsisten dengan Anderson. Jika niat mengenai keadaan diperlukan (pasal 1(2)), maka, berbeda dengan Anderson, niat mengenai konsekuensi juga harus diperlukan. Pandangan sebaliknya adalah bahwa walaupun niat terhadap keadaan diperlukan, namun kecerobohan terhadap konsekuensinya sudah cukup. Jika demikian, dua laki-laki yang setuju untuk melakukan pemerkosaan, namun ceroboh dalam memberikan persetujuan, bersalah atas konspirasi pemerkosaan. Perlu juga ditekankan bahwa seseorang tidak dapat 'mengetahui' bahwa sesuatu 'akan ada' di masa depan. Maksudnya, terdakwa harus percaya bahwa suatu fakta atau keadaan akan ada.

Dalam Anderson Lord Bridge mengatakan bahwa terdakwa mempunyai unsur mental 'jika, dan hanya jika terdakwa, ketika ia mengadakan perjanjian dengan maksud untuk ikut

serta dalam tindakan yang disepakati demi mencapai tujuan pidana yang ingin dicapai oleh tindakan yang disepakati tersebut. Berdasarkan pandangan ini, terdakwa tidak bersalah melakukan persekongkolan jika ia menghasut pelaku untuk membunuh pihak ketiga namun tidak bermaksud melakukan hal lain. (Bagaimana dengan 'Godfathers' IRA? Bisakah kita melihat House of Lords membiarkan mereka pergi?) Menyatakan proposisi tersebut berarti melihat betapa konyolnya hal itu. Pandangan ini dibenarkan oleh Pengadilan Banding di Siracusa, di atas. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Lord Bridge, tidak ada aturan hukum yang mewajibkan terdakwa untuk berperan aktif dalam tindakan yang disepakati. Cukuplah bahwa terdakwa bermaksud untuk tetap menyetujui agar tindak pidana pihak lain tetap dilanjutkan. Harus dikatakan juga bahwa diktum Lord Bridge tidak sejalan dengan inti pidatonya yang menyatakan niat tidak relevan dan diktum tersebut tidak sejalan dengan upayanya untuk menjamin pembebasan warga negara yang taat hukum yang ikut berkomplot untuk menjebak para konspirator. Dia sekarang bertanggung jawab jika dia berniat untuk berperan dalam pelaksanaan perjanjian. House of Lords bisa saja memutuskan terdakwa bersalah karena ikut serta dalam konspirasi untuk melakukan pelarian tersebut.

Dalam Allsop di atas, diktum Lord Diplock dalam *Hyam v DPP* [1975] AC 55 (HL) bahwa niat mencakup pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya konsekuensi diterapkan pada konspirasi untuk menipu. Undang-undang tahun 1977 memerlukan kesengajaan, dan jika Allsop benar, maka hal tersebut dibatasi pada pelanggaran hukum umum. Namun, ada pendapat bahwa, seperti halnya upaya, kecerobohan terhadap keadaan sudah cukup. Jika dua laki-laki setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan dan yakin bahwa perempuan tersebut boleh menyetujuinya, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini mereka tidak bersalah karena bersekongkol untuk melakukan pemerkosaan. Jika pasal 1(2) diterapkan tidak hanya pada pelanggaran berat namun secara umum, mereka tidak 'bermaksud atau mengetahui bahwa fakta atau keadaan tersebut [kurangnya persetujuan] akan terjadi pada saat tindakan yang merupakan pelanggaran tersebut akan dilakukan'.

Terdakwa bersalah melakukan konspirasi hanya jika dia tahu dia tidak menyetujuinya. Kecerobohan dalam menentukan keadaan, tidak adanya persetujuan, tidaklah cukup mens rea untuk terjadinya persekongkolan berdasarkan undang-undang, meskipun hal tersebut sudah cukup untuk seluruh tindak pidana pemerkosaan. Hal ini juga cukup untuk kejahatan percobaan pemerkosaan (lihat di bawah). Masalah ini dibahas dalam *Mir* (1994) *The Independent*, 23 Mei (CA). Menerapkan pasal 1(2) secara umum, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan konspirasi hanya jika dia mengetahui bahwa suatu keadaan memang ada atau bermaksud agar konsekuensinya terjadi. Kecerobohan saja tidak cukup. Oleh karena itu, terdakwa tidak bersalah bersekongkol untuk melakukan kerugian pidana yang berat apabila ia ceroboh sehingga menimbulkan resiko yang serius terhadap nyawanya. Putusan ini harus dikontraskan dengan undang-undang yang mana kecerobohan yang membahayakan nyawa sudah cukup mens rea.

Pengadilan di *Mir* tidak melakukan upaya untuk menyelaraskan putusannya dengan hukum percobaan. Keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan bahwa terdakwa harus memiliki mens rea atas pelanggaran yang dilakukannya. Kecerobohan mengenai bahaya

terhadap nyawa merupakan salah satu unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian pidana yang berat. Namun Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa bersalah hanya jika ia bermaksud membahayakan nyawanya.

Komentar Umum Tentang Konspirasi

Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, masih terdapat kesulitan untuk menyatakan bahwa tiga jenis konspirasi tetap merupakan pelanggaran hukum umum. Dua di antaranya, yaitu merusak moral publik dan melanggar kesopanan publik, tidak jelas. Diperkirakan pelanggaran-pelanggaran ini masih terus terjadi karena jarang sekali dilakukan penuntutan. Jika lebih banyak penuntutan diajukan, para pemikir liberal akan mempunyai kesempatan untuk mengkritik besarnya potensi pelanggaran tersebut. Besarnya konspirasi untuk melakukan penipuan juga tidak diketahui secara pasti. Hal ini lebih luas daripada konspirasi untuk melakukan pelanggaran penipuan (*Scott v MPC*, di atas) namun apakah perjanjian untuk merusak properti atau menangani barang curian merupakan konspirasi untuk menipu? Hal ini tidak berarti bahwa konspirasi berdasarkan undang-undang adalah sempurna. Jika luas kejahatan yang akan dilakukan tidak dapat dipastikan, maka persekongkolan untuk melakukannya juga tidak dapat dipastikan.

Berdasarkan common law dan berdasarkan undang-undang, tidak ada denda maksimum yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konspirasi common law yang merusak moral masyarakat dan melanggar kesusilaan masyarakat, tidak ada hukuman maksimal berupa penjara. Berdasarkan pasal 12 UU Peradilan Pidana tahun 1987, hukuman maksimal bagi permufakatan jahat untuk melakukan penipuan adalah 10 tahun penjara. Maksimal untuk persekongkolan menurut undang-undang adalah maksimal untuk pelanggaran. Jika pelanggarannya dapat diadili, maka maksimumnya adalah untuk diadili berdasarkan dakwaan. Persekongkolan merupakan pelanggaran yang dapat didakwakan meskipun kejahatan yang disepakati hanya bersifat ringkasan. Terdapat aturan pembuktian khusus untuk kasus konspirasi, yang dengannya bukti yang merugikan terhadap seorang konspirator dapat dikemukakan dan dilarang untuk semua pelanggaran lainnya.

Ian Dennis dalam 'The Reasonation of Crime Conspiracy' (1977) 93 LQR 39 memberikan lima alasan untuk mempunyai hukum persekongkolan kriminal: (a) Merupakan bukti adanya niat kriminal, seperti halnya tindakan yang 'lebih dari sekedar persiapan' adalah sebuah upaya. (b) Memungkinkan intervensi untuk mencegah orang melakukan pelanggaran. Jika tidak dicegah, konspirasi dapat menyebabkan banyak kejahatan terorganisir, tidak hanya satu kejahatan. (c) Ia membawa para penyelenggara kejahatan ke pengadilan. Para Godfather kejahatan, yang tidak mengotori tangan mereka dengan melakukan kejahatan seperti terorisme dan perampokan, dapat terkena pelanggaran ini. (d) Persekongkolan merupakan perkumpulan yang merugikan dan orang-orang yang ikut serta dalam perjanjian tersebut harus dihukum. (e) Undang-undang menyediakan cara untuk menghentikan kemitraan dalam kejahatan. Ada kemungkinan bahwa dua orang yang saling menghasut lebih mungkin melakukan pelanggaran daripada satu orang yang melakukannya sendiri. Fakta bahwa dua orang terlibat meningkatkan bahaya perilaku mereka. Geng teroris lebih sulit dihentikan

daripada satu teroris. (Penghasutan dapat dilihat dari sudut pandang yang sama.) Secara hukum, konspirasi tetap berlaku meskipun para pihak belum mencapai tahap upaya.

Aktivitas yang sama mungkin merupakan konspirasi jika dilakukan oleh dua orang, namun bukan upaya jika dilakukan oleh satu orang: alasan pencegahan kejahatan tampaknya lebih berlaku pada konspirasi daripada upaya. Memang benar, dalam *Board of Trade v Owen* [1957] AC 602 (HL), Lord Tucker melihat ini sebagai alasan konspirasi. 'Tujuan keseluruhan dari menjadikan perjanjian tersebut dapat dihukum adalah untuk mencegah dilakukannya pelanggaran substantif bahkan sebelum pelanggaran tersebut mencapai tahap percobaan.' Mungkin ada argumen mengapa undang-undang ini lebih berlaku terhadap dua orang atau lebih (yang bersalah). persekongkolan) dibandingkan terhadap satu orang (yang tidak bersalah atas persekongkolan atau percobaan). G. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Little, Brown & Co, 1978) 133, berpendapat bahwa: 'Fenomena orang-orang yang membentuk kelompok kriminal mungkin dianggap cukup menakutkan untuk dilarang demi kepentingannya sendiri.' Namun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Seseorang dapat menimbulkan bahaya yang sama besarnya dengan dua orang, dan satu orang sebesar gorila dapat menimbulkan kekhawatiran yang sama besarnya dengan dua orang yang pertumbuhannya terbatas.

Pembaruan

Rancangan KUHP, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989, kelas 48, mengatur:

- (2) Seseorang bersalah melakukan persekongkolan jika:
 - (a) ia sepakat dengan orang lain atau orang-orang lain bahwa suatu tindakan atau tindakan harus dilakukan yang, jika dilakukan, akan melibatkan dilakukannya pelanggaran atau pelanggaran oleh satu atau lebih pihak dalam perjanjian; Dan
 - (b) ia dan setidaknya satu pihak lain dalam perjanjian bermaksud agar pelanggaran atau pelanggaran tersebut dilakukan.

Rasio dalam *Anderson* [1986] AC 27 ditolak dan diktum Lord Bridge tidak diberlakukan.

- (3) Maksud pada ayat (1) maksud agar dilakukan suatu tindak pidana adalah kesengajaan terhadap seluruh unsur tindak pidana (selain unsur kesalahan), kecuali kecerobohan terhadap suatu keadaan. cukup jika itu cukup untuk pelanggaran itu sendiri. Seperti dalam upaya, kecerobohan terhadap keadaan, mis. persetujuan dalam pemerkosaan, sudah cukup.

Draf tersebut menghilangkan kata 'perlu' yang terdapat pada pasal 1(1). Persoalan niat bersyarat diserahkan kepada hukum umum dan tidak lagi bergantung, sebagaimana dinyatakan oleh Jackson [1985] Crim LR 442, pada apakah perjanjian tersebut merupakan pelanggaran jika dilakukan sesuai dengan niat terdakwa.

Pengecualian terhadap korban yang dituju sebagai konspirator sendiri dipertahankan dalam pasal 48(4). Namun, kelompok yang dikecualikan haruslah 'orang yang dilindungi'. Artinya, mereka yang menjadi korban dan merupakan sasaran dari niat Parlemen untuk melindungi mereka. Berdasarkan sub-klausul (8) seseorang bersalah melakukan persekongkolan meskipun:

- (a) tidak ada pihak lain yang pernah atau dituduh melakukan persekongkolan tersebut;

- (b) identitas pihak lain dalam perjanjian tidak diketahui;
- (c) pihak lain mana pun yang menurut dakwaan merupakan salah satu pihak dalam perjanjian telah atau dibebaskan dari persekongkolan tersebut, kecuali dalam semua keadaan, hukumannya tidak konsisten dengan pembebasan pihak lainnya; atau
- (d) satu-satunya pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak dapat dihukum atas persekongkolan tersebut (misalnya, karena ia bertindak di bawah tekanan dengan ancaman, atau ia adalah seorang anak di bawah usia sepuluh tahun, atau ia kebal dari penuntutan).

Sub-klausul ini sebagian besar menyatakan kembali undang-undang yang berlaku saat ini. Pengecualian ini apabila terdakwa sepakat dengan pasangannya, anak di bawah umur yang dapat bertanggung jawab pidana, dan korban yang dituju harus dibatalkan. Apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan bergantung pada hukum umum. Jika kini ada perbedaan antara undang-undang persekongkolan dengan anak dan persekongkolan dengan orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa, RUU KUHP akan menghapusnya. Komisi Hukum menilai kebijakan sosial di balik pengecualian perkawinan yang ada sebelumnya, bahwa hukum pidana tidak boleh mengganggu hubungan rahasia perkawinan, telah hilang. Selain itu, karena salah satu pasangan dapat menjadi pihak yang terlibat dalam pelanggaran utama pasangannya, maka tidak masuk akal jika mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas persekongkolan.

Klausul 48(7) memperjelas hukum. Tidak boleh ada tindak pidana persekongkolan jika menjadi pihak sekunder dalam dilakukannya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bukan pihak dalam perjanjian, namun terdapat pelanggaran karena menjadi pihak yang ikut serta dalam persekongkolan orang lain dan persekongkolan untuk menghasut. Proposisi pertama (tidak bertanggung jawab) menyatakan kembali keputusan Pengadilan Tinggi dalam *Hollinshead [1985] AC 975*, di atas.

Persekongkolan untuk menipu tidak terpengaruh oleh RUU KUHP maupun UU Penipuan tahun 2006. Komisi Hukum menerbitkan Makalah Konsultasi No. 183, *Konspirasi dan Upaya*, pada tahun 2007. Di dalamnya diajukan usulan sebagai berikut. Pertama, dan bertentangan dengan undang-undang Saik yang berlaku di atas, direkomendasikan bahwa kecerobohan sudah cukup untuk unsur keadaan apa pun dalam pelanggaran substantif. Kedua, dan memperluas hukum yang terdapat pada pasal 1(2), jika pengetahuan atau keyakinan cukup untuk melakukan pelanggaran penuh, maka persekongkolan untuk melakukan pelanggaran tersebut juga harus cukup; pasal 1(2) menuntut bahwa pengetahuan saja sudah cukup pada saat ini. Ketiga, dua bagian undang-undang menurut Anderson bahwa terdakwa yang bersalah melakukan konspirasi harus berniat 'memainkan bagian dalam tindakan yang disepakati' dan bahwa konspirasi tidak mengharuskan terdakwa bermaksud agar perjanjian tersebut dilaksanakan. sampai selesai – harus dihapuskan. Paragraf 1.39 mengungkapkan kekhawatiran Komisi:

Pertama, tidak ada alasan, dalam hal bahasa atau kebijakan undang-undang, untuk menegaskan bahwa D harus mempunyai niat untuk berperan dalam implementasi perjanjian tersebut. Jika D1 dan D2 setuju untuk membunuh V, maka D1 harus dihukum karena

melakukan konspirasi pembunuhan meskipun dia tidak bermaksud untuk berperan sebagai pihak mana pun dalam pembunuhan V. Kedua, persetujuan untuk melakukan suatu tindak pidana mengandung arti adanya niat bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan, seperti yang nampaknya dijelaskan dengan jelas dalam pasal 1(1) Undang-undang tahun 1977. Gagasan mengenai konspirasi yang disetujui oleh para konspirator namun tidak ada satu pun yang berniat untuk melaksanakannya sangatlah tidak memuaskan.

Ketiga, kekebalan pasangan dianjurkan untuk dihapuskan. Keempat, undang-undang yang mengecualikan kedua belah pihak ketika bukan korban dan korbannya sepakat untuk melakukan kejahatan akan dihapuskan dengan akibat bahwa bukan korban harus bertanggung jawab atas persekongkolan; Namun, pembelaan akan diberikan kepada korban. Contoh nyatanya adalah ketika seorang laki-laki yang sudah dewasa membujuk orang di bawah umur untuk melakukan hubungan badan dengannya. Saat ini, baik pihak laki-laki, pihak yang bukan korban, maupun pihak lain, pihak korban, yang kepentingannya dilindungi oleh undang-undang pelanggaran seksual (sekarang pasal 9 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003), mempunyai pembelaan. Usulannya adalah hanya korban yang harus mendapat pembelaan.

Namun yang kelima, undang-undang mengenai persekongkolan dengan anak di bawah 10 tahun tetap dipertahankan, sebuah rekomendasi yang sulit disejajarkan dengan undang-undang sebelumnya, terutama jika diingat bahwa undang-undang saat ini melindungi orang dewasa yang menargetkan anak kecil yang rentan untuk terlibat dalam konspirasi. apa yang seharusnya menjadi konspirasi. Argumen Komisi (paragraf 1.47) adalah ketika orang dewasa setuju dengan seorang anak untuk melakukan suatu pelanggaran, 'tidak akan ada pertemuan pikiran-pikiran "penjahat" yang menjadi inti dari setiap konspirasi kriminal'. Kemudian disebutkan bahwa orang dewasa, kecuali jika dikecualikan, harus bersalah atas kejahatan percobaan atau persiapan kriminal, seperti yang diusulkan dalam Makalah Konsultasi yang sama (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini).

Keenam, dan sejalan dengan Undang-Undang Kejahatan Berat tahun 2007 sehubungan dengan membantu atau mendorong kejahatan (lihat bagian awal bab ini), harus ada pembelaan untuk bertindak secara wajar. Pembelaan ini akan membalikkan hukum di Yip Chiu-Cheung di atas, sehingga misalnya petugas yang menyamar tidak bersalah melakukan konspirasi. Yang terakhir, saat ini persekongkolan untuk melakukan pelanggaran ringan, seperti persekongkolan lainnya, hanya dapat diadili berdasarkan dakwaan; dan persetujuan Direktur Penuntut Umum diperlukan. Usulannya adalah bahwa konspirasi semacam itu harus dapat diadili secara ringkas; salah satu akibatnya adalah persetujuan DPP tidak diperlukan lagi.

Percobaan

Perkenalan

Upaya dimulai di Star Chamber pada awal abad ketujuh belas. Tujuannya adalah untuk mengkriminalisasi perilaku sebelum pelanggaran penuh terjadi. Percobaan adalah kejahatan berdasarkan undang-undang, Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981. Pasal 6(1) menghapuskan percobaan hukum umum. Secara umum dapat dihukum sama dengan pelanggaran penuh atau penuh: pasal 4(1). Seseorang dapat dihukum karena suatu percobaan

meskipun dia bersalah atas pelanggaran penuh: *Webley v Buxton* [1977] QB 481 (DC) sehubungan dengan persidangan ringkasan dan pasal 6(4) Undang-Undang Hukum Pidana 1967 sehubungan dengan persidangan pada dakwaan.

Apabila terdapat dua dakwaan dalam dakwaan, yaitu percobaan dan pelanggaran penuh, maka terdakwa dapat dihukum atas pelanggaran penuh tetapi dinyatakan tidak bersalah atas percobaan tersebut. Salah satu cara untuk menjelaskan aturan ini adalah dengan mengatakan bahwa upaya tersebut digabungkan dengan pelanggaran penuh ketika upaya tersebut berhasil. Namun, seseorang yang dinyatakan bersalah atas satu dakwaan percobaan tidak dapat dituntut dengan pelanggaran penuh: *Velasquez* [1996] 1 Cr App R 155.

Percobaan merupakan tindak pidana dimana prinsip-prinsip hukum pidana berbenturan. Pertama, orang-orang yang berbahaya harus ditahan. Seseorang yang menembak dan meleset sama bersalahnya dengan orang yang menembak dan memukul. Tindakannya menunjukkan niat kriminal. Hukum harus mencegah pelanggaran di masa depan dan juga menghukum pelanggaran di masa lalu. Keduanya berbahaya. Selain itu, batas antara keberhasilan dan kegagalan mungkin tipis. Dalam kedua kemungkinan tersebut, terdakwa harus dicegah. Kedua, masyarakat tidak boleh dihukum hanya karena berpikir untuk melakukan kejahatan. Menyeimbangkan prinsip-prinsip ini membuat polisi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka harus menahan diri sampai saat terdakwa sudah siap untuk melakukan pelanggaran, meskipun sudah pasti kejahatan akan dilakukan.

Laporan Komisi Hukum No. 102 Tahun 1980 tentang Percobaan dan Ketidakmungkinan Berkaitan dengan Percobaan, Persekongkolan dan Penghasutan, lihat di atas, mengatakan bahwa dasar pemikiran dari pelanggaran tersebut adalah untuk menghentikan orang melakukan pelanggaran sepenuhnya. Undang-undang menganut pandangan bahwa upaya tersebut merupakan suatu tindak pidana jika terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana secara penuh dan ia telah mewujudkan sebagian niat tersebut: menurut Undang-undang, ia harus melakukan 'lebih dari sekadar persiapan'. bertindak. Keteguhan tujuan dan perilaku antisosial juga diperhatikan.

Setiap kali suatu pelanggaran baru yang dapat didakwakan tercipta, maka kejahatan mencoba melakukan pelanggaran tersebut secara otomatis tercipta. Namun, karena percobaan melakukan pelanggaran ringkasan tidak merupakan suatu pelanggaran, maka mengubah kategori suatu pelanggaran menjadi pelanggaran ringkasan berarti bahwa upaya tersebut dibatalkan kecuali Parlemen secara tegas mengatur upaya tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 37 Undang-undang Peradilan Pidana tahun 1988, tidak ada lagi tindak pidana berupa percobaan penyerangan atau pengambilan kendaraan tanpa izin. Mungkin seharusnya ada. Undang-undang ini diatur dalam pasal 1 (4) Undang-Undang tahun 1981, yang juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mencoba membantu, bersekongkol, menasihati atau melakukan kejahatan.

Namun, seseorang dapat menjadi pihak kedua dalam upaya melakukan pelanggaran: *Dunnington* [1984] QB 472 (CA). Pasal 1(4) lebih lanjut menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mencoba berkonspirasi, membantu pelanggar, atau menyembunyikan informasi tentang pelanggaran yang dapat ditahan. (Percobaan bersekongkol setidaknya tidaknya tercakup

dalam tindak pidana penghasutan.) Rancangan KUHP, Law Com. 177, 1989, akan menghapuskan tanggung jawab atas percobaan konspirasi namun tetap mempertahankannya untuk dua pelanggaran lainnya.

Mungkin saja seseorang tidak dapat dihukum setidaknya atas beberapa bentuk percobaan pembantaian. Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, pasal 1(1), menetapkan bahwa mens rea percobaan adalah kesengajaan. Ujian dari pembunuhan berencana karena kelalaian besar adalah bahwa terdakwa tidak memenuhi standar perawatan tertentu dan dengan demikian membunuh korban; dia tidak harus menginginkan konsekuensi tertentu. Bagaimana seseorang bisa berniat lalai? Namun argumen ini tidak berlaku untuk pembunuhan berencana. Jika seseorang mencoba untuk membunuh dan akan mendapat pembelaan atas provokasi atau pengurangan tanggung jawab jika dia membunuh, tentu saja dia dapat dihukum karena percobaan pembunuhan jika korbannya tidak meninggal. Di Bruzas [1972] Crim LR 367 Pengadilan Mahkota tidak menerima adanya kejahatan semacam itu. Jika RUU KUHP disahkan, pasal 61 akan memperbolehkan tuntutan terkait berkurangnya tanggung jawab dan provokasi. Diperkirakan bahwa seseorang tidak dapat mencoba melakukan pelanggaran penuh. Jika hal tersebut merupakan kejahatan, maka terdakwa akan bersalah sebelum ia mencapai tahap yang lebih dari sekedar tindakan persiapan, yang disyaratkan oleh Undang-undang tahun 1981.

Apabila Parlemen mengubah undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran substantif, luas upaya untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat terpengaruh. Sebuah ilustrasi yang baik adalah kejahatan penipuan baru yang bertentangan dengan Fraud Act 2006. Jika terdakwa mengirim email kepada seseorang yang tanpa sepengetahuannya sudah meninggal, meminta uang, maka sebelum UU 2006 sudah ada pelanggaran mencoba mendapatkan uang. properti (uang) dengan penipuan. Di sini, perubahan undang-undang substantif telah mengubah delik dari delik percobaan (percobaan penipuan) menjadi delik penuh (penipuan, bukan sekadar percobaan penipuan). Lihat juga pembelaan sebelumnya atas ketidakmungkinan yang dibahas di bawah.

Undang-Undang Percobaan Kriminal tahun 1981

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, percobaan kriminal atau tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP dan Pasal 54 KUHP.

Berikut adalah penjelasan mengenai kedua pasal tersebut:

Pasal 53 KUHP:

- Ayat (1):

"Percobaan melakukan kejahatan yang disertai dengan niat melakukan kejahatan itu, dianggap ada, jika permulaan pelaksanaannya telah dimulai, tetapi perbuatan itu tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri."

- Maksud dari ayat ini adalah tindak pidana percobaan terjadi ketika seseorang sudah memulai tindak pidana dengan niat untuk melakukannya, namun tindakannya tidak selesai karena suatu hal di luar kehendaknya. Contohnya, seseorang yang mencoba merampok sebuah toko, tetapi gagal karena alarm berbunyi atau karena campur tangan pihak ketiga.

- Ayat (2):

"Percobaan dapat dihukum hanya jika ada ketentuan dalam undang-undang yang menetapkan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan."

- Ini berarti percobaan tindak pidana hanya dapat dihukum jika perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana menurut KUHP atau undang-undang lain yang berlaku.

Pasal 54 KUHP:

- Pasal 54 KUHP menetapkan sanksi bagi tindak pidana percobaan.

"Bagi percobaan melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana tidak lebih dari hukuman maksimum pidana yang ditentukan oleh undang-undang terhadap kejahatan yang hendak dilakukan itu, dikurangi sepertiga."

- Artinya, sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana percobaan tidak boleh melebihi dua pertiga dari hukuman maksimum yang ditetapkan untuk tindak pidana yang sedang dicoba. Misalnya, jika hukuman maksimum untuk tindak pidana tersebut adalah 9 tahun, pelaku percobaan pidana hanya dapat dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun.

Jadi, KUHP Indonesia mengatur tindak pidana percobaan sebagai tindakan seseorang yang telah memulai pelaksanaan tindak pidana, namun tidak menyelesaikannya karena faktor lain selain kehendak pelakunya. Sanksi yang diberikan untuk tindak pidana percobaan adalah lebih ringan daripada hukuman yang berlaku untuk tindak pidana tersebut jika dilakukan secara penuh.

Parlemen secara substansial menerapkan rekomendasi-rekomendasi Komisi Hukum dalam Undang-Undang tahun 1981, perbedaan utamanya adalah bahwa tidak ada kejahatan dalam mencoba melakukan pelanggaran ringan kecuali Parlemen menyatakan sebaliknya. Ketentuan pokok Undang-undang tersebut adalah:

- (a) definisi mens rea;
- (b)) penetapan pengujian actus reus yang baru;
- (c) penghapusan pembelaan atas ketidakmungkinan, membalikkan *Haughton v Smith* [1975] AC 476 (HL);
- (d) penghapusan 'sus' (lihat di bawah) dan penciptaan pelanggaran terhadap kendaraan;
- (e) penghapusan delik pengadaan bahan untuk kejahatan, meskipun delik persiapan lainnya tetap ada, seperti yang ditemukan dalam pasal 25 Undang-Undang Pencurian tahun 1968 (lihat Bab 17) dan pasal 3 Undang-Undang Pengrusakan Pidana tahun 1971 (lihat Bab 18).

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki beberapa cacat hukum dan untuk mengkodifikasikan hukum sebagai persiapan bagi kodifikasi hukum pidana secara umum.

Pengertian Mens Rea

Pasal 1(1) Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981 menyatakan bahwa unsur mental dalam percobaan adalah 'niat'. Tidak ada definisi mengenai istilah ini dalam UU. Pemerintah menolak klausul yang menyatakan bahwa kecerobohan terhadap keadaan sudah

cukup jika hal tersebut cukup untuk melakukan pelanggaran penuh. Dilihat dari sejarah perundang-undangan, kita mungkin mengira bahwa maksud berarti maksud dalam kaitannya dengan setiap unsur *actus reus*. Dalam Mohan [1976] QB 1, Pengadilan Tinggi mendefinisikan niat dalam upaya sebagai 'keputusan untuk mewujudkan dilakukannya pelanggaran tersebut tidak peduli apakah terdakwa menginginkan konsekuensi tersebut atau tidak'. Bagian kedua dimaksudkan untuk menutupi maksud miring, seperti memasang bom di pesawat untuk mengklaim asuransi pengangkutan tanpa menginginkan kematian penumpang dan awak kapal menurut Stuart-Smith J dalam Pearman (1985) 80 Cr App R 259. Oleh karena itu, terdakwa bersalah apabila niatnya tidak dapat tercapai tanpa terlebih dahulu menimbulkan akibat lain. Dengan menggunakan contoh dari Pearman, tidak akan sulit untuk menemukan bahwa terdakwa bermaksud melukai seorang polisi jika dia melaju lurus ke arahnya.

Pasal 6 Undang-undang tahun 1981 menghapuskan *common law* mengenai percobaan tetapi pasal 1(1) masih memerlukan 'niat' dan dalam Pearman Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa definisi dalam Mohan diterapkan pada Undang-undang tersebut. Belum ada kasus yang membahas dampak Woollin [1999] AC 82 (HL) terhadap upaya percobaan. Lihat Bab 3 untuk penjelasan tentang hukum umum niat. Woollin secara tegas dibatasi oleh Lords untuk melakukan pembunuhan. Jika hal ini berlaku secara umum di seluruh hukum pidana, perkiraan akan suatu akibat yang pasti hanya merupakan bukti adanya kesengajaan. Namun, upaya mungkin terbatas pada niat langsung: bagaimana seseorang dapat mencoba sesuatu tanpa mencapai hasil tersebut sebagai tujuannya?

Persyaratan niat terus berlaku sehubungan dengan konsekuensi perilaku. Terdakwa tidak bersalah karena mencoba menyebabkan cedera tubuh yang parah dengan mengemudi secara sembrono sehingga ia memperkirakan kemungkinan terjadinya cedera. Berdasarkan prinsip-prinsip biasa, semakin tinggi tingkat tinjauan ke masa depan, semakin besar kemungkinan bahwa terdakwa memang menginginkan akibat yang terjadi. Namun, sehubungan dengan keadaan, persyaratan niat telah dipermudah. Dalam Pigg [1982] 1 WLR 762, sebuah kasus yang diputuskan berdasarkan *common law*, Pengadilan Banding, tampaknya tanpa mempertimbangkan permasalahan tersebut, menyatakan bahwa kecerobohan terhadap keadaan sudah cukup jika hal tersebut cukup untuk melakukan pelanggaran substantif.

Oleh karena itu, kecerobohan dalam memberikan persetujuan perempuan untuk melakukan pemerkosaan sudah cukup untuk melakukan percobaan pemerkosaan. (Hukum pemerkosaan kemudian diubah melalui Sexual Offenses Act 2003 namun prinsipnya tetap berlaku.) Dalam Breckenridge (1984) 79 Cr App R 244, pengadilan 'tidak mengkritik' keputusan hakim bahwa kecerobohan dalam memberikan persetujuan sudah cukup untuk pemerkosaan. Dalam Millard [1987] Crim LR 393, Pengadilan Tinggi melihat masalah percobaan pemerkosaan namun tidak menyelesaikannya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa mengatakan bahwa upaya kejahatan dapat dilakukan secara sembarangan adalah salah. Dalam O'Toole [1987] Crim LR 759, Pengadilan Banding menegaskan bahwa kecerobohan dalam melakukan tindak pidana tidak cukup untuk membuat upaya merusak properti dengan api menjadi ceroboh dalam menentukan apakah nyawa terancam. Dia telah

mencoba membakar sebuah pub yang di dalamnya terdapat seorang pelayan bar. Pengadilan tampaknya menarik garis batas antara konsekuensi (cukup kecerobohan) dan keadaan (cukup kecerobohan), meskipun pasal 1(1) Undang-undang tidak diungkapkan demikian; itu hanya berbicara tentang 'niat'.

Otoritas utama sekarang adalah Khan [1990] 1 WLR 815 (CA). Para terdakwa mencoba namun gagal melakukan hubungan seksual dengan seorang gadis berusia 16 tahun, yang mereka temui di diskotik siang hari. Russell LJ berpendapat demikian. Pemerksaan yang kemudian menjadi mens rea, yang merupakan pelanggaran penuh, adalah niat untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, mengetahui bahwa perempuan tersebut tidak menyetujuinya atau bertindak gegabah apakah ia menyetujuinya. (Saat ini laki-laki maupun perempuan bisa diperkosa.) Hal yang sama juga berlaku pada percobaan pemerksaan. Perbedaan antara pemerksaan dan percobaan pemerksaan terletak pada *actus reus*: dalam percobaan tersebut, tidak terjadi hubungan seksual.

Oleh karena itu, perbedaannya berkaitan dengan materi fisik, tetapi keadaan batinnya sama. 'Kata-kata "dengan maksud untuk melakukan pelanggaran" dalam pasal 1 Undang-Undang tahun 1981 berarti ketika diterapkan pada pemerksaan, "dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan dalam keadaan dimana dia tidak menyetujuinya" dan terdakwa mengetahui atau tidak peduli tentang ketidakhadirannya. Satu-satunya "niat" pelaku pemerksa adalah melakukan hubungan seksual.' Oleh karena itu, terdakwa bersalah melakukan percobaan pemerksaan, meskipun ia tidak mengetahui bahwa korban tidak menyetujuinya. Dia bersalah atas percobaan pemerksaan jika dia ceroboh dalam memberikan persetujuan. Namun, menurut Millard, seseorang tidak bersalah melakukan percobaan pengrusakan jika ia ceroboh mengenai siapa pemilik properti yang dirusak tersebut. Kepemilikan, suatu keadaan, bukanlah suatu unsur yang dapat membuat seseorang bertindak gegabah. Perbedaan antara ceroboh dalam hal kepemilikan (tidak bersalah) dan ceroboh dalam memberikan izin (bersalah) tidak mudah diterima.

Khan menyatakan bahwa kecerobohan terhadap keadaan (seperti persetujuan dalam pemerksaan) sudah cukup untuk menghukum upaya tersebut tetapi diperlukan niat untuk konsekuensinya (niat untuk melakukan hubungan seksual dalam pemerksaan). Aturannya tetap berlaku bahwa niat untuk mengambil konsekuensi diperlukan dalam upaya tersebut meskipun kecerobohan dalam mengambil konsekuensi sudah cukup untuk melakukan pelanggaran penuh. Khan mungkin berlaku untuk semua kejahatan 'situasi', meskipun pada kenyataannya ia merupakan otoritas dalam upaya melakukan kejahatan pemerksaan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang yang telah dicabut. Agaknya hukum tersebut berlaku pada upaya melakukan pelanggaran berat.

Lebar Khan tidak pasti. Pengadilan Banding mengatakan: 'alasan kami tidak dapat diterapkan pada semua pelanggaran dan upaya. Dimana misalnya seperti pada pembakaran yang sembrono, tidak ada keadaan pikiran selain kecerobohan yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, tidak boleh ada upaya untuk melakukannya.' Dalam rancangan pertama KUHP, Law Com. 143, 1985, para penyusun akademis berpendapat bahwa perbedaan antara keadaan dan perilaku tidak dapat diterapkan dan bahkan menggunakan pemerksaan sebagai

contohnya. Setelah berkonsultasi, rumusan mereka tentang unsur mental dalam percobaan pemerkosaan dikritik karena terlalu sempit.

Rancangan KUHP saat ini, Law Com. Nomor 177 Tahun 1989 sebelum Khan tetap konsisten dengan putusan tersebut, padahal tim rancangan KUHP dan Komisi Hukum sendiri dalam Laporan Nomor 102 tentang Percobaan Tahun 1980 ayat 2.18 yang menjadi dasar Undang-undang tersebut, sebelumnya telah menolaknya. Memang benar, jika Pengadilan Banding di Khan telah memeriksa Laporan tersebut (dan berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini yang dinyatakan dalam *Pepper v Hart* [1993] AC 593, Pengadilan Banding berhak untuk melakukan hal tersebut), maka Pengadilan Banding akan mengetahui bahwa Laporan tersebut salah. Klausul 49(2) versi 1989 menetapkan bahwa untuk semua upaya:

Niat melakukan suatu delik adalah suatu kesengajaan yang berkenaan dengan seluruh unsur delik kecuali unsur kesalahannya, kecuali kecerobohan terhadap keadaan saja sudah cukup dan hal itu sudah cukup untuk delik itu sendiri. Komisi Hukum tidak menentukan batas antara keadaan dan akibat yang harus diserahkan kepada pengadilan. Komisi Hukum berpendapat bahwa dalam pemerkosaan (seperti yang didefinisikan pada saat itu) pembedaannya mudah dilakukan karena tidak adanya persetujuan korban merupakan suatu keadaan. Namun bagaimana dengan persyaratan sebelumnya bahwa korbannya adalah perempuan? Hal ini terlihat seperti sebuah keadaan, namun Pengadilan Banding di Millard mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi. Hakim diperkirakan memerlukan pedoman jika RUU KUHP diundangkan.

Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kecil lainnya, Khan tidak berlaku untuk konspirasi menurut undang-undang karena pasal 1(2) Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977 mensyaratkan kesengajaan atau pengetahuan tentang 'fakta atau keadaan'. Khan mungkin berlaku untuk konspirasi common law. Berdasarkan rancangan KUHP, persekongkolan akan disejajarkan dengan percobaan: pasal 48(2) berlaku untuk persekongkolan dan pasal 49(2) dilakukan untuk percobaan. Agaknya Khan menerapkan hasutan.

Graham Virgo menulis dalam 'Upaya sembrono – pemerkosaan dan keadaan' [1990] CLJ 390 bahwa Khan 'dapat dibenarkan karena "niat" tidak dapat dikaitkan dengan keadaan; apakah seorang wanita menyetujui atau tidak, tidak dapat disengaja, tetapi dapat diketahui atau diyakini. Tidak ada ketentuan mengenai keadaan yang dibuat dalam Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, sehingga memungkinkan interpretasi Pengadilan Banding dalam hal ini.' Di sisi lain, undang-undang tersebut menyatakan 'niat' bukan 'niat mengenai konsekuensi dan kecerobohan terhadap keadaan'. Tentu saja Parlemen bisa saja menyatakan pendapatnya dengan lebih jelas, namun mereka tidak melakukannya. Lebih jauh lagi, istilah 'percobaan' dapat berarti kesengajaan: bagaimana mungkin terdakwa berupaya melakukan sesuatu kecuali seseorang memang berniat melakukannya? Begitulah pandangan Edmund-Davies LJ, sebagaimana dirinya saat itu, dalam *Easom* [1971] 2 QB 315 (CA). Bahkan ada yang mungkin berargumentasi bahwa, dengan menerima keadaan/konsekuensi yang terpisah, konsekuensi dalam pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan seorang perempuan yang tidak memberikan persetujuannya. Semua elemen adalah

konsekuensi; oleh karena itu, niat diperlukan dalam keseluruhannya: oleh karena itu, kecerobohan dalam memberikan persetujuan tidaklah cukup, dan Khan salah. Apa pun yang dikatakan tentang konstruksi undang-undang, pada prinsipnya akan menjadi aneh untuk menghukum seseorang yang baru saja melakukan penetrasi, ceroboh dalam memberikan persetujuan korban, dan tidak menghukum terdakwa percobaan pemerkosaan dalam situasi serupa di mana ia dihentikan sesaat sebelum melakukan penetrasi. . Untuk kritik terhadap dikotomi keadaan/konsekuensi dan usulan solusi, lihat Glanville Williams 'Intents in the alternatif' [1991] CLJ 120.

Khan telah disetujui dalam Referensi Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1992) [1994] 2 Semua ER 121 (CA). Schiemann J yang berbicara mewakili pengadilan mengatakan dalam keputusannya bahwa Khan sesuai dengan kebijakan dan akal sehat dan tidak melakukan kekerasan terhadap kata-kata undang-undang. Khan tidak terbatas pada pemerkosaan. Dia memperluas Khan dari kecerobohan dalam hal keadaan menjadi kecerobohan yang membahayakan nyawa dalam kerusakan kriminal yang parah. Elemen ini, disarankan, bukanlah konsekuensi atau keadaan, melainkan bagian lebih lanjut dari elemen mental. Dengan demikian unsur kejiwaan dalam delik percobaan pengrusakan berat paling rendah adalah bermaksud menimbulkan kerugian pidana, gegabah apakah akan membahayakan jiwa akibat perbuatan itu, keadaan pikiran yang berdasarkan fakta perkara meliputi pelemparan. sebuah bom molotov di properti pelapor tetapi hilang, karena ceroboh hingga membahayakan nyawa. Dalam kasus ini kerusakan tidak ada, di Khan hubungan seksual tidak terjadi.

Sehubungan dengan unsur yang hilang tersebut, niat diperlukan, namun sehubungan dengan unsur-unsur lain dari upaya tersebut, keadaan pikiran yang sama yang cukup untuk kejahatan substantif juga cukup untuk upaya tersebut. Berdasarkan fakta kasus, yang hilang adalah kerusakan. Oleh karena itu, untuk dapat bersalah atas percobaan tersebut, terdakwa harus bermaksud menimbulkan kerugian. Namun, ada unsur membahayakan nyawa. Oleh karena itu, cukuplah terdakwa ceroboh dalam hal ini. Oleh karena itu, mens rea dari upaya tersebut bertujuan untuk menimbulkan kerugian pidana, dan bersikap ceroboh mengenai apakah nyawa akan terancam. Apabila terdakwa tidak bermaksud menimbulkan kerugian pidana maka ia tidak bersalah atas percobaan tersebut meskipun ia ceroboh sehingga membahayakan nyawa. Kritik terhadap diktum ini dapat berupa tindak pidana percobaan hubungan seksual dengan anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Tentu saja terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana ini jika terdakwa yakin korban berusia di atas 16 tahun. Kejahatan penuhnya sangat ketat pada usia gadis itu. Tidak mungkin upayanya juga ketat.

Jika ya, kita mungkin mengira pengadilan (dan Parlemen) akan menyatakan hal yang sama dalam analisis mereka mengenai upaya tersebut. Namun demikian, unsur yang hilang akan menjadikan terdakwa bersalah atas upaya tersebut. Permasalahan lain dalam undang-undang yang berlaku saat ini adalah: untuk tindak pidana percobaan pengrusakan, harus dibuktikan dalam delik pokok bahwa terdakwa bermaksud merusak harta benda milik orang lain; dalam percobaan perkosaan, penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa bermaksud melakukan hubungan seksual namun cukup jika terdakwa ceroboh dalam memberikan

persetujuan korban. Tampaknya aneh bahwa ‘milik orang lain’ merupakan inti dari kejahatan percobaan pengrusakan (dasar) namun ‘tanpa persetujuan korban’ tidak termasuk dalam kejahatan percobaan pemerkosaan, terutama ketika kedua elemen tersebut merupakan keadaan dari kejahatan tersebut. Proposisi ini lebih disukai oleh Profesor P. Dobson dalam komentarnya mengenai Kasus Referensi (1994) 11 Student LR 17 sebagai berikut: ‘tanyakan “jika terdakwa berhasil melaksanakan niatnya, apakah pelanggaran penuh telah dilakukan?” Jika jawabannya ya, maka terdakwa mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan percobaan tersebut.’

Salah satu persoalan yang tidak dibahas dalam Acuan Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1992) adalah apakah jenis kecerobohan tersebut bersifat subjektif atau obyektif. Dari ungkapan penghakiman, kecerobohan obyektif mungkin dimaksudkan. Pengadilan mengatakan bahwa setelah Kerajaan membuktikan niatnya untuk menyebabkan kerusakan pidana, satu-satunya elemen mental lainnya adalah kondisi pikiran yang tersisa yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran pembakaran yang parah, yaitu kecerobohan obyektif. Akibatnya, seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan percobaan pengrusakan berat apabila ia menyalakan api di sebuah rumah, berniat melakukan hal tersebut, dan tidak menyadari bahwa ada orang di dalam rumah tersebut, asalkan terdapat risiko yang nyata dan serius yang dapat membahayakan kehidupan siapa pun yang sebenarnya ada di rumah itu. Pengadilan tampaknya tidak mempertimbangkan masalah ini. Bagaimanapun juga, penghapusan kecerobohan Caldwell dalam tindak pidana pengrusakan dalam G [2004] 1 AC 1034 sekarang berarti bahwa kecerobohan subjektif adalah ujian yang tepat. Perlu diketahui bahwa pengertian kesengajaan dalam Referensi Khan dan Jaksa Agung (No. 3 Tahun 1992) hanya sebatas percobaan dan tidak mencakup seluruh hukum pidana. Untuk definisi niat di tempat lain, lihat Bab 3.

Dua hal lebih lanjut yang berkaitan dengan niat dalam s 1(1)

Dalam percobaan pembunuhan, terdakwa harus berniat membunuh. Tidaklah cukup jika ia hanya bermaksud menyakiti tubuh secara pedih. Oleh karena itu, kejahatan yang lebih serius, yaitu pembunuhan, memiliki unsur mental yang lebih luas dibandingkan kejahatan yang lebih ringan, yaitu percobaan pembunuhan. Dalam Whybrow (1951) 35 Cr App R 141, terdakwa memasang kabel di bak mandi untuk membunuh istrinya. Di Walker dan Hayles, di atas, korban dijatuhkan oleh terdakwa dari jendela lantai tiga. Dalam kedua kasus tersebut, Pengadilan Banding Pidana dan Pengadilan Tinggi masing-masing memutuskan bahwa niat untuk melakukan penganiayaan fisik yang menyedihkan tidaklah cukup.

Kasus Walker dan Hayles, yang telah dibahas di Bab 3, menunjukkan bagaimana pertanyaan sederhana bisa menjadi sulit. Ketika terdakwa melakukan apa yang mereka lakukan, apakah mereka berniat membunuh? Hakim pengadilan mungkin telah mengarahkan juri bahwa terdakwa bersalah jika mereka bermaksud membunuh; jika terjadi kesulitan, juri mungkin akan diberi instruksi sesuai dengan Mohan bahwa terdakwa bersalah jika mereka memutuskan untuk membunuh atau memutuskan untuk membunuh. Kasus ini merupakan kasus yang disengaja atau tidak sama sekali. Tidak ada masalah niat miring. Namun, hakim mengarahkan juri untuk meramalkan kematian sebagai kemungkinan yang tinggi. Pengadilan

Banding lebih memilih istilah ‘kepastian virtual’ dibandingkan dengan kemungkinan kematian yang tinggi namun tidak membatalkan hukuman tersebut dengan alasan bahwa kemungkinan kematian yang tinggi sudah cukup. Berdasarkan fakta, kemungkinan atau kepastian kematian sebenarnya tidak relevan jika terdakwa (secara langsung) berniat membunuh. Hanya ketika ada keraguan mengenai niat terdakwa untuk melakukan hal tersebut, kita perlu melihat kepastian virtual atau tingkat kemungkinan yang tinggi sebagai bukti. Dalam situasi seperti ini, juri dapat menyimpulkan niat membunuh dari perkiraan awal terdakwa mengenai kematian sebagai konsekuensi yang pasti.

Bagian 1(3) dan maksud

Pasal 1(3) UU tahun 1981 mengatur:

Dalam kasus apa pun:

- (a) selain dari ayat ini, niat seseorang tidak dianggap sebagai niat untuk melakukan pelanggaran; Tetapi
- (b) jika fakta-fakta dalam kasus tersebut sesuai dengan keyakinannya bahwa niatnya akan dianggap demikian, maka menurut maksud ayat (1) di atas, ia dianggap mempunyai kesengajaan untuk melakukan tindak pidana itu.

Arti 1(3) sepertinya adalah ini. Aturan hukum umum mengenai ketidakmungkinan upaya ditetapkan oleh House of Lords di *Haughton v Smith*, di atas. Kasus tersebut memutuskan, antara lain, bahwa terdakwa tidak bersalah atas suatu percobaan jika dia telah melakukan segala sesuatu yang dia ingin lakukan tetapi bertentangan dengan keyakinannya, tindakannya tidak merupakan suatu kejahatan. Dalam kasus itu sendiri, terdakwa telah melakukan semua yang ingin ia lakukan sehubungan dengan harta benda tersebut, namun ia tidak mengetahui bahwa secara hukum barang tersebut tidak lagi dicuri. Bertentangan dengan keyakinannya, apa yang dilakukannya bukan merupakan pelanggaran penanganan barang curian. Berdasarkan pasal 1(3) terdakwa dianggap mempunyai niat yang diperlukan untuk menangani barang curian berdasarkan fakta-fakta yang diyakininya ada. Dia bermaksud menangani barang-barang yang dicuri; dia yakin dia sedang menangani barang-barang yang dicuri; menerapkan s 1 (3) mens rea dari upaya penanganan terpenuhi.

Pembentukan tes baru untuk actus reus

Actus reus didefinisikan dalam pasal 1(1) UU tahun 1981 sebagai melakukan ‘suatu tindakan yang lebih dari sekedar persiapan untuk melakukan pelanggaran’. Tidak ada persyaratan seperti itu dalam konspirasi. ‘Suatu tindakan’ itu luas. Tindakan tersebut tidak harus berbahaya. Mens rea-lah yang mengubah suatu perbuatan menjadi suatu kejahatan. Aku mungkin mengendarai mobilku ke arahmu. Hanya jika para juri mengetahui bahwa saya bermaksud menjatuhkan Anda, barulah mereka dapat memvonis saya melakukan pelanggaran. Berdasarkan pasal 4(3), pertanyaan mengenai apakah terdakwa melakukan suatu percobaan atau tidak, merupakan tanggung jawab juri, dengan ketentuan bahwa terdapat cukup bukti dalam undang-undang untuk mendukung temuan tersebut: yaitu, hakim dapat memutuskan bahwa tindakan tersebut mungkin merupakan suatu percobaan tetapi untuk tujuan tertentu. juri untuk menentukan bahwa memang demikian. Hakim tidak dapat memberikan instruksi kepada juri bahwa suatu situasi merupakan tindakan yang lebih dari

sekedar tindakan persiapan. Namun, ia dapat mengatakan kepada juri bahwa tidak ada bukti bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa lebih dari sekedar tindakan persiapan, dan permasalahan tersebut dapat ditarik dari juri: Campbell (1991) 93 Cr App R 350.

On faktanya terdakwa tidak bersalah melakukan percobaan perampokan meskipun ia telah mengintai kantor pos yang hendak dirampoknya dan ia memiliki senjata tiruan (dan ia dihukum karena memiliki senjata api tiruan) dan surat ancaman. Dia ditangkap di dekat pintu kantor. Dia mengatakan dia akan kembali ke sepeda motornya, setelah memutuskan untuk tidak merampok. Agaknya dia tidak akan bersalah dalam pendekatan ini sampai dia melewati ambang pintu kantor pos pembantu – bukan keputusan yang membantu dalam pencegahan kejahatan. Jika fakta-fakta tersebut diserahkan kepada juri, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan hukuman, dan mungkin dia bisa saja dihukum atas percobaan kejahatan lain, yaitu percobaan perampokan, karena dia telah melakukan lebih dari sekedar tindakan persiapan dalam perjalanannya memasuki gedung. sebagai pelanggar dengan niat mencuri. Pengadilan Banding mengatakan bahwa kasus-kasus harus diputuskan berdasarkan pendekatan kasus per kasus, dan hal ini tidak membantu juri. Kasus sebaliknya adalah Griffin [1993] Crim LR 515. Seorang ibu bersalah karena mencoba menculik anak-anaknya dan membawa mereka keluar dari Inggris ketika dia membeli tiket feri ke Irlandia dan memberi tahu guru anak-anaknya bahwa dia akan membawa mereka ke dokter gigi.

Dia belum mengurus anak-anak, apalagi berangkat ke pelabuhan. Dia dinyatakan bersalah, meskipun faktanya dia sama sekali tidak mengeluarkan mereka dari yurisdiksinya.

Alasan di balik kasus-kasus seperti Campbell adalah bahwa terdakwa tidak bersalah sampai dia berhasil melewati hambatan psikologis dalam melakukan pelanggaran. Terdakwa berada dalam jarak yang sangat dekat untuk melakukan pelanggaran. Tidakkah cukup bahwa terdakwa hanya memikirkan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Batasannya saat ini adalah antara kegiatan persiapan dan lain-lain.

Dalam Qadir, yang tidak dilaporkan, pada tanggal 25 Juli 1997, Pengadilan Tinggi mengatakan, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa upaya *actus reus* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang berupaya untuk mengarahkan 'jalan tengah [t]usaha tersebut dimulai pada saat terdakwa memulai kejahatannya, dan bukan mengambil langkah-langkah yang dianggap hanya sebagai persiapan'. Potter LJ melanjutkan: 'Apakah suatu tindakan melintasi ambang batas antara persiapan dan mulai dilakukannya kejahatan akan selalu bergantung pada pemeriksaan ruang lingkup atau substansi kejahatan yang dituju.' Dia memberikan beberapa contoh: 'dalam sebuah kasus [pembunuhan], melukai atau menyebabkan [sic] luka fisik yang nyata, kemungkinan besar tindakan apa pun mengarah pada komisi kejahatan tersebut tetapi jauh sebelum kejahatan itu terjadi pada waktunya akan menjadi suatu tindakan yang hanya sekedar persiapan. Dalam kasus penipuan, karena *actus reus* kejahatan itu sendiri dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka saat dimulainya kejahatan tersebut mungkin sangat jauh dari titik keberhasilan yang diharapkan.'

Undang-undang yang berlaku saat ini tidak banyak mendorong pencegahan kejahatan, karena persiapan untuk melakukan pelanggaran bukanlah upaya, meskipun ada kemungkinan bahwa kejahatan lain telah dilakukan (termasuk persekongkolan jika ada dua pihak atau

lebih). Di Sidaway, tidak dilaporkan, 11 Juni 1993, Pengadilan Banding menyatakan bahwa membuat bom tiruan dan membawanya ke London dalam perjalanan ke Ramsgate tidak berarti mencoba melakukan tipuan bom di Ramsgate. Dalam Gullefer [1990] 3 All ER 882, terdakwa mendukung seekor anjing greyhound yang akan kalah. Dia melompat ke lintasan untuk mencoba mengalihkan perhatian anjing-anjing itu sehingga pengurusnya menyatakan 'tidak ada balapan' dan bandar taruhan akan mengembalikan uang taruhannya. Dia gagal. Pengadilan Banding memutuskan bahwa dia tidak bersalah atas percobaan tersebut. Tidak ada bukti untuk dibawa ke juri. Tindakannya adalah persiapan. Posisinya akan berbeda jika pramugara menyatakan 'tidak ada balapan'. Dalam kemungkinan itu akan ada bukti untuk juri. Namun juri mungkin berpendapat bahwa terdakwa bersalah hanya ketika dia telah menunjukkan slip taruhannya, atau mungkin ketika dia ikut dalam antrian. Pengadilan mengatakan bahwa terdakwa bersalah hanya jika dia telah melakukan 'kejahatan yang wajar'. Berdasarkan fakta, juri mungkin mempunyai pandangan berbeda mengenai kapan terdakwa melakukan hal tersebut. Lagi pula, dia tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Para pengurus harus menyatakan perlombaan batal. Pengadilan Banding di Tosti [1997] Crim LR 746 menyatakan bahwa kedua terdakwa bersalah atas percobaan perampokan gudang ketika mereka membawa peralatan oxyacetelene ke tempat kejadian, menyembunyikannya di pagar dan memeriksa gembok karena 'terbukti' langkah pertama dalam melakukan pelanggaran, dan bukan sekedar langkah persiapan.

Gullefer diterapkan dalam Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1992) [1993] 1 WLR 274 (CA). Terdakwa bersalah atas percobaan pemerkosaan padahal dia sendiri yang melakukan pemerkosaan. 'Bukti dari kesusahan yang dialami remaja putri, kondisi pakaiannya, dan posisi di mana ia terlihat, serta tindakan tergugat yang menyeretnya menaiki tangga, menurunkan celananya dan mengganggu bagian pribadinya membiarkan juri menyimpulkan bahwa tergugat mempunyai niat yang diperlukan dan telah melakukan tindakan yang lebih dari sekedar persiapan.' Tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah mencoba melakukan penetrasi ke dalam vagina. Namun, karena pemerkosaan memerlukan penetrasi dan penis terdakwa dalam keadaan lembek, mungkin aneh jika ia dihukum karena percobaan pemerkosaan. Kasus ini tampaknya tidak dapat dibedakan dengan kasus Campbell, namun di sana terdakwa dibebaskan. Demikian pula di Patnaik, tidak dilaporkan, 5 November 2000 (CA), terdakwa telah mengancam korban, berusaha mencium korban dan mengangganginya, namun tidak melepaskan pakaiannya atau menyentuh korban secara intim.

Diputuskan bahwa ada cukup bukti percobaan pemerkosaan untuk diserahkan kepada juri. Dalam kritik mungkin dipertanyakan apakah terdakwa telah melakukan kejahatan pemerkosaan. Ia telah menyelesaikan beberapa pelanggaran dari tindak pidana penyerangan tidak senonoh yang ada pada saat itu, namun faktanya masih jauh dari meyakinkan seperti Referensi Jaksa Agung (No. 1 Tahun 1992). Dagnall [2003] EWCA Crim 2441 serupa sejauh dapat dilihat dari fakta yang diberikan. Terdakwa mengikuti korban, memeluk korban, mengatakan bahwa ia ingin melakukan hubungan seksual, mengatakan bahwa tidak seorang pun akan mendengarnya jika ia membawanya ke jalan yang gelap, menarik rambutnya ke

belakang, dan memeluknya. -lock, menutup mulutnya dan menyeretnya ke halte bus. Pengadilan menolak argumennya bahwa karena dia tidak menyentuhnya secara seksual, tindakannya tidak lebih dari sekedar persiapan.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, dalam banyak kasus, intervensi tampaknya dilakukan terlambat demi kepentingan pencegahan kejahatan. Misalnya, 'menyelubungi sendi', seperti dalam kasus Campbell, terlalu dini dalam rangkaian peristiwa yang mengarah pada kejahatan dan hakim menarik permasalahan tersebut dari juri. Dalam Geddes [1996] Crim LR 894 terdakwa bermaksud menculik seorang anak laki-laki dari sebuah sekolah. Dia melarikan diri ketika dia ditemukan di toilet anak laki-laki, dan tentu saja dia adalah seorang pelanggar. Di ranselnya ada pisau besar, selotip, dan tali. Pengadilan Banding menyatakan ('dengan sangat tidak nyaman') bahwa ia masih dalam tahap persiapan dan oleh karena itu tidak bersalah atas percobaan pemenjaraan palsu. Agaknya dia akan bersalah jika dia melakukan kontak dengan bocah itu. Pengadilan merasa tidak nyaman dengan keputusannya, namun tentu saja para orang tua merasa jauh lebih tidak nyaman. Keputusan tersebut tidak mendorong terhambatnya perilaku orang-orang yang berbahaya. Pembaca mungkin juga berpikir bahwa terdakwa layak menerima hukuman. (Karena kasus ini, Parlemen telah menciptakan pelanggaran dengan maksud untuk melakukan pelanggaran seksual saat berada di tempat di mana ia adalah seorang pelanggar, bertentangan dengan pasal 63 Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003, dan terdakwa akan bersalah atas pelanggaran ini)

Serupa adalah Nash [1999] Crim LR 308 (CA). Terdakwa mengajukan banding atas hukuman percobaan untuk melakukan tindakan yang sangat tidak senonoh. Dia telah menulis tiga surat yang ditujukan kepada 'paper boy'. Dua yang pertama berisi ajakan untuk saling melakukan masturbasi atau seks oral atau keduanya. Yang ketiga menawarkan pekerjaan di perusahaan keamanan. Terhadap surat ketiga ini, terdakwa dianggap tidak melampaui tahap persiapan belaka. Geddes disetujui. Kasus terbaru adalah Bowles & Bowles [2004] EWCA Crim 1608. Kedua terdakwa merencanakan untuk mendapatkan uang seorang wanita tua setelah kematiannya. Mereka telah menerima sejumlah besar uang darinya. Mereka menyusun surat wasiat dan wasiat terakhirnya, yang menyebutkan mereka sebagai penerima manfaat. Surat wasiat yang belum dilaksanakan itu kemudian dimasukkan ke dalam laci samping tempat tidur korban dan dibiarkan selama beberapa bulan. Pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak bersalah karena mencoba membuat surat wasiat palsu, karena mereka hanya melakukan tindakan persiapan.

Glanville Williams 'Salah mengubah hukum percobaan' [1991] Crim LR 416 berharap agar hukum menjadi hakim yang akan memutuskan ketika persiapan menjadi suatu percobaan. 'Yang hilang dari para hakim adalah kekuasaan mereka untuk melindungi masyarakat dengan mengatakan secara tegas kepada juri bahwa tindakan terdakwa, jika terbukti, . . . memang merupakan upaya' (pada 425). Tidak ada yang menghalangi dua juri untuk mengambil kesimpulan berbeda atas fakta yang sama. Artinya, juri dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal non-hukum. Bahkan para hakim pun tidak

konsisten, seperti yang ditunjukkan pada bagian ini, mengenai kapan terdakwa memasuki tahap 'lebih dari sekedar tahap persiapan'.

Bolehkah hakim mengacu pada otoritas common law?

Secara hukum, para hakim mempunyai beberapa tes yang dapat mereka rujuk.

- (a) Tes tindakan terakhir menanyakan apakah terdakwa melakukan tindakan terakhir yang bergantung padanya. Ungkapan modern dari tes tersebut adalah menanyakan apakah terdakwa telah 'menyeberangi Rubicon dan membakar perahunya', seperti yang dikatakan Lord Diplock dalam *DPP v Stonehouse* [1978] AC 55 (HL). Tes ini tidak selalu diadopsi berdasarkan hukum umum. Dalam *White* [1910] 2 KB 124, terdakwa bersalah atas percobaan pembunuhan meskipun faktanya dia perlu memasukkan lebih banyak dosis potasium sianida ke dalam minuman ibunya sebelum dia membunuhnya. Tes tindakan terakhir ini disetujui di *Widdowson* (1985) 82 Cr App R 314 (CA) setelah Undang-undang tersebut tetapi ditolak di *Gullefer*.
- (b) Uji tindakan apa pun yang membawa-mens-rea-ke-efek ditetapkan dalam *Gurmit Singh* [1966] 2 QB 53 tetapi ditolak oleh pasal 6(1) Undang-undang tahun 1981: lihat di bawah.
- (c) Uji keragu-raguan, yang ditetapkan dalam kasus-kasus seperti *Davey v Lee* [1968] 1 QB 366, menanyakan apakah tindakan terdakwa mempunyai tujuan lain selain melakukan pelanggaran penuh.
- (d) Tes yang paling sering digunakan adalah tes proximity. Parke B dalam *Eagleton* (1855) [1843 –60] Semua ER Rep 363 mengatakan bahwa: 'Tindakan yang mengarah pada dilakukannya pelanggaran penuh tidak dianggap sebagai upaya untuk melakukannya, namun tindakan yang langsung berhubungan dengan pelanggaran tersebut dianggap sebagai upaya untuk melakukan pelanggaran tersebut.' Tiga Penguasa Hukum menyetujui tes *Eagleton* di *Stonehouse*. Namun pengujian ini menimbulkan kasus-kasus seperti *Robinson* [1915] 2 KB 342, dimana terdakwa tidak bersalah karena berusaha mendapatkan uang dari perusahaan asuransinya ketika ia memalsukan perampokan di toko perhiasannya karena ia tidak mengirim uang. dalam formulir klaim. Argumennya adalah bahwa terdakwa (seperti halnya *Gullefer*) belum terlibat dalam bisnis penipuan. Dia telah mempersiapkan jalannya tetapi belum mencapai tahap di mana penipuan dapat dilakukan. Namun baik dalam kasus *Robinson* maupun *Gullefer*, terdakwa tidak mempunyai banyak hal untuk dilakukan. Di *Gullefer*, satu-satunya tindakan yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan sahamnya. Laporan Komisi Hukum No. 102 Tahun 1980, yang menjadi dasar Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, ingin memasukkan kasus ini ke tong sampah sejarah (paragraf 2.30, 2.42 dan 2.48) namun hasil yang sama dapat dicapai dengan analogi *Gullefer* dan *Campbell* setelah UU 1981. Penerapan kembali uji kedekatan akan bertentangan dengan keinginan Komisi Hukum, kata-kata dalam undang-undang, dan, menurut pendapat, akal sehat.

Dalam *Ilyas* (1983) 78 Cr App R 17 (CA), suatu kasus diputuskan berdasarkan hukum adat tetapi setelah berlakunya undang-undang, pengadilan menggunakan terminologi undang-undang

tersebut. Dikatakan bahwa menurut undang-undang baru, meninjau kasus-kasus lama dapat diterima. Dalam Boyle (1987) 84 Cr App R 270, Pengadilan Tinggi juga memutuskan hal serupa dalam kasus UU tahun 1981. Hal yang sama terjadi pada Widdowson di atas. Dalam kasus ini, tidak menjadi masalah yang mana dari dua tes utama sebelum tindakan, yaitu tindakan terakhir atau kedekatan, yang digunakan karena fakta-fakta memenuhi kedua tes tersebut. Kasus-kasus selanjutnya mengambil pandangan yang berbeda.

Namun di Gullefer, pengadilan memutuskan bahwa UU tahun 1981 tidak memberlakukan undang-undang sebelumnya. Para juru gambar bisa saja melakukan hal itu tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya, jalan tengah diarahkan. Jalan tengah itu adalah arti alami dari s 1(1). Dalam Jones [1990] 1 WLR 1057 Pengadilan Banding dalam putusannya menyatakan bahwa Undang-undang tersebut tidak memasukkan pengujian common law dan hakim tidak boleh mengacu pada undang-undang sebelumnya. Kata-kata dalam Undang-undanglah yang diperhitungkan. Taylor LJ mengatakan bahwa tindakan terdakwa dalam mengambil senjata, memendekkannya, memuatnya, menyamar, dan pergi ke sekolah hanya dapat dianggap sebagai tindakan persiapan. Tetapi . . . begitu dia masuk ke dalam mobil, mengeluarkan pistol yang sudah terisi dan mengarahkannya ke korban dengan maksud untuk membunuhnya, terdapat cukup bukti untuk pertimbangan juri atas tuduhan percobaan pembunuhan.' Tidak perlu menunggu sampai terdakwa melakukan perbuatan terakhirnya. Terdapat bukti bahwa tindakan tersebut lebih dari sekedar tindakan persiapan meskipun telah dilakukan pengamanan. Tidak perlu menunggu sampai terdakwa melepaskan tangkapannya, meletakkan jarinya di pelatuk, dan mulai menekannya. Penuntut hanya perlu membuktikan bahwa tindakan terdakwa 'lebih dari sekedar persiapan' dan kata-kata tersebut mempunyai arti yang sebenarnya. Di Campbell, pengadilan memutuskan bahwa hakim tidak boleh mengacu pada common law tetapi mengarahkan juri berdasarkan Undang-undang tahun 1981.

Meskipun terdapat otoritas yang kuat, Pengadilan Banding di Rowley di atas merujuk pada Ransford (1874) 13 Cox CC 9, yang disebut dengan penghasutan, ketika menanyakan apakah catatan yang diberikan kepada anak laki-laki untuk memikat mereka agar pergi demi tujuan yang tidak bermoral merupakan pelanggaran upaya menghasut seorang anak di bawah 14 tahun untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Catatan itu diteruskan untuk mengatur pertemuan. Mereka tidak berisi undangan seksual yang jelas. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan persiapan, tidak lebih dari sekedar tindakan persiapan. Namun pertanyaannya tetap: apa lagi yang harus dia lakukan agar bisa bersalah? Jika dia benar-benar bertemu dengan anak-anak itu dan memberikan saran-saran yang tidak senonoh, dia akan bersalah atas penghasutan. Agaknya upaya penghasutan terjadi ketika dia bertemu mereka tetapi sebelum membuat proposisi apa pun.

Setidaknya dalam satu hal, undang-undang baru ini lebih baik bagi pelajar dibandingkan undang-undang lama. Pengujian actus reus hanya ada satu, tidak beberapa. Bentuk kata-katanya pasti akan menimbulkan ketidakpastian, dan para juri tidak setuju apakah tindakan tersebut lebih dari sekedar tindakan persiapan yang telah dilakukan. Apa pun yang terjadi, juri tanpa ketentuan yang tegas akan mengambil keputusan yang tidak konsisten

mengenai titik mana, dengan menggunakan contoh lama, seorang terdakwa bersalah ketika ia mendekati tumpukan jerami dengan maksud untuk menjelaskannya.

Tiga poin interpretasi lainnya

1. Sulit untuk membicarakan tindakan yang 'lebih dari sekedar tindakan persiapan'. Sayangnya, untuk melepaskan diri dari hukum lama tentang kedekatan, istilah yang berbeda harus dipilih. Kini setelah pengadilan tidak lagi mengacu pada undang-undang lama, kata 'proximate' dapat digunakan kembali sebagai kata sifat yang merangkum undang-undang tersebut.
2. Kata keterangan 'hanya' tampaknya tidak menambahkan apa pun pada 'lebih dari sekedar persiapan'. Hal ini dapat berarti bahwa hanya tindakan 'persiapan' yang bukan merupakan upaya, sedangkan tindakan 'persiapan' adalah upaya, namun penafsiran tersebut tidak sesuai dengan kasus yang ada. Hal ini tampaknya berarti bahwa orang-orang seperti terdakwa dalam *Robinson* kini bersalah: mereka melakukan lebih dari sekedar persiapan. Oleh karena itu, beberapa tindakan persiapan merupakan upaya.
3. Pasal 1(1) merujuk pada 'tindakan'. Apakah istilah tersebut mencakup kelalaian? Ada perpecahan di antara para komentator, dan tidak ada hukum kasus. Yang dimaksudkan pemerintah adalah 'tindakan' untuk menutupi kelalaian sehingga, misalnya, jika orang tua tidak memberikan makanan kepada anaknya, namun bayinya dapat diselamatkan sebelum kematiannya, merupakan sebuah kejahatan. Amandemen yang menyatakan bahwa kejahatan kelalaian tidak dapat dilakukan telah dikalahkan. Akan tetapi, jika suatu undang-undang menyatakan bahwa terdakwa bersalah jika ia melakukan suatu 'tindakan', maka kelalaian saja tidak cukup (kecuali kelalaian tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan). UU tersebut seharusnya dirancang dengan lebih baik. Jika 'tindakan' memang mencakup kelalaian, maka akan sulit untuk mengatakan kapan terdakwa melakukan kelalaian yang 'lebih dari sekedar persiapan'. Misalnya, kapanakah seorang ayah melakukan lebih dari sekedar kelalaian persiapan ketika dia membuat putrinya kelaparan sampai mati? (Lihat di bawah untuk solusi rancangan KUHP.)

Sebuah alternatif untuk 'lebih dari sekedar persiapan'

Partai Kerja Komisi Hukum menerbitkan Makalah, No. 50, Kodifikasi Hukum Pidana: Prinsip-Prinsip Umum, Para Pihak, Keterlibatan dan Kewajiban Atas Perbuatan Orang Lain, 1973 yang merekomendasikan uji 'langkah substansial' sebagaimana diadopsi dalam KUHP Model Amerika, 1962, hal 5.01. Model KUHP pada ayat (2) mempunyai daftar ilustrasi:

Hal-hal berikut ini, jika menguatkan tujuan pidana pelaku, tidak dapat dianggap tidak cukup secara hukum:

- (i) berbaring menunggu, mencari atau mengikuti korban yang dimaksud. . . ;
- (ii) membujuk atau berusaha membujuk korban kejahatan untuk pergi ke tempat yang dimaksudkan untuk dilakukannya;
- (iii) mengintai tempat yang dimaksudkan untuk dilakukannya kejahatan;
- (iv) memasuki secara tidak sah suatu bangunan, kendaraan atau ruang tertutup yang diperkirakan akan melakukan kejahatan;

- (v) kepemilikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam melakukan kejahatan yang dirancang khusus untuk penggunaan yang melanggar hukum atau yang tidak dapat memberikan tujuan yang sah bagi pelaku dalam keadaan tersebut;
- (vi) kepemilikan, pengumpulan atau pembuatan bahan-bahan yang akan digunakan dalam melakukan tindak pidana, di atau dekat tempat yang dimaksudkan untuk dilakukannya, dimana kepemilikan, pengumpulan atau pembuatan tersebut tidak mempunyai tujuan yang sah dalam keadaan tersebut;
- (vii) meminta agen yang tidak bersalah untuk terlibat dalam tindakan yang merupakan suatu unsur kejahatan.

Komentar yang ditemukan dalam Rancangan Resmi yang Diusulkan tahun 1985 menyatakan bahwa dalam setiap kasus tersebut, terdakwa telah menembus hambatan psikologis dan kemungkinan besar tidak akan berhenti. Komisi Nasional Hukum Pidana Federal AS, Laporan Akhir atas Usulan KUHP Federal Baru, 1971, menghilangkan ilustrasi-ilustrasi ini tetapi hanya karena daftarnya dapat diperluas.

Salah satu alasan penolakan uji langkah substansial yang dilakukan Komisi Hukum dalam Laporrannya No. 102 Tahun 1980 adalah karena tidak tepat. Setelah dua dekade, dapat dikatakan bahwa pengujian UU tahun 1981 yang 'lebih dari sekadar persiapan' juga tidak tepat, bahkan lebih. Pengadilan Banding mengakui kesulitan yang dihadapi Geddes (atas): 'Tidak ada aturan praktis yang bisa diuji. Harus selalu ada pelaksanaan penilaian berdasarkan fakta-fakta khusus dari kasus tersebut.' Seperti yang ditulis A. Ashworth: 'Jika perlindungan terhadap hak-hak individu dan pembatasan diskresi polisi dianggap sebagai tujuan yang penting, bukankah ketidaktepatan hal tersebut akan merugikan tuntutan hukum? tes?' ('Upaya kriminal dan peran yang mengakibatkan kerugian berdasarkan Kode dan hukum adat' (1988) 19 Rutgers LJ 725 di 752). Ia lebih menyukai daftar contoh-contoh yang otoritatif seperti dalam Model KUHP, karena tanpa contoh-contoh tersebut hukum tidak akan terselesaikan. Karena tidak ada keraguan bahwa jika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam daftar tersebut, maka mereka bersalah melakukan persekongkolan, tentunya jika dilakukan oleh satu orang, maka harus dilakukan suatu percobaan kejahatan.

Penghapusan pembelaan atas ketidakmungkinan

Haughton v Smith [1975] AC 476 dan *DPP v Nock* [1978] AC 979 dianggap telah menetapkan aturan bahwa seseorang tidak bersalah atas percobaan atau konspirasi jika faktanya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk melakukan pelanggaran penuh. . Misalnya, jika terdakwa memasukkan tangannya ke dalam saku, karena berniat mencuri, ia tidak bersalah melakukan percobaan pencurian jika tidak ada apa pun di dalam sakunya. Meskipun pernyataan undang-undang ini, yang telah disederhanakan untuk tujuan saat ini, mempunyai pembela, sebagian besar komentator menganggapnya menggelikan, dan Komisi Hukum dan Parlemen menyetujuinya. Bagaimanapun terdakwa telah menunjukkan niat untuk melanggar hukum. Undang-undang tersebut kini tercantum dalam pasal 1(2) Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981:

Seseorang mungkin bersalah karena mencoba melakukan suatu pelanggaran yang termasuk dalam bagian ini meskipun faktanya sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan. Pasal 1(2) menyatakan 'mungkin'. 'Apakah' yang dimaksud. Pengadilan Banding di Shivpuri [1985] QB 1029 berpendapat bahwa 'mungkin' digunakan untuk menekankan persyaratan *actus reus* dan *mens rea*. Atas fakta pencopet, terdakwa kini bersalah. Dalam ilustrasi berdasarkan *Partington v Williams* (1975) 62 Cr App R 225, terdakwa bersalah jika mencoba mengambil uang dari dompet di laci tetapi tidak ada uang di sana. Dalam contoh berdasarkan *Farrance* [1978] RTR 225, terdakwa bersalah ketika ia mencoba mengambil mobil tetapi tidak mungkin untuk pergi karena koplingnya terbakar.

House of Lords menerapkan s 1(2) di Shivpuri [1987] AC 1. Terdakwa didakwa mencoba untuk secara sadar terlibat dalam berurusan dengan obat-obatan terlarang, heroin. Dia ditemukan membawa paket berisi bubuk dan lebih banyak lagi ditemukan di apartemennya. Ia mengira zat itu heroin, namun nyatanya bukan. House of Lords menolak bandingnya. Lord Bridge mengatakan bahwa terdakwa bermaksud melakukan pelanggaran tersebut dan dia telah melakukan lebih dari sekedar tindakan persiapan. Meskipun dia tidak mungkin melakukan pelanggaran penuh, pasal 1(2) menganggapnya bersalah. House of Lords menyatakan bahwa terdakwa juga seharusnya bersalah dalam *Anderton v Ryan* [1985] AC 560 (HL) karena mencoba menangani video yang dia yakini telah dicuri. Undang-undang tersebut dengan jelas dinyatakan dalam s 1 (2). Berargumentasi secara berbeda berarti menentang kata-kata dalam undang-undang, yang mewakili maksud Parlemen. Saat ini seseorang dapat bersalah karena mencoba mencuri properti yang sudah dimilikinya. Apakah seseorang harus bersalah atau tidak adalah masalah kebijakan, dan tidak boleh diserahkan kepada kebijaksanaan penuntut.

Kasus-kasus sejak Shivpuri mengenai upaya yang mustahil jarang terjadi namun contohnya adalah *Brown*, tidak dilaporkan, 2 Maret 2004. Terdakwa dihukum karena mencoba memutarbalikkan jalannya keadilan ketika ia melontarkan tuduhan pelecehan seksual dan fisik oleh seseorang yang tewas di lokasi kejadian. waktu yang terkait dengan tuduhan tersebut.

Namun undang-undang tersebut tidak selalu diterapkan. Dalam *Galvin* (1987) 88 Cr App R 85 (CA), terdakwa didakwa berdasarkan pasal 2(2) Undang-Undang Rahasia Resmi tahun 1911, sejak dicabut, dengan menerima dokumen pemerintah secara tidak sah. Pengadilan memutuskan bahwa hukuman terhadapnya harus dibatalkan karena pemerintah telah mengungkapkan dokumen tersebut secara luas sehingga terdakwa yakin bahwa dia dapat menggunakannya. Mungkin dia seharusnya dihukum karena mencoba menerima dokumen tersebut secara tidak sah, dan hal itulah yang dia yakini sedang terjadi. Mungkin terdakwa dalam *DPP v Huskinson* [1988] Crim LR 620 seharusnya dihukum karena percobaan juga. Dia diberi uang oleh Departemen Layanan Perumahan. Dia pikir dia mempunyai kewajiban hukum untuk menggunakan uang itu untuk melunasi tunggakan sewanya; sebenarnya dia tidak.

Dalam keadaan seperti itu dia tidak dapat dihukum karena pencurian, yang menurut pasal 5(3) Undang-Undang Pencurian tahun 1968 mensyaratkan adanya kewajiban hukum

dalam keadaan seperti itu (lihat Bab 15). Mungkin Shivpuri tidak berlaku untuk kesalahan hukum, seperti yang terjadi di Huskinson. Dia salah mengira bahwa dia telah melanggar hukum: dia tidak memahami sifat hukum dari uang yang diberikan kepadanya. Di Shivpuri ada kesalahan fakta, sifat barangnya, dan di *Anderton v Ryan* kesalahannya adalah sifat barangnya: apakah barang itu dicuri atau tidak? Jawaban Huskinson dalam hal penafsiran undang-undang adalah apakah 'fakta' dalam pasal 1(2) dapat menutupi kesalahan hukum perdata – hal tersebut mungkin dapat menutupi kesalahan hukum perdata. Konstruksi ini juga akan mencakup contoh ini. Terdakwa setuju untuk membeli mobil dan mengambil alih. Ia yakin bahwa ia tidak akan menjadi pemilik sebelum ia membayarnya. Faktanya berdasarkan Undang-Undang Penjualan Barang tahun 1979, pasal 18, dia menjadi pemilik. Jika dia melakukan tindakan tersebut, dia bersalah atas percobaan pidana jika 'fakta' mencakup kesalahan hukum perdata. (Berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang dia tidak akan bersalah.)

Banyak kasus tidak akan menimbulkan masalah. Jika terdakwa menembakkan pistol ke bantal dengan tujuan membunuh seseorang, dia bersalah atas percobaan pembunuhan. Jika terdakwa memasukkan potasium sianida ke dalam minuman ibunya dengan maksud untuk membunuhnya, namun dosisnya terlalu lemah, maka ia bersalah atas percobaan pembunuhan. Jika terdakwa mencoba membuka brankas dengan alat yang salah, berniat mencuri, dia bersalah atas percobaan pencurian. Kasus yang sedikit lebih sulit adalah contoh terkenal dimana terdakwa mengambil payung dari sebuah klub London, percaya bahwa dia telah mencuri payung tersebut dari anggota lain. Sebenarnya itu miliknya. Karena bukan milik orang lain, maka ia tidak bersalah mencuri. Namun, dia bersalah karena mencoba mencuri. Tidak peduli apakah harta itu benar-benar miliknya. Membiarkan solusi pada diskresi untuk tidak menuntut tampaknya lemah, namun hukumnya jelas.

Kasus luar biasa dari kejahatan khayalan

Dalam *Taafe* [1984] AC 539 (HL), terdakwa yakin bahwa dia mengimpor mata uang asing ke Inggris merupakan pelanggaran hukum. Tidak ada undang-undang seperti itu. Terdakwa tidak bersalah meskipun dia berpikiran buruk. Dia tidak dapat dihukum karena mencoba melakukan pelanggaran khayalan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang menurutnya haram, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak bersalah atas percobaan itu. Oleh karena itu, dalam bidang ini masih berlaku hukum upaya yang mustahil.

Beberapa ilustrasi menjelaskan maksudnya. Jika terdakwa berpendapat bahwa perzinahan adalah suatu pelanggaran, ia tidak bersalah melakukan percobaan perzinahan ketika ia berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah menikah. Perzinahan bukanlah pelanggaran. Oleh karena itu, percobaan perzinahan bukanlah suatu pelanggaran. Jika terdakwa secara keliru percaya bahwa ia bersalah karena melakukan hubungan seksual dengan gadis berusia 17 tahun yang menyetujuinya, ia tidak bersalah, karena tidak ada kejahatan seperti itu. Lain halnya jika terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak perempuan berusia 17 tahun, karena mengira gadis tersebut berusia 15 tahun. Ada tindak pidana persetubuhan dengan anak perempuan di bawah 16 tahun. Tindak pidana tersebut bukan merupakan khayalan, dan terdakwa akan dipidana. upaya tersebut.

Christopher Ryan, Hukum Pidana, edisi ke-4 (Blackstone, 1995) 143, berkomentar:

Apa yang membedakan Tuan Taaffe (yang tidak dinyatakan bersalah) dengan Tuan Shivpuri (yang bersalah)? Keduanya tercela secara moral, keduanya mengira mereka terlibat dalam melakukan kejahatan. . . Jika bahaya sosial menjadi faktor yang menentukan, maka tentu saja masing-masing dari orang-orang ini telah membuktikan bahwa mereka adalah sebuah bahaya, bahwa mereka siap untuk melanggar hukum (atau apa yang mereka anggap sebagai hukum) meskipun tidak mungkin bagi keduanya untuk benar-benar melakukan hal tersebut.

Penghapusan 'sus' dan penciptaan delik gangguan terhadap kendaraan

Pasal 9 Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981 mencabut pasal 4 Undang-undang Gelandangan tahun 1824, sebagaimana telah diamandemen, yang memuat tindak pidana yang kemudian dikenal sebagai 'sus', yaitu orang yang dicurigai berkeliaran dengan maksud untuk melakukan tindak pidana yang dapat ditangkap. Kejahatan ini mendapat reputasi buruk karena diduga digunakan polisi secara selektif. Sebagai pengganti 'sus', dilembagakan kejahatan mengganggu kendaraan di pasal 9. Selain lebih sempit dan oleh karena itu lebih dapat diterima daripada 'sus', hal ini menghilangkan kesulitan hukum yang menyusahkan. Jika seseorang terlihat merusak pintu mobil, pelanggaran apa yang dituduhkan padanya? Percobaan pencurian mobil yang bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Pencurian tahun 1968 akan gagal jika dia mengaku akan melakukan perjalanan dengan senang hati berdasarkan pasal 12 Undang-undang tersebut; permasalahan yang sama juga muncul dalam kejahatan dan sebaliknya; atau terdakwa mungkin berpendapat bahwa dia ingin mencuri isinya, bukan mobilnya. Pasal 9 Undang-Undang tahun 1981 mengatasi kesulitan ini:

- (1) Seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mengganggu kendaraan apabila ia mengganggu kendaraan bermotor atau gandengan atau benda apa pun yang dibawa di dalam atau di dalam kendaraan bermotor atau gandengan tersebut dengan maksud agar dilakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di bawah ini. oleh dirinya sendiri atau orang lain.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah –
 - (a) pencurian kendaraan bermotor atau trailer atau bagiannya;
 - (b) pencurian apapun yang dibawa di dalam atau di atas kendaraan bermotor atau trailer; Dan
 - (c) pelanggaran berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Pencurian tahun 1968 (membawa dan mengusir tanpa persetujuan): dan, jika terbukti bahwa orang yang dituduh melakukan pelanggaran berdasarkan bagian ini bermaksud melakukan salah satu pelanggaran tersebut, tidaklah penting bahwa hal itu tidak dapat ditunjukkan yang mana.

'Kendaraan bermotor' didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan secara mekanis yang dimaksudkan atau disesuaikan untuk digunakan di jalan raya. Definisi ini lebih sempit dibandingkan dengan 'penyerahan' dalam tindak pidana pengambilan tanpa persetujuan.

Poin interpretasi

- (a) Satu tindakan campur tangan saja sudah cukup. Terdakwa tidak harus merupakan orang yang dicurigai.
- (b) Salah satu maksud yang disebutkan dalam pasal 9 harus dibuktikan. Tidak ada pelanggaran berdasarkan bagian ini jika, misalnya, terdakwa bermaksud melakukan kejahatan pidana.
- (c) 'Interferensi' tampaknya memerlukan semacam campur tangan. Menyentuh kendaraan atau bersandar pada kendaraan mungkin tidak cukup. Dalam *Reynolds v Metropolitan Police* [1982] Crim LR 831, seorang hakim di Pengadilan Mahkota berpendapat bahwa membuka pintu atau menekan pegangan akan menyebabkan gangguan. Membuka pintu biasanya tidak disebut gangguan, namun hal ini dilakukan untuk tujuan pelanggaran.
- (d) Judul panjang Undang-undang tersebut berbicara tentang 'campur tangan yang tidak sah terhadap kendaraan'. Memindahkan mobil untuk menciptakan ruang mungkin merupakan gangguan yang sah. Namun, pasal 9 tidak berbicara mengenai 'intervensi yang tidak sah', namun hanya mengenai 'intervensi', meskipun maksud yang disebutkan dalam sub-s (2) harus dibuktikan.
- (e) Maksud pada sub-s (2) mengacu pada tindak pidana Pencurian. Terdakwa mempunyai pembelaan terhadap pasal 9(1) jika ia mempunyai pembelaan berdasarkan undang-undang tersebut. Kepercayaan terhadap persetujuan pemilik merupakan pembelaan terhadap pengambilan suatu alat angkut tanpa persetujuan. Terdakwa mempunyai pembelaan terhadap pasal 9(1) jika ia ikut campur namun yakin bahwa pemiliknya akan menyetujuinya, seandainya ia mengetahuinya.
- (f) Pelanggaran ini bersifat ringkasan. Berdasarkan pasal 1(4) Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, tidak ada pelanggaran dalam upaya melakukan pelanggaran ringkasan. Oleh karena itu, tidak ada kejahatan yang mencoba mengganggu kendaraan.

10.7 PENGHAPUSAN PELANGGARAN HUKUM UMUM ATAS PERSIAPAN

Pasal 6 Undang-Undang tahun 1981 menghapuskan pelanggaran pengadaan bahan untuk melakukan kejahatan. Bisa saja dalam undang-undang masih terdapat pelanggaran yang lebih umum yaitu persiapan, dimana tahapan tindakan yang 'lebih dari sekadar persiapan' belum tercapai. Namun, diperkirakan tidak ada pelanggaran seperti itu.

Penarikan

Dalam ketiga pelanggaran tersebut tidak ada pembelaan untuk penarikan diri. Lord Hailsham mengatakannya sehubungan dengan upaya di *Haughton v Smith*, di atas. Wright J dalam *Toothill* [1998] Crim LR 876 (CA) menyebutnya sebagai 'hukum basi' bahwa penarikan diri bukanlah pembelaan terhadap upaya tersebut. Pertobatan dapat diperhitungkan dalam hukuman, dan Layanan Penuntutan Mahkota dapat menolak untuk menuntut. Dapat dikatakan bahwa pembelaan seperti itu akan sesuai dengan kebijakan hukum yang mendorong masyarakat untuk berhenti melakukan pelanggaran. Argumen tersebut melemah

jika alasan tidak melakukan pelanggaran secara penuh adalah kehadiran polisi! Dengan kata lain, jika pembelaan diberikan, pembelaan tersebut harus dibatasi pada pengabaian tujuan secara sukarela.

Pembaruan

Rancangan KUHP, Law Com. 177, 1989, jika diberlakukan kembali akan diberlakukan kembali pasal 1(1) Undang-Undang Percobaan Pidana 1981 (cl 49(1)) dengan tambahan bahwa Khan, di atas, akan diberlakukan (cl 49(2)); Artinya, kecerobohan terhadap keadaan sudah cukup untuk upaya tersebut jika cukup untuk kejahatan penuh. Karena ketentuan rancangan KUHP tidak memuat kecerobohan Caldwell, maka kecerobohan Cunningham saja sudah cukup. Karena dalam undang-undang saat ini, upaya untuk melakukan pelanggaran yang dapat didakwa saja sudah cukup (cl 49(1)). Persoalan apakah ‘tindakan’ dalam undang-undang tahun 1981 mencakup kelalaian (pemerintah berasumsi bahwa setidaknya beberapa kelalaian cukup untuk menimbulkan tanggung jawab) dibahas dalam pasal 49(3). ‘Tindakan’ dalam bagian ini mencakup kelalaian hanya jika pelanggaran yang dimaksudkan dapat dilakukan melalui kelalaian. Contoh yang diberikan Komisi Hukum (UU No. 177 Tahun 1989, 168 –169) adalah sebagai berikut:

D mendapat hak asuh atas P, anaknya yang cacat mental, dari suaminya yang sudah bercerai. E pindah untuk tinggal bersama D dan P. Polisi mengunjungi rumah tersebut beberapa minggu kemudian dan menemukan P kurus dan sakit parah. D dan E mengaku berharap P akan mati, mereka sepakat untuk tidak memberi makan P atau memanggil dokter ketika P jatuh sakit. Pembunuhan adalah pelanggaran yang dapat dilakukan karena kelalaian; oleh karena itu upaya untuk melakukan pembunuhan karena kelalaian termasuk dalam cakupan bagian tersebut. D mempunyai kewajiban untuk memberi makan dan mendapatkan perawatan kesehatan bagi anaknya; jika kegagalannya untuk melaksanakan tugas ini lebih dari sekedar persiapan untuk menyebabkan kematian, dia akan bersalah. E juga akan bersalah, baik sebagai pelaku jika dia sendiri juga mempunyai tugas serupa atau sebagai pelengkap pelanggaran D.

Pasal 49(4) menyatakan kembali pasal 4(3) UU tahun 1981 tentang peran hakim dan juri. Upaya untuk berkonspirasi kembali menjadi suatu pelanggaran (seperti halnya hasutan untuk berkonspirasi). Klausul 49(5) menyatakan kembali pasal 1(4)(c) UU. Klausul 49(6) sebagian sama dengan pasal 1(4)(b) namun lebih jelas dan memberlakukan Dunnington [1984] QB 472, di atas. Komisi Hukum menyatakan (di 245) bahwa ‘[suatu] tuduhan percobaan tentu saja tidak layak’. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mencoba menjadi pihak sekunder, namun ia dapat menjadi pihak sekunder dalam suatu upaya. Kejahatan upaya bersekongkol, yang dihapuskan pada tahun 1981, akan dibangkitkan kembali. Ketidakmungkinan bukanlah pembelaan terhadap semua pelanggaran kecil (cl 50). Bahasa sulit pada s 1(2) dan (3) akan disederhanakan. Yurisdiksi dibahas di kelas 52.

Kumpulan usulan terakhir Komisi Hukum terdapat dalam Makalah Konsultasi No. 183 Tahun 2007, Persekongkolan dan Percobaan. Sehubungan dengan percobaan, Komisi mengusulkan untuk menghapuskan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 1(1) Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981 dan menggantinya dengan dua pelanggaran, yang

pertama adalah 'percobaan', yang akan dibatasi pada tindakan terakhir terdakwa, dan 'persiapan kriminal', yang mencakup perilaku yang merupakan bagian dari pelaksanaan rencananya: terdakwa masih bersiap-siap untuk melakukan pelanggaran substantif tetapi telah melampaui tahap persiapan belaka. Unsur mental dalam kedua pelanggaran tersebut adalah kesengajaan untuk melakukan pelanggaran secara penuh dan memperhatikan akibat (jika ada) namun kecerobohan terhadap keadaan. Tujuannya bukan untuk memperluas tanggung jawab tetapi untuk memperjelas hukum.

Proposal-proposal tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, sehubungan dengan *actus reus*, Komisi merasa prihatin bahwa pengadilan telah kesulitan dalam menarik garis batas antara tindakan yang 'sekadar persiapan' dan 'lebih dari sekadar persiapan' dan menyebut Geddes, di atas, sebagai contoh mengenai kemajuan yang telah dicapai pengadilan. salah. Komisi menempatkan hasil tersebut pada kata-kata pada pasal 1(1) yang menyatakan bahwa 'percobaan' tampaknya berarti 'pengadilan' – terdakwa tidak akan dihukum kecuali upaya tersebut 'lengkap atau hampir seluruhnya' (paragraf 1.77). Memiliki dua pelanggaran akan mengatasi masalah definisi yang ditemukan dalam kasus seperti Geddes. Harus ada daftar contoh-contoh dalam Laporan yang akan datang yang termasuk dalam rencana tindak pidana persiapan pidana namun hal ini tidak akan muncul dalam undang-undang: lihat paragraf. 12.39 untuk ilustrasi dan par. 16.40 atas usulan untuk tidak memasukkan daftar contoh tersebut ke dalam undang-undang, meskipun Komisi terbuka untuk melakukan persuasi (paragraf 16.47) mengenai apakah undang-undang tersebut harus menyertakan daftar contoh.

Kedua, harus dijelaskan bahwa jika pelanggaran substantif dapat dilakukan karena kelalaian, maka upaya untuk menghilangkan pelanggaran tersebut juga dapat dilakukan. Ketiga, sehubungan dengan unsur kesalahan harus ada kesengajaan (didefinisikan seperti dalam Woollin [1999] 1 AC 82) dalam hal tindakan dan konsekuensinya, namun kecerobohan (subjektif) dalam hal keadaan. Elemen kesalahan serupa juga diusulkan untuk konspirasi. Keempat, berdasarkan Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, pasal 4(3), lihat di atas, hakim harus memutuskan apakah terdakwa memang melakukan tindakan 'lebih dari sekadar tindakan persiapan' tetapi kemudian juri harus diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan yang sama! Komisi mengusulkan untuk merevisi undang-undang tersebut sehingga hakim dapat memutuskan apakah tindakan terdakwa secara hukum dapat dianggap sebagai suatu upaya, namun juri berhak menentukan apakah tindakan tersebut memang merupakan suatu upaya atau tidak.

Kelima, aturan bahwa tidak ada pelanggaran dalam upaya melakukan pelanggaran ringkasan dipandang sebagai 'anomali' (paragraf 1.87) yang harus dibatalkan. Usulan ini akan berlaku tidak hanya pada usulan percobaan kejahatan tetapi juga usulan tindak pidana persiapan pidana. Keenam, sehubungan dengan kejahatan yang bersifat *inchoateness ganda* (misalnya percobaan untuk berkonspirasi dan bersekongkol untuk mencoba) Komisi merekomendasikan pembalikan pasal 1(4)(a) dari Undang-undang tahun 1981: harus ada kejahatan percobaan atau persiapan pidana. untuk melakukan konspirasi menurut undang-undang. Namun, karena undang-undang ini akan menetapkan bahwa kegiatan-kegiatan

tersebut ‘sangat jauh’ (paragraf 1.98) sebagai tindakan pelanggaran, maka Komisi terbuka bagi pihak-pihak yang berkonsultasi untuk mengajukan pembelaan dengan alasan ‘bertindak wajar’.

Ringkasan

Bab tentang pelanggaran kecil ini merupakan bab terakhir yang membahas topik-topik umum. Sisa buku ini membahas pelanggaran tertentu seperti pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ‘inchoate’ berarti pelanggaran-pelanggaran yang pelaku utamanya belum melakukan seluruh pelanggaran seperti pembunuhan (lihat partisipasi sekunder, ketika pelanggaran penuh telah dilakukan). Hukum Anglo-Welsh mempunyai tiga pelanggaran: penghasutan, konspirasi dan percobaan. Penghasutan, sebuah pelanggaran hukum umum, terdiri dari upaya terdakwa membujuk atau mendorong pelaku utama untuk melakukan kejahatan (hal ini akan menjadi pelanggaran hukum setelah berlakunya Undang-Undang Kejahatan Berat tahun 2007); persekongkolan, yang memiliki dua bentuk, menurut undang-undang (bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Pidana 1977) dan hukum adat, terjadi ketika dua atau lebih pelaku sepakat untuk melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran; percobaan, yang merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981, terjadi ketika terdakwa melakukan tindakan yang mengarah pada dilakukannya pelanggaran pokok – undang-undang mengharuskan terdakwa melakukan tindakan ‘lebih dari sekedar tindakan persiapan’. Ketiga pelanggaran tersebut memiliki permasalahan yang sulit. Apa unsur mental dalam hasutan? Apa yang dimaksud dengan actus reus dalam konspirasi? Mengapa konspirasi untuk menipu terus ada dalam hukum adat? Kapan dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan ‘lebih dari sekedar tindakan persiapan’? Persoalan yang melandasi hukum ketiga tindak pidana tersebut adalah apakah terdakwa boleh bersalah atas salah satu tindak pidana tersebut apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tidak mungkin dilakukan. Persoalan kebijakan, yang sekali lagi mendasari ketiga pelanggaran tersebut, adalah: haruskah terdakwa dihukum ketika pelanggaran utama belum dilakukan? Usulan reformasi dibahas setelah setiap pelanggaran kecil.

- Penghasutan: ini adalah kejahatan berdasarkan hukum umum yang berkaitan dengan meminta atau mendorong orang untuk melakukan pelanggaran. Elemen mentalnya masih kontroversial, bahkan setelah kasus-kasus baru-baru ini, namun posisi yang dituju adalah bahwa mens rea terdiri dari niat untuk menghasilkan konsekuensi (misalnya niat agar pelaku utama akan membunuh) dan pengetahuan tentang keadaan. Ketidakmungkinan adalah suatu pembelaan, mungkin secara mengejutkan mengingat adanya perubahan undang-undang terhadap upaya dan konspirasi undang-undang. Perlu juga dicatat bahwa harus ada kejahatan yang dihasut: penghasutan yang bersifat ‘non-kejahatan’ bukanlah pelanggaran penghasutan. Pelanggaran penghasutan akan dihapuskan dan diganti dengan pelanggaran baru dengan berlakunya Undang-Undang Kejahatan Berat tahun 2007.
- Konspirasi: hampir semua konspirasi merupakan konspirasi menurut undang-undang yang bertentangan dengan pasal 1(1) Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1977

sebagaimana telah diamandemen. Pengecualian utama adalah konspirasi untuk menipu. Ketidakungkinan bukanlah pembelaan terhadap konspirasi undang-undang, namun merupakan pembelaan terhadap variasi common law. Actus reus adalah persetujuan untuk melakukan suatu tindak pidana dan mens rea adalah kesengajaan untuk ikut serta dalam perbuatan yang dilarang tersebut (menurut HL dalam Anderson [1986] AC 27), niat untuk melakukan tindak pidana tersebut dan unsur mental yang ditentukan dalam kejahatan yang disepakati. Perlunya adanya dua pihak menyebabkan tidak adanya tanggung jawab persekongkolan dimana terdakwa telah mencapai kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana dengan perusahaan yang dikuasainya, dengan pasangannya dan dengan orang seperti anak-anak atau orang gila.

- Percobaan: hukum diatur dalam Undang-Undang Percobaan Pidana tahun 1981. Actus reus lebih dari sekedar tindakan persiapan; mens rea adalah niat untuk melakukan pelanggaran penuh. Tidak ada kejahatan mencoba melakukan pelanggaran ringan kecuali Parlemen menyatakan sebaliknya. Ketidakungkinan bukanlah suatu pembelaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. (2013). *Textbook on criminal law*. Oxford University Press, USA.
- Ambos, K. (1999). General principles of criminal law in the Rome Statute. *Crim. LF*, 10, 1.
- Andrews, J. A. 'Reform in the law of corporate liability' [1973] *Crim LR* 91
- Anon. 'Increasing community control over corporate crime' (1961) 71 *Yale LJ* 280 Bergman, D. 'Recklessness in the boardroom' [1990] *NLJ* 1496
- Arlidge, A. 'The trial of Dr David Moor' [2000] *Crim LR* 31. (See also response by Sir John Smith, 'A comment on Dr Moor's case' (2000) *Crim LR* 41.)
- Ashworth, A. 'Excusable mistake of law' [1974] *Crim LR* 652
- Ashworth, A. 'Reform of the law of murder' [1990] *Crim LR* 75
- Ashworth, A. 'Testing fidelity to legal values: Official involvement in criminal justice' (2000) 63 *MLR* 63
- Ashworth, A. and Mitchell, B. *Rethinking English Homicide Law* (Clarendon Press, 2000)
Bingham, Lord <http://www.open.gov.uk/lcd/judicial/speeches/mansent.htm>
- Ashworth, A. Comment on *H Crim* [2003] *LR* 818
- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of criminal law*. Oxford University Press, USA.
- Australian Law Reform Commission Report no. 69, *Equality before the Law: Justice for Women* (1994)
- Ayyildiz, E. 'When battered women's syndrome does not go far enough: the battered women as vigilante' (1995) 4 *Am U J Gender & L* 141
- Barnard, J. 'Reintegrating shaming in corporate sentencing' (1999) 5 *Cal L Rev* 959
- Bazelon, D. L. (1975). The morality of the criminal law. *S. Cal. L. Rev.*, 49, 385.
- Beale, S. S. and Safwat, A. G. 'What developments in Western Europe tell us about American critiques of corporate criminal liability' (2004) 8 *Buff Crim L Rev* 89
- Bean, P. and Whyne, B., (eds.) *Barbara Wootton* (Tavistock, 1986) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005)
- Belcher, A. 'Corporate killing as a corporate governance issue' (2002) 10 *Corporate Governance* 47

- Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Methuen, 1932) (first published 1789)
- Bergman, D. 'Recklessness in the boardroom' (1990) 140 *NLJ* 1496 Bergman, D. 'Weak on crime – weak on the causes of crime' [1997] *NLJ* 1652
- Bergman, D. *Deaths at Work: Accident or Corporate Crime*, WEA (1991) (See also the website www.corporateaccountability.org.)
- Bergman, D. *Deaths at Work: Accidents or Corporate Crime?* (WEA, 1991)
- Bilionis, L. D. (1998). Process, the Constitution, and substantive criminal law. *Michigan Law Review*, 96(5), 1269-1334.
- Bishop, J. P. (1868). *Commentaries on the criminal law* (Vol. 2). Little, Brown,.
- Bishop's *Criminal Law* vol. 1, 9th edn (Little, Brown & Co, 1923) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005) Reed, A. and Fitzpatrick, B. *Criminal Law* 3th edn (Thomson, 2006) Seago, P. *Criminal Law* 4th edn (Sweet & Maxwell, 1994)
- Bohlander, M. (2008). *Principles of German criminal law*. Bloomsbury Publishing.
- Boister, N. (2003). 'Transnational criminal law'?. *European Journal of International Law*, 14(5), 953-976.
- Boland, F. *Anglo-American Insanity Defence Reform* (Dartmouth, 1999) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 1st edn (Fontana, 1987) Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005) Dell, S. *Murder into Manslaughter* (Oxford University Press, 1984)
- Boyle, C. 'The battered wife syndrome and self-defence' (1990) 9 *Canadian Journal of Family Law* 171
- Brady, J. 'Strict liability offences: a justification' (1972) 8 *Crim L Bull* 217
- Breitell, C. D. (1960). Controls in criminal law enforcement. *The University of Chicago Law Review*, 27(3), 427-435.
- Brett, P. 'Mistake of law as a criminal defence' (1966) 5 *Melb ULR* 179 Elliott, D. W. 'Necessity, duress and self-defence' [1989] *Crim LR* 611
- Brickey, K. F. (1994). Criminal mischief: The federalization of American criminal law. *Hastings LJ*, 46, 1135.
- Brudner, A. 'Imprisonment and strict liability' (1990) 40 *UTLJ* 73
- Brudner, A. 'Subjective fault for crime: a reinterpretation' (2008) 14 *Legal Theory* 1 Buxton, R. 'Some simple thoughts on intention' [1988] *Crim LR* 484

- Burrows, R. 'The responsibility of corporation under English law' (1948) 1 *Journal of Criminal Science* 1
- Callaghan, A. R. 'Will the "real" battered woman please stand up?' (1994) 3 *Am U J Gender & L* 117
- Card, R., Cross, P. and Jones, P. A. *Criminal Law* 17th edn (Oxford University Press, 2005)
- Slapper, G. and Tombs, S. *Corporate Crime* (Longman, 1999)
- Cassese, A. (2011). *International criminal law: cases and commentary*. Oxford University Press.
- Celia Wells has also had a book published, *Corporations and Criminal Responsibility* (Clarendon, 2nd edn, 2001). In it she argues that companies should be punished if they exhibit practical
- Centre for Corporate Accountability / Disaster Action / Trades Union Congress *Why we Need a New Corporate Killing Law* (2003)
- Chiu E. M. 'The challenge of motive in criminal law' (2005) 8 *Buff Crim LR* 653 Ferzan, K. K. 'Beyond intention' (2008) 29 *Cardozo L Rev* 1147
- Clarkson, C. M. (2005). *Understanding criminal law*. Sweet & Maxwell.
- Clarkson, C. M. V. 'Corporate manslaughter: yet more government proposals' [2005] *Crim LR* 677
- Clarkson, C. M. V. 'Kicking corporate bodies and damning their souls' (1996) 59 *MLR* 557
Clarkson, C. M. V. 'Corporate culpability' [1998] 2 *Web JCLI*
- Clarkson, C. M. V. and Keating, H. *Criminal Law: Text and Materials* 5th edn (Sweet & Maxwell, 2003)
- Clarkson, C. M. V. and Keating, H. *Criminal Law: Text and Materials* 5th edn (Thomson, 2003)
Cremona, M. and Herring, J. *Criminal Law* 2nd edn (Macmillan, 1998)
- Clarkson, C. M. V. *Understanding Criminal Law* 4th edn (Thomson, 2005)
- Clough J. 'Bridging the theoretical gap: the search for a realist model of corporate criminal liability' (2007) 18 *Crim LF* 267
- Clough, J. 'Sentencing the corporate offender: the neglected dimension of corporate criminal liability' (2003) *Corporate Misconduct Ezine*
- Colvin, E. 'Corporate personality and criminal responsibility' (1995) 6 *Criminal Law Forum* 1
Field, S. and Jorg, N. 'Corporate liability and manslaughter: should we be going Dutch?' [1991] *Crim LR* 156
- Criminal Law Revision Committee 11th Report, Evidence (General), Cmnd 4991 (1972) Criminal Law Revision Committee 14th Report, Offences against the Person, Cmnd 7844 (1980)
Law Commission Consultation Paper no. 173, Partial Defences to Murder (2003)

- Criminal Law Revision Committee 14th Report, Offences against the Person (1980) Cmnd 7844
Interdepartmental Steering Group on the Law on the Use of Lethal Force in Self-Defence or the Prevention of Crime (1995)
- Criminal Law Revision Committee Report no. 14, Offences against the Person (1980) Cmnd 7844
Law Commission Consultation Paper no. 177, A new Homicide Act for England & Wales? (2005)
Law Commission Report no. 29, Offences of Damage to Property (1970)
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2007). *An introduction to international criminal law and procedure*. Cambridge University Press.
- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure*. Cambridge University Press.
- Dennis, I. 'What should be done about the law of self-defence?' [2000] Crim LR 417
- Dubber, M., & Hörnle, T. (2014). *Criminal law: A comparative approach*. Oxford University Press, USA.
- Duff, R. A. (2018). *The realm of criminal law*. Oxford University Press.
- Elliott, C., & Quinn, F. (2008). *Criminal law*. Pearson Education.
- evidence?' (2003) 15 St Thomas L Rev 107
- Faigman, D. L. and Wright, A. J. 'The battered woman syndrome in the age of science' (1997) 39 Ariz LR 67
- Fennell, C. 'Intention in murder' (1990) 41 NILQ 325
- Fitzpatrick, B. 'Strict liability and Article 6(2) of the European Convention on Human Rights' (2004) 68 JCL 11
- Fitzpatrick, B. 'Strict liability: reverse burden and Article 6(2) of the European Convention on Human Rights' (2003) 67 JCL 363
- Fletcher, G. 'The theory of criminal negligence' (1971) 119 U Pa LR 401
France, S. 'Reckless approach to liability' (1988) 18 VUWLR 141
- Fletcher, G. P. (1998). *Basic concepts of criminal law*. Oxford University Press, USA.
- Fletcher, G. *Rethinking Criminal Law* (Little, Brown & Co., 1978)
- For a full-length study of self-defence, see S. Uniacke, *Permissible Killing: The Self-Defence Justification of Homicide* (Cambridge University Press, 1996). The principal English survey of excuses is J. Horder, *Excusing Crime* (Oxford University Press, 2003).
- For a lobbying and advice organisation see the Centre for Corporate Accountability at www.corporateaccountability.org

- For a recent Irish approach, see Law Reform Commission, Commission Paper 41, Legitimate Defence, 2006.
- For an Australian view see Tasmania Law Reform Institute, Criminal Liability of Organizations, Issues Paper No. 9, 2005 and the Report No. 9 of the same name, 2007
- For an essay, see J. Horder in A. P. Simester and S. Shute (eds.), Criminal Law: Doctrines of the General Part (Oxford University Press, 2002), Chapter 12.
- For an Irish view see Law Reform Commission, Consultation Paper on Corporate Killing, LRC CP 26, 2003
- For Commonwealth reform proposals, see Tasmania Law Reform Institute, Intoxication and Criminal Responsibility, Issues Paper no. 7 (2005) and the Final Report no. 7 of the same name (2006), the principal recommendation being that intoxication should be relevant to all mental elements.
- For US law, which in general is similar to the law of intoxication in England and Wales, see M. Keiter, 'Just say no excuse' (1997) 87 JCL & Crim 482.
- Forschler, A. 'Corporate criminal intent – toward a better understanding of corporate misconduct' (1990) 78 Cal LR 1287
- Gardner, S. 'The importance of Majewski' (1994) 14 OJLS 279
- Getzler, J. 'Use of force in protecting property' (2006) Theoretic Inquiries L131 Gough, S. 'Intoxication and criminal liability' (1996) 112 LQR 335
- Glasbeek, M. 'Shielded by law: why corporate wrongs and wrongdoers are privileged' [2002] UWSL Rev 1
- Glazebrook, P. 'A better way of convicting businesses of avoidable deaths and injuries' (2002) 61 CLJ 405
- Gledhill, K. 'Criminal carelessness' [2007] 157 NLJ 41
- Gobert, J. 'Controlling corporate criminality: penal sanctions and beyond' [1998] 2 Web JCLI
Gobert, J. 'Corporate killing at home and abroad – reflections on the government's proposals'
- Gobert, J. 'Corporate criminality: four models of fault' (1994) 14 LS 393
- Gobert, J. 'Corporate criminality: new crimes for the times' [1994] Crim LR 722
- Gobert, J. and Punch, M. Rethinking Corporate Crime (Butterworths, 2003) Griffin, S. 'Corporate manslaughter: a radical reform?' (2007) 71 JCL 151 Hill, J. 'Corporate criminal liability in Australia' [2003] JBL 1
- Goode, M. 'Some thoughts on the present state of the "defence" of intoxication' (1984) 8 Crim LJ 104

- Goodliffe, J. 'R v Tandy and the concept of alcoholism as a disease' (1990) 53 MLR 809 Griew, E. 'The future of diminished responsibility' [1988] Crim LR 75
- Gough, S. 'Surviving without Majewski' [2000] Crim LR 719
- Grubin, D. 'Unfit to plead in England & Wales 1976–88 – a survey' (1991) 158 BJ Psych 540
Grubin, D. 'What constitutes fitness to plead?' [1993] Crim LR 748
- Hall, J. (2010). *General principles of criminal law*. The Lawbook Exchange, Ltd..
- Hall, J. *General Principles of Criminal Law* 2nd edn (Bobbs-Merrill, 1968) Hart, H. L. A. *Punishment and Responsibility* (Clarendon Press, 1968) Husak, D. N. *Philosophy of Criminal Law* (Rowman & Littlefield, 1989) Smith, J. C. and Hogan, B. *Criminal Law* 10th edn (Butterworths, 2002)
- Hall, J. S. 'Corporate criminal liability' (1998) 35 Am Crim L Rev 549
- Hamdani, A. 'Mens rea and the cost of ignorance' (2007) 93 Va L Rev 415
- Harlow, C. 'Self-defence: public right or private privilege' [1974] Crim LR 528 Horder, J. 'Cognition, emotion and criminal culpability' (1990) 106 LQR 469
- Hart Jr, H. M. (1958). The aims of the criminal law. *Law & Contemp. Probs.*, 23, 401.
- HEALY, G. (2004). *Criminal law & procedure*.
- Healy, P. 'R v Bernard: difficulties with "voluntary intoxication"' (1990) 35 McGill LJ 610 Smith, G. 'Footnote to O'Connor's case' (1981) 5 Crim LJ 270
- Herring, J. (2021). *Criminal law: The basics*. Routledge.
- Hogan, B. 'Strict liability' [1978] Crim LR 593
- Home Office Consultation Paper, *Reforming the Law of Involuntary Manslaughter* (2000) Law Commission Consultation Paper no. 135, *Involuntary Manslaughter* (1994)
- Horder, J. (2016). *Ashworth's principles of criminal law*. Oxford University Press.
- Horder, J. 'Intention in criminal law: a rejoinder' (1995) 58 MLR 678
- Horder, J. 'Sobering up: The Law Commission on criminal intoxication' (1995) 58 MLR 534
Jefferson, M. 'Householders and the use of force against intruders' (2005) 69 JCL 405
- Horder, J. 'Strict liability, statutory construction and the spirit of liberty' (2002) 118 LQR 459
Horder, J. *Excusing Crime* (Oxford University Press, 2004) ch. 6
- Horder, J. 'Transferred malice and the remoteness of unexpected outcomes' [2006] Crim LR 383 Kaveny, M. C. 'Inferring intention from foresight' (2004) 120 LQR 81
- Hughes, G. (1962). Morals and the criminal law. *The Yale Law Journal*, 71(4), 662-683.

Husak, D. (2004). The criminal law as last resort. *Oxford Journal of Legal Studies*, 24(2), 207-235.

Husak, D. (2008). *Overcriminalization: The limits of the criminal law*. Oxford University Press.

indifference to a risk. For some of her other work see I. Loveland (ed.), *Frontiers of Criminality* (Sweet & Maxwell, 1995). See also B. Fisse and J. Braithwaite, *Corporations, Crime and Responsibility* (CUP, 1993). Fisse's (and Braithwaite's) articles are legion and include 'Reconstructing corporate criminal law: deterrence, retribution, fault and sanction' (1983) 56 S Cal LR 1141; 'Corporate criminal responsibility' (1991) 15 Crim LJ 166; 'The attribution of criminal liability to corporations' (1991) 13 Syd LJ 277. For a practitioner text see A. Pinto and M. Evans, *Corporate Criminal Liability* (Sweet & Maxwell, 2003).

Jackson, B. S. 'Storkwain: a case study in strict liability and self-regulation' [1991] Crim LR 892
Lanham, D. 'Larsonneur revisited' [1976] Crim LR 276

Jefferson, M. 'Corporate criminal liability in the 1990s' (2000) 64 JCL 106

Jefferson, M. 'Corporate criminal liability: the problem of sanctions' (2001) 65 JCL 235

Jefferson, M. 'Reckless: the objectivity of the Caldwell test' (1999) 63 JCL 57 Kadish, S. 'The decline of innocence' [1968] CLJ 273

Journals

Kadish, S. H. (1976). Respect for life and regard for rights in the criminal law. *Calif. L. Rev.*, 64, 871.

Kadish, S. H. (1999). Fifty years of criminal law: An opinionated review. *Cal L. Rev.*, 87, 943.

Katyal, N. K. (2001). Criminal law in cyberspace. *University of Pennsylvania Law Review*, 149(4), 1003-1114.

Katz, L. (2012). *Bad acts and guilty minds: Conundrums of the criminal law*. University of Chicago Press.

Kaufman, W. R. P. 'Self-defense, imminence, and the battered woman' (2007) 10 New Crim L Rev 342

Keating, H. 'Reckless children' [2007] Crim LR 546

Kenny, C. S. (1926). *Outlines of criminal law*. University Press.

Khanna, V. S. 'Corporate crime liability: a political economy analysis', John M. Olin Centre for Law & Economics, University of Michigan, Paper no. 3-012

Khanna, V. S. 'Corporate criminal liability: what purpose does it serve?' (1996) 109 Harv LR 1477

Kugler, I. 'Conditional oblique intention' [2004] Crim LR 284 Mitchell, B. 'Culpably indifferent murder' (1996) 25 A-ALR 64 Norrie, A. 'After Woollin' [1999] Crim LR 532

- Lacey, N., Wells, C. and Quick, O. *Reconstructing Criminal Law* 3rd edn (LexisNexis, 2003)
 Leigh, L. *Strict and Vicarious Liability* (Sweet & Maxwell, 1982)
- Lacey, N., Wells, C. and Quick, O. *Reconstructing Criminal Law* 3rd edn (Butterworths, 2003)
 Mackay, R. D. *Mental Condition Defences in the Criminal Law* (Clarendon, 1995)
- Lacey, N., Wells, C., & Quick, O. (2003). *Reconstructing criminal law: text and materials*.
 Cambridge university press.
- Lanham, D. 'Offensive weapons and self-defence' [2005] Crim LR 85
- Laufer, W. S. 'Corporate bodies and guilty minds' (1994) 43 Emory LJ 647
- Law Commission Consultation Paper no. 127, *Intoxication and Criminal Liability* (1993) Law
 Commission Report no. 177, *A Criminal Code for England & Wales* (1989)
- Law Commission Consultation Paper no. 177, *A new Homicide Act for England & Wales* (2005)
 Law Commission Report no. 143, *Criminal Law: Codification of the Criminal Law – A
 Report to the Law Commission* (1985)
- Law Commission Report no. 143, *Criminal Law: Codification of the Criminal Law – A Report to
 the Law Commission* (1985)
- Law Commission Report no. 177, *A Criminal Code for England & Wales* (1989) Law Commission
 Report no. 290, *Partial Defences to Murder* (2004)
- Law Commission Report no. 177, *A Criminal Code for England and Wales* (1989)
- Law Commission Report no. 218, *Legislating the Criminal Code – Offences against the Person
 and General Principles* (1993)
- Law Commission Report no. 218, *Legislating the Criminal Code: Offences against the Person
 and General Principles* (1993)
- Law Commission Report no. 229, *Legislating the Criminal Code: Intoxication and Criminal
 Liability* (1995)
- Law Commission Report no. 237, *Legislating the Criminal Code: Involuntary Manslaughter
 (1996)*
- Law Commission Report no. 290, *Partial Defences to Murder* (2004)
- Law Commission Report no. 306, *Murder, Manslaughter and Infanticide* (2006)
- Law Commission Report no. 306, *Murder, Manslaughter and Infanticide* (2006) Law Reform
 Commission of Ireland Report no. 51, *Intoxication* (1995)
- Law Commission Report no. 306, *Murder, Manslaughter and Infanticide* (2006) Model Penal
 Code, Official Draft (1985)
- Law Commission Report no. 89, *The Mental Element in Crime* (1978)

- Law Commission Report no. 89, *The Mental Element in Crime* (1978)
- Law, W. K. (2008). *Criminal law*. Wolters Kluwer.
- Lederman, E. 'Models for imposing corporate criminal liability' (2000) 4 Buffalo Criminal Law Review 642
- Levenson, L. L. 'Good faith defenses: reshaping strict liability crimes' (1993) 78 Cornell LR 401
- Leverick, F. 'Defending self-defence' (2007) 27 OJLS 563
- Leverick, F. 'Is English self-defence law incompatible with Article 2 of the ECHR?' [2002] Crim LR 347
- Leverick, F. 'The use of force in public or private defence and Article 2' [2002] Crim LR 963
Leverick, F. *Killing in Self-Defence* (Oxford University Press, 2006)
- Lott, J. R. 'Corporate criminal penalties' (1996) 17 Managerial and Decision Economics 349
Parker, J. S. 'Doctrine for construction: the case of corporate criminal liability' (1996) 17
- Macdonald, E. 'Reckless language and Majewski' (1986) 6 LS 239
- Mackay, R. D. 'Fact and fiction about the insanity defence' [1990] Crim LR 247 Mackay, R. D. 'The decline of disability in relation to the trial' [1991] Crim LR 87 Mackay, R. D. and Kearns, G. 'An upturn in unfitness to plead?' [2000] Crim LR 532 Reville, N. 'Automatism and diabetes' [1989] 86 LSG 19
- Managerial and Decision Economics 381
- Manchester, C. 'Knowledge, due diligence and strict liability in regulatory offences' [2006] Crim LR 213
- Martinson, D. et al. 'Lavalley v R 1 SCR 852 – the Supreme Court of Canada addresses the issue of gender bias in the court: Women and Self-Defence' (1991) 25 UBCLR 23
- Mays, R. 'The criminal liability of corporations and Scots law: learning the lessons of Anglo-American jurisprudence', [2000] Edin LR 46
- McAuley, F. 'The grammar of mistake in criminal law' (1996) xxxi IJ 56
- McCord, D. 'The English and American history of voluntary intoxication to negate mens rea' (1990) 11 JLH 372
- Model Penal Code (1962)
- Moodie, R. A. 'Refulgent mens rea eclipsed' (1974–5) 6 NZULR 230 Parker, J. S. 'The economics of mens rea' (1993) 79 Virg LR 741
- Moore, M. S. (2010). *Act and crime: The philosophy of action and its implications for criminal law*. Oxford University Press.

- Moore, M. S. (2010). *Placing blame: A theory of the criminal law*. Oxford University Press.
- Norrie, A. 'Between orthodox subjectivism and moral contextualism' [2006] Crim LR 486
- Patient, I. H. E. 'Transferred Malice – a misleading misnomer' (1990) 54 JCL 116
- Pedain, A. 'Intention and the terrorist example' [2003] Crim LR 579
- O'Leary, J. 'Lament for the intoxication defence' (1997) 48 NILQ 152
- O'Keefe, R. (2015). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Orchard, G. 'Surviving without Majewski: A view from Down Under' [1993] Crim LR 426
- Polsby, D. D. 'Reflections on violence, guns and the defensive use of reasonable force' (1986)
- Ormerod, D. 'Voluntary intoxication: whether voluntary intoxication available on a charge of sexual assault' [2007] Crim LR 654
- Ormerod, D. and Taylor, R. 'The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007' [2008] Crim LR 589
- Pace, P. J. 'Delegation – A doctrine in search of a definition' [1982] Crim LR 627
- Packer, H. 'Mens rea and the Supreme Court' [1962] Sup Ct Rev 107
- Smith, J. C. 'Subjective or objective?' [1981–82] Villanova LR 1179
- Williams, G. 'Oblique intention' [1987] CLJ 417
- Perkins, R. M. (1939). Ignorance and mistake in criminal law. *U. Pa. L. Rev.*, 88, 35.
- Polinsky, A. M. and Shavell, S. 'Should employees be subject to fines and imprisonment given the existence of corporate liability?' (1993) 13 IRLE 239
- Posner, R. A. (1985). An economic theory of the criminal law. *Colum. L. Rev.*, 85, 1193.
- Punch, M. '(g.b.h.) Grievous Business Harm: exploring corporate violence' (1995) 3 EJCP 92
- Reville, N. J. 'Corporate manslaughter' [1989] LSG 17
- Ragozino, A. 'Replacing the collective knowledge doctrine with a better theory for attributing corporate mens rea' (1995) 24 Southwestern LR 423
- Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders (Butler) (1975) Cmnd 6244
- Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders (Butler) Cmnd 6244 (1975)
- Report of the Select Committee of the House of Lords on Murder and Life Imprisonment (Nathan) (1989), HL Paper 78–1
- Report of the Select Committee on Murder and Life Imprisonment (Nathan) (1989) HL Paper 78-1
- Reville, N. 'Corporate manslaughter' (1989) LSG no. 37, 17
- Slapper, G. 'A safe place to work' [1992] LSG no. 37, 27

- Richardson, G. 'Strict liability for regulatory crime: the empirical research' [1987] Crim LR 295
- Rogers, J. 'Justifying the use of firearms by policemen and soldiers' (1998) 18 LS 486 Rosman, J. B. 'The battered woman syndrome in Florida: junk science or admissible
- Rubin, G. R. 'New light on Steane's case' (2003) 24 Journal of Legal History 143
- Scottish Law Commission Discussion Paper no. 122, Insanity and Diminished Responsibility
- Segev, R. 'Justification, rationality and mistake' (2006) 25 Law and Philosophy 31 Shaffer, M. 'The battered woman syndrome revisited' (1997) 47 UTLJ 1 Simester, A. P. 'Intoxication is never a defence' [2009] Crim LR 3
- Simester, A. P. 'Can negligence be culpable?', in J. Horder (ed.) Oxford Essays in Jurisprudence, 4th series (Oxford University Press, 2000)
- Simons K. W. 'Dimensions of negligence in criminal and tort law' (2002) Theoretical Inquiries L 283
- Simons, K. W. 'Criminal law: when is strict liability just?' (1997) 87 JCL & Crim 1075 Smith, J. and Pearson, A. 'The value of strict liability' [1969] Crim LR 5
- Slapper, G. 'Corporate manslaughter: an examination of the determinants of prosecutorial policy' (1993) 2 Social and Legal Studies 423
- Smith, J. C. 'The use of force in public or private defence and Article 2' [2002] Crim LR 958 Spencer, J. R. 'Drunken defence' [2006] CLJ 267
- Smith, J. C. and Hogan, B. Criminal Law (ed. D. Ormerod) 11th edn (Oxford University Press, 2005)
- Smith, J. C. and Hogan, B. Criminal Law 10th edn (Butterworths, 2002)
- Smith, Sir John 'A comment on Dr Moor's case' [2000] Crim LR 41 (in response to A. Arlidge [2000] Crim LR 31)
- Stannard, J. E. 'Stretching out the actus reus' (1993–5) xxviii–xxx IJ 200 Wasik, M. 'A learner's careless driving' [1982] Crim LR 411
- Stannard, J. Recent Developments in Criminal Law (SLS, 1988) Williams, G. Criminal Law: The General Part 2nd edn (Stevens, 1961) Yeo, S. Fault in Homicide (Federation Press, 1997)
- Stanton-Ife, J. 'Strict liability: stigma and regret' (2007) 27 OJLS 151
- Stern, Y. Z. 'Corporate criminal personal liability' (1987–88) 13 Journal of Corporation Law 125 Sullivan, G. R. 'Expressing corporate guilt' (1995) 15 OJLS 281
- Stessens, G. 'Corporate criminal liability – a comparative perspective' (1994) 43 ICLQ 493 Sullivan, G. R. 'Expressing corporate guilt' (1995) 15 OJLS 281

- Sullivan, G. R. 'The attribution of culpability to limited companies' [1996] CLJ 515 Sullivan, G. R. 'Corporate killing – some government proposals' [2001] Crim LR 31 Swigert, V. L. and Farrell, R. A. 'Corporate homicide' (1980–81) 15 Law Society Review 161
- Tench, D. *Towards a Middle System of Law* (Consumers' Association, 1981) Wootton, Baroness *Crime and the Criminal Law* 2nd edn (Stevens, 1981)
- The principal theoretical work is the series of essays in A. P. Simester (ed.), *Appraising Strict Liability* (Oxford University Press, 2005). An older account is L. Leigh, *Strict and Vicarious Liability* (Sweet & Maxwell, 1982).
- There are many excellent American articles which discuss corporate liability; the following is a selection from the 1990s and early 2000s.
- Tombs, S. 'Law, resistance and reform: 'regulating' safety crimes in the UK' (1995) 4 *Social and Legal Studies* 343
- Ulen, T. S. 'The economics of corporate criminal liability' (1996) 17 *Managerial and Decision Economics* 351
- Virgo, G. 'Reconciling principle and policy' [1993] Crim LR 415
- Von Bar, L. (1916). *A history of continental criminal law* (Vol. 6). Little, Brown.
- Wallerstein, S. 'Justifying the right to self-defense: a theory of forced consequences' (2005) 91 *Virg LR* 999
- Walsh, C. and Pyrich, A. 'Corporate compliance programs as a defense to corporate criminal liability: can a corporation save its soul?' (1995) 47 *Rutgers LJ* 605
- Ward, A. R. 'Making sense of self-induced intoxication' [1986] CLJ 247 White, S. 'Offences of basic and specific intent' [1989] Crim LR 271
- Wasserstrom, R. A. (1959). Strict liability in the criminal law. *Stan. L. Rev.*, 12, 731.
- Wells, C. 'Corporate liability for crime' [1996] 1 *Archbold News* 5
- Wells, C. 'Corporate manslaughter: a cultural and legal form' (1995) 6 *Criminal Law Forum* 45
- Wells, C. 'Corporations and the risk of criminal liability' (1996) 10 *The Whistle* (Bulletin of Freedom to Care, available on www.freedomtocare.org/page165.htm)
- Wells, C. 'The corporate manslaughter proposals: pragmatism, paradox and peninsularity' [1996] Crim LR 545
- Wells, C. 'The criminal liability of corporations and their officers' (1990) 2 *Law for Business* 120
- Wells, C. 'Culture, risk and criminal liability' [1993] Crim LR 551
- Wells, C. 'The decline and rise of English murder: Corporate crime and individual responsibility' [1988] Crim LR 788

- Wenham, D. 'Recent developments in corporate homicide' (2000) 29 ILJ 378
- Wickens, R. J. and Wong, C. A. 'Confusion worse confounded: the end of the directing mind theory' [1997] JBL 524
- Williams, G. 'Mens rea and vicarious liability' [1956] CLP 57
- Williams, G. 'Oblique intent' [1987] CLJ 417
- Williams, G. 'The mens rea for murder: leave it alone' (1989) 105 LQR 387
 Wilson, W. 'A plea for rationality in the law of murder' (1991) 10 LS 307
 Wilson, W. 'Doctrinal rationality after Woollin' (1999) 62 MLR 447
- Williams, J. M. 'Mistake of fact' (1985) 63 CBR 597
- Williams, R. 'Voluntary intoxication, sexual assault and the future of Majewski' [2007] CLJ 260
 Yeo, S. 'Revisiting excessive self-defence' (2000) 12 Current Issues in Criminal Justice 39
- Yeo, S. 'Killing in Defence of Property' [2000] NLJ 730
- Criminal Law Revision Committee 15th Report, Sexual Offences, Cmnd 9213 (1984) Home Office Consultation Paper, Fraud Law Reform (2005)
- Law Commission Consultation Paper no. 131, Assisting and Encouraging Crime (1993) Law Commission Report no. 76, Conspiracy and Criminal Law Reform (1976)
- Law Commission Report no. 102, Attempt, and Impossibility in Relation to Attempt, Conspiracy and Incitement (1980)
- Law Commission Report no. 143, Criminal Law: Codification of the Criminal Law – A Report to the Law Commission (1985)
- Law Commission Report no. 177, A Criminal Code for England & Wales (1989)
- Law Commission Report no. 180, Jurisdiction over Offences of Fraud and Dishonesty with a Foreign Element (1989)
- Law Commission Report no. 228, Criminal Law: Conspiracy to Defraud (1994) Law Commission Report no. 276, Fraud (2002)
- Law Commission Report no. 300, Inchoate Liability for Assisting and Encouraging Crime (2006)
- Law Commission Working Paper no. 50, Codification of the Criminal Law: General Principles, Complicity, and Liability for the Acts of Another (1973)
- Law Commission Working Paper no. 104, Conspiracy to Defraud (1988)

HUKUM PIDANA

JILID 1

Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H
Dian Karisma, S.H, M.H

BIO DATA PENULIS



Maulana Fahmi Idris, S.H.,M.H Lahir pada tanggal 14 Februari 1999 di Kota Demak. Penulis telah menyelesaikan studi S1 Hukum di UIN Walisongo Semarang dan S2 Hukum di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Saat ini penulis menjadi dosen pada Universitas Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) mengajar di Program Studi S1 - Hukum.



Dian Karisma, S.H.,M.H Lahir pada tanggal 11 Januari 1984 di Kota Semarang. Penulis telah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISULA). Saat ini penulis menjadi dosen di Universitas Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) dan mengajar di Program Studi S1 - Hukum.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-94-9 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-8120-95-6 (jil.1 PDF)



9 786238 120956